

Kongres Bahasa Indonesia III

**Editor:
Amran Halim
Yayah B. Lumintintang**



**Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
1983**

TIDAK DIPERDAGANGKAN UNTUK UMUM

499.22/06

KOH
L.

Kongres Bahasa Indonesia III

H A D I A H
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

PERPUSTAKAAN
PUSAT PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

2115 - 18/75

Kongres Bahasa Indonesia III

Editor :

Amran Halim

Yayah B. Lumintintang

H A D I A H
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

PERPUSTAKAAN
PUSAT PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
1983

Kongres
Bahasa Indonesia III

Rektor
Universitas
Yogyakarta

Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

No: Klasifikasi 499.72106 R00 K	No. Induk: 2115 Tgl.: Ttd.:
--	-----------------------------------

Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

No. Induk:	Tgl.:	Ttd.:

No: Klasifikasi:



Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
1983

PENGANTAR

Kongres Bahasa Indonesia III diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober – 3 November 1978 dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-50. Tujuan kongres itu adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional, sesuai dengan isi dan semangat Sumpah Pemuda 1928, maupun sebagai bahasa negara, sesuai dengan Bab V, Pasal 36, Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Kongres Bahasa Indonesia III fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia dan sebagai sarana perhubungan antardaerah dan antarbudaya di Indonesia dibahas secara mendalam. Demikian juga halnya dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemerintahan dan ketahanan nasional, sebagai unsur dan sarana pendukung pengembangan kebudayaan nasional, sebagai sarana pendidikan dan pengajaran, sebagai sarana pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai sarana komunikasi massa. Selain itu, masalah pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dibahas dengan cermat.

Kongres Bahasa Indonesia III diikuti oleh 419 orang peserta, termasuk peserta dari beberapa negara asing dan anggota Panitia Penyelenggara yang juga mengikuti kongres itu secara aktif.

Keputusan dan kesimpulan yang dicapai di dalam kongres itu menyangkut kepentingan segenap lapisan masyarakat, baik kalangan Pemerintah maupun kalangan masyarakat umum. Sesuai dengan isi pidato Menteri Muda Urusan Pemuda pada upacara penutupan kongres itu, masalah bahasa Indonesia adalah masalah nasional. Sebagian keputusan dan kesimpulan kongres itu dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dengan dukungan segenap lapisan masyarakat. Ada pula keputusan dan kesimpulan kongres itu yang menghendaki usaha dan keikutsertaan kita sebagai warga masyarakat dalam lingkungan yang lebih kecil, seperti lingkungan keluarga dan lingkungan profesi kita. Dengan kata lain, pelaksanaan keputusan dan kesimpulan kongres itu menghendaki adanya jalinan dan jaringan kerja sama yang erat antara Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat kita.

Pidato pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pidato Menteri Muda Urusan Pemuda, dan kertas-kertas kerja yang disajikan dan dibahas di dalam kongres itu diterbitkan dengan tujuan menyajikannya kepada masyarakat luas.

Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia III dan penerbitan buku ini dimungkinkan oleh bantuan berbagai pihak dan biaya yang disalurkan melalui Proyek Pengembangan dan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Atas segala bantuan itu, dengan ini dinyatakan penghargaan dan terima kasih tak terhingga.

Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
PIDATO PENGARAHAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA SIDANG LENGKAP KONGRES BAHASA INDONESIA III PADA TANGGAL 30 OKTOBER 1978.....	1
1. Perkembangan Bahasa Indonesia dalam Politik Mohammad Hatta	11
2. Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi Keagamaan H. Alamsjah Ratu Prawiranegara	14
3. Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pembinaan Ketahanan Nasional Letjen TNI Sayidiman Suryohadiprojo	25
✓ 4. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Manusia dan Kebudayaan Modern Sutan Takdir Alisjahbana	32
5. Bahasa Indonesia dalam Perjuangan Bahasa Soedjatmoko	49
↓ 6. Bahasa Indonesia dalam Hubungannya dengan Pengembangan Kebudayaan Nasional A.M.W. Pranarka	74
7. Bahasa Indonesia dan Perkembangan Masyarakat Harsja W. Bachtiar	94
8. Peranan Bahasa Indonesia dalam Peningkatan Kesadaran Politik di Kalangan Masyarakat di Indonesia S.K. Trimurti	111
9. Sikap Bahasa dan Pelaksanaan Kebijakan Bahasa Nasional Amran Halim	135
10. Bahasa Indonesia dalam Hubungannya dengan Kebijakan Pendidikan Nasional Dardji Darmodihardjo	152

11.	Keadaan Kebahasaan di Indonesia dan Implikasinya bagi Pengajaran Bahasa Indonesia Jakub Isman	160
√12.	Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia Jazir Burhan	175
13.	Pengajaran Sastra Indonesia dan Pembinaan Apresiasi Sastra Boen S. Oemarjati	195
14.	Peranan Bahasa Indonesia dalam Pendidikan Luar Sekolah Anwas Iskandar	208
15.	Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di Sekolah Dasar Yus-Rusyana	219
√16.	Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Buku Pelajaran J.S. Badudu	229
17.	Bahasa Indonesia dan Pembinaan Minat Baca Oejeng Soewargana	248
18.	Bahasa Indonesia Sarana Komunikasi Astrid S. Susanto	267
2	19. Media Massa, Bahasa Indonesia, dan Pembangunan Nasional Mughtar Lubis	282
2	20. Ragam Lisan Lewat Radio dan Televisi Toeti Adhitama	302
2	21. Peranan Media Massa dalam Pertumbuhan Bahasa Indonesia H. Rosihan Anwar	315
	22. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Masyarakat Desa Mattulada	324
	23. Kebijakan Pariwisata dan Bahasa Indonesia Umar Kayam	343
2	24. Ragam Bahasa Berita dan Cirinya BH. Hoed	357
	25. Bahasa Indonesia sebagai Sarana Kreasi dan Pengembangannya Ajip Rosidi	372

FE
M MEL F

26.	<i>Sinar Harapan</i> sebagai Kasus Pengembangan Sastra Indonesia dan Media Massa Satyagraha Hoerip	390
27.	Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lagu-lagu Indonesia Modern Pranadjaja	398
28.	Bahasa Indonesia dalam Film dan Teater Modern Asrul Sani	411
29.	Bahasa Indonesia dalam Cerita Rekaan Mutakhir : Sebuah Pengamatan Kasar M. Saleh Saad	420
30.	Bahasa Indonesia dan Pengembangan Teater Tradisional Astuti Hendrato	428
31.	Bahasa Indonesia Bacaan Anak-Anak Sapardi Djoko Damono	444
32.	Penerjemahan Karya Sastra Tradisional ke dalam Bahasa Indonesia I Gusti Ngurah Bagus	455
33.	Suatu Tinjauan Perkembangan Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan A. Latief	471
34.	Beberapa Segi Standardisasi Tata Bahasa Anton M. Moeliono	481
35.	Ragam Standar dan Nonstandar Bahasa Indonesia D.P. Tampubolon	493
36.	Beberapa Masalah Lafal Standar Djoko Kentjono	513
37.	Interferensi dan Integrasi dalam Situasi Keanekabahasaan Soepomo Poedjosoedarmo	521
38.	Penggunaan Unsur-unsur Klasik dalam Bahasa Indonesia Dewasa Ini Haryati Soebadio	546
39.	Perkembangan dan Pengembangan Kosa Kata Bahasa Indonesia Kridalaksana Harimurti	563

40.	Penelitian Bahasa dalam Hubungannya dengan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	
	S. Effendi	575
g (41.)	Masalah Akronim dan Singkatan dalam Perkembangan Bahasa Indonesia	
	Nugroho Notosusanto	591
42.	Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penalaran	
	R. Slamet Iman Santoso	602
43.	Struktur Bahasa sebagai Cermin Pandangan Hidup	
	E.K.M. Masinambow	610
44.	Menuju Bahasa Hukum dan Bahasa Administrasi yang Lebih Mudah Dipahami	
	Mahadi	630
45.	Gaya Bahasa Keilmuan	
	H. Johannes	644
f (46.)	Penerjemahan Karya Tulis Ilmiah	
	Maurits Simatupang	660
47.	Pembakuan dan Penyebaran Tata Istilah dan Tata Nama Tjiptasurasa	
	A. Aminuddin	681
48.	Bilangan dan Namanya dalam Bahasa Indonesia	
	Andi Hakim Nasoetion	687
49.	Bahasa Indonesia dalam Penulisan Laporan	
	Hans E. Kawulusan	700
50.	Keputusan Kongres Bahasa Indonesia III	716
	PIDATO MENTERI MUDA URUSAN PEMUDA SELAKU KETUA UMUM PANITIA NASIONAL PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-50 PADA UPACARA PENUTUPAN KONGRES BAHASA INDONESIA III DI JAKARTA PADA TANGGAL 3 NOVEMBER 1978	732
	SUSUNAN KEPANITIAAN KONGRES BAHASA INDONESIA III	736

**PIDATO PENGARAHAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA SIDANG LENGKAP KONGRES BAHASA INDONESIA III
PADA TANGGAL 30 OKTOBER 1978**

Pada saat mereka berbicara dalam bahasa yang sama, tidak ada satu pun kerja yang tidak mungkin mereka laksanakan.

(Voici que tous parlent une seule langue. Maintenant aucun dessein ne sera irrealisable pour eux)

(Bible, Genese - 11.5)

Berdasarkan letak geografis negara Indonesia dan berdasarkan sistem politik ketatanegaraan yang kita pilih, setiap manusia Indonesia dari mulai lahir dan selama kehidupannya, saya kira sekaligus melalui tiga lingkungan kebudayaan, baik disadari maupun tidak disadari. Pertama, lingkungan kebudayaan di mana ia merupakan bagian daripada kebudayaan tertentu dan di satu tradisi tertentu sebab tidak dapat secara alamiah semua orang Indonesia lahir di satu tempat. Tidak dapat semua lahir di Jakarta; ada yang lahir di Banda Aceh, ada yang lahir di Medan, ada yang lahir di Ujungpandang. Dan sesuai dengan perkembangan lokalitas itu timbul pulalah sistem-sistem nilai yang dihayati, kadang-kadang secara sadar, kadang-kadang tidak sadar.

Lingkungan kedua adalah lingkungan kebudayaan di mana ia merupakan bahagian karena ia merupakan warga dari satu negara bangsa yang sedang tumbuh. Yang ketiga, lingkungan kebudayaan di mana ia merupakan bahagian karena ia merupakan warga dari satu negara bangsa yang telah merdeka, yang namanya Indonesia, di satu lingkungan kebudayaan yang sedang tumbuh. Yang ketiga, lingkungan kebudayaan di mana ia merupakan bahagian karena manusia Indonesia itu adalah termasuk yang disebut *human race*, makhluk manusia.

Dan terang antara perkembangan kebudayaan ini ada kaitan yang erat dengan bahasa.

Kebudayaan dan bahasa yang secara tak terelakkan menjadi bagiannya adalah bagaikan dua permukaan sehelai kertas, yang dapat dilihat perbedaannya secara analitis dan perbandingan (komparatif), tetapi sebenarnya keduanya merupakan kesatuan integral dalam totalitas budaya kehidupan manusia yang membedakannya dari makhluk binatang. Hubungan antara kebudayaan dan bahasa manusia (*la langage*) adalah tidak saja erat, tetapi secara timbal-balik juga mencerminkan taraf kemajuan hakikat manusiawi pelaku, penghayat, serta peserta kebudayaan dan bahasa tersebut. Sesungguhnya, kalimat arif yang mengatakan "bahasa menunjukkan bangsa" mengandung pengertian yang sangat luas karena ia tidak saja mencakup pengertian peralambangan, tetapi juga merangkum pengertian-pengertian pragmatis, kultural, dan *real*.

Sebagaimana halnya kebudayaan, bahasa tidak dapat melepaskan dirinya dari lingkungan kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kemasyarakatan, yang abad ini ditandai oleh makin laju dan meningkatnya perubahan dalam segala bidang, yang menurut Alvin Toffler disebut sebagai zaman berhentinya kemandekan (*the death of permanence*), segala sesuatu berubah. Baik dalam fungsinya sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai wahana komunikasi bersama dengan kesatuan serta persatuan maupun dalam fungsinya sebagai bahasa negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, Bab XV, Pasal 36, beserta penjelasannya, bahasa Indonesia merupakan alat pengungkapan kebudayaan nasional yang khas berbeda dengan kebudayaan bangsa lain (*sui generis*), yang secara cermat dapat kita lihat sebagai suatu spektrum yang bersinar dari permata kehidupan bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika* itu. Ini merupakan kenyataan yang membahagiakan dan bersejarah. Membahagiakan karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang tadinya dapat dikatakan berupa "bahasa pasar" (*lingua franca*), telah sejak tanggal 28 Oktober 1928, yang dua hari yang lalu kita peringati secara resmi dan konsekuen diterima dan dipakai dengan suka rela oleh beraneka ragam masyarakat penutur yang berbeda-beda latar belakang bahasa ibu, tradisi, dan sosial budayanya. Bersejarah karena jauh sebelum Republik Indonesia lahir, jauh sebelum itu, bahasa Indonesia telah mempunyai kedudukan sebagai salah satu penentu persatuan dan kesatuan bangsa. Kedudukan seperti ini, dalam sejarah manusia, tidak banyak, kalau bukannya malah sama sekali sepenuhnya tidak dialami dan dimiliki oleh bangsa lain.

Kalau kita tilik dengan seksama, situasi kebahasaan di Indonesia sesuai dengan kaitan ketiga lingkaran kebudayaan tadi, memungkinkan kita

berbicara tentang empat macam bahasa, yaitu bahasa ibu, bahasa nasional, bahasa matematik, dan bahasa internasional.

Bahasa ibu yang jumlahnya ratusan dan berbeda-beda itu dalam konfigurasi piramida merupakan dasar dan dipakai oleh berbagai masyarakat penutur aslinya sejak kecil. Ia mempunyai fungsi yang amat penting sebagai wahana pemahaman dan pewarisan serta pengembangan nilai-nilai dan norma-norma budaya masyarakat serta pengembangan nilai-nilai dan norma-norma budaya masyarakat penutur aslinya. Oleh karena masyarakat-masyarakat penutur aslinya itu juga sekaligus merupakan pelaku, penghayat, serta peserta dalam latar belakang kehidupan yang berbagai ragam, jelaslah bahwa pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat berbagai ragam itu akan mencerminkan pula beragam kekhasan yang bersumber dari berbagai latar belakang tadi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai langgam atau dialek bahasa Indonesia, yang bersama-sama membentuk lapisan kedua yang terletak di atas dasar piramida, yang terdiri dari bahasa-bahasa ibu tersebut.

Dalam perkembangannya yang paling awal, seorang anak Indonesia perlu sekali dengan terampilnya mempergunakan bahasa ibunya. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengabaikan atau membuang begitu saja fungsi dan hakikat bahasa ibu ini, oleh karena banyaknya dan kita tidak akan mempunyai waktu dan dana yang cukup untuk memanfaatkan bahasa-bahasa ibu tersebut sebagai wahana komunikasi yang efisien dan efektif untuk kepentingan nasional, pembinaan dan pengembangannya memerlukan perencanaan dan pelaksanaan secara wajar dan proporsional. Ini juga mengingat bahwa keadaan bahasa-bahasa ibu di Indonesia adalah kompleks; beberapa di antara bahasa ibu itu, meskipun berbeda-beda, tetapi saling berkaitan dalam kelompok atau "keluarga" bahasa yang sama, sedangkan sejumlah yang lain berasal dari keluarga bahasa yang saling berlainan sebagaimana, misalnya, bahasa-bahasa di Irian Jaya.

Lapisan kedua yang terdiri dari berbagai dialek Indonesia itu mencerminkan kekhasan-kekhasan ujaran, yang seringkali dapat dipakai sebagai petunjuk (indikator) tentang siapa atau dari daerah dan lapisan masyarakat mana asal pemakainya. Lapisan kedua ini sampai ke puncak piramida bahasa tadi merupakan apa yang tadi disebut sebagai bahasa nasional. Ia merupakan suatu himpunan berbagai ragam pemakaian, di mana pemakaian yang relatif paling "baik" dan "benar" menempati daerah puncak piramida dan merupakan norma ideal serta memenuhi persyaratan apa yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai bahasa negara. Pemakaian seperti

itulah yang harus dibina dan dikembangkan sejak anak Indonesia memasuki bangku sekolah. Di samping itu, kita juga perlu menyadari bahwa sebagaimana halnya kebudayaan nasional yang sedang kita kembangkan menjadi peradaban nasional, masalah bahasa Indonesia adalah kompleks dan gagasan tentang kesempurnaan mutlak secara 100% merupakan impian atau ilusi yang tidak realistis. Akan tetapi, sebagai pewaris masa lampau, pelaku masa kini, dan peletak masa depan kita inginkan bersama sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma pegangan kehidupan bangsa yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, kita mempunyai tugas yang betapa pun berat dan sulitnya harus secara penuh tanggung jawab kita tunaikan sebaik-baiknya guna mencapai hasil yang maksimal. Pembakuan bahasa Indonesia harus terus dilakukan dan secara nyata dicerminkan dalam pemakaian sejauh mungkin. Hal ini khususnya sangat diperlukan bagi apa yang tadi disebut sebagai bahasa matematik, di mana ketetapan (*prestasi*) tinggi harus dicapai melalui keserasian satu lawan satu (*one-to-one correspondence*) antara lambang bahasa dan isi atau artinya secara tetap dan tidak berdwarti. Jadi, dengan ini jelas yang saya maksudkan bahasa matematik bukanlah bahasa universal matematika, tetapi satu bahasa yang jelas dan eksplisit arti setiap kata yang diutarakan itu. Di samping itu, juga menempati titik kulminasi piramida bahasa sebagaimana halnya bahasa matematik tadi, bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa internasional. Kita sudah terlibat di dalam bahasa internasional itu. Jikalau kita tidak dapat meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional atau apa yang disebut bahasa modern oleh Sutan Takdir Alisjahbana, bahasa Indonesia akan tersisih tidak hanya di luar lingkungannya di mana ia seharusnya dapat juga dipakai, tetapi di daerah wilayahnya sendiri; bahasa Indonesia itu akan didesak oleh bahasa internasional yang lain; dan ini telah kita lihat gejalanya di mana-mana. Ini menyangkut berbagai usaha penyempurnaan pada bahasa itu sendiri, dan tidak hanya oleh karena dengan bahasa itu orang dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi di perusahaan-perusahaan multinasional, dan juga tidak dapat sepenuhnya kita andalkan pada keinginan kebanggaan kita semata.

Bila kita melihat gambaran piramidal tadi, bahasa Indonesia mempunyai sumber khazanah yang amat kaya dalam berbagai aspeknya. Sebagai bagian integral kebudayaan Indonesia, bahasa Indonesia tetap terkait artinya bagi individu Indonesia sebagai pengetahuan, pilihan hidup, dan praktik komunikasi, serta dipandang dari sudut masyarakat sebagai perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran (logika), kemauan (etika), serta perasaan (estetika). Je-

las pula hal ini menyangkut secara langsung manusia Indonesia sebagai pelaku dan peserta, baik kebudayaan maupun bahasa nasional. Dengan kata lain, penyempurnaan bahasa Indonesia tidak dapat terlepas dari penyempurnaan landasan manusiawi sebagai prasyarat pokok untuk pengembangan bangsa itu. Dengan ini jelas betapa terdapat kaitan yang erat antara bahasa dengan kebudayaan. Ini tinggi nilainya dan menyangkut tanggung jawab berat dan perhatian yang sungguh-sungguh terus-menerus. Bahasa-bahasa di Indonesia yang belum mempunyai tradisi tulisan perlu segera diaksarakan bersamaan sekaligus dengan peningkatan tradisi tulisan internasional (Latin) dan juga peningkatan bahasa sebagai wahana penalaran dan analisis-analisis. Sumber-sumber dari khazanah nasional dan juga dari sentuhan dengan nilai-nilai dan pengertian-pengertian dari luar yang baik, perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini menuntut sikap peka terhadap pembaharuan, kritis, dan selektis, dan selektif sehingga apa yang diperlukan adalah sarinya dan bukan ampasnya.

Ketepatan pemakaian bahasa yang tinggi secara kualitatif dan kuantitatif merupakan tuntutan bagi masyarakat modern. Ini menyangkut tidak saja segi-segi ucapan (fonologis), tetapi juga peristilahan (leksikal), penyusunan untaian (gramatikal), dan ungkapan arti (semantis). Bagi bangsa Indonesia yang menghadapi tantangan untuk melakukan tugas hidupnya dalam zaman modern, peningkatan mutu dan jumlah tingkah laku kebahasaan sebagai ungkapan akal sehat dan norma-norma nasional tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bangsa yang telah maju peradabannya ditandai tidak saja oleh kemampuannya menguasai alam, membangun industri berat, membuat jaringan jalan raya dan sistem pelayanan jasa yang bermutu tinggi, tetapi juga oleh tingginya tingkat pemakaian bahasa dalam beraneka-ragam segi kehidupannya. Ini jelas tercermin pada banyak dan teraturnya alat telekomunikasi penyampai pesan bahasa, karya-karya sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, serta buku-buku dan media tulisan lainnya. Di mana-mana terdapat papan atau tanda baca yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota masyarakat untuk memahaminya dan dengan demikian mengurangi beban anggota yang lain. Dalam masyarakat seperti ini, ke arah mana kita sudah dan harus mulai mengembangkan diri, kebisuan bahasa dan kebuta-hurufan menjadi penghambat yang harus dibuang jauh-jauh. Tidak kalah pentingnya dari peningkatan kuantita dan kualita pemakaian bahasa Indonesia ini ialah peningkatan kecepatannya secara tepat.

Peningkatan dan penyempurnaan bahasa Indonesia sebagai wahana pikiran, kemauan, dan perasaan harus terarah dan juga terbuka. Sebagai-

mana kita ketahui, pengertian-pengertian yang dapat diungkapkan dalam bahasa asing, tetapi yang telah berada dalam daerah kebutuhan dan kemampuan kita, misalnya, *think, thought, reason, reasoning, concept, conception, idea*, dan sebagainya, sering tidak dapat ditampung dalam lambang kebahasaan apabila kita hanya berpegang pada sumber Melayu semata. Kita tahu, bahwa kata *pikir* telah kita pinjam dari bahasa Arab. Dengan menggali khazanah bahasa daerah, pengertian-pengertian fundamental yang sangat diperlukan untuk ketepatan pengungkapan seperti tersebut di atas dapat ditampung dalam lambang kebahasaan. Demikianlah telah saya pakai kata *nalar* untuk *reason, gagasan* untuk *idea*, dan nanti mungkin kita memerlukannya, misalnya, kata *graita* untuk *reflective thinking* dan barangkali *udarasa* untuk *speculative thinking*, dan sebagainya. Jadi, harus kita gali dalam lingkungan kebudayaan lokal di negara kita.

Pengembangan penggunaan bahasa secara tepat dan bernalar ini menyangkut bukan saja masalah bahasa itu sendiri, melainkan juga antara lain logika. Ini sangat jelas dan fundamental dicerminkan oleh kata-kata penghubung pikiran (*logical operators*), misalnya, kata *dan, atau, tetapi, apabila, dan maka*. Dengan sendirinya, sejak pada tahap yang paling awal, pengembangan dan penyempurnaan pemakaian bahasa harus melibatkan pendidikan bernalar dalam bahasa. Dan inilah salah satu tuntutan berpikir modern. Dan kalau kita tinjau sampai sekarang, seperti yang tertulis dalam salah satu publikasi UNESCO, dikatakan bahwa salah satu tuntutan untuk suatu bahasa supaya dapat dianggap sebagai bahasa modern adalah sampai berapa jauh bahasa itu sudah dapat dipakai untuk membahas hal-hal yang paling abstrak. Sebenarnya sudah sejak lama kita telah membiasakan memakai bahasa Indonesia untuk membahas hal-hal yang paling abstrak, yaitu analisis-analisis ilmiah di dalam perkuliahan dan di dalam tulisan-tulisan analitis. Dari sudut itu saya kira bahasa Indonesia sudah memenuhi syarat untuk dipandang sebagai bahasa modern dan/atau internasional.

Tujuan untuk mewajibkan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar harus dicapai dengan memahami segala aspek masalah penyempurnaan bahasa Indonesia yang dipakai bukan dalam suatu kemampuan, tetapi dalam lingkungan hidup dan budaya manusia Indonesia yang terkait erat dengan nilai-nilai nasional sebagaimana dijelaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Kalau kita telaah Garis-garis Besar Haluan Negara itu dengan teliti, akan tampak nyata bahwa ia tidak sekedar merupakan kerangka pembatas, tetapi bahkan sebaliknya merupakan sumber dan alasan pembesar untuk segala kreativitas, pembaharuan, dan peningkatan mutu hidup bangsa, di

mana bahasa Indonesia merupakan salah satu infrastruktur terdalam bersama-sama dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan nasional yang lain. Dalam kerangka pemikiran seperti ini peranan manusia Indonesia dan peningkatan kebudayaannya menjadi peradaban nasional Indonesia tidak dapat lepas dari lingkungannya. Sebaliknya, lingkungannya tidak ada artinya tanpa adanya ia. Implikasi teoritis pemikiran ini adalah jelas, yaitu bahwa penyempurnaan bahasa Indonesia tidak bisa terlepas dari paham: pengalaman manusiawi sebagai bagian lingkungan dan juga sebaliknya: lingkungan sebagai bagian pengalaman-manusiawi. Secara ilmu pengetahuan kultural: tanpa manusia sebagai pengamat tiada akan ada budaya dan bahasa sebagai data. Oleh karena itu, sebagai dikatakan tadi, penyempurnaan bahasa Indonesia harus integral dengan pengembangan manusia Indonesia.

Sebagian usaha pengembangan kebudayaan nasional, penyempurnaan bahasa Indonesia menghadapi tantangan-tantangan besar. Tradisi tulisan tidak saja harus dibina dan ditingkatkan secara cepat dan merata, tetapi secara sungguh-sungguh harus diarahkan kepada penulisan karya-karya besar. Ini bukan sekedar idealisme pasif, tetapi merupakan idealisme yang didasarkan atas realitas yang ada dalam sejarah manusia. Peradaban nasional Indonesia menuntut agar kita terus-menerus mengembangkan tumbuhnya iklim intelektual agar dalam waktu tidak lama lagi muncul karya-karya budaya tulis yang diakui orang di luar Indonesia sederajat dengan Omar Khayam, Charles Dickens, Shakespeare, Leo Tolstoy, George Santayana, Alfred North Whitehead, Franz Kafka, Piere de Chardin, sampai ke tipe-tipe Agatha Christie dan Leon Uris. Sudah jelas ini bukan tantangan sepele. Kita secara harus menyadari bahwa berhasilnya usaha penyempurnaan bahasa Indonesia tidak saja sekedar diukur dari selesainya suatu program kerja atau kegiatan proyek, tetapi juga atas betapa besar tantangan yang dihadapi dan sampai sejauh mana tantangan itu dipecahkan serta landasan-landasan pokok serta tindakan apa telah dilakukan untuk menghadapi masa depan. Dalam kaitannya dengan proses tak terelakkan transformasi kebudayaan ke arah peradaban tantangan ini jelas harus kita hadapi dan pecahkan bersama mulai sekarang juga.

Sebagai wahana komunikasi intraindividu (monologis), antarpribadi, dan antarmasyarakat, bahasa Indonesia dihadapkan kepada dunia kehidupan masyarakat yang tadi telah saya singgung, tidak lagi mampu memisahkan dirinya dari arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia harus menghadapi arus perkembangan "berpikir" modern. Di kalangan para ahli ilmu bahasa, filsafat, dan juga ilmu jiwa "bahasa" dan "pikir" merupakan dwitunggal yang kait-mengait. Oleh

karena itu, usaha penyempurnaan bahasa Indonesia juga harus melibatkan peningkatan kemampuan berpikir pemakaiannya. Rasa was-was yang sering terdengar bahwa bahasa Indonesia tidak dapat dipakai dalam ilmu pengetahuan harus dikikis habis dengan usaha-usaha nyata. Penulisan atau penerjemahan karya-karya dalam berbagai disiplin dan juga sastra indah (*belles lettres*) harus segera ditingkatkan. Bahasa Indonesia, melalui praktik dalam kuliah, ceramah, pertukaran pendapat, penulisan kertas kerja, dan sebagainya, harus ditingkatkan kemampuannya agar dapat dipergunakan untuk melakukan konseptualisasi dalam segala bidang kegiatan berpikir. Konsekuensi dari gagasan ini ialah bahwa sejak anak masih di taman kanak-kanak atau sekolah dasar harus dilatih berpikir dengan teratur dan betul dan menyatakan pendapatnya berupa kalimat-kalimat yang betul dan baik. Ini menurut tanggung jawab pendidik, guru, dan dosen yang harus memberi contoh dalam melakukan proses berpikir yang betul sebagaimana dicerminkan dalam penggunaan bahasanya dengan baik dan benar.

Menulis dan membaca tidak saja harus dilakukan dengan teliti, baik, dan benar, tetapi juga harus dengan cepat. Tekanan zaman modern tidak lagi memungkinkan kita mempergunakan waktu luang atau yang memang disediakan untuk menulis dan membaca dengan lamban. Eksistensi dan keselamatan masa depan kita bergantung pada tepat dan cepatnya tanggapan serta pengambilan keputusan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Membaca cepat, baik harfiah maupun dalam arti kiasan, tidak lagi merupakan barang mewah; ia mutlak harus dimiliki oleh bangsa yang beradab. Demikian pula halnya dengan menulis dan menyatakan pendapat dengan baik dan benar. Dan ini semua selalu menyangkut penggunaan bahasa dan pikiran.

Tentu saja usaha penyempurnaan bahasa Indonesia yang tak terelakkan juga menyangkut usaha pembakuan bahasa Indonesia itu, yang harus dilakukan, baik secara bertahap maupun simultan, tetapi terarah, dan proses kodifikasi tidak boleh dilakukan tanpa alasan-alasan yang bernalar dan dapat diterima oleh masyarakat. Kita sewajarnya merasa bersyukur dan berbahagia karena dalam proses kodifikasi bahasa Indonesia kita telah membakukan ejaan, yang juga dipakai oleh negara tetangga kita. Sewajarnya kita menghimbau agar kongres ini diikuti oleh usaha-usaha nyata untuk membakukan segi-segi lain bahasa Indonesia, antara lain segi ucapan beserta pola lagu kalimatnya.

Tidak boleh dilupakan pula ialah adanya kenyataan hidup berupa ragam bahasa Indonesia, yang tadi dikatakan mulai dari dasar lapisan kedua

dalam piramida bahasa sampai ke puncaknya, yang merupakan norma yang harus kita capai. Kita tidak boleh mengikis ragam bahasa yang ratusan jumlahnya itu karena mereka juga merupakan kekayaan budaya Indonesia. Kebahagiaan etis dan estetis kadang-kadang kita peroleh dari ragam bahasa Indonesia ini, yang kaya akan kekhasan ucapan, kosa kata, untaian (sintaksis), dan arti. Kekayaan ini perlu dimanfaatkan bukan untuk menghambat usaha penyempurnaan bahasa Indonesia, melainkan justru untuk memperkaya dan menampung nilai-nilai dan pengertian-pengertian baru, baik yang tumbuh dan berkembang dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, tidak dapat dilupakan fungsi bahasa pada umumnya dan bahasa Indonesia pada khususnya untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya, sebagaimana menurut First disebut basa-basi (*phatic communion*), menyatakan perasaan (*emotive function*), dan menyatakan rujukan (*referential function*), yang tidak selalu identik dan bisa dilakukan secara sempurna dengan menggunakan bahasa Indonesia normatif atau baku. Akan tetapi, bagaimanapun juga penyempurnaan bahasa Indonesia agar ia menjadi wahana kebudayaan yang memadai, harus mengutamakan prioritas nasional dan memanfaatkan khazanah yang terdapat dalam bahasa-bahasa daerah sebagai penunjang dan pemer kaya bahasa Indonesia yang kita cita-citakan.

Hadirin sekalian, kita sekarang memerlukan pembahasan bahasa Indonesia dalam satu lingkungan masalah yang khas. Kalau kita teliti perkembangan sejarah bangsa kita, berdasarkan sejarah bangsa kita, berdasarkan apa yang diperbuat oleh nenek moyang kita, kita berusaha menganalisis kehidupan mereka. Mula-mula tentunya manusia itu hidup seorang diri, kemudian membentuk keluarga, dan keluarga berkembang menjadi suku. Kemudian, apabila mereka menetap menjadi desa, kampung atau "nagari", lalu berkembang menjadi pulau seperti terdapat dalam tahun 1928: *Jong Java*, *Jong Sumatra*, dan setelah 1928 meningkat menjadi Indonesia. Apakah artinya ini? Semakin besar suatu kelompok hidup (*survival group*), pengenalan pribadi di antara para anggotanya menjadi semakin tidak langsung. Apa yang menjadi perhatian dan pikiran serta keprihatinan menjadi semakin berbeda, pekerjaan menjadi semakin berbeda, dan latar kebudayaan menjadi semakin berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran-pemikiran baru, tingkah laku yang baru, keterampilan dan cara-cara baru untuk mengadakan kerja sama.

Kadang-kadang kita lihat ketegangan terjadi karena kelompok hidup hendak dinaikkan ke tingkat nasional, tetapi orang masih berpikir pada tingkat lokal; bahkan yang lebih berbahaya adalah bahwa orang masih ber-

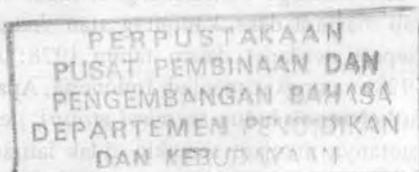
pikir, bertindak, dan bekerja sama seperti pada tingkat keluarga.

Sekarang pola tingkah laku itu hendak kita tingkatkan lagi dari tingkat nasional ke tingkat regional dengan terbentuknya ASEAN sebagai kesatuan kerja sama yang terdekat. Di dalam hubungan ini diperlukan adanya komunikasi dan di dalam komunikasi itu peranan penting sekali. Inilah sebabnya, mengapa kita mempunyai keharusan membina bahasa itu, sesedikitnya sebagai alat komunikasi yang dipahami bersama di tengah-tengah gelombang perbedaan dan keanekaragaman yang semakin meriah dan kompleks. Oleh karena itu, persamaan bahasa, baik dalam arti kiasan maupun dalam arti harfiah perlu sekali kita kembangkan. Perhatian masyarakat kita dewasa ini benar-benar dicurahkan kepada kongres yang terhormat ini.

Terima kasih.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Dr. Daoed Joesoef



PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA DALAM POLITIK

Mohammad Hatta

Pada permulaan abad ke-20 bahasa Indonesia belum dikenal. Di samping bahasa Melayu Riau yang dianggap sebagai *lingua franca* di seluruh Nusantara, banyak orang mempergunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, bahasa Aceh, bahasa Palembang, bahasa Melayu logat Ambon, dan lain-lainnya.

Sejak pemerintah kolonial pada bulan November 1918 di bawah G.G. Van Limburg Stirum atas pengaruh Revolusi Bolsyewik di Rusia menjanjikan di *Volksraad* bahwa kemajuan politik akan cepat terlaksana dengan ikut sertanya rakyat dalam tata negara, orang pergerakan serta pemuda terpelajar menyangka bahwa *evangeli* yang diucapkan Presiden Wilson sesudah Perang Dunia Pertama akan dilaksanakan pula di tanah jajahan Belanda. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Ucapan G.G. Van Limburg Stirum itu ditentang pula di Negeri Belanda. Antara lain yang menentang itu ialah anggota *Tweede Kamer*, Mr. Fock, yang kemudian diangkat menjadi G.G. menggantikan Graaf Van Limburg Stirum. Gubernur Jenderal baru itu datang ke Hindia Belanda dengan program penghematan. Yang penting-penting bagi keselamatan rakyat dihemat.

Pemuda bumiputra yang belajar di Negeri Belanda yang menjadi anggota *Indische Vereeniging*, yang kumpulan mereka didirikan kira-kira sesudah *Boedi Oetomo*, tidak mau lagi mengenal sifat kedaerahan. *Indische Vereeniging* mengingat segala bumiputra yang datang dari Hindia Belanda bersama-sama dengan pemuda Belanda yang kemudian akan menjabat di Hindia Belanda beserta pemuda turunan Tionghoa. Mereka mendirikan perkumpulan *Indonesisch Verbond*. Yang menjadi anggota hanya perkumpulan, bukan orang-seorang. Cita-cita yang hendak dituju ialah mendekatkan ketiga golongan pemuda serta mempercepat tercapainya ekonomi untuk Hindia Belanda. Akan tetapi, yang diperoleh hanyalah pertentangan saja.

Sejak *decennia* kedua abad ke-20, di Nederland Prof. Mr. Van Vollenhoven memakai kata *Indonesier* pengganti istilah *Inlander*. Mula-mula dalam bukunya yang banyak dipelajari *De Indonesier en Zijn Grond*. Setelah itu banyak diambil alih oleh pemuda bumiputra dari Hindia Belanda yang datang ke Negeri Belanda sesudah Perang Dunia I. Mereka menamakan dirinya orang Indonesia, tanah airnya tanah Indonesia, dan bahasanya bahasa Indonesia. Juga pada kongres internasional yang dapat mereka hadiri. Nama "Indonesia" dipropagandakan. Pers di Indonesia mengambil alih nama itu dan terus-menerus memakainya. Apalagi sejak *Indonesische Vereeniging* melancarkan politik nonkooperasi terhadap Hindia Belanda; penggantian istilah *Hindia Belanda* dan *Inlander* cepat dilakukan. Pada Kongres Pemuda di Jakarta tahun 1928 ditetapkan Sumpah Pemuda sebagai berikut.

"Kami putra dan putri Indonesia
 mengakui berbangsa satu : Bangsa Indonesia
 Kami putra dan putri Indonesia
 mengakui bertanah air satu: Tanah Air Indonesia
 Kami putra dan putri Indonesia
 mengakui berbahasa persatuan yang satu: Bahasa Indonesia."

Sejak berdirinya Partai Nasional Indonesia, perkembangan kehidupan politik di Indonesia bertambah maju. Besar sekali pengaruhnya atas perkembangan bahasa Indonesia. Agitasi yang diucapkan oleh Bung Karno tidak sedikit pengaruhnya atas perkembangan bahasa Indonesia. Apalagi sekarang setelah Indonesia merdeka dan bahasa Indonesia lazim dipakai sehingga bahasa Belanda tidak menjadi tandingan lagi. Pada masa yang akan datang pengaruh bahasa Indonesia akan semakin besar dalam kehidupan politik di Indonesia. Pengacara Indonesia akan selalu memakai bahasa Indonesia dalam perkara politik. Ada kalanya dalam kehidupan politik di Indonesia bahasa yang sudah tertanam ke dalam bahasa Melayu lama diubah sebutannya menjadi kata baru. Dalam bahasa lama selalu disebut *negeri*, seperti *negeri* Belanda, *negeri* Prancis, *negeri* Inggris. Akan tetapi, dalam istilah politik dihasilkan kata *negara* sebagai terjemahan dari kata *state* (Inggris) atau *staat* (Belanda). Saya sendiri pernah memakai kata *negara* dalam karangan saya yang terbit dalam buku saya, *Mencari Volkenbond dari Abad ke Abad*, yang saya karang di Bandaneira pada tahun 1938.

Kemudian kita temukan kata itu kembali dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ambillah, misalnya, Pasal 1. "Negara

Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik." Dalam Pasal 23 berkali-kali disebut "keperluan negara", "keuangan negara". Dalam Pasal 35 disebut "bendera negara Indonesia" dan dalam Pasal 36 dikatakan "bahasa negara ialah bahasa Indonesia."

Jadi, kata *negara* itu sekarang sudah menjadi istilah baru yang sama artinya dengan kata Inggris *state*. Istilah ini tidak akan berubah di masa yang akan datang. Kedua-duanya itu akan tetap ada dalam bahasa Indonesia: *negeri* dan *negara*.

Perlu diperingatkan di sini bahwa di masa pemerintah Jepang di Indonesia, Panitia Bahasa Indonesia giat bekerja untuk membentuk kata-kata istilah guna dipakai di perguruan tinggi. Ada tiga bagian. Pertama bagian gramatika, kedua bagian menyaring kata-kata yang telah ada dalam surat kabar, dan ketiga adalah bagian yang menciptakan istilah baru. Di waktu itu sudah beribu-ribu kata istilah baru yang dipikirkan sehingga perguruan tinggi banyak memperoleh bantuan. Panitia itu terus bekerja di masa Republik Indonesia merdeka dan sekarang masih melaksanakan tugasnya. Sekali seminggu Panitia Bahasa Indonesia itu menguraikan di TVRI pendapatnya. Tujuannya ialah menyempurnakan pemakaian bahasa Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia sekarang berusaha sebaik-baiknya memajukan bahasa Indonesia. Pemuda angkatan sekarang mempunyai kewajiban untuk memajukan pemakaian bahasa Indonesia. Apabila mereka banyak mengenal bahasa Inggris, lebih besar tugasnya untuk melancarkan bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Mereka perlu mempelajari kembali Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Amat janggal rupanya apabila ia kenal dan bicara dalam bahasa asing, misalnya Inggris, tetapi tidak lancar bicara dalam bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia.

Pada masa yang akhir ini perkembangan bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa asing. Digunakannya kembali huruf *f* atau *v* ke dalam ejaan bahasa Indonesia, misalnya, untuk menuliskan kata *Februari* dan *November*, menunjukkan adanya pendekatan kepada istilah yang asli yang berasal dari bahasa asing. Akan tetapi, beberapa istilah yang sesungguhnya telah biasa dipakai dalam bahasa Indonesia juga diubah hanya karena pengaruh bahasa asing tertentu, yakni bahasa Inggris. Misalnya, istilah *tradisionil* yang berpuluh tahun dibiasakan memakainya hingga terasa sebagai bagian dari bahasa Indonesia kini diubah menjadi *tradisional*. *Strukturil* dijadikan *struktural* dan *formil* dijadikan *formal*. Tidak perlu kita dalam bahasa Indonesia terlalu banyak meniru-niru atau menyandarkan diri pada bahasa Inggris.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI KEAGAMAAN

H. Alamsjah Ratu Prawiranegara
Menteri Agama Republik Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya menyampaikan banyak terima kasih dan menyambut baik permintaan Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia III kepada saya untuk memberikan uraian dengan judul "Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi Keagamaan".

Sudah tentu kita menyadari bahwa pembangunan yang sedang kita laksanakan dewasa ini adalah pembangunan yang menyeluruh bagi keperluan manusia lahir dan batin, material, dan spiritual. Ini berarti bahwa pembangunan yang kita laksanakan adalah pembangunan yang seimbang antara dua kepentingan, yaitu kepentingan rohaniah dan jasmaniah. Dengan demikian, mudah dipahami bahwa pembangunan kita menyangkut seluruh kepentingan umat manusia secara utuh.

Dalam kita menyongsong Pelita III adalah tepat ditingkatkan kegiatan pemuda dan Kongres Bahasa Indonesia III yang masing-masing mempunyai andil besar dalam kemerdekaan bangsa dan negara. Pemuda pada setiap generasi mempunyai peranan masing-masing. Demikian pula bahasa sebagai media yang dapat menyatukan satu rasa dan satu pengertian. Bahasa merupakan alat pemersatu bangsa dan merupakan salah satu "titik temu", yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, satu pemerintahan, dan satu ideologi, yaitu Pancasila.

Lebih dari itu, kegiatan seperti ini tidak lepas dari tujuan pokok pembangunan itu sendiri dalam rangka usaha mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Masyarakat yang adil dan makmur hanya dapat dicapai dengan kesediaan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi, mengambil bagian dalam pembangunan nasional dengan segala totalitasnya.

Pendahuluan

Diketahui bahwa bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional negara Republik Indonesia adalah satu dari sekitar 250 bahasa yang ada di negara kita ini. Sebelum secara resmi dijadikan bahasa nasional, bahasa itu dikenal dengan nama bahasa Melayu.

Baik bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lainnya di Indonesia itu berasal dari induk bahasa yang sama, yang oleh para ahli dikenal dengan nama bahasa Austronesia. Bukti bahwa bahasa-bahasa itu dikenal dari induk bahasa yang sama dapat diketahui dari banyaknya kata yang sama atau hampir sama yang terdapat dalam bahasa-bahasa tersebut. Persamaan itu bukan karena bahasa-bahasa itu sama-sama meminjam dari sumber yang sama dalam bahasa asing, melainkan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan. Sebagai contoh, nama bilangan seperti *esa*, *dua*, nama tumbuh-tumbuhan seperti *padi*, *tebu* nama binatang seperti *udang*, *ikan pari*, dan lain-lainnya, dalam bahasa-bahasa itu sama atau hampir sama. Selanjutnya, dikemukakan oleh para ahli bahwa bahasa Austronesia itu bukan hanya menurunkan bahasa-bahasa yang sekarang dipergunakan oleh penduduk Indonesia, tetapi bahasa itu juga menurunkan bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh penduduk Filipina, Madagaskar, dan tentu saja bahasa kebangsaan Malaysia yang dahulu juga bermama bahasa Melayu.

Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli, bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara.

Bahasa Indonesia sebagai Lingua Franca di Kepulauan Asia Tenggara

Bukan hanya sekarang saja bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu sebagai bahasa nasional atau bahasa penghubung di beberapa negara di Asia Tenggara. Sudah sejak dahulu kala bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Ini dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Tentu saja ada juga prasasti yang ditemukan di daerah

yang bahasa sehari-hari penduduknya memang bahasa Indonesia atau Melayu. Seperti prasasti Kedukan Bukit yang bertahun 683 M, Talang Tuo (684 M), Kota Kapur (686 M), dan Karah Barahi (686 M). Prasasti berbahasa Indonesia atau Melayu yang ditemukan di daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya bukan bahasa Indonesia atau Melayu itu di antaranya prasasti yang terdapat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) dan Bogor, Jawa Barat (942 M). Sangat boleh jadi bahasa Indonesia atau Melayu pada waktu-waktu sekitar itu juga sudah dikenal di daerah-daerah lain meskipun tidak ada bukti tertulis yang ditemukan orang. Barulah lama sesudah itu, Pegafetta yang menyertai Magelhaens dalam pelayarannya mengelilingi dunia dan singgah di Kepulauan Tidore pada 1521 menunjukkan bahwa bahasa yang dipergunakan penduduk di daerah itu adalah bahasa Indonesia atau Melayu. Enam ratus tahun sesudah itu Jan Huygen Van Linschoten, pelaut berkebangsaan Belanda, yang berlayar ke Indonesia, mengatakan bahwa bahasa Indonesia atau Melayu adalah bahasa untuk daerah Timur dan siapa yang tidak memami bahasa Prancis. Sesudah itu banyak bukti yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia atau Melayu sudah tersebar di seluruh kepulauan Asia Tenggara.

Bagaimana mungkin bahasa Indonesia atau Melayu yang jumlah pemakai aslinya tidak sebanyak bahasa-bahasa lainnya itu dapat memegang peranan ?

Dapat kiranya di sini disebut tiga faktor yang menyebabkan bahasa Indonesia atau Melayu memegang peranan sepenting itu di kepulauan Asia Tenggara.

1. Letak

!Pemakai asli Bahasa Indonesia atau Melayu adalah penduduk yang diam di seberang-menyeberang Selat Malaka. Daerah itu sudah sejak dahulu kala merupakan daerah yang strategis. Dalam perjalanan dari India, Arabia, dan lain-lain menuju ke negeri Cina, Jepang, dan lain-lain, atau sebaliknya, para pelaut selalu melewati daerah sekitar Selat Malaka itu. Banyak dari mereka yang bukan sekedar lewat, melainkan singgah di pelabuhan-pelabuhan di daerah itu, entah untuk keperluan penambahan perbekalan, untuk keperluan perdagangan, atau untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, penduduk daerah mendapat kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang asing itu. Pergaulan itu pastilah dilakukan dengan bahasa dan bahasa yang dipergunakannya tentulah bahasa penduduk setempat mengingat para pendatang itu berasal dari bermacam-macam negara yang bahasanya pasti berbeda-beda, yang

satu tidak dipahami oleh yang lain. Dalam kesempatan itulah bahasa Indonesia atau Melayu dikenal oleh para pendatang, yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Kalau mereka itu sekali-kali saling bertemu di daerah lain, bukan di daerah asli bahasa Indonesia atau Melayu yang ada di seberang menyeberang selat Malaka, pastilah mereka juga menggunakan bahasa yang sudah sama-sama mereka pahami, bahasa Indonesia atau Melayu. Oleh karena itu, makin lama makin luaslah daerah persebaran bahasa Indonesia atau Melayu itu. Tidaklah mengherankan kalau Ar-Raniri, seorang ulama terkenal dari India yang menetap di Aceh, ketika pertama kali datang ke Aceh pada tahun 1617 sudah dengan baik menguasai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Jadi, pastilah ia sudah mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu lebih dahulu di luar Aceh, mungkin di Gujarat, atau mungkin juga di daerah lainnya.

2. Struktur

Umum mengetahui bahwa jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana dan mudah, baik struktur katanya maupun struktur kalimatnya. Fonem bahasa Indonesia juga dimiliki oleh kebanyakan bahasa lainnya. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal *deklinsi* (perubahan bentuk kata atas dasar posisinya dalam kalimat) dan *konjugasi* (perubahan bentuk kata kerja atas dasar waktu dan pelakunya). Dalam posisi apa pun kata *rumah* dalam bahasa Indonesia tetap berupa *rumah* (bandingkan dengan bahasa Jerman: *das Haus, des Hauses, dem Haus*), dan siapa pun pelakunya serta kapan pun perbuatan itu dilakukan, kata kerja *duduk* dalam bahasa Indonesia akan tetap berupa *duduk* (bandingkan dengan bahasa Inggris: *do, does, did, done*).

Susunan kalimat juga selalu menempati urutan yang diterangkan lebih dahulu, barulah menerangkan; dikenal dengan hukum Diterangkan-Menerangkan atau Hukum D-M.

Karena sederhana dan mudahnya itulah, semua orang termasuk mereka yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia, dapat menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu menyebabkan makin banyak orang yang mengetahui dan menggunakan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia menjadi makin luas tersebar.

Pemakai

Pemakai asli bahasa Indonesia adalah orang-orang yang diam di seberang-menseberang Selat Malaka. Mungkin karena tempat tinggal mereka itu

strategis, banyak didatangi orang asing, mungkin juga karena faktor lainnya, yaitu orang-orang itu memang gemar merantau. Mereka bukan hanya menunggu kedatangan orang-orang asing ke tempat tinggal mereka, tetapi mereka juga aktif mengunjungi daerah-daerah lain, baik untuk keperluan perdagangan, keperluan keagamaan maupun keperluan lainnya. Sedikit ataupun banyak kepergian mereka ke daerah-daerah lain itu pastilah ikut membantu dalam penyebaran bahasa Indonesia.

Itulah ketiga faktor utama yang menyebabkan bahasa Indonesia memegang peranan yang penting dalam kawasan kepulauan Asia Tenggara. Oleh karena itu, tidaklah salah kiranya kalau beberapa negara di kawasan itu menentukan bahasa Indonesia atau Melayu sebagai bahasa nasionalnya.

Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Keagamaan

Dalam sementara masyarakat kegiatan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan lainnya. Sebelum menuai padi para petani memanjatkan puji syukur karena Tuhan telah berkenan memberikan panen yang baik. Sebelum turun ke laut untuk menangkap ikan para nelayan dalam upacara keagamaan mohon kepada Tuhan agar mereka memperoleh ikan yang banyak. Masih banyak contoh lain lagi yang dapat disebutkan. Puji syukur para petani dan permohonan para nelayan itu tentu saja menggunakan bahasa. Oleh karena itu, sebenarnya sukar dikatakan, kapan mulainya bahasa digunakan dalam komunikasi keagamaan. Kalau hendak dikatakan juga, "bahasa digunakan sejak manusia melakukan kegiatan dengan menggunakan bahasa".

Pada bahasa Indonesia dapat disebutkan kegiatan keagamaan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi juga sudah ada sejak lama sekali. Adanya mantra-mantra yang sampai sekarang masih dikenal orang menunjukkan bukti kegiatan itu. Para ahli berpendapat bahwa mantra-mantra itu sudah ada sejak sebelum agama Islam datang ke Indonesia, bahkan sebelum agama Hindu dan Buda. Mantra-mantra itu diajarkan oleh guru kepada murid, oleh generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Tentu saja semuanya masih serba lisan sebab tulisan pada waktu itu belum dikenal.

Itulah kalau boleh ditunjuk saat bahasa Indonesia dipakai sarana komunikasi keagamaan. Kalau komunikasi keagamaan itu dapat juga ditafsirkan bukan hanya komunikasi dari manusia kepada Tuhan, dan sebaliknya, tetapi juga dari manusia kepada manusia sepanjang masih dalam rangka kegiatan keagamaan, maka itu jugalah waktunya. Kegiatan keagamaan agar dapat juga dilakukan oleh orang lain haruslah diajarkan. Mengajarkannya tentulah dengan bahasa dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kira-kira pada per-

mulaan tarikh Masehi datangnya agama Hindu dan Buda dari India. Di tanah aslinya bahasa yang digunakan dalam komunikasi untuk kedua agama itu ialah bahasa Sanskerta untuk agama Hindu dan bahasa Pali untuk agama Buda. Untuk penyebarannya ke daerah lain, bantuan bahasa setempat diperlukan.

Wilayah Indonesia yang paling dekat dengan dan paling mudah dicapai dari India adalah di sekitar Selat Malaka. Oleh karena itu, dalam usaha penyiaran kedua agama itu ke wilayah Indonesia lainnya, bahasa Indonesia tetap memegang peranan yang penting.

I-Tsing, seorang musafir Cina, yang juga penulis, berkunjung ke Sriwijaya pada abad ketujuh mengatakan bahwa bahasa Kwunlun (K'un-lun) adalah bahasa agama Buda yang penting di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, banyak terjemahan ke dalam bahasa Cina dalam masalah agama Buda itu, yang bersumber pada bahasa Kwunlun. Apa yang dimaksud dengan bahasa Kwunlun oleh I-Tsing tidaklah lain dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Sriwijaya memang pada waktu itu menjadi pusat ilmu agama Buda. Banyak orang terpelajar datang ke situ untuk memperdalam ilmu itu, baik dari wilayah Indonesia lainnya maupun dari negara lain. Karena bahasa negara Sriwijaya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, dengan sendirinya bahasa itu memberikan sumbangan yang besar dalam penyiaran agama itu ke daerah-daerah lain. Selanjutnya, ketika agama Islam datang ke kawasan Asia Tenggara, bahasa setempat pertama-tama berkenalan dengan agama itu adalah bahasa Indonesia juga. Raja yang pertama memeluk agama Islam di Indonesia adalah Sultan Malik al-Saleh, di Perlak, yang meninggal pada tahun 1297. Bahasa negara bagi kesultanan itu adalah bahasa Indonesia juga. Dari Kerajaan Samudera itu agama Islam kemudian berkembang ke Malaka dan dari Malaka itulah kemudian Islam berkembang ke wilayah Indonesia lainnya. Memang dalam perkembangannya kemudian, bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa yang tunggal untuk penyiaran agama Islam di Indonesia sebab ada pula bahasa Jawa yang dipakai di Pulau Jawa untuk orang-orang yang berbahasa Jawa, Sunda, dan Madura, serta bahasa Bugis dan Makasar untuk penduduk Wilayah Timur. Akan tetapi, betapa pun bahasa Indonesia tetap memegang peranan yang terpenting. Ini diakui oleh para ulama. Mereka menggunakan istilah *allughat al-Jawi*. Penggunaan *Jawi* sampai sekarang bukan hanya untuk bahasa atau suku Jawa, tetapi untuk seluruh kawasan Asia Tenggara.

Betapa pentingnya peranan bahasa Indonesia untuk sarana komunikasi keagamaan dapat dibuktikan dari perbandingan jumlah kata pinjaman dari

kedua bahasa agama itu, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Arab. Kata pinjaman dalam bidang agama seperti *sorga*, *meraka*, *dewa* (dari bahasa Sanskerta), *mesjid*, *kitab*, *subuh* (dari bahasa Arab) jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata pinjaman dalam bidang-bidang lainnya. Hal ini berbeda dengan kata pinjaman yang berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris, misalnya, perbandingan antara kata-kata dalam bidang keagamaan dengan bidang-bidang lainnya tidak seperti itu.

Ketika datang agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan yang dibawa oleh orang Eropa, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pembuka jalan untuk penyarannya ke wilayah Indonesia lainnya. Kitab Injil dalam bahasa setempat yang pertama terbit juga dalam bahasa Indonesia.

Faktor-faktor yang Menunjang

Sudah dikatakan di depan bahwa bahasa Indonesia memegang peranan yang terpenting di kawasan Asia Tenggara sebagai sarana komunikasi keagamaan. Banyak bahasa yang terdapat di daerah itu, tetapi peranannya tidak dapat menyamai apalagi melebihi bahasa Indonesia. Faktor-faktor yang menguntungkan untuk bahasa Indonesia itu di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Faktor Geografis

Semua agama besar yang dipeluk oleh penduduk Indonesia datang dari arah barat. Pada waktu itu sebagian besar lalu-lintas dilakukan melalui laut. Dengan begitu, wilayah Indonesia yang pertama-tama menerima kedatangan agama itu adalah Indonesia bagian barat juga. Daerah itulah yang mula-mula didatangi oleh para penyar agama, baik agama Hindu, Buda, Islam maupun Kristen. Dalam perjalanannya ke wilayah Indonesia yang lain, para penyar agama itu singgah dahulu di kota-kota pelabuhan di seberang-menyeberang Selat Malaka. Bahkan, banyak di antara mereka tinggal cukup lama atau malahan menetap. Oleh karena itu, mereka cukup mengenal bahasa di daerah itu. Bahasa itulah yang mereka jadikan modal untuk berkomunikasi dengan penduduk wilayah Indonesia lainnya. Tentu saja bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Itulah faktor geografis yang menyebabkan bahasa Indonesia memegang peranan terpenting sebagai sarana komunikasi keagamaan.

2. Faktor Penyebaran

Sudah dikatakan di depan bahwa pada beberapa tempat yang bahasa sehari-hari penduduknya bukan bahasa Indonesia ditemukan prasasti yang

berbahasa Indonesia. Prasasti itu dibuat antara abad ke-8 dan ke-9. Dari itu saja dapat diketahui bahwa pada waktu itu bahasa Indonesia sudah dikenal di daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya bukan bahasa Indonesia. Boleh jadi sebelum abad itu pun bahasa Indonesia sudah dikenal secara luas. Hanya saja bukti tertulisnya memang tidak ada. Akan tetapi, tidak ada bukti tertulis tidak berarti bahwa di situ tidak ada kegiatan berbahasa. Betapa pun dari bukti yang ada itu saja kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa penyebaran bahasa Indonesia pada waktu permulaan penyiaran agama besar di Indonesia sudah melewati daerah asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah dikenal oleh penduduk yang tempat tinggalnya bukan hanya di seberang-meny seberang Selat Malaka saja.

Faktor itulah yang menyebabkan bahasa Indonesia lebih banyak lagi dipakai sebagai sarana penyiaran agama-agama di Indonesia. Bahasa Indonesia besar peranannya dalam penyiaran agama Hindu dan Buddha, agama besar yang pertama datang di Indonesia. Dalam penyebaran agama besar yang datang sesudah itu peranan bahasa Indonesia lebih besar lagi sebab penyebaran bahasa Indonesia sudah lebih mendalam.

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi Keagamaan

Jika dibandingkan dengan bahasa itu, perkembangan bahasa Indonesia sejak dulu sampai sekarang termasuk cepat. Masa perkembangan itu dapat dibagi tiga, yaitu (1) zaman sebelum pendudukan Jepang, (2) zaman pendudukan Jepang, dan (3) zaman merdeka.

1. Zaman sebelum Pendudukan Jepang

Pada zaman panjang ini bahasa Indonesia sejak adanya terus saja berkembang. Dari daerah asalnya di seberang menyeberang Selat Malaka tersebar ke daerah-daerah lain. Dari perbendaharaan kata-katanya yang mula-mula sedikit terus saja bertambah, baik dengan kata-kata ciptaan baru maupun dengan mengambil dari bahasa lain.

Perkembangan itu memang cepat, tetapi boleh dikatakan wajar kalau dibandingkan dengan perkembangan dalam masa sesudahnya. Pada waktu itu perkembangan itu boleh dikatakan tidak ada sentakan-sentakan atau kejutan-kejutan; bahasa Indonesia berkembang secara *constant* dan cepat.

2. Zaman Pendudukan Jepang

Dalam zaman Jepang inilah perkembangan bahasa Indonesia mengalami sentakan atau kejutan. Begitu balatentara Jepang menduduki Indonesia, lang-

sung mereka melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Barat lainnya. Dekat-dekat sebelum zaman Jepang bahasa antarsuku si Indonesia ialah bahasa Belanda untuk sekelompok kecil orang-orang terpelajar berpendidikan Barat dan bahasa Indonesia untuk sebagian besar orang Indonesia lainnya.

Dengan dilarangnya penggunaan bahasa Belanda, sarana komunikasi yang tadinya dilakukan dengan bahasa Belanda tidak boleh tidak harus dilakukan dengan bahasa lain yang tidak dilarang. Bahasa lain itu ialah bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Jepang. Kebanyakan bahasa daerah hanya dikenal oleh pemakai aslinya saja, sedangkan bahasa Jepang yang memang dimaksudkan untuk pengganti bahasa Belanda oleh pemerintah Jepang, sangat asing bagi orang Indonesia. Tak ada pilihan lain, hanya bahasa Indonesialah yang harus dipergunakan. Oleh karena itu, dalam waktu tiga setengah tahun pendudukan Jepang perkembangan bahasa Indonesia sangat cepat.

3. *Zaman Kemerdekaan*

Setelah terbentuk negara Republik Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia luar biasa cepatnya. Bahasa itu dijadikan bahasa resmi. Dalam kalangan Pemerintah bahasa itu menjadi bahasa komunikasi satu-satunya. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan, dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi, kecuali di daerah-daerah tertentu yang baru dimulai di kelas IV sekolah dasar. Dalam soal ini pihak swasta juga tidak ketinggalan. Semuanya mempunyai saham untuk mempercepat perkembangan bahasa Indonesia. Melalui pendidikan dan sarana komunikasi lainnya bahasa Indonesia dikenal dan digunakan sampai ke pelosok-pelosok. Hanya sebagian kecil dari orang tua-tua yang tidak pernah mendapat pendidikan secara formal yang tidak paham akan bahasa Indonesia.

Dalam komunikasi keagamaan bahasa Indonesia juga tidak kalah cepat perkembangannya. Banyak tempat ibadah yang dalam waktu-waktu yang lalu hanya menyelenggarakan khotbah-khotbahnya dalam bahasa daerah atau bahasa lainnya, sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Juga lembaga pendidikan keagamaan tradisional, yaitu pondok pesantren yang dahulu hanya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dan bahasa pergaulan, sekarang sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Itu dapat dipahami karena makin banyak santri yang datang dari daerah lain yang tidak memahami bahasa daerah-daerah tempat ia belajar. Juga karena para kiai dan santri dari daerah itu sendiri makin banyak yang dapat berbahasa

Indonesia sehingga tidak mengalami kesukaran dalam penggantian bahasa pengantar dan bahasa pergaulan di lingkungan pondok pesantren itu. Buku-buku keagamaan dalam bahasa Indonesia juga makin banyak yang diterbitkan, termasuk penerjemahan kitab-kitab suci. Di samping untuk turut memasyarakatkan bahasa Indonesia, penerbit dan juga pengarangnya menginginkan agar buku-bukunya dibaca oleh sebanyak-banyaknya orang. Itu hanya dapat dicapai kalau buku yang diterbitkan itu dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah atau bahasa asing.

Menurut catatan, dari sekian jumlah penerbitan akhir-akhir ini sebagian besar merupakan buku-buku agama (terutama Islam). Ini mempunyai arti bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi keagamaan akan meningkat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan bangsa yang di antaranya, tercermin dari penerbitan.

Usaha-usaha yang Perlu Dilakukan

Sudah dikatakan di depan bahwa perkembangan bahasa Indonesia sesudah masa pendudukan Jepang dan terutama sesudah kemerdekaan sangat pesat. Perkembangan yang pesat kalau tidak diimbangi dengan usaha-usaha untuk mengarahkannya akan menyebabkan timbulnya hal-hal yang dapat merugikan bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, pada tempatnyalah kiranya di sini disarankan untuk melakukan usaha-usaha sebagai imbalan kepesatan perkembangan bahasa Indonesia itu dengan tujuan untuk mengarahkan perkembangan itu, khususnya dalam bidang keagamaan.

Untuk pengarahannya itu dapat dikemukakan di sini di antaranya sebagai berikut.

1. Pembakuan Istilah

Kepesatan perkembangan bahasa Indonesia, khususnya dalam segi perbendaharaan kata-kata, memerlukan penambahan jumlah istilah. Baik oleh Pemerintah, dalam hal ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa maupun oleh pihak-pihak lainnya sudah dilakukan. Hasilnya, termasuk istilah agama, juga sudah sama-sama kita lihat. Tentu saja, untuk perkembangan bahasa Indonesia di masa mendatang jumlah istilah itu masih perlu ditambah. Yang dirasakan mendesak dalam waktu sekarang ini adalah "membakukan istilah-istilah agama". Pembakuan itu harus dilakukan, baik dalam segi bentuk maupun dalam segi arti agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam usaha pembakuan istilah agama ialah bahwa istilah itu banyak yang sudah dan akan diambil dari bahasa yang dalam banyak hal berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah karena bahasa sumber istilah itu ialah bahasa yang dipakai dalam kitab suci agama itu sendiri atau bahasa para penziarnya. Juga perlu diperhatikan adanya kecenderungan para pemeluk agama untuk sedapat-dapatnya berusaha menyamakan atau mendekatkan istilah agama dalam bahasa Indonesia dengan istilah dalam bahasa sumbernya. Satu di antara penyebab kecenderungan ini adalah adanya satu anggapan bahwa satu kata dalam bahasa Arab umpamanya sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

2. Transliterasi

Huruf yang dipakai secara resmi untuk menuliskan bahasa Indonesia adalah huruf Latin. Huruf inilah yang dikehendaki oleh Pemerintah agar diketahui oleh semua warga negara Indonesia. Huruf itu juga yang diajarkan di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hasilnya dapat sama-sama kita lihat sendiri; huruf itulah di Indonesia yang paling luas tersebar dan paling banyak digunakan.

Buku-buku, surat kabar, majalah, dan media tertulis lainnya sebagian besar, kalau tidak boleh dikatakan semuanya, ditulis dengan huruf Latin. Sementara itu, beberapa agama, kitab sucinya ditulis dengan huruf non-Latin. Kecuali itu, juga banyak buku agama yang ditulis dengan huruf non-Latin. Karena kelainan huruf yang digunakan itulah, sedikit atau banyak tentu ada pengalihan huruf dalam komunikasi tertulis atau transliterasi.

Agar ada kesegaran dalam transliterasi sehingga tidak menimbulkan salah paham, perlu juga ada pembakuan. Akan tetapi, dalam soal transliterasi ini juga kita perlu berhati-hati karena yang dialihhurufkan itu bukan sembarang huruf, melainkan huruf yang dapat dikaitkan dengan agama. Saya dapat mengambil contoh dalam transliterasi Arab ke Indonesia. Dalam penggunaannya dalam literatur Islam sering atau lebih umum dengan menggunakan sistem transliterasi "*Encyclopedia of Islam*". *System Encyclopedia of Islam* ini juga digunakan oleh *Library of Congress*.

Demikian beberapa hal yang dapat saya kemukakan sebagai sumbangan pikiran dalam Kongres Bahasa Indonesia III ini.

Wasallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL

Letjen TNI Sayidiman Suryohadiprojo
Lembaga Pertahanan Nasional

Maksud Ketahanan Nasional

Meskipun terdapat usaha-usaha yang kuat untuk mempersatukan umat manusia dan menjamin perdamaian dunia serta kesejahteraan bangsa-bangsa, tetapi di pihak lain dunia masih tetap diliputi oleh pertentangan-pertentangan yang hakikatnya bersumber pada kepentingan nasional bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa pada umumnya masih menempatkan kepentingan nasional mereka masing-masing sebagai nilai tertinggi dalam pergaulan internasional.

Pengajaran kepentingan-kepentingan nasional itu dilakukan dengan berbagai sarana dan metoda yang tersedia, baik berupa ideologi, diplomasi, ekonomi, budaya, teknologi maupun kekuatan militer. Oleh karena sarana dan metoda ini terus berkembang dan meningkat, sesungguhnya kelangsungan hidup tiap-tiap bangsa di dunia nyata-nyata terancam.

Usaha bangsa Indonesia untuk memberikan isi dan bobot kepada kemerdekaan yang telah diraihinya dengan perjuangan yang penuh pengorbanan, tidak luput dari kenyataan yang terdapat dalam pergaulan internasional itu. Oleh karena itu, usaha memberikan isi kepada kemerdekaan tak dapat dilepaskan dari kemungkinan ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa kita. Lain dari itu, usaha untuk memberikan isi dan bobot kepada kemerdekaan tidak lepas dari kondisi intern bangsa kita, di mana masalah pertambahan penduduk yang begitu hebat (khususnya di Pulau Jawa) menimbulkan problema yang tidak ringan. Pemberian isi kepada kemerdekaan tidak dapat dilakukan secara santai untuk mencapai keadaan yang memuaskan 200-300

tahun dari sekarang, bahkan waktu 100 tahun adalah terlampau lama. Desakan-desakan intern dan ekstern tidak memberikan kesempatan waktu yang panjang kepada kita dan lain dengan apa yang telah dialami bangsa-bangsa Eropa Barat (+ 300 tahun), Amerika Serikat (+ 200 tahun), Jepang (+ 70 tahun), dan lain-lain. Oleh sebab itu, dituntut penyelenggaraan pengisian kemerdekaan yang lebih cepat dan ini menghendaki kondisi bangsa tertentu, yaitu adanya kondisi dinamik yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Dengan itu hendaknya dapat dihadapi dan diatasi semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar atau timbul dari dalam sehingga terjaminlah kelangsungan hidup bangsa dan dapat dicapailah tujuan perjuangan nasional. Kondisi dinamik inilah yang dinamakan ketahanan nasional.

Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat dan Sifat Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional atau kondisi dinamik bangsa yang dikemukakan sebelumnya pada hakikatnya adalah resultante dari tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional. Oleh sebab itu, harus senantiasa dipelihara hubungan timbal-balik antara dua faktor ini yang dapat dibedakan, tetapi tak dapat dipisahkan. Meskipun dalam periode tertentu perjuangan bangsa harus diberikan prioritas atau titik berat kepada salah satu dari dua faktor itu, faktor lain tak boleh ditelantarkan. Kelalaian memelihara hubungan ini akan berakibat menyedihkan untuk kehidupan bangsa.

Usaha untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional harus meliputi seluruh kehidupan nasional yang dapat dibagi dalam aspek-aspek alamiah dan aspek-aspek sosial. Aspek alamiah dapat dibagi dalam keadaan geografi negara, keadaan penduduk, dan keadaan alam, sedangkan aspek sosial dapat dibagi dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Semua aspek kehidupan bangsa ini perlu digerakkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional yang terus meningkat. Dalam usaha itu harus dijamin pula hubungan timbal-balik antara semua aspek dan tidak terjadi pengotak-ngotakan tiap-tiap aspek karena kehidupan itu adalah utuh dan manunggal.

Fokus seluruh usaha itu pada hakikatnya adalah manusia Indonesia karena kondisi dinamik yang berisikan keuletan dan ketangguhan itu nyata-nyata harus terpancar dari manusia. Keuletan dan ketangguhan manusia Indonesia yang dapat membuat semua aspek kehidupan bangsa menjadi berfaedah untuk kesejahteraan dan keamanan nasional. Manusia Indonesia yang menjadi

pengemban dan penyelenggara falsafah dan ideologi Pancasila, dan sebaliknya, juga memperoleh inspirasi daripadanya. Kehidupan politik yang konstruktif dan membangun adalah hasil pemikiran dan perbuatan manusia. Demikian pula keberhasilan bangsa untuk memperoleh penghargaan dan kerja sama dari bangsa-bangsa lain.

Betapa pun pentingnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi realisasinya dalam kehidupan hanya mungkin melalui manusia yang dapat hidup berdisiplin, mampu berpikir dan bekerja keras, serta tahu bekerja sama dengan manusia lainnya, dan produktivitas yang diharapkan meningkat tak mungkin tanpa itu.

Keinginan memperkembangkan budaya bangsa amat bergantung kepada kreativitas dan ketekunan manusia Indonesia, sedangkan usaha untuk menjamin keamanan nasional amat tergantung kepada kemampuan dan kualitas manusia, betapa pun pentingnya peranan peralatan. Oleh sebab itu, usaha menjamin ketahanan nasional dalam analisis terakhir amat ditentukan oleh kemampuan dan kesediaan manusia Indonesia sendiri.

Peranan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pembinaan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional tak mungkin ada apabila bangsa itu tidak memiliki identitas dan harga diri. Bahasa Indonesia yang merupakan produk perjuangan nasional kita mempunyai saham penting untuk memberikan identitas tersendiri pada bangsa kita. Meskipun terdiri dari sekian banyak suku bangsa yang mempunyai berbagai bahasa sendiri ditambah dengan besarnya jumlah dialek, tetapi kita telah berhasil mengkreasikan bahasa nasional yang digunakan di seluruh wilayah nasional yang luas itu. Inilah jasa Sumpah Pemuda tahun 1928 dan perjuangan setelah itu untuk memberikan wujud kepada sumpah itu.

Bahasa nasional yang merupakan hasil perjuangan itu menimbulkan harga diri pada manusia Indonesia karena kita telah dapat menghasilkan sesuatu yang tidak mudah dan belum dapat dicapai oleh banyak bangsa lain. Harga diri ini memperkuat keteguhan hati dan kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam.

Bahasa nasional kemudian mempersatukan bangsa yang demikian binnekannya karena memungkinkan komunikasi yang lancar antara manusia yang satu dengan yang lain, sekalipun berasal dari beraneka ragam suku bangsa. Contoh yang paling jelas adalah Timor Timur dan Irian Jaya pada tahun

1962. Betapa hebat peranan bahasa Indonesia untuk membawa kawan-kawan kita di daerah-daerah untuk dengan cepat turut dalam kehidupan nasional bangsa Indonesia. Dan persatuan nasional itu merupakan tonggak utama untuk terpeliharanya kemerdekaan bangsa.

Adanya bahasa Indonesia juga memungkinkan kita untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa negara dan bangsa Indonesia itu merupakan kenyataan. Kita tahu betapa banyak orang di luar negeri menyangsikan apakah Republik Indonesia benar-benar dapat berdiri dan berfungsi mengingat luasnya wilayah yang terbagi-bagi dalam pulau-pulau dan perairan yang besar jumlahnya. Belum lagi kesangsian dan, bahkan skeptisisme terhadap kemampuan bangsa Indonesia yang di masa lalu dijajah begitu lama oleh suatu bangsa yang jauh lebih kecil jumlahnya dan amat jauh letak negaranya. Adanya bahasa Indonesia sedikit banyak memaksa golongan-golongan yang sangsi itu untuk berpikir lain dan melihat bangsa Indonesia dengan penilaian baru.

Akan tetapi, kita menyadari bahwa dalam dunia abad ke-20 ini dan yang masih dikuasai oleh sikap bangsa-bangsa untuk menjamin kepentingan nasionalnya masing-masing, kerja sama antara bangsa-bangsa hanya mungkin kalau ada sikap saling menghargai, sedangkan biasanya suatu bangsa baru dihargai apabila ia dapat menunjukkan prestasi kongkret dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam abad ke-20 ini prestasi itu tidak dapat lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin tersebar luas ilmu dan teknologi di kalangan rakyat suatu bangsa, apalagi dengan mutu yang tinggi, semakin besar jaminan adanya prestasi di berbagai bidang kehidupan bangsa, asalkan dibarengi dengan sikap hidup yang sesuai, yaitu adanya disiplin, keuletan, dan ketangguhan.

Bahasa Indonesia memberikan kemungkinan untuk menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu menjadi milik bangsa kita, yakni dengan jalan mengalihbahasakan bahasa-bahasa asing yang bangsanya memiliki ilmu dan teknologi itu, dan setelah berada dalam bahasa Indonesia, penyebarannya di kalangan luas rakyat kita menjadi suatu hal yang relatif mudah. Dengan begitu, lambat-laun rakyat kita turut memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang begitu penting untuk mendorong prestasinya dalam kehidupan. Sekaligus ini merangsang kemajuan berpikir pada rakyat banyak sehingga senantiasa dapat mengikuti perkembangan umat manusia masa sekarang maupun masa mendatang. Itulah sebabnya, mengapa amat penting suatu bangsa mempunyai bahasa sendiri dan tidak menggantungkan diri pada suatu bahasa asing. Tidak mungkin rakyat banyak mengolah pikiran dan men-

capai kemajuan berpikir melalui suatu bahasa asing.

Memang untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa-bangsa lain kita perlu menguasai bahasa-bahasa asing, tetapi ini merupakan fungsi untuk sebagian kecil bangsa yang memang mampu untuk sungguh-sungguh berbuat demikian. Akan tetapi, kewajibannya sekaligus adalah mengindonesiakan hal-hal yang diperoleh dari bahasa asing itu agar kemudian yang berfaedah dapat pula diserap oleh rakyat banyak yang tidak dapat diharapkan menguasai bahasa asing. Hal-hal ini semua besar pengaruhnya pada ketahanan nasional sebab inilah yang memperkuat ketangguhan bangsa dan terwujudnya kekuatan nasional.

Pengaruh Pembinaan Ketahanan Nasional terhadap Pembinaan Bahasa Indonesia

Usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional akan mempengaruhi pembinaan bahasa nasional kita sebab akan terasa dorongan kepada seluruh bangsa kita untuk memupuk keyakinan bahwa hal-hal yang bersifat nasional adalah penting.

Kadang-kadang ada kecenderungan, terutama di kalangan elite dan cendekiawan, untuk mengarah kepada kehidupan universal dan internasional sehingga mengabaikan dan, bahkan menganggap tidak perlu adanya hal-hal yang bersifat nasional. Akibatnya adalah bahwa kalangan itu lebih mementingkan bahasa asing daripada bahasa nasional.

Tidak dapat diingkari bahwa akhirnya kita ingin menciptakan umat manusia yang sejahtera dan dunia yang damai. Akan tetapi, ini tidak mungkin dicapai tanpa memperhatikan keadaan nasional sendiri, apalagi dengan kerasnya kenyataan bahwa bangsa-bangsa lain menempatkan kepentingan nasionalnya sebagai ukuran tertinggi dalam pergaulan internasional.

Kalau ini disadari, mau tak mau seluruh kalangan bangsa kita akan sadar pula bahwa pembinaan bahasa nasional adalah amat penting. Juga ada tokoh-tokoh cendekiawan kita yang pernah menyatakan bahwa bahasa Indonesia tidak memiliki persyaratan untuk dapat dipakai sebagai bahasa dalam ilmu pengetahuan.

Kita menyadari bahwa bahasa Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan, tetapi apakah benar bahwa kekurangan-kekurangan itu tidak dapat diatasi? Khususnya mengenai ilmu pengetahuan itu, apakah benar bahasa Indonesia secara permanen tak mampu untuk dikembangkan sehingga da-

pat digunakan dalam ilmu pengetahuan? Tentu tak dapat dihindari bahwa diadakan pengindonesiaan dari kata-kata yang berasal dari bahasa asing karena pengertian itu sukar dibentuk dari bahasa Indonesia yang asli. Akan tetapi, dunia, seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang.

Hendaknya kita menyadari apa yang menjadi problema pokok dan tidak memutarbalikkannya. Problema kita adalah memajukan kemampuan rakyat agar terwujud kekuatan nasional yang ulet dan tangguh. Untuk itu, antara lain diperlukan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan rakyat banyak. Agar hal itu dapat tercapai, ilmu dan teknologi harus dapat dikomunikasikan melalui bahasa yang dikuasai rakyat banyak, yaitu bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia harus dikembangkan kemampuannya sehingga dapat menjalankan fungsi itu. Jelas bahwa tidak ada pilihan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal ini karena bahasa asing tak akan mungkin dikuasai rakyat banyak. Jadi, merupakan tantangan kepada kaum cendekiawan Indonesia untuk dapat menjadikan bahasa Indonesia bahasa dalam ilmu pengetahuan sebagaimana Jepang pada akhir abad ke-19 juga telah mampu membuat bahasanya menjadi sarana yang efektif untuk meresapkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, lambat-laun bahasa Indonesia akan menjadi sarana komunikasi yang lengkap untuk semua aspek kehidupan manusia dan berbahasa Indonesia yang baik merupakan kebanggaan sebagaimana juga bangsa-bangsa lain bangga dan sadar akan berbahasa sendiri secara baik.

Prospek Masa Depan

Prospek masa depan bahasa Indonesia akan cerah sekali andai kata hal-hal yang dikemukakan di atas dapat kita wujudkan. Kalau kita melihat sejarah Eropa, bahasa Prancis meluas di seluruh benua Eropa sebagai akibat kemenangan Napoleon dan kecemerlangan pemerintahannya serta hasil-hasil pembangunannya. Demikian pula perluasan penggunaan bahasa Inggris di dunia. Terdesaknya bahasa Prancis adalah karena kemenangan Amerika Serikat dan Inggris dalam Perang Dunia ke-2 serta peranan Amerika Serikat dalam pembangunan dunia setelah perang itu. Juga meluasnya bahasa Rusia di Eropa Timur adalah akibat kemenangan Uni Soviet dalam Perang Dunia ke-2 dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara itu untuk mengimbangi kemampuan lawannya kemudian, yaitu Amerika Serikat. Jadi, bahasa Indonesia akan meluas kalau kita mampu memancarkan kewibawaan ke keliling kita dan, bahkan ke santero dunia melalui ketahanan nasional

yang kukuh, yang terbentuk oleh tingginya kesejahteraan nasional dan terjaminnya keamanan nasional kita, sedangkan itu semua adalah hasil dari prestasi yang terus meningkat dalam berbagai aspek kehidupan bangsa sebab kewibawaan itu akan mempengaruhi bangsa-bangsa lain yang merasa perlu memelihara hubungan yang baik dengan bangsa Indonesia, untuk mempelajari bahasa kita. Yang langsung akan terpengaruh adalah wilayah Asia Tengah, kemudian Asia Pasifik dan Timur Tengah; baik karena alasan-alasan politik, ekonomi, budaya, agama maupun pertahanan keamanan. Jadi, ini sangat bergantung kepada tekad bangsa Indonesia sendiri untuk menciptakan kewibawaan yang diperlukan itu. Tanpa itu, bangsa-bangsa lain akan tidak menghiraukan bahasa Indonesia sekalipun jumlah bangsa Indonesia adalah nomor 5 di dunia, letak negaranya ada di persimpangan jalan antara dua benua dan dua samudra, atau adanya kekayaan alam yang besar. Akan tetapi, kalau kewibawaan itu ada, besarnya bangsa, letak geografi negara, dan potensi kekayaan alam akan mendorong perluasan pengaruh bahasa Indonesia. Di samping itu, bahasa Indonesia yang relatif mudah dipelajari, antara lain karena menggunakan huruf Latin, akan turut mendorong bangsa-bangsa lain untuk mempelajari bahasa kita. Makin meluasnya bahasa Indonesia digunakan di dunia, berarti turut mempertinggi kewibawaan bangsa Indonesia. Peranan ini nanti dapat kita manfaatkan untuk turut menimbulkan persatuan dan kesejahteraan umat manusia dan perdamaian dunia.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN MODERN

Sultan Takdit Alisjahbana

Kepada saya diminta untuk menyiapkan kertas kerja tentang bahasa Indonesia sebagai sarana pemodernan manusia Indonesia. Permintaan itu saya terima dengan girang hati karena sesungguhnya fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemodernan manusia Indonesia jarang sekali dikemukakan. Orang telah girang bahwa bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, (4) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah, (5) bahasa resmi kenegaraan, (6) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (7) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan (8) bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern (Halim, 1976:25).

Kita lihat bahwa dalam daftar fungsi yang saya kutip dari kitab *Politik Bahasa Nasional* (Halim, Editor, 1976:25) ini perkataan *modern* hanya tampil sekali dan di akhir sekali pula, padahal apabila kita ikuti perkembangan pendidikan modern di negeri kita dan menghubungkannya dengan bangkitnya bahasa Indonesia yang mendapat perumusan yang menentukan dalam Sum-pah Pemuda, dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dan dalam konstitusi kita, kita tidak dapat mengelakkan tiba pada kesimpulan bahwa fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana membentuk bangsa Indonesia yang modern dan kebudayaan Indonesia yang modern adalah salah satu tugasnya yang penting, kalau tidak terpenting sebab kita tidak dapat menolak bahwa kekalahan bangsa kita terhadap bangsa Portugis, Sepanyol, Inggris, dan terutama Belanda pada hakikatnya adalah kekalahan kebudayaan kita terhadap kebudayaan modern. Untuk memahamkan ini, hendaklah kita menganalisis pengertian

kebudayaan dalam arti yang luas sehingga kita dapat melukiskan perbedaan maupun persamaan antara berbagai-bagai kebudayaan. Agar dapat membedakan kebudayaan tradisi kita dari kebudayaan modern cukuplah apabila di sini saya kemukakan dengan bersahaja bahwa segala kebudayaan adalah penjelmaan nilai-nilai yang dapat kita klasifikasi dalam nilai teori atau ilmu, nilai ekonomi, nilai agama, nilai seni, nilai kuasa, dan nilai solidaritas. (Alisjahbana, 1966, 1975). Dalam perkembangan di dunia tampak kepada kita bahwa zaman *Renaissance* yang menjadi pangkal dari kebudayaan modern adalah permulaan perubahan susunan nilai-nilai dari konfigurasi yang dikuasai oleh nilai-nilai agama dan seni kepada konfigurasi yang dikuasai oleh nilai-nilai ilmu dan ekonomi. Kebudayaan yang dikuasai oleh nilai agama dan seni saya sebut kebudayaan *expresif* dan di dalamnya amat penting kedudukan perasaan, intuisi, dan imajinasi, sedangkan kebudayaan yang dikuasai oleh nilai ilmu dan ekonomi saya sebut kebudayaan *progresif* yang melahirkan teknologi. Dalam ilmu dan ekonomi amat penting kedudukan rasio manusia yang logikanya sejalan dengan hukum-hukum alam. Kebudayaan tradisi kita adalah kebudayaan *expresif*. Jadi, dikuasai oleh agama dan seni seperti umumnya kebudayaan pramodern.

Dalam kebudayaan *expresif* apabila orang berbicara tentang ilmu, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu agama atau ilmu gaib. Cara berpikir ilmu yang objektif dengan rasio menyelidiki alam tidak timbul di negeri kita sebelum kedatangan orang Barat.

Pada ketika itu negeri kita terbagi dalam sejumlah kerajaan yang masing-masing berdiri sendiri dan antara sesamanya sering berperang takluk-menaklukkan. Pada dasarnya kerajaan-kerajaan itu bersifat feodal, raja-rajanya yang dikelilingi oleh pembesar-pembesar yang tersusun bertingkat-tingkat di seluruh negara mempunyai kekuasaan yang mutlak. Di bawah struktur kefeodalan ini terdapatlah desa-desa yang sepenuh-penuhnya takluk kepada susunan feodal itu, tetapi ke dalam mempunyai struktur sendiri, yang lain coraknya, yaitu lebih demokratis kalau dibandingkan dengan struktur kefeodalan yang bertingkat-tingkat dari atas sampai ke bawah. Dalam kedua struktur itu, pemerintahan, hukum, ekonomi keagamaan, dan kesenian bukanlah keaktifan manusia yang terpecah-pecah, tetapi sekaliannya amat rapat hubungannya, tidak nyata di mana yang satu mulai dan yang lain berakhir dan sekaliannya berlaku di bawah naungan anggapan dan konsep-konsep agama yang tersimpul dalam mitos yang kudus. Dalam struktur feodal, raja-raja dianggap keturunan dewa sebagai sisa zaman Hindu atau keturunan nabi dalam suasana kebudayaan Arab—Islam yang di sisi itu pula men-

jabat kedudukan khalifah. Dalam suasana desa tingkat-tingkat kedudukan manusia tidak besar bedanya, tetapi suasana keagamaan tak kurang berkuasa dalam hubungan adat-istiadat yang mengatur kehidupan sekalian penduduk desa dan yang dianggap berasal dari nenek-moyang yang sama yang arahnya dianggap selalu masih ada di sekitar desa itu.

Dalam kedua suasana ini, yaitu baik dalam suasana kefeodalan kerajaan yang mentereng dan penuh kesenian maupun dalam suasana kerukunan dan gotong-royong di desa, manusia terikat kepada hukum kerajaan yang ditentukan dari atas dan kepada keakraban kekeluargaan dengan adat-istiadatnya yang mengekang perkembangan individu yang tak sesuai dengan suasana solidaritas kedesaan dan kekeluargaan. Dilihat dari jurusan ini masyarakat Indonesia pada ketika bertemu dengan orang-orang Eropa sebagai pelajar, pedagang, malahan perampok adalah suatu masyarakat yang statis. Sebaliknya, bangsa Eropa yang meninggalkan tanah airnya dan mengarungi lautan dan samudra yang mahaluas sehingga sampai ke negeri kita, mempunyai sejarah yang lain sekali.

Dilihat dari konfigurasi nilai-nilainya, kita boleh menganggap bahwa kebudayaan Abad Pertengahan atau *pra-Renaissance* di Eropa itu tak banyak bedanya dengan kebudayaan bangsa kita pada ketika orang-orang Eropa itu menjejakkan kakinya di negeri kita. Untuk mengerti hakikat pertemuan yang berakibat penjajahan bangsa kita itu tak boleh tidak kita harus menganalisis apakah yang berlaku dalam *Renaissance* dan bagaimana manusia *Renaissance* itu tumbuh dan berkembang dalam tiga-empat abad yang terakhir ini sehingga menjadi masyarakat dan kebudayaan modern.

Dalam hubungan ini agaknya tidak ada salahnya kalau kita kembali kepada sejarah umat manusia agak jauh, yaitu ke zaman ketika bangkitnya kebudayaan-kebudayaan yang besar di dunia sekitar abad kelima sebelum kurun Masehi. Ketika itu boleh dikatakan serempak berkembang kebudayaan tinggi dengan lahirnya ahli-ahli pikir dan pembentuk-pembentuk agama: di Cina dengan bangkitnya Kong Hu Chu, Moti, Laotze, di India Mahavira, Buda, dan kaum Upanisad, di Persi Sarasustra, di Tanah Arab nabi-nabi sebelum Nabi Isa dan di Yunani filsuf-filsuf dan ahli pikir seperti Plato, Heraklitos, dan lain-lain. Hingga zaman kita kebudayaan-kebudayaan inilah yang tersebar ke seluruh dunia dan kita malahan dapat berkata bahwa sekalian kebudayaan yang lain yang tidak bertemu dan dipengaruhi oleh salah satu daripada kebudayaan-kebudayaan tinggi dari sekitar abad ke-5 sebelum kurun Masehi itu hingga sekarang tetap primitif. Kita tahu bahwa kebudayaan Cina menyebar ke Korea, Jepang, Indo-Cina, kebudayaan India menguasai Burma,

Sailon, Thailand malahan terus ke Cina dan Jepang, dan pada suatu ketika menguasai kepulauan kita. Dari nabi-nabi di Jazirah Arab bangkit agama Yahudi, agama Kristen dan kemudian agama Islam yang meliputi sebagian besar dari dunia hingga zaman kita.

Di antara kebudayaan-kebudayaan yang bangkit dan berkuasa sejak abad ke-5 sebelum kurun Masehi itu kebudayaan Yunani mempunyai kedudukan yang istimewa sekali, sedangkan kebudayaan-kebudayaan yang lain itu sedikit banyaknya dapat disebut kebudayaan yang amat dikuasai oleh perasaan keagamaan dengan mitos dan upacaranya, di Yunani ahli-ahli atau filsuf dan ahli-ahli ilmunya menembus mitos agama dan mulai dengan bebas berpikir dan menyelidiki hukum-hukum alam di sekitarnya.

Demikianlah timbul sistem-sistem pikiran atau filsafat-filsafat sekitar nama-nama Plato, Aristoteles, Heraclitus, Empedokles dan banyak lagi disertai oleh berbagai-bagai ahli ilmu dalam berbagai-bagai lapangan

Pada hakikatnya kebudayaan Yunani dengan pemikirannya yang bebas dan minatnya yang besar untuk menyelidiki proses alam dengan objektif itulah yang menjadi sumber daripada ilmu yang dengan teknologi menandai zaman kita. Bangsa Rumawi dan demikian juga pemeluk agama Kristen yang pertama sekali bertemu dengan kebudayaan Yunani itu kurangnya memanfaatkannya sehingga tidaklah kentara benar pengaruhnya atas kebudayaan Rumawi. Demikian juga atas kebudayaan Kristen sampai dengan Abad Pertengahan. Dalam hubungan ini, dapat kita berkata bahwa adalah kebudayaan Islam yang sesungguhnya mewarisi kebudayaan Yunani dengan perantaraan terjemahan-terjemahan yang luas dari filsafat dan ilmu yang ditinggalkan oleh ahli filsafat dan ilmu Yunani. Di zaman kita tentang hal kegiatan filsafat dan ilmu ahli-ahli Islam, baik di timur maupun di barat di bawah pimpinan raja-raja Umayyah, Abassiyah, dan lain-lain, tak dapat disangsikan lagi. Masa kebesaran kebudayaan Islam dari abad ketujuh sampai abad kedua belas adalah masa kejayaan pemikiran dan penyelidikan ilmu, masa penerjemahan dan penulisan buku, masa perkembangan perpustakaan di mana-mana di dunia Islam, dari batas Cina sampai ke Lautan Atlantik. Akan tetapi, pada abad ke-13 dan selanjutnya kelihatan pasang surut. Ulama-ulama yang konservatif mulai menentang pemikiran dan penyelidikan yang bebas yang menjadi dasar perkembangan ilmu itu.

Pada ketika itulah bangkitnya Eropa sesudah mengalami bermacam-macam keseregangan dan konflik dalam dirinya sendiri oleh berbagai-bagai sebab. Pertama sekali di Eropa bangkit semangat perang salib yang berakibat

terbebasnya beribu-ribu budak yang memperkuat kedudukan penduduk kota yang menjadi pusat perdagangan dan kerajinan. Olehnya mengalir ke Eropa hasil-hasil kebudayaan Yunani, Bisantium, dan dunia Islam. Ketika itu bangkit di Italia dan di Eropa Utara negara-negara kota yang mengembangkan perdagangan dan kerajinan dan meletakkan dasar kebudayaan borjuis yang sekular atau keduniaan. Suatu sebab pula adalah pertentangan antara kekuasaan Paus yang universal dengan kekuasaan raja-raja negara kebangsaan, yang mulai timbul dan yang disokong oleh kaum borjuis. Suatu humanisme timbul dan berkembang di Eropa yang rapat berhubungan dengan kebudayaan Yunani klasik. Itulah permulaan zaman *Renaissance* yang ditandai oleh bangkitnya negara-negara kebangsaan dengan bahasa-bahasa kebangsaan dalam suasana kebudayaan ini amat besar juga pengaruh terjemahan karangan ahli-ahli pikir Islam seperti Ibnu Rusyd.

Perkembangan politik di Eropa itu sejalan dengan perubahan yang amat besar dalam mentalitas bangsa-bangsa di Eropa. Zaman *Renaissance* yang diikuti oleh peperangan agama yang dahsyat menandai perkembangan akal atau rasio yang makin lama makin menentukan suasana kebudayaan di Eropa. Kerasionalan ini yang paling kuat adalah dalam kerajaan-kerajaan Eropa yang bersifat absolut, terutama di Prancis. Ketika itulah mulai lahir pikiran-pikiran tentang kebebasan, tentang hak-hak manusia dan martabat manusia yang sejalan dengan timbulnya pengertian-pengertian kedaulatan rakyat yang perlahan-lahan menyebarkan perasaan tak senang di kalangan rakyat. Dalam suasana ini Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan lain-lain merumuskan bahwa sumber kekuasaan terletak pada rakyat. Terutama karangan Rousseau, *Social Contract*, menganggap kekuasaan pemerintah itu hanyalah berdasarkan kontrak atau perjanjian antara yang memerintah dan yang diperintah. Pengaruhnya atas pemikiran tentang politik dalam abad ke-18 dan seterusnya amat besar.

Amerika adalah negara yang pertama yang bereksperimen dengan pikiran-pikiran yang baru tentang perhubungan antara rakyat dan pemerintah di negara-negara kebangsaan. Dalam tahun 1789, revolusi demokrasi itu dipindahkan ke Eropa, ketika *Estate General Prancis* diubah menjadi *National Assembly*, yang merumuskan dalam konstitusi hak-hak manusia. Revolusi Prancis itu bukan hanya menjadi kejadian yang penting dalam pertumbuhan politik Prancis, tetapi mempengaruhi kehidupan politik seluruh Eropa, Amerika Selatan dan malahan kita dapat berkata bahwa negara-negara Asia dan Afrika sekarang pun menerima pengaruh itu. Dengan revolusi Prancis itu tertutuplah kekuasaan lama yang biasa disebut *Ancient Regime*. Sepan-

jang abad ke-19 pikiran-pikiran tentang hak-hak manusia, tentang kemerdekaan dan kesamaan, tentang kedaulatan rakyat diperkembangkan, bukan saja dalam lapangan politik, dalam hak umum untuk memilih, dalam kesamaan tiap-tiap rakyat di depan hukum, tetapi juga dalam sistem wajib belajar dan dalam perlindungan yang sama bagi warga negara. Rakyat memegang kedaulatan menggantikan raja yang dahulu dianggap mendapat kekuasaannya dari Tuhan, tetapi ciri yang terpenting kebudayaan modern yang berpokok pada perkembangan sejak zaman *Renaissance* adalah kepercayaan akan kemungkinan-kemungkinan manusia yang tiada berhingga, baik kesanggupannya untuk memikirkan dan mengetahui alam sekitarnya maupun untuk menguasainya. Kebenaran yang dikemukakan oleh agama terus-menerus mendapat serangan sejak zaman *Renaissance*. Cukup kita menyebut di sini ahli-ahli pikir dan ahli-ahli ilmu seperti Giordano Bruno, Copernicus, dan Galileo, yang berjuang dan menderita untuk kebenaran dan keyakinan yang baru diperoleh mereka. Dalam abad-abad yang berikutnya perjuangan ini diteruskan oleh ahli-ahli ilmu sebagai Linnaeus, Darwin, dan banyak lagi yang menyelidiki alam secara objektif.

Dalam abad ke-19 kekuasaan gereja telah sangat berkurang sehingga dapatlah orang sebagai Darwin mengumumkan buah pikirannya dengan tidak membahayakan hidupnya. Akan tetapi, jangan kita lupa bahwa antara *Renaissance* dan Darwin telah berkembang zaman *Aufklärung* atau pencerahan ketika akal manusia mencapai puncak keagungannya.

Ciri yang terpenting dari ilmu modern adalah ketatnya metode pemikirannya dan penyelidikannya yang menuju kepada ketelitian pengetahuan yang positif. Meskipun pada abad ke-14, ke-15, dan ke-16 telah kelihatan usaha-usaha untuk mengembangkannya, tetapi perkembangan yang sesungguhnya barulah dalam abad ke-17 ketika ahli-ahli ilmu yakin betul bahwa kesimpulan-kesimpulan ilmu mesti berdasarkan pengukuran sejauh mungkin yang dirumuskan dengan angka-angka. Kesadaran ini disiapkan oleh bermacam-macam perkembangan dalam pemikiran matematik. Pertama adalah pemakaian angka Arab yang telah umum dipakai orang di Eropa pada akhir abad ke-16. Pada permulaan abad ke-17 John Napier mendapat rangka inti perhitungan yang kemudian diikuti oleh pendapatnya yang terkenal: logaritma. Zaman itu pulalah kebiasaan kuno menambahkan dan mengurangkan dari kiri ke kanan diganti oleh cara menambah dan mengurangkan dari kanan ke kiri. Akan tetapi, lebih penting lagi untuk perkembangan kesadaran pikiran matematik adalah perubahan pikiran spekulatif yang dipimpin oleh pemikir-pemikir seperti Galilio (1564–1642), Harvey (1578–1657), dan Pascal (1623–1662).

Dalam zaman itu juga Fermat mengemukakan dengan sadar kalkulus kemungkinan dan dengan demikian diberinya dasar kepada teori tentang resiko yang di zaman kita menjadi bentuk ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu sosial mengemukakan hukum-hukumnya. Demikianlah tepat sekali John U. Nef berkata, "Kalau ada suatu masa yang dapat diutamakan sebagai masa ilmu modern mendapat bahasanya dan pertama-tama memakainya, maka masa itu adalah abad ke-17." Prosedur dan cara mengemukakan proposisi ilmu yang dipakai oleh Rutherford dan Einstein serta Poincare telah dipakai oleh Galileo dan Kepler dan Fermat. (*Harper Torch Books*, 1960:31)

Faktor yang lain dalam revolusi ilmu dalam abad ke-17 adalah timbulnya keyakinan bahwa proposisi ilmu itu hanya dapat dibuktikan dengan observasi dan eksperimen. Hal ini berarti perpisahan yang mutlak dari kebenaran agama dan seni yang menguasai semua kebudayaan sampai masa itu. Timbullah suatu kebenaran ilmu yang bersaing, malahan yang menyerang kebenaran agama seperti yang dikatakan terlebih dahulu. Metode-metode baru dan alat-alat baru diciptakan untuk mendapat rumusan yang baru daripada kebenaran ilmu.

Dengan terciptanya sikap, pikiran, dan metode ilmu yang baru ini kelihatanlah dalam abad-abad yang berikutnya pertumbuhan terus-menerus dari ilmu pengetahuan dalam arti yang seluas-luasnya. Ilmu menjadi ujung tombak yang lancip yang terus maju ke depan. Di sini tidaklah dimaksud untuk mengikuti perkembangan ilmu dalam berbagai-bagai disiplin dalam abad ke-18, ke-19, dan ke-20, tidak juga untuk menguraikan apa yang tercapai oleh ilmu dalam dua-tiga abad yang terakhir ini. Akan tetapi, perkembangan ilmu terus-menerus itu tidaklah mengherankan sebab oleh perkembangannya dan terutama oleh pemakaian dan penerapannya dalam teknologi, dalam pengobatan, dalam penghasilan barang-barang dan dalam cepatnya lalu-lintas dan komunikasi, orang banyak lambat-laun menyadari bahwa ilmulah yang memberikan harapan yang baru kepada manusia untuk kemakmurannya, kesehatannya, kesenangan, atau kegirangan hidupnya.

Tidaklah mengherankan bahwa lambat-laun ilmu bertambah lama bertambah tampil ke depan dan menduduki kedudukan yang tinggi dan sangat terpendang dalam dunia modern. Dalam hubungan ini, mesti juga diingatkan bahwa logika ilmu yang berdasarkan matematika itu bersifat umum untuk seluruh dunia, sedangkan hasil penyelidikannya dapat dicek segala orang, berbeda sekali dengan kebenaran agama yang berbeda menurut agama yang berbeda-beda. Demikianlah di mana-mana timbul universitas dilengkapi dengan

perpustakaan dan laboratorium tempat kemajuan ilmu dengan sengaja dan bersistem diusahakan. Dengan perantaraannya himpunan-himpunan ilmu, majalah, kongres-kongres, ilmu menjadi perhatian internasional, pertukaran ilmu, dan pengetahuan berlaku antara seluruh dunia. Dibandingkan dengan pengetahuan atau kebenaran agama yang bersifat statis dan terbentuk sekali untuk selama-lamanya sebagai wahyu Tuhan, pengetahuan ilmu tentang alam adalah dinamis, selalu berubah bertambah baik oleh eksperimen-eksperimen yang baru, dan oleh rumusan-rumusan yang baru berdasarkan terungkapkannya kenyataan yang baru.

Dengan perkembangan ilmu ini timbullah suatu sikap yang baru terhadap alam, bangkitlah suatu pemandangan dunia dan tercapailah satu suasana kebudayaan baru, yaitu suasana kemajuan berdasarkan pengetahuan manusia yang senantiasa bertambah. Hal itu berarti juga terus-menerus bertambahnya kekuasaan manusia atas alam. Bury (1955:64) menyatakan bahwa pikiran tentang kemajuan tidak ada dalam abad pertengahan, malahan tidak juga dalam waktu permulaan *Renaissance*, tetapi baru terwujud dalam abad ke-17 sebagai hasil penerimaan dua aksioma yang positif dari Cartesius: Kekuasaan akal atau budi manusia dan tak berubah-ubahnya hukum alam.

Kedua aksioma ini bersama-sama menghentikan otoritas gereja dan pemikir-pemikir Yunani dan Roma. Lambat-laun terjadilah perubahan dalam nilai-nilai kebudayaan dari kekuasaan nilai kekudusan agama menjadi kekuasaan nilai teori ilmu. Universitas dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang lain bertambah lama bertambah penting kedudukannya dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan bertambahnya terus-menerus pengetahuan manusia tentang hukum-hukum alam bertambah pula terus-menerus kekuasaan manusia atas alam dengan perantaraannya perkembangan teknologi untuk kepentingan manusia.

Apabila kita berbicara tentang teknologi sebagai hasil ilmu, janganlah kita lupakan bahwa pada hakikatnya perhubungan antara teknologi dan ilmu adalah bersifat dialektik. Pengetahuan yang baru tentang hukum-hukum alam, pendapatan yang baru tentang potensi-potensi alam tak dapat dielakkan membawa kemajuan teknologi, tetapi sebaliknya kemajuan teknologi memberikan kepada manusia alat-alat dan perkakas-perkakas yang baru, yang memungkinkan manusia mencapai pengetahuan yang lebih teliti serta hukum-hukum alam yang lebih umum. Akan tetapi, jelaslah bahwa sumbangan teknologi yang terpenting bukanlah pertama sekali memberi alat untuk eksperimen ilmu itu sendiri, tetapi adalah kekuasaan yang mahabesar yang diberikannya

kepada manusia, yang memungkinkan kemajuan masyarakat dan teristimewa ekonomi yang amat besar dalam abad-abad yang akhir ini.

Perkembangan teknologi dalam arti yang seluas-luasnya taklah lain daripada penyempurnaan tangan manusia, pencaindera manusia dan tenaga manusia. Hal itu berarti bahwa manusia dapat memperlipatgandakan hasil materi atau rohaninya tiada berhingga. Telah kita lihat bahwa dengan pendapatan hukum-hukum optik, manusia dapat memperbesar kesanggupan matanya sampai kepada yang sangat kecil dan yang sangat jauh. Kemajuan dan kepandaian membuat kapal dan pelayaran berakibat terdapatnya Amerika dan terbukalah jalan ke timur, dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Kemajuan ilmu pelayaran dan ilmu menghasilkan senjata selanjutnya memberikan kepada bangsa-bangsa Eropa kemungkinan untuk mendirikan kepada bangsa-bangsa Eropa kemungkinan untuk mendirikan kerajaan penjajahannya yang besar sehingga pada permulaan abad ke-20 hampir seluruh Asia dan Afrika dikuasai oleh negara-negara Eropa. Perkembangan pengangkutan yang amat penting untuk perdagangan atau untuk keaktifan politik mendapat dorongan yang kuat dari pendapatan mesin uap yang rapat berhubungan dengan pemakaian batu bara dan besi. Dalam abad ke-19 pengangkutan lebih maju lagi dengan pemakaian minyak untuk menggantikan batu bara. Akhirnya, tenaga listrik memungkinkan telekomunikasi antara daerah-daerah yang sangat jauh jaraknya. Dengan mesin terbang dan radio menjelmalah zaman baru. Jarak di dunia menjadi kecil sehingga kita dapat berbicara tentang satu dunia yang tiada berhingga banyaknya memberikan kemungkinan untuk bekerja sama, tetapi juga untuk berselisih malahan untuk berperang.

Pengaruh kemajuan teknologi tak kurang memajukan lapangan pertanian, peternakan dan penangkapan ikan, tetapi adalah industri yang mendapat dorongan yang terkuat. Revolusi industri yang bermula di tanah Inggris pada abad ke-18 tersebar ke seluruh Eropa dan Amerika dan lambat-laun ke seluruh dunia. Demikianlah kebudayaan modern disebut orang kebudayaan atau sivilisasi industri.

Pada hakikatnya revolusi industri itu tidaklah lain daripada penyesuaian kerajinan tentang penghasilan barang-barang kepada sikap progresif daripada ilmu dan teknologi yang sebelum revolusi industri masih sangat dipengaruhi oleh konsep agama dan seni, sedangkan tangan masih menjadi alat yang terpenting untuk pengahasilan barang-barang. Permbaruan yang dibangkitkan oleh revolusi industri adalah penghasilan barang-barang murah dalam jumlah yang bertambah lama bertambah besar. Hal itu bermula di Inggris dan ter-

utama sekali dihubungkan dengan pemakaian besi tuangan dan bahan bakar batu bara. Kemajuan Inggris itu antara lain terjelma dalam perkembangan jaringan jalan kereta api, bangkitnya paberik-paberik tekstil, dan beratus-ratus jenis mesin dan alat-alat.

Pada bagian kedua abad ke-19 pimpinan tentang teknologi dan industri berpindah ke daratan Eropa, terutama Jerman dan Amerika Serikat. Jerman dan Amerika memakai berbagai-bagai jenis bahan yang baru maupun berbagai-bagai sumber dan bentuk tenaga, meskipun besi dan batu bara masih banyak dipakai. Baru sesudah Perang Dunia I amat cepat berkembang industri-industri yang memakai listrik, campuran-campuran kimia, minyak tanah, dan berbagai-bagai logam yang ringan. Ketika itu pula mulailah bertambah penghasilan auto, radio, mesin terbang, dan barang-barang dari bahan-bahan sintesis: dari batu bara, misalnya, dijadikan orang bermacam-macam bahan kimia untuk menghasilkan aspirin, warna, dan bahan peletus. Suatu ciri dari industri modern ialah pentingnya ilmu kimia. Dengan mengolah tenaga dan sifat butir-butir molekul, atom, dan subatom dapatlah dicapai penguasaan zat dan tenaga yang jauh lebih halus dan tepat dari sebelumnya.

Setelah menguraikan sejarah bangkitnya masyarakat dan kebudayaan modern dan menguraikan sekedarnya ciri-ciri sikap hidupnya atau konfigurasi nilai-nilainya ciri-ciri sikap hidupnya atau konfigurasi nilai-nilainya dapatlah kita mengemukakan hubungannya dengan tujuan nasional pembangunan bangsa kita.

Kita tak dapat menolak bahwa meski bagaimana sekalipun besar penghinaan dan penderitaan bangsa kita dalam zaman penjajahan dahulu, proses penjajahan itu adalah proses yang terpenting yang memasukkan bangsa kita ke dalam orbit kebudayaan modern yang baru saja kita uraikan sejarah dan ciri-cirinya. Ketika bangsa kita bertemu dengan bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan Inggris yang telah mengalami revolusi masyarakat dan kebudayaan sejak zaman *Renaissance*, bangsa kita, seperti boleh dikatakan semua bangsa-bangsa Asia, masih dalam masyarakat dan kebudayaan yang dengan ringkas dapat kita sebut kebudayaan pramodern, yang bersifat ekspresif, yaitu dikuasai oleh nilai agama, seni, dalam hubungan sistem kefeodalan, dan solidaritas kedesaan.

Ini bukan berarti bahwa di seluruh Asia tak pernah ada tumbuh ilmu. Kita tentu sering mendengar tentang ilmu di negeri Cina dan pendapatan-pendapatan seperti mesiu dan kertas. Demikian juga kita pernah mendengar tentang ilmu bahasa, ilmu bintang, dan lain-lain di India.

Peristiwa dunia Islam dalam zaman jayanya mengenal kehidupan ilmu yang gilang-gemilang.

Prof. Ho Peng Yoke berkata dalam pidato umumnya (1967) di Kuala Lumpur bahwa meski bagaimana sekalipun berkembang ilmu di negeri Cina Kuno, tetapi perkembangan ilmu yang sesungguhnya baru bermula ketika bangsa Cina berhubungan dengan kebudayaan Eropa sesudah zaman *Renaissance*, yaitu kebudayaan Eropa modern. Kebudayaan Cina tidak dapat mengembangkan ilmunya oleh karena dalam pemikiran ilmu berkuasa teori yang disebutnya *pseudoscientific* dan lagi pula sejenis *obscurantisme*. Tujuan pemikiran ilmu pun masih banyak tercampur unsur-unsur yang tidak bersifat keilmuan seperti mencari kebahagiaan atau mencari obat untuk keabadian hidup. Hal yang demikian kelihatan juga kepada kita dalam ilmu di India. Pemikiran yang objektif dan logis dan penyelidikan yang teliti semata-mata untuk mencari hukum-hukum alam, tak dapat tumbuh oleh karena dicampuri oleh perasaan-perasaan, keinginan-keinginan yang tidak logis, yang sering bersifat mitos. Tentang dunia Islam, kemajuan ilmu yang dengan bebas dan objektif berusaha memikirkan alam semesta. Baik di Barat maupun di Timur dunia Islam pada abad-abad ke-13 dan selanjutnya bangkit kaum ulama yang membakar buku-buku ahli, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan lain-lain, dan perpustakaan ditutup sehingga di zaman kita dunia Islam mendapat ilmu Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-12, tetapi dengan belajar dari Eropa yang menjadi pusat kebudayaan modern.

Kembali kepada bangsa Indonesia, terutama dalam abad ke-19 kelihatan kepada kita pemerintah Belanda membukakan sekolah-sekolah Belanda bagi anak-anak pembesar Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah yang mengajar anak-anak bangsa Indonesia membaca dan menulis, berhitung, dan ilmu-ilmu yang lain sekedarnya. Dalam abad ke-20 tampaknya orang Indonesia menjadi lebih sadar akan kelebihan kebudayaan modern itu atas kebudayaannya sendiri tentang ilmu pengetahuan, tentang teknologi, dan tentang ekonomi yang memberi kekuasaan dan kekayaan kepada bangsa-bangsa Eropa. Dengan didirikannya sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan kemudian sekolah hakim, sekolah Stovia yang diikuti pula oleh sekolah insinyur di Bandung, Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta, yang sekaliannya kemudian menjelma menjadi universitas, di kalangan sebagian bangsa Indonesia meresaplah semangat manusia modern yang mengutamakan kejayaan ilmu, teknologi dan ekonomi atau kesadaran martabat manusia. Kerinduan akan kemajuan dunia modern itu pada pertukaran abad paling jelas diucapkan oleh Kartini dalam kumpulan surat-suratnya yang melukiskan seorang gadis remaja yang

merasa terjepit dalam kegelapan kebudayaan tradisinya dan yang dengan kegembiraan muda-remajanya mengelu-elukan cahaya yang datang dari Eropa.

"En de gebruiken en gewoonten van ons land staan lijnrecht tegenover het nieuwe, dat ik graag in onze Maatschappij zou ingevoerd zien. Dag en nacht peins en zin ik op middelen om toch aan de strenge zeden en gewoonten van mijn land te kunnen ontsnappen (1912:1)

Bagaimana berbahagia dan terima kasihnya Kartini akan pendidikan Barat yang diterimanya itu jelas diucapkannya dalam salah satu surat kepada Stella :

"O, zeker Stella, kan ik mijn ouders nooit genoeg dankbaar zijn voor de vrije opvoeding, die zij mij geven. Liever mijn heele leven strijd en moelijkheden, dan niet gekend te hebben, al wat door mijne Europeesche opvoeding mijn leven vult. Ik weet, dat veel, veel strijd mij wacht, doch ik zie onbevreesd de toekomst in. (1912:13)

Dalam suasana meluasnya pendidikan Belanda yang bersifat modern, yaitu yang mengembangkan budi dengan bebas dan berasio berdasarkan keobjektifan inilah, sekolah menengah seperti HBS, sekolah hakim sekolah guru, dan sekolah Stovia menjadi pusat dari pergerakan pembebasan bangsa Indonesia dari ikatan kebudayaan tradisi. Dalam hubungan inilah lahir Budi Utomo dan kemudian berbagai-bagai himpunan pemuda yang mula-mula bersifat daerah seperti pemuda Jawa Jong Java pemuda Sumatra Jong Sumatra, pemuda Minahasa Jong Minahasa, dan lain-lain. Pada pertengahan tahun dua puluhan perkumpulan-perkumpulan pemuda itu bersama-sama meluaskan lingkupan cita-citanya dalam Sum-pah Pemuda yang pada hakikatnya hingga sekarang masih menjadi pegangan, baik bagi rakyat kita maupun bagi Pemerintah kita, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejalan dengan pergerakan pemuda ini dan sebagai lanjutannya timbullah bermacam-macam partai politik, yang waktu mula-mula juga cenderung bersifat kedaerahan, tetapi dalam tahun dua puluhan seperti pergerakan pemuda jelas menuju ke arah persatuan Indonesia.

Dalam hubungan pembicaraan bahasa Indonesia seperti ini tak usah saya berpanjang lebar tentang timbulnya pergerakan politik modern di Indonesia yang dipimpin oleh orang-orang yang menamatkan sekolah-sekolah dunia modern, yang didirikan oleh pemerintah jajahan Belanda dan yang boleh

dikatakan sama dengan sekolah-sekolah modern yang ada di Eropa, terutama di Negeri Belanda.

Di sini agaknya perlu juga disebut bahwa kebangkitan suasana, semangat, sikap, dan cara berpikir modern di kalangan bangsa Indonesia itu, yang memberikan kepercayaan baru kepada angkatan muda Indonesia dalam suasana penjajahan, tak urung mulai menyoroti dan mencari unsur-unsur kebudayaan sendiri yang mungkin berharga dalam hubungan dunia modern. Demikian tak mengherankan bahwa Budi Utomo, Jong Java, Jong Sumatra, dan lain-lain, meskipun jelas bersifat organisasi dunia modern, membayangkan sekedarnya perhatian kepada adat-istiadat dan teristimewa kesenian kebudayaan tradisi. Hal ini sedikit-banyaknya dipengaruhi juga oleh aliran etik dalam suasana penjajahan Belanda, yang tidak hendak menekankan sepe-nuh-penuhnya sikap hidup dan cara berpikir maupun lembaga-lembaga Barat kepada bangsa Indonesia. Aliran ini amat kuat mempertahankan beberapa unsur kebudayaan tradisi Indonesia, seperti ahli hukum van Vollenhoven yang menolak pemakaian hukum sipil Belanda bagi orang Indonesia, tetapi berusaha menyelidiki dan mempertahankan hukum adat sebagai norma-norma yang paling layak bagi bangsa Indonesia. Kita tak usah heran bahwa jiwa bangsa Indonesia yang menyadari kekalahan kebudayaannya dan sebanyak itu mesti menerima unsur-unsur kebudayaan Barat, girang menyambut pikiran-pikiran golongan etik yang mengemukakan unsur-unsur yang berharga dalam kebudayaan Indonesia yang lama yang berbeda dari kebudayaan modern.

Sesungguhnya sangat menarik untuk memperbandingkan pemikiran aliran etik yang cenderung kepada unsur-unsur kebudayaan tradisi Indonesia dengan pikiran aliran dunia modern seperti terjelma dalam pertentangan antara ahli-ahli hukum universitas Leiden dan ahli-ahli hukum universitas Utrecht. Sedikit banyaknya jalan pikiran kedua aliran itu masih kelihatan sampai ke zaman Indonesia merdeka; hingga sekarang masih belum dapat dirumuskan dengan keseimbangan antara keduanya.

Pengaruh pendidikan Barat atau modern atas sikap dan cara berpikir golongan terpelajar bangsa Indonesia yang lambat-laun menjadi pemimpin di segala lapangan, tak urung sejalan dengan bermacam-macam aturan dan undang-undang, bermacam-macam lembaga dan usaha yang dijalankan oleh pemerintah jajahan, seperti pemungutan pajak, bertambah berkuasanya perhubungan keuangan-keuangan dalam masyarakat, berkembangnya bermacam-macam usaha perkebunan dan industri yang sejalan juga dengan maju-

nya urbanisasi. Demikian dalam masyarakat Indonesia sejak abad yang lalu perlahan-lahan tumbuh suatu sektor masyarakat dan kebudayaan modern di atas masyarakat Indonesia, yang pada umumnya masih hidup dalam suasana kebudayaan tradisi, baik bersifat feodal maupun yang bersifat kedesaan.

Dalam sektor masyarakat dan kebudayaan modern itu sampai kepada penyerahan pemerintahan Belanda kepada kekuasaan bala tentara Jepang berkuasalah bahasa Belanda, yang bukan hanya merupakan bahasa undang-undang, bahasa administrasi pada puncak pemerintah, tetapi juga menjadi bahasa pengantar pada, boleh dikatakan, segala sekolah menengah sampai kepada perguruan tinggi. Di bawah bahasa Belanda itu ada juga dipakai bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dan di beberapa daerah ada juga sekedar-nya dipakai bahasa daerah.

Jelas sekali orang Indonesia yang sadar bahwa harapan masa depan terletak dalam sektor modern itu berusaha dengan segala upaya dan berkorban untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah Belanda atau sekolah yang bersifat Belanda agar mereka menguasai bahasa Belanda dan dengan demikian dapat naik setinggi-tingginya dalam sektor modern itu. Melihat gelagat ketika itu ada kemungkinan bahasa Belanda akan meluas di masyarakat Indonesia seperti kelihatan kepada kita penyebaran bahasa Amerika-Inggris di Filipina. Akan tetapi, pemerintah jajahan Belanda yang melihat kedudukannya terancam bahaya apabila sebagian besar bangsa Indonesia menguasai bahasa Belanda dan mencapai tingkat dunia modern, menghalangi kemungkinan bahasa Belanda menjadi bahasa terpenting di Indonesia. Dibatasinya orang masuk ke sekolah Belanda dan dibatasinya juga pendirian sekolah-sekolah bumiputra yang mengajarkan bahasa Belanda dan dengan demikian membuka jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kita sekalian tahu bahwa itulah masanya bahasa Indonesia tampil ke depan didorong oleh kepercayaan akan diri sendiri yang baru dan oleh kesadaran akan perlunya kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Gerakan pemuda terpelajar kita terpaksa mencari jalan sendiri sehingga terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda yang kita rayakan sekarang usianya ke-50 tahun.

Dari uraian ini jelaslah bahwa bahasa Indonesia itu selain dari bahasa yang menyatukan bangsa Indonesia di atas bahasa-bahasa daerah, pertama sekali dan terutama sekali mestilah bersifat bahasa modern, yang akan menggantikan bahasa Belanda dan membawa bangsa Indonesia ke tingkat masyarakat dan kebudayaan modern, yang lambat-laun merata di seluruh dunia dan di zaman kita, sering dinamakan orang kebudayaan atau sivilisasi industri.

Kalau kita pikirkan bahwa pada ketika Sumpah Pemuda itu diucapkan, bahasa Melayu yang dijunjung menjadi bahasa Indonesia itu adalah suatu bahasa dari masyarakat dan kebudayaan pramodern dan hanya serba sedikit baru dipakai dalam sektor dunia modern, jelas bagi kita bahwa keputusan pemuda-pemuda kita itu sangat berani dan amat besar resikonya. Kepada bangsa Indonesia dibebankannya untuk menjadikan bahasa itu dalam waktu yang sependek-pendeknya bahasa modern yang dewasa seperti bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Jepang, dan lain-lain.

Pada waktu mengadakan Kongres Bahasa III, yang sejalan dengan perayaan 50 tahun Sumpah Pemuda ini, telah selayaknya kita menyelidiki dan menimbang hingga manakah cita-cita bangsa Indonesia seperti diucapkan Sumpah Pemuda itu tercapai. Hingga manakah bahasa Indonesia itu telah menjadi bahasa Modern seperti yang kita perlukan ?

Sebelum melakukan penilaian, baiklah pertama sekali kita kemukakan bahwa di antara bahasa-bahasa baru di negara-negara muda dewasa ini bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang amat maju, mungkin yang termaju sebab bahasa itu betul-betul menjadi bahasa kesatuan, bahasa kebangsaan, dan bahasa resmi negara kita. Di negara kita segala pendidikan dari sekolah rendah sampai universitas memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Keputusan Sumpah Pemuda lima puluh tahun yang lalu itu tak pernah disangsikan, malahan Konstitusi Indonesia 1945 dikukuhkan kedudukannya sehingga di negeri kita boleh dikatakan tak ada pertikaian bahasa yang seperti di beberapa bagian dunia yang lain sampai-sampai menimbulkan pertumpahan darah. Meskipun demikian, pertanyaan yang paling penting bagi kita masih tetap. Hingga manakah bahasa Indonesia itu telah mencapai tujuan cita-cita bangsa kita, yaitu menjadi bahasa modern yang dewasa ?

Sayang, pertanyaan ini masih harus dijawab dengan negatif: Bahasa Indonesia dewasa ini masih belum menjadi bahasa modern yang dewasa bagi masyarakat dan kebudayaan kita. Hal itu terasa benar dalam segala lapangan kehidupan masyarakat dan kebudayaan kita: hasil pendidikan kita masih tidak memuaskan karena kekurangan bahasa Indonesia maupun penguasaannya; demikian juga bersimpang-siumnya hukum kita, kurangnya pengetahuan orang-orang kita dalam segala lapangan pekerjaan sebagian yang besar disebabkan oleh kekurangan bahasa kita dan penguasaannya. Sebab saya katakan bahwa bahasa adalah alat berpikir dan alat kebudayaan yang terpenting. Bahwa pemikiran kita belum lancar jalannya, dapat dilihat dalam bermacam-macam karangan dan laporan, malahan skripsi dan tesis perguruan tinggi

yang sering memperlihatkan pemakaian bahasa yang kacau, bertele-tele, tidak logis, bersimpangsiur kata-kata dan istilah-istilahnya. Bahasa dan cara berpikir yang belum memuaskan ini tentu terbayang dalam seluruh kebudayaan kita, percampuradukan tentang struktur maupun nilai-nilainya, persimpangsiuran unsur-unsur kebudayaan tradisi dengan unsur kebudayaan modern yang berpengaruh atas sikap hidup dan perbuatan kita sehari-hari atau untuk jangka panjang. Sudah saya tunjukkan bahwa ada kekacauan cara berpikir yang menjelma dalam kelemahan kedudukan hukum di negeri kita, kelemahan administrasi dan birokrasi negara atau perusahaan-perusahaan, kelemahan kita dalam lapangan ekonomi. Demikian juga kesimpangsiuran dalam adat-istiadat kita antara unsur-unsur dunia modern, feodal, dan kedesaan membayangkan bahwa pikiran kita yang terjelma dalam bahasa belum sampai kepada suatu keseimbangan yang baru. Dalam sekaliannya ini ikut berpengaruh kekacauan bahasa, belum mantapnya struktur kalimat maupun kata-kata, dan bersimpangsiurnya istilah-istilah.

Dalam hubungan ini tak dapat dielakkan kita harus berusaha mengadakan aturan-aturan bahasa yang lebih tepat dan lebih mantap sebab mendisiplin bahasa kita berarti mendisiplin juga pikiran kita dan hal itu pasti berkonsekuensi juga kepada kehidupan kebudayaan kita. Dengan ini sampailah kita kepada soal standardisasi dan modernisasi bahasa yang amat penting artinya, tetapi bukanlah menjadi tugas kertas ini membicarakannya. Selain itu, bahasa sebagai alat dan penjelmaan kebudayaan pada tingkat perkembangan bahasa Indonesia sekarang masih sangat miskin; bahasa Indonesia belum dapat menyajikan pikiran dan pengetahuan dunia modern yang mencukupi untuk perkembangan bangsa kita dalam zaman yang amat cepat maju dewasa ini. Pada hakikatnya tidak satu mata pelajaran pun atau pekerjaan pun orang Indonesia dapat mengembangkan pikiran dan pengetahuannya sepenuh-penuhnya dengan hanya memakai bahasa Indonesia. Hal ini lebih mengerikan lagi kalau kita ingat akan kelemahan bangsa kita tentang bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, Jepang, Rusia. Demikian dapatlah kita pikirkan bagaimana terbatasnya kehidupan masyarakat dan kebudayaan modern di negeri kita dilihat dari jurusan bahasa. Kita belum dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa yang telah maju dalam kebudayaan modern. Hal ini tak dapat tidak mesti dapat disadari bangsa kita dan terutama sekali oleh puncak pimpinan negara kita, dari presiden sampai kepada menteri-menteri, parlemen, dan sebagainya.

Jalan yang terbuka bagi kita dewasa ini hanyalah dengan sungguh-sungguh memperbaiki pelajaran bahasa Indonesia dari sekolah rendah sampai se-

kolah menengah. Pengajaran bahasa musti diketatkan, guru-guru mesti memeriksa karangan-karangan murid-muridnya lebih teliti sehingga mereka betul betul terlatih dalam memakai bahasa yang teratur dan dengan demikian terlatih berpikir teratur dalam suasana pikiran dan kebudayaan modern. Selain itu, kita tak dapat mengelakkan memperlipat ganda usaha menerbitkan buku di negeri ini, baik buku-buku karangan sendiri dari ahli-ahli kita maupun buku-buku terjemahan dari karangan-karangan yang terpenting dalam segala kebudayaan sepanjang zaman. Di dalamnya tentulah yang terpenting adalah buku-buku yang menjelmakan puncak-puncak dari ilmu dan pengetahuan zaman modern.

Kalau sekaliannya ini tidak dilakukan dengan cepat, Sumpah Pemuda yang kita banggakan sekarang ini dan yang menentukan bahasa Indonesia menjadi bahasa kebangsaan kita akan terbukti membawa bangsa kita ke jalan buntu di tengah dunia modern yang amat cepat maju dewasa ini.¹

Catatan

- ¹ Dalam karangan yang terbatas seperti ini tentulah saya tidak membicarakan soal-soal masyarakat dan kebudayaan modern, yang disebabkan oleh sifatnya atau kemajuannya sendiri.

BAHASA INDONESIA DALAM PERJUANGAN BANGSA

Soedjatmoko

Kalau kita menoleh ke belakang kepada kurun sejarah yang mulai dengan peristiwa Sumpah Pemuda sampai kepada tahun 1978 ini, jelas sekalilah betapa sulitnya untuk menyarikan daripadanya perubahan-perubahan sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia dan yang perlu diperhitungkan dalam usaha pengembangan bahasa Indonesia seterusnya. Hal ini disebabkan oleh padatnya dan silih bergantinya kejadian-kejadian yang telah memberi arah dan bentuk kepada kehidupan politik dan ekonomi kita dengan segala gejolaknya sendiri. Lebih sulit lagi untuk memaksakan semuanya itu ke dalam batas-batas suatu kertas kerja. Usaha sintesis yang diperlukan untuk itu tidak lain dari bersifat subjektif dan impresionistis.

I

Sumpah Pemuda dilakukan di dalam suatu keadaan ekonomi Hindia Belanda yang baru mulai berkembang kembali setelah suatu depresi agraris panjang melanda seluruh dunia dalam seperempat terakhir abad ke-19, dan beberapa tahun sebelum mulainya depresi baru pada tahun 1929, yang juga meliputi seluruh dunia, tetapi sekali ini mengenai hampir semua bidang ekonomi. Dari tahun 1933 sampai dengan tahun 1942 pemerintah Belanda mencoba memulihkan kembali ekonominya sambil sekaligus mencoba menanggulangi peningkatan kemiskinan yang merajalela di daerah pedesaan. Terhadap latar belakang ekonomi sosial ini berkembanglah pergerakan nasional kita. Pertumbuhan pergerakan nasional bukan tanpa penderitaan dan kemunduran akibat pukulan-pukulan balasan dari pemerintah Hindia Belanda yang khususnya mengenai gerakan komunis, Islam, dan nasionalisme yang khususnya mengenai gerakan komunis, Islam, dan nasionalisme yang dianggapnya radikal. Zaman pendudukan militer Jepang dengan segala penderitaan, korban manusia serta penghisapan dan penindasan khususnya di daerah pedesaan, juga telah menyaksikan penyusunan kembali kekuatan gerakan na-

sional. Karena larangan Jepang untuk memakai bahasa Belanda, bahasa Indonesia mendapat peluang untuk meluas dan berkembang pada masa itu. Kemudian, Proklamasi Kemerdekaan dan revolusi nasional, dan di dalam tahun 50-an berturut-turut *Korea boom* dan hancurnya sistem politik generasi pertama. Sampai dengan tahun 1965 kita terlibat dalam beberapa usaha untuk mewujudkan sistem politik lain yang dapat dianggap lebih cocok dengan keperluan revolusi dan sifat-sifat bangsa Indonesia, yang akhirnya membawa kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian, telah kita alami hancurnya usaha itu di dalam suatu keadaan ekonomi yang macet sama sekali, suatu masa peralihan yang penuh pergolakan dan yang sekali lagi membawa korban manusia yang sangat besar. Sesudah itu, mulailah masa Orde Baru dengan usaha pembangunannya.

Pergolakan sejarah yang hebat ini telah berkali-kali membawa kita dari puncak kegemilangan kehidupan bangsa ke dalam jurang penghinaan dan ketakutan. Gelombang-gelombang harapan tinggi telah silih berganti dengan masa kegelapan dan kebingungan. Kita telah melihat betapa heroisme bangsa kita telah memupuk dan menyegarkan harga diri kita bersama dan kita juga telah menyaksikan teladan-teladan kesediaan kita untuk berkorban dan bertahan demi tujuan-tujuan yang mulia. Akan tetapi, kita juga telah mengalami saat-saat yang ditandai kebuasan manusia dan saat-saat yang dikuasai oleh pengejaran kepentingan diri sendiri dan kerakusan yang tidak terkendalikan. Kita telah menikmati kehidupan yang merdeka dan bebas, tetapi kita juga telah merasakan pahitnya masa-masa ketidakbebasan, penindasan dan penghisapan, penjara dan pembuangan. Akhirnya, kita juga telah menyaksikan betapa rapuh dan sementaranya segala kekuasaan duniawi dalam naik turunnya serta liku-likunya arus sejarah yang terus mengalir dengan deras. Mau tidak mau, pengalaman hidup semacam ini dalam waktu dua setengah generasi saja telah memberikan cap yang khas pegang dan kepada harapan dan cita yang kita kandung. Begitu juga pada persepsi kita sajalah yang menentukan perubahan-perubahan serta keadaan sosial budaya kita. Di bawah dataran gejala-gejala sejarah politik dan ekonomi, terdapat proses-proses perubahan sosial yang secara diam-diam berjalan terus atas dorongan dinamikanya sendiri. Proses-proses ini tidak kurang pengaruhnya atas keadaan kita, bahkan wujud permasalahan dan tantangan yang kita hadapi sekarang ini, dan lebih lagi di dalam hari depan kita, tetapi juga bakal pemecahannya ditentukan olehnya. Dua proses utama di antaranya ialah penambahan jumlah penduduk dengan segala akibatnya atas tata susunan sosial dan kehidupan budaya dan terus meningkatnya kecerdasan hidup dan kesadaran politik bangsa kita sebagai akibat

pendidikan dan komunikasi modern.

Kalau pada tahun 1930, dua tahun setelah Sumpah Pemuda, jumlah penduduk adalah 60 juta lebih, pada tahun 1976 jumlah itu lebih berlipat ganda, yaitu menjadi 131 juta lebih. Jikalau pada tahun 1930 jumlah kota yang berpenduduk lebih dari 50.000 jiwa hanya 17, dan jumlah total penduduk di kota lebih kurang 2 juta, pada tahun 1971 dan dihitung 23 kota yang berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa, dan 13 juta orang yang tinggal di kota. Dalam 15 tahun terakhir pemerintahan Hindia Belanda, jumlah orang Indonesia yang menikmati pendidikan dasar dalam sekolah-sekolah pemerintah dan bersubsidi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa perantara ialah di antara 65.000 – 80.000, yaitu kurang dari 1% golongan umur yang relevan. Pada tahun 1975 jumlah siswa di sekolah dasar 14 juta lebih. Pada akhir pemerintahan kolonial, kurang dari 7.000 orang Indonesia mendapat pendidikan di sekolah-sekolah lanjutan berbahasa Belanda. Dalam tahun 1975 jumlahnya di sekolah lanjutan lebih dari 2½ juta. Pada permulaan pendudukan Jepang jumlah orang Indonesia yang telah mendapat pendidikan tingkat sarjana tidak lebih dari 230 orang, sedangkan pada tingkat universitas-universitas, angka-angka untuk mahasiswa dalam tahun 1975 jumlahnya sebesar 134.500 orang. Dalam masa 50 tahun memang sangat mendalamlah perubahan wajah serta pola-pola hidup masyarakat kita. Banyak sekali sudah ciri-ciri modern di dalam kehidupan kita sekarang ini yang belum ada 50 tahun yang lalu. Mobilitas penduduk telah sangat meningkat, baik secara vertikal maupun horisontal. Elite kita telah bertambah besar, baik secara absolut maupun secara proporsional. Kalau dahulu hanya anak dari kaum ningrat dapat maju—walaupun gereja Protestan dan Katolik untuk sejumlah kecil anak desa juga membuka jalur alternatif mobilitas ke atas — di dalam dan sejak revolusi kita berbagai golongan lain telah masuk ke dalam golongan elite, di antaranya golongan-golongan yang tidak berpendidikan Barat, yang muncul dari birokrasi kecil, dan dari gerakan-gerakan serta organisasi-organisasi politik, buruh, dan petani. Dalam hubungan ini, perkembangan penting ialah masuknya, di zaman pendudukan Jepang, pemimpin-pemimpin Islam ke dalam elite Indonesia, yang di dalam masa kolonial umumnya dijauhkan dari kedudukan-kedudukan formal yang berpengaruh. Perluasan pendidikan telah membuka jalur-jalur mobilitas ke atas yang jauh lebih banyak serta luas dibandingkan dengan dahulu.

Perkembangan lalu lintas darat, laut, dan udara telah memudahkan mobilitas horisontal. Hal itu telah memungkinkan orang mengejar peluang-peluang ekonomi, pendidikan untuk keperluan kedinasan dan pemukiman

secara lebih luas dan intensif. Peningkatan mobilitas horisontal ini telah memperkenalkan suku-suku dan daerah-daerah satu dengan yang lain, dan khususnya di kota-kota telah meningkatkan kebiasaan untuk hidup dan bekerja bersama. Dia juga telah membawa suatu akibat yang lain. Pola pertumbuhan ekonomi di zaman kolonial, di zaman pendudukan Jepang dan di masa kemerdekaan tidak merata dalam pengaruhnya atas masing-masing daerah di Indonesia. Sebaliknya, kemampuan masing-masing suku atau daerah untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang baru tidak sama pula karena perbedaan tingkat pendidikan, struktur sosial, pola kebudayaan atau kekuatan, keuangan, dan minat berdagang yang berbeda-beda. Di dalam waktu 50 tahun ini kita telah menyaksikan perubahan-perubahan besar dalam peranan ekonomi dan politik berbagai suku bangsa, yang diakibatkan oleh perbedaan lajunya kemajuan ini. Hal ini telah membawa perubahan besar dan terus-menerus dalamimbangan antarsuku bangsa dan antardaerah, yang sering membawa ketegangan-ketegangan sosial yang baru, dan yang merupakan tantangan terus-menerus untuk usaha *nation-building* kita.

Menjalarnya proses modernisasi, monetisasi ekonomi desa, ketidakmampuan desa untuk menampung semua tenaga kerja karena pesatnya penambahan penduduk yang menekan atas sumber-sumber daya desa yang terbatas, tetapi juga gangguan keamanan dan gejolak-gejolak peristiwa-peristiwa politik selama 50 tahun ini telah memperbesar arus urbanisasi. Untuk sebagian, urbanisasi itu juga bersumber pada stagnasi ekonomi kota-kota kecil. Angka-angka statistik memang menyarankan adanya gejala pengurangan penduduk di beberapa kota kecil. Di samping itu, urbanisasi juga disebabkan oleh lajunya penambahan penduduk kota sendiri dengan jalan kelahiran dan karena pekerjaan musiman orang desa di kota. Meskipun demikian, lajunya urbanisasi, biarpun tinggi, masih sedang jikalau dibandingkan dengan laju urbanisasi berbagai negara lain di Asia. Yang penting dari sudut perubahan sosial budaya ialah bahwa proses urbanisasi ini sudah jauh melampaui kemampuan kota-kota besar untuk memberi pelayanan munisipal yang memadai. Oleh karena itu, timbullah pemukiman-pemukiman pendatang baru yang kualitas hidupnya jauh di bawah tingkat minimal yang sesuai dengan martabat manusia. Dalam hubungan ini, ternyata pentingnya peranan organisasi-organisasi informal berdasarkan ikatan tradisional daerah asal atau keluarga dan suku. Merekalah yang menampung pendatang ini, membantunya dalam mencari pekerjaan, dan pada umumnya berperan sebagai bantal yang mengurangi akibat gejolak-gejolak sosial serta tekanan jiwa yang menyertai proses transisi ini. Tingkat kriminalitas atau radikalisisasi politik golongan-golongan pendatang ini masih

terhitung rendah di kota-kota di Indonesia. Untuk sebagian penting hal ini disebabkan oleh adanya ikatan-ikatan komunal tradisional ini. Sangat pentinglah peranan organisasi-organisasi informasi yang berdasarkan solidaritas kelompok-kelompok primer ini dipelihara dan diberi tempat dan fungsi di dalam pengembangan swadaya kota dalam pengembangan swadaya warga kota dalam rangka rukun tetangga dan rukun warga. Dapat dipertimbangkan, misalnya, sejauh mana organisasi-organisasi informal ini dapat diberi tanggung jawab untuk melakukan *training* atau latihan-latihan keterampilan hidup dan bekerja di daerah perkotaan. Pemakaian radio dan televisi—misalnya dengan mengadakan saluran kedua yang tidak ditujukan kepada keperluan sektor modern dan orang gedongan, tetapi khususnya kepada sektor informal kota-kota dan daerah pedesaan — dapat sangat membantu dalam proses peralihan ini dengan jalan pementasan dagelan, lenong dan "*sitcom*" (*situation comedies*) yang dengan cara yang ringan dan menggairahkan dapat menerangkan dan meringankan kesulitan-kesulitan tradisi ini, di samping kursus-kursus keterampilan. Usaha-usaha semacam ini dapat mengurangi kecenderungan kehidupan kota ke arah atomisasi dan tenggelamnya individu-individu dalam anonimitas kehidupan orang banyak dengan segala akibat atas perilakunya. Sebagian besar dari ketegangan sosial di daerah perkotaan timbul pada garis pertemuan antara sektor modern dan sektor informal atau rakyat. Kekhawatiran bahwa senantiasa kepentingan modern—atau yang dianggap modern—dimenangkan atas kepentingan sektor informasi, khususnya dalam bentuk pengurusan, merupakan sumber ketegangan utama. Berbagai peristiwa telah menunjukkan betapa besar sudah ketegangan dan kegelisahan sosial di bawah permukaan kehidupan normal, dan betapa mudah ketegangan dan kemarahan golongan lemah dapat meletus. Namun, melintasi jalannya sejarah ekonomi, politik, dan sosial konvensional ini terdapat suatu proses perubahan sosial lain yang telah mulai dalam abad ke-19. Proses itu ialah erosi dan proses perusakan masyarakat. Jawa patrimonial tradisional, yang mengakibatkan stagnasi daerah pedesaan, kemiskinan yang endemis dan pengangguran massal. Lagi pula, pada masa itu masuklah barang-barang buatan hasil industri Eropa yang murah, yang bukan saja di Jawa, tetapi juga di India dan Cina telah merusak habis kerajinan-kerajinan rakyat, baik di kota-kota maupun khususnya di desa-desa. Akhirnya, yang tinggal ialah desa yang ditelanjangi dari semua keterampilan dan kemampuan nonpertanian dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini, semata-mata sebagai penghasil pangan dan tanaman perdagangan yang sangat peka terhadap pasang surutnya konjunktur ekonomi negara-negara industri. Proses pemiskinan terus-menerus itu akhirnya telah menimbulkan

suatu stratifikasi baru di desa, yaitu antara golongan yang mempunyai tanah yang cukup, golongan yang mempunyai tanah tetapi tidak cukup untuk menjamin hidupnya, serta golongan yang sama sekali tidak mempunyai tanah dan yang jumlahnya terus meningkat dengan pesatnya, yang berjalan terus-menerus selama 50 tahun ini. Stratifikasi inilah yang sekarang menjadi beban dan tantangan usaha pembangunan kita. Apabila kita sekarang melihat keadaan dengan pedesaan, tampaklah bahwa selain proses stratifikasi masyarakat desa di dalam 50 tahun ini, besar sekali perubahan dalam pola kehidupannya. Meluasnya pendidikan, modern—yang, banyak bersifat pendidikan pola kehidupan perkotaan—masuknya media komunikasi modern, meluasnya jalan-jalan pada suatu masa juga politisasi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi desa, monetisasi hubungan sosial yang sebelumnya hanya secara implisit merupakan hubungan ekonomi, transpor, dan masuknya barang-barang buatan kota yang murah yang mendesak barang penghasil desa sendiri (plastik), ikatan kontraktual yang makin lama makin menguasai interaksi sosial dan berkurangnya peranan status serta akibat-akibat sosial program-program pembangunan Pemerintah, mekanisasi, dan birokratisasi kehidupan pedesaan. Semua perubahan ini sedang dan telah mengubah secara mendalam pola dan gaya hidup daerah pedesaan.

Peningkatan mobilitas horisontal dan vertikal, proses urbanisasi, serta proses modernisasi desa umumnya telah membantu peluasan bahasa Indonesia karena interaksi antarsuku umumnya lebih intensif. Begitu pun hubungan dengan sektor modern dan Pemerintah, meskipun di kota-kota di daerah di mana para pendatang berbahasa daerah yang sama, peluasan lingkungan bahasa Indonesia tidak secara otomatis meluas. Dalam pada itu, anak-anak para pendatang yang bersekolah, akan lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Indonesia. Adapun keperluan latihan keterampilan hidup dan bekerja di kota untuk para pendatang ini, menimbulkan masalah, dalam bahasa mana latihan-latihan itu harus diberikan supaya mencapai hasil yang sebesar-besarnya.

II.

Tidak secara kebetulan gerakan nasional kita mulai sebagai suatu gerakan kebudayaan sebab jikalau ada suatu ciri yang khas pada bangsa Indonesia yang menampakkan diri sepanjang sejarahnya, ciri khas itu adalah pemusatan perhatian dan tenaganya atas budi daya manusia sebagai asas pengertian dan

pengaturannya mengenai dirinya sendiri sebagai manusia ataupun dalam menghadapi realitas sosialnya. Masa kebangkitan nasional, yang juga merupakan suatu periode sejarah yang penuh rasi kecendekiaan. Pada waktu itu kita dapat menyaksikan pencarian dan pemasukan gagasan-gagasan konseptual dan integratif baru yang dapat mencakup permasalahan-permasalahan serta aspirasi-aspirasi bangsa Indonesia dan yang sekaligus dapat menerangkan situasi atau menggerakkan kekuatan terpendamnya. Pada waktu inilah paham nasionalisme Indonesia diartikulasikan. Marxisme mampu menerangkan kenyataan penjajahan sebagai suatu fenomena sejarah, yang tidak menambah rasa penghinaan yang sedang menusuk hati kita sebagai bangsa yang dijajah dan sekaligus mampu merangkap idam-idaman tradisional mengenai kesamarataan dan keadilan sosial. Islam, yang di dalam berbagai peperangan dan pemberontakan melawan penegakan kekuasaan kolonial, sering merupakan ideologi tandingan terhadap Belanda. Juga bergumul dengan tantangan-tantangan dan peluang-peluang baru, baik yang timbul dari keadaan kolonial maupun dari gagasan-gagasan dunia Islam yang baru. Dalam masa itu juga paham demokrasi modern dirumuskan kembali dalam kaitannya dengan unsur-unsur dan jiwa kehidupan demokrasi tradisional di daerah pedesaan sebelum ini dirusakkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik kolonial serta tekanan penambahan penduduk. Akan tetapi, yang juga masuk ialah paham-paham fasis dengan pandangan-pandangan mengenai susunan masyarakat secara korporatif unsur-unsur rasialnya serta pendewaan paham bangsa sebagai suatu kolektif organis yang membatasi peranan dan perkembangan manusia sebagai individu. Paham ini kemudian diperkuat di masa penduduk-an Jepang, biarpun pada akhirnya kurang mendapat pasaran. Namun, alam pikiran itu sedikit banyak masih berbekas juga di dalam kebudayaan politik kita setelah kemerdekaan tercapai. Di dalam kebudayaan Indonesia ternyata semua gagasan ini berkumandang dengan unsur-unsur tertentu di dalam kompleks kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Keanekaragaman gerakan dan organisasi politik, yang semuanya mengambil tempat di dalam proses kebangkitan nasional ini mencerminkan hal ini, baik sebagai unsur dominan maupun sebagai aliran minoritas. Ketahanan berbagai kebudayaan daerah juga tercermin di dalam gerakan nasional, baik dalam bentuk organisasi-organisasi neotradisional tersendiri maupun sebagai unsur atau aliran dalam organisasi-organisasi lain. Biarpun sekarang gelombang penyebaran ideologi-ideologi besar di seluruh dunia sudah menjadi surut dan kekurangan relevansinya untuk pembangunan Indonesia juga sudah menjadi lebih jelas, mereka telah sedikit banyaknya berhasil memodernisasikan nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi

bangsa Indonesia yang terpendam di dalam masyarakat dan kebudayaan tradisional. Semua ini akhirnya menjadi bekal dalam pewujud dan pengembangan konsepsi-konsepsi Indonesia dalam usaha pembangunan masyarakat. Gagasan-gagasan ini pula yang menjadi faktor dalam perubahan-perubahan sosial budaya di Indonesia ataupun sebagai faktor penyebab, atau sebagai faktor yang mewujudkan persepsi dan jawaban atas perubahan sosial budaya itu. Di dalam proses itu bahasa Indonesia sangat diperkaya, baik dalam peristilahanannya, kemampuan konseptualnya maupun dalam dayanya untuk menggerakkan manusia. Kita harus berterima kasih untuk selama-lamanya kepada tokoh-tokoh seperti : Tan Malaka, Soekarno, Hatta, dan Moh. Yamin untuk hal itu.

Perbedaan dan polemik tajam yang merupakan ciri di dalam proses pengumpulan dengan gagasan-gagasan yang datang dari luar dengan nilai-nilai yang berakar di dalam sejarah kebudayaan kita sendiri serta dengan masalah-masalah keterbelakangan, kemiskinan, dan pengangguran telah menghidupkan tema-tema permasalahan yang senantiasa menampilkan diri kembali. Setiap kali bangsa Indonesia menghadapi persimpangan jalan dalam sejarahnya, atau setiap kali ia harus memiliki metode perjuangannya, urutan prioritasnya dan organisasi politik serta masyarakatnya. Di antara tema-tema besar itu ialah: pilihan antara penggalangan kekuasaan dan pemakaian kekuasaan (*machtsvorming en machtsaanwending*) dengan pendidikan politik dan peningkatan kesadaran; antara agitasi dan aksi massa pada satu pihak, dan pendewasaan bangsa dan pembebasan manusia Indonesia pada pihak lain; antara kekuasaan negara yang absolut dengan kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi dan hak-hak asasi manusia; antara persoalan apakah negara atau manusia dan masyarakat adalah pangkal tolak dan tujuan perjuangan bangsa; antara elitisme dan populisme, baik yang bernada jakobinis dan yang bernada kerakyatan; antara paternalisme dan swadaya rakyat, antara disiplin nasional dan kreativitas perseorangan dan komunitas, antara penghayatan kehidupan politik oleh gambaran keagamaan atas negara atau oleh gambaran agama tentang manusia, antara pembangunan dari atas atau dari bawah. Sejarah Indonesia setelah kemerdekaan dapat dilihat sebagai usaha untuk mencari jalan yang tepat antara kutub-kutub yang berlawanan ini dan untuk mendamaikan tuntutan-tuntutan yang berlawanan dalam rangka ini. Satu pelajaran yang dapat kita tarik dari pengalaman ini — dan pelajaran itu juga dapat kita tarik dari pengalaman penjajahan yang lamanya berbeda-beda untuk berbagai daerah di Indonesia—ialah bahwa kepribadian kebudayaan Indonesia dan subjektivitas bangsa Indonesia yang menjadi esensinya tetap dapat bertahan terhadap pengaruh-pengaruh luar yang kuat dan beraneka ragam itu.

Hal ini telah memberikan kepada bangsa Indonesia suatu kepercayaan kepada dirinya sendiri juga kepada kemampuan kebudayaannya untuk memberikan respons yang kreatif atas tantangan-tantangan dari luar itu. Suatu bentuk sosial memang hanya dapat menyelamatkan hidupnya jikalau ia mampu menerima segala informasi dari lingkungan di sekitarnya dan jika ia dapat memanfaatkannya untuk menyesuaikan strukturnya sendiri. Bahkan, sejarah Indonesia juga menunjukkan kemunduran kreativitasnya dan ketahanannya pada waktu ia terisolasi atau mengisolasi diri, seperti dalam respons raja-raja Mataram semula terhadap penyebaran kekuasaan Belanda.

Sekarang kita berada di dalam proses mewujudkan corak-coraknya sendiri. Pencarian itu terjadi baik dalam interaksi terus-menerus. Namun, masih belum cukup antara dia sendiri dengan kebudayaan-kebudayaan daerah yang masing-masing juga mengalami perubahan atau dalam interaksi terus-menerus dengan kebudayaan-kebudayaan luar negeri dengan segala kekuatan ekonomi, politik, dan kebudayaannya, tetapi yang sendiri juga mengalami krisis. Bahaya bahwa Indonesia terhanyut dalam arus kebudayaan internasional sehingga pola kehidupan elitnya menjadi tersaing dari kepribadian bangsa sendiri sebagai akibat meniru-niru pola konsumsi internasional yang silih berganti selamanya dibatasi oleh karena mau tak mau kita tidak dapat melarikan diri dari masalah-masalah kita di dalam negeri kita sendiri, antara lain pengangguran, kemiskinan, dan ketidakadilan, yang akan menumpas kita jikalau kita tidak menanganinya secara efektif. Berhasil tidaknya usaha itu akan banyak bergantung kepada vitalitas dan kreativitas kebudayaan kita sendiri. Di sinilah terletak suatu tantangan yang sangat menentukan bagi bahasa Indonesia.

III

Jikalau pembangunan sosial dan tranformal struktural masyarakat Indonesia merupakan tantangan utama yang harus kita hadapi dalam 50 tahun yang akan datang dengan jalan mendobrak pola berlapis gandanya masyarakat Indonesia dalam lapisan atas dan lapisan daerah pedesaan menuju kepada suatu masyarakat yang mempunyai golongan menengah yang kuat dan yang kemungkinan mobilitas ke atasnya lebih besar, maka juga akan menjadi lebih jelas faktor-faktor sosial budaya mana yang harus diperhatikan dalam proses perkembangan bahasa Indonesia selama 50 tahun yang sudah ini dan faktor-faktor mana yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijaksanaan pengembangan bahasa nasional untuk tahap berikutnya.

Seperti telah jelas dari uraian tadi, dinamika transformasi itu bergantung kepada peningkatan keterampilan, kemampuan berorganisasi, dan terangsangnya potensi pembaharuan, inovasi, inisiatif, dan kreativitas di daerah pedesaan, baik pada tingkat pribadi maupun pada tingkat kolektif. Hal ini membuka pertanyaan mengenai di mana, dan dengan jalan apa, golongan sosial yang lemah ini dapat mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk maju sendiri; artinya bagaimanakah pola distribusi pengetahuan di Indonesia.

Boleh dikatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi wadah tunggal informasi yang diperlukan untuk kemajuan dan pembangunan. Benar bahasa Indonesia telah memasuki daerah pedesaan dengan perantara sekolah-sekolah. Namun, kecuali di daerah-daerah tempat bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu, di daerah pedesaan bahasa daerah tetap menjadi bahasa yang dipakai di luar sekolah. Di sebagian besar wilayah negara Indonesia, masuknya komunikasi elektronik ke daerah pedesaan telah menciptakan suatu lingkungan tempat bahasa Indonesia dimengerti. Pengertian bahasa Indonesianya mungkin cukup untuk mengikuti latihan, *training*, yaitu menyampaikan informasi sederhana yang terbatas untuk dipakai dalam tindakan-tindakan terbatas guna mencapai suatu saran terbatas. Namun, penggunaan pasif suatu bahasa belum berarti bahwa informasi dan pesan-pesan yang sampai kepada warga desa dalam bahasa Indonesia itu dapat merangsangnya untuk mengambil prakarsa dan untuk memanfaatkannya secara kreatif dan inovatif. Dia dapat melakukan apa yang diperintahkan kepadanya oleh aparat pemerintah, tetapi seperti diterangkan di atas kita sudah hampir mencapai batas dari apa yang dapat dicapai di bidang pembangunan dengan jalan itu. Oleh karena itu, timbulah pertanyaan, apakah yang harus dilakukan dalam bidang bahasa agar informasi yang disampaikan dalam bahasa itu sungguh-sungguh diintegrasikan di dalam kebudayaan komunitas yang bersangkutan dan dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga di desa itu sehingga informasi itu menjadi miliknya dan menjadi landasan bagi keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri mengenai apa yang hendak dilakukannya. Yang terpenting agaknya dalam hubungan ini adalah dibukanya kemungkinan baginya untuk berpartisipasi dalam menentukan informasi yang diperlukan, selaras dengan keinginannya sendiri, serta dalam bentuk dan dengan cara pembawaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan orientasi kebudayaannya. Hal ini berarti desentralisasi pembuatan program siaran media elektronik ke tingkat yang paling dekat kepada desa dan partisipasi warga desa di dalam program-program itu serta pengolahan dan pembicaraan bersama dari informasi itu di dalam lingkungan

desa. Hal ini berarti paling sedikitnya, perlunya pengembangan bahasa Indonesia dari bahasa kota menjadi bahasa rakyat desa sesuai dengan tingkat kecendekiaan dan orientasi kebudayaan daerah pedesaan.

Di sini terlihat juga masalah dalam bahasa perantara mana pemberantasan buta huruf pada tingkat pedesaan dapat dilakukan seefektif-efektifnya. Kemampuan fungsional membaca dan menulis merupakan sarana perubahan sosial utama. Dia mempengaruhi lajunya penyesuaian adat kebiasaan dan keterampilan tradisional kepada kemungkinan-kemungkinan baru. Dia meningkatkan kesediaan untuk mencari jalan-jalan dan cara-cara yang baru di dalam bidang pertanian, teknologi, dan rumah tangga. Begitu pun dia dapat mempercepat peningkatan keterampilan dan pengembangan macam-macam pekerjaan yang baru. Dia meningkatkan mobilitas, baik horisontal maupun vertikal dan juga mempengaruhi perkembangan manusia dan pemekaran potensi-potensi dan bakat yang terpendam dalam dirinya. Di dalam hubungan ini perlu dipertanyakan apakah bahasa Indonesia pada tingkat perkembangan sekarang akan dapat mencapai tujuan-tujuan itu secara lebih efektif ataukah bahasa daerah?

Perlu sekaligus dipertimbangkan bahwa beberapa bahasa daerah pada satu pihak menjamin kesinambungan (kontinuitas) kebudayaan suatu syarat penting dalam pertumbuhan suatu bangsa yang sehat. Namun, pada pihak lain bahasa-bahasa daerah itu sangat terjalin dengan stratifikasi sosial tradisional, yang justru harus diatasi jikalau usaha pembangunan sosial hendak berhasil. Dalam proses sosialisasi anak-anak, si anak pagi-pagi sudah melalui bahasa daerahnya itu, belajar melihat pelapisan masyarakatnya sebagai sesuatu yang wajar dan *langgeng*, yang tidak dapat dan tidak boleh diubah. Oleh karena itu, bahasa juga merupakan alat suatu kebudayaan untuk meneruskan dan me-*langgeng*-kan suatu stratifikasi sosial. Tantangan bagi perkembangan bahasa Indonesia justru sebaliknya. Dalam hubungan ini, juga perlu dipersoalkan sampai di mana di dalam lingkungan hidup dua bahasa (*bilingual*) di alam Indonesia ini, pendidikan dalam dua bahasa, dan pengalihan dari satu bahasa pengantar ke bahasa pengantar lainnya tidak secara sistematis merugikan golongan itu dalam kesempatan maju jika dibandingkan dengan anak-anak yang dididik dalam satu bahasa selama masa sekolah dan di dalam lingkungan keluarga dan sampai di mana kemampuan kita untuk mengurangi *handicap* itu. Sebenarnya merangsang dinamika pembangunan dari bawah ini membuka kembali masalah peranan dan hubungan dwitunggal antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dan kedua bahasa untuk merangsang dinamika itu. Pasti sudah bahwa selama bahasa Indonesia belum mampu menjadi bahasa

rakyat dalam usaha pembaharuan kebudayaan, bahasa daerah akan harus dipakai karena di kemudian hari akan ada konferensi mengenai bahasa daerah, di sini cukup masalah ini disinggung saja tanpa memperkembangkan implikasi implikasinya yang sangat pelik itu untuk politik bahasa dan untuk politik integrasi nasional pada umumnya.

Tidak seorang pun dapat menyangkal kemajuan yang pesat lagi luas yang telah diperlihatkan oleh perkembangan bahasa Indonesia. Dalam 50 tahun ini dia telah berkembang dari bahasa politik untuk menggalangkan kekuatan dalam perjuangan anticolonialisme dan sebagai pernyataan keyakinan dan tekad bangsa Indonesia untuk hidup sebagai suatu bangsa yang merdeka menjadi bahasa negara dan bahasa nasional yang cukup mampu untuk menampung dan mengungkapkan segala keperluan kehidupan negara. Dia telah berhasil menjadi bahasa perantara dan bahasa pergaulan antardaerah dan antarsuku. Munculnya pengarang-pengarang dan penyair-penyair terkemuka dalam bahasa Indonesia, yang tidak berasal dari daerah di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa ibunya, dan yang pemakaiannya telah, dan terus-menerus, memperkaya kemampuan ekspresif bahasa Indonesia, telah membuktikan kreativitas dan tercapailah taraf kedewasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebudayaan nasional. Dia telah juga berhasil menjadi bahasa kemajuan sosial, seperti, di zaman kolonial, bahasa Belanda menjadi wahana mutlak untuk *upward mobility*. Sebaliknya, gambaran tentang tetap berlapis gandanya masyarakat Indonesia sepanjang masa 50 tahun ini juga menunjukkan bahwa tempat keberhasilannya ialah terutama di lapisan atas. Dengan perkataan lain kurun zaman 50 tahun yang pertama ini telah menunjukkan keberhasilan bahasa Indonesia, terutama sebagai bahasa elite. Persoalan yang kita hadapi sekarang ialah, kalau di dalam 50 tahun yang lalu bahasa Indonesia telah berhasil menjadi wahana integrasi politik dan alat perjuangan anti kolonial, sanggupkah dalam 50 tahun yang akan datang ia menjadi wahana transformasi sosial masyarakat Indonesia?

Sudah barang tentu pengembangan bahasa Indonesia sebagai wahana transformasi sosial tidak merupakan satu-satunya kaitan dengan, atau interaksi antara, perubahan-perubahan sosial budaya dan perkembangan bahasa. Suatu bahasa mencerminkan dalam perkembangan dan perubahan-perubahan yang mempunyai arti sosial, perkembangan kondisi-kondisi sosial baru karena bahasa memang adalah suatu alat komunikasi sosial. Kata-kata baru menjadi lazim dan berbagai kata lama hilang atau mengalami perubahan. Berbagai gagasan golongan-golongan yang berkuasa pada suatu tahap sejarah dapat hilang dengan perputaran sejarah berikutnya dan penjelasan-penjelasaannya

dalam bahasa juga dapat turut hilang. Oleh karena itu, kosa kata dan gaya suatu bahasa mencerminkan perubahan-perubahan sejarah yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Kosa kata bahasa memang bagian yang paling cepat mencerminkan perubahan-perubahan dalam masyarakat dengan munculnya kata-kata baru dan hilangnya kata-kata yang sudah usang, atau perubahan makna. Juga sintaksis dapat berubah, biarpun jauh lebih lambat dan berangsur-angsur. Dalam bahasa Indonesia interaksi yang beraneka ragam ini agaknya menjadi lebih jelas dan dapat memperlihatkan implikasi-implikasi untuk kebijaksanaan pengembangan bahasa seterusnya jikalau kita menyusunnya di sekitar tiga pertanyaan berikut.

1. Sampai di mana bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa persatuan?
2. Sampai di mana bahasa Indonesia berhasil menjadi wahana modernisasi kebudayaan dan khususnya berhasil menjadi alat penguasaan dan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi?
3. Sampai di mana bahasa Indonesia telah berhasil menjadi wahana aspirasi bahasa ke arah pendemokrasian masyarakat?

Dalam hubungan dengan pertanyaan yang pertama, sejarah 50 tahun ini telah menunjukkan bahwa wajah permasalahan persatuan nasional terus-menerus berubah. Setiap kurun sejarah dan demikian pula setiap tahap pembangunan menampilkan wujud permasalahan persatuan tersendiri. Perubahan-perubahan di bidang sosial ekonomi juga mengubah terus-menerus imbang dan pola distribusi kekuasaan antardaerah dan antarsuku, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Hal ini sering membawa ketegangan sosial politik yang menyangkut kohesi dan persatuan nasional. Perkembangan di bidang pendidikan pun telah dan akan mempengaruhi ikatan-ikatan solidaritas dan kepercayaan antarsuku dan antardaerah. Kalau di zaman kolonial keakraban dan hubungan saling percaya-mempercayai antara pemuda-pemuda dari berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia tidak dipupuk dalam sejumlah kecil sekolah Hindia Belanda, tempat pendidikan pemuda-pemuda itu, dan jika di dalam masa revolusi pemuda-pemuda yang beraneka ragam asal daerahnya, tidak belajar dan hidup bersama dengan memakai bahasa nasional di Universitas Gajah Mada dan beberapa universitas lain di daerah Republik Indonesia, sulitlah untuk membayangkan bahwa negara Indonesia dapat muncul sebagai negara kesatuan dan dapat ke luar dengan selamat dari konflik-konflik politik ideologis dan regional, yang telah melanda bangsa kita dalam tahun 50-an. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan usaha

nation-building tidak pernah akan dapat dianggap selesai.

Dalam segala usaha peluasan pendidikan kita akan harus menjaga supaya selalu cukup terdapat kesempatan bagi generasi-generasi muda dari semua daerah Indonesia, dalam masa yang akan datang untuk tetap belajar dan hidup bersama dalam lingkungan satu bahasa, bukan saja di universitas-universitas di daerah-daerah yang agak jauh dari pola lalu lintas kecendekiaan. Perlu dijaga supaya, baik susunan korps dosen maupun susunan mahasiswa selalu multietnis dan multiagama dan memakai bahasa Indonesia dalam hubungan formal dan informal.

Dalam hubungan ini perlu juga disinyalir beberapa gejala yang jikalau dibiarkan dapat menjadi tendensi regresif dalam peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita semua telah melihat gejala pemakaian bahasa daerah di berbagai kantor Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah ataupun di kedutaan-kedutaan besar kita di luar negeri, khususnya dalam hubungan kedinasan yang tidak berupa rapat atau surat-menyurat formal. Untuk sebagian hal itu mungkin terjadi karena bahasa Indonesia belum berhasil menjadi keakraban, bahasa intim. Boleh dikatakan bahwa bahasa intim itu baru berkembang di Jakarta dan di Medan, khususnya antara generasi muda. Kreativitas ekspresif golongan muda dalam pemakaian yang perlu lebih diperhatikan, agaknya oleh ahli-ahli bahasa dan perumus-perumus kebijaksanaan bahasa kita. Bagi generasi yang lebih tua kunci yang mempertahankan sifat hubungan informal dan akrab ialah pemakaian campuran bahasa Indonesia dan jika situasi memungkinkannya bahasa daerah atau bahasa Belanda. Untuk generasi cendekiawan muda kuncinya ialah pemakaian campuran bahasa Indonesia dan Inggris, atau bahasa campuran Indonesia dan daerah.

Gejala-gejala ini pada dirinya sendiri belum merupakan suatu masalah yang membahayakan semangat persatuan bangsa. Dia merupakan suatu fenomena yang lazim terdapat di dalam lingkungan dua bahasa, khususnya di mana satu di antaranya merupakan bahasa bertingkat yang mencerminkan stratifikasi masyarakat (*diglossia*). Namun, masalahnya cukup serius agaknya untuk menempatkan pada acara penentuan kebijaksanaan pengembangan bahasa Indonesia dan pada acara penelitian para ahli bahasa kita, masalah pengembangan bahasa Indonesia sebagai wahana keakraban, justru untuk menjamin penerusan bahasa dari generasi ke generasi demi hari depan kita.

Mungkin sekali tekanan-tekanan ke arah pemakaian bahasa daerah pada tingkat nasional dapat dikurangi apabila bahasa Indonesia, yang terutama masih merupakan bahasa **pergaulan** formal dan resmi, diperkaya

dengan perbendaharaan bahasa daerah dengan usaha penerjemahan sastra, filsafat, idiom dan pepatah-petitih bahasa-bahasa daerah, serta istilah-istilah kesenian daerah ke dalam bahasa Indonesia. Hal itu harus dikerjakan biarpun dewasa ini belum dikerjakan atas skala yang memadai untuk memadukan perbendaharaan substantif kebudayaan-kebudayaan daerah ke dalam bahasa Indonesia.

Perlu pula di sini dikemukakan suatu persoalan yang melintasi semua persoalan lain di bidang pengembangan bahasa yang dikemukakan di atas ini. Persoalan itu ialah kurangnya penguasaan bahasa Indonesia; juga pada mereka yang telah mendapat seluruh pendidikannya dalam bahasa Indonesia. Kekurangan itu tampak sekali pada tingkat pendidikan tinggi, pada pelamaran pekerjaan tingkat tinggi, tetapi juga dalam keluhan-keluhan dari golongan-golongan masyarakat tentang kecerobohan pemakaian bahasa Indonesia di surat-surat kabar, majalah-majalah, iklan-iklan, serta nama-nama gedung. Yang dimaksudkan di sini bukan keluhan-keluhan dari golongan "puris" bahasa. Keluhan semacam itu selalu akan ada dan memang terdapat di mana-mana di dunia ini. Juga tidak dimaksudkan kebebasan memakai bahasa yang diperlukan suatu bahasa yang sedang berkembang dengan pesatnya sebagai lingkungan subur untuk pengungkapan-pengungkapan kreativitas bahasa. Yang dimaksudkan ialah dua hal. Pertama, kecerobohan pemakaian bahasa yang mencerminkan kurang adanya rasa tanggung jawab pribadi masing-masing untuk pengembangan bahasa Indonesia, pengembangan masyarakat Indonesia dan pembangunan Indonesia. Oleh karena berbagai sebab—beberapa di antaranya dapat juga dimengerti — mereka tidak merasa terlibat dan bersikap acuh tak acuh. Bagi mereka perjuangan bangsa sudah selesai, tidak ada lagi tugas nasional yang merupakan tanggung jawab mereka. Yang disebut "kebudayaan santai" adalah penjelmaan sikap ini. Sekarang tinggal mengurus diri sendiri dalam suatu *privatisme* yang merupakan gejala yang baru dalam sejarah nasional sejak kemerdekaan atau tinggal menikmati sepenuh-penuhnya hari kini. Hari esok dipikirkan nanti, atau tinggal mengejar secara sungguh-sungguh dan gigih kepentingan diri sendiri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.

"Kebudayaan santai" ini sebenarnya juga suatu pola hidup di mana barang cap asing dan nama asing lebih berharga. Oleh karena itu, timbullah suatu ketergantungan yang berlebih-lebihan dari hasil buatan ekonomi dan kebudayaan luar negeri.

Alienasi, rasa keterasingan, serta kendornya semangat nasional di berba-

gai kalangan masyarakat Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu masalah politik. Namun, ia tercermin juga dalam pengembangan bahasa.

Persoalan kedua ialah kekurangmampuan memakai bahasa Indonesia untuk membentangkan suatu pikiran secara teratur dan tersusun secara logis. Persoalan ini perlu dikemukakan di sini, bukan saja karena dia ternyata merupakan hambatan serius dalam kemajuan sosial individu yang bersangkutan, melainkan ia juga menghalangi komunikasi konsepsi-konsepsi abstrak yang kompleks, yang diperlukan dalam pengelolaan masyarakat Indonesia dalam arti yang luas. Dia juga menghalangi kemampuan inovatif dan kesanggupan nasional untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini dan mendatang. Ada yang mencoba menerangkan gejala ini dengan menunjuk kepada perubahan lingkungan bahasa ke arah penekanan unsur lisan dan visual karena pengaruh alat komunikasi elektronis. Alasan itu tidak mencukupi.

Peralihan lingkungan bahasa semacam itu juga terjadi di negara-negara tetangga kita dan ternyata tidak mengurangi kemampuan mereka untuk menguraikan pendapatnya secara efektif dan meyakinkan untuk menguasai ilmu dan teknologi. Jalan untuk mengatasi kekurangan ini agaknya bukan dengan mengajarkan logika formal di sekolah-sekolah, seperti yang sering dianjurkan. Mungkin sekali jalan keluarnya jauh lebih mudah, yaitu dengan membiasakan si anak didik itu sendiri sekolah dasar dan terus-menerus pada setiap tingkat pendidikan, mengarang tentang hal-hal yang makin lama makin sukar dan abstrak untuk kemudian didiskusikan di dalam kelas, bukan saja mengenai isinya, melainkan juga mengenai cara pengutaraan pikiran.

Adapun peranan bahasa Indonesia sebagai wahana modernisasi dan alat penguasaan dan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan yang telah dicapai juga tidak dapat disangkal. Bahasa Indonesia sudah merupakan wahana kemajuan sosial (*upward mobility*) dan peluasan komunikasi (*language of wider communication*). Peluasan kemampuan bahasa di bidang hukum, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu lain, tetapi juga di bidang kesusastraan, peningkatan kemampuan ekspresif dalam pengucapan berbagai perasaan halus, dan kekayaan batin di dalam karya-karya sastra dan sajak-sajak modern kita; semua telah menunjukkan vitalitas dan kreativitas bahasa Indonesia yang hampir-hampir menakjubkan. Untuk sebagian penting karena kemajuan-kemajuan itulah kita sekarang mampu bergumul dengan masalah-masalah kehidupan modern dengan segala tantangannya yang baru dalam bahasa Indonesia. Namun, kekurangan komunikasi horisontal karena kurangnya bahan bacaan menyebabkan perkembangan-perkembangan bahasa

yang penting itu tidak cepat masuk dalam lalu-lintas kecendekiaan bangsa kita sehingga tidak dikenal dan dipakai umum dan tetap tersimpan dalam masing-masing kotak tersendiri. Juga betapa pun besarnya kemajuan yang dapat dicatat dalam kemampuan bahasa Indonesia di dalam proses pembaharuan kebudayaan kita dan betapa besar sekalipun kemajuan kita di bidang perluasan kemampuan bahasa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, perjuangan bangsa kita tidak membolehkan kita hanya melihat kemajuan itu dalam perbandingannya dengan masa yang silam. Kita perlu juga membandingkannya dengan keperluan-keperluan suatu masyarakat yang sedang membangun dan berubah dengan pesat dan yang masih harus menangani perubahan struktural susunan masyarakatnya sambil dia menghadapi pula kekuatan-kekuatan ekonomi, politik, dan kebudayaan dari luar. Dilihat dari sudut itu, kemajuan-kemajuan itu belum memadai. Seperti, di antaranya dapat dilihat dari kesimpulan-kesimpulan Seminar Hukum dan Bahasa Indonesia yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Prapat, Medan, pada tahun 1974.

Kita juga harus membandingkannya dengan kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh negara-negara Asia lainnya, yang tidak memakai suatu bahasa nasional, tetapi bahasa Inggris sebagai wahana modernisasinya. Sulit untuk membuktikan korelasi langsung antara jumlah dan mutu sarjana yang dihasilkan oleh sistem pendidikan negara-negara itu dengan kemampuan sistem pendidikan kita yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Namun, dapat diduga bahwa kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mau ketinggalan dalam persaingan internasional. Juga kecenderungan yang makin meningkat antara sarjana-sarjana Indonesia untuk meloncat ke bahasa Inggris dalam pembicaraan-pembicaraan di antara mereka sendiri kalau mendiskusikan masalah-masalah ilmiah yang sulit merupakan tanda ke arah itu. Kita harus menjaga supaya kita tidak kembali kepada hirarki bahasa di zaman kolonial, tempat bahasa daerah menjadi bahasa paling rendah, yaitu sebagai bahasa pergaulan antarkeluarga dan antarsahabat, bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi yang lebih luas pada tingkat kedua, dan bahasa Belanda untuk maju untuk menguasai ilmu pengetahuan modern, dan untuk masuk dalam golongan elite bumiputra.

Di dalam bagian uraian ini, ilmu pengetahuan dibicarakan sebagai suatu kumpulan pengetahuan sistematis yang sudah ada dan yang akar-akarnya pada hakikatnya berada di luar Indonesia. Semula kita harapkan bahwa pada tingkat universitas di seluruh Indonesia kemajuan dalam bahasa Inggris akan

mencukupi untuk memasuki alam yang kaya-raya ini. Ternyata harapan itu suatu khayalan saja. Oleh karena itu, sudah tiba waktunya untuk menempuh jalan lain dengan segala bekal, dana, dan daya yang diperlukan untuk perjalanan itu. Jelas sekarang bahwa penguasaan ilmu pengetahuan itu memerlukan suatu kemampuan terjemahan ilmiah yang besar dan berlembaga. Jepang, yang bertekad memodernisasikan dirinya dengan memakai bahasa sendiri, telah berhasil dalam usaha ini. Sekarang hampir tidak ada satu penerbitan ilmiah dan sastra yang penting di dunia, yang tidak, dalam waktu yang singkat, dipasarkan dalam bahasa Jepang. Di sana pembinaan kemampuan menerjemahan lebih dahulu dipelopori oleh Pemerintah. Sekarang proses itu hampir seluruhnya ditangani perusahaan-perusahaan komersial atau lembaga-lembaga ilmiah sendiri. Demikian pun Uni Soviet telah berhasil dengan pembinaan pelebagaan yang sesuai dengan sistem sosialnya sendiri.

Pilihan beberapa negara yang sedang berkembang untuk memakai bahasa Inggris telah membuka keseluruhan kekayaan ilmiah dan teknologi di dunia Barat bagi mereka dan telah memberikan kepada mereka suatu keuntungan pendahuluan yang berarti. Sebaliknya, pilihan itu juga membawa biaya yang tinggi, dalam arti terkembangnya suatu golongan ilmuwan yang sangat elitistis dan teknokratis, dan suatu *brain-drain* yang sangat besar. Hal itu disebabkan oleh orientasi ilmiahnya yang bukan terutama ditujukan pada masalah-masalah negara dan bangsanya sendiri, melainkan kepada spesialisasi yang tidak atau belum relevan untuk persoalan negara.

Keperluan pembangunan dan transformasi sosial kita sendiri memaksa kita untuk menyerahkan perkembangan ilmu pengetahuan kita untuk sebagian yang jauh lebih besar ke masalah-masalah kita sendiri dan memaksa kita dalam kita bergumul dengan masalah-masalah itu, untuk memperkembangkan konsepsi-konsepsi dan alat-alat analisis ilmiah kita sendiri. Di sini kita bicara bukan hanya mengenai aplikasi yang relevan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, melainkan khususnya tentang "pengalihan" (*indigenisation*) proses pengadaan pengetahuan ilmiah dan teknologi baru, dan pengembangan kreativitas intelektual yang berakar di bumi Indonesia sendiri. Oleh karena itu, tidak cukup dilakukan usaha penerjemahan ilmiah secara besar-besaran. Perlu juga dipropagandakan dan dirangsang secara insititutorial penulisan buku-buku pelajaran dan buku-buku serta karya-karya ilmiah yang berpangkal tolak dari permasalahan-permasalahan Indonesia sendiri. Di sinilah juga terletak suatu garis depan baru dalam pengembangan bahasa Indonesia seterusnya.

Adapun pertanyaan sampai di mana bahasa Indonesia telah berhasil menjadi wahana pendemokrasian masyarakat Indonesia, boleh dikatakan hasilnya positif bercampur negatif. Dari semula pergerakan nasional mencerminkan kerinduan bangsa Indonesia kepada kebebasan, kepada pelepasannya dari belenggu struktur-struktur sosial budaya tradisional yang mengekang jiwa dan kemajuannya. Di sinilah akar hasratnya akan kehidupan yang lebih demokratis. Dari semula sebutan *saudara*, *bung (a)bang*, dan kemudian *anda* merupakan lambang unsur kerakyatan dan rasa sama rata, atau *egalitarianisme*, yang menjadi cirinya pola demokrasi sederhana di dalam kehidupan pedesaan tradisional sebelum mulainya proses disintegrasinya. Masuknya kata sebutan *bapak* dan kata keterangan seperti *berkenan* mencerminkan suatu alam kehidupan berlapis-lapis atau berstratifikasi yang agak baru di dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan politik. Hal ini ada kaitannya dengan belum berhasilnya perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari berlapis gandanya masyarakat Indonesia. Munculnya kata-kata itu, baik dalam bahasa pergaulan maupun dalam bahasa formal mencerminkan bangkitnya kembali sikap jiwa feodal dalam bentuk modern dan mempermudah berkembangnya kecenderungan neofeodal itu dalam tubuh masyarakat dan kebudayaan kecenderungan neofeodal itu dalam tubuh masyarakat dan kebudayaan kita. Kita juga dapat melihat gejala itu sebagai permulaan perkembangan bahasa Indonesia ke arah perkembangan bahasa tinggi dan bahasa rendah yang dipakai untuk berbicara dengan pihak yang dianggap lebih tinggi, atau yang lebih rendah, atau dipakai secara campuran dalam percakapan dengan orang yang dianggap sederajat. Sudah barang tentu persoalan ini bukan suatu persoalan bahasa semata-mata. Pada hakikatnya dia merupakan persoalan sosial politik dan kebudayaan, yang memerlukan suatu kesepakatan nasional tentang sampai di mana kita menganggap stratifikasi sosial, warisan zaman feodal dan kolonial, sebagai sesuatu yang dapat dan tidak perlu diubah. Bagaimanapun juga gejala ini menunjukkan betapa eratnya perkembangan bahasa dengan perkembangan masyarakat dan aspirasi-aspirasi sosial suatu bangsa.

Program Keluarga Berencana telah menunjukkan hasil-hasil sementara yang sangat menggembirakan. Namun, juga jikalau program itu nanti berhasil sepenuhnya, jumlah penduduk Indonesia tetap akan berlipat ganda dalam 25 tahun yang akan datang, yaitu dalam masa hidup generasi muda sekarang. Penampungan jumlah yang demikian besar ini dan penampungan penambahan seterusnya serta pemberantasan pengangguran dan kemiskinan akan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam masa yang akan

datang. Struktur masyarakat yang kita warisi dari zaman feodal dan zaman kolonial, juga dalam bentuk yang lebih modern, tidak akan mampu menjabar tantangan ini. Akan diperlukan suatu transformasi sosial yang mampu mengatasi dualisme struktural yang menjadi ciri masyarakat kita sampai sekarang, guna menjamin kehidupan dan kerja yang layak bagi setiap warga Indonesia. Hal itu berarti suatu pembangunan kembali masyarakat Indonesia dari bawah, yang berpangkal tolak dari penggairahan kembali kehidupan pedesaan, keterampilannya, dan kemampuan berorganisasi serta kemampuan kreativitasnya. Di samping itu, yang merupakan unsur kedua dalam usaha ini ialah pengembangan golongan menengah yang besar lagi kuat, yang beraneka ragam kemampuan dan keterampilan, serta tinggi produktivitasnya, di mana tenaga-tenaga nonpertanian, baik dari daerah pedesaan maupun dari sektor informal perkotaan dapat mengambil tempat yang wajar.

Perombakan struktur masyarakat ini tidak dapat dicetak dari atas, biarpun kebijaksanaan Pemerintah merupakan suatu syarat mutlak dalam usaha ini. Ia terutama akan bergantung kepada kemampuan dan motivasi swadaya daerah perkotaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah dapat memberi peluang, rangsangan, serta bimbingan kepada pengembangan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga wadah kemampuan swadaya itu dalam suatu kerangka kebijaksanaan makro pada tingkat nasional yang mendukung usaha ini. Dalam pada itu, tidak ada contoh atau model terperinci tertentu yang dapat ditiru atau dilaksanakan karena yang pokok ialah dinamisasi masyarakat itu sendiri, sedangkan pada setiap persimpangan jalan, dalam memilih antara jalan-jalan yang dapat ditempuh, kita hanya dapat berpegangan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai batu ujian tetap untuk rencana bersama kita. Garis-garis Besar Haluan Negara dan Repelita III dengan penekanannya pada "terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin meratanya pembangunan dan hasilnya" telah membuka pintu ke arah itu.

Di dalam perjuangan kita menghadapi demografi, pengangguran, dan kemiskinan itu, serta dalam meneruskan perjuangan kita menuju ke masyarakat yang adil dan makmur, kita akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan terakhir tentang eksistensi manusia, yang jawaban-jawabannya terakhir tentang eksistensi manusia, yang jawaban-jawabannya merupakan esensi kebudayaan setiap bangsa, yaitu tentang maut, harapan, tragedi, kasih, keberanian, makna, dan tujuan hidup manusia, serta hubungannya dengan sesama manusia, alam sekitarnya, dan hubungannya dengan Tuhan. Di dalam penghadapan ini secara terus-menerus dan di dalam penghadapannya dengan ilmu penge-

tahuan dan teknologi, kebudayaan Indonesia akan memperbaharui dan mendefinisikan diri dari dalam. Inilah pada hakikatnya proses kebudayaan yang sekarang kita alami dan kita masing-masing menjadi pelaku. Dari uraian di atas ini cukup jelas kiranya bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar sarana komunikasi nasional bangsa Indonesia. Ia tetap merupakan alat perjuangan dalam bahasa usaha pembangunan kembali masyarakat Indonesia dari bawah dan dalam penguasaan serta pengaslian ilmu dan teknologi sebagai sarana di dalam proses pembangunan tadi.

Kita telah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang perlu kita bina sebagai alat komunikasi dan alat perjuangan suatu bangsa dan negara yang kuat, yang terdiri dari manusia bebas, dan yang hatinya tenang dalam kesadaran identitasnya sendiri dan kepercayaannya kepada kemampuan dan ketahanan kebudayaannya karena terpeliharanya dan kreativitas bahasa nasionalnya. Oleh karena itu, pengembangan bahasa Indonesia seterusnya hendaknya diperhatikan dan diperlakukan sebagai suatu tantangan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama, baik bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat ramai. Kemudian, alangkah baiknya kalau disediakan dana dan daya yang secukupnya untuk memperkembangkan prasarana yang memadai untuk suatu kehidupan intelektual yang bergairah dan bermutu, yaitu dengan jalan memungkinkan peningkatan jumlah penerbitan sehingga keterbelakangan kita di bidang ini, jika dibandingkan dengan negara-negara yang lebih kecil dari kita di Asia Tenggara dan Selatan, dapat diatasi dalam waktu yang singkat. Alangkah baiknya pula mengadakan suatu Jawatan Penerjemahan Negara yang cukup besar, baik dari bahasa asing—sehingga kita tidak ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah memilih bahasa Inggris sebagai wahana modernisasinya—maupun dari bahasa-bahasa daerah di Indonesia memperkaya bahasa atau kebudayaan Indonesia dan memperkuat persatuan bangsa.

Akhirnya, patut agaknya untuk mempertimbangkan didirikannya suatu lembaga seperti *Academis Francaise* yang terdiri dari tokoh-tokoh senior bahasa, kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan tingkat nasional yang bertanggung jawab dan memepertanggungjawabkan tugasnya kepada seluruh bangsa Indonesia, penyempurnaan terus-menerus suatu kamus bahasa nasional, termasuk kodifikasi istilah-istilah ilmu pengetahuan modern, kata-kata yang mendapat makna baru yang diperkembangkan oleh dunia ilmu pengetahuan, dunia sastra, dunia media komunikasi, dan kelompok-kelompok pergaulan tertentu di dalam masyarakat Indonesia. Lembaga semacam ini dapat bekerja berdasarkan persiapan dan pertimbangan-pertimbangan Pusat Pemb-

naan dan Pengembangan Bahasa. Pilihan menjadi anggota hendaknya dianggap sebagai salah satu kehormatan nasional tertinggi yang dapat diberikan kepada seorang warga negara Indonesia. Hari depan kita bergantung kepada kesediaan kita untuk senantiasa memelihara dan memperbaiki mutu dan kemampuan alat perjuangan kita yang utama ini.

Mudah-mudahan kita diberi hikmah dan ketekunan untuk menunaikan tugas itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah, No. 9. 1977. *Memori Serah Jabatan 1921 - 1930 (Jawa Tengah)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Aveling, Harry. 1966. *Arjuna in Meditation: Three Young Indonesia Poets. Translated by Harry Aveling*. Calcutta 700045, India : P. Lal from 162/92, Lake Gardens.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1965. *The Failure of Modern Linguistics in the Face of Linguistic Problems of the Twentieth Century*. Kualalumpur: University of Malaya.
- Abdullah, Taufik dan Lopian, Adrian Bernhard, 1971. *Proceedings Southeast Asian Regional Conference on the Study of Malay Culture*. Jakarta: Indonesian National Commission for Unesco, Department of Education and Culture.
- Attali, Jacques. 1975. *La Parole et L'outil, Economie en Liberte*. France: Presses Universitaires de France.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1974. *Symposium Bahasa dan Hukum*. Medan, Prapat.
- Biro Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 1976*. Jakarta.
- Bondenstedt, Adolf Andreas. 1966. *Sprache und Politik in Indonesien. Entwicklung und Funktionen Einer Neuen National-sprache*. Munster: Universitat Munster.
- Burger, DH. 1975. *Sociologisch-Economische Geschiedenis van Indonesia. Jilid I. Indonesia voor de 20^e eeuw*. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen.
- . 1975. *Sociologisch-Economische Geshiedenis van Indonesia. Jilid II. Indonesia in de 20e eeuw*. Amsterdam: koninklijk Instituut voor de Tropen.

- Clammer, John R, D. Phil. 1976. *Sociological Approaches to the Study of Language and Literacy in Southeast Asia*. Singapore: Chopmen Enterprises.
- Djawatan Kebudayaan Kem. P.P. dan K, Bagian Bahasa. 1955. *Kongres Bahasa Indonesia di Kota Medan 28 Okt—2 Nop*. 1954. Djakarta.
- Feith, Herbert dan Castles, Lance. 1970. *Indonesian Political Thinking 1945—1965*. Ithaca dan London: Cornell University Press.
- Halim, Amran. 1976. *Politik Bahasa Nasional 1*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . 1976. *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hartig, Matthias/Kurz, Ursula. 1971. *Sprache als Soziale Kontrolle. Neue Ansätze zur Soziolinguistik*. Nordlingen: George Wagner.
- Hutasoito, M. 1954. *Compulsory Education in Indonesia*. Paris: UNESCO.
- Hagen, Everett E, PH.D. 1962. *On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins*. Homewood, Illinois: The Dorsey Press, Inc.
- Jassin. H.B., Dr; K.M., Saini; Jt, Darmanto. 1976. *Penyair Muda di Depan Forum*. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono, Prof. "The Impact of Science and Technology on Societies in Southeast Asia". Yogyakarta: Kertas Kerja.
- Kartodirdjo, Sartono, Prof. Poesponegoro, Marwati Djoened; Nugroho, Notosusanto. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kahin, George McTurnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Lyons, John. 1977. *Chomsky*. Great Britain: William Collins Sons and Co. Ltd, Glasgow.
- Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (LEKNAS—LIPI) bekerja sama dengan Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan. 1976—1977. *Sejarah Pers di Indonesia. Sumber dan Hasil Penelitian Awal*. Jakarta : Departemen Penerangan dan LIPI.
- Noss, Richard B. 1978. "Some Southeast Asian Priorities in Applied Linguistics". Paper.

- Nurcombe, Barry, 1976. *Children of the Dispossessed*. Hawaii: The University Press of Hawaii.
1955. *Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Peristiwa yang Tiada Bandingannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1970. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Rosidi, Ajip. 1973. *Pembinaan Minat Baca, Apresiasi dan Penelitian Sastra*. Jakarta: Panitia Tahun Buku Internasional DKI Jakarta.
- , 1976. *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Bandung : Binacipta.
- Reid, Anthony. 1974. *The Indonesian Nasional Revolution 1945-1950*. Australia: Longman.
- Suryomihardjo, Abdurrachman, Drs. 1974. *Sumpah Pemuda di dalam Perkembangan Budaya-Politik Indonesia 1900-1945, sebuah ikhtisar. Dari 45 tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah.
- Steinmetz. 1912. *Onderzoek Naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera. Deel II: Slotbeschouwingen (Eerste Gedeelte)*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Tan-Sen., Tan Drs. 1978. *Language Policies in Insular Southeast Asia: A Comparative Study*. Singapore: Chopmen Enterprises.
- Unesco. 1974. *Intergovernmental Conference on Cultural Policies in Asia. Yogyakarta 10-19 December 1973. Final Report*. Paris: Unesco.
- Unesco. 1976. *Experts' Meeting on the International Thesaurus on Cultural Development*. Paris: Unesco.
- Van der Wal, S.L., Dr. 1965. *Het Maleis In De Volksraad*. dari *De Volksraad En De Staatkundige Ontwikkeling Van Nederlands Indie*. Groningan: J.B. Wolters.
- Yamin Muhammad, Mr. 1954. *Pidato Penutup Kongres Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

BAHASA INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

A.M.W. Pranarka

Centre for Strategic and International Studies

Pendahuluan

Sebagai bagian dari rangkaian acara Kongres Bahasa Indonesia III ini, kepada kami disampaikan tugas untuk mengemukakan suatu ekspose tentang bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pengembangan kebudayaan nasional. Ada empat permasalahan yang diminta untuk diperhatikan :

- pertama : bagaimana hubungan antara pengembangan bahasa Indonesia dan pengembangan kedudukan nasional;
- kedua : sejauh manakah bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kebudayaan nasional;
- ketiga : bagaimana proses peranan bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan transfo.masi kebudayaan ke arah peradaban di Indonesia;
- keempat : usaha-usaha apakah yang diperlukan untuk meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai unsur kebudayaan nasional Indonesia yang hidup.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin dapat diajukan jawaban-jawaban secara langsung, singkat dan sederhana, dan segalanya dapat dianggap selesai. Namun, penugasan untuk mengemukakan pemikiran mengenai bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pengembangan kebudayaan nasional ini, tampaknya dimaksudkan untuk mengungkapkan konteks yang sedalam-dalamnya dan setepat-tepatnya. Tema Kongres Bahasa III ini meski-

pun mempunyai lingkup terbatas, tetapi pendalamannya dikaitkan dengan latar belakang yang luas. Pendekatan yang demikian ini kiranya memang sudah tepat. Bahasa pada umumnya tidak pernah dapat dilepaskan dari *Sitz im Leben* manusia. Bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik dan sejarah kebudayaan bahasa Indonesia. Konteks sosiopolitik dan konteks sosiokultural adalah amat penting bagi pengembangan bahasa Indonesia. Sebaliknya, perkembangan bahasa Indonesia juga mempunyai arti terhadap kehidupan sosiopolitik dan sosiokultural bangsa kita. Oleh karena itu, apa yang harus kami ajukan sebagai suatu bahan pemikiran di dalam Kongres Bahasa III ini adalah apa yang lazim dinamakan *analisis konteks*: khususnya konteks sosiokultural pengembangan bahasa Indonesia.

Beberapa Catatan Pengantar tentang Kebudayaan

Perkenankanlah kami mulai dengan mengemukakan apa yang pernah diungkapkan oleh van Baal sebagai berikut ini: "*Cultuur bestaat in de mens; vandaar gaat ze uit*". Kalau kata-kata itu kita terjemahkan secara bebas, tanpa mengurangi apa yang tersirat di dalamnya, dapatlah dikatakan bahwa kebudayaan itu awalnya ada pada manusia; dari sana ia memancar.

Konstataasi van Baal di atas merupakan salah satu ungkapan dari suatu arus yang amat besar artinya di dalam perkembangan studi dan analisis kebudayaan sejak sekitar empat puluh tahun yang lalu sampai kepada hari-hari ini.

Ada berbagai fase perkembangan di dalam studi atau pemikiran mengenai kebudayaan itu. Perkembangan pada fase pertama terutama terdiri dari catatan-catatan yang sifatnya deskriptif dan kebanyakan adalah naskah-naskah itineraria atau catatan perjalanan. Perkembangan pada fase kedua menunjukkan corak yang lebih analitis, tetapi ini pun mempunyai evolusinya tersendiri. Pada awalnya banyak ditemukan analisis atas dasar perbandingan antara kebudayaan Eropa dengan kebudayaan di luar Eropa, masih tidak jauh berbeda dari pola Yunani Kuno (ada kategori antara Hellas dan Barbaroi). Pada fase itu terdapat dua aliran pokok: teori evolusi dan teori degenerasi. Sesudah itu, analisis dan studi kebudayaan kebanyakan merupakan suatu transplantasi cabang-cabang disiplin pengetahuan ke dalam bidang kebudayaan dan kebanyakan sifatnya deterministik. Lahirlah berbagai macam aliran seperti interpretasi geografis, interpretasi biologis (determinisme ras, determinisme seks), interpretasi pralogis, psikologisme kebudayaan, determinisme ekonomi, interpretasi sejarah (aliran difusionisme, aliran kultur historis), dan interpretasi sosiologis. Tidaklah mengherankan bahwa ke-

mulian terdapat bermacam ragam definisi kebudayaan. Tidak pula mengherankan apabila kemudian terdapat konstataasi sebagai berikut.

"Ternyata pikiran ilmiah Barat tidak terlalu membantu kita di dalam memberikan pengertian tentang kebudayaan". Pada tahun 1952 Kroeber dan Kluchohn, misalnya, menemukan tidak kurang dari 166 definisi mengenai kebudayaan selama kurun waktu 1871-1952, yang diajukan oleh para antropolog, sosiolog, psikolog, dan lain-lain ilmu sosial, bahkan ahli kimia, biologi, dan falsafah. Setiap ilmuwan ini menyatakan batasan pengertiannya sendiri, tekanan arti sendiri, dan kadang-kadang meliputi berbagai isu yang bertentangan satu dengan lainnya. Para ahli antropologi yang biasanya gemar mengajukan konsep ilmiah tentang kebudayaan juga mengajukan pengertian yang terlalu polisemik sesuai dengan penggunaan istilah kebudayaan di dalam analisis permasalahan yang beraneka ragam, misalnya, akulturasi, keanekaragaman kebudayaan, kontak kebudayaan, pola kebudayaan. Diversitas pengertian kebudayaan dewasa ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga kebudayaan telah kehilangan ketepatan pengertian seperti yang pernah dialaminya di masa lampau sehingga menjadi kabur untuk dipegang. Ini pulalah kiranya yang menjadi sebab utama dari kesulitan di dalam usaha merumuskan sesuatu kebijakan (*policy*) kebudayaan; sebab bagaimana menerapkan sesuatu kebijakan di satu bidang yang sulit dirumuskan secara 'tepat' dahulu?¹

Perkembangan seperti itu merupakan akibat dari sejarah kebudayaan modern sendiri, yang memang menunjukkan suatu perkembangan yang amat kaya, penuh dengan macam kemungkinan, tetapi semakin kehilangan sintesis. Baik heterogenitas pendekatan maupun diversitas definisi mengenai kebudayaan yang kebanyakan bersifat dogmatik dan deterministik mengungkapkan kompleksitas dari apa yang dinamakan kebudayaan itu. Namun, pandangan-pandangan telah dipersempit oleh fanatisme cabang-cabang disiplin ilmu pengetahuan sehingga menutup cakrawala ke arah titik-titik komunikasi dan sintesis. Pemikiran mengenai kebudayaan yang berkembang terpecah-pecah di dalam keping-keping aliran yang fanatik dan tertutup satu sama lain itu tampaknya membangkitkan adanya suatu gerakan kritis, terutama untuk membuka jalan-jalan menuju kepada titik-titik sintesis, kepada komunikasi antardisiplin. Oleh karena itu, lahirlah antara lain aliran akulturasi dan aliran antropologi budaya, yang pada pokoknya menempatkan manusia sebagai konteks dasar dari apa yang dinamakan kebudayaan. Inilah arus baru di dalam perkembangan studi dan analisis kebudayaan, yang berkembang di sekitar pertengahan abad kedua puluh ini dan besar pengaruhnya sampai pada saat ini.

Proses yang demikian ini merupakan refleksi dari gerakan sejarah yang lebih besar dan lebih luas lagi: manusia mulai mengalami gejala titik jenuh perkembangan sejarah modern. Menyadari kompleksitas tetapi serta-merta mencari titik sintesis, menghilangkan sikap-sikap sempit dari fanatisme, determinisme, mengembangkan pola berpikir yang tidak berkeping-keping, melainkan secara lapang dan menempatkan manusia menjadi konteks dasar dari segala permasalahan atau pengalaman sejarah, kiranya merupakan arus kuat di dalam kontemporer dewasa ini. Sejarah modern yang kaya itu ternyata telah memecah-mecah manusia ini sendiri. Kalau Neitze pernah memproklamasikan *the death of God*, perkembangan modern mencanangkan pula tanda *the death of man*. Situasi ini mengakibatkan adanya kebangkitan baru yang berpangkal pada kesadaran manusia akan dirinya sehingga terdapat gejala *the ressurection of man* 'bangkitnya kemanusiaan'.

Antropologi dan humanisme merupakan istilah-istilah kunci di dalam alam pikiran kontemporer. "*A new humanisme ought to be established. It must have the power to renew. It ought to evolve within history; unless it has the power to renew, it is nothing*", demikian tulis Maritain (1939) seorang filsuf dan diplomat Prancis menanggapi perkembangan sejarah modern yang dirasanya menjadi semakin gawat. Situasi ini dengan sendirinya membawa kebudayaan menjadi fokus yang semakin penting. Kebangkitan kemanusiaan (*the ressurection of man*) tidak lain adalah ditemukannya kembali arti kebudayaan (*the rediscovery of culture*). Orang melihat kebudayaan sebagai suatu jalan dan tumpuan harapan di dalam krisis-krisis besar dunia dewasa ini. Kebudayaan dipandang sebagai suatu proses humanisasi untuk menghindarkan perkembangan ajaran dari dehumanisasi. Kebudayaan merupakan jalan-jalan setapak yang secara terus-menerus harus dilewati umat manusia. Manusia baik secara individual maupun secara kolektif mengidap suatu tegangan eksistensial, tegangan antara humanisasi. Beban tegangan eksistensial, tegangan antara humanisasi. Beban tegangan eksistensial ini hanya dapat diatasi apabila kebudayaan oleh manusia dijadikan pilihan yang jelas dan sadar.

Dalam keadaan demikian refleksi dan analisis antropologis, (tidak sekedar dalam pengertian antropologi budaya, tetapi dalam arti kemanusiaan, *humaniora, humanities*), tentu saja menjadi penting sekali artinya. "*Was ist der Mensch und was ist seine Stellung im All*". Apakah manusia itu dan apakah posisi dia di dalam semesta? Kalau permasalahan Scheler ini kita pandang sebagai suatu ungkapan seorang fenomenolog dan seorang eksistensialis yang sungguh-sungguh, permasalahan itu bukanlah sekedar masalah falsafah, tetapi

ia terutama adalah masalah kultural. Jawaban kepada pertanyaan Scheler ini tidak lain daripada menjadikan kebudayaan sebagai pilihan: menjadikan manusia titik sintesis dari kompleksitas masalah hidup dan sejarah.

Tempat manusia di dalam evolusi—atau lebih tepat koevolusi semesta itu makin lama terasa makin menjadi jelas. Manusia bukanlah sekedar satu gejala kosmis, tetapi ia terutama adalah kekuatan kultural. Sejarah dunia mulai berubah menjadi sejarah kebudayaan semenjak manusia menggejala di dunia. Ada tiga fase di dalam koevolusi semesta itu, yang berlangsung di dalam suatu kesinambungan sejarah: fase kosmogensis (terjadinya kosmos), fase biogenesis (terjadinya kehidupan), dan fase noogenesis (fase terjadinya manusia, fase kebudayaan). Kita sekarang berada di dalam fase ketiga, fase noogenesis, fase kebudayaan. Fase ini terjadi semenjak manusia menggejala di dunia. Amat menarik perhatian bahwa istilah noogenesis itu diangkat dari kata Yunani *nous* dan *genesis* dan kata *nous* itu amatlah berdekatan artinya dengan istilah budi di dalam bahasa kita.

Bukanlah maksud kami mengemukakan suatu uraian mengenai falsafah manusia. Namun, berkembangnya suatu kebudayaan akan sangat memerlukan adanya pemahaman secara sadar mengenai struktur ontologi manusia. Secara eksplisit ataupun secara implisit pemahaman mengenai struktur ontologi manusia dan bahkan struktur ontologi semesta amat besar pengaruhnya kepada perkembangan, corak, dan bentuk kebudayaan itu. Oleh karena itu, adanya suatu falsafah manusia yang terjalin dengan suatu falsafah tentang dunia yang refleksif, sadar, sistematis, dan kritis akan merupakan salah satu landasan pengembangan kebudayaan.

Tampaknya sudah menjadi semacam konsensus di dalam antropologi falsafah bahwa pada hidup manusia ini secara inheren diakui terdapatnya apa yang dinamakan tegangan eksistensial: antara personalitas dan sosialitas, antara dinamika dan keterbatasan, antara lahiriah dan batiniah, antara dimensi horisontal dan vertikal. Istilah-istilah itu digunakan untuk mengungkapkan struktur dasar ontologi hidup manusia serta dengan mengatasi kepincangan dan kesempatan bermacam-macam falsafah tentang manusia. Rumusan struktur ontologi manusia seperti itu didasarkan atas interpretasi pengalaman hidup manusia sebagai suatu kemanunggalan antara yang jasmani dan rohani, baik yang bergerak di dalam dimensi relasional secara horisontal (dengan alam sekitar dan sesama manusia) maupun secara vertikal (*dengan yang Tiada Batas*) *Geist-im-Welt, Sein, das Leben des Mit-sein, Geschichte*, komunikasi, dan komitmen merupakan istilah-istilah kunci di dalam antro-

pologi falsafah dewasa ini dan memang mengungkapkan pengalaman dasar kehidupan kita. Pengalaman itu mengungkapkan pengalaman dasar kehidupan kita. Pengalaman itu mengungkapkan bahwa manusia adalah pribadi, yang berada di dunia, berada di dalam masyarakat, berada di dalam sejarah, bergerak menembus keterbatasan-keterbatasan. Kehidupan adalah suatu proses aktif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia adalah mempribadi, memasyarakat, menyejarah. Itu semua adalah proses humanisasi, proses sosialisasi, proses kebudayaan. Manusia membudayakan dirinya, membudayakan masyarakatnya, dan membudayakan alamnya.

Beban eksistensial yang ada di dalam struktur ontologi manusia membawa akibat bahwa manusia, baik secara individual maupun secara kolektif, akan selalu berhadapan dengan simpang sejarah. "*De mens kan steeds twee kanten uit; zichzelf vernietigen ofwel ziech zelf vervolmaken*".³ Manusia selalu dapat memilih dua jalur eksistensi: jalur humanisasi atau jalur dehumanisasi. Jalur humanisasi adalah kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan akan selalu berarti 'pilihan eksistensi', 'pilihan eksistensi manusia'. Kebudayaan adalah dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kultural itu, manusia mempunyai bekal-bekal perlengkapan yang berupa daya-daya kehidupannya. Ada daya-daya fisik biologis, ada daya-daya kognitif, volitif, psikis, dan ada daya-daya relasional. Dengan daya-daya itu manusia membudaya, baik secara pribadi maupun secara masyarakat, peranan pengetahuan dan komunikasi mempunyai arti yang amat besar. Dengan pengetahuan manusia memperoleh prbendaharaan dari hal-hal yang diketahui mengenai masa lampau dan masa kini, mengenai apa-apa yang pernah diciptakan dan yang sedang dalam proses penciptaan. Berkat pengetahuan manusia dibantu untuk memahami dengan baik dirinya sendiri, hubungannya dengan manusia-manusia lainnya, hubungannya dengan alam di lingkungan hidupnya, dan kaitannya dengan alam di lingkungan hidupnya, dan kaitan kegiatannya dengan kegiatan warga masyarakat lainnya. Dengan praktik komunikasi dipenuhilah kebutuhan manusia untuk mendapat informasi mengenai perkembangan keadaan yang semakin kompleks dan berhubung pada waktu yang bersamaan ada pula kebutuhan dari anggota masyarakat lainnya, untuk memberi tahu apa-apa yang diciptakannya kepada pihak lain. Masyarakat sebagai keseluruhan, demi perkembangan yang sehat dan teratur, memang diperlukan anggota-anggota yang tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu berkomunikasi secara korek, teratur, diajukan secara jelas dan eksplisit, serta tercatat.⁴

Apabila kebudayaan harus menjadi pilihan eksistensi manusia, apabila kebudayaan adalah jalan-jalan setapak yang manusia secara terus-menerus harus melewatinya, maka hanya konsep kebudayaan yang lapang dan dinamis yang akan memungkinkan manusia memberikan jawaban-jawaban kepada masalah-masalah hidup dan sejarah yang semakin kompleks sifatnya.

Arus yang demikian tadi tampaknya telah pula ikut mewarnai perkembangan di Indonesia, sekurang-kurangnya sekitar sepuluh tahun terakhir ini. Hal itu mungkin disebabkan oleh tradisi humanistik ternyata cukup kuat di dalam budaya Indonesia. Akan tetapi, bagaimanapun juga kita, sebagai bagian dari sejarah besar umat manusia, tidak dapat melarikan diri dari pengalaman-pengalaman besar di dalamnya. Hanya saja, di dalam menghadapi masalah di atas, beberapa tahun yang lalu itu kita belum juga sampai kepada pilihan-pilihan yang tegas. Terasa cukup sukar untuk sampai kepada suatu politik kebudayaan yang sadar dan jelas. Hal itu antara lain mungkin disebabkan oleh pengaruh perkembangan pengertian kebudayaan sehingga di dalam usaha mendalami permasalahan kebudayaan tidak jarang kita terperangkap kepada suasana permainan kata-kata. Hal itu mungkin pula memang disebabkan oleh situasi kita dewasa ini, sebagai suatu situasi transisional, tempat menentukan pilihan-pilihan dalam menghadapi kompleksitas masalah memang harus terjadi, dan memerlukan waktu. Mungkin kebanyakan dari kita masih ingat betapa beberapa waktu yang lalu kita dilibatkan dengan kontroversi serta ditinggi yang agak bertele-tele mengenai kebudayaan dengan "K" (*k* besar) dan kebudayaan dengan *k* (*k* kecil).

"Pendidikan merupakan bagian yang integral dari kebudayaan, sama halnya dengan tulisan merupakan bagian yang integral dari teknologi. Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah cara yang dipakai untuk meneruskan nilai-nilai kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya, sedangkan kebudayaan merupakan sekaligus semangat yang menjiwai pendidikan dan kerangka tempat diletakkan setiap pemikiran dan perbuatan di bidang pendidikan", demikianlah diucapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Hari Pendidikan Nasional di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1978 ini. Tidaklah mengherankan bahwa *policy statement* Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mendapat sambutan yang lega. Pernyataan di atas menciptakan suatu suasana baru di mana kebijakan kebudayaan nasional yang jelas dan sadar telah menjadi suatu pilihan, sekurang-kurangnya secara konseptual. *Policy statement* itu telah memberi warna kepada perkembangan kehidupan masyarakat dan tentunya menjadi arah aksi kebudayaan.

Kenyataan ini perlu sekali kita sadari, terutama pada saat-saat mengawali terselenggaranya Kongres Bahasa Indonesia III ini. Kebudayaan nasional itu adalah pilihan eksistensi. *Policy statement* pendidikan dan kebudayaan itu tidak lain adalah penegasan kembali lipihan eksistensi bangsa ini. Oleh karena itu, Kongres Bahasa III ini terlaksana di dalam momentum yang tepat sekali: ia terjadi pada saat kebijakan kebudayaan nasional mulai menjadi suatu bentuk pilihan yang tegas. Kongres ini terjadi di dalam konteks kultural yang sadar.

Bahasa dan Kebudayaan

Pada tempatnyalah sekarang kami mulai mengadakan suatu ulasan mengenai hubungan antara bahasa dengan kebudayaan. Tidak jarang dikemukakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi merupakan bagian penting di dalam kebudayaan. Oleh karena itu, bahasa pun mempunyai arti yang penting di dalam kebudayaan itu pula. Tidak jarang dikemukakan bahwa bahasa adalah sarana di dalam kebudayaan. Pernyataan-pernyataan itu tidak salah, hanya saja tampaknya kurang tepat. Memang betul bahasa adalah sarana. Namun, ia berbeda dengan sebuah batu yang dapat menjadi sarana bagi kita ataupun sebuah pisau yang dapat juga menjadi suatu sarana.

Lebih dari sekedar sarana (atau kalau ia dinamakan sarana haruslah dalam arti yang istimewa) bahasa adalah manifestasi manusiawi *paraxcellence*; bahasa adalah ekspresi manusiawi. Di dalam bahasa tercerminlah seluruh aspek ontologi manusia. Di dalam bahasa tercerminlah tagangan eksistensial, tercerminlah dialektika antara rohani dan jasmani, personalitas dan sosialitas, dinamik dan keterbatasan. Bahasa adalah sesuatu yang amat dekat, bahkan melekat pada struktur dasar manusia ini sendiri. Oleh karena itu, bahasa merupakan bagian yang amat khusus dari suatu kebudayaan. Kalau hidup manusia bagaikan api yang menyala, kebudayaan adalah panasnya dan bahasa adalah nyalanya.

Itulah sebabnya, analisis bahasa telah mempunyai perkembangan yang amat khusus. Semula analisis bahasa adalah bagian dari aliran postivisme. Namun, perkembangan selanjutnya justru merupakan suatu kritik terhadap positivisme itu. Dewasa ini analisis bahasa seperti tampak di dalam perkembangan epistemologi dan hermenetika merupakan salah satu cabang pengetahuan manusia yang amat penting. *Language analysis* tampaknya akan mempunyai tempat yang semakin penting di dalam perkembangan ilmu kemanusiaan. *Language analysis* tampaknya akan berkembang sejajar, kalau tidak lebih jauh, dari *system analysis*, sebab kalau manusia adalah akar dari segala

permasalahan sejarah ini, tidak dapat tidak kita harus mempelajari akar itu sendiri, dan bahasa merupakan jembatan yang paling baik untuk dapat menyelami manusia itu.

Perkembangan hidup manusia, dan karena itu juga perkembangan kebudayaan akan selalu membawa serta aspek semantis, aspek ontologis, aspek deontologis, dan aspek epistemologis. Aspek-aspek ini satu sama lain amatlah berkaitan. Oleh karena bahasa itu adalah suatu manifestasi manusiawi, suatu ekspresi manusiawi, maka bahasa tidaklah sekedar termasuk ke dalam aspek semantis. Ia juga terjalin dengan aspek ontologis, aspek deotologis, dan aspek epistemologis. Oleh karena itu, bahasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kebudayaan, baik kebudayaan itu kita pandang sebagai pilihan eksistensi, baik itu menyangkut proses pengetahuan dan komunikasi maupun kalau kebudayaan itu kita pandang berkenaan dengan perkembangan logika, estetika, dan etika.

Apakah ini artinya? Sebagaimana kita dapat mendalami kebudayaan secara sepotong-sepotong, demikian pun halnya dengan masalah bahasa. Bahasa bukanlah sekedar masalah semantik. Ia adalah masalah logika dan masalah lainnya lagi. Bahasa berhimpit pada induknya, yaitu manusia dan kebudayaan. Ini berarti bahwa segala usaha pengembangan bahasa kita, juga tidak dapat dilihat secara sepotong-sepotong, apalagi tanpa memperhatikan konteks utamanya: sejarah bangsa ini, terutama sejarah kebudayaannya, baik masa lampau, kini, dan perkembangannya maupun dinamik intinya yang amat esensial. Mengembangkan bahasa nasional berarti mengembangkan kebudayaan nasional. Ini harus berarti bahwa kebudayaan nasional bagi kita memang telah menjadi satu pilihan eksistensi.

Apa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 tampaknya memang merupakan contoh yang amat bagus dari kenyataan itu. Konteks politik nasional, konteks budaya nasional, dan bahasa nasional berpadu. Pada saat itu terjadi pilihan eksistensi kebudayaan nasional, terjadi pilihan politik nasional, dan terjadi pilihan bahasa nasional. Ditegaskannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bersamaan jatuhnya dengan pilihan akan politik nasional, pilihan akan kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah induk radikal dari segala macam manifestasi kegiatan hidup manusia, termasuk bahasa dan politik. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa perkembangan bahasa Indonesia serta dengan perkembangan negara kesatuan dan kebangsaan Indonesia pada hakikatnya adalah buah dan ungkapan dari dinamika kebudayaan nasional. Dalam pengertian inilah kita dapat berbicara mengenai nasionalisme dalam arti kultur l.

Sudah banyak diusahakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia. Ejaan baru, peristilahan, pembakuan, penentuan kaidah-kaidah; semuanya sedang di dalam proses penggarapan. Tidak jarang kita merasakan adanya hambatan-hambatan. Kadang-kadang masalahnya ingin kita pecahkan melulu melalui penertiban-penerbitan di bidang kebahasaan saja. Dengan menyadari betapa erat kaitan yang ada antara bahasa nasional dengan kebudayaan nasional ini, sekurang-kurangnya kita perlu melihat lingkup persoalannya secara lebih luas. Walaupun ungkapan permasalahan itu terdapat di bidang bahasa, tidaklah akarnya kadang-kadang harus kita temukan di dalam perkembangan kebudayaan nasional secara luas. Akan tetapi, sebaliknya, situasi kultural bangsa ini sendiri akan mempengaruhi pula pengembangan bahasa Indonesia itu. Politik bahasa nasional akan besar artinya terhadap politik kebudayaan nasional. Sebaliknya, politik kebudayaan itu akan menentukan pula perkembangan politik bahasa. Sebab keduanya adalah bagaikan panas api dan nyalanya. Oleh karena itu, jelas apabila kongres ini ingin meletakkan basis-basis yang kukuh di dalam politik bahasa nasional, kongres bahasa ini harus meminta diletakkannya basis-basis kukuh dan sadar bagi politik kebudayaan nasional.

Ada dua contoh yang mungkin dapat kami ajukan. Pertama, di dalam pengembangan penggunaan bahasa terutama yang tertulis kita menginginkan adanya *accuracy*, *precision*, dan karena itu perlu *discipline*. Hambatannya banyak. Pengalaman dari lapangan pendidikan formal tidak jarang mendedahkan rasa kecewa. Akan tetapi, tidakkah itu semua justru masalah pokok di dalam kebudayaan kita? Tidakkah *accuracy*, *precision*, dan *discipline* itu merupakan unsur-unsur yang sedang kita tanamkan di dalam kehidupan budaya kita?

Contoh lain adalah masalah bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Bagaimana sikap kita? Bagaimana ditentukan? Kami rasa alternatif-alternatif apa pun yang kita pilih harus selalu didasarkan kepada situasi kultural kita. Bahasa daerah harus kita pandang sebagai bagian dari perkembangan manusiawi. Sementara itu, kita harus melihat pula bahwa manusia Indonesia ini terlibat dengan berputarnya tiga roda sistem-sistem yang berjalan berkaitan satu dengan yang lain, yakni sistem nasional, sistem regional, dan sistem global.

Tentang hal-hal ini kiranya nanti masih perlu kita bahas sekali lagi, tetapi baiklah kita menengok sebentar situasi kultural kita dewasa ini dan apa implikasinya pada masalah pengembangan bahasa Indonesia.

Situasi Kultural Kita Saat Ini

Bagaimanakah situasi kultural kita saat ini? Ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan terlebih dahulu. Pertama adalah bahwa kebudayaan itu selalu berada di dalam status dinamis: ia berkembang terus. Kedua, kiranya ada baiknya kalau mulai sat ini analisis kita mengenai kebudayaan nasional tidak terlalu *introvert* lagi, tetapi lebih bercorak *extrovert*. Kita perlu menempatkan kebudayaan nasional di dalam konteks perkembangan regional dan mondial karena di situlah kancah masa depan bangsa kita.

Secara kultural kita terlibat di dalam suatu situasi transformasi yang besar, pesat, dan menyeluruh. Besar karena ia terjadi secara serentak di hampir segala penjuru dunia, pesat karena ia terjadi di dalam tempo yang kadang-kadang tak terkendali. Menyeluruh karena ia menyangkut hampir segala bidang kehidupan: pengetahuan, ekonomi, teknologi, politik, bahasa, kesenian, dan religi. Transformasi itu adalah transformasi kultural karena manusia adalah awal dan tujuan serta sebab dan penderita dari situasi itu.

Proses transformasi seperti itu terjadi di dalam kenyataan yang serba jalin-menjalin di dalam interelasi dan interdependensi. Semua ini telah melahirkan apa yang dinamakan dalil kompleksitas, yang kerap kali menimbulkan rasa insekuri dan ketidakpastian.

Hal di atas adalah gejala-gejala yang kita alami semua. Kita terlibat di dalam sejarah yang makin lama semakin kompleks: kompleksitas permasalahan pribadi, kelompok, kompleksitas permasalahan nasional, kompleksitas permasalahan internasional, dan regional.

Dalil kompleksitas itu harus dihadapi dengan dalil "centricitas". Kita harus mampu membangun sintese regional. Dialektika antara kompleksitas dan sintesis adalah kerangka yang penting di dalam usaha memahami situasi kultural kita.

Transformasi, kompleksitas, dan sintesis adalah *opgave* kultural dunia dewasa ini dan situasi ini hanya dapat kita hadapi apabila kita mampu mentransformasi proses kebudayaan menjadi peradaban. Artinya, di dalam perkembangan kebudayaan kita harus ciptakan peradaban. sebab *orgave* kultural hanya akan dapat diselesaikan dengan peradaban sebagai kekuatan.

Ada tiga elemen pokok dari peradaban itu: penggunaan tulisan, pembagian kerja yang menjurus ke arah perkembangan spesialisasi profesional, dan pertumbuhan kota sebagai tempat pemukiman manusia. Pada

dasar, nya hal ini berkenaan dengan teknologi, pengetahuan, organisasi, dan ekonomi.

Elemen-elemen peradaban itu untuk perkembangan masyarakat Indonesia merupakan bidang-bidang yang amat urgen, terutama karena kita saat ini sedang berada di dalam fase akulturasi ketiga. Hipotesis akulturasi ketiga ini mengandaikan adanya fase akulturasi kedua dan akulturasi pertama, serta mengandaikan adanya masyarakat dan kebudayaan Nusantara awal, yang sudah mulai terbentuk sebelum terjadi fase akulturasi pertama dan kedua. Yang kami maksud dengan fase akulturasi pertama adalah akulturasi elemen-elemen kebudayaan Hindu ke dalam kebudayaan Indonesia, fase akulturasi kedua adalah akulturasi Islam ke dalam kebudayaan Indonesia.

Adapun fase akulturasi ketiga adalah akulturasinya elemen-elemen kebudayaan modern ke dalam kebudayaan Indonesia. Kalau di dalam fase akulturasi pertama dan kedua perubahan-perubahan/transformasi setelah terjadi di dalam fase akulturasi ketiga perhatian harus lebih banyak diarahkan kepada transformasi pengetahuan, teknologi dan ekonomi, yang tentu saja akan membawa efek-efek terhadap bidang-bidang lainnya pula seperti bahasa, kesenian, politik, dan religi.

Fase akulturasi ketiga, sebagai *opgave* kultural, hanya akan dapat kita hadapi dengan dikembangkan, dihayati dan dilaksanakannya disiplin, kerja keras, rasionalitas, ketepatan, ketelitian. Sekali lagi: kerja keras, disiplin, *precision* dan *accuracy* sebagai perangkat peradaban baru yang kita perlukan. Kalau tidak, kita akan ditenggelamkan oleh tantangan sejarah. Kita akan tergilas oleh roda sejarah dunia.

Dalam hal inilah menjadi jelas kaitan antara pengembangan bahasa dengan masalah transformasi kebudayaan ke arah peradaban. Pengembangan bahasa Indonesia, di dalam konteks kultural dewasa ini, harus ditempatkan ke dalam kerangka fase akulturasi ketiga sebagai *opgave* kultural. Di sinilah pentingnya apa yang dinamakan pembinaan bahasa matematika, yang tekanannya adalah dalam *discipline*, *accuracy*, dan *precision*.

Yang dimaksud dengan bahasa matematika bukanlah bahasa universal (ilmu) matematika, tetapi suatu bahasa yang kata-katanya mempunyai pengertian atau konsep yang jelas dan eksplisit. Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern mungkin memerlukan pengertian dan definisi baru untuk berbagai macam ungkapan dan konsep yang selama ini dikenal dalam kata-kata yang diambil dari bahasa daerah. Mungkin masalahnya di sini bukan

hanya terbatas pada konsep-konsep yang terjelma dalam kata-kata, tetapi juga menyangkut aturan pembentukan kata-kata dan jalan serta susunan kalimat sebab kata-kata itu mesti tersusun dalam jalan pikiran yang berbeda dari jalan pikiran dalam kebudayaan tradisional. Betapa tidak. Bahasa daerah sebagai lanjutan suasana kebudayaan tradisional lebih banyak dikuasai oleh naluri, fantasi, mite, dan perasaan, sedangkan suasana kebudayaan yang sedang berkembang ke arah peradaban lebih banyak dikuasai oleh rasio, inisiatif, perhitungan dan karenanya ketepatan. Jadi, bahasa matematika perlu untuk mengukur kekuatan dan ketepatan penalaran, kepastian ucapan, dan pernyataan. Betapa diperlukannya bahasa seperti ini di dalam politik. dan di kalangan orang-orang yang menduduki teknostruktur sosiopolitik. Untuk keperluan ini mungkin usaha penyusunan kamus istilah perlu ditingkatkan dan penyebarannya perlu semakin diperluas.⁵

Penggunaan bahasa Indonesia secara baik, tepat, dan bertanggung jawab tampaknya merupakan salah satu tujuan pengembangan bahasa Indonesia saat ini. Pilihan arah ini kiranya memang tepat.

Tanggung jawab! Hal ini termasuk hal yang esensial. Karena elemen tanggung jawab itu salah satunya adalah tanggung jawab intelektual. Pada kesempatan ini kami ingin mengemukakan suatu hal yang belum banyak ditangani di Indonesia ini. Di muka kami kemukakan adanya empat aspek kebudayaan: aspek semantis, aspek antologis, aspek deontologis, dan aspek epistemologis. Aspek semantis berkenaan dengan struktur bahasa. Aspek ontologis meliputi konstruksi kita mengenai realita, mengenai manusia, dunia, Tuhan. Deontologis berkenaan dengan kaidah-kaidah, sedangkan aspek epistemologis merupakan pertanggungjawaban intelektual mengenai pengetahuan kita berkenaan dengan aspek semantik, ontologis atau deontologis.

Aspek semantis, ontologis, dan deontologis sudah cukup berkembang dan banyak perhatian. Aspek epistemologis masih merupakan *terra incognita* bagi kebanyakan kita. Padahal perkembangan epistemologi secara sadar dan refleksif akan amat mendewasakan perkembangan kebudayaan, terutama karena ada tuntutan secara sadar untuk selalu mempertanggungjawabkan apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita pilih, dan kita lakukan

Tanggung jawab, *precision*, *accuracy*, disiplin dan kerja keras, adalah ciri-ciri kebudayaan Indonesia di masa mendatang. Hanya dengan penghayatan ciri-ciri itulah, di samping persatuan dan kesatuan nasional akan terwujud

suatu ketahanan kultural untuk menghadapi perputaran roda sejarah dunia.

Agar hal yang tertera di atas dapat dicapai, pendidikan harus amat memperhatikan berkembangnya ciri-ciri itu. Belajar dan berlatih secara sadar menggunakan bahasa Indonesia secara baik, tepat, dan bertanggung jawab jelas mempunyai nilai edukatif yang besar artinya untuk masa depan itu. Akan tetapi, di sini pun berlaku perumpamaan tentang panas api dan nyalanya: politik bahasa yang meminta adanya disiplin, ketepatan, dan ketelitian akan meminta adanya politik kebudayaan di mana disiplin, ketepatan, ketelitian, dan kerja keras merupakan nilai-nilai yang amat ditekankan—tentu saja jangan sampai mengakibatkan efek-efek yang menjurus ke arah dehumanisasi.

Beberapa Masalah Khusus

Sesudah mencoba mendalami arti kebudayaan, sesudah mengulas hubungan antara bahasa dan kebudayaan, dan sesudah membahas peranan bahasa di dalam transformasi kebudayaan dengan implikasinya pada ketahanan kebudayaan maupun proses pendidikan, ada tiga masalah khusus yang kiranya perlu kita perhatikan tanpa lepas dari konteks dasarnya, yaitu :

1. masalah bahasa daerah;
2. masalah bahasa nasional; dan
3. masalah bahasa asing.

Eratnya hubungan antara kebudayaan dan bahasa membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa bahasa adalah pintu untuk perkembangan eksistensial seorang manusia dan sekelompok manusia. Lewat pintu itu ia mengenal dan juga dikenal lingkungan eksistensinya. Dalam hal ini perlu sekali kita memberi perhatian kepada apa yang dikemukakan oleh de Saussure, yaitu perbedaan antara *parole*, *langue*, dan *language*: antara bahasa percakapan, bahasa peradaban dan bahasa sebagai objek ilmu pengetahuan. Yang lebih penting tampaknya adalah mengaitkan tiga macam distingsi itu dengan eksistensi manusia sendiri.

Kita tahu bahwa seorang anak manusia lahir. Ia ada karena Tuhan menghendaki dan karena perbuatan orang tua (orang dewasa). Yang ingin kami kemukakan adalah bahwa pada kelahiran ini apa yang dinamakan pilihan eksistensi itu praktis tidak ada. Jadi, di dalam awal perkembangan hidup manusia, eksistensi itu diberikan, dan kadar kebudayaan masih pada suatu fase permulaan, yang sifatnya amat bergantung kepada lingkungan hidup. Eksistensi ini akan makin berkembang, pilihan eksistensi menjadi semakin sadar, kadar kebudayaan menjadi berkembang pula.

Bahasa daerah harus diberi arti berdasarkan hubungannya dengan level eksistensi awal itu. Bahasa daerah adalah bahasa kelahiran, bahasa yang akan ikut membentuk evolusi awal eksistensi seorang manusia. Inilah fungsi pertama-tama dari bahasa daerah. Ia akan ikut meletakkan dasar-dasar kepribadian. Oleh karena itu, bahasa daerah pertama-tama adalah keluarga.

Bahasa Indonesia adalah bahasa dalam level pilihan eksistensi yang sudah lebih sadar. Ia adalah bahasa kebudayaan nasional, mungkin lebih tepat: bahasa peradaban dalam rangka kebudayaan. Ia diperlukan dan bahkan menjadi keharusan di dalam level pilihan eksistensi manusia Indonesia. Dengan perkataan lain, bahasa Indonesia diperlukan dalam perkembangan kebudayaan manusia Indonesia, baik individual maupun kolektif. Oleh karena itu, lebih diperhatikan di dalam sistem pendidikan nasional sebab ia adalah sarana penting bagi transformasi diri manusia Indonesia dan juga masyarakat Indonesia.

Dengan melihat bahasa daerah dan bahasa Indonesia di dalam konteks evolusi eksistensi manusia di atas, proporsinya dapat dijelaskan dan atas dasar itu dapat ditata paket-paket penanganannya.

Mungkin dalam hal hubungan antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia dapat dikemukakan catatan lain. Pertama bahwa di dalam proses pembudayaan itu bahasa daerah mempunyai fungsi mengantar ke arah perkembangan kebudayaan nasional. Kedua bahwa bahasa daerah pun juga mempunyai nilai-nilai khas merupakan manifestasi dari suatu sistem kebudayaan pula sehingga ia menjadi bagian yang memperkaya kebudayaan Indonesia yang bersifat Nusantara dan *bhinneka tunggal ika* ini. Yang terakhir ini penanganannya terletak di dalam pilihan kebijakan kebudayaan yang lebih sadar. Akan tetapi, bagaimanapun arti terpenting bahasa daerah, sebagai bahasa kelahiran adalah fungsinya di dalam evolusi awal eksistensi manusia. Memang dapat terjadi disebabkan oleh lingkungan perkembangan kebudayaan dan terutama peradaban bahwa bahasa Indonesia sudah pula menjadi bahasa dari fase eksistensi awal tersebut.

"Bahasa kelahiran untuk sebagian besar, walaupun tidak terbesar, anak Indonesia berupa bahasa daerah. Sebagai bahasa ia adalah alat pemikiran, penanggapan (persepsi), perhubungan, dan pengucapan (ekspresi) yang terbaik dalam lingkungan kebudayaan dan masyarakat yang menggunakan dan memiliki bahasa itu. Dikatakan terbaik karena ia dapat membantu individu

yang menghayatinya di dalam memupuk spontanitas dan kehalusan jiwa (*spirit*) dan di dalam hal pengenalan (eksplorasi) dari makhluk dan benda. Di pihak lain, tetap mempunyai kepentingan kebudayaan yang pantas dikembangkan dalam arti ia merupakan satu penjelmaan yang khas dari suatu sistem nilai (kebudayaan) yang khas. Namun, harga dan kepentingan kebudayaan dari bahasa daerah (kelahiran) ini bukanlah terletak pada sifatnya yang khas, bukan pula pada tradisi dan partikularisme yang dinyatakannya, melainkan pada nilai-nilai manusiawi yang dikandungnya, pada arti sumbangan yang dapat diberikannya untuk pembentukan bahwa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kebudayaan nasional dan mondial. Berkaitan dengan semua ini masalahnya lalu berupa intensitas pengajarannya di dalam sistem pendidikan formal di samping penelitian dan pencatatan yang pantas dilakukan agar ia tidak punah d.landa arus bahasa persatuan”.

Apakah yang masih perlu dikata tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Yang jelas perkembangan bahasa Indonesia adalah buah perkembangan sejarah kebudayaan—termasuk di dalamnya sejarah politik—yang dapat dibandingkan. Ia mengungkapkan adanya daya kekuatan kebudayaan nasional. Mungkin memang masih perlu adanya daya kekuatan kebudayaan nasional. Mungkin memang masih perlu adanya suatu studi mengenai: mengapa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa nasional. Teori mengenai toleransi mayoritas, yaitu toleransi orang Jawa, adalah salah satu percobaan interpretasi yang terjadi kemudian. Memang tidak dapat diingkari bahwa di dalam proses itu tercermin aspek toleransi. Akan tetapi, argumentasi ini untuk tidak mengatakan kurang dapat diterima tampaknya amat lemah. Tidakkah proses ini memang merupakan akibat dari perkembangan suatu substrat kultural Nusantara, yang memang melandasi perkembangan masyarakat dan kebudayaan Nusantara, bahkan mungkin lebih luas dari sekedar wilayah Indonesia ini? Dengan perkataan lain: bahasa nasional dapat terjadi karena dinamika kebudayaan nasional itu memang nyata ada dan mungkin mempunyai akar-akarnya di masa-masa yang jauh silam.

Masalah terpenting yang harus mendapat perhatian adalah masalah hubungan pengembangan bahasa Indonesia dengan situasi kultural bangsa Indonesia dewasa ini. Hal itu sudah banyak kami ulas di muka, terutama berkenaan dengan proses transformasi ke arah peradaban, di dalam konteks fase akulturasi ketiga. Secara kultural diperlukan perkembangan kehidupan

bangsa di mana dititikberatkan kerja keras, disiplin, ketelitian, dan kecepatan, yang tentu ada hubungannya dengan pengembangan bahasa Indonesia sebagai manifestasi dan ekspresi dari kebudayaan nasional. Dengan kata lain, jalinan dialektik antara kebudayaan, politik, dan bahasa yang terungkap di dalam Sumpah Pemuda beberapa tahun yang lalu, harus terlaksana pula di dalam kancah sejarah sekarang dan masa mendatang.

Oleh karena kancah di masa mendatang bagi bangsa Indonesia adalah kancah mondial dan regional, maka masalah mengenai bahasa asing memang amat penting artinya. Ada dua pertimbangan mengapa bahasa asing menjadi suatu masalah yang harus kita pikirkan secara sungguh-sungguh. Pertama-tama bahasa adalah pintu perkembangan eksistensi manusia, baik dalam taraf individual maupun dalam taraf kolektif. Lewat pintu itulah perkembangan eksistensi dapat diperkaya. Kedua wilayah Indonesia yang dengan sendirinya akan selalu mempunyai implikasi sosial politik, sosial ekonomi, dan dengan sendirinya juga sosiokultural.

Di muka sudah dikemukakan bahwa kancah masa depan bangsa Indonesia adalah kancah mondial dan regional. Kita tidak dapat bersikap eskapistis dan memang tidak akan dapat melarikan diri dari perputaran sejarah besar umat manusia. Kita harus secara sadar dan berani memasuki perputaran roda itu, tetapi untuk itu perlengkapan kita harus diperkuat, dan salah satu perlengkapan itu adalah pintu-pintu lewat mana bangsa Indonesia akan dapat secara sadar dan berani memasuki perputaran roda sejarah umat manusia itu. Bahasa asing perlu kita lihat sebagai salah satu dan pintu-pintu itu.

Di sini masalahnya adalah menentukan bahasa asing manakah yang akan menjadi perlengkapan eksistensi bangsa kita di dalam konteks sejarah kebudayaan dunia dewasa ini. Kebanyakan kita cenderung untuk memilih bahasa Inggris sebagai pilihan utama. Masalah selanjutnya adalah bagaimana cara membuat bahasa itu menjadi suatu perbekalan untuk masyarakat Indonesia. Di sini terdapat beberapa alternatif, sekurang-kurangnya ada dua kemungkinan. Pertama, secara tegas-tegas mengharuskan penguasaan satu bahasa asing itu sebagai persyaratan untuk perkembangan kebudayaan, perkembangan peradaban sehingga dengan demikian maka masing-masing dan aktif. Pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah bagi tingkat-tingkat tertentu, bahasa itu harus menjadi suatu keharusan bangsa secara luas dan merata, yang penting bukanlah penguasaan bahasa asing itu, melainkan bagaimana dapat menimba unsur-unsur yang baik dan memperkaya dari luar se-

hingga permasalahannya menjadi bagaimanakah menerjemahkan kebudayaan khasanah kebudayaan dari luar itu untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh bangsa di seluruh tanah air kita ini. Namun, oleh karena kancah masa depan Indonesia adalah kancah mondial dan regional, maka jelas sekali bahwa penguasaan bahasa asing utama itu harus merupakan kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar bagi kelompok-kelompok elite strategis di dalam pengembangan kebudayaan bangsa kita ini sebab penguasaan bahasa ini akan besar sekali artinya untuk menopang evolusi pilihan eksistensi kita sebagai bangsa sebagai bagian dari perputaran roda sejarah umat manusia ini. Sebab fase akulturasi ketiga segera dan sudah mulai berjaln dengan fase akulturasi keempat: fase mondial dan fase regional.

Catatan Penutup

Demikianlah sudah kami coba mengemukakan suatu analisis konteks terhadap masalah pengembangan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kiranya akan ada manfaatnya. Sebagai penutup ulasan ini dikemukakan beberapa catatan singkat.

Pertama-tama, seperti telah kami kemukakan di muka, Kongres Bahasa Indonesia III ini terjadi di dalam momentum yang tepat ditinjau dari sejarah kebudayaan bangsa kita. Kongres bahasa ini terlaksana dalam suasana politik kebudayaan yang mulai menjadi sadar dan jelas kembali di dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Seperti halnya Sumpah Pemuda terjadi di dalam momentum sejarah yang secara terpadu bertemu dinamik kebudayaan nasional, dinamik politik kebangsaan, dan dinamik bahasa nasional. maka Kongres Bahasa Indonesia III ini menurut pengamatan kami berada di dalam momentum yang sama pula. Kita berada di dalam momentum di mana dinamik kebudayaan nasional, dinamik politik kebangsaan, dan dinamik bahasa nasional pula sedang bergerak untuk berpadu.

Kedua, dengan adanya suatu *policy statement* mengenai kebudayaan yang sadar dan jelas dari Pemerintah, langkah-langkah untuk memecahkan masalah dapat dipermudah. Tentu saja kita tidak akan dapat mengelak dari kompleksitas masalah dan dari aspek-aspek ketidakpastian. Dengan adanya suatu ketegasan di dalam *cultural policy* yang sadar, kita mempunyai titik pijak untuk melangkah menyusun suatu perakitan menghadapi tugas memadukan antara kompleksitas dan sintesis. Oleh karena itu, di samping kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis, seyogianyalah Kongres Bahasa Indonesia III ini dapat menjadi suatu momentum gerakan kebangkitan kebudayaan

nasional di dalam fase sejarah sekarang ini dan di masa mendatang. Kongres Bahasa Indonesia III bukanlah sekedar kongres yang bergulat dengan masalah semantik; ia harus bergulat pula dengan masalah-masalah ontologis, masalah deontologis, dan masalah epistemologis. Ia harus bergulat dengan masalah-masalah kultural. Politik bahasa yang sadar dan jelas harus berada di dalam politik kebudayaan yang sadar dan jelas. Politik kebudayaan yang sadar dan mantap akan memerlukan bahasa yang sadar dan jelas. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah bahwa Kongres Bahasa Indonesia III ini melihat pengembangan kebudayaan nasional sebagai satu tuntutan sejarah sebagai konsekuensi dari pilihan eksistensi kita semua. Kongres bahasa ini harus menjadi salah satu momentum untuk suatu gerakan kebudayaan nasional dan gerakan politik kebangsaan. Dengan demikian, Kongres Bahasa Indonesia III ini akan mempunyai bobot yang sama seperti Sumpah Pemuda lima puluh tahun yang lalu. Nasionalisme adalah suatu kekuatan esensial di dalam sejarah Indonesia. Bukan nasionalisme dalam arti sempit, melainkan nasionalisme dalam konteks kultural, nasionalisme sebagai suatu nasionalisme dalam konteks kultural, nasionalisme sebagai suatu ungkapan dari humanisme, sejarah kemanusiaan yang lebih besar. Hal-hal ini tampaknya sejalan dengan hikmah ajaran dialektik antara *natur* dan *kultur* sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kebudayaan Nasional, Ki Hadjar Dewantoro.

CATATAN

- 1 Daoed Joesoef, *Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan*, CSIS (1978).
- 2 Maritain, J. 1939 *True Humanism*. dan J. Maritain, 1945. *Principes d'une politique humaniste*, Paris.
- 3 Sassen, F. 1957. *Wijsbegeerte van onze tijd*, Amsterdam.
- 4 Cfr. Daoed Joesoef, 1978. *Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan*, CSIS.
- 5 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pidato pengarahan kepada Panitia Pengarahan Kongres Bahasa Indonesia ke-3.
- 6 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pengarahan kepada Panitia Pengarah Kongres Bahasa Indonesia ke-3.
- 7 Perakitan pemikiran di dalam ulasan ini terutama diangkat dari tulisan-tulisan berikut :
 Ali Moertopo. 1977. *Strategi Kebudayaan*. CSIS.
 Daoed Joesoef. 1978. *Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan*. CSIS.
 Daoed Joesoef. 1978. *Pendidikan, Kebudayaan dan Pembentukan Manusia*, CSIC.
- 8 A.M.W. Pranarka, 1976. *Situasi Kultural Dunia Dewasa ini*

BAHASA INDONESIA DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Harsja W. Bachtiar

Universitas Indonesia

Tentu saja perjuangan untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa persatuan dari penduduk di kepulauan kita yang amat luas ini tidak dimulai dengan keputusan para pemuda yang mengadakan Kongres Pemuda-pemudi Indonesia di Jakarta tepat 50 tahun yang lalu, keputusan untuk "mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonessia".¹

Keputusan ini amat penting bagi pemuda-pemuda yang hadir pada kongres tersebut serta rekan-rekan mereka sesama anggota perhimpunan *Jong Java*, Pemuda Sumatra, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Celebes*, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Peladjar-peladjar Indonesia. Keputusan ini, yang diterima baik dengan tepuk tangan riuh dan sorak gempita "hidup persatuan",² merupakan tekad perjuangan mereka, perjuangan yang amat banyak akibatnya pada perkembangan masyarakat kita. Tindakan para pemuda ini kemudian menjadi perlambangan semakin banyak sesama penduduk di kepulauan kita ini, orang-orang yang merupakan inti nasion kita, nasion Indonesia. Kita pun berkumpul di sini, lima puluh tahun kemudian, untuk memperingati dan merayakan peristiwa maha-penting ini serta untuk memperoleh inspirasi dan semangat juang baru yang lebih besar lagi. Akan tetapi, bilamana kita memperhatikan keseluruhan penduduk di kepulauan kita ini dan tidak membatasi perhatian ini pada para pemuda yang berkumpul di gedung *Indonesische Club*, di Jalan Kramat 106, Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 itu, kita memperoleh gambaran yang agak lain. Kita harus mengakui, dengan rendah hati bahwa perjuangan untuk

menjadikan bahasa Indonesia bahasa persatuan kita diusahakan oleh berbagai golongan orang, muda maupun tua, pelajar maupun bukan pelajar, dimulai sudah sejak cukup lama sebelum tahun 1928 dan dilanjutkan terus sesudah tahun yang amat penting dalam sejarah perkembangan kebangsaan kita ini.

Pada kongres yang banyak bermakna ini, Kongres Bahasa Indonesia III, tidak mungkin dapat dikemukakan peranan setiap golongan yang ikut mengakibatkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan kita, bahasa nasional kita.³ Kita harus senantiasa ingat bahwa pemimpin tidak ada artinya tanpa pengikut bahwa orang yang maju ke muka tidak ada artinya tanpa didukung di belakang. Hal yang maju ke muka tidak ada artinya tanpa didukung di belakang. Hal yang sama berlaku juga dalam perjuangan bahasa nasional kita.

Saya akan coba memberi gambaran meskipun gambaran yang sangat kasar, mengenai pengaruh perkembangan masyarakat kita pada perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita serta, sebaliknya, pengaruh perkembangan bahasa Indonesia pada perkembangan masyarakat kita.

Nasional-nasional Tua dan Masyarakat Hindia-- Belanda

Lima puluh tahun yang lalu, orang-orang yang hendak dipersatukan sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia yang "bertoempah darah yang satoe tanah Indonesia" terbagi-bagi dalam berbagai masyarakat tersendiri yang masing-masing memperlihatkan ciri-ciri yang biasanya dianggap merupakan ciri-ciri suatu bangsa, suatu nasion⁴. Masing-masing nasion ini mendiami suatu daerah tertentu sebagai daerah tumpah darah, tanah asal, tempat kediaman sejak para nenek moyang menetap di daerah yang bersangkutan, daerah tempat para anggota nasion yang bersangkutan senantiasa 'pulang' bilamana mereka merantau ke daerah lain.

Penduduk pribumi masing-masing daerah menganggap diri keturunan nenek moyang yang sama, ide yang dipelihara dengan perantara cerita mitos mengenai asal-mula para nenek-moyang dan biasanya juga dengan mengadakan upacara-upacara tertentu. Mereka memiliki kebudayaan tersendiri, kebudayaan yang menyangkut kepercayaan-kepercayaan tertentu, pengetahuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan aturan-aturan tertentu yang dinyatakan dalam bahasa daerah tertentu. Adanya kebudayaan tersendiri yang dinyatakan dalam bahasa tersendiri membedakan mereka dari orang-orang lain. Me-

reka adalah suatu nasion tersendiri dengan identitas kebangsaan tersendiri: bangsa Aceh, bangsa Batak, bangsa Minangkabau, bangsa Sunda, Jawa, Madura. Bali, Bugis, Makasar, Toraja, Gorontalo, Minahasa, Maluku, Manggarai, Dayak Ngaju, Marind-anim, dan sebagainya.⁵

Penduduk pribumi masing-masing daerah sesuai dengan kata-kata Renan yang menjelaskan arti nasion :

... adalah suatu solidaritas besar, tercipta oleh sentimen pengurbanan yang telah diadakan bersama dan yang mereka bersedia adakan dalam masa depan; mereka mempunyai masa lampau yang melanjutkan diri dalam masa kini dalam bentuk suatu fakta yang nyata jelas: mufakat, kehendak yang dinyatakan dengan jelas untuk meneruskan kehidupan bersama.⁶

Masing-masing nasion ini, yang dapat kita namakan nasion-nasion tua di kepulauan kita, mempunyai sejarah tersendiri yang merupakan ingatan bersama dari para anggotanya. Beberapa nasion malah memiliki aksara tersendiri ataupun aksara yang diambil alih dari nasion lain sehingga ingatan bersama ini dapat direkam sebagai tulisan-tulisan yang memudahkan nasion yang bersangkutan mengingat apa yang telah dialami dan apa yang merupakan hasil pemikiran para anggotanya.⁷

Di beberapa daerah, nasion yang mendiami daerah yang bersangkutan mewujudkan struktur kenegaraan. Malah, pada umumnya di daerah-daerah demikian tidak hanya ada satu negara, melainkan sejumlah negara. Di daerah kediaman orang-orang Melayu di Sumatra Timur, misalnya, dijumpai Kerajaan Deli, Asahan, Langkat, Serdang, Siak Sri Indrapura, dan Pelawan; di Jawa dijumpai Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, serta Mangkunegaran, dan Pakualaman; di Sulawesi Selatan dijumpai, antara lain, Kerajaan Bone, Wajo, Goa, Soppeng, Tanette. Sidenreng, dan Rappang; di Bali dijumpai Kerajaan Buleleng, Jembrana, Badung. Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karengasem; di Sumbawa dijumpai Kerajaan Bima dan Sumbawa; di Halmahera dijumpai Kerajaan Tidore dan Ternate; dan begitulah seterusnya. Adanya negara di daerah-daerah ini melibat adanya pemerintahan dan kewarganegaraan negara yang bersangkutan, raja, dan rakyat.⁸

Sekalian daerah-daerah yang sekarang merupakan wilayah Republik Indonesia, kecuali daerah Timor Timur, lima puluh tahun yang lalu merupakan tanah jajahan Belanda sehingga penduduk di wilayah ini sedikit banyaknya juga merupakan satu masyarakat besar, masyarakat Hindia Belanda, suatu

masyarakat yang dikuasai oleh suatu pemerintah asing, suatu masyarakat tempat semua keputusan penting yang menyangkut sekalian anggota masyarakat dibuat oleh orang-orang asing.

Bahasa Belanda dengan sendirinya merupakan bahasa golongan elite, golongan "orang-orang terpilih", di masyarakat jajahan Hindia Belanda ini sehingga orang-orang pribumi yang hendak dianggap terpelajar atau terkemuka berusaha menguasai bahasa asing ini. Penguasaan bahasa Belanda membuka kesempatan untuk memilih antara berbagai jenis pekerjaan yang tertutup bagi orang-orang yang tidak menguasai bahasa para penguasa asing ini.

Dalam keadaan demikianlah bahasa yang menjadi bahasa persatuan kita harus dijadikan bahasa sekalian penduduk di kepulauan kita ini.

Masing-masing nasion tua di kepulauan kita dengan sendirinya berusaha mempertahankan bahasa sendiri, bahasa yang diwarisi dari para nenek moyang anggota-anggota nasion yang bersangkutan.⁹ Akan tetapi, keadaan demikian tidak memungkinkan orang-orang pribumi dari daerah yang satu berkomunikasi secara intensif dengan orang-orang pribumi di daerah-daerah lain. Tanpa kemungkinan berkomunikasi tak mungkin dapat dikembangkan suatu kebudayaan yang mempunyai arti bagi sekalian di kepulauan kita dan tanpa suatu kebudayaan yang sama sukar sekali dikembangkan hubungan-hubungan solidaritas prioritas tinggi antarpenduduk di kepulauan kita ini yang diharapkan mewujudkan suatu nasion yang lebih besar daripada masing-masing nasion tua yang terdapat di kawasan kita ini.

Lagi pula, penduduk di kepulauan kita tidak hanya terdiri dari orang-orang pribumi. Di berbagai daerah juga berdiam orang-orang peranakan Arab, Cina, dan Belanda serta berbagai orang lain yang telah menganggap daerah kediaman mereka sebagai tanah air mereka. Mereka pun mempunyai kebudayaan tersendiri, sering termasuk bahasa tersendiri serta identitas diri sendiri, tetapi mereka pun harus dipersatukan bersama sekalian orang pribumi yang beraneka ragam, sekarang termasuk penduduk di daerah Timor Timur, menjadi satu bangsa, satu nasion yang jaya.

Bahasa golongan penguasa pada waktu itu, bahasa Belanda, memang mengandung daya tarik yang besar untuk digunakan sebagai bahasa perantara. Banyak di antara kaum terpelajar dan tokoh-tokoh lain di kalangan orang-orang pribumi pada waktu itu tertarik pada kemungkinan ini sehingga usaha untuk menjadikan bahasa yang sekarang dikenal sebagai bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan sekalian penduduk di wilayah yang sekarang me-

rupakan wilayah negara kita menjadi bertambah sulit.

Tahun 1930 Dr. Soetomo, seorang pendekar terkemuka dalam gerakan kebangsaan kita, masih mengemukakan pendapat agar pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah dasar pribumi berpola modern, HIS, ditiadakan saja dan agar waktu yang tersedia buat pengajaran bahasa Melayu digunakan buat pengajaran bahasa Belanda.¹⁰ Usul yang diajukan dua tahun sesudah para pemuda yang berkumpul pada Kongres Pemoeda-pemoedi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 memutuskan untuk menjunjung bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Peranan Para Guru

Di daerah-daerah tempat bahasa Melayu bukan bahasa induk penduduk pribumi, penyebaran bahasa Indonesia diusahakan terutama oleh para guru bahasa Melayu. Di berbagai jenis sekolah yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti HIS, MULO, dan *kweekschool* diadakan mata pelajaran bahasa Melayu.¹¹ Pada umumnya, guru-guru yang mengajar bahasa Melayu berasal dari daerah-daerah tempat penduduk pribumi berbahasa Melayu atau berbahasa yang dekat hubungannya dengan bahasa Melayu seperti Sumatra Barat. Mereka ditempatkan tersebar di amat banyak tempat di kepulauan kita. Mereka tidak hanya mengajar di sekolah-sekolah yang diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga di berbagai sekolah yang merupakan usaha swasta seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah, Taman Siswa, dan al-Wasliyah. Lambat-laun makin banyak anggota-anggota berbagai nasion tua di kepulauan kita berkenalan dengan bahasa Melayu yang kemudian dikenal dan berkembang sebagai bahasa Indonesia, mengerti dan dapat menggunakannya, berkat usaha para guru bahasa Melayu ini.

Berbagai guru menulis buku-buku pelajaran bahasa Melayu yang diterbitkan sehingga tidak saja murid-murid mereka sendiri saja dapat belajar bahasa persatuan ini melainkan juga orang-orang lain yang berminat. Beberapa guru ini juga menulis bahan-bahan bacaan dalam bahasa Indonesia, seperti buku-buku cerita dan buku-buku pengetahuan. Mereka berusaha agar makin lama makin banyak orang menguasai bahasa Indonesia.

Pada tahun 1930 jumlah anak-anak didik pribumi yang belajar di sekolah-sekolah tempat bahasa pengantar adalah bahasa setempat, kecuali di beberapa daerah tempat penutur bahasa setempat tidak banyak sehing-

ga digunakan bahasa Melayu atau suatu bahasa daerah yang banyak digunakan di daerah yang bersangkutan, yaitu 1.220.666 orang-orang di sekolah-sekolah desa (*volkschool*), 339.594 orang di sekolah-sekolah kelas 2, yang diadakan buat anak-anak pribumi yang tidak lagi akan bekerja sebagai petani, dan 97.236 orang di sekolah-sekolah desa lanjutan (*vervolg-school*).¹²

Pada tahun yang sama, jumlah anak-anak didik pribumi yang belajar di sekolah-sekolah berpendidikan Barat tingkat sekolah dasar seperti *Europesche Lagere School* (ELS), *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), dan *Schakelschool* ialah hampir 75.000 orang; di sekolah-sekolah *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) ialah kurang lebih 6.500 orang sedangkan di sekolah-sekolah pertanian dan kejuruan lain ialah hampir 3.000 orang.¹³

Angka-angka ini memberi sekedar gambaran mengenai jumlah anak-anak yang belajar bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dari para guru bahasa Melayu di beberapa jenis sekolah tersebut. Jumlahnya tidak besar, tetapi mereka tersebar luas.

Di sekolah-sekolah yang diadakan, baik oleh pemerintah Hindia Belanda maupun oleh pihak-pihak swasta tidak semua guru mengajar bahasa Melayu dan tidak semua guru mengajar dengan menggunakan bahasa Melayu. Malah, makin lama makin banyak guru berpendapat bahwa sebaiknya pengajaran bahasa Melayu diganti saja dengan pengajaran bahasa Belanda yang menurut mereka, lebih bermanfaat bagi para anak didik dalam menghadapi masa depan mereka masing-masing.

Pada kongres para guru lulusan *kweekschool*, *kweekschoolbond* yang diadakan 1921 dan 1922 diputuskan agar diusahakan penghapusan pengajaran bahasa Melayu di sekalian HIS dan penggunaan waktu yang terbebaskan untuk pengajaran bahasa Belanda. Keputusan ini diperkuat oleh suatu referendum yang diadakan oleh Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) dalam tahun 1926 dan diresmikan sebagai keputusan kongres dalam tahun yang sama,¹⁴ noda yang hitam pada lembaran sejarah peranan guru di negeri kita.

Mulai tahun pelajaran 1930—1931, pengajaran bahasa Melayu, yang telah dinyatakan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang berkongres di Jakarta dua tahun sebelum itu, dihapuskan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah HIS di Jawa dan Madura dan jam-jam pelajaran yang terbebaskan digunakan sesuai dengan usul para guru anggota PGHB,

untuk pengajaran bahasa Belanda.¹⁵ Tindakan ini mengakibatkan usaha menjadikan bahasa Indonesia bahasa perantara kita semua, penduduk di kepulauan ini mundur satu langkah yang besar. Dua tahun kemudian, tahun 1932, pengajaran bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib di HIS dan *schakelschool* dihapuskan juga di daerah-daerah luar Jawa dan Madura.¹⁶

Peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara dalam komunikasi antarnasion-nasion tua di kalangan "orang-orang terpelajar" menjadi terdesak. Makin banyak orang-orang pribumi menggunakan bahasa Belanda, juga dalam percakapan di rumah. Pasaran pekerjaan, yang menuntut penguasaan bahasa Belanda menjadi lebih luas, hal mana merangsang lebih banyak lagi orang-orang kita untuk menguasai penguasaan bahasa Belanda. Di kota-kota kecil, sampai-sampai di pedesaan-pedesaan tertentu, banyak orang-orang mengerti dan memang bisa berbicara bahasa Belanda bahasa golongan yang berkuasa.

Fakta-fakta kenyataan ini ditampilkan di sini tidak untuk menjelekan para guru kita yang menganggap bahasa Belanda lebih penting daripada bahasa Indonesia. Fakta-fakta kenyataan ini ditampilkan di sini juga tidak untuk mempersalahkan anggota-anggota masyarakat kita yang memilih bahasa Belanda sebagai bahasa utama dan menolak bahasa Indonesia sebelum para penguasa Belanda dikalahkan oleh tentara Jepang. Fakta-fakta kenyataan ini ditampilkan untuk memperlihatkan betapa hebatnya kemenangan sekalian pejuang-pejuang bahasa nasional kita yang, seperti telah dikemukakan, tidak terbatas pada pemuda-pemuda yang membuat keputusan amat penting yang kita rayakan sekarang ini.

Pejuang-pejuang pengajar, yang sebagian besar tidak lagi dikenal, dengan gigih tetap mengusahakan agar bahasa Indonesia dan bukan bahasa Belanda menjadi bahasa persatuan kita. Arus kuat menentang mereka, tetapi mereka dapat mengatasi arus kuat ini. Dan dalam perjuangan hebat, tetapi tidak mempesonakan itu, para guru bahasa Indonesia berjuang berdampingan dengan para wartawan.

Peranan Wartawan

Para wartawan yang menulis dalam bahasa Indonesia banyak berjasa dalam usaha penyebaran penggunaan bahasa Indonesia di wilayah tanah jajahan Hindia Belanda beberapa puluh tahun yang lalu. Mereka memperkenalkan cara-

cara pemikiran baru dengan penggunaan bahasa persatuan kita. Dalam usaha penyebaran bahan keterangan dan pemikiran melalui surat-surat kabar dan majalah, mereka sendiri sering kali masih melatih diri, masih mendidik diri, dalam penggunaan bahasa Indonesia, yang bagi banyak wartawan bukanlah bahasa ibu mereka masing-masing. Di antara orang-orang peranakan Cina, Arab, dan Belanda pun terdapat wartawan-wartawan yang ikut mengangkat pena untuk menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, betapa pun sukarnya usaha ini bagi mereka.

Tahun 1930. jumlah penduduk pribumi yang mampu membaca dan menulis telah meningkat lebih dari 200% dalam masa 10 tahun, dari jumlah 1.645.790 orang dalam tahun 1920 meningkat menjadi 3.746.275 orang, meskipun angka ini berarti bahwa hanyalah 6% dari penduduk pribumi pada waktu itu mampu membaca. Kemampuan membaca tidak sama di semua daerah. Kemampuan membaca paling besar di Pringan, Lampung (26.9% dari penduduk pribumi), Bengkulu (15.5%), Palembang (17.6%), Manado (21.9%), dan Maluku (14.5%).¹⁷

Tulisan-tulisan para wartawan dibaca oleh semakin banyak orang yang haus bahan bacaan, haus berita, haus informasi, haus ide, bermacam ide. Diskusi antarpemulis surat kabar yang berlainan dapat menjadi hangat, mengakibatkan permusuhan antarorang-orang yang bersangkutan, tetapi pembaca makin gemar membaca dan menjadi terbiasa dengan pertukaran pikiran yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.

Para wartawan, terutama para editor, memperkenalkan istilah-istilah baru, ungkapan-ungkapan baru. Mereka memperkaya bahasa persatuan kita pada taraf pemikiran yang lebih tinggi daripada taraf pemikiran dalam pelajaran bahasa dari guru yang menghadapi para anak didik, orang-orang yang belum dewasa.

Surat-surat kabar dan majalah-majalah yang diasuh oleh para wartawan memungkinkan pembaca menyampaikan pendapat mereka, pemikiran mereka, sebagai atau surat pembaca, sering sebagai usaha pertama untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenal, mungkin orang-orang di daerah-daerah lain, mungkin anggota nasion-nasion tua yang lain daripada nasion asal sendiri. Akan tetapi, juga para wartawan tidak mewujudkan sikap yang sama terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Cukup banyak wartawan kita menulis dalam bahasa Belanda, tidak selalu hanyalah agar pikiran

dan pendapat mereka dapat dimengerti oleh para penguasa Belanda yang hendak dicapai. Juga banyak wartawan-wartawan kita menulis dalam bahasa daerah, bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, dan sebagainya, seperti penulis-penulis *Soara Batak*, *Pardomoean Batak*, *Pasoendan*, *Darmo Kondo*, *Sri Mataram*, *Galih Pakoean*.

Bagaimanapun perbedaan sikap pandang yang terdapat di kalangan para wartawan kita berkenaan dengan penggunaan bahasa Indonesia, pada waktu pengajaran bahasa Melayu di HIS menjadi masalah yang menuntut sikap yang tegas, pers pribumi sepenuhnya mempertahankan pengajaran bahasa Melayu (baca : bahasa Indonesia) dengan mengemukakan bahwa penghapusan pengajaran-bahasa Melayu di HIS hanyalah akan mengakibatkan pembentukan jurang yang mendalam dan melebar antara kaum terpelajar pribumi yang menggunakan bahasa Belanda dan rakyat yang hanya dapat dicapai dengan penggunaan bahasa daerah masing-masing atau bahasa Indonesia.

Begitulah berbagai golongan profesi, termasuk profesi dokter, pedagang, ahli teknik, militer, pamong praja, ahli hukum, dan penyiar agama, yang tumbuh dalam masyarakat sebagai akibat perkembangan spesialisasi kerja menjalankan peranan dalam penyebaran dan pengembangan bahasa Indonesia. Akan tetapi, boleh dikatakan setiap golongan profesi mengandung tidak hanya orang-orang yang berkeinginan untuk ikut serta berusaha menjadikan bahasa Indonesia bahasa nasional dari suatu nasion baru, nasion Indonesia, melainkan setiap golongan profesi juga mengandung anggota-anggota yang menolak bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sikap menolak bahasa Indonesia belum tentu berarti bahwa orang-orang yang menolak ini tidak menghendaki suatu bahasa persatuan yang dapat mempersatukan penduduk di kepulauan kita ini; cuma, mereka memilih suatu bahasa lain, bahasa Belanda atau suatu bahasa daerah lain.

Adanya golongan-golongan profesi, yang merupakan suatu ciri utama dari masyarakat modern, menuntut pengadaan program-program pendidikan keahlian. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program-program ini, seperti universitas, sekolah tinggi, dan akademi. Lembaga-lembaga pendidikan keahlian ini memperoleh siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswanya dari berbagai nasion tua yang tersebar luas di kepulauan kita. Dengan sendirinya, berlainan dengan jenis-jenis pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan keahlian dan oleh sebab itu dapat diwariskan dari orang tua, anggota-anggota suatu golongan profesi terpaksa mengusahakan suatu bahasa

yang dapat dimengerti bersama bilamana mereka hendak belajar bersama dan bekerja bersama. Keadaan demikian memaksa para anggota masing-masing profesi memilih antara dua kemungkinan: bahasa Indonesia atau bahasa Belanda. Tetapi salah satu bahasa harus dipilih untuk memungkinkan komunikasi antarpara ahli yang berasal dari berbagai nasyon tua yang berbeda bahasa.

Perubahan dalam Keluarga

Dalam setiap masyarakat, keluarga merupakan kesatuan dasar, utama, dari para anggota masyarakat. Masyarakat kita tidak merupakan terkecuali. Kesatuan-kesatuan keluarga meneruskan penerus tradisi budaya dengan orang tua sebagai pendukung utama. Anak-anak diajar berbicara, menggunakan bahasa yang diwarisi dari nasyon asal keluarga yang bersangkutan: bahasa Batak di keluarga-keluarga Batak, bahasa Jawa di keluarga-keluarga Jawa, bahasa Bugis di keluarga-keluarga Bugis, dan seterusnya. Bahasa yang diwarisi dari para nenek moyang merupakan bahasa ibu hampir setiap orang di kepulauan kita.

Bahasa-bahasa yang sekarang dikenal sebagai bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan dalam membentuk anak-anak menjadi manusia yang berbudaya, manusia yang mengetahui dan berusaha menaati tata cara bertindak yang berlaku di nasyon asal masing-masing. Bahasa daerah merupakan alat utama untuk mengungkapkan perasaan bahagia, duka, amarah, hormat, terima kasih, cinta, dan perasaan-perasaan lain yang merupakan sifat-sifat kemanusiaan.

Pemindahan sebagian dari tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan anak dari keluarga ke sekolah yang makin lama makin banyak jumlah dan jenisnya menyebabkan makin banyak anak didik juga belajar menguasai suatu bahasa yang lain daripada bahasa yang digunakan di rumah dalam kalangan keluarga. Penguasaan bahasa Indonesia oleh anak-anak ini, yang tentu tumbuh menjadi besar, dewasa, mengakibatkan keadaan yang menuntut penyesuaian-penyesuaian baru dalam penggunaan bahasa di lingkungan keluarga.

Suatu masalah baru timbul di keluarga-keluarga tempat sebagian anggota keluarga belajar menguasai bahasa Indonesia. Bahasa manakah yang harus dianggap wajar digunakan berkenaan dengan pola-pola tingkah laku yang terdapat di rumah masing-masing? Jawaban atas pertanyaan ini tidak selalu menghasilkan kata sepakat para anggota keluarga yang bersangkutan. Para

orang tua cenderung mempertahankan penggunaan bahasa daerah sebanyak mungkin, terlebih lagi karena penggunaan bahasa daerah erat berhubungan dengan tata keteraturan kehidupan keluarga. Anak-anak, terlebih lagi anak-anak remaja dan pemuda, cenderung hendak menggunakan bahasa yang dipelajari di sekolah, bahasa Indonesia, atau dalam masa jajahan Belanda, bahasa Belanda. Bahasa lain ini memungkinkan mereka membebaskan diri dari keterikatan pada aturan-aturan tradisi budaya yang dianggap sebagai pengkang kebebasan mereka.

Keadaan demikian dapat menimbulkan keretakan-keretakan dalam keluarga, pembedaan antara "kaum tua" dan "kaum muda", "orang-orang kolot" dan "orang-orang modern", "orang-orang yang ketinggalan zaman" dan "orang-orang yang maju, progresif". Orang tua prihatin dan mengeluh mengenai anak-anak mereka yang tidak lagi memperhatikan adat-istiadat, aturan-aturan yang dianggap lazim, sedangkan anak-anak kesal, sedih, dan mungkin malu melihat cara berpikir dan tingkah orang tua mereka. Ikatan solidaritas antara anggota keluarga, yang tidak dapat mengatasi masalah yang sebagian disebabkan oleh penetrasi bahasa Indonesia atau bahasa asing ke dalam lingkungan keluarga menjadi renggang. Kekuasaan orang tua terhadap anak-anak mereka menjadi lemah.

Anak-anak yang menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, lebih banyak berperan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan nasion Indonesia yang masih muda, masih memberi banyak kebebasan, banyak kesempatan untuk berkembang.

Gejala sebagaimana digambarkan secara sangat kasar ini hanya terdapat dalam masa peralihan dan terutama di kota-kota besar tempat tidak hanya terdapat satu tradisi budaya dan tak ada satu pun di antara tradisi-tradisi yang ada cukup kuat untuk dapat bertahan dalam lingkungan keluarga.

Penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga sekarang masih merupakan pola yang terdapat pada sebagian kecil saja dari kesatuan-kesatuan keluarga yang terdapat dalam masyarakat kita. Kebanyakan keluarga, juga di kalangan para warga yang menganggap diri 100% orang Indonesia, masih menggunakan bahasa daerah, bahasa nasion asal mereka masing-masing dan bukan bahasa Indonesia.

Pada hakikatnya, perkembangan sejenis juga dijumpai pada masyarakat kita sebagai keseluruhan.

Pelapisan Sosial Baru

Perubahan amat besar dalam masyarakat kita selama lima puluh tahun ini terwujud, antara lain, sebagai pertumbuhan suatu struktur pelapisan sosial yang baru dan yang meliputi seluruh masyarakat Indonesia, "dari Sabang sampai ke Merauke".

Di masing-masing masyarakat daerah, sesuai dengan kebudayaan yang didukung oleh penduduk pribumi di daerah yang bersangkutan, dijumpai penggolongan para anggota masyarakat menurut pembedaan tingkatan kedudukan dalam masyarakat.

Jumlah tingkatan sosial yang dibedakan di masing-masing masyarakat daerah tidak sama. Ada masyarakat-masyarakat daerah di mana pembedaan tinggi dan rendah kedudukan boleh dikatakan hanya didasarkan kepada perbedaan jenis kelamin, umur, dan tempat seseorang dalam jaringan hubungan-hubungan kekerabatan sehingga sekalian anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan, atau nasion yang bersangkutan, tidak banyak dibedakan satu dari yang lain menurut pembedaan tinggi rendah kedudukan. Semua anggota masyarakat pada dasarnya sama tinggi kedudukannya.

Sebaliknya, ada juga masyarakat-masyarakat daerah yang mengadakan pembedaan tinggi rendah kedudukan menurut suatu skala yang memperlihatkan adanya banyak lapisan sosial yang dibedakan satu dari yang lain. Masyarakat Jawa, masyarakat daerah yang terbesar, mewujudkan pembedaan tingkatan sosial yang paling banyak. Seperti sekalian masyarakat lain yang mengenal bentuk kerajaan, atau sampai belum lama berselang pernah mewujudkan struktur kerajaan, masyarakat Jawa membedakan golongan bangsawan dari golongan 'orang biasa', pembedaan yang diperkuat dengan penggunaan gelar-gelar kebangsawanan, lambang-lambang khusus lain, serta pola-pola bahasa yang khas.

Tata aturan menurut kebudayaan nasion setempat menuntut penggunaan bentuk-bentuk hormat dalam pembicaraan yang diarahkan kepada anggota golongan yang dianggap lebih tinggi daripada golongan pembicara. Tuntutan demikian mengekang kebebasan anggota-anggota masyarakat yang menghadapi anggota-anggota yang lebih tinggi kedudukannya dan mengakibatkan pembedaan para anggota menurut pembedaan tinggi rendah kedudukan golongan bertahan terus. Keadaan demikian, meskipun tidak dalam bentuk tahap perkembangan amat tinggi sebagaimana dijumpai di Jawa Tengah, terdapat juga di Aceh, Sumatra Timur, Jawa Barat, Madura, Bali, Su-

lawesi Selatan, dan berbagai daerah lain.

Bahasa Indonesia, setidak-tidaknya pada permulaan perkembangannya, tidak membedakan tinggi rendah kedudukan seseorang. Bentuk bahasa yang digunakan dalam percaraan terhadap siapa saja pada hakikatnya sama. Penggunaan bahasa Indonesia membebaskan banyak orang dari kekangan sosial yang membatasi kemungkinan untuk mengajukan pendapat, pemikiran, ataupun tuntutan. Sifat yang terkandung dalam penggunaan bahasa ini menjadikan bahasa Indonesia sangat menarik bagi golongan-golongan sosial yang menganggap perbedaan para anggota masyarakat dalam golongan bangsawan dan "orang biasa" sebagai perbedaan yang merugikan banyak orang. Banyak orang di masyarakat-masyarakat daerah yang mewujudkan perbedaan tinggi rendah kedudukan sosial ini menerima bahasa Indonesia sebagai alat pembebasan diri atau pembebasan golongan-golongan yang terkekang oleh perbedaan tinggi rendah kedudukan yang dipertahankan dengan penggunaan bahasa daerah.

Dalam masa lima puluh tahun terakhir ini, suatu struktur pelapisan sosial yang baru telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan mungkin tanpa disadari sepenuhnya oleh para anggotanya. Perbedaan-perbedaan pelapisan sosial yang diwujudkan oleh struktur baru ini didasarkan pada tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pengetahuan, kekayaan, kekuasaan politik, serta gaya hidup.

Struktur pelapisan sosial baru yang sedang tumbuh dan berkembang ini tidak mengenal perbedaan antara golongan bangsawan dan "orang biasa", sedangkan kemungkinan mencapai kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan asal sangat besar. Meskipun demikian, struktur pelapisan sosial baru ini jauh lebih banyak lapisannya daripada struktur pelapisan masyarakat daerah mana pun di daerah kita ini. Jarak antara lapisan tertinggi dan lapisan terendah pun jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jarak antara lapisan tertinggi dan lapisan terendah di masyarakat daerah mana pun.

Pertumbuhan struktur pelapisan sosial baru ini juga berpengaruh pada penggunaan dan perkembangan bahasa Indonesia. Golongan atasan, golongan elite, memperlihatkan kecenderungan untuk mengembangkan pola-pola penggunaan bahasa yang makin lama makin membedakan mereka dari golongan-golongan lain, golongan-golongan yang dianggap lebih rendah.

Perbedaan tingkatan kedudukan sosial tidak hanya tercerminkan dalam gaya bahasa dan pilihan kata-kata dalam pembicaraan yang diselenggarakan dengan penggunaan bahasa Indonesia, dengan kata-kata dari bahasa Belanda yang sering tidak dimengerti oleh orang-orang lain yang tidak memperoleh kesempatan belajar bahasa Belanda. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang pernah memperoleh kesempatan belajar bahasa Inggris yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak memperoleh kesempatan belajar bahasa Inggris.¹⁸ Dengan menggunakan bahasa campuran, para pembicara ini memisahkan diri dari golongan lain, mungkin dengan anggapan terselubung-kadang-kadang tidak terselubung—bahwa bahasa mereka berkedudukan lebih tinggi dari orang-orang yang tidak mengerti bahasa asing yang bersangkutan.

Juga bentuk-bentuk hormat, yang membedakan pembicara yang satu dari pembicara yang lain menurut struktur tinggi rendah kedudukan, semakin banyak menampilkan diri sebagai unsur-unsur bahasa Indonesia. Panggilan *Bapak*—ditulis dengan huruf B besar—terhadap orang yang dianggap berkedudukan lebih tinggi, meskipun berumur jauh lebih muda, adalah hanya satu contoh menyolok dari pola bentuk hormat ini. Pengadilan *Bung* atau *Saudara*, yang lebih mencerminkan kedudukan yang sama, rupanya dianggap kurang sopan.

Sifat pembebasan dari kekangan sosial, yang semula merupakan suatu sifat utama dari penggunaan bahasa Indonesia, lambat laun menjadi pudar, mengabur, kemudian menghilang. Bahasa Indonesia pun menjadi bahasa yang menuntut perbedaan tingkatan kedudukan: ada orang yang di atas dan ada orang yang di bawah. Bahasa Indonesia pun mulai menimbulkan hambatan-hambatan buatan dalam hubungan antar anggota masyarakat yang mengakibatkan satu pihak dalam suatu komunikasi dengan pihak lain terkekang, keadaan yang dulu justru mendorong banyak orang untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang tidak mengandung kekangan demikian.

Nasion-nasion Tua, Nasion Indonesia, dan Bahasa Indonesia

Sekarang ini nasion-nasion tua di kepulauan kita masih ada. Dan masing-masing nasion ini masih mempertahankan bahasa yang diwarisi dari para nenek-moyang masing-masing. Nasion-nasion tua ini, lebih-lebih nasion-nasion yang besar, akan tetap menghiasi kepulauan kita. Nasion-nasion tua ini tidak akan lenyap, setidaknya-tidaknya dalam puluhan, mungkin ratusan tahun yang akan datang, terlepas dari persoalan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan keadaan demikian.

Nasion-nasion tua yang kecil, yang sedikit anggotanya, cenderung akan menghilang sebagai kesatuan tersendiri dan berpadu dengan nasion lain yang lebih besar. Bahasa nasion-nasion kecil ini juga akan hilang lenyap, tidak digunakan lagi.

Dalam masa yang relatif singkat, telah muncul, terbentuk, tumbuh, dan berkembang suatu nasion baru yang berbahasa sendiri. nasion Indonesia yang berbahasa Indonesia. Anggota-anggota nasion baru ini diperoleh dari nasion-nasion yang telah mendiami kepulauan kita lama sebelum nasiona Indonesia terbentuk. Nasion baru ini juga memperoleh anggotanya dari golongan-golongan penduduk lain, terutama golongan-golongan peranakan Arab, Cina, dan Belanda, yang juga menganggap kepulauan kita sebagai tanah air mereka "tanah toempah darah jang satoe".

Bahasa Indonesia, seperti nasion Indonesia sendiri, telah berakar kuat di kepulauan kita dengan perantaraan para pendukungnya yang semakin besar jumlahnya.

Pendudukan kepulauan kita oleh tentara Jepang yang selama tiga setengah tahun memaksakan larangan penggunaan bahasa Belanda; revolusi yang mengakibatkan, baik kebanyakan penduduk pribumi maupun peranakan memberi perlawanan terhadap Belanda selama lima tahun segera sesudah Perang Dunia II berakhir; pemerintah oleh orang kita sendiri yang memberikan prioritas tinggi pada persebaran dan pengembangan pengajaran dan pendidikan dengan penggunaan bahasa Indonesia; serta amat banyak usaha beraneka ragam yang mengakibatkan bahasa Indonesia sungguh-sungguh menjadi bahasa persatuan kita, bahasa utama masyarakat kita, nasion kita, negara kita, yang memungkinkan kita berbangga hati bahwa berlainan dengan banyak negara-negara baru lain, kita memiliki bahasa nasional, tidak hanya di atas kertas tapi dalam kenyataan. Meskipun demikian, perjuangan belum berakhir. Masih banyak penduduk di kepulauan kita ini belum sungguh-sungguh menguasai bahasa nasional kita. Masih banyak yang harus kita usahakan; masih banyak yang harus kita usahakan, perjuangan bersama.

CATATAN

1. 'Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoedi Indonesia,' *Dari Lembaran Sejarah Sumpah Pemuda*. Jakarta : Jajasan Idayu. 1967. halaman ii.
2. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta : Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, 1974. halaman 70.
3. Untuk uraian mengenai institusionalisasi bahasa Indonesia, lihatlah prasaran penulis, "*Bahasa Indonesia and the Indonesian Nation*," disampaikan pada ASANAL, *Third Conference on Asian Languages*, Jakarta. Indonesia, 1—6 Desember, 1975. Lihat juga S. Takdir Alisjahbana. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat 1957.
4. Lihat disertasi Ph.D. penulis, "*The Formation of the Indonesian Nation*", Harvard University. Cambridge. Mass. 1972.
5. Pembentukan perhimpunan-perhimpunan Budi Utomo, Pagubuan Pasundan, Kaum Betawi, Serekat Sumatera, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan sebagainya didasarkan kepada asas kebangsaan yang terbatas pada satu atau hanya beberapa nasion tua saja, tidak atas dasar ide bahwa sekalian penduduk di kepulauan kita merupakan satu nasion.
6. Hans Kohn, *Nationalism: Its meaning and History*. Rev. Editor. Princeton, N.J. D. Van Nostrand Company. 1965. halaman 139. Rumusan Ernest Renan. guru besar pada Universitas Sorbonne, juga digunakan oleh Ir. Soekarno dalam pidato bermakna sejarah mengenai 'dasar Indonesia merdeka' yang disampaikan pada Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, tanggal 1 Juni 1945, pidato yang sekarang dikenal sebagai pidato "Lahirnya Panca Sila"
7. Daftar naskah-naskah dalam bahasa Jawa yang tersimpan di sejumlah perpustakaan di Indonesia dan Belanda mencapai lebih dari 800 halaman cetak. Lihat T.G.Th. Pigeaud, *Literature of Java*, Jilid II (The Hague: Martinus Nijhoff. 1968). 972 halaman.
8. Lihat G.J. Resink, "Onafhankelijke vorsten, rijken en landen in Indonesie tussen 1850 en 1910," *Indonesie*, Jilid IX, No. iv (Agustus 1956), halaman 265—296; serta "Inlandsche staten in den Oosterschen Archipel (1973—1915)," *Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde*, Jilid CXVI, iii (1960), halaman 313—349.
9. Lihat, misalnya, *Soeloeh Rajat Indonesia*, No. 26, 27 Juni 1928.
10. S.L. van der Wal, ed. *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indie 1900—1940: een bronnenpublikatie* (Groningen: J.B. Wolters, 1963), halaman 487.
11. Lihat *op. cit.*, terutama halaman 412—421, 472—492.

12. Lihat *op. cit.*, tabel pada halaman 691—692.
13. *Op. cit.*, halaman 486
14. *Op. cit.*, halaman 483.
15. *Op. cit.*, halaman 492.
16. *Op. cit.*, halaman 492.
17. *Volkstelling 1930*, Jilid VIII (Batavia: Landsdrukkerij, 1935), halaman 29; Jilid IV, halaman 73; dan jilid VII, halaman 106—109.
18. Lihat tulisan penulis, "Penggunaan Bahasa Asing oleh Kaum Tjencekian Kita." *Intisari*, No. 44 (Maret 1967), halaman 108—113.

CATATAN

PERANAN BAHASA INDONESIA DALAM PENINGKATAN KESADARAN POLITIK DI KALANGAN MASYARAKAT DI INDONESIA

S.K. Trimurti

Kata Pengantar

Salah satu ciri khas pada manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya ialah kepandaiannya atau kecakapannya untuk berbicara. Dengan berbicara manusia dapat menyampaikan isi hatinya, cita-citanya, dan sebagainya kepada manusia lainnya. Oleh karena itu, berbicara merupakan salah satu sarana komunikasi antarmanusia. Dari suara yang keluar dari mulut manusia, sampai kepada suku kata, kata, dan seterusnya kalimat merupakan bahasa yang mengandung isi lengkap dari suatu kehendak atau maksud manusia untuk disampaikan kepada orang lainnya. Oleh karena itu, bahasa sebagai salah satu alat komunikasi memegang peranan penting untuk meningkatkan kesadaran manusia, termasuk kesadaran politik.

Kertas kerja ini tidak untuk menyajikan soal-soal bahasa tersendiri, melainkan dan terutama untuk mengungkapkannya peranan bahasa itu dalam peningkatan kesadaran manusia. Khususnya dalam kongres bahasa Indonesia sekarang ini, saya sebagai orang yang tahu sedikit tentang bahasa, tetapi awam dalam liku-liku bahasa, diminta oleh panitia untuk menyajikan kertas kerja dengan judul seperti di atas.

Peranan bahasa Indonesia dalam peningkatan kesadaran politik yang akan saya sajikan ini saya ambil sejak muda berkecimpung dalam dunia pergerakan politik, (2) buku-buku atau tulisan-tulisan orang pergerakan bangsa Indonesia, (3) buku-buku yang ditulis oleh orang-orang asing, dan (4) buku-buku tambahan sebagai pembantu keterangan. Semua itu saya sajikan dalam daftar pustaka di bagian akhir naskah ini.

Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan besar dan kecil yang dipisahkan oleh lautan-lautan, dan di atas pulau-pulau itu terdapat gunung-gunung/pegunungan dan lembah-lembah, yang menjadikan Indonesia suatu kebinekaan yang begitu luas dan kompleks. Kelompok-kelompok manusia yang terpisah secara alami merupakan suku-suku yang mempunyai bahasa sendiri-sendiri, adat-istiadat sendiri-sendiri pula. Di atas adat-adat yang kuat itulah berdiri hukum adat yang kukuh yang sampai sekarang masih banyak dianut oleh masing-masing pengikutnya. Di dalam adat dan hukum adat terdapat istilah-istilah bahasa yang biasanya tidak dikenal oleh suku lain. Semuanya ini menimbulkan masalah sosiologis dalam kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang ingin bersatu atau setidaknya-tidaknya berhubungan satu sama lain. Hal ini memerlukan suatu pemecahan jika kita ingin mempersatukan kebinekaan Indonesia menjadi satu ika yang tunggal.

Sarana komunikasi yang praktis harus dicari dan sarana itu sudah dapat ditemukan melalui bahasa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan.

Rupanya, bagi Indonesia, mencari atau memilih bahasa yang mana dapat disetujui bersama sebagai bahasa persatuan, tidak begitu sukar bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kebetulan berbagai-bagai bahasa dan dialek sendiri-sendiri itu termasuk satu rumpun, yaitu rumpun bahasa Melayu, dan rumpun Melayu ini termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia.

Dengan berkembangnya lalu-lintas perdagangan antarpulau dan antardaerah di Indonesia (dan luar Indonesia), makin terasa perlunya dipergunakan satu bahasa yang sudah dimengerti sebagai bahasa pengantar. Bahasa itu tentu saja diambilkan dari bahasa yang relatif sederhana, mudah digunakan, dan tidak terlalu sukar liku-liku paramasastranya. Lagi pula, dengan berkembangnya apa yang dinamakan kesadaran demokrasi, orang cenderung menyenangi bahasa yang tidak menyolok menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan kasta. Kita mengetahui bahwa bahasa perhubungan (*lingua franca*) yang sudah berabad-abad dipergunakan di Asia Tenggara itu ialah sejenis bahasa Melayu.

Oleh kaum politisi Indonesia, yang mempunyai tujuan untuk mempersatukan Indonesia dan berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia, telah dipilih salah satu bahasa untuk tujuan itu. Oleh karena itu, lambat-laun tetapi nyata dan tegas ditemukan bahasa yang memenuhi syarat sebagai bahasa pergaulan dan perhubungan, yaitu bahasa Melayu. Bahasa ini setelah diperbaiki dan dikembangkan, akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia selain bahasa pokoknya dari bahasa Melayu, dalam perkembangannya ditam-

bah dengan unsur-unsur, kata-kata, atau ungkapan-ungkapan dari bahasa-bahasa daerah. Ternyata ini cocok sekali untuk pergaulan, terutama dalam kegiatan ekonomi, perdagangan, dan dalam kegiatan-kegiatan politik.

Dengan mempergunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, kesadaran nasional mudah dipupuk dan dikembangkan. Dengan ini pula, kesadaran politik dapat ditingkatkan melalui penyebaran buah pikiran, pendapat, cita-cita, ideologi, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan yang tajam yang mengarah kepada perpecahan antarsuku atau golongan dapat diperkecil, malahan banyak yang bisa dihilangkan.

Dalam naskah ini yang paling banyak diketengahkan ialah mengenai fakta perkembangan kesadaran politik itu di Indonesia, misalnya, kesadaran untuk memperbaiki nasib, kesadaran atas hak-haknya sebagai warga lingkungan, yang mula-mula masih bersifat kedaerahan hingga bersifat nasional dan disela-sela itu adanya kesadaran-kesadaran dalam hubungannya dengan politik internasional.

Lain-lain hal akan merupakan bahan pelengkap saja dan tidak akan menyinggung hal-hal yang langsung mengenai bahasanya sendiri.

Perkembangan Kesadaran Politik Masyarakat Indonesia

Kesadaran politik yang tumbuh di bumi Indonesia ternyata berkembang dari waktu ke waktu. Untuk memudahkan penelaahan dalam kaitannya dengan perkembangan bahasa Indonesia, perkembangan itu kami bagi sebagai ancar-ancar kurang lebih sebagai berikut.

Dalam Masa Sebelum dan Sekitar Tahun 1928

Setelah timbulnya kesadaran terhadap "kemampuan" bangsa-bangsa kulit berwarna atas bangsa-bangsa kulit putih (1905 dengan kemenangan Jepang atas Rusia) serta setelah berubahnya haluan politik pemerintahan jajahan Hindia Belanda, dari politik "sopan santun" (*ethische politiek*) dan sesudah Hindia Belanda dinyatakan terbuka untuk negara-negara "maju" lainnya yang mau menanamkan modalnya di Indonesia, sekitar tahun 1905, mulailah pemerintah Hindia Belanda mengadakan sekolah-sekolah sekedarnya untuk kepentingan "bumi putra" atau penduduk asli di Indonesia. Tentu saja, pendirian sekolah-sekolah itu pertama-tama untuk mencukupi keperluan Belanda dan modal-modal asing lainnya, akan tenaga buruh. Akan tetapi, di samping itu, bagi bangsa Indonesia sendiri terbukanya sekolah-sekolah itu ada manfaatnya.

Pemuda-pemuda Indonesia yang berhasil mendapat kesempatan untuk bersekolah, di antaranya menjadi sadar akan kenyataan-kenyataan yang diderita oleh bangsanya. Ini tidak berarti bahwa rakyat yang tidak bersekolah tidak merasakan penderitaan itu, tetapi bagi yang sudah bersekolah, yang sudah dapat membandingkan keadaan yang satu dengan yang lainnya, yang sudah pula belajar sebagaimana cara berorganisasi, lebih mempunyai kemampuan untuk menyalurkan dan memecahkan segala penderitaan bangsanya secara "sistematis" daripada mereka yang sama sekali buta huruf dan buta organisasi. Oleh karena itu, ketika pemuda-pemuda pelajar ini mengajak rapat untuk bersatu dengannya, ajakan itu segera mendapat sambutan yang hangat karena sebetulnya rakyat sendiri sudah merasakan penderitaan sehari-hari yang dialaminya.

Kesadaran yang mula-mula dirasakan oleh pemuda-pemuda pelajar itu ialah kesadaran atas "hak-haknya untuk menerima pengajaran dan pendidikan".

Jikalau bangsa Indonesia diberi kesempatan belajar dan mendapatkan pendidikan sama dengan bangsa-bangsa kulit putih atau bangsa Belanda yang menjajah Indonesia, derajat bangsa Indonesia akan dapat dinaikkan. Karena kesadaran inilah, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, melalui organisasi-organisasinya, menurut tambahnya sekolah-sekolah untuk anak-anak Indonesia dan sekolah-sekolah yang sudah ada itu supaya ditingkatkan mutunya dan kelanjutannya, yaitu dari sekolah rendah ke sekolah menengah dan selanjutnya ke sekolah tinggi.

Organisasi-organisasi yang memperjuangkan cita-cita itu, misalnya, Budi Utomo (BU). Bahkan, BU sejak semula sudah mengusahakan adanya *studiefonds* (dana untuk pelajar). Jika dibandingkan dengan pengajaran di negeri lain, pengajaran yang ada di sini sangat menyedihkan dan mengecewakan, oleh karena sedikitnya dan sempitnya lapangan pengajaran. Hal seperti itu tidak sedikit pula ditambah oleh karena kekurangan kekuatan untuk membiayainya. Oleh sebab itulah, usaha dokter Wahidin dalam tahun-tahun itu adalah mengadakan *studiefonds*.

Selain BU sebagai organisasi (yang kemudian menjadi partai politik), semua partai politik dan organisasi massa yang ada memperjuangkan tambahnya jumlah dan mutu pendidikan serta pengajaran di Indonesia, seperti Sarekat Dagang Islam — yang berdiri sejak tahun 1906, dan yang kemudian menjadi Sarekat Islam —, Partai Nasional Indonesia, berbagai organisasi kedaerah-

an, misalnya Sarikat Sumatra, Perkumpulan Orang-orang Ambon dan Minahasa. Juga organisasi-organisasi buruh, organisasi wanita, organisasi pemuda selalu mencantumkan dalam anggaran dasarnya usaha pendidikan dan pengajaran. Mereka mengusahakan sendiri dan atau menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda.

Pada mula-mulanya, pemerintah Hindia Belanda melarang organisasi-organisasi itu mencampuri urusan politik (berpolitik). Di waktu itulah usaha-usaha mereka dipusatkan kepada peningkatan pengajaran dan pendidikan, kebudayaan, peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi. Akan tetapi, setelah larangan politik dihapuskan mulailah organisasi-organisasi mencantumkan program-program politik dalam anggaran dasarnya. Ini tidak berarti bahwa kesadaran politik mereka baru muncul setelah larangan berpolitik dicabut. Kesadaran politik telah ada sebelum itu. Hanya saja, sebelum pemerintah dengan resmi mencabut larangannya, organisasi-organisasi itu menjalankan aksi-aksi politik secara sembunyi-sembunyi atau secara nekad (terang-terangan melanggar, dengan risiko dihukum).

Perkembangan Kesadaran Politik

Setelah BU berpolitik, segera dicantumkan program politik di dalamnya. Sejak tahun 1915, BU sudah menginginkan adanya "parlemen" bagi Indonesia sendiri. Waktu itu parlemen diperlukan untuk, antara lain, menetapkan undang-undang tentang "milisi" sebab menurut BU Indonesia harus dapat menjaga keamanannya sendiri dan mempertahankan diri bila terjadi apa-apa. Waktu itu sudah terjadi Perang Dunia Pertama (mulai tahun 1914-1918). Indonesia tidak boleh bergantung segalanya kepada negeri Belanda. Apalagi hubungan antara Belanda dan Indonesia waktu itu terhambat oleh peperangan.

Sementara hubungan dengan Belanda putus, Hindia Belanda berorientasi kepada negara-negara lainnya, terutama negara-negara di Asia, untuk kepentingan ekspor dan impornya. Akibat peperangan itu, timbul pengangguran yang tidak dapat ditampung oleh industri dalam negeri sendiri. Oleh karena itu, timbullah pergolakan-pergolakan. Di negeri Belanda dan Eropa juga timbul pergolakan-pergolakan. Untuk meredakan pergolakan dan tuntutan rakyat Indonesia, Belanda dengan perantaraan Gubernur Jenderal (van Limburg Stirum) menjanjikan kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri (*Zelfbestuur*). Hal ini dimaksudkan untuk memikat bangsa

Indonesia supaya tetap setia kepada Belanda. Akan tetapi, janji ini tidak pernah ditepati. Rakyat Indonesia bukan diberi parlemen, tetapi hanya *Volksraad* saja. Ini pun atas tuntutan rakyat Indonesia.

Sebelum Dewan Rakyat (*Volksraad*) didirikan (dibuka pada bulan Mei 1918), BU sudah menganjurkan berdirinya "Komite Nasional" yang terdiri dari wakil-wakil partai politik di Indonesia untuk merundingkan calon-calon anggota *Volksraad* yang pertama, baik yang ditunjuk maupun yang dipilih. Program politik BU sendiri adalah terwujudnya "pemerintah parlementer" berasaskan "kebangsaan". Dalam program itu dikemukakan juga bahwa kedudukan bangsa Indonesia harus sama dengan penduduk Indonesia yang lain. Sikap ini terang menentang diskriminasi yang diadakan oleh Hindia Belanda terhadap warga negara di Indonesia (lihat *Indische Staatsregeling* Pasal 131). Waktu itu tuntutan BU adalah supaya di Indonesia diadakan parlemen, sekalipun masih di dalam rangka ikatan penjajahan Belanda. Jadi, belum terang-terangan menyatakan lepasnya ikatan Indonesia dari Belanda sebagai negara penjajah dan terjajah (kesempatan ikut campur dalam pemerintahan Indonesia).

Sementara itu, organisasi-organisasi lain atau partai-partai lain yang timbul menunjukkan sikap politik yang mengarah ke kemajuan kesadaran politik di Indonesia. Misalnya, Serekat Islam (SI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Sala pada tahun 1911, sejak semula sudah merupakan gerakan nasionalisasi demokratis religius ekonomis. Organisasi ini menentang adat lama yang sifatnya feodalistis yang menghambat sikap demokratis. Memajukan ekonomi (dalam hal ini terutama perdagangan) bangsa Indonesia jangan sampai terdesak oleh orang-orang Tionghoa asing atau warga negara bukan asli yang memang sudah menonjol keunggulannya dalam menguasai dunia perdagangan. Sifatnya yang religius ternyata dari tuntutan mereka agar pemerintah Hindia Belanda tidak membeda-bedakan sikapnya terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Sementara itu, terhadap pemeluk-pemeluk agama Islam, yang merupakan jumlah terbesar di Indonesia, dianjurkan agar bersatu dalam ikatan persaudaraan.

SI keanggotaannya hanya untuk bangsa Indonesia saja. Perkembangan seterusnya SI berusaha untuk mencapai "pemerintahan sendiri", sekurang-kurangnya bangsa Indonesia dapat ikut serta dalam sistem pemerintahan Indonesia. Makin lama SI makin terang tujuan perjuangannya, yaitu "melawan penjajahan dan menentang semua penghisapan oleh kapitalisme yang buruk".

Indische Partij, yang didirikan oleh Dr. E.F.E. Doewes Dekker di Bandung pada tahun 1912, terbuka buat semua golongan bangsa, misalnya, bangsa Indonesia, bangsa Eropa yang terus tinggal di sini, peranakan Belanda, dan Tionghoa, yang merasa dirinya *Indier*. Tujuannya ialah *Indie* merdeka, dasarnya *National Indische* dengan semboyan *Indie untuk Indiers*. Perkumpulan ini menuju ke kemerdekaan.

Sementara itu, pengaruh-pengaruh dari luar negeri terhadap gerak langkah perjuangan bangsa Indonesia mulai terasa. Jika sebelumnya ada pengaruh, corak perjuangan rakyat bersifat kedaerahan dan kenasionalan, sekarang ditambah lagi dengan adanya corak-corak aliran baru yang mendasarkan perjuangan kelas dan internasionalisme. Tujuan ke arah kemerdekaan sama. Akan tetapi, ini ditarik dari pandangan politik bahwa kemerdekaan suatu bangsa tidak akan aman bila masih ada bangsa-bangsa lain yang menjajah dan dijajah, bila masih ada penindasan dan penghisapan dari bangsa atau golongan atau kelas yang satu terhadap yang lain. Oleh karena itu, menurut golongan aliran baru ini, kemerdekaan suatu bangsa harus di dalam rangka perjuangan kemerdekaan untuk seluruh bangsa-bangsa dan seluruh umat manusia, sedangkan untuk menghilangkan penghisapan dan penindasan harus dihilangkan sistem kapitalisme. Golongan ini sebagian terpengaruh oleh cara berpikir kaum sosial demokrat (*sosialisme, marxisme*), dan sebagian terpengaruh oleh cara berpikir kaum komunis (*Marxisme-Leninisme*). Sebagai contoh, misalnya, ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereniging*) yang didirikan oleh HJFM Sneevliet (Belanda totok) tahun 1914 di Semarang. ISDV pada tahun 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia. Partai inilah lewat kader-kadernya yang tangguh memasuki organisasi-organisasi lain, terutama serikat serikat buruh dengan tujuan memasukkan paham komunisme ke dalamnya dan untuk mencari dukungan atas aksi-aksi yang dijalankan. Golongan ini juga menyokong kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, dalam rangka perjuangan internasional guna menghapuskan imperialisme dan kapitalisme. Pergerakan pemuda dan pergerakan wanita, juga ada yang terpengaruh oleh aliran-aliran ini, tetapi tidak sebanyak partai-partai politik dan serikat-serikat buruh.

Pada umumnya organisasi-organisasi di Indonesia masih mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Golongan yang masih mau bekerja sama ini adalah golongan yang kemudian diberi nama 'koperator' (*cooperator*). Tentu mereka punya alasan, mengapa jalan ini ditempuh. Sekalipun yang dituju Indonesia merdeka, tetapi melalui jalan evolusioner, jalan per-

lahan-lahan yang tidak mengejutkan. Dengan meningkatnya pengetahuan serta pendidikan bangsa Indonesia dan adanya kesempatan (yang diberikan oleh penjajah) untuk ikut serta duduk dalam pemerintahan, lambat-laun, bangsa Indonesia akan menjadi matang sehingga dapat mengatur negerinya sendiri. Andaikata nanti kekuasaan di Indonesia diserahkan sama sekali kepada bangsa Indonesia, bangsa Indonesia tidak perlu bermusuhan dengan bangsa Belanda yang semula menjajah.

Jalan pikiran yang demikian ditentang oleh golongan pejuang yang lain. Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin penjajah akan menyerahkan hak-hak yang sudah di tangan. Kepentingan yang dijajah dengan kepentingan yang menjajah selalu berlawanan. "Sini mau ke sini, sana mau ke sana". Demikian kata Bung Karno ketika itu. Belanda menjajah Indonesia untuk mencari bahan-bahan mentah guna industrinya dan untuk mencari pasaran guna menjual hasil-hasil industrinya.

Sebelum saya melanjutkan uraian ini, saya utarakan dulu kejadian-kejadian penting menjelang Sumpah Pemuda itu. Golongan komunis yang berusaha menyusupi partai-partai atau organisasi-organisasi lain telah berhasil menarik massa dari organisasi-organisasi itu untuk masuk ke dalam bloknya. Akan tetapi, sebagian lagi malah menentangnya. Sebagai contoh, SI. Organisasi ini lantas pecah. Sebagian tetap SI, sedangkan yang di bawah pengaruh komunis menjadi SR (Serikat Rakyat). Hal ini menjadi organisasi massa dari PKI Organisasi Serikat Buruh yang kuat, misalnya, VSTP (*Vereniging van Spoor en Tram Personeel*) cenderung dipengaruhi oleh golongan komunis.

Pada tahun 1926 komunis mengadakan pemberontakan, tetapi gagal. Tidak lama sesudah itu pemerintah Hindia Belanda mengadakan tindakan keras. Pemimpin-pemimpin dan pengikut-pengikut PKI dan orang-orang yang didakwa menjadi pembantu PKI dihukum serta dibuang ke Digul. PKI dilarang hidup. Sesudah itu, udara politik di Indonesia untuk sementara seperti diam.

Pada tanggal 4 Juli 1927 Ir. Soekarno dan kawan-kawannya, di Bandung, mendirikan partai baru bernama "Partai Nasional Indonesia". Partai inilah yang tidak percaya akan berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia jika dilakukan bersama dengan pemerintah jajahan. Oleh karena itu, mereka tidak mau duduk dalam lembaga-lembaga yang diadakan

oleh pihak Belanda, yang memperjuangkan kepentingan Indonesia. Golongan inilah yang kemudian dinamakan golongan nonkoperator (*non-cooperator*). PNI menuju ke "Indonesia Merdeka" untuk selanjutnya mengatur negara sendiri ke arah masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia Merdeka adalah jembatan satu-satunya yang harus dilalui.

Keterangan asas dan tujuan PNI adalah sebagai berikut.

1. Imperialisme Belanda menyebabkan Indonesia berabad-abad lamanya dijajah Belanda. Dengan jalan monopoli, kerja paksa, dan tanaman paksa, Belanda berusaha memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Akibatnya ialah bahwa rakyat Indonesia sengsara dan sangat mundur dalam segala lapangan penghidupan, baik di bidang perekonomian maupun di bidang kebudayaan, sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, rakyat asli Indonesia mempunyai kedudukan yang paling rendah dan segala peraturan Belanda yang mengenai orang-orang Indonesia adalah tidak wajar.
2. Untuk memperbaiki kembali keadaan masyarakat Indonesia agar rakyat menjadi sentosa kembali dan dapat menyempurnakan kebudayaannya dan sebagainya, maka rakyat Indonesia harus mempunyai "pemerintahan sendiri" yang dipilih oleh rakyat sendiri. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus "merdeka" dan harus disiapkan untuk menghadapi "Indonesia Merdeka".
3. Tujuan Indonesia Merdeka dapat dicapai dengan jalan aksi massa besar-besaran berdasarkan kekuatan sendiri. Departemen-departemen kebangsaan harus disusun sebagai negara dalam negara. Kekerasan tidak dipakai, tetapi dengan tekanan batin kemerdekaan akan tercapai. Dalam negara nasional, pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan sesungguhnya.
4. Dalam perjuangan kemerdekaan tidak dapat diharapkan bantuan dari penjajah pun tidak dapat diharapkan bantuan dari Moskow atau dari Istambul dan "bantuan itu berbahaya" sebab dapat menyimpangkan orang-orang Indonesia dari jalan yang menuju ke kemerdekaan. Dengan sikap demikian ini dasar yang dipakai adalah "non-koperasi".
5. Meskipun rakyat Indonesia harus bersandar pada bangsa sendiri, orang-orang luar negeri, terutama bangsa-bangsa Asia yang juga ditindas oleh imperialisme Barat harus mengerti tentang perjuangan bangsa Indonesia. Segenap bangsa Asia yang diperbudak harus bekerja sama (Pan-Aziateisme).

6. Semenjak abad ke-19 "kapitalisme" berkuasa di negara-negara Barat dan kapitalisme ini mempergunakan "imperialisme Barat" dan imperialisme ini diperkukuh oleh kapitalisme. Keadaan bangsa Indonesia yang sengsara ini adalah akibat kapitalisme dan imperialisme Barat. Oleh karena itu, semua bangsa yang terjajah menentang kapitalisme dan imperialisme.
7. Dalam perjuangan kemerdekaan ini orang tidak boleh membedakan pangkat, golongan, kekayaan, laki-laki, atau perempuan (demokrasi). Perbedaan agama pun tidak dipersoalkan. Kaum wanita yang bertugas mendidik pemuda dan pemudi yang menjadi harapan bangsa dan tanah air harus dimerdekakan dari segala ikatan yang menindas kehidupannya.
8. Orang-orang yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan ini tidak akan mendapatkan keuntungan ataupun kesenangan. Yang akan didapat hanya beban belaka dalam pengabdiannya untuk kebahagiaan bangsa di masa yang akan datang.

Demikianlah perkembangan kesadaran politik di Indonesia sesudah PKI dibubarkan. Sikap menentang imperialisme hampir menjadi sikap partai-partai politik yang ada ketika itu, sedangkan sikap antiimperialisme dan kapitalisme diambil oleh partai-partai yang dinamakan berhaluan kiri. Misalnya, PNI (Partai Nasional Indonesia), Partai Muslimin Indonesia. Setelah PNI pecah, yang satu menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan yang satu lagi menjadi PNI (Pendidikan Nasional Indonesia), juga masih tetap anti-kapitalisme dan imperialisme. Demikian juga Gerindo yang berdiri belakangan. Partai-partai yang di golongan "kanan", biasanya hanya antiimperialisme saja dan bersikap kooperatif (mau kerja sama) dengan pemerintah jajahan, dalam hal menggunakan fasilitas-fasilitas yang diadakan oleh pemerintah, sepanjang itu dianggap bisa memberi keuntungan kepada perjuangan. Misalnya, mau duduk dalam *Gemeente Raad*, dan dalam *Volksraad*.

Usaha-usaha ke Arah Persatuan Aksi

Pada bulan November 1918 pernah diusahakan berdirinya satu badan untuk menyatukan aksi-aksi politik yang dinamakan *Radical Concentratie*. Akan tetapi, badan ini tidak dapat tahan lama karena adanya perpecahan antara golongan nasionalis dan golongan yang sudah terpengaruh oleh aliran komunis. Di kalangan organisasi-organisasi buruh juga pernah berulang-ulang diadakan usaha persatuan ini, tetapi sejauh itu juga pecah-pecah terus.

Setelah tidak berhasilnya *Radicale Concentratie* mempersatukan aksi-aksi politik, dari golongan nasionalis dan nonkomunis diadakan berbagai usaha ke arah persatuan kembali. Sekitar tahun 1926 pernah diusahakan berdirinya:

1. *Indonesische Eenheidscomittee* (di Bandung);
2. Komite Persatuan Kebangsaan (di Surabaya);
3. Komite Persatuan Indonesia dengan anggota-anggota semua *studieclub* SI, Muhammadiyah, JIB, Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, Sarekat Madura. Komite ini bermaksud akan mengadakan persatuan bagi pergerakan Indonesia tetapi tidak berhasil.

Kemudian atas usul PNI akhirnya pada tanggal 17 Desember 1927 (sebelum Kongres Pemuda) lahirlah Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Yang menjadi anggotanya mula-mula: PNI, *Algemene Studieclub*, *Partai Sarekat Islam (PSI)*, Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Kaum Betawi, *Indonesische Studieclub*.

Aksi-aksi yang pernah dilontarkan oleh PPPKI antara lain sebagai berikut.

- a. Mengangkat Perhimpunan Indonesia untuk membicarakan, mempropagandakan, dan memperjuangkan perjuangan rakyat di Indonesia, misalnya, menentang adanya *punale sanks*, rodi.
- b. Supaya PPPKI lewat PI dapat mengetahui keadaan perjuangan politik di Eropa.
- c. Mengajukan adanya satu pusat gabungan untuk serikat-serikat buruh atau serikat sekerja.
- d. Menentang penahanan yang terlalu lama bagi orang-orang politik.
- e. Menentang adanya larangan terhadap pegawai negeri untuk menjadi anggota partai-partai politik tertentu.
- f. Memandang setiap orang yang tidak menghormati persatuan sebagai "musuh" Indonesia.

Untuk membiayai propaganda dan menyokong korban perjuangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, PPPKI mendirikan *Fonds Nasional*.

PPPKI merencanakan dalam bulan Desember 1930 mengadakan Kongres Nasional Indonesia Raya, yang menerima juga kunjungan dari organisasi-organisasi di luar PPPKI. Ini berarti bahwa PPPKI memperlebar sayapnya sedapat mungkin merangkum seluruh organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Maksudnya untuk bersama-sama mendapat tujuan perjuangan kebangsaan.

Maksud PPPKI untuk menyatakan aksi itu sukar sekali dilaksanakan. Sebabnya, antara lain karena organisasi-organisasi yang masuk di dalamnya bermacam-macam coraknya, ada yang "ko-", ada yang nonkoperasi, sedangkan cara berjuangnya pun berbeda-beda, sekalipun tujuannya sama. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa di dalam badan ini akhirnya timbul perpecahan. Pada bulan Desember 1930 SI keluar dari PPPKI. Namun, PPPKI sudah dapat menanamkan rasa persatuan dan kesatuan pada organisasi-organisasi dan rakyat Indonesia, yaitu diakuinya:

- a. "Indonesia Raya" sebagai lagu kebangsaan;
- b. merah putih sebagai bendera kebangsaan;
- c. bahasa Melayu (yang kemudian menjadi bahasa Indonesia) sebagai bahasa Indonesia;
- d. Indonesia merdeka menjadi tujuan bangsa oleh hampir segenap golongan.

Usaha Persatuan di Kalangan Pergerakan Buruh

Di kalangan organisasi-organisasi buruh bangsa Indonesia berhasrat untuk membikin vaksentral-vaksentral dan hasrat untuk menggabungkan vaksentral vaksentral juga makin kentara. Pada akhir tahun 1919 dan permulaan tahun 1920 berdirilah Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB). Pengurus dan keanggotaannya masih campuran antara golongan kiri dan kanan. Waktu itu sudah diadakan tuntutan mengenai perbaikan nasib buruh, misalnya:

- a. penetapan upah minuman;
- b. jam kerja sehari (8 jam siang, 6 jam malam);
- c. hak libur tahunan 14 hari;
- d. pengakuan terhadap organisasi buruh sebagai wakil buruh di tempat pekerjaan;
- e. adanya Majelis Urusan Perselisihan Perburuhan, tempat buruh dan majikan mempunyai wakil;

- f. hak pensiun;
- g. jaminan sosial;
- h. supaya di Indonesia diadakan parlemen yang anggotanya dipilih oleh rakyat sendiri; dan
- i. diakuinya kebebasan hak bersuara dan berpikir.

PPKB pada tahun 1921 pecah. Mereka yang berhaluan kiri keluar dan mendirikan federasi baru bernama *Revolutionaire Vakcentrale*. Akan tetapi, karena dua-duanya merasa perlu adanya kesatuan, pada tahun 1922 PPKB dan RV difusikan menjadi Persatuan Vakbond Hindia (PVH). Karena melelutsnya pemberontakan PKI, PHV bubar pada tahun 1926 itu juga.

Sesudah ini dirasakan perlunya vaksentral yang bebas dari pengaruh politik, tetapi kenyataannya sukar sekali dilaksanakan karena organisasi-organisasi buruh selalu menjadi sasaran utama dari partai-partai politik. Makin besar pengaruhnya partai politik terhadap gerakan buruh, makin besar pula kekuatannya. Vaksentral-vaksentral dan federasi-federasi yang didirikan setelah PKI dilarang, misalnya:

- a. Serikat Kaum Buruh Indonesia (SKBI), 1928 – 1930;
- b. Persatuan Vakbonder Pegawai Negeri (PVPN), hidup terus sampai jatuhnya Hindia Belanda (1930–1942),
- c. Gabungan Serikat-serikat Sekerja Partikelir Indonesia (Gaspi) hidup sampai jatuhnya Hindia Belanda (1941–1942).

Perhimpunan Indonesia

Pada tahun 1908 mahasiswa-mahasiswa yang berada di negeri Belanda mendirikan satu organisasi pelajar, yang dinamakan *Indische Vereniging* (Perkumpulan Hindia) yang tidak mempunyai tujuan politik. Kesadaran politik baru timbul sewaktu perang dunia pertama berkecamuk.

Pada tahun 1922 nama *Indische Vereniging* diganti menjadi *Indonesische Vereniging*. Tahun 1924 nama ini diganti lagi menjadi "Perhimpunan Indonesia". Majalah perhimpunan dinamakan "Indonesia Merdeka". Dalam majalah inilah aspirasi perjuangan rakyat selalu didengungkan. Ternyata pengaruhnya besar sekali.

Keterangan dasar yang ditetapkan pada rapatnya tanggal 11 Januari 1925 antara lain sebagai berikut.

- a. Hanya satu Indonesia yang merasa dirinya satu dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Tujuan bersama, pembebasan Indonesia menuntut adanya suatu aksi umum yang insaf, bersandar atas kekuatan sendiri, dan bersifat kebangsaan.
- b. Segala lapisan rakyat Indonesia ikut dalam perjuangan kemerdekaan ini.
- c. Adanya kepentingan yang berlawanan antara si penjajah dan si terjajah.

Keterangan dasar di atas dipropagandakan ke Indonesia dan ke dunia internasional. Propaganda ke dunia internasional menghasilkan bantuan-bantuan moral dari berbagai negara dan mahasiswa dapat mengadakan kerja sama dengan pejuang-pejuang nasionalis dari India, Vietnam, dan sebagainya, sedangkan propaganda ke Indonesia adalah lewat majalah *Indonesia Merdeka* yang banyak menjiwai semangat pergerakan dari para pemuda dan para terpelajar lainnya di Indonesia.

Usaha Persatuan di Kalangan Pergerakan Pemuda

Tri Koro Dharmo, berdiri pada tahun 1915, terdiri dari pelajar-pelajar terutama dari Jawa dan Madura. Perkumpulan ini pada tahun 1918 diganti namanya menjadi *Jong Java*. Di lain-lain daerah timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda, misalnya *Jong Batak*, *Jong Celebes*, *Jong Ambon*, *Jong Sumatranen Bond*, *Sekar Rukun*, *Pemuda Kaum Betawi*, *Jong Islamieten Bond*.

Sementara itu, para mahasiswa mengadakan perkumpulan sendiri, pada tahun 1924, bernama Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI), yang mendasarkan perjuangannya pada *antithese* kolonial. Mereka berpendapat bahwa *antithese* kolonial dapat hapus kalau penjajahan hapus. PPPI ini telah dijiwai oleh Perhimpunan Indonesia (di negeri Belanda). Waktu organisasi Pemuda Indonesia mengadakan kongres yang pertama di Bandung (25–28 Desember 1927) PPPI telah mengajukan usul supaya semua organisasi pemuda Indonesia yang diadakan pada tanggal 27–28 Oktober 1928, yang terdiri dari *Jong Java*, *Jong Sumatra* (Pemuda Sumatra), Pemuda Indonesia, *Sekar Rukun*, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Celebes*, Pemuda Kaum Betawi, dan PPPI telah memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.

2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Tiga putusan penting inilah yang kemudian dinamakan sebagai Sumpah Pemuda. Dan pengaruh sumpah ini besar sekali terhadap perkembangan nasionalisme, tanggung jawabnya, serta pengembangan bahasa Indonesia.

Idee fusi dapat dilaksanakan dengan ditandatangani oleh : *Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond*, yang menjadi satu organisasi baru bernama "Indonesia Muda" (IM). Waktu itu jatuh pada tanggal 31 Desember 1930 menjelang 1 Januari 1931. Indonesia Muda diharapkan untuk menjadi wadah dari organisasi-organisasi pemuda Indonesia. Akan tetapi, nyatanya tidak dapat karena ada golongan muda yang mengancam bahwa IM kurang radikal, kurang revolusioner. Oleh karena itu, pada tahun 1931 atas dukungan orang-orang PNI berdirilah perkumpulan "Suluh Pemuda Rakyat Indonesia" (SPI) dan pada tahun 1932 berdiri "Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia" (Perpri) yang mendapat dukungan dari orang-orang Partindo.

Dalam Masa Sesudah Tahun 1928 Hingga Jatuhnya Hindia Belanda

Pada bulan Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda di Jakarta, yang berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda, yang isinya bahwa kita bertekad mengakui bahwa bangsa, tanah air, dan bahasa kita hanya satu, yaitu "Indonesia".

Sesudah itu, usaha-usaha ke arah persatuan makin lancar jalannya. Akan tetapi, sebaliknya, juga terdapat halangan-halangan yang menghambat persatuan karena masih saja ada soal-soal yang belum dapat dicari pertemuannya.

Di bawah ini secara ringkas beberapa hal yang perlu diketengahkan.

Usaha Persatuan di Kalangan Pergerakan Wanita

Organisasi-organisasi wanita yang pada mulanya masih bersifat ke-daerahan, karena mungkin juga terpengaruh oleh aliran-aliran pergerakan politik di Indonesia, mengarah ke sifat nasional. Dalam pergerakan wanita juga ada yang *ko-* dan yang *non-*. Yang nonkoperasi, misalnya, Isteri Sedar dan Persatuan Marhaeni Indonesia.

Pada tanggal 22 Desember 1928 (2 bulan sesudah sumpah pemuda) dibukalah Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta. Salah satu putusan kongres itu ialah berdirinya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Nama PPPI pada kongresnya tahun 1929 di Jakarta diganti dengan PPII (Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia).

Lapangan perjuangan federasi ini ialah sosial, pendidikan dan kebudayaan. Terutama memperbaiki kedudukan perempuan dalam hukum sehubungan dengan kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Kongres Perempuan Indonesia tahun 1941 di Semarang menganjurkan kepada anggota-anggota *Volksraad* supaya bahasa Indonesia dijadikan pelajaran tetap di sekolah-sekolah menengah (HBS dan AMS). Menjelang jatuhnya Hindia Belanda, KPI menyokong aksi-aksi politik yang dilancarkan oleh gabungan organisasi-organisasi politik.

Setelah Jepang menduduki Indonesia selama kurang lebih 3½ tahun, semua organisasi yang didirikan oleh rakyat dilarang. Yang boleh ada, hanya organisasi yang didirikan oleh pihak penguasa Jepang untuk orang-orang Indonesia. Itu pun sifatnya hanya kebaktian.

Zaman merdeka gabungan organisasi-organisasi wanita Indonesia (Kowani). Pada tahun-tahun perjuangan fisik, Kowani banyak jasanya secara langsung atau tidak langsung kepada perjuangan melawan penjajahan. Sesudah tahun 1950 perjuangan Kowani beralih kembali kepada penekanan perjuangan pendidikan, sosial, budaya, dan terutama tugas-tugas sebagai Ibu Bangsa.

Usaha Persatuan di Kalangan Pergerakan yang Moderat

Indonesische Studieclub, anggota PPPKI yang telah berdiri sejak tahun 1924, yang dipimpin oleh Dr. Sutomo adalah satu kelompok intelek yang giat dalam bidang *studie* mengenai persoalan-persoalan masyarakat. Pada tanggal 16 Oktober 1930 namanya diganti menjadi "Persatuan Bangsa Indonesia" (PBI) dan gerak langkahnya diperluas sehingga dapat menampung rakyat biasa untuk menjadi anggotanya. Langkahnya dalam bidang politik sederhana saja, tetapi dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, terutama koperasi-koperasi rakyat, pertanian, dan sebagainya maju sekali. PBI tidak mau menghiraukan soal *non-* dan *ko-*. Anggota-anggota diberi keleluasaan untuk memilih sikap *non-* atau *ko-* sebab hal ini dianggap hanya taktik perjuangan belaka, bukan prinsip. Anggota-anggota yang duduk dalam Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengatasnamakan PBI.

Dalam kongres yang diadakan tanggal 24 sampai dengan 26 Desember 1935 berfungsi dengan BU menjadi partai politik baru bernama "Partai Indonesia Raya", disingkat Parindra. Ketuanya Dr. Sutomo. Parindra bertujuan tercapainya Indonesia merdeka yang raya (besar, luas) dan yang luhur (*groot en verheven Indonesia*). Usahnya adalah memperkuat nasionalisme Indonesia, menjalankan aksi politik untuk hak-hak politik yang penuh bagi bangsa Indonesia, terbentuknya suatu pemerintahan yang berdasarkan nasionalisme dan demokrasi, meningkatkan pendidikan, penghidupan ekonomi dan sosial rakyat. Sikap dan cara kerja Parindra ini mendapat tantangan dari golongan partai-partai kiri dengan memberikan cap sebagai partai borjuis. Namun, Parindra cukup banyak mempunyai pengaruh di kalangan rakyat, terutama di Jawa Timur.

Aksi-aksi Politik Menjelang Perang Dunia II

Kericuhan dalam suasana politik internasional menjelang Perang Dunia II terasa di Indonesia. Gagasan baru timbul untuk mengatasi keadaan, andai-kata terjadi apa-apa di Indonesia. Pengalaman dalam Perang Dunia I menambah bahan pemikiran baru ini.

Sebagian anggota *Volksraad* dari bangsa Indonesia mengajukan usul kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan politik dan status Indonesia di kelak kemudian hari. Usul ini dinamakan menurut penandatanganan yang pertama ialah M. Soetardjo Kartohadikoesoemo. Nama usul itu menjadi "Petisi Soetardjo" yang diajukan pada tanggal 15 Juli 1936. Isinya antara lain adalah *Volksraad* itu hendaknya mengajukan permohonan kepada Pemerintah Tertinggi (*Opperbestuur*) dan Majelis Perwakilan Rakyat (*Staten-Generaal*) agar mau mengusahakan dibukanya suatu konferensi wakil-wakil dari Negeri Belanda dan Hindia Belanda, yang didasarkan atas persamaan derajat, untuk membuat suatu rencana agar jalan perubahan yang bertahap (*gedeeltelijk*), dalam sepuluh tahun atau dalam waktu yang dipandang baik oleh konferensi itu bagi dilaksanakannya pemikiran itu, kepada Hindia Belanda diberi kedudukan sebagai *Negara Merdeka* di dalam batas-batas artikel 1 dari Undang-Undang Dasar (*Grondwet*). Dalam Keterangan Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) ditunjukkan bahwa sejarah telah saling mengaitkan kepentingan material dan ideal dari Negeri Belanda dan Hindia Belanda sedemikian rupa sehingga suatu pemisahan dari kedua negeri itu akan membawa kerugian yang sangat besar, tetapi sebaliknya demi kepentingan pembangunan kedua bagian daerah itu, maka sangat perlu adanya kerja sama yang erat dan harmonis (Pluvier, 1953:

118). Petisi Soetardjo ini terang tidak revolusioner karena dia sama sekali tidak menyinggung soal pemutusan hubungan dengan negeri penjajah. Soetardjo adalah Ketua *Bond van Indonesische B. B. ambtenaren* (PPBB).

Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Kekhawatiran bahwa Indonesia secara langsung mungkin terlibat dalam peperangan dunia telah menimbulkan gagasan-gagasan baru di antara kaum nasionalis. Sebagai pemrakarsa pertama ialah PARINDRA yang pada tanggal 19 Maret 1939 menyatakan bahwa: Rakyat Indonesia harus dimobilisasi dan diorganisasi supaya dapat melawan setiap serbuan musuh dari luar negeri. Pers Indonesia menyokong gagasan ini. Pada tanggal 21 Mei 1939 diadakan rapat resmi Panitia Persiapan di Jakarta. Setelah para peserta menyatakan setuju dalam prinsip rencana itu, dengan suara bulat diputuskan mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Menurut anggaran dasarnya, badan itu bertujuan mempersatukan semua partai politik Indonesia untuk saling bekerja sama dan mengorganisasi suatu kongres Indonesia. Dasar-dasarnya ialah hak menentukan nasib sendiri, persatuan nasional, demokrasi dalam hal politik, ekonomi dan sosial dan kesatuan aksi. Yang dapat diterima sebagai anggota hanyalah partai-partai Indonesia yang berusaha mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia (Pluvier, 1953:134). GAPI berjuang di bidang politik praktis. GAPI bersemboyan "Indonesia berparlemen".

Pada bulan September 1939 Perang Dunia II pecah. Dan pada tanggal 8 Desember 1941 Hindia Belanda langsung terlibat dalam perang dunia ini. Setelah serbuan tentara Jepang atas Pearl Harbour di AS, menjadikan Hindia Belanda jatuh, yakni pada bulan Maret 1942. Dengan demikian tamatlah riwayat penjajahan Belanda di Indonesia.

Masa Penduduk Jepang

Ketika pasukan Jepang masuk ke Indonesia pada mulanya rakyat banyak menyambut dengan gembira karena mengira bahwa Jepang akan betul-betul menolong Indonesia. Anggapan ini timbul karena sebelum pecah perang orang-orang Jepang yang berada di Indonesia sangat ramah-tamah kepada bangsa Indonesia, dan Radio Tokyo tiap hari mengumandangkan suar-suara yang mengandung cita-cita kemerdekaan rakyat. Akan tetapi, setelah tahu bagaimana kejam tindakan Jepang itu, rakyat berpaling membencinya. Sementara itu, dari golongan para pemimpin politik terdapat sikap dua

macam. Pertama, yang langsung menyatakan tidak mau kerja sama dengan Jepang karena pemerintahannya *fascistis* dan kedua yang masih mau bekerja sama dengan perhitungan akan mempergunakan setiap kesempatan yang ada guna kepentingan Indonesia.

Setelah Jepang datang dan sudah menancapkan kakinya kuat, semua organisasi rakyat dibubarkan. Semua organisasi harus dibuat dari dan atas pemerintah Jepang dan sifatnya hanya kebaktian. Rakyat dikerahkan dalam organisasi-organisasi buatan Jepang itu agar membantu peperangan Jepang (dengan blok *fascistnya*: Jerman dan Itali) melawan Sekutu.

Hak-hak demokrasi rakyat sama sekali direnggut. Selama berperang, makin lama Jepang makin merasa terdesak dan memerlukan bala bantuan dari orang-orang Indonesia. Untuk keperluan ini didirikan barisan *Heiho* (pembantu serdadu Jepang). Oleh karena merasa makin terdesak peperangannya, kebutuhan atas bantuan makin keras, yang bisa diandalkan untuk mempertahankan daerah pendudukannya, tanpa bantuan dari Tokyo, andaikata terputus hubungan. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Oktober 1943 dikeluarkanlah Osamu Sirei, yang mengenai Pembentukan Pasukan Sukarela (*Pasukan Pembela Tanah Air*, PETA) untuk membela tanah Jawa. PETA dibentuk dari penduduk asli yang mengajukan diri untuk dididik kemiliteran guna membela tanah airnya. Sebagai pendidik ditunjuk opsir-opsir Jepang. Sementara itu kekejaman Jepang makin mengganas. Keadaan penghidupan rakyat sangat rendah sehingga banyak rakyat yang berpakaian karung. Semua keresahan ini, tentu saja memerlukan sarana untuk pencetusannya dan ternyata para pemuda PETA telah dapat memelopori pemberontakan, sebagai juru bahasa rakyat yang menderita lahir batin selama pendudukan. Pemberontakan PETA terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 di Blitar dan di tempat lain: Gemilir. Akan tetapi, kedua-duanya dapat dikalahkan dan memakan banyak korban. Para pelakunya dijatuhi hukuman mati. Untunglah sebelum dilaksanakan hukuman itu, Jepang keburu kalah perang dan kemerdekaan Indonesia keburu diproklamasikan sehingga nyawa mereka tertolong.

Kesadaran Politik setelah Indonesia Merdeka

Bagaimana kesadaran politik sesudah Indonesia merdeka, sudah banyak disaksikan sendiri oleh angkatan-angkatan "muda" sekarang. Oleh karena itu, saya pandang tidak perlu diuraikan secara terperinci. Sesuai dengan pasang surutnya keadaan, aktivitas praktis politik juga mengalami garis yang naik turun.

Kesadaran politik antara tahun 1945 (sesudah proklamasi) sampai dengan tahun 1950 dicetuskan dalam perjuangan-perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan dan untuk memperkuat kedudukan Indonesia di mata dunia.

Antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 para pemimpin banyak yang mabuk apa yang dinamakan demokrasi sehingga kerap kali melupakan bahwa Indonesia ketika itu masih di dalam kepungan musuh. Partai-partai politik berdiri tanpa batas sehingga kekuatan nasional terpecah-pecah.

Antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 dan tahun 1965 sampai dengan tahun 1969, Presiden Republik Indonesia berusaha menyatukan kembali perpecahan-perpecahan itu dengan mengumumkan dekritnya dan menetapkan Republik Indonesia kembali ke UUD 1945. Demokrasi liberal ditekan dan sebagai gantinya dianjurkan penggunaan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya, kekuasaan makin terpusat di satu tangan, yaitu di tangan presiden sendiri. Hal ini menimbulkan kelemahan-kelemahan sehingga memungkinkan satu golongan untuk berusaha mendominasi golongan-golongan lainnya. Golongan itu ialah golongan PKI, yang pada tahun 1965 mengadakan Gerakan 30 September atau yang lebih terkenal dengan nama G. 30 S. Sesudah itu terjadi pergerakan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, yang didahului oleh pengangkatan pada tahun 1966 (SP 11 Maret 1966) dan kemudian diresmikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1968. Di tangan pemerintah baru, keadaan politik diubah. Dari sedikit demi sedikit, dimulai tahun 1969 organisasi-organisasi rakyat, baik yang politik maupun yang bukan disederhanakan. Pada akhirnya partai-partai politik hanya boleh hidup menurut pola yang digariskan oleh Pemerintah. Sesudah ini, praktis pembangunan organisasi dari bawah boleh dikatakan tidak ada, dalam arti yang wajar. Dari bawah boleh, tetapi harus direstui oleh atasan dulu. Dalam keadaan yang demikian memang cetusan-cetusan yang spontan dari rakyat tidak mungkin ada. Baik segi positif maupun segi negatifnya sistem demikian itu sudah sama-sama kita rasakan. Oleh karena itu, tidak perlu diuraikan lagi di sini. Yang penting bahwa dalam keadaan bagaimana pun rakyat, terutama pemimpin-pemimpin politik yang sungguh-sungguh, tidak akan padam semangatnya untuk menghadapi tantangan zaman.

Peranan Bahasa Indonesia dalam Peningkatan Kesadaran Politik

Sebetulnya antara bahasa Indonesia dan politik mempunyai pengaruh

timbang-balik. Bahasa Indonesia dibesarkan dan dimungkinkan hidup atas daya upaya golongan politik. Sebaliknya, bahasa ini membantu dan mempengaruhi golongan politik dalam penyebarluasan gagasan, cita-cita, rencana-rencana, dan sebagainya kepada rakyat banyak yang bertempat tinggal terpecah di Kepulauan Indonesia. Salah satu sarana untuk perkembangan bahasa dan perkembangan kesadaran politik itu ialah "pers nasional". Pers ini ada yang *independent* ada pula yang menjadi kepunyaan partai atau golongan masyarakat. Pada zaman penjajahan, peranan pers nasional dalam perjuangan politik sangat besar. Pers ini tidak komersial, malahan merupakan suatu lembaga yang harus dibiayai dan selalu rugi. Masih ada lagi risikonya ialah berupa pembereidelan, hukuman terhadap penanggungjawabnya bila isinya dianggap melawan yang berkuasa.

Bahasa Indonesia yang sifatnya demokratis itu telah dapat mengurangi jurang pemisah antara golongan-golongan masyarakat yang disebabkan oleh kedudukan sosialnya. Pengaruhnya terdapat juga dalam hal menipiskan rasa kesukuan, kedaerahan, dan menjurus kenasionalan. Menggali nilai-nilai budaya, nilai-nilai ajaran kejiwaan, yang memang sudah hidup subur di beberapa daerah, memang ada gunanya, untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia. Akan tetapi, bila itu dijuruskan untuk mempertebal tembok pemisah antara suku satu dan suku lainnya memang patut disesalkan.

Dengan singkat, cita-cita perjuangan rakyat, yang sudah dirintis sejak zaman penjajahan, dapat diteruskan, dihidupkan, diperluas dan diperkembangkan sehingga kemauan untuk ambil bagian dalam tugas nasional dapat dipupuk. Pengaruh timbal-balik antara bahasa Indonesia dan kesadaran politik, juga membikin bangsa Indonesia mempunyai harga diri di tengah-tengah dunia internasional.

Hari Depan Bahasa Indonesia untuk Indonesia

Mengingat sejarahnya, bahasa Indonesia memang mempunyai ruang lingkup yang luas. Usman, (1975:26) mengemukakan hal-hal berikut.

Agaknya tiap-tiap orang yang ada perhatian terhadap bahasa-bahasa Nusantara akan mengetahui juga batas-batas yang termasuk lingkungan bahasa itu, Pulau Madagaskar di sebelah barat, Jayapura (Irian) di sebelah timur, Taiwan (Formosa) di sebelah utara dan Selandia Baru di sebelah selatan, dahulu disebut bahasa-bahasa Indonesia. Karena kata *Indonesia* sekarang bersifat penamaan dalam bidang politik,

yaitu Republik Indonesia, maka untuk penamaan bahasa-bahasa Selatan cabang barat, dipakai istilah bahasa-bahasa Nusantara. Untuk cabang-cabang timur dikenal dengan bahasa Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Berdasarkan penyelidikan H. Kern, pada mulanya bahasa-bahasa yang amat luas itu berasal dari gugusan kepulauan Indonesia yang terletak paling barat, yaitu Sumatra atau seberang pantai Sumatra.

Tanpa mengurangi peranan dan pentingnya bahasa-bahasa daerah, bahasa Indonesia akan terus berkembang, bahkan sudah mulai mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai salah satu bahasa pengantar dalam pertemuan-pertemuan internasional. Sekarang ini bahasa Indonesia dipelajari di universitas-universitas luar negeri. Para cendekiawan makin banyak yang tertarik perhatiannya untuk menyelami sastra dan kebudayaan Indonesia. Dengan dipergunakannya bahasa Indonesia di universitas-universitas, bahasa ini akan tambah kaya dengan istilah-istilah ilmiah. Dengan sendirinya, lambat laun, bahasa Indonesia akan berkembang menjadi bahasa ilmiah juga, dalam arti bahwa kata-kata dan istilah-istilah Indonesia akan kuasa mengungkapkan makna-makna ilmiah.

Bahasa Indonesia yang sudah menerima unsur-unsur bahasa daerah, juga telah menyerap istilah-istilah yang berhubungan dengan pandangan filosofis, pandangan mistis, dan sebagainya sehingga hari depannya dapat diharapkan. Lewat bahasa Indonesia dasar pandangan hidup (*Weltanschauung*) dari berbagai macam suku bangsa akan dapat dipahami bersama.

Akhirnya, Indonesia Merdeka yang adil dan makmur akan menjadi Indonesia Raya di tengah-tengah dunia internasional tanpa menimbulkan akibat penekanan terhadap bangsa-bangsa lain, tetapi akan mempercepat perdamaian dunia atas dasar saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Takdir. 1972. *Pembinaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Moderen*. Naskah stensilan. Jakarta Yayasan Idayu.
- , 1972. *Politik Bahasa Nasional dan Pembinaan Bahasa Indonesia*. Naskah stensilan. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Angelino, A.D.A. de Kat. 1929. *Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch-Indie*. Eerste Deel. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- , 1930. *Staatkuning Beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch-Indie*. Tweede Deel. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Blumberger, T.TH. Petrus. 1931. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie*. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.
- Djojoadisuryo, Ahmad Subardjo Mr. 1972. *Lahirnya Republik Indonesia*. Jakarta : PT Kinta.
- Deppen R.I. 1963. *Semangat Bandung dan Pers Asia Afrika*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- , 1961. *Indonesia Menggugat*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Hatta, Mohammad Dr. 1970. *Sekitar Proklamasi*. Djakarta: Tintamas.
- Kempen. 1952. *Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- , 1958. *Buku Peringatan 30 tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Pertjetakan Negara.
- Laski, Harold J. *A Grammar of Politics*. London: George Allen & Unwin LTD.
- Malik, Adam. 1970. *Riwayat Proklamasi*. Djakarta: Widjaja.
- Nur, Aminuddin Drs. 1967. *Pengantar Studi Sedjarah Pergerakan Nasional*. Djakarta: PT Pembimbing Masa.
- Pringgodigdo, A.K. SH. 1967. *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Djakarta: PT Dian Rakjat.

- Pluvier, J.M. Dr. 1953. *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesie, in de jaren 1930 tot 1942*. Bandung: 's Gravenhage: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve.
- Rutgers, S.J. Ir. 1951. *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Surabaya: C.V. Hajam Wuruk.
- Sajudja, Darwas. 1952. *Peristiwa-peristiwa Penting di Tanah Air*. Djakarta: Fa. Tegas.
- Soltau. Roger H. 1951. *An Introduction to Politics*. London: Lowe and and Brydone Limited.
- Sjahrazad. 1951. *Renungan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat NV.
- Tirtoprodjo, Susanto Drs., S.H. *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia* Djakarta. PT Pembangunan Djakarta.
- Trimurti, S.K. 1951. *A.B.C. Perjuangan Buruh*. Djakarta: Widjaja.
- Trimurti, S.K. Dra. Ek. 1975. *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Usman, Zuber. SS. SP. 1975. *Bahasa Melayu Sebelum dan Sesudah menjadi Lingua Franca*. Jakarta: Yayasan Idayu.

SIKAP BAHASA DAN PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN BAHASA NASIONAL

Amran Halim

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Pengantar

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional adalah sikap bahasa yang dimiliki oleh warga masyarakat yang bersangkutan, baik sebagai perseorangan maupun sebagai satu kesatuan kemasyarakatan. Faktor-faktor lain yang juga berpengaruh meliputi: (1) kecermatan dan ketegasan kebijaksanaan bahasa nasional itu, (2) ketelitian di dalam perencanaan strategi pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional itu, (3) tingkat kesenyawaan antara kebijaksanaan bahasa nasional itu dan kebijaksanaan pembangunan nasional, baik secara umum maupun secara sektoral, (4) tersedianya sarana kelembagaan yang berwenang penuh dan berwibawa, (5) tersedianya tenaga pelaksana profesional yang bermutu, cakap, terampil, dan tekun dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan, (6) tingkat keterlibatan segenap instansi pemerintah, media massa, lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan segenap lapisan masyarakat, serta (7) tersedianya prasarana serta sarana kerja termasuk dana.

Bahasan di dalam kertas kerja ini terbatas pada masalah sikap bahasa sebagai landasan pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional Indonesia. Di dalam hubungan ini, pertanyaan-pertanyaan pokok yang jawabannya perlu dicari adalah sebagai berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan sikap bahasa?
2. Apakah yang dimaksud dengan kebijaksanaan bahasa nasional?
3. Sampai ke manakah nasionalisme dipertahankan di dalam kebijaksanaan bahasa nasional?
4. Sampai ke manakah unsur-unsur bahasa lain, baik bahasa asing maupun bahasa daerah, dapat diterima dan diserap di dalam pengembangan bahasa Indonesia?
5. Di dalam hubungan dengan bahasa asing sebagai sumber bahan pengembangan bahasa Indonesia, bahasa asing manakah yang diutamakan?

Pembatasan masalah dan pertanyaan-pertanyaan pokok di dalam kertas kerja ini tentu saja tidak berarti bahwa masalah dan pertanyaan-pertanyaan pokok yang lain dapat diabaikan.

Sikap Bahasa

"Sikap Bahasa" adalah salah satu di antara berbagai "sikap" yang mungkin ada. Dengan demikian, pertanyaan dasar yang jawabannya perlu dicari adalah apa yang dimaksud dengan "sikap". Atas dasar jawaban terhadap pertanyaan dasar ini, kita dapat mencoba menjawab pertanyaan mengenai sikap bahasa.

Masalah sikap telah agak banyak diteliti dan berbagai batasan telah dikemukakan terutama di dalam hubungan dengan psikologi sosial. Namun, menurut Triandis (1971:2-4) unsur yang umumnya terdapat di dalam berbagai batasan itu adalah "kesiapan bereaksi" terhadap suatu keadaan. Kesiapan ini dapat merujuk kepada "sikap mental" atau kepada "sikap perilaku". Batasan yang masih sangat berpengaruh adalah batasan yang dikemukakan oleh Allport pada tahun 1935: "Sikap adalah kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman, yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu". Selanjutnya, para ahli teori mengenai sikap mengemukakan batasan yang menyatakan bahwa sikap memiliki tiga buah komponen, yaitu : (1) komponen kognitif, (2) komponen afektif, dan (3) komponen perilaku.

Komponen kognitif menyangkut pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan di dalam proses berpikir. Misalnya, dalam hubungan dengan keadaan kebahasaan di

Indonesia, komponen kognitif menyangkut pengetahuan kita mengenai bahasa-bahasa yang terdapat atau dipergunakan di Indonesia dan penggolongan bahasa-bahasa itu menjadi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, serta hubungan di antara kategori-kategori ini. Komponen afektif menyangkut perasaan atau emosi yang mewarnai atau menjiwai pengetahuan dan gagasan yang terdapat di dalam komponen kognitif. Komponen afektif menyangkut nilai rasa "baik" atau "tidak baik", atau "suka" atau "tidak suka". Apabila seseorang memiliki nilai rasa "baik" atau "suka" terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka dalam hal ini orang itu dikatakan memiliki "sikap positif". Sebaliknya, apabila orang itu memiliki nilai rasa "tidak baik" atau "tidak suka" terhadap suatu objek atau suatu keadaan, maka dalam hubungan ini orang itu dikatakan memiliki "sikap negatif". Jadi, apabila seseorang "menerima bahasa Indonesia dengan hati yang terbuka", maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Komponen perilaku menyangkut kecenderungan berbuat atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap sesuatu suatu keadaan. Seperti halnya dengan komponen kognitif dan komponen afektif, komponen perilaku pun terbentuk melalui pengalaman.

Ketiga komponen sikap itu (kognitif, efektif, dan perilaku) pada umumnya berhubungan erat (lihat juga Oppenheim (1976:105-106). Namun, pengalaman seseorang mungkin saja mengakibatkan ketidakseimbangan di antara ketiga komponen itu. Misalnya, apabila seseorang kena copet ketika dia sedang naik bus kota, mungkin sekali komponen efektif sikapnya terhadap bus kota menjadi negatif; dia memiliki nilai "tidak suka" terhadap bus kota. Meskipun demikian, komponen kognitif dan komponen perilakunya dalam hubungan dengan bus kota mungkin sekali tidak mengalami perubahan apabila dia mengingat kenyataan bahwa bus kota adalah sarana angkutan yang biayanya sesuai dengan tingkat penghasilannya. Dengan kata lain, dia tetap memiliki kecenderungan naik bus kota meskipun pengalaman pahitnya telah mengakibatkan sikapnya yang negatif terhadap bus kota. Dalam hubungan dengan keadaan kebahasaan, seseorang mungkin memiliki nilai rasa "tidak suka" terhadap penggunaan kata-kata asing di dalam bahasa Indonesia. Namun, kebutuhan profesinya akan istilah-istilah ilmiah tertentu yang tidak ada padanya di dalam bahasa Indonesia tidak memberikan kepadanya pilihan lain kecuali mempergunakan istilah-istilah asing yang dibutuhkannya itu, sekurang-kurangnya sampai dia memperoleh padanya yang tepat

di dalam bahasa Indonesia. Jadi, komponen afektif sifatnya yang negatif kepada penggunaan unsur bahasa asing dalam bahasa Indonesia tidak dengan sendirinya sejalan dengan komponen perilaku sikapnya.

Anderson (1974:37) mengutip batasan sikap yang dikemukakan oleh Milton Rokeach: "Sikap adalah tata keyakinan yang relatif berjangka panjang mengenai suatu objek atau keadaan yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu yang disenanginya". Batasan ini menyatakan bahwa sikap bukanlah sesuatu yang terjadi sesaat, melainkan berlangsung dalam jangka yang relatif panjang. Menurut Rokeach, sikap merupakan jaringan keyakinan (kognisi) dan nilai yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk berbuat atau bereaksi terhadap suatu objek sosial dengan cara tertentu yang disenanginya. Atas dasar batasan yang dikemukakan oleh Rokeach itu, Anderson (1974:47) membagi sikap menjadi dua jenis, yaitu (1) sikap bahasa dan (2) sikap non-bahasa seperti sikap politik, sikap sosial, dan sikap estetis. Baik sikap bahasa maupun sikap non-bahasa dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Dengan demikian, menurut Anderson, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya.

Oleh karena sikap pada dasarnya adalah "kesiapan mental dan saraf" atau "tata keyakinan (kognisi)", kita berhadapan dengan kenyataan bahwa sikap tidak dapat diamati secara langsung. Kadang-kadang orang menyimpulkan sikap seseorang terhadap sesuatu atau suatu keadaan atas dasar apa yang dikatakan orang itu mengenai sikapnya terhadap sesuatu atau suatu keadaan, atau atas dasar perbuatannya dalam hubungan dengan sesuatu atau keadaan itu. Kesimpulan mengenai sikap seperti ini tidak selamanya benar karena pengalaman kita menunjukkan bahwa pernyataan verbal atau perbuatan seseorang belum tentu merupakan manifestasi sikapnya yang sebenarnya. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap negatif terhadap musik klasik mungkin sekali mengatakan bahwa ia menyenangi musik klasik dan berpura-pura menikmati apabila ia disuguhi musik klasik ketika ia berkunjung ke rumah temannya yang menyenangi musik klasik. Pernyataan sikapnya dan perbuatannya di rumah temannya itu mungkin disebabkan oleh keinginannya menyenangkan hati temannya itu atau oleh keinginannya menghindarkan anggapan bahwa ia tidak terpelajar dan tidak mengerti serta tidak dapat menikmati musik klasik.

Contoh sikap dan perbuatan terhadap musik klasik di atas memperlihatkan bukan saja bahwa pernyataan verbal dan perbuatan tidak selamanya mencerminkan sikap seseorang terhadap sesuatu atau suatu keadaan melainkan juga bahwa sikap seseorang sesuatu atau suatu keadaan tidak selamanya menjadi faktor penyebab perbuatan orang itu dalam hubungan dengan sesuatu atau suatu keadaan. Hubungan antara sikap dan perbuatan telah agak banyak diteliti. Oppenheim (1976:75-76) menyatakan bahwa "kita belum tentu dapat meramalkan perbuatan atas dasar sikap; sikap tidak dengan sendirinya dapat disimpulkan dari perbuatan dengan betul, dan perbuatan tidak dengan sendirinya merupakan pernyataan sikap yang lebih benar daripada pernyataan verbal. Kaitan antara sikap dan perbuatan merupakan jaringan yang rumit".

Edwards (1957:7) menyatakan bahwa perbuatan dan sikap tidak memiliki hubungan langsung. Sikap sebagai faktor yang mempengaruhi atau menentukan perbuatan mungkin merupakan salah satu faktor saja dan belum tentu merupakan faktor yang terkuat. Apabila kita hendak meramalkan perbuatan atas dasar perasaan atau sikap, faktor-faktor yang lain itu harus diperhitungkan. Sebaliknya, apabila kita hendak menyimpulkan sikap atau perasaan atas dasar pengamatan perbuatan, kita harus selalu mengingat kemungkinan bahwa kesimpulan kita tidak benar karena perbuatan itu mungkin ditentukan oleh faktor-faktor selain perasaan atau sikap. Triandis (1971:6-16) dengan tegas menyatakan bahwa asumsi sikap merupakan faktor perbuatan seseorang tidak benar. Dia berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa perbuatanlah yang menentukan sikap, bahwa hubungan antara sikap dan perbuatan adalah hubungan yang lemah. Malah, menurut Triandis, penelitian yang dilakukan oleh La Piere (1934) sama sekali tidak menentukan hubungan apa pun antara sikap dan perbuatan. Triandis berpendapat bahwa hubungan antara sikap dan perbuatan itu ada. Sikap menyangkut apa yang dipikirkan orang, apa yang dirasakan, dan bagaimana orang ingin berbuat dalam hubungan dengan sesuatu atau suatu keadaan. Perbuatan tidak hanya ditentukan oleh apa yang "ingin" dilakukan orang, tetapi juga oleh apa menurut pendapatnya harus dilakukannya sesuai dengan norma-norma sosial, oleh apa yang biasanya dilakukannya, dan oleh akibat yang mungkin ditimbulkan oleh perbuatannya itu. Dengan kata lain, perbuatan adalah fungsi (1) sikap, (2) norma sosial, (3) kebiasaan, dan (4) akibat yang mungkin terjadi. Di antara keempat faktor ini,

faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap perbuatan adalah kebiasaan, dan faktor yang paling kecil adalah sikap. Kesimpulan mengenai urutan tingkat pengaruh faktor-faktor ini, menurut Triandis, dicapai oleh Sugar (1967) di dalam penelitiannya mengenai hubungan antara sikap dan perbuatan dalam kaitannya dengan kegemaran merokok di kalangan mahasiswa.

Kesimpulan yang dicapai oleh La Piere adalah kesimpulan yang ekstrem. Pengalaman kita bukan saja memperlihatkan adanya hubungan antara sikap dan perbuatan, tetapi juga menunjukkan bahwa hubungan antara sikap dan perbuatan itu merupakan hubungan timbal-balik. Dalam keadaan tertentu sikap, baik sendiri maupun bersama-sama dengan faktor-faktor lain, menyebabkan terjadinya perbuatan tertentu. Sebaliknya, apabila seseorang belum memiliki sikap tertentu terhadap sesuatu atau suatu keadaan karena kurangnya pengalaman atau pengetahuannya dalam hubungan dengan sesuatu atau suatu keadaan itu, perbuatan yang dilakukannya atas dasar faktor-faktor lain seperti norma sosial dan akibat yang mungkin timbul dapat secara berangsur-angsur memberikan sikap yang positif kepada yang bersangkutan. Lambert (1967), misalnya, mengemukakan bahwa kegiatan dan keberhasilan belajar bahasa sangat dipengaruhi oleh motivasi pelajar yang bersangkutan, dan motivasinya ditentukan oleh sikap serta pandangannya mengenai pelajaran bahasa. Seseorang dikatakan memiliki sikap dan orientasi instrumental apabila tujuan yang hendak dicapainya dalam belajar bahasa itu merupakan tujuan praktis seperti perbaikan nasib. Sebaliknya, sikap dan orientasi itu disebut integratif apabila tujuan yang hendak dicapai adalah penghayatan kehidupan dan kebudayaan masyarakat yang bahasanya dipelajari itu. Dalam hubungan ini, jelaslah bahwa sikap dan orientasi pelajar yang bersangkutan menentukan cara dan intensitas kegiatan belajarnya.

Sikap bahasa yang dikemukakan oleh Garvin dan Mathiot (1956): (1) kesetiaan bahasa, yang mendorong suatu masyarakat bahasa mempertahankan bahasanya dan, apabila perlu, mencegah adanya pengaruh asing, (2) kebanggaan bahasa, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakatnya, dan (3) kesadaran adanya norma bahasa, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan penggunaan bahasa. Dalam hubungan dengan keadaan kebahasaan di Indonesia, ketiga komponen sikap bahasa (komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku)

telah menghasilkan penggunaan bahasa Indonesia di dalam masyarakat kita seperti yang kita jumpai dewasa ini. Salah satu fungsi lembaga pendidikan kita adalah menanamkan dan mengembangkan sikap bahasa yang positif dan sehat pada anak didik terhadap bahasa Indonesia dengan jalan membimbingnya ke arah kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan cermat sesuai dengan norma-norma bahasa Indonesia baku dan norma-norma sosiolinguistik dan budaya yang terdapat di dalam masyarakat kita. Di dalam hal ini, sikap bahasa yang positif dan sehat dibina melalui pemupukan kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan cermat. Dengan kata lain, kebiasaan dan perbuatan yang dipupuk itu dijadikan dasar untuk membina sikap bahasa yang positif dan sehat terhadap bahasa Indonesia.

Kebijaksanaan Bahasa Nasional

Pada dasarnya sikap bahasa yang dikemukakan di atas adalah sikap bahasa yang terdapat atau mungkin terdapat atau seharusnya terdapat pada anggota suatu masyarakat sebagai perseorangan. Kebijakan bahasa nasional adalah pernyataan, baik lisan maupun tertulis, mengenai sikap bahasa yang menyangkut keseluruhan masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena kebijakan bahasa nasional menyangkut kepentingan seluruh masyarakat, dalam hal ini di Indonesia, kebijakan bahasa nasional Indonesia merupakan pernyataan sikap nasional terhadap keseluruhan masalah bahasa Indonesia, yang merupakan jaringan masalah kebahasaan yang dijalin oleh (1) masalah bahasa Indonesia, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah bahasa asing, baik yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan maupun yang digunakan tanpa pengajarannya di lembaga-lembaga pendidikan.

Salah satu fungsi kebijakan bahasa nasional adalah memberikan dasar dan pengarahannya bagi perencanaan serta pengembangan bahasa nasional, perencanaan serta pengembangan bahasa daerah, dan pengembangan pengajaran bahasa asing. Pada waktu yang sama kebijakan bahasa nasional merupakan pernyataan sikap nasional terhadap masalah-masalah kebahasaan seperti :

1. fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam hubungan dengan bahasa daerah dan bahasa asing,

2. ciri-ciri bahasa Indonesia baku,
3. pembakuan dan pengembangan bahasa Indonesia, dan
4. pengembangan pengajaran bahasa Indonesia pada semua jenis dan tingkat lembaga pendidikan.

Dipandang dari segi tujuan umumnya, kebijaksanaan bahasa nasional merupakan pernyataan sikap nasional terhadap masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dengan pembinaan bahasa Indonesia dimaksudkan peningkatan mutu komponen kognitif dan komponen afektif sikap bahasa warga masyarakat Indonesia. Komponen kognitif menyangkut kesadaran dan pengetahuan mengenai keadaan kebahasaan di Indonesia yang meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sesuai dengan fungsi serta kedudukannya masing-masing. Komponen kognitif juga menyangkut pengetahuan dan kesadaran bahwa masalah kebahasaan di Indonesia merupakan masalah nasional, yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, instansi-instansi pemerintah, sektor swasta, media massa, dan lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Di dalam hubungan dengan bahasa Indonesia, komponen kognitif juga menyangkut pengetahuan dan kesadaran bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang telah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan selama berabad-abad di seluruh Indonesia, dan diperkaya dengan unsur-unsur serapan, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Kenyataan ini berhubungan erat dengan pendekatan dan strategi yang perlu ditempuh di dalam pembakuan bahasa Indonesia. Di dalam pertumbuhannya dari bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan menjadi bahasa nasional kita sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 dan bahasa negara kita sesuai dengan Bab XV, Pasal 36, Undang-Undang Dasar 1945, perkembangan bahasa Indonesia seperti yang kita miliki sekarang telah dimungkinkan oleh adanya tingkat toleransi kebahasaan yang tinggi di dalam masyarakat kita. Dengan demikian, pembakuan bahasa Indonesia haruslah tidak berarti pembakuan yang mutlak dan ketat di seluruh Indonesia. Ini terutama berlaku bagi pembakuan perbendaharaan kata. Demikian juga halnya dengan pembakuan ragam lisan bahasa Indonesia.

Komponen afektif sikap bahasa kita dalam hubungan dengan bahasa Indonesia mencakup nilai rasa bangga memiliki bahasa nasional sebagai lambang kebulatan tekad dan semangat kebangsaan Indonesia dan sebagai sarana penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang keba-

hasaan, kebudayaan, dan kesukuannya di dalam satu masyarakat nasional Indonesia. Rasa bangga ini timbul dan berkembang sejalan dengan keberhasilan perjuangan kebangsaan Indonesia di dalam menentukan identitasnya sebagai kebangsaan Indonesia di dalam menentukan identitasnya sebagai bangsa. Selain itu, rasa bangga ini juga timbul dari kenyataan bahwa bahasa Indonesia tidak merupakan milik khas daerah atau suku tertentu sehingga ia benar-benar merupakan sarana perhubungan antarsuku dan antardaerah yang dapat diandalkan. Sikap bangga terhadap bahasa berhubungan erat dengan sikap setia terhadap bahasa Indonesia. Sikap setia ini telah memungkinkan bahasa Indonesia mempertahankan identitasnya meskipun di dalamnya banyak terdapat unsur serapan, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Kecenderungan perseorangan tertentu di Indonesia ke arah pemakaian bahasa asing atau kata-kata asing yang tidak diperlukan di dalam bahasa Indonesia tentu tidaklah dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa sikap setia terhadap bahasa Indonesia pada umumnya negatif atau tidak ada sama sekali. Dalam hubungan ini, kita harus membedakan penggunaan ungkapan atau kata asing yang tidak diperlukan dari penggunaan kata-kata asing sebagai istilah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Penggunaan kata-kata asing sebagai istilah ini mungkin sekali disebabkan oleh belum adanya padanan yang cocok dan tepat bagi istilah asing itu di dalam bahasa Indonesia. Jika demikian halnya, penggunaan istilah dari bahasa asing itu tidaklah berarti bahwa pemakaiannya memiliki sikap setia yang negatif terhadap bahasa Indonesia.

Kebijaksanaan bahasa nasional, seperti telah dikemukakan di atas, juga merupakan pernyataan sikap nasional terhadap masalah pengembangan bahasa Indonesia. Dengan pengembangan bahasa Indonesia dimaksudkan peningkatan mutu dan kelengkapan bahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga ia benar-benar dapat berfungsi sebagai bahasa negara, bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa perhubungan di dalam media massa, bahasa pendukung kebudayaan, dan bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pengembangan bahasa Indonesia memungkinkan terbinanya keagairahan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan fungsinya. Sejalan dengan itu, keagairahan penggunaan bahasa Indonesia diharapkan menjelma menjadi kenyataan yang disertai oleh kecermatan dan ketaatan di dalam pelaksanaan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku dan norma-norma kebahasaan yang berlaku.

Di dalam hubungan dengan bahasa daerah, kebijaksanaan bahasa nasional mengenai sikap bahasa terhadap bahasa daerah. Untuk dapat mencapai tujuannya, kebijaksanaan bahasa nasional perlu memperhitungkan kenyataan bahwa :

1. kelangsungan hidup dan pembinaan serta pengembangan bahasa-bahasa daerah yang tetap dipelihara oleh masyarakat pemakainya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahasa-bahasa daerah adalah lambang nilai sosial budaya yang mencerminkan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat pemakainya;
3. bahasa-bahasa daerah adalah kekayaan budaya yang dapat dimanfaatkan, baik untuk kepentingan pengembangan bahasa Indonesia maupun untuk kepentingan pengembangan bahasa daerah itu sendiri;
4. bahasa-bahasa daerah berbeda-beda bukan saja di dalam struktur kebahasaannya, melainkan juga di dalam jumlah penutur aslinya;
5. bahasa-bahasa daerah tertentu dipergunakan sebagai sarana perhubungan, baik secara lisan maupun secara tertulis, sedangkan bahasa-bahasa daerah lainnya hanya dipergunakan secara lisan;
6. di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa daerah dipengaruhi dan, pada waktu yang sama, dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah lain, dan bahasa asing tertentu sebagai akibat meningkatnya penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia, bertambah lancarnya hubungan antardaerah, dan meningkatnya arus perpindahan penduduk serta jumlah perkawinan antarsuku.

Kebijaksanaan bahasa nasional juga merupakan pernyataan nasional mengenai sikap bahasa terhadap bahasa asing, baik yang secara resmi diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan maupun yang karena berbagai alasan dipergunakan di dalam masyarakat kita. Kebijaksanaan bahasa nasional perlu mencakup pernyataan dalam hubungan dengan pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman di dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah?
2. Apa fungsi bahasa-bahasa asing itu?

3. Bahasa atau bahasa-bahasa asing yang manakah yang perlu diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan kita?
4. Di lembaga-lembaga pendidikan yang manakah bahasa-bahasa asing itu diajarkan?
5. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan pengajarannya, baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan anak didik sebagai perseorangan?

Kenyataan bahwa penguasaan bahasa-bahasa asing tertentu seringkali dianggap sebagai lambang status sosial di dalam masyarakat kita memperbesar kebutuhan kita akan kebijaksanaan bahasa nasional yang menyeluruh, cermat, dan terarah. Selain itu, sebagai pernyataan sikap nasional yang resmi, kebijaksanaan bahasa nasional merupakan dasar bagi penentuan skala prioritas di dalam perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra kita (Halim, 1976).

Pelaksanaan Kebijakan Bahasa Nasional

Pada dasarnya sikap bahasa kita sebagai bangsa, sikap bahasa para pemimpin negara dan masyarakat kita, dan sikap bahasa kita sebagai perseorangan serta warga masyarakat kita merupakan faktor yang sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional kita. Ketiga komponen sikap bahasa kita (komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku) menentukan arah serta mempengaruhi kualitas perbuatan kita di dalam pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional kita itu. Oleh karena itu, keberhasilan kita di dalam pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional itu sebageian besar bergantung kepada sampai ke mana kebijaksanaan bahasa nasional kita itu benar-benar merupakan pernyataan sikap bahasa kita sebagai perseorangan dan warga masyarakat kita. Selain itu, kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan bahasa kita itu bergantung pula kepada sampai ke mana kita berhasil melibatkan segenap lapisan masyarakat kita, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan, sektor swasta, media massa, dan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal.

Di dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional itu, keutuhan semangat kebangsaan dan identitas kita sebagai bangsa di samping bangsa-bangsa lain di dunia harus tetap terjamin. Keutuhan semangat kebangsaan dan identitas kita sebagai bangsa itu harus tetap mewarnai sikap bahasa kita dan menentukan arah serta kualitas perilaku kita di dalam

bidang kebahasaan, terutama perilaku kita di dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia. Namun, ini tidaklah berarti bahwa kita menolak kenyataan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang hidup dan dinamis senantiasa tumbuh, berubah, dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan, perubahan, dan perkembangan masyarakat pemakainya. Kita harus mengakui bahwa lingkungan kehidupan kita sebagai bangsa di samping bangsa-bangsa lain di dunia menghendaki adanya keserasian antara sikap hidup kita sebagai bangsa dan tata pergaulan antarbangsa. Perkembangan kebudayaan kita ke arah peradaban sejalan dengan munculnya unsur-unsur baru seperti penggunaan tulisan yang semakin intensif, perkembangan spesialisasi dalam bidang profesi, perkembangan berbagai jaringan organisasi, dan perkembangan kota sebagai tempat pemukiman di dalam tata kehidupan kita (Joesoef, 1978a) juga menuntut adanya penyesuaian di dalam pandangan hidup kita. Dalam hubungan ini, patut kita catat pernyataan Joesoef (1978b): "Kebudayaan suatu bangsa tentunya harus terus tumbuh, sesuai dengan keadaan pertumbuhan lingkungan dan zaman, kait-berkait dengan: pertumbuhan kebudayaan bangsa-bangsa lainnya. Dalam wujudnya, pertumbuhan itu lebih banyak menyangkut bentuk penampilannya, tetapi tidak jarang pula pertumbuhan itu secara perlahan-lahan membawa pergeseran norma-norma dan tata nilai. . . . Norma-norma (yang baru) itu sudah tentu harus merupakan kesempatan bersama dari bangsa Indonesia sendiri meskipun di dalamnya mungkin terdapat juga nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal." Dengan demikian, keutuhan semangat kebangsaan dan identitas kita sebagai bangsa di dalam hubungannya dengan pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional haruslah berarti keutuhan semangat kebangsaan dan identitas yang dinamis, yang terbuka terhadap adanya kemungkinan penyerasian, penyesuaian dan perubahan sesuai dengan perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan masyarakat kita sendiri serta masyarakat dunia. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan kita ke arah peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, ciri kecendekiaan bahasa Indonesia harus semakin menonjol. Bahasa Indonesia harus mampu mengungkapkan proses pemikiran dan penalaran yang rumit secara tepat dan tegas dengan tidak mengorbankan identitasnya sebagai bahasa kebangsaan Indonesia (Lihat juga Moeliono, 1976).

Di dalam usaha menjaga keseimbangan di antara keutuhan identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan Indonesia, bahasa negara, ba-

hasa pengantar, dan bahasa perhubungan antarsuku di Indonesia pada satu pihak dan kebutuhan peningkatan mutu dan kemampuan bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi pada pihak lain, salah satu pertanyaan yang timbul menyangkut tingkat keterbukaan bahasa Indonesia terhadap pengaruh bahasa-bahasa lain. Sampai ke mana unsur bahasa daerah dapat diterima dan diserap di dalam pengembangan bahasa Indonesia? Sampai ke mana bahasa Indonesia dapat menerima dan menyerap unsur bahasa asing?

Sebelum mencoba menjawab kedua pertanyaan di atas, sebaiknya kita mencoba menjawab pertanyaan: Apa tujuan yang dicapai dengan penerimaan dan penyerapan unsur-unsur bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, di dalam bahasa Indonesia? Kalau tujuan yang hendak dicapai dalam hal ini adalah sekedar menambah-nambah apa yang sudah ada di dalam bahasa Indonesia, jelaslah unsur-unsur bahasa lain itu tidak diperlukan, dan oleh karena itu tidak patut diterima apalagi diserap di dalam bahasa Indonesia. Apabila yang dimaksud dengan unsur-unsur bahasa lain itu adalah kata-kata yang pandangannya yang tepat di dalam bahasa Indonesia, sedangkan konsep atau makna yang dilambangkan oleh kata-kata itu sangat diperlukan, maka unsur-unsur bahasa lain itu dapat diterima dan diserap ke dalam bahasa Indonesia, baik dalam bentuk unsur serapan itu maupun dalam bentuk unsur serapan yang disesuaikan dengan struktur dan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Di antara kedua pilihan bentuk unsur serapan ini, pilihan kedua, yaitu unsur serapan yang bentuknya disesuaikan dengan struktur dan kaidah bahasa Indonesia yang baku, harus diutamakan karena pilihan ini tidak mengakibatkan penyimpangan dari struktur dan kaidah bahasa Indonesia sendiri. Dengan kata lain, kalau tujuan yang hendak dicapai adalah memperbesar perbendaharaan kata bahasa Indonesia dengan kata-kata dari bahasa lain yang pandannya yang tepat tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, maka kata-kata dari bahasa lain itu dapat diserap dan dijadikan unsur perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Dalam hal ini kata-kata dari bahasa lain itu harus disesuaikan sedapat-dapatnya dengan struktur kata-kata bahasa Indonesia, terutama ejaannya, dan dengan kaidah bahasa Indonesia baku.

Pada dasarnya, syarat yang harus diperhatikan di dalam penerimaan dan penyerapan unsur-unsur bahasa lain seperti dikemukakan di atas berlaku, baik bagi unsur-unsur dari bahasa daerah maupun bagi unsur-unsur bahasa asing.

Dengan mengindahkan syarat penerimaan dan penyerapan unsur-unsur bahasa lain itu, kita dapat mengembangkan bahasa Indonesia dengan cermat dan terarah. Kecermatan dan keterarahan ini tercapai karena kita hanya menerima dan menyerap unsur-unsur dari bahasa lain yang benar-benar kita perlukan bagi kepentingan penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang dapat diandalkan, dan di dalam penyerapan unsur-unsur bahasa lain itu kita menghindarkan penyimpangan dari struktur dan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri.

Di dalam hubungan dengan bahasa asing, penerimaan dan penyerapan unsur-unsur itu harus benar-benar kita batasi. Penyerapan unsur-unsur bahasa asing dalam bentuknya yang utuh perlu dihindarkan apabila bentuknya itu menyimpang dari struktur dan kaidah bahasa Indonesia. Unsur-unsur bahasa asing yang dapat kita terima dan kita serap haruslah terbatas pada unsur-unsur dalam bentuk istilah yang melambangkan konsep ilmiah bagi kepentingan berbagai bidang ilmu dan teknologi; itu pun terbatas lagi pada istilah-istilah yang pandanannya yang tepat tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia. Tanpa pembatasan ini, sukarlah dibayangkan bagaimana identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan yang kita banggakan itu dapat kita pertahankan.

Penerimaan dan penyerapan unsur-unsur yang kita perlukan dari bahasa daerah pada dasarnya tidak merupakan gangguan bagi identitas bahasa Indonesia—asal saja strukturnya disesuaikan dengan struktur dan kaidah bahasa Indonesia—karena penyerapan unsur-unsur bahasa daerah itu sejalan dengan ciri-ciri dan perkembangan bahasa Indonesia seperti yang kita miliki dewasa ini. Toleransi kebahasaan yang secara khas telah menandai kehidupan kebahasaan kita berarti keterbukaan bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah. Namun, seperti telah dikemukakan di atas, keterbukaan itu adalah keterbukaan terhadap unsur-unsur yang benar-benar diperlukan bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Di dalam pengindonesiaan unsur-unsur dalam bentuk istilah dari bahasa asing, ada dua jalan yang dapat ditempuh. Pertama, istilah dari bahasa asing itu diindonesiakan dengan menggunakan unsur-unsur yang sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Kedua, apabila di dalam bahasa Indonesia tidak terdapat padanannya yang tepat, istilah dari bahasa asing itu dapat diindonesiakan dengan menggunakan unsur-unsur dari bahasa daerah, baik bahasa

daerah kontemporer maupun bahasa daerah klasik seperti bahasa Jawa Kuno. Kecenderungan menempuh jalan yang kedua, apabila jalan yang pertama tidak mendatangkan hasil yang memuaskan atau tidak mendatangkan hasil sama sekali, cukup besar. Kecenderungan ini timbul atas dasar sikap dan semangat kebangsaan kita. Meskipun demikian, jalan yang kedua ini hendaklah kita tempuh dengan berhati-hati, dengan senantiasa mengindahkan tujuan yang hendak kita capai. Di dalam hubungan ini, tujuan yang kita capai adalah (1) mengindonesiakan istilah dari bahasa asing dan (2) memungkinkan komunikasi ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jelaslah bahwa tujuan yang pertama dapat kita capai dengan menggunakan unsur-unsur bahasa daerah, baik bahasa daerah kontemporer maupun bahasa daerah klasik. Sebaliknya, tujuan yang kedua belum tentu tercapai dengan menempuh jalan ini. Tujuan yang kedua itu dapat dikatakan tercapai apabila komunikasi ilmiah menjadi tersendat-sendat atau tidak berjalan sama sekali karena istilah yang baru terbentuk itu terasa janggal dan maknanya terasa lebih asing daripada makna istilah asing yang hendak digantikannya. Apabila demikian halnya, jalan yang lebih baik adalah menyerap istilah dari bahasa asing itu dengan jalan menyesuaikan dengan struktur dan kaidah bahasa Indonesia.

Sejarah perkembangan bahasa Indonesia memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia telah menyerap unsur-unsur perbendaharaan kata dari berbagai bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis. Bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia selanjutnya, kita perlu menentukan bahasa asing yang mana yang diutamakan sebagai bahasa sumber di dalam hubungan dengan penyerapan istilah asing. Dalam hal ini pilihan kita jatuh pada bahasa Inggris, bukan bahasa lain seperti bahasa Belanda, atas dasar pertimbangan sebagai berikut.

1. Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib di lembaga-lembaga pendidikan kita, mulai dari kelas I sekolah lanjutan tingkat pertama sampai dengan kelas III sekolah lanjutan tingkat atas dan tahun-tahun pertama di lembaga pendidikan tinggi. Dengan demikian, generasi muda kita lebih mengenal dan memahami bahasa Inggris daripada bahasa asing lain seperti bahasa Belanda.
2. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang diutamakan sebagai sarana komunikasi resmi antara Indonesia dan negara-negara lain.

3. Sebagian besar bahan kepustakaan di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertulis di dalam bahasa Inggris.
4. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa resmi di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Bahasa Inggris adalah bahasa kerja di kalangan bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Pemilihan bahasa Inggris yang diutamakan sebagai bahasa sumber di dalam hubungan dengan penyerapan istilah dari bahasa asing, apabila perlu, memungkinkan kita melibatkan bukan saja generasi dewasa sekarang, melainkan juga generasi muda di dalam bidang kebahasaan kita. Hal ini perlu kita perhitungkan karena pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang hidup dan dinamis akan berlangsung terus dengan melampaui batas generasi sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat kita.

Kesimpulan

Sikap bahasa warga masyarakat kita adalah salah satu faktor yang menentukan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional kita. Pada dasarnya kebijaksanaan bahasa nasional adalah pernyataan sikap nasional terhadap masalah bahasa. Di Indonesia masalah bahasa merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh masalah bahasa Indonesia, masalah bahasa daerah, dan masalah bahasa asing.

Di dalam pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional diperlukan adanya keseimbangan antara sikap bahasa dan perilaku bahasa, antara sikap bahasa warga masyarakat, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok perseorangan dan sikap bahasa kita sebagai bangsa, dan antara pemeliharaan identitas bahasa Indonesia melaksanakan fungsinya. Selain itu, diperlukan pula keselarasan di antara ketiga komponen sikap bahasa, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen perilaku.

Bahasa Indonesia dapat dikembangkan dan diperkaya dengan jalan penerimaan dan penyerapan unsur-unsur bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Unsur-unsur serapan itu hendaklah terbatas pada unsur-unsur yang sangat diperlukan dan yang padanannya yang tepat tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia.

Untuk kepentingan pengembangan bahasa Indonesia selanjutnya, terutama di dalam bidang peristilahan, bahasa asing yang diutamakan sebagai bahasa sumber, apabila perlu adalah bahasa Inggris.

DAFTAR BACAAN

- Anderson, Edmund A. 1974. "Language Attitudes, Beliefs, and Values: A Study in Linguistic Cognitive Frameworks". Disertasi. Georgetown University
- Edwards, Allen L. 1957. *Techniques of Attitude Scale Construction*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Garvin, Paul L. dan Madeline Mathiot. 1956. "The Urbanization of the Guarani Language : A Problem in Language and Culture". Dalam *Men and Cultures: Selected Papers of the Fifth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences*. A.F.C. Wallace, editor. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Halim, Amran. 1976. "Fungsi Politik Bahasa Nasional". Dalam *Politik Bahasa Nasional*. Jilid I. Amran Halim, Editor. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Joesoef, Daoed. 1978a. "Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan". Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 1978. Yogyakarta.
- . 1978b. Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara peresmian Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Lambert, W.E. 1967. "A Social Psychology of Bilingualism". *Journal of Social Issues*. Vol. 23.
- Moeliono, Anton M. 1976. "Ciri-ciri Bahasa Indonesia yang Baku". Dalam *Politik Bahasa Nasional*. Jilid II. Amran Halim editor. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Oppenheim, A.N. 1976. *Questionnaire Design and Attitude Measurement*. London : Heinemann.
- Triandis, Harry C. 1971. *Attitude and Attitude Change*. New York: John Wiley

BAHASA INDONESIA DALAM HUBUNGAN DENGAN KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dardji Darmodihardjo

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Bahasa sebagai Alat untuk Mengemukakan Pendapat Menyampaikan Perasaan Hati

Manusia ditakdirkan lahir sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat itu manusia satu sama lain saling mempengaruhi, saling menyesuaikan diri, baik atas kepentingannya sendiri maupun atas kehendak anggota lainnya dalam masyarakat itu. (Gioglioli, 1972:309). Mereka saling mengemukakan dan menilai pendapat dan atau perasaan hati masing-masing. Dalam hubungan ini. Peranan Bahasa sangat penting. Melalui bahasalah semuanya itu dapat terjadi dengan baik.

Mengajak

Adakalanya dalam pergaulan bermasyarakat itu manusia tidak hanya mengemukakan pendapat, pikiran, atau perasaan hati saja. Mereka saling mengajak atau menyuruh, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam masyarakat. Ajakan atau suruhan ini pun hanya mungkin disampaikannya dengan baik melalui bahasa.

Memerintah

Dalam kehidupan bermasyarakat anggota masyarakat bukan hanya menyampaikan pikiran, pendapat, ajakan atau suruhan saja. Dalam kehidupan ketentaraan, misalnya, ada seorang yang memberi komando atau perintah.

Anggota-anggota pasukan itu tak perlu menafsirkan lebih dahulu komando atau perintah itu sebelum mereka melakukannya. Perbuatan sebagai reaksi terhadap komando atau perintah itu dilakukan mereka secara otomatis seperti halnya kita menekan sebuah tombol yang secara otomatis diikuti oleh nyalanya lampu listrik. Di sini komandan menggunakan bahasa untuk mengatur kegiatan bersama. Kegiatan bersama yang dilakukan oleh anggota-anggota pasukan itu tentu saja akan sangat tergantung pada taraf kerja sama dan penggunaan bahasa yang sama antara komandan dan anggota pasukan walaupun dalam bahasa yang digunakan komandan itu tidak terkandung pikiran atau pendapat yang harus ditafsirkan lebih dahulu oleh anggota-anggota pasukan itu sebelum mereka dapat melakukan perbuatannya. Manusia berbahasa bukan hanya untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan perasaan hatinya, tetapi juga untuk memancing reaksi dari anggota-anggota masyarakat lain, atau untuk mempengaruhi sikap dan perbuatan mereka ke arah yang diinginkan pembicara.

Pertanda Kepribadian

Di samping sebagai alat untuk berhubungan satu sama lain, bahasa juga merupakan pertanda kepribadian seseorang. Sering orang mengatakan, "Bercaralah, nanti akan saya katakan siapa Anda sebenarnya". Sekurang-kurangnya ada bagian ujaran yang tak begitu disadari oleh pembicara, seperti ucapan, mimik, dan gerak-gerik yang merupakan wahana kepribadian. Hampir setiap orang, bila berjumpa dengan orang yang belum pernah dikenalnya sebelumnya, akan menilai orang itu dari ujarannya. Bila kita berjumpa dengan orang yang sudah kita kenal baik, dari ujarannya kita pun dapat mengetahui apakah ia sedang berada dalam keadaan riang gembira atau dalam keadaan sedih, sungguh-sungguh atau bergurau, dan lain-lain.

Media Seni

Bahasa juga adalah media seni, yaitu seni sastra. Penggunaannya dalam ciptaan seni ini selalu dihubungkan dengan apa yang disebut "bahasa seni" yang sedikit banyak tampak berbeda dari bahasa sehari-hari. Bahasa sastra ini dapat berbentuk bahasa lisan atau tulisan.

Bahasa sebagai Alat Mendidik : sebagai Bahasa Pengantar

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung dalam suatu proses. Proses itu berupa proses transformasi nilai-nilai, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Pelaksana proses adalah pendidikan dalam fungsi dan lingkungan-

nya masing-masing. Yang menerima proses adalah siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju ke arah kedewasaan kepribadiannya. Untuk menjaga agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik perlu adanya hubungan edukatif yang baik pula antara pendidik dan anak didik.

Bila kita coba memperhatikan berlangsungnya proses pendidikan, misalnya, kita masuki sebuah kelas yang sedang melaksanakan proses pendidikan itu, termasuk kelas matematika atau kelas keterampilan, akan kita ketahui bahwa guru dan murid berbicara, membaca, atau menulis (mengarang). Semua kegiatan yang terjadi dalam proses itu pada hakikatnya adalah kegiatan berbahasa. Itulah sebabnya, sering dikatakan orang bahwa sesungguhnya semua guru adalah guru bahasa dan semua pelajaran yang diterima siswa adalah pelajaran bahasa. Maksudnya, tiap guru, bukan hanya guru bahasa tetapi juga guru bidang studi yang lain, harus mengajarkan bahasa untuk bidang studinya masing-masing. Guru tidak dapat begitu saja memisahkan fakta-fakta atau konsep-konsep yang terdapat dalam bidang studinya dari mengajarkan kepada murid-muridnya istilah-istilahnya yang tepat, cara membentuk pemikiran yang logis dalam bidang studinya itu, dan cara memahami buku pelajaran yang digunakannya.

Pendidikan akan berlangsung dengan baik bila bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar betul-betul berfungsi dalam proses interaksi gurumurid atau pendidik-anak didik. Peranan bahasa dalam pendidikan sangat penting. Mengabaikan faktor bahasa dalam pendidikan dapat menggagalkan pendidikan itu sendiri.

Bahasa sebagai Alat Pembentuk Kesadaran Bernegara

Alat pemersatu bangsa. Bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa itu sebagai alat komunikasi di antara sesama anggotanya merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Sistem komunikasi dengan bahasa merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup suatu masyarakat.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Sebagai akibat dari latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda yang dipunyai berbagai kelompok suku bangsa itu perlu adanya satu bahasa yang dapat mengemban berbagai fungsi dalam kehidupan nasional. Kita bersyukur, satu bahasa yang demikian sudah kita punyai sejak perjuangan kemerdekaan bangsa. Pengangkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda, yang kemudian pada masa kemerdekaan bangsa dinyatakan sebagai ba-

hasa negara dalam undang-undang dasar negara telah membuktikan betapa pentingnya peranan bahasa itu dalam membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara.¹

Sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda dan kemudian diperkuat dengan kedudukannya sebagai bahasa negara dalam UUD negara sejak kemerdekaan bangsa, bahasa Indonesia tidak saja berfungsi sebagai pembentuk kesadaran berbangsa dan bernegara, tetapi telah menjalankan berbagai fungsi penting yang lain. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah lambang kebanggaan nasional dan lambang identitas nasional, di samping sebagai alat yang mempersatukan berbagai kelompok suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya menjadi satu bangsa, dan alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah, sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara menurut undang-undang dasar negara, bahasa Indonesia berfungsi antara lain sebagai (1) bahasa resmi negara, (2) bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan, (3) bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan (4) bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.²

Alat penghubung kemanusiaan antarbangsa. Semakin luas lingkungan pemakaian suatu bahasa semakin menyebar pula para penuturnya. Luas pemakaian suatu bahasa, bahkan dapat melampaui batas-batas kebangsaan dan kenegaraan, seperti bahasa Inggris dan bahasa dunia yang lain. Tahun-tahun terakhir ini fungsi yang demikian telah pula dijalankan oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjalankan fungsinya sebagai alat perhubungan kemanusiaan antarbangsa dengan digunakannya sebagai bahasa resmi dalam berbagai pertemuan-pertemuan internasional, seperti halnya yang terjadi dalam Konferensi Guru Sedunia di Jakarta beberapa bulan yang lalu.³

Sifat Bahasa

Sebagaimana telah disinggung di atas, fungsi utama suatu bahasa adalah alat untuk berkomunikasi antarsesama anggota masyarakat bahasa itu. Agar komunikasi dapat berjalan lancar dan tepat, para pemakai bahasa harus menggunakan bahasa itu sedemikian rupa sehingga di antara pembicara/penulis dan pendengar/pembaca terdapat pengertian yang sama. Hal seperti ini, ter-

utama dalam masyarakat yang multibahasa, lebih mungkin dicapai bila para pemakai bahasa menggunakan bahasa yang sesuai dengan variasi yang serasi dengan situasi dan kondisi pemakaian bahasa itu, terutama dengan dalam pemakaian bahasa buku dapat menghindarkan para pemakai bahasa dari berbagai gangguan komunikasi. Sehubungan dengan itu, pemakai bahasa harus berusaha memakai bahasa secara mudah, sederhana, jelas, dan sesuai dengan kepribadian, baik dalam pilihan kata, tata kata, tata kalimat, maupun ejaan dan tanda-tanda baca (dalam bahasa tertulis). Dalam istilah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, para pemakai bahasa harus memakai bahasa "secara baik dan benar". Pencampuran unsur-unsur bahasa Indonesia dengan unsur-unsur bahasa lain dalam pemakaian bahasa Indonesia perlu dihindarkan, oleh karena hal seperti itu tidak saja akan menjadi penghalang bagi berlangsungnya komunikasi di antara pemakai bahasa, tetapi juga akan menghilangkan kepribadian bahasa itu sendiri.

Kebijaksanaan Bahasa Indonesia dalam Pendidikan Nasional

Kebijaksanaan pendidikan nasional bersumber pada ketetapan MPR tentang garis-garis besar haluan negara. Dalam hal kebijaksanaan bahasa dalam hubungannya dengan pendidikan nasional, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, antara lain dapat dikemukakan hal-hal berikut.

1. Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecenderungan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
2. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengalaman Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Pendidikan Pancasila, termasuk pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta.

4. Mutu pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan di bidang ilmu dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan.
5. Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia ditingkatkan dan diperluas sehingga mencapai masyarakat luas.
6. Kepustakaan nasional, penerbitan, dan penerjemahan dikembangkan sehingga dapat lebih menunjang program-program pendidikan.
7. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar.
8. Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas nasional.

Berdasarkan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan di atas, kebijaksanaan bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional ditekankan pada penempatan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran pokok dan penggunaannya sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan tingkatan sekolah.

Penempatan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran pokok di semua jenis dan tingkatan sekolah tujuannya agar siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sebagai alat komunikasi dalam berbagai situasi pemakaian bahasa dalam masyarakat. Di samping itu, pada tingkat sekolah lanjutan dan perguruan tinggi, pengajaran bahasa Indonesia juga ditujukan agar siswa mengetahui seluk-beluk bahasa Indonesia itu dalam hal sejarahnya, tata bunyi, tata kata, tata kalimat, kosa kata, ungkapan-ungkapan, dan peribahasa serta sastranya, baik sebagai ilmu atau pengetahuan biasa. Pengajaran sastra, di samping untuk tujuan pengetahuan dan apresiasi sastra, juga untuk memperkenalkan nilai-nilai, adat-istiadat dan peradaban bangsa yang dilukiskan pengarang dalam hasil karya sastranya itu.⁴

Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengajaran bahasa agar tujuan sebagaimana yang digariskan dapat tercapai dengan baik, telah diambil langkah-langkah untuk melengkapi sekolah-sekolah dengan semua sarana yang diperlukan, seperti buku teks siswa (metode), buku pegangan guru, buku pelengkap dan buku-buku bacaan serta sumber (buku-buku perpustakaan), serta alat-alat pelajaran yang diperlukan. Dalam hal guru, telah pula diusahakan

penambahan guru baru dan penataran-penataran bagi guru-guru yang ada. Sejalan dengan itu, pendidikan calon guru pun ditingkatkan mutunya agar dapat memenuhi keperluan bagi pelaksanaan program pengajaran yang baru itu.5

Penempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan tingkatan sekolah selain dimaksudkan sebagai media pengajaran, sekaligus juga sebagai wadah untuk membiasakan murid menggunakan bahasa itu secara baik dan benar karena pada hakikatnya sebagian besar dari kegiatan mengajar-belajar yang berlangsung di sekolah itu adalah kegiatan perbuatan berbahasa, baik lisan maupun tulisan (Stubbs, 1976:13).

Walaupun pada asasnya untuk semua jenis dan tingkatan sekolah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar, mengingat anak-anak yang masuk kelas I SD pada umumnya telah menguasai bahasa ibunya sebagai akibat sifat kemultibahasaan masyarakat kita, bahasa daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar dalam rangka mempercepat dan memperlancar siswa memahami dan menguasai bahan yang diajarkan. Di samping itu, bagi daerah-daerah yang memerlukan pendidikan bahasa daerah, tersedia pula waktu 2 jam pelajaran seminggu untuk pengajaran bahasa daerah sejak kelas I sampai kelas VI SD, yang kemudian dapat dilanjutkan terus di SLP dan SLA. Dengan jalan demikian, melalui pengajaran bahasa dan penggunaannya sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional, pembinaan terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah dapat sekaligus dilaksanakan.

Pemberian prioritas terhadap penempatan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran pokok dan penggunaannya sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan tingkatan sekolah, dan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada kelas-kelas rendah di SD, bila guru memandang perlu, dan penempatannya sebagai mata pelajaran di SD dan SL pada daerah-daerah yang memerlukan itu, didasarkan pada kedudukan dan fungsi bahasa itu dalam masyarakat kita dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pier Paolo Giglioli Editor 1972, *Language and Social Context*. Ltd, Harmondsworth: Penguin Books

Dalam buku *45 Tahun Sumpah Pemuda* terbitan Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, 1974 dapat kita baca berbagai uraian yang menyatakan usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai organisasi pemuda untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan jauh sebelum Sumpah Pemuda dan mencapai puncaknya pada saat Sumpah Pemuda seperti terlihat dalam pernyataan Sumpah Pemuda itu.

2. Perhatikan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Seminar Politik Bahasa Nasional dalam *Politik Bahasa Nasional, Kesimpulan, Pendapat, dan Usul*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975 (Stensilan).
3. Antara lain pemakaian bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi pada Kongres Guru Sedunia (WCOTP-Assembly) XXVII yang berlangsung di Jakarta tanggal 26 Juli – 2 Agustus 1978.
4. Lihat Kurikulum SD, SLP, dan SLA 1975/1976.
5. Hal ini sudah mulai dilaksanakan sejak Pelita I dan dilanjutkan terus selama Pelita II dan III dalam program pembangunan Ditjen PDM.
6. Stubbs Michael, 1976, *Language Schools and Classroom*. Methuen & Co.

KEADAAN KEBAHASAAN DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGAJARAN BAHASA INDONESIA

Jakub Isman

IKIP Padang

Keadaan Kebahasaan di Indonesia

Indonesia didiami oleh berbagai suku bangsa yang tinggal di berbagai daerah dengan aneka ragam kebudayaan dan bahasanya. Keanekaragaman demikian mungkin menguntungkan karena dapat memperkaya kebudayaan dan bahasa nasional, tetapi dalam keadaan tertentu mungkin pula merugikan karena dapat membahayakan persatuan nasional. Motto *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda, tetapi tetap satu jua) mencerminkan tekad bangsa kita untuk menarik keuntungan—dan bukan kerugian—dari keanekaragaman itu. Khusus di bidang kebahasaan, Sumpah Pemuda yang diikrarkan setengah abad yang lalu pada tanggal 28 Oktober 1928 menegaskan adanya kesepakatan kita bersama tentang bukan saja bangsa dan tanah air Indonesia satu, tetapi juga bahasanya satu, yaitu bahasa Indonesia.

Walaupun Sumpah Pemuda tahun 1928 telah mengikrarkan hanya ada satu bahasa nasional, tetapi Undang-Undang Dasar 1945—di samping menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara—tetap menjamin perlindungan bagi bahasa-bahasa daerah sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional. Ini berarti bahwa pemakaian dua bahasa atau lebih dalam komunikasi di Indonesia merupakan kenyataan yang dapat diterima oleh masyarakat dan Pemerintah, tetapi harus tetap dalam pengertian untuk memperkaya kebudayaan nasional.

Bahasa yang dipakai di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi: (1) bahasa daerah, (2) bahasa nasional, dan (3) bahasa asing. Secara umum dapat dikatakan bahwa bahasa daerah dipakai untuk komunikasi "intrasuku", yaitu percakapan antara anggota suatu suku bangsa. Bahasa nasional dipakai untuk komunikasi "antarsuku", yaitu percakapan antara orang dari suku-suku yang berbeda, sedangkan bahasa asing dipakai dalam komunikasi "antar bangsa". Walaupun secara umum sudah dapat ditetapkan pembagian pemakaian kelompok bahasa seperti di atas, tetapi bila diteliti lebih mendalam ternyata bahwa masalah pilihan bahasa untuk suatu percakapan bagi orang Indonesia sebagai multibahasawan adalah jauh lebih rumit. Penemuan beberapa penelitian dan observasi berikut ini akan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana rumitnya masalah itu.

Tanner (1967) telah mengadakan penelitian tentang penggunaan bahasa dalam suatu kelompok masyarakat kecil kalangan antara Indonesia yang belajar di salah satu universitas di Amerika. Kelompok yang beranggotakan 26 orang mahasiswa beserta keluarga mereka yang berasal dari berbagai suku itu ternyata semuanya dapat berbahasa Indonesia. Bahasa nasional ini mereka pakai untuk komunikasi antarsuku, baik dalam keadaan formal maupun dalam keadaan informal. Dalam percakapan intrasuku bahasa Indonesia sering juga dipakai, misalnya, antara orang Jawa yang baru berkenalan. Dalam situasi seperti ini tampaknya pemakaian bahasa nasional merupakan upaya untuk menghindari timbulnya akibat-akibat psikologis yang kurang menguntungkan semua pihak jika mereka mempergunakan bahasa Jawa yang mempunyai beberapa tingkatan itu.

Dari segi bahasa daerah ternyata 20 orang dari anggota kelompok dapat berbahasa Jawa, 5 orang berbahasa Minangkabau, 8 orang berbahasa Sunda, 1 orang berbahasa Batak, dan 1 orang berbahasa Palembang. Bahasa daerah dipakai dalam komunikasi intrasuku yang biasanya bersifat tidak resmi dan pada umumnya untuk menunjukkan penghargaan, rasa hormat, atau rasa intim atau rasa solidaritas suku.

Dari segi bahasa asing ternyata 20 orang dapat berbahasa Belanda, 24 orang berbahasa Inggris, dan 1 orang berbahasa Cina. Bahasa asing ini terutama dipakai untuk komunikasi antarbangsa, tetapi kadang-kadang dipakai pula dalam situasi formal antar sesama Indonesia untuk mendapatkan prestise. Khusus bahasa Belanda untuk kelompok yang memahaminya, juga dipakai sebagai alat komunikasi intraklik.

Dari hasil penelitian Tanner di atas dapat dilihat bahwa "bidang pemakaian" bahasa daerah, nasional, dan asing seperti yang diuraikan pada halaman 2 pada umumnya dapat diterima, tetapi beberapa pengecualian perlu dicatat. Pertama, bidang pemakaian bahasa nasional ternyata lebih luas karena sering pula dipakai dalam percakapan intrasuku dalam keadaan tertentu. Kedua, bahasa asing kadang-kadang dipakai pula dalam percakapan intrabangsa untuk mencapai tujuan sosial tertentu.

Laporan Isman (1975 dan 1976) juga menunjukkan adanya pengecualian dari bidang pemakaian bahasa itu pada halaman 2. Walaupun bahasa Indonesia lisan pada umumnya terbatas untuk percakapan antarsuku, bahasa Indonesia tulisan untuk beberapa suku bangsa selalu dipakai dalam komunikasi intrasuku. Untuk suku Minangkabau dan suku Kerinci di Sumatra bagian tengah, misalnya, semua surat-menyurat, termasuk untuk orang yang paling dekat seperti ayah dan ibu, hampir seluruhnya dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa bidang pemakaian bahasa nasional pada suku ini sudah lebih luas. Penelitian Isman *et al.* (1977) menunjukkan bahwa di Sumatra Barat komunikasi lisan di kota memakai 55% bahasa Minangkabau dan 45% bahasa Indonesia, sedangkan komunikasi tulisan memakai 3% bahasa Minangkabau dan 97% bahasa Indonesia. Sebagai perbandingan, komunikasi lisan di desa Sumatra Barat memakai 77% bahasa Minangkabau dan 23% bahasa Indonesia, sedangkan komunikasi tulisan memakai 7% bahasa daerah dan 93% bahasa nasional. Monopoli bahasa Indonesia dalam komunikasi tulisan untuk penutur bahasa daerah seperti Minangkabau dan Kerinci mungkin sekali disebabkan oleh kenyataan bahwa (1) bahasa daerah itu relatif lebih dekat dengan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek sistemnya atau (2) penutur bahasa daerah itu memperoleh pengalaman membaca dan menulis langsung dalam bahasa Indonesia sejak semula.

Masalah perpindahan dari satu bahasa ke bahasa lain dalam percakapan kelompok yang karena penambahan anggota berubah status dari bersifat intrasuku menjadi antarsuku atau antarbangsa dilaporkan oleh Isman (1976). Kesimpulannya ialah bahwa dalam komunikasi kelompok semacam itu kriteria utama pemilihan media yang akan dipakai ialah keharusan media itu dimengerti oleh semua pihak yang ikut berkomunikasi. Berdasarkan kriteria ini, percakapan dalam bahasa daerah antara beberapa orang yang sesuku segera berubah menjadi percakapan berbahasa Indonesia bila ada orang dari suku lain ikut berpartisipasi. Bila kemudian ikut lagi orang asing yang tidak dapat

berbahasa Indonesia, maka segera percakapan itu pindah ke dalam bahasa yang dipahami oleh semua pihak, biasanya bahasa Inggris.

Woyowasito (1975) melaporkan kasus yang lebih rumit. Dalam percakapan antara dua orang yang sesuku dalam bahasa daerahnya yang mempunyai beberapa tingkatan seperti bahasa Jawa, kadang-kadang lebih mudah berpindah ke bahasa Indonesia daripada ke tingkatan lain seperti ngoko dan kromo. Kesimpulan ini sama dengan hasil penelitian Tanner yang telah dibicarakan di muka. Dilaporkan juga adanya kasus percakapan antara dua orang Jawa yang dalam satu konteks pembicaraan tanpa kesadaran telah bolak-balik berpindah antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Belanda. Kasus seperti ini sebenarnya banyak terjadi disekitar kita. Tampaknya, bila pihak yang berkomunikasi menguasai beberapa bahasa yang sama, perpindahan bahasa dalam percakapan sering terjadi karena topik pembicaraan, situasi perasaan, atau beberapa faktor lain. Dalam kasus seperti ini tampaknya perbedaan antara komunikasi intrasuku dan antarsuku tidak menjadi soal lagi. Perpindahan kode berjalan otomatis sesuai dengan tuntutan efisiensi, efektivitas, dan keempukan pembicaraan.

Dari laporan Woyowasito (1975) dapat disimpulkan bahwa dalam daerah sosial bahasa Jawa, fungsi bahasa Indonesia ialah (1) sebagai media dalam hubungan yang bersifat resmi seperti hubungan di sekolah, dalam pertemuan dan rapat, dalam surat-menyurat dan media massa, (2) sebagai media dalam hubungan antarsuku, dan (3) sebagai media dalam hubungan tidak resmi seperti hubungan antara teman dan anggota keluarga. Penelitian Rasyad (1976), Razak (1976), serta Isman dan kawan-kawan (1977) tentang situasi kebahasaan di Sumatra Barat memberikan kesimpulan yang sama tentang pemakaian bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, dapatlah diambil kesimpulan umum bahwa bahasa Indonesia bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antarsuku, tetapi dalam hal-hal tertentu, bahkan sudah dipakai dalam komunikasi intrasuku dan dalam keluarga.

Pemakaian bahasa Indonesia yang semakin meluas itu dibantu oleh beberapa hal. Pertama, bagi kebanyakan orang belajar bahasa Indonesia itu tidak sukar karena kesederhanaan yang *inheren* dalam strukturnya dan karena banyak pula persamaannya dengan bahasa daerah. Kemudian, baik lingkungan linguistik maupun nonlinguistik yang ada di tanah air sangat menguntungkan bagi proses perolehan bahasa nasional. Prestise dan daya guna bahasa Indonesia terus meningkat karena dapat dipakai dalam pergaulan na-

sional dan internasional (Malaysia dan Singapura memakai bahasa Melayu sebagai bahasa nasional mereka), terpakai sebagai bahasa pengantar pada semua jenis dan jenjang sekolah, menjadi alat pengembangan ilmu dan teknologi, pendukung kebudayaan nasional serta simbol dari identitas bangsa. Terakhir, sifat demokratis bahasa nasional yang tidak mengenal tingkatan sosial sangat menarik bagi mereka yang bahasa daerahnya mempunyai tingkatan yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi psikologis dalam pembicaraan.

Di samping hal-hal yang menggembirakan bagi perkembangan bahasa nasional di atas, kita juga menyaksikan adanya beberapa hal yang tidak menggembirakan. Hambatan psikologis yang kadang-kadang dijumpai dalam pemakaian bahasa Jawa, misalnya, yang membedakan orang menurut statusnya seringkali memaksa mereka pindah bolak-balik antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Akibatnya ialah sering terjadi kalimat-kalimat yang bukan kalimat bahasa Jawa dan bukan pula kalimat bahasa Indonesia. Di kalangan masyarakat atasan, karena ingin mudahnya saja atau untuk prestise, sering pula dipakai kalimat-kalimat yang setengah Indonesia dan setengah asing. Hal lain yang juga memerlukan perhatian khusus ialah masalah pembakuan bahasa Indonesia. Kontak yang intensif antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing dapat membawa beberapa akibat negatif seperti interferensi yang tak terkendalikan. Untuk menghindari hal ini para penutur perlu diberi pengertian dan kesadaran bahwa bahasa Indonesia itu berbeda dari bahasa daerah dan berbeda pula dari bahasa asing walaupun banyak persamaan kosa kata akibat proses pinjam-meminjam. Usaha pembakuan harus pertama dan terutama diarahkan kepada bahasa tulisan. Pembakuan bahasa lisan terutama harus diarahkan kepada ragam resmi. Ragam tak resmi sebaiknya diberi kesempatan untuk memakai warna daerah di mana perlu, terutama dalam aspek fonologi.

Proses Perolehan Bahasa

Kebanyakan orang Indonesia dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang tidak memakai bahasa Indonesia, tetapi memakai salah satu bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Bagi mereka bahasa Indonesia bukanlah bahasa pertama yang diperoleh. Perolehan bahasa daerah sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama berjalan secara alamiah. Bagi seorang anak, proses perkembangan bahasa pertamanya berjalan jalin-menjalin dengan perkembangan pancainderanya, persepsinya, dan kognisinya. Dalam hal demikian, belajar bahasa

tidaklah berarti melakukan latihan-latihan hampa seperti yang sering ditemui dalam kelas bahasa asing. Proses belajar bahasa pertama sekaligus merupakan usaha melatih persepsi melalui pancaindra yang semakin berkembang untuk memperluas cakrawala lingkungan guna menambah pengetahuan, kemampuan berpikir, dan merasa. Bila seorang anak memperoleh kata *pisang*, misalnya, melalui pendengaran dia memperoleh aspek bunyi kata itu; melalui penglihatan dia mengenal bentuk dan warna benda yang dilambangkan oleh bunyi tadi; melalui rabaan dia mengenal keadaan lunak atau kerasnya benda itu; melalui kecapan dia merasakan manisnya dan melalui penciuman dia mengenal aroma benda yang disebut pisang tadi. Semua pengalaman persepsi yang simultan ini menimbulkan asosiasi dalam otak si anak tentang segala ciri-ciri benda *pisang* yang kemudian membentuk satu set unsur-unsur sematik (*semantic features*), yang menentukan arti dari rangkaian bunyi /p+i+s+a+ng/ tadi. Keadaan inilah yang memungkinkan anak membayangkan suatu jenis buah-buahan tertentu ketika dia mendengar bunyi *pisang*, atau sebaliknya waktu dia melihat buah-buahan tertentu itu dia akan melambangkannya dengan bunyi *pisang* itu.

Dalam mempelajari bahasa kedua, misalnya, bahasa Inggris, bunyi *banana* tidak selalu dapat dihubungkan langsung dengan bendanya, tetapi dengan bunyi *pisang* terlebih dahulu. Latihan dan pengalaman yang terus-menerus akan dapat menimbulkan asosiasi langsung antara bunyi *banana* dengan bendanya.

Proses menguasai sintaksis jauh lebih rumit dari yang dibicarakan di atas. Asumsi yang sering dipakai untuk menerangkan penguasaan sintaksis ialah perkembangan kognisi si anak melalui pengalaman seperti yang dikemukakan di depan menyebabkan dia mengenal konsep hubungan antara subjek dan predikat, hubungan antara benda dan sifat yang menerangkannya, hubungan antara kalimat negatif dan kalimat positif, dan seterusnya. Asumsi ini didukung oleh hasil banyak penelitian di bidang perolehan bahasa (Bloom, 1970; Dato, 1970; Isman, 1973), yang menunjukkan bahwa anak-anak mempunyai strategi tertentu dalam belajar bahasa yang bergerak dari hubungan dan aturan sintaksis yang sederhana ke arah yang lebih rumit. Penelitian-penelitian di atas juga menunjukkan bahwa perolehan bahasa kedua dalam lingkungan alamiah bagi anak-anak yang masih kecil memperlihatkan banyak persamaan dengan perolehan bahasa pertama. Implikasi dari penemuan ini ialah bahwa dalam mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, misalnya, kemungkinan akan berhasil sama seperti mempelajari bahasa pertama

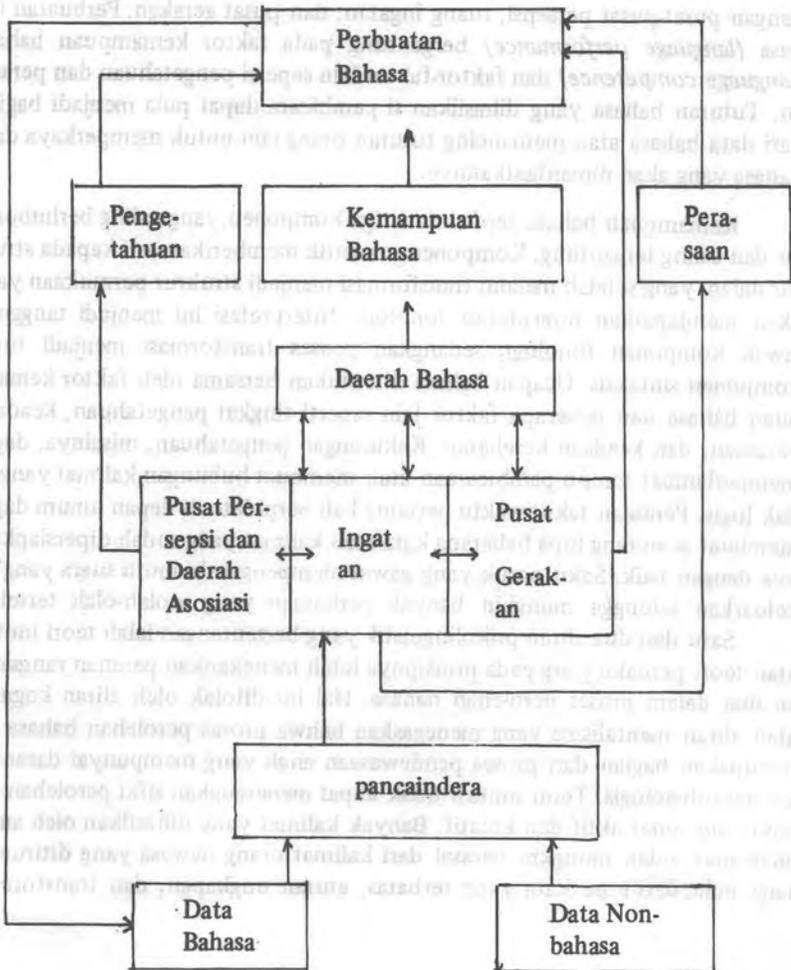
akan semakin besar jika bahasa Indonesia itu dapat diajarkan dalam lingkungan alamiah kepada anak-anak yang masih kecil. Belajar bahasa kedua bagi orang yang telah dewasa memang selalu lebih sulit karena dalam gudang ingatannya telah tersimpan kekayaan linguistik bahasa pertama yang sering menjadi penghambat. Proses asosiasi, generalisasi, dan analogi yang sangat penting sering terganggu oleh interferensi yang datang dari bahasa pertama yang telah lama ada dalam gudang ingatan itu.

Hal lain yang perlu dibicarakan ialah bahwa anak-anak mempelajari bahasa ibunya sewaktu mereka belum mengenal bahasa lain mana pun. Penguasaan bahasa pertama itu mutlak bagi kelangsungan hidupnya sehingga betapa sedikit pun yang diketahuinya pada suatu saat akan tetap dipakai secara efektif. Dalam hal ini setiap tingkatan kemampuan bahasa merupakan kesatuan yang bulat bagi si anak. Itulah sebabnya, dia tetap berkomunikasi secara antusias pada tingkat kemampuan yang belum sempurna seperti pada tingkat holofrastik (semua pikiran baru dapat dinyatakan dengan satu kata saja), tingkat kalimat dwikata, dan tingkat kalimat telegrafik. Dalam proses perolehan bahasa pertama si anak belum mengenal konsep "kesalahan" dalam berbahasa, sedangkan orang dewasa yang sedang belajar bahasa kedua selalu dihantui oleh rasa takut membuat kesalahan itu. Itulah sebabnya, si anak yang sedang mempelajari bahasa ibunya tidak pernah malu atau segan memakai kalimat-kalimat yang menurut ukuran orang dewasa tidak sempurna. Orang dewasa pun tidak pula pernah merasa kuatir melihat kalimat si anak yang masih penuh "kesalahan" itu karena mereka mengetahui betul bahwa apa yang mereka saksikan tidak lain dari suatu "kemampuan transisi" yang pasti akan menjadi lebih baik bila waktu diberikan kepada si anak untuk meneruskan proses perolehan. Mereka yakin bahwa pada suatu saat kelak kemampuan si anak akan sampai pada tingkat yang sama seperti orang dewasa. Dengan kata lain, orang dewasa menganggap bahwa proses perolehan bahasa pertama itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pendewasaan yang secara alamiah pasti akan terjadi.

Dalam mempelajari bahasa kedua di sekolah seorang murid menjadi sangat sadar akan kesalahannya setelah mendapatkan koreksi yang tak kenal ampun dari gurunya. Banyak guru karena dorongan yang kuat ingin berhasil mencoba mengoreksi setiap kesalahan pada setiap kemungkinan sehingga tidak ada kesempatan bagi si anak untuk menyelesaikan kalimatnya. Akibat-

nya ialah bahwa si murid pada suatu saat dapat dihindari rasa takut yang berlebihan sehingga akan selalu berusaha menghindari pemakaian bahasa kedua yang semula ingin dipelajarinya.

Di bawah ini disajikan sebuah bagan yang mencoba merangkum dan sekaligus lebih memperjelas masalah proses perolehan bahasa yang telah dibicarakan di atas.



Dari bagan yang diusulkan ini dapat dilihat bahwa data bahasa dan data non-bahasa diterima oleh pancaindera dan kemudian diteruskan ke pusat-pusat persepsi (pusat penglihatan, pendengaran, bau, dan rasa) dan daerah asosiasi dikirim ke ruang ingatan yang mengolah data fonologi dan sintaksis untuk menetapkan arti. Informasi sematik yang diperoleh disimpan pada ruang ingatan. Persepsi, asosiasi, dan informasi semantik menjadi sumber pembentukan dan pengembangan pengetahuan dan perasaan. Daerah atau gumpalan bahasa merupakan sarana kegiatan kebahasaan dan mempunyai hubungan dengan pusat-pusat persepsi, ruang ingatan, dan pusat gerakan. Perbuatan bahasa (*language performance*) bergantung pada faktor kemampuan bahasa (*language competence*) dan faktor-faktor lain seperti pengetahuan dan perasaan. Tuturan bahasa yang dihasilkan si pembicara dapat pula menjadi bagian dari data bahasa atau memancing tuturan orang lain untuk memperkaya data bahasa yang akan dimanfaatkannya.

Kemampuan bahasa terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan dan saling tergantung. Komponen semantik memberikan arti kepada struktur dalam yang setelah melalui transformasi menjadi struktur permukaan yang akan mendapatkan interpretasi fonologi. Interpretasi ini menjadi tanggung jawab komponen fonologi, sedangkan proses transformasi menjadi tugas komponen sintaksis. Ucapan bahasa ditentukan bersama oleh faktor kemampuan bahasa dan beberapa faktor lain seperti tingkat pengetahuan, keadaan perasaan, dan keadaan kesehatan. Kekurangan pengetahuan, misalnya, dapat memperlambat tempo pembicaraan atau membuat hubungan kalimat yang tidak logis. Perasaan takut waktu pertama kali berpidato di depan umum dapat membuat seseorang lupa beberapa kata atau kalimat yang sudah dipersiapkannya dengan baik. Sakit batuk yang gawat mempengaruhi mutu suara yang dikeluarkan sehingga mungkin banyak perkataan yang seolah-olah tertelan.

Satu dari dua aliran psikolinguistik yang bertentangan ialah teori imitasi atau teori perilaku yang pada prinsipnya lebih menekankan peranan rangsangan luar dalam proses perolehan bahasa. Hal ini ditolak oleh aliran kognitif atau aliran mentalisme yang menegaskan bahwa proses perolehan bahasa itu merupakan bagian dari proses pendewasaan anak yang mempunyai dasar-dasar neurofisiologis. Teori imitasi tidak dapat menerangkan sifat perolehan bahasa yang amat aktif dan kreatif. Banyak kalimat yang dihasilkan oleh anak-anak tidak mungkin berasal dari kalimat orang dewasa yang ditirunya. Lagi pula, dari kosa kata yang terbatas, aturan ungkapan, dan transformasi

yang terbatas dan unit bunyi yang terbatas manusia mampu membuat kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Kemampuan demikian tidaklah mungkin diperoleh hanya dengan meniru orang yang ada dalam lingkungan atau hanya merupakan hasil dari suatu rentetan proses rangsangan dan respons. Kemampuan demikian hanya mungkin dapat diterangkan dengan adanya suatu kemampuan dan proses intelektual yang rumit dan yang didukung oleh mekanisme neurofisiologis yang tampaknya hanya ada pada makhluk manusia. Inilah sebabnya, mengapa alat komunikasi bahasa hanya dimiliki oleh manusia saja. Hewan tidak memilikinya karena tidak pernah dapat belajar atau diajarkan bahasa walaupun perilaku lain dapat diperolehnya melalui proses yang telah diterangkan oleh ilmu jiwa perilaku.

Model yang penulis usulkan melalui bagan di depan merupakan sintesis dari teori perilaku (Skinner, 1957) dan teori mentalisme (Chomsky, 1959; McNeill, 1966). Peranan aktif si anak melalui mekanisme neurofisiologis yang memang secara unik telah ada pada manusia diakui sebagai aspek proses perolehan bahasa yang utama. Walaupun demikian, peranan lingkungan sosial dan lingkungan lain yang menyediakan data bahasa dan data nonbahasa juga amat penting.

Masalah Pengajaran Bahasa Indonesia

Pada bagian satu di depan telah dibicarakan masalah kebahasaan di Indonesia. Bagian dua membicarakan proses perolehan bahasa pertama dan bahasa lain. Pada bagian tiga ini akan dicoba melihat implikasi dari keadaan kebahasaan itu dan implikasi dari penemuan-penemuan psikolinguistik bagi usaha peningkatan pengajaran dan penyebaran bahasa Indonesia.

Bagi anak-anak yang bahasa ibunya memang sudah bahasa Indonesia (atau dialek langsung dari bahasa Indonesia) proses perolehan bahasa pertamalah yang berlaku. Penguasaan struktur dasar untuk komponen semantik, fonologi, dan sintaksis sudah dapat dikatakan baik pada waktu mereka masuk sekolah taman kanak-kanak. Yang harus dipikirkan untuk mereka ialah pengembangan selanjutnya. Hambatan psikologis dan sosiologis bagi mereka sangat minimal. Bagi anak-anak yang bahasa pertamanya adalah salah satu bahasa daerah, masalahnya lebih rumit. Ada hambatan psikologis berupa kompetisi antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia serta interferensi antara keduanya. Hambatan sosiologis akan timbul bila lingkungan bahasa daerah di mana si anak tinggal tidak mempunyai sikap pandangan yang positif terhadap

bahasa Indonesia. Masalah linguistik akan dihadapi oleh kedua kelompok. Masalah ini pada dasarnya menyangkut ada tidaknya data bahasa dan data nonbahasa yang jenis dan jumlahnya cukup dan tersedia saat si anak memerlukannya.

Seperti telah diuraikan di depan, perkembangan kebahasaan di Indonesia sangat menguntungkan bagi usaha peningkatan pengajaran bahasa nasional. Yang perlu dilakukan lagi ialah meningkatkan faktor-faktor positif dan menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi faktor-faktor yang negatif. Di bawah ini akan dicoba menyimpulkan saran-saran untuk peningkatan pengajaran dan penyebaran bahasa Indonesia.

1. Masalah pengajaran bahasa Indonesia tidak dapat hanya ditinjau secara mikro, yaitu membatasi perhatian pada masalah belajar-mengajar di sekolah atau lebih sempit lagi dengan memperhatikan masalah kelas-kelas bahasa Indonesia saja. Penulis mengusulkan suatu *pendekatan makro*, yaitu memperbaiki dan meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia dalam konteks yang lebih luas, yaitu penyebaran dan pengembangan bahasa Indonesia dalam lingkungan sekolah (termasuk yang di luar jam pelajaran bahasa Indonesia), lingkungan keluarga, dan masyarakat. Bila dihubungkan dengan bagan perolehan bahasa di depan, yang harus dilakukan ialah memperluas lingkungan data bahasa dan lingkungan data nonbahasa yang alamiyah yang memungkinkan anak-anak mengembangkan bahasanya dengan strateginya sendiri dan pada "saat" mana saja dia ingin melakukannya. Pendekatan ini akan dapat menunjang kelas bahasa Indonesia yang pada umumnya bergantung pada "metode guru" dan "jam-jam pelajaran" yang sangat terbatas.
2. Lingkungan sekolah harus membantu pengajaran bahasa Indonesia dengan jalan menyadarkan setiap guru, bukan guru bahasa Indonesia saja, bahwa mereka sendiri akan ikut membantu atau menghambat perkembangan bahasa Indonesia murid-murid. Oleh sebab itu, *semua* guru harus berusaha untuk selalu memakai bahasa Indonesia yang patut dicontoh. Menjalin perolehan bahasa di semua kelas dengan usaha mengembangkan pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan sangat sesuai dengan strategi mempelajari bahasa pertama yang telah dibicarakan pada bagian dua kertas kerja ini. Tugas guru bahasa Indonesia ialah meningkatkan motivasi murid belajar bahasa Indonesia dan memakainya pada semua kesempatan yang patut,

melengkapi murid dengan pengetahuan kebahasaan secara sistematis agar dapat memperkuat pengetahuan tersirat (*tacit knowledge*) yang telah diperolehnya dari pengalaman, serta mempersiapkan situasi dan fasilitas latihan yang mendekati situasi nyata di luar kelas. Untuk bahasa lisan, misalnya, dapat diadakan diskusi yang sungguh-sungguh dengan topik yang hangat yang diminati oleh murid dan bermanfaat bagi hidupnya. Latihan surat-menyurat dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dengan jalan menulis surat untuk keluarga atau teman yang tinggal di kota lain, atau surat untuk ketua kelas mengenai kebersihan. Latihan mengarang juga dapat dilakukan dengan menggalakkan buletin dinding. Menulis peraturan untuk pemilihan ketua kelas, memperdebatkannya secara terbuka merumuskan prioritas pemakaian uang SPP, memperbincangkan kode etik siswa, dan banyak kegiatan lain akan sangat baik dipakai sebagai kasus atau topik pengajaran bahasa Indonesia. *Metode* pengajaran dengan *kasus* ini amat menguntungkan karena pelajaran bahasa terjalin padu dengan proses persepsi dan asosiasi secara alamiah dan dikaitkan secara langsung dengan pengembangan kognisi dan perasaan. Dari kasus-kasus inilah dikembangkan pengajaran tata bahasa, fonologi, pemilihan kosa kata yang tepat, perbedaan ragam resmi dengan ragam tak resmi, gaya bahasa, lagu bahasa, efektivitas dan efisiensi bahasa, manfaat bahasa baku, dan lain-lain. Konsekuensi dari ini ialah bahwa pengaturan waktu dalam silabi bahasa Indonesia dan pengaturan topik perlu dilakukan dengan baik dan kualifikasi guru bahasa juga harus baik.

3. Di depan telah dibicarakan bahwa pengalaman membaca dan menulis yang dilakukan dalam bahasa Indonesia sejak awal mempunyai pengaruh yang baik terhadap kebiasaan memakai hanya bahasa Indonesia dalam menulis. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia yang lebih awal di sekolah juga menguntungkan karena masih ada kesempatan bagi anak-anak untuk memperoleh bahasa nasional melalui pengalaman-pengalaman langsung. Karena kosa kata bahasa daerahnya masih terbatas, misalnya, mereka akan dapat memperoleh kesempatan mengenal banyak kata Indonesia tanpa kemungkinan asosiasi interferensi dengan kata-kata bahasa daerah. Atas dasar pertimbangan kebahasaan ini penulis menyokong pemikiran yang menganjurkan agar pemakaian bahasa Indonesia harus dimulai dari kelas satu sekolah dasar. Manfaatnya banyak karena akan lebih dekat dengan situasi alamiah perolehan bahasa ibu. Mereka akan "terpaksa" belajar bahasa itu seperti

halnya dia "terpaksa" belajar bahasa ibunya karena bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di sekolah. Hanya dengan bahasa Indonesia mereka dapat belajar berhitung, membaca, menulis, mengenal lingkungan melalui buku-buku, dan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bila usul ini disepakati, tentu diperlukan pendidikan atau penataran khusus bagi guru-guru sekolah dasar untuk menangani sistem pengajaran baru ini agar manfaat sebesar-besarnya dapat diambil dan kerugian yang mungkin dapat dihindari. Sebagai contoh dari kerugian yang dapat terjadi ialah kekecewaan murid bila guru menanggapi kesalahan berbahasa suatu tindak pidana seperti yang telah diuraikan di bagian depan. Jadi, guru dalam pendekatan ini harus bersikap seperti orang tua di rumah yang tekun memberikan data bahasa dan data nonbahasa, sabar, dan bijaksana memperbaiki kesalahan dengan masalah perolehan bahasa itu, guru harus tahu bahwa kesalahan muridnya adalah tanda dari suatu proses belajar yang belum selesai.

4. Yang baru diuraikan di atas belum mempertimbangkan faktor politik. Mungkin ada pihak di daerah merasakan usul ini akan mengancam pertumbuhan bahasa daerah. Penulis ingin meyakinkan mereka untuk tidak perlu khawatir. Kenyataan kebahasaan di mana saja membuktikan bahwa bahasa ibu yang didukung oleh penutur dan kebudayaan yang hidup tidak akan punah. Pada kelas-kelas atas di sekolah dasar bahasa daerah sudah mulai dapat diajarkan sebagai mata pelajaran agar pengetahuan tersirat si murid tentang bahasa daerahnya dapat diperkukuh. Juga perbandingan dengan struktur bahasa Indonesia sudah dapat diadakan. Yang diuraikan di sini baru garis garis besarnya saja. Dalam ruang lingkup kertas kerja semacam ini mungkin penulis dapat menjelaskan secara terperinci masalah teknis.
5. Di rumah tangga dan dalam masyarakat luas pengajaran bahasa Indonesia dapat dibantu dengan meningkatkan jumlah, jenis, dan frekuensi media komunikasi melalui bahasa Indonesia. Rencana Pemerintah untuk membe-rantas tiga buta, di mana termasuk buta bahasa Indonesia perlu disokong dan dilaksanakan dengan baik tetapi hati-hati. Bahasa Indonesia belum memasuki beberapa aspek kebudayaan yang masih menjadi monopoli bahasa daerah. Dalam rangka usaha memperluas ruang lingkup data bahasa dan nonbahasa untuk perkembangan bahasa Indonesia, penetrasi harus diusahakan ke dalam aspek itu. Dalam hal ini sangat menggembirakan usaha untuk

membina pementasan wayang dalam bahasa Indonesia seperti yang telah dicobakan lewat TVRI baru-baru ini. Wayang berbahasa Indonesia mempunyai keuntungan ganda. Di satu pihak unsur kebudayaan daerah ini dapat diangkat menjadi unsur kebudayaan nasional yang dipahami oleh semua orang Indonesia. Di lain pihak ruang lingkup pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Pengindonesiaan wayang pasti akan memperkaya bahasa Indonesia, sekurang-kurangnya dalam segi kosa kata. Usaha semacam ini harus terus ditingkatkan. Akan amat besar keuntungannya bila film-film seri di TVRI dilengkapi dengan teks bahasa Indonesia. Lebih baik lagi bila sebagiannya betul-betul diganti mediana dengan bahasa Indonesia. Usaha yang demikian juga mempunyai keuntungan ganda. Di satu pihak ruang lingkup pemakaian bahasa Indonesia akan menjadi lebih luas dan di pihak lain kita terpaksa mengembangkan kemampuan kosa kata dan struktur kalimat Indonesia untuk dapat mendukung tugas yang dibebankan oleh jsi teks atau suara asli. Keuntungan tambahan ialah ruang lingkup data bahasa dan data nonbahasa menjadi lebih bervariasi sehingga lebih memikat bagi lebih banyak orang.

Dalam mengakhiri kertas kerja ini dapatlah disimpulkan bahwa usaha peningkatan pengajaran di kelas bahasa Indonesia harus dijalin dengan usaha pengembangan bahasa nasional melalui kelas-kelas lain serta pengembangan dalam keluarga dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Chomsky, Noam. 1959. "Review of Verbal Behavior by B.F. Skinner". Dalam *Language*. 35.
- Dato, D.P. 1970 *American Children's Acquisition of Spanish Syntax in the Madrid Environment*. Washington, D.C.: US Office of Education.
- Isman, Jakob. 1973. *The Acquisition of English Syntax by Indonesia Children*. Unpublished ph. D. Dissertation, Indiana University.
- 1977. "The Role of the National Language in Fostering National Identities in Indonesia". A paper presented to the Third ASANAL Conference. Jakarta: Juga dalam *Forum Pendidikan IKIP Padang*. No. 1 Tahun III.
- 1976. "Beberapa Masalah Pengembangan Bahasa Indonesia di Sekolah," *Forum Pendidikan IKIP Padang* No. 1 Tahun III, 1976.
- *et. al.* 1977. *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Minangkabau di Sumatra Barat*. Padang : FKSS IKIP Padang.
- McNeill, David. 1966. "Developmental Psycholinguistics". Dalam Smith and Miller Editor. *The Genesis of Language*. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
- Rasyad, Halipami. 1966. *Fungsi Bahasa Indonesia dan Bahasa Minangkabau di 'Kalangan Atasan' di Kotamadya Padang*. FKSS IKIP Padang.
- Razak, Abdul. 1976. *Penggunaan Bahasa Indonesia di Daerah Sumatra Barat*. FKSS IKIP Padang.
- Shaffer, Laurance F. 1940. *Psychology*. New York: Harper.
- Skinner, B.F. 1957. *Verbal Behavior*. New York: Appleton Century Crofts.
- Tanner, Nancy. 1967. "Speech and Society among the Indonesian Elite: A Case Study of a Multilingual Community" *Anthropological Linguistics*. March, 1967.
- Woyowasito, S. 1975. "Fungsi dan Kebudayaan Bahasa Daerah". Dalam Amran Halim. Editor. *Politik Bahasa Nasional*.

PERKEMBANGAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA

Jazir Burhan

IKIP Bandung

Pendahuluan

Kalau kita coba membalik-balik *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan W.J.S. Purwadarminta untuk mengetahui arti kata *perkembangan*, kita akan kecewa. Kita tidak dapat menemukan kata itu. Yang kita temukan hanya kata *kembang*, *berkembang*, dan *mengembang*. Yang agak mendekati pengertian yang kita inginkan bagi judul uraian ini di antara kemungkinan arti kata *kembang* yang terdapat dalam kamus itu ialah 'menjadi bertambah-tambah sempurna'. Kalau dari arti ini kita turunkan kata *perkembangan*, maka "perkembangan" dalam judul uraian ini akan berarti 'hal-hal yang menjadi bertambah-tambah sempurna'. Dengan demikian, pengertian yang terkandung dalam judul uraian ini akan menjadi 'hal-hal yang menjadi bertambah-tambah sempurna dari pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam uraian ini yang kami maksud dengan "perkembangan" tidak sama dengan pengertian di atas. Dengan "perkembangan" kami maksudkan "perubahan-perubahan yang terjadi", arti yang tampak diberikan kepada kata ini dalam pemakaian bahasa Indonesia di masyarakat dewasa ini, seperti tampak dalam kalimat-kalimat *perkembangan situasi dewasa ini semakin baik*, *Perkembangan pasien itu semakin mengkhawatirkan*. Dengan demikian, yang akan menjadi pokok pembahasan dalam uraian ini ialah perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengajaran bahasa Indonesia dalam masa waktu tertentu.

Sebagai suatu komponen dalam sistem pendidikan nasional Indonesia pengajaran bahasa Indonesia baru mulai diberikan sejak permulaan zaman kemerdekaan bangsa. Pada masa sebelum kemerdekaan, dengan nama bahasa Melayu, bahasa Indonesia sudah mulai diajarkan pada beberapa jenis sekolah. Namun, kedudukannya dalam sistem pendidikan penjajahan pada waktu itu tidak sepenting kedudukan pengajaran bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional kita dewasa ini.

Pembicaraan tentang perkembangan pengajaran bahasa Indonesia dalam uraian ini akan terbatas pada pengajaran bahasa Indonesia sebagai suatu komponen dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dengan demikian, perubahan-perubahan yang akan dibicarakan di sini hanya perubahan yang terjadi pada pengajaran bahasa Indonesia sejak permulaan zaman kemerdekaan bangsa. Begitu pula, sesuai dengan pengarahannya yang diberikan oleh Panitia Kongres Bahasa Indonesia III bagi penulisan kertas kerja ini, perubahan-perubahan itu akan dilihat dari segi anak didik, sarana pengajaran, guru, kegiatan pengajaran, dan lulusan, di samping segi ragam dan mutunya.

Pengajaran Bahasa Indonesia dalam Sistem Pendidikan Nasional

Seperti telah disinggung di atas, pengajaran bahasa Indonesia sebagai suatu komponen dalam sistem pendidikan nasional Indonesia baru mulai diberikan sejak permulaan zaman kemerdekaan. Pada tahun-tahun permulaan kemerdekaan bahasa Indonesia baru diajarkan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kemudian di sekitar tahun 1960-an barulah perguruan tinggi menjadikannya sebagai salah satu mata kuliah dasar.

Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional kita dewasa ini sangat penting. Bahasa Indonesia, di samping bahasa pengantar, adalah mata pelajaran pokok untuk semua jenis dan tingkatan sekolah.

Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Suatu Sistem

Pengajaran bahasa Indonesia, sama halnya dengan pengajaran pada umumnya, merupakan suatu sistem dalam arti bahwa setiap unsur yang membentuknya mempunyai fungsi dan peranan masing-masing dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang telah digariskan. Unsur-unsur yang membentuk sistem itu adalah kurikulum, metode (buku teks), alat pelajaran, guru, pelaksanaan pengajaran (perbuatan mengajar-belajar), dan siswa.

Kurikulum merupakan gambaran dari proses pengajaran yang dimaksudkan. Dalam kurikulum paling kurang dikemukakan hal-hal sebagai berikut: (1) tujuan pengajaran yang harus dicapai selama masa pendidikan; (2) pokok-pokok bahan pelajaran yang harus diberikan; (3) buku teks murid yang dapat digunakan; (4) alat pelajaran yang mungkin dipakai; (5) buku-buku sumber dan buku pelengkap yang dapat digunakan; dan (6) prinsip-prinsip didaktis metodologis yang disarankan untuk digunakan.

Metode atau buku teks siswa adalah buku pegangan yang telah dibuat khusus bagi pelaksanaan pengajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku, yang di dalamnya disajikan bahan yang harus diberikan, tersusun dalam urutan tertentu, berdasarkan teknik penyajian tertentu pula, dan teknik pengulangan bahan untuk menumbuhkan berbagai keterampilan yang perlu dikuasai siswa sesuai dengan tujuan pelajaran dalam kurikulum, dan diikuti dengan evaluasi. Semuanya itu disusun berdasarkan prinsip-prinsip didaktis metodologis yang disarankan dalam kurikulum itu.

Alat pelajaran adalah berbagai benda atau tiruan benda yang diperlukan guru sebagai alat bantu dalam mempercepat dan mempertinggi mutu proses belajar yang dilakukan siswa.

Guru, sesuai dengan sistem pendidikan kita dewasa ini, merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan pengajaran. Pada akhirnya gurulah yang akan merupakan kunci bagi berhasil atau gagalnya suatu pelaksanaan pengajaran mencapai tujuan sebagaimana yang telah digariskan dalam kurikulum.

Siswa adalah unsur yang menerima proses mengajar-belajar untuk dibawa ke arah tujuan pengajaran yang telah digariskan.

Dalam membicarakan pengajaran bahasa dan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Teori yang dianut orang tentang apa sesungguhnya bahasa dan bagaimana berlangsungnya proses belajar bahasa pada manusia sangat berpengaruh kepada pengajaran bahasa. Perbedaan teori bahasa yang dijadikan landasan pengajaran bahasa mempengaruhi pengajaran bahasa dalam analisis bahasa yang dijadikan landasan dalam pemilihan bahan, pemilihan teknik penyajian. Perbedaan dalam teori bahasa melahirkan perbedaan deskripsi bahasa. Ini akan berpengaruh kepada luas atau sempitnya bahan yang diajarkan dalam pengajaran bahasa. Perbedaan teori tentang proses belajar

bahasa pada manusia berpengaruh atas metode dan teknik penyajian. Suatu metode atau teknik mengajar yang didasarkan pada teori bahwa proses belajar-mengajar yang didasarkan pada teori bahwa proses belajar bahasa kedua sama dengan proses belajar bahasa ibu akan sangat berbeda dengan metode atau teknik mengajar yang didasarkan pada teori bahwa proses belajar bahasa kedua tidak sama dengan proses belajar bahasa ibu.

2. Metode (dalam pengertian buku teks siswa) mempunyai unsur pemilihan bahan (seleksi), penentuan urutan pemberian bahan (gradasi), penentuan teknik penyajian (presentasi), dan teknik penumbuhan keterampilan (repetisi). Oleh karena dua di antaranya melibatkan guru, yaitu "presentasi" dan "repetisi", maka dalam suatu metode perlu diperhitungkan berapa banyak bagian-bagian bahan yang diberikan dalam metode itu yang betul-betul dapat tersajikan oleh metode itu sendiri tanpa guru dan berapa banyak yang hanya dapat disajikan melalui guru.
3. "Mengajar" dan "belajar" adalah dua hal yang berbeda. Perbuatan mengajar yang baik belum akan merupakan jaminan bagi terjadinya perbuatan belajar yang baik karena perbuatan mengajar dilakukan oleh guru dan perbuatan belajar dilakukan oleh murid. Perbuatan belajar yang jelek mempengaruhi kebaikan perbuatan mengajar yang baik, seperti halnya perbuatan mengajar yang jelek dapat mengurangi kebaikan suatu metode. Perbuatan mengajar yang baik karenanya harus memperhitungkan perbuatan belajar yang dilakukan siswa karena pada hakikatnya tujuan perbuatan mengajar yang baik adalah mempertinggi mutu perbuatan belajar yang dilakukan siswa ke arah perbuatan belajar yang baik. Harus diingat bahwa perbuatan mengajar yang baik dan perbuatan belajar yang baik dapat terjadi sendiri-sendiri tanpa ada hubungan satu dengan yang lain.

Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pembicaraan dalam uraian ini diarahkan kepada perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengajaran bahasa Indonesia sejak permulaan zaman kemerdekaan sampai sekarang. Perubahan-perubahan yang terjadi itu akan ditinjau dari segi anak didik, sarana pengajaran, guru, kegiatan pengajaran, lulusan, serta ragam dan mutunya.

1. Perubahan-perubahan Kurikulum

Sejak zaman permulaan kemerdekaan sampai dewasa ini, dunia pendidikan kita telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum

pertama yang digunakan terkenal dengan nama Kurikulum Tahun 1950. Kemudian terjadi perubahan pada tahun 1958, 1964, 1968, dan terakhir pada tahun 1975/1976. Sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional ini, kurikulum pengajaran bahasa Indonesia pun mengalami perubahan. Pada dasarnya perubahan-perubahan itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan mutu dan menyesuaikan tujuan pendidikan dengan keperluan masyarakat yang sedang berkembang dengan cepatnya. Dalam hal pengajaran bahasa Indonesia terlihat bahwa perubahan-perubahan itu diarahkan untuk lebih menyesuaikan program pengajaran bahasa Indonesia dengan pentingnya fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengajaran bahasa Indonesia pada tahun 1958, 1964, dan 1968 boleh dikatakan tidak banyak. Pendekatan yang dijadikan landasan bagi perubahan-perubahan ini masih diwarnai oleh pandangan linguistik tradisional. Dari pokok bahan yang dikemukakan dalam kurikulum terlihat aspek bahasa tertulis mendapat tempat lebih banyak. Pelajaran tata bahasa mewarnai hampir seluruh kegiatan. Teori belajar kognitif merupakan landasan didaktis metodologis untuk penyusunan kegiatan mengajar-belajar. Kemampuan berbahasa dalam arti kemampuan menggunakan bahasa dalam berpikir menjadi pegangan utama dalam setiap kegiatan latihan berbahasa yang diberikan.

Pada perubahan yang terjadi dalam Kurikulum 1975/1976 terlihat pandangan linguistik struktural mulai memasuki arena pengajaran bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa lisan mulai mendapat perhatian yang lebih banyak. Pokok-pokok bahan yang diberikan yang diambil dari deskripsi bahasa menurut pandangan linguistik struktural mulai terlihat. Namun, pokok-pokok bahan yang bersumber pada deskripsi bahasa menurut pandangan linguistik tradisional masih digunakan. Dengan demikian, terlihat bahwa pandangan linguistik tradisional dan pandangan linguistik struktural sama-sama dijadikan landasan dalam penyusunan bahan yang dimasukkan ke dalam Kurikulum 1975/1976 ini, baik mengenai aspek bahasanya maupun aspek perbuatannya.

Kesukaran utama yang dihadapi para penyusun Kurikulum 1975/1976 dalam memilih bahan yang dimasukkan di dalam kurikulum ini tampaknya terletak pada buku-buku deskripsi tentang bahasa dan pembuatan berbahasa yang disusun berdasarkan pandangan linguistik struktural. Buku-buku seperti

itu yang dapat dijadikan sumber oleh para penyusun kurikulum ini belum tersedia sebagaimana mestinya, walaupun pandangan linguistik struktural itu sendiri sudah banyak mempengaruhi ahli-ahli bahasa kita. Itulah yang agaknya menjadi sebab mengapa banyak istilah yang digunakan dalam Kurikulum Pengajaran Bahasa Tahun 1975/1976 ini yang dapat dikatakan belum seragam penggunaannya.

Dalam hal jatah waktu, terlihat ada perubahan jumlah yang disediakan antara kurikulum sebelum Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1975 SD. Pada kurikulum sebelum Kurikulum 1975 pelajaran bahasa Indonesia baru mulai di kelas III pada daerah-daerah tertentu (Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain) yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dikelas I sampai dengan kelas III. Pada daerah-daerah yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar bahasa Indonesia diajarkan sejak kelas I.

2. Perubahan-perubahan Metode (Buku Teks Siswa)

Metode (buku teks) yang digunakan bagi pelaksanaan kurikulum-kurikulum sebelum Kurikulum 1975/1976 adalah sebagai berikut. (1) Untuk SD kita jumpai metode-metode seperti *Pelajaran Bahasa Indonesia* susunan Oesman dan Yspeert, *Bahasaku* susunan BM Nur dan kawan-kawan, *Bahasa Kita* susunan Baidilah Halian dan kawan-kawan, dan *Mahir Berbahasa Nasional* susunan Muh. Kasim dan kawan-kawan. (2) Untuk SLP kita jumpai metode sebagai berikut. *Bahasa Indonesia untuk SMP* susunan Zainuddin H. Idris dan kawan-kawan, *Bahasa Indonesia* susunan R. Usman, dan *Bahasa Indonesia I* susunan Sutarja. (3) Untuk SLTA *Lagak Ragam Bahasa Indonesia* susunan Hoetaoeroek dan kawan-kawan. Selain itu, kita jumpai berbagai buku tata bahasa dan buku latihan bahasa, yang walaupun terpakai sebagai buku pegangan siswa, namun tidak kami golongan ke dalam metode.

Pada umumnya metode-metode itu disusun berdasarkan pandangan linguistik tradisional walaupun ada di antara penyusunannya yang mengatakan bahwa metode mereka disusun berdasarkan pandangan linguistik struktural, misalnya, *Bahasa kita* dan *Mahir Berbahasa Nasional*. Pada *Metode Mahir Berbahasa Nasional* terlihat adanya unsur-unsur perbandingan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang dijadikan latihan. Namun, menurut pendapat kami bukan teori kontrasan yang digunakan sebagai landasan. Walaupun penyusunannya mengemukakan bahwa metode mereka didasarkan atas pandangan linguistik struktural, pola latihan yang digunakan lebih banyak di-

pengaruhi oleh latihan-latihan yang bersumber pada linguistik tradisional.

Sejalan dengan berlakunya Kurikulum 1975/1976, Pemerintah melalui proyek paket bukunya menyusun metode baru untuk SD, SLP, dan SLA, yaitu *Bahasa Indonesia untuk SD*, *Bahasa Indonesia untuk SMP*, dan *Bahasa Indonesia untuk SMA*. Untuk sekolah guru telah tersedia, yaitu *Metode Bahasa Indonesia untuk SPG*. Pada *Metode Bahasa Indonesia* untuk SD, SMP, dan SMA pendekatan yang digunakan terlihat lebih menonjol pengaruh pandangan linguistik tradisional dan linguistik struktural, sedangkan untuk *Metode Bahasa Indonesia SPG* pengaruh yang lebih menonjol adalah pandangan linguistik tradisional dan generatif transformasi walaupun sebagai bahan banyak diambil dari deskripsi bahasa menurut pandangan linguistik tradisional. Teknik penyajian bahan yang digunakan pada umumnya lahir dari pandangan linguistik tradisional pula.

Sekedar melihat beberapa contoh perubahan yang terjadi dalam metode, di bawah ini kami turunkan beberapa contoh yang dapat terlihat dalam tiga metode yang banyak dipakai dalam melaksanakan Kurikulum 1968 dan metode yang dipakai dalam pelaksanaan Kurikulum 1975 SD. Metode-metode yang dipakai dalam pelaksanaan Kurikulum 1968 itu adalah *Bahasaku*, *Bahasa Kita*, *Mahir Berbahasa Nasional*, dan *Metode Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) untuk pelaksanaan Kurikulum 1975.

Metode Bahasaku

Landasan metode yang digunakan adalah metode eklektik, yaitu campuran antara metode langsung dan metode baru. Bahan yang disajikan, yaitu kata-kata, ungkapan, dan kalimat-kalimat, adalah yang umum terpakai dalam masyarakat. Pelajaran dimulai dengan teks bacaan dan dilanjutkan dengan berbagai latihan kemampuan berbahasa. Urutan kegiatan disusun sebagai berikut :

1. Membaca dan menjawab pertanyaan sehubungan dengan bacaan itu;
2. memperhatikan bentuk kata, latihan ucapan, dan latihan menuliskan kata itu dengan tepat;
3. menilai ketepatan suatu pernyataan sehubungan dengan bacaan;
4. menilai isi dan judul suatu bacaan;
5. mempecahkan sesuatu yang dilihat;
6. mempercakapkan pengalaman;

7. mengingat dan menceritakan kembali;
8. membacakan (membaca bersuara);
9. latihan pemakaian ejaan;
10. mengenal kata dan suku kata;
11. menyusun kalimat dari kata yang tersedia;
12. memakai kata dalam kalimat dengan tepat;
13. bercakap-cakap;
14. menyalin (khusus untuk kelas-kelas rendah);
15. mengisi;
16. latihan ucapan dan lagu kalimat;
17. bercerita;
18. mengarang;
19. memakai lawan kata atau kata yang bersamaan arti;
20. mendengar dan melakukan perbuatan; serta
21. membaca indah.

Bahasa Kita

Sesuai dengan apa yang dikemukakan penyusun dalam kata pendahuluan buku ini, metode ini disusun berdasarkan pandangan linguistik struktural. Yang disajikan dalam metode ini bukan kata-kata, tetapi pola kalimat dan ungkapan-ungkapan yang hidup. Pelajaran disajikan secara langsung. Pelajaran disusun berdasarkan anggapan bahwa bahasa Indonesia adalah bukan bahasa ibu murid. Penyusun juga memberitahukan bahwa metode ini dapat dipakai di seluruh Indonesia. Garis besar urutan pelajaran adalah sebagai berikut :

1. membaca dan menjawab pertanyaan yang bertalian dengan bahan bacaan;
2. menentukan pendapat tentang salah atau benarnya suatu pernyataan;
3. menyelesaikan kalimat dengan kata-kata yang tersedia;
4. membaca dan menghafalkan sejak;
5. bercerita;
6. latihan ucapan;
7. membuat kalimat;
8. bercakap-cakap; dan
9. menyalin.

Dari latihan-latihan yang disajikan terlihat bahwa yang ditonjolkan adalah latihan pola-pola bahasa dalam rangka menghafal pola-pola itu, bukan latihan penggunaan bahasa.

Metode Mahir Berbahasa Nasional

Metode ini menurut penjelasan penyusunannya dalam kata pendahuluan buku itu disusun berdasarkan metode terbaru (linguistik struktural), memperhatikan kesukaran siswa disebabkan pengaruh bahasa ibu. Urutan pelajaran terlihat sebagai berikut:

1. membaca teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bahan bacaan itu;
2. menyelesaikan kalimat;
3. mengisi (menyelesaikan kalimat) dengan kata yang tepat;
4. tata bahasa;
5. ejaan;
6. membandingkan kalimat bahasa Indonesia dengan kalimat bahasa daerah; dan
7. mengarang.

Dari ketiga metode itu terlihat bahwa walaupun ada pernyataan dari penyusun metode *Mahir Berbahasa Nasional* dan *Metode Bahasa Kita* tentang pandangan bahasa yang dijadikannya landasan penyusunan metodenya, tetapi dari pilihan bahan dan teknik penyajiannya tampak bahwa pandangan linguistik tradisional dan psikologi kognitif lebih berpengaruh. Istilah-istilah ketatabahasaan dan deskripsi bahasa yang digunakan pada umumnya bersumber pada pandangan linguistik tradisional itu.

Metode Bahasa Indonesia

Jika *Metode Bahasa Indonesia* (SD, SMP, dan SMA) susunan Tim Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan sebagai buku teks utama bagi pelaksanaan kurikulum 1975 dibandingkan dengan metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum sebelum Kurikulum 1975 memperlihatkan ciri yang khas. Kalau dalam metode-metode terdahulu itu pendekatan linguistik (linguistik tradisional dan linguistik struktural) dan pandangan ilmu jiwa kognitif yang dijadikan landasan penyusunan, maka dalam penyusunan *Metode Bahasa Indonesia* yang merupakan buku teks utama bagi pelaksanaan Kurikulum 1975 ini hanya pandangan ilmu jiwa Gestalt yang digunakan sebagai landasan. Walaupun metode ini terkenal dengan nama "Struktural Analitik Sintetik", tetapi kata *struktural* di sini tidak ada hubungannya dengan aliran linguistik struktural. "Struktural"

di sini berasal dari "struktur totalitas". Jadi, teori linguistik dalam penyusunan metode ini tidak digunakan. Bahasa didekati bukan berdasarkan hakikatnya, tetapi berdasarkan fungsinya pada manusia.

Sesuai dengan landasan yang digunakan dalam penyusunan metode ini, aspek pengajaran bahasa yang diberikan mencakup :

- a. cakapan dan wicara,
- b. membaca/membacakan,
- c. mengarang/menulis,
- d. pengetahuan bahasa, dan
- e. apresiasi sastra.

Dari urutan pelajaran yang diberikan dalam metode terlihat bahwa sesungguhnya pandangan linguistik struktural sangat berpengaruh. Pelajaran dimulai dengan bahasa lisan baru sesudah itu diberikan kegiatan latihan untuk bahasa tertulis. Urutan bahan untuk *Metode Bahasa Indonesia SD*, misalnya, adalah sebagai berikut :

1. menceritakan sesuatu;
2. latihan ucapan;
3. latihan membaca dan pertanyaan bacaan;
4. latihan pemakaian kalimat;
5. membaca sajak (apresiasi sastra);
6. mengarang; dan
7. menyalin.

Urutan pelajaran dalam *Metode Bahasa Indonesia SMP* terlihat sebagai berikut :

1. percakapan;
2. lagu kalimat dan ucapan yang tepat;
3. latihan kalimat;
4. membaca dan mengarang; dan
5. latihan pemakaian kata dalam kalimat.

Urutan pelajaran dalam *Metode Bahasa Indonesia SMA* terlihat sebagai berikut :

1. cakapan dan wicara;
2. membaca dan pertanyaan bacaan;

3. kesusastraan;
4. mengarang; dan
5. tata bahasa.

Bila dalam urutan bahan terlihat pengaruh pandangan linguistik struktural, begitu pula dalam pola latihannya, maka dalam pemilihan bahan yang diisikan untuk latihan pemakaian kalimat (SD), latihan kalimat (SMP), dan tata bahasa (SMA), pengaruh pandangan linguistik tradisional terasa masih kuat. Istilah-istilah ketatabahasaan dan aspek-aspek tata bahasa yang diajarkan banyak menggunakan istilah-istilah dan aspek-aspek tata bahasa menurut kaum linguistik tradisional itu. Jadi, terlihat bahwa landasan penyusunan *Metode Bahasa Indonesia* untuk SD, SMP, dan SMA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini sama sekali tidak terlepas dari pendekatan linguistik. Hanya, bila pada metode-metode yang terdahulu tekanan terhadap pengetahuan bahasa lebih terasa, maka pada metode-metode yang terakhir ini tekanannya lebih banyak diberikan pada perbuatan berbahasa. Sebagai akibat dari pendekatan itu, pemberian materi bahasa kurang terarah jika dibandingkan dengan apa yang diberikan pada metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum sebelum Kurikulum 1975. Agaknya, hal ini disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa buku tata bahasa yang disusun berdasarkan pandangan linguistik tradisional telah tersedia dalam keputusan bahasa Indonesia, seperti *Tata-bahasa Baru Bahasa Indonesia* susunan Takdir Alisjahbana dan *Djalan Bahasa Indonesia* susunan Sutan Muhamad Zain, sedangkan buku tata bahasa yang disusun baik berdasarkan pandangan linguistik struktural atau linguistik generatif transformasi belum tersedia dalam kepustakaan bahasa Indonesia.

Sesungguhnya untuk keperluan pengajaran bahasa perlu disusun suatu buku tata bahasa pedagogis agar para penulis buku teks (metode) dapat terbantu. Namun, sampai sekarang buku seperti itu belum lagi tersedia. Untuk mengisi kekosongan itu agaknya buku tata bahasa Takdir Alisjahbana-lah yang banyak digunakan sebagai sumber.

3. *Perubahan-perubahan pada Alat Pelajaran*

Alat pelajaran utama dalam pengajaran bahasa adalah metode (buku teks siswa) dan buku pegangan guru. Seperti telah disinggung di atas, dalam hal buku teks ini telah terjadi perubahan-perubahan. Namun, dalam hal alat bantuan berupa berbagai buku dan kamus, buku bacaan pelengkap, dan buku-

buku perpustakaan, baik buku-buku fiksi maupun nonfiksi belum banyak perubahan. Walaupun sudah ada buku-buku perpustakaan di sekolah-sekolah kita, tetapi jumlah dan jenisnya masih terbatas.

Alat-alat pelajaran berupa benda-benda, tiruan benda, dan alat-alat mekanis, seperti *tape recorder*, *film strip*, *slide projector*, berbagai rekaman dan *slide*, dan lain-lain masih belum tersedia. Kalaupun ada beberapa sekolah yang mempunyai alat-alat seperti itu, tetapi jarang yang digunakan untuk keperluan pelajaran bahasa Indonesia.

4. *Perubahan-perubahan di Bidang Guru*

Guru SD sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berlaku sekarang adalah guru kelas, bukan guru bidang studi. Sehubungan dengan itu, mereka tidak disiapkan secara khusus sebagai guru (SPG). Namun, selama belajar di Lembaga Pendidikan Guru (SPG), mereka telah diberi dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai guru bahasa Indonesia. Dalam kurikulum SPG sebelum Kurikulum 1976, kepada siswa SPG tidak diberikan metodologi pengajaran bahasa secara khusus. Mereka hanya menerima metodologi umum. Akan tetapi, dalam Kurikulum SPG 1976, di samping metode umum, mereka juga diberi metode khusus untuk pengajaran bahasa.

Guru bahasa Indonesia SMP dan SMA pada umumnya sudah disiapkan sebagai guru bahasa Indonesia. Pada umumnya dewasa ini guru bahasa Indonesia SMP dan SMA adalah pemegang ijazah PGSLP, BI, atau Sarjana Muda IKIP (untuk SMP), dan Sarjana Muda IKIP, BI, BII, jurusan bahasa Indonesia (untuk SMA atau SLA).

Dilihat dari segi itu, secara teoritis dapat kita katakan bahwa pada umumnya guru bahasa Indonesia yang diberi tugas dewasa ini mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah kita telah dipersiapkan melalui lembaga pendidikan guru yang diberi wewenang untuk itu. Namun, masih merupakan hal yang perlu mendapat perhatian apakah persiapan yang diberikan kepada guru bahasa Indonesia melalui lembaga pendidikan guru yang dilaluinya itu betul-betul sudah sesuai dengan apa yang sesungguhnya diperlukan oleh seorang guru bahasa Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di sekolah.

5. *Perubahan-perubahan pada Kegiatan Pengajaran*

Keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia, sebagaimana halnya dengan pengajaran pada umumnya, akan sangat ditentukan oleh kegiatan pengajar-

an yang sungguh-sungguh terjadi. Sudah disadari bahwa antara metode dan kegiatan pengajaran tidak ada hubungan sebelum metode itu betul-betul digunakan dalam kegiatan pengajaran. Begitu pula halnya antara kurikulum dan kegiatan pengajaran.

Bila guru melaksanakan pengajaran sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam kurikulum dengan menggunakan buku teks yang telah ditentukan dan alat pelajaran yang disediakan berdasarkan prinsip-prinsip didaktis metodologis yang disarankan, maka buku teks dapat dipandang sebagai gambaran dari kegiatan mengajar yang dilakukan guru di kelas. Namun, untuk mengetahui kegiatan apa sesungguhnya yang berlangsung di kelas, analisis melalui buku teks saja tidaklah memadai karena guru biasanya akan menyesuaikan kegiatannya dengan situasi sesungguhnya yang dihadapinya di kelas. Seperti telah disinggung di atas, aspek presentasi dan repetisi dalam metode bertalian erat dengan guru. Oleh karena itu, sangat terbuka kemungkinan guru mengadakan penyesuaian-penyesuaian seperlunya dalam memenuhi kebutuhan yang nyata di kelas yang dihadapinya. Oleh karena itu, untuk mengetahui kegiatan yang sesungguhnya terjadi dalam pengajaran diperlukan observasi yang teliti terhadap situasi belajar-mengajar yang terjadi dalam kelas itu. Seperti telah pula kita singgung di atas, antara mengajar dan belajar tidak selamanya terhadap hubungan yang erat. Proses belajar yang baik dapat saja terjadi tanpa pengajaran yang baik, dan sebaliknya, walaupun tujuan mengajar yang baik adalah mendorong siswa melakukan proses belajar yang baik.

Hasil penelitian BP3K, sebagaimana yang diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini memperlihatkan daya serap pelajaran yang dipunyai siswa sangat rendah. Ini dapat kita gunakan sebagai bukti bahwa sesungguhnya kegiatan belajar di sekolah-sekolah kita dewasa ini tidak berlangsung dengan baik. Agaknya, dalam hubungan kegiatan pengajaran bahasa demikian pula halnya.

Pada waktu sebelum Kurikulum 1975 dinyatakan berlaku buku teks pada garis besarnya dapat dipandang sebagai gambaran kegiatan mengajar belajar yang terjadi di kelas, paling kurang untuk pengajaran bahasa. Namun, gambaran seperti itu tidak dapat kita peroleh setelah Kurikulum 1975 berlaku karena proses mengajar-belajar di kelas dianjurkan mengikuti satuan pelajaran yang dibuat tersendiri oleh guru di samping buku teks. Di tambah lagi dengan kenyataan bahwa masih banyak sekolah yang belum menerima buku

teks yang disiapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu. Dalam hal seperti ini guru mencari jalan sendiri dengan menggunakan buku-buku yang dapat digunakannya atau menyiapkan sendiri bahan yang harus diajarkannya itu berdasarkan sumber-sumber yang dapat diperolehnya.

6. *Lulusan*

Sampai beberapa jauh perubahan-perubahan yang terjadi pada berbagai unsur pengajaran bahasa ini terlihat pada lulusannya? Bila diukur dengan tujuan pelajaran sebagaimana yang tercantum dalam masing-masing kurikulum itu, seharusnya, bila pelaksanaan pengajaran berlangsung sebagaimana yang diharapkan, pada lulusan itu akan terlihat kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk setiap jenis dan ragam perbuatan berbahasa. Gambaran yang tepat tentang hal ini tentulah hanya dapat kita peroleh melalui suatu penelitian yang cermat.

Suara-suara yang terdengar dalam masyarakat, terutama melalui media massa, menunjukkan perasaan kurang puas terhadap hasil pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Pada umumnya suara-suara dalam masyarakat menilai mutu penguasaan bahasa lulusan sekolah-sekolah seperti terlihat dalam pemakaian ejaan dan tanda-tanda baca, pemakaian dan pemilihan kata, dan pemakaian kalimat.

Hasil penelitian yang kami lakukan terhadap kemampuan berbahasa murid SD kelas VI DKI Jaya pada bulan September 1976 s.d. Februari 1977 yang lalu, khusus mengenai kemampuan membaca dan menulis, mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

Kemampuan Membaca

Dari 1.179 orang siswa yang dijadikan sampel dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

Siswa yang mendapat nilai sangat memuaskan adalah 0% (nilai 90 – 100).

Siswa yang mendapat nilai memuaskan adalah 124 orang atau 10,51% (nilai 70 – 89).

Siswa yang mendapat nilai cukup (nilai 55 – 69) sebanyak 529 orang, atau 50,21%.

Siswa yang mendapat nilai kurang memuaskan (nilai 40 – 54) sebanyak 307 orang atau 26,04%.

Siswa yang mendapat nilai tidak memuaskan (10 – 39) sebanyak 191 orang atau 12,8%.

Siswa yang mendapat nilai sangat tidak memuaskan (0 – 9) sebanyak 5 orang atau 0,4%.

Kemampuan Menulis (Mengarang)

Dari 1.179 siswa yang dijadikan sampel dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

Siswa yang mendapat nilai sangat baik (90 – 100) tidak ada (0%).

Siswa yang mendapat nilai memuaskan (70 – 89) ada 110 orang (9,33%).

Siswa yang mendapat nilai cukup (55 – 69) ada 560 orang (47,49%).

Siswa yang memperoleh nilai kurang memuaskan (40 – 54) ada 441 orang (37,4%).

Siswa yang memperoleh nilai tidak memuaskan (10 – 39) ada 62 orang (5,25%).

Siswa yang memperoleh nilai sangat tidak memuaskan (0 – 9) ada 6 orang (0,51%).

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa dalam kemampuan membaca (pemahaman bacaan) lebih dari 50% siswa memperoleh nilai baik; begitu pula halnya dalam hal kemampuan menulis.

Data di atas menunjukkan hasil pengajaran bahasa berdasarkan Kurikulum 1968. Sampai berapa jauh hasil pengajaran yang diperoleh siswa berdasarkan Kurikulum 1975 belum dapat diketahui karena kurikulum ini baru mulai dilaksanakan.

Hasil untuk SD baru dapat diketahui mulai tahun 1982, untuk SMP tahun 1979, dan SMA 1979.

7. Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia dilihat dari Segi Ragam dan Mutu.

Berdasarkan kurikulum-kurikulum sebelum Kurikulum 1975, di SD terdapat dua jenis pengajaran bahasa Indonesia. Pertama, pengajaran bahasa Indonesia untuk SD yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak kelas I dan kedua pengajaran bahasa Indonesia untuk SD yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar sejak kelas I sampai dengan kelas II. Pengajaran bahasa Indonesia untuk jenis sekolah yang pertama diberikan kelas I sampai dengan kelas VI dan untuk jenis sekolah kedua diberikan di kelas III sampai dengan kelas VI. Dengan demikian, pada kedua jenis sekolah itu terdapat perbedaan dalam jumlah waktu belajar.

Berdasarkan Kurikulum SD 1975, bahasa Indonesia untuk semua daerah di Indonesia diajarkan sejak kelas I sampai dengan kelas VI. Sehubungan dengan itu, metode yang digunakan terdiri dari dua jenis. Yang pertama yang dirancang untuk pengajaran bahasa Indonesia pada SD yang mengajarkan bahasa Indonesia di kelas I sampai dengan kelas VI (*Bahasaku*), dan kedua metode yang dirancang untuk pengajaran bahasa Indonesia pada SD yang mengajarkan bahasa Indonesia di kelas III sampai dengan kelas VI (*Bahasa Kita* dan *Mahir Berbahasa Nasional*; *Metode Mahir Berbahasa Nasional* terbitan terakhir namanya berubah menjadi *Metode Mahir Berbahasa Indonesia*).

Bagi pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia menurut Kurikulum 1975 baru satu metode yang digunakan sebagai metode utama, yaitu *Metode Bahasa Indonesia* susunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami belum berani mengumumkan penilaian kami, apakah perubahan-perubahan yang terjadi pada pengajaran bahasa Indonesia ini sekaligus berarti peningkatan mutu. Untuk ini, diperlukan suatu penganalisisan yang teliti. Dari segi kuantitas perubahan-perubahan di bidang sarana dapat dipandang menuju ke arah yang lebih baik. Namun, dalam hal kualitas masih perlu dicarikan jawabannya melalui penelitian. Kami cenderung berasumsi bahwa dari segi kualitas, walaupun ada, perubahan itu belum banyak bedanya dari yang sebelumnya.

Beberapa Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan sehubungan dengan perkembangan pengajaran bahasa Indonesia seperti yang tampak dewasa ini.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada pengajaran bahasa Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi keperluan anak didik dalam menghadapi masa depannya, baik untuk keperluan melanjutkan studi maupun bagi kehidupan dalam masyarakat, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Perbaikan kurikulum adalah *satu hal* dan hasil pengajaran adalah *hal yang lain*. Hasil pengajaran seperti yang diharapkan dalam kurikulum akan sangat bergantung kepada kualitas pelaksanaan pengajaran itu di kelas. Dalam hal hasil pengajaran bahasa Indonesia yang dicapai siswa dewasa ini belum dapat dikatakan memuaskan dan juga tidak terlalu jelek. Bagi keperluan memuaskan dan juga tidak terlalu jelek. Bagi keperluan pemakaian bahasa dalam masyarakat hasil pengajaran rendah karena banyak

lulusan sekolah-sekolah kita yang tampak belum mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Suatu penelitian ilmiah untuk masalah ini perlu dilaksanakan agar dapat mengetahui dengan tepat taraf keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan pengajaran itu serta faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

Sarana pengajaran bahasa dapat kita katakan belum tersedia sebagaimana seharusnya. Buku-buku teks belum merata penyebarannya dan buku-buku pelengkap belum tersedia secukupnya. Begitu pula halnya dengan alat-alat bantu yang lain. Masih perlu dibuktikan dengan penelitian ilmiah kebaikan buku-buku teks yang baru itu dibandingkan dengan buku-buku lama.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada buku-buku teks menunjukkan bahwa pendekatan psikologis didaktis lebih diberi tekanan daripada pendekatan linguistik. Oleh karena itu, metode kegiatan berbahasa lebih mendapat tempat daripada pengetahuan bahasa. Untuk mengetahui apakah metode-metode yang baru ini lebih baik dari metode-metode lama diperlukan penelitian yang cermat.

Dalam masyarakat banyak terdengar keluhan mengenai kelemahan guru bahasa Indonesia. Pendapat itu umumnya bersifat subjektif. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian apakah kelemahan ini terletak pada kualitas guru atau pada "kesempatan mengajar" yang terbatas, yang disebabkan berbagai alasan atau karena faktor lain.

Hasil penelitian BP3K membuktikan bahwa daya serap pelajaran murid sangat rendah termasuk pula daya serap dalam bidang pengajaran bahasa Indonesia. Sehubungan dengan situasi dan kondisi sekolah-sekolah kita dewasa ini, yang pada umumnya serba kekurangan, kami cenderung pada pendapat bahwa proses belajar-mengajar pada pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah kita perlu ditingkatkan. Untuk ini, di samping penelitian terhadap metode, perlu diadakan suatu penelitian ilmiah terhadap proses belajar mengajar di kelas agar dapat diketahui berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Edward. M. 1971. "A Traditional Linguistic Basic for Language Teaching". *English Teaching Forum* IX: 4 July – August 1971. Washington, D.C.: Information Center Service of the United States Information Agency.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1957. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Djakarta: PT Putaka Rakyat.
- Burhan, Jazir. 1971. *Problema Bahasa dan Pengajaran Bahasa*. Bandung: Ganaco, N.V.
- 1975. "Arah Metodologi Pengajaran Bahasa Indonesia". *Buletin Pendidikan Guru*, tahun II, No. 1, April 1975. Jakarta: Direktorat Pendidikan Guru.
- *et. al.* 1977. "Kemampuan Berbahasa Murid SD kelas VI DKI Jaya". Jakarta : Laporan penelitian. (Stensilan).
- Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. 1964. *Rencana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1968. *Kurikulum Sekolah Dasar*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1972. *Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas I*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1973. *Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas II*. Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1973. *Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas III*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1973. *Buku Petunjuk Guru Bahasa Indonesia untuk SMP*. Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1974. *Bahasa Indonesia: Pedoman Guru membaca dan menulis Permulaan*. Jakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1975. *Kurikulum Sekolah Dasar. Garis-garis Besar Program Pengajaran Buku II D. Bidang Studi Bahasa Indonesia*. Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1975. *Buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA kelas I*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1975. *Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1975. Garis-Garis Besar Program Pengajaran. Buku II D.I. Bidang Studi Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1976. *Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) 1975 Pedoman Pelaksanaan Kurikulum. Buku IIIA.1. Pedoman Khusus*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1976. *Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) 1975 Pedoman Pelaksanaan Kurikulum. Buku IIIA.2 Model Satuan Pelajaran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Finacciaro, Mary. 1969. *Teaching English as a Second Language*, New York: Harper & Row Publishers.
- Forum Staf Article. 1974. "Current Trends in Language Teaching". *English Teaching Forum, III:1*, Washington, D.C. : Information Center Service of the United States Information Agency.
- Hwang, Juck Ryoom. 1970. "Current Theories of Language Learning and Teaching". *English Teaching Forum*. No. VIII:2. March-April, 1970. Washington, D.C.: Information Center Service of the United States Information Agency.
- Mackey, William Francis. 1966. *Language Teaching Amalysis*. London: Longmans, Green & Co Ltd. (terbitan pertama 1965).
- Pei, Mario. 1973. *How to Learn Language and What Languages to Learn*. New York: Harper & Row Publishers.
- Poerwadarminta W.J.S. Editor. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ramos, Maximo. *et al.* 1967. *The Determination and Implementation of Language Policy*. Philippines: Akmer Phoenix Publishing House.
- Rivers, Wilga M. 1970. "Contrastive Linguistics in Textbook and Classroom". *English Teaching Forum*. VIII: 4. July-August. Washington, D.C.: Information Center Service of the United States Information Agency.

- Rivers, Wilga M. 1970. "Rules, Patterns, and Creativity in Language Learning". *English Teaching Forum*. VIII: 6. November-Desember. Washington, D.C.: Information Center of the United States Information Agency
- Stubbs, Michael. 1976. *Language, School, and Classroom*. Methuen.

PENGAJARAN SASTRA INDONESIA DAN PEMBINAAN APRESIASI SASTRA

Boen S. Oemarjati

Universitas Indonesia

Pengantar

Sastra menggunakan bahasa sebagai alat pengucapannya. Oleh karena itu, pengajaran sastra berhubungan erat dengan pengajaran bahasa. Perlu disadari bahwa pengajaran sastra tidaklah mungkin mendahului pengajaran bahasa. Sekalipun demikian, kenyataan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menomorduakan pengajaran sastra; artinya, sekedar menumpangkan pengajaran bahasa. Jika pengajaran sastra juga akan terjelma hanya sebagai hasil sampingan dari pengajaran bahasa.

Pengajaran tidak hanya berarti penanaman, melainkan terlebih lagi merupakan proses pemeliharaan, pembinaan, dan penumbuhan dari apa yang ditanamkan ke arah perkembangan yang dijadikan tujuan pengajaran itu. Oleh karena itu, mengajarkan sastra berarti menanamkan, membina, serta menumbuhkan pengenalan, keakraban dan penikmatan sastra.

Apakah yang Dimaksud dengan Sastra ?

Pertanyaan di atas sangat sukar dijawab. Bagi mereka yang berminat mengikuti pembicaraan tentang pokok itu dengan sedikit-sedikit menyerempet wilayah filsafat, misalnya, dapat membaca buku Welles & Warren yang berjudul *The Theory of Literature*. Dalam kertas kerja ini sastra akan dibicarakan dalam konteks bahasa, yang menjadi alat pengucap sastra. Sekalipun demikian, perlu segera disadari bahwa pun pembatasan demikian masih terlampau luas.

Sebagai alat komunikasi dan pengendali sosial, bahasa juga mencakup aneka ragam fungsi terapan, yang sukar untuk dinyatakan sebagai "sastra". Dalam konteks demikian, jika 'wilayah' bahasa hendak dinyatakan dengan sebuah lingkaran, maka 'sastra' merupakan sebuah bencah di dalam lingkaran itu. Akan tetapi, jika direnungkan lebih lanjut, gambaran itu tidak sepenuhnya "kena" untuk dinyatakan tempat sastra dalam wilayah kebahasaan.

Jika dibandingkan cipta sastra Indonesia tahun 20-an dengan masa 30-an, misalnya, terlihat adanya sesuatu yang baru dalam pemakaian bahasa sastra maaa 30-an. Akan tetapi, sesuatu yang baru itu menjadi tidak baru lagi untuk masa berikutnya, yaitu kurun waktu 40-an, misalnya. Pembaruan-pembaruan dalam bahasa sastra berlangsung terus, seperti halnya dengan bahasa pada umumnya. Sekalipun demikian, tak dapat dielakkan kenyataan bahwa dalam kegiatan penulisan kreatif pemakaian bahasa acap kali melampai batas-batas pemakaian bahasa secara baru dapat diamati dari masa ke masa, dari seorang pengarang ke pengarang lainnya, dari seorang penyair ke penyair lainnya, sekalipun mereka hidup dalam masyarakat bahasa yang sama. Dengan demikian, gambaran tentang hubungan sastra dengan bahasa mungkin lebih tepat jika dinyatakan sebagai lingkaran yang diterobos oleh bencah bahasa sastra di beberapa tempat, seperti ditunjukkan gambar di bawah ini.



Akan tetapi, sastra lebih dari sekedar bahasa yang membentuknya. Jika dari segi umum dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa adalah untuk memberikan acuan pada pengalaman-pengalaman pemakainya, cipta sastra dapat dianggap sebagai pernyataan--atau barangkali lebih tepat 'pengungkapan'--yang kompleks dan menyeluruh dari dunia pengarang dan pembacanya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada tiga "wilayah" hakiki kehidupan manusia, yang sejak zaman purba hingga masa kini menjadi pusat perhatian kegiatan penulisan sastra, yaitu yang bersifat agama, yang bersifat sosial, dan yang bersifat personal. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan contoh berikut ini. Bahwa drama, misalnya, berasal dari upacara agama mungkin sudah banyak yang mafhum, tetapi, berapa orangkah yang dapat menerima bahwa sejak Q karya penyair Sutardji Calzoum Bachri, misalnya, merupakan sajak mutakhir yang berhakikat kesaksian agama? (Lihat Lampiran 1). Contoh itu kiranya cukup untuk menggambarkan betapa padunya jalinan unsur-unsur kebahasaan cipta sastra dengan totalitas dunia penciptanya--dan dunia pembacanya sehingga hampir mustahil menjawab pertanyaan "Apakah sastra itu?" dengan suatu perumusan.

Sastra dalam Pengajaran

Masyarakat yang berkembang hanya mungkin tercipta jika para anggotanya memiliki "keterampilan", "pengetahuan", dan "kualitas-kualitas kepribadian" yang diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah, teknik-teknik, dan bahkan peluang-peluang abad modern ini. Sekalipun demikian, kelayakan-kelayakan individual hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya jika masyarakat, tempat dia hidup dan bekerja, merupakan perwujudan nyata dari kualitas-kualitas kelarasan, efisiensi, dan fleksibilitas.

Secara realistik memang harus diakui bahwa sekalian persyaratan itu tidak dapat dipenuhi oleh pranata pengajaran saja, seberapa sempurna pun itu dilaksanakan. Pranata dan unsur masyarakat lainnya juga memegang peranan besar, seperti pemerintah, penulis, pemimpin masyarakat, dan media massa. Sekalipun demikian, dalam lembaga pengajaranlah suatu (bagian) masyarakat berusaha untuk merumuskan sasaran dan tujuan pengajaran setelah mempertimbangkan sebijak-bijaknya segala kemungkinan yang ada. Lembaga pendidikanlah, yang membina individu-individu yang pantas dan berkelayakan untuk siap terjun dan membina masyarakat selanjutnya.

Jika sastra dianggap tidak berguna, tidak ada manfaatnya untuk menafsirkan atau mempersiapkan diri bagi tantangan-tantangan dan masalah-

masalah dunia nyata, dunia sehari-hari, tentu saja pengajaran sastra juga tidak dirasakan perlu untuk diajarkan. Jangankan secara sungguh-sungguh, secara setengah-setengah, atau seperempat-seperempat pun sudah dianggap memboroskan waktu, tenaga, dan uang. Akan tetapi, jika dapat ditunjukkan bahwa sastra-atau setidaknya seperangkat pilihan dari perbendaharaan sastra-dapat mempunyai relevansi dengan masalah-masalah dunia nyata, pengajaran sastra patut menduduki tempat yang selayaknya. Jika diajarkan dengan cara yang tepat, pengajaran sastra juga dapat memberikan sumbangan yang besar kepada pembangunan, yang terus-menerus ditantang oleh masalah-masalah besar yang *alot*.

Di bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa tugas utama pengajaran adalah membina individu-individu supaya memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kualitas-kualitas kepribadian yang diperlukan untuk menghadapi masalah, teknologi, dan peluang abad modern ini. Dalam bagian pengantar telah dikemukakan keamatan hubungan antara pengajaran sastra dan pengajaran-bahasa dan bahwa pengajaran bahasa perlu mendahului pengajaran sastra. Sebenarnya lebih dari itu. Pengajaran bahasa merupakan sarana penalaran. Pengajaran bahasa yang dilaksanakan sebagaimana mestinya akan merupakan dasar yang kuat bagi terbinanya kualitas-kualitas kepribadian yang kuat, dapat diandalkan, dan berdaya guna untuk memasyarakatkan diri (lihat kertas kerja R. Slamet Imam Santoso yang berjudul "Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penalaran", yang diajukan dalam Kongres ini. BSO).

Dalam bentuknya yang paling sederhana, pengajaran sastra membekali para siswanya dengan keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan mendengarkan tampaknya sepele, tetapi sebenarnya sangatlah penting. Berapa kali kita dalam kehidupan sehari-hari mengalami akibat-akibat salah dengar? Bukan karena kurang atau bahkan tidak pernah dilatih untuk membiasakan diri mendengarkan (dengan benar). Dalam pengajaran sastra, keterampilan mendengarkan ini akan terbina dengan cermat (jika diajarkan dengan benar! BSO), antara lain karena sastra bukanlah bacaan yang dapat dicerna dengan cara menghafalkan atau dengan cara pembacaan sepiantas. Dengan kegiatan mendengarkan pula, kegiatan berbicara dapat dibangkitkan dan dibina, yaitu melalui pembicaraan yang kemudian timbul sebagai hasil kegiatan mendengarkan pembacaan sastra yang dilakukan guru atau siswa lainnya. Apa yang telah didengarkannya itu kemudian dapat dijadikan bahan untuk melatih menuliskan kembali, pokok-pokok penangkapan pendengarannya. Demikian pula, kegiatan membaca akan membangkitkan

kegiatan mendengarkan, berbicara, dan menulis. Bergantung pada bahan yang dipilih dan cara guru menyampaikannya di satu pihak serta tingkatan dan kemampuan para siswa di lain pihak, maka dapat diperiksa kadar pengetahuan yang diperoleh melalui pengajaran sastra itu.

Sastra tidak menyuguhkan (ilmu) pengetahuan dalam bentuk jadi seperti halnya ilmu kimia, misalnya. "Kenyataan" yang disajikan sastra lebih bersifat menghimbau pembacanya untuk menggali, untuk menemukan—acap kali dengan bantuan sumber atau (ilmu) pengetahuan lain—agar dapat memahami masalah-masalah atau keadaan agar dapat memahami masalah-masalah atau keadaan-keadaan yang khas sebagaimana disajikan di dalamnya. Pertanyaan yang dibangkitkan tidak sekedar berkisar pada "Siapa dia?", melainkan "Bagaimana dia?", dan bahkan "Mengapa dia sampai begitu?" Dengan kata lain, sastra melatih para siswa untuk mengajukan pertanyaan yang relevan untuk situasi atau masalah yang disajikan. Kedengarannya lagi-lagi sepele, tetapi berapa kali kita dalam kehidupan sehari-hari mengalami "ketakjuban" menanggapi pertanyaan yang tidak relevan dengan persoalan yang sedang kita bicarakan?

Pengetahuan yang dapat diperoleh dari sastra adalah pengetahuan tentang kehidupan kebudayaan sendiri; dengan kebudayaan di sini dimaksudkan totalitas ciri-ciri khas suatu masyarakat tertentu (sebagaimana disajikan cipta sastra bersangkutan). Pada hemat saya pengetahuan ini sangat penting. Tiap sistem pengajaran harus dapat membekalkan pada tiap anak didiknya suatu wawasan komprehensif tentang kebudayaannya sendiri. Pembekalan demikian menanamkan dan membina rasa kebanggaan, kepercayaan diri, dan suatu *sense of belonging*. Memang, "pengetahuan" tentang kebudayaan sebagian diperoleh dalam lingkungan keluarga atau juga rumah-rumah ibadat; sebagian lagi tersirat dalam kurikulum pengajaran. Akan tetapi, sastra dapat mengisi kekurangan-kekurangan yang masih ada di sana-sini dan mempersatukan sekaliannya dalam sebuah gambaran "bulat" yang bermakna—setidaknya dalam konteks "bahasa sastra" karya bersangkutan.

Sistem perhubungan dewasa ini telah sangat maju. Bahkan, pun di Indonesia komunikasi telah sangat maju. Sedemikian majunya sehingga hubungan telepon Jakarta-New York, misalnya, dapat dilakukan secara langsung, sedangkan Jakarta-Bogor harus menunggu paling tidak 15 menit. Dengan kata lain, komunikasi yang jaringannya seakan-akan tidak mengenal batas itu tidak saja menjadikan Indonesia anggota rukun warga "kampung dunia", melainkan juga mengikutsertakan Indonesia ke dalam kebudayaan internasional.

Salah satu tugas pengajaran yang utama adalah memperkenalkan anak didiknya dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia di segenap penjuru dunia, "tanpa" merusak kebanggaan mereka pada kebudayaan sendiri. Bukan pekerjaan mudah, tetapi pun tidak boleh dikesampingkan karenanya, apalagi mengingat letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas bangsa-bangsa (diapit dua benua dan dua samudera). Pengajaran sastra, yang dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan membawa anak didik ke perkenalan-perkenalannya dengan pribadi-pribadi dan pemikiran-pemikiran besar di dunia, guru-guru dan pemikir-pemikir utama dari abad ke abad. Tanpa mengenai totalitas medan kebudayaan manusia, kita akan sering terperangah mendengar atau membaca apa yang dikatakan atau ditulis orang lain. Yang parah adalah jika dalam keadaan demikian reaksi kita bukannya mencari untuk menemukan pengenalan, melainkan malah menyanggah atau menyokong apa yang tidak dikenal itu.

Pengajaran Sastra dan Apresiasi Sastra

Dalam melaksanakan pengajaran sastra kita tidak dapat berpuas diri dengan penyebaran pengertian-pengertian keterampilan, pengetahuan, dan kualitas-kualitas kepribadian. Tiap pengajar harus senantiasa menyadari bahwa tiap siswa adalah seorang individu yang memiliki kepribadiannya yang khas, kemampuan, masalah, dan kadar perkembangannya masing-masing. Sekali lagi, pengajaran merupakan proses pengembangan individu. Sekalipun sebagai individu si siswa sekaligus merupakan perwujudan suatu totalitas yang kompleks, tetapi padanya dapat dikenali sejumlah ragam "kecakapan" karena kadang-kadang dapat terlihat adanya beberapa kekurangan, atau bahkan kelebihan dalam kecakapan itu. Dalam pengajaran, kecakapan yang perlu dilatih dan dikembangkan adalah (a) yang bersifat indria, (b) yang bersifat nalar, (c) yang bersifat efektif, dan (d) yang bersifat sosial (serta dapat ditambahkan: yang bersifat agama). Dari bagian terdahulu kiranya dapat disadari bahwa sastra memberikan peluang-peluang untuk mengembangkan *sekalian* kecakapan itu dalam antarbantuan yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, pengajaran sastra yang diselenggarakan sebagaimana mestinya akan bergerak menghampiri sasaran dan tujuan pengajaran dalam arti yang sepenuhnya dan sesungguhnya.

Orang, yang dinyatakan sebagai "buah pengajaran yang baik", adalah orang yang tahu menghormati *sekalian* manusia: keluarganya sendiri, teman dan lawan, orang sekampung dan sesukunya, tetapi pun orang-orang yang berada di luar itu, di dunia. Orang demikian dikatakan sebagai orang yang

"matang di pohon"--bukan matang karena peranan atau hasil karbitan! Sikap yang matang berlandas pada pengertian dan perhatian, yang mewujudkan dalam keterbukaan dan keramahan. Yang harus kita sadari bersama adalah hal berikut. Tonggak pengertian yang efektif hanya dapat ditegakkan di atas landasan pengertian dan penghargaan terhadap diri sendiri dan kebudayaannya sendiri. Hasrat dan perbuatan banyak anggota masyarakat yang sedang berkembang untuk meloncat naik "gerbong amerikanisasi" dengan cara mencampakkan tradisi sendiri, misalnya, menunjukkan tingkat perkembangan yang kurang matang.

Sumber-sumber sastra merupakan pelengkap--jika tidak boleh dikatakan sebagai penyempurna--untuk mengimbangi kekurangan pembekalan yang diberikan melalui mata ajaran sosial lainnya--seperti sejarah dan ilmu bumi (dalam arti ilum bangsa-bangsa)--untuk mengasah kepekaan sosial. Penulis-penulis kreatif adalah insan-insan yang dianugerahi kesanggupan luar biasa untuk--secara sadar atau tak sadar--mengidentifikasi diri dengan orang lain, menempatkan diri sebagai orang lain, menerobos suatu masalah, dan mengenali intinya. Pengajar sastra, yang memilih ragam dan jenis sastra yang tepat untuk tujuan pengajarannya serta mengajarkan secara tepat pula, akan menjadi pendorong yang sangat besar bagi tergugahnya hasrat para anak didiknya untuk memahami orang lain dan--dalam proses yang bersamaan--memahami dirinya sendiri.

Dari uraian di atas kiranya jelas bahwa pengajaran sastra membina dan mengembangkan kepekaan terhadap nilai-nilai; apakah itu nilai indrawi, atau yang bersifat nalar, efektif, sosial, atau gabungan keseluruhannya. Jika pengertian dan jangkauan apresiasi sastra hendak dibatasi pada nilai-nilai estetis, misalnya, boleh saja. Dengan kata lain, pengajaran sastra dengan sendirinya menyiratkan apresiasi sastra. Pembedaan antara keduanya--sebagaimana disarankan judul kertas kerja ini--hanya berlaku untuk tingkatan pendidikan tertentu; untuk tingkatan berikutnya apresiasi sastra mungkin menggantikan "pengajaran sastra" (untuk pada tingkatan perguruan tinggi, misalnya, didampingi dengan "pengajian sastra"). Dengan demikian, hubungan antara keduanya tidaklah dapat disifatkan ke dalam satu sebutan yang pasti karena pada dasarnya tidak ada bentuk pengajaran humaniora yang dapat "mutlak memastikan" sesuatu; ia hanya dapat berusaha untuk membina, untuk membentuk. Pada hemat saya, bukan masalah hubungan antara keduanya yang penting, tetapi bagaimana kita memandang atau menganggap apresiasi sastra itu. Sebagai buah matang yang

lezat, siap untuk dipetik? Ataukah sebagai sesuatu yang melibatkan dari kita? "Keakraban" kita dengan sastra, itulah yang akan menentukan anggapan kita tentang apresiasi sastra di satu pihak dan di lain pihak keakraban itu pulalah yang akan membina dan membentuk tingkatan apresiasi sastra kita. Kiranya pepatah "karena tak kenal, maka tak sayang" dapat dipakai untuk menggambarkan hubungan antara keduanya.

Pengajaran Sastra di Indonesia

Tiap usaha pembangunan semesta berencana cenderung menciptakan permondar-mandiran dari satu ekstremitas ke ekstremitas lainnya, apakah itu namanya modernisasi, industrialisasi, atau berjudul kurikulum, pengadaan buku, atau lainnya. Kenyataan bahwa kesejahteraan dan kemajuan masyarakat hanya mungkin tercapai jika perkembangan individu dibina, senantiasa terlupakan demi tujuan semesta.

Dalam dunia pendidikan di Indonesia hal itu tampaknya juga tidak dapat dielakkan. Khususnya berkenaan dengan pokok pembicaraan kertas kerja ini, tampaknya sastra belum berhasil dianugerahi alokasi waktu sebagai mata ajaran yang mandiri. Sastra diajarkan sebagai sambilan dalam mengajarkan bahasa Indonesia; sastra diomprenkan pada pengajaran bahasa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari pekerjaan *ompren* dapat memberikan keuntungan yang lebih besar daripada pekerjaan yang sesungguhnya, tidaklah demikian halnya dengan pengajaran yang dipraktikkan dengan cara *ngompren*. Pengajaran merupakan kegiatan dan proses pembinaan dan pengembangan. Jika dilaksanakan menurut sistem *ompren*, proses itu mengalami distorsi. Hasil yang tidak dapat dielakkan dari proses demikian adalah justru beban bagi masyarakat, yang konon kabarnya akan dikembangkan dan diangkat derajatnya ke taraf hidup yang sejahtera, adil, dan makmur. Pengajaran sastra di Indonesia dewasa ini berada dalam keadaan "hidup enggan, mati pun tak mau", sedangkan akibat-akibat keadaan itu merupakan kenyataan yang "disebut jangan, dikenang pun jangan".

Masih ada ciri-ciri khas Indonesia lainnya dalam pelaksanaan pengajaran sastra, yang kurang sesuai dengan apa yang seyogianya dilakukan, seperti buku dan tenaga pengajar. Akan tetapi, pada hemat saya semuanya itu merupakan akibat dari sikap yang tidak menyadari hakikat dan fungsi pengajaran sastra yang sesungguhnya.

Himbauan

Memperbaiki yang sudah rusak lebih sukar daripada membangun yang baru. Dalam hal memperbaiki kerusakan sikap mental, misalnya, waktu yang diperlukan lebih banyak dan pekerjaannya lebih rumit daripada memugar candi Borobudur, kalau tidak boleh dikatakan hampir tidak mungkin. Akan tetapi, rakyat Indonesia konon sangat ulet dan kreatif serta inovatif; pendek kata tahan segala cuaca. Oleh karena itu, sebelum keadaan yang "hidup enggan, mati pun tak mau" mengambil alih kemampuan potensial bangsa Indonesia, perlu disadari sepenuhnya bahwa tindakan preventif jauh lebih murah daripada tugas korektif.

Kiranya tidak perlu diuraikan bahwa pelaksanaan sekalian tugas yang bersifat mendidik--baik itu sehubungan dengan ajar-mengajar di sekolah dan perguruan tinggi maupun anjur-menganjur seperti keluarga berencana dan hidup sederhana--tidak dapat dilakukan berdasarkan adanya dukungan moral dan spiritual saja, melainkan, terlebih lagi, memerlukan pengorbanan biaya yang sangat besar. Pengelolaan biaya tidak cukup dengan hanya bicara konteks alokasi, tetapi lebih penting, menerjemahkannya ke dalam pelaksanaan nyata yang bersifat antardepartemen. Pelaksanaan tugas pendidikan tidak mungkin berhasil jika departemen lainnya yang tidak berpapan nama Pendidikan dan Kebudayaan tidak membantu secara nyata. Sebaliknya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan dapat melaksanakan tugas mulianya, tidak akan berhasil dengan usaha-usaha pembaruan dan penyempurnaan, jika bertolak dari sikap dan keyakinan bahwa otoritas pendidikan berada dalam departemennya saja. Sebagai contoh: pengadaan buku tidak mungkin terlaksana baik jika tidak menyertakan setidaknya tiga departemen lain, yaitu Departemen Penerangan, Departemen Perdagangan, dan Departemen Perhubungan, kecuali jika masing-masing departemen itu beranggapan bahwa tugasnya hanyalah memberi keterangan (Departemen Penerangan), menandatangani kontrak jual-beli (Departemen Perdagangan), dan menjaga telepon supaya jangan mati bergantian (Departemen Perhubungan).

Bahwa dalam pelaksanaan pengajaran sastra itu sendiri perlu dipenuhi sejumlah syarat, kiranya tidak harus dijabarkan di sini. Di samping persyaratan-persyaratan "di atas kertas", perlu diperhatikan penguasaan "seni mengajar" yang tepat dalam suatu situasi pengajaran tertentu. Hal ini sama sekali tidak mudah. Di satu pihak, keragaman bahasa ibu dan keragaman latar belakang kebudayaan para siswa--baik yang berkaitan langsung dengan perkem-

banan individual maupun yang secara kurang langsung mempengaruhi perkembangan sosialnya—menantang para guru dalam situasi pengajaran sesungguhnya untuk melakukan improvisasi-improvisasi. Akan tetapi, di lain pihak kebebasan gerak para guru dibatasi berbagai faktor, di antaranya kurikulum yang harus dijadikan pedoman dan persyaratan-persyaratan ujian yang harus dihampiri. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan pengajaran sehari-hari, guru dihadapkan dengan situasi yang mengharuskannya melakukan pemilihan. Dalam konteks umum sebagaimana dinyatakan di sini, guru seakan-akan harus memilih antara atau tunduk pada peraturan, atau berusaha memenuhi kebutuhan para siswa.

Seleksi tidak mungkin dihindari karena hakikat pengajaran adalah penyesuaian bahan yang diajarkan dengan kemampuan atau daya serap siswanya pada suatu tingkatan pengajaran tertentu. Belajar merupakan upaya yang berjangka waktu panjang sekali, yang bergerak—kalau perlu merayap atau merangkak-maju menembus kegelapan dari keadaan "tidak tahu" ke arah terangnya "menjadi tahu", dari keadaan "tidak mengenal ketaraf "mengenal". Proses itu tidaklah berlangsung menurut garis datar, tetapi menunjukkan tataran yang semakin meningkat, meninggi. Dalam konteks khusus, yaitu penyelenggaraan pengajaran sastra, seleksi justru harus dilakukan secara cermat-tepat: kapan, teks mana dapat dikomunikasikan kepada siswa yang bagaimana, dan dengan cara yang bagaimana—merupakan empat patokan utama yang dapat digunakan sebagai landasan seleksi (lihat contoh kemungkinan pemilihan pada lampiran II). Tentunya, itu hanya dilakukan jika pengajaran sastra memang hendak dilaksanakan sesuai dengan tugas yang diembannya.

LAMPIRAN II

Teks mana akan Anda pilih untuk para siswa Anda? Pada tingkatan pengajaran mana siswa Anda berada dan bagaimana kemampuan mereka? Apakah tujuan Anda? Bagaimana Anda akan menyampaikan pilihan Anda ini kepada mereka?

A. Nur Sutan Iskandar, *Salah Pilih*:

3. ANAK DAN IBU

Senantiasa kalau Asri sudah pulang, maka ramailah rumah gedung itu. Anak muda-muda banyak turun-naik; gelak, kelakar dan olok-olok kedengaran dengan riangnya. Sebagai batu runtuh lainnya. Sababat-kenalan Asri datang berkerumun, lalu berjalan-jalan dan bermain-main dengan dia ke sana ke mari. Kadang-kadang mereka itu pergi berbiduk-biduk, mandi-mandi, berenang-renang dalam danau Maninjau yang luas itu, dan kadang-kadang mengelilingi danau itu. Perjalanan itu adalah 11 atau 12 jam lamanya. Amat senang hati mereka itu dalam perjalanan itu sebab penglihatan sepanjang jalan sangat bagus dan permai. Raskan tak puas hati melihat sawah yang luas-luas, sedang padinya di tumpak ini tengah masak dan di tumpak itu tengah berperut, tengah menghijau serta di bahagian lain baharu ditanami dan sebagainya. Pemandangan itu pun disela-sela pula oleh ladang pala, kulit manis, dan kopi. Kampung orang kedapatan sepanjang jalan. Rumah bulat, rumah lipat pandan, rumah gajah mengeram ada belaka. Ada yang beratap ijuk dan ada pula yang beratap sing. Tambahan pula makan-makan dalam perjalanan itu pun bukan kepalang enaknyanya.

B. Sutan Takdir Alisjahbana, *Dian yang Tak Kunjung Padam*:

VII. IBU DAN ANAK

Selama peralatan itu Jasin mengunjungi keramaian orang menari-nari di balai atau di muka rumah itu seperti biasa. Sesungguhnya pekerjaan itu merusakkan hatinya. Ketika itu tiada terperikan remuk kalbunya.

Sedang orang bergirang hati, bersenda gurau dan bercumbu-cumbuan, ia harus hadir di tempat bersuka-sukaan itu dengan hati yang penuh gundah gulana dan pikiran yang kusut dengan hatinya yang kacau-bilau itu laksana hutan sesudah topan yang dahsyat, terasa olehnya seolah-olah sebilah sembilu yang tipis dan tajam, yang disayatkan pada dagingnya, lambat-lambat, perlahan-lahan Pedih sedikit-sedikit, menyayat lambat-lambat, tetapi terus mendalam!

C. Amal Hamzah:

TEROPONG

Seperti biasa kereta api yang pergi ke Banten penuh sesak oleh penumpang. Dalam semua wagon-wagon berimpit-impit manusia laki-laki perempuan campur-baur, seperti ikan salai dalam belek. Panasnya tidak terkira, apalagi pada waktu aku pergi itu matahari bersinar amat teriknya. Mukaku yang basah oleh peluh kuseka dengan handuk saputangkanku (*kawan-kawanku seperkerjaan selalu mentertawakan aku karena aku memakai handuk sebagai selampai, tapi aku tidak ambil pusing*) tapi beberapa menit lagi mukakau basah kuyup kembali seperti pinggang dicurahi air.

D. Idrus, *Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma:*

KOTA-HARMONI

Trem penuh sesak dengan orang, keranjang-keranjang, tong-tong kosong dan berisi, kambing dan ayam. Hari panas dan orang dan binatang keringatan. Trem bau keringat dan terasi. Ambang jendela penuh dengan air ludah dan air sirih, kemerah-merahan seperti buah tomat.

PERANAN BAHASA INDONESIA DALAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Anwas Iskandar

Direktorat Pendidikan Masyarakat

Apakah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan Suatu Sistem ?

Pendidikan luar sekolah (PLS) adalah program kegiatan belajar di luar program persekolahan yang melembaga, yang berpangkal tolak dari pemenuhan kebutuhan belajar khusus warga masyarakat dengan terlebih dahulu memanfaatkan sumber belajar yang sudah ada dalam masyarakat itu sendiri. Tujuan utama PLS adalah ikut serta membantu menggugah, membangkitkan, dan mengembangkan kemampuan setiap warga masyarakat untuk senantiasa mendidik diri dan mengembangkan diri. PLS juga senantiasa ikut serta dalam menjelmakan keadaan yang memungkinkan setiap orang mengembangkan kemampuan dirinya. Sepintas lalu kelihatan bahwa tujuannya semata-mata memberikan atau menyampaikan seperangkat pengetahuan dan pengalaman, keterampilan dan kemahiran, serta budi pekerti, budi akal, dan budi bahasa. Sebenarnya isi pelajaran yang disajikan, cara penyajian dan penyampaian, keadaan tempat terjadi proses belajar, dipilih, dan dipertimbangkan dengan memperkirakan kemungkinan dapat berperan sebagai rasi yang menjamin terjadinya proses pengembangan diri secara terus-menerus.

Istilah 'luar sekolah' dalam PLS seyogyanya diartikan 'di luar program persekolahan' dan bukan 'di luar tembok dan lingkungan sekolah' Dengan pengertian itu mungkin terjadi: PLS yang diselenggarakan di luar sekolah, atau sebaliknya: pendidikan sekolah yang diselenggarakan di luar sekolah. Program sekolah yang melembaga yang diselenggarakan di luar lingkungan sekolah adalah tetap pendidikan persekolahan atau pendidikan sekolah. Sistem pamong, yaitu pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru

yang sedang dicobakan di beberapa daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K), yang mengajarkan pelajaran sekolah di luar lingkungan sekolah, adalah pendidikan sekolah, bukan PLS. Sebaliknya, kegiatan yang diselenggarakan di dalam lingkungan sekolah adalah program PLS apabila program itu bukan program persekolahan yang sudah melembaga

PLS ada bukan lantaran ada warga masyarakat yang tidak pernah sekolah; juga bukan lantaran ada warga masyarakat yang tidak tertampung di sekolah; bukan pula karena ada siswa putus sekolah yang dalam lima tahun terakhir saja sudah mencapai angka 11 juta orang lebih; bukan pula karena banyak siswa tinggal kelas. PLS akan tetap ada, baik dalam masyarakat tanpa sekolah yang terpencil di tengah hutan belantara, dalam masyarakat serba sekolah di kota-kota maupun dalam masyarakat peralihan dari masyarakat tanpa sekolah ke masyarakat serba sekolah. Panggilan terhadap PLS akan tetap terdengar semakin nyaring sebab mustahil program sekolah yang melembaga mampu mempersenjatai setiap warga masyarakat dengan kemampuan senantiasa mengembangkan diri. Sekolah juga mustahil berperan sebagai mandataris tunggal untuk mencerdaskan, menerampilkkan setiap warga masyarakat. Sekolah juga mustahil dapat menjadi penyalur tunggal ilmu dan teknologi yang semakin berkembang. Kalau pun hal itu mungkin, barangkali bukan merupakan kebijaksanaan yang arif bijaksana untuk menjadikan sekolah sebagai lembaga serta bisa dan serba guna. Bagaimanapun perubahan yang dilaksanakan dalam sistem persekolahan, peranan sekolah akan semakin terbatas, jika dibandingkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi akhir-akhir ini dan di waktu yang akan datang. Tuhan yang Mahakuasa rupanya menyebarkan sumber ilmu pengetahuan itu di seluruh penjuru jagat raya ini dan tidak terpusat hanya di beberapa tempat. Demikian pula, walaupun kita menegenal orang yang serba dapat dan serba tahu, ternyata bahwa keserbabisaan dan keserbatahuan mereka itu tetap terbatas. Mahaguru ternyata bukan manusia yang serba mahatahu. Kenyataannya ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang diperlukan seseorang untuk dapat menjelmakan dirinya menjadi insan tahu diri umpamanya, tersebar pada beberapa orang pada sanak saudaranya, pada guru atau pada mahaguru. Kenyataan itulah yang mengharuskan setiap manusia untuk bukan hanya berguru atau bersekolah, tetapi belajar dari siapa saja sepanjang waktu jaganya. Pengetahuan yangtersebar itu pun semakin berkembang, padahal waktu sekolah tetap tidak begitu banyak mengalami perubahan; waktu setiap hari tetap 24 jam, waktu jaga manusia tidak banyak dan sesudah batas tertentu mustahil dapat mengalami perpanjangan. Itu semua

bukan hanya memanggil pendidikan sepanjang hayat, termasuk di dalamnya PLS, melainkan jenis pendidikan yang dipilih dengan cermat dan diselenggarakan dengan cara yang lebih mudah, lebih menarik, menawan akal dan lebih insaniah, pilihan di hadapan kita bukan lagi dengan PLS atau tanpa PLS. Pilihan kita adalah antara PLS yang tepat dan PLS yang tidak tepat, berencana, dan PLS semena-mena; PLS yang membina benih pertumbuhan insaniah, dan PLS yang membinasakan benih pertumbuhan insaniah.

Sebelum masyarakat berhasil menciptakan sebuah lembaga yang bernama sekolah, masyarakat senantiasa mendidik, memasyarakatkan, dan membudayakan dirinya sendiri. Dengan diciptakannya lembaga yang disebut sekolah, sama sekali tidak berarti bahwa sekolah adalah mandataris tunggal masyarakat untuk mendidik dan membudayakan warganya. Walaupun secara nasional kita sudah menerima sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pembudayaan, masih ada gugusan masyarakat yang dapat disebut masyarakat tanpa sekolah, bukan karena dalam lingkungannya belum ada sekolah, tetapi memang belum ditembus oleh program sekolah, baik yang lewat tulisan maupun yang melalui saluran lain.

Dalam masyarakat tanpa sekolah terjadi PLS yang semurni-murninya, yaitu PLS sama dan sebangun dengan pembudayaan dan pemasyarakatan. Masyarakat sebagai satu kesatuan adalah tenaga pembudaya dan tenaga pemasyarakat setiap warganya yang baru. Masyarakat belajar dari apa yang ada di sekitarnya: dari manusia lain, dari tingkah laku binatang, dari tumbuhan, dari benda alam, dari peristiwa, dan gerak-gerik alam. Dalam binatang buruannya mereka menangkap berbagai pelajaran yang tertuang dalam berbagai ibarat dan peribahasa. Dari tumbuhan bukan hanya memetik butir energi yang mereka makan, melainkan memetik kearifan yang tersembunyi di balik tumbuhan itu. Lahirlah antara lain peribahasa seperti ilmu padi, makin runduk makin berisi. Masyarakat tanpa sekolah bukan hanya mendidik, melainkan membentuk jasmani setiap insan yang keluar dari rahim setiap ibu: telinga dan hidung dilubangi, leher dipanjangkan, kepala dibentuk, selaras dengan selera keindahan menurut pandangan kebudayaannya. Masyarakat membentuk alam pikirannya muncullah istilah yang disebut *tribal mind*. Masyarakat membentuk pandangan moralnya. Timbullah istilah *contextual morality*. Masyarakat juga membentuk pandangan sehingga setiap suku bangsa seolah-olah hidup dengan 'kaca-mata-budaya' yang tersembunyi. Dengan kaca mata budaya itu mereka melihat segala sesuatu, tetapi gara-gara kaca mata budaya itu pulalah warga masyarakat setiap suku terjangkau apa yang disebut *cultural*

blindness atau tunabudaya. Melalui proses pembudayaan itu tidak sedikit potensi pertumbuhan insaniah yang dibina, tetapi ada juga potensi insaniah yang dibinasakan; ada potensi insaniah yang dikembangkan, tetapi ada juga yang dilumpuhkan.

Proses yang sama juga terjadi dalam masyarakat serba sekolah seperti masyarakat yang berada di kota-kota. Walaupun masyarakat sudah serba sekolah, pendidikan luar sekolah akan tetap ada. Apalagi di Indonesia tempat struktur persekolahan tidak mungkin mempengaruhi setiap langkah pertumbuhan manusia. Sekolah di Indonesia praktis mulai pada anak berusia 6-7 tahun. Bagi anak yang mujur dapat mulai pada usia 4-5 tahun. Akan tetapi, berapa persen dari waktu jaganya yang terserap di sekolah? Sebagian waktu jaga mereka berapa dalam lingkungan rumah, dalam lingkungan teman sebaya, dalam lingkungan bacaan, dalam lingkungan kekerabatan, dan dalam lingkungan masyarakat luas, khalayak ramai yang memancarkan pengaruh dari mulai pengaruh yang antipendidikan dan nonpendidikan sampai kepada pengaruh yang mendidik.

Proses yang pada dasarnya sama terjadi juga dalam masyarakat peralihan dari masyarakat tanpa sekolah menuju masyarakat serba sekolah. Kehausan akan pendidikan dari masyarakat peralihan yang tidak terpenuhi oleh program sekolah mengakibatkan mereka memanfaatkan apa pun pendidikan yang ada. Tidak sedikit di antara mereka yang menjadi mangsa sikapnya yang keburu nafsu belajar atau keburu nafsu sekolah. Dalam masyarakat peralihan pun PLS akan senantiasa memainkan peranannya dalam pembentukan tabiat dan tingkah laku warga masyarakat. Di dalam lembaga pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah jajahan tidak pernah diajarkan rasa kebangsaan, kemerdekaan, demokrasi, dan sebagainya. Peranan PLS dalam pengugahan dan kebangkitan kesadaran nasional warga masyarakat Indonesia waktu itu, terlalu besar untuk diingkari.

Kedudukan dan Peranan Bahasa Indonesia dalam PLS

Ada lima arus kekuatan luar sekolah yang dapat menimbulkan pengaruh mendidik atau tidak mendidik. Arus atau jalur kekuatan itu adalah:

- (a) arus PLS yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- (b) arus PLS yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga masyarakat;
- (c) arus pembudayaan dan pemasyarakatan yang dilakukan oleh setiap suku bangsa dan kelompok sosial;

- (d) arus pergaulan kebudayaan antarbangsa dan antarsuku bangsa; dan
- (e) arus pendidikan yang berpusat pada agama.

Antara kelima arus itu kadang-kadang terdapat semacam jurang. Antara arus (a) dan (b) dan (c) kadang-kadang terdapat pengaruh yang sama sekali bertentangan satu dengan lainnya. Pada tahun-tahun pertama kemerdekaan, ketika Pemerintah dan masyarakat melalui arus (a) dan (b) berusaha memancasilakan setiap warga negara, masyarakat Asmat (insan kamil) masih melakukan pemburuan, pengayuan, dan pembataian manusia untuk dimakan. Tindakan suku yang menamakan diri *insan kamil* itu, dilihat dari sudut kebudayaan dan pemasyarakatan, bukanlah tindakan kemanusiaan yang biadab yang bertentangan dengan 'kemanusiaan yang beradab' sebagai salah satu sila dalam Pancasila yang tidak diketahuinya waktu itu. Itu adalah pencerminan 'kemanusiaan yang beradab' menurut pandangan hidup masyarakat Asmat, yang bertentangan dengan 'kemanusiaan yang beradab' sebagai satu bangsa yang suku Asmat adalah salah satu bagiannya.

Di dalam pembudayaan dan pemasyarakatan tradisional, kebudayaan suku bangsa, kedudukan, dan peranan bahasa Indonesia sangat lemah. Mereka tidak mengenal bahasa Indonesia. Para penyebar agama menerobos keterpencilan dan keterasingan itu dengan mempergunakan berbagai cara. Pergaulan dengan mereka dimulai dengan bahasa isyarat, kemudian dengan bahasa daerah, dan pada akhirnya dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang bercampur aduk dengan bahasa daerah. Di daerah terpencil dan di daerah pedesaan, bahkan di daerah pinggiran kota, bahasa daerah masih menempati kedudukan yang sangat kuat, baik sebagai bahasa pergaulan maupun sebagai wahana pembudayaan dan pemasyarakatan.

Sebelum meninjau kedudukan dan peranan bahasa Indonesia dalam PLS, mungkin sebagai catatan perlu dikemukakan sepintas lalu bahwa peranan bahasa asing--khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab--dalam program PLS tertentu kadang-kadang terasa sangat kuat. Dalam lingkungan pesantren tertentu, yang mungkin beranggapan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dengan sendirinya harus dipelajari, menonjol penggunaan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini hanya sekedar contoh bahwa dalam sebuah lingkungan PLS tertentu mungkin terjadi, yakni empat buah bahasa mempunyai kedudukan dan peranan tertentu yang berbeda-beda.

Secara umum dapat dikemukakan peranan bahasa Indonesia dalam arus PLS yang diselenggarakan pemerintah dan lembaga masyarakat sangat kuat. Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam latihan

maupun dalam pergaulan. Bahasa Indonesia dipergunakan dalam setiap sarana belajar yang dihasilkan oleh Pemerintah pusat, baik sarana belajar untuk bimbingan para petugas maupun sarana bacaan untuk warga masyarakat. Di samping buku pedoman, buku bacaan dan pelajaran, PLS juga menggunakan sarana belajar yang lain, umpamanya, lembar lepas, poster, *slides*, kaset, dan permainan belajar. Dalam sarana belajar itu dipergunakan bahasa Indonesia. Tujuan penggunaan bahasa Indonesia adalah di samping sebagai bahasa pengantar juga sebagai isi pelajaran yang tidak disajikan secara terpisah, tetapi langsung digunakan. Bahasa Indonesia berperan sebagai jembatan penghubung antara petugas pemerintah dan lapisan masyarakat yang sudah mengenal bahasa Indonesia. Di dalam hal lain, bahasa Indonesia merupakan jembatan antara berbagai suku bangsa yang berlainan bahasanya dan penghubung antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing (yang sudah berbahasa Indonesia). Dalam pengembangan konsep dan program, bahasa asing masih memainkan peranan tertentu.

Bahasa Indonesia yang merembes ke dalam masyarakat yang tidak berbahasa Indonesia telah berhasil memainkan peranan sebagai pemberi kemampuan pengucapan huruf dan kombinasi huruf yang tidak ada dalam bahasa daerah. Dengan adanya huruf *b* dan *p* dalam bahasa Indonesia, suku bangsa tertentu yang semula tidak mampu mengucapkan secara tegas perbedaan bunyi kedua huruf itu dengan maksudnya bahasa Indonesia menjadi memiliki kemampuan baru. Masyarakat yang kurang mampu mengucapkan gabungan beberapa huruf mati dalam kata-kata menjadi terlatih dan lama-lama menjadi terbiasa. Kemampuan semacam itu dapat diibaratkan dengan kemampuan baru bagi orang Indonesia untuk mengucapkan bunyi [*gin*] yang berasal dari bahasa Arab, atau sama dengan kemampuan baru orang bukan Sunda untuk mengucapkan bunyi [*eu*] yang dalam bahasa suku bangsanya tidak ada. Berkat bahasa Indonesia, ada ketidakmampuan yang membudaya atau ketidakmampuan terlatih yang berubah menjadi kemampuan terlatih (untuk mengucapkan huruf dan gabungan huruf baru).

Bahasa Indonesia telah memperkaya bahasa daerah dengan diterimanya kata, ungkapan, peribahasa yang berasal dari bahasa Indonesia. Dan kalau di daerah pedesaan pinggiran kota atau daerah terpencil ada orang yang tidak pernah sekolah yang mampu berbahasa Indonesia—walaupun belum baik dan benar—sebagian adalah berkat PLS.

Seerti telah disinggung di atas alam pikiran kesukubangsaan masih mempunyai kedudukan kuat dan memainkan peranan penting sebagai akibat

masih merajanya bahasa daerah. Masuknya bahasa Indonesia telah menimbulkan perubahan dalam *tribal mind* warga suku bangsa itu. Dengan demikian, bahasa Indonesia telah mengawali proses detribalisasi alam pikiran warga suku bangsa di seluruh tanah air ini. Tanda-tanda atau lambang-lambang kebangsaan seperti bendera, *Bhineka Tunggal Ika*, lagu kebangsaan telah sedikit demi sedikit mengubah alam pikiran kesukubangsaan (*tribal mind*) itu.

Alam pikiran kesukubangsaan (*tribal-mindedness*) itu juga membentuk pandangan budaya warga suku bangsa itu. Walaupun proses pembudayaan itu berhasil mempertajam pengamatan dan penginderaan warga masyarakat yang bersangkutan, tetapi dalam hal tertentu telah berhasil pula menjangkitkan penyakit yang disebut buta kenyataan dan buta kebudayaan karena tanpa disadari pembudayaan telah berhasil menyelinapkan "selaput mata budaya" yang sempit. Dilihat dari sudut ini bahasa Indonesia juga sudah berhasil sampai tingkat tertentu menyembuhkan dan atau mengurangi penyakit tunabudaya itu dan membatasi penularannya. Kalau sebelum masuk bahasa Indonesia sangat terasa sikap dan pandangan *tribal sentris*, sesudah masuk bahasa Indonesia, sikap *tribal sentris* itu mulai berubah dan meluas. Pandangan yang berwarna kebangsaan sedikit demi sedikit sudah mulai terasa dan ini merupakan prasarana mental bagi proses pengindonesiaan di waktu-waktu yang akan datang.

Harus diakui bahwa berkat bahasa Indonesia juga kemampuan membudaya atau kemampuan terlatih dalam berbahasa daerah menjadi cenderung luntur. Hal ini sangat terasa di kalangan angkatan muda dari berbagai-bagai suku bangsa. Kemampuan berbahasa daerah secara baik dan benar menjadi menurun. Ini berarti bahwa ada gejala, pengindonesiaan bergandengan dengan proses detribalisasi tadi. Dengan terkikisnya pengaruh bahasa daerah berkat penggunaan bahasa Indonesia, sedikit banyak terkuburnya pula pelapisan-pelapisan sosial atau tangga-tangga kemartabatan dalam masyarakat tradisional. Ini mungkin disebabkan oleh sifat bahasa Indonesia yang lebih demokratis jika dibandingkan dengan bahasa daerah.

Peranan bahasa Indonesia juga bergantung pada sifat PLS itu sendiri. Paling sedikit ada empat macam sifat PLS: (a) prapendidikan luar sekolah, (b) pendidikan luar sekolah, (c) pendidikan ulang luar sekolah (*reeducation*), dan (d) pendidikan lanjutan luar sekolah (*post-education*). Dalam prapendidikan luar sekolah yang sarannya penduduk usia prasekolah, peranan bahasa daerah masih sangat kuat jika dibandingkan dengan peranan bahasa Indonesia walaupun di kota-kota, tempat bahasa Indonesia dan bahasa daerah ke-

dua-duanya dipergunakan. Demikian juga dalam PLS yang sifatnya pendidikan, terutama yang sarannya warga masyarakat yang masih buta huruf. Bahasa Indonesia dipergunakan untuk memperkenalkan huruf-huruf Latin dan gabungan huruf Latin yang mengandung bunyi yang sudah dikenal dalam masyarakat. Dalam PLS yang bersifat pendidikan ulang dalam rangka menghilangkan bekas-bekas yang berasal dari salah asuhan, salah ajar, peranan bahasa daerah dan bahasa Indonesia hampir berimbang, sedang ke dalam PLS yang bersifat pendidikan lanjutan, bahasa Indonesia memainkan peranan yang penting, walaupun untuk lebih meresapkan pesan-pesan pendidikan tertentu dipergunakan juga bahasa daerah. Umpamanya dalam menerangkan segi-segi tertentu pendidikan luar sekolah dalam arti *nonformal education* dalam bahasa daerah terdapat ungkapan yang lebih gampang dipahami daripada kalau dijelaskan dengan hanya mempergunakan bahasa Indonesia.

Gagasan dalam Rangka Pemantapan Kedudukan dan Peranan PLS

PLS sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan kebudayaan baru akan mempunyai kedudukan yang kukuh dan peranan yang pasti apabila sistem pendidikan dan kebudayaan sudah kukuh. Sistem pendidikan dan kebudayaan nasional masih dalam proses pembentukan dan penjadian. Ada beberapa masalah mendasar yang masih harus diselesaikan. Umpamanya, apa sebabnya hanya anak berusia 7 tahun yang berhak masuk sekolah dasar? Mengapa kenaikan kelas atau tingkat harus terjadi setahun sekali? Mengapa anak yang tinggal kelas atau tidak naik harus menunggu satu tahun untuk dapat naik kelas? Mengapa anak yang putus sekolah kehilangan haknya untuk masuk kembali sekolah? Mengapa belum ada hubungan yang organis antara PLS dan pendidikan sekolah? Apa untung ruginya kalau pelajaran agama, kesenian, olah raga, dan keterampilan tidak diajarkan dalam pendidikan sekolah, tetapi diwajibkan diajarkan melalui PLS? Mengapa anak usia "prasekolah" (di bawah 7 tahun) masih merupakan anak yang terus-menerus terlantar? Sampai di mana bentuk pendidikan magang, belajar sendiri, atau belajar tanpa guru, kelompok belajar dan berguru telah dikembangkan, baik dalam PLS maupun di dalam pendidikan sekolah?

Itulah beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab secara tuntas. Dewasa ini muncul beberapa gagasan antara lain agar ada pembagian tugas yang tegas antara PLS dan pendidikan sekolah. Tugas pendidikan dan kebudayaan mana yang menjadi tanggung jawab sekolah dan mana yang menjadi tanggung jawab PLS, dan mana tugas bersama antara PLS dan pendidikan se-

kolah. Ada pihak yang berpendapat bahwa seyogianya pendidikan agama, keterampilan, olah raga, dan seni budaya dikeluarkan dari sekolah dan diwajibkan melalui PLS. Kenaikan siswa dalam pendidikan sekolah harus mempertimbangkan penunaian kewajiban di dalam jalur PLS. Setiap siswa hanya dipertimbangkan naik tidaknya setelah menunjukkan tanda serta belajar dalam jalur PLS di setiap tingkat dan jenjang. Pihak itu berpendapat bahwa sekolah sebaiknya mencurahkan usahanya pada (a) pembinaan alam pikiran agar setiap siswa mempunyai kemampuan yang senantiasa meningkat untuk berpikir logis, (b) penggunaan dan pembangkitan hasrat ingin tahu, hasrat ingin mencoba, keberanian untuk menyatakan pendirian yang asli, (c) pempukuan sikap rendah hati dan luhur budi yang dapat memandang dan berperilaku bahwa setiap orang dan bukan hanya guru adalah sumber belajar; bahwa dari setiap orang yang betapa pun bodohnya ada yang dapat dipelajari, dan (d) semangat yang tahan uji dan pantang menyerah dalam mencari dan memperbaharui ilmu pengetahuan.

Perlu diatur hubungan kelembagaan antara PLS dan pendidikan sekolah. Apabila seni budaya, keterampilan, agama, dan olah raga mutlak harus dikuasai setiap anak, persyaratan minimum di luar sekolah harus diciptakan agar penguasaan hal-hal itu terjadi. Setiap siswa diwajibkan menunjukkan bukti atau tanda serta belajar dari jalur PLS lengkap dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikuasainya. Atau setiap siswa harus memperlihatkan bukti sebagai anggota klub-klub cabang olah raga tertentu; anggota organisasi keterampilan tertentu, di samping bukti bahwa ia tercatat dalam lembaga pendidikan agama sebagai peserta yang rajin dan tekun. Dengan demikian, mereka bukan hanya akan memiliki kemahiran dan keterampilan serta pengetahuan, tetapi memiliki kemampuan berorganisasi dan kemampuan bergaul di samping penanaman sikap rendah hati sebab mereka dapat belajar dari berbagai orang.

Perlu ada ketegasan antara tanggung jawab Pemerintah, keluarga, masyarakat, dan pelajar itu sendiri dalam pendidikan dan pembudayaan secara keseluruhan. Sampai sekarang hanyalah anak yang berusia 6-7 tahun yang memiliki hak yang sah untuk memasuki kelas terendah pendidikan dasar. Apa untung ruginya apabila hal untuk masuk sekolah dasar itu bukan semata-mata usia, melainkan prestasi belajar sebelum ia dipertimbangkan masuk sekolah, yaitu prestasi belajar dalam program PLS atau pendidikan keluarga. Umpamanya, setiap anak berhak masuk kelas satu sekolah dasar bilamana (a) usia an-

tara 5 dan 7 tahun, (b) lulus ujian saringan dalam hal bahasa, baca tulis, berhitung, (c) lulus ujian saringan pengetahuan dasar sebagai warga negara antara lain lagu-lagu wajib, dasar negara, bendera pusaka, dan lambang negara. Dengan demikian, keluarga akan terpaksa mempersiapkan anaknya atau ikut dalam program PLS yang memang sengaja disediakan.

Pendidikan dan pembudayaan di dalam dan di luar sekolah harus merupakan peragaan kehidupan nasional yang diharapkan. Pendidikan dewasa ini masih terlalu banyak merupakan kegiatan dalam sebuah kepompong. Antara kegiatan dalam kepompong dan kegiatan di luar kepompong sering tidak ada hubungan kelembagaan yang organis dan saling angkat-mengangkat. Kalau pendidikan lingkungan hidup itu penting, apakah mustahil bahwa setiap siswa diwajibkan dalam PLS atau pendidikan keluarga memiliki paling sedikit tiga jenis tanaman: tanaman hias, tanaman obat, dan tanaman penghasil? Kalau setiap anak harus memahami kemungkinan hubungan saling mengangkat antara manusia binatang tumbuhan, apakah mustahil diwajibkan kepada setiap anak untuk menjadikan air kencingnya dan kotoran binatang sebagai pupuk tanaman yang diwajibkan dipeliharanya. Masih banyak anak-anak yang memandang air kencingnya sendiri dan kotoran binatang untuk "dibuang" sebab "menjijikkan". Dan kurang sekali ditanamkan bahwa di balik yang menjijikkan itu tersembunyi sumber kehidupan, sumber keindahan, dan bisa diolah menjadi sumber kesehatan. Dengan demikian, sedini mungkin anak dibudayakan dalam sikap "tidak menampahkan sampah". Kenyataan bahwa hidup itu kadang-kadang turun naik tidak pernah diragamkan secara mantap dalam pendidikan, baik PLS maupun pendidikan sekolah. Dalam "kepompong" atau "dunia" sekolah kita mengenal "naik kelas, tinggal kelas, dan putus sekolah", tetapi jarang "turun kelas". Ini mungkin yang menyebarkan penyakit terbawa sampai tua kalau orang turun pangkat karena prestasinya merosot, lantas timbul perasaan negatif yang macam-macam. Karena pengetahuan dan kemahiran serta budi akal itu terbagi-bagi dan tidak terpusat kepada guru atau mahaguru, mengapa tidak dibuka kesempatan pendidikan yang menjamin tertanamnya sikap bahwa setiap anak dapat belajar dari setiap orang, bahkan dari mereka yang usianya lebih muda sekalipun. Oleh karena anak tidak terbiasakan dan terbudayakan dalam keadaan yang demikian itu, tidak mengherankan kalau masih ada pendapat yang menganggap enteng kepada mereka yang usianya lebih muda.

Agar bahasa Indonesia semakin berakar dalam pendidikan dan kebudayaan, khususnya dalam PLS, telah diusahakan beberapa kegiatan yang akan

terus ditingkatkan: (a) penempatan bahasa Indonesia sebagai salah satu isi program PLS, (b) penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan lisan, (c) penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan melalui tulisan dan sarana belajar lainnya, (d) pelajaran bahasa Indonesia melalui berbagai sarana belajar termasuk penggunaan radio dan televisi, (e) penyusunan permainan belajar dengan menggunakan istilah Indonesia, termasuk cerita pendidikan, baik cerita bergambar maupun gambar bercerita, dan (f) bahasa Indonesia dasar untuk anak prasekolah perlu disusun dan disajikan melalui berbagai media sehingga sedini mungkin anak-anak sudah terbudaya dalam budaya Indonesia.

Bukti menunjukkan bahwa tidak sedikit bahasa yang punah karena tidak pernah berusaha menjawab "panggilan zaman" dan "panggilan tanah airnya" yang senantiasa berubah dan berkembang. Oleh karena itu, perlu (a) pembinaan terhadap tenaga dan lembaga yang mengemban serta mengembangkan bahasa Indonesia, (b) bahasa Indonesia harus senantiasa diperkaya: dari dalam dengan mengangkat bahasa daerah sebagai bagian bahasa Indonesia, dan (c) segera menemukan istilah Indonesia yang asli untuk menggantikan bahasa asing yang "pop" agar kata atau istilah Indonesia tetap meraja.

PENGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DI SEKOLAH DASAR

Yus Ruryana
IKIP Bandung

Pendahuluan

Pengertian dan Fungsi Bahasa Pengantar

Yang dimaksud dengan bahasa pengantar dalam karangan ini ialah bahasa yang digunakan dalam kegiatan mengajar dan belajar oleh guru dan murid di sekolah. Sesuai dengan tujuan kegiatan mengajar di sekolah dasar (SD), bahasa pengantar dipergunakan untuk menerangkan dan mengekspresikan serta memahami dan menghayati bahan pelajaran agar murid dapat mencapai tujuan pendidikan, yaitu memiliki pengetahuan, terampil, dan memiliki nilai dan sikap yang ditentukan dalam kurikulum. Dalam kegiatan-kegiatan itu bahasa pengantar digunakan, baik secara lisan maupun secara tulisan.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia (BI) antara lain berfungsi sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan seperti dirumuskan dalam *Seminar Politik Bahasa Nasional* (Halim, Editor, 1976:145). Sesuai dengan itu di SD, BI dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Di samping BI, ada beberapa bahasa daerah (BD) yang digunakan sebagai bahasa pengantar. Hal ini sesuai pula dengan salah satu fungsi BD yang dirumuskan dalam seminar itu, yaitu sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain (Halim, Editor, 1976:146).

Bahasa Pengantar Menurut Kurikulum SD

Penggunaan bahasa pengantar BI dan BD di sekolah dasar itu dalam *Kurikulum Sekolah Dasar 1968* dinyatakan dengan jelas. Kerangka kurikulum

1968 dinyatakan dengan jelas. Kerangka Kurikulum 1968 ada dua buah, satu untuk sekolah yang menggunakan bahasa pengantar BI dari kelas I sampai dengan kelas VI dan satu lagi untuk sekolah yang menggunakan bahasa pengantar BD dari kelas I sampai dengan kelas III (Direktorat Pendidikan Pra-sekolah/SD, 1968:17-20). Dalam Kurikulum Sekolah Dasar 1975 penggunaan bahasa pengantar itu tidak dinyatakan dengan jelas. Sama sekali tidak disinggung tentang boleh tidaknya menggunakan BD sebagai bahasa pengantar. Sebagai mata pelajaran, BD merupakan bagian bidang studi BI, khusus bagi sekolah di daerah yang memerlukan pelajaran BD dengan disediakan waktu dua jam pelajaran seminggu dari kelas I sampai dengan kelas VI di luar jam pelajaran yang telah dialokasikan (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 008C/U/1975, Pasal 6 Ayat (3), dan Pasal 7 Ayat (3)). Jika melihat pertimbangan dalam surat keputusan itu, yaitu bahwa masih terdapat berbagai susunan dan materi kurikulum untuk SD, dan dipandang perlu untuk mengadakan usaha pembakuan kurikulum, secara tersirat mungkin dimaksudkan bahasa pengantar itu hanyalah BI.

Bahasa Pertama atau Bahasa Kedua

Ada anggapan yang menekankan pentingnya bahasa pertama sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan seperti dikemukakan dalam laporan pertemuan para ahli UNESCO di Paris pada tahun 1951. Antara lain dikemukakan bahwa bahasa pertama (bahasa ibu) itu merupakan alat yang alamiah untuk pengutaraan pribadi, dan keperluan yang pertama-tama bagi seorang adalah mengembangkan daya pengutaraan pribadi itu sepenuh-penuhnya, serta setiap murid hendaknya memulai pendidikan formalnya dalam bahasa ibunya (Fishman, Editor, 1972:711). Dalam laporan itu disebutkan bahwa suatu yang aksiomatik bahasa pengantar yang terbaik, untuk mengajar anak adalah bahasa ibu anak itu (Stern, 1967:25).

Terhadap anggapan seperti itu ada pula yang menyanggah. Pada tahun 1962 para ahli UNESCO mengadakan pertemuan di Hamburg, yang bertujuan menyusun rencana jangka panjang tentang penelitian aspek-aspek kejiwaan dan pendidikan pengajaran bahasa kedua. Pelajaran bahasa kedua itu sering dimulai sejak kecil dengan alasan antara lain bahwa bahasa kedua itu diperlukan sebagai bahasa pengantar. Dalam pertemuan itu para ahli baru sampai kepada persetujuan bahwa belum ada kenyataan yang menyimpulkan kedwibahasaan itu merupakan rintangan atau dorongan bagi kemajuan kepribadian seorang anak (Stern, 1967:27). Atau seperti dikemukakan oleh Bull, waktu

membahas laporan pertemuan UNESCO di Paris itu, kiranya harus dibuat kompromi yang praktis antara apa yang secara langsung paling baik bagi individu anak dan apa yang dalam tinjauan jangka panjang paling baik bagi seseorang, dan bagi masyarakatnya (Hymes, Editor, 1964:529).

Dilihat dalam hubungan pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, pemakaian bahasa pengantar BI dan BD dalam *Kurikulum SD 1968* merupakan kebijaksanaan jalan tengah seperti apa yang disarankan oleh Bull itu.

Satu Bahasa Pengantar atau Dua Bahasa Pengantar

Sekolah ada yang menggunakan satu bahasa pengantar dan ada pula yang menggunakan dua bahasa pengantar. Bahasa yang dijadikan pengantar dipilih berdasarkan beberapa prinsip, seperti kebangsaan, wilayah, keagamaan, dan asal-usul etnik. Sekolah yang menggunakan dua bahasa pengantar ada yang melaksanakannya secara sejajar dan ada pula yang secara tidak sejajar. Secara sejajar kedua bahasa itu diberi kedudukan yang sama, dan dalam lingkungan yang sama. Hal itu diterapkan ke dalam silabus atau ke dalam jadwal waktu. Jika kesejajaran itu dalam silabus, pelajaran diberikan dalam kedua bahasa. Jika kesejajaran itu diterapkan dalam jadwal waktu, selama waktu tertentu (hari, minggu, bulan) dipergunakan pengantar yang satu, dan pada waktu lain dipergunakan bahasa pengantar yang kedua, demikian terus berganti-ganti. Secara tidak sejajar kedua bahasa itu digunakan untuk tujuan yang berbeda. Bahasa yang satu digunakan untuk beberapa mata pelajaran, sedangkan bahasa yang kedua digunakan untuk beberapa pelajaran yang lain (Mackey, dalam Joshua A. Fishman, Editor, 1972:560-561)

Menurut Kurikulum 1968, SD di Indonesia ada yang menggunakan satu bahasa pengantar dan ada yang menggunakan dua bahasa pengantar. Yang menggunakan satu bahasa pengantar adalah SD yang menggunakan BI bagi semua mata pelajaran di semua kelas. Pemilihan bahasa dilakukan berdasarkan kedudukan BI sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang menggunakan dua bahasa pengantar adalah SD yang menggunakan BD di kelas I, II, III, dan BI di kelas IV, V, VI. Pemilihan BD dilakukan berdasarkan bahasa yang digunakan oleh umumnya murid di suatu daerah. Penggunaan kedua bahasa itu dilakukan secara sejajar dalam jangka waktu tiga tahun.

Seperti telah dikemukakan bahwa dalam *Kurikulum SD 1975* ketentuan tentang bahasa pengantar tidak dinyatakan secara jelas. Secara tersirat mungkin dimaksudkan SD di Indonesia diharapkan menggunakan satu bahasa pengantar.

Gambaran Penggunaan Bahasa Pengantar di SD:

Mula Penggunaan Bahasa Pengantar Bahasa Indonesia

Kurikulum SD 1975 itu berlaku dan dilaksanakan mulai tahun ajaran 1976, dengan ketentuan: mulai tahun ajaran 1976 dilaksanakan di kelas I dan IV, 1977 di kelas II dan V, dan 1978 berlaku sepenuhnya dari kelas I sampai dengan kelas VI. Tahap pelaksanaan itu dilakukan secara nasional dengan memberikan kemungkinan SD yang menurut penilaian Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat secara teknis dan administratif telah mampu mulai melaksanakannya pada tahun ajaran 1975 (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008C/U/1975, Pasal 10). Mengingat hal itu mungkin bahasa pengantar BI sejak kelas I itu sudah dilaksanakan pula di sekolah-sekolah dasar di mana-mana.

Pada tahun 1976/1977 diadakan penelitian-penelitian tentang penggunaan BI sebagai bahasa pengantar pada SD-SD di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Di samping itu, diadakan pula penelitian tentang penggunaan BD Batak Toba, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Bugis sebagai bahasa pengantar. Menurut hasil-hasil penelitian itu, ternyata bahwa pada umumnya SD-SD itu telah menggunakan BI sebagai bahasa pengantar sejak kelas I sampai dengan kelas VI. Akan tetapi, BD pun dipergunakan pula untuk menjelaskan pelajaran sebab murid-murid terutama di kelas I-III di desa-desa belum bisa memahami dengan baik pelajaran yang diantarkan dengan BI. Dengan kata lain, bahasa pengantar itu tidak hanya satu, tetapi dua, yaitu BI dan BD, atau "bahasa campuran" (BC), yaitu menggunakan kedua bahasa itu dalam jam pelajaran yang sama. Penggunaan BI sebagai bahasa pengantar di kelas I dan II, bahkan di SD di lingkungan kota masih menimbulkan banyak kesulitan (FIP Univ. Syiah Kuala, 1976/1977:14; Fakultas Sastra Unpad, 1976/1977: 86, dan lain-lain). Keadaan demikian itu antara lain disebabkan oleh banyak sekali murid yang baru di sekolahlah mengenal BI, lebih-lebih di SD-SD yang bukan di kota. Oleh karena itu, dalam melaksanakan peralihan bahasa pengantar BD ke BI itu dilakukan sedikit demi sedikit; dalam hal itu guru menggunakan BD atau menggunakan BC untuk menjelaskan pelajaran kepada murid. Sebagai gambaran di Bali 38,33% guru menggunakan BI, dan 61,66% guru menggunakan bahasa campuran BI dan bahasa Bali, pada waktu mengajar dalam kelas (Unud, 1976/1977:179).

Kemampuan Murid Berbahasa Indonesia

Seperti telah dikemukakan, walaupun secara resmi BI digunakan sebagai bahasa pengantar sejak kelas I, tetapi karena dalam kenyataannya murid belum mampu ber-BI, guru tidak sepenuhnya menggunakan BI, tetapi mencampurkannya dengan BD. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan penggunaan bahasa pengantar BI, kita harus mendapatkan gambaran tentang kemampuan murid ber-BI dalam mendengarkan, berbicara, membaca, dan mengarang. Tentang hal itu pun telah ada beberapa penelitian.

Sehubungan dengan masalah mendengarkan dalam BI, murid kelas VI di Jawa Barat yang lulus dalam tes hanya 42,6%, sedangkan sisanya 57,37% tidak lulus (FKSS IKIP Bandung, 1977/1978:46).

Murid masih mendapat kesukaran dalam mendengarkan pelajaran dalam bahasa pengantar BI. Sebagai gambaran murid-murid SD di Bali hanya sebagian yang mengerti apa yang dijelaskan oleh guru (Unud, 1976/1977:189). Murid kelas VI di Jawa Barat yang dinyatakan lulus tes mendengarkan hanya 42,63% (IKIP Bandung, 1977/1978:46).

Dalam berbicara BI murid yang mendapatkan kesukaran. Sebagai gambaran, di Aceh 41% murid menunjukkan kesukaran berbicara BI. (Syiah Kuala:20). Di Sulawesi Selatan murid yang dapat berbicara BI dengan baik 28,37% di SD kota, di desa hanya 14,86% (IKIP Ujungpandang, 1976/1977:53). Murid kelas VI di Jawa Barat yang dinyatakan lulus tes berbicara hanya 46,92% (IKIP Bandung, 1976/1978:48).

Murid-murid mendapat kesukaran dalam membaca BI. Murid kelas VI SD di Jawa Barat yang dinyatakan lulus tes membaca hanya 38,32% (IKIP Bandung, 1977/1978:35). Guru-guru di Sulawesi Selatan umumnya berpendapat hanya sebagian saja murid-murid SD yang mampu membaca BI dengan baik (IKIP Ujungpandang, 1975/1977:50). Guru-guru di Jawa Tengah menyatakan kesulitan murid itu pada pemahaman gagasan, pemahaman kalimat, dan kata-kata (UNS, 1976/1977:27).

Murid-murid mendapat kesukaran mengarang dalam BI. Murid kelas VI SD di Jawa Barat yang dinyatakan lulus tes mengarang hanya 41,40% (IKIP Bandung, 1977/1978:37).

Dari contoh-contoh kemampuan murid dalam empat keterampilan ber-BI itu kiranya dapat digambarkan bahwa keterampilan ber-BI murid SD pada umumnya masih rendah. Dengan keadaan kemampuan ber-BI murid seperti

itu dapat dipahami mengapa guru dalam menerangkan pelajaran kepada murid tidak hanya menggunakan BI, tetapi menggunakan pula BD sebagai bahasa pengantar, bukan saja di SD yang ada di desa-desa, melainkan di SD yang ada di lingkungan kota.

Penggunaan BI dan BD di Sekolah

Dengan memperhatikan tokoh, latar, pokok, dan fungsi berkenaan dengan penggunaan BI kita akan beroleh gambaran yang lebih jelas tentang penggunaan BI sebagai bahasa pengantar itu. Berdasarkan hal itu kita dapat membedakan antara :

1. penggunaan bahasa di kelas dalam mengajar-belajar oleh guru kepada murid untuk menerangkan, bertanya atau menyuruh; oleh murid kepada guru untuk menjawab, mengemukakan pendapat atau bertanya; oleh murid kepada murid untuk bertanya jawab atau mengemukakan pendapat;
2. penggunaan bahasa di luar kelas dalam suasana bukan belajar, oleh guru kepada murid dan sebaliknya, dan oleh murid dengan murid untuk bercakap-cakap, tanya jawab, dan lain-lain.

Secara garis besar penggunaan bahasa di sekolah itu adalah sebagai berikut:

1. Di kelas dalam suasana belajar:
 - a. guru kepada murid dengan BI, BC, BD;
(contoh di Bali, guru yang menerangkan dengan BI sebanyak 18,66%, dengan BD sebanyak 19,33%, dengan BC sebanyak 62%. Unud:31);
 - b. murid kepada guru dengan BI, BC, BD;
(contoh di Bali murid yang bertanya dengan BI sebanyak 42,66%, dengan BD sebanyak 38%, dengan BC sebanyak 19,33%. Unud:31);
 - c. murid kepada murid dengan BD, BC, BI;
(contoh di Bali murid yang berbicara dengan BD sebanyak 51,33%, dengan BI sebanyak 22,66%, dengan BC sebanyak 26,01%).
2. Di luar kelas dalam suasana bukan belajar:
 - a. guru kepada murid dengan BI, BC, dan BD;
 - b. murid kepada guru dengan BI, BC, dan BD;
(contoh di Bali bertanya dengan BI sebanyak 44,66%, dengan BD

- sebanyak 46,66%, dengan BC sebanyak 8,66%. Unud:33).
- c. murid kepada murid dengan BD, BC, dan BI;
 9contoh di Bali murid bercakap-cakap dengan temannya dengan BD sebanyak 76%, dengan BI sebanyak 14%, dengan BC sebanyak 10%. Unud:33).

Dari ikhtisar itu tergambarkan BD dan BC, baik dalam kelas maupun di luar kelas masih banyak digunakan. Salah satu tujuan penggunaannya adalah untuk menjelaskan pelajaran agar murid dapat memahami.

Interferensi

Dalam situasi penggunaan bahasa seperti digambarkan di muka dapat dipahami apabila pada penggunaan bahasa oleh murid terjadi interferensi, khususnya interferensi dari BD sebagai bahasa pertama murid ke dalam BI sebagai bahasa kedua yang dipelajari, pada berbagai level bahasa. Akibat interferensi itu ada yang melanggar kaidah BI (tentang hal itu lihat, misalnya, Rusyana, 1975). Besarnya interferensi yang terjadi pada penggunaan BI oleh murid menandakan pula kemampuan murid yang masih rendah.

Kemajuan dan Hambatan

Dari gambaran pada bagian kedua di atas dapat diperkirakan kemajuan dan hambatan dalam menggunakan BI sebagai bahasa pengantar di SD.

Kemajuan yang dicapai ialah dalam usaha melaksanakan penggunaan BI sebagai bahasa pengantar sejak kelas I yang semakin meluas. SD-SD pada umumnya mengaku telah melaksanakannya. SD-SD Inpres semuanya menggunakan BI.

Salah satu hal yang menguntungkan pula bagi penggunaan bahasa pengantar BI ialah banyaknya buku pelajaran dan bacaan dalam BI yang diterbitkan. Paket buku SD untuk bidang studi BI, Matematika, IPS, dan IPA sudah tersebar ke SD-SD Inpres.

Yang menghambat penggunaan sepenuhnya BI sebagai bahasa pengantar di SD ialah kemampuan murid ber-BI yang masih belum memadai. Dengan kemampuan BI seperti itu tujuan pendidikan di SD yang telah ditentukan dalam kurikulum tidak akan dapat dicapai seluruhnya. Kemampuan ber-BI murid yang tidak memadai itu, lebih-lebih pada kelas-kelas permulaan, dikarenakan murid sebelum masuk SD pada umumnya tidak ber-BI, dan baru mengenal BI di sekolah.

Oleh karena situasi kebahasaan di sekelilingnya, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah di luar pelajaran, di rumah, dan di masyarakat, murid-murid itu lebih banyak menggunakan BD. Oleh karena itu, kemampuan ber-BI mereka tidak banyak ditunjang oleh kegiatan berbahasa di luar kelas.

Kebijaksanaan

Pelaksanaan penggunaan bahasa pengantar serta kemajuan dan hambatannya seperti telah digambarkan hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut tentang bahasa pengantar. Kebijaksanaan yang disarankan adalah sebagai berikut.

Variasi dalam Menggunakan Bahasa Pengantar

Seperti telah dikemukakan fungsi bahasa pengantar adalah untuk menerangkan dan mengekspresikan serta memahami dan menghayati bahan pelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dari segi politik bahasa nasional dan dari segi kurikulum tersedia kemungkinan untuk menggunakan BI dan BD sebagai bahasa pengantar. Mengingat kedua hal itu, tersedia dua jalan dalam menggunakan bahasa pengantar, yakni sebagai berikut:

- a. Menggunakan BI sebagai bahasa pengantar sejak kelas I di SD yang murid-muridnya sudah dapat berbahasa Indonesia.
- b. Menggunakan BD sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas permulaan di SD yang murid-muridnya belum dapat berbahasa Indonesia. Sementara itu, setelah murid belajar BI berangsur-angsur BI digunakan sebagai bahasa pengantar, mungkin dengan dicampur dengan penggunaan BD untuk mejelaskan. Jalan ini yang dilaksanakan oleh guru di daerah-daerah pada umumnya, dan jalan ini pula yang dianjurkan oleh UNESCO (Fishman. Editor, 1970:699). Pada kelas berapa sesungguhnya murid sepenuhnya mampu menggunakan bahasa pengantar BI hendaknya diteliti. Sementara itu, di daerah-daerah tertentu BD dapat dipakai sebagai bahasa pengantar mulai kelas I sampai dengan kelas III SD, sesuai dengan kesimpulan *Seminar Politik Bahasa Nasional* (Halim. Editor, 1976:150).

Pelajaran BI pada Kelas Permulaan

Pada kelas I dan II BI sebagai bidang studi hendaknya diajarkan terutama secara lisan. Tujuan pelajaran BI pada kelas permulaan ini adalah agar murid beroleh keterampilan ber-BI sebagai bahasa pengantar. Metode apa pun yang digunakan dalam mengajarkan BI hendaknya mempertimbangkan dan

memanfaatkan bahasa pertama murid-murid. Pengajaran bahasa di Indonesia hendaknya meningkatkan kesadaran murid akan kedudukan dan fungsi BI dan BD yang dirumuskan dalam *Politik Bahasa Nasional* seperti direkomendasikan oleh *The Regional Seminar on Language Education in Multilingual Societies* (1977:38). Murid-murid SD yang mempunyai BD hendaknya tumbuh menjadi dwibahasawan yang mampu berbahasa dengan baik dalam BI dan BD. Oleh karena itu, pengajaran BD bagi SD di daerah yang memerlukannya hendaknya diberi tempat yang sewajarnya dalam kurikulum.

Bahasa yang Digunakan Guru

Mengingat bahwa penggunaan bahasa oleh guru menjadi model utama bagi penggunaan bahasa bagi murid, hendaknya guru menggunakan BI baku. Kemampuan menggunakan BI baku itu hendaknya mendapat perhatian utama di lembaga-lembaga pendidikan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidikan Prasekolah/Sekolah Dasar. 1968. *Kurikulum Sekolah Dasar*. Jakarta.
- Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 1977. *Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di Sekolah Dasar di Jawa Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret. 1977. *Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di Sekolah Dasar Jawa Tengah*. Yogyakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Fakultas Sastra Udayana. 1977. *Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di Sekolah Dasar Bali*. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- FIP Universitas Syiah Kuala. 1977. *Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar pada Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Fishman, Joshua A. Editor. 1967. *Reading in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.
- FKSS IKIP Bandung. 1977. *Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD di Jawa Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- FKSS IKIP Bandung. 1978. *Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengarkan dan Berbicara). Murid Kelas VI SD di Jawa Barat Tahun 1977*. Jakarta; Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA DALAM BUKU PELAJARAN

J.S. Badudu

Universitas Padjadjaran Bandung

Pendahuluan

Masalah Bahasa dalam Buku Pelajaran

Sudah lama dirasakan perlunya mengadakan penelitian terhadap bahasa Indonesia yang dipakai di sekolah dasar (SD). Sering kita baca dalam surat kabar atau kita dengar keluhan orang tua murid terhadap kesalahan bahasa yang terdapat dalam buku-buku pelajaran, baik buku pelajaran khusus bahasa Indonesia maupun buku mata pelajaran lain, seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Kesalahan ini meliputi kesalahan struktur bahasa, penggunaan kata, ejaan, dan penggunaan tanda baca. Kesalahan lain ditimbulkan oleh penggunaan kalimat-kalimat yang terlalu panjang sehingga menyulitkan murid memahami maksud yang terkandung di dalamnya.

Alangkah baiknya bila setiap buku pelajaran yang akan dipakai di sekolah-sekolah, baik buku paket maupun bukan buku paket diperiksa bahasanya terlebih dahulu oleh suatu lembaga yang dianggap berwenang dalam hal itu, misalnya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Buku-buku yang akan diteliti itu sebaiknya dibagi atas dua golongan, yaitu buku khusus pelajaran bahasa Indonesia dan buku-buku pelajaran lain. Bagi buku pelajaran bahasa Indonesia diberikan penilaian khusus, lebih teliti dan lebih ketat daripada penilaian atas buku-buku yang lain.

Berhubung dengan waktu yang terbatas, uraian dalam kertas kerja ini akan dibatasi saja pada buku-buku tingkat sekolah dasar. Alasannya ialah sekolah dasar merupakan dasar bagi pelajaran selanjutnya. Dengan demikian,

buku yang akan diteliti jumlahnya tidak akan terlampau besar.

Buku-buku yang saya teliti semuanya berjumlah 53 buah, yang terdiri dari buku paket, seperti tertera di bawah ini.

Pelajaran Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; semuanya berjumlah 11 jilid untuk kelas I-IV.

Matematika, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 12 jilid untuk kelas I-VI, tiap kelas dua jilid.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) "Manusia dan Alam Sekitar", terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 3 jilid masing-masing untuk kelas IV, V, dan VI.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dua jilid untuk kelas III dan IV.

Yang bukan merupakan buku paket adalah sebagai berikut.

Pelajaran Bahasa Indonesia "Bahasa Kita", karangan Baidilah Halian dan kawan-kawan; terbitan Remaja Karya Bandung; 8 jilid untuk kelas III-VI, tiap kelas dua jilid.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), karangan Mugiyana, B.A., dan kawan-kawan; terbitan Tiga Serangkai Solo; 4 jilid untuk kelas V dan VI, tiap kelas dua jilid.

Pelajaran Ilmu Bumi, karangan Marzuki HA, dan kawan-kawan; terbitan Tiga Serangkai Solo;

Sari IB Jawa-Madura untuk kelas IV,

Sari IB Indonesia untuk kelas V,

Sari Panca Benua untuk kelas VI.

Pelajaran Sejarah, karangan Marzuki HA, dan kawan-kawan; terbitan Tiga Serangkai Solo;

Sari Sejarah Indonesia untuk kelas VI.

Pendidikan Moral Pancasila (PMP), karangan Drs. Abu Ahmadi, terbitan CV Toha Putra Semarang; 6 jilid untuk kelas I-VI.

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karangan Deden Candrasubrata, dan kawan-kawan; terbitan Yayasan Karya Bakti Bandung; 4 jilid untuk kelas III-VI.

Tujuan Penelitian

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV, Pasal 36 dan penjelasannya bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, dan bahasa daerah yang dipakai sebagai alat perhubungan dan dipelihara oleh masyarakat pemakainya, dipelihara juga oleh negara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 4/MPR/1978 menggariskan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar dan bahwa pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana identitas nasional.

Sehubungan dengan hal tertera di atas, tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai :

- a. ragam dan mutu bahasa yang digunakan dalam buku-buku pelajaran;
- b. apakah penggunaan bahasa itu sendiri benar-benar mendukung isi pengajaran dan pendidikan atau tidak;
- c. apakah yang dilukiskan dengan bahasa dalam buku-buku itu mudah dipahami atau tidak;
- d. strategi yang perlu dikembangkan dalam usaha peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia.

Kertas kerja ini akan lebih menitikberatkan uraiannya pada data yang dikumpulkan dengan berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis. Bahasa buku yang diteliti tidak akan dibicarakan sekaligus dalam satu napas, tetapi buku demi buku.

Buku Paket Pelajaran Bahasa Indonesia

Buku paket Bahasa Indonesia sebagai yang dinyatakan pada kata pengantarnya terdiri dari *Buku Bacaan Murid* kelas I-VI, *Buku Pelajaran Bahasa* kelas I-VI, di samping *Buku Pedoman Guru* untuk kelas I-VI serta *Buku Kurikulum/Silabus* pelajaran Bahasa Indonesia. Yang sudah terbit baru jilid I-IV untuk kelas I-IV. Untuk kelas V dan VI belum terbit sehingga sekolah-sekolah menggunakan buku yang lain.

Sesudah meneliti bahasa yang digunakan dalam buku paket pelajaran Bahasa Indonesia itu (11 jilid), dengan jujur saya harus mengatakan bahwa hampir tidak terdapat kesalahan bahasa yang berarti di dalamnya. Hal itu tidak mengherankan karena di dalam tim penyusun duduk tenaga-tenaga ahli bahasa dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, FSUI, dan IKIP Ja-

karta, yaitu tenaga-tenaga yang tidak asing lagi serta sudah sering menulis buku-buku. Pernyataan ini tentu tidak mengurangi penghargaan saya kepada anggota tim yang lain. Walaupun demikian, saya akan mengemukakan juga beberapa kesalahan yang saya jumpai.

- (1) Bawalah barang itu ke rumahmu!
Bawalah barang itu ke rumahmu!

Buatlah seperti contoh! (jilid 4a, halaman 54)

Bagaimana murid akan membuat seperti contoh jika contoh itu sendiri tidak jelas? Mungkin ini hanya kesalahan cetak. Dalam kotak yang kosong itu hendaknya ada kata yang diisikan.

- (2) Ubahlah seperti contoh!
Siapa yang berani Dini ?

(jilid 4a, halaman 70).

Kata *pukul* di dalam kotak itu harus diubah menjadi *memukul* seperti contoh. Namun, apa arti kalimat itu ?

Itu hanya sekedar contoh. Tentu masih dapat dicari satu dua lagi kesalahan lain, tetapi umumnya kesalahan yang akan dijumpai tidak berarti benar. Guru yang pandai tentu dapat segera melihat kesalahan yang saya berikan di atas dan segera pula dapat meralatnya.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa orang guru SD yang mengajar di SD-SD pinggiran kota Bandung ternyata buku-buku pelajaran ini tidak mudah bagi murid-murid. Bahasa yang digunakan dalam buku-buku itu sederhana, tetapi murid-murid yang dalam kehidupan sehari-hari sangat jarang menggunakan bahasa Indonesia ternyata mengalami kesukaran juga dalam memahaminya. Menurut guru-guru itu, bahasa yang dipakai dalam buku Pelajaran Ilmu Alam (IPA) lebih sukar lagi bagi murid-murid; demikian juga bahasa buku Matematika. Pemahaman murid-murid sangat lambat. Itu sebabnya guru-guru itu -- menurut pengakuan mereka-- harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya di rumah sebelum mengajar agar dapat menerangkan pelajaran secara baik dan jelas.

Murid-murid di pinggiran kota itu berbahasa ibu bahasa Sunda, baik di rumahnya maupun di dalam masyarakat sekitarnya. Bahasa Indonesia hanya digunakan mereka di sekolah ketika pelajaran sedang berlangsung. Itu sebab-

nya, saya berpendapat bahwa buku untuk murid-murid yang berbahasa ibu bahasa daerah, apalagi murid-murid yang di kelas-kelas satu sampai tiga menerima pelajaran dengan bahasa pengantar bahasa daerah, harus lain daripada buku yang dipakai oleh murid-murid kota-kota besar yang di rumahnya berbahasa Indonesia.

Di Jawa Barat, misalnya, kita dihadapkan kenyataan kebahasaan ini. Guru-guru Inpres yang ditempatkan di SD-SD Jawa Barat yang berasal dari daerah luar Jawa Barat dan tidak dapat berbahasa Sunda mengalami kesulitan dalam mengajar. Mereka umumnya merasa tidak berdaya menghadapi murid-muridnya yang sebagian besar tidak dapat memahami dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Sebagian dari guru-guru itu ingin kembali ke daerah asalnya akibat kesukaran yang dihadapi itu.

Kesimpulan

Buku paket *Bahasa Indonesia* menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan terjaga. Murid-murid yang berbahasa ibu bahasa Indonesia atau murid-murid di kota-kota besar yang sering mendengar dan menggunakan bahasa Indonesia dalam lingkungan hidupnya sehari-hari tidak akan mengalami kesulitan belajar dari buku-buku itu. Mereka akan mudah memahaminya.

Murid-murid yang berbahasa ibu bahasa daerah dan di dalam lingkungan hidupnya sehari-hari jarang menggunakan bahasa Indonesia, apalagi murid-murid yang di kelas I—III menerima pelajaran di sekolah dengan bahasa pengantar bahasa daerah masih mengalami kesulitan dalam memahami bahasa buku tersebut.

Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Karangan Baidilah H. dan Kawan-kawan

Buku karangan Baidilah ini terdiri dari 8 jilid, dipergunakan di kelas IV, V, dan VI; tiap kelas menggunakan satu jilid untuk satu semester. Nama buku *Bahasa Kita* disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sekolah Dasar Jawa Barat tercatat sebagai "buku yang dapat dipergunakan" di SD-SD di dalam wilayah itu.

Setelah meneliti bahasa buku-buku itu, kesan saya adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan yang tercantum dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* belum dipatuhi sepenuhnya. Masih banyak

terdapat kesalahan ejaan kata-kata dan kesalahan penggunaan tanda baca yang tidak boleh terdapat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia.

2. Bahasa yang digunakan dalam buku-buku itu masih perlu diperbaiki. Beberapa pola kalimat contoh tidak sama dengan apa yang harus dikerjakan oleh murid. Misalnya,

a. **Siapa tertawa dalam kelas?**
Anak-anak tertawa di dalam kelas.

...? Karta anak nakal.

...? Anak perempuan. (?)

...? Anak-anak berbaris. (?)

...? Anak laki-laki. (?)

b. **Adi pandai berhitung**

Rina dan Adi ber

Toto dan Rina ber

Ayah Ibu, dan Toto ber

c. **Wah, banyak sekali uang Rina**

Wah, . . . sekali Toto

3. Sering terlihat kekurangtelitian penulis atau penyusun.

Misalnya, pemberian makna kata dalam "kamus"nya.

Contoh: *seru* — *berseru*, berteriak memanggil;

Ia berseru, "Pencopet! Pencopet!"

(Jadi artinya 'ia berteriak *memanggil* pencopet? Supaya datang kepadanya?)

balut - kain pengikat; (kata benda?) membalut, mengikat, membungkus, membatat; Ia sedang *membalut* luka.

- = Ia sedang mengikat luka. (?)
 = Ia sedang membat luka. (?)
 Apa arti kata membat?

Kesimpulan

Buku-buku ini sebagai buku pelajaran bahasa, apalagi untuk SD masih belum memuaskan benar. Namun, buku ini dapat dipakai apabila direvisi lagi dengan cermat, bukan hanya bahasanya, melainkan juga materinya.

Buku Paket Pelajaran Matematika

Buku Matematika buku murid terdiri dari 12 jilid, yaitu dua jilid untuk tiap kelas dari kelas I-VI. Kesan saya setelah membaca kedua belas buku ini adalah sebagai berikut.

1. Bahasa yang digunakan dalam buku-buku ini bahasa yang terjaga. Walaupun demikian, tidak mudah memahami bahasa matematika itu karena banyaknya pengertian abstrak. Kesukaran makna istilah matematika yang cukup banyak dalam buku itu tentu akan dapat diatasi bila guru dapat memberikan keterangan yang jelas. Barangkali sebagian besar guru-guru SD akan sulit memahami bahasa yang digunakan dalam buku murid, bahkan dalam buku pedoman khusus dan pedoman guru sehingga baik sekali jika diadakan penataran terhadap mereka dalam mengajarkan matematika. Memahami pengertian abstrak hanya mudah bagi orang yang sudah biasa berpikir abstrak. Guru-guru SD yang saya wawancarai menyatakan kesukaran mereka mengajarkan matematika.
2. Ejaan baru belum sepenuhnya dipatuhi dalam buku-buku ini. Pada kata pengantar, misalnya, terdapat bentuk-bentuk seperti *normatip*, *relatip*, yang seharusnya *normatif*, *relatif*, (dengan f); *tradisionil* yang seharusnya *tradisional* (dengan -al); *diseluruh yang* seharusnya *di seluruh* (*di* kata depan harus terpisah dari kata yang mengikutinya). Di dalam pelajaran kita jumpai bentuk *kwadrat*, *konkrit*, yang berdasarkan buku *Pedoman Pembentukan Istilah* seharusnya *kuadrat*, *kongkret*. Kata gabung hampir semuanya dituliskan serangkai, misalnya, *segitiga*, *segiempat*, *persegi panjang*, *lambang-bilangan*, *ruas garis*, *himpunan bagian*, dan sebagainya, yang menurut buku *Pedoman Ejaan* seharusnya dituliskan terpisah sebagai dua kata.

3. Agar kesukaran pemahaman bahasa dapat dikurangi sebaiknya soal cerita tidak terlalu panjang. Sukar bagi murid-murid yang masih kurang penguasaan bahasanya itu menghubungkan-hubungkan sekian banyak pengertian sekaligus.

Contoh

- a. Ayah Budiman membeli 32 kelereng. Kelereng-kelereng itu dibagi-bagikan sama rata kepada 4 orang anaknya. Sebelumnya, anak-anak itu masing-masing telah mempunyai butir kelereng. Setelah menerima dari ayah, kelereng mereka masing-masing 15 butir. Berapa kelereng anak-anak itu masing-masing sebelum diberi tambahan?

Kalimat matematika yang abstrak dan sulit diserap hanya dapat dipahami oleh murid-murid jika baik penjelasan guru. Perhatikan contoh berikut.

- b. Dua orang anak memetik 24 mangga. Mereka memberikan 6 mangga kepada teman mereka. Sisanya mereka bagi dua sama banyaknya. Berapa bagian masing-masing?

Kalimat matematika tentang banyaknya mangga masing-masing anak ialah: $m = (\dots - \dots) : \dots$

Lambang bilangan manakah yang dapat mengganti huruf m itu? Jadi, berapakah mangga masing-masing?

(jilid 3a halaman 102)

Harus dihindari penyusunan soal yang dapat bermakna (ditafsirkan) ganda. Perhatikan contoh soal di bawah ini.

Aku suatu bilangan. Jika kamu menambahkan aku kepada 26, kamu akan mendapatkan jumlah yang sama dengan bila kamu menambahkan aku dua kali kepada 11. Bilangan manakah aku?

(jilid 4a halaman. 122)

Soal di atas dapat ditafsirkan:

- I. . . . sama dengan bila kamu menambahkan aku, dua kali kepada 11.
Hasilnya: $(n + 11) + (n + 11) = n + 26$
- II. . . . sama dengan bila kamu menambahkan aku-dua-kali kepada 11.
Hasilnya: $n + n + 11 = n + 26$

Dari wawancara yang saya adakan dengan Kepala Bidang Kurikulum Kande Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat, saya peroleh keterangan bahwa pelajaran matematika yang memang sukar itu ditambah lagi kesukarannya oleh kurangnya penguasaan bahasa Indonesia murid.

Kesimpulan

Bahasa yang digunakan dalam buku pelajaran matematika (buku paket) bahasa Indonesia yang baik dan terjaga. Yang perlu diusahakan hanyalah lebih mempermudah kalimat soal dan tidak membuat soal yang terlampau panjang. Sebagai buku yang diterbitkan oleh Pemerintah seharusnya buku-buku ini memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang Disempurnakan*. Sebaiknya, dibuat dua macam buku, yaitu buku untuk murid-murid di kota-kota besar dengan latar belakang bahasa ibu bahasa Indonesia dan buku untuk murid-murid di kota pinggiran atau di pedalaman.

Buku Paket Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Buku IPA untuk SD *Manusia dan Alam Sekitarnya* untuk murid terdiri dari 3 jilid, masing-masing satu jilid untuk kelas IV, V, dan VI.

Tiap pelajaran di dalam buku-buku itu terbagi atas bahan pelajaran (ba-caan) serta tugas yang harus dikerjakan oleh murid-murid. Sebagaimana buku matematika, buku ini pun disusun oleh sebuah tim ahli di antaranya beberapa orang mahaguru.

Setelah meneliti bahasa buku-buku ini, kesan saya adalah sebagai berikut.

1. Ejaan baru tidak sepenuhnya dipatuhi. Perhatikan contoh di bawah ini.

<i>ditulis</i>	<i>seharusnya</i>
effsienal	efisienal
frekwensi	frekuensi
I.P.A.	IPA
dipertanggung jawabkan	dipertanggungjawabkan
redagigi, sinarmatahari	roda gigi, sinar matahari
berfikir - memikirkan	berfikir - memikirkan, atau: berfikir - memikirkan
meteda	metode

2. Bahasa yang digunakan dalam buku-buku IPA ini bahasa yang baik dan terjaga. Namun, itu tidak berarti bahwa bahasanya mudah dipahami. Perhatikan contoh!

Tanah sekitar gunung api biasanya subur. Tanah itu mengandung endapan-endapan abu yang melapuk.

(jilid 1 halaman 71)

Dalam tembaga itu ada elektron yang dapat berpindah dari atom yang sebuah ke atom yang lain. Waktu pindah elektron itu mendesak ke luar sebuah elektron dari atom yang didatanginya, sedangkan atom yang ditinggalkannya didatangi oleh elektron dari atom yang lain lagi. Elektron yang didesak ke luar akan pindah ke atom yang lain lagi dan mendesak ke luar sebuah elektron dari yang didatanginya. Demikian seterusnya.

(jilid 3 halaman 78)

3. Bahasa buku-buku IPA ini sukar karena banyaknya istilah asing (sudah diindonesiakan). Padahal, di samping itu, banyak juga kata atau istilah Indonesia asli yang tergolong kata-kata sukar. Misalnya,

berulir	endapan	lenting
beting	gosong	longsor
dawai	kekerapan	melanda
dipantulkan	lengket	merambat
diserap	lengkungan	ringsek
	code	

Istilah-istilah dari bahasa asing:

<i>ampere</i>	humus	<i>mercurochrom</i>	<i>rachitis</i>
<i>amphibi</i>	industri	mesin jet	radiasi
<i>amplitudo</i>	infeksi	mesin roket	resonansi
angin pasat	insektisida	meteor	sekering
antologi	isolator	mikroba	sel
astronot	kambium	mikroskop	selai
atmosfir	karbohidrat	mineral	skala
<i>biseps</i>	karbondi-	molekul	skema
<i>cornea</i>	oksida	nitrogen	tanah porus
demonstrasi	kompresor	oksigen	telekomunikasi
<i>elektromagnet</i>	konduksi	okulasi	turbin

generatif	kontraksi	planet	<i>vegenatif</i>
generator	konduktor	plasma darah	waterpas
hidrogen	lava	protein	<i>watt</i>

Melihat banyak kata-kata asing dalam buku-buku IPA itu, maka kesukaran pemahaman bahasa bukan hanya dari susunan kalimat, melainkan juga dari pemahaman makna kata. Tidak mudah bagi murid mengingat makna semua kata asing itu.

Kestmpulan

Bahasa Indonesia yang dipakai dalam buku-buku IPA adalah bahasa yang baik dan terjaga. Namun, karena sifat mata pelajaran itu sendiri, banyaknya kata sukar dan banyaknya istilah asing, pemahaman bahasa menjadi sukar.

Buku Paket Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Buku paket IPS pegangan murid yang sudah terbit dan sudah dipakai sekarang baru 2 jilid, yaitu jilid I dan II untuk kelas III dan IV. Jika dibandingkan dengan buku paket IPA, buku ini lebih mudah bahasanya. Mungkin karena tidak banyak kata asing dan hal yang dibicarakan dalam buku IPS lebih dekat kepada lingkungan murid. Dengan demikian, lebih mudah dipahami.

Bahasa yang digunakan dalam buku ini bahasa yang terjaga; disusun dalam kalimat-kalimat sederhana. Pelajaran dibagi atas dua bagian, yaitu bahan bacaan dan tugas yang harus dikerjakan murid atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab.

Contoh di bawah ini memperlihatkan bahwa selalu saja ada kesukaran bagi murid memahami pelajaran yang tertulis dalam buku karena selalu saja ada kata-kata sukar yang memerlukan penjelasan.

Sawah-sawah itu merupakan *sumber* penghasilan padi. Supaya tetap subur, tanah harus *dipupuk*. Jika tidak, tanah akan menjadi *gersang*. Tanaman tidak subur. Di tanah yang *gundul*, air hujan tidak *meresap* kedalamnya. Air hujan mengalir di atas tanah dengan cepat. Tanah *terkikis* dan menjadi *tandus*. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan *penghijauan*. Hutan-hutan yang telah gundul ditanami kembali.

(jilid II halaman 6)

Kata-kata yang dicetak miring dalam kutipan di atas saya golongkan kepada kata-kata sukar. Mungkin sebagian sudah pernah dijumpai murid dalam pelajaran lain sebelumnya sehingga tak perlu dijelaskan lagi oleh guru, tetapi tentu tiap kali akan ditemukan kata-kata sukar yang memerlukan penjelasan guru. Apa yang mudah bagi orang dewasa, belum tentu mudah juga bagi anak-anak.

Kesimpulan

Bahasa yang dipakai dalam buku paket IPS bahasa yang baik dan terjaga. Kalimat-kalimat yang sederhana susunannya memudahkan pemahaman pelajaran oleh murid. Yang masih perlu diperbaiki ialah ejaan yang masih belum taat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam buku pedoman ejaan baru.

Buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Karangan Mugiyana, B.A., dan kawan-kawan.

Buku ini terdiri dari 4 jilid, yaitu jilid 5a dan 5b untuk kelas V dan jilid 6a dan 6b untuk kelas VI; diterbitkan oleh Penerbit Tiga Serangkai Solo. Menurut informasi yang saya terima dari pemilik toko-toko buku di Bandung, buku ini banyak dipakai di Jawa Barat; padahal buku ini tidak tercantum dalam daftar buku yang boleh digunakan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat Bidang Pendidikan Dasar.

Buku-buku ini tentu saja dipakai mengisi kekosongan karena buku paket IPS untuk kelas V-VI belum terbit. Dari hasil penelitian dapat saya kemukakan hal-hal berikut.

1. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam buku ini cukup baik. Di sana-sini ada kesalahan, tetapi tidak banyak.

Contohnya :

Bersawah ialah pertanian tanah basah.

Kecuali *bersawah* ada *berladang*. Yaitu pertanian tanah kering.

Berladang terdapat di tempat-tempat yang masih banyak hutannya.

Sering juga kita jumpai anak kalimat berdiri sendiri, tidak dirangkaikan dengan kalimat induknya. Misalnya:

Sebagai persimpangan jalan lalu lintas internasional.

Sebab di samping untuk memenuhi kebutuhan sendiri, juga kita jual (ekspor) ke luar negeri.

Kalimat-kalimat di atas ini harus dirangkaikan dengan kalimat (induk) yang mendahuluinya.

3. Ejaan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam buku pedoman ejaan baru.

Kesimpulan

Secara umum dapat dikatakan bahwa buku IPS susunan Mugiyana dan kawan-kawan dapat digolongkan pada buku yang ditulis dengan bahasa yang baik. Penyajian pun baik sehingga isinya mudah dipahami.

Buku Ilmu Bumi dan Sejarah Susunan Marzuki HA, dan kawan-kawan

Sebenarnya buku ilmu bumi dan sejarah khusus tidak perlu lagi dipakai di SD sebab mata pelajaran ini sudah tercakup dalam pelajaran IPS (diberikan secara korelatif). Namun, berdasarkan kenyataan, buku-buku ini masih banyak dipakai di SD-SD di Jawa Barat. Itu sebabnya saya ambil untuk diteliti.

Buku terdiri dari 1) *Sari Ilmu Bumi Jawa-Madura*; 2) *Sari Ilmu Bumi Indonesia*; 3) *Sari Panca Benua*, masing-masing untuk kelas IV, V, dan VI, dan 4) *Sari Sejarah Indonesia* untuk kelas V-VI; semuanya terbitan Tiga Serangkai Solo.

Setelah meneliti bahasa buku-buku ini, kesan saya adalah sebagai berikut.

Bahasa yang dipakai boleh dikatakan baik. Akan tetapi, karena buku berupa sari pelajaran saja, kalimat singkat-singkat dan padat. Yang ditulis yang penting-penting saja. Buku berupa sari pelajaran ditinjau dari segi bahasa mungkin kurang baik untuk SD.

Kesalahan ejaan dan kesalahan penggunaan tanda-tanda baca banyak terdapat dalam buku-buku ini. Yang mengherankan saya ialah bahwa buku ini, walaupun ditulis dicetak pada tahun 1976, 1977, dan 1978, memuat banyak fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa contoh :

Ketua DPR/MPR RI masih saja Dr. Idham Chalid.
 Perdana Menteri Israel masih saja Nyonya Golda Meir.
 Kepala Negara Etopia masih saja Kaisar Haile Selasie.
 Presiden Vietnam Selatan masih saja Nguyen Van Thieu.
 dan masih banyak lagi yang lain.

Bagaimana mungkin yang isinya seperti ini masih juga dipergunakan oleh guru-guru di sekolah-sekolah?

Kestmpulan

Jika buku-buku khusus seperti ini masih diizinkan dipakai di SD-SD, maka buku karangan Marzuki dan kawan-kawan ini memerlukan revisi besar, baik bahasa (terutama ejaan dan penggunaan tanda baca) maupun isinya yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan seperti yang dipaparkan di atas.

Buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) Susunan Drs. Abu Ahmadi

Buku terdiri atas 6 jilid untuk kelas I-VI, diterbitkan oleh CV Toha Putra Semarang; tidak tercantum dalam daftar buku yang boleh dipergunakan di Jawa Barat pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi banyak dipakai di Jawa Barat. Jilid I untuk kelas I langsung dimulai dengan kalimat-kalimat, padahal murid-murid baru mulai belajar membaca dan menulis. Walaupun buku ini buku murid, menurut keterangan guru SD di Jawa Barat, buku jilid hanya dipakai oleh guru. Isinya dibacakan saja dan murid hanya mendengarkan.

Bahasa yang dipakai penyusun dalam buku-buku ini cukup baik walaupun di sana-sini ditemukan kesalahan. Pada umumnya, seperti halnya buku-buku yang lain juga, buku-buku ini belum menaati ketentuan-ketentuan dalam buku pedoman ejaan baru dengan baik.

Kesimpulan

Bahasa yang dipakai cukup baik dan mudah dipahami. Namun, supaya buku menjadi lebih sempurna, bahasa dan ejaan perlu diperbaiki lagi.

Buku Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karangan Deden Candrasubrata, dan Kawan-kawan

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga termasuk bidang pelajaran keterampilan khusus. Buku PKK susunan Deden C. dan kawan-kawan ini banyak digunakan di Jawa Barat. Cetakan pertama tahun 1974, tetapi pada tahun 1978 telah mengalami cetak ulang ke-5; terbitan Yayasan Karya Bhakti Bandung. Buku terdiri atas 4 jilid untuk kelas III-VI.

Jika dibandingkan dengan buku-buku yang sudah saya bicarakan, buku-buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia yang sangat buruk. Penulisnya sama sekali tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Kalimat langsung dan kalimat tak langsung bercampur tidak keruan dalam penggunaannya. Ejaan dan tanda-tanda baca penuh dengan kesalahan yang tidak seharusnya dibuat oleh seorang penulis buku pelajaran.

Supaya ada gambaran tentang bahasa buku-buku ini saya kutip di bawah ini sebagai bacaan.

Di Kelas Tiga

Anak-anak kelas 3 SD. "Pelita" sudah duduk di bangkunya masing-masing. Mereka baru naik dari kelas 2. Di kursi guru sudah nampak duduk bapak Guru. Mereka heran, mengapa bukan Bu Elli yang duduk?

Tiba-tiba Pak Guru berdiri dan beliau berkata: "Anak-anak di kelas 3 kamu tidak diajar oleh Bu Elli lagi, seperti di kelas 2, tetapi oleh bapak". Karena itu kamu akan diajarkan oleh bapak dan bapak belum berkenalan dengan kalian, marilah kita berkenalan dahulu. Lalu pak guru mengenalkan dahulu namanya, nama bapak "Pak Daman".

(jilid I, Pel. I, halaman 3)

Selanjutnya halaman 7:

Begini sahut pak guru, "Kalian boleh mencalonkan paling banyak 5 orang ketua kelas, pilih saja calon yang kalian pikir bisa membantu pekerjaan bapak". "Benni pak" kata Anna, jangan pak, Roby saja kata Yeni masa laki-laki saja kata Dede, tuh si Rika juga bisa.

"Ssst diam, coba bapak akan tulis calon-calon yang kalian jagokan itu dipapan tulis" Pak Guru menulis nama 5 orang anak yang dicalonkan oleh anak-anak dipapan tulis ialah Benni, Roby, Rika, Priatna dan Yayan.

"Masa sampai 5 orang yang menjadi ketua kelas" kata si Atung "Eh, dasar si Bego, tidak mendengarkan kata" kata Rahmat ini baru calon.

Kedua kutipan di atas cukup membuktikan betapa buruknya bahasa yang digunakan dalam buku PKK susunan Deden C. dan kawan-kawan itu. Buku-buku ini bukan membina bahasa murid, melainkan sebaliknya merusak. Buku seperti itu seharusnya dilarang beredar sebab benar-benar memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap bahasa murid. Kesimpulan tidak perlu lagi.

Kesimpulan Umum dan Strategi yang Perlu Dikembangkan dalam Peningkatan Mutu Pemakaian Bahasa Indonesia

Buku-buku paket terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan terjaga. Yang masih perlu diperbaiki ialah ejaan yang belum menaati secara penuh ketentuan yang tercantum dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*.

Pemahaman murid-murid tidak sama. Murid-murid yang diam di pinggiran kota dan di pedalaman, yang di rumah dan dalam lingkungan hidupnya sehari-hari menggunakan bahasa daerah, lebih lambat dan lebih sukar memahami bahasa Indonesia yang dipakai dalam buku-buku pelajaran. Sebaiknya, buku untuk mereka dibedakan daripada buku yang dipakai oleh murid-murid di kota-kota besar.

Penulisan buku-buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SD seyogianya memperhatikan dan mengindahkan masalah interferensi yang ditimbulkan oleh pengaruh bahasa daerah dan dialek.

Untuk meningkatkan penguasaan bahasa Indonesia murid-murid terutama murid-murid di pinggiran kota dan di pedalaman, harus diusahakan agar selama di sekolah murid-murid tidak menggunakan bahasa daerah melainkan bahasa Indonesia.

Tiap sekolah seharusnya memiliki perpustakaan dengan buku-buku yang cukup. Dengan banyak membaca penguasaan bahasa murid bertambah, perbendaharaan bahasanya menjadi kaya.

Sebaiknya sekolah-sekolah tidak hanya memegang satu macam buku, yaitu buku paket. Buku-buku lain yang baik dapat dipakai di samping buku paket seizin dan sepengetahuan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Hal itu dapat mendorong semangat masyarakat untuk berkarya dan memberikan sumbangsinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Sebaiknya di tiap wilayah (propinsi) ada tim peneliti buku. Tim peneliti buku jangan hanya dipusatkan di ibu kota saja.

Sudah waktunya melakukan penelitian terhadap semua buku pelajaran yang kini beredar dalam masyarakat dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan atas. Buku yang tidak memenuhi syarat seharusnya dilarang pemakaiannya di sekolah-sekolah. Buku itu dapat diedarkan kembali bila telah diperbaiki dan diteliti oleh tim peneliti serta dinyatakan dapat dipakai.

IKIP setempat dapat juga diserahi tugas meneliti buku-buku pelajaran itu. Saran-saran peneliti tim IKIP itu dapat dipakai oleh kantor wilayah setempat menetapkan mana buku yang memenuhi syarat dan mana yang tidak.

Mudah-mudahan kertas kerja ini dapat memberikan sumbangan walaupun sedikit kepada usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pendukung kebudayaan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1976. *Kurikulum Sekolah Dasar 1975*. Jakarta.
- , 1972. *Pedoman Umum Matematika*. Jakarta.
- , 1972. *Pedoman Guru Buku "Manusia dan Alam Sekitarnya"*. Jakarta.
- , 1975. *Pedoman Guru Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta.
- , 1974. *Bahasa Indonesia, Belajar Membaca dan Menulis 2a*. Jakarta.
- , 1975. *Bahasa Indonesia, Belajar Membaca dan Menulis 1a, 1b, 1c, 2b, 2c*. Jakarta.
- , 1975. *Bahasa Indonesia, Pelajaran, 4a, 4b*. Jakarta.
- , 1976. *Bahasa Indonesia, Pelajaran Bahasa, 3a, 3b, 3c*. Jakarta.
- , 1972. *Matematika, 4b, 5a, 5b*. Jakarta.
- , 1973. *Matematika, 6a, 6b*. Jakarta.
- , 1975. *Matematika, 1a, 1b*. Jakarta.
- , 1976. *Matematika, 2a, 2b, 3a, 3b*. Jakarta.
- , 1973. *Pedoman Khusus Matematika 5b*. Jakarta.
- , 1976. *Manusia dan Alam Sekitarnya, 1, 3*. Jakarta.
- , 1977. *Manusia dan Alam Sekitarnya 2*. Jakarta.
- , 1977. *Ilmu Pengetahuan Sosial, 1, 2*. Jakarta.
- Halian, Baidilāh, B.S., et al. 1976. *Bahasa Kita, Pelajaran Bahasa 1b*. Bandung: Remaja Karya.
- , 1977. *Bahasa Kita, Pelajaran Bahasa, 1a, 2b*. Bandung: Remaja Karya.
- , 1978. *Bahasa Kita, Pelajaran Bahasa, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b*. Bandung: Remaja Karya.
- Mugiyana, B.A., et al. 1975. *Ilmu Pengetahuan Sosial, 5a, 6a*. Solo: Tiga Serangkai.

- Marzuki HA, *et al.* 1976. *Sari Ilmu Bumi Jawa-Madura*. Solo: Tiga Serangkai.
- . 1977. *Sari Ilmu Bumi Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai.
- . 1976. *Sari Panca Benua*. Solo: Tiga Serangkai.
- . (?). *Sari Sejarah Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai.
- Ahmadi, Abu, 1977. *Pendidikan Moral Pancasila (PMP)*, jilid I. Semarang: CV Toha Putra.
- . 1978. *Pendidikan Moral Pancasila (PMP)*, jilid 2, 3, 4, 5, 6. Semarang: CV Toha Putra.
- Candrasubrata, Deden. *et al.* 1977. *Sari PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. Bandung: Yayasan Karya Bhakti.
- . 1978. *Sari PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. Bandung: Yayasan Karya Bhakti.

BAHASA INDONESIA DAN PEMBINAAN MINAT BACA

Oejeng Soewargana

”Bagaimana ragam bacaan anak-anak yang tersebar di Indonesia dewasa ini jika ditinjau dari sudut pandangan mutu dan mutu pemakaian bahasa Indonesia?”

Mengingat sangat terbatasnya waktu dan biaya yang dapat disediakan oleh penulis, penelitian hanya dapat dilakukan di kota Bandung dan sekitarnya saja dan anak-anak yang diteliti hanya terdiri dari murid sekolah dasar kelas 1 yang berumur 6 atau 7—8 atau 9 tahun, murid SD kelas 6 umur 12 atau 13—14 atau 15 tahun.

Penelitian yang diadakan oleh penulis di beberapa toko buku di kota Bandung dan sekitarnya menunjukkan bahwa bacaan anak-anak murid sekolah dasar itu dapat dibagi dalam 4 macam kelompok seperti diuraikan di bawah ini.

- a. Bacaan anak-anak berbentuk majalah, termasuk di dalamnya bahan bacaan khusus untuk anak-anak yang terdapat dalam berbagai warta harian. Dalam 5 tahun yang terakhir ini banyak majalah anak-anak yang diterbitkan dengan ilustrasi berwarna, yang dibeli hak ciptanya dari luar negeri, seperti majalah *Bobo* dan *Eppo* yang aslinya diterbitkan di negeri Belanda. Mutu majalah anak-anak yang mempergunakan bahan ceritera maupun ilustrasi yang dibeli dari luar negeri itu dapat dianggap sudah setaraf dengan mutu majalah anak-anak di luar negeri.

- b. Buku komik, baik yang khusus disusun untuk anak-anak maupun buku komik umum, yang dalam praktiknya sangat digemari oleh anak-anak. Di antara buku komik untuk anak-anak itu ada yang mempergunakan bahan ilustrasi dari luar negeri, seperti penerbit Bruguera (Barcelon, Spanyol) dan dari *Indian Book House* (Bombay, India), yang di Indonesia diterbitkan oleh Gramedia. Ceritanya diambil dari literatur internasional, seperti karangan Jonanthan Swift, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Mark Twain, Silus Mahabharata. Indira menerbitkan komik seri *Tintin* yang hak ciptanya didapat dari Casterman (Belgia). Mutu buku komik anak-anak itu dapat dikatakan setaraf dengan kualitas buku komik di luar negeri. Akan tetapi, sebagian besar dari buku komik anak-anak itu, baik isi maupun lukisannya buatan artis Indonesia, meskipun ceriteranya sering diambil dari literatur internasional seperti dari dongeng karangan Hans Christian Andersen, dari Gebroeders Grimm, ceritera Robin Hood, Tarzan, yang diterbitkan oleh penerbit Rajawali Emas dan Sanggar Karya. Komik wayang, baik komik ceritera bersejarah maupun komik dongeng rakyat dari berbagai daerah Indonesia, seperti *Si Malin Kundang*, *Sangkuriang*, *Watu Gunung* tampaknya masih tetap dapat bertahan meskipun sudah ada saingan dari komik buatan luar negeri. Kualitas gambarnya tampak telah ditingkatkan.
- c. Buku ceritera, baik ciptaan sastrawan zaman sekarang maupun ceritera rakyat yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Yang paling banyak menerbitkan buku ceritera untuk anak-anak SD itu adalah penerbit Gramedia dan Cypress. Mulai tahun 1975 muncul beberapa puluh buku ceritera untuk anak-anak, misalnya, yang diambil dari *Dongeng 1001 Malam* dengan ilustrasi berwarna penuh (4 macam warna) yang tinggi sekali kualitasnya. Hak ciptanya dibeli dari penerbit luar negeri. Di antaranya diterbitkan oleh Penerbit Ganaco/Masabaru, Cypress, dan Eka jaya.
- d. Buku bacaan informatif (*information books*) untuk anak-anak berisi ilmu pengetahuan yang diuraikan secara populer dan sederhana sekali dengan ilustrasi berwarna yang sangat bagus dibeli hak ciptanya dari Macdonald Educational, Macmillan Educational, Malipiero, Grosset dan Dunlap, dan dari penerbit yang lain di luar negeri. Kualitas buku Informatif untuk anak-anak itu tidak jauh berbeda dari mutu bukunya yang asli.

Bahasa Indonesia yang dipakai dalam buku bacaan anak-anak itu umumnya bahasa Indonesia populer, artinya bahasa Indonesia yang biasa dipakai dalam percakapan masyarakat, yang ada kalanya menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia baku seperti yang dikemukakan oleh Dr. Yus Badudu dalam siaran TVRI.

Pada penulis atau para penerbit buku anak-anak itu rupanya lebih mengutamakan selera pembaca daripada mengikuti ketentuan dalam tata bahasa Indonesia yang dipakai itu sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu Umum yang dipakai dalam buku *Matahari Terbit* di zaman kolonial Belanda. Ungkapan-ungkapan seperti *mengenakan topi, di tengah jalan (on his way)* sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan *memakai topi, di jalan*, dan sebagainya. Demikian juga kata-kata Melayu seperti *dawat, pekan, lepau*, dan *pinsil* sudah tergeser oleh kata-kata *tinta, minggu, warung*, dan *potlot*.

Bilamana kita teliti kata-kata yang sekarang dipakai dalam buku dan terutama dalam masalah anak-anak mungkin kita akan tercengang menyaksikan betapa banyak kata-kata dialek Jakarta (yang dalam kamus Purwadarminta masih diberi tanda "J" di belakangnya) dipakai orang, seperti :

apes, brewok, binal, binatu, bogem, celetuk, ciut, dekil, dobrak, dongkol, enjot-enjotan, gebuk, gegabah, gelagapan, setru bebuyutan, genit, gerayang, gesit, getol, gondrong, jambret, jangkung, jejak, jeli, keki, laler, mandek, melotot, mercon, ngaco, ngawur, nongkrong, nyengir, nyolong, pelit, penasaran, pikun, ringsek.

Demikian juga kata-kata yang beraasal dari bahasa Jawa (yang dalam kamus Purwadarminta masih memakai tanda "Jw" di belakangnya) sudah banyak yang dipakai dalam buku dan majalah anak-anak, seperti :

alit, ampuh, antek, awet, bobol, budek, butek, cantel, cantol, dengkul, gondol, kelabang, kencur, kesandung, ketemu, lugu, luwes, merem, meringis, mondok, sembrono, semrawut, separo, sesepuh, trampil, tunakarya, tunarungu, tunatetra, ugal-ugalan.

Jargon dari dunia kampus perguruan tinggi juga sudah banyak yang masuk dalam literatur untuk anak-anak, seperti :

ngebut, nyontek, nangkring, ngorbit, semau gue, bloon, asoy, nyentrik, cewek, cowok, bego, sok.

Sebaiknya kita pikirkan dan kita perhitungkan dari sekarang bahwa kata-kata yang dewasa ini masih dianggap "bahasa dialek", yang dalam kamus Purwadarminta masih diberi tanda "J" untuk dialek Jakarta dan tanda "Jw" untuk dialek Jawa pada suatu ketika, tidak terlalu lama lagi, akan terpaksa kita masukkan dalam khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia baku; dan memang demikianlah umumnya jenjang perkembangan bahasa di mana pun di dunia ini.

Bagaimanakah luas penyebarannya ?

Setelah diadakan penelitian yang cukup seksama dapatlah diketahui bahwa taraf minat baca murid SD dari kalangan orang berada yang umumnya bersekolah di pusat kota jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasrat membaca rekannya anak-anak yang bersekolah di pinggir kota. Lebih menyolok lagi perbedaan itu jika dibandingkan dengan murid SD kampung-kampung, yang jauh dari kota Bandung dan jauh pula dari jalan besar.

Sebenarnya keadaan SD negeri yang berada di tengah kota Bandung pun masih jauh dari memuaskan. Di seluruh kota Bandung hanya ada 2 gedung sekolah SD yang dihuni oleh satu SD negeri, yaitu SD Percobaan, yang ada di Jalan Sabang dan yang ada di Jalan Pegajalan, yang dikelola langsung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selebihnya semua gedung sekolah itu dihuni oleh dua SD atau lebih.

Gedung bekas *Leerschool* HIS Banjarsari, ketika penulis sebagai *Kwekeling* dahulu pernah mengajar, dan yang sekarang masih tetap dianggap sebagai SD negeri pilihan yang paling baik, sekarang dihuni oleh 4 SD negeri. Demikian juga gedung bekas *Europese Meisjes Lagere School* di Jalan Merdeka di dekat jalan kereta api, yang juga termasuk SD favorit sama saja dihuni oleh 4 SD negeri. Dalam laporan resmi dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat keadaan itu dinyatakan sebagai 2 gedung sekolah yang berdekatan letaknya, yang masing-masing dihuni oleh 2 SD negeri.

Gedung SD yang berada di Jalan Soka dihuni oleh 6 SD negeri, sedangkan kompleks gedung sekolah yang ada di dekat Pasar Cicadas dihuni oleh tidak kurang dari 12 SD negeri. Memang sungguh keterlaluhan!

Situasi demikian jelas tidak menguntungkan bagi pengajaran bahasa Indonesia dan pembinaan minat baca anak didik. Keadaannya terlalu ramai, anak didik tidak dapat membaca dengan tenang, dan perpustakaan sekolah tidak dapat diselenggarakan dengan baik karena tiap-tiap ruang kelas dipakai bersama-sama secara bergantian oleh beberapa sekolah.

Mata pelajaran yang lain juga sama saja tidak dapat diberikan sebagaimana mestinya menurut metode mengajar yang dianjurkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah jam pengajarannya juga sangat kurang, maksimum rata-rata hanya antara 30 – 40% dari jumlah waktu yang ditetapkan dalam buku Kurikulum Tahun 1975.

Jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain sesungguhnya masih lebih untung keadaan pengajaran bahasa Indonesia karena di luar sekolah di kota Bandung itu masih terdapat cukup banyak perpustakaan swasta, baik yang bersifat *stasioner* maupun yang bergerak dibawa berkeliling dengan sepeda. Hanya sayang sekali hampir seluruhnya buku perpustakaan swasta itu terdiri dari buku komik. Mungkin dengan perhitungan bahwa buku komik itu lekas tamat dibaca sehingga para peminjam itu dapat lekas memilih buku yang lain. Yang paling disukai oleh anak didik di kota Bandung masih tetap komik wayang, di samping komik Tarzan dan komik *science fiction* meniru gaya ceritera Flash Gordon. Dan untuk dapat memahami serta menikmati buku komik itu tidak diperlukan kemahiran berbahasa Indonesia yang baik. Dari gambarnya saja anak didik itu dengan mudah sudah dapat menerka jalan ceritera.

Murid SD yang tinggal di pinggir kota serta kampung-kampung, yang letaknya jauh dari kota dan dari jalan besar, sebagian besar terdiri dari anak keluarga yang berpenghasilan sangat rendah, umumnya termasuk orang miskin. Kesempatan untuk membaca hampir tidak ada. Setiap hari waktu terluang sebelum atau sesudah masuk sekolah harus mereka manfaatkan untuk membantu pekerjaan ibu-bapaknya, atau untuk turut berusaha, seperti menjaga dagangan atau menjajakannya, mencari kayu bakar, menggembalakan kambing piaraannya, dan lain-lain pekerjaan yang kiranya dapat menambah penghasilan keluarga. Di samping itu, penerangan di rumahnya, yang biasanya terdiri dari lampu tempel minyak tanah, umumnya sangat buruk sehingga anak-anak itu pada malam hari sama sekali tidak dapat membaca.

Adakah hubungan antara pengajaran bahasa Indonesia dengan pembinaan minat baca ?

Selain disebabkan oleh faktor-faktor ekonomis dan keadaan sosial dalam lingkungan hidupnya yang sangat buruk itu, kemampuan penguasaan bahasa Indonesianya juga tampak besar sekali pengaruhnya pada minat baca murid SD dari kalangan keluarga miskin itu. Ketika dicoba disodori buku dan diajak untuk membaca mereka tidak tampak mempunyai hasrat. Mungkin karena mereka malu atau belum terbiasa untuk membaca buku perpustakaan. Setelah diamat-amati cukup lama dan kemudian diwawancarai ternyata mereka tidak berminat untuk membaca buku itu karena mereka tidak memahami isinya. Hanya buku komiklah yang menarik perhatian mereka karena dengan melihat lihat gambarnya saja jalan ceriteranya sudah dapat diketahuinya. Teristimewa

"komik wayang", yang semua tokoh-tokohnya ternyata dengan mudah dapat dikenalnya. Kalimat dalam buku-buku komik itu semuanya pendek-pendek, mempergunakan pola kalimat yang sederhana sekali, dengan kata-kata yang sangat terbatas, baik jumlah maupun macamnya; lagi pula seringkali diulang-ulang. Jadi, dapat dipahami jika bahasa Indonesia dalam buku komik itu sangat mudah untuk dikuasai. Demikian juga buku yang berilustrasi indah berwarna dibuka-bukanya dengan muka yang berseri-seri. Mereka tampaknya dapat mengagumi gambar-gambarnya yang bagus itu, tetapi ternyata tidak tergerak hatinya untuk meminjam buku itu untuk dibacanya.

Yang dilukiskan di atas itu adalah keadaan yang umum, reaksi yang bersifat rata-rata. Di antara anak didik itu tentu saja ada juga pengecualiannya.

Mengingat uraian di atas, sebaiknya kita harus menyadari dan harus memperhitungkan benar adanya perbedaan yang sangat menyolok dalam kemampuan penguasaan bahasa Indonesia di antara kedua macam golongan murid SD itu.

- a. Murid SD yang di dalam lingkungan hidupnya sehari-hari hampir tidak pernah berbahasa Indonesia, lagi pula jarang sekali mendengarkan orang berbicara dalam bahasa Indonesia. Murid itu rendah sekali kemampuan penguasaan bahasa Indonesianya. Mereka terdapat di SD yang letaknya agak jauh dari kota dan jauh pula dari jalan besar sehingga mereka itu sangat kurang mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan "dunia luar".
- b. Murid SD yang dalam kehidupannya sehari-hari sudah terbiasa bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Mereka terutama terdapat di kota-kota besar, di lingkungan masyarakat yang bersifat heterogin, yang terdiri dari beberapa keluarga dari berbagai suku, seperti di asrama dan kompleks perumahan ABRI, atau di kompleks perumahan pegawai negeri atau swasta yang seringkali berpindah-pindah tempat bekerja. Juga di lingkungan masyarakat keturunan Cina yang tinggal di daerah pertokoan dan di kalangan keluarga yang suami istrinya berasal dari suku bangsa yang berbeda. Dapat dipahami jika kemampuan berbahasa Indonesia murid SD dari golongan ini tinggi sekali karena untuk mereka bahasa Indonesia itu sudah merupakan semacam bahasa ibu (*mother tongue*).

Bagaimanakah pengajaran bahasa Indonesia dewasa ini dalam hubungan dengan usaha pembinaan minat baca ?

Mengingat kenyataan eksistensi kedua macam golongan murid SD dengan

latar belakang lingkungan hidup yang tidak sama sehingga kemampuan berbahasa Indonesia berbeda secara menyolok sekali, maka kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyamaratakan atau menggeneralisasikan semua murid SD di seluruh Indonesia itu adalah keliru sekali dan harus lekas dikoreksi.

Sebagaimana umum maklum pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar di negara kita dewasa ini diberikan dengan metode yang sama di semua SD di seluruh Nusantara dengan mempergunakan buku yang sama pula, yaitu seri buku *Bahasa Indonesia*, yang diterbitkan dan disebarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijaksanaan itu memang sejalan dengan apa yang tertulis dalam buku Kurikulum Tahun 1975, yang sama sekali tidak memperhitungkan adanya perbedaan penguasaan bahasa Indonesia yang menyolok itu di antara murid SD.

Pengajaran membaca permulaan pun diberikan kepada semua murid SD di seluruh Indonesia, yang baru saja masuk sekolah, dengan metode Struktural Analitis Sintetis yang sama dengan mempergunakan buku yang sama pula padahal banyak murid SD di kampung-kampung yang jauh dari kota dan dari jalan besar, baik yang tinggal di lereng gunung maupun di tepi pantai, yang belum pernah mendengar orang berbicara bahasa Indonesia dalam lingkungan hidupnya waktu mereka pertama kali masuk sekolah.

Suatu fenomena umum yang terjadi di mana saja dan dengan bahasa apa saja di dunia adalah pengaruh interferensi antara bahasa ibu yang sudah dikuasainya dan bahasa baru (atau bahasa kedua) yang dipelajarinya.

Jika kita mengadakan penelitian dengan seksama, akan dapat diketahui bahwa pengaruh interferensi itu bekerja timbal-balik. Penguasaan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh interferensi bahasa ibu, tetapi sebaliknya, penguasaan bahasa ibunya pun dipengaruhi oleh interferensi bahasa Indonesia.

Dari hasil penelitian penulis yang dilakukan di beberapa SD yang berada di luar kota Bandung ternyata pemakaian bahasa Indonesia murid SD itu kuat sekali dipengaruhi oleh bahasa Sunda. Murid SD itu membuat kesalahan-kesalahan dalam pemakaian bahasa Indonesia seperti berikut.

a. Dalam pelafalan dan penulisan kata-kata :

<i>loceng</i>	seharusnya	<i>lonceng</i>
<i>ruksak</i>	seharusnya	<i>rusak</i>

<i>dangdan</i>	seharusnya	<i>dandan</i>
<i>janji</i>	seharusnya	<i>janji</i>
<i>nongton</i>	seharusnya	<i>nonton</i>
<i>pipah</i>	seharusnya	<i>pipa</i>
<i>mampuh</i>	seharusnya	<i>mampu</i>
<i>iket</i>	seharusnya	<i>ikat</i>
<i>pager</i>	seharusnya	<i>pagar</i>
<i>karinget</i>	seharusnya	<i>keringat</i>

b. Dalam pembentukan kata-kata :

<i>nyuci</i>	seharusnya	<i>mencuci</i>
<i>nyari</i>	seharusnya	<i>mencari</i>
<i>ngambil</i>	seharusnya	<i>mengambil</i>
<i>ditaikkan</i>	seharusnya	<i>menaikkan</i>
<i>dihafalkan</i>	seharusnya	<i>dihafal</i>
<i>dipasak</i>	seharusnya	<i>dimasak</i>

c. Dalam pemakaian ungkapan-ungkapan :

<i>dibeli oleh saya</i>	seharusnya	<i>saya beli</i>
<i>yang baik duduknya</i>	seharusnya	<i>duduklah baik-baik</i>
<i>yang mana yang benar</i>	seharusnya	<i>manakah yang benar</i>
<i>menurun</i>	seharusnya	<i>mencontoh atau me- niru</i>
<i>ditungtut</i>	seharusnya	<i>dicicil</i>

Sebaliknya, di kalangan murid SD yang beribu-bapak orang Sunda dan di rumahnya berbahasa Sunda, tetapi di sekolahnya dan dengan teman mainnya sehari-hari berbahasa Indonesia, tampak sekali pengaruh interferensi bahasa Indonesia itu dalam penguasaan bahasa Sundanya. Malah di kalangan

para mahasiswa perguruan tinggi juga, yang sebenarnya sudah cukup mendapat pengajaran tata bahasa, rupanya pengaruh interferensi itu tidak dapat diatasi sehingga dengan kecepatan yang cukup mencemaskan para ahli bahasa Sunda. Tumbuhlah akibat interferensi bahasa Indonesia itu apa yang oleh Mama Satjadibrata almarhum sebut *Basa Sunda Kamalayan*. Dan mengerti-lah kita bilamana para pemain utama dalam sandiwara Sunda "Si Kabayan", yang disiarkan oleh TVRI, mempergunakan bahasa Sunda yang sudah sangat bercampur aduk. Malah sebenarnya sudah lebih banyak unsur bahasa Indonesi-anya daripada unsur bahasa Sundanya.

Sebagai contoh di bawah ini disampaikan beberapa kesalahan pemakaian bahasa Sunda, yang disebabkan pengaruh interferensi bahasa Indonesia, seperti :

<i>henteu jelas</i>	seharusnya	<i>henteu jentre</i>
<i>caina ngalir</i>	seharusnya	<i>caina ngocor</i>
<i>lampuna nyala</i>	seharusnya	<i>lampuna caang</i>
<i>ditabung</i>	seharusnya	<i>dicengcelengankeun</i>
<i>tulisan dihapus</i>	seharusnya	<i>tulisan dipupus</i>
<i>budak buta</i>	seharusnya	<i>budak lolong</i>
<i>anu menta-menta</i>	seharusnya	<i>anu baramaen</i>

Untuk dapat meningkatkan minat baca anak didik, terlebih dahulu kita harus meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa Indonesia anak-anak itu. Dengan meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa Indonesiannya, akan meningkat pulalah mutu selera bahasanya. Dengan jalan meningkatkan kemampuan anak didik untuk memahami dan untuk merasakan keindahan bahasanya dapat diharapkan akan meningkat pula hasratnya untuk membaca. Tentu saja peningkatan minat baca anak didik itu harus disertai peningkatan sarananya, berupa perbaikan tempat belajar dan tempat membaca, dan perbaikan penyediaan materinya berupa perpustakaan yang lengkap dan bermutu. Akan tetapi, jelas titik tolak harus dimulai dengan perbaikan metode pengajaran bahasa Indonesiannya dulu termasuk perbaikan buku pengajarannya, yang harus diikuti pula oleh perbaikan kemampuan gurunya yang akan melaksanakan metode serta memakai buku pelajaran baru itu.

Strategi apakah yang seyogianya dikembangkan dalam hubungan pokok ini?

Dalam memikirkan strategi pengajaran bahasa Indonesia SD di negara kita, terlebih dahulu kita harus menyadari dan harus memperhitungkan dahulu dengan tegas dan tepat kenyataan adanya realitas dua problematik yang akan diuraikan di bawah ini.

- a. Kenyataan adanya dua macam golongan murid SD dengan perbedaan kemampuan penguasaan bahasa Indonesia yang menyolok sekali, yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan hidupnya. Ada golongan yang dalam kehidupannya sehari-hari sudah biasa berbahasa Indonesia dan ada pula golongan murid SD yang sebelum masuk sekolah tidak pernah berbahasa Indonesia dalam lingkungan hidupnya. Mereka hanya berbahasa daerah saja sebagai bahasa ibunya.
- b. Kenyataan adanya pengaruh interferensi bahasa yang kuat sekali dan bersifat timbal-balik, antara bahasa Indonesia sebagai "bahasa kedua" dan bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu murid SD. Karena pengaruh interferensi bahasa itu, dalam kenyataannya kesukaran yang dihadapi murid SD dalam pelajaran bahasa Indonesia itu semuanya disebabkan oleh pengaruh bahasa ibu yang sudah dikuasainya, yang menimbulkan kekacauan yang membingungkan. Murid SD yang belajar bahasa Indonesia itu sering sekali tidak dapat membedakan, baik antara struktur kata maupun struktur kalimat bahasa Indonesia baku dari bahasa daerah standar menurut ketentuan tata bahasa yang berlaku. Tidak menjadi soal bahasa daerah mana yang telah dikuasainya, pengaruhnya tetap dapat membingungkan sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan. Pada para pembesar di Jakarta pun yang sudah mendapat cukup pengalaman dan cukup pendidikan dapat diketahui bahwa kesalahan yang mereka buat itu semuanya disebabkan pengaruh interferensi bahasa daerahnya. Sudah dimaklumi umum bahwa kesalahan yang dibuat oleh mereka yang dilahirkan dan dibesarkan di Jawa Tengah adalah pengaruh bahasa Jawa, seperti pada contoh berikut ini.

Itu gelasnya siapa ?

Bolehnya pulang besok kapan ?

Saya tidak mengerti kalau Bapak sudah pulang.

Rumahnya A Tjay di Pluit yang besar sendiri.

Bolehnya bicara dengan siapa?

Anak-anak pada lari.

Buku saya tidak ketemu.

Si Salim ketabrak beca.

Pak Dr. Sudjiran mengajar ilmu bumi.

Pak Adam Malik mengganti Pak Sultan.

Jika kenyataan adanya dua problema itu sungguh-sungguh kita sadari, kita tidak akan menggeneralisasikan atau menyamarkan semua murid SD di seluruh Nusantara itu dalam pengajaran bahasa Indonesia. Malah sebaliknya, sebagai konsekuensi dari kesadaran akan adanya dua problema itu, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut.

a. Dalam penyusunan bahan pelajaran dan dalam pemilihan metode mengajar kita akan berpijak pada dua jalur kebijaksanaan berikut.

- (1) Khusus untuk murid SD yang dalam kehidupannya sehari-hari belum pernah atau belum banyak mengenal bahasa Indonesia, kita susun semacam metode pengajaran bahasa kedua atau bahasa baru. Dalam bahasa Inggris disebut *teaching a new language as a second language*, atau dalam bahasa Belanda *een vreemde of nieuwe taal methode*. Kita tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa bahasa Indonesia untuk murid SD dari golongan ini termasuk bahasa baru atau bahasa kedua, sesudah bahasa daerah yang sudah dikuasainya. Seperti dalam buku pelajaran bahasa Inggris *as a second language*, dalam langkah pertama untuk golongan ini sebaiknya kita memperkenalkan dahulu berapa kata dasar (*basic words*), yang kemudian baru disuruh disusun menjadi kalimat-kalimat pendek yang sederhana. Dalam seri *Bahasa Indonesia* susunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang dipakai disemua SD di seluruh Nusantara, dari permulaan dalam jilid-jilid yang pertama pun bahasa Indonesia itu sudah disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Malah dalam pengajaran membaca permulaannya juga kepada murid SD yang baru saja masuk sekolah, bahan bacaan itu sesuai dengan prinsip metodenya, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang berstruktur. Kalimat-kalimat itu terus diuraikan atau dianalisis supaya tercapai suku kata dan kata untuk akhirnya dapat dikenal huruf-hurufnya. Kemudian huruf-hu-

ruf itu dirangkaikan atau disintesis kembali sehingga akhirnya kembali terbentuk kalimat-kalimat berstruktur tadi. Berdasarkan prinsip "kupasrangkai" atau "analisis sintesis" yang dimulai dari kesatuan atau globalitas struktur kalimat, maka metode itu disebut metode struktur analisis sintesis atau disingkat SAS. Kalau kita memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan bahasa murid SD di kampung-kampung yang jauh dari kota, yang semuanya belum mengenal bahasa Indonesia, maka sebaiknya pelajaran membaca permulaan itu harus diberikan dalam bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu murid. Sayang sekali dalam hal ini pun semua murid SD itu oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan disamaratakan atau digeneralisasikan. Suatu kebijaksanaan yang benar-benar keliru! Anak-anak disuruh belajar membaca dalam bahasa yang belum dikuasainya! Di zaman kononial Belanda juga murid HIS itu belajar membaca dalam bahasa ibu murid!

- (2) Untuk murid SD yang dalam kehidupan sehari-harinya sudah biasa berbahasa Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia itu dapat diberikan dalam metode bahasa ibu, yang dalam bahasa Belanda disebut *moedertaal methode*. Oleh katena anak didik dari golongan ini sudah mempunyai kemampuan penguasaan bahasa Indonesia yang cukup baik dan sudah mengenal cukup banyak kata dasar (*basic words*) pengajaran bahasa Indonesia untuk mereka itu dapat langsung diberikan dalam bentuk ceritera pendek dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Kira-kira sama seperti buku pengajaran bahasa daerah (sebagai bahasa ibu murid) yang hingga sekarang dipakai di Indonesia. Atas pertimbangan sosial politik, menghindari pertentangan, tidak menyalahi ilmu jiwa atau ilmu pendidikan, pelajaran bahasa Indonesia di semua SD di seluruh Nusantara itu diberikan pada waktu yang sama, misalnya, dari murid SD itu mulai masuk bersekolah. Yang harus berbeda—d disesuaikan dengan kemampuan penguasaan bahasa Indonesia dari murid SD itu hanya bahan pelajaran dan cara atau metode mengajarkannya saja.

- b. Mengingat betapa kuatnya pengaruh interferensi bahasa daerah dalam pengajaran bahasa Indonesia, kita harus menyusun metode pengajaran bahasa

Indonesia yang memperhatikan kesukaran murid yang khas disebabkan oleh pengaruh bahasa daerah yang sudah dikuasainya. Sebagai langkah pertama, baiklah kita menyusun bahan pelajaran disertai bahan latihannya (*drill materials*), yang kita susun khusus untuk murid SD yang berbahasa daerah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura sebagai tiga kelompok bahasa daerah dengan jumlah pemakai yang paling besar di Indonesia.

Kita mengetahui bahwa suatu kesukaran yang benar-benar sulit untuk anak didik di Jawa Tengah, belum tentu sukar bagi murid di daerah Sunda. Sebaliknya, murid SD di tanah Sunda mempunyai kesukaran khas, yang tidak terasa oleh anak didik di Jawa Tengah. Ungkapan *Buku itu saya beli*, tidak sukar bagi murid SD di Jawa Tengah karena dalam bahasa Jawa juga mereka mempergunakan struktur yang serupa, yaitu *Buku itu ndak tuku*. Bagi anak Sunda ungkapan itu cukup sulit. Banyak yang membuat kesalahan dan mengatakan *Buku itu dibeli oleh saya* sejalan dengan struktur kalimat Sunda *Eta buku dibeuli ku kuring*. Sebaliknya, banyak orang Jawa yang membuat kesalahan dan mengatakan *yang besar sendiri* terpengaruh oleh kalimat Jawa *Sing gede dewek*. Bagi murid SD di tanah Sunda ungkapan itu tidak akan menimbulkan kesukaran sebab dalam bahasa Sunda juga mereka sudah biasa mengatakan *nu penggedena*. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan pengaruh interferensi bahasa daerah yang menimbulkan kesukaran-kesukaran khas dalam pengajaran bahasa Indonesia, sebaliknya kita menyusun metode pengajaran bahasa Indonesia itu berdasarkan prinsip *a contrastive approach in language teaching*, suatu landasan pemikiran yang dipelopori oleh Lado dalam disertasinya "Linguistics Across Cultures". Prof. Takdir Alisjahbana, yang sangat mendukung aliran itu lebih menyukai istilah *a differential approach in language teaching*. Gagasan yang sama — untuk memperhatikan kesukaran-kesukaran yang khas disebabkan oleh pengaruh interferensi bahasa daerah — pernah dikemukakan oleh Badudu (1978:7—12) dan oleh Burhan (1971:62—80) dari Direktorat Pendidikan Guru Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedang Rusyana dari IKIP Negeri Bandung menguraikan masalah interferensi bahasa Sunda dalam bahasa Indonesia itu dalam disertasinya. Mengingat pengaruh interferensi bahasa daerah dalam pengajaran bahasa Indonesia itu bersifat timbal balik, bahan latihan (*drill materials*) yang disusun khusus berdasarkan prinsip *a contrastive approach in language teaching* itu pasti akan mempunyai efek yang berarah timbal-balik pula. Latihan itu dapat disajikan dalam bentuk latihan perbandingan bahasa (*language comparison exercises*) yang berlainan sekali cara, sifat, atau tujuannya dengan latihan menerjemahkan dalam me-

tode terjemahan (*translation method*). Kata-kata dan ungkapan-ungkapan kedua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa daerah) dihadapkan dengan tujuan agar murid itu dapat mengenal dan dapat menghafal kedua bahasa itu dalam bentuknya yang benar dan yang baku (standar). Latihan itu tujuannya untuk menghilangkan keragu-raguan untuk dapat mengatasi kekacaulaluan (percampuradukan) yang disebabkan oleh dua bahasa yang serumpun (*cognates*) banyak hal yang serupa atau hampir serupa, sedangkan sesungguhnya berbeda. Harap jangan lupa bahwa sebagian besar dari kesalahan orang yang berbahasa Indonesia itu disebabkan oleh keragu-raguan sebagai akibat dari kekacaulaluan atau percampuradukan.

Latihan perbandingan bahasa untuk murid SD di tanah Sunda itu, misalnya, dapat disusun seperti di bawah ini.

Bandingkanlah dan perhatikanlah baik-baik

Bahasa Indonesia

lonceng

rusak

pagar

keringat

pipa

mampu

nonton

janji

dipimpin

cabai pedas

lada mahal

daging dimasak

tiang dipasak

Amin mencontoh

jalan menurun

menarik gerobak

Bahasa Sunda

loceng

ruksak

pager

karinget

pipah

mampuh

nongton

jangji

dipingpin

cabe lada

pedas mahal

daging dipasak

tihang dipaseuk

Amin nurun

jalan mudun

narik roda

<i>rodanya tiga</i>	<i>gilindingna tilu</i>
<i>burung gelatik</i>	<i>manuk galatik</i>
<i>orang gila</i>	<i>jalma burung</i>
<i>saya jijik</i>	<i>kuring gila</i>
<i>lega hatinya</i>	<i>bungangang hatena</i>
<i>sawahnya luas</i>	<i>sawahna lega</i>
<i>tidak sampai hati</i>	<i>henteu luas</i>
<i>membeli benang</i>	<i>meuli bola</i>
<i>menendang bola</i>	<i>nyepak bal</i>
<i>sawah dirabuk</i>	<i>sawah digemuk</i>
<i>badannya gemuk</i>	<i>awakna lintuh</i>
<i>saya beli</i>	<i>dibeuli ku kuring</i>
<i>duduklah baik-baik</i>	<i>sing sae calikna</i>

Setelah mengamati-contoh bahan latihan perbandingan bahasa yang disajikan di atas, mudah-mudahan menjadi jelas sekarang bahwa bahan latihan perbandingan bahasa semacam itu tidak saja akan dapat menjaga kemurnian bahasa Indonesia baku, tetapi sekaligus akan menjaga pula kemurnian bahasa daerah standar. Jelas bahan latihan itu dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kekacaubalauan untuk menjaga pengaruh percampuradukan. Berlainan sekali cara dan fungsinya dengan latihan menerjemahkan. Khusus untuk perkembangan bahasa Sunda—jika kita meminjam istilah almarhum Mama Satjadibrat—latihan perbandingan bahasa itu dapat menjaga perkembangannya *Basa Sunda Kamalayon*, yang dewasa ini sangat mencemaskan para ahli bahasa Sunda. Menurut dugaan penulis, kecemasan yang serupa dirasakan pula oleh para ahli bahasa Jawa, yang merasa ngeri menyaksikan perkembangan *Bahasa Jawa Kemelayu-melayuan* yang sangat cepat itu.

Epilog

Mungkin di kalangan para pembaca, setelah merenungkan uraian penulis di atas, timbul pikiran bahwa jalan yang dirasakan itu terlalu kompleks karena akan terlalu banyak ragam, apabila kita ingat jumlah bahasa daerah yang sudah didaftarkan saja banyaknya melebihi 250 buah.

Baiklah selalu disadari bahwa kita sebagai pendidik dan sebagai penyusun metode bagi anak didik kita dan bagi guru akan melaksanakannya harus terus-menerus mencari jalan yang paling mudah dan yang paling cepat memberikan hasil yang baik serta aman dalam arti kata yang dapat menjaga timbulnya kekacaubalauan dan pencampuradukan.

Kebetulan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang Dr. Daed Joesoef, dalam salah satu wawancara persnya sudah mengemukakan pendiriannya untuk lebih memperhatikan pembinaan bahasa daerah, yang dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia terbukti telah memberikan sumbangan yang luar biasa besarnya, sebagai sumber penggalian kata-kata dan ungkapan-ungkapan baru, yang telah dapat memperkaya dan meningkatkan kualitas kegunaan bahasa Indonesia itu. Apakah pembinaan serta kegunaan bahasa daerah itu tidak akan kita perhatikan sebagai mana mestinya? Apakah bahasa daerah juga tidak akan kita jaga agar eksistensinya terjamin tidak akan hanyut atau terbenam karena pengaruh interferensi bahasa Indonesia yang sangat kuat itu?

Sungguh suatu hikmah (yang sampai sekarang belum cukup dimanfaatkan) bahwa kita sudah mempunyai IKIP, baik negeri maupun swasta di semua propinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Lembaga IKIP itulah yang sebaiknya kita beri kepercayaan untuk melakukan penelitian dan penyusunan metode pengajaran bahasa Indonesia SD, yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta problem yang khas di daerah di antaranya disebabkan pengaruh interferensi bahasa-bahasa daerah di propinsi itu.

Janganlah segala sesuatu selalu diborong ditetapkan untuk kemudian dikomandokan dari Betawi saja. Biarlah para cerdik pandai di daerah itu diberi kesempatan yang lebih luas untuk berusaha dan berkarya jika kita benar-benar ingin mencapai perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh Indonesia yang lebih merata sesuai dengan isi wejangan Bapak Presiden dalam pidato kenegaraannya tanggal 17 Agustus 1978 yang balu lalu.

Memberikan kepada para cendekiawan di daerah lebih banyak tugas kewajiban serta lebih banyak tanggung jawab dalam penelitian dan pencarian bahan serta metode pengajaran yang lebih cocok dengan situasi, kondisi, problem, serta kebutuhan yang khas di daerah itu akan membangkitkan rasa harga diri dan menumbuhkan kepercayaan pada dirinya sendiri, yang akan sangat menguntungkan pembangunan keseluruhan rakyat dan negara secara lebih merata.

Atau

masih adak oknum-oknum yang tetap ingin memusatkan segala sesuatu pencarian dan penentuan metode itu di Jakarta saja, mungkin atas pertimbangan lain yang berada di luar bidang lima jiwa dan pendidikan ?



Kompleks gedung SD negeri di Jalan Cikutra, dekat Pasar Cicadas Bandung, yang dihuni oleh 12 SD negeri dengan jumlah murid 4142 anak.

Tambahan

- a. Gedung SD (bekas HIS Banjarsari)
di Jalan Merdeka 22, Bandung
dihuni oleh 4 SD negeri :
- SD 1, 8 kelas, rata-rata 50 murid per kelas
SD 2, 8 kelas, rata-rata 50 murid per kelas
SD 3, 8 kelas, rata-rata 50 murid per kelas
SD 4, 8 kelas, rata-rata 60 murid per kelas
- b. Gedung SD (bekas *Meisjes Europese Legere School*)
di Jalan Merdeka 5, Bandung
dihuni oleh 4 SD negeri :
- SD 1, 6 kelas, 404 murid rata-rata 67 murid per kelas
SD 2, 6 kelas, 403 murid, rata-rata 67 murid per kelas
SD 3, 7 kelas, 329 murid, rata-rata 47 murid per kelas
SD 4, 8 kelas, 403 murid, rata-rata 50 murid per kelas
- c. Gedung SD, dibangun sesudah Perang Dunia II
di Jalan Soka 34, Bandung
dihuni oleh 6 SD negeri:
- SD, 1 6 kelas, 316 murid, rata-rata 53 murid per kelas
SD 2, 6 kelas, 275 murid, rata-rata 46 murid per kelas
SD 3, 6 kelas, 299 murid, rata-rata 50 murid per kelas
SD 4, 6 kelas, 281 murid, rata-rata 47 murid per kelas
SD 5, 7 kelas, 323 murid, rata-rata 46 murid per kelas
SD 6, 6 kelas, 303 murid, rata-rata 50 murid per kelas
- d. Kompleks gedung SD, dibangun sesudah Perang Dunia II
di Jalan Cikutra, dekat Pasar Cicadas
dihuni oleh 12 SD negeri :
- SD 1, 6 kelas, 321 murid, rata-rata 54 murid per kelas
SD 2, 6 kelas, 339 murid, rata-rata 56 murid per kelas
SD 3, 7 kelas, 332 murid, rata-rata 47 murid per kelas
SD 4, 7 kelas, 422 murid, rata-rata 60 murid per kelas

- SD 5, 6 kelas, 309 murid, rata-rata 51 murid per kelas
 SD 6, 6 kelas, 351 murid, rata-rata 59 murid per kelas
 SD 7, 7 kelas, 340 murid, rata-rata 48 murid per kelas
 SD 8, 8 kelas, 428 murid, rata-rata 53 murid per kelas
 SD 9, 6 kelas, 321 murid, rata-rata 53 murid per kelas
 SD 10, 6 kelas, 318 murid, rata-rata 53 murid per kelas
 SD 11, 7 kelas, 323 murid, rata-rata 47 murid per kelas
 SD 12, 6 kelas, 328 murid, rata-rata 54 murid per kelas

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI

Astrid S. Susanto

Pendahuluan

Komunikasi merupakan suatu kegiatan sosial. Dalam kegiatan ini dikirim dan diterima lambang-lambang yang mengandung arti. Pemberian arti ini perlu "sama" agar pengirim lambang (komunikator) dan penerima lambang (komunikan) mengerti satu sama lain dan kegiatan komunikasi dapat berlangsung lebih lanjut. Dalam pemberian arti, segera timbul permasalahan: latar belakang sosial budaya, sistem nilai (dan kadang-kadang agama), tingkat sosioekonomi dan pendidikan, serta pengalaman pribadi dari komunikator atau pun komunikan. Komunikasi massa sebagai komunikasi dengan khalayak banyak, yang bersifat heterogen dan tidak dikenal oleh komunikator, lebih banyak bergumul dengan kesukaran ini yang mudah menjadi hambatan bagi komunikasi yang efektif. Selain itu, dalam proses komunikasi dipergunakan "bahasa". Bahasa adalah suatu alat untuk menyampaikan pikiran dan alat kontak sosial. Oleh karena itulah, dikenal istilah "bahasa ibu", yaitu bahasa yang dipelajari semenjak masa bayi manusia dan diperolehnya dari lingkungan keluarga kecil. Di samping itu, dikenal istilah-istilah bahasa daerah, bahasa pengantar, bahasa kolokial (bahasa yang tidak ditulis dan hanya dipahami artinya oleh selingkungan terbatas), bahasa jurnalistik, dan seterusnya. Masalah-masalah inilah yang merupakan hambatan-hambatan pertama dalam komunikasi, terutama apabila tidak diperhatikan unsur-unsur seperti konotasi terhadap suatu perkataan, unsur emosi yang selalu terlibat dalam suatu proses komunikasi. Dengan demikian, suatu "kegiatan komunikasi jarang sekali

hanya bersifat pembawa suatu informasi secara murni". Hal itu terutama terjadi karena mengandung unsur konotasi dan perasaan. Unsur perasaan dapat diketahui dari lagu dan gaya yang dipergunakan pada waktu komunikasi sedang berlangsung, pilihan kata yang dirangkaikan sehingga terumuslah pesan sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator.

Dalam bidang bahasa dikenal bentuk-bentuk prosa, puisi untuk lebih memberi penekanan kepada apa yang dirasakan oleh komunikator. Demikian pula diketahui bahwa situasi seringkali membuat komunikator menggunakan kiasan-kiasan. Hal ini banyak dipergunakan dalam membahas masalah-masalah yang dapat menimbulkan akibat politik, sebagaimana dapat disimpulkan dari syair-syair yang dikumpulkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 1977 dalam kumpulan *Antologi Syair Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama*.

Dalam membahas bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi massa, mau tidak mau perlu dibahas pula teater rakyat dan peranan unsur-unsur tradisional di dalamnya. Hal itu telah membuatnya suatu sarana komunikasi yang efektif, sebagaimana dikenal dari ludruk, ketoprak, dan lain-lain, yang kini juga menggunakan bahasa Indonesia. Dari contoh-contoh inilah dapat ditarik kesimpulan unsur apakah yang membuat komunikasi itu menjadi efektif dan efisien (dilihat dari partisipasi komunikan dalam proses komunikasi) ataupun pengaruhnya terhadap komunikan. Selain itu, perlu disinggung pula bentuk-bentuk kesenian lainnya, yang merupakan sarana komunikasi massa lainnya, yang menunjang atau dapat lebih memperjelas inti kegiatan komunikasi massa itu sendiri karena memang komunikasi sendiri "tidak" terbatas pada penggunaan bahasa sebagai wahananya, tetapi seringkali dari yang merupakan ekspresi perasaan menunjang dan mempertajam apa yang dimaksudkan, yang disampaikan melalui kata-kata. Sebaliknya, ekspresi melalui tari dan lain-lain yang "tidak dapat atau tidak boleh" diucapkan sehingga seringkali lebih efektif daripada penggunaan bahasa apa pun.

Faktor-faktor yang Memungkinkan Terwujudnya Komunikasi Efektif dan Efisien

Suatu bahasa yang muda seperti bahasa Indonesia mengalami kesukaran dalam menemukan istilah yang tepat, baik agar dapat mengungkapkan apa yang tersirat dalam lubuk hati maupun pikiran seseorang. Oleh karena itulah, seringkali dirasakan seakan-akan bahasa daerah sebagai "bahasa ibu" merupa-

kan "saingan" bagi perkembangan bahasa Indonesia. Untunglah bahwa kebijakan tentang kedudukan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia makin hari makin jelas, yaitu sebagaimana telah dikemukakan dalam GBHN 1978 pengarahannya bahwa "Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana identitas nasional". Dengan pengarahannya ini bahasa daerah (sebagai bahasa ibu) memperoleh tempat yang jelas. Selain itu, dalam *Penjelasan tentang Pasal 36 UUD 45* dikemukakan pula bahwa "daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, misalnya, bahasa Jawa, Sunda, atau Madura, bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Dengan pengarahannya di atas masalah yang dihadapi bahasa Indonesia sebagai "bahasa muda" dapat teratasi. Demikian pula kedudukan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia tidak perlu dipersoalkan lagi. Dengan demikian, bahasa daerah dapat membantu bahasa Indonesia dalam peningkatan efisiensinya dan efektivitasnya sebagai wahana komunikasi. Bahwa efektivitas bahasa dalam campurannya dengan bahasa daerah makin meningkat dapat dilihat dari berbagai teater rakyat.

Dari banyak observasi, kegiatan seperti antara lain yang banyak dilakukan oleh kelompok, baik *Srimulat*, *Palapa Group* dan *Surya Group* maupun *Bagio* dan kawan-kawan justru dapat dilihat bahwa efektivitas pesan terletak dalam campuran bahasa itu dan antara lain karena meningkatkan suasana lucu dan santai sehingga komunikasi lebih terbuka terhadap pesan yang akan disampaikannya itu.

Percampuran bahasa ternyata dapat *menembus hambatan bahasa*. Sebaliknya, dapat juga dilihat bahwa para seniman itu lebih kreatif, lebih efektif apabila mengadakan pentas di *lingkungan sosialnya sendiri* daripada bila ditugaskan (walaupun dengan honor yang lebih tinggi) di tempat-tempat terhormat, seperti Balai Sidang Jakarta. Di muka televisi pun mereka tidak seefektif bila dibandingkan dengan bila mereka berpentas di Surabaya daerah asal mereka.

Dilihat dari segi komunikasi, hal ini menjelaskan lagi bahwa bukan saja komunikasi, tetapi juga komunikator sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya karena bagi komunikator lingkungan sosial

sumber inspirasi dan improvisasinya. Demikian bagi komunikasi lingkungan dan latar belakang sosial budayanya merupakan *penyaring pesan-pesan* yang mencapainya dan tergantung apa yang dapat menembus saringan ini, seberapa jauh pesan akan efektif atau kurang efektif. Namun demikian, justru dari teater dapat dilihat bahwa milik juga dapat mengatasi hambatan bahasa dan karenanya komunikasi teater rakyat seringkali lebih efektif daripada komunikasi-komunikasi media massa modern. Selain itu, dalam teater rakyat, hubungan antara penonton dan pemain adalah hubungan "langsung"; penonton dan pelaku di panggung "berinteraksi satu sama lain". Demikian intensifnya interaksi antara pelaku dengan penonton sehingga bila milik pelaku tepat dan baik, seorang penonton yang tidak mengerti bahasa ibu pelaku dapat mengikuti cerita yang dipentaskan. Teater rakyat pada umumnya lebih efektif daripada media modern karena komunikator atau pelaku dan komunikan atau penonton kedua-keduanya berasal dari lingkungan yang sama: berlatar belakang budaya yang sama dan menggunakan bahasa yang sama. Dalam hubungan inilah bahasa Indonesia perlu mengembangkan diri sehingga arti yang diberikan kepada kata-kata hendaknya "sama". Dalam hubungan ini yang menarik adalah tulisan Samsuri (1975:15) yang mengatakan bahwa "suatu bahasa mencerminkan pertanian atau kebudayaan teknologi suatu masyarakat". Dalam hubungan ini Samsuri mengatakan bahwa komunikasi bahasa adalah :

- a. mencerminkan jalan pikiran pemakai,
- b. mencerminkan pengaruh kebudayaan terhadapnya, dan
- c. merupakan wahana hubungan individu dengan masyarakat.

Hal ini "tidak" berbeda dengan dasar-dasar komunikasi yang mengatakan bahwa komunikasi sangat dipengaruhi oleh unsur kebudayaan; komunikasi adalah sosialisasi dan merupakan atau mencerminkan cara berpikir komunikator. Sehubungan dengan itu, dapatlah disimpulkan bahwa kesukaran dalam penyebaran dan pengembangan bahasa Indonesia dewasa ini disebabkan oleh perubahan masyarakat dari masyarakat yang berkebudayaan agraria menuju ke suatu masyarakat berkebudayaan industri dengan mempergunakan teknologi baru. Dalam bidang ilmu pengetahuan kekurangan kemampuan bahasa Indonesia untuk menyampaikan apa yang dimaksud sangatlah dirasakan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dan belum terlalu lama *pengalaman* manusia Indonesia, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mutakhir sehingga kata-kata sering belum ada dalam perbendaharaannya dalam bahasa Indonesia. Tidak

mengherankan bahwa dalam kebijaksanaan nasional bahasa daerah memperoleh peranan yang makin meningkat sebagai sumber memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia walaupun dalam terbanyak hal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masih kurang mampu membantu sehubungan dengan pengalaman yang terbatas pula. Oleh karena itulah, terjadi pengindonesiaan kata-kata asing, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan bukan saja dalam bidang eksakta dan ekonomi, melainkan juga dalam bidang sosial. Sehubungan dengan kegiatan dan peningkatan pengindonesiaan ini, maka timbullah kembali masalah tata bahasa sebagaimana dikenal dari Takdir Alisjahbana dan yang sangat membantu dalam masa lampau, kini tidak mencukupi lagi. Hal ini disebabkan oleh pengindonesiaan atau proses indonesianisasi dari kata-kata itu mengakibatkan adanya "akhiran" yang dipergunakan dalam bahasa asing dan bukan bahasa Belanda saja, seperti masalah akhiran *-is* (Belanda *-isch*) dan akhiran *-ik* (bahasa Inggris *-ic*). Oleh karena itu, tampaknya gambaran perkembangan bahasa Indonesia sebagaimana divisualisasikan oleh Samsuri dalam hubungan pengembangan bahasa Indonesia sebagai *lingua franca* sebagaimana dicantumkan di bawah dapatlah diterima.

Bahasa Asing	Bahasa Indonesia	Bahasa Daerah
	X	X
internasional	nasional	kesukuan

Bahwa pengindonesiaan kata-kata asing ini tidak dengan sendirinya dipahami oleh khalayak ramai, terutama yang bukan berasal dari bidang yang banyak menggunakan bahasa ilmiah. Ini adalah wajar. Inilah bahayanya bila suatu kata asing yang telah diindonesiakan dipergunakan untuk umum umpamanya melalui televisi dan radio. Akibatnya adalah bahwa pesan kurang dipahami dengan akibat lebih lanjut bahwa partisipasi tidak akan sebagaimana yang diharapkan. Sekali lagi, dalam penggunaan kata tertentu selalu ada unsur konotasi dan pengalaman yang ikut menentukan efektivitas tidaknya suatu komunikasi. Oleh karena itu, teori komunikasi mendukung apa yang dikatakan oleh Samsuri (halaman 18), khususnya tentang bahasa Indonesia, yaitu bahwa :

"Bahasa Indonesia hanya mungkin menjadi bahasa modern, apabila ada yang diwahanai, apabila ada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan bahasa Indonesia di dalam komunikasi dan interaksi modern itu. Bila tidak ada kegiatan-kegiatan modern itu, bagaimana bahasa Indonesia dapat menjadi modern?"

Apa yang dikatakan oleh Samsuri ditunjang pula oleh pendapat Langer (1964:59-61) mengenai lambang sebagai inti komunikasi, yaitu bahwa bahasa sebagai rangkaian lambang merupakan hasil formulasi pengalaman. Dengan demikian, komunikasi yang menggunakan kata, merupakan "proses simbolisasi dan ekspresi melalui lambang", hal mana merupakan, lebih lanjut lagi, suatu proses abstraksi. Dengan demikian, bahasa sebagai proses abstraksi, pengalaman abstrak harus merumuskan konsep atau pendapat, adalah tidak lain daripada pengalaman yang dituangkan dalam lambang-lambang, atau proses penggunaan kata merupakan pengalaman terlambang (Levi Strauss, 1969).

Pengalaman yang dialami manusia melalui rangsangan dan persepsi lebih lanjut lagi dipengaruhi oleh pengalaman sebelum dan sesudah proses belajar, yaitu terutama ditentukan oleh "daya tangkap" manusianya sendiri. Justru perbedaan persepsi dan perbedaan penerimaan rangsangan atau lambang yang sama, oleh manusia yang berbeda-beda, merupakan salah satu sumber utama dari jurang interpretasi (bukan jurang komunikasi). Mengingat tingkat pendidikan dan pengalaman serta latihan berpikir abstrak yang sedemikian berbeda-beda dalam masyarakat Indonesia, ditambah pula dengan perbedaan situasi etnik budaya, sosioekonomi, dan pendidikan, dengan sendirinya persepsi (kegiatan interpretasi rangsangan) akan berbeda-beda pula. Hal ini ditunjang oleh teori psikologi yang dikenal sebagai aliran *Gestalt Psychologie*, yang mengatakan bahwa persepsi selalu diterima manusia dalam suatu "keseluruhan yang totalitas terorganisasi". Apa yang dikatakan oleh *Gestalt Psychologie* ini "tidak" berbeda dengan pendapat dalam bidang antropologi, terutama pendapat dari Claude Levi-Strauss tadi, yaitu bahwa semua lambang selalu mempunyai fungsi bagi pemakai lambang. Fungsi ini "bukan" saja merupakan fungsi budaya tetapi terutama mempunyai "fungsi sosial" dan selalu dapat dimasukkan dalam kerangka sosial" dan selalu dapat dimasukkan dalam kerangka sosial budaya pemakai lambang tersebut. Mengingat bahwa komunikasi adalah kegiatan sosial, hal ini dengan sendirinya berlaku pula untuk lambang-lambang yang dipergunakan dalam komunikasi, yaitu dalam bentuk kata dan bahasa. Akibatnya adalah bahwa "penurunan kemungkinan efektivitas komunikasi". Bagaimanapun juga "pemetaan atau pengorganisasian rangsangan" yang diterima akan selalu ditentukan oleh beberapa faktor seperti :

- a. tampak tidaknya persamaan atau pengenalan kembali dari lambang yang dipergunakan dengan sesuatu yang pernah dialaminya,
- b. relevansi rangsangan dengan lingkungan,
- c. kontinuitas penerimaan rangsangan serta intensitas penerimaannya, dan
- d. gambaran keseluruhan yang diperoleh (Sperling, 1975:38).

Sekali lagi terbukti bahwa pengalaman terlebih dahulu merupakan pemberi makna kepada lambang atau kata yang dipergunakan. Di samping itu, Thorndike juga membahas unsur inteligensi sebagai unsur yang menentukan daya tangkap, yang dengan sendirinya akan menentukan efektivitas komunikasi pula. Di samping pengalaman, derajat interpretasi ditentukan oleh beberapa tahap penerimaan, ditinjau dari segi inteligensi manusia, yaitu :

- a. inteligensi mekanik,
- b. inteligensi sosial, dan
- c. inteligensi abstraksi (Sperling: 1975:83).

Oleh karena inteligensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri melalui proses belajar, yaitu penyesuaian terhadap lingkungan atau usaha untuk berhasil, dengan sendirinya usaha-usaha itu terjadi melalui komunikasi dan penggunaan bahasa serta proses belajar. Dalam hubungan ini, inteligensi mekanik adalah tahap yang terendah atau termudah dan dengan contoh mimik teater rakyat dapatlah menjelaskan mengapa orang yang tidak mengenal bahasa daerah kadang-kadang dapat mengikuti ceritera yang dipentaskan. Dalam proses belajar hal ini banyak dilaksanakan dalam pendidikan keterampilan, yaitu melalui percontohan.

Inteligensi sosial diklasifikasikan oleh Thorndike sebagai kegiatan menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial atau proses sosialisasi, yang merupakan suatu kombinasi dari penggunaan inteligensi mekanik dengan inteligensi abstrak. Bahasa sebaliknya banyak menggunakan atau menuntut inteligensi abstrak sehingga dari segi inilah dirasakan kesukaran mengembangkan suatu bahasa yang terlepas dari lingkungan sehari-hari. Hal ini banyak dialami oleh guru-guru bahasa asing. Inteligensi abstrak ini meliputi kegiatan menggunakan lambang-lambang, kata-kata, angka-angka, mengerti dan menggunakan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Sehubungan dengan inilah, pengembangan bahasa termasuk golongan kegiatan yang tersukar. Kebinekaan tanah air dan kebudayaan serta pengalaman kelompok-kelompok sosial di Indonesia tidak memudahkan pengembangan bahasa Indonesia, ter-

utama dalam arti bahasa yang dapat dan mampu menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum dikenal atau dialami oleh manusia Indonesia di pelosok yang lain dari tanah air kita. Karena ini pulalah, pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar merupakan suatu proses yang panjang yang hanya dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal serta sebagai akibat peningkatan transportasi memungkinkan mobilitas fisik yang banyak dari berbagai penduduk dari berbagai pelosok Indonesia. Bagaimanapun juga, penggunaan suatu lambang atau kata merupakan suatu reproduksi pengalaman dan hal ini hanyalah dapat dicapai--atau melalui pengalaman langsung -- atau melalui pengalaman "tidak langsung", yaitu proses belajar.

Namun, bila teori seakan-akan memberi ramalan yang suram mengenai kemungkinan pengembangan dan penyebaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang efektif, praktik sehari-hari tampaknya lebih mempercepat proses penyebaran bahasa Indonesia ini. Dari beberapa penelitian antara lain terbukti bahwa unsur ekonomi dan perdagangan merupakan salah satu faktor yang dapat memperlancar interaksi antarsuku atau dengan bahasa Indonesia atau bahasa campuran, atau sebagaimana terjadi daerah sekitar daerah transmigrasi Rimbu Bujang, penduduk Sumatra Barat, bersedia menggunakan bahasa Jawa di daerah transmigrasi demi lakunya makanan Padang yang disajikannya. Pada umumnya bahasa yang dipakai antara transmigrasi asal Wonogiri dengan penduduk Sumatra Barat merupakan suatu campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Berbagai daerah transmigrasi memperlihatkan situasi terserapnya para transmigran oleh penduduk setempat, atau terbantunya suatu "suku" dengan suatu "bahasa baru, hal mana telah terjadi di Sulawesi Utara dengan keturunan pengikut Kiayi Maja dengan bahasa "Jaton"-nya (singkatan dari Jawa-Tondano) dan di Sulawesi Selatan dengan adanya "suku baru" dengan "bahasa baru" yang dikenal sebagai "Jagis" (Jawa-Bugis).

Lebih lanjut suatu penelitian yang dilakukan oleh kelompok peneliti Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran dalam tahun 1977 tantangan masalah komunikasi di daerah pulau Lombok (Suryaman dan Daryanto, 1977) telah memberi kesimpulan-kesimpulan bahwa bahasa Indonesia bukan saja berhasil menjadi bahasa pengantar antara suku Sasak, Bugis, dan pendatang lainnya, melainkan juga menjadi bahasa pengantar antarsuku Sasak sendiri, yang sebelumnya terpisah satu sama lain, tidak mudah berkomunikasi satu sama lain karena perbedaan "pelapisan sosial". Dengan demikian, bahasa In-

donesia ternyata bukan saja menjadi alat komunikasi, melainkan telah menjadi alat demokratisasi dan pemersatu sebagaimana memang diinginkan oleh Sumpah Pemuda 50 tahun yang lalu.

Kiranya hal-hal ini cukup menggembirakan walaupun ada hal-hal yang kurang menyenangkan tentang penerimaan bahasa Indonesia di daerah perbatasan kepulauan Riau. Hal ini disebabkan karena bahasa Melayu dirasakan sebagai bahasa yang lebih halus jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Melayu ini telah mereka kenal dari nenek moyang mereka. Untuk dapat menarik kelompok ini ke dalam orbit atau gaya tarik bahasa Indonesi, perlulah diadakan penyempurnaan dan penghalusan bahasa lebih lanjut, selain melalui peningkatan frekuensi transportasi dan mobilitas fisik.

Kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari hal-hal yang dibahas dalam bagian ini adalah bahwa bahasa Indonesia adalah suatu bahasa yang sedang berkembang. Di samping itu, dengan peningkatan mobilitas fisik dan mobilitas sosial serta dengan peningkatan komunikasi media massa (dalam hal ini media masa modern dan tradisional) dapatlah bahasa Indonesia lebih menyebar dan meresap di hati rakyat. Media elektronika merupakan media yang menyebarkan dan memperkenalkan bahasa Indonesia kepada penduduk di pelosok-pelosok, sedangkan media massa tradisional, terutama yang bersifat hiburan, merupakan media yang secara efektif dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi. Selain itu, tentunya peranan sekolah mulai dari sekolah dasar tidak dapat diabaikan, yaitu sebagai sarana yang menyebar atau memperdalam penghayatan dan mengadakan kebudayaan (penggunaan) bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa perkembangan bahasa Indonesia kini sebaiknya tidak melepaskan diri dari sastra daerah, terutama di mana bahasa Melayu atau bahasa daerah yang serumpun atau dekat sekali dengan bahasa Indonesia, seperti di Sumatra dan beberapa daerah di Kalimantan atau pun di Sulawesi Utara, Melalui pemanfaatan bahasa daerah yang dekat dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia bukan saja menyebar, melainkan juga dapat mengembangkan diri.

Alangkah tepatnya, apabila dalam Repelita III selanjutnya di universitas-universitas daerah diadakan jurusan bahasa yang memupuk bahasa dan sastra daerahnya di tingkat universitas sehingga terpelihara pulalah bahasa daerah setempat serta dapatlah dikembangkan lebih lanjut bahasa Indonesia di sana, baik melalui pemanfaatan sastra lisan maupun tercatat dan ter-

tulis dengan partisipasi universitas. Dalam hubungan ini kiranya dapatlah diambil usul Margaret Mead (1972) yang melihat adanya perubahan masyarakat dari suatu masyarakat bersifat *purnafiguratif* (*post-figurative*) melalui tahap *kefiguratif* (*cofigurative*) menuju suatu masyarakat yang bersifat *prafiguratif* (*pre-figurative*). Dalam tahap pertama orang tua merupakan pihak yang meneruskan semua pengalamannya kepada anaknya; dalam tahap kedua anak-anak menemukan pula "pendidikan lain" di luar lingkungan jadi suatu percampuran nilai, kadang-kadang suatu pertumbuhan nilai. Untuk menghindari pertumbuhan itu. Mead mengusulkan kerja sama yang erat sehingga terjadilah dalam proses pendewasaan anak, tahap kofiguratif tadi, yaitu dengan pengalaman orang tua sebagai pedoman yang disesuaikan dengan keadaan baru. Lain halnya dalam masyarakat prafiguratif, yaitu masyarakat, baik orang tua sebagai pedoman yang disesuaikan dengan keadaan baru. Lain halnya dalam masyarakat prafiguratif, yaitu masyarakat, baik orang tua maupun anak tidak pernah mengalami hal-hal dan masalah-masalah yang harus dipecahkannya. Tata hidup dan keadaan sosial budaya yang *sedang dalam pembentukan* ini, bukan saja sedang terjadi di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, tetapi di seluruh dunia. Oleh karena itu, pembentukan masa depan bergantung kepada harapan dan interpretasi masing-masing tentang masa depan dengan orang tua tidak "dapat" membekali terlalu banyak nilai-nilai lama kepada generasi mendatang. Dilihat dari segi inilah, perkembangan lambang--dalam bahasa Indonesia merupakan suatu proses dalam proses totalitas pembentukan masyarakat masa depan itu. Namun, mungkin sekali tahap yang dicapai di Indonesia, barulah tahap perkembangan dari masyarakat figuratif ke masyarakat kofiguratif, sedangkan pembentukan situasi prafiguratif baru ditemukan di kota-kota besar. Mengingat bahwa perkembangan bahasa tidaklah pernah lepas dari perkembangan masyarakat dapatlah dikatakan bahwa tahap perkembangan bahasa Indonesia mengalami hal yang sama yaitu :

- a. di daerah-daerah bahasa Indonesia berkembang dalam tahap kofiguratif, dan
- b. di kota-kota besar bahasa Indonesia berkembang dalam tahap prafiguratif dengan kemungkinan besar bahwa sekaligus masih dialami tahap kofiguratif.

Justru hal ini merupakan suatu hal yang menarik serta merupakan kesempatan yang unik dan luar biasa bagi bahasa Indonesia untuk berkembang sebagai bahasa nasional. Bahwa kemampuannya telah terbukti di beberapa daerah transmigrasi merupakan contoh yang cukup mendorong dan mengembirakan.

Langkah-langkah Sarana Komunikasi yang Efektif dan Efisien

Setelah membahas berbagai masalah sosial dan terutama peranan lambang dalam masyarakat Indonesia, dapatlah kini dibahas beberapa langkah sarana komunikasi sehingga dapat diharapkan bahwa bahasa Indonesia akan lebih efektif dan lebih efisien. Efektivitas bahasa Indonesia bergantung kepada seberapa jauh penggunaannya dipahami oleh masyarakat luas sehingga dapat menghasilkan suatu keterlibatan masyarakat dalam proses nasional yang sedang berjalan. Dalam hubungan ini Margaret Mead dalam buku yang sama mengatakan bahwa dewasa ini masyarakat-masyarakat sedang mengalami bukan saja proses pembentukan masyarakat berdasarkan identitas, melainkan berdasarkan (commitment). Manusia dewasa ini tidak cukup dapat berkembang apabila hanya secara sepihak ia menemukan identitasnya, tetapi harus aktif berpartisipasi dalam pembentukan masyarakat yang baru itu. Oleh karena itulah, dalam fase prafiguratif, dalam fase lambang-lambang sedang dibentuk dan berkembang, manusia perlu terlibat di dalamnya sehingga masyarakat dengan pranata yang baru itu sungguh-sungguh akan merupakan masyarakat di mana manusia juga dapat menemukan dirinya kembali, diterapkan ke dalam bahasa Indonesia, hal ini berarti bahwa dalam pengembangan dan penggunaan bahasa Indonesia diperlukan keterlibatan setiap anggota masyarakat Indonesia, justru dalam proses pembentukan masyarakat nasional Indonesia itu. Efektivitas bahasa Indonesia dapat diarahkan oleh Pemerintah, tetapi keberhasilannya sendiri bergantung kepada seberapa jauh usaha dan keterlibatan setiap insan Indonesia dalam memahami bahasa yang sedang dikembangkan itu. Pengarahan oleh Pemerintah hanyalah dapat bersifat pemanfaatan bahasa dan sastra daerah yang mirip dengan bahasa Indonesia, memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah asing yang telah diindonesiakan karena tidak ada istilahnya dalam bahasa daerah, mengembangkan jurusan-jurusan sastra daerah dan Indonesia (lama dan kontemporer) di berbagai universitas. Langkah berikut adalah pembakuan kata-kata itu, penyusunan tata bahasa yang membantu dalam penambahan perbendaharaan sesuai kebutuhan zaman.

Efektivitas bahasa Indonesia selanjutnya dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teater-teater rakyat dan bentuk-bentuk kesenian yang bersifat komunikatif lainnya. Dalam hubungan ini masyarakat berkembang yang berkebudayaan tinggi, bukan saja mengalami perubahan bentuk masyarakat dari pranata purnafiguratif melalui tahap kofiguratif menuju ke masyarakat

yang bersifat prafiguratif, tetapi sekaligus mengalami perubahan dalam bidang komunikasi, yaitu perubahan sifat komunikasi berkonteks tinggi menuju ke masyarakat yang berkomunikasi dengan sifat komunikasi berkonteks rendah. Sebagai suatu masyarakat yang berkebudayaan tinggi, lambang yang dipergunakan lebih sedikit jumlah atau volumenya, tetapi "mengandung arti implisit yang banyak". Berbeda halnya dengan masyarakat berkembang, maka masyarakat industri sebaliknya lebih cenderung "versifat komunikasi berkonteks rendah dengan menggunakan banyak lambang dengan" masing-masing lambang mempunyai arti tersendiri dan bersifat eksplisit (Edward T. Hall, 1977:91). Masalah ini pula yang menjelaskan mengapa di Kepulauan Riau, orang enggan "menggantikan" bahasa melayu dengan bahasa Indonesia mengingat sifat bahasa Indonesia yang tampaknya cenderung berkembang menjadi suatu "sistem komunikasi berkonteks rendah" (*low-context-communication system*), terutama dalam penggunaan kata-kata yang diambil dari bahasa asing. Situasi ini sukar dihindari oleh negara berkembang yang berkebudayaan tinggi dan tampaknya merupakan salah satu "pengorbanan sosial" (*social cost*) yang harus diberikan demi modernisasi.

Komunikasi antara kaum terpelajar dengan penduduk pedesaan yang kurang dipengaruhi oleh pengaruh asing (dengan sistem komunikasi berkonteks rendah) karenanya merupakan komunikasi yang sukar dan akan mengalami banyak hambatan. Justru arti "implisit" yang banyak ditemukan dalam bahasa daerah dan sastra lama proses modernisasi, khususnya dalam perkembangan bahasa Indonesia, adalah perlu bahwa, baik sastra lama Indonesia maupun sastra lama daerah dipelajari. Melalui pendalaman filsafat dan budaya masa lampau bangsa Indonesia, pengembangan bahasa Indonesia dapat tetapi mempertahankan sistem komunikasi berkonteks tinggi, sebagaimana dikenal dalam masa-masa lampau. Dalam hubungan ini disitir di sini apa yang dikatakan oleh Benny Lumowah dalam kertas kerjanya "Teater sebagai Seni dan Alat Komunikasi" pada Seminar Kebijakan Komunikasi Nasional yang diadakan oleh Departemen Penerangan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 78. Lumowah mengingatkan bahwa istilah Indonesia untuk teater rakyat dalam zaman Jepang adalah "sandiwara", yang menjelaskan bahwa melalui pentas di panggung para pelaku memberikan anjurannya secara samar-samar kepada para penonton. Kesimpulan ini dapat ditarik dari analisis kata *sandi* yang berarti 'samar-samar', dan *wara* yang berarti 'anjuran'. Dengan demikian, pesan-pesan terselip dalam dialog antarpelaku dan kesatuan lakon

merupakan pesan-pesan yang terselubung yang disampaikan kepada penonton. Bahkan, situasi politik merupakan sebagai utamanya dalam zaman Jepang adalah jelas. Betapa keadaan ini berbeda dengan mental dan kebudayaan yang telah mencetuskan musik dari *jazz* di dataran Amerika Serikat dapatlah diperoleh keterangannya dari bahan *Dance Magazine*, yang diterbitkan dalam bulan Februari 1978. Menurut majalah ini, musik dan tari *jazz* justru timbul dan berkembang dalam zaman perbudakan penduduk Negro di Amerika Serikat dan tari serta musiknya lebih bersifat "pembebasan diri secara psikologis" yang dialami oleh para budak pada waktu itu. Tari yang mula-mula berasal dari Afrika dan merupakan tari ritual, akhirnya dalam pengasingan memperoleh bentuk "pembebasan diri dari tekanan-tekanan batin" yang dialami oleh mereka. Melalui tari-tari ini diekspresikan sindirian oleh mereka. Melalui tari-tari ini diekspresikan sindiran-sindiran terhadap tuan-tuan tanah berkulit putih, yang dilambangkan melalui gerak-gerak tari. Oleh karena itu, tari *jazz mempunyai sifat* khas, yaitu selalu berubah, banyak berpegang pada improvisasi, dan bergaya eksplosif.

Apabila sandiwara dalam zaman Jepang disejajarkan dengan perkembangan musik dan tari *jazz* di Amerika Serikat, tampaklah perbedaan teknik komunikasinya, yang ditentukan oleh mental dan kebudayaan masing-masing masyarakatnya. Juga sandiwara masih mengenal improvisasi sebagaimana halnya dengan teater rakyat lainnya walaupun berbeda dengan teater tradisional tari dan nyanyian mulai dihilangkan, demikian pula lawak ditiadakan dan improvisasi lebih sedikit. Musik pun mulai kurang peranannya dan naskah mulai lebih mengingat, yang dalam teater modern sangat menentukan. Pada sandiwara mulai tampak persamaan dengan teater modern, yaitu bahwa fokus ceritera adalah suatu masalah, sedangkan pada teater tradisional pada umumnya adalah suatu legenda atau kejadian yang mempunyai "nilai sejarah". Suatu masalah dalam teater tradisional dibahas melalui kesejahteraan atau kemiripan antara kejadian yang disindir dengan kejadian dalam masa lampau.

Dari proses perubahan teater rakyat atau teater tradisional menuju ke teater modern melalui tahap transisi, yaitu bentuk stambul dan teater bangsawan, dapatlah dilihat bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam bentuk-bentuk kesenian atau teater ini hanyalah "disesuaikan oleh media yang dipakainya". Hal ini sekali lagi menjelaskan bahwa proses pengembangan dan penggunaan suatu bahasa tidak terlepas dari keinginan bangsa yang mengembangkan bahasanya itu. Apabila "memang" diinginkan bahwa sifat sistem komunikasi konteks tinggi dipertahankan demi tingkat kebudayaan yang tinggi,

maka kemungkinan penyebarannya adalah lambat dan terbatas pada lingkungan-lingkungan yang memahami arti implisit itu. Lain halnya dengan sistem komunikasi dengan konteks rendah yang akan lebih cepat menyebar dan dapat dipahami oleh masyarakat di luar lingkungan budaya yang memberi arti implisit kepada kata-kata tertentu. Dengan demikian, tampaknya tidak ada jalan lain bagi perkembangan dan efektivitas Indonesia daripada mengorbankan sebagian dari nilai kebudayaan tingginya demi penyebaran dan pemahaman serta penggunaan bahasa ini oleh sebanyak mungkin orang dalam waktu sesingkat mungkin. Kasus seperti Riau merupakan kasus yang hanya akan ditemukan di daerah-daerah yang memang berkebudayaan Melayu sehingga "pengorbanan kebudayaan" inilah yang harus diberikan demi pengembangan bahasa Indonesia. Sehubungan dengan inilah, peranan bahasa daerah makin tampak, yaitu dalam mempertahankan kebudayaan yang tinggi melalui bahasa dan sastranya dan sedapat mungkin menunjang bahasa Indonesia untuk berkembang menjadi bahasa yang makin tersebar, tetapi tetap sempurna dan memperoleh bentuk idealnya : merupakan alat komunikasi efektif yang tetap bersifat berkonteks tinggi sehingga dapat dipergunakan dengan bangga oleh setiap warga negaranya. Dalam hubungan inilah, jurusan-jurusan bahasa dan sastra daerah dan Indonesia bersamaan dengan jurusan-jurusan sejarah serta falsafah dan budaya mempunyai peranan yang sangat menentukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hall Edward. 1977. *Beyond Culture*. New York: Anchor Books.
- Langer, Susane K. 1964. *Philosophical Sketches, a study of the human mind in relation to feeling, explored through art, Language and symbol*. New York: a Mentor book.
- Levi-Strausse. 1969. *Structural Antropology*; London: Allen Lane the Penguin Press.
- Margaret. 1972. *Culture and commintment: a Study of the the Generation Gap*. Ladder edition, Greenwich: Doubleday & Co. Fawcett Publications, Inc.
- Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. "Antologi Syair Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama". Jakarta.
- Samsuri. 1975. "Kebudayaan masyarakat dan Bahasa di Indonesia". Dalam Bulletin Yaperna, Berita Ilmu-ilmu Sosial dan Kebudayaan, No. 6 Tahun II. April 1975.
- Sperling, Abraham et. al. 1975. "Psykology made simple". Laondon: Allen Lane. the Penguin Press.
- Suryaman, Ukun dan Daryanto. 1977. "Masalah komunikasi dalam bahasa Indonesia di daerah Pulau Lombok".
- Laporan untuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penugasan BAPPENAS.

MEDIA MASSA, BAHASA INDONESIA, DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Muchtar Lubis

Pengantar

Panitia Kongres Bahasa Indonesia III mengajak saya menyumbangkan sebuah kertas kerja untuk Kongres Bahasa Indonesia ini dengan judul di atas, yang diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut.

- a. Mengapa media massa dan bahasa Indonesia turut menentukan jalan pembangunan di Indonesia?
- b. Apakah peranan media massa dan bahasa Indonesia dalam usaha peningkatan taraf pengetahuan dan kerohanian masyarakat?
- c. Mengapa bahasa Indonesia yang dipakai dalam media massa perlu dipelihara dengan baik?
- d. Apakah untung ruginya koran-koran yang berbahasa daerah dan asing?

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan panitia telah memancing pengulasan beberapa bidang masalah dan juga memancing beberapa pertanyaan kembali. Masalah media massa di negeri kita, peran media massa, bahasa Indonesia dan tidak kurang pentingnya masalah pembangunan itu sendiri. Sudahkah kita sepakat umpamanya dengan kebijaksanaan pembangunan yang telah dijalankan selama ini? Sudahkah kita merasa puas dan meyakini efektifnya media massa yang kita lihat sekarang? Dan benarkah media massa dan bahasa Indonesia turut menentukan jalan pembangunan di Indonesia? Pembangunan yang bagaimana? Jalan pembangunan yang bagaimana?

Tanpa menjelaskan kepada kita semua apa yang kita maksud dengan media massa dan pembangunan yang bagaimana, sukar atau tidak mungkin menjawab rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh panitia. Pada mulanya saya merasa amat segan untuk menerima ajakan Panitia Kongres

Bahasa Indonesia III untuk menyumbangkan sebuah kertas kerja karena pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula waktu yang diberikan untuk menyiapkan kertas kerja amat sedikit. Surat dari Panitia tertanggal 17 Juli 1978, yang baru saya baca menjelang akhir bulan Juli karena saya berada di luar tanah air. Waktu dua bulan yang tersedia untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai isi media massa dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia dan pembangunan. Akan tetapi, saya menyadari betapa pentingnya Kongres Bahasa Indonesia III ini untuk perkembangan selanjutnya seluruh kehidupan bangsa kita. Saya memberanikan diri menyusun kertas kerja ini dan saya sendiri sangat menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangannya.

Peranan Media Massa Meragukan

Saya tidak merasa yakin bahwa media massa turut menentukan jalan pembangunan di Indonesia. Hal ini tidak saja karena amat sangat terbatasnya peredaran media massa cetak, angka terakhir 1,5--2 juta lembar surat kabar (dan masih diperlukan satu penelitian yang cukup mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai media massa elektronik), tetapi juga karena saya melihat betapa media massa cetak belum dapat menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Media massa adalah salah satu dari komunikasi bangsa dan komunikasi dalam arti yang baik bukan saja bersifat timbal-balik dan dari serta ke berbagai arah, tetapi juga mengandung pengertian "bersama-sama", dan arus informasi dan pendapat tidak hanya bersifat vertikal, dari atas ke bawah, tetapi harus juga dari bawah ke atas dan pula harus secara horisontal serta pula harus terbuka.

Hanya sistem komunikasi demikian yang memungkinkan media massa dapat ikut menentukan jalan pembangunan di negeri kita. Banyak contoh dapat dikemukakan bahwa sistem komunikasi kita dewasa ini masih belum memenuhi persyaratan di atas. Kekurangan waktu tidak memberi penyusunan kertas kerja ini kemungkinan untuk mengumpulkan umpama-umpama demikian. Akan tetapi, izinkan saya mengingatkan pembatasan-pembatasan yang telah disetujui bersama oleh para pemimpin redaksi surat kabar yang dilarang terbit pada permulaan tahun 1978 yang lalu, yang menyebabkan umpamanya seorang wartawan, Saudara Jus Soema di Pradja, pada sebuah surat kabar yang ikut mendatangi pernyataan menerima pembatasan-pembatasan itu mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menulis surat pada pemimpin redaksi surat kabar itu, yang antara lain berbunyi sebagai berikut.

"Setiap penutupan surat kabar oleh pemerintah tentu menimbulkan rasa prihatin dalam diri setiap wartawan yang mencintai profesinya dan yang mencoba mengembangkan dirinya sebagai wartawan profesional yang sesungguhnya. Akan tetapi, keprihatinan yang lebih mendalam dengan ditutupnya surat kabar (nama surat kabar saya hilangkan) baru-baru ini. Ditambah dengan rasa kecewa yang sangat, setelah saudara-saudara pemimpin redaksi, termasuk saudara (nama dihilangkan) menandatangani dua pernyataan yang hakikatnya telah membuat harian-harian tersebut kehilangan landasannya yang sebenarnya untuk dapat berfungsi sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab. Sebagai wartawan muda yang berhasrat besar hendak mengembangkan diri menjadi seorang wartawan profesional dalam arti sebaik-baiknya, saya dengan hati duka, kini tidak lagi melihat sesuatu ruang atau iklim, di mana kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya."

Media massa kelihatan tidak dapat berfungsi sewajarnya. Sebaliknya, dalam situasi pers yang wajar, di mana inisiatif dan kreativitas wartawan tidak dibendung, tentulah pers dapat ikut menentukan jalannya pembangunan. Sebenarnya memang demikian, tetapi ini tidak akan berlaku secara otomatis. Andai kata pun pers menikmati kebebasan penuh melaksanakan tanggung jawabnya sebagai media massa dengan baik, banyak pula bergantung kepada sampai ke mana pula Pemerintah bersifat terbuka atau tertutup, dan bergantung pula kepada kecakapan dan kemahiran serta pengetahuan media massa, dan keberanian, serta kesanggupan media massa untuk melakukan perannya sebagai alat informasi dan pendapat masyarakat hingga apa yang disiarkannya dihormati dan dipercaya oleh masyarakat dan diperhatikan para pengambil putusan. Akan tetapi, masalah media massa tidak pula dapat diperbincangkan secara mendalam dalam kongres bahasa ini.

Gerak dan Arah Pembangunan Penuh Tanda Tanya

Saya merasa gerak dan arah pembangunan yang kita lihat sekarang masih belum sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33, yang menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akan tetapi, Kongres Bahasa ini bukan pula forum tempat mendebatkan masalah ini, bukan?

Erosi Makna Kata

Lebih penting dari makna kata dalam pengertian semantik yang biasa adalah meneliti "reaksi semantik" orang Indonesia kini terhadap kata-kata yang tiap hari dapat kita baca di media cetak atau kita dengar melalui media elektronik. Erosi makna kata dari maknanya yang asli dapat dilihat pada reaksi semantik seseorang terhadap suatu kata.

Setiap orang mempunyai hubungan mesra tersendiri dengan kata-kata tertentu, yang bagi dirinya memiliki makna khusus. Ambillah umpamanya kata *cinta*. Bagi seorang wanita yang hidup berbahagia dengan suaminya, kata *cinta* penuh dengan makna 'bahagia', 'beruntung', 'gairah hidup', 'senang hati', dan sebagainya. Akan tetapi, seorang wanita yang patah hati korban hawa nafsu lelaki yang memakai kata *cinta* untuk mengelabuinya saja, kata *cinta* pasti mempunyai makna lain sekali.

Kata *keadilan* yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum terhadap seorang terdakwa yang tidak bersalah atau kata *keadilan* yang diucapkan oleh seorang hakim yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan kehendak penguasa atau karena telah menerima suap terlebih dahulu, tentulah berbeda maknanya dari kata *keadilan* bagi sang terdakwa yang dijatuhi hukuman, sedangkan dia sama sekali tidak bersalah. Kata *keadilan* bagi hakim yang menyesuaikan panjang waktu hukuman penjara bagi sang terdakwa dengan lamanya dia ditahan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan juga tidak sama maknanya bagi hakim dan terdakwa itu.

Banyaknya kata dalam bahasa Indonesia yang makna aslinya baik, tetapi karena terus-menerus dipergunakan untuk menutup berbagai perbuatan yang berlainan atau bertentangan dengan makna asli kata-kata yang bersangkutan telah mengalami erosi makna dan telah menimbulkan reaksi semantik yang menyebabkan kata-kata itu seakan-akan tidak berdaya lagi untuk menyampaikan sesuatu apa kepada kita.

Mencari makna kata-kata tidak mulai dan berakhir dengan membuka sebuah kamus, tulis Hayakawa, dan pemenang Hadian Nobel, Bridgeman, seorang ahli nuklir, menulis bahwa makna sebenarnya dari suatu kata hanya dapat ditemukan dengan meneliti apa yang dilakukan seseorang dengannya dan bukan apa yang dikatakannya dengan kata itu.

Hal ini sama dengan ucapan yang sering kita dengar kini di Indonesia, yakni perlunya orang di Indonesia menyesuaikan katanya dengan perbuatannya.

Sebuah contoh terbaru adalah kata *ijazah* makna asli kata *ijazah* tiada lain adalah 'suatu surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan sesuatu tingkat pendidikan', tetapi terbukti bahwa melihat reaksi semantik ratusan, kalau tak hendak dikatakan ribuan orang di Indonesia kini terhadap kata *ijazah* itu, maknanya telah berubah menjadi umpamanya kunci untuk mendapat jabatan' atau kedudukan sosial yang tinggi', yang membuka pula pintu pada kekayaan besar. Oleh karena itu, banyak orang Indonesia yang bersedia membeli ijazah palsu, tidak saja agar mendapat jabatan, tetapi agar dapat pula memasang gelar Drs., B.A., M.A., dan sebagainya di depan atau belakang nama mereka. Ambillah kata *pejabat*, *pengusaha tinggi*. Apa reaksi semantiknya kini pada orang Indonesia? Dengan erosi makna kata, maka komunikasi antara kita menjadi sangat pelik dan hampir-hampir tak mungkin. Di bawah ini saya coba mengumpulkan beberapa contoh untuk menonjolkan apa yang saya maksud. Oleh karena kekurangan waktu, saya hanya dapat meneliti dua buah harian yang terbit di Jakarta, harian *Kompas* dan *Sinar Harapan*. Untuk menghemat waktu dan kertas, saya batasi pada mengutip kepala kepala berita dan petikan sekedarnya dari berbagai tulisan.

*700 JUTA DOLAR AS PER TAHUN TERBUANG DALAM PEMBORAN MINYAK
SERUAN UNTUK MENGHEMAT BAHAN BAKAR MINYAK*

Kepala berita pertama berasal dari Profesor Baiquni, Ketua Komisi Bidang Sumber Alam dan Energi pada Loka Karya Nasional Riset dan Teknologi. Kepala berita kedua diucapkan oleh Direktur Perbekalan Dalam Negeri Pertamina Joedo Soembono. Yang pertama disiarkan dalam bulan Juli dan yang kedua dalam bulan September. Akan tetapi, seruan untuk menghemat minyak bakar bukanlah sambutan terhadap sinyalemen pembuangan percuma gas ikutan yang terbuang dalam pemboran-pemboran minyak Indonesia. Kedua seruan ini yang sangat penting sebenarnya seakan hilang saja dilarikan angin. Tak ada lagi sambungannya. Tak diusulkan oleh suatu tindakan.

HEMATKAN KEKAYAAN ALAM INDONESIA. Demikian sebuah kepala berita mengantarkan ucapan Menteri Subroto. Di halaman yang sama, tepat di bawah berita ini, dipasang pula kepala berita yang berbunyi :

BUANGAN PABERIK UDANG MASIH TINGGI PROTEINNYA

Juga tidak ada hubungan antara kedua keterangan ini. Sang Menteri hendak menekankan pada masyarakat untuk menghemat kekayaan alam Indonesia, terutama minyak dan gas bumi. Dan kepala berita yang kedua menunjuk pada terbuangnya protein secara percuma oleh pabrik udang.

Saya yakin kita masih harus menanti lama sebelum umpamanya ada peraturan yang menetapkan mesin mobil yang beroperasi di Indonesia harus dapat menghasilkan sekian kilometer sedikitnya untuk setiap liter bensin atau laju mobil di jalan raya benar-benar diawasi untuk tidak melebihi satu kecepatan tertentu untuk menghemat pemakaian bensin. Kita juga, saya khawatir akan masih harus menunggu lama sebelum dikeluarkan peraturan agar pabrik udang menjaga buangannya jangan mengandung kadar protein yang masih tinggi.

Di bawah ini saya daftarkan pula kepala-kepala berita, tulisan, dan petikan-petikan berita dari tulisan. Tujuan saya adalah untuk memberi kesan mengenai iklim di tanah air kita tempat bahasa Indonesia harus kita kembangkan dan harus berfungsi sebagai alat komunikasi yang ampuh.

"Apakah Ibnu masih dikenakan tahanan rumah?", tanya pers. "Ibnu tidak pernah dikenakan tahanan rumah, tetapi dia dahulu diwajibkan untuk tetap di rumah guna kepentingan kelancaran pemeriksaan dan sekarang status itu telah diangkat", kata Jaksa Agung.

Kita sekarang di Indonesia tidak lagi ditahan, tetapi dilindungi (sebuah istilah lain yang juga populer pada pejabat-pejabat), atau hanya "dipanggil untuk diperkisa". Bahwa pemeriksaan dapat berlangsung cukup lama hingga yang diperiksa tidak dapat pulang ke rumahnya entah berhari-hari atau berbulan, itu adalah soal lain. Ibnu Sutowo tidak ditahan rumah hanya diwajibkan untuk tetap di rumah. Kita sudah mengganti kata *penjara* dengan *lembaga pemasyarakatan*, tetapi bagi seorang ayah dan seorang anaknya yang ditahan dalam sebuah "lembaga pemasyarakatan" di Kabupaten Jenenonto, atas tuduhan mencuri sepuluh liter beras, dan keduanya telah meninggal dunia dalam penjara setelah ditahan kurang lebih setahun, maka kata *lembaga pemasyarakatan* ini pasti mengandung makna yang lain sama sekali. Dan bagi keluarga mereka pun "lembaga pemasyarakatan" mengandung makna jauh berbeda dari makna asli kedua kata itu. Sebenarnya pula telah cukup banyak ditulis selama bertahun-tahun sudah bahwa dengan kondisinya yang sekarang sebagian ter-

besar "lembaga pemasyarakatan" kita sebenarnya harus diartikan 'sekolah lanjutan ilmu penjahat yang lebih tinggi'.

Mungkin kata *keadilan* dan *hukum* dalam bahasa Indonesia yang paling banyak menderita erosi maknanya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta dan di beberapa daerah yang memiliki LBH penuh dengan kasus-kasus tempat kata *keadilan* sudah kehilangan maknanya sama sekali.

Advokat serta sarjana hukum Sumarno P. Wirjanto (yang namanya terkenal dalam dunia peradilan serta pula dia rajin menulis tentang hukum dan *keadilan*) menulis tentang sel dalam penjara yang sebenarnya hanya untuk dua atau empat orang diisi dengan 20 hingga 30 orang. Dia menceritakan tentang seorang pemilik toko makanan dan minuman yang ditahan karena di tokonya ditemukan kaleng-kaleng yang penyok. Dianggap ada bahaya keracunan. Benar, tetapi apa dia mesti ditahan? Dia belum tentu bersalah, tetapi masuk **tahanan saja dahulu. Hutang perdata dikriminalkan dan orangnya ditahan. Ini berdagang hukum, komentar pengasuh majalah yang memuat kasus itu. Kasus-kasus begini amat banyak hingga jika daftar semuanya akan merupakan sebuah buku yang amat tebal.**

Dibandingkan dengan tahun 1966 situasi masalah tahanan sekarang jauh lebih buruk. Ini bukti bahwa kritik dalam koran-koran dan forum ilmiah kurang sekali mendapat perhatian dan tidak pernah mendapat tanggapan, tulis Advokat Wirjanto.

Pendapatnya ini memperkuat pula pandangan saya terhadap peran media massa yang tidak ikut menentukan jalan pembangunan seperti telah saya uraikan tadi.

Marilah saya teruskan mendaftar kepala-kepala berita dan petikan laporan dan tulisan.

KEBUDAYAAN KITA DALAM KRISIS

Sebagai indikator: adanya neurose individual dan sosial, hukum menjadi elastis, kesenian tanpa kreativitas, agama jadi sentimental, moral kehilangan objektivitas dan mengikuti subjektivitas dalam tata nilai. (Frans Seda di depan **Seminar Pembangunan Kebudayaan dalam Rangka Pembangunan Nasional**).

Dan masyarakat Indonesia saat ini memang benar-benar sakit. Sebagai contoh nasionalisme dan patriotisme telah luntur, kekasaran dan

brutalisme muncul di mana-mana dalam bentuk penggerogotan kekayaan negara, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya (kutipan dari keterangan Ny. Walandouw, anggota DPR, fraksi PDI, 1978).

"Terjadinya kemunduran dalam jaminan kepastian hukum dan merosotnya kadar keadilan sosial, terjadi berkurangnya bobot persatuan dan kesatuan bangsa dan menipisnya rasa kebanggaan nasional". (Petikan karangan Dr. Umi Haniek, *Sinar Harapan*, 19 September 1978).

"Menurut seorang ahli riset, berdasarkan konsumsi 9 bahan pokok, lebih separuh penduduk Indonesia tergolong miskin." (Petikan dari karangan Syarial, *Sinar Harapan*, 19 September 1978).

"Virus" korupsi dan penyelewengan sudah menghinggapi lapisan tinggi dan terpadang dalam masyarakat." (Petikan dari keterangan anggota Komisi III (hukum) DPR, Albert Hasibuan, S.H.)

PELIHARA & NYALAKAN TERUS API PATRIOTISME

(Presiden Suharto pada hari Pramuka dan Raimuna Nasional).

70 PERSEN PETANI INDONESIA MASUK GOLONGAN "EKONOMI LEMAH" (Menteri Pertanian Prof. Soedarsono).

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ben Mboi mengungkapkan per kapita rakyat NTT ternyata bukan lagi US\$50, melainkan hanya US\$39 per tahun. Hal ini, demikian Ben Mboi, diketahui setelah diadakan perhitungan ulang sebuah Tim Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) NTT.

85 JUTA RAKYAT KURANG KALORI (Menteri Pertanian pada Konferensi Ekonomi Pertanian ke-5).

"Lima puluh persen penduduk Indonesia hidup dalam garis batas kemiskinan yang terendah". (Drs. Soedardji dari Fraksi Persatuan Pembangunan, *Kompas*, 22 Januari 1977).

"Tiga puluh persen dari penduduk Indonesia masih hidup di bawah batas garis kemiskinan". (Presiden Suharto pada pembukaan proyek di Ujung Pandang Juni 1978).

"Sembilan puluh tiga persen dari buruh di 210 perusahaan Jawa Timur tidak menerima upah yang cukup untuk memulihkan tenaga, otot, dan pikiran yang tercurah selama bekerja". (Petikan dari karangan M. Olak, "Angka" Penduduk Miskin dan Kurang Gizi, *Kompas* 1978).

"Banyak potensi masyarakat dibunuh dengan semena-mena". (Dr. Matulada, Direktur Pusat Latihan dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Ujung Pandang dalam Seminar Pengembangan Kebudayaan dalam Rangka Pembangunan Nasional).

MENJADI PERWIRA BUKAN UNTUK MENCAPAI KEMEWAHAN HIDUP (Kepala berita, ucapan Menhankam/Pangab Jenderal M. Jusuf, Kompas 1978)

ANARKI INTELEKTUAL AKAN DITINDAK TEGAS (Kepala berita keterangan Menteri P dan K, *Sinar Harapan*, 22 Juli 1978).

"Prinsip ini berarti bahwa dalam diri setiap manusia Indonesia perlu dikembangkan sifat-sifat kritis, inovatif, dan tekun yang dilandasi oleh kepribadian yang utuh dan mantap". (Dari hasil Seminar Pengembangan Kebudayaan dalam rangka Pembangunan Nasional, 17--20 Juli di Jakarta).

Pada sebagian lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, yang mengelola kekuasaan, serta sumber-sumber ekonomi timbul gaya hidup yang berlebih-lebihan. Akibat lain adalah bahwa timbulnya berbagai jenis gaya hidup seperti neofeodal, santai, "mumpung", memintas, tidak tepo seliro, mengagungkan segala hal yang datang dari luar negeri. Pola hidup yang demikian itu akan melunturkan integritas dan penghayatan norma-norma sosial, agama, rasa kepatutan, rasa tanggung jawab dan kewiraan, serta hilangnya pegangan hidup, solidaritas, dan disiplin sosial. (Dari Seminar Pengembangan Kebudayaan dalam rangka Pembangunan Nasional, *Kompas*, 21 Juli 1978).

"Dan secara formal GBHN (Tap MPR No, IV 1978) juga telah mempercayakan suatu fungsi yang ideal kepada pers nasional, yaitu fungsi "menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan" (petikan dari karangan A. Muis, S.H. Prospek Sistem Pers Indonesia, *Kompas* 20 Juli 1978).

Dalam hal mengemukakan pendapat, tidak semua orang berani melakukannya di sini, meskipun kemerdekaan menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin oleh UUD. Soalnya masih ada perbedaan dalam tata cara menyatakan antara pihak penguasa dengan rakyat. (Petikan dari karangan Bambang Seyo, wartawan *Sinar Harapan*, 17 Juli 1978).

"Pers sendiri kurang dinamis dalam mengikuti perkembangan. Misalnya sekarang di daerah hanya soal-soal gubernur saja. Rakyat lama-lama bisa muntah". (Wakil Presiden Adam Malik pada pers, *Kompas* 21 Juli, 1978).

"Diperlukan penyebaran informasi secara bebas, merata, dan mendalam." (Kepala berita *Kompas*, 21 Juli 1978, mengenai Seminar Pembangunan).

an Kebudayaan dalam rangka Pembangunan Nasional).

Wartawan-wartawan yang bertemu dengan Sudomo sebelum Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi di Binagraha menanyakan siapa yang berwenang menghubungi surat kabar untuk tidak memuat sesuatu berita. "Secara fungsional adalah Departemen Penerangan," kata Sudomo (Petikan dari sebuah berita, *Kompas*, 1978).

Yang mengeluarkan kata-kata bahasa Indonesia itu ada penguasa, ada sarjana, ada anggota masyarakat. Kata-kata yang mereka pergunakan sama. Umpamanya kasus Ibnu Sutowo. Wartawan bertanya apakah Ibnu dikenakan tahanan rumah? Jaksa Agung menjawab, "Ibnu Sutowo tidak pernah dikenakan tahanan rumah, tetapi dia dahulu diwajibkan untuk tetap di rumah", dan sebagainya, dan sebagainya.

Apakah arti kata-kata *tahanan rumah* sang wartawan berlainan maknanya dari kata-kata yang sama bagi Jaksa Agung hingga Jaksa Agung mempergunakan kata-kata *dia diwajibkan tetap di rumah*. Dan apa pula artinya ini *dia diwajibkan tetap di rumah*? Menurut hemat saya, seseorang yang diwajibkan tetap di rumah, ya sama juga dengan orang yang dikenakan tahanan rumah. Akan tetapi, rupanya bagi Jaksa Agung tidak demikian. Karena Ibnu Sutowo yang diwajibkan tetap di rumah itu tidak pernah dikenakan tahanan rumah, menurut Jaksa Agung. Saya sungguh menjadi bingung dan tidak mengerti lagi sama sekali makna kata-kata seperti *dikenakan tahanan rumah*, *diwajibkan tetap di rumah* ini.

Kemudian kini ada lagi istilah baru. Belakangan ini ada orang-orang yang ditahan, yang kelihatan sudah dikeluarkan dari tempat tahanan, tetapi mereka itu tidak dibebaskan, tetapi diberi cuti. Dan timbullah pertanyaan, orang tahanan yang cuti, dikeluarkan dari penjara, apa status hukumannya? Masih orang tahanan? Dia cuti dari apa? Cuti dari tinggal di dalam tempat tahanan, atau juga cuti dari tuduhan yang menyebabkan dia pertama kalinya ditahan? Bagaimana nanti, jika praktik orang tahanan cuti jadi meluas, jika kita berjumpa dengan kawan di sebuah tempat tamasya, dan ketika kita bertanya, eh Bung ada di sini, lagi cuti? Mungkin dia merasa tersinggung atau terhina, kalau-kalau nanti arti kata *cuti* berarti 'orang tahanan yang lagi boleh di luar tempat tahanan'.

Gambaran apa yang timbul dalam pikiran kita membaca dari hari ke hari dalam media massa kata-kata seperti neurose individual dan sosial, hukum menjadi elastis, kesenian tanpa kreativitas, agama jadi sentimental, moral kehilangan objektivitas, masyarakat Indonesia benar-benar sakit, nasional-

isme dan patriotisme telah luntur, kekasaran dan brutalisme muncul di mana-mana dalam bentuk penggerogotan kekayaan negara, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, terjadi kemunduran kepastian hukum, dan sebagainya, dan sebagainya seperti telah saya kuti di atas?

Saya sendiri telah lama merasa seakan saya orang dari planet di luar angkasa orang Indonesia memakai kata-kata yang sama, tetapi dengan makna saling berbeda, dan **betapa** kata menjadi hampa dan karenanya banyak ucapan-ucapan yang muluk-muluk sangat jarang dilaksanakan.

Amat banyak kata dan istilah seakan telah menjadi "Jargon" (menurut kamus Webster artinya *confused, unintelligible talk or language: phraseology peculiar to a sect, profession or the like; professional slang. v.i. To utter unintelligible sounds, etc, etc*) atau 'linggo' (Webster: *language; speech; a contemptuous term for language one does not understand*). Kata-kata yang dipergunakan tidak lagi bermakna asalnya, tetapi mengandung arti yang lain sama sekali, baik bagi yang memakainya maupun bagi mereka yang menerimanya.

Pemerintah yang mengeritik Pemerintah di Indonesia umpamanya, sama-sama berpegang pada Pancasila dan UUD 1945. Rupanya makna kata-kata dalam rumusan Pancasila dan UUD 1945 berbeda-beda antara mereka.

Kita amat mudah mengatakan sesuatu, tetapi tidak merasa wajib untuk bertindak sesuai dengan makna kata yang kita ucapkan sendiri. Selain dari kelambanan yang sudah berakar dalam birokrasi kita, saya rasa sudah tiba waktunya kini bagi kita untuk meneliti apakah hal ini tidak juga ikut disebabkan oleh reaksi semantik kita pada kata-kata tertentu yang kehilangan maknanya, akibat terlalu lama disalahgunakan dan terus-menerus dipakai untuk menutup berbagai perbuatan yang bertentangan dengan makna aslinya?

Hal serupa ini sebenarnya tidak terjadi dengan bahasa kita saja jika kita hendak menyenangkan hati kita dengan kecelakaan yang serupa yang menimpa bahasa lain. Umpamanya peristiwa *Watergate* di Amerika telah mengembangkan apa yang dinamakan orang Amerika *Watergate Lingo*. Di waktu itu juru bicara Rumah Putih di Washington suka sekali mempergunakan kata "*no longer operative*". Artinya : *it wasn't true in the first place. I am sorry I said it. I thought it was true then, but I know now it wasn't.*

Dalam bahasa Inggris biasa orang berkata tentang "*employees being fired*", tetapi dalam Departemen Luar Negeri AS, pegawai-pegawai di — *selected out*. Mereka tidak dipecat, tetapi dipilih keluar. Kira-kira sama juga dengan rumusan kita di Indonesia, bahwa Ibnu Sutowo tidak pernah dikena-

kan tahanan di Indonesia, bahwa Ibnu Sutowo tidak pernah dikenakan tahanan rumah, tetapi hanya diwajibkan tetap di rumah saja. Sebuah kata Indonesia yang mendahului *Watergate Lingo* adalah sumbangan wajib. Kata ini menyembunyikan tindakan memaksa orang membayar sesuatu, atau tindakan pemerasan, tetapi dengan memakai istilah "sumbangan wajib", yang melakukan paksaan merasa bebas dari perbuatan memaksa atau memeras.

Kegiatan ilegal dinamakan *games* dalam *Watergate jargon*. Uang yang didapat atau dipergunakan secara ilegal dinamakan "*laundered*" ('dicuci'). Pada kita disebut "memutihkan". Melakukan pencurian, memasuki tempat orang lain secara tidak sah disebut "*surreptitious entry*". Mencangkok telepon orang, melanggar hukum di Amerika Serikat. Orang-orang Nixon yang melakukannya hanya mengadakan *electronic surveillance*. Masih banyak contoh-contoh lain dapat diberikan dari pemakaian kata-kata yang bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan mereka sendiri untuk melepaskan tanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan mereka sendiri untuk mengelabui lawan-lawan politiknya dan dalam proses ini telah mengembangkan satu *lingo* atau jargon yang merusak makna berbagai kata bahasa Inggris Amerika.

Jelaslah bahwa ada hubungan timbal-balik antara bahasa dan kebudayaan dan jika kita memakai arti kebudayaan sebagai apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh suatu masyarakat, hubungan bahasa dengan tingkah laku masyarakat dan anggotanya juga jelas. Bahasa mempengaruhi kebudayaan, dan sebaliknya, kebudayaan mempengaruhi bahasa. Bahasa amat penting kedudukannya dalam seluruh perikehidupan manusia, sangat besar perannya sebagai alat komunikasi suatu bangsa. Bahasa meliputi seluruh kegiatan manusia, baik kegiatan fisik maupun kegiatan mental, ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Seandainya tidak ada bahasa, dapatkah kiranya manusia berpikir?

Bahasa itu sendiri merupakan sebuah sistem komunikasi yang amat kompleks, yang amat peka terhadap manipulasi disengaja atau tidak disengaja terhadap makna kata-katanya. Sebuah kebiasaan yang amat mudah merusak makna kata-katanya. Sebuah kebiasaan yang amat mudah merusak makna kata-katanya. Sebuah kebiasaan yang amat mudah merusak makna kata adalah pemutarbalikan arti kata. Salah sebuah ciri kelakuan semantik orang adalah enggan untuk mengatakan bahwa dia tidak mengerti sesuatu. Menghadapi pemakaian istilah-istilah yang tidak diketahui maknanya yang jelas, banyak orang lebih suka mengangguk-angguk seakan mengerti daripada bertanya apa yang dimaksud oleh orang yang memakai kata itu.

Seorang penulis baru-baru ini menyelipkan berbagai kata dalam karangannya yang disiarkan dalam sebuah koran di Jakarta; contoh: melalui "surveillance" ('pengawasan tanpa mengawasinya')

Pemerintah dapat secara *elegan* mengatur program Bimas padinya di wilayah-wilayah persawahan yang terbaik. Dengan demikian, terlihat pula bahwa "surveillance" ini "built-in" dalam sistem pengawasan sekarang.

Jika di samping erosi makna kata-kata asing di antara kata Indonesia, tidaklah timbul pertanyaan sampai ke mana sebenarnya bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dapat dipahami pembaca, atau orang yang kita hadapi berbicara? Belum pula penyerbuan singkatan-singkatan ke dalam bahasa Indonesia yang telah terjadi selama ini.

Dalam sidang mengadili sekelompok pimpinan tertinggi polisi kita baru-baru ini, ada kalimat-kalimat berikut dikeluarkan dalam sidang pengadilan. Hakim: Setelah Skoi sampai pada Polri, dan menjadi Skop, ini diterimakan pada Kajanku, pada Kapolri atau kepada Deputy. Siapa yang biasa menerima Skoi itu?

Kalau Saudara-saudara belum tahu apa Skoi, maka itu artinya Surat Keputusan Otorisasi Induk, dan saya mohon maaf tidak mengerti apa itu Skop dan Kajanku. Juga di polisi kita ada Balakpus, yakni Badan Pelaksana Pusat. Mengapa tidak disingkat menjadi Bapelpus, Bapepu, atau Bapepus tentulah hanya yang membuat singkatan saja yang mengetahuinya. Membuat singkatan ada ilmu dan seninya sendiri rupanya.

Semua ini seakan sebuah gambaran dunia surealis¹. Dalam seni lukis, aliran surealisme menggambarkan dunia yang penuh kesepian, kosong tetapi mengandung berbagai sugesti dan kehadiran-kehadiran yang misterius².

Di mana kenyataan, di mana kebenaran terletak? Pada yang jelas terlihat dan di dalam terang, ataukah dalam bayangan, dan diselubungi warna-warna gelap, atau di balik tikungan jalan yang menghilang di kaki langit yang mengabur dan jauh? Kita tidak tahu. dan tidak pernah akan tahu.

Gambaran pemakaian bahasa Indonesia selama ini dengan erosi maknanya, ditambah pula dengan reaksi semantik kita pada berbagai kata seperti keadilan, kebebasan, **tanggung jawab**, dan sebagainya tercermin juga dalam tingkah laku banyak orang Indonesia di masa kini. Ingatlah cerita-cerita fantastis tentang kelakuan penguasa-penguasa Pertamina dengan dana-dana maskapai minyak nasional ini. Dan terakhir tidakkah tingkah laku pembesar-pembesar tertentu di DKI ditambah sejumlah pembesar-pembesar bank dengan si A Cai alias Endang Wijaya menimbulkan kesan dari suatu du-

nia surealis, di mana hukum-hukum logika tidak berlaku? Selain itu, jika kita membaca laporan-laporan dari sidang pengadilan tentang pembesar-pembesar polisi yang mempergunakan sisa anggaran belanja seperti uang pribadi mereka . . . yang membangun kamar mandi seharga seratus juta rupiah . . . ini juga menimbulkan sebuah lukisan dunia surealis lagi.

Media Massa dan Bahasa Indonesia, Peningkatan Taraf Pengetahuan, dan Masyarakat

Media massa Indonesia dalam kedudukannya kini, dan dengan keadaan bahasa Indonesia seperti yang saya lukiskan, saya lihat telah berbuat banyak untuk menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan taraf pengetahuan dan kerohanian masyarakat. Saya rumuskan ini berbeda dengan rumusan Panitia Kongres Bahasa ini. Apakah penghidangan demikian banyak laporan dan ulasan mengenai perkembangan ilmu dan teknologi, mengenai masalah lingkungan hidup, sumber-sumber alam, energi, kependudukan, perang dan damai di dunia, seni budaya, dan sebagainya telah meningkatkan taraf pengetahuan dan kerohanian masyarakat masih harus diteliti dengan cermat; dan saya tidak punya kesempatan untuk melakukan ini. Akan tetapi, jika kita melihat demikian banyaknya masih kasus keganasan dalam masyarakat kita, tahanan polisi yang mati dalam tahanan, penembakan bis yang melewati pengawal asrama tentera, kegiatan korupsi yang masih terus berlaku, dan berbagai tingkah laku masyarakat yang tidak sesuai dengan taraf pengetahuan dan kerohanian yang tinggi, timbul juga kesan bahwa dalam hal ini pun masih banyak yang harus dikerjakan oleh media massa dan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia dalam Media Massa Perlu Dipelihara dengan Baik

Perlunya bahasa Indonesia yang dipakai dalam media massa dipelihara baik sama saja dengan perlunya bahasa Indonesia yang baik dipelihara oleh setiap pemakainya yang lain. Ditambah dengan kedudukannya sebagai media massa tentulah bertambah penting bahasa Indonesia dalam media massa dipelihara, diasuh, dikembangkan sebaik mungkin, dan jangan dipergunakan secara semberono dan hantam kromo. Dalam rangka ini penting media massa menyesuaikan pemakaian bahasa yang baik dengan usaha untuk menyampaikan kebenaran. Di sini juga berlaku "menyesuaikan kata dengan perbuatan". Amat perlu media massa menghindarkan timbulnya kesan pada pembacanya bahwa surat kabar "berbohong saja", atau "ikut saja berbohong", atau menutup fakta-fakta yang sebenarnya karena jika hal serupa ini terus-menerus terjadi, ia tidak saja menggoncang kepercayaan terhadap integritas media massa, tetapi juga mendorong erosi makna kata yang dipakai dalam media massa itu.

Untung Rugi Koran-koran Berbahasa Daerah dan Asing

Masalah ini pun memerlukan penelitian yang cukup sebelum kita dapat memberikan analisis yang tepat. Saya tidak mempunyai data yang cukup mengenai penerbitan koran berbahasa daerah dan asing, tetapi jika kita hendak berkomunikasi dengan daerah dan asing, tetapi jika kita hendak berkomunikasi dengan bangsa kita sendiri, **teranglah** bahwa memakai bahasa asing bukanlah cara yang tepat.

Bergantung kepada kondisi masing-masing daerah, mungkin ada bahasa daerah yang dapat dipergunakan secara lebih efektif untuk berkomunikasi daripada memakai bahasa Indonesia. Ini juga masih memerlukan penelitian. Bahasa daerah di negeri kita berbeda-beda perkembangannya dan kemampuannya. Bahasa Jawa umpamanya sangat sarat dengan nilai-nilai kefeodalan. Menjadi pertanyaan apakah bahasa Jawa dapat melakukan peran alat komunikasi dalam pembangunan masyarakat kita yang demokratis dan terbuka? Kebenaran pendapat Orwell (1946) betapa politik dan ekonomi juga mempengaruhi perkembangan bahasa dapat kita lihat umpamanya pada masuknya secara menyolok kata-kata bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini bukan saja karena pusat kegiatan politik dan ekonomi bangsa kita berada di Jawa, tetapi juga karena saudara-saudara kita dari Jawa kini dominan kedudukannya dalam politik di negeri kita. Masuknya kata-kata bahasa daerah kedalam bahasa Indonesia saya anggap tambah memperkaya bahasa Indonesia. Yang patut kita renungkan adalah orientasi feodal dalam bahasa Jawa yang dibawa pula ke dalam pemakaian bahasa Indonesia. Umpamanya kata *berkenan*. Kata ini dipakai di masa Jepang untuk menggambarkan kegiatan Mikado dan kemudian penguasa-penguasa tertinggi militer Jepang. Mikado berkenan berbuat ini dan itu. Gunseikan berkenan begini dan begitu. Semasa perang kemerdekaan kita kata ini menghilang, dan kemudian dihidupkan kembali ketika Soekarno berkuasa penuh, dan kini kata ini diteruskan saja pemakaiannya tanpa dipikirkan lagi bahwa tepat melukiskan pejabat-pejabat "berkenan" melakukan apa yang memang adalah tugas dan kewajiban mereka itu. Kata *berkenan* dalam hubungan ini penuh diberati oleh konsepsi kekuasaan kebudayaan feodal, dan sangat bertentangan dengan cita-cita kerakyatan perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Pemakaian bahasa daerah yang penuh unsur feodal karena itu tidak membantu perkembangan kehidupan demokrasi di tanah air kita. Jadi, tidak mudah begitu saja menentukan untung rugi pemakaian bahasa daerah dalam media massa.

Sebagai pengamatan umum, saya tidak melihat sesuatu keberatan bahasa daerah dipergunakan oleh media massa. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Oleh karena itu, ia selalu menarik. Bahasa daerah senantiasa dapat merupakan sumber untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa daerah mungkin lebih mudah dipahami dan pikiran-pikiran yang hendak disampaikan mungkin lebih mudah dicernakan dan meresap ke dalam pikiran dan sanubari rakyat. Akan tetapi, pemakaiannya hendaknya selalu diikuti dengan kesadaran pada hal-hal yang saya sebut terlebih dahulu tadi.

Kesimpulan dan Usul

Orwell (1946) berpendapat bahwa kemunduran suatu bahasa pada akhirnya terjadi oleh penyebab-penyebab politik dan ekonomi dan bukan karena pengaruh buruk dari pengarang si Polan atau Anu. Musuh utama bahasa yang jernih, kata Orwell, adalah ketidakjujuran. Dalam kerangka situasi kita kini, hal ini dapat dilukiskan sebagai "lain di mulut, lain di hati", atau "lain ucapan, lain perbuatan".

Orwell menambahkan bahwa jika iklim umum buruk, maka bahasa menderita. Saya merasa dan ini merupakan terkaan karena saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menunjingnya bahwa bahasa Jerman, Rusia, dan Italia telah mundur selama sepuluh atau 15 tahun ini sebagai akibat diktatur di negeri-negeri itu, tetapi jika pikiran mengorupsikan bahasa, maka bahasa dapat pula mengorupsikan pikiran, kata Orwell.

Banyak orang menyangka bahwa kata adalah sesuatu yang amat sabar dan boleh saja diperlakukan secara semena-mena dan kata itu tidak akan rusak. Akan tetapi, kata dan bahasa adalah sesuatu yang hidup. Diperlakukan secara kejam, jika tidak dijaga dan dipelihara dengan kecintaan pada maknanya yang sebenarnya, kata dapat rusak, sakit, dan mati tiada bernyawa lagi. Dia dapat membalas melalui reaksi semantik orang pada siapa kata itu ditujukan hingga komunikasi yang dikehendaki tidak tercapai sama sekali. Jika kata terus-terus dipergunakan untuk membohong, maka daya maknanya hilang dan akhirnya yang memakainya tidak mencapai tujuannya semula.

Kiranya sebuah cerita kanak-kanak lama yang suka bercanda menakutkan orang sekampungnya dengan serigala merupakan ilustrasi yang baik tentang ini. Pada permulaannya, setiap kali anak ini berlari ke dalam kampung dengan napas terengah-engah berteriak: Serigala! Serigala! semua orang kampung segera berlari membawa tombak dan pedang ke luar desa untuk me-

lindungi ternak mereka, tetapi setelah beberapa kali dikelabui begini, maka pada suatu hari ketika seekor serigala yang ganas benar-benar datang dan anak itu datang berlari menjeritkan: Serigala! Serigala!, tak seorang juga yang keluar rumah. Kelihatannya seakan ada keengganan kita kini untuk berkonfrontasi dengan berbagai masalah yang sedang menimpa kita; kita lebih suka memakai kata-kata lain untuk mengelakkan berkonfrontasi perut-tatap-perut dengan masalah-masalah ini.

Bukan tahanan rumah, tapi diwajibkan tetap dirumah. Bukan paksaan, tapi sumbangan wajib. Bukan korupsi, tetapi Komerisialisasi jabatan. Kata *korupsi* kita rasa terlalu keras, langsung membawa kita pada tindakan melanggar hukum dengan segala implikasinya, kurang *tepo seliro*, sedangkan *komersialisasi* adalah kata yang lebih terhormat. *Komersialisasi* berasal dari kata *comerco*, 'perdagangan' dan gambar yang ditimbulkannya bukan gambaran hitam kelam yang buruk seperti kata *korupsi*, sedangkan saya menulis kertas kerja ini timbul pula beberapa pikiran yang hendak saya tuangkan dalam sebuah usul pada Kongres Bahasa Indonesia. Saya merasa bahwa perlu diteliti perbedaan pemakaian bahasa di masa revolusi, atau sebelumnya, selama masa perjuangan nasional di zaman penjajahan. Saya rasa, (dan karena tiada bahan, dan tidak berkesempatan melakukan penelitiannya, maka saya tidak pula berani memastikannya) di masa itu pemakaian bahasa kita lebih banyak berorientasi pada "bahasa solidaritas". Pemakaian bahasa di masa perjuangan nasional dan revolusi ini perlu dibandingkan dengan pemakaian bahasa di masa Soekarno melaksanakan kekuasaan pribadinya, dan kemudian pula dengan masa kini di masa saya melihat golongan penguasa lebih berorientasi pada pemakaian "bahasa kekuasaan".

Sebuah contoh dari "bahasa kekuasaan" ini adalah ucapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anarki intelektual akan ditindas. Pernyataan menteri serupa ini memancing berbagai pertanyaan, siapa yang menentukan apa itu anarki intelektual? Dan siapa yang menjadi pendakwa, dan siapa pula yang menjadi hakimnya?

Dengan membandingkan pemakaian bahasa solidaritas selama masa perjuangan nasional dan peperangan kemerdekaan kita dengan bahasa kekuasaan setelahnya, kita mungkin dapat memahami lebih baik apa yang telah terjadi dengan bahasa kita, apa yang telah terjadi dengan diri kita dan masyarakat kita, dan pengaruh-pengaruh timbal-balik apa yang membawa kita pada keadaan bahasa kita dan diri kita hari ini. Dengan demikian, kita akan dapat berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah terjadi,

tidak saja pada bangsa kita, tetapi pada diri kita sendiri.

Sebuah contoh dari bahasa kekuasaan adalah digantinya perkataan *saudara* dan *bung* semasa perjuangan nasional dan peperangan kemerdekaan, dengan kata *bapak* dan *ibu*. Kata *bapak* dan *ibu* dalam bahasa solidaritas mengandung makna hubungan kekeluargaan yang mesra dan hangat. Akan tetapi, dalam pemakaian kata *bapak* dan *ibu* dalam kerangka bahasa kekuasaan maka ia menegaskan hubungan antara atasan dengan bawahan, antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, antara yang *inferior* dengan yang *superior* tanpa unsur kemesraan.

Selain penelitian terhadap bahasa solidaritas dan bahasa kekuasaan ini, saya juga mengusulkan agar dilakukan penelitian mengenai reaksi semantik manusia Indonesia kini terhadap berbagai kata seperti keadilan, hukum pembangunan, polisi, ketertiban, dan sebagainya. Hal ini perlu kita ketahui. Penting menyadari apakah kata-kata demikian masih sama maknanya bagi kita semua?

Kehilangan makna dan daya kata-kata bahasa Indonesia juga tercermin umpamanya dalam persoalan pengadaan buku di Indonesia. Perjuangan mengadakan buku semurah mungkin di Indonesia bukan hanya perjuangan pengusaha penerbit buku (IKAPI) atau impian para pengarang Indonesia, tetapi juga telah termasuk dalam program Pemerintah sejak puluhan tahun terakhir ini. Pemerintah malahan sampai mengadakan Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional. Berbagai seminar dan kegiatan pekan buku diadakan. Berbagai pernyataan resmi dikeluarkan, tetapi hasilnya hingga kini nol besar saja. Selain itu, secara berkala berbagai pihak di masyarakat mengeluarkan jeritan mereka dengan berbagai gaya bahasa yang disusul kemudian dengan keheningan. Demikian pula dengan "pola hidup sederhana", dengan "konsepsi pertumbuhan ekonomi agar bergerak sama dengan keadilan", dan sebagainya, dan sebagainya. Akan tetapi, kerusakan bahasa, erosi makna, reaksi semantika yang negatif terhadap kata-kata, saya yakin dapat diperbaiki. Obatnya yang tepat di samping pengembangan tata bahasa yang logis, pembakuan ejaan, menghentikan membuat dan memakai penyingkatan kata-kata adalah kita harus belajar menghormati dan mencintai bahasa kita. Kita harus menyesuaikan kata dengan perbuatan kita. Kita harus memperbaiki nilai-nilai budaya, nilai moral dan estetika kita, dan kita harus menghormati martabat manusia kita. Hanya dengan berbuat demikian kita dapat mencegah terusnya erosi makna kata-kata bahasa kita. Hanya dengan berbuat demikian kita dapat mengembangkan bahasa Indonesia dengan kata-kata jernih dan

bening, yang menimbulkan reaksi semantik yang tepat dan dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang wajar membawa kita pada saling pengertian dan solidaritas bangsa yang kokoh.

CATATAN

- 1 Larousse, *surrealisme - tendance d'une école (nee vers 1942) a negliger toute preoccupation logique*
- 2 John Canaday, Metropolitan Seminars in Art.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, Takdir. 1965. *The Failure of Modern Linguistics*. Kuala Lumpur.
- Gambino, Richard. 1973. *Watergate Lingo, a language of non responsibility*, Freedom at Issue, New York: Freedom House.
- Hatta, Mohammad, Subardjo A.S., Maramis A.A., Sunarjo, Pringgogido, A.G. 1977. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Hayakawa, S.I. 1972. *Language in Thought and Action*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Lubis, Mochtar. 1977. *Manusia Indonesia*. Jakarta: Idayu Press.
- Orwell, George. 1956. *Politics and the English Language*. London: Horizon
- Robinson, W.P. 1972. *Language and Social Behavior*. London: Penguin Books.
- Sapir, Edward, 1921. *Language*. New York: Harcourt, Brace & World Inc.
- Sumardjan, Selo, 1972. *Imbalances in Development, the Indonesian Experience*. Ohio University: Centre for International Studies.
- Sritua Arief. 1978. *Indonesia: pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan dan kemiskinan massal*. Lembaga Studi Pembangunan.

RAGAM LISAN LEWAT RADIO DAN TELEVISI

Toeti Adhitama

Televisi Republik Indonesia.

Seorang teman yang ahli dalam bidang komunikasi baru-baru ini mengatakan: "Lama kelamaan bahasa Jakarta menjadi bahasa resmi kita". Alasannya karena TVRI Jakarta menyebarluaskannya dan karena logat Jakarta kenyataannya lebih komunikatif. Oleh karena itu, masyarakat cenderung memilihnya sebagai bahasa percakapan sehari-hari, sebagai bahasa tidak resmi, yang secara berangsur-angsur nanti akan merembes ke bahasa resmi. Kapan logat itu akhirnya mengungguli lain-lainnya, bergantung pada penyebarannya kepada masyarakat dan pemakaiannya oleh masyarakat karena bahasa adalah sarana komunikasi yang dilembagakan oleh masyarakat. Bahasa adalah hasil perkembangan dan perubahan secara berangsur-angsur selama berabad-abad di tangan banyak generasi yang memakainya.

Pernyataan yang sepintas itu dapat kita renungkan bersama dalam rangka penelaahan kita tentang peranan apa yang dapat dimainkan media radio dan televisi untuk membina dan mengembangkan bahasa nasional, khususnya ragam lisan bahasa Indonesia. Siapa-siapa saja yang bertanggung jawab langsung terhadap kebijaksanaan penggunaan bahasa Indonesia lewat media elektronik itu.

Televisi dan Radio Perlu Berperanan

Sebagai sarana komunikasi, televisi dan radio bukan hanya berkewajiban menyuguhkan materi penerangan itu dengan jelas-jelas, menarik, dan mudah dimengerti serta diingat, tetapi juga berkewajiban memikirkan bagaimana masyarakat akan menghayati atau menerapkan penerangan yang diperolehnya itu.

Media massa umumnya, termasuk media elektronik, banyak mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat, lebih-lebih kalau jangkauan siaran itu demikian luas. Mutu kebudayaan dapat ditingkatkan atau sebaliknya dirusak olehnya. Dalam hal penggunaan bahasa lewat televisi dan radio, ragam lisan yang tidak terbina atau yang cacat dapat mudah sekali menyebar. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan bukan hanya agar bahasa itu jelas dan mudah ditangkap, tetapi juga agar bahasa itu sopan dan tidak menyimpang. Dengan demikian, tidak mengganggu komunikasi.

Bahwa televisi dan radio perlu ikut memainkan peranan untuk membina dan mengembangkan ragam lisan bahasa Indonesia, bukanlah semata-mata demi kepentingan bahasa itu sendiri. Hal itu juga menyangkut wibawa televisi dan radio yang bersangkutan sebab selain ragam lisan lewat televisi dan radio akan menentukan berapa besar keefektifan media elektronik itu sebagai sarana komunikasi; masyarakat juga akan memperhatikan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam hubungan ini, saya ingin mengutip pendapat dua ahli bahasa Amerika yang mengkhususkan penelaahannya dalam bidang ragam lisan.

Anderson (1947:17) mengatakan, "Dalam menggunakan bahasa lisan, kita akan kedengaran membosankan, tidak menarik atau tidak menyenangkan karena suara yang kita pakai (dalam hal ini 'suara' saya tafsirkan sebagai *ragam lisan*) cacat atau tidak tepat. Mungkin juga kita kedengarannya demikian karena kita memang membosankan, tidak menarik, atau tidak menyenangkan". Pernyataan di atas kemudian membawa kita pada pertanyaan, apa yang kita anggap cacat atau tidak tepat dalam bahasa lisan. Mengenai hal ini Riper (1947:15) menjelaskan, "Ragam lisan dianggap cacat kalau menyimpang terlalu jauh dari ragam lisan yang dipakai lain-lainnya sehingga terlalu menarik perhatian, mengganggu komunikasi, atau mengakibatkan pemakaiannya dianggap aneh".

Sudah barang tentu pola ucapan dan artikulasi yang kita pakai tidak selalu sama. Kita masing-masing mempunyai gaya tersendiri, dan gaya bahasa lisan yang kita pakai berubah-ubah sesuai dengan pokok pembicaraan, perasaan, dan sasaran. Akan tetapi, kalau perbedaan atau perubahan itu terlalu menyolok sehingga menjadi suatu penyimpangan, maka keefektifan komunikasi akan terganggu. Sebagai contoh, ada di antara kita yang secara sengaja atau tidak sengaja menerapkan pola ucapan bahasa Barat dalam bahasa kita. Bunyi-bunyi vokal atau konsonan Indonesia yang murni itu kemudian kita beri tambahan bunyi atau kita beri ekor sehingga kedengaran seperti bunyi vokal

atau konsonan suatu bahasa Barat. Kita tidak mengucapkan *pecat* tetapi *pecateh*, bukan *waktu* tetapi *waktuh*, bukan *dan* tetapi *dane*. Lagu kalimat Indonesia yang umumnya dapat dikatakan 'rata' itu kemudian kita turunkan sedemikian rupa, sehingga kedengaran *manja*. Tekanan suara yang biasanya kita tempatkan pada suku kata kedua dari belakang atau suku kata terakhir itu (dalam hal ini agaknya belum ada kesepakatan di kalangan ahli-ahli bahasa kita), kemudian kita tempatkan pada suku kata pertama. Padahal, dalam bahasa Indonesia tekanan suara tidak pernah jatuh pada kata pertama kalau kata itu terdiri lebih dari dua suku kata. Kalau kita mengucapkan kata *presiden* dengan tekanannya pada suku kata *pre*, tentunya salah. Apakah penyimpangan itu dilakukan secara sengaja atau tidak, yang jelas pendengar akan terganggu. Misalnya, kalau kita menonton televisi atau mendengarkan radio, lalu penyiarinya bertindak terlalu manja atau terlalu menyimpang dalam membawakan ragam lisanya, maka perhatian kita bukannya tertuju pada pesan atau penerangan yang dibawakannya, tetapi lebih tertuju kepada caranya membawakan pesan atau penerangan itu. Komunikasi menjadi terganggu sehingga tidak efektif lagi.

Dari contoh-contoh tadi diharapkan timbul pemikiran, apa yang dapat kita lakukan supaya komunikasi televisi dan radio dapat efektif dan supaya tidak terjadi penyimpangan yang berlarut-larut yang dapat merusak integritas bahasa Indonesia mengingat bahwa pengaruh elektronik sangat besar terhadap masyarakat.

Mencari Lafal Baku

Mungkin yang pertama-tama perlu kita pikirkan adalah mencari lafal baku yang dapat dijadikan pedoman. Ragam lisan yang bagaimana yang kita anggap baku? Apakah kita pernah merumuskannya? Kalau belum, rasanya sekarang sudah waktunya untuk kita mulai. Televisi dan radio dapat kita jadikan medan atau forum penelitian, selagi ragam lisan yang mereka pakai sekarang ini masih bermacam-ragam dan belum menunjukkan adanya satu lafal untuk pedoman. Untuk itu, kita dapat memakai sistem penelitian yang dalam ilmu bahasa lazim disebut *field linguistics*, yang dapat kita terjemahkan 'riset lapangan dalam ilmu bahasa'. Tujuan riset lapangan itu adalah untuk mengumpulkan data linguistik dan untuk mempelajari gejala-gejala linguistik. *Field linguistics* melibatkan dua partisipan: pemakai bahasa yang sedang diteliti dan peneliti bahasa. Penelitian dilakukan secara langsung dengan mengadakan kontak perorangan. Pemakai bahasa atau informan menjadi sumber data.

Field Linguistics umumnya menggarap bahasa-bahasa yang belum pernah dipelajari atau yang kurang dipelajari, tetapi riset lapangan ini dapat juga dilakukan terhadap semua bahasa untuk segala macam tujuan. Misalnya, kalau seorang guru bahasa Inggris meminta pertolongan orang Inggris atau orang orang mengadakan riset semacam itu. Biaya yang dikeluarkan sampai mencapai jutaan dolar tiap tahunnya. Secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa *field linguistics* mempunyai empat kegunaan penting.

1. *Field linguistics* dipakai untuk mengadakan penelitian tentang bahasa-bahasa yang ada di dunia. Sampai sekarang kita belum merasa pasti benar mengenai berapa jumlah bahasa yang ada di dunia. Semakin banyak kita mengadakan penelitian, semakin terungkap bahwa jumlah bahasa yang ada terbukti lebih banyak daripada yang kita ketahui. Kira-kira empat dasawarsa yang lalu diperkirakan bahwa di dunia ini terdapat antara 2.500 dan 3.500 bahasa. Akan tetapi, menurut perkiraan terakhir, jumlah itu antara 4.000 dan 7.000.

2. Riset lapangan sangat penting untuk pengembangan ilmu bahasa itu sendiri. Riset itu dapat menyumbangkan data untuk mempelajari tingkah laku bahasa pada umumnya. Berdasarkan hasil-hasil penelitian semacam itu, sekarang kita mengetahui bahwa ada banyak ciri-ciri yang sama dalam bahasa bahasa di dunia. Kita kemudian juga mengenal berbagai variasi yang ada dalam bahasa-bahasa itu.

3. Ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dapat memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai oleh ilmu bahasa. Sebagai contoh, antropologi sudah sejak lama menyadari besarnya manfaat ilmu bahasa untuk pengembangan pengetahuan antropologi. Ahli-ahli antropologi pada waktu ini menggarap berbagai masalah -historis, struktural, dan fungsional- yang harus diteliti lewat ilmu bahasa. Misalnya, apa hubungan antara berbagai aspek sikap kultural dan struktur semantik. Akan tetapi, antropologi bukan satu-satunya ilmu pengetahuan yang dapat memanfaatkan teknik-teknik ilmu bahasa. Ahli bahasa Bloomfield (1925:1-5) pernah mengatakan "Ilmu bahasa sangat erat hubungannya dengan etnologi, tetapi dalam urutan ilmu-ilmu pengetahuan yang semakin rumit itu, ilmu bahasalah yang menjadi pelopor karena selain psikologi, ilmu bahasa menjadi salah satu landasan dan menjadi penghubung antara berbagai ilmu pengetahuan alam dengan manusia." Apa yang terjadi sejak itu dalam dunia ilmu pengetahuan hanya mempertegas kebenaran pendapatnya. Dewasa ini ilmu bahasa tidak boleh diabaikan oleh ahli-ahli falsafah, ilmu jiwa, atau agama.

4. Akhirnya, dan yang mungkin paling penting dalam rangka penelaahan kita mengenai ragam lisan bahasa Indonesia ialah bahwa riset lapangan harus dilakukan jika kita akan memanfaatkan ilmu bahasa secara praktis untuk masalah-masalah kemasyarakatan. Misalnya, dengan berakhirnya masa penjajahan dan tumbuhnya negara-negara baru, sekarang ini terasa bahwa negara-negara baru perlu sekali membuat perencanaan dan perumusan mengenai bahasa nasional mereka. Mereka perlu menentukan berapa banyak bahasa yang dapat dipakai dalam batas wilayah masing-masing, yang mana yang akan dipakai dalam batas wilayah masing-masing, yang mana yang akan dipakai sebagai bahasa nasional, dan bagaimana cara menyesuaikan bahasa itu dengan kehidupan modern. Dalam abad ini kita saksikan serangkaian revolusi di bidang ilmu bahasa, sebagian karena akibat dari perkembangan politik--seperti halnya di Indonesia--dan sebagian lagi mungkin sebagai akibat peledakan penduduk. Jika tadinya suatu dialek yang dipakai sekelompok kecil masyarakat dianggap tidak penting, maka karena jumlah pemakainya bertambah akibat peledakan penduduk, yang tidak penting itu kemudian menjadi penting.

Kenyataan seperti ini mengajak kita berpikir, apakah logat Jakarta yang pada waktu ini hanya dipakai oleh sekitar lima juta penduduk Jakarta, nanti akan menjadi logat-logat lain, mengingat bahwa media elektronik menyebarkanluaskannya?

Kalau saya menyebut "logat Jakarta", sebenarnya itu hanya kasus untuk contoh. Istilah itu dapat saja kita ganti dengan "bahasa Indonesia yang berlogat asing, berlogat Jawa, atau berlogat Batak." Pesan yang ingin saya sampaikan adalah ragam lisan yang menyimpang dari disiplin bahasa akan dapat menyebar kepada masyarakat kalau televisi dan radio tidak membenahi diri dalam pemakaian bahasa Indonesia. Disiplin bahasa perlu dirumuskan. Sekali lagi, rasanya sudah tiba waktunya untuk mulai mengadakan penelitian tentang lafal baku yang dapat kita jadikan pedoman.

Sudah umum kita ketahui bahwa bahan mentah yang dipakai membentuk bahasa sebagai alat komunikasi adalah *bunyi*. Oleh karena itu, pertama-tama peneliti perlu mencatat bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan oleh informannya. Kalau televisi dan radio dijadikan medan penelitian, dalam hal ini penyiar dapat dipakai sebagai informan. Untuk tugas itu, peneliti yang bersangkutan sudah tentu harus ahli dalam ilmu bunyi bahasa atau fonetik sebab ia harus dapat melukiskan secara terperinci bagaimana warna-warna bunyi itu. Misalnya, apakah vokal Indonesia bersifat murni atau berekor? Apakah kita mengucapkan *dan* atau *dane*. Apakah vokal itu tergolong

vokal terbuka atau tertutup? Berapa besar vokal itu dipengaruhi oleh bunyi-bunyi yang ada di depan dan di belakangnya. Untuk melukiskan bunyi-bunyi itu peneliti dapat memakai gambar-gambar bunyi bahasa seperti yang sudah ditetapkan oleh IPA (*International Phonetic Alphabet*). Dengan gambar-gambar IPA, peneliti akan dapat menentukan dan kemudian merumuskan jenis-jenis bunyi yang ada dalam bahasa Indonesia—bagaimana vokalnya, konsonannya, tinggi rendahnya, intensitasnya, panjang pendeknya, dan sebagainya. Ini perlu karena menurut teori modern analisis suatu bahasa harus dimulai dari pangkalnya atau dari masing-masing bunyi yang mempunyai fungsi tata bahasa, yang dalam ilmu bahasa dikenal dengan istilah *fonem*. Setelah identitas masing-masing fonem kita ketahui, kita baru akan dapat mengenal unit-unit yang lebih besar, seperti morfem, kata, kalimat dan akhirnya arti atau isi dari bunyi itu.

Walaupun kita tahu bahwa bahan mentah yang dipakai membentuk bahasa adalah bunyi, tetapi semakin tinggi kebudayaan kita semakin besar pula kesadaran kita bahwa kalau hanya bunyinya saja yang indah dan isinya tidak ada, komunikasi itu sifatnya sangat elementer. Oleh karena itu, ragam lisan sebagai sarana komunikasi jangan hanya mengutamakan bunyi, tetapi juga harus memperhatikan isi. Ini mengingatkan saya pada Carrol (1964:4), ahli bahasa Amerika, yang dalam bukunya *Language and Thought* menceritakan bahwa ia pernah melihat gambar kartun yang melukiskan dua orang prasejarah sedang merenung berpikir-pikir. Dua orang itu baru saja mulai pandai berbicara, apa yang akan mereka bicarakan? Rupa-rupanya Carrol ingin mengatakan bahwa manusia mungkin tidak akan menciptakan bahasa kalau bahasa itu tidak mempunyai fungsi yang berarti. Dengan kata lain, kalau televisi atau radio diharapkan membina dan mengembangkan ragam lisan bahasa Indonesia, maka bukan hanya bunyi bahasa itu saja yang perlu mereka perhatikan, tetapi isi dari ragam lisan itu pun harus mereka perhatikan. Siapa yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengaturnya?

Ragam Lisan dalam Komunikasi

Untuk menjawab pertanyaan, siapa yang terutama bertanggung jawab dalam usaha membina dan mengembangkan ragam lisan bahasa Indonesia lewat radio dan televisi, terlebih dahulu marilah kita kaji pendapat yang mengatakan bahwa "bahasa lisan mencerminkan seluruh pribadi pembicara" bahwa dari setiap kata yang diucapkan pembicara, pendengar akan mendapat selintas gambaran mengenai sifat, pengalaman, tujuan atau perasaan pem-

bicara. Dengan demikian, bahasa lisan bukan hanya bunyi-bunyi yang dirangkaikan begitu saja untuk mengemukakan apa yang saat itu sedang dipikirkan pembicara. Bahasa lisan adalah penting dari perwatakan pembicara dan sangat besar perannya dalam menentukan kepribadian pembicara.

Jelaslah bahwa antara bahasa lisan dan pikiran terdapat kaitan yang mutlak. Mekanisme yang memproduksi suara kita hanya bekerja sesuai dengan kualitas dan intensitas ide-ide yang menggerakkannya. Kalau pembicara tidak tegas atau tidak peduli akan apa yang dibicarakannya, hal itu akan tercermin dalam bahasa lisan yang dipakainya. Suaranya akan terdenar ragu-ragu, membosankan, lemah atau sumbang. Akan tetapi, kalau pembicara menghayati apa yang dibicarakannya dan ingin mengkomunikasikan idenya, seluruh mekanisme yang memproduksi suaranya akan bekerja untuk itu.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan ragam lisan menyangkut dua aspek, yakni: (1) ide apa yang akan dikemukakan dan (2) bagaimana kita memakai suara kita untuk mengungkapkan ide itu. Singkat kata, supaya komunikasi dapat efektif, pembicara selain harus menghayati apa yang akan dikemukakannya, ia juga harus terampil dalam menggunakan bahasanya. Ia bukan hanya harus menguasai tata bahasanya, tetapi juga harus peka terhadap gaya bahasa yang dipilihnya. Apakah gaya bahasa itu bagus, buruk atau hambar, bergantung kepada mutu kata-kata itu. Gaya bahasa yang baik akan membantu pembicara demikian rupa sehingga pendengarnya akan: (1) mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembicara; (2) percaya pada apa yang dikatakannya; (3) ingat akan apa yang disampainya; dan (4) mau menerima ide-idenya. Untuk itu gaya bahasa itu harus: (1) jelas, (2) tepat, (3) menarik, dan (4) mengesankan. Secara awam dapat kita katakan bahwa untuk dapat dimengerti, pembicara harus berbicara dengan jelas. Kalau bahasa yang dipakainya sesuai dengan pokok pembicaraan, dengan sasarannya, dengan pertiwanya, dan dengan perasaannya dan pikirannya, pendengar besar kemungkinannya akan menghormati dan mempercayainya; kalau bahasanya menarik dan bagus, pendengar biasanya akan lebih mudah menangkapnya; dan kalau bahasanya mengesankan, pendengar akan terus ingat dan mau memanfaatkan pengetahuan yang diperolehnya itu. Jadi, persyaratan minimum yang harus ada pada bahasa yang dipakai pembicara adalah *jelas*, supaya pesan itu dimengerti, dan *tepat* atau *sesuai* sehingga bahasa itu tidak merugikan pembicara atau lembaga yang diwakilinya. Dalam hal ini televisi atau radio.

Apa yang dimaksud dengan bahasa yang jelas?

Bahasa yang jelas adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar yang dijadikan sasaran. Pendengar akan langsung mengerti dan mencatat dalam pikirannya segala-galanya yang saat itu disampaikan oleh pembicara. Untuk itu dalam berbicara perlu dipakai kata-kata yang sudah dikenal pendengaran yang kongkret, yang tegas, dan yang aktif. Misalnya, kata-kata yang umum dipakai dalam pembicaraan, yang sedang populer, akan lebih efektif daripada kata-kata yang muluk-muluk (*elegant*) atau kata-kata yang asing bagi pendengar. Kata-kata yang tidak dikenal memang membangkitkan rasa ingin tahu, tetapi dalam pada itu juga akan menghambat kelancaran komunikasi. Pembicara sebaiknya memakai bahasa yang dikuasainya, tetapi ia juga harus terus-menerus bertanya pada diri sendiri. "Apakah ada istilah-istilah yang lebih populer daripada yang saya pakai sekarang ini? apakah Pendengar mengerti kata-kata yang saya pakai ini?". Dalam pada itu, pembicara juga jangan tampak meremehkan penengarnya. Bagaimanapun jenis bahasa lisan yang dipakainya itu harus memakainya dengan meyakinkan, seakan-akan memang sudah seharusnya demikian. Selain itu, sebaiknya dipilih kata-kata yang mengandung pengertian yang kongkret supaya mudah diingat. Kalimat "Jauhilah kejahatan dan berbuatlah kebaikan" mempunyai pengertian yang terlalu umum dan abstrak; "Jangan membunuh" mempunyai pengertian yang lebih kongret. Kata *mahluk* mempunyai pengertian yang abstrak. tetapi kata *kuda* atau *manusia* sifatnya kongkret. Kata *demokratis* juga abstrak, tetapi kata *pemerintahan Presiden Suharto* kongkret. Bahasa yang abstrak, seperti halnya pemikiran yang abstrak, memang mempunyai nilai tinggi. Karya-karya tulisan di bidang falsafah dan ilmiah yang baik tidak mungkin meninggalkan kata-kata semacam itu.

Akhirnya, perlu juga diutamakan pemakaian kata-kata yang aktif. Kita umumnya lebih menyukai gambar yang hidup daripada gambar yang mati. Demikian juga kata-kata atau kalimat-kalimat kongkret yang menunjukkan gerakan aktivitas, akan jauh lebih jelas bagi pendengar. Untuk itu, pembicara dapat mengambil beberapa langkah praktis. Pertama, ia dapat mencari kesempatan untuk menggunakan kata-kata yang menunjukkan aktivitas. Mengatakan *mobil itu lari* akan lebih baik daripada mengatakan *mobil itu dapat menjalankan fungsi*; mengatakan *patung itu berdiri* akan lebih baik daripada mengatakan *patung itu mempunyai posisi vertikal*. Jadi, sebagai pedoman, pembicara sebaiknya memakai kata-kata, terutama kata-kata kerja yang menggambarkan gerakan dalam pikiran pendengar. Kedua, pembica-

ra sebaiknya memakai kata-kata, terutama kata-kata kerja yang menggambarkan gerakan dalam pikiran pendengar. Kedua, pembicara sebaiknya memilih apa yang disebut kalimat-kalimat aktif. Kalimat "DPR membentuk komite untuk meneliti masalah itu" akan lebih baik daripada "Masalah itu akan diteliti oleh komite yang dibentuk DPR".

Selain bahasa lisan yang jelas, demi kelancaran dan keefektifan komunikasi, juga dibutuhkan bahasa lisan yang tepat dan sesuai-sesuai untuk pokok pembicaraannya, sesuai untuk sasarannya (pendengar), dan sesuai untuk pembicaraannya.

Kalau bahasa lisan yang dipakai oleh pembicara kedengarannya tidak tepat atau tidak sesuai, alasannya biasanya karena ia memaksakan diri memakai bahasa atau kata-kata yang tidak dimengertinya dengan maksud supaya mengesankan, tetapi akibatnya malahan sebaliknya. Bahasa itu akan kedengaran berlebih-lebihan dan dibuat-buat. Atau bahasa itu tidak sesuai karena pembicaranya ingin turun ke kalangan pendengar yang menjadi sasarannya. Untuk itu, ia memakai bahasa yang populer, bahasa tidak resmi dengan akibat bahwa ia lalu kedengaran murah. Misalnya, rasanya tidak pantas kalau Bapak Menteri Pendidikan berbicara dengan logat Jakarta lewat televisi atau radio dengan maksud supaya pesan atau penerangan tentang masalah pendidikan yang akan disampaikan itu mengena untuk masyarakat Jakarta.

Sebaiknya pembicara menyadari bahwa mendengar lebih senang mendengarkan ia berbicara dan jelas dalam bahasa yang dikuasainya daripada ia berbicara dalam bahasa yang bukan bahasanya. Oleh karena itu, yang terpenting, bahasa yang dipakai pembicara harus kedengaran benar-benar milik pembicara itu, baik sebagai perorangan maupun sebagai pembicara. Sekali lagi ini menegaskan bahwa pembicara harus menghayati apa yang dibicarakan-nya.

Bahasa lisan seharusnya bukan hanya sesuai untuk pemakainya, tetapi juga sesuai untuk pendengar dan peristiwanya. Ada hubungan yang timbal-balik antara pengertian "sesuai untuk pembicara" dan "sesuai untuk pendengar". Kalau pokok pembicaraan itu sesuai untuk pembicara, maka sudah tentu akan sesuai pula untuk pendengar yang menjadi sasarannya. Dalam hubungan ini, saya ingin mengutip apa yang dikatakan Aristoteles, yang ahli bicara itu, untuk kita renungkan bersama. Ia mengatakan "janganlah kita

berbicara terlalu santai mengenai masalah-masalah yang rumit dan gawat dan janganlah kita berbicara terlalu serius mengenai hal-hal yang rumit kecuali kalau tujuannya memang untuk melucu”.

Berbicara tentang melucu, rasanya perlu kita singgung soal penggunaan bahasa lisan secara berlebih-lebihan dalam dunia periklanan. Ini menyangkut masalah sesuai tidaknya bahasa itu untuk pokok pembicaraan, untuk pembicara dan untuk pendengar. Kita biasanya tidak membicarakan soal-soal yang berkenaan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti sabun atau pasta gigi, dengan nada atau lagu kalimat yang luar biasa gembiranya yang mencerminkan seakan-akan kita mendapat kesempatan terbang ke bulan, bukan? Akan tetapi, kalau ragam lisan semacam itu terlalu sering kita dengar, berangsur-angsur akan dapat mempengaruhi kebiasaan kita berbicara. Siaran-siaran niaga oleh radio-radio swasta atau oleh RRI atau TVRI sendiri secara berangsur-angsur akan ada pengaruhnya terhadap bahasa kita. Sebagai contoh, kalau kita dengarkan siaran-siaran radio swasta umumnya, akan dapat kita dengarkan siaran siaran radio swasta umumnya, akan dapat kita dengar bahwa ragam lisan yang dipakai oleh penyiar-penyiarnya sudah banyak menyimpang dari ragam lisan yang umum dipakai.

Tadi sudah saya sebutkan, ragam lisan menyangkut dua aspek. Pertama ide apa yang akan dikemukakan di dalamnya dan kedua bagaimana kita memakai suara kita untuk mengekspresikan ide itu.

Berbicara mengenai suara, kita akan sampai pada soal ucapan. Kata *ucapan* mencakup dua pengertian. Dalam pengertian luas yang dimaksud dengan *ucapan* adalah seluruh kegiatan yang kita lakukan untuk memproduksi bunyi bahasa. Ini meliputi *articulation*, istilah yang dipakai untuk menggambarkan di mana atau bagaimana lidah, gigi, bibir, dari langit-langit kita pada waktu kita membentuk bunyi, baik vokal maupun konsonan. Dalam pengertian sempit, yang dimaksud dengan *ucapan* adalah benar tidak ucapan kita waktu berbicara, apakah tekanan kata tidak salah (*pertama* atau *pertama*), apakah tiap suku kata kita ucapkan dengan jelas (*pemrentah* atau *pemerintah*), dan apakah kita memberikan tambahan bunyi pada suku-suku kata itu (*dane* dan bukan *dan*).

Untuk tidak membingungkan pendengar dan supaya perhatian pendengar tetap tertuju pada pembicara, bahasa lisan harus kedengaran jelas dan tegas. Ucapan harus mempermudah dan bukan mempersulit pengertian yang akan disampaikan oleh pembicara. Untuk mengetahui apakah pembicara cukup jelas ucapannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikannya.

Dalam komunikasi resmi, artikulasi bunyi konsonan harus lebih hati-hati dan tepat daripada dalam komunikasi tidak resmi. Walaupun dalam percakapan biasa mungkin ucapan pembicara sudah jelas, tetapi di depan umum ia perlu lebih hati-hati supaya tidak menimbulkan kebingungan atau salah pengertian. Masalahnya, kalau pendengarnya tidak mendengar dengan jelas dan tidak mengerti apa yang diucapkannya, ia tidak dapat diminta berhenti berbicara untuk mengulangi kata itu. Dalam wawancara mungkin dapat dilakukan, tetapi waktu yang sangat terbatas dan berharga itu kemudian akan dirugikan. Selain itu, ucapan yang ceroboh atau malas juga akan merugikan mutu bahasa lisan. Salah tekanan (*pertama* versus *pertama*), penghilangan suku kata (*pemrentah* versus *pemerintah*), penyambungan kata-kata ceroboh dan tergesa-gesa, suara yang hilang timbul-semua itu mempengaruhi. Akan tetapi, untuk mengatakan atau menentukan ucapan bagaimana yang benar, tidaklah semudah yang kita kira. Tidak mudah karena tiap orang mempunyai pendapat mengenai hal itu. Lebih-lebih lagi karena di kalangan ahli-ahli bahasa sendiri seringkali belum ada kesepakatan. Misalnya, *unit* atau *yunit*?; *regional* atau *rejional*?

Sebagian ahli bahasa malahan berpendapat bahwa ucapan dapat bervariasi karena ucapan yang mula-mula dianggap salah, tetapi kalau kemudian menyebar luas, akhirnya akan dibenarkan juga. Karena bunyi bahasa atau ucapan terus-menerus mengalami perubahan, lalu siapa yang akan menilai apakah ucapan baru itu boleh disebarkan atau tidak? Lagi pula bahasa adalah sarana komunikasi yang dilembagakan masyarakat, hasil dari perkembangan dan perubahan secara berangsur-angsur selama berabad-abad.

Pihak yang mempunyai kewajiban resmi untuk membina dan mengembangkan bahasa tentu menyadari hal ini. Yang mungkin dapat disarankan adalah agar media elektronik membatasi diri dengan hanya menggunakan bahasa yang dipakai orang-orang terpelajar sebagai pedoman. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang selain bahasa nasional kita, juga mungkin dapat mengganggu kelancaran keefektifan komunikasi.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan saya ingin menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Panitia Kongres Bahasa Indonesia III.

- 1) Bagaimana peranan radio, televisi, dan film dalam usaha mencari ciri-ciri lafal baku bahasa Indonesia?

Radio, televisi dan film dapat menyediakan diri sebagai forum atau medan penelitian, misalnya, dengan menggunakan penyiar-penyiarnya sebagai informan, tetapi penelitian itu sendiri, yang memang sudah waktunya diadakan, tentunya harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkemampuan. Setelah ciri-ciri lafal baku itu dirumuskan, barulah media elektronik dapat mengambil langkah-langkah untuk membenahi ragam lisan yang dipakainya. Oleh karena bahasa lisan mempunyai hubungan mutlak dengan pikiran pemakainya atau pembicaranya, baik televisi maupun radio perlu lebih hati-hati dalam memilih pembicara-pembicaranya mengingat bahwa media elektronik besar sekali pengaruhnya terhadap tingkah laku masyarakat. Lagi pula ini bukan hanya demi kepentingan bahasa itu sendiri, tetapi juga demi wibawa mereka sebab bahasa lisan, yang merupakan alat komunikasi paling penting dalam media itu dapat menentukan lancar tidaknya atau efektif tidaknya komunikasi.

2) Bagaimana peranan radio, televisi, dan film dalam usaha mencari ciri-ciri ragam lisan formal bahasa Indonesia?

Jawabnya hampir serupa dengan yang pertama, yaitu agar televisi atau radio lebih hati-hati dalam memilih pembicara-pembicaranya. Lagi pula bahasa yang dipakai dalam formal umum seperti televisi memang sebaiknya bahasa formal. Tata bahasa harus rapi dan gaya bahasa harus sesuai dengan formalitas bahasa. Jangan sampai ada ucapan-ucapan "TVRI menyelenggarakan pelajaran bahasa Indonesia, oleh Pak Badudu, tetapi bahasa yang dipakainya banyak menyimpang".

3) Peranan apakah yang dapat dimainkan radio nonpemerintah dalam pengembangan ragam-ragam bahasa Indonesia?

Dalam hal kewajiban membina dan mengembangkan bahasa Indonesia, saya rasa tidak perlu ada pembedaan antara radio pemerintah dan nonpemerintah. Yang perlu diperhatikan adalah kebijaksanaan penggunaan jenis bahasanya oleh pihak yang bersangkutan.

Dari pembahasan tadi jelas bahwa usaha membina dan mengembangkan suatu bahasa tidak dapat diserahkan kepada satu pihak saja. Usaha ini harus berupa usaha kolektif. Namun, kalau ditanya "Siapa yang terutama bertanggung jawab?" Saya akan menjawab bahwa pemakai bahasa atau pembicara itu sendiri yang paling bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, Donald C. & Wallace, Karl. R. 1954. *Oral Communication*. New York: Appleton-Century-Croft, Division of Menedith Publishing Company.
- Carrol, John B. 1964. *Language and Thought*: Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Miller, George A. 1969. *The Psychology of Communication*. Baltimre, Maryland: Penguin Books, Inc.
- Ross, Raymond S. 1965. *Speech Communication*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Samarin, William J. 1967. *Field Linguistics*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Soper, Paul L. 1963. *Basic Public Speaking*. New York: Oxford University Press.
- Riper, Charles van. 1947. *Speech Correction*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
- Virgil, A. Andrson. 1942. *Training the Speaking Voice*. New York: Oxford University Press, Inc.

PERANAN MEDIA MASSA DALAM PERTUMBUHAN INDONESIA

H. Rosihan Anwar

Kabinet Wilopo jatuh pada tanggal 6 Juni 1953 dan digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo. Sebab utamanya yang menjadi gara-gara langsung adalah peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Utara, yaitu pendudukan tanah bekas perkebunan oleh para tani dan buruh yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa itu diberitakan tidak saja oleh pers di Medan, tetapi juga oleh pers nasional di Jakarta. Wartawan harian *Abadi*, Mohammad Sjaaf, waktu itu meninjau Sumatra Utara dan menulis dalam surat kabarnya tentang peristiwa Tanjung Morawa. Bagi penduduk setempat hal itu tidak saja jadi buah tutur, tetapi juga menimbulkan heboh. Kata *heboh* adalah kata bahasa Melayu yang berarti 'gaduh'; 'ribut'; 'huru-hara'. Anak Medan sudah biasa menggunakan kata itu dalam bahasa *colloquial* 'percakapan sehari-hari'. Di Sumatra Barat ia juga umum dikenal, tetapi di dataran nasional Indonesia kata itu belum begitu tersebar luas, dan mungkin juga pada waktu itu tidak begitu dipahami maknanya. Sekembalinya dari Sumatra Utara, Mohammad Sjaaf menulis serangkaian karangan tentang "heboh" di Tanjung Morawa. Dengan sekaligus kata itu menjadi terkenal secara nasional. Tidak lama kemudian Perfini membuat sebuah film yang disutradarai oleh Nya Abas Acup dan judulnya adalah "*Heboh*". Sejak peristiwa sengketa tanah di Tanjung Morawa itu kata *heboh* menjadi umum diterima khalayak dan dipakai secara luas. Sekarang ini, seperempat abad kemudian, mungkin tidak banyak orang yang mengetahui pasti sejarah asal-usul kata itu sampai menjadi *commonplace*, lumrah, dan biasa.

Pemberian di atas tadi memberikan petunjuk kepada kita tentang potensi serta peranan media massa dalam pertumbuhan kosa kata bahasa Indonesia. Dalam hal ini kita berhadapan dengan gejala yang sering terjadi, yaitu

mengambil dan menggali sebuah kata yang terdapat dalam bahasa daerah, kemudian mengorbitkannya ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia.

Sebuah contoh lain adalah apa yang saya lakukan dalam majalah *Siasat* di Jakarta pada awal tahun 1949. Pada waktu itu makin jelas kelihatan politik Belanda hendak memaksakan kehendaknya atas Republik Indonesia dengan melancarkan Aksi Militer Kedua mulai menemuhi jalan buntu. Perlawanan gerilya pihak Indonesia sangat menyulitkan kedudukan Belanda. Akibatnya adalah bahwa mau tidak mau jalan perundingan kembali harus ditempuh. Akan tetapi, pada waktu itu rupa-rupanya soal *prestige* merupakan halangan psikologis yang tidak kecil bagi Belanda guna menempuh jalan berunding. Dalam hubungan latar belakang inilah pada waktu itu saya memperkenalkan kata *gengsi* sebagai ganti terjemahan perkataan *prestige*. Kata *gengsi* itu saya pungut dari perbendaharaan bahasa remaja di Minangkabau, ketika saya menjadi pelajar MULO di Padang pada pertengahan tahun 1930-an. Kata *gengsi* itu sering saya pakai dalam menulis tentang soal-soal politik dalam tahun 1949, dan kemudian lama-kelamaan dia pun menjadi tersebar umum. *Kamus Inggris-Indonesia* oleh John M. Echols dan Hassan Sahdily (1975) memberikan uraian *prestige* berarti 'gengsi', 'perbawa', 'wibawa', 'martabat'. Rupa-rupanya dalam peredaran masa kata *prestige* itu sudah disalin dengan beberapa istilah. Namun, kata *gengsi* tetap menduduki tempat pertama dalam urutan. Diketahui atau tidak, diakui atau tidak oleh orang lain, tidaklah menjadi persoalan bagi saya. Akan tetapi, pribadi saya mempunyai kepuasan, diarr-diam majalah *Siasat* pernah berperan memperkenalkan dan melontarkan kata *gengsi* di dataran nasional.

Dalam bukunya *Indonesia in the Modern World* (New Delhi, 1961) Sutan Takdir Alisjahbana ketika menguraikan tentang bahasa Indonesia menyentuh proses perubahan yang terjadi dalam penggunaan kata ganti atau *pronouns*. Dalam masyarakat desa tradisional kata ganti umum dipakai melukiskan hubungan-hubungan darah seperti sebagai ayah, ibu, abang, kakak, adik, paman, atau bibi. Dalam masyarakat keraton feodal kata ganti yang sama melukiskan kedudukan sosial seseorang atau pangkatnya dalam hierarki resmi. Akan tetapi, sekarang ini di bawah pengaruh masyarakat dan kebudayaan modern, orang merasakan keperluan akan lebih banyak perkataan netral tanpa konotasi hubungan keluarga, status sosial, atau pangkat resmi. Dalam hubungan ini suatu percobaan menarik sedang dilaksanakan dewasa ini dengan kata *anda*. Kata ini direncanakan menggantikan keserbaragaman kata yang dipakai buat menyapa "orang kedua" dalam masyarakat desa tradisional dan

aristokratis feodal. Yang diharapkan ialah *anda* akhirnya akan mempunyai suatu kedudukan yang serupa dengan kata *you* dalam bahasa Inggris yang dapat dipakai guna menyapa setiap orang, tua atau muda, berkedudukan sosial tinggi atau rendah, demikian kata Takdir Alisjahbana.

Tahukah Anda bahwa penemu kata *anda* itu seorang perwira Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), pangkatnya Kapten, dan namanya Sabirin? Sabirin menggali kata *anda* dari Kamus Modern Bahasa Indonesia oleh Sutan Mohammad Zain. Ahli bahasa itu setuju kata '*anda*' dipakai sebagai pengganti *you*. Ia menjelaskan kata *anda* asal mulanya terdiri dari satu suku kata, yakni kata *ra* dari bahasa Kawi dan berarti 'yang mulia'. Lama kelamaan kata itu berubah menjadi *da*. Awalan *an* itu datangnya kemudian. Per-kataan *ratu* atau *datu* berarti 'orang yang mulia'.

Tahukah Anda, kata *anda* itu diperkenalkan pertama kali dalam harian *Pedoman*, Kamis tanggal 28 Februari 1957?

Tahukah Anda, Prof. Sutan Takdir Alisjahbana dalam *Pedoman Minggu* tanggal 14 April 1957 menyatakan setuju mempopulerkan kata *anda* sedangkan Prof. Purbotjaroko dalam *Pedoman Minggu* tanggal 28 April 1957 tidak dapat menyatakan apakah dia setuju atau tidak terhadap pemakaian kata *anda* sebagai kata ganti?

Tahukah Anda karena *Pedoman* sebagai koran sosialis yang pertama menyiarkannya, koran komunis *Harian Rakyat* menentangnya lalu mengajukan istilah-tandingan, yakni *andika*? Akan tetapi, ternyata kata *andika* tidak pernah mendapat pasaran, dan yang laku akhirnya ialah kata *anda*.

Tahukah Anda, dewasa ini tidak saja di Indonesia, tetapi juga di Malaysia dan Singapura kata *anda* sudah umum dan lazim dipakai? Bukan saja pramugari dalam pesawat Singapore Airlines dan MAS, melainkan juga penyiar acara TVRI, bahkan ahli bahasa Anton Moeliono sudah biasa dan jamak menggunakan kata *anda*?

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tidak melupakan jasa Sabirin ialah "seorang perwira AURI yang memperkaya bahasa" (mengutip penamaan yang diberikan kepada Sabirin oleh wartawan Harjadi Hartowardojo dalam *Pedoman Minggu* tanggal 10 maret 1957). Sesungguhnya, jasa Kapten Sabirin menemukan perkataan *anda* tidak dapat dikesalkan begitu saja. Prof. Sutan Takdir Alisjahbana menyatakan 21 tahun yang lalu, makna hakiki

kata *anda* ialah 'pendemokrasian dalam kata ganti'. Mempopulerkan kata *anda* berarti juga membantu tumbuhnya masyarakat Indonesia yang demokratis. "Tetapi dalam memakai kata *anda*, saya usulkan supaya penulisnya diwajibkan dengan huruf besar, untuk mencegah perasaan feodal masuk pula, yaitu kepada orang tinggi dipakai huruf besar, kepada yang rendah dipakai huruf kecil", demikian kata Takdir Alisjahbana dalam *Pedoman Minggu* tanggal 14 April 1957.

Pada hari ulang tahun PWI ke-31, yaitu tanggal 9 Februari 1977, para pemimpin redaksi dari seluruh Indonesia menyampaikan tanda penghargaan kepada Sabirin yang sudah pensiun atas jasa-jasanya di bidang pengembangan bahasa.

Cerita tentang asal-usul perkataan *anda* ini kiranya menyatakan lagi betapa tidak kecilnya peranan media massa dalam pertumbuhan kosa kata bahasa Indonesia. Sudah barang tentu hal ini mesti dikatakan dengan sebuah catatan, yaitu karena dalam analisis terakhir media massa itu, dan istimewa media massa cetak, hanyalah merupakan cermin masyarakat, sesungguhnya masyarakat itu sendiri pulalah yang berperan dalam pertumbuhan kosa kata bahasa Indonesia.

Beralih sekarang kepada pertanyaan bagaimana peranan media massa dalam pemasyarakatan bentuk dan pemakaian bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini kita berhadapan dengan suatu hal yang kontroversial, sedang diperdebatkan dan dipercecekkkan.

Sebuah pandangan yang tajam dikembangkan oleh Drs. Anton M. Moeliono, M.A. ketika ia berceramah tentang "Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia" di Balai Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pada tanggal 15 Maret 1978. Dalam majalah Dewan Bahasa (Kuala Lumpur, Mei 1978) Anton Moeliono berkata antara lain sebagai berikut.

Keluh-kesah orang banyak tentang ketidak mahiran orang Indonesia berbahasa Indonesia, sering dipulangkan kepada si guru, tapi guru lepasan Sekolah Guru atau Institut Pendidikan Keguruan menyatakan bahwa itu saya terima dari guru saya. Masalahnya ialah masalah lingkaran setan. Seringkali terjadi bukanlah orang-orang yang terampil yang menjadi guru bahasa. Dan harus dicatat bahwa di dalam perkembangan sejarah bangsa kami, guru untuk sebagian besar terpaksa menyerahkan wibawanya kepada kaum wartawan. Bahwa terjadi di sekolah debat antara guru dan murid yang tidak mahu menerima

pengarahan gurunya: Ya "Ya pak! tadi dikoran tertulis begitu pak", tadi dikoran tertulis begitu pak".

Artinya ia lebih percaya dan taat kepada apa yang disebut di koran daripada apa yang dikatakan oleh gurunya.

Saya peribadi beranggapan bahawa wartawan memang dapat menjadi pendita masyarakat tapi hati saya berbelah-bahagi terhadap golongan ini, sebab ia dapat dianggap pesaing dan dapat dianggap teman seperjuangan. Saya tidak tahu sikap wartawan di Malaysia. Di Indonesia wartawan itu jika ditunjukkan keteledorannya berbahasa, kekurangannya dalam pelurusan kalimatnya, maka dijawabnya: "Mana bisa saya ini harus memerhatikan secermat-cermatnya bahasa saya. Kami ini wartawan, dikejar waktu".

Pada hemat saya, itu hanya dalih, sebab wartawan Indonesia bukan satu-satunya wartawan dunia. Wartawan di seluruh dunia memang di kejar oleh waktu, tetapi mengapa wartawan di lain negeri tidak selalu menyatakan: "Saya ini dikejar waktu". Jadi yang saya kuatirkan ialah pengaruh kaum wartawan yang merasa tidak tertakluk kepada hukum bahasa yang efektif dan baik.

Memang saya setuju pendirian supaya jangan memerangi wartawan, tetapi ciptakanlah wartawan yang ada sekarang ini lampau dengan sendirinya. Jika kita bersikap sinis, kita akan mengatakan: mahu apa lagi biarkan *lost generation* ini, seperti juga banyak orang dewasa di Indonesia, termasuk generasi yang mubazir ini, tetapi dengan mengakui sepenuhnya lingkungan pengaruh sarana komunikasi massa.

Pandangan Anton Moeliono tadi terhadap wartawan mengandung perasaan yang bertenangan, bersifat *abivalent*.

Badudu juga mempersoalkan tentang *Bahasa Indonesia dalam Pers* sebagaimana dimuat dalam majalah *Pers Indonesia* (Jakarta, No. 13 tahun ke IV, Januari 1978). Ia berkata sebagai berikut.

Membaca sebagian besar surat kabar dan majalah dewasa ini, termasuk terbitan Bandung, saya merasa gembira. Tampak banyak kemajuan dibandingkan dengan sepuluh dua puluh tahun yang lalu. Tentu saja masih ada pihak-pihak yang belum merasa puas, dan menuduh bahwa bahasa koran dewasa ini masih penuh dengan kesalahan dan sering mengabaikan kaidah bahasa yang berlaku atau yang dianggap masih berlaku. Hal ini tentu disebabkan oleh masih banyaknya juga kita temukan kesalahan dalam bahasa koran baik kesalahan bahasa maupun kesalahan ejaan.

Masyarakat memang menuntut lebih dari pers sebagai lembaga yang diakui sangat besar peranannya dalam pembinaan bahasa karena pengaruhnya yang sangat besar. Pekerjaan guru di sekolah yang ber-

payah-payah setiap hari membimbing murid-muridnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, pekerjaan penyuluhan bahasa oleh ahli bahasa atau tenaga-tenaga penyuluh dirasakan akan menjadi sia-sia jika apa yang dibina mereka itu seolah-olah dilanggar begitu saja oleh pers.

Pandangan Badudu secara substansial tidak banyak berbeda dengan pandangan Moeliono mengenai wartawan Indonesia walaupun dalam pengutaraannya Badudu lebih bersikap *reconciliatory*.

Bahasa yang dipergunakan oleh wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa pers ialah salah satu ragam bahasa. Bahasa pers memiliki sifat-sifat khas, yaitu: singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, dan menarik. Bahasa pers harus disadarkan pada bahasa baku.

Wojowasito (1978) dari IKIP Malang dalam kertasnya berjudul "Bahasa Jurnalistik". Segi-segi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan mutu penggunaannya, yang disajikannya kepada Karya Latihan Wartawan (KLW) Daerah Jawa Timur mengemukakan tentang wartawan sebagai berikut:

Ia haruslah mampu menangkap sesuatu dengan cepat, baik dengan jalan mendengarkan maupun dengan jalan membaca, mengolahnya dalam hati dan pikirannya, kemudian mengutarakan, menyatakan secara lancar dan jelas atau menulisnya dengan gaya yang terang serta mudah dibaca, oleh karena susunan kalimatnya yang logis dan pilihan katanya yang umum diketahui.

Ini menambahkan kita mengatakan bahasa jurnalistik haruslah bahasa yang logis. Bahkan, apa yang dikatakan oleh Drs. Anton Moeliono di depan Karya Latihan Wartawan (KLW) PWI Pusat di Cibulan tanggal 8 April 1975 tentang syarat untuk bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia harus cendekia (logis) sifatnya, harus lugas (*to the point*) dan harus merupakan bahasa penalaran (*reasoning*) sesungguhnya juga berlaku bagi bahasa jurnalistik.

Sebuah ciri lagi yang melekat pada bahasa jurnalistik ialah menerapkan ekonomi kata atau *word economy*. Ini berarti dia harus membuang *redundancy* atau hal yang berlebih-lebihan. Apa yang dinamakan kata *mubazir* dapat dihilangkan dari susunan kalimat tanpa merusak atau mempengaruhi kejelasan makna kalimat. Dalam KLW PWI Pusat yang saya pimpin selama tujuh tahun belakangan ini saya selalu mengunjukkan kata-kata mana yang termasuk *kata mubazir*. Kantor berita *Antara* dalam buletin dalam negerinya sudah melaksanakan bahasa jurnalistik yang mengindahkan ekonomi kata, tetapi hal ini belum secara merata dilaksanakan oleh segenap media massa.

Sebagai penatar wartawan generasi muda dan orang yang akrab bergaul dengan mereka saya dapat mengenali betapa dalam penggunaan bahasa Indonesia terdapat kelemahan-kelemahan pada mereka. Salah satu kelemahan ialah membuat kalimat yang sering kata pokoknya (subjek) menjadi hilang sama sekali. Kelemahan lain ialah tidak selalu dapat membedakan antara bentuk kalimat tanggap (pasif) dengan kalimat aktif, dan akibatnya kedua hal itu bercampur aduk *bergelemek-peak*. Kelemahan berikut ialah membuat kalimat-kalimat yang panjang atau *compound sentence* sehingga membuat penulisannya terjerumus sendiri dalam lumpur pikiran yang *woolly*, bertele-tele, kabur. Saya tidak tahu apakah ini disebabkan pelajaran bahasa Indonesia yang diterima waktu di sekolah dasar sampai sekolah lanjutan oleh wartawan itu tidak memadai atau kurang tepat? Suatu kali hal ini baik juga diteliti. Namun, bagaimanapun juga, kalau kita mempertanyakan bagaimana peranan media massa dalam pemasyarakatan bentuk dan pemakaian bahasa yang baik dan benar, semua itu tidak dapat dilepaskan dari gambaran situasi dan latar belakang yang diberikan di atas tadi secara selayang pandang. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu secara kuantitatif dan mutlak pasti. Akan tetapi, sebagai wartawan yang sudah berkecimpung di bidang jurnalistik selama 35 tahun ini, dan ikut aktif dalam menembangkan bahasa Indonesia di dalam media massa selama itu, sudah barang tentu saya cenderung berpendapat bahwa peranan media massa dalam pemasyarakatan bentuk dan pemakaian bahasa yang baik dan benar, niscaya banyak sedikitnya ada.

Suatu hal lain yang dipertanyakan ialah adakah peranan media massa dalam pertumbuhan dan perkembangan "akronim" dalam bahasa Indonesia? Sebagai dimaklumi gejala akronim subur berkembang dalam kalangan Tentara Serikat semasa Perang Dunia II. Untuk keperluan ketentaraan cara demikian tentu ada rasionya. Sehabis perang cara ini berlanjut dan malah meluas memasuki dunia sipil. Segala sesuatu hendak disingkatkan. Di negeri kita akronim banyak dipergunakan di kalangan angkatan bersenjata. Tidak selalu jelas atas dasar apa dan dengan prinsip mana dilakukan penyingkatan kita, apakah menurut penggalan kata awal atautkah dengan akhir suku kata? Yang jelas ialah akronim merembet pula tentunya ke dalam media massa. Kebiasaan itu menjadi mendalam sehingga sering akhirnya akronim itu sendiri merupakan pengertian yang berdiri sendiri, sedangkan pengertian yang asli dilupakan orang. Apabila hal ini dilanjutkan, akibatnya adalah bahwa generasi muda merugikan dan menjadi malas berpikir atau tidak terangsang memperkembangkan rasa pingin tahu.

Sutan Takdir Alisjahbana dalam tulisannya "Bahasa Hukum Beberapa Sumbangan-Pikiran Menuju ke Arah Pembentukan dan Pemakaian Bahasa yang Baik", yang dimuat dalam buku *Simposium Bahasa Hukum* (Jakarta, Mei 1976, cetakan kedua) mengatakan antara lain sebagai berikut.

Kita mesti menahan diri dalam membuat akronim yang sekarang terlampau banyak dibuat oleh ABRI dan di sana-sini sudah diturut pihak lain. Kalau proses ini berjalan terus bahasa Indonesia yang bersahaja, mudah dan terjadi dari kata-kata yang pendek-pendek itu akan menjadi amat sukar, sebab akronim itu tidak menambah pengertian, tetapi hanya menambah beban ingatan dengan kata-kata yang tidak membawa isi baru.

Media massa tidak mempunyai keinginan menjadi generator pertumbuhan dan perkembangan akronim dalam bahasa Indonesia. Peranannya hanyalah merefleksikan apa yang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat. Jadi, apabila masyarakat sesuai dengan anjuran Takdir Alisjahbana tadi dapat menahan diri dalam membuat akronim dengan sendirinya hal itu akan tercermin dalam media massa dan berkurangnya pula pemakaian akronim dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks demikianlah saya hendak melihat peranan media massa dalam pertumbuhan dan perkembangan akronim dalam bahasa Indonesia.

Akhirnya, dipertanyakan pula adakah peranan media massa dalam pertumbuhan dan pengembangan sistem *afiksasi* dalam bahasa Indonesia?

Sepengetahuan saya kebiasaan menghilangkan bentuk awalan (*prefix*) dalam bahasa jurnalistik pertama kali suka dilakukan oleh pers Tionghoa-Melayu. Siapa yang membalik-balik lembaran lama koran-koran seperti *Sin Po*, *Hong Po*, *Keng Po* akan menemui gejala ini. Terutama dalam bahasa kepala berita (*headline*) sering terjadi pemenggalan bentuk awalan. Tentu ada rasionya. Bahasa judul mesti padat dan dinamis. Keterbatasan ruangan tambah menuntut dipenuhinya syarat ini. Saya pribadi tidak keberatan, apabila hal ini dilakukan dalam bahasa kepala berita. Akan tetapi, pemakaiannya jangan sampai dipukulratakan sehingga sampai merembet ke dalam tubuh berita. Di sini wartawan harus tetap mengindahkan kaidah-kaidah tata bahasa yang baku. Takdir Alisjahbana dalam tulisannya "Bahasa Hukum" yang disebutkan di atas tadi memberikan pengamatn sebagai berikut:

Tentang tata bahasa, yang bahagian yang terpentingnya terjadi dari pemakaian imbuhan, hendaklah diingat bahwa bertambah rapi atur-

an pemakaian awalan dan akhiran, akan bertambah jelas dan teliti pula bahasa Indonesia moderen sebagai alat berpikir dan alat perhubungan masyarakat.

Pengamatan Takdir Alisjahbana di atas dapat kita garis bawahinya.

Sesungguhnya, media massa dapat berbuat banyak dalam pertumbuhan dan pengembangan bahasa Indonesia yang baik. Akan tetapi, syarat untuk itu adalah perlunya para wartawan menguasai bahasa itu dengan sebaik-baiknya. Mencapai hal ini memerlukan waktu dan kesabaran. Para wartawan bukanlah orang-orang yang secara khusus mendapat pendidikan khusus kebahasaan. Inilah keadaan yang umumnya berlaku selama ini. Inilah pula keadaan yang harus diubah dan diperbaiki. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan saling pengertian antara para ahli bahasa dengan para wartawan.

PENGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Mattulada

Universitas Hasanuddin

Pendahuluan

Pembangunan bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan yang diarahkan kepada "Manusia Indonesia Seutuhnya". Terbangunnya manusia Indonesia yang mempunyai kemampuan lahir batin, membangun lingkungan hidupnya, memberi manfaat dalam kehidupan, baik bagi orang seorang maupun bagi kelompok atau golongan dalam masyarakat.

Potensi rohaniah yang paling istimewa dipunyai oleh makhluk yang disebut manusia itu ialah bahasa. Dengan bahasa, manusia itu memahami diri dalam hubungannya dengan sesama manusia. Dengan bahasa, manusia mengelompokkan diri, membuat kelompoknya berbeda dengan kelompok yang lain, untuk saling mengenal. Dengan bahasa, manusia memiliki kemampuan yang amat besar untuk mewariskan milik peradaban dari generasi ke generasi sepanjang zaman.

Bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia yang luas, terdiri atas ratusan kesatuan geografi dan kebudayaan yang masing-masing mempunyai bahasanya sendiri. Semenjak zaman purbakala yang belum diketahui awalnya, rupa-rupanya sudah terdapat keperluan akan adanya satu bahasa bersama. Makin tinggi tingkat keperluan berhubungan antara satu sama lainnya, makin tinggi pula tingkat diperlukannya bahasa yang dapat dipahami bersama. Mungkin sekali dalam catatan-catatan kuno musafir orang Cina yang

mengunjungi Nusantara kita ini, telah menemukan adanya bahasa pergaulan bersama antara kelompok-kelompok penduduk Nusantara, semacam *lingua franca*, dan mungkin itulah yang disebut dalam catatan itu, bahasa *Kwenlun*. Satu hal yang sudah dapat dipandang lebih pasti adalah bahwa pada permulaan kurun Masehi, Kerajaan Sriwijaya menguasai negeri-negeri yang penting di kawasan Nusantara ini. Pusat Kerajaan Sriwijaya itu berada di negeri yang penduduknya berbahasa Melayu. Kedudukan Kerajaan Sriwijaya yang amat berpengaruh itu, memberikan peranan yang amat penting kepada bahasa Melayu di dalam berhubungan dengan negeri-negeri yang berada dalam pengaruh kerajaan itu. Mungkin itulah menjadi sebab utama mengapa bahasa Melayu semanjak zaman dahulu kala dijadikan *lingua franca* di kepulauan Nusantara.

Prasasti Melayu tertua, tidak saja terdapat di daerah-daerah yang penduduknya berbahasa Melayu, tetapi juga di daerah-daerah luarnya, seperti prasasti Gandasuli di Jawa Tengah (827 dan 832 Masehi). Juga persebaran bahasa Melayu di Nusantara ini didorong oleh beberapa faktor yang amat penting artinya, yaitu daerah pemakai bahasa Melayu terletak pada kedua belah pesisir selat Malaka, yaitu pintu-gerbang laut yang amat penting untuk memasuki kepulauan Nusantara dari jurusan barat, untuk sampai ke bahagian timur Nusantara yang memiliki hasil bumi yang digemari oleh dunia di sebelah barat. Orang Melayu pemakai bahasa Melayu adalah kelompok bangsa Melayu yang gemar berlayar mengarungi lautan Nusantara, gemar mengembara ke luar tempat daerah asalnya dan bermukim di tempat-tempat yang baru. Kota Malaka lebih dari seabad lamanya menjadi bandar yang penting di Asia Selatan, tempat saudagar-saudagar dari segenap penjuru kepulauan Nusantara berkumpul bersama dengan saudagar-saudagar asing, bergaul dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu. Di samping itu, kedudukan kota Malaka sebagai pintu gerbang bahagian barat Nusantara untuk persebaran agama Islam ke bagian timur Nusantara, semua itu telah menjadi faktor yang mendorong terjadinya *lingua franca* dari bahasa Melayu oleh penduduk kepulauan Nusantara ini.

Demikianlah kiranya sudah dapat diperkirakan betapa pentingnya sudah, kedudukan bahasa Melayu itu di kepulauan Nusantara, ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke negeri ini, di tengah-tengah bahasa-bahasa daerah lainnya. Pigafetta yang mengikuti pelayaran Magelhaen mengelilingi dunia, ketika kapalnya berlabuh di Tidore (1521), telah menyusun daftar kata-kata Melayu di tempat itu. Hal itu membuktikan bahwa bahasa Melayu, yang berasal dari bahagian barat Nusantara, pada zaman itu telah tersebar sampai ke

bagian timur Nusantara yang jauh itu. Enam puluh tahun sesudah Pigafetta dan Magelhaen, pelaut Belanda Huygen van Linschoten melakukan pelayaran ke Indonesia. Ia menulis karangan yang melukiskan pengalaman pelayarannya itu dalam judul *Itinerario ofte Schipvaert naer Oost-ofte Portugaels Indien*. Dalam karangan itu disebutkan bahwa bahasa Melayu yang ditemukannya itu di kepulauan Nusantara, bukan saja sangat populer, melainkan juga bahasa itu dipandang sebagai bahasa se hormat-hormatnya di antara bahasa-bahasa negeri timur dan bahwa orang yang tidak tahu bahasa itu di kepulauan Nusantara, kira-kira sama keadaan seseorang Belanda yang tidak tahu bahasa Prancis pada zaman yang sama. Orang itu dipandang rendah dalam pergaulan masyarakat terutama kalangan atasan. Agama Islam pun seperti telah disebut pada bagian depan bersebar ke bagian timur Nusantara, kebanyakan melalui pintu barat dan dibawa oleh orang-orang ulama yang sudah fasih berbahasa Melayu, atau karena ulama itu adalah orang Melayu menurut kelahirannya. Dalam abad keenam belas, bahasa Melayulah yang dipakai oleh raja-raja daerah Maluku apabila mereka mengirim surat-surat kepada raja Portugis. Saint Francis Xavier yang dalam abad keenam belas menentang Islam di Kepulauan Maluku, untuk dapat menarik penduduk masuk agama Kristen, menulis karangan-karangannya tentang kepercayaan Kristen dalam bahasa Melayu, sebab seperti dikatakannya sendiri "bahasa itu (Melayu) diketahui segala orang".

Kodrat bahasa Melayu yang mudah dipelajari, juga menjadi salah satu sebab diterimanya sebagai *lingua franca*. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkat-tingkat seperti dalam bahasa Jawa, yang kata-katanya sering berbeda-beda tergantung kepada usia, pangkat dan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Bangsa asing untuk keperluan politik, ekonomi dan penyebaran agama Nasrani sejak abad ketujuh belas telah menggunakan bahasa Melayu di sekolah-sekolah yang mereka adakan. Memang, juga kedudukan bahasa Belanda sejalan dengan meningkatnya pengaruh kekuasaan kolonial, bertambah lebih penting terutama dalam abad kesembilan belas dan dua puluh. Di balik itu, kaum cendekiawan Indonesia sejak tahun 1908, dengan segala upaya berusaha mendirikan organisasi-organisasi yang bertujuan memajukan kecerdasan bangsa. Kaum cendekiawan Indonesia ini yang pada umumnya tahu menggunakan bahasa Belanda, kemudian menyadari bahwa dengan perantaraan bahasa Belanda, tidaklah mungkin mereka dapat mendekati rakyat untuk membangkitkan kesadarannya. Demikianlah oleh pertumbuhan politik maka bahasa Melayulah yang secara alami telah menjadi *lingua franca* masyarakat Nusantara ini, menjadi bahasa persatuan.

Partai-partai politik, organisasi-organisasi Islam, dan surat kabar kebanyakan menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa persatuan. Tanggal 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda di Jakarta mengikrarkan Sumpah Pemuda bahwa mereka berbangsa satu, bangsa Indonesia; bertanah air satu, tanah air Indonesia; berbahasa satu, bahasa Indonesia. Pada kongres ini pulalah untuk pertama kalinya nama bahasa Melayu diganti dengan nama bahasa Indonesia. Itulah semuanya jalan-jalan yang memastikan pemantapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu itu menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia yang secara resmi dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945.

Dengan terangkatnya *lingua franca* bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa persatuan bangsa Indonesia, tidak berarti bahwa masalah bahasa dalam kalangan masyarakat bangsa Indonesia yang beraneka ragam kesatuan geografi, kebudayaan dengan bahasa daerah masing-masing, telah terselesaikan seluruhnya. Intensitas persebaran bahasa Melayu pada zaman lalu dan bahasa Indonesia sekarang, juga dalam penggunaannya tidak sama kuatnya di seluruh Indonesia yang amat luas ini. Timbullah masalah ragam bahasa yang meramu kehidupan dan perkembangan bahasa nasional, bahasa Indonesia.

Uraian ini mencoba melihat masalah itu dari lingkup yang amat kecil, tetapi mencoba memperlihatkan kenyataan dunia empiris kita. Lingkup yang kecil itu, adalah empat buah desa di Sulawesi Selatan, masing-masing mempunyai keadaan sosial, ekonomi, dan kultural yang relatif berbeda antara satu sama lainnya. Penduduk desa-desa itu adalah bangsa Indonesia yang semua mengetahui tentang adanya bahasa persatuan nasional bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Bugis atau bahasa Makasar menurut lokasi pemakaian bahasa daerah ini masing-masing.

Ragam Bahasa yang Digunakan

Di Sulawesi Selatan terdapat empat bahasa daerah utama, yaitu bahasa Bugis, bahasa Makasar, bahasa Toraja, dan bahasa Mandar. Di antara keempat bahasa daerah itu, bahasa Bugislah yang terbesar jumlah pemakaiannya dan dipandang berkedudukan sebagai *lingua franca* bagi masyarakat Sulawesi Selatan semenjak abad ketujuh belas, ketika kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan masih memiliki kemerdekaannya masing-masing. Setelah itu, suku-suku bangsa pemakai bahasa-bahasa daerah Bugis, Makasar, Toraja, dan Mandar, tidak lagi mendiami desa-desa seutuhnya oleh suatu suku bang-

sa dengan suatu bahasa daerah. Percampuran antarsuku sudah terjadi sejak lama. Suku-suku bangsa Indonesia dari luar Sulawesi Selatan pun, telah ikut memperbanyak keragaman suku dan keragaman bahasa sampai ke desa-desa Sulawesi Selatan, sehingga tingkat keperluan akan adanya satu bahasa yang dipahami dan dapat digunakan bersama, terasa tinggi adanya. Demikianlah pula empat buah desa yang diamati dengan keadaan khusus masing-masing. Desa-desa yang diamati untuk keperluan penyusunan kertas kerja ini ialah sebagai berikut.

- 1) Desa Bontonompo. Kabupaten Gowa-bahasa daerahnya yang umum adalah bahasa Makasar. Terletak kurang lebih 30 km sebelah selatan kota Makasar (Jumpangang), berpenduduk kurang lebih 5000 jiwa. Mata pencarian penduduknya 80% dalam lapangan pertanian sawah. Hubungan dengan kota Makasar lancar dan hampir semua penduduknya telah mengunjungi kota itu sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Tingkat pendidikan rata-rata (lebih 80%) pernah mengikuti pendidikan sekolah dasar minimal sampai dengan kelas tiga. Selain penduduk orang Makasar juga terdapat dalam jumlah kecil orang Bugis, Toraja, Jawa, dan Sunda, tetapi dengan peranan yang cukup penting, sebagai petugas-petugas pemerintahan.
- 2) Desa Banyorang. Kabupaten Bantaeng; bahasa daerahnya yang umum adalah bahasa Makasar terletak kurang lebih 140 km sebelah selatan kota Makasar, berpenduduk kurang lebih 5000 jiwa. Terletak di lereng gunung Lompobattang, kurang lebih 15 km dari ibu kota Kabupaten. Mata pencarian penduduknya kurang lebih 90% dalam lapangan pertanian sawah dan kebun. Hubungan dengan kota Makasar dan Bantaeng dapat dilakukan melalui kendaraan darat. Dalam tahun 1978, hanya kurang lebih 5% penduduk desa yang pernah berkunjung ke Makasar, dan kurang lebih 15% yang mengunjungi ibu kota Kabupaten (Bantaeng). Tingkat pendidikan relatif rendah. Hanya kurang lebih 30% penduduk yang pernah mengikuti sekolah dasar dan hanya kurang lebih 15% yang menamatkan pelajaran tingkat SD dan lebih sedikit lagi melanjutkan ke SL. Selain penduduk orang Makasar, terdapat juga dalam jumlah yang cukup besar orang Bugis dan beberapa orang petugas pemerintahan yang berasal dari Jawa dan Sumatra.
- 3) Desa Kambuno, Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Bahasa daerah yang umum adalah bahasa Bugis. Terletak kurang lebih 200 km sebelah timur kota Makasar dan kira-kira 5 mil dari ibu kota Kabupaten Sinjai. Desa

ini berkedudukan di salah satu pulau kecil dari gugusan Pulau Sembilan, yang terletak di Teluk Bone. Mata pencarian penduduknya kurang lebih 90% dalam lapangan perikanan (nelayan). Untuk mencapai desa ini dapat digunakan perahu layar atau perahu bermotor. Dalam tahun 1978, hampir semua penduduknya telah berkunjung sekurang-kurangnya sekali ke Sinjai, itu kota kabupaten dan hampir 50% penduduk laki-laki dewasa telah mengunjungi kota-kota lain di Sulawesi Selatan termasuk kota Makasar. Tingkat pendidikan relatif rendah. Hanya kurang lebih 30% penduduk desa pernah mengikuti sekolah dasar, sampai kelas tiga dan hanya sebagian kecil saja yang tamat. Selain penduduk orang Bugis juga terdapat orang Makasar, orang Bajo, dan Buton yang bergaul bersama dalam masyarakat nelayan.

- 4) Desa Cabbenge. Kabupaten Soppeng; bahasa daerahnya yang umum adalah bahasa Bugis. Terletak kurang lebih 150 km sebelah utara kota Makasar dan kurang lebih 20 km dari ibu kota Kabupaten, Watansoppeng, berpenduduk kurang lebih 6.000 jiwa, dengan mata pencarian terutama dalam lapangan pertanian dan perdagangan. Hubungan desa ini dengan kota-kota sekitarnya, seperti Singkat, Wt. Pone, dan Wt. Soppeng cukup lancar dan frekuensi hubungan cukup tinggi. Tingkat pendidikan relatif tinggi. Kurang lebih 40% penduduk desa telah menamatkan pelajaran tingkat SD atau yang sederajat.

Selain penduduk orang Bugis, juga terdapat dalam jumlah kecil orang Makasar, Toraja, Jawa dan Sunda dengan peranan yang cukup penting sebagai petugas pemerintahan. Pada empat buah desa yang diamati, dua buah desa yang penduduknya berbahasa daerah Bugis dan dua buah lainnya berbahasa daerah Makasar. Dalam hal penggunaan bahasa Indonesia di samping bahasa daerahnya masing-masing diamati intensitas: (1) menurut tingkat usia (Tabel I) dan (2) menurut lapangan kegiatan kehidupan, (Tabel II), seperti berikut.

1. Intensitas Penggunaan Bahasa Indonesia menurut Tingkat Usia

Warga desa yang menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak dalam arti intensitas penggunaannya lebih tinggi daripada menggunakan bahasa daerah mereka sendiri dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di rumah maupun dalam masyarakat kelihatan amat ditentukan oleh hal-hal berikut:

- (1) Pengalaman mobilitas seseorang, yang menyebabkan ia dapat berhu-

bugan dengan masyarakat di luar masyarakat desanya. Makin banyak meninggalkan desanya untuk berhubungan dengan orang lain, semakin banyak dan lancar seseorang itu menggunakan bahasa Indonesia. Keadaan seperti itu tampak di desa Bontonompo (Makasar) dan di desa Kambuno (Bugis).

- (2) Tingkat pendidikan formal masa kanak-kanak dapat juga dipandang sebagai faktor penting untuk memungkinkan seseorang menggunakan lebih banyak dengan kemampuan yang lebih tinggi bahasa Indonesia. Semakin tinggi kemampuan mereka menggunakan bahasa nasional, semakin banyak dalam berbagai hal menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah mereka sendiri. Keadaan seperti ini dijumpai di semua desa, yakni pada kebanyakan pemuka-pemuka masyarakat desa.
- (3) Adanya rasa bangga menempatkan bahasa Indonesia sebagai simbol kemajuan. Hal ini tampak pada adanya kecenderungan yang amat kuat ditemukan pada masyarakat desa yang warganya pada umumnya tahu berbahasa Indonesia, maka pada anak-anak 6–12 tahun, kebanyakan lebih mahir dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah.

Bermain-main dengan sesama anak-anak terutama di sekolah, juga di rumah dengan orang tua dan keluarganya, kebanyakan anak-anak itu suka menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu, baik di Bontonompo (65%) maupun di desa Kambono (30%) anak-anak pada usia itu, lebih banyak dan mahir menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah.

Warga desa yang mampu menggunakan bahasa Indonesia yang sama banyak dan sama lancar atau fasihnya dengan menggunakan bahasa daerah sendiri kelihatan jumlahnya cenderung berkurang karena hal-hal berikut.

- (1) Mereka yang menguasai secara baik kedua bahasa, lambat-laun hanya terbatas pada golongan-golongan penduduk yang dipandang sebagai pemuka masyarakat, yaitu pamong-desa, guru-guru, pemuka agama, petugas jawatan pemerintahan dan sebagainya. Ada gejala perubahan dalam titik intensitas penggunaan kedua bahasa itu sebagai berikut. Semakin tinggi pendidikan umum seseorang, semakin tinggi pula intensitas penggunaan bahasa Indonesia. Di balik itu, kecekatanya menggunakan bahasa daerah akan menurun. Orang itu dalam pengalaman hi-

dupnya lambat-laun akan memiliki kembali kemahiran dan kecekatan bahasa daerahnya sesudah meningkat ke usia 26–45 tahun. Tabel I menunjukkan pada semua desa dan dalam usia itu kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sama intensitas penggunaan dan penguasaannya.

- (2) Hampir semua benda peradaban baru yang sampai ke desa membawa simbol Indonesia. Ia akan mudah dipahami melalui pemahaman atas simbol itu. Juga ada kecenderungan yang amat kuat bahwa seseorang walaupun mempunyai kemampuan bahasa daerah yang cukup kuat, tetapi belum tentu bahwa orang itu dapat menulis atau membaca bahasa daerahnya, selancar ia menulis atau membaca dalam bahasa Indonesia.
- (3) Pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah dasar, pada semua desa yang diamati, amat rendah kualitas dan isi pengajarannya, ditambah dengan kekurangan fasilitas alat pengajaran dan pelajarannya, diperkeras oleh semakin berkurangnya minat di kalangan murid (mungkin karena anggapan keliru, seperti merasa diri sudah tahu); semua itu memberikan kesempatan kepada bahasa Indonesia lebih berkembang melampaui pemeliharaan dan penggunaan bahasa daerah.

Tidak ada sebuah pun taman kanak-kanak yang menggunakan, apalagi mempelajari bahasa daerah setempat dalam kegiatan pendidikannya. Warga desa yang menggunakan bahasa daerah lebih banyak dan lebih lancar atau fasih daripada bahasa Indonesia, kelihatannya bertambah sedikit jumlahnya. Hal itu sebagian besar disebabkan oleh hal-hal berikut.

- (1) Terbatasnya lingkungan umum yang semata-mata menggunakan bahasa daerah. Khotbah-khotbah di mesjid dan penerangan-penerangan keagamaan yang bersifat umum serta penyampaian pesan-pesan dari pemerintah kepada rakyat desa melalui media masing-masing, lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa daerah dalam kesempatan itu sudah menjadi amat terbatas jumlahnya.
- (2) Alat-alat dan sarana-sarana pengembangan bahasa daerah seperti buku-buku, siaran-siaran melalui media mutakhir, dan gairah penciptaan ke-susastraan daerah yang dapat dikatakan tak ada lagi. Orang-orang di desa-desa yang terpendang mahir menggunakan bahasa daerah, walaupun masih ada, jumlahnya sudah semakin berkurang.

Warga desa yang semata-mata hanya dapat menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi dengan orang lain, memang masih dijumpai di desa-desa. Jumlah mereka itu kelihatan berbeda, besar-kecilnya amat ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- (1) Pada desa-desa yang terisolasi, yaitu desa yang kurang mendapat kunjungan dari orang luar desa atau penduduk desa tersebut kurang mobilitasnya ke luar desa, maka di desa itu terdapat banyak warga yang hanya dapat menggunakan bahasa daerah mereka untuk berkomunikasi. Hal itu dapat dilihat, misalnya, untuk desa Banyorang rata-rata (12%) dan Cabbenge (17%) penduduknya yang hanya tahu berbahasa daerah saja. Atau kalau pun tahu berbahasa Indonesia, mereka lebih suka atau senang memakai bahasa daerah.
- (2) Di antara golongan penduduk yang paling banyak tidak tahu berbahasa Indonesia adalah golongan kaum ibu (wanita). Golongan ini yang amat berpengaruh dalam pendidikan awal (rumah tangga) anak-anak sehingga dalam rumah tangga itu intensitas penggunaan bahasa daerah dalam kalangan ini memang masih tinggi.

Tabel I di bawah ini menunjukkan keadaan itu dalam angka persentase.

TABEL I
INTENSITAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
MENURUT TINGKAT USIA
(DALAM %)

Tingkat Usia	Penggunaan Bhs. Ind. Lebih Banyak daripada Bahasa Daerah				Penggunaan Bhs. Ind. Sama Banyak dengan Bhs. Daerah				Penggunaan Bhs. Daerah lebih Banyak daripada Bhs. Indonesia				Penggunaan hanya Bhs. Daerah			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
6 -12	65	5	30	10	25	5	40	20	5	70	20	50	5	20	10	20
13-25	50	5	50	20	45	5	30	25	3	80	15	40	2	10	5	15
26-45	30	10	40	10	65	15	40	20	3	70	15	55	2	5	5	15
46-60	25	10	40	5	45	20	40	10	20	65	15	60	10	15	5	25

- x) = A = Bontonmpo (Makasar)
 B = Banyorang (Makasar)
 C = Kambuno (Bugis)
 D = Cabbenge (Bugis)

2. Intensitas Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Berbagai Lapangan Kehidupan

Dalam pengamatan mengenai intensitas penggunaan bahasa Indonesia pada empat buah desa ditemukan kenyataan bahwa intensitas itu amat berbeda-beda menurut lapangan kegiatan tertentu. Untuk semua lapangan kegiatan itu pada semua desa terdapat intensitas yang kurang lebih sama ukurannya. Tabel II menunjukkan hal itu sebagai berikut.

- (1) Intensitas penggunaan bahasa Indonesia tertinggi (rata-rata 47,5%) ditemukan dalam lapangan pendidikan. Angka-angka menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan (formal) ini kebanyakan anak-anak muda dan orang-orang terkemuka dalam desa.
- (2) Dalam lapangan pemerintahan, intensitas penggunaan bahasa Indonesia pun ditemukan cukup tinggi (rata-rata 35%). Hampir segenap penduduk desa laki-laki dewasa terlibat secara langsung dalam kegiatan administrasi pemerintahan. Mereka harus berhubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah desa, petugas-petugas Bimas dari berbagai dinas dan jawatan pemerintahan. Dalam kegiatan pemerintahan ini, kelihatan ada pola penggunaan bahasa yang sudah mulai tumbuh dengan jelas. Biasanya para pejabat atasan menggunakan bahasa Indonesia terhadap bawahannya. Bawahan yang disapa oleh atasannya itu dengan bahasa Indonesia akan menjawab dengan menggunakan bahasa daerah. Terhadap sesama pegawai pemerintahan desa yang kira-kira setara dalam kedudukan kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia di tempat pekerjaannya.
- (3) Dalam lapangan kegiatan keagamaan, intensitas penggunaan bahasa Indonesia kelihatannya agak lemah (rata-rata 17,5%). Karena kegiatan keagamaan ini melibatkan hampir segenap penduduk desa, terutama kalangan tua dan anak-anak yang mengikuti pengajian tradisional, maka baik dalam mesjid atau langgar-langgar maupun di tempat-tempat lain untuk penerangan agama, terbanyak masih digunakan bahasa

daerah. Untuk kalangan perempuan yang juga gemar mengikuti penerangan-penerangan agama, kebanyakan digunakan bahasa daerah. Intensitas penggunaan bahasa Indonesia dalam lapangan ini rata-rata 16%.

- (4) Dalam lapangan kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan jual beli di toko-toko dan pasar-pasar desa, intensitas penggunaan bahasa Indonesia agak tinggi juga. Dalam lapangan pertanian, karena kunjungan-kunjungan para petugas dinas pertanian ke desa-desa, serta adanya kelompok-kelompok tani yang acapkali merundingkan masalah bersama, maka penggunaan bahasa Indonesia dapat dipandang cukup tinggi intensitasnya, yaitu rata-rata 24%.
- (5) Dalam lapangan kegiatan rekreasi (kesenian olah raga, pariwisata, dan sejenisnya), intensitas penggunaan bahasa Indonesia cukup tinggi (rata-rata 34%). Hal ini mungkin disebabkan oleh pelaku-pelaku kegiatan dalam lapangan ini yang pada umumnya terdiri dari orang-orang muda usia. Lagi pula lapangan kesenian dan olah raga di desa-desa itu kebanyakan berasal dari lingkungan desa setempat. Kesenian asli dan olah raga asal setempat, tidak lagi menjadi kegemaran umum di desa. Melalui kegiatan kesenian dan olah raga juga telah menyebabkan meningkatnya mobilitas pelaku kegiatan lapangan itu berkunjung ke tempat lain-lain di luar desanya. Dalam kepergian itulah intensitas penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mereka menjadi amat tinggi, sebagai tanda adanya kesamaan atau persamaan kedudukan setiap orang dalam kelompok itu dapat menyatakan pikirannya dengan lebih bebas tanpa gangguan emosi kedaerahan tradisional yang melekat pada bahasa daerah, terutama terhadap orang-orang sederahnya sendiri.
- (6) Dalam kegiatan-kegiatan tradisional, seperti penyelenggaraan upacara-upacara adat dalam perkawinan, kematian, kelahiran, dan upacara-upacara adat lainnya yang seringkali banyak liku-likunya, tidak dapat dihindari penggunaan bahasa daerah. Dalam upacara-upacara tradisional itu, orang-orang yang memegang peranan adalah kaum tua laki-laki dan kaum perempuan tua-muda. Setiap orang terlibat atau dilibatkan dalam upacara adat, senantiasa berusaha mempertunjukkan bahwa ia adalah orang yang "tahu adat" sehingga seluruh atribut upacara, termasuk basa-basi yang menggunakan bahasa daerah, harus dilakukan se-tertib mungkin. Mereka atau sebagian mereka yang terlibat dalam kegiatan ini bukannya sama sekali tidak tahu berbahasa Indonesia, melain-

kan dipandang lebih sah kegiatan tradisional itu bila pesertanya menggunakan bahasa daerah.

Demikianlah kira-kira keadaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, masing-masing memilih proporsi yang tepat dalam kehidupan masyarakat. Lambat-laun terasa timbulnya satu pola yang berdasarkan "dugaan kepatutan" dalam masyarakat untuk menggunakan bahasa daerah dipandang sepatutnya dalam lapangan, peristiwa atau suasana tertentu dan menggunakan bahasa Indonesia sepatutnya dalam peristiwa, suasana, atau lapangan tertentu lainnya.

Sikap Masyarakat Desa terhadap Peranan Bahasa Indonesia dan Daerah

Dengan masuknya sarana komunikasi mutakhir ke desa-desa, seperti radio, transistor dan *cassette-recorder* ke semua desa yang diamati dan TV di desa Bontonompo, maka semakin kuatlah dorongan dalam kalangan warga masyarakat desa-desa itu untuk memahami selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam pengamatan terhadap kelompok-kelompok pendengar siaran radio di desa-desa, ditemukan kenyataan bahwa setiap siaran, baik berita maupun penerangan-penerangan yang menggunakan bahasa Indonesia, diikuti dengan saksama. Penerimaan berita atau penerangan itu ternyata juga masih bertingkat-tingkat tahap pemahamannya. Mereka yang memahami dengan baik, rata-rata sesuai dengan jumlah tingkat pemahaman dan kemampuan bahasa, seperti digambarkan pada tabel-tabel. Mereka yang kurang sempurna pemahamannya, diperbaiki oleh rekan-rekan mereka yang lebih baik pemahamannya dengan menggunakan bahasa daerah dalam mempercakapkan topik-topik berita atau penerangan itu. Di sini peranan bahasa daerah amat diperlukan sebagai alat pemerataan pemahaman terhadap bahasa Indonesia.

TABEL II
 INTENSITAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
 PADA BERBAGAI LAPANGAN KEHIDUPAN
 (DALAM %)

No.	Lapangan Kehidupan	Bon-tonompo	Banyorang	Kambuno	Cabbenge	Rata-rata
1.	Pendidikan	80	40	30	40	47,5
2.	Agama	20	10	20	20	17,5
3.	Pemerintahan	70	10	30	30	35
4.	Ekonomi	30	30	20	15	24
5.	Rekreasi	40	25	40	30	34
6.	Tradisional	20	10	20	15	16

Satu hal yang agaknya menarik juga ialah bahwa pada keempat buah desa yang diamati itu, baik pada desa Bontonompo dan Banyorang yang berbahasa daerah utama Makasar, maupun desa-desa Kambuno dan Cabbenge yang berbahasa daerah Bugis, kedua bahasa daerah (Makasar dan Bugis), digunakan juga seperti adanya dengan bahasa Indonesia. Umpamanya di Bontonompo yang disebut "Asli Makasar", pada umumnya warga desa yang mahir berbahasa Bugis, niscaya mahir pula berbahasa Indonesia. Sebaliknya, di Desa Cabbenge yang disebut "asli orang Bugis", mereka yang mahir berbahasa Indonesia belum tentu mahir pula berbahasa Makasar. Pada dua desa lainnya, yaitu Banyorang dan Kambuno yang rata-rata warganya dapat menggunakan kedua bahasa daerah (Makasar dan Bugis), tidak dengan sendirinya mahir pula berbahasa Indonesia. Akan tetapi, warga desa Kambuno yang banyak melakukan hubungan dengan orang-orang di luar desanya, bahasa Indonesia rata-rata dipahami dan dapat digunakan.

Keadaan ini belum dialami sebab-musababnya. Untuk sementara waktu dapat dikemukakan keterangan tentang kemungkinan penyebabnya sebagai berikut:

- 1) bahasa daerah Bugis lebih luas daerah pemakaiannya dan lebih banyak jumlah orang yang menggunakannya;
- 2) bahasa daerah Bugis banyak digunakan sebagai bahasa kedua (di samping bahasa Indonesia) oleh pejabat-pejabat di kantor pemerintah,

organisasi-organisasi sosial, dan pendidikan agama tradisional;

- 3) kebanyakan pejabat terkemuka di Sulawesi Selatan, baik sipil maupun militer berasal dari keluarga Bugis.

Dengan keadaan ini (sebagai identifikasi sementara) dapat digunakan untuk menempatkan kedudukan bahasa-bahasa yang dipandang penting untuk dapat mengkomunikasikan *idea-idea* pembangunan di pedesaan Sulawesi Selatan adalah bahasa daerah Bugis dan bahasa Indonesia. Adapun bahasa-bahasa daerah lainnya, yaitu Makasar, Toraja, dan Mandar menempati urutan-urutan menyusul dan lambat-laun semakin kurang peranannya.

Perbandingan peranan yang dapat dilakukan oleh bahasa Indonesia dengan bahasa daerah Bugis di Sulawesi Selatan dalam rangka pembangunan desa, keduanya dapat saling melengkapi. Sikap tertentu tentang peranan bahasa daerah yang semakin berkurang tampak pada kalangan pemuka-pemuka adat (kaum tua) dan pemuka-pemuka agama. Kalangan ini mengkhawatirkan akan timbulnya kekosongan gairah menggali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bahasa-bahasa daerah untuk memperkaya pertumbuhan bahasa nasional.

Bahasa Indonesia dapat berperan lebih luas dalam menyampaikan hal hal baru, sedangkan bahasa daerah Bugis dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kekurangpemahaman dalam masyarakat terhadap konsep-konsep yang disajikan melalui bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia dapat menempati keunggulan dalam persebaran, dalam arti pemakaian secara umum, tetapi masih lamban dalam kemampuan menggugah dan memahami atau menampilkan ungkapan-ungkapan perasaan warga desa. Dalam hal terakhir ini, bahasa Bugis pada khususnya dan bahasa daerah lain pada umumnya dapat digunakan sebaik-baiknya, terutama dalam hal-hal yang menyangkut usaha mempengaruhi kesadaran terdalam warga masyarakat desa.

Bahasa daerah yang didukung oleh sistem sosial dan kebudayaan daerah, dapat dipandang sebagai subkultur yang amat menentukan usaha-usaha pembangunan di pedesaan untuk berhasil menggalang partisipasi rakyat sebagai syarat mutlak berhasilnya rencana pembangunan. Pembangunan yang dimaksud tentulah pembangunan yang dirasakan sebagai bagian dari kebudayaan itu sebagai satu keseluruhan yang kompak. Kehadiran bahasa Indonesia di pedesaan pada tahap sekarang dapat diumpamakan sebagai mode pakaian yang digemari secara umum, tetapi pada peristiwa-peristiwa tertentu

mode itu belum dapat menjangkau kesadaran terdalam sebagaimana ia ditampilkan untuk mewakili diri pribadi pemakainya secara utuh.

Pada masa ini, yaitu sekurang-kurangnya seperempat abad terakhir, tradisi kesusastraan bahasa daerah Bugis dan Makasar yang pada masa-masa sebelumnya dapat dikatakan memiliki daya penampilan yang cukup tinggi, kini tidak ada lagi. Bahasa Indonesia yang rupa-rupanya telah menjadi satu kenyataan yang diterima dalam pemakaian umum sampai ke desa-desa, belum sampai kepada kemampuan yang pernah dimiliki oleh bahasa-bahasa daerah itu. Mungkin itu pulalah menjadi salah satu sebab, mengapa hasil-hasil kesusastraan di daerah belum sampai pada keadaan yang diharapkan, dilihat dari sudut pembangunan bahasa dan kebudayaan pada umumnya yang membumi di buminya sendiri.

Kenyataan bahwa sudah tumbuh terutama di kalangan orang-orang muda usia, pemakai bahasa Indonesia lebih banyak mungkin juga lebih fasih daripada bahasa daerahnya sendiri, dapat dipandang sebagai satu aspek kemajuan. Akan tetapi, kemajuan itu rupa-rupanya hanya menyentuh bagian permukaan wajah kehidupan kebudayaan. Ia belum menjamin satu pertumbuhan yang dapat mendekapi isi dan hakikat yang memberikan keutuhan kebudayaan dalam warna pembangunan yang terpadu.

Untuk menjangkau keadaan seperti yang diharapkan itu, diperlukan satu langkah pembinaan bahasa Indonesia yang lebih mendorong ke arah terjadinya transformasi sosiokultural, dan bahasa Indonesia bukan saja menjadi semata-mata alat, melainkan menjadi salah satu bahagian yang esensial dalam transformasi itu sendiri. Orang Indonesia harus dapat mencapai kemampuan berpikir, berbuat, dan merasa, dengan bahasa Indonesia. Barulah pada taraf itu dapat disebut bahasa Indonesia menjadi bahasa kebudayaan Indonesia. Taraf itu kini belum sampai ke desa-desa secara mantap.

Penutup dan Saran

Melalui studi yang amat singkat atas empat buah desa seperti diuraikan pada bagian depan, dapat dikemukakan identifikasi yang amat sementara sifatnya. Identifikasi sementara itu tentu saja amat tidak kuat untuk dijabarkan kepada keadaan sesungguhnya yang terdapat di semua desa Indonesia yang jumlahnya beribu-ribu. Namun, berbagai hal dapat ditarik sebagai manfaat untuk melihat masalahnya secara lebih luas dan umum bagi keadaan bahasa nasional, bahasa Indonesia dalam peranannya mentransformasikan

nilai-nilai sosial-budaya, menjadi nilai-nilai yang mendukung pembangunan yang memperkuat integrasi nasional bangsa Indonesia. Berbagai identifikasi umum yang diperkirakan terdapat di semua desa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Bahwa bahasa Indonesia semenjak lama sudah menjadi kebanggaan nasional yang dirasakan sampai ke desa-desa Indonesia, termasuk desa-desa yang amat terpencil letaknya sekalipun.
- 2) Intensitas penggunaan bahasa Indonesia amat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan mobilitas penduduk berhubungan dengan warga masyarakat luar desanya, terutama dengan kota-kota pusat segala macam kegiatan sosial budaya. Juga keanekaragaman bahasa yang terdapat dalam sebuah desa, amat mendorong keperluan masyarakat desa untuk menggunakan bahasa Indonesia.
- 3) Makin intensif bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari seseorang dalam masyarakat dalam arti sepenuhnya dapat menekapi ungkapan-ungkapan terdalam yang terdapat dalam bahasa daerahnya, semakin besar kemungkinan bahasa Indonesia dapat digunakan untuk mengungkapkan potensi rohaniah manusia Indonesia ke arah berpikir, berkemauan, dan merasa dengan bahasa Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dalam gambaran kebudayaan nasional bangsa Indonesia.
- 4) Dalam perkembangan persebaran bahasa Indonesia yang digunakan dalam proses pembangunan di pedesaan, ditemukan adanya kecenderungan angkatan muda usia menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak daripada bahasa daerahnya sendiri, terutama karena alasan-alasan praktis. Penggunaan bahasa Indonesia dalam ukuran kuantitatif dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang pesat. Akan tetapi, arti kualitatif dari bahasa dalam konteks pengembangan kebudayaan yang terdapat dalam bahasa daerah menjadi amat menurun. Hal ini dapat dipandang sebagai kekurangan dalam daya transformasi sosial budaya yang membumi di Tanah Air Indonesia sendiri.
- 5) Pengembangan bahasa Indonesia melalui proses pembangunan atau pengembangan terpadu (acapkali kalau tidak dapat dikatakan selalu menempatkan bahasa Indonesia semata-mata sebagai alat komunikasi) yang tidak mengandung makna kultural yang semestinya menjiwai denyut kehidupan kebudayaan bangsa seutuhnya. Hal ini mungkin juga menjadi salah satu sebab mengapa karya-karya kesusastraan terasa

kering atau gersang, setidaknya-tidaknya kurang membumi, malahan kerap kali lebih terasa keasingannya di tengah-tengah masyarakat desa yang kehausan.

- 6) Pembagian peranan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah kiranya dapat diletakkan secara fungsional. Bahasa Indonesia berperan integratif, sedangkan bahasa daerah dengan peranan suplementer bagi penyempurnaan makna-makna ungkapan isi kebudayaan yang dapat disampaikan oleh bahasa Indonesia, dapat memperkaya dan membumikan kehidupan bahasa Indonesia dalam konteks pembinaan kebudayaan Indonesia yang kaya-raya tersimpan dalam bahasa-bahasa daerah.

Berkenaan dengan indentifikasi di atas dalam rangka pembangunan di desa-desa Indonesia, bahasa Indonesia sudah menduduki bahasa daerah. Akan tetapi, dengan peranan komunikasi semata-mata, bahasa Indonesia akan kehilangan makna kualitatifnya yang tersimpan dalam bahasa bahasa daerah. Dengan semakin mundurnya peranan bahasa daerah dalam pengembangan kebudayaan, maka peranan integratif bahasa nasional kita akan menjadi kurang daya dorongnya.

Beberapa saran dapat diajukan untuk mengakhiri kertas kerja ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pengajaran bahasa Indonesia hendaknya berdasar kepada tabiat bahasa Indonesia itu sendiri yang hidup tidak terpisah dari realitas kebudayaan Indonesia yang hendak digerakkan ke arah kemajuan memenuhi harkat dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.
- 2) Salah satu cara untuk mengisi keperluan itu ialah secepat mungkin membahasaindonesiakan sebanyak mungkin kekayaan budaya bangsa Indonesia yang tersimpan dalam bahasa dan kepustakaan daerah, termasuk *folklore* untuk menjadi milik nasional.
- 3) Untuk kemandapan pemakaian bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan desa, sejauh mungkin menghindari pemakaian istilah-istilah asing, atau konstruksi kalimat asing, kalau istilah itu terdapat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, para petugas pemerintah, para penyuluh, dan para juru penerang, hendaknya dibekali dengan layak pengetahuan bahasa Indonesia, sesuai dengan kebutuhannya.

Akhirnya, dengan penuh harapan, kami sebut bahwa sesungguhnya bahasa Indonesia di pedesaan bagaimanapun gersang pertumbuhannya, ia

telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tugas utama yang terben- tang di depan kita ialah menjadikan bahasa Indonesia dalam pembangunan pedesaan itu sebagai bagian integral dari hidup kebudayaan, menjadikan baha- sa Indonesia sebagai kebanggaan nasional yang oleh setiap orang Indonesia dipunyainya sebagai kebanggaan pribadi karena dirasakannya sebagai milik- nya yang ia cintai dan lindungi dari kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Takdir. 1966. *Revolusi Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Kuala Lumpur : Oxford University Press.
- , 1957. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Halim, Amran, 1975. "Fungsi dan Kedudukan bahasa Indonesia", Didalam *Politik Bahasa Nasional*. Laporan Seminar, 25-28 Februari 1975. Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional.
- Linton, R. 1936. *The Study of Man*; New York: Appleton, Century Crofts.
- Mattulada dkk. 1976. *Bahasa Bugis di Sulawesi Selatan*. (Beberapa Aspek Sociolinguistik), Laporan Penelitian Ujungpandang: Fakultas Sastra Unhas.
- 1978, *Masyarakat Desa di Sulawesi Selatan*; Ujungpandang: Lembaga Penerbitan Unhas.
- Rosidi, Ajip. 1975. "Pengembangan Bahasa Daerah", Didalam *Politik Bahasa Nasional*. Laporan Seminar, 25-28 Februari 1975. Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional.

KEBIJAKSANAAN PARIWISATA DAN BAHASA INDONESIA

Umar Kayam

Universitas Gadjah Mada

Pariwisata, sebagai industri yang "menggerakkan" manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tampaknya tetap menunjukkan kelenturan dan keuletan yang menarik. Berbagai krisis ekonomi dan politik dunia yang silih berganti menemukannya ternyata hanya mampu **melesukan kegiatan industri** ini untuk sementara. Pada tahun 1976, umpamanya, tahun yang masih dianggap sebagai tahun yang cukup rawan, *World Tourist Organization* melaporkan jumlah arus wisatawan di seluruh dunia sebanyak 218 juta orang (2% lebih besar dari tahun 1975) dengan pendapatan 40 milyar dollar Amerika, sedangkan pada tahun 1977 jumlah seperti tertera di atas dilaporkan menjadi 245 juta kunjungan wisatawan dengan pendapatan sejumlah 50 milyar dollar Amerika¹. Jika dibandingkan dengan macam industri yang lain — apalagi yang "berat" — mungkin volume angka pendapatan seperti dilaporkan di atas bukan merupakan angka yang menakjubkan buat ukuran pendapatan internasional. Akan tetapi, bila kita membayangkan bahwa yang "diurus" dalam industri seperti pariwisata itu adalah manusia-manusia dalam jumlah ribuan yang secara harfiah dan **diangkut lewat berbagai alat** pengangkutan dan sistem organisasi yang rumit dan efisien, maka kita mendapatkan suatu gambaran dari satu industri dalam dimensi yang lain. Inilah satu industri yang mengkhususkan usahanya dalam **pengelolaan** pemuasan salah satu naluri manusia yang penting, yakni pemuasan keinginan manusia untuk sewaktu-waktu ke luar dari kebosanan yang rutin dari lingkungannya. Keinginan manusia untuk berada dalam lingkungan yang sama sekali baru dan bertemu mereka dengan manusia dan budaya yang lain. Kalau kita membayangkan 245 juta orang bergerak dalam satu tahun untuk ke luar

dari kebosanan rutin lingkungannya, kita mengerti bagaimana menarik, "hiruk pikuk", dan ruwet industri pariwisata ini. Bagaimana tidak. Manusia, pada tempatnya pertama adalah makhluk hidup yang berbudaya yang memiliki keinginan subjektif dan cenderung untuk tumbuh melebar (ekspansif) dengan keinginan itu. Meskipun telah sejak lama manusia dalam jumlah ribuan diorganisasi untuk mencapai suatu tujuan —, perang, umpunya —, tetapi manusia diorganisasi dalam jumlah ribuan dengan suatu tujuan untuk menyenangkan keinginannya adalah satu tradisi yang belum terlalu lama. Dalam pengelolaan dan pengorganisasian semacam ini manusia menempatkan dirinya dalam kedudukan menuntut yang lebih subjektif daripada dalam sistem pengorganisasian manusia lainnya —, bahkan lebih daripada organisasi pelayanan mana pun —. Oleh karena itu, manusia yang selalu tumbuh melebar keinginannya itu telah menjadikan pariwisata sebagai satu industri yang sangat peka terhadap sifat keinginan yang demikian itu. Tuntutan itu adalah juga membuat pariwisata sebagai satu industri yang sangat bersaing. Bahwa industri yang unik dan peka untuk persaingan ini mendatangkan keuntungan adalah jelas dari kecenderungan menaik jumlah wisatawan dari tahun ke tahun, penambahan jalur penerbangan dengan segala persaingan tajam dari pelayanan tarifnya serta penciptaan daerah wisata yang makin banyak dan baru.

Buat suatu negara yang sedang berkembang, pariwisata tampaknya merupakan suatu harapan kemungkinan yang menarik. Dua modal utama bagi berhasilnya pariwisata, yakni kekhasan tradisi kebudayaan dan pemandangan alam, biasanya dimiliki oleh negara-negara ini. Statusnya yang masih di tengah perjalanan dari keadaan "masyarakat lama" menuju ke keadaan "negara modern" memberikan negara berkembang itu warna dan corak yang khas pada serat anyaman (*texture*) dari bahan (*fabric*) masyarakatnya. Status "masyarakat lama" yang biasanya menonjolkan kekhasan adat-istiadat dan bahasa dari suatu lingkungan pertanian yang pernah ketat masih merupakan ciri yang tampak dalam negara berkembang. Justru keadaannya yang berkembang itu, artinya yang secara kultural bergerak dari orientasi yang "kental" kepada nilai-nilai lingkungannya yang sempit menuju ke orientasi solidaritas kebudayaan yang lebih luas, membuat negara-negara ini menarik. Bagi kebanyakan wisatawan-wisatawan yang datang dari negara industri dan perdagangan yang telah maju dan kaya, artinya yang secara struktural telah lama meninggalkan statusnya yang "masyarakat lama", keadaan kebudayaan negara yang sedang berkembang itu seakan memberikan isyarat kepada wisatawan itu untuk cepat-cepat datang berkunjung sebelum wajah

yang utuh dari "masyarakat lama" itu mulai cair hilang sama sekali. Bagi mereka mengamati wajah "masyarakat lama" itu mungkin merupakan penatapan penghabisan kepada salah satu cara dan gaya hidup dari manusia dari suatu kurun yang tidak akan dijumpainya lagi.

Pemandangan alam dari negara berkembang yang merupakan cermin dari cara manusia-pertanian memilih dan mengembangkan permukiman kemudian mengelolanya menjadi latar belakang sumber penghidupannya adalah juga merupakan daya tarik yang sangat kuat bagi pariwisata modern. Juga di sini saya kira para wisatawan dari dunia industri maju dan kaya ingin buru-buru menatap suatu gaya pengelolaan lanskap yang baru sama sekali sebab untuk berapa lama lagi gunung, sawah, ladang, dan rumah-rumah adat itu merupakan satu keutuhan lanskap? Segera unsur-unsur yang telah menyatu dari lanskap itu akan harus dikocok kembali, kemudian (ditambah dengan unsur-unsur baru) dibangun keutuhan lanskap yang lain yang mungkin akan berubah menjadi kota-kota dan pabrik-pabrik.

Seperti juga banyak negara yang sedang berkembang lainnya, Indonesia melihat pariwisata sebagai salah satu sumber kemungkinan penghasilan yang penting dengan mempertimbangkan kebudayaan dan pemandangan alam sebagai modal yang pokok. Dengan jelas kebijaksanaan pembangunan dan pembinaan pariwisata nasional yang diungkapkan di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1969 merumuskan tiga tujuan sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya;
2. Untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia; dan
3. Untuk meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional.²

Sampai dengan Pelita II oleh Pemerintah telah dikembangkan 9 wilayah, yang masing-masing pengembangannya dilandaskan kepada suatu Rencana Induk Pariwisata. Kesembilan wilayah (propinsi) pengembangan pariwisata itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan.

Strategi pengembangan kepariwisataan seperti dikemukakan di atas jelas ingin mendayagunakan unsur khas dari wilayah transisi berbagai lingkungan kebudayaan negeri kita yang terpenting sebagai modal raksasa dari pem-

bangunan industri di negeri ini. Kecuali mungkin wilayah DKI Jakarta (yang tentu saja tetap mempunyai ciri tersendiri), kita melihat delapan wilayah pengembangan pariwisata itu sebagai serat anyaman yang terpenting dari bahan masyarakat (*social fabric*) Indonesia. Dapatkah kita membayangkan mosaik Indonesia tanpa menyebut delapan lingkungan kebudayaan itu. Oleh karena itulah, saya cenderung menyebut ke-9 wilayah pengembangan pariwisata ini sebagai "modal raksasa". Nilainya bukan main besarnya sebagai penanaman modal suatu industri. Bahwa usaha pengembangan pariwisata dengan perhitungan strategi yang demikian mulai memperlihatkan hasilnya dapat kita lihat pada kecenderungan menaik dari jumlah wisatawan asing yang masuk Indonesia dalam lima tahun terakhir ini lewat angka-angka sebagai berikut: tahun 1973:270.303 orang; tahun 1974:313.452 orang, tahun 1975:366.293 orang; tahun 1976:401.237 orang, dan tahun 1977: 424.913 orang.³

Memilih pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang konsekuensi yang jauh. Ia menghadirkan di tengah kita suatu preseden yang sebelumnya belum kita kenal — setidaknya tidak dalam skala ukuran seperti dikenal sekarang.

Pertama, dalam pariwisata kebudayaan dan pemandangan alam menjadi unsur perdagangan yang dijajakan secara intensif. Untuk ini, prasarana dan sarana baru diciptakan, didorong, dan dikembangkan untuk menunjang keberhasilan penjajakan dua unsur perdagangan baru itu.

Kedua, sukses dari pembangunan dan pengembangan pariwisata mengundang peningkatan persinggungan kebudayaan kita dengan berbagai wajah kebudayaan asing di negeri kita.

Pada konsekuensi yang pertama kita menghadapi suatu pengalaman yang sama sekali baru. Kekhasan tradisi kebudayaan dan pemandangan alam yang sebelumnya merupakan kaitan yang hidup dan berfungsi sekali dalam kehidupan masyarakat kita sekarang musti dipotong-potong dipisahkan dari keutuhan masyarakat untuk bisa ditawarkan sebagai suatu bingkisan wisata. Demikianlah, umpamanya, tari-tarian Bali yang tidak terpisah dari rentetan upacara yang silih berganti datang di desa, dipotong-potong dalam berbagai *package* atau bingkisan wisata yang dijajakan di Batubulan, Singapadu, dan hotel-hotel di Pantai Sanur kepada para wisatawan. Dan untuk menjajakan bingkisan itu alangkah panjang rentetan prasarana dan sarana

yang musti disiapkan sebelumnya. Kantor perjalanan, hotel, *route* baru perjalanan, baik yang udara maupun yang laut dan darat, musti diadakan. Rencana promosi yang akan membungkus kebudayaan dan pemandangan menjadi satu bingkisan yang siap untuk dijajakan atau ditawarkan lewat jaringan kantor perjalanan, hotel atau maskapai penerbangan, musti diolah dan di-siasati dengan sebaik-baiknya. Tenaga-tenaga yang musti mengisi sarana-sarana itu serta kemudian musti melaksanakan tugas yang berantai dari semua aspek kepariwisataan itu tentulah musti dikumpulkan, dipilih, dan dididik. Dapatlah kita bayangkan bagaimana luas akibat dari pengadaan segalanya itu bagi lingkungan. Untuk membangun hotel-hotel dan lapangan terbang, desa-desa mungkin musti dihilangkan atau setidaknya dipindahkan. Untuk membangun jalan-jalan besar yang akan menahan tekanan dan putaran roda-roda bis-bis yang khusus didatangkan untuk mengangkut beratus dan beribu wisatawan, mungkin hutan dan sawah musti dimusnahkan, dan mungkin desa-desa musti dipindahkan lagi. Tiba-tiba di Pantai Sanur yang sepi itu bermunculan hotel-hotel yang bertingkat terbuat dari tembok beton. Tiba-tiba jalan yang sempit di sela-sela desa Bali Selatan penuh dengan mobil-mobil mewah serta bis-bis wisatawan yang berseliweran. Tiba-tiba di sepanjang sawah-sawah di Celuk dan Mas berderetan *souvenir-shops*. Dan tiba-tiba juga di salah satu sudut Pulau Bali yang paling selatan, yang sebelumnya hanya terdiri dari desa-desa tradisional Bali yang sporadis, dikembangkan satu proyek pariwisata raksasa Nusa Dua yang kelak akan menghuni hotel-hotel dengan segala jaringan fasilitasnya.

Konsekuensi kedua adalah ekor sukses dari strategi pengadaan prasarana dan sarana. Bila prasarana dan sarana untuk "membangkis" kebudayaan dan pemandangan alam sebagai bingkisan wisata yang komersial sukses dan efektif, peningkatan persinggungan kebudayaan dengan wajah kebudayaan asing tidak dapat dielakkan lagi. Bayangkan bila bingkisan-bingkisan itu secara meyakinkan berhasil membujuk para calon wisatawan di Eropa Amerika, dan Asia, baik lewat serbuan promosi kantor perjalanan, maskapai penerbangan, jaringan hotel maupun sarana lainnya. Beratus atau mungkin beribu calon wisatawan akan segera bersedia (anehnya juga) "di-bingkis" oleh perusahaan perjalanan raksasa di Eropa atau Amerika Serikat, kemudian digiring ke Indonesia sesudah terbujuk oleh bingkisan wisata tentang Bali, Jawa, Toraja, atau Toba sehingga pada musim liburan demi musim liburan berbagai rombongan wisatawan dari berbagai negara bergantian berbondong datang masuk wilayah wisata yang sudah kita siapkan dalam rencana induk Pemerintah kita. Persinggungan kebudayaan asing atau ka-

takanlah kebudayaan "modern" yang sesungguhnya sudah terjadi sejak kita menerima pariwisata sebagai satu konsep industri atau perusahaan sumber pendapatan negara yang penting, makin meningkat sejak wisatawan-wisatawan itu datang dalam waktu yang lebih teratur lagi. Pada waktu kita memutuskan bahwa kantor atau perusahaan perjalanan, hotel, biro advertensi perjalanan, maskapai penerbangan perlu diadakan serta teknik promosi wisata perlu dikembangkan dan digalakkan, sesungguhnya waktu itu kita sudah menerima singgungan kebudayaan baru secara mendasar sekali. Sebab, bukankah sarana-sarana yang demikian itu sarana yang asing bagi kita? Sarana yang mendapatkan pengalamannya serta tumbuh dalam lingkungan kebudayaan yang bukan Indonesia? Pada waktu rombongan wisatawan digiring masuk oleh perusahaan-perjalanan ke hotel-hotel di Sanur yang sejuk oleh *air-conditioning* diterima oleh para pekerja hotel yang lancar berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya mendapatkan keterangan di dalam kamar dan pada daftar makanan di rumah makan dalam bahasa yang mereka pahami, para wisatawan itu tahulah bahwa Indonesia sudah siap menerima wisatawannya.

Indonesia siap menerima wisatawannya. Pada waktu seseorang mengatakan begini apakah yang sesungguhnya telah terjadi? Atau kalau kita mau melanjutkan ilustrasi di atas, pada waktu para wisatawan asing itu menemukan di Indonesia sarana-sarana pariwisata yang struktur dan sistemnya tidak asing bagi mereka, bahkan dinyatakan dalam bahasa mereka, apa yang sesungguhnya telah terjadi?

Yang terjadi, saya kira, adalah pengambilalihan dan penyerapan suatu idiom kebudayaan yang telah dikembangkan menjadi suatu "teknik" dari suatu lingkungan "kebudayaan modern" oleh suatu lingkungan kebudayaan yang sedang beranjak menjadi "modern"⁴ Apa yang kita sebut sebagai sarana-sarana pariwisata, seperti hotel, perusahaan perjalanan, maskapai penerbangan, serta siasat promosi, dan advertensi pariwisata pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau ekspresi "teknik" dari suatu gaya hidup (*life style*) dari suatu kebudayaan yang sudah lama meninggalkan kedudukan dan sifatnya yang agraris dan yang telah lama mengembangkan lingkungan kebudayaan yang industri dan dagang. (Di sini sarana itu dikatakan sebagai "teknik" karena sistem yang dikembangkan dalam mencapai efisiensi sarana itu adalah serentetan keterampilan yang diterapkan).

Suatu perusahaan perjalanan, umpamanya, adalah cermin dari berbagai macam ekspresi teknik dan kebutuhan baru di samping ia sendiri adalah sebuah ekspresi teknik juga. Ia, perusahaan perjalanan itu, adalah

ekspresi dari tangan panjang alat angkutan modern yang semakin cepat dan efisien, ekspresi dari penghalusan perkembangan teknik di bidang komputer, ekspresi dari perkembangan kerumitan teknik administrasi dan ekspresi dari perkembangan teknik pelayanan terhadap pemuasan kebutuhan manusia akan perjalanan dalam membayangkan berbagai macam kaitan ekspresi teknik ini kita juga membayangkan adanya jalur yang kontinyu dari berbagai ekspresi itu dengan perkembangan sejarah kebudayaan dan perdagangan negara industri itu. Rentetan ekspresi teknik itu, dengan lain perkataan, adalah "bahasa" yang ditempa oleh tuntutan lingkungan kebudayaan sepanjang generasi demi generasi.

Pada waktu suatu negara sedang berkembang — yang biasanya agraris itu — memutuskan untuk juga memiliki berbagai macam sarana pariwisata hampir dalam waktu yang bersamaan, pada waktu itu pula sesungguhnya ia memutuskan untuk mencoba mengambil alih dan menguasai suatu bahasa yang di "tanah asal"-nya merupakan hasil perkembangan dan tempaan bergenerasi. Dengan unsur-unsur ciri "masyarakat lama" yang masih banyak dikandungnya, negara sedang berkembang itu musti mengadakan berbagai sarana modern hampir-hampir bersamaan dengan keinginannya untuk menemukan format baru sebagai suatu "negara baru". Tanpa suatu tradisi industri yang berarti, perdagangan yang tumbuh melebar (ekspensif) dan mayoritas kelas menengah yang menyangganya, negara sedang berkembang ini mengadakan sarana yang membutuhkan bahasa yang tumbuh dalam lingkungan tiga tradisi itu. Akibat dari keputusan ini ialah bahwa negara ini musti mengembangkan bahasanya sendiri sejajar dengan tradisi yang dikuasainya.

Di Indonesia, keadaan yang serupa juga dijumpai. Pada waktu itu memutuskan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber penghasilan negara yang terpenting, kita belum mempunyai pengalaman yang berarti dalam menjajakan kekhasan kebudayaan dan pemandangan alam negeri kita sebagai bingkisan wisata. Paling banyak pengalaman itu adalah pengalaman yang agak sporadis di sana-sini (dalam jumlah kecil-kecilan) dengan pengalaman KPM yang paling menonjol di Bali pada zaman sebelum Perang Dunia II. Akan tetapi, yang paling penting disadari adalah bahwa membangun sarana pariwisata adalah membangun sarana yang bukan menjadi tradisi kita. Teknik yang dikembangkan untuk membangun sarana itu adalah teknik yang bersumber pada perkembangan sejarah asing. Kebutuhan yang melahirkan sarana-sarana itu adalah kebutuhan dari suatu gaya hidup asing. Maka kekacauan atau kesalahmengertian yang sering terjadi saya

kira adalah kesalahmengertian dalam menafsirkan "idiom" bahasa baru ini. Misalnya, suatu toko *souvenir* ingin mengontrak seluruh pelukis gaya tradisional Klungkung di desa kamasan. Keinginan ini mungkin tidak salah. Akan tetapi, bila pada satu ketika pelukis-pelukis ini yang biasa melukis menurut irama waktu yang mereka tentukan sendiri sekarang harus melukis dalam waktu yang lebih cepat untuk memenuhi "target" yang ditentukan oleh toko *souvenir* itu, sesuatu yang aneh akan segera kelihatan. Hasil lukisan para pelukis dengan irama yang baru itu akan merosot mutunya karena lukisan gaya tradisional yang rumit ini tidak lain daripada musti dikerjakan dalam irama lama yang perlahan-lahan. Merosotnya mutu ini, kita tahu, akan mengakibatkan serentetan ketidakselarasan dalam hubungan. Toko *souvenir* akan menerima keluhan-keluhan dari langganannya, toko *souvenir* akan menghentikan kontraknya dengan para pelukis, para pelukis akan kehilangan mata pencaharian. Pada hal kalau saja pemilik toko *souvenir* itu tahu akan proses kreatif dari sebuah lukisan gaya tradisional itu serta tahu menghargai mutu sebenarnya dari lukisan itu mungkin dia tidak usah harus menetapkan irama baru itu dan membiarkan sang pelukis memilih waktunya sendiri. Akan tetapi, bukanlah di sini letak kemelesetan itu, yakni pada menafsirkan waktu dan kebutuhan? Waktu yang diketahui oleh sang pelukis gaya tradisional Klungkung adalah waktu yang ditetapkan iramanya oleh irama pertanian Klungkung, sedangkan waktu yang dipahami oleh sang *manager* toko *souvenir* adalah waktu yang ditetapkan oleh irama kebutuhan dunia pasca pertanian.

Juga bila pada satu waktu *odalan*, yakni upacara peringatan pura, lebih separuh dari karyawan satu hotel di Sanur tidak masuk bekerja karena musti mengikuti upacara itu di desanya. Kembali di sini masalah menempatkan diri pada putaran waktu yang berlainan konteksnya, yang menjadi inti persoalan.

Dalam proses pengambilalihan teknik baru dari satu lingkungan kebudayaan asing, kita masih harus selalu memperhitungkan wajah "masyarakat lama", yang di sana-sini masih melekat dalam tubuh kita.

Seorang kawan dari daerah yang sudah lama tidak datang ke Jakarta terperanjat melihat kehadiran bahasa Inggris yang semakin banyak di tempat-tempat umum. Di Hotel Indonesia dia mengeluh melihat bagaimana hotel itu dengan lampu-lampu menyolok memberi tahu siapa saja yang melewati

hotel itu (dalam bahasa Inggris) bahasa setiap Rabu malam adalah malam daging bakar. Mengapa memberi tahu begitu saja musti dalam bahasa Inggris, keluhannya. Kemudian di restoran-restoran makin banyak juga dia lihat daftar makanan itu tertulis dalam bahasa Inggris. Papan-papan yang terpandang di depan resotran, hotel, bahkan pemangkas rambut mengapa pula makin banyak yang berteriak bahwa mutu mereka "internasional" dalam bahasa Inggris? Pertanyaan dan keluhan teman ini saya kira dapat terus direntang menjadi satu daftar yang panjang. Akan tetapi, tidak cuma itu saja! Keluhan itu akan dapat direntang sejauh Bali dan Toraja. Mungkin karena dia bertempat tinggal di kota sepi yang tidak kena singgungan arus pariwisata dia tidak mengetahui bagaimana di banyak toko *souvenir* di pelosok-pelosok Pulau Bali orang memasang harga dalam dolar Amerika, daftar makanan di warung-warung kecil Pantai Kuta hingga resotran di Bukit Jambul tertulis dalam bahasa Inggris, dan di bukit Londa, gebang yang menuju ke gua-gua makam orang Toraja orang menulis dalam huruf besar-besar bukan hanya "*selamat datang*", tetapi juga "*wellcome*" dalam ejaan yang keliru. Dan di sepanjang Pantai Kuta dan Sanur anak-anak kecil menjajakan barang kerajinan tangan, kadang-kadang juga jamur yang dapat membuat kita *fly*, dalam bahasa Inggris yang khas.

Apa yang terjadi sesungguhnya? Kegemaran berbahasa Inggris hingga ke pelosok desa dan gunung tanah air kita? Bukan. Yang terjadi adalah kehadiran suatu medium komunikasi baru untuk suatu kebutuhan baru. Kawan kita yang mengeluh tentang pemberitahuan *barbeque night* di Hotel Indonesia mengeluh karena dia mengira bahwa pemberitahuan itu ditujukan kepada orang Indonesia. Saya kira dia salah. Pemberitahuan itu bukan ditujukan kepada orang Indonesia, tetapi kepada orang-orang asing yang diharapkan mengerti bahasa Inggris dan mungkin mau makan daging bakar. Bahwa pada setiap Rabu malam di pinggir kolam renang Hotel Indonesia itu banyak juga orang Indonesia datang untuk makan daging bakar itu adalah keuntungan tambahan. Seandainya pemberitahuan itu dipasang dalam bahasa Indonesia yang murni *setiap Rabu malam, malam daging bakar* siapa yang akan datang makan daging bakar di pinggir kolam renang hotel itu? Mungkin hanya orang Indonesia saja, itu pun tidak dalam jumlah yang besar karena meskipun orang Indonesia suka makan daging bakar yang disebut sate, dia tidak akan terangsang oleh himbauan lampu listrik yang berbunyi *daging bakar* itu. Asosiasi yang timbul sehabis membaca kata *daging bakar* itu saya kira bukan sate, tetapi sesuatu yang asing.

Dan daftar makanan yang di banyak tempat ditulis dalam bahasa Inggris itu serta anak-anak kecil yang menjajakan dagangannya dalam bahasa Inggris serta orang-orang Toraja di puncak bukit yang merasa perlu untuk menulis *welcome* meskipun keliru ejaannya, mereka membayangkan publik yang sama dengan yang dibayangkan oleh karyawan hotel Indonesia, yakni "orang asing".

Orang-orang asing, dalam hal ini kita batasi pada para wisatawan asing, adalah mereka yang datang karena himbauan bingkisan wisata yang disalurkan lewat berbagai sarana pariwisata. Pada tempatnya pertama, mereka adalah orang-orang yang — seperti telah disinggung sebelumnya — ingin memuaskan naluri manusiawi mereka yang penting, yakni keluar dari kebosanan rutin lingkungannya untuk sebentar berada dalam lingkungan yang sama sekali baru. Dalam pemuasan ini adalah wajar bila mereka menempatkan diri mereka sebagai subjek yang harus diperhatikan dan dilayani sebaik-baiknya sebab untuk persiapan perjalanan itu sang wisatawan harus mempersiapkan waktu, uang, dan sikap penyesuaian yang tidak sedikit. Sekali mereka mulai dengan perjalanan itu mereka akan menuntut dari salah satu sarana wisata yang melayaninya untuk melindunginya dari segala macam kerepotan dan ketidaksenangan. Keinginan mereka hanyalah satu, yakni untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan dalam perjalanan liburan itu. Oleh karena itu, untuk ini para sarana wisata itu mulai dari perusahaan perjalanan, maskapai penerbangan hingga ke hotel akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk tidak merepotkan mereka dengan umpamanya mengharuskan mereka menguasai bahasa Indonesia, makan makanan Indonesia yang terlalu khas (seperti lawar Bali) atau pedas (seperti makanan Padang) dan melewati birokrasi pariwisata yang berbelit-belit. Maka para pemandu harus bisa berbicara dalam bahasa asing, menu harus bisa dimengerti oleh orang asing, karyawan toko harus komunikatif dan efisien, dan informasi yang di mana-mana diperlukan mustilah ditulis dalam bahasa asing pula.

Malam daging bakar harus dikatakan *barbeque night* agar wisatawan jangan repot.

6

Apa yang dikeluhkan kawan kita dari daerah tentang kehadiran bahasa Inggris mungkin mendapatkan dimensi yang lain bila jumlah wisatawan asing dari berbagai bangsa yang datang cenderung naik dalam persentase yang tinggi. Dengan praduga efisiensi yang semakin tinggi dari pelayanan sarana wisata, maka kecenderungan untuk "tidak merepotkan" dan "meng-

enakkan" para wisatawan asing dengan menghadirkan sebanyak mungkin bahasa asing diduga juga akan semakin banyak lagi. Bila ini terjadi, maka keluhan kawan kita tentang "bahasa Inggris ada di mana-mana" mungkin akan mencapai suatu keadaan di luar proporsi yang wajar. Sarana-sarana wisata akan berlomba menaikkan pelayanan mereka dengan antara lain memanfaatkan kekeluasaan bahasa Inggris. Kalau perlombaan ini digalakkan maka "polusi bahasa asing" mungkin dapat dicegah lagi. Akan tetapi, dalam meninjau ini agaknya kita perlu memperhatikan beberapa kenyataan. Pertama, kenyataan bahwa pariwisata sudah ditetapkan sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Kedua, kenyataan bahwa yang akan menggerakkan pariwisata di negeri kita adalah pemanfaatan kebudayaan dan pemandangan alam kita. Ketiga, kenyataan bahwa untuk pendayagunaan itu berbagai sarana wisata yang akan "membungkus" kebudayaan dan pemandangan alam digalakkan pendiriannya di mana-mana terutama di sembilan wilayah wisata yang telah ditentukan pemerintah. Keempat, kenyataan bahwa sarana wisata adalah satu teknologi yang sudah berkembang jauh di lingkungan kebudayaan negara industri. Kelima, kenyataan bahwa menyerap teknik yang dikembangkan negara industri maju membutuhkan strategi penyesuaian (adaptasi) yang "saling", yang musti memperhitungkan kehadiran ciri "masyarakat lama" yang sudah ada di negara kita.

Kelima kenyataan ini agaknya yang telah meringkai pilihan-pilihan kita dalam menerima pariwisata sebagai sumber penghasilan negara yang penting. Kekhawatiran akan hadirnya bahasa asing dalam dunia kepariwisataan secara menyolok hingga di luar proporsi yang wajar agaknya dapat diimbangi bila kita perhatikan pilihan-pilihan yang lahir dari kelima kenyataan itu.

Dalam menerima kenyataan bahwa bahasa asing akan hadir dalam proporsi yang besar di bidang pariwisata sarana pelayanannya yang efisien dan memuaskan menghendaki demikian, kita juga melihat dari lima kenyataan itu kehendak yang lain. Kehendak yang lain itu adalah kehendak kita untuk mengembangkan teknik pariwisata yang memiliki idiom budaya kita sendiri.

Juga dalam membayangkan bahasa asing yang terlalu menyolok dari bahasa asing mungkin sekali kita telah mengaitkan dengan kehadiran "fisik" dari bahasa itu seperti yang ditunjukkan oleh lampu-lampu Hotel Indonesia serta berbagai sarana reklame dan promosi yang dipancarkan secara menyolok di bagian-bagian kota Jakarta. Bila ini benar yang terutama merisaukan, mungkin pemecahannya bisa dilakukan dengan per-

aturan yang lebih ketat terhadap penggunaan papan reklame, poster, spanduk, dan lain-lain sebagai alat penjaja. Para pengusaha itu dapat diperintahkan agar tidak sembarangan menempatkan papan pesannya.

7

Masalahnya mungkin masalah imbalanced. Konsekuensi membuka pintu lebar-lebar bagi wisatawan adalah hadirnya bahasa-bahasa asing di tengah-tengah kita. Agar tidak terlalu menyolok (secara fisik), dapat diatur, baik cara pemasangan papan atau lampu pesan maupun bahasa yang dipilihnya. Akan tetapi, mencegah tuntutan, bahkan serbuan bahasa asing dalam dunia pariwisata adalah tidak mungkin. Sekali "kotak Pandora" pariwisata dibuka begitulah agaknya konsekuensinya.

Karena kita tidak menuntut para wisatawan asing untuk berbahasa Indonesia (dan ini sikap yang sehat), bahasa Indonesia saya kira juga tidak banyak peranannya dalam komunikasi pariwisata. (Kecuali pariwisata domestik yang persoalannya adalah persoalan biasa dari bahasa kita). Istilah atau jargon pariwisata dalam bahasa Indonesia mungkin hanya perlu dalam komunikasi pariwisata domestik. Itu pun tidak sepenuhnya berlaku. Sebab dalam komunikasi antara sarana wisata sekarang tidak selalu mungkin membatasi dengan yang domestik saja.

Dalam pengembangan pariwisata ini pada hemat saya ada masalah yang lebih penting daripada persoalan penggunaan bahasa dalam komunikasi pariwisata, yaitu yang sebelumnya telah kita singgung tentang kehendak kita untuk mengembangkan teknik pariwisata yang memiliki idiom budaya kita sendiri. Ada dua hal yang musti kita dasari pada waktu kita memutuskan untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber penghasilan negara yang penting. Pertama, adalah kehendak untuk "membangkitkan" kebudayaan dan pemandangan alam kita sebagai modal pariwisata. Kedua teknik pariwisata yang kita ambil alih adalah teknik yang tumbuh dalam lingkungan kebudayaan asing.

Saya kira sukses pariwisata kita pertama-pertama akan terletak pada penghayatan kita yang peka dan tepat tentang menafsirkan "membangkitkan" kebudayaan dan pemandangan alam sebagai modal pariwisata. Bila kita menafsirkannya masih sama dengan menafsirkan komoditi dagang lainnya, saya khawatir, strategi pariwisata kita akan meleset. Ilustrasi tentang toko *souvenir* yang mengadakan kontrak dengan pelukis tradisional Kamasan adalah satu contoh tentang kemelesetan ini, sedangkan penjajakan tarian

Bali secara terpotong-potong di berbagai tempat adalah contoh yang lain. Saya kira dalam menafsirkan "bingkisan" ini kita musti mampu melihat kebudayaan dan pemandangan alam sebagai satu kelanjutan sejarah kebudayaan dan kelanjutan perkembangan masyarakat. Saya kira bila kita sudah mampu melihat ini kita dapat "membangkis" itu dengan lebih baik. Akan tetapi, untuk dapat menafsirkan yang demikian kita musti mampu mengambil satu landasan sikap yang utuh tentang lingkungan dan gaya hidup kita.

Tentang kesadaran kedua, yakni kesadaran bahwa yang kita ambil-alih itu adalah teknik yang tumbuh di dalam kebudayaan asing, adalah kesadaran bahwa yang ingin kita kembangkan itu adalah pariwisata kita sendiri. Artinya, teknik yang akhirnya kita mengerti sendiri. Bila ini tidak dapat kita kembangkan, saya khawatir yang kita kembangkan adalah sarana wisata asing yang dipaksakan di sini. Saya kira bila kesadaran dasar ini telah secara kukuh kita hayati kita bisa secara lebih tenang mengembangkan pariwisata kita, termasuk mempersoalkan tempat bahasa Indonesia dalam pengembangan pariwisata itu.

Pada waktu ini saya tidak terlalu risau, baik dengan kehadiran bahasa asing maupun dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pariwisata kita. Kecuali mungkin penempatan papan pesan yang tidak estetik dan permainan lampu Hotel Indonesia yang terlalu menonong, saya masih melihat kehadiran bahasa asing (Inggris) di dunia pariwisata kita dalam batas kewajaran. Tentang tempat bahasa Indonesia yang mungkin bagi banyak ahli bahasa kita masih belum memuaskan saya untuk sementara masih juga belum merisaukan sebab saya kira untuk sementara belum akan banyak pengaruhnya apakah satu perusahaan perjalanan masih memakai istilah *travel*, *tour*, *package tour*, atau *tourist* selama sarana wisata kita secara bertahap belum berkembang menjadi teknik yang tumbuh secara wajar dalam lingkungan kebudayaan kita sendiri. Hal ini tampaknya bukan ditentukan oleh dunia pariwisata sendiri.

Ada dua bangsa yang menarik dalam sikapnya (yang berhasil) dalam pariwisata, yakni Jepang dan Belanda. Kedua bangsa ini adalah bangsa yang sangat bangga dengan bahasa, sejarah, dan kebudayaannya. Dalam kebangsaan itu orang Jepang tidak terlalu suka memakai bahasa asing, sedangkan orang Belanda suka belajar bahasa asing. Kedua bangsa ini suka menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa mereka dan membaca buku terjemahan itu dengan tekun. Yang Jepang karena suka bahasanya sendiri

hanya mau membaca buku dalam bahasanya sendiri. Yang Belanda meskipun menguasai bahasa-bahasa asing akan membaca buku dalam bahasanya sendiri. Dalam pariwisata? Keduanya dapat membangun sarana wisata mereka secara efisien. Di Tokyo orang boleh saja berkomunikasi dengan orang Jepang, tetapi bagi wisatawan asing di sana akan kesulitan mendapatkan informasi dari sarana-sarana wisata mereka. Bahasa Inggris cukup banyak tampil di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh wisatawan. Di Amsterdam, wisatawan tidak hanya akan gampang mendapatkan informasi dari sarana wisata, orang Belanda yang bangga dengan bahasanya itu akan dengan ramah dan lancar melayani wisatawan asing dalam bahasa wisatawan itu.

Orang Jepang dan Belanda yang kita mempunyai kesamaan dalam hal ini, yakni landasan sikap yang sama tentang lingkungan dan gaya hidup mereka. Oleh karena itu, mereka berhasil dan santai sikapnya dengan pariwisata.

Saya khawatir tidak dapat mengusulkan sesuatu apa tentang kebijaksanaan bahasa dalam pariwisata. Sebab saya kira ia bagian yang kecil saja dari kebijaksanaan bahasa dan kebudayaan yang umum dan besar. Pada hemat saya, bila kebijaksanaan dalam bahasa dan kebudayaan ini — apakah lewat kurikulum sekolah atau lainnya — berhasil, orang akan berbahasa (sendiri atau asing) dengan baik sehingga nantinya orang di Bukit Londa itu tidak merasa perlu capek menuliskan *home*.

CATATAN

1. Dari Hari Hartono dalam "Perencanaan Pengembangan Pariwisata di Bali dan Masalah-masalahnya", halaman 7, Seminar Pembinaan Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata, Bali 3 -- 6 Maret 1978.
2. Lihat Instruksi Presiden No. 31 Tahun 1969.
3. Hari Hartono, *op cit.*, halaman 10.
4. Yang dimaksud dengan "kebudayaan" di sini adalah konsep yang dikembangkan oleh Jacques Ellul (1963, halaman 3 -- 13), sedangkan yang dimaksud dengan *kebudayaan* yang di sini adalah kebudayaan yang sudah lewat pascapertanian.

RAGAM BAHASA BERITA DAN CIRINYA

B.H. Hoed

Universitas Indonesia

Pendahuluan

1. Pembatasan Istilah

Ternyata sulit untuk begitu saja berbicara tentang ragam bahasa pers atau bahasa surat kabar. Pertama, harus jelas bagi kita bahwa istilah pers mencakup, baik pers tertulis (surat kabar harian dan majalah) maupun lisan (radio), dan bahkan pers pandang-dengar (*audio visual*) seperti televisi. Namun, pembedaan antara "tertulis" dan "lisan" di sini terutama menyangkut *saluran* komunikasi kebahasaan yang dipakai. Kedua, surat kabar adalah salah satu jenis unsur pers tertulis yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis ragam bahasa seperti yang terlihat dalam teks berita, reportase, cerita pendek, tajuk, pojok, karangan ilmiah populer, dan iklan, yang masing-masing memiliki ciri sendiri.

Meskipun demikian, dilihat dari proses pembuatannya, berita memiliki ciri yang khas dan menarik untuk diteliti secara khusus. Di samping reportase, tajuk, dan pojok, berita merupakan salah satu bentuk kebahasaan yang dilahirkan dari kegiatan pers.

2. Ragam Bahasa

Kita semua mengetahui bahwa dalam kenyataannya bahasa itu bukan merupakan sesuatu yang monolitik. Bahasa Indonesia, seperti halnya bahasa-bahasa lain di dunia ini, memiliki perlbagai *variasi*, yakni bentuk-bentuk penuturan yang khusus. Berdasarkan pemakaiannya, variasi itu disebut *ragam*, sedang berdasarkan pemakaiannya variasi itu disebut *dialek* (Haliday : 1970 : 139). Situasi pemakaian bahasa Indonesia dalam sebuah berita menye-

babkan bahasa tersebut memiliki sejumlah kekhususan, yakni ciri-ciri yang hanya dipunyai oleh bahasa berita.

Ciri sebuah ragam bahasa dapat dilihat dari fonetiknya, tata bahasanya, kosa katanya, dan struktur wacananya. Khusus dalam hubungan dengan dunia persuratkabaran, ciri ragam bahasanya tidak dapat dilihat dari segi fonetik dan hanya dapat dilihat dari segi wacana, tata bahasa, dan kosa kata. Dengan demikian, dalam pembicaraan ini kita akan melihat ciri bahasa berita dari segi (1) struktur teksnya, (2) tata bahasanya, dan (3) kosa katanya.

Ciri Ragam Bahasa Berita

1. Struktur Teks Judul dan Tubuh Berita

Dari penelitian ternyata bahwa kita harus membedakan tubuh berita dari judulnya. Judul, di samping bertugas memperkenalkan apa yang dikemukakan dalam tubuh berita, juga bertugas menarik perhatian pembaca. Oleh karena itu, perhatian khusus diberikan dalam penulisan judul ini oleh penulis berita. Terlepas dari judulnya, suatu tubuh berita memang disusun dengan tujuan menarik perhatian pembaca di samping memberi informasi. Bahkan, tidak jarang terjadi judul dan tubuh berita melampaui tugasnya sebagai penarik perhatian. Judul dan tubuh berita juga dibuat untuk mempengaruhi pembaca (fungsi konatif; Jakobson, 1963:208–248).

a. Jenis Teks Tubuh Berita

Berita termasuk teks yang menitikberatkan narasi penceritaan yang mengandung peristiwa-peristiwa dan hubungan waktu. Nida (1974:132–133) membagi teks dalam tiga jenis, yakni : (1) *narasi*, yang menitikberatkan penyajian tindakan dan peristiwa, serta berisi hubungan-hubungan yang menyangkut waktu, misalnya cerita pendek, dongeng, reportase, dan berita; (2) *deskripsi*, yang menitikberatkan pelukisan serta hubungan yang menyangkut ruang, misalnya uraian yang memberikan gambaran tentang bentuk suatu benda atau suatu pemandangan; dan (3) *argumen*, yang menitikberatkan penyajian hubungan logika dan kausatif, misalnya esei, tajuk rencana, dan karya ilmiah. Tidak perlu dikemukakan lagi di sini bahwa tidak ada teks yang murni, termasuk salah satu jenis tersebut di atas. Biasanya suatu teks kita golongkan dalam salah satu jenis itu berdasarkan ciri-ciri jenis yang mendominasi teks

itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teks berita termasuk dalam jenis teks yang menitikberatkan penyajian peristiwa dan tindakan serta hubungan waktu. Jadi, teks berita termasuk naratif.

b. Struktur Dasar Teks Tubuh Berita

Carl Warren (1955:85) mengemukakan bahwa pada dasarnya suatu (tubuh) berita berbeda dengan teks karya fiksi seperti novel atau drama. Perbedaan itu terletak pada strukturnya, yakni susunan organisasi bagian-bagiannya menurut kepentingan isinya. Ambillah suatu berita seperti di bawah ini :

Eddy Purwanto (19 tahun), pembantu keamanan Dirjen Pajak yang berdiam di pintu II Senayan Jakarta, Rabu kemarin menjadi korban penusukan laki-laki yang tidak dikenal di belakang STM Pembangunan Kebayoran Jakarta. Korban menderita luka-luka berat di bagian lambung kanan dan dada, hingga memerlukan perawatan dokter. Sampai Jumat siang, korban masih dalam perawatan di RSTM, karena keadaannya menguatirkan.

Menurut Dinas Penerangan Komdak Metro, penusukan dilakukan dengan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pelakunya sampai saat ini masih dalam pengejaran yang berwajib, sementara menurut masyarakat setempat diduga peristiwa itu berlatar belakang penodongan.

Barang-barang korban yang hilang kini masih dalam pengusutan. Persoalannya ditangani kepolisian Komwil 74 Jakarta Selatan (*Kompas*, Jumat 10-1-75).

Teks berita di atas mementingkan peristiwa serta pelakunya. Oleh karena itu, bagian yang dianggap penting ini ditempatkan pada awal teks (disebut juga paragraf pembuka).

Perhatikan sekarang cerita di bawah ini yang merupakan transformasi berita tersebut di atas.¹

Sekeluar dari gedung bioskop malam itu Eddy memutuskan untuk langsung pulang saja. Di dalam gedung tadi pikirannya agak terganggu oleh janjinya kepada seorang teman yang mengajaknya nonton orkes dangdut, tapi malam itu ada suatu perasaan yang mendesaknya untuk pulang saja. Di rumah hanya tinggal adiknya, karena kakaknya sedang pergi mengunjungi perhelatan kawin. Meskipun kakaknya tidak berpesan apa-apa, Eddy berpikir sebaiknya pulang saja menenami adiknya.

Hujan tidak jadi turun. Ia memutuskan untuk jalan kaki saja sebab hari belum malam benar. Ia selalu merasa asing berada di jalan yang dipagari gedung-gedung besar itu. Dalam malam ini ia merasa ada yang membuatnya takut. Pagar-pagar tinggi sepanjang jalan itu seakan mengepung dirinya, dan tiba-tiba saja ia merasa sendirian. Ada suatu motor dari kejauhan, makin lama makin mendekat suaranya. Dan sekarang ia merasa seolah-olah suara itu sudah berada dibelakang tengkuknya. "Lekas dompetnya!" Sebuah suara terdengar di sebelah kanannya, dan bersamaan dengan itu sebuah benda tajam terasa menyentuh lambungnya.

"Dompet apa?" sekarang ia sudah dapat melihat muka orang yang di sebelah kanannya itu.

"Uang, lekas!"

"Nggak ada uang . . ."

"Bohong, ayo lekas!"

Tiba-tiba saja Eddy mendorong si penodong ke samping dengan tinjunya. Orang itu terjatuh, tetapi kemudian segera bangkit lagi.

Temannya yang masih duduk di atas motor datang membantu. Dipukulnya Eddy dengan tinjunya, tapi Eddy menangkis dan dipukulnya orang itu Tak . . . ! Tapi tiba-tiba saja ia merasa sebuah pisau menancap di bagian lambung. Kemudian lagi di bagian dadanya. Sesudah itu ia tidak tahu lagi apa yang terjadi.

Ia terbangun, dibukanya matanya, lalu hendak bangkit. Tetapi alangkah sakitnya perut dan dadanya, bahkan seluruh badannya.

"Aduh . . . di mana saya?"

"Di rumah sakit," seorang berjaket hijau menjawab dengan tenang. Eddy tidak menjawab.

"Saudara terluka. Kami temukan Saudara didekat Gedung STM di Kebayoran. Kami sedang mencari pelakunya. Nanti kalau Saudara sudah kuat bicara kami akan mengajukan beberapa pertanyaan . . ."

"Saya, . . . saya, . . . di . . . todong" Eddy kemudian menutup matanya. Badannya lemah. Dengan tenang orang yang berjaket hijau itu meninggalkan ruangan, setelah berbicara sebentar dengan muka yang sungguh-sungguh dengan jururawat yang juga berada di ruang itu.

Dengan memperbandingkan kedua teks tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bagian terpenting dalam suatu berita terdapat pada awal teks, sedangkan bagian terpenting (klimaks) suatu cerita tidak terdapat pada awal cerita, tetapi pada umumnya menjelang akhir cerita. Dari pengamatan sekilas

kita juga dapat menyimpulkan bahwa struktur teks berita berbeda dengan struktur teks suatu reportase yang mirip dengan struktur suatu cerita. Hal ini menjadi lebih jelas bila kita memperhatikan berita-berita yang disuguhkan di majalah-majalah.

Mengapa berita mendahulukan "klimaks"-nya? Warren mengemukakan antara lain bahwa pembaca surat kabar pada umumnya orang-orang yang "tidak memiliki banyak waktu" sehingga surat kabar harus menyuguhkan hal yang terpenting dahulu agar dibaca, sedang hal yang kurang penting dan bagian yang bersifat memperinci menyusul kemudian (1955:84). Bagian terpenting itu hampir sama fungsinya dengan judul berita yang bertugas menarik perhatian pembaca di samping memperkenalkan isi berita.

c. Isi Teks Judul Berita

Sebagaimana halnya paragraf pembuka, judul mempunyai fungsi daya tarik pandangan (*eye-appeal*) di samping daya tarik kebahasaan. Daya tarik pandangan ini bersangkutan dengan tipografi dan tata halaman. Oleh karena penelitian khusus mengenai hal itu belum diadakan, persoalan itu tidak akan dibicarakan di sini. Sebaliknya, segi kebahasaan akan dibicarakan secara khusus.

Judul bersifat kata falsafah artinya mengacu pada apa yang kemudian dinyatakan dalam teks tubuh berita. Dalam hubungan ini, kita dapat membedakan dua jenis judul (Hoed, 1976:43-47), yakni (1) judul yang langsung ada hubungannya dengan bagian utama berita (selanjutnya disebut judul *langsung*) dan (2) judul yang tidak langsung ada hubungannya dengan bagian utama berita (selanjutnya disebut judul *tak langsung*).

1) Judul Langsung

Judul langsung terdiri dari :

- a) Ikhtisar (judul merupakan ikhtisar isi tubuh berita atau paragraf pembuka), misalnya :

"Tiga Laki-laki Pembunuh Gadis Dihukum Seumur Hidup" (*Sinar Harapan*, 24-5-75).

"Pemuda Sumedang dan ITB Tandatangan Kontrak Radio" (*Pikiran Rakyat* 10-3-75).

"Ceramah Menjelang Detik-detik Proklamasi" (*Berita Buana*, 11-8-75)

"Presiden Tinjau Daerah Banjir" (*Merdeka*, 23-5-75).

- b) Tafsiran (judul merupakan tafsiran penulis berita).

Judul tafsiran ini dapat dibedakan dengan judul ikhtisar dari hubungannya dengan isi berita. Judul ikhtisar benar-benar memperlihatkan apa yang merupakan inti berita, sedangkan tafsiran tidak sepenuhnya sesuai dengan isi inti berita. Misalnya judul "Tewas Kena Tusuk Gara-gara Cekcok Main Gagle" (*Suara Karya*, 12-2-75) tidak sepenuhnya benar. Royani, yang menjadi korban penusukan, tidak dinyatakan main gagle dalam berita itu. Ia hanya dinyatakan ditusuk di suatu rumah perjudian. Bahwa Royani main gagle itu hanya tafsiran penulis judul.

- c) Kutipan (judul merupakan kutipan ucapan seseorang yang disebutkan dalam berita), misalnya :

"Kalau Keadaan Timor Portugis Membahayakan, Tak akan Dibiarkan" (*Kompas*, 3-3-75).

Judul di atas merupakan kutipan ucapan Menteri Luar Negeri Adam Malik (waktu itu).

2) Judul Tak Langsung

Judul tak langsung merupakan cuplikan (yang kadang-kadang tidak lengkap) dari sebagian tubuh berita yang tidak penting, tetapi dapat menarik perhatian bila dijadikan judul. Seperti halnya judul langsung, judul tak langsung dapat berupa (a) ikhtisar, (b) tafsiran, atau (c) kutipan. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan di sini ialah sebuah judul "Pangeran dari Yogya Meninggal Habis Lihat 1000 Patung di Borobudur" (*Pos Kota*, 6-3-75) yang mengawali suatu berita dengan isi pokok "bantuan IBM pada proyek pemugaran candi Borobudur" berdasarkan keterangan pers Direktur Jenderal Kebudayaan dan Ketua Proyek Pemugaran Borobudur. Cerita pangeran yang meninggal itu merupakan bagian dari sejarah Borobudur yang ditambahkan pada tema pokok tersebut.

2. Morfologi

Yang menonjol dalam morfologi bahasa berita ialah pemenggalan awalan *me-* yang ternyata masih tetap tinggi frekuensinya, meskipun tidak selalu dilakukan. Berdasarkan penelitian, pemenggalan awalan *me-* lebih sering terjadi pada judul daripada tubuh berita.

Pemenggalan awalan *me-* sering dianggap sebagai penggunaan bahasa Indonesia yang tidak benar. Tetapi rupanya sampai sekarang hal ini masih tetap dilakukan. Seringkali dirasakan pemenggalan awalan *me-* pada judul sebagai cara untuk menonjolkan tindakan atau peristiwa yang dinyatakan oleh

kata kerja yang bersangkutan. Dengan demikian, mau tidak mau, kita harus menyimpulkan bahwa gejala ini merupakan salah satu ciri ragam bahasa berita.

3. Sintaksis dalam Tubuh Berita

Gejala sintaksis yang khas dalam ragam bahasa berita yang kita dapati dalam tubuh berita dapat dibagi dalam tiga golongan berdasarkan penyebabnya, yakni (a) yang disebabkan oleh usaha penghematan dengan menghindari penggunaan kata yang biasa disebut "kata mubazir"² seperti *bahwa*, *oleh*, dan *yang*, (b) penyerapan struktur kalimat bahasa Inggris, seperti struktur partispisip, dan (c) hasil ciptaan penulis berita.

a. Kata Mubazir

Kata mubazir adalah kata yang dianggap oleh penulis berita tidak akan mengganggu kelancaran komunikasi bila tidak dipakai (Hoed, 1978:1). Oleh karena itu, dengan tujuan penghematan, kata-kata jenis itu dihindari pemakaiannya. Beberapa kata yang dianggap mubazir ialah *bahwa*, *pada*, *oleh*, *yang*, *untuk*, *hari*, *tanggal*, dan *bulan*. Kata mubazir yang tercatat di tinggi frekuensinya ialah berturut-turut, *bahwa*, *pada*, dan *oleh* (Hoed, 1978:5-9). Dengan demikian, tercatatlah kalimat-kalimat berikut ini.

bahwa: Dr. Sulastomo mengemukakan (*bahwa*) saat ini masih ada perkembangan yang harus ditunggu dari Timur Tengah (*Kompas*, Selasa 15/3/75).

pada: (Pada) saat itu Bung Hatta berada di ruang tengah (*Kompas*, Senin, 16/8/75).

oleh: Uang itu akan digunakan (*oleh*) Palang Merah Internasional untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan . . . (*Pikiran Rakyat*, Senin, 3/11/75).

yang: Demikian dikemukakan Menteri P dan K dalam pertemuan dengan para rektor Perguruan Tinggi Swasta se Surakarta Kamis (*yang*) lalu (*Kompas*, Senin, 1/3/75).

untuk: Presiden Vietnam Selatan Nguyen Van Thiu mengatakan hari Jumat, *bahwa* ia akan memerintahkan pasukan bersenjata Vietnam Selatan (*untuk*) merebut kembali propinsi Phuoc Long (*Sinar Harapan*, Senin, 11/1/75).

hari: Pengadilan Negeri Serang (*hari*) Rabu memeriksa tiga orang yang dituduh terlibat dalam perkara order penipuan satu juta kotak suara

Pemilu seharga Rp 6.750.000.000,— (*Suara Karya*, Sabtu, 20/11/76).

tanggal: Akhirnya (tanggal) 2 Maret 1959, kedua Fakultas tersebut digabungkan dan diresmikan sebagai ITB (*Kompas*, Senin 8/3/76).

bulan: Sebelum (bulan) Oktober 1973, dunia tidak memperhitungkan perang Oktober yang timbul dengan tiba-tiba (*Kompas*, Selasa 15/3/75)

Hal yang perlu dicatat di sini ialah bahwa *yang* hanya dianggap mubazir bila terdapat dalam frase tertentu saja seperti *Senin (yang) lalu* yang menunjukkan waktu. Bahkan dalam frase seperti *yang akan datang* biasanya penulis berita tidak hanya menghindari kata *yang* tetapi mengganti frase itu dengan *mendatang*. Frase *yang* + kata sifat (*yang besar*) dan *yang* + kata nama yang menunjukkan fungsi (*yang Menteri Luar Negeri*) tidak pernah dipenggal. Bila dalam penelitian tercatat bahwa *yang* sering diperlakukan sebagai kata mubazir, maka hal itu hanya terbatas pada frase yang menyatakan waktu. Sebagai suatu wacana naratif berita memang banyak mengandung kata dan frase yang memperlihatkan hubungan waktu.

Dari penelitian yang dilakukan selama ini, ternyata tidak tercatat kata dari rumpun verbal (kata kerja) yang diperlakukan sebagai kata mubazir (Hoed, 1978:9). Membuang unsur verbal rupanya selalu berakibat terganggunya komunikasi. Apakah hal ini memperkuat asumsi bahwa keseluruhan alam konseptual manusia bertitik tolak dari dua wilayah utama : wilayah kata kerja dan wilayah kata nama, dan bahwa kata kerja itu sentral sedangkan kata nama periferal? (Chafe, 1970:96–98).

b. Serapan dari Bahasa Inggris

Tidak dapat disangkal, baik kantor berita nasional maupun surat-surat kabar sering mengutip berita yang bersumber pada kantor berita asing, khususnya yang berbahasa Inggris. Tidak jarang berita-berita itu diterjemahkan langsung sehingga sejumlah struktur dialihkan begitu saja tanpa mengingat struktur semacam itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dua jenis struktur yang sering tercatat ialah struktur yang biasa disebut partisip. Misalnya :

Struktur yang mirip dengan struktur partisip aktif :

Menyinggung semangat pengorbanan yang harus dimiliki seorang prajurit, Jenderal Jusuf meminta para taruna merenungi ketabahan prajurit-prajurit yang dijumpai sewaktu perjalanan inspeksinya (Kompas, Jumat, 29/9/78).

Bandingkan dengan sebuah berita dalam bahasa Inggris :

Telling her own story of the Chester Sands slaying of which she was accused, Bloria Lamar, cabaret dancer, today tried to convince a Circuit court jury of her innocence.

Struktur yang mirip dengan struktur partisip pasif :

Ditanya apakah penerbitan ini juga akan meliputi penelitian golongan, Cosmas mengatakan tidak demikian halnya (Sinar Harapan, senin, 2/10/78).

Bandingkan dengan berita bahasa Inggris berikut ini :

Asked by journalists about the results of the meeting the Minister said . . .

Dua jenis struktur itu kelihatannya makin sering dipergunakan dan dianggap sudah biasa dalam ragam bahasa berita. Tentu saja ada struktur serapan lainnya seperti *Lahir di Medan tiga puluh tahun yang lalu, MH mencoba nasibnya di Jakarta (. . .)*; bandingkan dengan *Born in New Jersey May 4, 1898, John Paulson spent his boyhood in the East, . . .*

Struktur-struktur tersebut tadi dianggap sebagai serapan dari bahasa asing karena masuk melalui terjemahan sedangkan dalam bahasa Indonesia struktur semacam itu tadinya belum ada. Nida menyebut unsur serapan seperti itu *translationese* (1974:124-125), yakni unsur yang masuk melalui terjemahan pada suatu bidang yang belum memiliki ragam tersendiri atau yang ragamnya sedang berkembang. Pada mulanya unsur seperti itu dianggap janggal dan tidak jarang pula ditolak. Tetapi, tidak juga unsur serapan tertentu dianggap cocok dan kemudian diterima dalam ragam untuk bidang yang bersangkutan. Gejala tersebut terjadi dalam bidang penulisan berita.

c. Hasil Ciptaan Penulis Berita

Dalam menulis berita, wartawan selalu dibayangi oleh kewajiban informasi untuk berhemat dengan kata dan menyampaikan informasi yang jelas. Tidak jarang wartawan menciptakan sendiri struktur kalimat baru seperti halnya struktur *Mahar Mardjono yang Rektor* muncul pertama kali dalam majalan *Tempo*. Didorong pula oleh kewajiban mengetengahkan prinsip 5W (*who, what, when, where, dan why*) dan 1H (*how*), setidaknya sebagian dari formula itu pada paragraf pembuka, seorang wartawan terpaksa menciptakan kalimat yang banyak sisipannya :

Royari Haji Marjuki (20 tahun), dari kampung Tulodong Rt 004/05

kelurahan Senayan Selatan, Jakarta (who), telah menjadi korban pembunuhan (what) Senen sore jam 17.00 (when) di salah satu rumah tempat perjudian (Kompas, 12/2/75).

Struktur dasar seperti ini sangat sering kita jumpai dalam teks berita. Karena belum lengkap, penulis berita kemudian meneruskan lagi keterangannya dalam paragraf selanjutnya :

Korban menderit luka-luka berat di bagian dada sebelah kanan dan perut (how) akibat tusukan sebuah badik yang diduga telah dipersiapkan sebelumnya (why).

Dalam keterbatasan itu, wartawan harus dapat menyusun beritanya sedemikian rupa agar terlalu seperti klise.

4. Struktur Sintaksis Judul Berita.

Dalam meneliti struktur sintaksis judul paragraf, yang menjadi perhatian saya sementara ini ialah judul utama berita. Kita dapat membagi judul berita menjadi dua jenis, yakni (a) yang berupa klausa, yakni konstruksi lengkap yang bersubjek dan berpredikat, dan (b) yang berupa frase, yakni konstruksi yang tidak merupakan susunan subjek-predikat

a. Klausa

Pada umumnya memang judul berupa klausa seperti pada contoh di bawah ini :

"Keuangan Vatikan terpukul" (Sinar Harapan, Sabtu, 7/10/78)

"Presiden Soeharto dan Mashuri bahas penegakan hukum" (Sinar harapan, Sabtu, 7/10/78).

"Ticket Kingkong Amsterdam-Surabaya Rp 4 juta lebih" (Sinar Harapan, Sabtu, 7/10/78).

Berikut ini kita melihat kalimat yang terdiri dari dua klausa sebagai judul :
"Pertempuran di semua front dan Israel lakukan gempuran dari laut" (Sinar Harapan, 7/10/78).

Daya cipta penulis berita telah menghasilkan struktur yang khas dengan tujuan menonjolkan predikat. Struktur semacam ini saya temui pertama kali dalam surat kabar *Kompas* :

"Dilarang, pendirian penggilingan padi baru"

(Kompas, Jumat, 15/9/78).

Struktur di atas sebenarnya merupakan transformasi dari kalimat *Pendirian penggilingan padi baru dilarang*. Karena penulis berita ingin menonjolkan predikatnya (*dilarang*), predikat itu disebut pertama. Gejala ini disebut

topikalisasi. Kadang-kadang topikalisasi dilakukan dengan cara yang membuat pembaca tertarik baik pada unsur yang ditopikalisasi maupun yang lainnya, misalnya :

"Masih terus disiapkan:

Penyederhanaan Penyuluran Produksi Bimas Padi"

(Kompas, Kamis, 5/9/78).

Variasi lain dari judul yang berupa klausa, yang sering terdapat ialah seperti contoh berikut ini :

"Sudomo tentang urusan pajak di Jabar :

Kita tunggu laporannya dulu". (Kompas, Kamis, 5/10/78).

Bagian pertama judul di atas sebenarnya sebuah klausa yang dihilangkan predikatnya: *Sudomo berbicara tentang urusan (. . .)* atau *Kata Sudomo tentang urusan (. . .)*. Memang ada juga kemungkinan struktur judul itu bukan suatu klausa, tetapi frase: *Pendapat Sudomo tentang urusan pajak di Jabar*.

b. Frase

Sejumlah judul berstruktur frase. Sebagian dapat merupakan konstituen suatu kalimat yang tidak kelihatan, sedangkan sebagian lagi tidak dapat diketahui apa kedudukannya. Misalnya :

"Tindakan Rektor bagi Mahasiswa Pembakar Orang" (Sinar Harapan, Sabtu, 7/10/78).

"Pungutan untuk Barang yang Diantar-Pulaukan" (Kompas, Jumat 15/9/78).

Kadang-kadang terdapat variasi seperti :

"Dokar, Kendaraan Rakyat yang disukai Turis" (Kompas, Jumat, 15/9/78).

yang merupakan struktur dengan aposisi.

5. Kosa Kata

Sulit untuk mengatakan bahwa ragam bahasa berita memiliki kosa kata yang khas. Meskipun demikian, kita dapat mengatakan bahwa kata-kata seperti *oknum*, *ricuh*, *tutup-usia*, *tajuk*, *pojok*, dan *mengutip* kita kenal melalui surat kabar dan mungkin juga memang dilahirkan di surat kabar. Ditilik dari dunia pers secara umum, kita pun mengenal kata-kata seperti *menurunkan berita*, *kepsen (caption)*, *mengkover*, *wawancara*, dan *reporter*.

Saya masih belum mengadakan penelitian mengenai segi kosa kata ini. Oleh karena itu, tidak banyak yang dapat dikemukakan di sini mengenai kosa kata ragam bahasa berita.

Kesimpulan

Bahasa berita surat kabar dijadikan pokok pembicaraan dalam kertas kerja ini karena merupakan sumber dan pangkal tolak produksi kebahasaan di bidang pers. Berita merupakan bagian terpenting suatu surat kabar. Penyusunannya dibatasi oleh waktu dan ruang. Berita, seperti sayuran, harus dihidangkan dalam keadaan masih segar; waktu untuk menghasilkan berita yang "segar" sampai siap cetak hanya beberapa jam saja. Berita juga dibatasi oleh ruang; pada dasarnya sebuah berita harus singkat tetapi jelas. Teks berita disusun dengan aturan dasar tertentu agar dapat menarik perhatian pembaca. Batasan-batasan itu menyebabkan teks sebuah berita memiliki struktur yang khusus, sedangkan judul dan kalimat-kalimat dalam tubuh berita memiliki struktur sintaksis yang khusus pula. Tidak dapat disangkal bahwa struktur sintaksis judul dan kalimat-kalimat dalam tubuh berita sering terdapat pula dalam reportase. Reportase juga merupakan teks naratif seperti berita, tetapi biasanya mempunyai struktur teks seperti sebuah cerita pendek. Di samping itu, berita juga disampaikan melalui saluran lisan (radio, TV). Itulah sebabnya, ragam bahasa berita yang saya anggap penting untuk ditonjolkan di sini.

Seperti sudah dikemukakan pada awal kertas kerja ini, sulit kita berbicara tentang ragam bahasa pers yang secara umum, juga sulit untuk berbicara tentang bahasa surat kabar. Kita dapat berbicara tentang bahasa surat kabar apabila yang dimaksud itu ialah ragam bahasa berita yang memang besar pengaruhnya terhadap jenis-jenis tulisan lainnya dalam sebuah surat kabar, terutama reportase.

Ciri ragam bahasa berita dapat dilihat dari segi (a) struktur wacananya (teksnya), (b) tata bahasanya, dan (c) kosa katanya. Dalam kertas kerja ini pembicaraan tentang kosa kata tidak cukup mendalam karena baru merupakan pengamatan biasa saja. Bahasa berita memiliki ragam yang khas dalam morfologinya (pemenggalan awalan *me-*) dan sintaksisnya. Kekhasan dalam tata bahasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, terutama, (a) usaha penghematan (antara lain karena prinsip kata mubazir), (b) usaha menarik perhatian pembaca (di samping harus mengingat struktur dasar teks berita, penulis berita juga harus menciptakan hal-hal baru), dan (c) penyerapan struktur sintaksis dari bahasa Inggris yang kemudian diterima sebagai salah satu struktur ragam bahasa berita.

Penggunaan bahasa Indonesia untuk menulis berita masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, teks berita sering melahirkan struktur atau kata baru. Hal itu menurut pendapat saya tidak merugikan perkembangan bahasa Indonesia, tetapi justru memperkaya bahasa Indonesia khususnya ra-

gam bahasa berita. Para penulis berita kita masih memerlukan model-model kalimat efektif. Meskipun demikian, kita perlu waspada agar perkembangan bahasa berita tidak menyebabkan terbentuknya ragam yang terlalu eksklusif sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai alat komunikasi massa. Kalau konstruksi kalimat berikut ini makin umum dalam teks berita dan masih jelas maksudnya.

Tragedi tersebut terjadi ketika berlangsung pertandingan antara kesebelasan Rajawali Muda melawan kesebelasan Pespa Bart (Berita Buana, Kamis, 12/8/76).

maka kalimat berikut tidak gramatikal karena kata *yang* yang seharusnya mendahului kata *dibuka* dihilangkan :

Badan Pembina Hukum ABRI Senin kemarin memulai rapat kerjanya selama dua hari di Hotel Kartika Chandra Jakarta, dibuka oleh Kepala Badan Pembina Hukum ABRI (. . .) (Kompas, Selasa 25/7/78).

Pada dasarnya ragam bahasa berita adalah ragam bahasa tertulis. Oleh karena itu, harus dibedakan dengan ragam bahasa lisan. Salah satu ciri ragam bahasa tertulis ialah kekonsistenan gramatikal; dalam suatu teks tertulis hubungan logis antara unsur-unsurnya harus tetap dipertahankan. Dalam bahasa lisan, hal ini agak diabaikan karena bahasa lisan didukung oleh faktor-faktor luar bahasa seperti air muka, gerak tangan, dan benda atau situasi di sekitar pembicara. Oleh karena itu, dalam contoh berikut ini, meskipun mungkin masih jelas bagi pembaca, tetapi kekonsistenan gramatikal diabaikan :

Penyadapan pembicaraan lewat SKSD Palapa kemungkinan sangat kecil, walaupun bisa biayanya sama besarnya dengan pembuatan satelit baru.

. . . Menyinggung kemungkinan pemanfaatan Palapa oleh negara-negara Asean atas dasar sistem sewa, menurut Willy Munandir hal tersebut tidak akan mengganggu kepentingan Indonesia . . . (Berita Buana, Selasa 21/8/76).

Bila harus diperbaiki, bunyi berita tersebut di atas menjadi :

Kemungkinan penyadapan pembicaraan lewat SKSD Palapa sangat kecil, walaupun mungkin.

Atau :

Penyadapan pembicaraan lewat SKSD Palapa kemungkinannya sangat kecil.

Sedangkan bagian kedua dapat diperbaiki sebagai berikut :

Menyinggung kemungkinan pemanfaatan . . . , Willy Munandir *mengatakan* hal tersebut . . .

Demikian hasil pengamatan saya terhadap bahasa berita yang saya lakukan sejak tahun 1974. Kita dapat menuntut pada penulis berita untuk tidak memperkaya bahasa berita dengan hal-hal yang baru. Bahasa berita sudah dapat kita pandang sebagai suatu ragam tersendiri. Ciri-ciri ragam itu secara umum telah dikemukakan dalam kertas kerja ini. Meskipun demikian, bahasa berita harus dijaga agar tidak menjadi ragam yang eksklusif sehingga tidak efektif lagi sebagai alat komunikasi massa. Para penulis berita juga perlu memperhatikan dan sadar bahwa bahasa berita adalah bahasa tertulis. Kekonsistenan gramatikal dan hubungan logis antara unsur-unsur teks harus tetap dijaga agar informasi tetap jelas; suatu hal yang sangat penting bagi media massa.

CATATAN

- 1 Saya berterima kasih kepada Saudara Drs. Sapardi Djokodamono yang telah bersedia melakukan transformasi dari sebuah berita menjadi sebuah cerita untuk keperluan kertas kerja ini.
- 2 Istilah "kata mubazir" ini untuk pertama kali saya dengar dari Saudara Drs. Kajat Hartoyo. Ia mengatakan kepada saya bahwa istilah tersebut dilontarkan untuk pertama kalinya oleh Saudara Rosihan Anwar dalam suatu ceramah (?). Dalam pada itu, waktu saya bersama sejumlah rekan mengadakan wawancara di beberapa kantor surat kabar di Jakarta menanyakan mengenai istilah tersebut, ternyata banyak di antara para wartawan yang ditanya tidak mengenal istilah "kata mubazir" meskipun konsep yang terkandung dalam istilah itu memang mereka kenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chafe, W.L. 1970. *Meaning and the Structure of Language*. Chicago/London: The University of Chicago Press.
- Halliday, M.A.K. *at al.* 1970. "The Users and Uses of Language" dalam J.A. Fisman (Ed.) *Reading in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton. Halaman 139-169.
- Hoed. B.H. 1976. *Laporan Penelitian (Sementara) tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Kabar*. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1978. *Kata Mubazir dalam Berita Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia. Kertas Kerja untuk Konferensi Bahasa Indonesia (12-18 Februari)*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Jakobson, R. 1963. *Essais de Linguistique Generale*, Vol. I. Paris : Minuit.
- Nida, F.A. dan Ch. R. Taber. 1974 (1969). *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: E.J. Brill.
- Warren, Carl. 1955. *Modern News Reporting*. New York: Harper & Brothers.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA KREASI DAN PENGEMBANGANNYA

Ajip Rosidi

Pendahuluan

Ketika menerima surat yang menanyakan kesediaan saya untuk membuat sebuah kertas kerja dalam Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga ini, saya tidak dapat segera menyanggupinya. Dalam surat itu, Panitia Penyelenggara meminta saya untuk menulis kertas kerja mengenai kreativitas sastrawan dan pengembangan bahasa Indonesia, yang isinya harus merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut :

- a. Dapatkah dicatat pemakaian kreatif sastrawan yang dapat dikembangkan sebagai unsur pembina bahasa Indonesia ?
- b. Bagaimana para sastrawan memilih variasi kalimat yang kreatif ?
- c. Bagaimana penggunaan unsur kosa kata dan ungkapan yang tidak konvensional ?
- d. Unsur kreatif yang manakah yang dapat memperkaya jumlah pemakaian struktur dan perbendaharaan kata dan ungkapan dalam bahasa Indonesia ragam resmi ?

Baik pokok masalah, yaitu "kreativitas sastrawan dan pengembangan bahasa Indonesia" maupun pertanyaan-pertanyaan itu sendiri, terasa oleh saya, sebagai lapangan permasalahan yang masih gelita.

Karena keterbatasan pengetahuan saya, misalnya, maka saya tidak dapat memahami pertanyaan bagian *a* dan *d*, sedangkan pertanyaan *b* dan *c*, yang dapat saya pahami, hanya dapat dijawab setelah mengadakan penelitian tentang bahasa yang dipergunakan oleh para sastrawan. Terang sekali bahwa saya bukanlah orang yang tepat untuk itu. Masalah pokoknya sendiri, yaitu masalah kreativitas sastrawan, merupakan suatu masalah yang musykil, yang dalam waktu-waktu akhir-akhir ini telah menimbulkan suatu problema

yang menarik bagi ilmu jiwa—suatu lapangan yang jelas tidak saya kuasai—Untuk menyuguhkan sebuah pemandangan umum dalam sebuah kertas kerja tentang masalah kejiwaan para sastrawan Indonesia dan pengembangan bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh para sastrawan itu, jelas sekali saya bukan orangnya, karena saya tidak mampu. Untuk menyuguhkan kertas kerja seperti itu haruslah orang ahli ilmu jiwa yang menaruh minat khusus bagi kegiatan rohani yang khas yang disebut kreativitas yang pula menaruh minat kepada masalah pengembangan bahasa Indonesia.

Tetapi setelah saya berkonsultasi dengan Ketua Panitia, yaitu Dr. Amran Halim, maka saya mendapat kesan bahwa sebenarnya yang diinginkan Panitia ialah agar saya mengemukakan permasalahan itu dari sudut pandangan seorang yang aktif dalam lapangan penciptaan sastra Indonesia. Maka jelas pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab, bukanlah pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan oleh Panitia. Namun, agar supaya saya mempunyai pegangan yang menghubungkan saya sebagai penulis kertas kerja dengan Panitia, maka pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan oleh Panitia itu akan tetap saya jadikan rujukan dalam kertas kerja ini.

Karena saya tidak pernah mengadakan penelitian mengenai kegiatan kreativitas para sastrawan maka dalam kertas kerja ini saya lebih banyak mengemukakan pengalaman-pengalaman pribadi saya sendiri, sehingga sebenarnya kertas kerja ini lebih merupakan sebuah laporan pengakuan. Mudah-mudahan hal ini dapat dimaklumi dan diterima sebagai sebuah sumbangsih dalam Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga ini.

Bahasa Indonesia bagi Saya

Sumpah yang diikrarkan para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, lima puluh tahun yang lalu itu berbunyi sebagai berikut :

- Kesatu : Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, Tanah Indonesia.
- Kedua : Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
- Ketiga : Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Dalam salah sebuah tulisan (Ajip Rosidi, 1977), saya pernah mengemukakan bahwa sumpah yang ketiga itu ternyata kemudian berubah menjadi "mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia"—mungkin karena pengaruh kesejajaran kalimat pertama dengan yang kedua—yang tentu saja mempunyai akibat-akibat yang merugikan. Dalam kesempatan ini, saya pun

akan meminta perhatian kepada kalimat ketiga itu, yaitu kenyataan bahwa bahasa persatuan yang akan dijunjung itu disebut "Bahasa Indonesia".

Kenyataan itu sangat menarik perhatian, karena kalau para pemuda lima puluh tahun yang lalu menyebut tanah airnya dengan "Tanah Indonesia" dan bangsanya dengan "Bangsa Indonesia", kita dapat pahami sebagai usaha untuk menghindarkan pemakaian istilah "Hindia Belanda" yaitu istilah resmi yang dipergunakan pada waktu itu, yang jelas berbau kolonial; tapi nama bahasa yang telah ditetapkan sebagai bahasa persatuan itu, yaitu "bahasa Melayu", tidaklah mempunyai konotasi kolonial. Lagi pula nama tersebut sudah populer dan dipakai juga di kalangan kaum pergerakan pada masa itu.

Tetapi mengapa istilah "bahasa Melayu" dihindarkan dari kalimat sumpah tersebut? Mengapa justru yang dipakai istilah "bahasa Indonesia"?

Sekarang kita dapat mengemukakan dugaan tentang kemungkinan sebab-sebabnya. Yang pertama mungkin karena ingin memperoleh kesejajaran dengan dua kalimat yang pertama sumpah itu. Jadi semata-mata bersifat retorik. Yang kedua, mungkin sebagai jalan keluar (artinya merupakan kompromi) dari kenyataan bahwa bahasa Melayu yang diangkat sebagai bahasa Indonesia itu bukanlah bahasa yang paling banyak pemakainya (kalah oleh paling tidak bahasa Jawa dan Sunda) dan bukan pula yang paling kaya kesustranya.

Sulit bagi kita sekarang untuk mengetahui apakah sebab yang sebenarnya, karena kita tidak mempunyai dokumen yang lengkap mengenai apa yang dibicarakan orang dalam kongres tersebut. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada notulen yang lengkap yang pernah dipublikasikan. Tetapi mengenai hal ini, sesungguhnya dapat kita selidiki sejak kapan dan siapakah yang pertama kali mempergunakan istilah "bahasa Indonesia" itu.

Yang jelas adalah bahwa baik dalam tahun-tahun sebelumnya maupun dalam tahun-tahun berikutnya, kita tidak dapat menarik suatu garis yang jelas antara "bahasa Melayu" dengan "bahasa Indonesia". Orang mempergunakan dua istilah, yang diterima dan diartikan orang dengan barang yang sama (Ajip Rosidi, 1964:1-9).

"Barang yang sama" itulah yang saya pelajari di dalam dan di luar sekolah; sementara itu dalam kehidupan sehari-hari saya tetap mempergunakan bahasa ibu saya ialah bahasa Sunda. Saya mula-mula belajar menulis dalam bahasa Sunda sekitar tahun 1950, tetapi kemudian juga dalam bahasa Indonesia. Bahkan yang lebih dahulu dipublikasikan adalah tulisan dalam bahasa Indonesia. Baru setelah saya banyak mempublikasikan tulisan dalam bahasa Indo-

nesia—baik sajak maupun cerita pendek, bahkan artikel dan esei—saya mempublikasikan tulisan dalam bahasa Sunda berupa sajak, dan artikel atau esei.

Saya membaca karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang terbit di Indonesia; baik yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, Pustaka Rakyat (penerbit majalah Pujangga Baru) maupun oleh para penerbit partikelir lainnya yang kecil-kecil. Saya merasa menjadi pelanjut dari estafet sastra Indonesia yang belum panjang usianya. Tetapi saya pun banyak membaca, dan masih terus juga membaca, karya-karya sastra Sunda, baik yang bergerak *wawacan* maupun yang berbentuk prosa. Saya tidak banyak membaca hikayat-hikayat yang ditulis dalam bahasa Melayu. Tetapi, saya banyak sekali membaca *wawacan* dalam bahasa Sunda. Dalam membaca karya sastra yang ditulis oleh para pengarang Angkatan Pujangga Baru, para penulis Bali Pustaka, dan juga di luarnya, kemudian juga pengarang Angkatan 45, saya mendapat kesan bahwa orientasi para pengarang kita itu terutama adalah sastra dunia, dalam hal ini sebenarnya sastra Belanda dan kemudian saya tahu bahwa itu pun dapat dipersempit pula menjadi karya sastra Indo (*Indische belletrie*). Ketika kemudian kaki langit pandangan itu diperluas, maka orientasi para sastrawan itu terutama tetaplah kepada sastra Barat, terutama melalui bahasa Inggris dan bahasa Eropa modern lainnya seperti bahasa Prancis dan Jerman.

Orientasi yang selalu ke dunia Barat itu tidak hanya kelihatan dalam bentuk-bentuk sastra yang kian banyak ditulis dalam bahasa Indonesia seperti roman, esei, cerita pendek, sajak bebas, kritik, drama, dan lain-lain yang adalah berasal dari khazanah sastra Barat—walaupun terbukti bahwa baik bentuk cerita pendek maupun drama asalnya dari Timur juga—, melainkan juga dalam struktur kalimat dan penambahan jumlah kosa kata bahasa yang dipergunakan. Struktur bahasa Melayu lama banyak ditinggalkan, dan para pengarang merasa lebih leluasa memakai struktur bahasa Belanda. Kalimat dengan *di mana* seperti *Pasar di mana pedagang itu berjualan di Tanah Abang; yang mana* seperti *Peristiwa pembunuhan itu, yang mana sangat mengejutkan hatinya, terjadi pada suatu hari Minggu; atau kepada siapa, Pak Abdullah kepada siapa saya berutang budi adalah orang yang sangat baik hati*, dan lain-lain.

Struktur kalimat seperti itu sekarang sudah sangat populer sekali, sehingga bukan saja mereka yang menguasai atau sekurang-kurangnya mengenal salah satu bahasa asing yang mempergunakannya, tetapi mereka yang tidak mengenal apalagi menguasai bahasa asing pun banyak mempergunakan kalimat

seperti itu—tentu saja sering dengan tidak tepat..

Pengaruh bahasa Melayu lama dan bahasa Barat modern itu telah memperkaya dan membantu perkembangan bahasa Indonesia. Saya telah menerima pengaruh itu, sehingga jika diperhatikan bahasa Indonesia yang saya gunakan juga tidaklah "bersih".

Tetapi yang harus saya kemukakan pula ialah kenyataan bahwa banyak pengaruh bahasa Sunda dalam tulisan-tulisan saya. Bukan saja saya banyak memasukkan kata-kata bahasa Sunda untuk memperkaya bahasa Indonesia, tetapi juga struktur kalimat dan pikiran bahasa Sunda. Beberapa kata Sunda saya masukkan secara sadar, terutama untuk menjelmakan pengertian atau maksud, yang kata padanannya tak terdapat dalam khazanah kata Indonesia ataupun Melayu, atau karena ada rasa yang tak dapat terwakili oleh padanan yang tersedia. Beberapa kata kemudian ternyata diterima secara umum dan menjadi kata yang telah diterima sebagai kata Indonesia, misalnya kata *judul* untuk menggantikan pengertian yang pada waktu itu selalu diistilahkan dengan kepala karangan yang terasa agak terlalu panjang. Tapi banyak juga kata-kata lain yang saya tawarkan tidak mendapat sambutan, misalnya kata *melang*, *ajrih*, dan lain-lain yang tidak juga menjadi populer sampai sekarang.

Tetapi banyak pula pengaruh bahasa Sunda yang secara tidak sadar terdapat dalam tulisan-tulisan saya. Misalnya, dalam sebuah sajak yang ditulis tahun 1954, berjudul "Rindu" (Ajip Rosidi, 1976:11) bait pertama baris keduanya berbunyi: "Tembang. *sejalanan* menyuruk gang demi gang". Perkataan *sejalanan* tak dapat diartikan dalam bahasa Indonesia. Saya sendiri sekarang merasa heran, mengapa saya memakainya. Tetapi saya tidak susah untuk dapat mengetahui sumbernya. Kata itu merupakan terjemahan dari ungkapan *sajajalan* basa Sunda, artinya, sepanjang jalan. Yang saya maksudkan dengan kalimat itu : (Aku) menembang sepanjang jalan memasuki gang demi gang (yang sempit).

Mengapa hal itu sampai terjadi ? Menurut hemat saya, hal tu terjadi karena secara tidak sadar saya berpikir dalam bahasa Sunda, baru kemudian memindahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi hal seperti itu ternyata terdapat pula dalam karangan para pengarang yang lain. Misalnya pengarang Utuy T. Sontani (lahir 1920), dalam karangan-karangannya banyak sekali memperlihatkan semacam itu. Dalam buku kumpulan cerita pendeknya (Utuy T. Sontani, 1963) dapat terlihat, misalnya : "*Di dalam aku teringat kepadanya, rupanya ia senang-senang saja tidur dengan perempuan itu*" (halaman 32) yang jelas merupakan terjemahan dari bahasa Sunda "*Jeroning kuring inget ka manehna, sigana manehna mah keur senang-senang bae*

sare jeung eta awewe”.

Dalam bahasa Indonesia yang baku, kalimat itu seharusnya berbunyi : “Ketika (Sementara) aku terkesan kepadanya, agaknya ia sendiri sedang berenang-senang tidur dengan perempuan itu”.

“Ah, gelinya aku memikirkan!” (halaman 79), jelas sebuah kalimat yang aneh dalam bahasa Indonesia. Karena kalimat itu terjemahan dari kalimat bahasa Sunda : *Ah hayang seuri kuring mah mikirkeunana!*” Dalam bahasa Indonesia baku, seharusnya ia berbunyi : Ah, aku merasa geli memikirkannya”.

Juga hal seperti itu terdapat pula dalam karanga-karangan Achdiat K. Mihardja, misalnya dalam roman *Atheis* (1960:36). Kalimat “*Datanglah kira-kira setengah lima begitu*”, yang merupakan terjemahan dari “*Datang kira-kira pukul lima kitu*”. Dalam bahasa yang baku seharusnya kalimat itu tidak usah mendapat tambahan kata *begitu*.

“*Ia memberes-bereskan juga beberapa buku yang berantakan di atas melaku*” yang merupakan terjemahan dari kalimat bahasa Sunda “*Manehna memeres buku-buku nu patulayah dina meja kuring*”. Dalam bahasa Indonesia yang baku tidak dikenal kata ulang *memberes-bereskan* dalam kalimat seperti itu, cukup dengan *membereskan* saja.

“*Terdengar olehku dari dalam kamar suara tersedu-sedu*” (halaman 195) yang merupakan terjemahan dari “*Kadenge ku kuring ti jero kamar aya sora nu ngagukguk*”. Dalam bahasa Indonesia baku, kalimat itu seharusnya cukup dengan “*Kudengar dan seterusnya*.”

Penyimpangan-penyimpangan seperti itu dengan mudah dapat saya peroleh pula dalam karangan-karangan yang ditulis oleh para pengarang yang berasal dari Jawa Barat yang mempunyai bahasa ibu bahasa Sunda seperti Rusman Sutiasumarga (lahir 1917), Aoh K. Hadimadja (1911—1973), Ramadhan K.H. (lahir 1927), dan lain-lain.

Tetapi hal seperti itu tidak hanya terdapat pada karangan-karangan para pengarang yang mempunyai bahasa ibu bahasa Sunda. Dalam karangan-karangan yang ditulis oleh para pengarang yang mempunyai bahasa ibu bahasa Jawa, kelihatan pula pengaruh bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia yang dipakainya. Misalnya dalam karangan Pramoedya Ananta Toer (lahir 1925), berjudul *Keluarga Gerilya* (1962) terdapat kalimat-kalimat sebagai berikut :

“*Amilah masih dalam keadaannya : memanjang angan.*” (halaman 20) yang berasal dari ungkapan bahasa Jawa : *ngulur angen-angen*;

“*Aku sudah senang jadi tukang beca asal engkau bisa terus makan*” (halaman 25) yang berasal dari ungkapan *mangan terus* dan bukan berarti

langsung makan seperti harus begitu diartikan dalam bahasa Indonesia baku;

"*Dan mengapa jadi beitu?*" (halaman 116) yang berasal dari ungkapan basa Jawa *dadi ngono*.

"*Tapi perempuan yang begini tak sabaran* (halaman 97) tentu berasal dari bahasa Jawa *ora sabaran*.

Juga dalam karangan-karangan Trisnojuwono (lahir 1926), terdapat kalimat-kalimat yang menunjukkan pengaruh bahasa Jawa. Misalnya dalam bukunya *Laki-laki dan Mesiu* (1971) terdapat antara lain kalimat-kalimat sebagai berikut :

"*Keberangkatanku tidak seperti tentara-tentara biasa*" (halaman 7) yang merupakan terjemahan dari *prajurit-prajurit lumrah*;

"**sudah lama tidak pulang sejak pindahanya pasukannya yang dulu bertugas di situ*" (halaman 9), yang merupakan dari ungkapan *pindahane pasukane*;

"*Dalam matanya kurasai permintaan yang mendalam*" (halaman 14), yang tentu berasal dari bahasa Jawa "*dakrasa*";

Tentu saja kelimat-kalimat dan penggunaan bahasa Indonesia semacam itu dengan mudah dapat saya temukan dalam karangan-karangan yang lain kedua pengarang itu, dan juga dalam karangan-karangan buah tangan para pengarang yang lain yang berasal atau yang berbahasa ibu bahasa Jawa. Hal yang sama akan dapat juga kita lihat dalam karangan-karangan buah tangan para pengarang yang bukan berasal dari Sunda dan Jawa. Tentu saja dalam karangan-karangan mereka yang kita lihat adalah pengaruh bahasa ibunya masing-masing, dan bukan pengaruh bahasa Jawa atau Sunda!

Bahasa yang Kreatif

Apa arti kenyataan-kenyataan yang saya kemukakan itu?

Pertama ialah bahwa para sastrawan kita dalam mempergunakan bahasa Indonesia untuk mengekspresikan dirinya, sering kembali atau sering masih berpikir dalam bahasa daerahnya, atau bahasa yang menjadi bahasa ibunya. Hal ini bertalian dengan kenyataan bahwa bahasa Indonesia belum menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu bagi umumnya para pengarang kita.

Kedua ialah bahwa untuk mengekspresikan hal-hal tertentu, bahasa Indonesia dianggap belum memadai oleh para pengarang kita sehingga ia terpaksa berpaling kepada bahasa ibunya; atau kepada bahasa lain yang dianggap akan lebih mampu mengekspresikan dirinya, baik berupa peminjaman kata (leksikal) maupun berupa pemakaian struktur kalimat (sintaksis)

ataupun perubahan bentuk kata (morfologi).

Kecuali berpaling kepada bahasa ibunya, para pengarang pun berpaling kepada bahasa asing yang menjadi bacaannya, sering pula yang menjadi sumber pemikiran dan budayanya.

Menurut sifatnya, bahasa Indonesia sangat terbuka akan berbagai kemungkinan pengaruh. Pada satu pihak karena sebagai bahasa yang masih muda belum mempunyai bentuk yang ketat; pada pihak lain karena masyarakat pemakainya pun masih mencari bentuk kulturalnya yang baku. Dengan kata lain: belum baku. Masyarakat pemakai bahasa Indonesia mempunyai latar belakang kebudayaan, pendidikan, pengalaman yang berlain-lainan, sehingga kesemuanya itu memberikan kemungkinan timbulnya variasi pengaruh yang hampir tidak terbatas.

Pengaruh terhadap bahasa Indonesia dengan demikian dapat terjadi dari dua arah. Yang pertama pengaruh dari bahasa asing terutama berupa peminjaman kata-kata yang mengekspresikan kehidupan dunia modern; namun juga dalam bidang sintaksis dan morfologi pengaruh itu kelihatan pula. Meskipun sekarang ini jarang sekali pengarang Indonesia yang menganggap bahasa asing sebagai bahasa ibunya—agak berlainan dengan para pengarang sebelum perang yang banyak dapat disebut mempunyai bahasa Belanda sebagai bahasa ibunya atau bahasanya yang pertama—tetapi kebanyakan dari mereka meminimalkan kekayaan rohaninya melalui bacaan yang umumnya ditulis dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Bacaan dalam bahasa Indonesia sendiri belum banyak memberikan kemungkinan untuk memperkaya kehidupan rohani para pengarang itu.

Yang kedua, pengaruh dari bahasa daerah, yang umumnya menjadi bahasa ibu setiap orang Indonesia. Meskipun peminjaman kata dari bahasa daerah pun banyak dilakukan, tetapi pengaruh dari bahasa daerah ini terutama pula bersifat sintaksis dan morfologis. Yang bersifat leksikal terutama berupa peminjaman kata-kata atau istilah kehidupan sehari-hari, yang khas, yang tidak terdapat dalam kehidupan modern seperti alat-alat dapur, nama-nama flora, fauna, dan lain-lain. Di samping itu ungkapan-ungkapan yang khas seperti telah saya kemukakan dalam contoh-contoh tadi.

Pengaruh sesuatu bahasa kepada bahasa yang lain sangatlah umum sekali. Menurut Edward Sapir (1939:205) sangatlah sukar menemukan bahasa yang sama sekali bebas atau tidak terpengaruh oleh bahasa yang lain. Pengaruh yang paling mudah dan yang paling banyak terjadi adalah masuknya kata-kata: jadi dalam bidang leksikal. Sering peminjaman atau pemerikayaan khazanah kata suatu bahasa dilakukan karena dalam bahasa itu tak ada kata yang

mempunyai padanan yang sama dengan kata tersebut; tetapi sering pula terjadi bahwa peminjaman itu dilakukan juga walaupun ada kata yang mempunyai padanan yang sama dalam bahasa tersebut. Dalam hal kedua ini maka peminjaman kata itu menambah khazanah kata dengan padanan yang mempunyai arti yang sama (sinonim), misalnya sekarang dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata-kata *transisi*, padahal kita telah mempunyai kata *peralihan*, kita pakai kata *nasional* padahal kita telah mempunyai kata *kebangsaan*, kita pakai kata *plural* meskipun kita telah punya kata *majemuk* (yang juga berasal dari kata pinjaman), dan lain-lain.

Kadang-kadang pengaruh yang bersifat leksikal itu tidak langsung diambil dari bahasa aslinya, seperti kita sekarang banyak meminjam kata yang asalnya dari bahasa Yunani atau Latin melalui bahasa Belanda dan Inggris, seperti *ekonomi*, *psikologi*, *antropologi*, dan lain-lain. Peminjaman kata seperti itu tidak hanya dilakukan oleh bahasa Indonesia saja. Bahasa-bahasa lain pun, termasuk bahasa-bahasa modern, banyak meminjam kata-kata dari bahasa lain. Kata-kata Arab banyak yang masuk menjadi khazanah kata Inggris melalui bahasa Latin seperti *aether*, *algebra*, *alcohol*, *alchemic*, *sugar*, *soap*, dan lain-lain. Juga dari bahasa Melayu, bahasa Inggris meminjam kata-kata antara lain *mango*, *orangutan*, *rattan*, dan lain-lain. Bahkan menurut Mario Pei (1960:332) kata bahasa Inggris *so long* pun berasal dari kata *salam* bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Melayu!

Dalam bayang-bayang pengaruh itu si pemakai bahasa, dalam hal ini si sastrawan, dapat membuat kata-kata baru atau susunan kalimat baru, yang niscaya merupakan ungkapan baru yang kreatif. Kata-kata bahasa asing atau bahasa daerah yang dia tidak temukan padanannya dalam bahasa Indonesia, akan dia pakai dalam bahasa Indonesia, artinya dia masukkan sebagai unsur pemer kaya bahasa Indonesia; tetapi dia harus sesuaikan dengan sifat-sifat bahasa Indonesia. Misalnya haruslah dia perhatikan fonem yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Tak dapat misalnya seorang Sunda yang ingin memasukkan kata-kata yang mempunyai fonem O yang dilambangkan dengan huruf *eu*, karena bahasa Indonesia tidak mengenal fonem dan huruf itu- meskipun secara aneh sekali kata *baheula* dipinjam juga dan menjadi populer dalam kalangan tertentu. Dari bahasa Belanda misalnya telah banyak kita terima dorongan untuk menciptakan istilah-istilah baru yang khas dunia modern, yang sebelumnya tak dikenal dalam kehidupan budaya lama kita, misalnya kata *rumah sakit* yang merupakan bentuk baru dari terjemahan *ziekenhuis* dengan mematuhi hukum bahasa Indonesia yang mendahulukan kata yang diberi keterangan dari yang memberi keterangan dan lain-lain.

Usaha menciptakan istilah atau ungkapan, atau susunan kalimat yang tidak lazim itu adalah usaha kreatif, yang kecuali memperkaya kemungkinan pemakaian bahasa Indonesia, juga menguji kemampuan bahasa Indonesia sendiri. Ketika menciptakan karyanya, para sastrawan ingin melahirkan suatu pengalaman yang sebelumnya tak pernah dituliskan orang, maka pada saat itu kemampuan kreatifnya diuji, antara lain berupa pemakaian bahasa secara kreatif. Sastra, menurut Max Lerner dan Edwin Mims, Jr. (1957:526) dalam melahirkan pengalamannya dalam bahasa, juga meningkatkan kemampuan bahasa tersebut.

Hubungan antara bahasa dan sastra, menurut Rene Wellek dan Austin Warren (1949:178) adalah hubungan dialektik. Perkembangan bahasa-bahasa Eropa modern, tak dapat dipisahkan dari pengaruh karya sastra yang ditulis para sastrawan dalam bahasa tersebut. Bahasa Prancis dan Inggris tak dapat dipisahkan dari pengaruh sastra neoklasiknya; begitu juga bahasa Jerman tak dapat dipisahkan dari pengaruh karya sastra Goethe dan karya para pengarang Romantik Jerman.

Dalam hal bahasa dan sastra Indonesia, maka kita pun akan melihat peranan sastrawan Indonesia dalam pembinaan bahasa Indonesia. Sanusi Pane (1905-1969), S. Takdir Alisjahbana (lahir 1908); Armijn Pane (1908-1971); dan lain-lain terjun langsung dalam pembinaan bahasa Indonesia. Mereka banyak menulis atau mengajarkan bahasa Indonesia. S. Takdir Alisjahbana pernah disebut orang sebagai "insinyur bahasa". Tetapi haruslah diakui bahwa pengaruh karya sastra mereka sendiri dalam pembinaan bahasa Indonesia, sangatlah terbatas. Hal itu disebabkan oleh karya sastra mereka itu--dan juga karya sastra para pengarang kita lainnya-- belum dapat menjadi guru yang memberikan contoh pemakaian bahasa Indonesia yang baik, karena karya-karya itu belum lagi menjadi bacaan yang dapat diperoleh oleh setiap orang Indonesia. Karena belum mempunyai metode pengajaran sastra yang efektif, dan karena belum tersedia perpustakaan yang lengkap, maka hubungan antara sastra dan para pelajar, para mahasiswa dan bahkan para guru--apalagi masyarakat awam umumnya-- masihlah merupakan hubungan yang terjadi karena kebetulan, belum lagi menjadi hubungan yang berupa kewajiban dan keakraban.

Maka dalam hal ini peranan Chairil Anwar (1922-1949) sangatlah istimewa. Kalau para pengarang sebelumnya mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan rapi sesuai dengan hukum dan sifat bahasa Melayu, maka Chairil Anwar memasukkan unsur-unsur bahasa sehari-hari ke dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Indonesia yang dipergunakannya, tak sedikit pun

pernah masuk pengaruh bahasa Melayu Pasar. Bahasa Takdir sangatlah kuat berpegang kepada kaidah-kaidah bahasa Indonesia dengan baik. Penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan, banyak yang kemudian diterima dan dicontoh oleh masyarakat pemakai bahasa Indonesia sehingga penyimpangan itu tidak lagi berupa penyimpangan.

Sebenarnya usaha untuk memasukkan pengaruh (terutama peminjaman kata) sehari-hari dalam karya sastra telah dilakukan juga oleh Armijn Pane, yang memasukkan kata-kata seperti *radio* ke dalam sajaknya; tetapi kurang berhasil. Mungkin karena pada dasarnya Armijn Pane berpikir dalam bahasa Belanda yang menjadi bahasa pertamanya, sehingga percobaan demikian lebih merupakan suatu usaha melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan daripada usaha untuk mengungkapkan sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah diungkapkan dalam bahasa Indonesia dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan bahasa Indonesia sendiri.

Hal ini berlainan dengan pemanfaatan unsur-unsur bahasa Melayu Pasar dan bahasa sehari-hari oleh Chairil Anwar dalam sajak-sajaknya misalnya. Kata *bisa* (yang berarti 'dapat' dan bukan *poison* dalam bahasa Inggris) dipakainya dengan tidak ragu. Begitu pula kata *punya* (yang berarti 'ber' dan bukan yang berarti 'memiliki') digunakannya pula. Ungkapan seperti :

"*Dan gerak tak punya arti*" dalam sajak "Kawanku dan Aku" (Anwar, 1953:16), terasa lebih plastis daripada "*Dan gerak tak berarti*".

Yang hendak saya kemukakan ialah bahwa bahasa Indonesia pada zaman Jepang itu, setelah bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang sebelumnya sama sekali tak pernah terpikirkan, oleh Chairil (dan juga Idrus dalam prosa) mendapat tempaan pengalaman yang lebih mendalam, lebih mencekam, lebih subtil, lebih menulung sungsum. Pengalaman yang luar biasa, yaitu bahasa yang kreatif. Apakah sebenarnya bahasa yang kreatif? Bahasa yang kreatif ialah bahasa yang dapat menjadi sarana penyampaian ekspresi rohani pemakainya yang luar biasa, misalnya karena apa yang hendak diekspresikannya itu tidak pernah terdapat dalam lingkungan kehidupan budaya bahasa tersebut.

Chairil Anwar yang sebagai sastrawan berinduk kepada sumber budaya Eropa (Sastrowardjo, 1974), mencoba mengekspresikan getaran sukmanya itu dalam bahasa Indonesia yang walaupun sudah mendapat pengaruh bahasa Barat (Belanda terutama), merasa perlu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi penyimpangan-penyimpangan itu dilakukannya dengan memanfaatkan kemampuan bahasa dan sifat bahasa Indonesia sendiri (Teeuw, *in edita*).

Dalam hubungan ini, saya ingin mengutip sebuah sajak Chairil Anwar yang ditulis tahun 1947 (Jassin, 1968:68), yaitu :

PEMBERIAN TAHU

Bukan maksudku mau berbagai nasib
nasib adalah kesunyian masing-masing.
Kupilih kau dari yang banyak, tapi
sebentar kita sudah dalam sepi lagi
terjaring.

Aku pernah ingin benar padamu,
Di malam raya, menjadi kanak-kanak
kembali,

Kita berpeluk ciuman tidak jemu
Rasa tak sanggup kau kulepaskan.
Jangan satukan hidupmu dengan hidupku
Aku memang tidak bisa lama bersama
Ini juga kutulis di kapal, di laut
tidak bernama!

Tak ada satu patah kata pun dalam sajak ini yang tidak dikenal dalam bahasa Melayu. Tetapi, kata-kata itu oleh penyairnya digunakan untuk melahirkan pengalaman yang boleh dikatakan tidak dikenal dalam kehidupan Melayu lama paling tidak tak pernah dituliskan orang. Konsep tentang nasib yang disebut sebagai "kesunyian masing-masing", adalah sesuatu yang aneh. Meskipun pengertian takdir yang dalam alam pikiran lama pun "*milik tara pahili-hili, bagja teu paala-ala*" (tiap orang punya kadar sendiri-sendiri), tetapi tidak pernah dianggap sebagai "kesunyian", yang barangkali sumbernya dapat dicari pada bacaan Chairil pada waktu itu. Dan juga adalah suatu hal yang mengejutkan, hampir-hampir tak masuk akal, bagaimana seorang lelaki yang telah *berpeluk ciuman tidak jemu*, kepada kawan-wanitanya itu, meskipun *rasa tak sanggup kau kulepaskan*", berkata *Jangan satukan hidupmu dengan hidupku*. Sungguh suatu hal yang tak dapat terpikirkan dalam rangka kehidupan budaya Melayu lama.

Sikap yang menunjukkan adanya konsep yang mempunyai ukuran nilai yang tak terdapat dalam kehidupan budaya Melayu itu dilahirkan dalam sebuah sajak pendek yang semuanya mempergunakan kata-kata yang sudah dikenal dalam bahasa Melayu. Tetapi, sajak itu pun menunjukkan bagaimana kata-kata lama itu tampil membawakan gambaran imaji yang hidup seperti *kita sudah dalam sepi lagi terjaring*, yang memberikan bayangan adanya jaringan sepi yang setiap waktu akan menangkap kita.

Baris terakhir yang berbunyi *Ini juga kutulis di kapal, di laut tidak bernama* barangkali akan segera mengingatkan kita akan sajak-sajak Slauerhoff, dokter kapal yang jadi penyair pengembara itu. Kalimat ini bukan saja menyarankan bahwa sajak itu ditulis oleh penyairnya setelah dia sendiri berada di kapal memberi tahu si pacar, melainkan juga memberikan gambaran pengembaraan yang tak habis-habisnya, menempuh daerah dan wilayah tak dikenal, karena lautnya pun tidak bernama.

Pemakaian kata-kata sederhana oleh Chairil dalam sajak itu ternyata telah memberikan suatu dunia tersendiri, dunia yang sebelumnya tak dikenal dalam alam pikiran kehidupan budaya Melayu lama. Dunia seorang pengembara tak beralamat, dunia seorang *bohémien*! Konsep ini ternyata kemudian mendapat sambutan dari para penyair, sastrawan dan seniman Indonesia lainnya sehingga kehidupan seniman *bohémien* pernah ada masanya menjadi mode dalam dunia kesenian Indonesia.

Sastra, kata Max Lerner dan Edwin Mims, Jr. pula (1957:531) sangat peka terhadap dinamika masyarakat dalam peralihan. Sebagai sastrawan yang hidup dalam masa peralihan, Chairil telah mengekspresikan dirinya sebagai seorang yang sangat peka akan kemungkinan-kemungkinan dan memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan dunia dan kehidupan yang sebelumnya tak dikenal dalam masyarakat Indonesia. Sastra, kata Sapir (1939:236) adalah bahasa yang diekspresikan secara istimewa. Dalam hal ini bahasa Indonesia yang dipergunakan Chairil Anwar adalah contoh yang representatif. Bahasa yang dipergunakan Chairil adalah bahasa yang benar-benar istimewa, walaupun kata-kata yang dipakainya kebanyakan kata-kata yang bisa, yang sebelumnya pun sudah terdapat dalam khazanah kata Melayu. Akan tetapi, ia telah mempergunakan kata-kata secara istimewa sehingga dapat mengungkapkan kehidupan yang sebelumnya tak dikenal dalam kehidupan budaya Melayu. Dengan demikian Chairil telah membuktikan budaya Melayu. Dengan demikian, Chairil telah membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang kreatif yang mempunyai kemungkinan-kemungkinan untuk mengungkapkan kehidupan dan kekayaan rohani manusia, bahkan juga yang tadinya sangat asing sekalipun. Kemampuan ini merupakan suatu modal yang besar bagi sastrawan yang menulis dalam bahasa Indonesia. Tentu saja pemanfaatan kemungkinan itu harus dimulai dengan penguasaan sifat-sifat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia terlebih dahulu. Memasukkan serba pengaruh, baik dari bahasa asing maupun daerah, tanpa penguasaan bahasa Indonesia secara baik akan menimbulkan kekacauan saja. Dalam hal ini, saya

kira Chairil Anwar telah dipopulerkan secara kurang menguntungkan, yaitu karena ia sering diperkenalkan sebagai seorang sastrawan pelopor yang memakai unsur bahasa sehari-hari dalam karya sastra, *tanpa* keterangan bahwa Chairil tetap berpegang kepada kaidah-kaidah bahasa Indonesia sendiri. Penyimpangan-penyimpangan dilakukannya untuk mengungkapkan kehidupan rohani manusia yang sebelumnya tak terdapat dalam kehidupan budaya Indonesia, sehingga dengan demikian memperkaya kehidupan rohani yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, penyimpangan itu kreatif karena berhasil memindahkan dan mengungkapkan suatu dunia sendiri dalam bahasa yang dipakainya.

Masalahnya sekarang ialah apakah para sastrawan kita sesudah Chairil mempunyai kekayaan rohani yang akan menuntut dilahirkan dalam bahasa yang kreatif. Menurut Max Lerner dan Edwin Mims, Jr. (1957:531), setiap pengarang itu mempunyai dua filsafat, yaitu credo artistik yang sadar dan yang letaknya lebih dalam, yaitu berupa visinya tentang kehidupan dan sistem nilai yang terletak di bawah sadar. Yang pertama akan menunjukkan ke dalam aliran (isme) apa ia termasuk, sedangkan yang kedua akan menunjukkan pandangan hidup (*weltanschauung*) hidupnya.

Mudah-mudahan kesan bahwa para sastrawan kita sekarang terlalu sibuk dengan yang pertama, yaitu dengan credo artistiknya dan kurang memperhatikan lapisan falsafi yang kedua--seperti yang saya peroleh--adalah keliru. Karena apabila kesan itu tidak keliru, maka kehidupan sastra kita nanti hanya akan sibuk membicarakan lapisan atas dan kurang menyelam ke dalam memasuki kehidupan yang lebih berbobot.

Pengembangannya

Yang sekarang merisaukan ialah kenyataan bahwa banyak (mungkin pula kebanyakan) pengarang Indonesia kurang memadai terhadap penguasaan bahasa Indonesia. Hal itu dapat dicari sebabnya pada berbagai hal: pada pendidikan bahasa Indonesia yang kurang efektif, pada pengajaran sastra yang belum berjalan sebagaimana mestinya, pada kurangnya kesempatan membaca buku karya-karya sastra Indonesia yang baik-baik, karena kurangnya perpustakaan yang lengkap, pada kenyataan bahwa banyak karya sastra yang baik-baik seperti karya Pramoedya Ananta Toer, Utuy T. Sontani, Rivai Apin, dan lain-lain yang tidak bisa diperoleh lagi secara wajar (baik melalui toko buku maupun melalui perpustakaan), dan lain-lain.

Pengaruh bahasa daerah yang sekarang banyak kelihatan pada para pengarang kita, sering terbatas kepada pengaruh kata-kata belaka; atau kepada

ungkapan sehari-hari saja. Pengaruh yang bersumber dari sastra dan budaya daerah sendiri kurang kelihatan. Hal itu disebabkan karena sastra dan budaya daerahnya sendiri kurang akrab bagi umumnya para pengarang (muda) kita. Kehidupan budaya dan bahasa daerah sendiri beberapa dasawarsa dalam alam kemerdekaan ini memang mengalami erosi yang luar biasa (Rosidi, 1978).

Para pengarang (muda) kita merasa lebih akrab dengan kehidupan sastra dan budaya--melalui bacaan--Eropah atau Amerika. Tetapi, apabila kita perhatikan bahwa lepas dari soal penguasaan salah satu bahasa asing itu sendiri, buku-buku bahasa asing yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan bukanlah karya-karya sastra yang baik, melainkan terutama berupa bacaan sampah belaka--karena belum adanya suatu kebijaksanaan impor buku yang terarah yang menguntungkan perkembangan budaya kita--maka sangatlah sulit kita mengharapkan para pengarang kita akan benar-benar mendapat kesempatan membaca karya-karya sastra asing yang cukup dan representatif.

Kenyataan itu menyebabkan para pengarang kita sebenarnya umumnya kurang mendapat kesempatan untuk mengisi kehausan rohaninya dengan bacaan yang dapat memberikan keluasan kaki langit pandangan dan kedalaman penyelaman pemikiran. Bacaan yang baik yang sampai ke tangan mereka lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor kebetulan daripada merupakan hasil program yang berencana dan terarah. Karena itu, sering kita--bahkan juga para sastrawan kita yang paling luas bacaannya sekalipun--baru mengetahui nama pengarang besar yang mendapat hadiah nobel setelah ada berita bahwa ia menerima hadiah tersebut. Itupun sering hanya terbatas kepada namanya saja. Karya-karya kita tak pernah tahu, tak pernah mendapat kesempatan untuk tahu karena kita tidak mempunyai sarana untuk itu.

Kehidupan sastra Indonesia seakan-akan terpisah dari arus kehidupan sastra dunia. Bahkan kebanyakan para sastrawan kita sendiri tidak mengikuti perkembangan kesusastraan dunia secara intensif, karena sarana dan kesempatan untuk itu tidak ada. Sarana untuk membawakan sastra Indonesia masuk ke dalam arus kehidupan sastra dunia pun tidak tersedia. Sampai sekarang penerjemahan sastra Indonesia ke dalam bahasa asing merupakan hasil usaha orang atau sarjana asing yang menaruh minat terhadap bahasa Indonesia. Boleh dikatakan hampir tak ada yang merupakan hasil usaha kita sendiri.

Kenyataan-kenyataan itu menunjukkan betapa sedikitnya perhatian kita sebagai bangsa dan negara--terhadap bahasa dan sastra kita sendiri. Bukan saja kita tidak pernah memberikan pengarahan dan bimbingan apresiasi sastra yang efektif melalui sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan yang lain-

lain agar bangsa kita mempunyai minat dan kecintaan kepada sastranya, tetapi kita pun telah membiarkan diri kita mengalami erosi secara kultural karena kita membiarkan diri kita terpisah dari arus kehidupan sastra di dunia yang kian menyatu ini. Kita selalu membangga-banggakan bahasa Indonesia, tetapi kita tidak mempunyai dan tidak merasa perlu menyusun suatu program usaha untuk memberikan isi kepada bahasa itu sendiri, baik dalam lapangan ilmu maupun dalam lapangan filsafat atau seni. Apa yang sekarang lahir dalam lapangan ilmu, seni dan filsafat dalam bahasa Indonesia lebih merupakan hasil kebetulan dari usaha-usaha perorangan atau kelompok daripada sebagai hasil usaha kita sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlulah sekarang kita menyusun sebuah program pengembangan kehidupan sastra kita secara lebih berencana, teratur, menyeluruh dan kontinyu. Program yang tujuannya adalah melakukan pembinaan apresiasi bangsa kita terhadap karya-karya hasil rohani bangsanya sendiri yang dilahirkan dalam bahasa nasional dan bahasa daerahnya dan yang sekaligus juga menceburkan kehidupan sastra kita dalam arus kehidupan sastra dunia, baik dengan jalan memberi kesempatan kepada para sastrawan dan peminat sastra kita membaca karya-karya sastra dunia yang representatif dalam bahasa aslinya maupun dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun dengan jalan menterjemahkan karya-karya sastra Indonesia sendiri ke dalam bahasa-bahasa asing.

Kalau kita tidak segera menyusun program semacam itu, maka kehidupan sastra Indonesia dari hari ke hari mengalami proses alienasi, baik dari kehidupan sastra dan budaya daerah (yang sangat kaya itu) maupun dari sastra dan budaya dunia. Proses alienasi itu harus dihindarkan, antara lain dengan :

- a. mengefektifkan pengajaran sastra di sekolah-sekolah;
- b. menyediakan perpustakaan yang lengkap dan memadai;
- c. menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah;
- d. menterjemahkan dan menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia;
- e. merangsang penelitian dan pendalaman karya-karya sastra daerah tersebut;
- f. menterjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia; atau daerah;
- g. menterjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra Indonesia dan daerah ke dalam bahasa-bahasa asing;
- h. menyusun suatu kebijaksanaan perbukuan secara nasional sehingga setiap warga negara dapat memperoleh kesempatan membaca buku dengan mudah dan murah.

- i. menggiatkan dan merangsang kreativitas para sastrawan kita dengan menyediakan sarana untuk itu, misalnya berupa majalah sastra, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa daerah.

Dengan kata lain, harus diusahakan agar bangsa kita--terutama para pengarang kreatif kita--mendapat kesempatan menimba sumber kekayaan rohaninya seluas mungkin, baik dari kekayaan sastra daerah, sastra nasional maupun dari kekayaan sastra dunia. Ketiga sumber itu haruslah dapat mereka peroleh dengan mudah dan murah. Terus terang saja bahwa sekarang tidaklah mudah; --jagankan pula murah--untuk memperoleh sumber-sumber itu. Maka dalam hal ini pemerintah--melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-- harus menembus kemacetan ini dan mengatasinya agar para sastrawan kita tidak digiring secara paksa untuk mengambil satu-satunya pilihan yang tersedia, yaitu membaca buku-buku bacaan murahan yang populer. Kalau mereka hanya mendapat kesempatan membaca buku-buku bacaan murahan yang populer semacam itu, maka yang dapat kita harapkan akan lahir dari mereka pun niscaya tidak lebih dari sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil. 1953. *Deru Campur Debu*. Jakarta : Pembangunan.
- Jassin, H.B. 1968. *Chairil Anwar Pelopor Angkatan '45*. Jakarta : Gunung Agung.
- Lerner, Max dan Edwin Mims, Jr. 1957. "Literature". Dalam Edwin, R.A. Seligmen. Editor. *Encyclopedia of the Social Sciences*. New York: The Macmillan Company.
- Mihardja, Achdiat K. 1960. *Atheis*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pei, Mario. 1960. *The Story of Language*. New York: The New American Library of World Literature, Inc. (Mentor book).
- Rosidi, Ajip. 1964. *Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir?* Jakarta: Bhratara.
- . 1976. *Surat Cinta Enday Rasidin*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- . 1977. "Sumpah Pemuda yang Berubah". Dalam *Kompas*, 22 November.
- . 1978. "Kedudukan Budaya dan Bahasa Daerah". Dalam *Kompas*, 16 Oktober.
- Sapir, Edwar. 1939. *Language*. New York: Harcourt, Brace and Company.
- . 1960. *Culture, Language and Personality*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
- Sastrowardojo, Subagio. 1974. "Orientasi Budaya Chairil Anwar". dalam *Budaya Jaya* tahun 1973 no. 59.
- Sontani, Utuy T. 1963. *Orang-orang Sial*. Bandung: Kiwari
- Teeuw. A. "Kawanku dan Aku" dalam naskah "Tergantung pada Kata", *in edita*.
- Toer, Pramoedy Ananta. 1961. *Keluarga Gerilya*. Jakarta, Bukittinggi : Nusanantara.
- Trisnojuwono. 1971. *Laki-laki dan Mesiu*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1949. *Theory of Literature*. New York: Harcourt, Brace and Company.

SINAR HARAPAN SEBAGAI KASUS PENGEMBANGAN SASTRA INDONESIA DAN MEDIA MASSA

Satyagraha Hoerip
Redaktur Seni-Budaya, *Sinar Harapan*

Pendahuluan

Suatu apology seketika perlu diajukan di sini, sebab terhadap judul asli "Pengembangan Sastra Indonesia dan Media Massa" yang diberikan Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia ke-3 sehubungan dengan tepat 50 tahun usia bahasa Indonesia kita, sengaja saya mengimbuhkan di depannya kata-kata *Sinar Harapan* sebagai kasus.

Setidaknya ada tiga hal yang mendasari apology ini :

Pertama, saya bukan seorang pengamat yang telaten dan teliti terhadap sekian banyak Ruang Sastra/Budaya (atau apa pun namanya) yang ada dalam serbaneka media massa yang berhamburan di tanah air kita sehingga tanpa penelitian yang lama selayaknyalah bila saya tak sanggup memasalahkannya, apalagi di forum yang semulia ini.

Kedua, lebih-lebih sebab "Pengembangan Sastra Indonesia dan Media Massa" ini, tatkala Seminar Pengembangan Sastra Indonesia di tahun 1975, pernah dibahas secara teoretis dan umumnya dari prasaran Alfons Tarjadi dari koran *Kompas*. Sehingga melakukan hal yang sama-sekali pun tentu ada saja perbedaan-perbedaan-- pada hakikatnya hanyalah menghamburkan tenaga dan pikiran. Oleh sebab itu, ketiga, ingin sekali saya mengajak para hadirin untuk sudi "turun ke bumi" dengan memakai *Sinar Harapan* (selanjutnya di singkat dengan SH) sebagai kasus, oleh sebab sejak awal penyelenggaraan

Ruang Seni dan Budaya di koran tersebut saya memang terlibat, --kecuali bila sedang tugas luar untuk waktu yang lebih dari sebulan. (Hanya perlu disebut di sini bahwa ketika menyusun kertas kerja ini saya tidak menyangding bundel SH 11 tahun sehingga saya pun tidaklah hafal kronologi pemuatan serta judul-judul tulisan maupun nama para penulis masalah sastra di dalamnya). Alasan *keempat* ialah jikalau topik sepenting "Pengembangan Sastra Indonesia dan Media Massa" ini benar hendak ditelaah secara serius--siapa tahu kelak bahkan merupakan bahan mengambil gelar doktor--maka setelah giliran saya ini di lain kesempatan sepatutnyalah diundangi pula para editor Seni dan Budaya (atau apapun namanya) dari media massa yang lain, guna memberikan *in-put* masing-masing. Ini karea saya yakin bahwa juga koran-koran, majalah-majalah dan radio-radio di Banjarmasin, Medan, Yogya, Ujungpandang, Padang, Denpasar, Surabaya dan masih banyak lagi lainnya, sungguh patut untuk ikut diteliti sumbangan mereka dalam soal pengembangan sastra itu.

Pada hemat saya, anggapan seolah koran-koran besar dari Jakarta saja yang dalam "gerakan" ini patut didengar, adalah tidak tepat. Akan tetapi, tentu saja ini bukan apologi lagi, melainkan sudah suatu usul kepada Panitia di masa-masa yang akan datang.

Kelahiran dan Pertumbuhannya

Ruang Seni dan Budaya dalam SH (yang di dalamnya memuat soal-soal sastra dan lain-lain) mula-mula muncul di tahun 1967, sekali dalam seminggu. Yang ditugasi mengasuhnya adalah Sdr. Gerson Poyk dan saya. Akan tetapi, tak lama sesudah itu Gerson Poyk mengundurkan diri dari SH sehingga sampai sekarang tinggal saya seoranglah yang mengasuhnya. *

Kehadiran ruang tersebut bukan saja karena kami berdua saat itu merasa perlu mengkomunikasikan pikiran maupun karya para sastrawan/budayawan kita, di satu pihak, melainkan juga karena di pihak lain, Pimpinan Redaksi SH meyakini bahwa korannya seharusnya tidak sekedar memberikan masalah-masalah politik, kriminalitas, ekonomi, pembangunan, pidato-pidato para pembesar di pusat maupun daerah, dan lain-lain, melainkan haruslah pula menyiarkan masalah-masalah seni-budaya, yang bukan sekedar berupa berita-berita singkat.

Pada tahun 1967 itu memang sudah ada beberapa sastrawan/budayawan kita yang rajin memuatkan tulisan mereka dalam SH, namun umumnya lebih

menyangkut masalah sosial politik ("Selamat Datang Orde Baru") daripada masalah seni, budaya dan kesusastraan itu sendiri. Bukan mustahil hal itu karena pada zaman Orde Lama masalah kebebasan berekspresi pada akhirnya memperoleh tekanan yang cukup berat dari para penguasa politik sehingga di masa awal Orde Baru para sastrawan/budayawan tersebut merasa perlu lebih dulu membersihkan arena bagi pertumbuhan seni-budaya yang kembali sehat daripada seketika itu pula mengkomunikasikan karya-karya kreatif. Di antara mereka yang memuatkan tulisan dalam SH dapat disebut Saudara-saudara Ajip Rosidi (yang saat-saat itu masih menetap di Bandung), Wiratmo Sukito, Taufiq Ismail, Arief Budiman, dan Ismet Rauf (yang kini sudah hilang). Akan tetapi, diluar hal-hal itu-terutama di antara para sastrawan kita-terasalah bahwa pikiran-pikiran soal seni dan sastra serta kebudayaan pada umumnya sudahlah saatnya untuk disebarakan ke masyarakat luas. Begitulah selain polemik-pertama-yang terjadi antara Poemawan Tjondronegoro lawan Bambang Soelarto (penulis drama "Domba-domba Revolusi" yang keras dihantam oleh Lekra dan kawan-kawannya itu) sekitar pengganyangan kaum sastrawan "kontrev" oleh barisan sastrawan "revolusioner", pernah pula dimuat dalam SH tanggapan keras Taufiq Ismail terhadap salah satu artikel Wiratmo Soekito.

Polemik yang di awal Orde Baru terjadi "antarkawan" itu semula kami harapkan sebagai awal tumbuhnya kembali semangat polemik di bidang kesenian, yang selain memberi arti bagi tumbuhnya kesenian juga bisa menjadi ukuran bagi sudah atau belum pulihnya demokrasi di Indonesia; apa boleh buat, harapan kami ternyata meleset. Karena sesudah dua polemik tersebut ternyata tak ada lagi yang menyusuli.

Baru lama kemudian, yakni di tahun 1974 terjadi polemik antara Ajip Rosidi lawan Drs. M.S. Hutagalung, sekitar sajak "Ular" ciptaan Ajip yang di anggapnya ditapsirkan semena-mena oleh Hutagalung. Sayang, polemik seru ini terpaksa tidak dapat berlanjut semau mereka, hanya karena "sifat" media massa untuk membatasi setiap perang pena yang terjadi di ruangnya, - meski betapa pun sebagian pembaca dan lebih-lebih pihak yang bersangkutan itu sendiri masih ingin membaca/melakukan kelanjutan polemik itu.

Jika polemik pertama, antara B. Soelarto dan Poemawan Tjondronegoro agaknya hanya mendapat perhatian kalangan sastrawan sendiri, maka polemik kedua antara Ajip Rosidi lawan "proklamator kritik-sastra aliran Rawamangun" itu mendapat perhatian yang lebih luas. Bukan saja terbukti dari adanya tempelan guntingan (*clipping*) di beberapa Fakultas Sastra di Jawa--yang kebetulan saya saksikan, bila sedang tugas ke luar Jakarta--melainkan pula da-

ri pengakuan seorang sopir taksi yang saya tumpangi suatu sore, setelah ia tahu bahwa sayalah penyetop polemik itu. (Sopir itu jebolan jurusan Ekonomi Universitas Andalas, dan menyatakan bahwa beberapa rekan sopirnya yang juga "drop-out" seperti dia, mengikuti pula polemik itu).

Suatu pertanyaan agaknya pantas diajukan di sini, atas kejadian itu adalah sebagai berikut. Sekiranya polemik kedua tokoh sastra itu dimuat bukan dalam suatu media massa yang umum seperti SH dan dimuat oleh sebuah majalah yang khusus katakanlah itu *horison* atau *Bassi* atau *Budaya Jaya*, mungkinkah ia mendapat perhatian sampai-sampai dari seorang sopir taksi?

Pertanyaan itu saya sendiri cenderung untuk menjawabnya dengan "tidak!" Oleh sebab itu, tadi saya sempat mengusulkan agar media massa lainnya yang jumlahnya cukup besar itu di Indonesia ikut pula diteliti apabila benar kita menganggap "Pengembangan Sastra Indonesia dan Media Massa" merupakan masalah yang penting diamati. Saya kira, pada bangsa Indonesia kecenderungan untuk mengikuti media massa yang umum jauh lebih besar daripada untuk mengikuti media massa yang khusus, baik itu mengenai sastra dan seni atau pun masalah-masalah lain; bukan hanya pada golongan awam, melainkan pula di kalangan intelektual sendiri.

Apabila hal ini dibenarkan (silahkan menyelidikinya,--SH) maka sepatutnya ah kita menyerukan kepada *semua media massa umum* di Indonesia agar mengusahakan pengadaan ruang "Sastra atau Seni Budaya" pada umumnya; tidak lain sebab kesusastraan dan kesenian adalah pula tiang-tiang pendukung bagi eksistensi kita sebagai bangsa. (Mohon ingat ucapan Doktor H.B. Jassin "Koran tanpa Ruang Kebudayaan, adalah koran barbar!"). Dan pengadaan rubrik serupa itu hendaklah bukan sekedar secara kuantitatif memuat karya-karya cipta, melainkan mengindahkannya pula segi kualitas dari yang dimuatinya itu. Kalau pun kemauan untuk ini ada, sebaliknya tidak ada tenaga redaksi yang sanggup menanganinya, maka--seperti yang dilakukan *Berita Buana*--dapat saja mengundang redaktur tamu dari kalangan sastrawan. (Berarti: tersediakannya lapangan kerja "sambilan" bagi para sastrawan kita, yang kebanyakan masih menganggur itu).

Syukurilah, selain SH sudah banyak media massa umum kita yang memiliki ruang serupa itu. Tinggallah meningkatkannya lagi kuantitas dan terutama kualitasnya.

Mutu dan Kesulitan-kesulitan

Menjaga—apalagi meningkatkan—kualitas bukan semudah menganjurkannya. Setiap editor tentu pernah mengalami paceklik yang paradoksal ini: menerima ber-*gebog-gebog* amplop berisi karangan dari sekian banyak penyumbang, tetapi pada anggapannya tidak satu jua yang pantas dimuat. Keadaan serupa itu mendorong dirinya buat menulis sendiri—perduli adakah otaknya sedang buntu atau tidak—yang ditambah oleh makin mendesaknya *deal-line* sehingga kualitas pun terdapaklah ke belakang. Akan tetapi, ini memang risiko.

Dalam pada itu, akibat paham bahwa memuat karya cipta dalam media massa umum biasanya lebih menguntungkan ditinjau dari beberapa aspek, dewasa ini gejalanya makin mengentara saja bahwa para sastrawan kita lebih suka mengirimkan karya terbarunya ke sana daripada ke media massa khusus. Selain (teorinya) lebih cepat di-*retour* jika ditolak, lebih cepat dimuat kalau memang disetujui, di samping imbalannya umumnya juga lebih tinggi dan lagi lingkup pembacanya juga lebih luas, maka dengan dimuat oleh media massa umum lebih mempopulerkan nama seseorang di masyarakat daripada jika dimuat oleh media massa khusus melulu.

Inilah sebab-sebabnya dalam banyak media massa umum (tentulah antara lain SH) sering kita menemukan tulisan-tulisan bermutu dari tokoh-tokoh sastra seperti almarhum Iwan Simatupang, Drs. M.S. Hutagalung, Darmanto Yatman, Umar Kayam, Achdiat Kartamihardja, Ajip Rosidi, Drs. Umar Junus, Bakdi Sumanto, Peter Hagul, Andre Hardjana, dan lain-lain maupun tokoh-tokoh yang lebih muda lagi seperti Ikranagara, Putu Wijaya, Emha Ainun Nadjib, Yudhistira Ardi Nugraha, Abdul Hadi dan -percayalah- masih segudang "jagoan" lainnya.

Tulisan mereka tidak terbatas pada yang berbentuk sajak terbaru dari Sutardji Cazoum Bachri, Abdul Hadi W.M., Yunus Mukri Adi, Adri Darmadji Woko, Emha Ainun Nadjib dan lainnya ataupun sorotan-buku oleh Umar Junus, Drs. Dami N. Toda dan masih banyak lagi lainnya, melainkan sering pula berwujud esei, wawancara-wawancara dan bahkan cerpen oleh tunas-tunas muda maupun cerita bersambung (aslinya novel) oleh bakat baru yang sama sekali belum dikenal, Umar Nur Zein. Bahkan, jika esei yang pernah dimuat SH itu bukanlah yang sekitar sastra saja dan diluaskan kepada seni atau persoalan-persoalan kebudayaan umum, maka dalam "daftar honorarium pengarang" Sekretariat Redaksi akan kita temuilah nama-nama seperti Dr. Soedjatmoko, Umar Kayam, Taufik Abdulah,

Goenawan Mohammad, Wiratno Soekito, Sardono Waluyokusumo, Drs. Soedarsono, Dra. Edi Sedyawati, pelukis Nashar, Drs. Popo Iskandar, Drs. Soedarmadji dan kritikus senirupa lainnya, yakni Dan Suwarjono (sebelum menetap di *Berita Yudha*), Wahyu Sihombing, Drs. Salim Said, Pramana Padmodarmaja, Dr. Soedjoko, Rustandi Kartakusumah, dan betul-betul masih segudang lagi yang lain.

Timbangan buku yang selain merupakan promosi bagi para penerbit ada kalanya juga sebagai "cubitan--dan--pujian" untuk para pengarang itu, sudah tiga tahunan ini secara tetap dan dalam ruang khusus dimuat oleh SH, bahkan tidak jarang dalam ruang Seni-Budaya (yang sejak 1975 menjadi 2 kali dalam seminggu: Rabu dan Sabtu) mengingat panjang dan "cukup mendalamnya"--nya. Misalnya terhadap *Bawuk dan Sri Sumarah* oleh Umar Kayam, *Upacara* oleh Korrie Layun Rampan, lalu *Kemelut Hidup* punya Ramadhan K.H., dan sebagainya; bahkan--dalam semangat ber-ASEAN-ASEAN sekarang ini--beberapa novel Malaysia yang dilakukan oleh Drs. Umar Junus. Begitu pula terhadap buku-buku kumpulan puisi, misal *Sajak-sajak Sebelum Tidur*nya Budiman S. Hartojo oleh Sutardji Calzoum Bachri dan *Dukamu Abadi* oleh Sapardi Djoko Damono dari tangan Emha Ainun Nadjib.

Dua yang disebut belakangan itu agaknya patut kita catat di sini. Bahwa penyair terpaksa (?) menyoroti karya sesama rekannya tidak lain sebab pada hemat mereka "para kritisi sastra" sudah pada enggan turun gelanggang dewasa ini, akibat tergiur oleh kesibukan-kesibukan lain yang lebih mendatangkan banyak uang sehingga (mengutip Soetardji) "Para kritisi sastra Indonesia selalu jauh tertinggal ketimbang lahirnya ciptaan-ciptaan mutakhir" dengan akibat "Sastra kita, terlebih puisi, ibarat anak yatim" karena tidak punya lagi kritikus.

Situasi langka kegiatan--dan--kecintaan para sarjana sastra kita, yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah itu, buat mengkomunikasikan pengamatan mereka terhadap karya-karya sastra yang mutakhir, bukan semata-mata dirasakan oleh pengasuh Seni dan Budaya SH, melainkan telah merupakan keprihatinan nasional tersendiri.

Demikianlah, jika masalah "Pengembangan Sastra Indonesia" ini benar hendak diteliti secara luas, patutlah kiranya (kelak?) ditelaah pula dengan sesama "pengembangan sastra Indonesia dan krisis dedikasi di bidang kritik sastra dari mereka yang bergelar Sarjana Sastra Indonesia". Calon topik itu sekali-kali bukan dalam rangka menelanjangi suatu golongan terpelajar kita, tetapi semata-mata guna mencari jalan keluar dan andaikata tidak ada lagi maka dari mana bakal dicari pengganti? Dengan loka-loka karya ber-

kalahkah? Atau lomba tahunan menulis kritik sastra dengan hadiah-hadiah menarik,--seperti di Malaysia? Atau--bila perlu--pengiriman ke jurusan kritik sastra di sesuatu universitas luar negeri buat studi-studi *non-degree*?

Pikiran di atas lahir karena sekiranya orang percaya bahwa sastra adalah pula salah satu tiang pendukung eksistensi kita sebagai bangsa, maka kritik sastra tentulah salah satu paku penguat tegaknya tiang tersebut. Sehingga adanya paku-paku penguat jelaslah bersifat imperatif. Dalam pada itu, kita pun tahu bahwa kritikus sastra tak usah selalu sarjana sastra; asalkan orang itu cukup pengetahuan, punya bakat dan yang terpenting kecintaan-remaja dalam mengamati sastra dari saat ke saat, jadilah. Akan tetapi, mengapa tadi sarjana sastra Indonesia saya usiki? Tidak lain sebab saya percaya bahwa--ketimbang kelompok lainnya dalam "masyarakat sastra"--mereka lebih dibekali pengetahuan apresiatif dan terdidik buat berpikir kritis-analitis. Saya juga masih percaya bahwa para sarjana sastra Indonesia itu sebetulnya ingin menulis kritik sastra sebanyak mungkin atas karya-karya sastra yang terbit, hanya "waktu"--lah yang tidak mereka miliki. Akibatnya, kritis sastra bukan monopoli SH saja, tetapi sudah suatu keprihatinan nasional sendiri!

Beberapa Kesimpulan

Setelah cukup lelah mengikuti metode pemain bola sodok ini, akhirnya tibalah kita pada beberapa kesimpulan umum sebagai berikut.

Sinar Harapan, sebagaimana media massa umum yang lain, nyata mempunyai sumbangan dalam pengembangan sastra Indonesia, lewat ruangan yang khusus disediakan untuk itu dan secara berkala pula.

Media massa umum yang belum memiliki ruang khusus serupa itu selayaknya bila menyusul mengadakannya. Apabila tenaga redaksi dianggap tidak ada yang sanggup menanganinya, baiklah diundang redaktur tamu. Hal ini tidak ain karena sekiranya disetujui pendapat bahwa sastra adalah salah satu tiang pendukung eksistensi kita sebagai bangsa, maka pengembangan sastra patutlah mendapat tempat yang sejajar dengan bidang-bidang kehidupan nasional yang lain.

Baik bagi yang sudah maupun yang belum menyediakan ruang khusus serupa itu, selain memperhatikan masalah kuantitas, seyogyanyalah menjaga dan meningkatkan kualitas sajian; hal itu bukan hanya demi kepentingan

apresiasi sastra masyarakat, melainkan juga demi para sastrawan itu sendiri.

Peranan dan sumbangan media massa umum dalam gerakan pengembangan sastra Indonesia tampak semakin dipercayai oleh para sastrawan kita sendiri daripada media massa yang khusus sastra misalnya, *Horison*, karena beberapa pertimbangan praktis-dan-nyata.

Andaikata Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sampai berniat membantu secara nyata berkembang sastra Indonesia selayaknyalah kenyataan ini diperhatikan dengan jalan menambahi kemampuan pengembangan media massa umum. Misalnya saja pemberian (tambahan?) honorarium pengarang yang dititipkan lewat media massa yang memuat tulisan-tulisan kreatif dan bermutu. Atau menyewa tempat agar khusus digunakan dan diisi bagi pengembangan sastra Indonesia ini, baik dengan orang bayarannya ataupun dengan asuhan dari kalangan redaksi media massa umum itu sendiri.

Beberapa tahun belakangan ini, gejala krisis kritik sastra semakin mengentara saja. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan jalan keluar yang benar-benar dapat ditempuh. Media massa umum, selain dianjurkan memuat karya-karya sastra, hendaknya dianjurkan pula menumbuhkan kritikus sastra, di antara mereka yang tampak berbakat.

Kaderisasi kritikus sastra di luar para sarjana sastra Indonesia seharusnya dijadikan acara loka karya berkala, yang jika dianggap perlu dapatlah digalang bersama dengan kalangan media massa.

Itu semua tidak lain karena apabila betul kita beranggapan bahwa sastra adalah salah satu tiang pendukung bagi eksistensi kita sebagai bangsa, maka kritik sastra dapatlah dianggap sebagai salah satu paku penguat bagi kukuhnya tiang itu.

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA DALAM LAGU-LAGU INDONESIA MODERN

Pranadjaja

Yayasan Bina Vokalia Jakarta

Pendahuluan

Suatu konsensus perlu terlebih dahulu diadakan untuk pembatasan pengertian bahwa yang dimaksud dengan "lagu Indonesia modern" tidak ada hubungannya dengan "musik modern" sebagai suatu aliran musik kontemporer yang mendobrak aliran "romantisisme" dengan segala cabang-cabangnya (impressionisme, nasionalisme, dan lain-lain). "Lagu Indonesia modern" dimaksudkan untuk menggolongkan lagu-lagu Indonesia baru yang musiknya merupakan hasil persentuhan dengan musik Eropa serta menggunakan bahasa Indonesia sebagai kata-kata atau teks lagunya. Dengan demikian, sebutan "lagu Indonesia modern" dipergunakan di sini untuk membedakannya dari musik daerah atau musik pribumi (*native music* atau *folk music*) atau musik tradisional yang menggunakan bahasa daerah masing-masing, meskipun diakui seringkali melodinya sudah banyak menerima pengaruh dari luar.

Bahasa Indonesia, sebagaimana diikrarkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan bahasa kesatuan yang hingga saat ini masih terus berkembang dalam usaha penyempurnaan dirinya menjadi bahasa yang benar-benar sepenuhnya dapat melayani kebutuhan pemakaian dalam segala bidang. Istilah-istilah baru terus lahir dan seringkali merupakan adaptasi atas bahasa-bahasa daerah maupun bahasa asing.

Dibandingkan dengan perkembangan yang begitu pesat dari bahasa Indonesia, musik Indonesia modern jauh tertinggal karena cukup banyak alasan. Terutama sekali karena terlalu amat terbatasnya para pemusik Indonesia

modern yang benar-benar tahu-menahu soal komposisi musik. Perlu dicatat bahwa hingga dewasa ini pada umumnya para komponis Indonesia adalah justru *penulis-penulis nyanyian (song writers)*; terlalu sedikit yang menulis untuk instrumen dan celakanya, justru dalam penulisan nyanyian inilah orang menghadapi tantangan dari dua jurusan sekaligus: jurusan melodi dan jurusan bahasa.

Dari lagu-lagu Indonesia modern yang telah ditulis orang hingga sekarang boleh dikatakan bahwa bahasa Indonesia belum sewajarnya tercermin. Setiap komponis Indonesia yang berpendidikan komposisi (yang jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari) amatlah menghimbaukan suatu zaman yang didalamnya bahasa Indonesia mendapat tempat yang terhormat dalam musik Indonesia, suatu tingkat keadaan yang nantinya justru akan mengangkat musik itu sendiri. Sudah barang tentu dengan diberinya kesempatan dalam Kongres Bahasa Indonesia ini untuk membicarakan masalah tersebut amatlah menggembirakan hati para komponis yang berdedikasi untuk mengabdikan kepada bangsa dengan cara belajar terus tentang bahasa yang dipakai dalam komposisinya, dan mereka kiranya boleh berharap akan mendapatkan "hembusan angin segar" dari ruangan kongres ini, sesuatu yang akan membantu memudahkan pekerjaannya.

Lagu-lagu Indonesia Modern pada Permulaan

Tidak ada yang dapat memastikan kapan mulainya terdengar lagu-lagu bertangga-nada diatonik yang menggunakan bahasa Melayu sebagai induk asal bahasa Indonesia masa kini. Secara hipotesis orang boleh menganggap lagu-lagu keroncong dan stambul yang merupakan permulaan: keroncong dari segi bentuk dan cara, stambul dari segi bentuk. Sisa-sisa lagu yang masih terdengar dari perbendaharaan zaman itu adalah yang paling menyolok ini :

7	1	/	2	2	2	2	2	/	5	.	.	.	1)
Ji-wa	ma-nis		in-dung	di	sa-	yang							

Susunan kalimat seperti di atas ini pastilah tidak akan dimengerti lagi oleh anak-anak masa kini yang berpikir secara Indonesia masa kini.

Juga amat sering kita jumpai kata-kata yang dibubuhi akhiran lah dengan maksud untuk memenuhi jumlah suku kata sesuai dengan jumlah not sehingga lagu menjadi silabis, tidak melismatis.

Munculnya wartawan pemusik muda W.R. Supratman di tengah-tengah kehidupan "musik Indonesia modern" yang sama sekali tidak modern itu merupakan gejala yang menarik. Kontaknya dengan orang-orang pergerakan politik telah berhasil merangsang hatinya untuk menuangkan kesadaran patriotiknya ke dalam lagu-lagu gubahannya.

Puncak daya kreasinya adalah lagu kebangsaan kita "Indonesia Raya" YA yang untuk pertama kalinya diperdengarkan tepat 50 tahun yang lalu dihadapan Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928.

Walaupun nafas seluruh Kongres ketika itu dihangati oleh rasa kesatuan-bangsa yang dituangkan ke dalam pemakaian bahasa Indonesia, namun lagu Indonesia Raya ketika itu masih dikarang-karang menurut cara berpikir yang kebelanda-belandaan:

1 . 1 / 4 6 . 6 6 6 . 6 / 5 3 . 3 3 2)
In - do-nees, In - do-nees, mu - li - a, mu - li - a

Tentang belum adanya persiapan yang cukup matang dari W.R. Supratman dalam hal pemakaian bahasa Indonesia dalam lagu-lagu modern tampak dari melodisasinya yang beraneka tekanan atas perkataan "Indonesia" seperti di bawah ini :

4 6 5 4 / 3 . 1 . 3)
Pu-tri In-do - ne - sia

3 . 4 / 5 3 4)
In - do - ne-sia

3 5 2 3 / 1 . . 6 5)
In- do- ne- si- a

Sesudah Lagu "Indonesia Raya"

Di zaman pendudukan tentara Jepang, muncul seorang tokoh musik yang menulis lagu-lagu Indonesia modern tentang tanah-air dan perjuangan bangsa: Ismail Marzuki. Berbeda dengan Supratman yang dari lagu-lagunya kita jumpai kobaran api juang yang meluap-luap, maka pada pemuda Ismail yang rendah hati, ber-sepi-ing-pamrih dan (sayang!) sakit-sakitan, kita kenali lagu-lagunya yang melankolik. Namun, seperti halnya Supratman, Ismail pun

tidak mempersiapkan diri dan tampaknya belum punya niat untuk melakukan pengadaan baru :

3 5 / 4 . 5 7 . / 7 0 4 5 / 3 . 5 1 . / 1 0
 Me-lam-bai lam-bai nyi-ur di pan-tai

3 5 / 4 . 5 2 . / 2 0 2 2 . 1 / 3 . . . /
 Ber-bi-sik bi-sik Ra-ja k'la - na

/ 3 0 6)

Kalimat : *melambai-lambai nyiur di pantai* amatlah mudah dimengerti oleh setiap orang. Demikian pula : *berbisik-bisik raja kelana*. Akan tetapi, siapa yang tahu hubungannya antara raja kelana yang berbisik-bisik dengan nyiur di pantai yang melambai-lambai?

Udara baru dalam dunia penggubahan musik Indonesia modern, baru terasa ketika seorang Cornel Simandjuntak muncul dengan persiapan diri yang cukup. Langkahnya segera diikuti oleh para komponis lainnya: Amir Pasaribu, B. Sitompoel dan juga musikolog L. Manik yang ketika itu juga menulis lagu. Persiapan yang cukup dari Cornel ini bisa kita rasakan sudah sejak lagu-lagunya yang pertama :

5 . 5 1 2 / 3 . 1 . 7)
 A - sia su- dah ba- ngun

dan semakin matang dalam lagu-lagu yang kemudian menyusul :

3 . 4 / 5 5 1 2 / 3 . 1 7 . 1 / 2 4 3 2 / 1 . 0 8)
 So - rak so-rak bergembi - ra, bergem-bi-ra se-mu-- a

0 0 3 / 5 . . 5 . . / 3 . . 3 . . / 3 0 0 3 3 3 /
 o, a -- ngin ba-wa-ke-

$$\begin{array}{c} / \overline{5 \dots} \overline{5 \dots} / 3 \dots \\ \text{luh ----- ku} \end{array} \quad 9)$$

Lalu terdengarlah karya-karya lain dari para penggubah lain :

$$3 / 1 \overline{. 2} 3 4 / 5 \overline{. 6} 5 \quad 10)$$

An- di ka Bha-yang ka- ri

$$5 / 3 \overline{. 5} / 4 3 2 / 1 \dots / 5 \dots \quad 11)$$

De- sa ku yang ku-cin - ta

$$5 \overline{. 5} \overline{6 5} 3 / 1 \overline{. 1} \overline{2 1} 6 / \quad 12)$$

Sa- tu Nu- sa, sa- tu bang- sa,

$$\overline{5 \dots} \overline{3 \dots} / \overline{6 \dots} \overline{5 \dots} / \overline{3 \dots} / \overline{2 1} \dots \quad 13)$$

Tri- ma sa- lam - ku, o, tu-an

$$\overline{5 / 5} \overline{. 5} \overline{6 7} \overline{1 2} / \overline{3 \dots} \overline{2 1} \quad 14)$$

Bhinne- ka Tung- gal I ka

Tidak seperti para penggubah lagu sebelumnya, Cornel menunjukkan kekuatan patriotiknya justru *bukan* karena teks dan watak lagu-lagu perjuangannya yang berapi-api, melainkan karena *arti sejarahnya dalam garis perjalanan pengubahan musik Indonesia modern*, khususnya justru dalam *pemakaian bahasa Indonesia dalam lagu-lagu Indonesia modern*. Untuk mengerti dan memahami arti sejarah peranan Cornel itulah kiranya kami boleh menurunkan keterangan di bawah ini.

Aksen dalam Kerangka Musik

Kerangka musik disebut orang untuk menjelaskan makna dan fungsi birama atau matra (metrum). Alunan irama seluruh lagu ditentukan oleh ja-

Kami main musik (Kenapa *main* dan tidak *bermain* atau *memainkan* – Pen.)

Nyanyian mereka menarik.

(Perhatikan: semua tekanan jatuh pada suku kata terakhir. Pen.)

Sementara itu, Bapak Yus Badudu dalam siaran televisi ruang Pembinaan Bahasa Indoensia menjelaskan bahwa perkataan yang terdiri dari dua suku kata mendapatkan tekanan pada suku kata pertama, kecuali apabila yang pertama itu bervokal e (lemah). Jadi, menurut Pak Yus, kalimat di atas itu seharusnya berbunyi :

Kami main musik (tanpa memperdebatkan kata 'main').

Hal itu berarti 180 derajat bertolak belakang dengan buku pelajaran untuk para calon guru di atas. Rupa-rupanya inilah yang dimaksudkan dengan kalimat *Belum ada kesatuan pendapat* itu ! Akan tetapi, apakah dengan demikian maka bahasa Indonesia kita ini lalu tanpa bentuk alias *vormloos* sehingga bisa ditekek-tekek menurut sekehendak kita? Dengan demikian, kita boleh memasukkannya menurut "selera" kita masing-masing? Alangkah irinya kita bila kita mau sejenak menrenungkan dua lagi berbahasa Jerman yang menggunakan sajak yang sama ini :

6/8 $\overline{3} \ . \ \overline{3} \ \overline{5} \ . \ \overline{4} \ \overline{3} \ / \ \overline{2} \ . \ \overline{2} \ \overline{2} \ . \ / \ \overline{3} \ . \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{6} \ / \ \overline{6} \ . \ .$
Sah ein Knab'ein Ros-lein stehn, Roslein auf der Hei-
5 . . 15)
den

2/4 $\overline{3} \ \overline{3} \ / \ \overline{3} \ \overline{3} \ / \ \overline{5} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{3} \ / \ \overline{2} \ . \ / \ \overline{2} \ \overline{2} \ / \ \overline{3} \ \overline{4} \ / \ \overline{5} \ . \ /$
Sah ein Knab'ein Ros-lein stehn, Roslein auf der Hei-
1 0 16)
den

Dua buah lagu yang sangat berlainan wataknya, yang pertama merdu berayun, yang kedua lincah gembira, ditulis atas sajak yang sama dan tetap jatuh pada tekanan yang sama, sedangkan di halaman 34 sudah kita saksikan Supratman menuliskan kata-kata Indonesia di satu pihak Indonesia di lain pi-

hak Indonesia. Tidak heran kalau ada lagu iklan Taman Mini yang menyanyikan :

$\bar{1} \dot{2} / \dot{3} \dot{3} \dot{3} . \bar{1} / \dot{4} \dot{2} \dot{1} \dot{7} / \dot{1} . 0$ 17)
 ke Ta-man Mi-ni In- do- ne-sia in- dah

Dan tidak heran pula Mohd. Syafei menuliskan :

$/ \dot{1} . \bar{7} \dot{1} \dot{2} \bar{1} / \dot{3} . . \dot{1} / \dot{2} . \bar{1} \bar{7} \bar{1} \bar{6} \bar{7} / \dot{5}$ 18)
In- do-ne si - a, In- do- ne - si - a

Menurut hemat kami pada umumnya kata-kata dalam bahasa Indonesia, sebelum mendapat awalan dan akhiran, terdiri dari 2 dan 3 suku kata dan karenanya tentu terdapat 5 macam kaki matra dalam pengaturan tekanan :

1. Yambe : $\cup -$ (sedih, penuh, mesra, bebas)
2. Trokheus : $- \cup$ (kami, takut, sulit, mabok)
3. Anapest : $\cup \cup -$ (cemei, keledai, sedekah, rejeki)
4. Daktilus : $- \cup \cup$ (kurnia, marilah)
5. Amphibrakhis : (sempurna, saudara, belajar, adapun) 19)

Namun, dalam pengamatan kita, semua jenis kaki matra itu dalam bahasa Indonesia dikalahkan oleh suatu keumuman atau kesamaan apabila mendapatkan awalan dan akhiran, yaitu : *aksen jatuh pada suku kedua dari belakang*, sehingga semua perkataan akan mengalami perubahan aksentuasi yang pertama (Yambe) :

takut	menjadi	ketakutan	(berubah)
sulit	„	kesulitan	(berubah)
sempurna	„	kesempurnaan	(berubah)
saudara	„	persaudaraan	(berubah)
sedih	„	kesedihan	(tidak berubah)
mesra	„	kemesraan	(tidak berubah)

Sudah barangtentu --seperti halnya dalam semua bahasa-- ketentuan di atas itu harus dimengerti sebagai suatu keumuman biasa, artinya masih bisa terjadi perkecualian. Barangkali orang masih boleh memilih antara:

kerajaan / dan kerajaan
keberhasilan / dan keberhasilan,

tetapi yang jelas orang tidak akan mengucapkan *kerajaan* dan *keberhasilan!*

Sementara itu, masih perlu dipertimbangkan tentang aksentasi dalam kata-kata yang berasal dari bahasa asing sehingga akan merupakan perkecualian.

Arab	Menurut	"aturan" aksentasi bahasa Indonesia seharusnya :
Imán	—	Iman
Firman	—	Firman
Syukúr	—	Syukur

Belanda	Jerman	Inggris	Indonesia
Republiek / democratie	die Republik / die Demokratie	Republic democracy	? ?
muziek	die Musik	music	?
melodie	die Melodie	melody	?

Aksentasi sebagai Faktor Terpenting dalam Hubungan antara Teks dan Melodi

Semua ahli musik dari segala zaman sependapat bahwa dalam musik nyanyian (*vocal music*), nada-nada itu tidak lebih daripada hanya sekedar wahana untuk menyampaikan kata-kata. Jadi, dengan kalimat lain: *musik mengabdikan kepada kata-kata*. Atau, dengan kata-kata Cornel: *syair dulu, baru lagu!* Tidakkah ini bertentangan dengan para penggubah lagu-lagu Indonesia modern sebelumnya yang mendapat ilham melodi dulu, lalu mereka-reka kata-kata untuk melodi itu? Namun, ini bukan yang paling utama dan tidak boleh dianggap mengikat. Bisa saja melodi dulu asalkan kata-kata yang menyusul kemudian memang serasi. Soal keserasian ini tidak hanya asal keseluruhannya saja, yaitu kata-kata gembira untuk nada-nada gembira, kata-kata khusyuk untuk nada-nada khusyuk, kata-kata sedih untuk nada-nada sedih, tetapi lebih lagi dari itu adalah hubungan yang tepat antara aksentasi kata-kata dengan aksentasi musik atau sebaliknya. Sebagai misal, kita boleh membandingkan dua cara memelodikan kata-kata dalam kalimat di bawah ini.

2	2	2	3	/	1	1	1	1	2	/	6	6	
'Ku	ber	- a	-da		ja-	uh	da-	ri	a-	lam	<u>de-</u>	sa	
2	2	2	2	3	/	1	1	1	1	1	2	/	6
'Ku	ber-	a-	da	ja-	uh	da-	ri	a-	lam	de-	sa		

Daya serap intelektual kita sudah pasti lebih merasa nikmat dengan melodi yang pertama, sedangkan melodi kedua akan membuat pikiran kita terganggu. Akan tetapi, masalah aksent bukan hanya dalam soal matra belaka. Aksent suku kata dari kata tertentu dalam deretan kata-kata atau dalam kalimat juga menimbulkan kesan atau bahkan pengertian lain dan demikian pula perbedaan melodisasi dan/atau pembagian garis birama dalam lagu bisa mengakibatkan perbedaan serius :

3	2	3	/	6	5	.	3	2	1	/	3	2
An-jing	pa-	<u>man-</u>	mu		yang	hi-	tam	<u>i-</u>	tu			
/	1	5	5	5	5	5	1	2	/	3	1	
<u>An-jing</u>	pa	<u>man-</u>	mu	yang	hi-	tam	<u>i-</u>	tu				

Penutup

Dengan memohon maaf sebesar-besarnya kepada Sidang Kongres karena untuk sekian menit lamanya kami paksa untuk mendengar "kuliah tentang komposisi musik", kami merasa lega sudah berhasil menguraikan *uneg-uneg* dari para "idealis" dalam bidang penggubahan lagu-lagu Indonesia modern. Menyadari bahwa yang kami hadapi ini bukan sidang para musisi, melainkan para pemikir bahasa Indonesia, maka untuk kedua kalinya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Sidang Kongres bahwa dalam kertas kerja ini kami hampir sama sekali tidak menjawab dan membahas masalah yang diajukan oleh Panitia kepada kami yang berbunyi sebagai berikut.

1. Adakah perbedaan ragam bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam syair yang berlainan sifatnya seperti lagu pop, seriosa dan keroncong?

2. Adakah faktor yang menguntungkan atau menyulitkan dalam pemakaian bahasa Indonesia untuk syair-syair lagu-lagu Indonesia modern, dilihat dari segi kebahasaan (struktur kalimat, struktur tata-bunyi)?

Menurut hemat kami, masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Sudahkah bahasa Indonesia menawarkan syarat-syarat yang diperlukan untuk pengubahan lagu-lagu Indonesia modern?
2. Seberapa jauh lagu-lagu Indonesia modern sanggup mengemban tugasnya untuk menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terhormat?

Kedua pertanyaan ini sudah terjawab di atas. Penegasan atas penyimpulan ini tinggallah: Mungkinkah penentuan aksien (tekanan) suku kata dalam bahasa Indonesia dibicarakan, diselesaikan dan disahkan dalam Kongres ini sehingga sudah akan segera disebarluaskan lewat berbagai media dan dicantumkan dalam kamus-kamus? Sebab hanya tinggal dalam hal ini sajalah masalah pokok dalam hubungan antara pengubahan lagu-lagu Indonesia modern dan bahasa Indonesia (modern) akan (terbantu) terselesaikan. Semoga berakhirlah suatu zaman dimana para pengubah lagu-lagu Indonesia modern menggarap dan memperlakukan bahasa Indonesia seperti menekuk-nekuk lilin lembek sekehendak hati.

Catatan

- 1) dari lagu Keroncong Kemayoran – Anonim
- 2) "Indonesia Raya" menurut naskah aslinya :
 Catatan : Pada tahun 1946 dibentuk Panitia Negara untuk menyesuaikan teks lagu "Indonesia Raya" dengan perkembangan bahasa Indonesia. Panitia yang diketuai oleh almarhum Presiden Soekarno dan beranggotakan Mr. Muhammad Yamin dan Ki Hadjar Dewantara itu menghasilkan teks lagu "Indonesia Raya" yang dipakai hingga sekarang.
- 3) dari lagu "Ibu Kita Kartini" – W.R. Supratman
- 4) dari lagu "Indonesia Raya" – W.R. Supratman

- 5) dari lagu "Di Timur Matahari Mulai Bercahaya" – W.R. Supratman
- 6) dari lagu "Rayuan Pulau Kelapa" – Ismail Marzuki
- 7) dari "Mars Pembela Tanah Air" – Cornel Simandjuntak
- 8) dari lagu "Sorak-sorak Bergembira" – Cornel Simandjuntak
- 9) dari lagu "O, Angin" – Cornel Simandjuntak/sajak Sanusi Pane
- 10) dari lagu "Andika Bhayangkari" – A. Pasaribu
- 11) dari lagu "Desaku" – L. Manik
- 12) dari lagu "Satu Nusa, Bangsa, dan Bahasa" – L. Manik
- 13) dari lagu "Terima Salamku" – B. Sitompoel/Syair Sanusi Pane
- 14) dari lagu "Bhineka Tunggal Ika" – B. Sitompoel/Syair Amrin Thaib
- 15) permulaan lagu "Heiden Roslein" – Heinrich Werner
- 16) permulaan lagu "Deiden Roslein" – Franz Schubert
- 17) akhir lagu "Taman Mini Indonesia Indah"
- 18) permulaan lagu "Indonesia Subur" – Mohd. Syafei
- 19) menurut teori matra Yunani

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, Yus 1978. "Tekanan dalam Bahasa Indonesia". Jakarta. Siaran Te-
Republik Indonesia, rubrik Pembinaan Bahasa Indonesia.
- Dunga, J.A. bersama Manik L. 1952. *Musik di Indonesia dan Beberapa Persoalan-nya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmud, A.T. 1974. *Musik, Jilid I, untuk SPG Kelas I, II, III*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pohan Shn, E.L. 1975. *Menyusun dan Menterjemahkan Kata-kata Nyanyian Rohani/Gerejani*. Jakarta: Yayasan Musik Gerejani (Yamuger).
- Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1975. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta : Departemen Pendidikan di Kebudayaan.
- Waesberghe S.J. F.H. Smits van 1977. *Arsis dan Thesis suatu Penyelidikan tentang Intisari Kedua Unsur Utama di Bidang Musik Non Tradisional*. Yogyakarta: Akademi Musik Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Waesberghe S.J. F.H. Snits van. 1976. *Kursus Sejarah Musik*. Kumpulan diktat. Yogyakarta: Akademi Musik Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAHASA INDONESIA DALAM FILM DAN TEATER MODERN

Asrul Sani

Dewan Kesenian Jakarta

Pengantar

Barangkali tidaklah terlalu dibuat-buat kalau kita mengatakan bahwa film dan teater adalah alat yang baik sekali bagi penyebaran bahasa Indonesia. Sekarang ini kita rata-rata membuat 100 film setahun; di Indonesia terdapat lebih kurang delapan ratus buah bioskop; perhatian pihak orang banyak terhadap film-film berbahasa Indonesia ini cukup baik sehingga jika kita berhitung secara kasar, maka setiap hari lebih hampir setengah juta rakyat Indonesia mendapat kesempatan berada dalam lingkungan bahasa dan pengucapan Indonesia.

Akhir-akhir ini, kelompok-kelompok teater tumbuh di mana-mana. Di Jakarta saja terdapat lebih kurang seratus tiga puluh kelompok teater yang mengadakan pertunjukkan yang agak teratur, sedangkan perhatian kepada teater modern dewasa ini -- terlebih-lebih di kalangan para remaja -- boleh dikatakan sangat menggembarakan sehingga secara keseluruhan sumbangan teater modern untuk penyebaran bahasa Indonesia tidaklah boleh kita kecilkan. Jadi, sudah pantas sekali kalau dalam kesempatan seperti sekarang ini kita menunjukkan perhatian pada penggunaan bahasa Indonesia melalui kedua medium itu. Dalam hubungan ini kita merenung dan merasa risau: kalau medium yang begini efektif mencapai orang banyak, apakah tidak akan merugikan jika ia menyebarkan bahasa Indonesia yang tidak baik? Apakah ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk menghalangi ini? Ini suatu pertanyaan? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini dengan jawaban *ya* atau *tidak*, perlu sekali terlebih dahulu kita mengaji sifat penggunaan bahasa dan praktek bahasa dalam film dan teater modern. Inilah yang ingin saya bahas dalam kertas kerja ini. Saya lebih cenderung memaparkan peng-

gunaan bahasa dalam film dan teater sebagai laporan pandangan mata dari pada menyajikannya sedemikian rupa hingga ia memperoleh bentuk sebuah rumusan masalah.

Fungsi Bahasa dalam Film dan Teater Modern

Fungsi bahasa yang kita temui dalam bentuk dialog secara sepintas adalah sama dalam teater dan film. Akan tetapi, sebenarnya tidak. Secara teknis sebuah drama dapat kita rumuskan sebagai sebuah bentuk cerita yang ditulis dan kemudian dipertunjukkan dalam percakapan-percakapan yang diarahkan. Dalam film ia juga mempunyai fungsi dramatis, tetapi kedudukannya jauh lebih rendah daripada dalam teater. Sebuah pertunjukkan drama tidak dapat dibayangkan tanpa adanya dialog-dialog yang menjadi inti dari drama itu. Akan tetapi, sampai saat ini cukup banyak film yang dibuat tanpa penggunaan dialog. Malahan, sebelum film bicara sudah cukup banyak film-film bisu yang mengungkapkan berbagai persoalan dengan cara efektif sekali tanpa mempergunakan medium bahasa sebagai andalan. Selain itu, kalau kita baca sebuah naskah drama dan kita bandingkan dengan sebuah naskah film, naskah drama yang hanya berisikan dialog-dialog sudah dapat memberikan jalan cerita yang hendak disampaikan sampai keperincian terkecil, sedangkan dialog-dialog yang dapat dibaca dalam sebuah naskah film belum lagi memberikan gambaran lengkap dari cerita film itu sehingga biarpun dalam drama terdapat hubungan yang erat antara ucapan dan perbuatan, seluruh perbuatan sangat bergantung kepada dialog-dialog yang ada. Dalam film, dialog dapat merupakan sekedar pelengkap dari perbuatan, atau jauh lebih kurang lagi ia dapat sekedar merupakan efek suara, sama dengan bunyi kereta api, lenguh sapi, ngeong kucing, dan sebagainya sehingga cara penulisan dialog dalam drama juga berbeda sekali dengan cara penulisan dialog dalam sebuah skenario film biarpun keduanya ditulis untuk diucapkan. Sebagai contoh kita kutip sebuah dialog yang terdapat dalam drama "Kusuma Hati" yang dipertunjukkan dalam tahun-tahun empat puluhan. Untuk mendapat gambaran bagaimana melompat-lompatnya dialog yang terdapat dalam film, saya hanya akan mengutip dialog saja tanpa keterangan-keterangan.

Pertama-tama dialog dari "Kusuma Hati"

Mustajab : (gugup) Bagaimana keadaan isteri saya, nona? Segala pertolongan tidak nanti dilupakan, jika saya tidak dapat membalas, tentu Allah nanti membalasnya, karena Allah tidak buta! Tolonglah saya, nona.

Kasmini : (sabar) Jangan gugup dan bingung, isteri tuan semalam tidur nyenyak sekali. Mengapa tuan banyak sangsi, sedang isteri tuan berada dalam rawatan yang baik.

Mustajab : (heran dan aneh) Ha . . . ? Semalam isteri saya tidur nyenyak? Bagaimana sih? Sedang saya sudah dua malam tidak dapat tidur meskipun sakser saja, karena memikirkan jika ada apa-apa.

Jika dialog ini dibaca — dalam hal ini kita lupakan sebentar hal-hal yang buat telinga kita sekarang agak janggal karena bahasa ini adalah bahasa Indonesia panggung komersial tahun empat puluhan, maka segalanya cukup jelas. Apa yang jadi percakapan mereka dan bagaimana hubungan suami terhadap isteri yang ditanyakan. Biarpun dialog-dialog ini diucapkan tanpa melakukan apa-apa pengertian yang kita peroleh tidaklah akan berkurang. Akan tetapi, coba kita baca sebuah cukilan dari skenario "Titian Serambut Dibelah Tujuh", yang menggambarkan percakapan antara seorang bernama Ibrahim dan Saleh 'seorang anak kecil'.

IBRAHIM : Sudah, sudah. Kau sudah besar.
Jangan nangis.

IBRAHIM : Kau tidak akan dipukul lagi.
Tapi kau mesti sekolah.

IBRAHIM : Aku punya dua. Kau boleh ambil satu.
Kau mau?

IBRAHIM : Hup! Sambut!

Cukilan ini juga menggambarkan hubungan antara seseorang dan seseorang, tetapi dialog ini tidak dapat menjelaskan seluruhnya. Ia hanya merupakan bagian dari perbuatan Ibrahim.

Kelengkapan yang harus dimiliki oleh dialog sebuah drama membuat penggunaan bahasa dalam drama jauh lebih kaya dari penggunaan bahasa dalam film. Bahasa film adalah bahasa kawat, bahasa antara sadar dan tak sadar.

Yang menentukan bentuk-bentuk dialog ini adalah sifat hubungan kedua medium itu dengan realita. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk kesenian lain, teater dan film adalah bentuk kesenian yang sangat sekali terpaut pada zamannya. Dalam soal penggunaan bahasa ia sangat sekali bergantung kepada kebiasaan berbahasa yang terdapat dalam satu zaman. Teater dan film adalah bentuk kesenian yang harus dinikmati sekali duduk. Artinya berbeda, misalnya, dari sebuah novel yang dapat kita baca pada

Dalam hal ini pengarang-pengarang kita cukup menghadapi kesulitan. Ada satu ucapan yang seringkali kita dengar diucapkan oleh orang Indonesia: Terasa ada, terkatakan tidak. Dalam hidup sehari-hari ucapan ini dapat diterima sebagai pengganti permintaan "harap maklum". Akan tetapi, tidak ada drama tanpa ucapan, tidak ada dialog tanpa ucapan. Seorang penulis skenario tidak dapat menggambarkan pertemuan dua orang muda yang saling jatuh cinta yang dalam cintanya terasa ada, terkatakan tidak. Penulis itu tidak dapat mengarang serangkaian dialog di mana si pemuda bertanya tentang kabar ayah si gadis dan si gadis menjawab baik-baik saja, lalu si pemuda bertanya bagaimana keadaan sekolahnya, lalu dijawab oleh si pemudi baik-baik saja, dan selanjutnya menyerahkan kepada penonton supaya maklum bahwa kedua mereka itu saling mencintai. Masalah ini pernah menjadi pembicaraan yang ramai di kalangan pengarang-pengarang Indonesia di tahun lima puluhan. Kalau seorang pemuda jatuh cinta pada seorang gadis, bagaimana caranya ia menyatakan cintanya. Dalam percakapan-percakapan itu kedengaran pendapat bahwa pernyataan seperti *I love you* tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi, bagaimana? Apa main labrak saja? Tidak. Kalau begitu bagaimana? Ya, sama-sama maklum saja. Tentu saja seorang penulis drama atau penulis skenario tidak tertolong dengan jawaban seperti itu. Akhirnya, mereka paksakan dan mereka berikan ucapan pada anak muda itu "aku cinta padamu". Sebelumnya percintaan dinyatakan dalam surat yang panjang lebar, tetapi mulai saat itu rasa cinta dapat dikomunikasikan dengan lisan dengan suatu cara yang lambat-laun tidak lagi ganjil kedengarannya. Ucapan itu begitu sudah menjadi perbendaharaan umum hingga ia sudah dapat dipergunakan untuk efek komedi seperti yang kita temui dalam ucapan Jalal dalam film "Inem Pelayan Sexi": "Saya cinta *sampean!*" Proses pembukaan daerah perasaan dan pemikiran baru ini akan berjalan terus dengan masuknya berbagai unsur baru dalam dunia pemikiran dan perasaan orang Indonesia. Penerjemahan naskah-naskah asing untuk panggung telah banyak membantu menyadarkan pengarang dan penonton drama Indonesia terhadap nuansa-nuansa pemikiran dan perasaan yang selama ini dihadapi secara borongan. Di satu pihak mulai terasa sekali keterbatasan daya jangkau kata-kata yang ada untuk menyampaikan suatu hal yang lebih terbatas sifatnya dari yang disampaikan oleh kata itu biasanya. Ambillah, misalnya, kata *gila*. Kata *gila* mengingatkan kita pada perbuatan-perbuatan yang berada di luar kelaziman pada penyakit pikiran, pada ketidakwajaran yang jauh, pada ketidakpantasannya seseorang diajak bermasyarakat bersama-sama, atau pada sesuatu yang menyimpang dari pendapat umum. Sementara itu,

pengetahuan kita tentang ilmu jiwa sudah lebih jauh dan kita mengerti bahwa yang dianggap kegilaan itu banyak macamnya dan tidak dapat dibungkus dengan kata *gila* saja.

Dalam usaha penggeseran batas-batas dunia pemikiran dan perasaan yang dapat disampaikan dalam bentuk ucapan yang wajar ini, teater modern kita jauh lebih maju dari film-film kita. Mungkin sekali karena dunia teater kita — artinya teater modern — seluruhnya dikuasai oleh orang-orang yang kreatif yang mempergunakan medium teater sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu. Eksperimen-eksperimen banyak dilakukan di sini; kalimat-kalimat yang menarik dan tidak konvensional banyak kita dengar di atas panggung kita, tetapi dunia film kita dikuasai oleh pedagang-pedagang. Mereka membuat film bukan untuk menyampaikan sesuatu, tetapi untuk mencari uang. Dan untuk ini memerlukan jumlah penonton sebanyak mungkin. Dan penonton yang banyak ini menurut mereka tidaklah ditemui di kalangan terpelajar, tetapi di kalangan orang-orang yang bodoh, yang persoalannya hanya berputar sekitar: uang, makan dan pakaian, serta hubungan kelamin. Tidak semua film Indonesia dibuat atas dasar ini, tetapi sebagian besar hingga orang mengatakan bahwa dialog-dialog yang terdapat dalam film Indonesia adalah dialog-dialog yang hanya sepatasnya diucapkan oleh anak kecil atau makhluk gabungan orang utan yang memperoleh badan manusia.

Dalam teater dan film sangat berlaku pemero yang berkata "bahasa menunjukkan bangsa": bangsa tidak saja dalam pengertian bangsa tetapi juga derajat, kedudukan sosial, kemuliaan sifat, dan sebagainya. Di satu pihak kekurangan-kekurangan dalam segi ini dapat kita katakan akibat dari kelemahan penguasaan teknis mengarang para penulis drama dan skenario Indonesia. Akan tetapi, di lain pihak, hubungan bahasa dan derajat seseorang dalam masyarakat Indonesia memang tidak jelas. Sebagai sebuah ilustrasi barangkali dapat saya kutip sebuah ucapan yang saya dengar dalam sebuah rapat mengenai masalah-masalah masyarakat. Pembicara itu berbicara tentang memasyarakatkan kebiasaan menabung. Ia berkata: *Kebiasaan menabung ini harus dimasyarakatkan*. Lalu ia tambahkan: Atau dalam bahasa para pembesar *dimasyarakat-ken*. Ilustrasi ini menyadarkan kita bahwa dalam tahap sekarang belum ada suatu hubungan yang logis antara derajat sosial seseorang dan bahasanya. Malahan barangkali dapat kita katakan bahwa justru orang-orang yang menurut kedudukannya harus dihormati sangat tidak boleh dihargai dalam penggunaan bahasanya. Kecuali tentu kalau ia lagi mengutip ucapan-ucapan resmi dan menjadi *his master's voice* memidatokan partisipasi

pembangunan dan sebagainya. Begitu ia pindah pada penyampaian pendapat pribadi, dengan sedih harus kita catat bahwa antara kehidupan rohani bapak yang terhormat itu dan seorang pelayan atau petani biasa tidak banyak bedanya.

Pendidikan dan kedudukan seseorang di masa sekarang ini belum lagi menjamin penggunaan bahasa Indonesia yang baik, seperti misalnya baiknya penggunaan bahasa Inggris oleh orang-orang Inggris yang terpelajar. Sehingga pembedaan melalui penggunaan bahasa tidaklah banyak kita temui dalam film dan teater kita. Ketinggian kedudukan seseorang lebih banyak ditunjukkan oleh sikap, isi dari ucapan-ucapannya daripada corak bahasa.

Penggunaan Langgam Bahasa Daerah

Masalah langgam bahasa ini merupakan masalah yang rumit sekali dalam film dan teater. Dalam teater, di mana penguasaan teknik bermain makin lama makin menjadi prasyarat bagi seorang aktor, lebih banyak usaha yang dilakukan untuk meluruskan langgam bahasa ini. Akan tetapi, dalam film, di mana prasyarat yang dikenakan pada seorang pemain berbeda dari prasyarat yang dikenakan pada seorang aktor panggung, keadaan masih sangat buruk sekali. Umumnya para bintang kita itu tidak menguasai teknik pengucapan bahasa dengan baik. Kesadaran bahasa juga tidak hingga banyak film Indonesia yang ceritanya bermain, misalnya, di Jawa Timur memperdengarkan ucapan-ucapan langgam Jakarta. Seorang pemain yang menurut cerita berasal dari Sumatra dan memakai nama yang agak gaib bagi orang-orang berasal dari Sumatra mengucapkan dialog-dialognya dengan lidah Jawa yang tebal. Struktur-struktur kalimat yang dituliskan oleh penulis skenarionya pun menunjukkan struktur kalimat yang sangat dipengaruhi oleh bahasa Jawa. Hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak disengaja dan merupakan cacat yang mengganggu dalam film-film Indonesia. Akan tetapi, akhir-akhir ini terdapat suatu perkembangan yang wajar, yaitu kecenderungan untuk mempergunakan langgam suatu daerah dengan sengaja. Contoh-contoh seperti ini, misalnya, kita temui dalam film-film seperti dalam film "Jembatan Merah" bahasa Indonesia langgam Surabaya, "Inem Pelayan Sexi" bahasa Indonesia langgam Madura, "Bulan di Atas Kuburan" bahasa Indonesia langgam Medan dan langgam Jakarta. Di sini langgam bahasa daerah dipergunakan secara sengaja untuk memberikan semacam *couleur locale* dan untuk memberikan semacam latar belakang kebudayaan pada tokoh itu.

Kecenderungan seperti ini sebetulnya adalah kecenderungan yang

biasa dalam dunia film. Oleh karena film bercerita tentang individu-individu dan tokoh-tokoh, sedangkan tokoh-tokoh tidak lahir dari satu keyakinan. Ia harus mempunyai latar belakang, mempunyai lingkungan yang membentuk pribadinya dan bahasanya. Kenyataan ini menghadapkan seorang pengarang dan skenario kepada sebuah tantangan baru, yaitu tantangan yang ditimbulkan oleh kevakuman latar belakang yang diberikan oleh bahasa Indonesia yang netral, dalam pengertian yang diucapkan menurut cara-cara yang baik. Latar belakang bahasa Indonesia bukanlah sebuah kebudayaan yang homogen, tetapi suatu kesinambungan sosial yang terdiri dari segala macam unsur, yang tidak semuanya dimiliki oleh setiap anggotanya. Seorang tokoh drama atau film yang berbahasa Indonesia yang baik adalah seorang tokoh modern dengan latar belakang sejarah tertentu. Ia tidak berasal dari mana-mana, ia orang Indonesia sekaligus dari Sabang sampai dengan Irian Jaya. Bahasanya dapat dimengerti, cukup komunikatif untuk semua orang Indonesia, tetapi bahasa itu adalah bahasa yang hanya dapat dipahami dan diresapi dengan baik dalam konteks pribadinya, tidak dalam konteks suatu lingkungan atau suasana kebudayaan. Hal ini bukanlah suatu kelemahan, Hal ini adalah suatu tantangan bagi setiap seniman yang ingin menulis drama atau skenario film. Bagaimana juga tokoh-tokoh yang ia gambarkan harus merupakan individu yang hidup, yang punya latar belakang yang dilahirkan dan dibesarkan ditumpuk bumi tertentu dengan kebiasaan tertentu, yang punya kedudukan sosial tinggi atau rendah. Saya kira kesadaran untuk mencapai itu sebaik-baiknya ada, tetapi dalam keadaan sekarang kita baru dapat mengatakan: ia berada dalam tahap perkembangan.

Penutup

Praktik penggunaan bahasa dalam film dan teater modern telah saya laporkan secara garis besar. Perkembangannya erat sekali dengan perkembangan penggunaan bahasa oleh masyarakat dan kesanggupan bahasa itu sendiri menjadi alat pengutaraan hal-hal yang lebih dalam daripada yang hanya sekedar dapat dilihat dengan mata dan dihayati secara badaniah. Dalam tahap sekarang teater lebih maju dari film. Teater sudah banyak menyumbangkan usaha untuk memindahkan bermacam nuansa perasaan dan pikiran ke dalam ucapan-ucapan. Film masih jauh ketinggalan. Apa ada yang dapat kita lakukan? Ada, yaitu sekiranya pada sineas kita mendapat kesempatan membuat film-film yang memperlihatkan tokoh-tokoh yang tidak sekedar memperkatakan soal-soal dangkal seperti makan, seks,

dan sebagainya, tetapi lebih menitik kepada nilai-nilai yang lebih dalam. Dengan adanya kesempatan ini perkembangan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan pengutaraan artistik dalam film dan teater akan tertolong sekali.

BABARU INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN BAHASA
Sejarah Perkembangan Bahasa

Sejarah Bahasa Indonesia
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia
9. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia
10. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia

BAHASA INDONESIA DALAM CERITA REKAAN MUTAKHIR

Sebuah Pengamatan Kasar

M. Saleh Saad

Fakultas Sastra Universitas Indonesia

1. Tulisan ini hanyalah hasil sebuah pengamatan kasar, bukan hasil sebuah penelitian yang cermat.
2. Pembatasan dilakukan dalam hal-hal berikut: (1) jangka waktu; (2) jenis sastra; (3) percontoh.
3. Sampai hari ini belum pernah diberikan penyifatan yang tegas dan jelas mengenai "sastra mutakhir". Oleh karena itu, pada kesempatan ini "mutakhir" sepenuhnya dikaitkan pada pengertian waktu. Diambil dasawarsa terakhir: 1970-1978/80.
4. Jenis sastra yang dibicarakan hanyalah jenis "cerita rekaan". Cerita rekaan ialah karangan dalam bentuk prosa, menggambarkan kehidupan, hasil imajinasi pengarang.
5. Cerita rekaan yang diambil sebagai percontoh ialah : (1) *Pada Sebuah Kapal*, Pustaka Jaya, 1973; (2) *Dari Hari ke Hari*, Pustaka Jaya, 1975; (3) *Upacara*, Pustaka Jaya, 1978.
6. Dalam pengarahannya, Panitia mengemukakan masalah-masalah berikut.
 - a. Apakah para sastrawan mutakhir mempergunakan bahasa Indonesia yang khas?
 - b. Ragam bahasa Indonesia yang mana dipergunakan mereka?
 - c. Apakah sifat khas bahasa sastrawan dalam hal struktur morfologis, variasi kalimat, dan kosa kata?
7. Baiklah kita mulai dengan mengetengahkan kutipan dari *Pada Sebuah Kapal*¹

"Sehabis makan malam aku ke salon. Aku tahu dia akan datang, dan pengetahuan ini membikinku semakin tidak sabar menanti-kannya. Dan sewaktu dia mengajakku naik ke tempatnya untuk mengambil buku lain, aku tahu bahwa aku seharusnya tidak menyetujuinya. Tetapi aku naik ke kamarnya. Kulihatkan dia mengunci pintu dengan ketenangan yang kekal. Dia meletakkan kunci tersebut di depanku dan menatap wajahku. Untuk kesekian kalinya kami berpandangan. Dan begitulah. Dalam waktu dia menciumi muka dan bibirku aku masih berfikir bahwa aku harus menyetiaai suamiku, satu-satunya laki-laki yang kuberi tubuhku selama ini. Aku bertanya-tanya sendiriku kalau aku masih bisa menghalangi untuk tidak berbuat sesuatu pun yang mengerikan. Mengapa aku tidak lagi memiliki kekuatan? Mengapa aku selemah ini? Mungkinkah orang mempunyai kehendak sekuat ini untuk melabuhkan diri pada suatu pengalaman yang tak berkeesokkan? Suatu kekuatan kehendak untuk memutuskan dengan sekali sentak tali yang mengikatnya pada sebatang kayu di tepi pantai? Tapi aku tidak bisa menipu diriku lagi. Dada yang penuh dan berahi yang terpendam telah merangsangku untuk berkata yang sebenarnya. Dalam kamarnya yang temaram aku menerimanya menyelinap ke dalam kehangatan tubuhku. Bahunya kuat, ketegapan seorang pelaut yang penuh kerja dan latihan. Tangannya lembut membelai-ku. Semua itu kurasai bergetar menyentuhku. Gerakan-gerakan kami tergesa dan kaku. Seperti dua orang yang merasakan air menelan sampai ke leher, kami menggeragap mencari pegangan, mencari udara lepas, lepas. Dan kaki kami seperti menginjak sebuah batu yang kokoh di dasar kali, tanpa kami lihat, kami merasakan keselamatan yang terjanjikan, berdua kami berdekatan erat menghirup kebebasan. Aku adalah sebagian darinya, dia adalah sebagian dari diriku. Kami berdua melumat tanpa sesuatu pun yang akan bisa memisahkan kami". (1973 : 231 – 232).

8. Pengamatan kasar akan mengatakan bahwa bahasa yang dipergunakan berbeda dari, misalnya, bahasa yang dipergunakan dalam karangan-karangan ilmiah. Bila karangan-karangan ilmiah kita mulai cenderung memakai ragam resmi² (lihatlah misalnya *Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia*), kutipan di atas tidak mengarah ke situ. Bila "bahasa ilmiah" cenderung menjauhi kata-kata tak baku dan sedapat mungkin menggunakan kata-kata tak baku bukanlah sesuatu yang haram bagi-

nya. Bila "bahasa ilmiah" cenderung lebih banyak memakai kata kerja dengan awalan *di-*, kutipan di atas tidak sekali pun memakai awalan tersebut. Bila kata-kata dalam "bahasa ilmiah" lebih banyak bersifat konotatif. Dalam "bahasa ilmiah" banyak ditemukan istilah-istilah teknis. Ada satu perbedaan yang menyolok sekali — kalau tidak ingin menyebutkan sebagai pertentangan yakni *nada* pada karangan-karangan itu. Bila karangan-karangan ilmiah mengesankan nada tak personal, kutipan di atas keras sekali mendengung nada personal. Tidak kebetulan bahwa cerita rekaan tersebut mempergunakan *pencerita-aku-an-sertaan*.

9. Dapatkah kita segera mengatakan -- berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dicapai di atas -- bahwa cerita rekaan mutakhir kita mempergunakan bahasa yang khas, bahasa yang tersendiri? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perhatikan dahulu kutipan di bawah ini.

"Pada suatu pagi muncul seorang murid baru, Juariah. Pengungsi dari Jawa Timur, kuning lagi panjang-rambutnya. Dia bercerita tentang Mojokerto, kotanya yang baru jatuh ke tangan pasukan Belanda. Berarti, memang tak ada gunanya gencatan senjata. Tak ada gunanya persetujuan Linggarjati, Krian, Sidoarjo, dan sekarang Mojokerto. Pengungsi datang dari segala penjuru angin. Solo terengah-engah kepayahan menerima pendatang baru.

Ayah mendengarkan semua laporanku tentang sekolah, termasuk pindah-memindahinya, alasan-alasan mengapa sampai aku memutuskan demikian, hampir tanpa berkedip. Mungkin karena semata-mata menyangkut bidang teknis, artinya tidak menambah anggaran baru, dan tidak penting. Sekolah di jaman itu hampir-hampir tidak memerlukan biaya. Bayarannya kecil, begitu pula keperluan peralatan tak ada, karena memang tak ada di pasar.

Hanya buku tulis dan pensil. Kertasnya berwarna kuning muda, terbuat dari merang yang adonannya begitu rupa, sehingga serat-seratnya bertimbulan. Sangat memuakkan dan mengganggu. Menulis daya serap yang ganas. Satu titik tinta sudah cukup membikin kubangan di atas kertas. Sedikit percikan air sudah sanggup merobah kertas itu jadi bubur.

"Yang kau harus lakukan sekarang adalah mengaji," kata ayah sambil mengelap kaca mata dengan ujung kemeja, mema-

tut-matut, mengacung-acungkannya arah ke loteng, meletakkannya kembali di tempatnya. "Kau boleh bersukur karena di kota ini ada sekolah agama termasyhur. Supaya segala sesuatunya bisa cepat, sudah kubicarakan soal ini dengan kepala sekolah, Kiyai Dimiyati. Awas, kau jangan main-main di situ, bukan saja kau sendiri rugi, tapi aku bisa malu."

Lingkungan keluarga pemeluk Islam yang kuat, dari samalah aku berasal. Nenekku Siti Hasanah dari garis ayah "guru agama keliling", bermurid ribuan, sampai ke luar batas kota. Gemar bicara, tapi tidak suka makan. Kutub lawannya adalah suaminya sendiri, kakekku, pendiam lagi garang, dan suka makan enak. Minumnya selalu air daging. Abdul Aziz bin Sailan bin . . . itulah namanya, yang lebih condong menggunakan tinjunya, ke-timbang pertimbangan kepalanya di dalam menyelesaikan masalah. (*Dari Hari ke Hari*. 1975: 33-34).

Kutipan di atas hampir-hampir tidak berbeda dari "bahasa sehari-hari". Kata-katanya dan susunan kalimatnya mengingatkan kita kepada bahasa yang kita pakai sehari-hari. Ada nada seloroh, nada menyindir, dan nada melucu yang tidak kita jumpai dalam bahasa ilmiah.

10. Bila sekarang kita berpindah ke kutipan berikutnya, kutipan dari *Upacara*, kita dihadapkan kepada kenyataan yang lain pula.

"Kalau misalnya Kakak tak kembali?" aku mengajuk. "Ning akan menanti. Menanti. Menanti! Sampai Kakak datang." Wajahnya memuram sedikit redup. "Karena Kakak pasti akan kembali!" Waning berkata pasti.

"Kalau misalnya Ning yang ingkar janji? Ia nampak terkejut. Wajahnya memuram, mata memanah hatiku, mengiris. Ada penyesalan mendentak batinku, begitu kasar aku meragukan kesetiannya.

"Waning telah memilih Kakak. Hanya Kakak! Tak ada yang bisa memisah kita. Kecuali mati, atau Kakak yang tak setia pada janji?"

"Aku setia. Tapi harus menjaring rezeki. Kita berpisah, lama, tak tahu aku yang akan mungkin terjadi. Seperti Sili yang meninggalkan Itung. Kabarnya ia berbahagia di kampung Gunung. Tapi Itung kalap mencebur diri di kali."

"Soalnya hanya keyakinan dan kesetiaan. Cinta selalu penuh pengorbanan," ucapnya gemetar. Matanya membasah.

Beberapa titik air bening mengalir dari sana. "Aku berjanji. Aku setia pada sumpah setia, pada hati nurani.

Atau Kakak masih ragu-ragu padaku?"

Kuambil tangannya. Kubelai rambutnya yang tergerai. Matanya terus membasah. Ada senggukan yang dalam di dadanya.

"Tidak baik air mata bagi dewi jelita," sambil kususut genangan air matanya.

Kemudian kami mekar mengombak dalam kerinduan yang panas. Kupagut bibirnya yang pias, saling merengkuh, lama. Lama sekali! Tangan-tangan kasihberpadu berangkulan. Tangan-tangan yang fana pun tak mau diam. Merayap mencari segenap kelembutan. Dua bukit kecil yang liat membuat darahku berdesir. Kami sampai pada kehangatan yang membakar.

Tak ada dangau, tak ada huma, tak ada burung, tak ada langit, tak ada bumi. Tak ada! Tak ada padi, tak ada angin, tak ada hari. Tak ada! Yang ada hanya lagu. Lagu cinta kami. Yang ada hanya mata hari. Matahari cinta kami. Yang ada hanya api. Api cinta kami. Yang ada hanya langit. Langit cinta kami. Yang ada hanya bumi. Bumi cinta kami. Yang ada hanya nafas. Nafas cinta kami. Kayu-kayuan bernyanyi merdu. Menyanyikan cinta kami. Mega-mega berlagu. Melagukan cinta kami. Angin pun memetik kecapi. Kecapi cinta kami. Seluruh alam melagukan senandung cinta. Cinta kami. Jiwa kami menyanyi. Menyanyikan cinta kami. Denting-denting yang indah membuai, yang dalam menikam, yang di dada menyiksa.

Lama sekali baru kami tersadar. Kami mendapatkan diri berdua di atas dangau huma. O, Gusti! Langit masih yang dulu juga. Daun-daun masih yang dulu juga. Melambai dalam keceriaan. Rumput-rumput menganggukkan salam. Ada keasingan yang karib ketika mata kami saling bertemu. Ia tersenyum aku tersenyum" (1978:62-63).

Pengamatan sastra segera mengatakan: bahasanya puitis! Kita temukan unsur-unsur yang lazim terdapat dalam puisi: pengulangan yang menguatkan makna, pengulangan yang mendalam makna. Juga kata-kata yang maknanya merambat ke mana-mana. Rambatan yang efektif. Awalan *me-* yang dipakai secara efektif melentingkan nada personal itu dengan kerasnya.

11. Kutipan-kutipan di atas memperlihatkan pula variasi, misalnya variasi dalam struktur morfologis. Variasi ini dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yakni :
- A. melumat, memuram, membasah;
 - B. menyetiai;
 - C. sendiriku;
 - D. berkeesokan;
 - E. membikinku, mengajakku, merangsangku, membelaiiku.

Kelompok A,B,C,D boleh dikatakan bentuk yang kreatif. Berkat bentukan kata itu gambaran menjadi lebih hidup. Kelompok E sudah menyimpang dari tata bahasa. Tidak biasa dalam bahasa Indonesia kata ganti orang pertama dirangkaikan dengan kata kerja. Namun, variasi A, B, C, D itu barulah gejala saja. Kelompok E tidak bisa dianggap sebagai penyimpangan yang harus dinobatkan sebagai ciri. Ia lebih baik disebut sebagai suatu kesalahan.

12. Lalu, bila harus menyimpulkan, apakah yang harus kita katakan? Apakah harus kita katakan bahasa yang dipergunakan itu bahasa yang khas, bahasa yang tersendiri? Ketiga cerita rekaan kita memperlihatkan tiga kemungkinan. Bila disatukan, dan kemudian ditarik ke atas (abstraksi), boleh agaknya dikatakan bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa biasa, kata-katanya biasa, kalimatnya biasa, tetapi *cara pemakian-nya* khas. Di sini kita berurusan dengan pertalian kata dengan kata dalam kalimat dalam sebuah pengucapan. Ditarik lebih ke atas lagi dapat dikatakan bahwa sastra (cerita rekaan adalah salah satu jenis sastra) melaksanakan apa yang ingin kita sebut langgam sastra, yang menghimpun di dalam dirinya langgam-langgam lain (kecuali barangkali langgam resmi).

Catatan

¹Ejaan disesuaikan dengan EYD.

²Tulisan ini lebih ingin memilih istilah *langgam resmi*. Ini ada kaitannya dengan pengkajian sastra yang menggunakan istilah *ragam* untuk ragam prosa, ragam puisi, ragam drama (trikotomi). Selanjutnya, pengelompokannya seperti berikut :

ragam	prosa
jenis	cerita rekaan
macam	cerita panjang cerita menengah cerita pendek
corak	cerita rekaan tokoh cerita rekaan peristiwa cerita rekaan tokoh-peristiwa cerita rekaan drama cerita rekaan intian dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darbyshire, A.E. 1971. *A Grammar of Style*. London: Andre Deutsch.
- Dini, Nh. 1973. *Pada Sebuah Kapal*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Djunaidi, H. Mahbub. 1975. *Dari Hari ke Hari*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Dresden S. 1971². *Wereld in Woorden: beschouwing over romankunst*. Den Haag. Bert Bakker.
- Grimes, Joseph E. 1975. *The Thread of Discourse*. The Hague: Mounton.
- Mukarovsky, Jan. 1976. *On Poetic Language*. Lisse: The Peter de Ridder Press.
- Rampan, Korrie Layun. 1978. *Upacara*. Jakarta: Pustaka Jaya.

BAHASA INDONESIA DAN PENGEMBANGAN TEATER TRADISIONAL

Astuti Hendrato

Universitas Indonesia

Saya diminta Panitia agar dalam kertas kerja ini memberikan jawaban atas empat macam pertanyaan berikut.

- a. Teater tradisional manakah yang dapat dikembangkan dengan bahasa Indonesia?
- b. Usaha apa yang pernah dilakukan dalam hubungan ini?
- c. Hambatan apa yang ditemukan dan bagaimana mengatasinya?
- d. Sarana apa yang diperlukan untuk menunjang usaha itu?

Tampaknya pertanyaan-pertanyaan di atas sederhana sekali, tetapi menjawabnya sungguh memerlukan pemikiran sejenak. Bahan bacaan sukar diperoleh, lebih-lebih karena apa yang kita bahas ini adalah masalah kesenian dalam hubungannya dengan bahasa. Jadi, patutlah kita harus sedikit berhati-hati. Namun, baiklah kita coba juga memenuhi harapan Panitia itu.

Kertas kerja ini lebih banyak saya dasarkan kepada pengalaman-pengalaman dan pengamatan sendiri dalam menonton pementasan atau pemutaran film teater tradisional dan rekaman-rekaman hasil wawancara yang pernah dilakukan dengan tokoh-tokoh tertentu di daerah-daerah.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas sebaiknya kita perhatikan dahulu apa yang dimaksud dengan teater tradisional dan apa yang dimaksud dengan pengembangannya dengan bahasa Indonesia itu.

Teater Tradisional

Teater tradisional adalah teater warisan budaya bangsa yang sekarang masih dapat kita saksikan di berbagai daerah. Di samping yang masih tetap

hidup, masih utuh, dan masih terus dipentaskan, setiap kali diinginkan oleh penggemarnya, ada juga yang sudah hampir punah dan sukar dicari jejaknya lagi. Bahkan, ada pula yang sudah hilang lenyap, tidak sempat kita saksikan lagi pada masa kini. Apa yang dapat kita ketahui darinya hanyalah terbatas pada keterangan-keterangan yang samar-samar melalui cerita atau uraian orang-orang tua atau dari kitab-kitab lama.

Di Indonesia ada tiga macam jenis teater yang hingga kini masih berjalan dan hidup berdampingan, yaitu: (1) teater tradisional, (2) teater modern, dan (3) teater transisi.

Penggolongan menjadi tiga jenis ini didasarkan kepada struktur dan ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing jenis teater itu.

Seni teater adalah suatu bentuk penyajian karya seni yang ditampilkan melalui cerita dan diperagakan dengan gerak, suara (bunyi-bunyian atau tetabuhan dan lagu), serta dialog. Jadi, sebenarnya teater merupakan suatu seni kolektif karena mencakup beberapa cabang seni, seperti seni sastra, seni drama, seni rupa, seni suara, dan seni gerak dan di dalamnya tercakup pula tiga macam kegiatan, yang satu dengan lainnya saling jalin menjadi satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Ketiga kegiatan ini adalah: (1) kegiatan mencipta suatu cerita, yang dilakukan oleh penulis lakon; (2) kegiatan pementasan, yang dilakukan oleh para seniman dan seniwati teater; dan (3) kegiatan penikmatan hasil-hasil kegiatan (1) dan (2) yang dilakukan oleh para penonton.

Teater tradisional dapat dikatakan merupakan teater asli. Ia lahir dari masyarakat serta dihayati dan berkembang di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Dalam pelaksanaannya ia tidak hanya untuk keperluan hiburan saja, tetapi juga sering sekali dihubungkan dengan kegiatan upacara keagamaan atau adat. Dari pementasannya kelihatan pola dan struktur yang mengungkapkan ciri-ciri khas kedaerahan. Unsur-unsur kesenian seperti tari dan musik sekaligus menjadi bagian dari pementasan, bersama-sama dengan dialognya. Dialog yang dilakukan dalam bahasa daerah disampaikan secara spontan dan biasanya dengan lawakan-lawakan.

Ciri-ciri umum teater tradisional adalah sebagai berikut.

1. Cerita yang disajikan biasanya sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah populer. Yang disajikan biasanya sejarah, dongeng, legenda, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Bila yang diungkapkan itu babad, sejarah, atau dongeng biasanya lalu diadaptasi-

kan dengan selera masyarakat sekitarnya;

2. Pementasannya selalu diiringi bunyi-bunyian alat musik (tetabuhan);
3. Tarian, nyanyian, dan lawak tidak merupakan bagian pertunjukan yang terpisah, tetapi luluh menjadi satu dengan unsur-unsur seni lainnya. Bahkan, lawakan biasanya menguasai jalannya pementasan.
4. Nilai dramatik dilakukan spontan dan tak terduga. Dalam satu adegan, misalnya, dua unsur emosi dapat kita saksikan sekaligus. Tangis dan tawa, sedih dan gembira dapat bersama-sama disajikan.
5. Penonton dapat dan boleh bersikap santai, tidak pernah merasakan adanya peraturan-peraturan khusus yang mengikatnya. Hubungan antara penonton dan pemain terasa sangat akrab karena kedua belah pihak saling memberikan respons. Sahut-menyahut secara spontan dapat terjadi sehingga penonton ikut pula menentukan sukses atau tidaknya suatu pementasan.
6. Pergelaran dilakukan di mana saja asal dipandang memenuhi kebutuhan. Jarak antara tempat penonton dan pemain tidak jauh. Pada umumnya penonton duduk atau berdiri mengitari pentas dengan membuat garis lengkung (tapal kaki kuda).

Inilah ciri-ciri yang umumnya ada pada teater-teater tradisional kita. Tentu saja antara daerah yang satu dapat terjadi perbedaan dengan daerah yang lain.

Menurut kelahirannya, teater tradisional dapat dibagi menjadi dua golongan: (1) yang disebut juga teater rakyat karena timbulnya dari dan oleh rakyat kecil; dan (2) teater tradisional yang lahirnya di kalangan kaum atasan.

Dalam bentuk aslinya teater rakyat sangat sederhana. Tidak ada yang menciptakan khusus karena lahirnya dari spontanitas rakyat yang memerlukan atau menginginkan hiburan. Oleh karena itu, tidak ada desain-desain tertentu dan tidak ada cerita yang disusun rapi dalam bentuk tulisan. Alat bunyi-bunyiannya pun seadanya. Tidak ada pula latihan-latihan khusus terlebih dahulu. Semuanya timbul secara spontan, lahir bersama dengan kegiatan kehidupan itu sendiri. Contoh yang baik sekali dapat kita ambil dari lahir dan berkembangnya teater rakyat ketoprak (Wiajya dan Sutjipto, 1977).⁴

Lain lagi keadaan teater tradisional yang lahir di kalangan atas, di keraton, misalnya. Teater ini dibina oleh ahli-ahli tertentu dan diciptakan oleh seniman-seniman keraton. Segala-galanya, termasuk pola ceritanya, rencana pakaian, desain, dan lain sebagainya diatur dan dipersiapkan secara teliti. Pelaku-pelakunya dilatih, cara pementasannya diatur demikian rupa sehingga dalam keseluruhannya segi-segi keindahan dan nilai artistiknya lebih diutamakan daripada sekedar untuk hiburan saja. Namun, cara pementasannya tidak jauh berbeda dengan teater rakyat, tempatnya terbuka, dan tidak memerlukan panggung.

Di depan sudah dikemukakan bahwa teater-teater tradisional tidak semuanya masih dapat kita saksikan sekarang. Sayangnya yang masih ada pun banyak yang tidak mendapat perhatian yang layak dari bangsa kita sendiri. Bahkan, oleh segolongan masyarakat tertentu dianggap tidak bermutu, tidak pantas untuk dihargai, dan dipandang hanya layak untuk dipertontonkan di perkampungan atau pedesaan saja.

Adalah suatu ironi yang besar karena kenyataan sekarang menunjukkan bahwa yang menaruh minat terhadap teater-teater tradisional kita justru orang-orang asing. Mereka ini tidak segan-segan mempelajari dan menekuni bahasa daerah yang digunakan dalam teater tradisional itu. Bahkan, tidak sedikit yang kemudian bertekad langsung ikut terjun dalam kegiatan-kegiatan pementasannya dan untuk itu mereka menyadari bahwa tanpa pengetahuan atau kemampuan berbahasa daerah keinginan mereka itu tidak akan tercapai. Bagaimana sikap bangsa kita sendiri? Segolongan kaum cerdik pandai kita sendiri justru tidak membenarkan pembinaan bahasa daerah.

Kenyataan memang banyak di antara bangsakita yang tidak menyadari bahwa kita ini mempunyai warisan budaya yang pantas dipelihara. Banyak orang yang sudah terlalu jauh dari dunianya sendiri dan sudah tidak berpijak di buminya sendiri sehingga sudah tidak dapat atau tidak mau mengerti akan kebudayaannya sendiri.

Lakon-lakon yang disajikan oleh teater tradisional tampaknya memang tidak berarti karena penontonnya tidak perlu mengerutkan dahi agar dapat memahami masalah yang dilemparkan dalam pertunjukannya. Akan tetapi, sebaliknya, penonton teater tradisional secara tidak sadar sesungguhnya telah menerima ajaran hidup yang sangat penting artinya. Beda dengan menonton teater modern. Orang tidak santai karena harus mengikuti arus jalannya pementasan apabila tidak ingin kehilangan jejak pengungkapan

problema yang dilontarkan. Baru sesudah selesai menonton, orang dapat merumuskan segala-galanya yang baru saja diselesaikannya.

Pengembangan Teater Tradisional

Setelah mengikuti uraian di atas kita lalu dapat menilai dan mempertimbangkan perlu tidaknya teater tradisional kita yang masih tersebar di daerah-daerah itu dipelihara, dibina, dan dikembangkan. Khusus pada kesempatan ini kita akan menyoroti masalah sampai berapa jauh bahasa Indonesia dapat memberikan sumbangannya. Akan tetapi, sebelum kita masuki masalahnya, sebaiknya kita berbekal suatu pegangan bahwa yang akan kita terjun ini adalah kancah kesenian. Kesenian adalah salah satu unsur pokok kehidupan kebudayaan bangsa yang selalu tumbuh, hidup, dan berkembang dari masa ke masa, seirama dengan perkembangan masyarakat bangsa itu sendiri.

Bidang yang akan kita masuki ini adalah bidang yang peka sebab justru yang akan kita bahas adalah suatu karya seni yang lahir, hidup, dan berkembangnya di daerah-daerah. Oleh karena itu, dalam segala langkah kita nanti tidak boleh dilupakan satu faktor yang penting, yaitu masyarakat pendukungnya, masyarakat daerah pemilik seni itu sendiri.

Seni adalah hasil budi daya manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, baik secara individu maupun dalam kaitannya sebagai bangsa. Segala yang masuk wilayah seni selalu mengandung unsur-unsur keindahan, etis-estetis. Di samping yang pada tata lahirnya indah, sedap dipandang, nyaman didengar, juga selalu berisi hal-hal yang berguna dan berbobot. Hal-hal yang pada hakikatnya bagi kehidupan manusia dapat memberikan kepuasan rohaniah.

Dalam rangka pengembangan kesenian nasional, teater tradisional yang juga merupakan salah satu cabang kesenian daerah perlu dipelihara dan dibina. Dalam rangka pengembangan ini kita dapati dua tujuan utama, yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu seni, yang mencakup usaha-usaha memelihara, memperkaya, dan meningkatkan nilai budayanya serta
2. Memperkenalkan, menyebarluaskan, dan memanfaatkan isi amanat teater tradisional hingga dapat dan dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya terbatas pada warga daerah pemilikinya saja, tetapi juga sampai pada kalangan yang di luar (antarsuku atau, bahkan

antarbangsa). Usaha ini sering juga disebut popularisasi.

Dalam rangka pengembangan ini bahasa Indonesia jelas akan dapat memberikan sumbangannya yang sangat berarti. Namun, bagaimanakah caranya? Di bagian manakah ia akan dapat kita manfaatkan? Dalam usaha meningkatkan mutu seni atau popularisasi?

Bila kita perhatikan, usaha peningkatan mutu agaknya lebih condong ke arah kegiatan teknis pementasan dengan segala unsur-unsur seninya. Kiranya penggunaan bahasa Indonesia di sini kurang dapat secara langsung kita manfaatkan. Oleh karena itu, lebih baik kita masuki bidang popularisasinya.

Popularisasi dengan Bahasa Indonesia

Sementara orang berpendapat bahwa semua kesenian daerah yang sudah tinggi mutunya perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga dapat ditingkatkan menjadi milik nasional. Benarkah gagasan ini? Apakah hanya yang berbahasa Indonesia saja yang diakui menjadi milik nasional?

Harus diakui bahwa gagasan atau pemikiran di atas adalah sikap yang sangat simpatik. Akan tetapi, perlukah kita harus melangkah sampai sejauh itu? Bagi seni sastra gagasan itu memang sangat baik, dan sekarang juga sudah banyak karya-karya sastra daerah yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Bahkan untuk ini tidak sedikit proyek-proyek yang khusus diadakan.

Penerjemahan pementasan teater tradisional tidak akan semudah yang diperkirakan. Setiap pencipta kesenian tradisional tentu akan senang dan bangga bila teater daerahnya dapat dimengerti oleh lain orang yang tidak se daerah asalnya. Di antara pencinta-pencinta ini lalu ada yang merasakan timbulnya suatu keinginan untuk memodernkan seni daerahnya. Keinginan ini akhirnya membawa serta suatu tendangan ke arah modernisasi, antara lain dengan menerjemahkan teater tradisionalnya ke dalam bahasa lain, yaitu ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing.

Memang tidak dapat diingkari bahwa pada masa kehidupan modern sekarang ini bangsa kita pun berusaha menyesuaikan diri dengan alam pikiran modern. Akan tetapi, dalam penerangan cara berpikir modern itu di bidang kesenian sering mudah timbul kecenderungan untuk kurang atau tidak memperhatikan sumber serta dasar warisan budaya kita, yang selayaknya dijadikan landasan usaha pembinaan dan pengembangan kesenian di masa-masa

mendatang. Dalam keadaan semacam ini lalu ada dua hal yang saling berhadapan, yakni:

1. teater daerah yang klasik tradisional sifatnya; dan
2. golongan masyarakat yang menginginkan modernisasi.

Adanya toleransi yang besar akan sangat diperlukan untuk pemecahan masalah ini. Mereka yang cinta sekali pada seni tradisional hendaknya jangan bersikap terlalu ketat, hanya mau mempertahankan agar yang kuna tetap kuna saja, sedikit pun tidak boleh bergeser atau berubah, tanpa menghiraukan terjadinya perkembangan masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, aliran yang menghendaki modernisasi juga harus berhati-hati. Di samping merasakan adanya tantangan alam pikiran modern, mereka sebaiknya juga memperhitungkan tanggapan yang datang dari masyarakat, khususnya masyarakat pendukung teater daerah itu. Tindakan yang kurang bijaksana hanya akan merugikan saja. Rugi bagi mutu seninya, rugi pula bagi bahasa Indonesia kita. Lebih-lebih jika segi-segi yang penting tidak dihiraukan, misalnya saja, amanat yang terkandung dalam seni tradisional. Unsur-unsur mistik-religius, pedagogis-etis, simbolik, dan filsafat, yang selalu mencerminkan nilai-nilai budaya yang tinggi justru akan mudah tercecceh dan tidak dapat ditularkan atau disebarluaskan. Perlu diingat bahwa popularisasi bukan hanya berlaku bagi hal-hal yang lahiriah saja, tetapi justru harus dititikberatkan pada hal hal yang rohaniannya.

Tidaklah mustahil, terjemahan pementasan malahan akan dapat berakibat pemerkosaan seni budaya kita. Dalam hal ini bukan saja untuk teater tradisional, melainkan juga memperkosakan bahasa Indonesia. Kita ambilkan beberapa contohnya.

1. Pementasan wayang kulit purwa dalam bahasa Indonesia. Telah berulang kali kita mendapat kesempatan menyaksikan pertunjukan wayang kulit dalam bahasa Indonesia. Bahkan, pernah pula dalam bahasa Inggris. Dari pementasan-pementasan itu kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang disajikan itu sesungguhnya bukan pementasan utuh. Kaidah pementasan tidak atau belum dapat terpenuhi sebab yang diterjemahkan hanya dialog-dialog saja. Unsur-unsur seni lainnya yang bermedia bahasa, seperti: janturan, cerita, tembang, suluk, gerong, dan sinden tetap dalam keadaan aslinya, tidak diterjemahkan. Dengan demikian, keserasian dalam pementasan tidak terpenuhi hingga malahan dapat berbahaya bagi tujuan yang akan dicapai: popularisasi. Orang-orang

yang belum pernah mengenalnya tetap tidak akan merasakan daya tarik untuk menyukainya sebab kecuali segi keindahan seni yang sudah terganggu dialog-dialog dalam bahasa Indonesia itu pun kurang dapat mengungkapkan ajaran hidup utama yang terangkum dalam teater wayang itu sendiri. Sebaliknya, orang yang sudah terlanjur suka dan sudah dapat memahaminya untuk memupuk kecintaannya pada wayang sebab lalu merasakan kehambaran dalam cita rasanya. Lebih-lebih jika dialog dalam bahasa Indonesia itu masih dalam lagu dan nada bahasa daerah. Jadi, penerjemahan semacam ini dikhawatirkan bukan akan membantu pengembangan, melainkan malahan sebaliknya akan mempercepat kemusnahan saja. Akan tetapi, mungkin juga ada yang kemudian akan bertanya. Bila sekarang ini kita sudah memiliki Wayang Betawi, tidaklah ini berarti bahwa sesungguhnya hanya diperlukan satu langkah lagi untuk dapat mencapai pergelaran wayang kulit dalam bahasa Indonesia? Itu memang dapat terjadi, tetapi satu langkah yang akan dilangkahkan itu pasti suatu langkah yang luar biasa besar dan beratnya. Biasanya orang yang melangkah terlalu lebar justru akan kehilangan keseimbangannya sehingga akan jatuh sendiri.

2. Terjemahan pementasan teater-teater tradisional yang bahasanya berdekatan dengan bahasa Indonesia. Di antara teater-teater daerah ada yang bahasanya mirip-mirip bahasa Indonesia, dalam arti tidak terlalu jauh bedanya, yaitu *randai* dari Sumatra Barat, *mendu* dari Riau, *mamanda* dari Kalimantan. Terjemahan pementasan, ditinjau dari segi teaternya, memang mungkin dapat dilakukan. Namun, karena spontanitas menjadi berkurang, barangkali masih juga menimbulkan kekakuan. Sifat-sifat khas kedaerahannya juga akan dapat terganggu dan jika sifat kedaerah itu hilang, sifat tradisionalnya tentu akan hapus pula.

Popularisasi dengan bahasa Indonesia akan dapat ditempuh dengan cara membuat uraian atau ringkasan, terpisah dari pementasan, yang memuat cerita atau lakon yang dipentaskan. Atau dengan cara memberikan penjelasan tertulis dalam bahasa Indonesia mengenai adegan-adegan yang sedang dimainkan. Dengan jalan ini agaknya orang yang belum pernah mengenal teater tradisional tertentu akan merasa tertarik dan ingin memahaminya. Bukankah orang-orang asing pun mulainya tertarik juga bukan karena terlebih dahulu menyaksikan pementasan terjemahan, tetapi hampir selalu karena membaca uraian-uraian yang disajikan secara menarik?

Hingga kini yang kita miliki memang masih selalu teater tradisional daerah Bali, teater tradisional daerah Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Belum ada teater tradisional Indonesia. Perlukah kita mengarahkan diri ke situ? Yang perlu sesungguhnya adanya usaha merintis terwujudnya teater asli Indonesia.

Bila kita ingin benar mempunyai teater asli Indonesia, maka sebaiknya kita membuat bentuk tersendiri. Dasar-dasarnya seperti teater tradisional, yang dapat mencerminkan kepribadian Indonesia, dan dipentaskan memakai bahasa Indonesia baku. Untuk mencapai teater semacam ini tentulah perlu diadakan penggarapan tersendiri.

Ada satu contoh yang baik kita ambil ialah pementasan apa yang sekarang dikenal dengan nama *sandima (sandiwara mamanda)*, yang pada masa kini sering dilakukan di sekitar Samarinda. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, yang masih juga sedikit-sedikit tercampur bahasa Melayu.

Cerita yang disajikan masih seperti yang dipentaskan dalam *mamanda*, tetapi sekarang makin banyak mengambil dari kejadian-kejadian sehari-hari, misalnya, tentang seorang pemimpin rakyat yang pantas dijadikan teladan. Alat musik yang dipakai, bila ada, tetap memakai yang tradisional (biola, gendang, gong, dan semacam seruling). Pada waktu akhir-akhir ini, berkat kemajuan teknologi digunakan juga kaset (rekaman musik tradisional) dan bahkan ada yang sangat maju hingga memakai rekaman-rekaman lagu-lagu masa kini.

Menurut keterangan yang diperoleh, sudah ada yang memakai rekaman lagu-lagu Elvi Sukaesih.

Jalannya pertunjukkan disesuaikan dengan sandiwara dengan cara membaginya dalam babak-babak. Akan tetapi, bagaimana pun juga masih tercampur dengan cara-cara tradisional. Misalnya saja dalam pembukaannya. Pada awal pertunjukan masih dipakai *ladun* atau *paladun*, yang dilakukan oleh 4 atau 5 orang, satu di antaranya menjadi kepalanya. Cara memperkenalkan diri sudah memakai bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada setiap awal babak baru selalu didahului dengan pengenalan adegan dan peran yang dipegang oleh masing-masing pemain. Untuk dapat menilai bahasa yang dipakai, di bagian akhir akan dilampirkan transkripsi rekaman dari salah satu pementasan.

Kalau sudah melihat *sandima* ini, lalu timbul pertanyaan apakah hal semacam ini masih dapat digolongkan pada teater tradisional? Lebih-lebih jika musik pengiringnya sudah diambil dari lagu-lagu pop masa kini.

Jikalau benar-benar kita menginginkan adanya pementasan teater tradisional dalam bahasa Indonesia, persiapannya pun harus baik betul. Yang mutlak harus ada lain adalah:

1. seorang ahli di bidang teater tradisional yang akan di-Indonesiakan itu;
2. ahli bahasa daerah yang dipakai dalam teater tradisional itu;
3. ahli bahasa Indonesia; dan
4. ahli di bidang musik yang mengiringi pementasan.

Masih ada satu model lagi yang harus dimiliki oleh masing-masing ahli tertentu di atas, yaitu ketekunan dan semangat kerja serta kekerasan kemauan mewujudkan teater tradisional terjemahan.

Tanpa ahli-ahli semacam itu mustahil akan tercapai keinginan di atas. Sesungguhnya, bila alasan penerjemahan teater tradisional itu hanya karena bahasa aslinya (bahasa daerah) sudah tidak dipahami lagi, demi popularisasi masih ada jalan lain yang dapat ditempuh, yaitu dengan menyederhanakan bahasanya. Tidak lagi perlu memegang teguh bahasa standarnya, tetapi menyesuaikan dengan bahasa yang berlaku dalam masyarakat masanya, tanpa mengurangi keindahan unsur-unsur seni sastranya.

Sesungguhnya, kita boleh berterima kasih dan bangga bahwa sekarang ini sudah ada segolongan seniman atau seniwati yang merintis jalan menuju ke arah pembaharuan atau penyegaran seni teater. Banyak percobaan-percobaan yang telah dibuat dan kita harapkan semoga dalam waktu yang tidak lama lagi mereka berhasil memberikan kepada kita semua suatu karya seni yang benar-benar dapat dinamakan teater Indonesia.

Kesimpulan

Dengan uraian dikemukakan di atas kiranya sekarang kita sudah akan dapat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

1. Teater tradisional manakah yang dapat dikembangkan dengan bahasa Indonesia?

Bila yang dimaksud dengan "mengembangkan" itu tidak langsung me-

ngenai pementasannya (terjemahan pementasan), bahasa Indonesia akan banyak sekali kegunaannya. Bahasa Indonesia akan banyak sekali manfaatnya dalam pengembangan teater tradisional dengan pengertian: pengenalan, penyebarluasan atau penuluran isi, serta makna ajaran yang berbobot, yang terkandung dalam teater-teater tradisional umumnya. Dengan pengertian ini, setiap teater tradisional dapat dikembangkan dengan bahasa Indonesia.

2. Untuk apa yang pernah dilakukan dalam hubungan ini?

Pementasan terjemahan pernah dilakukan; juga dengan maksud popularisasi dan adaptasi. Bahkan, tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja, tetapi juga dalam bahasa Inggris.

Dengan penuh penghargaan kepada mereka yang melakukannya yang —tentunya terdorong oleh rasa cintanya kepada kesenian daerahnya—, telah berusaha memperkenalkan kepada orang-orang yang dipandang perlu mengenalnya, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu masih terbatas pada suatu demonstrasi saja.

Suatu peragaan yang dapat diterima sebagai contoh atau suatu penajagan untuk mengetahui sampai di mana terjemahan pementasan itu dapat terlaksana. Kaidah pementasan masih tetap belum dapat dipenuhi sehingga sifat tradisionalnya dan sifat klasik kedaerahannya masih terdesak ke belakang.

Penerjemahan naskah-naskah drama atau cerita lakon sudah banyak dilakukan dan hal ini sudah dapat dikatakan berhasil. Terbitan-terbitan pada waktu akhir-akhir ini menunjukkan kemajuan yang pesat. Penulisan-nya sudah tidak terasa kaku lagi. Bukan saja berupa buku-buku yang khusus diterbitkan, melainkan juga surat-surat kabar dan majalah banyak yang secara teratur memuat saduran ringkasan atau lakon yang biasanya dimainkan dalam teater-teater tradisional. Dengan cara begini sudah terbukti dapat membangkitkan perhatian pihak-pihak yang semula masih merasa asing.. Bahkan, lebih daripada hanya cerita saja, sekarang telah banyak didapati tulisan-tulisan yang mengungkapkan latar belakang dan arti falsafahnya lakon-lakon itu.

3. Hambatan apa yang ditemukan dan bagaimana mengatasinya?

Untuk menerjemahkan naskah drama atau lakon kita perlukan sekali penerjemah-penerjemah yang terdidik dan terlatih. Harus diakui bahwa menulis atau menerjemahkan naskah sastra daerah ke dalam bahasa

Indonesia tidaklah semudah orang mengira. Untuk menngungkapkan hal-hal yang sifatnya tradisional orang harus mempunyai keahlian khusus. Lebih-lebih bila ia masih harus mengalihaksarakannya dahulu. Terjemahan dialog yang asli dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia sering dirasakan canggung sebab peristilahan-peristilahan sering sulit dicarikan kata-katanya yang tepat. Ungkapan-ungkapan sukar untuk diterjemahkan secara luwes.

4. Sarana apa yang diperlukan untuk menunjang usaha ini?

Dirasakan perlu adanya usaha peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia bagi mereka yang berhasrat menangani popularisasi teater-teater tradisional. Lebih baik kiranya kita mengaku kurang mampu berbahasa Indonesia daripada mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang belum dapat melayani kepentingan terjemahan ini. Selain itu, secara simultan hendaknya juga diadakan penelitian dan pendalaman mengenai bahasa-bahasa daerah yang digunakan dalam teater tradisional.

Untuk keperluan ini diperlukan adanya kerja sama yang baik antara ahli-ahli bahasa dengan ahli-ahli teater tradisional. Hal ini berarti terselenggaranya kerja sama antara lembaga-lembaga yang berwenang di bidang kebahasaan dan bidang kesenian.

Demikian kiranya jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan itu. Semoga uraian ini dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pembinaan Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1977. *Pekan Teater Tradisional*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1977. *Seni Teater*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975. *Hasil Lokakarya Tenaga Pembina Kesenian Seluruh Indonesia*. Jakarta.
- Kasim Achmad, A. 1977. *Teater Tradisional di Indonesia*. Jakarta.
- , 1978. *Penggalian, Pemeliharaan dan Pengolahan Seni Teater di Indonesia*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai. 1976. *Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur*. Kutai.
- Prijono. 1964. *Glimpses of Indonesia Education and Culture*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Proyek Pembinaan Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. *Bimbingan dan Pengarahan Teknis Kesenian*. Jakarta.
- Proyek Pusat Pengembangan Kebudayaan Kalimantan Timur. 1977. *Kumpulan Naskah Kesenian Tradisional Kalimantan Timur*. Samarinda.
- Seminar Pedalangan Wayang Purwa. 1968. *Beberapa Gagasan mengenai Alih Bahasa dan Adaptasi Wayang Purwa*. (Pandam Guritno S.H., M.A.) dan *Gagasan mengenai Alih Bahasa dan Adaptasi (penyesuaian) Wayang Purwa* (Ir. Sri Mulyono). Jakarta.

Wijaya dan F.A. Sutjipto. 1977. *Ketoprak*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kesenian. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Rekaman-rekaman hasil wawancara dan film-film teater tradisional.

LAMPIRAN

Agar mempunyai sedikit gambaran mengenai pelaksanaan pementasan *sandima* di wilayah Samarinda di bawah ini akan diberikan sedikit gambaran, khusus mengenai pemakaian bahasa Indonesianya.

Pertunjukkan dimulai dengan *ladun* atau *paladun*, yang terdiri dari 4 atau 5 orang, seorang di antaranya menjadi pemimpinnya.

Pemimpin *ladun* memperkenalkan diri:

"Abidin Muhammad tersebut saya punya nama, dalam ceritera malam ini menjabat sebagai kepala ladun",

Kemudian ia pun memperkenalkan kawan-kawan *paladun* lainnya dan berkata:

"Saudara-saudara sekalian, marilah kita mulai perladunan kita".

yang dijawab oleh kawan-kawannya dengan:

"Dipersilahkan Saudara memulainya".

Ia lalu mulai dengan iringan musik ia membacakan pantun:

*"Inilah kembang surya dinata,
Tumbuh di kolam jembatan kaca,
Inilah malam bermain kita,
Kita berhenti habis ceritera"*.

Lain-lain *paladun* menyusunnya dengan berpantun sambil menari-nari:

*"Bukan kain sembarang kain,
Kain terbuat dari beledru.
Bukan main sembarang main,
Untuk meramaikan pengantin baru"*.

Setelah pembukaan dianggap selesai mulailah cerita intinya. Pada babak pertama keluar seorang pemain dengan peran menteri bersama seorang lagi sebagai rekannya. Diulang lagi dengan perkenalan masing-masing:

"Dalam ceritera pada malam ini saya menjabat sebagai menteri pertama di Kerajaan Bagdad".

Menteri kedua pun memperkenalkan diri dan selanjutnya mereka bergaya seolah-olah mempersiapkan balai persidangan karena Sang Raja akan segera hadir. Sementara itu, musik terus berbunyi. Seorang pemain selaku pahlawan keluar dengan gaya sangat gagah dan berkata,

"Syaiful Alam tersebut saya punya nama dalam cerita pada malam ini, menjabat sebagai pahlawan di Kerajaan Bagdad. Sudah duapuluh lima tahun saya memangku jabatan ini, belum pernah membuat salah dan tercela. Paduka Sultan sangat sayang dan percaya kepada saya, yang selalu sukses melaksanakan tugas".

Bahasa raja dalam pementasan ini saya cukilkan sebagai berikut:

"Dalam ceritera pada malam ini tersebut beta punya nama Raja Alamsyah, yang bermahkota tinggi di Kerajaan Bagdad".

Titahnya kepada menteri dan pembantu-pembantunya:

"Mamanda Mangkubumi dan Mamanda Wajir, Pahlawan yang gagah berani serta kedua menteriku yang kuharapkan serta berjasa. Sengaja kalian beta kumpulkan di dalam sidang ini untuk suatu maksud yang perlu beta mufakatkan bersama kalian. Beta perlu mendengar pendapat dari sidang ini, sekali pun beta sendiri pun berhak memutuskannya. Namun, sebagai raja yang bijaksana perlu menghargai pendapat dan buah pikiran para Mangkubumi, Wajir, dan Pahlawan serta menteri sekalian, karena mamanda semua turut berjasa dalam kerajaan ini".

Jawab mereka sebagai berikut.

"Harap diampun Daulat Tuanku yang bermahkota tinggi serta berkuasa penuh. Patik amat bangga mempunyai seorang raja yang adil bijaksana. Segala titah baginda Patik junjung tinggi di atas batu kepala Patik".

Demikianlah, sedikit cukilan bahasa yang digunakan dalam *sandima*, yang pada akhir-akhir ini mulai banyak dipentaskan oleh angkatan muda di sekitar Samarindah. Bila masih mungkin mereka tetap menggunakan iringan musik tradisional atau rekamannya, tetapi jika terpaksa sudah ada yang berani memakai iringan musik pop dangdut.

Pertanyaan balik saya sekarang: Apakah ini yang dimaksud dengan pengembangan teater tradisional dengan bahasa Indonesia? Kiranya hal ini perlu mendapat sorotan khusus.

BAHASA INDONESIA DALAM BACAAN ANAK-ANAK

Sapardi Djoko Damono

Universitas Indonesia

- I. (a) HARIMAU: He! Nenek Biruang, hari ini kau akan kugigit sampai mampu!
- BIRUANG: Hm! Kau boleh coba2 mendekat kesini. Akan kuhantam kau sampai ter-kuing2!
- HARIMAU: Aku tidak gentar dengan telapak-tanganmu itu!
- BIRUANG: Kau boleh coba2 datang kesini!
(Nenek dan Biruang Kecil, 1976:6)
- (b) Hakim agung Khairustam, adalah seorang qadhi yang terkenal adil dan bijaksana. Lagi pula sangat luhur budi pekertinya. Oleh karena itulah semua orang mencintainya. Begitu pula Sultan yang memerintah negeri itu.
(Endang Basri Ananda, 1975).
- (c) Banyak tempat-tempat di Tanah air kita ini yang mengandung riwayat. Di Jawa Barat, orang mengenal riwayat asal-usul gunung Tangkuban Perahu. Di Jawa Tengah, gunung Tidar diriwayatkan sebagai "paku yang menancap Pulau Jawa, agar tetap pada tempatnya."
(S.A. Bandono, 1976:3)
- (d) Karena kasihnya kepada anak, pergi jugalah ibu Joko Kendil keesokan harinya ke istana raja. Dengan hati resah dan bimbang. Konon, raja sangat bijaksana dan memperbolehkan rakyatnya memasuki istananya untuk menyampaikan setiap keinginan. Ibu Joka Kendil sementara memasuki istana yang agung itu.
(Suyadi dan Kurnain Suhardiman)
- (e) Sementara itu, dalam pondoknya yang terletak di seberang hutan, Nenek sedang berbaring di atas ranjang. Beliau sengaja

menghadap ke jendela terbuka. Karena ia tahu, bahwa cucunya akan datang menyambanginya hari ini.

(Yan Widjaja)

- (f) Badannya pendek gemuk dengan perut buncit melembung ke depan. Lehernyapun pendek bergelambir. Ia adalah seorang panglima yang paling setia sampai ke tulang sumsumnya kepada raja Bongak. Sayang otaknya kurang cerdas. Kalah dengan Datuk Hitam yang jadi penasehat Raja Bongak. Datuk Hitam seorang yang culas. Hatinya busuk suka berkhianat. Tapi sangat tamak akan mas dan perak.
(Zubir Mukty, 1976:11)
- (g) Bertambah keras, suara tertawa para putri, sedang Sang mempelai putri hanya tersenyum simpul tertunduk kepala tanpa menyahut, tetapi di dalam hati menyetujuinya, Sang Resi tergelak-gelak, demikianlah juga Sang Raja tertawa keras-keras.
(S. Wiroatmojo, 1976:31)
- (h) Sebenarnya nama gelodok itu nama sarang aslinya. Lebah biasanya membuat sarang di pohon yang tinggi atau wuwungan rumah . . . ”
(Darmawan Tjokrokusumo, 1977:20)
- (i) Jauh sebelum beliau datang, maka rumah kami telah dibersihkan.
(Satmowie, 1978:3)
- (j) Beberapa waktu sebelum meninggal aku sempat merekam suara Kakek ke dalam pita tape recorder.
(Surasono, 1977:18)

II. Kutipan-kutipan di atas diambil dari berbagai cerita anak-anak yang ditebitkan berupa buku atau dimuat di majalah anak-anak. Bacaan anak-anak sebenarnya tidak hanya berupa cerita anak-anak, tetapi mencakup juga puisi dan ilmu pengetahuan. Kertas kerja ini sengaja membatasi diri pada cerita anak-anak sebab penulis beranggapan bahwa bacaan jenis inilah yang paling banyak menarik minat penerbit. Puisi dan ilmu pengetahuan belum begitu banyak beredar sebagai buku; kedua jenis bacaan itu biasanya hanya dimuat pada majalah-majalah anak-anak dan lembaran-lembaran khusus bagi anak-anak di pelbagai majalah dan koran.

Cerita anak-anak dimaksudkan sebagai bacaan bagi pelajar sekolah dasar meskipun bacaan serupa itu dapat juga memberikan ke-

senangan dan manfaat kepada para remaja dan orang tua. Dengan membaca cerita semacam itu anak-anak diharapkan dapat memperoleh setidaknya dua manfaat, yakni penajaman imajinasi dan peningkatan penguasaan bahasa. Yang dibicarakan di dalam kerja kerja ini adalah manfaat yang kedua itu dengan segala seluk-beluknya. Peningkatan penguasaan bahasa dianggap sebagai pokok yang cukup penting dibicarakan sebab jam-jam dalam kelas tentu saja belum cukup membekali anak-anak dengan penguasaan bahasa yang memadai. Dalam hal ini bacaan memang merupakan pembantu utama, di samping tentu saja pergaulan di dalam dan di luar keluarga. Akan tetapi, apakah bahasa Indonesia yang dibutuhkan anak-anak sama dengan yang kita butuhkan? Apakah bahasa dalam bacaan anak-anak tidak berbeda dengan bacaan kita sehubungan dengan, misalnya, kosa kata dan strukturnya? Dua kutipan berikut ini akan dapat membantu menjelaskan jawaban atas pertanyaan di atas.

Pengantar Redaksi

Selamat bertemu lagi dengan sahabatmu Tomtom, adik-adik yang manis!

Bagaimana pendapat kalian setelah Tomtom terbit seminggu sekali? Dengan senang hati Kak Daktur akan menerima saran-saran kalian, agar majalah mingguan Tomtom tambah asoiii dan mengasyikkan.

Bagaimana dengan hadiah mainan yang dihadiahkan oleh Tomtom nomor lalu? Cukup bagus dan mengasyikkan bukan? Pokoknya beres, masih banyak mainan Kak Daktur yang akan dihadiahkan buat kalian.

Selamat belajar (pesan Tintin agar Evaluasi belajar jangan dilewatkan).

Kak Daktur

Pengantar Redaksi

Pemukiman adalah titik awal tetapi sekaligus titik akhir. Dari sana kegiatan sehari-hari dimulai dan di sana pula diakhiri. Relevansi dari permukiman terletak di sini. Dan barangkali karena itulah maka perkataan "pulang" mengandung suatu pesona kejiwaan tertentu. Di sana terbayang suatu kedamaian, ketenteraman, kebebasan dan kelepasan dari hiruk pikuk hidup. Pesona ini telah menjadi nyanyian bocah sehari-hari: "Gelang si patu gelang". "home sweet home", atau "monggo sami mundur . . . sega liwet jang terong".

Aswab Mahasir

Dua kutipan di atas merupakan pengantar redaksi; yang pertama diambil dari majalah *Tomtom* Nomor 52 tahun 1977, yang kedua diambil dari majalah *Prisma* Nomor 6 tahun 1976. *Tomtom* adalah majalah anak-anak untuk sekolah dasar, sedangkan *Prisma* berisi tulisan ilmiah populer ringkasan hasil penelitian, survai, hipotesis, atau gagasan asli yang kritis dan segar. Kutipan dari majalah *Prisma* itu adalah alinea pertama dari lima alinea yang relatif panjang-panjang; alinea kedua, misalnya, tiga kali alinea yang dikutip di atas. Diksi, susunan kalimat, dan alinea, serta bahan pembicaraan kedua kutipan itu tampak jelas berlainan. Pengantar tulisan Aswab Mahasin, Redaktur *Prisma* itu, bermuatan serangkaian konsep yang dapat jelas hanya apabila disampaikan dalam bahasa Indonesia yang memberi kesan *terpelajar*. Jika dibandingkan dengan kutipan kedua itu, pengantar redaksi *Tomtom* tampak sangat sederhana.

Apakah perbedaan itu juga menunjukkan adanya perbedaan kualitas keterpelajaran kedua penulis? Tidak. Setidaknya berdasarkan kedua pengantar redaksi itu kita tidak dapat menarik kesimpulan bahwa Wahab Mahasin lebih terpelajar dari redaktur *Tomtom*. Kita hanya dapat mengatakan bahwa perbedaan itu ada karena pembaca *Tomtom* tidak sama dengan pembaca *Prisma*. Redaktur *Tomtom* berbicara kepada anak-anak sekolah dasar, sedangkan redaktur *Prisma* kepada selapis tipis kaum terpelajar yang berminat terhadap perkembangan nasional negeri ini. Anak-anak sekolah dasar membutuhkan diksi, susunan kalimat, dan bahan pembicaraan yang berbeda dari kita. Penulis bacaan anak-anak bertugas memahami hal ini.

- III. Pembicaraan kita di sini terbatas kepada cerita anak-anak, bacaan yang pada dasarnya merupakan karya sastra dan bukan karangan ilmiah populer. Apakah bahasa cerita anak-anak harus berbeda dari bahasa cerita orang tua? Apabila jawabnya adalah ya, apakah dengan demikian sastra membedakan usia? Sering kita dengar pernyataan bahwa pengarang harus menulis sesuai dengan cara yang dikehendaknya -- tidak peduli siapa nanti yang membaca tulisannya. Cara itulah yang menentukan nilainya sebagai pengarang.

Barangkali pernyataan itu benar, tetapi marilah kita mencoba melihatnya dari segi lain. Karya sastra besar sering dapat bermanfaat bagi siapa pun. Oleh karena itu, ia diterbitkan dalam beberapa edisi. Contoh yang tepat adalah *Gulliver's Travels* karya Jonathan Swift, se-

untuk memecahkan persoalan cara penyampaian pesan itu. Naskah cerita anak-anak yang masuk ke penerbit harus dianggap sebagai bahan mentah yang masih harus diolah; pengarang harus tidak berkeberatan apabila redaktur merombak bahasa yang dipergunakannya. Dari segi ini tampak bahwa tugas redaktur penerbit bacaan anak-anak lebih berat daripada redaktur penerbit buku sastra untuk orang dewasa. Dalam bacaan macam kedua itu bahasa dapat menunjukkan kepribadian pengarang dan oleh karenanya tidak sepatasnya diusik-usik.

Dalam pengolahan bahasa cerita anak-anak pengalaman dan pengetahuan redaktur benar-benar diuji. Ia harus menerima sebagian tanggung jawab pengarang yang telah diserahkan kepadanya. Dengan demikian, apabila ada kekurangan dalam bahasa bacaan anak-anak yang diterbitkan, kesalahan tidak dapat sepenuhnya ditimpakan kepada pengarang. Penerbit bacaan anak-anak yang baik akan memperhatikan ketelitian dan kecermatan bahasa buku-buku yang ditawarkan kepada anak-anak.

- IV. Sebagian besar bacaan anak-anak yang beredar sekarang ini mempergunakan ragam bahasa baku. Bahkan, bacaan bergambar pun berusaha menggunakan ragam itu meskipun tidak jarang menyebabkan percakapan antara tokoh-tokohnya terasa kaku. Pilihan itu barangkali disebabkan oleh sebagian besar kita beranggapan bahwa belum seluruh masyarakat kita memahami dan menguasai sepenuhnya bahasa Indonesia; kita pun berkesimpulan bahwa ragam bahasa baku merupakan pilihan terbaik untuk menyampaikan pesan secara tertib. Pilihan itu tentunya juga didorong oleh keinginan mendidik anak-anak agar mampu berbahasa Indonesia dengan tertib. Memang kemampuan itulah yang sangat diperlukan apabila kita berniat menghasilkan golongan terpelajar yang dapat menggunakan imajinasi dan pikirannya dengan efektif.

Beberapa penerbit seperti Pustaka Jaya, Balai Pustaka, dan Gramedia tampaknya menunjukkan perhatian khusus terhadap ketelitian dan ketertiban bahasa buku-buku terbitannya. Para redaktur majalah anak-anak seperti *Kawanku*, *Bobo*, dan *Si Kuncung* ternyata juga semakin teliti memeriksa bahasa karangan-karangan yang dimuatnya. Meskipun demikian, rupanya masih ada kesalahan atau kekurangan pada beberapa bagian cerita-cerita tertentu. Kutipan-kutipan dalam Bagian I karangan ini membuktikan bahwa kemampuan pengarang me-

nguasai bahasa Indonesia dan ketelitian redaktur masih harus ditingkatkan.

Kesalahan yang paling mengganggu adalah kesalahan ejaan seperti yang tampak pada kutipan (a). Percakapan antara harimau dan beruang itu diambil dari sebuah cerita bergambar; redaksi menerima naskah yang sudah siap tanpa dapat mengadakan perubahan. *Balloon dialogues* dalam cerita itu ditulis oleh penggambarannya sehingga kesalahan ejaan jelas menunjukkan bahwa pengarang (dan sekaligus penggambarannya?) tidak menguasai ejaan yang disempurnakan. Dalam kutipan itu kata ulang masih dilambangkan dengan angka 2, kata *dengan* masih disingkat menjadi *dgn*, dan kata depan masih disambung dengan kata yang mengikutinya. Barangkali si pengarang beranggapan bahwa terbatasnya ruang untuk *balloon dialogues* telah memaksanya untuk menyingkat kata ulang dan merapatkan kata depan, tetapi demi anak-anak sebaiknya ia memperkecil saja huruf-huruf yang dipergunakannya agar tidak perlu mengorbankan ejaan.

Ejaan memang merupakan penghalang penting dalam pengembangan bahasa Indonesia akhir-akhir ini. Dalam hampir semua kutipan dalam Bagian I tampak bahwa penggunaan tanda baca belum sepenuhnya beres. Dalam kutipan-kutipan (b), (c), (d), (e), dan (g) penggunaan koma dan titik masih harus diperbaiki agar susunan kalimat-kalimatnya tidak terganggu. Koma dalam kalimat pertama (b), misalnya, sebaiknya dihilangkan. Kalimat *Hakim agung Khairustam* adalah seorang kadi yang terkenal adil dan *bijaksana* tentunya lebih baik daripada *Hakim agung Khairustam, adalah seorang qadhi yang terkenal adil dan bijaksana*. Kata *qadhi* sebaiknya juga disesuaikan saja dengan ejaan kita.

Penggunaan huruf kapital ternyata juga belum sepenuhnya dikuasai beberapa pengarang. Dalam bagian (c), misalnya, *Tanah air* cukup ditulis *tanah air* saja; dalam (e) kata *Nenek* sebaiknya ditulis *nenek* saja, kecuali apabila *nenek* adalah nama diri. Penggunaan kata penghubung tidak jarang merepotkan para penulis kita. Dalam (f) dua kalimat terakhir berbunyi *Hatinya busuk suka berkhianat. Tapi sangat tamak akan mas dan perak*. Kalimat kedua seharusnya menjadi bagian kalimat pertama, dan kata *tapi* tidak dipergunakan setepat-tepatnya. *Busuk, berkhianat, dan tamak* semuanya mengandung nilai negatif. Oleh sebab itu, penggunaan *tapi* kurang tepat di sini. Kutipan (i) juga menunjukkan penggunaan kata penghubung yang sebenarnya tidak berfungsi sama

sekali. Kata *maka* dalam kalimat itu mengganggu susunannya.

Salah satu ciri bacaan anak-anak adalah penggunaan kalimat-kalimat sederhana dan pendek. Akan tetapi, pemenggalan kalimat menjadi pendek-pendek secara sembarangan tentu saja tidak dapat dibenarkan. Kutipan (f) membuktikan bahwa pemenggalan yang dilakukan penulis malah menjadikan alinea itu tidak lancar. Demikian pula halnya kutipan (d). Kalimat kedua yang tidak lengkap itu sebaiknya digabungkan saja dengan kalimat yang mendahuluinya. Pemilihan kata yang tidak tepat dan penyusunan kalimat yang kurang cermat menyebabkan beberapa kalimat mengandung arti yang meragukan meskipun apabila dihubungkan dengan konteks keseluruhan artinya menjadi jelas. Dalam kutipan (c) dikatakan bahwa gunung Tidar adalah *paku yang menancapkan Pulau Jawa, agar tetap pada tempatnya*. Imaji visual yang disarankan oleh kalimat itu tidak jelas sebab sebenarnya yang *menancap* adalah *paku*, dan bukan *Pulau Jawa*. *Paku* (gunung Tidar) itu menancap di Jawa, bukan pulau itu yang ditancap paku. Dalam kutipan (j) yang berbunyi *Beberapa waktu sebelum meninggal aku sempat merekam suara Kakek ke dalam pita tape recorder.*; penafsiran yang paling dekat adalah si aku yang meninggal. Sebaiknya kalimat itu disusun kembali menjadi "Beberapa saat sebelum kakek meninggal aku sempat merekam suaranya ke dalam *tape recorder*." (Kata *pita* dihilangkan saja sebab artinya sama dengan *tape*, dan *tape recorder* dicetak miring agar tidak dibaca menurut ejaan bahasa Indonesia).

Campur tangan bahasa daerah tidak jarang tampak dalam bacaan anak-anak. Kata *wuwungan* dalam kutipan (h) berasal dari bahasa Jawa; kata yang baku untuk itu adalah *bubungan*. Campur tangan bahasa daerah pada dasarnya merupakan halangan yang sering sulit ditanggulangi karena kebanyakan penulis kita adalah dwibahasawan. Apabila penguasaan bahasa daerahnya melebihi penguasaan bahasa Indonesianya, kemungkinan adanya campur tangan menjadi lebih besar. Bahasa-bahasa daerah (dan asing) memang dapat memperkaya bahasa Indonesia, terutama dalam segi kosa kata, tetapi campur tangan yang mengaburkan penafsiran sebaiknya dihindarkan.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tugas redaksi penerbit bacaan anak-anak dalam menanggulangi kekurangan-kekurangan seperti yang disebutkan di atas itu memang berat. Mereka harus selalu berusaha mengembangkan bahasa kokoh yang melancarkan sampainya pesan

pengarang kepada anak-anak. Dalam usaha itu bantuan dan pengertian pengarang sangat diperlukan.

- V. Bacaan anak-anak bisa menjadi alat bantu penting dalam usaha kita mengembangkan kecerdasan, imajinasi, dan kemampuan berbahasa anak-anak. Pengembangan kedua hal yang disebut terakhir itu tidak begitu banyak mendapat perhatian di sebagian besar sekolah dasar di negeri ini. Pelajaran menggambar, menyanyi, dan mengarang umumnya dianggap sebagai buku utama. Kita pun selama ini rupanya tidak begitu mempedulikan pelajaran kesenian itu. Kita meluangkan waktu untuk ikut meributkan perubahan metode pengajaran berhitung, tetapi kita tidak pernah mencoba mengetahui apakah selama ini telah terjadi perubahan-perubahan dalam metode pengajaran menggambar, menyanyi, dan mengarang.

Membaca cerita anak-anak merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan anak-anak kita dari "keringnya" pelajaran yang diterima dalam dinding-dinding sekolah. Sayang sekali bahwa perpustakaan masih merupakan suatu keajaiban di sekolah dasar kita. Beberapa sekolah dasar elit memang telah memiliki perpustakaan yang cukup baik, tetapi di sekolah-sekolah semacam itulah perpustakaan relatif tidak begitu diperlukan sebab pelajaran-pelajarannya adalah anak-anak keluarga berada yang mampu membeli bacaan. Di desa-desa dan kota-kota kecil tidak pernah mengenal bacaan anak-anak; perpustakaan tak ada dan toko buku pun langka. Mungkin sekali kebanyakan sekolah dasar kita pernah menerima kiriman beberapa puluh judul buku dari pusat, tetapi bacaan yang disimpan di lemari kantor sekolah bukanlah perpustakaan — apalagi apabila buku-buku itu tidak boleh dipinjam dengan alasan nanti rusak atau hilang.

Banyaknya judul cerita anak-anak dan penerbit yang tertarik untuk memproduksinya menunjukkan bahwa minat terhadap bacaan anak-anak meningkat. Konsumennya tentulah anak kota besar, terutama Jakarta. Jumlah majalah anak-anak juga meningkat. Jumlah majalah dan koran yang menyediakan lembaran-lembaran khusus bagi anak-anak juga bertambah seolah-olah koran-koran dan majalah-majalah itu belum merasa lengkap tanpa lembaran anak-anak. Meningkatnya minat terhadap bacaan anak-anak itu menggoda kita untuk mengajukan usul kepada staf redaksi lembaran anak-anak di majalah dan koran untuk

memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menulis. Kegiatan membaca biasanya diikuti dengan kegiatan manusia -- tidak dengan maksud untuk menjadi pengarang, tetapi sekedar untuk mempercepat proses peningkatan penggunaan berbahasa.

Langkah yang diambil oleh para redaktur lembaran-lembaran koran dan majalah untuk memuat cerita, puisi, dan ilmu pengetahuan sudah besar. Sudah seharusnya anak-anak kita diperkenalkan dengan berbagai ragam bahasa seawal mungkin. Oleh sebab itu, sudah waktunya sekarang penerbit-penerbit memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penerbitan buku-buku ilmu pengetahuan dan puisi anak-anak. Apabila semuanya itu dilakukan sebaik-baiknya, besar kemungkinan tidak sia-sialah harapan kita untuk menghasilkan generasi yang memiliki ketajaman imajinasi, kecerdasan, nalar, dan keterampilan berbahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Endang Basri. 1975. *Nenek yang Cerdik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bandono, S.A. 1976. *Sendang Polaman*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mukty, Zubir. 1976. *Puteri Tanjung Menanti*. Jakarta: PT Katharina Utama Corp.
- Sanggar Karya, Cergam teladan anak2. 1976. *Nenek dan Biruang Kecil*. Jakarta.
- Satmowie. 1978. *Pemberani*. Jakarta: Yayasan Kawanku.
- Suyadi dan Kuranin Suhardiman. 1977. *Joko Kendil*. Jakarta: Djembatan.
- Surasono. 1977. "Suara Kakek". *Tomtom*. IV. 52.
- Tjokrokusumo, Darmawan. 1977. *Lebah Paman Wawan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Wiratmodjo, S. 1976. *Naga Baru Kelinting*. Jakarta: Balai Pustaka.

orang pujangga Inggris. Swift tidak menulis cerita itu untuk anak-anak; dan sekarang pun di sini kata dapat menemukan edisi Indonesia cerita itu. Dalam perubahan dari satire menjadi cerita anak-anak itu, nama-nama tokoh, latar dan cerita tidak banyak mengalami perubahan; yang diubah secara mendasar adalah bahasanya. Perubahan itu menyebabkan sifat bacaan itu menjadi sama sekali berbeda.

Hal yang hampir serupa terjadi juga pada epos. *Mahabharata* dan *Ramayana*. Kedua epos itu telah mendapatkan bentuk yang bermacam-macam di negeri ini, mulai dari komik sampai ke renungan filsafat. Bagian *Mahabharata* yang bernama *Bhagavat-gita*, misalnya, hampir tidak dikenal anak-anak sebab pesan yang disampaikannya dianggap tidak akan dapat diserap anak-anak; dan tentunya usaha untuk menyampaikan pesan luhur itu dalam bahasa yang sesuai dengan dunia anak-anak juga sia-sia. Demikianlah, penulis yang ingin menyediakan bacaan bagi anak-anak seharusnya pandai-pandai memilih bahan dan cara penyampaian yang dapat diterima pembacanya. Kemampuan memilih itu membutuhkan pengalaman dan pengetahuan.

Tidak semua penulis bacaan anak-anak memiliki pengalaman dan pengetahuan itu. Nama-nama seperti Suhanto SA, Mansur Samin, dan Umar Kayam dikenal di bidang sastra sejak lama; mereka juga menulis cerita anak-anak. Dalam menjalankan tugasnya yang kedua itu rupanya mereka sepenuhnya menyadari untuk siapa mereka menulis. Mereka harus menyederhanakan pesan dan oleh karena itu harus pula menyederhanakan bahasanya. Penulis lain seperti Danarto, misalnya, boleh menghasilkan karya eksperimental apabila menulis cerita pendek untuk *Horison*, tetapi ia harus menyesuaikan diri dengan dunia anak-anak apabila menyerahkan tulisan kepada redaktur *Kawanku*. Cerita pendeknya yang dikumpulkan dalam *Godlob* pasti dikembalikan apabila dikirirkannya kepada majalah anak-anak itu sebab pesan dan cara penyampaian berada di luar dunia anak-anak.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pembaca memainkan peranan yang sangat penting dalam produksi bacaan. Kesulitan timbul apabila ada pengarang yang mempunyai pesan bagus bagi anak-anak, tetapi tidak pandai menyampaikannya dalam bahasa yang sesuai untuk itu. Kesulitan demikian harus dipecahkan oleh penerbitan. Dalam hal penerbitan cerita anak-anak penerbit juga mempunyai tugas yang penting. Penerbit yang baik biasanya memiliki staf redaksi yang kuat

kesempatan-kesempatan yang lowong, menghentikannya di suatu bab dan kemudian membaca kembali pada kesempatan lain, membaca terus atau mengulangi kembali bagian-bagian yang sudah kita baca, tetapi yang belum kita pahami dengan baik. Pokoknya cara penikmatannya sama sekali bergantung kepada pembaca. Lain halnya dengan sebuah pertunjukan teater atau film. Kita tidak dapat menghentikan pertunjukan begitu saja dan minta bagian yang tidak begitu dipahami supaya diulang. Kita harus menikmatinya sampai habis dan keluar dari gedung pertunjukan dengan penuh pertanyaan atau dengan kepuasan yang cukup. Sifat penyajiannya ini memaksa penulis dialog teater atau film menggunakan bahasa yang lebih langsung dan yang dapat ditangkap penonton pada saat ia diucapkan.

Dalam soal bahasa, teater dan film adalah semacam parasit. Ia mempergunakan bahasa yang sudah ada dan menyajikan bahasa dalam bentuk-bentuk yang lumrah dalam suatu zaman. Ia merupakan pedagang yang menjual barangnya secara borongan, yang buruk dan yang baik sekali pukul. Ia akan menyebarkan bahasa: segala macam kebiasaan yang baik dalam bahasa dan juga segala macam salah kaprah. Secara kasarnya dapat diambil kesimpulan bahwa dalam soal bahasa teater dan film adalah hasil penggunaan bahasa masyarakat. Makin baik bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat akan lebih baik dan terang pula bahasa yang dipergunakan dalam film dan teater.

Terasa Ada, Terkatakan Tidak

Saya tadi telah menghukum film dan teater sebagai parasit dan benalu yang betul-betul hidup dari bahasa orang banyak dan tingkah laku bahasa suatu bangsa. Hukuman ini sebetulnya terlalu berat. Dalam penggunaan kata-kata memang ia hidup dari perbendaharaan yang ada. Ini adalah suatu disiplin atau kungkungan yang dipaksakan oleh medium seni yang ia pilih. Sungguhpun ia terkungkung oleh perbendaharaan yang ada, ia menghadapi sebuah tantangan besar karena salah satu ukuran buruk baiknya penulis dialog untuk sebuah drama atau film adalah kesanggupannya memindahkan perasaan-perasaan baru, nuansa-nuansa pikiran yang belum biasa diucapkan tetapi sudah dihayati oleh masyarakat secara nyata ke dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan wajar kedengarannya. Dengan demikian, ia telah membantu menggeser batas-batas dunia perasaan dan pemikiran yang dikomunikasikan dengan bantuan ucapan ke daerah-daerah yang lebih jauh.

PENERJEMAHAN KARYA SASTRA TRADISIONAL KE DALAM BAHASA INDONESIA

I Gusti Ngurah Bagus

Pendahuluan

Sebelum kami memasuki acara pokok yang menjadi pembahasan dalam kertas kerja ini, izinkanlah terlebih dahulu kami mengemukakan satu dua hal yang berhubungan dengan keterbatasan kertas kerja ini. Pertama, dapatlah kami sebutkan di sini tentang isi kertas kerja ini yang tidak berpijak pada pembahasan beberapa sastra daerah, melainkan terbatas hanya membicarakan sastra Bali tradisional saja. Kedua, adalah berhubungan dengan masalah pokok dari kertas kerja ini, yaitu mengenai penerjemahan yang bagi kami sendiri, karena belum pernah memperoleh suatu pendudukan yang khusus mengenai masalah tersebut, tentunya belum dapat menyajikan permasalahannya yang tepat. Apa yang disajikan dalam kertas kerja ini, hanyalah berdasarkan hasil dari pengalaman praktis dalam menerjemahkan beberapa karya tradisional Bali ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sudah dapat dibayangkan bahwa suatu isi yang berbobot tidak akan dapat ditarik dari kertas kerja ini sehingga untuk melengkapinya diharapkan tanggapan serta pendapat dari para peserta.

Kami mengharap hasil diskusi yang demikian itu dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat untuk dapat dipakai sebagai pedoman dalam menerjemahkan karya sastra tradisional ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, usaha kita ini akan dapat menunjang pembangunan yang tengah kita laksanakan, terutama untuk mensukseskan pembangunan dalam bidang kebudayaan, khususnya sumbangan daerah terhadap perkembangan kebudayaan nasional.

Ruang Lingkup Sastra Bali Tradisional

Agar masalah penerjemahan itu menjadi jelas, ada baiknya terlebih dahulu dibicarakan mengenai apakah yang dimaksudkan orang dengan sastra Bali tradisional itu. Di Bali, seperti juga dengan sastra daerah lainnya, dalam sejarah sastranya dikenal adanya sastra Bali tradisional (*kasusastraan Bali purwa*) dan sastra Bali modern (*kesustraan Bali anyar*). Adanya pembagian seperti di atas ini, adalah akibat dari perkembangan sastra Bali. Sastra Bali tradisional sejarah pertumbuhannya meliputi jangka waktu yang amat panjang, sangat mungkin perkembangannya itu telah mulai dari zaman prasejarah yang berlangsung hingga abad XX, sedangkan sastra Bali modern, walaupun kerdil, sejarah perkembangannya mulai tumbuh pada tahun-tahun tiga puluhan hingga pada masa ini.

Sastra Bali tradisional itu, kalau dilihat dari bentuk penyajiannya dapat dibagi atas sastra lisan (*kasusastraan gantian*) dan sastra tulis (*kasusastraan sesuratan*). Kedua bentuk sastra ini, selain ada perbedaan ada pula persamaannya. Agar masalah ini menjadi jelas, bentuk sastra itu masing-masing akan dibicarakan lebih renik sebagai tersebut di bawah ini.

Sastra Lisan

Dalam bagian ini yang akan diuraikan hanya dua jenis saja ialah sastra lisan dalam bentuk bebas yang disebut dongeng rakyat (*satua*). Biasanya dongeng ini tidak panjang, boleh dikatakan panjangnya sama dengan cerita pendek dalam bahasa Indonesia, yang diceritakan secara lisan atau *oral* oleh pendongeng (*tukang satua*). Di antara pendongeng itu ada juga yang memang profesional. Namun, mereka umumnya adalah kerabat dari anak yang bersangkutan, mungkin nenek atau orang tuanya. Dongeng itu, diceritakan pada malam hari menjelang anak itu tidur, sedangkan untuk mendongeng pada siang hari adalah tabu dalam masyarakat Bali.

Seperti juga dengan dongeng rakyat lainnya, dongeng Bali pun mempunyai struktur, yang secara garis besarnya dapat dibagi ke dalam alur pendahuluan, alur konflik, dan alur penyelesaian. Biasanya struktur itu tidak kompleks, boleh dikatakan sederhana dan jelas dapat dilihat.

Seperti juga dengan sastra lisan lainnya, sastra Bali pun mengenal jenis fabel, legende, dan mite, misalnya ada yang menceritakan tentang ayam, lutung, tokoh Kebo Iwa, tentang asal mula padi, dongeng-dongeng jenaka, dongeng panji dan sebagainya.

Tiap-tiap jenis dongeng itu, mempunyai beberapa variasi yang berbeda menurut tempat dan pendongengnya. Semenjak dahulu dongeng rakyat itu telah dikumpulkan oleh para peneliti, dan sebagian besar kini hasil pencatatan itu disimpan dalam perpustakaan yang bernama Gedong Kirtya, Singaraja.

Oleh karena dongeng itu disampaikan secara oral, maka dongeng itu mempunyai gaya khas, berbeda dengan gaya sastra tulis. Mengenai hal itu, belum ada penelitian yang membahas secara mendalam dan untuk sementara gaya itu kami sebut gaya tutur (Bandingkanlah dengan F. Boas, 1955:303). Adapun ciri-ciri utamanya, antara lain sebagai berikut.

1. Adanya dialog antara pendongeng (*tukang satua*) dengan pendengar. Dialog ini biasanya terjadi pada permulaan orang mendongeng dan sering juga diulang kembali pada tengah-tengah cerita. Contohnya sebagai berikut.

Pendongeng : *Ada kone tutur-tuturan satua, I Tiwas teken I Sugih.*

"Maan dong keto!"

Terjemahannya : Konon, tersebutlah sebuah dongeng I Tiwas dan I Sugih. "Dengarkanlah".

Pendengar : *"Maan".*

Terjemahannya : "Ya, saya mendengarkan." Atau kalau di tengah cerita berarti 'lanjutkan'.

Dialog ini agaknya dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian si pendengar agar ia mendengarkan cerita itu.

2. Biasanya dalam permulaan dongeng, terdapat bentuk kalimat yang tetap sebagai berikut : *Ada kone tutur-tuturan satua*, atau dalam variasi lain : *Ada kone orah-orahan satua* yang kedua-duanya kami terjemahkan secara idiomatik, *konon tersebutlah sebuah dongeng.*

Dalam hubungan ini ada dua hal yang perlu dibicarakan, yaitu kata *kone* dan kata ulang *tutur-tuturan* atau *orah-orahan*.

Kata *kone* ini dapat diterjemahkan dengan kata 'konon' dalam bahasa Indonesia. Kata *kone* akan berulang kali kita dengar pada waktu dongeng itu diceritakan. Hal ini agaknya disebabkan dongeng itu bukanlah ciptaan si pendongeng (*tukang satua*), melainkan asalnya dari orang lain. Jadi, sifatnya turun-temurun.

Kata ulang *tutur-tuturan* atau *orah-orahan* adalah berasal dari morfem *tutur* dan *orah*. Kata *tutur* berarti 'nasihat' atau 'bicara'. Kata *tutur-tuturan* kadang-kadang disebut juga *tuturan* dalam istilah teknis dongeng berarti 'cerita lisan'. Mengenai kata ulang *orah-orahan* adalah berasal dari

kata dasar *orah* 'beri tahu, (secara lisan)

Kata turunannya seperti tersebut di atas berarti 'cerita lisan' juga.

3. Ciri lisan yang ketiga ialah adanya kata *lantas*, *laut*, atau *raris* yang berarti 'lalu' atau 'maka'. Dalam dongeng Bali pemakaian kata itu didapati secara berulang-ulang. Agaknya pemakaian kata-kata itu pun suatu ciri dongeng yang disampaikan secara lisan.
4. Ciri yang keempat, adalah struktur kalimatnya yang biasanya memakai konstruksi inversi. Fungsi konstruksi ini ialah untuk mendramatisasikan situasi sehingga terasa hidup, sebagaimana juga halnya dalam sastra Indonesia lama (Emeis, 1950:206–207; 1952:13–17).
5. Ciri lainnya adalah pemakaian bentuk kalimat pasif.

Mengenai bentuk terikat dalam sastra lisan Bali yang terpenting ialah *wewangsalan*. Kalau dilihat dari bentuk dan isinya sama dengan pantun dalam sastra Indonesia.

Wewangsalan ada dua macam, Pertama yang tiap baitnya terdiri dari dua baris, baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Kedua tiap baitnya terdiri dari empat baris, baris pertama dan kedua merupakan isi. Perlu juga dicatat bahwa kedua *wewangsalan* itu, bersajak. Pada *wewangsalan* yang empat baris ada bunyi akhir tiap-tiap akhir barisnya sama/bersajak dan ada pula bunyi akhir baris pertama bersajak dengan bunyi akhir baris ketiga, dan baris kedua bersajak dengan yang keempat.

Perihal isi dari *wewangsalan* ini ada bermacam-macam hal, terutama berisi tentang dunia muda-mudi (percintaan).

Sastra Tulis

Secara historis perkembangan sastra tulis agaknya telah ada sejak zaman Bali Kuna (dinasti Warmadewa) pada abad IX. Menurut prasasti, pada zaman ini telah ada pertunjukan wayang dengan istilah *parbwayang*, yang memper-tunjukkan cerita-cerita tertentu yang terdapat dalam kesustraan Bali pada waktu itu. Akan tetapi, semenjak abad X pengaruh Jawa mulai besar di Bali hingga memuncak pada waktu zaman Majapahit (Lihat P.J. Worsely, 1972 : 93). Tradisi kraton Jawa yang mengembangkan kesustraan kraton terus dilanjutkan di keraton-keraton Bali. Hal ini terjadi terutama pada abad XVI, yaitu pada zaman Gelgel di bawah raja Watuorenggong. Seorang pujangga yang

terkenal dari masa ini bernama Dauh Bale Agung.

Pengaruh kesustraan Jawa yang kemudian disebut dengan istilah kesustraan Jawa-Bali sangat mempengaruhi masyarakat Bali, terutama masyarakat yang terletak di seputar kerajaan, terutama dalam lingkungan bangsawan dan pendeta.

Pada masa ini mulailah diperkenalkan bentuk-bentuk puisi Jawa yang berupa tembang yang disebut *tembang macapat*. Hal ini berkembang terutama mulai abad XVII hingga sekarang (Lihat Th. Pigeaud, 1967 : 5 – 6). Kebanyakan hasil sastra Bali klasik dalam sastra tulis ini berbentuk tembang (dinyanyikan). Hasil sastra dalam bentuk tembang tersebut disebut *geguritan*. Di samping bahasanya, temanya pun ada yang diambil dari cerita Panji, seperti ternyata dalam *Geguritan* Megantaka, *Geguritan* Bagus Umbara, *Geguritan* Jajar Pikatan, dan sebagainya.

Sampai sekarang telah populer dengan nama *pupuh* seperti *Adri*, *Alis-alis*, *Ijo*, *Blabak*, *Dangdang*, *Dingdang*, *Ginada*, *Jumbang*, *Jumog*, *Juragan Danu*, *Demung*, *Durma*, *Gambuh*, *Ginanti*, *Girisa*, *Kumambang*, *Mijil*, *Megatruh*, *Palugangsa*, *Pangkur*, *Jagul Anom*, *Rare Kediri*, *Pucung*, *Sinom*, *Semarandana*, *Racecanggu*, dan sebagainya. Tidak semua jenis *pupuh* itu terkenal, di samping ada juga nama-nama *pupuh* yang belum dicatat. Dalam hal ini yang populer adalah sepuluh buah *pupuh*, yaitu : *Sinom*, *Pangkur*, *Ginada*, *Ginanti*, *Maskumambang*, *Durma*, *Mijil*, *Pucung*, *Semarandana*, dan *Dandanggula*.

Tiap-tiap *pupuh* yang disebutkan di atas mempunyai patokan yang disebut *pada lingsa* (Lihat I Gusti Bagus Sugriwa 1978:3), yaitu :

1. banyaknya baris dalam tiap bait;
2. banyaknya suku kata dalam tiap baris; dan
3. bunyi akhir dari tiap-tiap baris.

Kesepuluh *pupuh* itu dapat diikhtisarkan patokannya sebagai tersebut pada Tabel I berikut ini.

Tabel I. SEPULUH JENIS PUPUH BESERTA PATOKANNYA

Jenis Pupuh	Pada Lingsa	
	Banyaknya Baris	Suku Kata dan Bunyi Akhir
1. <i>Sinom</i>	10	8a, 8i, 8a, 8i, 8i, 8u, 8a, 8i, 4u, 8a
2. <i>Pangkur</i>	7	8a, 12i, 8u, 8a, 12u, 8a, 8i
3. <i>Ginada</i>	7	8a, 8i, 8a, 8u, 8a, 4i, 8a
4. <i>Ginanti</i>	6	8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i
5. <i>Maskumambang</i>	4	12a, 6a, 8i, 8a
6. <i>Durma</i>	7	12a, 8i, 6a, 8a, 8i, 8a, 8i
7. <i>Mijil</i>	5	10i, 6o, 10e, 6i, 6u
8. <i>Pucung</i>	4	12u, 6a, 8i, 12a
9. <i>Semarandana</i>	7	8i, 8a, 8e, atau o, 8a, 8a, 8u, 8a
10. <i>Dangdanggula</i>	10	10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a

Pupuh-pupuh seperti tersebut di atas oleh para sastrawan Bali telah dipakai untuk membentuk karya sastra *geguritan*. Di samping itu, *pupuh-pupuh* itu dipakai pula dalam *babad-babad* atau *pamancangah-pamancangah* yang pada dasarnya menguraikan tentang hikayat, dongeng atau suatu kisah perjalanan, dan sebagainya.

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap beberapa buah *geguritan*, maka ternyatalah bahwa ada *geguritan* yang hanya memakai satu jenis *pupuh*, dan ada pula yang memakai beberapa jenis *pupuh*. *Geguritan* yang memakai hanya satu jenis *pupuh* adalah : *Geguritan Jayaprana (Ginada)*, (*Geguritan Pakang raras (Ginada)*), *Geguritan Bagus Umbara (Ginada)*, *Geguritan Pan Bangkling (Sinom)*, *Geguritan Lingga Peta (Ginada)*, *Geguritan Luh Raras (Ginada)*, *Geguritan Basur (Ginada)*, dan sebagainya. Sedangkan *geguritan* yang memakai jenis *pupuh* lebih dari satu, seperti *Geguritan Luh Raras (Ginada)*, *Geguritan Basur (Ginada)*, dan sebagainya. Sedangkan *geguritan* yang memakai jenis *pupuh* lebih dari satu, seperti *Geguritan Megantaka*, *Geguritan Durma*, *Geguritan Sampik*, *Geguritan Gunawati*, *Geguritan Tamtam*, dan sebagainya. Di samping itu, perlu dicatat di sini bahwa penulis-penulis karya sastra *geguritan* biasanya memberikan tugas tertentu pada masing-masing jenis

pupuh. Maksudnya, dalam menguraikan peristiwa tertentu tidaklah sembarang jenis *pupuh* dipakai, misalnya sebagai berikut .

1. *Pupuh Sinom* biasanya dipakai untuk mengubah hal-hal keindahan, kebahagiaan, kesenangan, muda-mudi, pendeknya hal-hal yang menggembirakan.
2. *Pupuh Durma* dipakai menceritakan hal-hal kekacauan, peperangan, kemarahan, permusuhan, dan sebagainya
3. *Pupuh Semarandana* biasa dipakai mengubah di seputar asmara, kasih sayang, tangis, kesedihan, pendeknya hal-hal yang mengharukan.
4. *Pupuh Pangkur* biasanya dipakai pada waktu perubahan suasana.
5. *Pupuh Dangdang* dipakai menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan wanita, keindahan alam dan sebagainya.
6. *Pupuh Pucung* dipakai menceritakan hal-hal yang lucu-lucu, nasihat, teka-teki, dan sebagainya.

Tugas jenis-jenis *pupuh* ini bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak. Tugas ini akan dilanggar oleh para penulis *geguritan* apabila ia memakai hanya satu jenis *pupuh* dalam *geguritan*-nya. Pelanggaran seperti tersebut ternyata pula pada karya sastra *geguritan* belakangan, sekalipun karya sastra *geguritan* tersebut memakai banyak jenis *pupuh*.

Setelah membicarakan *geguritan*, maka kini akan diuraikan suatu karya sastra yang sebenarnya masih sangat dekat dengan karya sastra *geguritan*, karena memakai jenis *pupuh* yang sama, yaitu yang disebut *peparikan*. Karya sastra *peparikan* biasanya mengambil tema atau cerita yang terdapat dalam *kekawin* atau *parwa*, yaitu karya sastra yang memakai bahasa Kawi. *Kekawin* atau *parwa*, atau cukilan dari *kekawin* atau *parwa* tersebut dengan memakai *pupuh* dengan mempergunakan bahasa Bali atau Bali-Kawi.

Peparikan yang dimaksudkan itu adalah :

1. *peparikan Sutasoma*
2. *peparikan Calonarang*,
3. *peparikan Adiparwa*, dan sebagainya.

Walaupun telah ada patokan seperti telah diuraikan di atas, ada kalanya juga penyair (*pengawi*) tidak menepati *pada lingsa* itu.

Masalah Penerjemahannya

Dari uraian di atas, sudah tergambar sepintas ruang lingkung serta hakikat sastra Bali tradisional itu. Menerjemahkan karya sastra seperti itu ke dalam bahasa Indonesia, menurut hemat kami, menghadapi banyak masalah, terutama apabila didasarkan pada proses penerjemahannya sebagai yang dikemukakan oleh B.H. Hoed (1977) dan Anton M. Moeliono (1977). Untuk sementara dapat dikelompokkan ke dalam dua pokok masalah, yaitu yang menyangkut masalah aspek seninya dan aspek latar belakang sosial budayanya. Untuk kejelasannya kedua masalah tersebut akan diuraikan lebih renik sebagai berikut.

Aspek Seni

Menurut hemat kami, yang paling sulit dihadapi dalam menerjemahkan karya sastra adalah mencari padanan unsur seninya, yang bervariasi sesuai dengan jenis sastra yang diterjemahkan.

Dalam menerjemahkan dongeng rakyat masalah yang dihadapi adalah berkenaan dengan gaya tutur, terutama tentang perulangan kata-kata, *laut/lantas/raris* dan *kone*. Dalam hal ini terjemahannya harus disesuaikan dengan gaya bahasa Indonesia sehingga kata-kata itu tidak selalu secara setia diterjemahkan, bahkan, kalau perlu dihilangkan sebagaimana telah dikemukakan oleh Ketut Lama (1978). Contohnya diambil dari dongeng "Oong Putih Oong Selem", sebagai berikut.

Walau pisan ipun menceg ring alase, durung polih nuduk saang, *raris* sabeh ageng pisan, mapawinan nenten nyidaang ngarereh. Derika *raris* inpun ngetis ka pura Dalem mangdene nenten belusan Derika *aris* kapanggihin oong kekalih, rupanipun selem ring putih. Punika *raris* kaambil tur sesampunne ngetan sabehe, *raris* kabata mantuk.

Terjemahannya :

Baru saja ia tiba di hutan, belum sempat mencari kayu api, *lahu* turunlah hujan lebat. Maka itu ia tak dapat mencari kayu api. *Kemudian* ia berteduh ke kuil Dalem supaya tidak basah. Di sarta dijumpainya dua batang jamur, yang sebatang berwarna hitam dan yang lain berwarna putih. Kedua jamur itu diambil dan setelah hujan agak reda, jamur itu dibawa pulang.

Contoh lainnya, tentang yang dihilangkan atau tidak diterjemahkan ambil dari dongeng "Anak Agung Lingasari" sebagai berikut :

Mara cicipina teken Meng Bekung, laut aeng *kone* jaane. Dening keto, laut telahanga *kone* ngamah. Mara teka ane muani, orana-nga *kone* payuke belah. Makelo lantasi beling *kone* Men Bekung.

Terjemahannya ;

Baru dicicipi oleh Men Bekung, alangkah lezatnya. Oleh karena itu, dimakan habis semuanya. Ketika suaminya datang, periuk itu dikatakan pecah. Lama-kelamaan hamillah Men Bekung.

Mengenai penerjemahan *wewangsalan*, yang berbentuk puisi itu masalahnya lebih sulit lagi apabila dibandingkan dengan penerjemahan bentuk prosa. Masalah penerjemahan bentuk puisi, umumnya lebih rumit, seperti pernah dikemukakan oleh Theodore Savory (1968: 75-89). Dalam hal ini ada dua cara yang ditempuh, yaitu sebagai berikut.

- (a) Apabila padanan itu baik mengenai bentuk maupun isinya ada dalam bahasa sasaran, maka *wewangsalan* itu akan diterjemahkan dengan bentuk tersebut, seperti berikut :

*suba bawang buin tambusin,
suba tawang buin tandruhin*

Terjemahannya :

sudah gaharu, cendana pula,
sudah tahu, bertanya pula.

Walaupun demikian, untuk kejelasannya, perlu juga dibuatkan catatan kaki mengenai arti kata yang belum diterjemahkan, seperti kata *bawang* 'bawah merah'; *tambusin* 'ditambus' dan kata *tandruhin* 'pura-pura tak kenal!

- (b) Apabila *wewangsalan* tersebut tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran, menurut hemat kami penerjemahan itu dapat dilakukan dengan cara idiomatik, seperti contoh di bawah ini :

*Nguda kena pait kopine,
Beliang gula aji patpat,
Nguda kene sakit atine,
Alihang guna apang ia bakat,*

Terjemahannya :

Kenapa begini pahit kopi itu,
Belikan gula seharga empat kepeng,
Kenapa begini sakit hatiku,
Carikan guna-guna agar dapat kuper-sunting

Menurut pengalaman kami, menerjemahkan puisi dalam bentuk *geguritan* dan *peparikan* menghadapi lebih banyak kesulitan. Hal ini disebabkan, di samping memang banyak kata-katanya yang kuna, umumnya diambil dari bahasa Kawi, juga karena bentuk puisi itu harus dinyanyikan dengan pola tembang sebagai telah diuraikan di atas. Dalam bahasa Indonesia tembang seperti itu tidak dikenal, maka menurut hemat kami, penerjemahannya dapat dilakukan dengan cara tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disebutkan di atas.

Di bawah ini kami akan mencoba menerjemahkan lima *pupuh* sebagai berikut.

Pangkur (Geguritan Salia)
Ingsun mangke masucian,

Terjemahannya :

Kini segera aku akan membersihkan diri,

Saksana masiram gelis,
Ngrangsuk busana alus,
Wastra petake punika,
Tuhu becik warnane wawuwuh ayu.

Mandilah Baginda, seketika itu juga, Berbusana kain nan halus,

Putih, warna busana,

Sangat indah dan wajahnya bertambah cantik,

Raris meling Raden Dewia,

Terkenanglah Raden Dewi akan masa lampau,

Nyelsel raga sambil nangis

Lalu menyesal sambil menangis.

Samarandana (Geguritan
Megantaka)

Terjemahannya :

Sampun surup Sang Hyang
Rawi,

Telah terbenam Sang Surya,

Taler menangis Rahadyan,
Di biase pajalempoh.
Tan kacarita punika,
Polahe Rahaden Dewya,
Di gili kawelas kayun
Anganti elen carita,

Masih jualah Sang Rahadian menangis,

Di pasir, duduk lunglai,

Taklah hal itu diceritakan lagi,

Tingkah Rahaden Dewi,

Belas kasihan di pulau itu,

Yang lainlah, akan diceritakan.

Sinom (Geguritan Purwa
Sengara)

Terjemahannya :

Reh kocap tan saking sastra,
Tan mantra tatan mas manik,

Dikatakan bukanlah karena ilmu, bukanlah mantra, bukan juga mas dan manikam,

*Sida manulak sengara,
Kewala sane asiki,
Kukuh kaliwat-liwat,
Kakusilaning budi*

Dapat menolak kehancuran itu,
Hanyalah yang satu jua,
Kuat kukuh,

Hati yang luhur dan mulia,

*Tuara keweh tempuh angin,
Sida mentas,
Sakeng sengara segara.*

Tak luluh dilanda badai,
Dapat selamat,
Dari kehancuran samudra.

*Ginada (Geguritan Bagus Um-
bara)*

Terjemahannya :

Gelis ida abresihan,

Dengan segera, baginda dibuatkan upacara mandi,

Rahaden Dewi anangis,

Tatkala itu menangislah Rahaden Dewi,

Mirah adi anggon monmon,

Cincin bermata mirah *adil* dipakai *monmon*²,

*Kareb sutra satus kayun,
Sampun mangkin binasmian,
Putus mangkin,
Sang Atma dadi Betara.*

Tutup jenazah sutra seratus gulung,
Usailah upacara perabuan,
Kini telah menjadi suci,
Sang Ruh telah menjadi Dewa.

Menerjemahkan karya *geguritan* atau *peparikan* yang digubah dengan memasukkan unsur *blabadan* adalah lebih sulit lagi. Menurut keterangan Ketut Ginarsa (1971:66), yang dimaksudkan dengan *blabadan* adalah suatu kalimat yang dimulurkan atau dipanjangkan sehingga dapat melukiskan apa yang dimaksudkan oleh si pembicara, umpamanya : *Madamar di langit* 'Berlampu di langit'. Makna dari *blabadan* ini adalah *bulan*. Kata *bulan* inilah yang kemudian diulur menjadi atau menunjuk kepada *bulan-bulanan* 'berbulan-bulan'. Menurut hemat kami, bentuk itu dapat diterjemahkan secara bebas (penerjemahan bebas), contohnya sebagai berikut.

*Dangdanggula
Bwin pidana ganti tityang
ngapal padi,
Manyidayang makunyit di alas*

Terjemahannya :

Kapan kiranya akan dapat bersua dan kawin dengan kau, idaman hatiku, kini hatiku resah gelisah,

<i>Katamu lamun idepe,</i>	kendati dihiburkan,
<i>Apang madon jaka payu,</i>	namun tak terhiburkan,
<i>Makaranon ring I Manik</i>	Permohanku,
<i>Daluang bisa ngumbara</i>	duhai kau permata hatiku,
<i>Lilayang tong dadi saru,</i>	agar sudi berkenan memenuhi
<i>Pangi kaput mangda olas,</i>	permintaanku.
<i>Ratu mirahisi alus managingin,</i>	
<i>Sakadi pununas tityang.</i>	

Oleh karena itu, agar orang yang membaca terjemahan itu mengerti latar belakang bentuk puisi itu, maka perlu kiranya mengenai blabadan itu diterangkan artinya sehingga pembaca mengerti mengenai terjemahan puisi itu, seperti :

Ngalap padi maknanya/maksudnya *manyi* 'menuai padi'; kata *manyi* menunjuk kepada kata *menyidayang* 'berhasil'.

Kunyit di alas maksudnya *temu* 'semacam kunir'; kata *temu* ini menunjuk kepada kata *matemu* 'bersua'.

Madon jaka maksudnya adalah *ron* 'daun aren'; kata ini menunjuk kepada kata *makaranon* 'kawin'.

Deluang bisa ngumbara maksudnya adalah *layangan* 'layang-layang'; kata ini menunjuk kepada kata *lilayang* 'hiburkan'.

Pangi kaput maksudnya *pelas* 'nama bahan upacara'; kata ini menunjuk kepada *olas* 'rela', 'berkenan'.

Isi alus mekasudnya *daging* 'daging'; kata ini menunjukkan kepada kata *managingan* 'memenuhi'.

Aspek Sosial Budaya

Masalah penerjemahan yang menyangkut aspek sosial budaya, terutama mengenai hubungan bahasa dengan sistem pelapisan sosial, terutama kasta (*wangsa*).

Seperti juga halnya dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Madura, di Bali pun dalam sistem bahasanya terdapat tingkat-tingkat bicara/unda usuk (*sor singgih basa*).

Agar permasalahan tingkat-tingkat bicara ini diketahui secara baik, hal itu harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek paradigmatis dan aspek sintagmatik. Pada prinsipnya, baik dalam aspek paradigmatis maupun sintagmatiknya hanya ada dua tingkat, ialah tingkat hormat (*alus*) dan tingkat lepas hor-

mat (*kasar*). Untuk lebih terperinci mengenai aspek paradigmatisnya, tingkat hormat itu dibagi lagi ke dalam empat tipe, yaitu *alus mider*, *alus madia*, *alus singgih*, dan *alus sor*, sedangkan pada aspek sintagmatikanya, hanya ada dua ialah *alus* dan *alus madia* sehingga dalam tingkat-tingkat bicara dalam aspek ini terdapat tiga tingkat, yaitu *alus*, *alus madia*, dan *kasar*.

Tingkat-tingkat bicara itu, seperti telah dikatakan di atas, mempunyai korelasi dengan sistem pelapisan masyarakat Bali. Dengan kata lain, fungsi tingkat-tingkat bicara itu bergantung pada tinggi rendahnya kedudukan atau kasta seseorang dalam masyarakat. Seperti diketahui, dalam masyarakat Bali dikenal adanya empat tingkat kasta: *Brahmana*, *Satria*, *Wesia*, dan *Jaba*. Tiga lapisan pertama disebut juga *Triwangsa* sehingga secara garis besarnya ada dua lapisan, yaitu *Triwangsa* (orang bangsawan) dan *Jaba* (orang kebanyakan).

Walaupun di atas dikatakan ada dua lapisan, tetapi apabila dilihat dari jarak sosialnya (secara vertikal) tampak adanya tiga jarak, yaitu jarak sosial yang jauh, yaitu hubungan antara orang kebanyakan dengan orang bangsawan yang tinggi; dalam hal ini orang kebanyakan akan memakai bentuk hormat *alus* terhadap orang atau golongan bangsawan tinggi itu, sedangkan hubungan jarak yang sedang, orang kebanyakan akan mempergunakan bentuk hormat *alus madia* terhadap orang bangsawan yang kedudukannya tidak demikian tinggi. Terakhir ialah hubungan yang pada hakikatnya tidak menunjukkan jarak sosial atau dengan perkataan lain adalah orang-orang yang sama kedudukannya. Dalam hal ini biasanya orang mempergunakan bentuk lepas hormat (*kasar*).

Hubungan antara tingkat-tingkat bicara (aspek sintagmatikanya) dengan kasta seperti terurai di atas dapat dibayangkan sebagai berikut.

Bagan I. HUBUNGAN TINGKAT-TINGKAT BICARA DENGAN KASTA

Tingkat-tingkat Bicara		Kasta
Bentuk hormat (<i>alus</i>)	<i>alus</i>	Orang bangsawan (<i>Triwangsa</i>)
	<i>alus madia</i>	
Bentuk lepas hormat (<i>kasar</i>)	<i>kasar</i>	Orang kebanyakan (<i>Jaba</i>)

Menerjemahkan tingkat-tingkat bicara seperti terurai di atas ke dalam bahasa Indonesia akan menghadapi beberapa kesulitan karena dalam bahasa Indonesia, walaupun mengenal juga sistem tingkat-tingkat bicara (Soepomo Poedjosoedarmo 1973 : 400 – 419), tetapi menurut hemat kami sistemnya tidaklah sama benar.

Untuk membatasi masalah ini, apabila dalam bahasa Indonesia itu sudah ada padanannya, maka bentuk hormat itu (aspek paradigmatisnya) akan diterjemahkan dengan kata-kata seperti berikut .

<i>ajeng (alus singgih)</i>	'santap'
<i>seda (alus singgih)</i>	'wafat'
<i>raka (alus singgih)</i>	'kakanda'
<i>ida (alus singgih)</i>	'beliau'

Demikian juga terjemahan pada aspek sintagmatiknya, apabila dalam bahasa Indonesia telah ada padanannya, kami terjemahkan sesuai dengan struktur bahasa Indonesia, contohnya diambil dari dongeng "I Rareangon" (Ginarsa 1978:44) sebagai berikut.

Ngandika Ida teken I Rareangon, "Rareangon, cai ngambar gambare ene?"

"Inggih, titiang"

"Dija cai taen nepukin anak luh buka kene, orahang teken gelah!"

"Titiang matur sisip, Ratu Dewa Agung, tan wenten pisan titiang naen manggihin jadmra mrupa asapunika."

Terjemahannya :

Bersabdalah Baginda kepada I Rareangon, "Rareangon, kau yang membuat lukisan ini?"

"Daulat Tuanku, hambalah."

"Di mana kau pernah melihat wanita seperti ini, katakanlah hal itu kepadaku!"

"Mohon ampun beribu ampun, Paduka Tuanku, hamba sama sekali tak pernah berjumpa dengan orang yang berwajah seperti itu."

Untuk menunjukkan adanya jarak sosial, dalam penerjemahannya ada yang kami tambahkan dengan kata *silakanlah* untuk membuat gaya kalimat itu lebih formal (Lihat Soepomo Poedjosoedarmo, 1978: 406-407), contohnya diambil dari dongeng "I Sigir, Jlema Tuah Asibak" (Bagus dan Ginarsa, 1978:120) sebagai berikut .

Masaut I Sigr, "Inggih, niki tiang muat jaja, katipat taluh, mulam takuh saliki, saiki ambil!"

Terjemahannya :

Menjawablah I Sigr, "O ya, saya ada membawa kue, ketupat telur, berisi telur sebutir, *silahkan* ambil ini!"

Di samping itu, karena masyarakat Bali mempunyai agama dan adat yang tersendiri, tak mengherankan terdapat banyak konsep, terutama yang menyangkut agama dan adat istiadat yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia

Untuk mengatasi masalah ini jalan yang kami tempuh ialah dengan menjelaskan atau menerangkan arti kata tersebut, seperti *abersihan* 'upacara permandian jenazah; *murah adi* 'jenis mirah', *monmon* 'nama cincin untuk upacara kematian'.

Hal yang tak kurang pentingnya untuk diperhatikan ialah mengenai penerjemahan arah dalam bahasa Bali. Seperti diketahui, penunjukan arah dalam bahasa Bali mengenai utara dan selatan, antara Bali Utara dan Bali Selatan bertentangan (Swellengrebel, 1960: 36--53) Hal itu disebabkan Penunjukkan itu didasarkan pada letak gunung dan laut, yang dalam bahasa Bali disebutkan dengan istilah *kaja* 'ke arah gunung' dan *kelod* 'ke arah laut'. Masing-masing kata itu di Bali Utara diterjemahkan dengan, selatan dan utara sebaliknya di Bali Selatan diterjemahkan dengan kata 'selatan dan utara' Karena adanya perbedaan itu, maka arah *kaja kangin*, *kelod kangin*, *kelod kauh* dan *kaja kauh* di Bali Utara diterjemahkan dengan, 'tenggara, timur laut, barat laut, dan barat daya' sebaliknya di Bali Selatan diterjemahkan dengan 'timur laut, tenggara, barat daya dan barat laut'

Demikianlah beberapa catatan kecil tentang masalah penerjemahan yang kami angkat dari pengalaman praktis kami, waktu menerjemahkan beberapa karya sastra Bali tradisional ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang disajikan di atas hanya berupa usaha pendahuluan saja yang perlu digarap lebih lanjut, sehingga hasilnya kemudian dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu penerjemahan di Indonesia.

Catatan :

¹Jenis mirah di Bali.

²Nama cincin untuk upacara kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, I Gusti Ngurah sareng I Ketut Ginarsa. 1978. *Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa*. Singaraja.
- Boas, Franz. 1955. *Primitive Art*. New York.
- Emeis, M.G. 1950. *Inleiding tot de Bahasa Indonesia*. Groningen, Djakarta: J.B. Wolters.
- , 1952. *Bunga Rampai Melayu Kuno, Bloemlezing uit het Klassiek Maleis*. Groningen. Djakarta: J.B. Wolters.
- Ginarsa, Ketut. 1971. *Paribhasa Bali*. Singaraja.
- Hoed, B.H. 1977. "Beberapa Informasi Teoritis Dasar Mengenai Terjemahan Tahap I" Tugu, Bogor.
- Lama, Ketut. 1978. "Masalah Penterjemahan Dongeng Bali", Tugu, Bogor. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Moeliono, Anton M. 1977. "Sejumlah Masalah dalam Penterjemahan Tahap I" Tugu, Bogor.
- Pigeand, Th. 1967. *Literatur of Java*, The Hague.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 1978. "Language Etiquette in Indonesia" dalam *Spectrum, Essays presented to Sutan Takdir Alisyahbana on his seventieth birthday*, S. Udin. Editor. Jakarta: Dian Rakyat.
- Savory, Theodore. 1969. *The Art of Translation*, London: Jonathan.
- Sugriwa, I Gusti Bagus. 1978. *Penuntun Pelajaran Kakawin*, Denpasar.
- Swellenghel, J.L. 1960. "Introduction" dalam *Bali, Studies in Life, Thought and Ritual*, The Hague, Bandung.

SUATU TINJAUAN PERKEMBANGAN PENERAPAN EJAAN BAHASA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN

A. Latief

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, masalah ejaan kini bukanlah merupakan hal yang perlu dipersoalkan lagi. Hampir kita semua "menerima dan memakainya". Ejaan pernah dan cukup lama dipermasalahkan dan diperdebatkan orang secara hangat, yaitu pada akhir-akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an.

Yang paling banyak disoroti dan ditanggapi pada waktu itu adalah masalah pemakaian huruf, terutama penggantian huruf *tj* menjadi *c*, *dj* menjadi *j*, dan *j* menjadi *y*. Di samping itu, masalah penulisan kata depan yang harus dipisahkan dari kata yang mengikutnya juga cukup banyak mendapat tantangan.

Tanggapan dan tantangan ini sebenarnya menunjukkan sikap positif masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Tanggapan yang demikian itu juga menggambarkan sikap yang belum dapat menerima gagasan perubahan ejaan yang diusulkan oleh Lembaga Bahasa Nasional melalui Panitia Ejaan Bahasa Indonesia.¹

Salah satu kemungkinan sebab yang menimbulkan sikap yang demikian itu adalah adanya perbedaan pengertian itu seperti tentang kata *ejaan* itu sendiri. Bagi masyarakat pada umumnya pengertian kata *ejaan* ialah hal-hal yang menyangkut pemakaian huruf khususnya tentang abjad. Di luar itu dianggap tidak termasuk soal ejaan. Oleh sebab itulah, barangkali peristiwa seperti yang dialami oleh Ejaan yang Disempurnakan (EYD) ini tidak dialami oleh Ejaan Republik.²

Sejak ejaan baru ini masih berupa konsep sampai pada tahun-tahun pertama setelah ejaan ini diresmikan pemakaiannya³, penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya masih berkisar sekitar kedua masalah tadi. Dalam memberikan penjelasan itu biasanya para petugas membagi-bagikan buku *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (hingga tahun 1975) atau buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (sejak tahun 1975 hingga sekarang) secara cuma-cuma. Jumlah buku pedoman ejaan yang telah dibagikan hingga saat ini kurang lebih 50.000 buah.

Penyebaran buku pedoman ejaan ini dilakukan melalui Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di setiap propinsi (termasuk Propinsi Timor Timur), universitas dan IKIP setempat, terutama yang mempunyai fakultas sastra atau sastra seni, badan-badan resmi dan pertemuan-pertemuan para ahli (seminar, konferensi, rapat kerja, dan lain-lain), serta perorangan.

Salah satu usaha yang pernah ditempuh agar penerapan kaidah ejaan ini dapat berjalan lebih lancar dan merata di seluruh Indonesia ialah mengadakan Penataran Penyuluh Bahasa Indonesia. Di samping itu, seperti kita ketahui pula, telah dimanfaatkan pula ruang Pembinaan Bahasa Indonesia di televisi dan radio yang disiarkan sekali seminggu.

Dari pidato Presiden Soeharto di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1976 (Pidato Kenegaraan: 1972; 4043) kita mengetahui bahwa pembakuan ejaan merupakan langkah pertama dan sekarang harus menjadi lambang dari pembakuan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, bila usaha yang pertama kurang berhasil atau gagal maka dapatlah dibayangkan apa yang akan terjadi dengan usaha-usaha pembakuan berikutnya. Mengingat hal ini tentu saja akan baik sekali kalau kita bersama-sama memikirkan dan membahas masalah ejaan ini, khususnya mengenai masalah yang kita hadapi dalam menerapkan kaidah ejaan yang telah diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 dengan surat keputusan No. 57 tahun 1972.

Masalah dan Hambatan

Kalau kita memperhatikan pelaksanaan atau penerapan kaidah ejaan yang resmi berlaku (untuk selanjutnya disebut ejaan resmi) sejak lebih dari enam tahun yang lalu, secara keseluruhan di seluruh tanah air, dapatlah dikatakan bahwa kita masih belum boleh merasa puas. Usaha-usaha yang

lebih berencana, terarah, dan terpadu masih perlu dilancarkan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus.

Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian kita dalam menangani masalah ejaan ini, yang antara lain menjadi penyebab kekurangberhasilan usaha selama enam tahun lebih ini adalah sebagai berikut.

1. *Sikap*

Barangkali tidak terlalu salah kalau kita mengatakan sebagian besar anggota masyarakat kita beranggapan atau merasa telah "mampu mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik". Hal ini didukung pula oleh kenyataan atau pengalaman mereka selama ini bahwa mereka dapat berkomunikasi seperti yang mereka harapkan tanpa merasa menderita kerugian. Di samping itu, masih ada lagi faktor lain yang cukup membantu sikap yang demikian itu ialah tidak adanya sanksi bagi para pemakai bahasa yang tidak menaati peraturan bahasa, termasuk kaidah ejaan. Semua ini menyebabkan makin sukarnya kita mengubah sikap yang demikian agar menjadi sikap bahasa yang positif, artinya, menjadi sikap yang secara sadar mencintai dan bangga akan bahasa nasionalnya.

Selama sikap yang positif ini belum berhasil kita kembangkan atau tanamkan dalam diri para pemakai bahasa Indonesia, selama itu pula akan sukar bagi kita mengharapakan penerapan kaidah ejaan ini secara menyeluruh dan merata.

2. *Penyebaran Buku*

Seperti yang kami kemukakan di atas, buku pedoman ejaan yang telah disebarluaskan sampai saat ini berjumlah kurang lebih 50.000 buah. Menurut hemat kami, cara ini tidak menjamin penyebaran yang merata kepada semua pihak yang membutuhkan buku pedoman itu, terutama kalau buku itu dibagikan secara cuma-cuma. Selain itu, cara penyebaran ini tidak didukung oleh sesuatu jumlah dana untuk ongkos pengiriman, terutama setelah buku itu tiba di daerah. Oleh sebab itu, kiranya perlu dipikirkan cara yang lebih baik untuk memungkinkan terjaminnya penyebaran yang lebih merata.

3. *Pejabat sebagai Teladan*

Kita semua akan sepakat kalau dikatakan bahwa pada umumnya

masyarakat mudah sekali meniru apa yang dilakukan oleh para pejabat, terutama bila para pejabat mempunyai wibawa dan wewenang yang besar. Dalam hubungan dengan pelaksanaan ejaan sekarang ini dapatlah dikatakan bahwa, baik para pejabat maupun para petugas Pemerintah pada umumnya masih dapat meningkatkan usaha mereka agar mereka mampu memberikan teladan yang lebih baik kepada masyarakat. Hingga kini, menurut pengamatan kami, teladan yang diberikan kepada masyarakat masih belum menunjang sepenuhnya usaha penerapan kaidah ejaan resmi ini.

4. *Media Massa*

Tidak jarang kita mendengar bahwa media massa itu mempunyai dan memakai bahasa sendiri. Arti bahasa yang dipergunakan di dalam surat kabar, majalah, radio (khususnya, radio nonpemerintah) tidak tunduk atau tidak harus tunduk pada kaidah-kaidah bahasa yang ada, termasuk kaidah ejaan. Akan tetapi, benarkah hal demikian ini? Menurut hemat kami, sebegitu jauh tidaklah demikian halnya. Kami dapat mengatakan, bahkan hak yang sebaliknya yang benar karena hal-hal berikut. Hingga saat ini belum atau tidak ada tulisan yang dibaca atau ucapan yang didengar seseorang apa yang disampaikan oleh media-media massa. Oleh sebab itu, tentu saja masalah ejaan ini akan menjadi perhatian dan akan mendapat sorotan lebih dari sumber yang lain. Di samping itu, kita perlu juga memperhatikan proses terjadinya pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa itu, khususnya yang menyangkut peranan yang dimainkan oleh wartawan, anggota redaksi, dan petugas yang mengoreksi (korektor). Kalau kita sudah mengerti, kesalahan ejaan yang terdapat dalam surat kabar, tidak segera kita anggap bahwa wartawan¹ atau redaksi surat kabar itu belum dapat menerapkan kaidah ejaan resmi.

Walaupun demikian, banyaknya kesalahan ejaan bahasa salah cetak yang terdapat dalam suatu surat kabar dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap usaha penerapan kaidah *Pedoman Umum*. Apa yang biasa kita kenal dengan istilah salah cetak, yang kebetulan berupa pelanggaran kaidah ejaan, yang kebetulan berupa pelanggaran kaidah ejaan, kemungkinan sekali akan terus terlihat dalam waktu-waktu mendatang selama para petugas yang terlibat dalam proses penyampaian pesan itu masih ada yang belum menguasai sepenuhnya kaidah ejaan yang berlaku, termasuk tanda baca dan unsur serapan.

5. Peranan Pengajar dan Penyuluh

Menurut keterangan yang kami peroleh, sampai saat ini belum semua pengajar (pada semua tingkat pendidikan) yang memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap masalah penerapan kaidah ejaan resmi. Bahkan, dapat pula kami katakan, belum semua pengajar yang memberikan pelajaran bahasa Indonesia telah mampu menerapkan kaidah ejaan yang berlaku ini secara mantap. Jadi, jelaslah bahwa tugas yang harus dilaksanakan dalam bidang ejaan ini masih cukup berat. Dapat kami tambahkan pula bahwa masih ada beberapa pengajar bahasa Indonesia yang hingga kini masih belum memiliki buku *Pedoman Umum* ini. Selanjutnya, para penyuluh di daerah belum dapat berperan atau belum berhasil dengan baik melaksanakan tugasnya karena berbagai sebab. Salah satu di antaranya ialah tidak tersedianya dana yang memadai untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan.

6. Buku Pedoman Ejaan

Seperti yang dapat kita baca dari kata dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* itu jelas dikatakan bahwa buku *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* sebagai lampiran surat Keputusan Presiden No. 57/1972 perlu dilengkapi sehingga menjadi suatu buku pemaparan kaidah ejaan. Bagi sebagian anggota masyarakat, *Pedoman Ejaan* dan *Pedoman Umum* itu dianggap benar-benar sama kecuali ukiran dan warna kulitnya, sedangkan isinya pasti sama. Padahal, *Pedoman Umum* itu sebenarnya berisi penjelasan dengan contoh yang lebih lengkap (jumlah uraian bab, pasal, dan ayatnya sama). Adanya anggapan yang demikian ini juga menghambat usaha penyebaran *Pedoman Umum* itu. Selain itu, beberapa hal berikut ini merupakan hambatan yang cukup besar bagi kemungkinan terlaksananya penerapan yang baik kaidah ejaan secara menyeluruh.

- a. Dalam buku *Pedoman Umum* ini ternyata masih terdapat kaidah-kaidah yang hanya jelas artinya bagi para ahli atau guru bahasa saja.

Misalnya:

"Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata partikel seperti *di*, *ke*, *dari*, *untuk*, dan *yang*, yang tidak ada posisi awal."

(*Pedoman Umum*: 15; lihat juga *Pedoman Umum*:23).

Selain kesukaran menebak arti kata *partikel* itu sendiri, contoh yang diberikan juga kurang jelas artinya.

Penghilangan istilah-istilah linguistik akan mempermudah kaidah-kaidah itu. Bila istilah-istilah itu tidak mungkin dihilangkan, sebaiknya buku *Pedoman Umum* itu dilengkapi dengan suatu daftar kata yang berisi arti atau penjelasan makna kata tersebut dan berisi juga contoh-contoh yang lengkap untuk istilah itu. Kesukaran yang timbul adalah dipergunakannya istilah-istilah linguistik seperti partikel *di, ke, dari, untuk, dan yang*; kata depan: *di, ke, dan dari*. Dari kedua contoh itu dapat kita catat bahwa *di, ke, dan dari* dapat menjadi kata depan dan dapat juga menjadi partikel. Jadi, bagi orang awam kemungkinan besar *kata depan* itu dianggap sama artinya dengan *partikel* — padahal, kita semua tahu bahwa hal itu tidak benar.

- b. Dari contoh-contoh yang diberikan dan diawali dengan kata *misalnya* atau *seperti* kurang banyak membantu para pemakai bahasa yang tidak begitu ahli dalam bidang bahasa sehingga harapan panitia penyusun buku *Pedoman Umum* ini agak sukar tercapai.

Sebagai contoh, marilah kita perhatikan Bab III, Pasal F:

"kata depan *di, ke* dan *dari* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata seperti *kepada* dan *daripada*" (Lihat juga Bab III, Pasal D, Ayat 3).

Kami kira, bagi para ahli dan pengajar bahasa kaidah ini sudah cukup sederhana. Akan tetapi, seperti yang kami katakan di atas bagi orang awam sebenarnya kaidah ini tidak mudah diterapkan.

Sebagai bukti baiklah kita perhatikan hal-hal berikut.

Disamping itu, saya ingin menyampaikan . . .

Dapatkah kita mengharapkan para pemakai bahasa mampu menuliskan kata *di samping itu* menjadi tiga kata secara terpisah atau *diantara* dalam kalimat *di antara hadirin tentu ada yang tidak setuju* menjadi dua kata, hanya berdasarkan kaidah yang ada?

Bagaimana pula halnya bila orang harus menuliskan:

Kemari sebentar atau Keluarlah sebentar.

Dari contoh yang terdapat dalam buku *Pedoman Umum*, kedua kalimat sederhana di atas tidaklah mudah mendapatkan jawabannya. Demikian-

lah pula halnya dengan kaidah-kaidah lain yang memerlukan penjelasan tambahan yang praktis atau yang lebih bersifat operasional. Sebagai contoh baiklah kami kemukakan satu "usaha percobaan" sebagai penjelasan tambahan kaidah Bab III. Pasal F :

(Untuk menentukan apakah kata *di*, *ke*, dan *dari* itu harus ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya atau tidak perlu diperhatikan hal-hal berikut).

1. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya bila ketiga-tiganya (*di*, *ke*, dan *dari*) dapat dipergunakan dengan kata tersebut.

Contoh: *Disini* atau *kesini* ditulis terpisah karena kita dapat mengatakan *di sini*, *ke sini*, dan *dari sini*. Jadi, karena ketiga bentuk (*di*, *ke*, dan *dari*) dapat dipergunakan dengan *sini* dan mempunyai makna yang jelas, maka kata *disini* atau *kesini* harus ditulis terpisah (*di sini*; *ke sini*).

2. Bentuk *di*, *ke*, dan *dari* ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya bila kita tidak memperoleh ketiga buah bentuk yang mempunyai arti atau bentuk yang dapat diterima. Misalnya :

Kata *kepada* dan *daripada* kita tuliskan serangkai karena kita tidak mengenal bentuk *di pada*. Jadi, kita tidak mempunyai "tiga" bentuk melainkan hanya dua.

Bentuk *kemari* kita tulis serangkai karena kita tidak mengenal atau tidak dapat menerima bentuk *di mari* atau *dari mari*.

7. Masa Peralihan

Masalah masa peralihan ini penting kita bicarakan karena hal-hal berikut. Pertama, kebiasaan kita menulis dengan mempergunakan sistem ejaan lama yang relatif lama dan akan diubah dengan suatu sistem yang mencakup beberapa aspek yang selama ini tidak atau hampir-hampir tidak menjadi perhatian kita.

Kedua, jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, sedangkan jumlah buku pedoman yang beredar selama ini relatif sedikit.

Ketiga, daerah Indonesia sangat luas dan komunikasi atau hubungan antardaerah belum ideal. Oleh sebab hal-hal itu, sebaiknya kita tidak beranggapan bahwa waktu sudah berlalu lama untuk masa peralihan. Makin singkat masa peralihan itu tentu saja makin baik. Akan tetapi, kalau kita ingat bahwa sanksi bagi pelanggaran bahasa itu tidak ada dan juga pelang-

garan bahasa itu sering terjadi karena ketidaksengajaan, seperti halnya dengan salah cetak, di samping kenyataan bahwa selama ini dilakukan oleh petugas Pemerintah. Hal ini tidak berarti bahwa kita dapat menerima atau membiarkan pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan, tetapi justru memberi kesempatan yang lebih besar kepada segenap pemakai bahasa untuk berpartisipasi dalam penghayatan dan penerapan kaidah ejaan yang berlaku. Pada tahun-tahun terakhir ini usaha-usaha ke arah ini sangat menggembirakan. Dalam hubungan ini, perlu pula diperhatikan masalah-masalah yang tampaknya masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapat penyelesaian bentuk baku seperti penulisan dan pelafalan kata:

manager dan *manajer*
toilet dan *toalet*
bus, bis, dan bas
prinsipül, prinsipil, dan prinsipiel
 dan lain-lain.

(Bandingkan masalah ini dengan penulisan kata *zaman* dan *djaman* pada waktu Ejaan Republik).

Kita menyadari bahwa peranan kamus dalam dunia yang sudah maju ini sangat penting. Akan tetapi, peranan itu menjadi berlipat ganda pentingnya dalam usaha pembakuan ejaan terutama dalam masa peralihan ini. Tidak tersedianya kamus baku yang cukup lengkap dalam masa peralihan seperti ini tentu saja sangat menghambat usaha penerapan kaidah ejaan yang berlaku. Belum lagi kita berbicara tentang kemungkinan adanya pengaruh negatif dari beberapa buku atau kamus yang dianggap baik dari semua segi, kecuali ejaan.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapatlah kita simpulkan sebagai berikut. Buku *Pedoman Umum* yang sekarang ini sudah cukup baik, terutama bagi para ahli dan pengajar bahasa. Pelaksanaan kaidah Bab I ("Pemakaian Huruf") sudah mendekati 100%, sedangkan mengenai bab-bab yang lain masih perlu ditingkatkan lagi.

Guna mengatasi masalah atau hambatan yang dialami selama ini kiranya perlu ditempuh hal-hal berikut.

1. Kesadaran berbahasa, khususnya kesadaran untuk menerapkan kaidah ejaan yang berlaku, perlu segera digugah kembali. Untuk ini, dapat ditempuh cara-cara seperti adanya anjuran atau instruksi oleh Bapak Presiden atau Menteri. Anjuran atau instruksi itu perlu didukung oleh kebijaksanaan yang serasi di tingkat propinsi.
2. Sarana utama seperti buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* hendaknya tersedia cukup banyak sehingga dapat dipunyai oleh setiap orang terutama para petugas Pemerintah.
3. Pedoman Umum Ejaan yang sekarang ini perlu ditunjang oleh suatu *Petunjuk Praktis Penerapan Ejaan* yang dapat lebih mudah dimengerti oleh umum. Buku ini juga harus memberikan informasi tentang buku acuan lainnya yang dapat digunakan.
4. Peranan media massa sebagai teladan dalam melaksanakan kaidah ejaan ini perlu ditingkatkan.
5. Para pengajar, tanpa kecuali, diwajibkan menguasai dan mampu memberikan teladan yang baik dalam menerapkan kaidah ejaan ini.
6. Setiap kantor atau badan resmi hendaknya berusaha menatar para petugasnya dalam bidang ini.
7. Peranan para penyuluh bahasa Indonesia, khususnya di daerah, perlu ditingkatkan, paling tidak untuk 2 atau 3 tahun mendatang.
8. Dokumen-dokumen resmi hendaknya dapat dijadikan contoh atau bukti penerapan kaidah ejaan secara baik.
9. Sarana penunjang seperti kamus bahasa Indonesia yang baku perlu segera diterbitkan.
10. Bahan-bahan lain yang berlainan atau bertentangan dengan kaidah ejaan resmi khususnya dapat membingungkan para pemakai bahasa.

Catatan:

- ¹ Panitia Ejaan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diketuai oleh A.M. Moeliono disahkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 662/1967, tanggal 19 September 1967. Pada waktu itu Lembaga Bahasa Nasional masih bernama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan.
- ² Surat Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972 dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 1972, tetapi mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1972.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1972. *Pedoman Ejaan yang Disempurnakan*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1975. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*.
- Departemen Penerangan. 1972. *Pidato Kenegaraan*.
- Majalah *Nusa: Misoellaneous Studies in Indonesian and Languages in Jakarta*. Bagian II. 1976.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Zain, ST. M. *Kamus Umum Modern Bahasa Indonesia*.

BEBERAPA SEGI STANDARDISASI TATA BAHASA

Anton M. Moeliono

Universitas Indonesia

Keragaman Bahasa

Bahasa Indonesia yang amat luas wilayah pemakaiannya dan bermacam lapisan penuturnya, mau tak mau, takluk pada hukum perubahan. Dalam sebuah karangan lain, penulis ini (1977) mengajukan ikhtisar yang menggambarkan variasi bahasa itu. Dengan mengikuti Halliday (1968:141) dan Quirk (1973:13 — 29) ragam bahasa dapat ditinjau menurut golongan penutur bahasa dan menurut jenis pemakaian bahasa. Bahasa dari sudut pandangan penutur dapat diperinci menurut patokan (1) daerah, (2) taraf pendidikan, dan (3) sikap penutur. Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya digolongkan sebagai berikut: (1) ragam dari sudut pandangan bidang atau pokok persoalan, (2) ragam menurut sarananya, dan (3) ragam yang mengalami gangguan pencampuran.

Ragam daerah sejak lama dikenal dengan nama *logat* atau *dialek*. Bahasa yang menyebar luas selalu mengenal logat. Berapa banyak jumlah logat bahasa Indonesia? Jawaban atas pertanyaan itu bergantung pada ukuran kecermatan yang kita terapkan dalam pengamatan kita.

Ragam bahasa menurut tingkat pendidikan formal, yang menyilangi ragam dialek, menunjukkan perbedaan yang jelas antara kaum yang bersekolah dan yang tidak. Perbedaan kedua ragam itu antara lain di bidang tata bunyi. Bunyi /f/ dan gugus konsonan akhir /-ks/, misalnya, tidak selalu terdapat dalam ujaran orang yang tidak atau hampir tidak bersekolah. Bentuk *film* dan *kompleks*, yang dikenal di dalam ragam orang yang ber-

pendidikan, bervariasi dengan *pilem* dan *komplek* dalam ragam orang yang tidak mujur dapat menikmati pengajaran di sekolah. Perbedaan kedua ragam itu tampak juga pada tingkat kalimat. *Saya mau tulis ini surat ke pamanku* dapat dibandingkan dengan *Saya mau menulis surat ini kepada paman saya*. Yang pertama dapat diterima dalam ragam bahasa orang yang kurang bersekolah, tetapi bentuk yang kedualah yang dituntut di dalam ragam orang yang berpendidikan bagi pernyataan yang sama.

Ragam bahasa menurut sikap penutur mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada dasarnya tersedia bagi tiap pemakai bahasa. Ragam ini, yang dapat disebut *gaya* atau *langgam*, pemilihannya bergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajaknya berbicara atau terhadap pembacanya. Sikapnya itu dipengaruhi, antara lain oleh umur dan kedudukan yang disampainya, pokok persoalan yang hendak disampikannya, dan tujuan informasinya. Perbedaan berbagai gaya atau langgam itu tercermin dalam kosa kata dan tata bahasa. Perhatikanlah, misalnya, gaya bahasa kita jika kita memberikan laporan kepada atasan, menulis surat cinta, memberi instruksi kepada bawahan, atau mengobrol dengan sahabat karib.

Setiap penutur bahasa hidup dan bergerak dalam sejumlah lingkungan masyarakat yang adat-istiadatnya atau cara pergaulannya dapat berbeda. Orang yang ingin turut serta dalam bidang tertentu atau yang ingin membicarakan pokok persoalan yang berkaitan dengan lingkungan itu harus memilih salah satu ragam yang dikuasainya dan yang cocok dengan bidang atau pokok itu. Jumlah ragam yang dimahirinya itu agak terbatas karena bergantung pada luas-sempitnya pergaulannya, pendidikannya, profesinya, kegemaran dan pengalamannya, ilmu, teknologi, pertukangan, perdagangan, seni rupa dan seni sastra, olah raga, perundang-undangan, dan angkatan bersenjata.

Kerap kali perbedaan ragam itu berkisar pada pemilihan kata atau ungkapan khusus digunakan dalam bidang atau dalam pembahasan pokok persoalan yang bersangkutan. Misalnya, *akidah, biara, pedanda* (agama); *pemilihan umum, kuorum* (politik); *atom, fosil, pembelahan inti* (ilmu); *penyulingan, beton pratekan*, (teknologi); *baut, dongkrak* (pertukangan); *konsumen, cek* (perdagangan); *stupa, naturalisme* (seni rupa) *sajak, rima* (seni sastra); *gelandang, sundulan* (olah raga); *pidana, perdata* (perundang-undangan); *panglima, satuan tugas* (angkatan bersenjata). Di samping itu, ada juga variasi dalam tata bahasanya. Perhatikanlah bagaimana bangun

kalimat tersusun dalam uraian dapur, wacana ilmiah, surat putusan, undang-undang, wawancara, doa, ikatan, dan kawat.

Ragam bahasa menurut jenis sarananya lazim dibagi atas ragam lisan atau ujaran dan ragam tulisan. Tiap-tiap golongan masyarakat bahasa memiliki ragam lisan, tetapi tidak semua lapisan mengenal ragam tulisan. Ada dua jenis perbedaan pokok yang memadai kedua ragam itu. Pertama, jika kita menggunakan sarana tulisan, kita berpraanggapan bahwa orang yang kita ajak berbahasa tidak ada di hadapan kita. Akibatnya adalah bahwa bahasa kita perlu lebih terang dan jelas karena uraian kita tidak dapat disertai oleh gerak isyarat, pandangan, atau anggukan, tanda penegas di pihak kita atau tanda pemahaman di pihak pembaca kita. Itulah sebabnya, kalimat dalam ragam tulisan lebih eksplisit sifatnya.

Kalimat dalam ragam tulisan penutur yang cermat tidak jarang dikaji, dinilai, dan disunting sebelum terwujud dalam bentuk akhirnya (Haugen, 1972:80). Kedua, ragam tulisan tidak menggambarkan dengan sempurna tinggi-rendahnya nada atau panjang-pendeknya suara yang berperan dalam ragam lisan — dan yang sering memberikan nuansa arti — sehingga penulis acap kali perlu merumuskan kembali kalimatnya jika ia ingin menyampaikan jangkauan makna yang sama lengkapnya atau ungkapan perasaan yang sama telitinya.

Keleluasaan pengaruh timbal-balik di antara bahasa yang digunakan secara berdampingan, seperti halnya di Indonesia, ada batasnya. Selama pemasukan unsur bahasa daerah Nusantara atau bahasa asing, misalnya, bahasa Belanda dan Inggris, ke dalam bahasa Indonesia mengisi kekosongan atau memperkaya kesinoniman dalam kosa kata atau bangun kalimat maka gejala itu kita anggap wajar. Akan tetapi, serta unsur bahasa yang bersangkutan itu mengganggu rasa bahasa kita atau mengganggu keefektifan penyampaian informasi kita, maka ragam bahasa yang dicampuri unsur masukan itu kita tolak. Itulah yang disebut ragam bahasa yang mengalami interferensi atau gangguan pencampuran. Barang tentu, batas antara pencampuran yang mengganggu dan yang tidak, tidak selalu jelas. Banyaknya unsur pungutan yang berasal dari bahasa Jawa, misalnya, dianggap pemerayaan bahasa Indonesia, tetapi masuknya unsur pungutan bahasa Inggris oleh setengah orang dianggap perusakan keaslian dan kemurnian bahasa kita. Lafal Indonesia yang kesunda-sundaan agaknya masih dapat diterima orang; tidak demikian halnya dengan lafal yang kebelanda-belandaan.

Di dalam batas makalah ini, penulis ini tidak akan menyinggung ragam pijin dan kreol Indonesia yang tersebar di beberapa daerah seperti Manado, Ambon, Banda, Larantuka, dan Kupang.

Mosaik ragam bahasa di atas mencerminkan khasanah bahasa kita yang jalin-menjalin. Jalinan itu akan menjadi terang dengan contoh yang berikut. Orang dari Ujung Pandang (logat), lulusan universitas (pendidikan) menulis karangan (sarana) tentang adat orang Toraja (bidang) untuk majalah (bidang) sekolah siswa SMA (sikap). Lagi, pemuda Jakarta (logat) mengobrol (sarana) dengan santai (sikap) tentang pertandingan sepak bola (bidang) dengan teman karibnya (sikap).

Ragam bahasa yang beraneka ragam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia karena masing-masing berbagi yang lazim disebut "inti bersama yang umum". Tingkat kemahiran yang mewujudkan berbagai ragam bahasa berbeda-beda. Pertanyaan yang mungkin diajukan ialah dapatkah seorang menguasai semua ragam yang terpakai dalam bahasanya.

Dalam teori, jika masyarakat bahasa yang bersangkutan sangat sederhana sifatnya dan peri kehidupannya serba seragam, tidak mustahil orang mampu mencapai tingkat kemahiran yang tinggi. Jika masyarakat bahasa sudah majemuk coraknya, jika sistem bagi kerjanya sudah amat berkembang, hampir tidak mungkin orang mengenal dan menguasai semua ragam bahasa dengan lengkap. Namun, baiklah disadari bahwa jumlah ragam yang kita "kenali" biasanya lebih besar daripada jumlah ragam yang kita "mahiri". Dalam praktik, kita juga tidak perlu menguasai semua ragam bahasa yang tersedia.

Pemantapan Kaidah Tata Bahasa

Inti bersama yang umum yang disebut di atas dikenal orang lewat buku tata bahasa Indonesia yang merupakan karangan ahli bahasa. Di sini kita layak memperbedakan dua paham yang kadang-kadang dikacaukan. Tata bahasa mungkin dapat kita beri batasan yang berikut: "seperangkat kaidah yang memerikan pemakaian bahasa, baik keteraturannya maupun penyimpangan dari keteraturannya itu". Kaidah itu ada yang direkam secara tertulis, ada yang tidak. Rekaman itu disebut buku tata bahasa yang kepadanannya, atau keadekuatannya bergantung pada taraf kecermatan penyusunnya.

Jika kita memakai penggolongan ragam bahasa di atas sebagai kerangka acuan, maka tampaknya buku tata bahasa, yang banyak dipakai

dan yang paling berwibawa, disusun berdasarkan ragam orang yang berpendidikan, yang banyak berasal dari Sumatra, dan yang karya tulisannya bercorak susastra. Pertama-tama dapat disebut buku van Ophuijsen (1910), yang walaupun ditulis orang Belanda, menggambarkan bahasa Melayu Riau-Johor. Buku ini banyak pengaruhnya di dalam sistem pendidikan kita waktu itu. Berturut-turut kita menyaksikan munculnya buku Zain (1942), Lubis (1946), Alisjahbana (1949 -- 1950), Mess (1951), Fokker (1951), Poedjawijatna dan Zoetmulder (1955), Slametmuljana (1956 — 1957), dan Keraf (1970). Tanpa mengurangi kebajikan penata bahasa yang lain, kita dapat mendukung pendapat Teeuw (1961:66) bahwa buku-buku yang tertera di ataslah yang amat berpengaruh dalam proses penghabluran dan pematapan kaidah tata bahasa.

Tersedianya sarana percetakan mengakibatkan ragam tulisan dengan ciri-ciri yang disebut di atas melewati batas ruang dan waktu masyarakat bahasa asalnya. Patut disebut di sini badan penerbit Balai Poestaka dengan majalahnya *Pandji Poestaka*.

Di antara penyantun bahasanya harus disebut St. Perang Boestami, Noer Soetan Iskandar, M. Kasim, A. Moeis, St. Pamoentjak, Sanoesi Pane, dan S.T. Alisjahbana (Mess, 1954:18).

Alisjahbana jugalah yang pada tahun 1933 mulai menerbitkan *Poedjanga Baroe*, Surat kabar pada masa sebelum Perang Dunia II di Jakarta (Batavia), Surabaya, Medan, dan Padang dengan wartawannya seperti A. Rivai, H. Agus Salim, M. Amir, Parada Harahap (*Bintang Timoer*), Adinegoro (*Pewartu Deli*), Tjindarbumi (*Soeara Oemoem*), M. Yamin, dan Soemanang (Moes, 1954:17), turut pula mengembangkan dan membarui bahasa Melayu-Riau menjadi bahasa Indonesia. Sesudah Perang Dunia II peranan majalah *Pembina Bahasa Indonesia*, asuhan Alisjahbana, amat besar sebagai pedoman para guru bahasa.

Di samping jasanya sebagai sarana, kadang-kadang memang satu-satunya, dalam pengajaran bahasa yang menjaga kesinambungan pematapan kaidah tata bahasa, buku yang pernah dipakai secara luas itu, jika ditinjau dengan ukuran kepaadaan, tidak sepenuhnya menggambarkan lagi pemakaian bahasa masa kini. Akibatnya adalah bahwa ada ketidakserasian antara kaidah yang diperkirakan dan kenyataan orang berbahasa. Karena kaidah dan praktik tidak sesuai, kemantapan lama mulai goyah sehingga di sana-sini timbul ketidakpastian. Orang mulai sangsi apa yang betul dan apa yang salah. Apa yang dibolehkan dan apa yang tidak.

Berikut ini akan dibahas beberapa sebab yang mungkin melatari ketidakpastian itu.

Kemantapan yang Mengambang

Bahasan tentang kemantapan dan kegoyahan kaidah kata bahasa ini bertumpu pada tiga sendi: (1) teori atau wawasan bahasa, (2) pelaksanaan atau implementasi wawasan itu, dan (3) hasil pelaksanaannya.

Teori bahasa diperlukan untuk menetapkan norma, standar, atau baku yang memadai dan yang secara merata dapat diterima dan dipatuhi. Teori fonologi yang mendasari uraian di dalam buku tata bahasa Indonesia umumnya berasal dari kaidah tata bunyi bahasa Belanda. Itulah sebabnya, mengapa sampai sekarang dipertikaikan orang tempat tekanan kata walaupun tekanan bahasa Indonesia berbeda peranannya dengan tekanan bahasa Belanda seperti dibuktikan oleh Halim (1947). Jenis gugus konsonan dan gejala morfonemik yang ditimbulkannya belum tercantum secara eksplisit. Misalnya, *memrotos* atau *memprotes*.

Di bidang morfologi buku tata bahasa tidak membedakan kaidah yang produktif dari yang tidak produktif dalam pembentukan kata. Misalnya, *kebanjiran* mungkin, tetapi *keairbahan* tidak.

Pemerian tentang luas sempitnya daya terap kaidah tidak akan ditemukan. Mengapa, misalnya, bentuk *teruji*, yang beranalogi pada *tersentuh*, tidak dapat diartikan 'diuji dengan tidak sengaja'. Apakah bentuk kanomik kata yang berikut: *menormaliser*, *menormalisasi (kan)*, atau *menormalkan*; *pertanggungjawaban*, atau *pertanggung jawaban*.

Bagaimanakah kita memakai prefiks *a-*, *non-*, *tan-*, *nir-*?

Di bidang sintaksis, benarkah urutan D-M itu kaidah pokok dalam bangun frase? Jika urutan M-D, misalnya, pada *tiga orang, akan datang masih harus menerima*, hanya dianggap perkecualian, tidaklah kita memiuhkan gambaran struktur bahasa? Kapanakah kata *yang*, sebagai perangkai pewatasan, boleh dihilangkan dalam frase? Misalnya, *keterangan lebih lanjut dan keterangan yang lebih lanjut*. Uraian tentang tipe frase, tipe klausa, dan tipe kalimat yang amat singkat dalam buku tata bahasa seakan-akan mencerminkan kenyataan bahwa pemakai bahasa Indonesia hanya mengenal bangun kalimat yang sederhana. Kaidah sintaksis yang tidak memadai itulah yang menjadi sumber pembuatan kalimat yang rancu dan yang tidak bersubjek. Misalnya, *Dalam rapat kemarin mengambil keputusan memberhentikan*

bendaharawan. Buku tata bahasa tidak memberikan pedoman yang mana yang harus dipakai di antara ungkapan tetap yang berikut: *sampai ke* atau *sampai dengan*; *tergantung dari*, *bergantung pada*, atau *bergantung kepada*; *terdiri atas*, *terdiri dari*, atau *terdiri*; *pandangan atas*, atau *pandangan terhadap*; *berbicara tentang* atau *membicarakan tentang*.

Satu dua masalah yang bertalian dengan kategori leksikal dikemukakan di sini menunjukkan bahwa ketiadaan teori yang memadai dapat menghasilkan kaidah yang tidak mantap. Pertama, pengulangan bentuk, sebagai upaya penandaan kategori jumlah banyak, merupakan kaidah tata bahasa atau bukan? Jika memang kaidah, mengapa tidak selalu perlu diterapkan? Misalnya, *Peraturan ini berlaku untuk badan-badan usaha Pemerintah dan perusahaan swasta*. Apakah bentuk *beliau-beliau* bentuk halus *mereka*? Apakah bentuk *beberapa pejabat-pejabat* menegaskan keinginan orang agar perbedaan jumlah dinyatakan dengan jelas? Kedua, jika orang, berkat perkenalannya dengan bahasa Inggris, menggunakan kata *akan*, *sedang*, *sudah*, dan *telah* sebagai penanda kategori waktu, haruskah kebiasaan itu dianggap kaidah? Jika begitu, mengapa pemakaiannya tidak bertaat asas?

Uraian di atas mungkin dapat meyakinkan kita bahwa teori bahasa kita perlu disempurnakan agar norma yang dihasilkannya lebih sesuai dengan hakikat bahasa Indonesia. Kita boleh bersyukur bahwa salah satu rintisan ke arah itu telah terjelma dengan terbitnya buku *Pedoman Penulisan Tata Bahasa Indonesia* suntingan Yus Rusyana dan Samsuri (1976). Pemantapan norma itu, yang juga disebut pembakuan atau standardisasi, berpraanggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti penyeragaman kaidah. Namun, penyeragaman kaidah tidak berarti penyamaan ragam bahasa. Ketimpangan yang terasa, antara jumlah kaidah tata bahasa dan pemakaian bahasa yang nyata, justru disebabkan oleh norma yang belum mencakupi ciri-ciri ragam bahasa dari sudut pandangan bidang atau pokok persoalan dengan secukupnya.

Pelaksanaan atau implementasi wawasan tata bahasa yang turut memantapkan kaidah-kaidahnya dapat bercorak kelembagaan dan perorangan. Di atas sudah disinggung peranan sekolah sejak dulu serta peranan penerbit dan penulis pada masa prakemerdekaan. Apakah sekolah dan kalangan penerbit serta penulis masih memegang peranan yang memantapkan? Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dewasa ini agaknya tidak berhasil dengan sepenuhnya memantapkan penguasaan kaidah tata bahasa (Effendi, 1975:12 —13). Guru bahasa Indonesia tidak selalu dapat dijadikan tolok

atau model yang diteladani dalam pemakaian bahasanya (Oka, 1976:57). Karena guru bahasa sering hanya berpedoman pada buku tata bahasa yang ada dan yang tidak dapat menafsirkan ciri ragam bahasa di luar bidang sastra, maka dapat dipahami jika lambat-laun para pelajar menjadi ragu-ragu akan kebenaran kaidah yang dipelajarinya di sekolah.

Keluaran sistem pengajaran bahasa itu, yang menjadi penerbit, penulis, atau wartawan, selanjutnya melipatkan ketidakpastian itu karena ragam tulisannya dianggap orang gambaran hakikat bahasa Indonesia masa kini.

Sejarah perkembangan bahasa menunjukkan bahwa norma tata bahasa yang baku umumnya dijabarkan dari ragam bahasa orang yang berpendidikan karena merekalah yang menjadi tokoh anutan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Kemantapan akan timbul jika terdapat keserasian antara kaidah yang diajarkan di lembaga pendidikan formal dan kaidah yang dipraktikkan oleh pemuka masyarakat. Jika kemahiran berbahasa tokoh anutan itu tidak dapat diteladani, menyelinaplah ketidakpastian kaidah ke dalam pemakaian bahasa. Keadaan di Indonesia agaknya belum memperlihatkan keserasian itu karena golongan pembina pendapat umum dewasa ini tidak semuanya sempat menguasai dengan secukupnya ragam bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, penyuluhan bahasa yang akhir-akhir ini digiatkan lewat sarana komunikasi massa dan yang bertujuan turut memantapkan kaidah tata bahasa — di dalam situasi ketidakserasian itu oleh setengah orang dapat dianggap usaha dari sumber yang berwenang menafsirkan norma tata bahasa yang berlaku dan oleh setengah orang lagi, usaha yang sewenang-wenang karena tidak cocok dengan perangkat kaidah yang diyakininya sendiri.

Kemantapan kaidah, selanjutnya, dipengaruhi oleh produk implementasi teori bahasa (Kridalaksana, 1976:43). Peranan buku tata bahasa sudah disinggung di atas. Karya sastra terbitan Balai Poestaka dulu untuk zamannya memang dianggap "su-sastra", tulisan yang memuaskan selera estetik pembacanya. Bahwa karangan itu sekarang mungkin tidak dapat memikat kalangan tertentu lagi, hanyalah tanda bahwa kaidah sintaksis dan kaidah wacana dewasa ini mengalami perubahan. Dapatkah kita beranggapan bahwa karya sastra mutakhir turut memantapkan kaidah tata bahasa? Kesan penulis ini ialah bahwa banyak penulis modern lebih senang mementingkan cerita dan alurnya daripada keindahan dan kerapian bahasanya. Akan menarik sekali andaikan dapat diteliti beberapa banyak pengarang

menjadi tolok teladan pemakaian bahasa orang lain. Makin banyak penganutnya, makin besar pengaruhnya sebagai pemantap kaidah bahasa.

Perluakah Tata Bahasa yang Normatif?

Jika kata *normatif* ditautkan dengan *norma* yang dapat memantapkan kaidah tata bahasa, kata normatif tidak perlu diartikan 'dogmatis', 'tradisional', 'kolot', atau 'tidak ilmiah'. Sebaliknya, relativisme dalam linguistik yang beranggapan bahwa semua jenis bahasa sama baiknya tidak perlu berarti 'ilmiah' karena sikap toleransi itu.

Sikap ilmiah di sini ialah jika orang mengenali adanya masalah kebahasaan di Indonesia dan mencari jalan bagaimana mengatasinya. Di satu pihak kita perlu berteriak bersama Hall (1953) "*Leave your language alone*", di pihak lain kita juga tidak perlu berseru dengan Alisjahbana (1965) bahwa kita berhadapan dengan "*the failure of modern linguistics in the face of linguistic problems of the twentieth century*". Sebabnya ialah bahwa kedua ahli bahasa itu pada waktu itu tidak melihat kemungkinan bahwa kaum linguist dapat berdwifungsi juga. Kita selayaknya memperbedakan penelitian serta pemerian bahasa dengan pembinaan serta pengembangan bahasa. Di dalam situasi Indonesia kedua pasang kegiatan itu isi-mengisi. Pengembangan bahasa harus berdasar pada penelitian. Penelitian yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembinaan, dewasa ini, merupakan kemewahan. Haugen (1972: 181—182), misalnya, dalam karangannya berpendapat bahwa linguist dalam perancangan bahasa dapat berperan sebagai (1) sejarawan, (2) pemerih bahasa, (3) ahli teori, dan (4) guru.

Sebagai sejarawan, linguist dapat menurut sejarah bahasa-bahasanya. Studinya itu dapat menetapkan kesinambungan adat orang berbahasa. Ia dapat menelaah perbedaan antara bentuk yang asli dan bentuk pungutan. Pendapatnya itu dapat dijadikan dasar bagi penyelesaian masalah pungutan dalam bahasa.

Sebagai pemerih bahasa, linguist dapat menyiapkan deskripsi yang akurat tentang bahasa masa kini, baik ragam tulisannya maupun ragam lisannya. Hasil pekerjaannya dapat berbentuk pedoman ejaan, buku tata bahasa, kamus, pedoman gaya tulis-menulis, dan tata istilah.

Sebagai ahli teori, linguist dapat memberikan pengarahan dalam pemahaman hakikat bahasa; dan berkat keahliannya di bidang teknik analisis bahasa, ia dapat melukiskan rencana bahasa. Pengetahuannya tentang hubungan antara ragam lisan dan tulisan menjadikan ia mampu meramal-

kan apa yang mungkin terjadi jika salah satunya dimanipulasi. Ia menyadari pentingnya kesatuan struktur demi komunikasi yang efisien dan sekaligus ia mengakui keleluasaan bagi penyimpangan perorangan.

Sebagai guru, linguist, jika terpanggil, bersiap-siap menghadapi masalah yang berkenaan dengan pengajaran dan penyuluhan bahasa. Pengalamannya dapat membantunya dalam penilaian suatu proyek terlaksanakan atau tidak dan diperlukan atau tidak.

Dengan mempertimbangkan peranan yang mungkin dapat dipegang kaum linguist di dalam usaha menangani masalah kebahasaan di Indonesia, penulis ini mendukung cita-cita Alisjahbana (1976:83 — 39) yang sudah dicanangkannya sejak berpuluh-puluh tahun agar penyusun tata bahasa yang menggambarkan norma bahasa dengan memadai memperoleh prioritas utama dalam kegiatan pengembangan bahasa. Sesudah itu perlu dijabarkan daripadanya tata bahasa pedagogis untuk tujuan pengajaran. Perbedaan di antara kedua jenis tata bahasa itu perlu ditegaskan karena tujuannya berlainan. Secara ideal, tata bahasa pedagogis menuju ke kemampuan pelajar agar ia dapat mengenali dan menghasilkan ujaran dan tulisan berdasarkan teori belajar yang adekuat (Saporta, 1973:266).

Kita dapat mengambil ibarat dari pengalaman pemakai bahasa modern yang mengeluarkan buku tata bahasa dan kamusnya yang pertama pada waktu negerinya melaju dalam kemakmuran dan kekuasaan pada abad yang kelima belas dan keenam belas. Spanyol memiliki *Grammatica de la Lengua Castellana*-nya pada tahun 1492, sedangkan kodifikasi bahasa di Italia dimulai sejak 1582, dan di Prancis sejak tahun 1635 (Haugen 1972:169). Pemantapan norma yang bertujuan mencapai kode bersama yang memang diperlukan bukan semata-mata masalah bahasa, melainkan masalah nasional, sosial, dan pedagogis.

Akhirulkalam, pada peristiwa kita mengperingati permakluman Sumpah Pemuda setengah abad yang lalu, baiklah kita terapkan ucapan Samuel Johnson, Bapak Leksikografi Inggris, yang pada usia hampir lima puluh tahun dengan penuh semangat menulis dalam prakata kamusnya *A Dictionary of the English Language* (1755), "*Life may be lengthened care, though death cannot be ultimately defeated: tongues, like governments, have a natural tendency to degeneration: we have long preserved our constitution, let us make some struggles for our language*" (Haugen, 1972:149).

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S.T. 1949. *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- 1965. *The Failure of Modern Linguistics in the Face of Linguistic Problems of the Twentieth Century* (Pidato pengukuhan). Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- 1976. *Language Planning for Modernization: the Case of Indonesia and Malaysian*. The Hague: Mouton.
- Allen, J.P.B. dan S. Pit Corder. Editor. 1973. *Reading for Applied Linguistics. Jilid 1, The Edinburgh Course in Applied Linguistics*. London: Oxford University Press.
- Effendi, S. 1975. "Beberapa Pokok Pikiran tentang Pengajaran Bahasa" Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra*, I, 1.
- Fishman, J.A. Editor. 1978. *Reading in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.
- Fokker, A.A. 1951. *Inleiding tot de Studie van de Indonesische Syntaxis*. Groningen, Djakarta Wolters (terjemahan Djohar: *Pengantar Sintaksis Indonesia*). Jakarta: Pradjna Paramita.
- Halim, A. 1974. *Intonation in Relation to Syntax in Bahasa Indonesia* (Tesis). Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional dan Penerbit Djambatan.
- 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hall, R.A. 1950. *Leave Your Language Alone*. Ithaca: Linguistica.
- Halliday, M.A.K. 1968. "The Users and of Language" Dalam J.A. Fishman. Editor. *Reading in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.

- Haugen, E. 1972. *The Ecology of Language*. Essays selected and introduced by Anwar S. Dill. Stanford University Press.
- Keraf, G. 1970. *Tatabahasa Indonesia*. Ende: Nusa Indah.
- Kridalaksana, H. 1976. "Tata Cara Standardisasi dan Pengembangan Bahasa Nasional". Dalam Amran Halim 1976.
- Lubis, M. 1946. *Paramasastera Landjut*. Medan.
- Mees, C.A. 1951. *Tata Bahasa Indonesia*, cet. ke-4, 1954. Jakarta-Groningen: J.B. Wolters.
- Moeliono, A.M. 1977. "Bahasa Indonesia dan Ragam-ragamnya". Dalam Harian *Kompas*, 27 -- 28 Oktober.
- Oka, I.G.N. 1976. "Pembinaan Pengajaran Bahasa Indonesia". Dalam Amran Halim 1976.
- Ophuijsen, C.A. van. 1970. *Maleische Spraakkunst*, Leiden: S.C. van Doesburgh.
- Poedjawijatna, I.R. dan P.J. Zoetmulder. 1955. *Tata Bahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Atas*, I, II. Jakarta: Obor.
- Qoirk, R. et al. 1973. *A Grammar of Cotemporary English*. cet. ke-3. London: Lougman Group.
- Rusyana, Y. dan Samsuri. Editor. 1976. *Pedoman Penulisan Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Saporta, S. 1973. "Scientific Grammars and Pedagogical Grammars". Dalam Allen dan Pit Corder 1973.
- Slametmuljana 1956, 1957. *Kaidah Bahasa Indonesia* I, II. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Teeuw, A. 1961. *A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia*, s'Gravenhage: Martinus Nijhoof.
- Zain, S.M. 1942. *Jalan Bahasa Indonesia*. Cet. ke-9, 1954 Jakarta: Dharma.

RAGAM STANDAR DAN NONSTANDAR BAHASA INDONESIA

D.P. Tampubolon

IKIP Medan

Ragam Bahasa Indonesia

Ragam suatu bahasa¹ secara umum dapat dilihat pada tiga dimensi, yaitu, dimensi regional, dimensi sosial, dan dimensi temporal (David, 1969, 24:45 — 57). Berdasarkan ketiga dimensi inilah pada umumnya berbagai ragam suatu bahasa dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu ragam regional, ragam sosial, dan ragam temporal. Istilah dimensi mengimplikasikan bahwa ketiga ragam itu saling berhubungan. Ragam regional tidak terpisahkan dari ragam sosial karena di dalam ragam regional pada umumnya akan timbul berbagai ragam sosial.

Terjadinya perubahan-perubahan dalam kedua ragam ini, sebagai akibat perubahan-perubahan sosial, akan menyebabkan ragam tertentu tidak terpakai lagi. Ragam yang tidak terpakai demikian ini merupakan ragam temporal (historis).

Timbulnya ragam-ragam suatu bahasa pada dasarnya adalah disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor psikologis-fisiologis dan faktor sosial. Faktor Psikologis-fisiologis yang dimaksud ialah proses-proses interaksi antara sistem bahasa dan sifat-sifat psikologis-fisiologis setiap penutur. Proses asimilasi dan analogi adalah dua contoh proses interaksi seperti itu. Dalam proses-proses interaksi ini mungkin banyak ragam yang terjadi, tetapi sebahagian besar ragam itu tidak lama bertahan dan akhirnya hilang dari pemakaian sebelum sempat ditiru penutur-penutur lain. Di antara berbagai ragam ada yang terjadi berulang-ulang dan dalam taraf perkembangan selanjutnya sudah ditiru oleh anggota-anggota masyarakat bahasa lainnya

sehingga mencapai taraf kemantapan dalam pemakaian. Faktor psikologis-fisiologis itu tidak terlepas dari faktor-faktor sosial karena faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya proses-proses interaksi yang dikemukakan di atas tadi. Oleh sebab itu, saya hanya membicarakan faktor-faktor sosial saja.

Ragam Regional

Dua faktor sosial pokok, atau barangkali lebih baik disebut faktor sisiopolitik, yang menimbulkan ragam regional yaitu "daerahisme" dan "nasionalisme". Yang dimaksud dengan daerahisme di sini ialah penonjolan identitas kedaerahan. Identitas kedaerahan ini tidak harus merupakan penonjolan kesukuan (*ethnicity*) meskipun faktor kesukuan dimaksud ini mungkin terdapat atau mungkin berkembang ke arah ini.

Dalam bahasa Indonesia dewasa ini sepanjang pengamatan saya tidak terdapat ragam regional seperti yang terdapat di Amerika Serikat. Ragam regional yang dimaksudkan ini timbul dalam bahasa Indonesia adalah disebabkan oleh dua hal: (1) adanya bahasa-bahasa daerah dan (2) rasa kesatuan bahasa yang berkembang terutama sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang dapat dikatakan sudah mencapai taraf kemantapan dewasa ini. Oleh karena adanya bahasa-bahasa daerah yang hidup di seluruh Nusantara, daerahisme, walaupun ada keinginan menonjolkan, tidak diperlihatkan dalam bahasa Indonesia, tetapi diperlihatkan dalam bahasa daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, keinginan memperlihatkan daerahisme pada umumnya dikalahkan oleh rasa kesatuan bangsa.

Adanya ragam-ragam regional bahasa Indonesia dewasa ini bukanlah disebabkan oleh daerahisme sebagai didefinisikan pada permulaan tadi, melainkan oleh keadaan lain, yakni oleh "kontak bahasa". Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan selalu mempunyai kontak dengan bahasa-bahasa daerah. Dalam kontak-kontak yang dimaksudkan ini kedua bahasa bersangkutan saling mempengaruhi. Penutur asli bahasa daerah selalu dipengaruhi bahasa daerahnya itu ketika berujar dalam bahasa Indonesia sehingga terdengarlah bahasa Indonesia yang mengandung pengaruh bahasa daerah. Penutur asli bahasa Toba dan Jawa, misalnya, jika berbicara dalam bahasa Indonesia dapat dengan mudah ditandai. Sebagai ilustrasi, marilah kita perhatikan dialog berikut ini.

A: [bⁿapa) Kⁿ bⁿioh bⁿaki_{tu}]
 (Bapak kok bilang begitu)

B: [m x r̄apa r̄upana z̄adi sayā diam sa:za]
 (Mengapa rupanya. Jadi, saya diam saja)

Pengujaran konsonan letup bersuara seperti /b/ dan /g/ dengan desah berat sebagai terlihat di atas adalah pengaruh sistem fonologi bahasa Jawa. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa penutur A adalah suku Jawa atau orang yang sudah lama berdiam di daerah itu. Pengujaran vokal *schwa* /ə/ menjadi sebagai vokal depan bawah terbuka /æ/ adalah pengaruh fonologi bahasa Toba. Demikianlah juga vokal /a/ yang mendekati vokal bulat lebar, dan juga konsonan /z/ sebagai pengganti /j/; begitu juga /n/ yang berubah menjadi /n/. Kuat dugaan bahwa penutur B adalah suku Batak Toba atau orang yang sudah lama berdiam di daerah Tapanuli Utara. Sudah tentu ada juga penutur yang dapat meniru kedua pengujaran tersebut. Akan tetapi, kasus demikian bukan masalah pengaruh lagi.

Jelas kiranya bahwa ragam-ragam regional bahasa Indonesia yang saya maksud adalah ragam-ragam yang terjadi karena pengaruh bahasa-bahasa daerah. Pengaruh-pengaruh yang dimaksud pada umumnya baru bertaraf interferensi, belum mencapai taraf integrasi. Dengan demikian, ragam-ragam itu masih bersifat sementara. Apabila pengaruh-pengaruh dimaksud sudah mencapai taraf integrasi dan ragam-ragam regional yang terjadi sudah menggantikan bahasa-bahasa daerah sehingga terjadi situasi keesa-bahasaan, maka ragam-ragam regional yang dimaksudkan sudah mencapai taraf kemandapan. Ragam-ragam regional bahasa Indonesia seperti inilah barangkali yang bersamaan kedudukannya dengan ragam-ragam regional bahasa Indonesia A tertera terdahulu. Sebelum tercapai taraf seperti di atas ini, meskipun telah terjadi integrasi sebagai yang dimaksud oleh Mackey (1968:569 — 570), agaknya belum dapat dikatakan bahwa telah terjadi ragam-ragam regional bahasa Indonesia yang mantap.

Sehubungan dengan kontak bahasa, satu lagi situasi kebahasaan perlu mendapat perhatian, yaitu kreolisasi. Kreolisasi adalah suatu perkembangan linguistik yang terjadi karena dua bahasa berada dalam kontak dalam waktu yang lama. Dalam kontak itu terjadi integrasi antara kedua bahasa yang dimaksud. Dalam integrasi ini pada umumnya terjadi bahwa salah satu bahasa menjadi sumber tata bahasa. Pada mulanya bentuk bahasa yang terjadi adalah bahasa pijin (*pidgin*) yang timbul karena urgensi komunikasi, tetapi

berkembang terus menjadi kreol (Stewart 1968:539). Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Bickerton (1972:34—35). Dia mengemukakan bahwa dalam kreolisasi terdapat tiga tingkatan ragam yang merupakan suatu kontinum, yaitu *basilek* (*basilect*), *mesolek* (*mesolect*), dan *akrolek* (*acrolect*). Basilek bersamaan dengan pijin dan *akrolek* bersamaan dengan pijin dan *akrolek* bersamaan dengan kreol.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kreol atau ragam *basilek*, *masolek*, dan *akrolek* itu termasuk ragam regional atau tidak. Berdasarkan kenyataan bahwa faktor yang menonjol dalam perkembangan kreol adalah faktor regional, bukan faktor sosial seperti kelas sosial, pendudukan, dan lain-lain, maka dapat dikatakan bahwa kreol adalah ragam regional. Akan tetapi, yang masih menjadi tanda tanya dalam hal ini ialah ragam regional bahasa manakah dia? Kreol adalah akibat integrasi dua bahasa dalam jangka waktu yang lama dan dengan cara khusus sebagaimana disebut terdahulu sehingga menentukan bahasa mana yang harus disebut bahasa yang mempunyai ragam regional dimaksud tadi. Oleh sebab itu, kreol agaknya lebih baik disebut ragam regional yang bersifat unik.

Sehubungan dengan kreol, "bahasa Jakarta" timbul dalam pikiran. Apakah bahasa ini bukan hasil kreolisasi? Jika demikian, bahasa-bahasa manakah yang berintegrasi dan sudah hingga taraf manakah kreolisasi itu (*basilek*, *mesolek*, atau *akrolek*)? Atau bahasa ini adalah salah satu ragam regional bahasa Melayu (dulu Melayu Betawi) sebagaimana dikatakan oleh kalangan tertentu? "Bahasa Indonesia Irian" (Suharno, 1968) juga masih perlu mendapat perhatian. Apakah bahasa ini satu ragam regional bahasa Indonesia atau salah satu ragam regional bahasa Melayu atau merupakan hasil kreolisasi?

Nasionalisme sebagaimana dikemukakan terdahulu adalah faktor kedua yang dapat menjadi sebab timbulnya ragam-ragam regional suatu bahasa.

Pemilihan dan pengangkatan salah satu ragam regional bahasa Melayu, yaitu Melayu Riau menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan adalah karena timbulnya dan berkembangnya nasionalisme Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai daerah yang lebih luas dari daerah penggunaan ragam regional asalnya, malah sudah meliputi daerah ragam itu. Tambahan lagi, karena keheterogenan Indonesia, fungsi bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi semata-mata, melainkan juga menjadi alat pemersatu. Dengan demikian, meskipun bahasa Indonesia dari segi regional

bahasa Melayu sebagaimana ragam Melayu Riau, Deli, Asahan, dan lain-lain, kedudukannya sudah jauh lebih penting. Dalam hubungan ini kedudukan bahasa Indonesia dapat dianggap sangat unik.

Ragam Sosial

Tingkah laku kebahasaan para anggota suatu masyarakat bahasa ditentukan oleh berbagai faktor sosial yang timbul dalam masyarakat itu. Faktor-faktor sosial itu, sesuai dengan definisi sosiolinguistik yang dikemukakan oleh Fishman (1970:2), terutama ialah umur, jenis kelamin, status kawin, hubungan kekeluargaan, kedudukan (jabatan), status ekonomi, pendidikan, peristiwa sosial, tempat, waktu, topik, tujuan, dan tingkat keakraban. Keragaman tingkah laku kebahasaan yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial di atas mempengaruhi struktur bahasa yang dipergunakan; dan dengan demikian, timbullah berbagai ragam dalam bahasa yang bersangkutan. Ragam-ragam yang timbul seperti itulah yang dimaksudkan dengan ragam-ragam sosial².

Ragam-ragam sosial suatu bahasa mencerminkan struktur masyarakat yang bersangkutan. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai ahli sosiolinguistik. Labov (1972), misalnya, telah membuktikan bahwa ragam pengujar bunyi /r/ bahasa Inggris di New York mencerminkan stratifikasi sosial berdasarkan taraf sosioekonomi anggota-anggota masyarakat kota itu. Bahasa Jawa merupakan suatu bahasa yang baik sekali dijadikan sebagai objek studi tentang ragam-ragam sosial.

Dalam berbagai bahasa telah dibuktikan bahwa sistem sapaan dan rujukan ditentukan juga oleh faktor-faktor sosial tertera di atas. Sistem sapaan asimetris pada umumnya dijumpai dalam masyarakat feodalistis dan masyarakat yang berorientasi pada hubungan kekeluargaan. Sebaliknya, sistem sapaan simetris terdapat pada umumnya dalam masyarakat egaliteria. Namun, jarang dijumpai suatu masyarakat yang mempergunakan secara murni satu sistem saja. Kenyataannya, terutama dalam masyarakat-masyarakat modern, kedua sistem itu dipakai. Faktor umur, pendidikan, jenis kelamin, jabatan, dan hubungan kekeluargaannya pada umumnya menjadi penyebab pemakaian sistem asimetris (Brown dan Gilman, 1968:252 — 275; Brown dan For 1972).

Mengadakan studi tentang ragam sosial bahasa Indonesia dewasa ini agaknyanya begitu mudah, terutama karena keheterogenan Indonesia. Dalam taraf perkembangan bahasa Indonesia masih sangat sukar mengisolasi-

suatu masyarakat bahasa Indonesia yang homogen karena hampir setiap lapisan masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh bahasa daerah atau ragam regional tertentu. Keanekabahasaan ini menyebabkan sangat sulit untuk menentukan secara tepat apakah timbulnya suatu ragam disebabkan oleh faktor atau faktor-faktor sosial tertentu atau faktor regional. Namun, di bawah ini saya akan membicarakan beberapa ragam bahasa Indonesia, yang menurut pengamatan saya dapat dianggap sebagai ragam-ragam sosial.

Ragam bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh kaum muda mudi agaknya adalah suatu ragam sosial yang menarik. Ragam yang dimaksud ini saya jumpai di kalangan muda-mudi yang berumur kira-kira 16 hingga 19 tahun di dua tempat di kota Medan³. Dialog berikut adalah suatu contoh.

A: Man, kau punya rencana malam Minggu ini?

B: Kemana rupanya, paling begadang ke tempat si Jul atau nembak di kedai si Ateng. Abis tak ada acara.

C: Kalau mau kau, ke tempat si Butet *aja* kita. Kita ramai-ramai, mau *enggak*? Kalau di sana bereslah itu.

B: Apanya yang beres, jangan asal beres. Jangan *kek* malam Minggu yang lewat, *ngutuk* awak jadinya.

D: *BK merahnya* dulu sebatang. Kau *ngomel* aja nampaknya *kek* si cerewel.

Dalam pengamatan ini, perhatian saya terutama tertuju pada struktur leksikal. Sebagaimana dapat dilihat, dalam dialog di atas terdapat beberapa kata yang menarik: *abis*, *aja*, *ngak*, *ngutuk*, *ngomel*, *nembak*, *BK merah*, dan *cerewel*. Kata-kata ini tidak terdapat atau setidaknya tidaknya jarang sekali dijumpai dalam ragam bahasa Indonesia yang umum dipakai oleh orang-orang tua, terutama yang mempunyai pendidikan. Kata-kata yang umum dijumpai ialah *habis*, *saja*, *tidak*, *mengutuk*, *mengomel*, dan *menembak*. Seterusnya setelah diselidiki, *BK merah* adalah "gudang garam" (rokok kretek cap Gudang Garam) dan *cerewel* adalah akronim untuk "cewek rewel".

Dari data-data di atas ini satu tingkah laku kebahasaan yang menarik dapat dilihat, khususnya yang berkenaan dengan struktur leksikal, yaitu "kecenderungan mempersingkat". Kecenderungan ini direalisasikan pada struktur leksikal dengan tiga cara: (1) mendeliskan fonem-fonem tertentu, /h/ dari *habis*, /s/ dari *saja*; (2) mendeliskan prefiks *meN-*, *mengutuk* ---, *ngutuk*, *mengomel* ---, *ngomel*, *menembak* ---, *nembak*; membuat akronim,

cewek rewel ---, *cerewel*. *BK merah* sukar dikategorikan karena hanya terdapat pada dialog di atas saja. Akan tetapi, barangkali dapat dianggap sebagai akibat suatu kecenderungan untuk merahasiakan hal-hal tertentu. Dari segi semantik terdapat juga perkembangan baru. Kata *nembak* bukan lagi berarti membunuh dengan senjata api, melainkan berarti 'makan atau minum di kedai tanpa bayar'.

Tingkah laku kebahasaan di atas juga dijumpai dalam bahasa tertulis. Anak saya, salah seorang anggota kelompok muda-mudi Kampus USU, menerima surat dari teman gadisnya yang berada di luar kota sebagai berikut.

Eh . . . problem apa sih yang nimpa cowok-cowok Camp . . . masak nggak mau nyeritain. Koq sampe' sakit hati segala . . . , Kog bisa gitu ya . . . kenapa sih mereka itu ama kalian . . . mungkin mereka nggak pernah ikut ngumpul lagi, atau mungkin aja putus hubungan cowok-cewek. Kenapa ya . . . bilangin lho, mbuat penasaran aja . . . oh mungkin mereka caparan ama anak luar ya.

Dalam surat ini kelihatan juga kecenderungan seperti dikemukakan di atas tadi. Perhatikanlah kata *nimpa*, *nyeritain*, *nggak*, *mbuat*, *gitu*, *ama* dan *aja*. Kata *caparan* adalah kata yang dibentuk dengan proses metatesis dari kata *pacaran*. Apa motif penciptaan kata ini belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi, mungkin juga sama dengan motif pembentukan *BK merah* dalam dialog di atas tadi, yaitu kecenderungan merahasiakan sesuatu.

Perlu dicatat bahwa pengaruh "bahasa Jakarta" terdapat dalam data-data di atas. Kata *kek*, *nggak*, *cowok*, dan *cewek* adalah kata-kata yang dijumpai dalam "bahasa Jakarta". Pengaruh bahasa Jawa agaknya ada juga, misalnya, *koq* dan akhiran *-in* (*bilangin*). Akan tetapi, ini pun terdapat juga dalam "bahasa Jakarta". Masih perlu diteliti mengapa "bahasa Jakarta" sangat berpengaruh pada muda-mudi dewasa ini. Mungkinkah kemetropolitan Jakarta yang menjadi sebab dalam hal ini? (bd.⁴ Moeliono, 1975:3).

Pendelisian-pendelisian tersebut di atas tampaknya tidak *semrawut*. Pada tingkat fonologi, misalnya, yang dideliskan pada umumnya adalah fonem /s/ pada posisi awal yang diikuti oleh vokal terbuka. Pada tingkat morfologi yang dideliskan ialah awalan *meN-* dan bunyi sengau tetap ada pada kata yang tinggal. Namun, hal ini masih dugaan-dugaan sementara dan masih memerlukan data-data yang cukup untuk membuktikannya.

Menurut pengamatan saya, dua faktor sosial pokok yang menyebab-

kan timbulnya ragam di atas, yaitu umur dan tingkat keakraban. Pendapat ini diperkuat oleh dua hal: (1) anak saya suatu ketika bersama seorang temannya bercakap-cakap di depan rumah dengan seorang anak dari luar kampus dan yang belum dikenalnya sebelumnya; saya dengar ragam bahasa di atas tidak dipergunakan. (2) Saya tidak pernah mendengar ragam di atas dipergunakan oleh anak saya apabila saya bercakap-cakap dengan dia di rumah.

Ragam bahasa Indonesia yang umum dipergunakan oleh orang-orang yang lebih tua, terutama yang mempunyai pendidikan, berlainan dengan ragam sosial muda-mudi di atas. Marilah kita perhatikan dialog berikut ini.

Dialog II

A: Kalau Bapak tidak berkeberatan, saya akan memulai penelitian ini minggu depan.

B: Tentu saja tidak keberatan. Akan tetapi, sebaiknya Saudara teliti dulu sekali lagi rencana pembiayaannya ini agar nanti tidak terlalu meleset.

A: Baiklah, Pak.

Dialog di atas adalah antara seorang dosen (A) dan dekan (B) salah satu Fakultas di IKIP Medan. Dialog terjadi pada waktu hari kerja di kantor dekan itu. Dosen A lebih muda (\pm berumur 40 tahun) dari Dekan B (\pm berumur 45 tahun). Keduanya berkenalan baik dan agak akrab. Namun, ragam bahasa Indonesia yang dipergunakan mereka dalam dialog di atas jelas adalah ragam bahasa situasi kedinasan. Karena saya juga mengenal dosen A itu, saya mengetahui bahwa ragam bahasa Indonesia yang dipergunakannya jika bercakap-cakap dengan rekan-rekan lain di luar kantor berlainan dengan ragam di atas.

Yang berikut adalah satu dialog antara dua orang dosen yang sebaya (\pm 35 tahun) dan berkenalan akrab.

Dialog III

C: Tak kulihat kau beberapa hari ini. Ke mana kau pigi?

D: Ah, kau harus maklum. Kan perlu ditambah tunjangan fungsional itu agar cukup makan sebulan.

C: O, ya pula, Kalau gitu, mari ngopi dulu.

Ragam ini lebih jelas. Perbedaan yang jelas antara ragam ini dan ragam dalam dialog II tadi jelas dapat dilihat pada penggunaan istilah-istilah sapaan dan rujukan. Dalam dialog II dosen A menyapa dekan B dengan istilah *Bapak* dan *Pak*, sedangkan B menyapa A dengan istilah *Saudara*. Kedua mereka mempergunakan kata rujukan *saya*. Dalam dialog III, C menyapa rekannya dengan istilah *kau* dan begitu juga sebaliknya. Kata rujukan yang dipergunakan bukan *saya*, melainkan *aku*. Selanjutnya, dapat dilihat, baik pada tingkat fonologi, leksikal maupun sintaksis ragam yang dipakai dalam dialog II sempurna benar. Dengan kata lain, tidak terdapat delisi-delisi. Sebaliknya, ragam yang dipakai dalam dialog III mengandung beberapa delisi dan unsur leksikal yang berlainan. Perhatikanlah kata-kata *pigi*, *kau*, *gitu*, dan *ngopi*.

Jika diamati lebih dekat, dapat dilihat bahwa faktor-faktor sosial yang menimbulkan ragam yang dipakai dalam dialog II ialah topik pembicaraan, tempat berbicara, dan jabatan. Topik pembicaraan ialah penelitian, yaitu suatu topik dinas, dan tempat berbicara adalah kantor dekan. Seterusnya, jabatan (kedudukan) kedua pengajar berbeda, yaitu satu atasan dan satu lagi bawahan. Ketiga faktor ini agaknya lebih dominan dari faktor tingkat keakraban. Dalam dialog III faktor-faktor sosial penentu yang sama ialah tingkat keakraban, tempat berbicara, dan umur. Kedua dosen bersangkutan berteman akrab, tempat berbicara di luar kantor, dan mereka sebaya. Umur dianggap sebagai faktor penentu utama berdasarkan kenyataan bahwa ketika dosen tadi berbicara dengan dosen lain yang lebih tua dari dia, ragam yang dipergunakan berbeda. Perbedaan ini terutama kelihatan pada pemakaian istilah-istilah sapaan. Dosen muda menyapa dosen yang lebih tua dengan "Bapak", sedangkan dosen yang lebih tua menyapa yang lebih muda dengan "nama". Saya sendiri menyapa pesuruh di kantor dengan "Bapak" ("Pak") karena pesuruh itu jauh lebih tua. Jadi, umur agaknya masih lebih dominan daripada kedudukan.

Menurut pengamatan kami, di dua kantor lainnya di Medan (Kantor Penerangan dan Perpustakaan Medan), dalam situasi kedinasan ragam sosial seperti yang terdapat dalam dialog bawahan. Antara sesama pegawai yang sama tingkat kedudukannya pun ragam itu dipakai pada umumnya, tetapi istilah-istilah sapaan berubah menurut umur. Istilah rujukan *saya* umum terpakai, sedangkan istilah rujukan *aku* dan *ku* hampir tak dijumpai. Ragam sosial yang terdapat dalam dialog III juga biasa di kalangan umum yang

bukan pegawai, jika para penutur berkenalan akrab. Jika kurang akrab atau baru kenal, ragam seperti dalam dialog II yang umum terdengar. Pemakaian istilah sapaan *kau* dan rujukan *aku* pada umumnya dipergunakan apabila kedua pengujar berkenalan sangat akrab dan masih muda. Di kalangan orang-orang tua, terutama berpendidikan, kedua istilah itu jarang sekali terdengar.

Meskipun uraian di atas hanya didasarkan pada data-data yang sangat terbatas, kiranya cukup untuk menunjukkan adanya berbagai ragam sosial dalam Bahasa Indonesia dan faktor-faktor sosial yang menjadi penentu dalam penggunaan ragam-ragam tersebut. Sehubungan dengan faktor tujuan berbicara sebagai salah satu faktor sosial penentu, masih ada lagi berbagai ragam sosial bahasa Indonesia. Strategi berbicara dalam mengajukan suatu permintaan, misalnya, lain dari strategi untuk memberi informasi atau sekedar bertanya.

Ragam Standar dan Non-Standar Bahasa Indonesia

Pandangan bahasa yang saya kemukakan dalam kertas kerja ini adalah pandangan dinamis sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Bahasa terdiri dari sejumlah ragam yang terus mengalami perubahan, dan setiap ragam mempunyai nilai sosial tersendiri. Sesuai dengan pandangan ini, saya tidak mempergunakan istilah "bahasa standar", sebagai umumnya dikenal, tetapi "ragam standar".

Apa yang disebut "bahasa standar", sesungguhnya adalah salah satu ragam yang terdapat dalam suatu bahasa. Pengertian ini secara eksplisit dapat dilihat pada pendapat para ahli tentang "bahasa standar". Ferguson (1968:31--32), misalnya, mengemukakan bahwa standarisasi adalah proses diangkatnya salah satu ragam suatu bahasa menjadi dialek yang tertinggi dan yang merupakan acuan. Seterusnya dikemukakan bahwa dasar bagi ragam yang standar ialah ragam yang terdapat di kalangan kelas menengah yang terpelajar dalam suatu masyarakat kota. Pendapat yang bersamaan juga dikemukakan oleh Moeliono (1975:2). Kridalaksana (1975:12--13) meninjau bahasa standar dari segi fungsinya dan menemukan bahwa fungsi bahasa standar ialah untuk komunikasi resmi, pembicaraan di depan umum, pembicaraan dengan orang yang dihormati.

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya dalam menentukan ragam standar empat faktor sosial utama harus dipertimbangkan, yaitu pendidikan, jabatan (kedudukan sosial), maksud dan tujuan pembicaraan, dan topik. Berdasarkan kenyataan ini dapat di-

katakan bahwa ragam standar suatu bahasa adalah salah satu ragam sosial.

Bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa yang hidup juga mempunyai ragam standar. Untuk memahami wujud ragam standar BI dewasa ini, kita hendaklah melihat dari dua segi, yaitu struktur atau bentuk dan nilai sosialnya.

Struktur ragam standar bahasa Indonesia sudah banyak dibicarakan baik pada tingkat fonologi, morfologi dan leksikal, sintaksis, dan ortografi. Usaha-usaha standardisasi yang diadakan oleh Pemerintah melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memberikan hasil-hasil yang mengembirakan, khususnya dalam tingkat ejaan. Pada tingkat leksikal hasil-hasil juga sudah banyak, terutama dalam bidang pengindonesiaan kata-kata asing.

Pada tingkat fonologi, morfologi, dan sintaksis, usaha-usaha kita belum berhasil dengan memuaskan karena masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan.

Pada tingkat fonologi, dalam hal penginventarisasian fonem-fonem, usaha kita boleh dikatakan sudah berhasil. Jumlah fonem segmental ragam standar bahasa Indonesia agaknya sudah diketahui meskipun masih ada perbedaan pendapat dalam hal-hal tertentu, misalnya, tentang penentuan kedudukan fonemis bunyi henti-glotal (*glotal stop*) [ʔ]. Usaha-usaha selanjutnya pada tingkat fonologi terutama hendaklah ditujukan pada dua hal: (1) penentuan pola-pola prosodi seperti pola-pola tekanan suara, ritme, dan intonasi; (2) penentuan nilai-nilai fonetis setiap fonem.

Penentuan nilai-nilai fonetis setiap fonem sangat penting karena hanya dengan nilai-nilai fonetis inilah dapat kita tentukan pengajaran standar. Artikulasi setiap fonem hendaklah ditentukan setepat mungkin. Selain itu, nilai-nilai setiap vokal hendaklah ditentukan dengan mengukur getarannya. Sekedar ilustrasi di bawah ini kami kemukakan dua pola dasar intonasi ragam bahasa Indonesia dan posisi vokal-vokal dalam artikulasi. Pola-pola dan posisi ini kami dasarkan pada hasil rekaman ujaran dua orang penyiar TVRI Medan dan karena itu mungkin dapat dianggap standar.

1. Pola dasar intonasi kalimat berita (*statement*) dan kalimat perintah.

'Saya tidak 'yakin bahwa 'Tuti akan menang

'Ambilkan 'teh untuk 'Ibu!

2. Pola dasar intonasi kalimat tanya.

a. Kalimat tanya ya – tidak

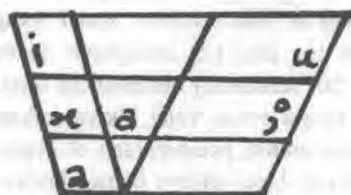
'Apakah Saudara sudah 'tahu bahwa 'dia telah 'pindah?

b. Kalimat tanya dengan kata tanya.

Di 'mana 'dia sekarang?

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat diduga bahwa pola dasar intonasi kalimat berita dan kalimat perintah standar bahasa Indonesia adalah pola "menurun", sedangkan pola dasar kalimat tanya adalah pola "menaik". Akan tetapi, pola dasar kalimat tanya dengan kata tanya seperti *di mana*, *ke mana*, *apabila*, dan lain-lain menyangsikan karena penutur yang direkam dua kalimat tanya demikian ini dengan intonasi menurun.

3. Posisi artikulasi vokal-vokal



[i]	dalam kata <i>ingat</i>
[x]	dalam kata <i>bebek</i>
[a]	dalam kata <i>anak</i>
[a]	dalam kata <i>potong</i>
[o]	dalam kata <i>toko</i>
[u]	dalam kata <i>unta</i>

Untuk dapat mengetahui vokal standar lebih pasti, perlu diukur getaran tiap-tiap vokal itu.

Pada tingkat morfologi masalah aspek-aspek semantik afiksasi agaknya masih belum terselesaikan semuanya. Masih belum ada kesatuan pendapat, misalnya, apakah arti akhiran *-kan* sama atau berbeda dengan akhiran *-i*, misalnya, dalam kata *membasahkan* dan *membasahi*. Demikian juga masih belum ada kesatuan pendapat tentang perbedaan awalan *per-* dan akhiran *-kan*. Selanjutnya, perbedaan antara afiksasi derivatif dan afiksasi inflektif agaknya perlu diadakan agar aspek semantik afiksasi-afiksasi verbal semakin jelas dan mantap (lihat Tampubolon, 1977). Pada tingkat sintaksis juga masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Pola-pola kalimat dasar yang standar, misalnya, ditentukan secara tuntas dan mantap. Demikian juga penentuan kata-kata modal.

Dari uraian di atas kiranya jelas bahwa wujud struktural ragam standar bahwa Indonesia masih dalam proses penentuan dan pemantapan. Kridalaksana (1975:15 — 17) telah mencoba menunjukkan beberapa ciri bahasa Indonesia standar (sebagaimana disebut terdahulu kami berpendapat bahwa istilah yang lebih tepat ialah ragam standar bahasa Indonesia). Meskipun ciri-ciri yang dikemukakannya itu mungkin sudah dapat dijadikan sebagai satu pegangan umum, agaknya masih memerlukan pembuktian selanjutnya dengan data-data objektif dan masih belum merupakan ciri-ciri yang lengkap.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, wujud ragam standar bahasa Indonesia juga dilihat dari nilai-nilai sosialnya, yaitu dari segi penggunaannya dalam konteks sosial yang sesungguhnya. Kridalaksana, sebagaimana disebut di atas, juga telah meninjau bahasa Indonesia standar dari segi fungsinya dan dikemukakan empat fungsi sosialnya. Keempat fungsi tersebut agaknya dapat diterima, tetapi perlu ditambah dengan fungsi sosio-politik, yaitu fungsi pemersatu.

Bagaimanakah cara yang sebaiknya menentukan wujud ragam standar bahasa Indonesia dewasa ini? Menurut hemat kami, dua jenjang hendaklah ditempuh, yaitu: (1) mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang menjadi penentu dalam penggunaan ragam itu atau (2) menyusun suatu tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik) berdasarkan data-data penggunaan ragam itu. Dari keempat fungsi sosial yang dikemukakan oleh Kridalaksana (komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan orang yang dihormati) dapat dilihat bahwa faktor-faktor sosial penentu dalam penggunaan ragam standar yang dimaksud ialah pendidikan, jabatan, umur, topik (masalah dinas, teknis, ilmu, dan lain-lain), tempat (kantor, dan lain-lain), dan tingkat keakraban serta formalitas. Dengan kata lain, ragam standar dewasa ini terutama dijumpai di kalangan pejabat dan orang-orang berpendidikan, dan dipakai terutama dalam komunikasi dinas baik secara tertulis maupun dalam pembicaraan-pembicaraan, serta tulisan-tulisan ilmiah; juga dalam pengumuman-pengumuman dan berita-berita resmi, termasuk siaran-siaran TVRI dan RRI. Kedua penyiar TVRI Medan yang kami sebut terdahulu agaknya dapat diterima sebagai informan yang baik. Selain data-data lisan, data-data tertulis dari dokumen-dokumen resmi, terutama yang bersifat hukum dan ilmiah, dapat juga dipergunakan sebagai data-data tambahan. Dengan tata bahasa yang demikian, dapatlah ditemukan wujud ragam standar bahasa Indonesia dewasa ini dan seterusnya dapat dibina dan dikembangkan.

Setelah kita ketahui wujud ragam standar, sebagaimana diuraikan di atas, dengan sendirinya ragam-ragam yang tidak sesuai dengan norma-norma standar yang dimaksud adalah ragam-ragam nonstandar. Secara umum dapat disebut bahwa ragam-ragam regional yang telah dibicarakan terdahulu adalah ragam-ragam nonstandar.

Ragam-ragam sosial lain, seperti ragam sosial yang dijumpai di kalangan muda-mudi sebagai yang telah dibicarakan terdahulu, juga adalah ragam-ragam nonstandar.

Beberapa Implikasi

Suatu konsekuensi dasar pandangan dinamis tentang bahasa ialah pengakuan tentang adanya ragam-ragam suatu bahasa dan bahwa setiap ragam itu mempunyai nilai sosial tersendiri. Telah dikemukakan bahwa bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa yang hidup juga mempunyai ragam-ragam, yaitu ragam sosial dan ragam historis. Kedua ragam pertama adalah

yang terpenting karena langsung bersangkutan dengan kehidupan bahasa Indonesia dewasa ini. Selanjutnya, ragam-ragam ini, dalam hal ini ragam-ragam regional dan sosial, dapat pula dibagi-bagi atas dua berdasarkan fungsi sosialnya, yaitu ragam standar dan nonstandar. Ragam standar adalah salah satu dari ragam-ragam sosial bahasa Indonesia dan ragam nonstandar adalah ragam-ragam di luar norma-norma standar yang dimaksud.

Salah satu implikasi pandangan di atas ialah pengertian tentang "kemahiran bahasa". Hingga sekarang kemahiran bahasa masih diartikan sebagai kemampuan mempergunakan suatu bahasa dengan cukup, baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan pandangan di atas, definisi kemahiran bahasa tidak cukup demikian saja. Kemahiran bahasa didefinisikan sebagai kemampuan yang cukup baik untuk mempergunakan setiap ragam sosial suatu bahasa dalam konteks sosialnya. Kemampuan demikian ini mengimplikasikan kemampuan "beralih kode". Sudah barang tentu bahwa kemahiran demikian ini tidak mungkin dicapai sekaligus, tetapi bertaha-tahap dan dalam waktu yang tidak pendek. Kemahiran berbahasa Indonesia, dengan demikian ialah kemampuan yang cukup baik mempergunakan setiap ragam sosial (bukan ragam regional) bahasa Indonesia dalam konteks sosialnya.

Implikasi yang kedua ialah pengertian tentang "bahasa yang baik" dan "bahasa yang tidak baik". Memastikan perbedaan pengertian yang dua ini tidak mudah. Jika pandangan perskriptif yang dituruti, maka ragam standarlah yang dianggap "bahasa yang baik". Namun, jika pandangan dinamis tentang bahasa diterima, maka harus disadari bahwa ragam standar hanyalah salah satu ragam sosial suatu bahasa, yang dengan sendirinya mempunyai nilai sosial tersendiri sebagaimana ragam-ragam sosial lainnya. Agaknya, sikap yang lebih tepat dalam hubungan ini ialah menganggap bahwa setiap ragam itu adalah baik dalam konteks sosialnya sendiri.

Kedua implikasi di atas mempunyai implikasi lebih lanjut, yaitu implikasi untuk pendidikan bahasa. Pada dasarnya, bahasa Indonesia yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan umumnya adalah ragam standar. Ini berarti bahwa kemahiran bahasa yang kita harapkan dicapai oleh para pelajar atau mahasiswa ialah kemahiran mempergunakan ragam standar saja, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam kemahiran ini pun masih diragukan kemahiran para pelajar dan mahasiswa itu mempergunakan ragam standar itu dalam konteks sosialnya sendiri. Karena para pelajar tidak atau kurang disadarkan akan adanya ragam-ragam sosial bahasa Indonesia yang lain, dalam diri mereka tertanam sikap bahwa hanya ragam standar yang

dipelajari merekalah "bahasa yang baik".

Sehubungan dengan adanya ragam-ragam regional bahasa Indonesia sebagaimana telah dikemukakan terdahulu ada implikasi yang sangat perlu mendapat penelitian, yaitu kemungkinan berkembangnya sikap bahasa bahwa ragam regional tertentu, bahkan semua ragam-ragam regional bahasa Indonesia adalah ragam tercela (*stigmatized variety*). Sikap bahasa yang demikian ini harus dihindarkan karena akibatnya tidak baik, terutama pada jiwa kesatuan bangsa kita. Hendaklah disadari bahwa hidupnya bahasa-bahasa daerah, di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, adalah kekayaan kebudayaan bangsa kita. Oleh sebab itu, pengaruh bahasa-bahasa daerah pada tingkai laku kebahasaan bangsa kita hendaklah dianggap sebagai fenomena yang wajar.

Timbulnya dan berkembangnya berbagai ragam sosial dan regional bahasa Indonesia sangat sukar, walaupun mungkin dihempang; pertama, karena keragaman itu adalah ciri hakikat tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dinamis; kedua, justru karena keheterogenan Indonesia. Dalam situasi keanekaragaman dan keanekaragaman demikian ini, usaha-usaha standardisasi perlu. Akan tetapi, usaha-usaha ini harus didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dikemukakan terdahulu. Dengan demikian, usaha-usaha standardisasi juga harus bersifat dinamis karena norma-norma sosial yang menjadi dasar akan terus mengalami perubahan-perubahan.

Akhirnya, perlu disebut bahwa ragam standar dan ragam-ragam non-standar bahasa Indonesia mungkin saling mempengaruhi. Akan tetapi, kemungkinan ini tipis apabila setiap penutur menyadari adanya ragam-ragam itu beserta nilai-nilai sosialnya. Kesadaran ini dapat ditanamkan melalui pendidikan di rumah dan di sekolah.

Kesimpulan

Bahasa Indonesia suatu bahasa yang hidup mempunyai berbagai ragam, yaitu ragam regional, ragam sosial, dan ragam historis. Ragam-ragam regional dan ragam-ragam sosial adalah ragam-ragam bahasa Indonesia yang berkembang dewasa ini karena adanya berbagai bahasa daerah dan faktor-faktor sosial. Salah satu ragam sosial, yaitu ragam yang dipergunakan untuk komunikasi kedinasan (resmi) dan wacana yang bersifat teknis dan ilmiah, terutama di kalangan pelajar dan lapisan masyarakat yang berpendidikan, dianggap sebagai ragam standar. Ragam-ragam sosial lainnya dan ragam-

ragam regional dianggap ragam-ragam nonstandar. Setiap ragam itu mempunyai nilai sosial tersendiri.

Wujud ragam standar bahasa Indonesia hendaklah dilihat dari dua segi, yaitu segi struktur dan segi nilai sosialnya. Untuk menemukan wujud itu perlu disusun suatu tata bahasa yang didasarkan pada data-data yang berasal dari informan-informan dari lapisan sosial yang dianggap umumnya memakai ragam dimaksud dan yang tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daerah, ragam-ragam regional dan bahasa asing.

Kemahiran bahasa yang sepenuhnya ialah kemampuan beralih kode sesuai dengan konteks-konteks sosial. Dengan kata lain, setiap penutur bahasa Indonesia yang mahir hendaklah dapat mempergunakan setiap ragam sosial bahasa Indonesia dalam konteks sosialnya. Kemungkinan timbulnya sikap bahasa yang menganggap bahwa ragam regional tertentu atau ragam-ragam regional adalah ragam tercela (*stigmatized variety*) harus dicegah karena adanya ragam-ragam itu adalah wajar dalam situasi keanekabahasaan. Situasi demikian merupakan kekayaan kebudayaan kita. Pendidikan bahasa Indonesia, baik di rumah maupun di sekolah hendaklah juta menanamkan kesadaran akan adanya ragam-ragam seperti tertera di atas, di samping meningkatkan dan memantapkan penguasaan dan kemampuan menggunakan ragam standar. Dengan adanya kesadaran seperti itu akan terhindarlah sikap bahasa yang negatif.

Saling pengaruh antara ragam standar dan ragam-ragam nonstandar bahasa Indonesia agaknya akan terus terjadi, terutama jika kemahiran dan sikap bahasa di atas tadi belum tercapai. Usaha-usaha standardisasi, dengan demikian, hendaklah bersifat dinamis.

Catatan

¹ Dalam kertas kerja ini kami tidak memakai istilah *dialek* karena istilah ini kadang-kadang dapat membingungkan sehubungan dengan batas perbedaannya dengan bahasa. Tambahan lagi, istilah ini kadang-kadang diartikan sama dengan ragam nonstandar sehingga dapat menimbulkan kesan pejoratif.

² Istilah *sociolect* dipergunakan oleh John T. Platt (1978:28) untuk ragam sosial. Agaknya, istilah ini baik juga diindonesiakan menjadi *sosiolek*

³Daerah dimaksud ialah: (1) Kampus USU dan (2) Gelugur. Di kedua tempat ini pada umumnya bahasa Indonesia yang dominan. Terutama kaum muda-mudi pada usia sejak kecil sudah memakai bahasa Indonesia. Pengamatan diadakan di tempat muda-mudi biasa berkumpul (4—5 orang) dan *ngomong-ngomong*. Dialog mereka sebahagian dicatat dan sebagian direkam.

⁴bd ----- bandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bickerton, Derek. 1972. "The Structure of Polylectal Grammar". *Monograph Series on Languages and Linguistics*. Roger W. Shuy. Editor. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Brown, Roger and Ford, Marguaritte. 1972 "Address in American English". *The Psychology of Language*. Dalam Serse Moscovics, Editor Chicago: Makham Publishing Company.
- and Gilman, Albert. 1968. "The Pronouns of Power and Solidarity". Dalam Joshua A. Fishman. *Reading in The Sociology of Language*. Editor The Hague: Mouton.
- Ferguson, Charles A. 1968. "Language Development". *Language Problems of Developing Nations*. Dalam Joshm A. Fishman, Charles A. Ferguson, Jyotirindra Das Gupta. Editor New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Fishman, Joshua A. 1970. *Sociolinguistics: A brief Introduction*. Rowley, Mass: New bury House.
- 1975. "Beberapa Ciri Bahasa Indonesia Standar". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. 1, thn 1. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Labov, William 1972. *Sociolinguistics Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Mackey, William F. 1968. "The Description of Bililingualism", Dalam Joshua A. Fishman. Editor: *Readings in The Sociology of Language*. The Hague: Mouton.
- Mc. David, Raven I., J.R. 1969. "A Theory of Dialect". Dalam *Monograph Series on Languages and Linguistics*, James A. Alatis. Editor Washington, D.C.: Goergetown Univeristy Press.

- Mc. Cawley, James 1968. "The Role of Semantics in a Grammar". Dalam Emmon Basch and Robert Harms. Editor *Universals in Linguistics Theory* New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- 1975, "Ciri-ciri Bahasa Indonesia yang Baku". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra*, 3, thn 1. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Stewart, William A. 1968. "Sociolinguistic Typology of Multilingualisms". Dalam Joshua A. Fishman. Editor *Readings in The Sociology of Language*, The Hague: Mouton.
- Suharno, Ignatius. 1978. "The Teaching of Indonesia to Speakers of Non-Standars Indonesian". Kertas Kerja dibacakan pada Seminar RELC ke-13 di Singapura.
- Tampubolon, D.P. 1977. "Verbal Affixations i- Indonesians: A Semantic Explorations". Disertasi tak diterbitkan. Geogertown University.

BEBERAPA MASALAH LAFAL STANDAR

Djoko Kentjono

Universitas Indonesia

Pendahuluan

Kertas kerja ini seharusnya mempermasalahkan dua pokok yang ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia III: adakah lafal standar itu dan adakah gunanya menguasai lafal standar. Namun, dalam kertas kerja ini, pokok tertera di atas dipersempit menjadi adakah lafal standar bahasa Indonesia dan adakah gunanya menguasai lafal standar itu.

Istilah lafal standar digunakan dalam pembicaraan ini selanjutnya dengan pengertian pelaksanaan atau hasil pengucapan bunyi ujaran (segmental maupun suprasegmental), yang dijadikan atau menjadi model ketetapan atau kebaikan bagi pemakai bahasa.

Persoalan dibatasi dengan mengandaikan bahwa pembakuan segi-segi kebahasaan seperti ejaan, peristilahan, dan tata bahasa telah atau sedang digarap. Dengan pengandaian ini tersirat pendapat bahwa pembakuan lafal, jika diperlukan, tidak usah menunggu selesai dibakukannya segi-segi kebahasaan yang telah dikemukakan di atas.

Pembatas yang lain menyangkut situasi pemakaian bahasa. Hanya situasi seperti komunikasi resmi, komunikasi teknis, dan penghormatan yang akan disangkutkan dengan pembicaraan mengenai lafal standar berikut.

Adakah Lafal Standar Bahasa Indonesia?

Dari bahan pustaka yang dipelajari dalam pembuatan kertas kerja ini tidak dijumpai bukti adanya produk perundangan, peraturan pemerintah, atau keputusan menteri yang menetapkan lafal standar bahasa Indonesia. Dengan demikian, secara resmi lafal standar bahasa Indonesia belum atau tidak ada.

Jika secara resmi belum atau tidak ada, apakah dalam kenyataan pemakaian bahasa Indonesia sampai saat ini lafal standar bahasa Indonesia telah dirasakan kehadirannya? Penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui kesan atau pendapat umum di luar para pengamat bahasa mengenai hal ini. Di kalangan pengamat bahasa, setidaknya seperti yang tercermin dalam Seminar Bahasa Indonesia 1968, Seminar Politik Bahasa Nasional 1975, dan beberapa karangan, secara tidak langsung tampak kecenderungan mengakui kehadiran lafal yang dapat dijadikan lafal standar bahasa Indonesia. Lafal yang demikian itu dirumuskan sebagai lafal yang tidak memperlihatkan ciri-ciri lafal bahasa daerah.

Ukuran 'tidak bercirikan lafal bahasa daerah' itu kelihatannya dapat dijadikan ukuran lafal standar. Dalam hal itu penggunaan ukuran itu dapat ditafsirkan sebagai berikut. Jika pendengar tidak dapat mengenal bahasa atau daerah asal pembicara, maka pembicara itu menggunakan lafal standar. Sebaliknya, jika pendengar dapat mengenal bahasa atau daerah asal pembicara, pembicara itu tidak menggunakan lafal standar bahasa Indonesia.

Ukuran di atas kelihatan sederhana dan mudah diterapkan, tetapi memancing beberapa pertanyaan. Siapa yang mengenal lafal bahasa daerah yang banyak jumlahnya itu? Ataukah hanya beberapa bahasa daerah saja yang perlu dikenal lafalnya? Bahasa daerah yang mana? Apakah lafal yang terdengar asing musti digolongkan sebagai yang berciri lafal bahasa daerah, ataukah sebaliknya? Adakah lafal yang sama sekali tidak berciri lafal bahasa atau dialek daerah?

Pertanyaan-pertanyaan di atas tidak dimaksud untuk memperkecil arti pengamatan atas lafal yang tidak berciri lafal bahasa daerah. Namun, lebih tepat kiranya jika lafal semacam itu disebut atau dirumuskan sebagai lafal yang ciri-cirinya dimiliki bersama oleh kebanyakan dialek bahasa Indonesia. Seandainya hadirin di ruang ini diminta kesannya mengenai lafal beberapa tokoh tertentu--ambillah para penyiar berita RRI dan TVRI, almarhum Presiden Soekarno, atau almarhum Profesor Poerbatjaraka sebagai misal -- mungkin sekali akan terlihat kesepakatan yang cukup berarti. Jika demikian halnya, dalam bahasa Indonesia telah dirasakan kehadiran lafal yang dianggap baik untuk dicontoh.

Masalah Sumber Data

Lafal yang dianggap pantas dicontoh di atas dapat diperikan dan dinyatakan dengan resmi sebagai lafal standar bahasa Indonesia. Beberapa jalan

dapat dipilih untuk mendapatkan lafal standar itu.

Tentu saja mungkin membuat patokan yang pasti, misalnya, dengan menentukan bahwa i Indonesia standar ialah yang berfrekuensi sekian, beramplitudo sekian, dan yang menggunakan tempo sekian peratus detik. Namun, tidak seperti halnya dengan meter standar yang disimpan di Parc de Saintcloud, Paris, lafal yang distandarkan secara ini pastilah tidak ada gunanya. Lafal orang berbeda menurut jenis, usia, asal, dan ciri-ciri perorangan lainnya. Bahkan, telah diketahui bahwa pada dasarnya orang yang sama tidak dapat mengulang lafal yang sama (Pike, 1947:59). ✓

Sebaliknya, pemerian artikulatoris yang menunjukkan wilayah yang diizinkan, misalnya wilayah dental-alveolar serta wilayah apikal-laminal tanpa aspirasi dan tanpa retrofleksi untuk bunyi *t*, akan lebih bermanfaat. Tentu saja pemerian unsur segmental itu harus didampingi pemerian unsur supra-segmental yang terutama berupa pola intonasi dan tekanan.

Jika langkah pemerian yang memperlihatkan kelonggaran terbatas itu diterima, soal berikutnya ialah memilih model atau data untuk diberikan. Soenarjati Djajanegara (dalam naskah prapenerbitan yang berjudul "Pembakuan Lafal. Mungkinkah?") melihat empat pilihan langkah: a) memilih salah satu lafal bahasa daerah berdasarkan pertimbangan historis, politik, dan sosial; b) mengambil lafal Melayu sebagai dasar; c) memilih lafal pejabat tinggi pemerintah atau kaum cendekiawan yang dianggap sebagai pemberi teladan; d) memilih lafal "resmi" yang paling sedikit pengaruh bahasa daerahnya. Langkah keempat ini yang dipilih Soenarjati Djajanegara sebagai yang paling baik, mudah pelaksanaannya, dan yang sudah banyak dikenal oleh mayoritas pemakai bahasa Indonesia.

Di samping pilihan-pilihan di atas, dari tulisan Lukman Hakim (1978: 28-29 dan 35) diperoleh pilihan sumber data berikut: a) penutur yang mempunyai kesadaran berbahasa yang tinggi; b) penutur bahasa Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa daerah, bukan pula dialek bahasa Indonesia; c) penutur yang berasal dari lingkungan bahasa daerah, tetapi pengaruh bahasa daerah itu tidak kuat tertanam dalam dirinya; dan d) penyiar berita TVRI. Lukman Hakim tidak menyatakan pilihannya, tetapi dugaannya bahwa lafal yang dipakai pembaca siaran berita TVRI bukan tidak mungkin dijadikan contoh oleh masyarakat umum, mengingat luas jangkauan siaran TVRI, dapat diambil alih sebagai saran untuk mengambil lafal para penyiar berita TVRI.

Pilihan lain lagi ialah pengambilan pemerian fonologis bahasa Indonesia yang pernah diajukan oleh para penulis tata bahasa Indonesia atau oleh para ahli bahasa meskipun sumber data pemerian itu tidak disebutkan atau hanya merupakan idiolek pembuat pemerian yang bersangkutan. Wajarlah jika perbedaan-perbedaan dalam pemerian timbul. Bandingkan, misalnya, pemerian Prijana (1954), Samsuri (1960; 1978); Keraf (1970), Alisjahbana (1973), dan Halim (1974).

Dalam kertas kerja ini diajukan pendapat bahwa rumusan lafal standar bahasa Indonesia sebaiknya berupa paduan hasil pemerian yang menggunakan sumber data yang berbeda (dalam hal ini lafal dialek-dialek "utama" bahasa Indonesia dengan lafal penyiar berita TVRI dan atau RRI) dan pemerian fonologi yang ada.

Penstandaran bahasa, termasuk juga penstandaran lafal, merupakan tindakan preskriptif alih-alih deskriptif. Oleh karenanya, kenetralan dalam nilai sulit atau tidak dapat dicapai (Ray, 1963:15). Pilihan langkah mana pun yang diambil, kemungkinan timbulnya ketidakpuasan pada sebagian pemerhati dan penutur "bahasa Indonesia" selalu ada. Penstandaran yang ideal mencerminkan keseimbangan maksimal antara ukuran-ukuran atau kepentingan-kepentingan yang pada dasarnya bertentangan. Sikap terbuka untuk kepentingan bersama sangat diperlukan.

Penyebaran Lafal Standar Bahasa Indonesia.

Salah satu tujuan penstandaran lafal bahasa Indonesia ialah pemakaiannya secara merata di kalangan pemakai bahasa Indonesia dalam situasi-situasi yang menghendaki penggunaan lafal standar itu. Untuk mencapai tujuan itu lafal standar itu, jika sudah dirumuskan, harus disebarakan

Penyebaran itu akan memakan waktu yang lama sebelum tujuan yang diidamkan di atas tercapai mengingat bahwa bagi sebagian besar orang Indonesia mempelajari lafal standar bahasa Indonesia berarti mempelajari perangkat kebiasaan pelafalan baru sesudah kebiasaan menggunakan sistem bahasa ibu tertanam kuat-kuat. Namun, penguasaan perangkat kebiasaan baru itu bukannya sesuatu yang mustahil, terutama bagi generasi muda dan generasi yang akan datang. Bahkan, kemampuan orang Indonesia pada umumnya dalam beralih kode nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari sebagai yang ditunjukkan oleh Wojowasito (dalam Halim, Editor 1976: 61--83).

Sasaran penyebaran lafal standar bahasa Indonesia yang perlu didahulukan ialah orang-orang yang harus menjadi teladan, yakni guru, penyiar televisi

dan radio, dan sebaiknya juga para pejabat (tinggi), serta orang-orang yang mempunyai potensi menjadi teladan bagi orang-orang lain. (Lihat juga Pasal 3.1.2. *Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional*.)

Peranan media radio, televisi, dan sudah barang tentu pendidikan sangat menentukan dalam penyebaran lafal standar bahasa Indonesia. Dalam hubungannya dengan peranan media ini patut diingat bahwa dalam pidato pembukaan Seminar Politik Bahasa Nasional yang lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sjarif Thajeb, mengumumkan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan siaran nasional melalui radio dan televisi khusus untuk guru dalam (tahun 1978) abad XX ini (Halim, Editor, 1976: 14).

Para penyebar memerlukan pedoman untuk menjalankan tugasnya. Demikian pula masyarakat umum yang ingin mengetahui dan memakai lafal standar itu. Bahasa Indonesia tidak memerlukan kamus lafal khusus seperti yang dibuat untuk bahasa Inggris (lihat, misalnya, Bender, 1943; Kenyon dan Knott, 1944; dan Jones, 1956) sebab ejaan bahasa Indonesia hampir-hampir sepenuhnya fonemis. Ada hubungan tetap di antara hampir setiap huruf atau gabungan huruf yang dipakai dengan sebuah fonem tertentu.

Ketentuan pelafalan cukup dijadikan bagian pengantar atau bagian lampiran dalam kamus umum. Pedoman itu memuat kaidah umum lafal bahasa Indonesia standar, misalnya, yang menjelaskan wilayah lafal setiap fonem dalam berbagai posisinya; yang menjelaskan pelafalan diftong; yang menunjukkan pelafalan awalan yang mengandung huruf *e* seperti *me-*, *ber-*, *ke-*, *ter-* dan *se-*, atau pelafalan akhiran *-kan*, atau pelafalan kata berakhiran *-an* yang bentuk dasarnya berakhiran dengan *k*; yang menunjukkan intonasi kalimat-kalimat pokok; dan yang menunjukkan penempatan tekanan. Keterangan selebihnya hanya akan terdapat di belakang kata-kata tertentu yang memerlukannya, terutama kata dasar yang mengandung huruf *e* seperti yang sudah dilakukan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan Poerwadarminta (1976).

Dengan kemajuan teknologi perekaman suara atau gambar bersuara, contoh-contoh pelaksanaan kaidah umum lafal standar bahasa Indonesia dapat saja dibuat dan disebar.

Adakah Gunanya Menguasai Lafal Standar?

Jawabnya positif. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh karena penguasaan dan pemakaian lafal standar oleh para pemakaian lafal standar oleh para pemakai bahasa Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama,

komunikasi di antara sesama pemakai lafal standar lebih efisien jika dibandingkan dengan komunikasi tanpa lafal standar. Artinya, perhatian para peserta komunikasi dapat lebih dipusatkan kepada amanat komunikasi tanpa gangguan yang mungkin timbul karena lafal yang berbeda-beda. Efisiensi ini lebih-lebih diperlukan dalam komunikasi lisan yang tidak direkam. Kedua, penguasaan lafal standar, terutama dalam komunikasi lisan tidak berhadapan muka dapat menghindarkan seorang pembicara dari penilaian atau asosiasi yang kurang menguntungkan baginya. Penilaian atau asosiasi negatif dari pihak pendengar mungkin saja pembicara dan pendengar tidak berasal dari latar bahasa daerah atau dialek yang sama. Ketiga, erat hubungannya dengan keuntungan yang kedua di atas memperkecil perbedaan dapat pula ditafsirkan sebagai memperkuat persatuan. Keempat, penguasaan lafal standar akan menambah kesadaran berbahasa atau menumbuhkan kebanggaan pemakainya karena kesanggupannya menghasilkan yang baik dan benar. Kelima, kebiasaan untuk setia menggunakan bahasa standar, termasuk lafal standarnya, cenderung memupuk kedisiplinan seseorang.

Adanya lafal standar sendiri jelas memberikan beberapa keuntungan. Yang jelas, pengajaran lafal bahasa Indonesia untuk warga negara atau bukan warga negara memiliki pedoman. Keanekaragaman dalam bahasa Indonesia dapat ditertibkan (Soenarjati Djajanegara, naskah prapenerbitan: 5). Kewibawaan bahasa Indonesia bertambah karna pemakai bahasa Indonesia perlu memperhatikan standar yang berlaku jika tidak ingin berhadapan dengan sanksi sosial yang mungkin mengenainya.

Penutup

Patut dicatat bahwa usaha menuju lafal baku bahasa Indonesia telah dimulai oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan bantuan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dalam bentuk proyek yang dikerjakan oleh Tim Fonologi FKSS IKIP Malang. Dari proyek ini telah dihasilkan *Petunjuk Penelitian Fonologi Bahasa Indonesia Baku* (1976).

Seandainya masyarakat bersedia memahami sifat perskriptif usaha pembakuan bahasa dan bersedia memberikan kepercayaan penuh kepada suatu panitia atau badan yang memanfaatkan berbagai tenaga ahli yang bersangkutan dengan masalah penstandaran lafal ini dan yang dapat dikelola oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, agaknya pedoman lafal standar bahasa Indonesia akan dapat dihasilkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Takdir. 1973. *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia*, Cetakan 38. Jakarta: Dian Rakyat.
- Baradja, M.F. 1975. "Mencari Jalan ke Arah Pembakuan Bahasa Indonesia". *Pengajaran Bahasa dan Sastra*, 1;2:-20
- Bender, James. F. 1943. *NBC Handbook of Pronunciation*. New York: Thomas Y. Crowell Company.
- Colby, Frank. O. 1950. *The American Pronouncing Dictionary of Troublesome Words*. New York: Thomas Y. Crowell Company.
- Djajanegara, Soenarjati. "Pembakuan Lafal. Mungkinkah ? Naskah prapenerbitan.
- Hakim, Lukman. 1978. "Sebuah Pemikiran tentang Lafal Baku Bahasa Indonesia". *Dalam Tifa Sastra*, VI; 38-39: 28-29, 35.
- Halim, Amran. 1974. *Intonation in Relation to Syntax in Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional dan Penerbit Djambatan.
- Halim, Amran. Editor. 1976. *Politik Bahasa Nasional*, 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Harimurti Kridalaksana. 1976. "Tata Cara Standardisasi dan Pengembangan Bahasa Indonesia" dalam Amran Halim. Editor: *Politik Bahasa Nasional*, 2.
- Harimurti Kridalaksana dan Djoko Kentjono. Ed. 1971. *Seminar Bahasa Indonesia 1968*. Ende: Nusa Indah.
- Jones, Daniel. 1956. *Ang English Pronouncing Dictionary*, Edisi 11. London: Dent.
- Kenyon, John S. dan Thomas A. Knott. 1944. *A Pronouncing Dictionary of American english*. Springfield: G. & C. Merriam Company.
- Keraf, Gorys. 1970. *Tatabahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Atas*. Ende: Nusa Indah.

- Latif, A. 1971. "Lafal dan Ejaan". Harimurti Kridalaksana dan Djoko Kentjono. Editor. *Seminar Bahasa Indonesia 1968*.
Medan Bahasa IV; 7 dan 8, 1954.
- Moeliono, A.M. 1976. "Ciri-ciri Bahasa Indonesia yang Baku". Dalam Amran Halim. Editor. *Politik Bahasa Nasional*, 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Panitia Penyelenggara Bahasa Indonesia. 1955. *Kongres Bahasa Indonesia di Kota Medan. 28 Okt. - 2 Nop, 1954*. Djakarta: Djawatan Kebudayaan Kem. P.P. dan K. Bagian Bahasa.
- Pike, Kenneth L. 1947. *Phonemics: A Technique for Reducing Languages to Writing*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan 5. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prijana. 1954. "Dasar-dasar Ejaan Bahasa Indonesia dengan Huruf Latin". Dalam *Medan Bahasa IV*; 7 dan 8.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional: Jakarta 25-28 Februari 1975*.
- Ray, Punya Sloka. 1963. *Language Standardization*. The Hague : Mouton & Co.
- Samsuri, 1960. "Sistem Fonem Indonesia dan Suatu Penjusunan Ejaan Baru". *Medan Ilmu Pengetahuan I*; 4: 323-341.
- Samsuri. 1978. *Analisa Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Slametmuljana. 1959. *Politik Bahasa Nasional*. Djakarta: Jambatan
- Tim Fonologi FKSS-IKIP Malang. 1976. "*Petunjuk Penelitian Fonologi Bahasa Indonesia Baku*". Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan bantuan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Wojowasito, S. 1976. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Daerah". Dalam Amran Halim, Editor, *Politik Bahasa Nasional*, 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

INTERFERENSI DAN INTEGRASI DALAM SITUASI KEANEKABAHASAAN

Soepomo Poedjosoedarmo

IKIP Sanata Dharma

Kertas kerja ini dimaksudkan untuk menyelusuri perkembangan yang telah dialami oleh bahasa Indonesia pada akhir-akhir ini, terutama dalam hubungannya dengan bahasa-bahasa daerah. Kertas kerja ini dibuat atas permintaan Ketua Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia III No. 56/B/II/KBI/78, tanggal 15 Agustus 1978.

Dalam persoalan bahasa, bangsa Indonesia telah mencapai hasil gemilang. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Republik Indonesia sungguh menyenangkan. Proses yang dilaluinya, semenjak ia masih bernama bahasa Melayu hingga sekarang, cukup menarik. Ada perkembangan yang berjalan melalui proses perkembangan yang wajar; ada pula yang melalui musyawarah dan persetujuan.

Sampai akhir abad ke-19, bahasa Melayu mengalami proses penyebaran secara wajar ke berbagai pantai di Kepulauan Indonesia. Sebagian karena kegemaran beberapa suku bangsa Indonesia berlayar, merantau dan berdagang, sebagian lagi karena letak daerah Melayu yang kebetulan baik untuk pusat perdagangan, sebagian karena bahasa Melayu mudah dipelajari orang--termasuk orang India, Arab, Cina, Portugis, Belanda, dan Inggris --, maka bahasa Melayu dipakai oleh berbagai bangsa dan akhirnya lalu menumbuhkan kantong-kantong daerah kreol Melayu di beberapa pantai, seperti di Jakarta, Manado, Ambon, Kupang, Larantuka, dan beberapa daerah lain.

Kreol-kreol ini mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu pada waktu itu. Bahasa Melayu mengalami semacam proses pijinisasi, yang menyebab-

kan kodifikasinya melemah. Oleh karena itu, bahasa Melayu sering dianggap sebagai bahasa pasaran. Akan tetapi, sementara itu bahasa Melayu lalu terbuka, mudah sekali menerima pengaruh-pengaruh dari mana pun.

Pijinisasi bahasa Melayu mulai terkendalikan setelah bahasa Melayu Tinggi diajarkan di sekolah-sekolah pada pergantian dari abad ke-19 ke abad ke-20. Keputusan pemerintah penjajah Belanda untuk mengajarkan bahasa Melayu Tinggi di sekolah-sekolah ini ternyata sangat membantu perkembangan bahasa Melayu selanjutnya. Dengan keputusan ini bahasa Melayu menjadi semakin tersebar dan standardisasinya pun mulai terintis kembali.

Penyebaran dan standardisasi bahasa Melayu semakin maju dengan didirikannya Balai Pustaka dan kemudian dicituskannya Sumpah Pemuda tahun 1928. Register-register khusus kehidupan politik pemerintahan mulai dirintis dan diantarkan dengan bahasa Melayu.

Beberapa tahun kemudian, pengarang-pengarang yang tergabung pada *Pujangga Baru* mulai mengembangkan ragam keputakaan (atau ragam indah) dalam tubuh bahasa Melayu modern itu. Puisi, drama, dan roman yang mereka tulis menjadi pelopor estetikanisasi bahasa Indonesia.

Proses intelektualisasi bahasa Melayu dipergiat (atau dimulai) setelah pemerintah pendudukan Jepang pada Perang Dunia II menyetujui menggunakan bahasa Melayu untuk bahasa pengantar sekolah dan urusan politik pemerintahan. Beratus-ratus istilah teknis dalam berbagai bidang kehidupan dipungut oleh bahasa Melayu karena ia harus mengantarkan ilmu-ilmu seperti aljabar, ilmu ukur, biologi, geografi, musik, dan lain-lain.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan kita, dan bahasa Melayu secara resmi menjadi bahasa Indonesia, proses standardisasi, estetikanisasi, intelektualisasi, dan penyebaran fungsi bahasa Indonesia makin menjadi bertambah pesat. Beberapa ahli bahasa, baik bumiputra maupun asing, menulis buku-buku tata bahasa, kamus, dan buku pelajaran bahasa yang sangat berguna bagi standardisasi bahasa. Guru-guru dan para penerbit menyebarkan bahasa Indonesia ke seluruh penjuru tanah air. Penulis buku pengetahuan menambah kata-kata dan idiom baru melalui karyanya. Para sastrawan menimbulkan pola morfosintaksis baru, relasi semantik baru, dan struktur wacana baru yang sangat membantu dalam memperindah bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia menjadi semakin tersebar dengan semakin membaiknya sistem pendidikan kita, sistem pemerintahan kita, sarana komunikasi, dan media masa kita. Sebagai akibatnya, lambat laun ragam bahasa lisannya pun

mulai terbentuk pula di daerah-daerah bukan Melayu. Ini berarti bahwa fungsi bahasa Indonesia telah betul-betul menjadi sangat luas.

Inventarisasi

Jika dibandingkan dengan keadaannya pada waktu masih bernama bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini terdapat merata hampir di seluruh unsur kebahasaannya, variasinya, fungsinya, dan juga prestisinya.

Pada unsur kebahasaannya dapat kita sebut bahwa bahasa Indonesia dewasa ini telah memiliki fonem atau bunyi baru (/f/, /sy/, /kh/, /z/), aturan fonotaktik baru (gugus konsonan/Kr-, /kl-/; suku akhir dengan vokal /e/; dan lain-lain) yang dulu tak terdapat pada inventarisasi bahasa Melayu. Imbuhan-imbuhan baru mulai berkembang, bahkan sebagian daripadanya telah mulai bersifat produktif (-is, -isasi, wan, -wati, -a, -i, -isme, a-, tuna-, pramu-, eks-, dan lain-lain). Kecuali itu, konfiks seperti *ke-...-an*, *peN-...-an*, *per-...-an*, yang sangat perlu untuk membuat abstraksi dan nominalisasi, ternyata telah menjadi semakin produktif. Imbuhan-imbuhan itu berkembang bersamaan dengan proses intelektualisasi bahasa Indonesia. Dalam tata kalimatnya kita dapat menyebut bahwa sekarang ini pola susunan subjek plus predikat plus komplemen jauh lebih tinggi frekuensinya daripada pola predikat plus subjek. Sementara itu, faktor intonasi menjadi sangat dominan. Frase genitif dengan memakai *daripada* dan klausa relatif dengan kata *di mana*, *dari mana*, *untuk siapa*, *ke mana saja*, dan lain-lain sekarang mulai digemari orang. Selanjutnya, struktur wacana baru pun tampaknya banyak yang timbul. Dengan suatu penelitian, saya yakin bahwa, misalnya, di dalam register-register seperti perundang-undangan, pemberitaan di surat kabar, tajuk rencana, laporan ilmiah dapat ditemukan susunan wacana yang dulu belum pernah ada. Selanjutnya, pada tingkat leksikonnya, kita dapat menyebut bahwa sekarang ini bahasa Indonesia telah menjadi jauh lebih kaya daripada dulu sewaktu ia bernama bahasa Melayu. Beribu-ribu kata pinjaman telah dipungut, baik dari bahasa asing maupun dari bahasa-bahasa daerah. Bahkan, kata-kata partikel yang tampaknya tak memiliki arti leksikal pun telah dipungut dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan leksikon bahasa Indonesia. Inovasi baru dari dalam tubuh leksikon dengan jalan pemajemukan dan derivasi juga banyak berkembang. Kamus bahasa Indonesia sekarang ini telah menjadi sangat tebal. Kamus istilah dan, bahkan kamus akronim bermunculan di mana-mana.

Dalam hubungan dengan sistem tulisnya, kita tahu bahwa abjad Latin sekarang telah menjadi sistem tulis bahasa Indonesia mantap. Sekarang orang telah jarang menulis dengan huruf Arab atau Jawa. Sebagai akibatnya, perbedaan ucapan seperti yang terdapat pada kata *hakekat* dan *hakikat*, *telur* dan *telor* dapat digambarkan dalam sistem tulis dan dilihat orang dengan jelas.

Dialek, Unda-wusuk, Ragam, dan Register Khusus

Suatu pertama bahwa bahasa Indonesia telah betul-betul menjadi milik rakyat Indonesia ialah adanya kenyataan bahwa bahasa Indonesia sekarang ini telah memiliki dialek-dialek geografis yang tersebar di seluruh daerah. Sekarang kita dapat berkata bahwa bahasa Indonesia telah memiliki logat Sunda, logat Jawa, logat Bali, Madura, Batak, Minangkabau, Minahasa, Flores, Ambon, dan lain-lain. Pada logat-logat ini biasanya terdapat penyimpangan-penyimpangan tertentu pada sistem tata ucapannya dan beberapa istilahnya. Dialek-dialek ini sangat dipengaruhi sistem fonologi, morfosintaktis, dan leksikon bahasa daerah. Dialek ini menggunakan sistem suprasegmental bahasa daerah. Ia juga menggunakan interjeksi dan partikel kalimat bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah bukan saja terdapat pada pemakaian ragam lisannya, tetapi juga sering terdapat pada ragam tertulisnya. Dialek ini terbentuk bukan saja karena para penutur bertempat tinggal di daerah yang terpisah-pisah, tetapi terutama karena mereka itu baru menguasai bahasa Indonesia sesudah menguasai bahasa daerah terlebih dahulu. Jadi, penyimpangan-penyimpangan itu terjadi karena adanya transferensi dari kebiasaan berbahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Pada tingkat tuturnya (*unda-usuknya*) pun terdapat perubahan-perubahan. Jikalau dulu dipakai apa yang disebut "bahasa dalam", pemakaian kata-kata itu sekarang agak berkurang karena sistem feodalisme di Republik Indonesia sekarang resminya telah tidak dipakai. Oleh karena itu, ada beberapa istilahnya yang sekarang jarang dipakai, misalnya, *gering*, *bersabda*, *guling*, *bercengkerama*. Kata-kata yang lain seperti *mempersalahkan*, *anugerah*, *mohon* masih sering dipakai, tetapi sebagai objek atau agennya sekarang sering dipakai rakyat biasa secara keseluruhan. Dengan kata lain, konotasi *honorifik* kata-kata itu telah banyak menurun. Suatu hal yang bertambah ruwet ialah persoalan pemanggilan orang kedua (O2) sebagai lawan bicara. Sekarang ini untuk menyebut O2, banyak sekali kata-kata yang dapat dipakai : *kamu*, *engkau*, *saudara*, *tuan*, *nyonya*, *nona*, *ibu*, *bapak*, *adik*, *adinda*, *anda*, dan lain-lain dan masing-masing memiliki spesifikasi artinya sendiri-sendiri. Ini menunjukkan bahwa perihal relasi sosial di masyarakat kita masih banyak va-

riasinya dan situasinya belum mantap betul.

Dalam hubungan dengan ragam bahasa dengan terbentuknya dialek-dialek regional, bahasa Indonesia ini mulai memiliki tiga ragam bahasa yang biasanya dimiliki oleh bahasa-bahasa penting: ragam informal, ragam formal, dan ragam pustaka. Dari sudut lain, yaitu dari kelengkapan bentuknya, bahasa Indonesia pun telah memiliki ragam yang lengkap: ragam tutur ringkas, ragam tutur lengkap, dan ragam puisi. Masing-masing ragam ini memiliki cirinya sendiri-sendiri. Ragam-ragam ini sudah mulai dikenal masyarakat dengan baik. Hanya saja, karena tingkat ilmiah kita pada umumnya belum begitu tinggi, penguasaan ragam formal dan ragam lengkap oleh sebagian besar masyarakat masih belum memuaskan.

Cara penyebaran ragam-ragam itu di Indonesia juga cukup menarik. Di tempat-tempat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu, pemerolehan ragam informal berjalan wajar melalui pergaulan hidup sehari-hari semenjak masa bayi. Ragam formal diperoleh lewat pendidikan formal. Demikian pula penguasaan dasar-dasar ragam pustaka. Akan tetapi, bagi masyarakat yang berbahasa ibu bahasa daerah, pemerolehan ragam informal itu terjadi sesudah mempelajari ragam formal terlebih dahulu. Kadang-kadang, penguasaan ragam informal itu, bahkan terjadi sesudah berkenalan dengan ragam pustaka. Oleh karena itu, penguasaan ragam informal orang-orang daerah biasanya bersifat sangat heterogen. Ada orang yang pandai bertutur informal dengan luwes sekali, tetapi ada pula orang yang kalau berbicara terdengar kaku sekali. Mereka yang menggunakan bentuk-bentuk ragam bahasa formal waktu berbicara dalam suasana informal. Atau, jika tidak, mereka itu berbicara dengan memasukkan interferensi dari bahasa daerah dalam jumlah besar. Jadi, baik ragam formal maupun ragam informal bahasa Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Akan tetapi, kalau kaidah-kaidah ragam formal itu sudah boleh dikatakan mantap, kaidah-kaidah ragam informal umumnya masih belum begitu mantap. Oleh karena itu, ragam ini masih sangat terbuka terhadap pengaruh-pengaruh luar. Dengan adanya kesempatan ini, ragam informal bahasa Indonesia di Jakarta, yang terkenal dengan bahasa Jakarta atau dulu terkenal dengan omong Betawi, mulai banyak mempengaruhi ragam informal bahasa Indonesia di daerah-daerah. Bahasa Jakarta karena didukung oleh penutur-penutur kota yang sangat penting mulai menanjak prestisenya. Lewat televisi, radio, media massa lain, dan juga melalui kontak pribadi, pemuda-pemudi di daerah memperoleh model-model bahasa dari Jakarta dan kemudian mencoba menirunya dalam perca-

kan mereka sehari-hari. Jadi, bahasa Indonesia telah berhasil mengembangkan berbagai dialek dan ragam bahasa. Akan tetapi, ia juga telah berhasil mengembangkan berbagai register khusus. Penelitian tentang register khusus, terutama di Indonesia, belum banyak. Namun, kita dapat menyebut bahwa, misalnya, di dalam bahasa Indonesia sekarang ini telah ada register khusus bahasa persuratkabaran, bahasa perundang-undangan, bahasa surat-menyurat resmi, bahasa rapat politik, bahasa puisi, bahasa sandiwara, atau bahasa telepon. Register-register khusus itu berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan berfungsi bahasa Indonesia. Ada register khusus yang telah bertradisi secara mantap, seperti bahasa perundang-undangan, tetapi ada juga yang belum mantap seperti bahasa telepon.

Banyak di antara register-register yang baru tumbuh itu dipengaruhi oleh pola-pola struktur bahasa Belanda atau bahasa Inggris, tetapi kadangkala kita menemukan pula petunjuk-petunjuk adanya pengaruh bahasa daerah. Sering kita dengar ada orang berpidato dengan gaya dalang, dan akhirnya ini di dunia kesusastraan telah berkembang bentuk-bentuk puisi baru yang sangat dipengaruhi oleh bentuk mantera-mantera dari bahasa Iban atau mantera Dayak lainnya. Tampaknya, register yang tumbuh bersamaan dengan diimpornya teknologi Barat juga banyak dipengaruhi bahasa-bahasa Barat, dan register yang tumbuh dan mempunyai akar di kebudayaan daerah juga dipengaruhi oleh bahasa daerah.

Fungsi

Dalam hubungan dengan fungsi bahasa Indonesia, kita dapat menunjuk hasil survei yang dijalankan oleh tim inti penyuluh bahasa Indonesia. Setelah menjalankan surveinya di daerah-daerah di seluruh Indonesia selama beberapa bulan, tim itu melaporkan bahwa antara lain di hampir setiap propinsi terdapat masyarakat yang di dalam kehidupannya sehari-hari menggunakan dua bahasa sebagai bahasa pengantar, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi, masyarakat Indonesia sebagian besar ialah masyarakat yang berdwi-bahasa. Masyarakat dwibahasa ini terutama terdapat di kota-kota besar dan kota-kota menengah. Namun, di samping masyarakat dwibahasa, ada masyarakat-masyarakat jenis lain. Di beberapa tempat seperti di daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Irian, terutama di daerah-daerah dekat perbatasan suku, terdapat masyarakat yang multibahasa. Mereka mempergunakan bahasa Indonesia dan beberapa bahasa daerah. Di desa-desa dan di daerah yang terpencil masih ada masyarakat yang ekabahasa yang memakai satu bahasa daerah saja. Daerah-daerah terpencil ini biasanya belum mempunyai

sekolah atau sarana komunikasi, seperti jalan yang baik, radio, atau televisi. Hal yang menggembirakan bagi perkembangan bahasa Indonesia ialah adanya daerah-daerah yang mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Medan anak-anak telah tumbuh menjadi ekabahasawan bahasa Indonesia.

Pada masyarakat yang berdwibahasa, dan juga pada masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu atau bahasa daerah terdapatlah penggunaan bahasa yang sifatnya "diglosia". Artinya ialah bahwa pada masyarakat itu terdapat pilihan-pilihan penggunaan bahasa secara baik: bahasa Indonesia digunakan pada waktu-waktu tertentu yang lain. Tumpang-tindih tugas kebahasaan jarang terjadi. Kalau ada, sedikit saja. Atau kadang-kadang yang sedikit itu pun masih dapat diselurus lagi pilihan-pilihan (pembagian) fungsinya.

Secara singkat dapat kita katakan bahwa bahasa Indonesia sekarang ini umumnya dipakai bila suasananya bersifat resmi, dinas, (baik dinas pemerintahan maupun dinas swasta), ilmiah, modern, dan bersemangat nasional dan antarsuku. Sebaliknya, bahasa daerah digunakan pada waktu-waktu yang sifatnya tidak resmi, familiar, kedaerahan, dan tradisional. Bahasa Indonesia digunakan pada situasi tutur yang sifatnya resmi kenegaraan dan resmi kedinasan, keilmuan, kenasionalan, dan modern, sedangkan bahasa daerah digunakan pada situasi tutur yang sifatnya kekeluargaan, kedaerahan, dan tradisional. Perincian fungsi antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah di berbagai daerah agak bervariasi, terutama pada situasi tutur yang sifatnya indah dan religius.

Di Jawa, misalnya, dalam rapat-rapat dan laporan kedinasan, kepartaian, digunakan orang bahasa Indonesia. Bahkan, di tingkat kelurahan, laporan jual beli tanah, rapat dinas antarpamong, laporan tentang perkawinan, sudah banyak dijalankan dalam bahasa Indonesia. Di sekolah-sekolah, kecuali pada kelas I, II, III sekolah dasar, bahasa Indonesia umumnya sudah digunakan sebagai bahasa pengantar pelajaran. Di kota-kota sudah ada beberapa sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang menggunakan bahasa Indonesia langsung dari sejak hari pertama masuk sekolah. Untuk siaran-siaran radio, televisi, dan tulisan-tulisan di majalah masih ada tumpang tindih penggunaan bahasa; sebagian bahasa Indonesia dan sebagian bahasa daerah. Akan tetapi, kalau dilacak, sebetulnya kita masih dapat menemukan pembagian tugas juga: bahasa Indonesia untuk hal-hal yang bersifat nasional dan bahasa daerah untuk hal-hal yang sifatnya kedaerahan dan tradisional. Kalau ada peng-

gunaan yang menyimpang dari kebiasaan itu, rasanya lalu agak janggal.

Dalam urusan perdagangan pun tampaknya juga begitu. Urusan perdagangan yang bersifat dan bersuasana kedaerahan biasanya diantarkan oleh bahasa Indonesia, tetapi yang berbau modern diantarkan dengan bahasa daerah.

Dalam kehidupan kesenian dan keagamaan juga ada tumpang tindih penggunaan bahasa; baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah kadang-kadang digunakan orang. Akan tetapi, dalam seni panggung, misalnya, bahasa Jawa digunakan untuk ketoprak, wayang, dagelan, ludruk, dan sendratari, sedangkan bahasa Indonesia untuk sandiwara bentuk baru, yang biasanya dimainkan oleh para pemuda-pemudi pelajar. Sandiwara ini biasanya mempunyai corak modern dan suasana yang dipancarkannya biasanya suasana bukan kedaerahan. Dalam pesta perkawinan, pidato-pidato diadakan dengan bahasa Jawa apabila dikehendaki suasana tradisional kejawaan yang betul. Akan tetapi, di kota-kota, kadang-kadang bahasa Indonesia dipakai apabila dinilai bahwa suasananya bersifat urban. Demikian pula dalam upacara-upacara keagamaan di mesjid dan gereja, upacara kematian, peralatan khitanan, dan pola pembagian tugas kebahasaan serupa.

Situasi diglostik ini tampaknya belum mantap betul. Proses pembagian fungsi kebahasaan antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah masih berjalan terus. Fungsi kebahasaan bahasa Indonesia masih dalam taraf berkembang; sedikit demi sedikit menambil alih fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bahasa-bahasa daerah. Di daerah-daerah yang berbahasa daerah besar, yaitu yang berbahasa daerah dengan tradisi sastra tulis, ada kekhawatiran bahwa bahasa daerah tak akan lagi dipakai di sekolah. Seperti telah kita singgung, ada beberapa sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang sekarang ini sudah tidak menggunakan bahasa daerah lagi; dan biasanya sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang tak menggunakan bahasa daerah itu adalah sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang bermutu baik. Bahkan, penggunaan bahasa daerah di kalangan keluarga pun sekarang ini mulai tergerogoti. Ada beberapa keluarga terdidik dan berinspirasi modern sekarang ini tidak lagi menggunakan bahasa daerah untuk bahasa pengantar keluarga, paling tidak antara orang tua dan anak. Dalam keluarga yang berprestise ini, bahasa Indonesia dipakai untuk berkomunikasi.

Di daerah-daerah yang berbahasa daerah kecil, yang tak memiliki tradisi sastra tulis, tumpang-tindih penggunaan bahasa ini, bahkan lebih meluas dan mendalam lagi. Bahasa Indonesia dipakai dalam sebagian besar aspek-

aspek kehidupan. Aspek-aspek kehidupan yang "hanya" diantar oleh bahasa daerah jumlahnya tinggal sedikit saja.

Dalam situasi kebahasaan yang sifatnya diglosik seperti kita alami di Indonesia biasanya ada beberapa kecenderungan. Kecenderungan-kecenderungan itu antara lain ialah (1) adanya saling mempengaruhi antara kedua bahasa yang dipakai, (2) adanya gejala-gejala bahasa yang biasa disebut "alih kode". Sebagai akibat adanya saling pengaruh itu, maka kedua bahasa itu makin lama makin serupa, sedangkan sebagai akibat adanya gejala alih kode penggunaan bahasa itu lalu terasa seperti kacau.

Tuah

Dalam artikelnya yang berjudul "Piglossia", Ferguson (Dalam Giglioli, 1972: 232-234) membedakan adanya dua bahasa, yang satu disebut bahasa H (*High* 'tinggi'), satunya bahasa L (*Low* 'rendah'). Kalau kita mengikuti kerangka Ferguson ini, bahasa Indonesia lalu dapat kita namakan H, dan bahasa-bahasa daerah kita namakan L. Dikatakannya bahwa H mempunyai prestise atau buah bahasa yang tinggi, sedangkan L bertuah bahasa rendah saja. Memang bahasa Indonesia dewasa ini memiliki prestise yang makin lama makin merosot. Yang dimaksud dengan buah bahasa atau prestise bahasa ialah tingkat rasa bangga yang ditimbulkan oleh bahasa itu pada diri penutur-penuturnya. Dengan begitu, buah bahasa ini dapat dilihat pada sikap para penuturnya terhadap bahasa itu sendiri, baik penutur asli maupun penutur kedua atau asing. Naik dan turunnya buah bahasa ini biasanya ditentukan oleh beberapa hal, terutama (1) tingkat kemampuan bahasa itu sebagai sarana komunikasi, dan (2) tingkat peradaban masyarakat pendukungnya. Jika sebuah bahasa mempunyai kesanggupan yang besar sebagai bahasa pengantar, sanggup menjadi bahasa pengantar segi-segi kebudayaan yang dianggap tinggi oleh masyarakat, bahasa itu cenderung memiliki buah yang tinggi. Jika bahasa itu didukung oleh masyarakat yang berperadaban tinggi, apa lagi kalau anggota masyarakat itu berjumlah besar, ia cenderung bertuah hebat pula.

Bahasa Indonesia ini mulai menanjak prestisinya karena ia mulai mempunyai kemampuan yang baik dan bangsa Indonesia sebagai pendukung bahasa Indonesia pun tengah mengembangkan peradaban yang oleh masyarakat modern sekarang ini dianggap tinggi.

Syarat untuk dapat dipakai sebagai sarana komunikasi secara baik ialah bahwa bahasa itu harus memiliki standarisasi yang mantap karena dengan be-

gitu, informasi-informasi yang diantarkannya lalu dapat dimengerti oleh orang banyak tanpa menimbulkan salah paham. Di samping itu, bahasa itu harus kaya dengan leksikon dan unsur morfosintaksis sehingga ia dapat dipakai menyampaikan berbagai pengertian, konsep, proses, kondisi, sebab, akibat, dan lain-lain secara *gamblang*. Bahasa Indonesia sekarang ini boleh dikatakan telah memiliki pembakuan yang baik dan memiliki kosa kata dan kosa morfosintaksis yang mencukupi untuk menyampaikan berbagai wacana. Tentu saja bahasa Indonesia masih dapat ditingkatkan lagi dalam kedua hal ini. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia juga masih dapat ditingkatkan tuahnya.

Jika kita memeriksa bahasa-bahasa lain yang memiliki prestise yang tinggi, seperti bahasa Yunani zaman Aleksander Agung bahasa Latin, bahasa Prancis sejak Napoleon Bonaparte, bahasa Inggris dewasa ini, bahasa Arab, bahasa Cina Mandarin, kita akan menjadi yakin bahwa untuk dapat menjadi bertuah, bahasa itu harus mempunyai kemampuan yang tinggi dan didukung oleh masyarakat yang beradab. Bahasa Yunani pada waktu Aleksander Agung menjadi bahasa pengantar daerah-daerah kekuasaannya terutama dalam kehidupan politik pemerintahan, yang pada waktu itu merupakan segi kebudayaan yang dianggap tinggi. Bahasa Latin bertuah cemerlang karena di samping sebagai bahasa pengantar kehidupan politik pemerintahan ia juga bahasa pengantar kehidupan keagamaan yang pada waktu itu dianggap maha penting di dalam kehidupan manusia. Bahasa Prancis bertuah cemerlang karena ia dipakai sebagai bahasa pengantar kehidupan politik pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan kesenian, yang kesemuanya dihargai oleh masyarakat. Demikian seterusnya. Dan untuk itu, bahasa itu memang memiliki kodifikasi yang mantap dan memiliki kosa kata yang banyak. Aturan-aturan tata bahasa, tata bentuk kata, tata ucap, dan tata tulis bahasa Inggris dewasa ini jelas walaupun barangkali buat kita agak kompleks. Di samping itu, perbendaharaan kata Inggris memang mengesankan. Kamusnya tebal sekali. Kamus itu harus tebal, sebab bahasa Inggris digunakan orang dalam segala bidang kehidupan yang dialami orang Inggris, Amerika, Canada, Australia, New Zealand, yang amat luas dan penuh dengan spesialisasi yang rumit. Anggota-anggota masyarakat yang berbahasa Inggris sebagai bahasa ibu memiliki pengalaman serta aspirasi hidup yang amat luas dan amat dalam dan karena semua itu harus dilambangi oleh kata dan ungkapan, maka jumlah kata dan ungkapan yang bisa didaftar di dalam kamus bahasa Inggris lalu besar sekali.

Bahasa Indonesia dewasa ini memiliki buah yang lebih baik daripada bahasa Melayu pada zaman sebelum proklamasi kemerdekaan sebab bahasa

Indonesia sekarang ini telah mulai mampu dipakai sebagai bahasa pengantar aspek-aspek kehidupan yang oleh orang sekarang dipandang bernilai, misalnya, kehidupan politik pemerintahan, kehidupan ekonomi modern, kehidupan ilmu pengetahuan, kehidupan religi, kehidupan kesenian, dan kehidupan sosial. Bahasa Indonesia memiliki tuah karena tata bahasanya telah mulai menjadi mantap, jauh lebih mantap daripada waktu pijinisasi masih berlangsung. Bahasa Indonesia memiliki tuah karena kamusnya juga mulai menjadi semakin tebal.

Sebaliknya, bahasa-bahasa daerah menjadi semakin pudar sebab makin lama kemampuan komunikasinya menjadi semakin ciut. Kemampuannya sebagai pengantar bidang kehidupan politik pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan agama makin melemah. Kodifikasinya semakin longgar. Di dalam tata bahasanya terdapat banyak alternatif-alternatif. Batas antara apa yang betul dan apa yang salah menjadi semakin kabur. Inovasi di dalamnya menjadi agak jarang, dan kalau ada, tak tersebar merata diketahui orang banyak. Kamus bahasa daerah tak banyak bertambah tebal.

Di desa-desa, banyak pemuda yang dengan tak sadar menggunakan bahasa Indonesia untuk bersombong, bergaya, atau meletakkan kesan yang berwibawa kepada orang lain. Bahasa Indonesia mempunyai konotasi urban. Di Yogya, para pemuda merasa lebih "aksi" berjalan dengan membawa majalah *Tempo* daripada majalah berbahasa Jawa *Mekarsari*. Bahasa Indonesia mempunyai konotasi modern. Di luar negeri jumlah orang yang belajar bahasa Indonesia makin bertambah. Mereka mempelajari bahasa Indonesia dengan berbagai alasan: ada yang untuk mengajukan karier di kemudian hari, ada yang agar cepat lulus dalam ujian sekoalh, ada yang sekedar ingin mengetahui dengan lebih baik peradaban orang Indonesia.

Pengaruh Bahasa Daerah

Seperti telah kita singgung di atas, antara bahasa yang menjalani fungsi sebagai H (atas) dan L (bawah) ada kecenderungan saling mempengaruhi. Kecenderungan saling mempengaruhi ini ada, terutama apabila (a) keadaan diglosia itu belum mentap, (b) kodifikasi bahasa H belum tajam betul, (c) kodifikasi itu ditentukan sendiri oleh masyarakat pemakai diglosia itu, (d) masyarakat pemakai bahasa itu mempunyai toleransi kebahasaan yang besar, dan (e) masyarakat pemakai bahasa beranggapan bahwa antara kedua bahasa itu tak ada perbedaan besar.

Ferguson berkata bahwa hubungan antara kedua bahasa di dalam suasana diglosia itu dapat mantap, artinya fungsi yang dijalankan oleh masing-masing bahasa itu dapat menjadi stabil. Akan tetapi, saya kira hal ini baru terjadi apabila tumpang-tindih fungsi tidak begitu ekstensif. Apabila tumpang-tindih fungsi masih terjadi di banyak segi fungsi kebahasaan, relasi diglosia itu belum betitu stabil. Oleh karena itu, bahasa H (atas) masih dalam proses mendesak bahasa L (bawah). Di Indonesia keadaan ini kiranya belum mantap betul. Pada beberapa fungsi kebahasaan bahasa Indonesia masing-masing sedang dalam mengambil alih fungsi kebahasaan bahasa daerah. Di dalam keadaan yang seperti inilah saling mempengaruhi terjadi. Bahasa Indonesia banyak memungut unsur-unsur kebahasaan bahasa daerah dan bahasa daerah banyak menerima unsur-unsur kebahasaan bahasa Indonesia. Namun, dari sudut pandangan lain, kita dapat mengatakan bahwa saling mempengaruhi ini terjadi karena aturan-aturan tata bahasa yang ada pada bahasa Indonesia belum mantap betul; belum tajam betul; masih terdapat fleksibilitas yang cukup longgar. Jika kodifikasi bahasa H (atas) sudah mantap betul, sebetulnya susah juga bagi bahasa L (bawah) untuk mempengaruhinya. Di Arab, bahasa-bahasa Arab kolokuiial sukar mempengaruhi bahasa Arab standar sebab tata bahasa Arab standar sudah boleh dikatakan mantap betul. Selanjutnya, kita dapat menyatakan bahwa saling mempengaruhi ini dapat terjadi karena kodifikasi bahasa Indonesia kita tentukan sendiri di Indonesia. Seandainya tidak, seperti yang terjadi pada pemakaian bahasa Inggris di Filipina, bahasa Prancis di Haiti, bahasa Inggris di Hongkong, dan lain-lain, pengaruh-pengaruh bahasa daerah akan sulit diterima oleh bahasa Indonesia. Di Indonesia, bahasa Indonesia telah memungut banyak unsur bahasa dari bahasa daerah, terutama bahasa daerah besar seperti bahasa Jawa, Sunda, dan lain-lain karena kita adalah pemilik bahasa Indonesia itu sendiri. Kodifikasi bahasa Indonesia kita tentukan sendiri di Indonesia, dan bukannya ditentukan oleh orang asing di negeri seberang.

Saling mempengaruhi mudah terjadi kalau penutur bahasa itu memiliki toleransi kebahasaan yang cukup besar. Ini memang betul. Jika penutur-penutur bahasa dalam masyarakat *kikrik* (serba rewel, selalu menuntut penggunaan yang bagus betul), maka kiranya pengaruh-pengaruh terhadap bahasa H akan sulit terjadi. Namun, dalam hal ini saya agak ragu, jangan-jangan toleransi kebahasaan ini hanya disebabkan oleh adanya alasan bahwa bahasa H itu masih memiliki kodifikasi yang longgar saja. Jadi, toleransi kebahasaan itu hanya akibat langsung dari adanya kodifikasi bahasa yang masih longgar.

Akhirnya, kita menyaksikan adanya kecenderungan lain. Apabila masyarakat penutur bahasa X beranggapan bahwa bahasa yang harus dipelajari sangat menyerupai bahasanya (X), mereka akan memunculkan pengaruh-pengaruh yang jauh lebih banyak daripada apabila masyarakat itu beranggapan sebaliknya. Rupa-rupanya, jika masyarakat penutur bahasa X itu beranggapan bahwa bahasa Y yang harus dikuasai kemudian serupa dengan bahasa aslinya, apa yang biasa kita sebut interferensi atau transferensi negatif lalu berjalan dengan agak keras. Jika bahasa Y dianggapnya sangat berbeda dengan bahasa aslinya, usaha mempelajari dijalankan dengan konsentrasi pikiran yang lebih baik dan akibatnya transferensi negatif dapat agak diperkecil. Mungkin antara lain inilah sebabnya bahwa sebegini jauh, pengaruh-pengaruh yang masuk ke bahasa Indonesia datangnya kebanyakan dari bahasa-bahasa daerah di sebelah barat, yang keadaan unsur-unsurnya sangat menyerupai bahasa Indonesia. Baik pada tingkat ucapan, morfosintaksis maupun tingkat kosa kata, pengaruh-pengaruh bahasa daerah sebelah barat jauh lebih terasa daripada pengaruh dari bahasa daerah sebelah timur.

Tentang alasan mengapa suatu bahasa memungut pengaruh atau unsur-unsur bahasa dari bahasa lain, Hockett (1962:404-405) menunjuk kepada adanya dua buah kondisi penyebab: (a) adanya keperluan memenuhi kebutuhan (*need dfilling motive*), dan (b) adanya keinginan beraksi-aksian (*prestige motive*). Jadi, secara singkatnya bahasa Indonesia memungut kata, pola sintaksis, pola morfologi, atau bunyi dari bahasa daerah apabila dirasakan ada kebutuhan untuk meminjam kata itu karena ternyata pada bahasa Indonesia belum ada bentuk yang tepatnya seperti yang dipinjam itu. Dalam hal ini kita memang menyaksikan bahwa bahasa Indonesia telah banyak memungut ungkapan dan kata dari bahasa-bahasa daerah karena bahasa Indonesia memerlukan ungkapan dan kata itu. Misalnya, kata *paling* (Bali), *gotong-royong*, *kok* (Jawa), *merantau* (Minangkabau) memang dipungut karena diperlukan.

Pemungutan dengan alasan prestise juga meliputi pungutan untuk kepentingan eufemisme, yang maksudnya untuk menjadikan kata-kata atau ungkapan tertentu terasa lebih sopan. Pemungutan-pemungutan semacam ini memang telah terjadi pada bahasa Indonesia dari bahasa-bahasa daerah, misalnya, *tinja* atau *pirsawan* (Jawa).

Dalam hal pungutan yang berdasar pada alasan pemenuhan kebutuhan, penting sekali disebut kata-kata dan pungutan yang datang dari bahasa daerah yang melambangi konsep-konsep dan nilai yang spesifik ada di dalam ke-

budayaan daerah, misalnya, *gamelan*, *wayang*, *dalang*, *candak kulak*, *kecapi suling*, *degung*, *pepes*, *tifa*, *santai*, *ngaben* dan *galungan*. Dengan masuknya kata-kata dan ungkapan ini ke dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, ini berarti bahwa konsep-konsep kebudayaan daerah ini telah atau paling tidak mulai ramai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa konsep-konsep dan kebiasaan daerah itu telah mulai memasuki khasanah kebudayaan nasional. Selanjutnya, selain pengaruh yang memasuki bahasa Indonesia lantaran alasan kebutuhan memenuhi keperluan dan alasan keinginan beraksi-aksian seperti yang telah disebut oleh Hockett, di dalam bahasa Indonesia ada lagi macam pungutan yang masuk ke tubuh bahasa Indonesia dari bahasa-bahasa daerah karena alasan kelembaman bahasa (*transference*). Dalam persoalan perolehan bahasa (*language acquisition*) kita mengenal adanya *transference* dari kebiasaan yang ada pada bahasa ibu kepada bahasa kedua atau bahasa asing yang tengah dipelajari (Lago, 1974:217). Kelembaman ini dapat memudahkan usaha belajar (*facilitate*) jika kebiasaan yang ada bahasa ibu itu serupa dengan sistem atau kebiasaan yang ada pada bahasa yang tengah dipelajari. Kelembaman itu sebaliknya akan menyulitkan atau mengganggu (*interfere*) jika kebiasaan yang ada pada bahasa yang tengah dipelajari itu berlainan dengan sistem yang ada pada bahasa yang telah dikuasainya terlebih dahulu. Peristiwa interferensi bahasa dalam soal peroleh bahasa itu sulit sekali dihindarkan, terutama pada diri orang-orang yang telah lanjut umurnya. Jika waktu mulai belajar bahasa kedua atau bahasa asing itu sudah pada usia agak lanjut, gejala interferensi ini menjadi ada di mana-mana. Interferensi ini terutama banyak sekali terjadi apabila metode belajar yang dipakai oleh pelajar itu semacam metode terjemahan. Interferensi-interferensi ini pada saatnya akan dikoreksi apabila tata bahasa, bahasa yang tengah dipelajari itu telah jelas betul dan apabila ada guru yang dengan tegas berani membetulkan kesalahan itu. Di dalam bahasa Indonesia, kesalahan-kesalahan interferensi yang datang dari pihak penutur bahasa daerah ini sering tidak dibetulkan. Mungkin sekali alasannya ialah bahwa pada waktu-waktu yang lalu kodifikasi bahasa Indonesia belum tajam betul dan guru-guru bahasa Indonesia pada waktu-waktu yang lalu juga belum yakin betul mengenai standar yang ada pada bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, banyaklah kesalahan-kesalahan interferensi yang dibuat oleh orang daerah ini lalu menjadi kesalahan yang sifatnya *salah-kaprah*, sebetulnya salah tetapi dianggap betul karena sudah umum dipakai orang. Kesalahan karena interferensi ini lalu masuk juga ke dalam khasanah unsur kebahasaan bahasa Indonesia.

Dari sudut kepentingan bahasa Indonesia, pengaruh yang datang dari bahasa-bahasa daerah ini ada yang menguntungkan ada juga yang mengacaukan. Pungutan-pungutan yang masuk lantaran keperluan memenuhi kebutuhan, menjadikan bahasa Indonesia kaya. Pungutan-pungutan lantaran kepentingan keinginan menggayakan dan menutupi kata yang dianggap kurang sedap didengar sebetulnya tidak terlalu menguntungkan walaupun barangkali dari segi kehidupan tertentu tidak merugikan. Ada kekhawatiran bahwa kebiasaan memungut atau menciptakan kata baru seperti eufemisme itu hanya mendidik masyarakat kita menjadi munafik dan bersemangat feodalistis, dan menambah jumlah kosa kata dengan hal-hal yang kurang diperlukan. Pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam bahasa Indonesia karena kelembaman bahasa tentu saja mengacaukan bahasa Indonesia. Kelembaman bahasa ini mendatangkan kata-kata, ungkapan, pola ucapan, pola pembentukan kata, pola frase, pola kalimat yang sama sekali tidak diperlukan oleh bahasa Indonesia. Interferensi yang menjadi *salah kaprah* ini hanya menimbulkan bentuk-bentuk yang menjadi saingan bentuk yang sudah lama maupun dalam bahasa Indonesia. Pengaruh yang masuk dari bahasa-bahasa daerah akibat interferensi *salah kaprah* ini menjadi akibat sampingan sebagai konsekuensi keterbukaan bahasa Indonesia. Sekarang ini kita tengah menghayati semua macam pengaruh ini.

Unsur-unsur bahasa yang masuk lantaran kebutuhan sangat menguntungkan bagi kita sebab dengan masuknya kata-kata seperti *tempe*, *serimpi*, *keraton*, *gotong-royong*, *candak kulak*, *bedol desa*, *pamong*, *mawas diri*, *wereng*, *ngaben*, *galungan*, *legong*, *merantau*, *melereng*, *mengayau*, *tifa* atau *koteka*, bahasa Indonesia lalu menjadi lebih kaya dan lebih mampu dalam mengantarkan berbagai pokok pembicaraan. Kecuali itu, kebudayaan daerah lalu diangkat masuk ke dalam khasanah kebudayaan nasional atau setidaknya mulai di-*karuh*-kan, diperhatikan dengan sikap yang positif. Dengan demikian, integrasi nasional juga tergalakkan.

Ada beberapa bahasa di dunia ini yang biasa memunculkan kata dan ungkapan baru dengan alasan karena kata dan ungkapan lama dirasakan kasar atau tidak sopan, tetapi saya kira kebiasaan ini memang kurang sehat. Mengapa harus memungut kata *tinja* kalau sudah ada kata *tahi*. Mengapa memakai kata *tunanetra* kalau sudah ada kata *buta*. Mengapa harus menimbulkan kata *wanita* kalau sudah ada kata *perempuan*. Mengapa perlu ada *pirsawan* kalau sudah ada *penonton*. Kebiasaan ini mengajari diri kita untuk mengembangkan sikap kemasyarakatan yang membeda-bedakan, yang feodalistis, yang

berkelas-kelas. Kebiasaan ini mengajari diri kita sendiri untuk suka menutupi suatu fakta dengan kata-kata yang muluk. Kita mendidik diri kita menjadi masyarakat yang tidak berani menatap kenyataan hidup. Padahal, kesemuanya hanyalah bergantung kepada pendapat kita. Suatu kata menjadi tabu betul karena kita anggap tabu. Kalau kita menganggapnya biasa, kata itu juga memiliki arti dan konotasi biasa dan tidak perlu ditutupi dengan mencari-cari eufemisme. Sekali suatu kata kita anggap tabu, konsep yang dilambangi oleh kata itu juga menjadi dianggap jelek; oleh karena itu, apa yang sekarang eufimisme, di waktu yang akan datang akan segera menjadi tabu juga. Sebagai akibatnya, kita harus menemukan kata eufemisme baru. Kadang-kadang kita dapat menjadi tak tahu lagi apa katanya yang asli di zaman dulu. Bagaimana-kah sejarah kata *WC* dan *toilet*? Apakah asal mula kata yang sekarang kita kenal sebagai *bersetubuh* atau *bersanggama*? Dalam soal bahasa tampaknya ada kecenderungan, kalau sebuah kata atau ungkapan sering dipakai, maka kata atau ungkapan itu akan kehilangan konotasi-konotasinya yang spesial. Bagi orang yang suka menggunakan kata *mohon*, konotasi honorifiknya lama-kelamaan terasa hambar. Bagi orang yang suka mengumpat, kata-kata yang sering dipakai di dalam umpatannya akan kehilangan konotasi kasarnya. Oleh karena itu, sebetulnya pungutan atas dasar menutupi tabu, aksi-aksian, dan yang serupa ini paling untung kurang ada manfaatnya. Kalau tidak untung, hal ini akan membawa kita kepada kebiasaan yang jelek.

Tentang kesalahan yang bersifat interferensi, memang agak sulit dihindarkan. Soalnya tidaklah mudah mengontrol kebiasaan yang telah mendarah daging. Menurut laporan tim penyuluh, penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh interferensi ini ada di mana-mana dari Aceh sampai ke Irian. Interferensi ini terdapat di segala tingkat unsur kebahasaan: cara mengucapkan kata dan kalimat, cara membentuk kata dan ungkapan, cara menyusun frase dan kalimat, dan cara pemberian arti kata tertentu (Soepomo, 1975). Ada interferensi yang bersifat aktif, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ada pada bahasa daerah terpindahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ada interferensi yang bersifat pasif, yaitu tidak digunakannya bentuk-bentuk Indonesia karena ketiadaan bentuk atau pola bentuk itu di dalam bahasa daerah. Ada lagi interferensi yang bersifat variasional: kebiasaan beragam bahasa tertentu atau unda-usuk tertentu di dalam bahasa daerah terbawa juga ke dalam bahasa Indonesia. Timbulnya ragam informal dalam dialek-dialek bahasa Indonesia sekarang ini kurang lebih ialah akibat interferensi ini. Di golongan masyarakat tertentu, di daerah-daerah bahasa daerah besar seperti di Jawa, sering timbul gejala *pengkromoan* bahasa Indonesia pembuatan tingkat tutur hormat

dengan jalan memasukkan kata-kata honorifik tertentu.

Banjirnya bentuk-bentuk dan pola-pola interferensi pada tata ucap, tata bentuk kata, tata kalimat, atau tata arti kata terang tidak menguntungkan perkembangan bahasa Indonesia karena seperti telah disinggung di depan, hal ini hanya menyebabkan adanya hal-hal yang bersaing saja. Kata-kata dan ungkapannya menjadi terlalu banyak. Di samping kata *harimau* ada kata *macan*; di samping *babi hutan* ada *celeng*; di samping *dapat* ada *bisa*; di samping *akan* ada *mau* dan *hendak*; dan seterusnya. Demikian pula pada aturan pengucapan kata: di samping kata *telur* ada kata *telor*; di samping *pengantin* ada *penganten*; di samping *pegang* (dengan tekanan kata pada vokal akhir) ada *pegang* (dengan tekanan kata pada vokal pertama); di samping *jangan* ada *dzangan*; di samping *kedudukan* ada *keduduqan*; di samping *disamakan* ada *disamakan*; di samping *rumah Ali* ada *rumahnya Ali*; dan seterusnya.

Kalau bentuk-bentuk bersaing itu ada dalam suatu bahasa dalam tempo yang lama, bahasa itu menjadi kurang efisien di dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana komunikasi. Biasanya lalu ada pemecahan. Salah satu pemecahan yang sering terjadi ialah bahwa salah satu bentuk dari bentuk yang bersaing itu akan hilang terdesak oleh bentuk yang dapat hidup terus. Di dalam bahasa Indonesia, misalnya, bentuk kata *zonder* sekarang itu sudah tidak lagi dipakai orang. Sebagai pemenang dalam persaingan itu, kata *tanpa*, sekarang dipakai terus. Kata *prakarsa* dalam banyak hal sekarang telah mendesak kata *inisiatif*. Akan tetapi, ada juga suatu contoh pemecahan secara lain. Saya mempunyai dugaan keras bahwa sistem unda-usuk di dalam bahasa Jawa yang sangat kompleks itu telah ditumbuhkan atau setidaknya diperluas pertumbuhannya karena adanya banjir pungutan-pungutan kata dari bahasa Sansekerta. Adanya bentuk *krama* atau *krama inggil* sebetulnya adalah hanya pemecahan atas adanya bentuk-bentuk bersaing yang timbul karena membanjirnya kata-kata pungut dari bahasa Sansekerta. Karena sesuatu hal, kata-kata yang berasal dari bahasa Sansekerta lalu diberi arti hormat dan lalu ditempatkan ke dalam perbendaharaan tingkat tutur yang hormat. Sebaliknya, kata-kata yang berasal dari bahasa Jawa asli lalu diberi arti tidak hormat dan ditempatkan pada perbendaharaan tingkat tutur *ngoko*. Pemecahan semacam ini mungkin lalu mencerminkan sikap toleransi kebahasaan orang Jawa, tetapi mungkin juga karena pada waktu itu keadaan kemasyarakatan di Jawa sudah ada tanda-tanda adanya kelas-kelas masyarakat yang bertingkat-tingkat.

Di Indonesia dewasa ini tampaknya ada gejala pemecahan secara lain. Pengaruh-pengaruh yang datang dari bahasa daerah secara interferensi ini

kebanyakan lalu dianggap memiliki konotasi informal dan kedaerahan. Dalam kenyataan, ragam informal bahasa Indonesia dan dialek-dialek geografis bahasa Indonesia dewasa ini banyak sekali mengandung bentuk dan pola yang asalnya dari pengaruh kalembaman bahasa daerah. Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa pungutan-pungutan dari bahasa daerah ini lalu diberi tugas untuk mengantarkan ragam bahasa yang sifatnya informal, serta dialek bahasa Indonesia regional. Kalau hal ini betul, maka bentuk-bentuk pungutan itu akan hidup teurs dan tidak terdesak ke luar dari pemakaian.

Tentang pengaruh ini ada satu hal yang perlu kita sebutkan. Kiranya kita tak perlu takut bahwa bahasa-bahasa daerah akan memberikan pengaruh yang akan menggoncangkan keseimbangan bahasa Indonesia. Sekarang ini orang menduga bahwa sistem kebahasaan itu dapat mantap dan dapat tidak mantap. Ia mantap jika komponen-komponen dalam sistemnya menempati struktur yang tertentu. Kalau salah satu dari struktur itu berubah, seluruh tata bahasa itu menjadi goyang juga. Dalam hal ini, karena bahasa-bahasa daerah yang mempengaruhi bahasa Indonesia kebanyakan ialah serumpun dengan bahasa Indonesia, kita tidak perlu khawatir bahwa pengaruh bahasa-bahasa daerah itu akan menggerakkan struktur bahasa Indonesia sehingga mencapai titik ketidakmantapannya (Poedjosoedarmo, 1976).

Alih Kode

Di samping pengaruh bahasa daerah yang sering terasa mengacaukan kemantapan standardisasi bahasa Indonesia, kita juga banyak mengalami gejala adanya alih kode secara agak *santer*. Memang, di dalam situasi diglosia, gejala alih kode ini sering tampak dengan jelas.

Pada waktu penutur berbicara dalam bahasa H, terseliplah ungkapan atau kata, atau klausa, bahkan kalimat dalam bahasa L. Atau sebaliknya, pada waktu bertutur dalam bahasa L, ungkapan, klausa, atau bahkan kalimat bahasa H sering terujarkan di sela-selanya. Hal ini biasanya disebabkan oleh pergantian warna emosi atau warna kehendak penutur sewaktu ia tengah berbicara. Dapat juga hal ini disebabkan oleh pergantian alamat atau arah orang ke-2 yang diajak bicara (02). Dapat juga hal ini disebabkan semata-mata karena penguasaan bahasa si penutur (01) kurang sempurna.

Dari penelitian yang kami adakan beberapa tahun yang lalu di Yogyakarta, kami menjadi sadar bahwa pada waktu berkomunikasi dengan bahasa, penutur biasanya tidak hanya menyampaikan pesan-pesan seperti termuat di

dalam arti kata-kata, ungkapan, frase, klausa, dan kalimat-kalimat yang diujarkannya saja, tetapi bersamaan dengan itu ia juga menyampaikan berbagai warna emosi dan kehendak yang pelambangannya tidak dijalankan oleh bentuk kata-kata, ungkapan, frase, klausa, atau kalimat-kalimatnya, melainkan oleh hal lain. Di dalam masyarakat monolingual, pergantian warna emosi dan kehendak ini sering hanya diwujudkan dengan adanya pergantian nada suara; dan di dalam suasana tutur yang sangat formal, pergantian ini sering hanya termuat dalam pilihan diksi atau rangkaian kata tertentu. Akan tetapi, di dalam masyarakat bilingual, terutama yang bersifat diglosia seperti di Indonesia, pergantian warna emosi dan kehendak ini dapat dilontarkan melalui pergantian kode bahasa. Jadi, misalnya, pada waktu berbicara bahasa Indonesia, tiba-tiba penutur menyelipkan kalimat-kalimat dalam bahasa daerah. Atau pada waktu bertutur dengan ragam bahasa formal tiba-tiba diselipkannya ragam bahasa informal. Di Jawa, Sunda, dan bahasa daerah lainnya yang memiliki *unda-usuk* yang ruwet, pergantian kode bahasa ini dapat diperluas dengan pergantian tingkat tutur. Jadi, misalnya, pada waktu berbicara dalam bahasa daerah yang formal dan hormat (*krama*), tiba-tiba penutur beralih ke bahasa Indonesia ragam formal, kemudian kembali lagi ke *krama*, lalu bergantian ke *ngoko*, lalu ke bahasa Indonesia lagi, lalu ke *krama* lagi, begitu selanjutnya. Melalui alih kode ini dapat kita lacaklah pergantian warna emosi dan kehendak si penutur. Dapat saja, misalnya, pada waktu menyampaikan pesannya, penutur itu tiba-tiba merasa iba, jengkel, marah, haru, *nervous* (*ndredeg* Jw), malu, enggan. Atau tiba-tiba ia ingin memberikan warna kehendak tertentu, misalnya, membujuk, menggurui, mengejek, mengeritik, mendakwa, atau *mengulu*. Dengan alih kode, warna kehendak itu tak perlu dinyatakan secara eksplisit melalui kata-kata leksikal, tetapi cukup diisyaratkan melalui peralihan kode itu. Berikut ini sekedar contoh.

Eddy mau ke mana. Main layang-layang lagi? Ya, Ya, Ya, udah sana. Main terus, ya. Layangan terus wae. Ora sah mulih. ("Bermain layang-layang saja terus. Tak usah pulang").

Dari peralihan kode bahasa ke bahasa Jawa ini anak (Eddy) akan tahu bahwa ibunya tidak setuju kalau ia bermain layang-layang lagi. Ibunya *mengulu* saja.

Di dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa alih kode ini banyak terjadi, terutama kalau suasana bicara informal. Di dalam situasi tutur informal biasanya orang tidak begitu ketat di dalam mengontrol emosinya. Oleh ka-

rena itu, kemungkinan adanya alih kode ini jauh lebih besar daripada di dalam situasi tutur yang resmi.

Kebiasaan beralih kode ini lalu menyebabkan seolah-olah keadaan kebahasaan kita ini agak kacau. Kalau hal ini ditambah dengan pengaruh-pengaruh interferensi bahasa daerah, maka kekacauan itu lalu menjadi lebih besar.

Hari Depan Bahasa Indonesia dan Bahasa-bahasa Daerah

Sekarang timbul pertanyaan tentang bagaimana kiranya nasib bahasa-bahasa daerah dan bahasa Indonesia kita di kemudian hari. Dari apa yang kita amati sekarang, kiranya kita dapat menggambarkan tiga kemungkinan perkembangan : (1) bahasa Indonesia akan terus bertambah kuat dan akhirnya mendesak bahasa-bahasa daerah sampai mati, (2) akan terjadi diglosia yang mantap; (3) akan terjadi semacam integrasi antara bahasa-bahasa daerah dengan bahasa Indonesia (Soepomo, 1976)

1. Bahasa-bahasa Daerah Mati

Kalau kita melihat perkembangan bahasa Indonesia yang senantiasa menanjak, baik dilihat dari segi inventarisasi unsur-unsurnya, variasinya, fungsinya maupun tuah bahasanya dan kalau kita melihat perkembangan-perkembangan yang menggembirakan sarana fisik komunikasi kita, maka ada alasan untuk menduga di waktu-waktu yang akan datang bahasa Indonesia akan semakin menjadi kuat lagi. Di dalam situasi kebahasaan diglosia seperti yang ada pada masyarakat Indonesia, Hal ini berarti bahwa bahasa-bahasa daerah akan menjadi semakin lemah. Kalau keadaan semacam ini berjalan terus tanpa ada titik baliknya, akhirnya hanya ada satu kemungkinan saja yang bakal terjadi, yaitu bahasa Indonesia akan menjadi satu-satunya bahasa yang dipakai masyarakat, dan bahasa-bahasa daerah akan lenyap. Pertama-tama, bahasa-bahasa daerah kecil yang hanya memiliki pendukung sedikit akan mati terlebih dahulu. Kemudian bahasa daerah kecil yang agak besar segera akan mengikutinya. Kemudian bahasa daerah kecil yang sering dipakai sebagai *lingua franca* oleh masyarakat sekitarnya, dan lalu akhirnya bahasa-bahasa daerah besar, semuanya akan terdesak lenyap. Pendesakan ini diawali oleh pengambil-an fungsi kebahasaannya, pelemahan daya gunanya, dan kemudian pendesakannya. Kalau hal ini terjadi, komunikasi di masyarakat kita akan menjadi efisien. Salah paham antara orang dari daerah yang satu dengan yang lain diperkecil. Komunikasi antara pemerintah dan rakyat pun menjadi lebih lancar. Anak sekolah tak perlu mempelajari dua bahasa. Pengajaran ilmu pengetahuan

dapat diperlancar. Akan tetapi, jika bahasa-bahasa daerah lenyap dengan cara terdesak ke luar, dengan cara *displacement*, digusur oleh bahasa Indonesia, saya khawatir akibatnya akan kurang baik. Penggusuran bahasa daerah akan berakibat tergusurnya kebudayaan daerah. Kekosongan kebudayaan (*cultural void*) akan mencengkeram masyarakat kita. Bukanlah bahasa adalah jaringan sentral kebudayaan di samping ia merupakan salah satu segi kebudayaan itu sendiri? Hilangnya bahasa berarti hilangnya kebudayaan. Penggantian kebudayaan yang telah mapan dan berakar dengan kebudayaan lain yang baru dan asing dengan cara penggusuran bisa berakibat fatal. Krisis identitas yang cukup serius bisa menghinggapi masyarakat yang bahasanya tergusur itu. Masyarakat yang kehilangan kebudayaannya akan diinggapi penyakit hampa budaya, akan kehilangan kepercayaan diri, akan senantiasa mencari tuntunan orang lain untuk membuat keputusan-keputusan.

Contoh hampa budaya ini dapat kita lihat pada masyarakat migran serta keturunannya, masyarakat budak belian yang dipaksa bekerja di tengah masyarakat majikannya, dan masyarakat jajahan yang kebudayaannya digasak oleh kebudayaan penjajahnya. Pada masyarakat semacam ini biasanya terdapat rasa kurang yakin diri, kemampuan akan sesuatu, kehidupan yang kurang segar bergairah walau, misalnya, mereka itu mengecap kehidupan ekonomi yang baik.

2. *Diglosia Mantap*

Kemungkinan kedua ialah terciptanya masyarakat diglosia yang kurang lebih mantap. Menurut Ferguson, situasi diglosia memang biasanya mantap. Relasi antara bahasa H dengan bahasa L stabil, paling tidak untuk waktu yang lama sekali. Bahasa H tidak akan mendesak bahasa L. Pengalaman di tanah Arab, di Haiti, di Yunani, dan di Jerman Selatan membuktikan kebenaran ucapan Ferguson. Di Haiti, bahasa Prancis tidak mendesak bahasa Kreol Haiti. Di Yunani Kattarevusa tidak mendesak Dhimotiki.

Seperti saya singgung di depan, situasi diglosia yang sedang kita alami di Indonesia sekarang ini belum mantap betul. Proses desak-mendesak dalam pembagian fungsi kebahasaan masih berjalan terus. Tumpang-tindih penggunaan bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah masih terlalu banyak. Mudah-mudahan saja, pembagian fungsi ini lambat-laun lalu dapat mencapai garis yang mantap. Mudah-mudahan, pendesakan antara yang satu ke yang lain lalu dapat berhenti. Mudah-mudahan, diglosia lalu menjadi stabil.

Menurut dugaan saya, pada masyarakat yang berbahasa daerah besar (seperti Jawa, Sunda, Bali, Madura, Bugis, Makasar, Batak) dan berbahasa daerah menengah (seperti Minangkabau, Banjar, Jakarta, Melayu, Manado, dan lain-lain) keadaan diglosia mantap ini tidak sukar untuk diciptakan. Asal saja ada rasa cinta terhadap kebudayaan dan bahasa-bahasa daerah mereka, saya kira keadaan diglosia lekas dapat dimantapkan. Akan tetapi, pada masyarakat yang berbahasa daerah kecil, yang memiliki gejala tumpang-tindih fungsi kebahasaan yang sangat luas dan sangat dalam, situasi diglosia kiranya cukup sulit diusahakan. Pendesakan bahasa Indonesia kepada bahasa daerah dapat berjalan dengan lancar.

Keuntungan keadaan diglosia ialah bahwa identitas kedaerahan dapat dipertahankan secukupnya, sementara kebudayaan nasional yang dilambangi oleh bahasa Indonesia dikembangkan. Kekosongan kebudayaan tak akan terjadi. Akar kita sebagai bangsa terpelihara dengan baik. Akan tetapi, efisiensi komunikasi memang tidak dapat dikembangkan sampai titik optimum. Faktor kesalahpahaman antardaerah yang disebabkan oleh bahasa masih ada. Anak-anak dipaksa mempelajari dua bahasa dalam hidupnya, walaupun dengan begitu mereka mendapat untung juga.

Dari ketiga gambaran kemungkinan ini, saya kira diglosia mantap inilah yang akan berlangsung lama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan sebagian terbesar masyarakat kita yang agraris dan suka tinggal di daerah, daerah tempat tinggal kita yang terpecah-pecah, dan sikap positif kita terhadap sebagian besar kebudayaan daerah kita. Dengan kata lain, mobilitas sosial yang berjalan sekarang dan di waktu-waktu yang akan datang saya kira kurang mampu mengubah suasana diglosia ini.

Integrasi

Fungsi kebahasaan mungkin saja terjadi. Di dalam keadaan ini bahasa-bahasa daerah juga akan hilang. Namun, hilangnya bukan karena digusur, melainkan disatukan ke dalam tubuh bahasa Indonesia. Konsep-konsep yang dilambangi oleh kata dan ungkapan bahasa daerah dipungut atau dipelihara di dalam bahasa Indonesia. Mungkin saja konsep dan nilai itu dilambangi oleh kata lain, tetapi inti konsep dan nilai itu terpelihara. Dari sudut kesejahteraan kebudayaan yang penting justru pemeliharaan konsep dan sebagian besar nilai-nilai ini dan bukannya bentuk linguistik yang melambanginya.

Dewasa ini bahasa Indonesia telah membuktikan diri sanggup memungut berbagai kata, ungkapan, pola frase, dan pola kalimat bahasa daerah

(Soepomo, 1970). Kalau hal ini diteruskan, saya kira leksikon, pola morfositaksis bahasa-bahasa daerah tentu akan dapat diintegrasikan; paling tidak sebagian besar daripadanya.

Kalau integrasi ini dapat terjadi, kejelekan-kejelekan yang ada pada kemungkinan pertama dan kedua akan dapat diatasi. Akar kebudayaan kita masih terpelihara sebab segala konsep dan cara berpikir yang penting masih dilambangi oleh kata-kata yang telah dipungut di dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, karena bahasa yang ada tinggal bahasa Indonesia saja, komunikasi lalu menjadi efisien, kesalahpahaman antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan antara pemerintah dengan rakyat dapat diperkecil. Bahasa Indonesia akan menjadi efektif, baik sebagai bahasa rasio maupun bahasa rasa, baik sebagai bahasa bisnis maupun sebagai bahasa kekeluargaan. Kalau integrasi dan fusi terjadi, konotasi bahwa bahasa Indonesia cocok untuk dipakai berbicara dengan orang asing akan hilang. Bahasa Indonesia bukan lagi bahasa kedua, melainkan akan menjadi bahasa ibu yang dengan sendirinya dicintai dan dipelihara rakyat.

Salah satu cara untuk mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia ialah dengan jalan menunjukkan sikap yang positif terhadap kebudayaan dan bahasa daerah. Kita semua harus pandai menghargai inti sari kebudayaan daerah kita. Satu per satu apa yang sekarang ini bernama kebudayaan daerah harus kita angkat menjadi kebudayaan nasional. Yang saya maksud dengan kebudayaan bukan hanya kesenian atau kebudayaan dalam arti sempit, melainkan kebudayaan dalam arti luas, yang meliputi segala bidang kehidupan manusia. Dengan merangkul kebudayaan daerah dan mengangkatnya menjadi kebudayaan nasional, akan masuk pulalah istilah-istilah dan ungkapan bahasa daerah yang melambangi butir-butir kebudayaan itu ke dalam bahasa Indonesia. Dengan cara ini lambat-laun kebudayaan dan bahasa daerah akan terintegrasikan ke kebudayaan dan bahasa Indonesia. Jika nanti sewaktu-waktu bahasa daerah hilang, pelambangnya sudah ditampung di dalam bahasa Indonesia. Tentu saja, karena satu dan lain hal, ada butir-butir kebudayaan daerah yang tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kalau begitu, kata atau ungkapan yang melambangi butir kebudayaan itu mungkin sekali lalu terancam akan musnah. Asal saja hal seperti ini merupakan kekecualian saja, saya kira tidak mengapa. Dalam pertumbuhan suatu bahasa, hal ini lumrah terjadi; ada butir kebudayaan yang dianggap usang dan ada pula yang baru timbul. Ada kata yang lalu menjadi kuno dan ada kata baru yang timbul. Dengan sendirinya kodifikasi di dalam bahasa Indonesia

sekarang haruslah agak fleksibel. Artinya, bahasa Indonesia masih harus sanggup menerima kemungkinan-kemungkinan baru pada unsur kebahasaannya. Dengan demikian, para ahli bahasa lalu tidak boleh membuat pernyataan-pertanyaan linguistik yang sifatnya menghambat proses integrasi ini. Tidak perlu ahli bahasa kita bersitegang kepada kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah usang atau yang tengah berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Giglioli, P.P. Editor. 1972. *Language and Social Context*. Baltimore: Penguin Books.
- Gloria Poedjosoedarmo. 1976. "Hipotese Perkembangan Sintaktis Bahasa Jawa." *Bahasa dan Sastra*.
- Hockett, C.F. 1962. *A Course In Modern Linguistics*. New York
- Lado, R. 1974. *Language Teaching, A Scientific Approach*, Bombay, New Delhi: McGraw-Hill.
- Soepomo Poedjosoedarmo. 1970. "Javanese Influence On Indonesian," Disertasi. Cornell University.
- Soepomo Poedosoedarmo. 1975. *The Problem of Indonesia*. Kertas Kerja ASANAL III. Jakarta.
- Soepomo Poedjosoedarmo. Editor. 1977. "Laporan Umum Survei Pemakaian Bahasa Indonesia di Daerah-daerah dan Prospek Pengembangannya." Stensilan.

PENGUNAAN UNSUR-UNSUR KLASIK DALAM BAHASA INDONESIA DEWASA INI

Haryati Soebadio

Fakultas Sastra
Universitas Indonesia

Pendahuluan

Istilah *klasik* dalam bidang bahasa dan sastra di Indonesia digunakan untuk menunjukkan semua bahasa dan sastra lama (kuna) sekalipun pada hakikatnya sebutan *klasik* itu dipakai khusus dalam rangka bahasa dan sastra Yunani Kuna dan Latin; dan itu pun untuk keadaan zaman-zaman tertentu. Yang menjadi sebab ialah bahwa bahasa dan sastra Yunani Kuna dari abad ke-5 sebelum Masehi dan bahasa dan sastra Latin dari zaman Kerajaan Awal terutama dianggap sebagai sangat terpelihara serta indah, dan mencapai taraf ataupun "kelas" yang tinggi sekali. Sampai sekarang juga patokan "klasik" itu didasarkan kepada keadaan bahasa dan kesusastraan Yunani Kuna dan Latin itu. Akan tetapi, dalam bahasa sehari-hari dan di negara-negara yang tertentu, istilah *klasik* kemudian digunakan juga untuk semua bahasa dan sastra yang dianggap sebagai sudah mencapai taraf yang sama tingginya. Demikianlah misalnya, sastra Sansekerta dari zaman-zaman tertentu diberi sebutan "klasik" pula. Dalam hal ini terutama sastra berbahasa Sansekerta yang ditulis menurut langgam bahasa yang ditemukan oleh linguis utama dari zaman kuna itu, Panini yang diperkirakan hidup dalam abad ke-4 sebelum Masehi dan mengikuti ukuran sastra seperti yang ditetapkan dalam berbagai kitab peraturan sastra (1) yang terkenal. Selanjutnya, penggunaan istilah klasik juga dipakai dalam hal bahasa dan sastra Arab, terutama bahasa dalam kitab suci Alquran dan yang sezaman atau mirip walaupun sekarang ini istilah itu tidak lazim dipergunakan lagi karena ada pembagian baru yang berlaku di negara-

negara Arab sendiri (2). Di Indonesia istilah *klasik* kita kenal dalam hubungan sastra Melayu Lama, mungkin dasar pemikirannya ialah untuk mutlak membedakan bahasa sastra dari bahasa Melayu sehari-hari yang digunakan sebagai bahasa pergaulan dan dagang di seluruh wilayah budaya Melayu. Istilah *klasik* itu pernah didengar juga dalam hubungan dengan sastra Jawa zaman kuno. Akan tetapi, dalam hal ini ilmu sastra telah menetapkan peristilahan khusus untuk macam-macam bahasa dan sastra Jawa dari zaman yang berbeda (3). Namun, apabila dengan *klasik* memang mau dimaksudkan 'kuna' (4), maka dalam kaitan kertas kerja ini unsur klasik yang rupa-rupanya perlu ditinjau ialah unsur bahasa-bahasa kuno yang secara umum masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal itu tentu harus dikesampingkan unsur bahasa-bahasa yang melahirkan sebutan klasik itu sendiri, yaitu bahasa Yunani Kuno dan Latin karena unsur-unsur kedua bahasa itu masuk ke dalam bahasa Indonesia lewat bahasa-bahasa Barat modern, terutama Belanda dan Inggris. Juga tidak perlu ditinjau lagi unsur bahasa Sansekerta yang sudah mapan dalam bahasa Indonesia karena sudah merupakan unsur dalam bahasa Melayu sendiri. Kita ingat saja pada kata-kata seperti *bendahara*, *laksamana*, *menteri*, dan lain-lain, yang sudah kita temukan dalam hikayat Melayu Lama. Untuk kata-kata seperti itu kita boleh menunjuk pada buku Gonda, *Sanskrit in Indonesia* (5) sebagai sumber yang cukup lengkap. Sama halnya pula dengan unsur bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Melayu. Masalah dengan unsur bahasa Arab juga sukar untuk dibahas karena bukan termasuk keahlian saya. Oleh karena itu, yang hendak saya kemukakan di sini hanyalah penggunaan bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa Kuno yang kaitannya erat pula satu dengan lain dalam pembentukan istilah baru. Selanjutnya, akan saya singgung kecenderungan dewasa ini yang tampaknya lebih banyak mengindahkan unsur dari bahasa-bahasa daerah untuk dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia.

Unsur Sansekerta dan Jawa Kuno dalam Bahasa Indonesia Modern

Pengalaman saya dengan masalah pembentukan istilah baru secara langsung adalah mulai dengan keanggotaan dalam Komisi Istilah pada tahun 1957. Saya ditempatkan sebagai penasihat pada Seksi Hukum. Para sarjana hukum yang menjadi anggota ahli dalam bidang sendiri, berkali-kali menyatakan kepuasan dengan mendapat penasihat bahasa yang merupakan sarjana dalam sastra dan bahasa Sansekerta. Keinginan mereka yang segera ditunjukkan ialah untuk dapat menggantikan sekalian istilah Barat, dan terutama yang merupakan bentuk baru atas dasar bahasa Yunani Kuno dan Latin, dengan istilah atas dasar bahasa Sansekerta. Memang bahasa Sansekerta tidak dapat disang-

kal berasal dari rumpun bahasa yang sama dengan bahasa-bahasa di Eropa itu, yaitu rumpun bahasa-bahasa Indo-Eropa. Namun, pula keberatan-keberatannya untuk menerjemahkan secara langsung setiap unsur istilah Barat itu dengan unsur serupa dari bahasa Sansekerta. Masalah itu sudah pernah saya bicarakan dalam dua artikel (6). Akan tetapi, oleh karena kedua majalah yang masing-masing memuat artikel-artikel itu sekarang mungkin sulit didapatkan, akan saya sungguh pula beberapa pokok yang telah saya bicarakan di dalamnya. Namun, sebelumnya perlu kita bicarakan dulu suatu masalah yang belum pernah saya sebutkan secara jelas (7), yaitu kaitan antara bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa Kuna sebagai sumber pinjaman untuk pembentukan istilah baru.

Masalahnya ialah bahwa seringkali sukar ditetapkan secara tegas bahasa yang mana yang merupakan sumber pinjaman itu, bahasa Sansekerta atau bahasa Jawa Kuna? Seperti diketahui bahasa Jawa Kuna sangat dipengaruhi oleh bahasa Sansekerta. Namun, pengaruh itu terletak dalam bidang perbendaharaan atau kosa kata bukan dalam bentuk (tata bahasa) atau struktur bahasanya. Bahasa Jawa Kuna dan bahasa Sansekerta tetap merupakan dua bahasa yang berbeda rumpun. Sekalipun mengalami pengaruh dari bahasa Sansekerta berabad-abad lamanya, bahasa Jawa Kuna belum sampai berubah menjadi bahasa yang bersifat Indo-Eropa dan tetap menggunakan pola bahasa dari rumpun bahasa-bahasa Melayu-Polinesia atau Austronesia. Hal itu sudah jelas sekalipun penelitian sejauh mana pinjaman atau pengaruh sebenarnya dari bahasa Sansekerta masih perlu diteliti dari sudut linguistik mendalam.

Dalam hubungan dengan kata pinjaman dari bahasa Sansekerta dapat dicatat bahwa bahasa Jawa Kuna hanya menggunakan bentuk "akarnya" (8) tanpa mengindahkan perubahan yang dikuasai oleh akhiran kasus, jumlah, jenis kelamin, ataupun tafsiran kata kerja. Hal ini berarti bahwa kata-kata yang dipinjam dari bahasa Sansekerta, terlepas dari sifatnya ataupun fungsinya dalam bahasa sendiri, dapat saja digunakan sebagai macam-macam kata menurut pola dan keperluan bahasa Jawa Kuna. Misalnya, akar kata benda yang dalam bahasa Sansekerta hanya bisa berfungsi sebagai kata benda setelah mengalami perubahan menurut kasus sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat, dalam bahasa Jawa Kuna dapat saja dipakai sebagai kata kerja dan mengalami perlakuan sebagai kata kerja secara umum yang lazim dalam semua bahasa-bahasa Indonesia (9). Walaupun demikian, dalam penglihatan sepintas lalu, akibat banyaknya unsur Sansekerta yang terdapat, dapat diperoleh kesan bahwa beda antara bahasa Jawa Kuna dan bahasa Sansekerta tidak terlalu besar (10). Hal itu lebih ditimbulkan lagi oleh sifat ganda dari bahasa

Sansekerta dalam strukturnya. Sebagai anggota rumpun bahasa-bahasa Indo-Eropa, bahasa Sansekerta pada satu pihak benar-benar mengenal sifat-sifat bahasa-bahasa Indo-Eropa itu, seperti kasus (ada delapan), jenis kelamin (ada tiga), pembedaan jumlah (tiga macam), dan tasrifan kata kerja menurut kala, jumlah, dan modus untuk menentukan fungsi setiap kata dalam kalimat. Seperti setiap bahasa kuna dalam rumpun Indo-Eropa kedudukan kata dalam kalimat itu jelas terlihat dan ditentukan sehingga pada dasarnya urutan kata dalam suatu kalimat tidak merupakan masalah untuk pengertian kalimat itu. Namun, di samping sifat itu, yang jelas-jelas menggolongkan bahasa Sansekerta dalam rumpun bahasa-bahasa Indo-Eropa, ia juga mengenal cara mengungkapkan yang pernah saya sebut *ucapan namaan* (11). Dalam hal ini bahasa Sansekerta membentuk kata majemuk, yang kadang-kadang panjang sekali serta meliputi banyak kata dalam rangkaian yang berbentuk akar saja, kecuali kata terakhir yang memperlihatkan fungsi kata majemuk itu dalam kalimat seluruhnya. Dengan kata lain, dalam hal ini bahasa Sansekerta bersikap seolah-olah ia bukan suatu bahasa dari rumpun bahasa-bahasa Indo-Eropa yang mengenal kasus dan tasrifan lain untuk memperjelas kedudukan kata dalam kalimat. Urutan dalam kata majemuk itu sendiri tidak dapat diganti-ganti, tetapi ketat atau kurang lebih ketat mengingat hubungan erat antara setiap kata dalam majemuk itu (12). Gejala itulah yang saya kira berpengaruh sekali kepada bahasa Jawa Kuna karena memang juga cocok sekali. Bahasa Jawa Kuna tidak mengenal tasrifan seperti yang dimiliki oleh suatu bahasa Indo-Eropa. Lewat kata-kata majemuk Sansekerta itu, unsur Sansekerta dapat masuk ke dalam bahasa Jawa Kuna tanpa banyak kesulitan. Bahasa-bahasa di Indonesia pun mengenal keadaan kata majemuk sekalipun bukan menjadikan kebiasaan itu sebagai sistem dalam bahasanya.

Keadaan seperti teruraikan di atas itu juga menyebabkan bahwa orang sepintas lalu menjadi kacau menempatkan bahasa Sansekerta pada satu pihak dan bahasa Jawa Kuna pada lain pihak. Lama sekali bahasa Jawa Kuna dianggap sebagai semacam bahasa Indo-Eropa (13), sedangkan sebaliknya di Indonesia (14) ada orang yang menganggap bahasa Sansekerta suatu bahasa Kuna Indonesia. Oleh karena itu, ada kalangan yang merasakan bahasa Sansekerta sebagai bahasa Latinnya bahasa-bahasa di Indonesia; dan itu pun sebabnya, saya kira, mengapa orang cenderung menggantikan semua istilah Barat atas dasar Latin (atau Yunani Kuna) dengan istilah Indonesia asal Sansekerta (15). Walaupun demikian, dalam praktiknya banyak istilah dan kata tunggal diambil dari tradisi dan naskah lama Jawa (Kuna). Kita tidak jarang sukar menetapkan dalam hal mana kata Sansekerta masih harus dipandang se-

bagai asli Sansekerta dan dalam hal mana sebagai kata pinjaman asal Sansekerta yang sudah merupakan unsur mutlak bahasa Jawa Kuna (atau Melayu dan lain-lain). Masalahnya sehubungan dengan bahasa Jawa Kuna sudah saya singgung dalam kaitan pembaruan ejaan Jawa (16). Akan tetapi, dalam Seksi Hukum pada Komisi Istilah dan oleh berbagai instansi dan perorangan yang mendekati saya jelas-jelas disebutkan keinginan untuk mendapat nama atau istilah dari bahasa Sansekerta. Saat itu saya tidak pernah mempersalahkan, apakah yang diinginkan itu bukankah sebenarnya nama atau istilah Jawa Kuna mengingat bahwa selalu ada bahaya akan dituduh berpikir 'Jawa sentris'. Sebagai dapat diingat, nama Jawa Kuna untuk bahasa bersangkutan di luar Jawa dianjurkan untuk digantikan dengan bahasa Kawi supaya tidak terdengar 'Jawa sentris'. Boleh saya ulang di sini untuk kesekian kalinya bahwa bahasa Kawi adalah hanya "*semacam*" bahasa Jawa Kuna saja, yaitu yang digunakan dalam *kakawin*. Oleh karena itu, apabila saya mengatakan bahwa mungkin dapat ditemukan alternatif dari bahasa Jawa Kuna, Jawa Modern, ataupun bahasa daerah lain, orang lebih cenderung tetap minta istilah atas dasar Sansekerta.

Nyatanya bahasa Sansekerta, secara murni ataupun lewat bentuk perkembangan dalam bahasa Jawa Kuna ataupun bahasa daerah lain, memiliki daya tarik yang luar biasa pada saat-saat itu. Sudah acapkali pula dipertanyakan apa sebab bahasa Sansekerta mempunyai sinar cemerlang yang menarik itu serta bahkan "*prestise*" yang besar sekali, sedangkan kerjaan Hindu-Jawa yang terakhir sudah lama silam! Kegemaran terhadap bahasa Sansekerta di Indonesia memang juga bukan hanya terbatas pada pembentukan istilah baru, tetapi sehari-hari dapat disaksikan pada kecenderungan sementara kalangan untuk memberi nama asal Sansekerta kepada anak-anak, rumah, wisma, termasuk pusat pertokoan, gedung negara, dan lain sebagainya, serta semboyan untuk lambang dan bendera dari Angkatan Bersenjata, dan lain-lain. Pernah diajukan bahwa salah satu sebab mungkin ialah keperluan bangsa Indonesia sesudah kemerdekaan untuk mendapatkan identitas baru sebagai bangsa berdaulat, bebas dari koloniasasi. Dalam mencari identitas itu, zaman yang silam, sebelum masuknya kolonisasi, terutama zaman kerajaan-kerajaan megah Hindu-Jawa atau Hindu-Indonesia pada umumnya, mendapat cahaya gemilang serta cukup memberi rasa kebanggaan. Dapat dipahami juga bahwa dengan demikian bahasa yang digunakan masa itu seperti yang masih terlihat pada prasasti dan naskah lama, dirasakan sebagai jauh lebih indah, sebagai memiliki "*prestige*" yang lebih hebat dan lebih cocok untuk Indonesia daripada bahasa yang mana pun dari daerah barat, yang lagi pula terlalu meng-

ingatkan pada zaman kolonial.

Penjelasan itu dengan sendirinya lebih cocok untuk orang Indonesia asal Jawa, yang masih kuat sekali dasar budaya dan tradisinya yang berasal dari zaman Hindu-Jawa itu. Memang kesan yang didapatkan ialah bahwa baru sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Hal itu saya rasakan baik di antara anggota-anggota Komisi Istilah maupun di masyarakat Indonesia selebihnya. Bahasa Arab yang idak jarang diidentifikasi dengan agama Islam, pada umumnya, dan jelas sekali saat itu oleh kalangan yang akar keislamannya kuat sekali lebih sering dipilih sebagai bahasa sumber pilihan istilah baru (17). Sebaliknya, bahasa Sansekerta, dengan bahasa Jawa Kuna sebagai 'kawan erat', umumnya dipilih oleh mereka yang tidak beragama Islam (18) atau oleh kalangan yang dasar-dasar Hindu-Jawa atau praislamnya lebih kuat dari didikan Islamnya (terutama orang Indonesia asal Jawa Tengah). Mengingat bahwa kalangan itu paling besar jumlah dan juga pengaruhnya dalam peristilahan baru, tidak mengherankan pula bahwa banyak istilah baru dibentuk atas dasar bahasa Sansekerta secara murni atau lewat bahasa Jawa Kuna.

Pembentukan Istilah Baru

Dalam membentuk istilah baru unsur-unsur Sansekerta digunakan sebagai unsur bahasa Indonesia yang hidup dan sanggup membentuk formasi baru. Formasi baru itu dibentuk dengan menggunakan arti dasar dari unsur-unsur Sansekerta itu, yang berupa akar kata, awalan ataupun akhiran. Seringkali pengertian dasar itu tidak sesuai dengan makna dalam bahasa aslinya serta juga belum tentu dapat digunakan untuk menerjemahkan atau menggantikan unsur-unsur bahasa Barat, seperti yang pernah saya utarakan (19). Ada kalanya dapat diajukan lebih dari satu kemungkinan untuk terjemahan atau pengantiannya, yang dalam satu-dua keadaan dapat bertahan sampai sekarang. Suatu contoh ialah awalan *pra-* di samping awalan *purba-* yang keduanya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *para* dan *purva*, dan yang masuk ke Indonesia lewat bahasa Jawa Kuna (20). *Pra* sejak semula dirasakan yang paling cocok untuk menggantikan awalan Barat *pre-* (Inggris), *prae* (latin), yang dalam bahasa Belanda diganti dengan awalan *voor-* karena memang berasal dari akar Indo-Eropa yang sama. Walaupun demikian, dalam bahasa Sansekerta sendiri awalan *pra* sebagai awalan seperti yang dimaksudkan itu tidak selalu mempunyai makna yang sepenuhnya sama (21). Untuk maksud itu sebenarnya awalan *purva* lebih tepat dan memang juga dikemukakan sebagai alternatif (22). Demikianlah kita kenal dua istilah Indonesia modern untuk

menerjemahkan kata Belanda *voor-oordeel* (Ingg. *pre-judice*), yaitu *prasangka* dan *purbasangka*, yang kadang-kadang terdengar kedua-duanya digunakan hingga sekarang.

Memang awalan-awalan semacam *pra-* sangat digemari dan juga diperlukan dalam bahasa Indonesia mengingat bahwa bahasa Indonesia tidak mengenal awalan seperti itu dalam sistemnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila awalan-awalan itu menjadi produktif sekali. Awalan *pra-* sendiri, misalnya, telah menghasilkan berbagai bentuk baru. Keberatan yang diajukan atas dasar makna asal dalam bahasa Sansekertanya, dengan demikian, tidak menjadi relevan lagi. Awalan *pra-* kini telah membentuk istilah seperti *prangngapan*, *prabedah*, *prakata* (23), *prasaran* (24), *prasekolah*, dan lain sebagainya. Dalam membentuk kata-kata seperti itu tidak diindahkan lagi bahwa *pra-* asal-mulanya berupa unsur Sansekerta, berarti Indo-Eropa, sedangkan kata yang dilengkapinya mungkin tidak. Contoh terkenal ialah kata *prasejarah* yang unsur keduanya *sejarah* berasal dari bahasa Arab. Ketika kata itu dilontarkan untuk pertama kalinya, pembentukannya mendapat kritik justru karena merupakan *hybrid*, yaitu setengah Sansekerta setengah Arab. Namun, alternatif yang diajukan, yaitu *nirleka* (berasal dari Sansekerta *nir* dan *lekha*), yang secara harfiah berarti 'tanpa tulisan' sehingga lebih cocok menerjemahkan arti *prehistory* ialah zaman sebelum sejarah (tertulis) tidak dapat bertahan. Untuk pengertian *prehistory* kata *prasejarah* sekarang ini betul-betul sudah mapan. Kata *hybrid* yang lain, *prausul*, misalnya, yang pernah diajukan untuk menerjemahkan 'working paper', sebaliknya, tidak dapat mencapai masyarakat. Sekarang kita menggunakan kata *prasaran*, *kertas kerja*, atau bahkan *paper* saja.

Bentuk dengan awalan *pra-*, yang menarik pula ialah *pramugari*. Bentuk jantannya adalah *pramugara* jarang didengar. Etimologi kata dasarnya pernah diperbincangkan secara ramai. Memang seharusnya kata asal itu ialah *pugar*, yang dalam bahasa Indonesia memiliki dua arti (25), yaitu 'membangun kembali, membaharui', yang lebih banyak kita kenal, dan 'sibuk, berjalan cepat kian-kemari', yang kurangsekali digunakan. Jelas, arti kedua itulah yang mendasari pembentukan kata *pramugari*. Hal lain yang amat menarik perhatian dalam kata itu ialah bahwa ia telah menimbulkan pembentukan kata seperti *pramuniaga* 'pelayan atau petugas toko, restoran; Dalam hal itu jelas bahwa *pra-* sebagai awalan aslinya sudah terlupakan, dan *pramu-* dianggap sebagai awalan tersendiri!

Kata-kata lain dengan awalan *pra-* semacam *pramuka* dan *prasasti* tidak termasuk kategori formasi baru seperti yang dikemukakan di atas karena merupakan pinjaman langsung dari bahasa Sansekerta. *Pramuka* berasal dari Sansekerta *pramukha*, 'orang yang berjalan di depan, penunjuk jalan, *pioneer*' (26). Pada tahun 1959 kata itu dipilih sebagai pengganti kata *pandu*, yang saat itu tidak dipandang sesuai lagi dengan suasana politik Pemerintah. *Prasasti* merupakan kata Sansekerta yang masuk ke Indonesia bersama dengan kebudayaan India pada umumnya.

Istilah baru *prasetia* yang sementara ini menjadi terkenal, akibat semboyan *Eka Prasetia Pancakarsa*, di bawah nanti akan mendapat sorotan khusus karena termasuk contoh dari perkembangan pembentukan istilah baru masa kini.

Awalan lain yang sekarang luas pula penggunaannya ialah *antar-*, yang merupakan bentuk pendek dari *antara*, kata asal Sansekerta pula, dengan arti yang sama dalam bahasa asal itu. Dalam bentuk pendek *antar-*, kata itu menjadi awalan yang cukup produktif. Formasi baru dengan *antar-* dewasa ini meliputi, misalnya, *antarbenua*, (menerjemahkan *intercontinental*); *antardisiplin* (menerjemahkan *interdisciplinary*); *antarjawatan*, yang kita dengar hampir secara khusus dalam kalangan pemerintahan; *antarfakultas*, *antargolongan*, dan *antarpulau* (yang sekarang telah menimbulkan kata kerja *mengantarpulaukan*).

Dengan arti *antar-*, yang sedikit berbeda, kita temukan istilah *antar-ruang* untuk menerjemahkan *outer space*. Dalam hal ini *antar* (a) memiliki arti 'lain, luar'. Untuk pengertian itu sebenarnya sudah ada kata kuna yang kurang lebih menutup, yaitu *antariksa*, yang juga digunakan dengan makna yang sama. Akan tetapi, tampaknya kata kuna itu sering tergeser oleh kata *antarruang* yang mungkin dirasakan lebih dekat pada pengertian *outer space* itu.

Awalan-awalan lain masih dapat dikemukakan pula, seperti *swa* (27) dan *anu* (28). Namun, keadaannya sama semua. Arti dasar yang menjadi dasar pemilihannya dan yang dianggap cocok dengan awalan asing yang hendak diterjemahkan. Selanjutnya, apabila awalan itu sudah dirasakan mapan, ia bisa menjadi produktif dan membentuk istilah-istilah baru.

Di samping awalan, bahasa Sansekerta juga memberi akhiran kepada bahasa Indonesia. Antara lain yang menonjol dapat dikemukakan akhiran *-wan* dan *-wati*. Pola jantan dan betina yang berasal dari bahasa Sansekerta

atau bahasa-bahasa Indo-Eropa secara umum; dengan demikian ikut masuk ke dalam bahasa Indonesia.

Dari kata-kata yang berakhiran *-wan* sudah ada yang terkenal sejak bahasa Melayu (29), sekalipun dengan arti yang belum sama dengan arti dalam bahasa Indonesia. Dapat dikemukakan, misalnya, *rupawan* yang sekarang jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari; *hartawan* (*harta* dari Sansekerta *artha*, 'milik, kekayaan'); *bangsawan* (*bangsa* dari Sansekerta *vamsa* 'keluarga, keturunan'), yang dalam bahasa Melayu selanjutnya mendapat arti lain (*komedi bangsawan*); *sastrawan*, tetapi dengan makna yang berbeda dengan sekarang, yaitu 'orang yang mengetahui ilmu gaib' (30). Dalam bahasa Indonesia selanjutnya telah terbentuk banyak kata baru analog dengan pembentukan itu. Beberapa contoh dari pembentukan sekarang ialah : *agawawan*, yang bertahan di samping *theolog* yang merupakan pinjaman langsung dari bahasa Belanda; *angkasawan* sebagai alternatif untuk *astronaut*; *bendaharawan*, yang serupa kata berlebihan mengingat bahwa *bendahara* sudah sesuai dengan maksud dan telah digunakan pula; *biarawan*, yang juga dieja sebagai *biharawan*; *budayawan*, dengan arti 'orang yang mempelajari kebudayaan', bukan 'orang yang berbudaya'. Kata-kata itu apabila digunakan untuk kaum wanita mendapat akhiran *-wati*.

Apabila contoh di atas mungkin hanya terdengar dalam kalangan terbatas, kata *karyawan* dan *karyawati* termasuk istilah resmi yang tersebar luas sebagai "penghalusan" kata *pekerja*. Selanjutnya, dapat dikemukakan pula kata seperti *olahragawan*; *sastrawan* (dalam arti modernnya); *sejarawan* (dengan melepaskan *h* dari *sejarah*); *usahawan*, yang dewasa ini sudah terdesak oleh istilah baru *wiraswasta*. Kemudian *ilmuawan* (dengan menghilangkan *h* dari *ilmiah*) di samping *ilmuwan*, untuk menerjemahkan *scientist* dalam arti 'ahli dalam ilmu alamiah'. Bagi orang terpelajar secara umum kita dengar kata *cendikiawan*. Dalam hal ini jelas bahwa akhiran *-wan* dan *-wati* itu digunakan umum tanpa mengindahkan lagi asal kata yang hendak dilengkapinya. Sansekerta ataupun bukan.

Mengenai perbedaan antara pria dan wanita yang dinyatakan oleh akhiran *-wan* dan *-wati* dapat dikemukakan bahwa perbedaan itu memang merupakan pengaruh dari bahasa Sansekerta. Bahasa Indonesia pada mulanya tidak mengenal perbedaan seperti itu. Bahkan, pernah dikemukakan pula bahwa memasukkan sifat tersebut dalam sistem bahasa Indonesia sebenarnya tidak dapat dinamakan memperkaya bahasa, tetapi justru merugikan (31). Akan tetapi, bagaimanapun juga perbedaan antara pria dan wanita le-

wat akhiran *-wan* dan *-wati* ataupun secara singkatnya perbedaan *a* dan *i* boleh dikatakan susah menjadi unsur mutlak bahasa Indonesia modern. Demikianlah—mungkin sejajar dengan usaha menonjolkan peranan wanita dewasa ini—kita sering melihat kata-kata seperti *wartawati* dan *olahragawati*. Kata *peragawati*, bahkan pada mulanya lahir sebagai pekerjaan yang hanya dilakukan oleh wanita. Baru kemudian dikenal *peragawan* juga (32).

Akhiran *-wati* yang pada asalnya merupakan bentuk betina untuk akhiran *-wan*, sekarang juga digunakan sebagai bentuk betina untuk akhiran *-man*. Dalam bahasa Sansekerta hal itu tidak mungkin. Akhiran untuk wanita dari *-man* ialah *-wati* (33). Jadi, hanyalah dalam bahasa Indonesia dimungkinkan pembentukan kata *seniwati* di samping *seniman*. Malahan, akhiran *-wati* itu selanjutnya digunakan di samping kata-kata yang sebenarnya tidak mungkin menggunakan bentuk betina dengan *-wati* seperti *pramukawati* di samping *pramuka*; atau *sarjanawati* di samping *sarjana* yang telah saya hadapi dalam media massa populer.

Kemudian, karena perbedaan antara pria dan wanita akhirnya sudah boleh disebut membudaya pula dalam bahasa Indonesia, dirasakan perlu melakukan perbedaan itu di mana-mana. Alat yang sekarang lazim digunakan ialah kata *wanita*. Timbullah sebutan seperti "dokter wanita", "hakim wanita", atau "sarjana wanita". Dalam hal itu orang Indonesia justru bersikap sebaliknya dari negara-negara Barat yang dewasa ini malahan menghilangkan perbedaan antara petugas atau pejabat pria dan wanita! (34). Walaupun demikian, untuk Indonesia, gejala seperti itu boleh disebut tergolong kepada pengindonesiaan dari keadaan asing. "Pengindonesiaan" itu memang merupakan kejadian yang lazim dalam sejarah Indonesia. Suatu contoh terkenal dari gejala pengindonesiaan ialah misalnya, semakin menonjolnya corak Indonesia dalam candi-candi di zaman Jawa Timur apabila dibandingkan dengan bangunan-bangunan zaman Jawa Tengah (35).

Dalam hal pembentukan istilah dewasa ini kita menyaksikan gejala yang mirip, sekurang-kurangnya dalam penggunaan bahasa sumber pinjaman. Kalau mula-mula orang biasa mencari "ilham" pada bahasa Sansekerta, sekarang kecenderungan itu makin berkurang. Tidak dapat kita tetapkan secara tepat bilamana kecenderungan terhadap bahasa Sansekerta itu mulai terdesak oleh keinginan untuk menjadikan bahasa-bahasa di Indonesia sendiri sebagai sumber pinjaman. Waktu saya sendiri memberi komentar atas kecenderungan terhadap bahasa Sansekerta itu (36), kekaguman masyarakat secara umum untuk bahasa Sansekerta masih meluas dan masih tetap besar selama ber-

tahun-tahun kemudian. Kalangan yang berhubungan dengan saya saat-saat itu, masih juga terus-menerus menginginkan istilah, nama dan semboyan yang berasal dari bahasa Sansekerta. Bahkan, pada tahun 1973 pun masih ada yang menganggap bahasa Sansekerta sebagai suatu bahasa kuna Indonesia (37). Namun, media massa dan masyarakat secara umum sudah mulai melontarkan kata dan istilah yang diambil dari bahasa-bahasa daerah, terutama bahasa Jawa dan Jawa Kuna. Dalam hubungan itu, dapat dicatat bahwa bahasa Jawa Kuna mengambil tempat yang semula secara khusus diduduki oleh bahasa Sansekerta. Istilah dan semboyan atau lambang resmi yang dewasa ini masuk ke dalam penggunaan sehari-hari, boleh dikatakan untuk sebagian besar diambil dari kesusastraan Jawa, khususnya yang tradisional (38). Hal itu berarti bahwa sekalipun bentuk kata dari jauh tampaknya sebagai kata Sansekerta, makna, penggunaan, serta fonologinya sudah menjadi bahasa Jawa (39). Walaupun demikian, ada kalanya juga kurang jelas terlihat apakah asalnya memang bukan Sansekerta dan harus dianggap sebagai Jawa Kuna. Namun, rata-rata boleh dikatakan bahwa yang lahir dalam tahun-tahun terakhir ini memang diambil dari tradisi Jawa Kuna.

Mengenai lambang negara *Bhinneka Tunggal Ika*, dari semula sudah diketahui bahwa asalnya bukan Sansekerta. Kalimat itu diambil dari kitab Jawa Kuna "Sutasoma" (40). Dan memang unsur Sansekerta yang ada hanyalah kata *bhinna*.

Suatu semboyan negara yang dilontarkan akhir-akhir ini ialah *Eka Prasetya Pancakarsa*, yang diartikan sebagai berikut (41): Satu janji (tekad) untuk menghayati dan mengamalkan sila-sila Pancasila, dengan catatan bahwa tekad itu lahir dari *karsa* (keinginan) pribadi.

Seumpamanya semboyan itu berasal dari bahasa Sansekerta, di samping ejaan (42) tentu pengertiannya juga bukan demikian. Adapun penyusunan kata majemuk dalam bahasa Sansekerta ada peraturannya yang terperinci sekali, yang di sini tidak perlu dan tidak mungkin pula kita perdalami (43). Dengan demikian, maka sudah akan tampak susunan lain dari semboyan itu.

Pancakarsa, misalnya, dalam bahasa Sansekerta akan berarti 'lima keinginan'. Selain itu, daripenjelasan yang diberikan oleh Presiden Soeharto sudah nyata pula bahwa penyusunan dan maknanya berasal dari tradisi Jawa.

Memang perlu diadakan penelitian mendalam mengenai keadaan bahasa Jawa Kuna dan kaitannya dengan perbendaharaan kata Sansekerta. Penelitian

itu perlu diadakan, baik dari sudut linguistik secara terbatas maupun dari sudut penerapannya dalam kesusastraan dan penggunaan bahasanya secara umum. Karena ada kaitan erat dengan kosa kata Sansekerta, maka dengan sendirinya harus ada penelitian bandingan dengan kesusastraan Sansekerta yang berpengaruh di Indonesia. Tanpa studi bandingan yang cukup mendalam, dan yang memang merupakan usaha yang berat sekali, kita tetap kurang jelas mengenai semua pengaruh terhadap bahasa Jawa Kuna serta, sebaliknya, mengenai bagaimana bahasa Jawa Kuna memasukkan unsur-unsur asing itu ke dalam tubuhnya. Bahan yang dapat mengungkapkan masalah itu semua dewasa ini baru sedikit sekali diteliti. Linguistik bahasa Jawa Kuna, misalnya, sampai sekarang belum tuntas diteliti. Malahan, penelitian filologi, yang kelihatannya sudah banyak dikerjakan (44), dan yang menyangkut pengertian setiap kata dalam naskah-naskah dan tradisi lisan masih menghadapi bermacam-macam masalah dalam bahasa Jawa Kuna. Justru untuk pengertian yang sebenarnya itu, bagi bahasa Jawa Kuna perlu diadakan perbandingan dengan naskah-naskah Sansekerta atau sumber India lain. Pada pihak sumber India itu kita, sebaliknya, mengalami kesulitan, bukan hanya karena sumber-sumber itu belum diteliti, tetapi -- dan lebih-lebih -- karena belum diketahui benar-benar juga naskah mana saja yang digunakan sebagai sumber oleh orang Indonesia saat bersangkutan (45). Sementara itu diperkirakan bahwa pengaruh India seharusnya datang dari daerah-daerah di bagian Selatan sekalipun ada juga petunjuk yang menolak pendapat itu (46). Namun, bagaimana juga, sebelum semua naskah Jawa Kuna dan, mungkin, naskah Indonesia lainnya yang menunjukkan pengaruh India secara jelas atau kurang langsung jika dibandingkan dengan naskah-naskah India, terutama dari India Selatan, yang tampaknya cocok dengan pikiran (47) rasanya belum dapat dikeluarkan pendapat yang tepat mengenai keadaan tradisi kuna itu di Indonesia, termasuk penggunaan sekalian istilahnya. Untuk penelitian bahasa Indonesia secara khusus, dan semua bahasa-bahasa Indonesia secara umum, penelitian historis dan komparatif seperti itu masih sangat diperlukan dan dinantikan (48).

Pembentukan kata dan istilah baru akan terus-menerus berlangsung. Demikian pula kecenderungan untuk menggunakan unsur-unsur dari bahasa-bahasa kuna. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila yang dipilih itu merupakan kata atau istilah yang benar-benar tepat sesuai dengan maksud dan juga diambil dari tradisi atau kosa kata Indonesia sendiri tanpa perlu mencarinya dari bahasa-bahasa asing. Dalam hal ini tentu bukan maksudnya untuk mempropagandakan "purisme" nasional yang berlebihan. Kita tidak perlu kembali ke zaman kuna ataupun menggunakan "perhalusan" yang tidak me-

rupakan sifat dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebelumnya dan yang berasal dari bahasa Jawa atau Sunda (49). Akan tetapi, seringkali digunakan saja istilah asing karena tidak dikenal atau belum diteliti ada atau tidaknya istilah Indonesia yang cukup cocok sehingga bahasa Indonesia modern tidak jarang terdengar sebagai bahasa campur-baur. Untuk mencegah gejala itulah di sini dianjurkan meneliti sumber-sumber Indonesia sendiri secara sedalam-dalamnya.

CATATAN :

1. Panini, *Astadhyayi*. Sejak terbitan beserta terjemahan pertama oleh O. Bohtlingk, 1887, Leipzig, dibicarakan dan diterbitkan kembali oleh berbagai sarjana di negara Barat dan India.
2. Arab Lama dan Arab Modern dengan pengertian bahwa bahasa dalam Alquran termasuk bahasa Arab Modern.
3. Di Indonesia istilah *klasik* dipakai dalam hubungan dengan bahasa Melayu Klasik, yaitu bahasa Melayu dalam naskah lama. Bahasa Jawa mempunyai pembagian sendiri, Jawa Kuna, Jawa Tengahan, dan Jawa Modern.
4. Poerwadarminta, 1976, hal. 539.
5. Cetakan kedua, tahun 1973, New Delhi.
6. "Penggunaan bahasa Sansekerta dalam pembentukan istilah baru," *Madjalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia* 1, 1, 1963; dan "New Sanskrit Loanformation in Bahasa Indonesia," *Cultural Forum* 39, 1969.
7. Dalam kertas kerja untuk Loka karya Bahasa Daerah, Januari, 1975, yang diterbitkan dalam *Madjalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia* VI-2, 1976, berjudul "Masalah Transliterasi dan Ortografi dalam Perkembangan Bahasa", saya menyebutkan perbedaan mutlak antara bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa Kuna sehubungan dengan ejaan naskah-naskah campuran.
8. Bentuk yang belum diberi akhiran menurut kasus atau jumlah.
9. Misalnya, kata *karya*, yang dalam bahasa Sansekerta merupakan kata benda, dan hanya kata benda, dalam bahasa Jawa Kuna dapat diberi awalan *a: akarnya* atau *pa:pakarya*, yang menjadikannya berfungsi sebagai kata kerja.
10. Bacaan sekedar dalam naskah Ramayana Kakawin atau naskah Jawa Kuna lainnya akan menjelaskan. Oleh karena itu, tidak mengharapkan

bahwa lama sekali dikira bahasa Jawa Kuna serumpun dengan bahasa Sansekerta. Beda antara kedua bahasa itu baru dibuktikan oleh W. von Humboldt dalam *Über die Kawisprache* (1836 – 1939). Namun, waktu saya menjadi mahasiswa pada *Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam* dalam tahun lima puluhan, Sastra Jawa Kuna diajarkan dalam Jurusan Sastra Indo-Iran, bersama-sama dengan bahasa Sanskerta, bahasa Veda, Avesta, Iran, dan lain-lain.

11. "Utjapan Namaan dalam bahasa Sansekerta", *Medan Ilmu Pengetahuan* III, 1 Januari 1962.
12. Setiap buku tata bahasa Sansekerta mutlak perlu membicarakan masalah kata majemuk, atau kompositum itu. Tanpa pengetahuan tentang gejalanya bacaan sederhana pun tidak mungkin.
13. Lihat catatan 10.
14. Pada Sarasehan Ejaan Bahasa Nusantara, Yogyakarta, 1973.
15. Misalnya, *Pro Juventure* menjadi *Pra Yuwana*.
16. Lihat catatan 7.
17. Masalahnya saya sebutkan sebagai dalil dalam promosi doktor pada tahun 1971, *Gemeentelijke Universiteit*, Amsterdam.
18. Saya alami sendiri dalam permintaan nama dan semboyan.
19. Dalam artikel yang disebutkan pada catatan 6.
20. Pergantian bunyi *v* menjadi *b* merupakan gejala Jawa Kuna dan dilakukan pada hampir semua kata semacam ini.
21. Dalam hal bahasa Sansekerta *pra* memiliki arti yang berbeda-beda apalagi dikaitkan dengan kata kerja, kata nama, ataupun kata sifat.
22. *Purwa* lebih mempunyai kaitan dengan sesuatu yang terjadi sebelumnya sehingga lebih cocok untuk menggantikan *voor-* atau *pre-* dalam kata seperti *vooroordeel*, *prejudice*, *prehistory*.
23. Menerjemahkan *voorwoord* (Belanda).
24. Menerjemahkan *preadvies* (Belanda)
25. Klinkert, 1893, halaman 483, hanya mengenal arti pertama; Poerwadarminta, 1976, halaman 771–772 mengenal kedua arti.
26. *Pioneer* adalah arti yang timbul dari pengertian 'orang yang berjalan di

- depan', yang biasanya diartikan sebagai *chief* (Monier William, halaman 686).
27. Perhatikan kata seperti *swadaya*, *swakarya*, atau *swasta*.
 28. Terutama kata *anumerta* yang merupakan kreasi baru atas dasar *anu* dan *merta* (mati, kematian). Kata seperti *anugraha* merupakan pinjaman langsung, bukan formasi baru.
 29. Periksa kata seperti *rupawan*, *hartawan*, dan lain-lain pada Klinkert.
 30. Klinkert, 1893, halaman 371.
 31. Disebutkan dalam Teeuw, halaman 89. (Teeuw--Emanuel, Bibliografi)
 32. Baru setelah ada keperluan untuk memamerkan pakaian pria.
 33. Periksa peraturan tata bahasa Sansekerta.
 34. *Misalnya*, doctorandus sebagai gelar sarjana, sejak tahun 1970 di Negeri Belanda digunakan untuk pria dan wanita menurut ketetapan pemerintah !
 35. Gejala ini Goris diterapkan pada keadaan agama dan bahasa (Lihat Soebadio, *Juanasiddhanta* 1971, Introduction).
 36. Artikel 1963 (lihat catatan 6) saya ucapkan pada semintar Ikatan Sarjana Sastra Indonesia, 1959.
 37. Pada Sarasehan, 1973, di Yogyakarta sehingga perlu diadakan penjelasan mengenai rumpun bahasa.
 38. Semboyan seperti *Tut Wuri Handayani* yang sebenarnya sudah lama digunakan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
 39. *Misalnya*, kata *satria*, yang berasal dari *ksatrya* (Skt), *manggala* dari *mangala* (Skt).
 40. Sutasoma CXXXIX, 5.
 41. Presiden Soeharto dalam Sambutan Pembukaan Musyawarah Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (terbitan Sekneg, 1976).
 42. Dalam bahasa Sanskerta akan berupa sebagai: *Ekaprasatya-pancakarsa* dengan arti yang sama sekali berlainan.
 43. Bandingkan tata bahasa Sanskerta yang mana pun juga.
 44. Yang paling akhir, dalam bahasa Indonesia, ialah disertasi Ny. A. Ikram, 1978, *Hikayat Seri Rama*. Bandingkan juga Haryati Soebadio,

- "Philology, Linguistics and the Study of Literature", dalam Koentjaraningrat. Editor *The Social Sciences in Indonesia*, I, 1975, Jakarta.
45. Soebadio, 1971, Introduction, Bab K, terutama halaman 64-65.
 46. Karena ada juga pengertian dan istilah yang terdapat dalam naskah dari India Utara.
 47. Naskah *agama* dari India Selatan, yang sekarang ini banyak diteliti dalam *Institute of Indology, Pondicherry*, memberi kesan benar-benar senada dan suasana dengan inti naskah Jawa Kuna yang dikenal dengan nama *Tutur*.
 48. Tawaran yang diajukan dari pihak *Institute of Indology di Pondicherry* perlu sekali mendapat tanggapan yang serius.

PERKEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA

Harimurti Kridalaksana

Universitas Indonesia

Walaupun lima puluh tahun bukanlah waktu yang dapat terlalu diandalkan untuk menentukan periodisasi sejarah bahasa, tetapi sulit bagi kita untuk menyangkal adanya proses perubahan dalam bahasa kita selama ini. Berlainan dengan kesan selintas kita, ternyata tidak semua bidang bahasa mengalami perubahan. Selama beberapa puluh tahun terakhir ini dalam struktur bahasa Indonesia Indonesia tidak banyak terjadi perubahan: kestabilan menjadi ciri utama struktur fonologis dan struktur gramatikal. Walaupun dalam bidang morfologi tampak perubahann dalam pemakaian dan penggabungan morfem afiks dan morfem dasar dalam proses pembentukan kata serta dalam pemakaian afiks-afiks "baru", tetapi dipandang dari sudut struktur boleh dikata subsistem morfologi tidak mengalami perubahan yang berarti.

Perubahan bahasa yang sungguh menyolok terdapat dalam bidang kosa kata karena memang subsistem inilah yang paling peka terhadap perubahan budaya bahasawan. Beberapa aspek perkembangan kosa kata akan disinggung dalam kerta kerja ini, yaitu :

1. wujud perkembangan kosa kata dan akibat-akibat semantis;
2. sebab-sebab perubahan kosa kata,
3. batas-batas pembaruan dalam kosa kata; dan
4. masalah penciptaan kata-kata baru.

Hanya kasus perubahan makna kata yang terjadi selama sekitar 50 tahun ini sajalah yang disoroti. Itu pun kasus yang ada dokumentasinya.

Beberapa catatan tentang beberapa usaha pengembangan kosa kata yang disinggung di sini karena kami berpendapat bahwa dengan memahami per-

kembangan bahasa pada masa-masa yang sudah, kita dapat mengarahkan perkembangan bahasa secara lebih memadai untuk masa-masa yang akan datang.

II

Wujud Perkembangan Kosa Kata dan Akibat-akibat Semantis

Perkembangan kosa kata dalam bahasa Indonesia selama beberapa puluh tahun ini diperinci di bawah ini disertai dengan beberapa contoh.

- (1) Perubahan makna kata dan kelompok kata. Banyak contoh dapat dikemukakan di sini; salah sebuah di antaranya ialah *menyiarkan* yang pernah hanya berarti 'menyebarkan' seperti terdapat dalam "*Ia ditoe-doeih menyiarkan oeang palseo*" (surat kabar *Bahagia* 4 Januari 1928). Contoh lain *mewahyui* pernah berarti 'menjiwai' dalam kalimat *Oleh sebab itoe, maka kita pertama-tama haroeslah mengabdikan kepada roh dan semangat itoe, roh-moeda dan semangat moeda jang haroes menjerapi dan mewahjoei segenap kita poenja tindakan dan segenap kita poenja perbuatan*" (surat kabar *Persatoean Indonesia* 1 Agustus 1928).
- (2) Hilangnya kata atau kelompok kata. Misalnya, dahulu orang memakai *hati jantung*, sekarang kita lebih biasa memakai *hati nurani*: *... masing-masing seperti soeara jang didengarnja hati jantoengnja*" (surat kabar *Persatoean Indonesia* 15 Pebruari 1929). Kita sekarang memakai kata *menggrayangi*, dahulu orang memakai *menggratak*, misalnya, *Satoe antaranja itoe pendjahat lalu menggratak barang dagangnja. . . .* (surat kabar *Kebangoenan* 7 Maret 1938). Kita sekarang memakai *darah daging*, dulu orang memakai *otak benak*, misalnya, *Roepanja nafsoe boeat berkolonie itoe boekan dipoenjai oleh orang barat sadja, tapi djoega sangat tebal dalam otak benaknja orang Timoer. (Ichtiar 5/12/35)*. Kita sekarang memakai idiom *sepintas lalu*, dulu orang memakai *selendjang terbang*, misalnya, *Kemarin dengan setjara kilat kita mengadakan perdjalanan mengoenjoengi beberapa daerah jang penting di Bandoeng oentoek menangkap kesan-kesan rakjat seledjang terbang. (Tjahaja 3/6/45)*.
- (3) Munculnya kata dan kelompok kata baru, seperti *helicak*, *anda*, *lintas udara*, *pameran keliling*, *ruang lingkup*, yang tidak kita dapati 40--50 tahun yang lalu.
- (4) Hilangnya idiom lama, seperti *sakit sumsum* dalam kalimat, *Stand-*

redacteur koran itoe barangkali sakit soemsoem karena kabar perang. (surat kabar *Kebangoenan* 10 Maret 1941), *pusing-pusing udang* dalam kalimat, *Beberapa hari berselang Wa Moe'allim djadi poesing-poesing oedang poela waktoe dia diadjak makan oleh seorang kemenakannya* (*Pandji Poestaka* 6 Januari 1939). Dalam surat kabar *Tjahaja* yang terbit di Bandung dan dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata terdapat rubrik *Taman Istri*, sedangkan dalam surat kabar *Kebangoenan* yang dipimpin oleh Sanusi Pane terdapat rubrik *Halaman Istri, yang* ". . . *membentang keadaan-keadaan jang berhoeboengan dengan poetri*". Kita sekarang memakai bentuk *luar negeri*, beberapa puluh tahun yang lalu orang memakai *negeri loearan*.

- (5) Munculnya idiom baru, seperti *tongkat atas* (sebuah istilah grafika), *umpan balik*, *tatap muka*, *gerak tipu*, *buku induk*, dan sebagainya yang tidak terbayangkan akan dipakai orang beberapa puluh tahun yang lalu. Dalam tahun 1966-67 mulailah orang memakai ungkapan *ngecap* dalam arti 'membual', dan dalam harian *Sinar Harapan* kita temukan kalimat *Mengingat bahwa projek kemanusiaan di Irian Barat sesungguhnya suatu projek jang bukan mertju suar dan ketjap-ketjapan . . .* (1 April 1970). (Sejarah kata *ngecap* adalah sebagai berikut : untuk meyakinkan pembeli pada etiket botol kecap, apapun merknya, selalu tertera tulisan 'kecap No. 1'; Bung Karno dalam pidatonya berjudul RESOPIM pada tanggal 17 Agustus 1961 menyatakan: "Tidak semua 'kecap nomor satu' adalah benar-benar nomor satu!". Ia masih mempergunakannya dalam arti sebenarnya. Makna itu kemudian dialihkan pada hal-hal yang disombongkan; perbuatan membualkan sesuatu disebut *ngecap*. Kata *kecap-kecapan* dalam kutipan di atas jelas bukan berarti 'seperti kecap'. Jadi, tidak sama dengan rumah-rumahan, misalnya, melainkan "hal-hal yang disombongkan").
- (6) Munculnya kembali kata atau kelompok kata lama, seperti *arkian*, *konon*, *mengelola*, *sepadan*, *walahu'alam*, yang dahulu lazim dalam karya-karya kuna. Proses penggunaan kata-kata lama tampaknya akan terus berlangsung.
- (7) Meluasnya pemakaian singkatan dan akronim. Salah satu ciri yang menonjol yang menandai pemakaian Bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan ialah kebiasaan mempergunakan singkatan dan akronim. Masalah ini tidak akan dibicarakan di sini karena sudah sering dibahas dan sudah diinventarisasikan (Salah satu karya yang awal ialah Schmidgall-

Tellings 1947; lihat juga Morzer-Bruyns 1970 dan Salea 1971).

- (8) Leksikalisasi singkatan dan akronim. Sebagai perkembangan kebiasaan mempergunakan singkatan dan akronim seperti diuraikan di atas ialah perubahan status singkatan dan akronim menjadi unsur leksikal utuh sehingga tidak tampak lagi hubungannya dengan asal singkatan atau akronim itu.

Misalnya; *Orang yang ngebut itu ditilang polisi.*
Perusahaan negara yang rugi terus akan di-p.t.-kan.
Banyak sekolah dasar INPRES dibangun dengan tergesa-gesa.
Peraturan ejaan baru akan di-KEPPRES-kan.
Pemakaian pupuk sudah lama di-BIMAS-kan.

Sebagai akibat perubahan leksikal di atas terjadilah perubahan makna dalam pelbagai bentuk, antara lain metafora yang dulu tidak lazim. Contoh seperti *mulut jalan, roda gendeng, rencana yang bodoh, jantung kota* adalah kasus metafora antropomorfis yang makin banyak kita jumpai sedangkan ungkapan-ungkapan seperti *nada keras, warna yang ramai, selera tinggi* adalah contoh metafora sinestetis yang tidak jarang dipakai orang.

Salah satu jenis metafora ialah perubahan makna kongkret ke makna abstrak, misalnya, makna *jatuh* yang tadinya hanya bersangkutan dengan benda fisik, sekarang dipakai juga untuk makna abstrak, misalnya, *jatuh dalam ujian, dan perusahaan itu jatuh*. Dalam perkembangan Bahasa Indonesia sekarang ini pertumbuhan makna abstrak yang berasal dari makna kongkret itu menjadi sangat meluas. Kalau hadirin menyimak *Kamus Sinonim* yang kami susun akan banyak dijumpai sinonim bagi kata yang bermakna abstrak, sedangkan yang bermakna kongkret hanya sedikit atau sama sekali tidak bersinonim. Misalnya, kata *putih* yang bermakna kongkret tidak ada sinonimnya, tetapi yang bermakna abstrak bersinonim dengan *bersih, murni, pucat*. Contoh lain *belakang* yang makna kongkretnya tidak ada sinonimnya, tetapi makna abstraknya bersinonim dengan *kelak, kemudian, nanti, yang akan datang*. Yang juga bersangkutan dengan masalah pengembangan, makna itu adalah kenyataan bahwa kata-kata yang diturunkan dari kata bermakna kongkret menumbuhkan nuansa yang lebih banyak, misalnya, kata *satu* dalam *Kamus Sinonim* mempunyai entri sebagai berikut :

Satu esa, eka, wahid, pertama, tunggal, mufrad,
 primer

bersatu berkumpul, bergabung, berpadu, bersehati, bertaut
bersatu hati sepakat, seia-sekata
bersatu-padu berpadu benar-benar, seia-sekata, sehidup semati
hanya satu hanya ini (itu) saja
kesatuan kelompok, kesetuhan, keesaan
persatuan gabungan, ikatan, himpunan, kumpulan, perikatan,
serikata, paduan, perhimpunan, perkumpulan, federasi, uni
satuan dasar, ukuran, unit
satu-satu masing-masing, tiap-tiap kali satu
satu sama lain saling
satu-satunya hanya ini (itu), tinggal itu saja, tiada yang lain
tidak satu ada beberapa, ada banyak

Pengecekan dengan padanan-padanan itu, yang sebenarnya hanya kami lakukan untuk melihat perkembangan makna dan nuansa makna mengingatkan kami kepada pernyataan Meillet, sarjana linguistik Prancis, pada awal abad ini, bahwa dalam kemajuan bahasa-bahasa Indo-Eropa tampak bahwa kategori-kategori kongkret sedikit demi sedikit menjadi abstrak, dan yang abstrak tetap dipertahankan atau dikembangkan lebih jauh. Perkembangan ke arah pemikiran yang abstrak ini ditentukan oleh kemajuan kebudayaan yang dialami bangsa-bangsa yang berbahasa Indo-Eropa (Meillet 1926:201). Apakah perkembangan kata seperti kami uraikan di atas juga menjadi tanda kemajuan budaya bangsa kita, wallahu a'alam.

Perubahan-perubahan makna yang lain tidak kami singgung di sini karena pernah dibahas oleh sarjana lain (antara lain oleh Slametmuljana 1964, yang walaupun tidak membatasi diri pada kurun waktu tertentu, Namun, beberapa kasus terjadi dalam beberapa puluh tahun terakhir ini saja, misalnya, kasus terjadinya ungkapan *baju hijau*, *wanita P*, atau *tajuk*.

III

Sebab-sebab Perubahan Kosa Kata

Masalah sebab-sebab perubahan kata pernah diperbincangkan dalam linguistik umum. Meillet (1926) salah seorang yang berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi perubahan makna kata menyetengahkan tiga proses :

- (1) perubahan objek yang dirujuk oleh kata atau perubahan pandangan

- bahasawan tentang objek itu,
- (2) perubahan makna karena diferensiasi sosial, dan
 - (3) perubahan makna karena perubahan konteks kata.

Kerangka teori Meillet pasti relevan sekali dengan perkembangan kosa kata Bahasa Indonesia. Tampaknya kita tidak perlu memberikan contoh untuk masing-masing itu, hanya dua hal yang bersangkutan dengan (1) ingin kami singgung di sini, yaitu soal perubahan makna karena salah paham dan perubahan makna yang disengaja oleh bahasawan.

Kita semua mengakui bahwa Būng Karno adalah tokoh politik yang sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan Bahasa Indonesia (lihat Wojo-wasito 1964); ternyata ia ikut juga menyumbangkan berubahnya makna sebuah kata karena ia kurang paham artinya: dalam salah satu pidatonya ia memakai kata *nahuri* untuk makna 'tradisi'; rupanya ia mengacaukannya dengan kata Jawa lain *lehuri*.

Kata lain yang sekarang lazim dipakai, padahal maknanya sangat jauh dari asalnya karena orang yang memakai pertama kali salah paham ialah kata *nusantara*. Dalam buku *Nagarākertagama* arga 12, 44, 79, dan 83 kata ini berarti 'pulau yang lain', maksudnya tentu saja -- dalam bahasa sekarang-- 'luar Jawa'. Sekarang ini disamakan artinya dengan 'Indonesia'. Salah paham semacam ini rupanya sudah berlangsung lama karena Sanusi Pane dalam *Roeang Bahasa* dari surat kabar *Kebangonenan* tanggal 7 Juli 1938 halaman 2 sudah memperingatkan kesalahan itu. Sekarang anggap saja pemakaian kata itu sudah salah kaprah karena ternyata banyak orang yang tahu bahasa Jawa Kuna (termasuk orang-orang Fakultas Sastra) sudah memakainya dalam arti yang "salah" itu.

Contoh sebuah lagi yang memperlihatkan perubahan makna yang sedang berlangsung karena pemakaiannya kurang paham pemakaiannya ialah kata *demikian*. Kata ini sebenarnya untuk menunjuk sesuatu yang sudah disebutkan (dalam peristilahan linguistik disebut "anafora"), tetapi sekarang tidak sedikit orang yang memakainya untuk menunjuk sesuatu yang akan disebut (dalam linguistik disebut *katafora*).

Perubahan makna karena bahasawan dengan sengaja ingin mengungkapkan perbedaan makna dan nuansa makna sangat lazim dilakukan dalam dunia kehidupan teknis. Misalnya, para ahli anatomi ingin membedakan *lengan* *L. brachium* dengan *tangan* *L. manus*, *tungkai* *L. crus* dengan kaki *L. pes*, kuping *auricula* dengan *telinga* *L. auris*. karena keperluan teknis, padahal pasangan-

pasangan itu dalam bahasa sehari-hari tidak terlalu dibedakan.

Kebalikan dari kasus-kasus itu adalah pembedaan makna yang menjadi kabur karena disengaja atau tidak disengaja, misalnya, antara kata-kata *rapat*, *rapat kerja*, *musyawarah*, *musyawarah kerja*, *konferensi*, *kongres*, *muktamar*, *seminar*, *simposium*, *diskusi*, *loka karya*, dan *sanggar kerja*. Pasti antara satu kata dengan kata lain itu ada perbedaan makna, tetapi apakah kita cukup menandainya, dan apakah kalau kita menyelenggarakannya berbuat sedemikian rupa sehingga jelas perbedaannya? Hal ini bersangkutan dengan suatu aspek bahasa yang sangat menarik, tetapi yang tidak kita bicarakan di sini, yaitu hubungan antara semantik dan perbuatan; Jadi, bersangkutan dengan masalah satunya kata dengan perbuatan”.

Perubahan makna yang disengaja tertera di atas menandai usaha untuk memperbarui kosa kata dan ini merupakan salah satu aspek usaha memperbarui bahasa.

Pembaruan kosa kata tidak dapat dilakukan semena-mena. Ada batas-batas dalam bahasa yang menyebabkan pembaruan itu sering tidak mencapai sasarannya—hal yang akan disinggung di bawah ini.

IV

Batas-batas Pembaruan Kosa Kata

Manusia selalu berusaha untuk menguasai bahasanya bukan hanya dalam arti mampu memakainya, melainkan juga dalam arti ikut membentuknya, antara lain dengan menciptakan atau memperkenalkan ungkapan-ungkapan baru untuk menyatakan makna secara lebih teliti dan cermat. Contoh yang paling aktual adalah usaha untuk memperkenalkan kata *anda* pada tahun 1957 dan usaha untuk memperkenalkan pelbagai istilah dalam pelbagai istilah dalam pelbagai bidang kehidupan teknis seperti disebutkan di atas. Ambillah kata *anda* yang sangat terkenal itu. Memang kata ini sampai hari ini cukup luas dipakai. Akan tetapi, kita dapat bertanya, benarkah tercapai tujuan pengenalan kata itu? Benarkah sistem sapaan kita lebih ”demokratis” dan lebih sederhana daripada sebelum kata itu dikenal?

Masalah ini membawa kita ke teori medan makna. Kita semua memahami bahwa kata-kata dalam perbendaharaan bahasa terikat dalam subsistem-subsistem yang cukup ketat walaupun tidak terlalu kentara. Jadi, kita mengenal subsistem tingkat-tingkat sosial, subsistem bidang pekerjaan, subsistem

warna, subsistem kekerabatan, dan sebagainya. Penambahan atau pengurangan unsur dalam subsistem itu akan memberi akibat pula kepada unsur-unsur lain karena unsur-unsur dalam subsistem itu terikat satu sama lain oleh apa yang lazim kita sebut *valensi* (Lihat Lyons 1973:32--69). Kata *anda* bersama-sama dengan kata, seperti *engkau*, *kamu*, *bapak*, *ibu*, *saudara* terikat dalam subsistem sapaan. Dengan pemakaian kata ini memang perbendaharaan kata kita diperkaya, tetapi kami yakin hadirin sepaham dengan kami bahwa subsistem sapaan kita tidak lebih sederhana daripada yang sudah-sudah (Kridalaksana 1974a).

Kasus lain kita lihat dalam ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966 yang menghapuskan ungkapan *Paduka Yang Mulia*, *Yang Mulia* dan *Paduka Tuan* dari dunia penyapaan resmi. Akan tetapi, kita boleh bertanya apakah karena itu neofeodalisme sudah terhapus dari bumi Indonesia dan masyarakat kita sekarang ini lebih demokratis?

Sebuah kasus lain yang memperlihatkan betapa medan makna memegang peranan penting dalam pengenalan kata sebagai anggota subsistem kosa kata kita temukan dalam soal jantan betina dalam hubungannya dengan istilah kekerabatan.

Dalam bahasa Melayu kata *abang* dipergunakan untuk menunjukkan laki-laki maupun perempuan. Pada suatu ketika seseorang memperkenalkan kata *kakak* dari bahasa Minangkabau yang hanya dipakai untuk merujuk perempuan. Dengan dipakainya kata *kakak* terjadilah pembedaan *abang* untuk laki-laki, *kakak* untuk perempuan. Masalahnya adalah apakah kita sekarang secara konsisten membuat pembedaan semacam itu? Bukankah banyak di antara kita memakai kata *kakak laki-laki* dan *kakak perempuan*, bahkan kata *abang* hanya dipakai dalam dialek-dialek tertentu saja? Walaupun kita memang membedakan laki-laki-perempuan, ayah-ibu, jantan-betina, dan sebagainya, tetapi tampak bahwa pembedaan itu akan menjadi sistematis. Hal ini diperkuat dengan terbatasnya penggunaan forman *i* untuk menandai betina dan forman *a* untuk menandai jantan (misalnya, *muda-mudi*, *mahasiswa-mahasiswa*). Tendensi untuk membedakan tua-muda lebih kuat daripada pembedaan jantan-betina. Perhatikan juga, misalnya, kata *Saudara* yang dipakai untuk menyapa orang yang umurnya sama atau orang yang umurnya lebih muda, tetapi tidak kepada orang yang lebih tua. Begitu pula kata *Saudari* tidak pernah dipakai untuk menyatakan saudara kandung yang perempuan, tetapi hanya untuk sapaan saja. Tendensi ke arah kosa kata yang lebih berstratifikasi kelihatan makin kuat-- ciri yang sudah ada dalam bahasa

Melayu sendiri yang tampak dalam apa yang disebut *bahasa dalam*. Lepas dari soal apakah hal ini menguntungkan atau merugikan bahasa kita, nyata sekali bahwa setiap kata terikat dalam suatu sistem yang cukup ketat yang mempunyai peranan pula dalam perubahan makna.

Masalah teoretis yang kami kemukakan di atas kiranya dapat dimanfaatkan dalam pembinaan bahasa yaitu bahwa menciptakan atau memperkenalkan kata harus tanpa memperhatikan hubungannya dengan kata-kata lain tidak akan terlalu banyak artinya.

Masalah Penciptaan Kata-kata Baru

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahasawan akan berusaha ikut membentuk bahasanya dengan menciptakan atau memperkenalkan ungkapan-ungkapan baru untuk mengungkapkan makna dan nuansa makna secara lebih teliti dan cermat. Proses penciptaan ungkapan-ungkapan baru sudah berlangsung lama. Pada awal pertumbuhan bahasa Indonesia penciptaan ungkapan-ungkapan baru didorong oleh kebutuhan untuk menerjemahkan kata-kata dari bahasa Belanda. Dalam terbitan-terbitan beberapa puluh tahun yang lampau masih banyak kita temukan kata-kata Belanda. Misalnya, dalam surat kabar *Bahagia* terbitan Semarang kita dapati kalimat berikut. "... *regent* Soerabaja soedah ada dalam *dienst* negeri tiada koerang dari 38 tahun, ..." (7 Januari 1928). Dalam surat kabar *Kebangoenan* terdapat kalimat: "Kemaren satoe orang perempuan bernama Kalima binti Joedokoesoemo, tinggal di Gang Kesehatan VI No. 9, soeda mengadoe pada *Politie* dimana ia sedang menaek speda, bajingan sebrot ia poenja *tasch* dalem mana ada berisi wang *contant* banjaknja f. 5,80 dan beberapa barang keperluan orang prampoean seharga f.9.60." (12 Februari 1938).

Dalam tahun 60-an pun masih ada terbitan-terbitan yang masih mempergunakan bahasa Belanda. Dalam harian *Api Pantjasila* kita temukan kalimat berikut. "... tapi karena sikap kita jang selalu *bescheiden* dan sialnja terkadang jadi *schijnheilig* membuat kerdja kreatif tersebut ahirnja jadi kerdil dan terkadang bisa hilang sama sekali ..." (18 Agustus 1969).

Dalam Kongres Bahasa Indonesia 1954 di Medan pun orang masih memakai kata *preadvis*; rupanya kata *prasaran* belum ditemukan pada waktu itu. Dalam Kongres itu pula hadirin selalu tersenyum kalau Menteri Penerangan, Dr. F.L. Tobing, dalam sambutannya secara konsisten mengucapkan "Ke-

menterian P, P en K”

Kecenderungan berbahasa Belanda akhir-akhir ini digantikan dengan kebiasaan berbahasa Inggris di kalangan-kalangan tertentu. Pidato Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1972 yang menganjurkan agar kita semua berbahasa Indonesia “yang baik dan benar” sangat mengurangi kebiasaan yang dianggap banyak kalangan rakyat biasa “sok intelek dan kurang nasional” itu. Hal itu tentu saja mengingatkan kita pada apa yang tertera dalam GBHN 1978 Bab IV *Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya* Pasal 2 (n) dan Pasal 3 (f). Terlepas dari segi-segi yang agak preskriptif membuang kebiasaan memakai kata-kata asing memang akan mendorong kreativitas dalam berbahasa Indonesia.

Beberapa prosedur penciptaan ungkapan-ungkapan baru dapat dikemukakan di sini sebagai berikut :

- (1) menciptakan ungkapan yang baru sama sekali;
- (2) mengambil kata atau kelompok kata yang ada, dan memberikan makna baru;
- (3) meminjam ungkapan dari bahasa daerah, baik yang kontemporer maupun yang klasik;
- (4) meminjam dari bahasa Malaysia;
- (5) menerjemahkan ungkapan asing;
- (6) mengadaptasi ungkapan asing menurut kaidah-kaidah bahasa Indonesia;
- (7) mengambil alih ungkapan asing secara utuh.

Prosedur-prosedur itu sering dipergunakan, baik dalam ragam teknis maupun dalam bahasa sehari-hari. Secara agak normatif prosedur itu diurutkan seperti itu, tetapi dalam prakteknya, terutama dalam bahasa sehari-hari, tidak ada prioritas. Namun, beberapa catatan baik juga disertakan di sini.

Dalam hubungan dengan prosedur (3) rupanya pada akhir-akhir ini terdapat sedikit salah paham: ada perasaan kalau kita mengambil alih ungkapan daerah kita akan menonjolkan kedaerahan, dalam hal ini daerah-daerah tertentu, sehingga sebagai gantinya ada kecenderungan untuk menerima unsur asing secara mentah-mentah. Hal itu tampak, misalnya, dalam kecenderungan untuk menerima pola-pola fonologis asing secara utuh, tetapi bila menerima unsur dari bahasa daerah pola bahasa daerah itu dibuat lain. Jelas bahwa fobia

semacam ini didasarkan pada salah paham semata-mata. Memang benar pengambilan unsur daerah sebagian besar bersumberkan bahasa Jawa atau Sunda, tetapi di luar sangkaan kita, tidak sedikit orang yang bukan Jawa atau Sunda berusaha menggali unsur-unsur dari kedua bahasa itu. Harus diakui bahwa kita masih harus lebih banyak mengenal bahasa-bahasa daerah lain dan bahwa para pembina bahasa dari suku lain masih menunjukkan keberanian untuk memperkenalkan kekayaan bahasa daerahnya. Usaha itu tentu saja tidak perlu disertai rasa waswas dituduh menonjolkan kedaerahan. Kalau kita berpendirian bahwa kebudayaan Indonesia harus berakar di bumi Indonesia, dan kita tidak semestinya menggapai-gapai di dunia luar, tentulah sumber-sumber yang telah dimiliki, yaitu sumber-sumber daerah harus dimanfaatkan. Pada hakikatnya apa yang kita hadapi ini bersangkutan dengan tekad kita untuk melaksanakan politik bahasa nasional yang sejalan dengan kebudayaan nasional kita.

Sumber lain yang mulai dimanfaatkan ialah bahasa Malaysia. Agak disayangkan bahwa pengambilalihan beberapa unsur Malaysia tidak disertai dengan wawasan yang memadai. Yang kami maksudkan disini ialah kata *penyunting* dan *kawasan*. Di Malaysia *penyunting* berarti *asistant editor* (Inggris); beberapa orang di sini memakainya dengan pengertian *editor*. *Kawasan* di Malaysia berarti *homestead, holding* (lihat Wilkinson, t.t. : 518). Jadi, bagian dari suatu wilayah. Di negeri kita ini ada yang memakainya dengan pengertian *region* sehingga ada orang yang berbicara mengenai *kawasan Asia Tenggara*, padahal di Malaysia orang menyebutnya *rantai Asia Tenggara*. (Kata *kawasan* mempunyai sejarah yang unik; kata ini adalah kata Jawa, bukan Melayu asli, yang kemudian lazim dipakai di Negeri Sembilan Malaysia, tetapi yang tidak dikenal di Indonesia, kecuali kalau kita tahu bahasa Jawa atau Sunda). Kalau kita akan membina komunikasi yang lebih baik dengan negara tetangga kita, cara yang sekarang kita pakai, yakni "demi bunyi yang enak didengar" tanpa memperhatikan segi-segi semantisnya jelas tidak dapat kita teruskan.

Termasuk dalam usaha menyerap unsur-unsur asing ialah penggunaan ungkapan-ungkapan bahasa Sansekerta. Unsur yang diambil alih ada yang tetap maknanya dan ada yang bermakna baru yang khas Indonesia. Ada yang diambil langsung dari bahasa Sanskerta dan ada yang diambil dari perbendaharaan bahasa Jawa Kuna (lihat Gonda, 1973).

Pemanfaatan bahasa Arab untuk mengungkapkan konsep-konsep teknis sudah lama dilaksanakan orang; salah satu karya yang berusaha menginventarisasikan unsur-unsur itu ialah Ramali 1974.

Pengaruh bahasa Inggris untuk masa-masa yang akan datang kiranya akan tetap besar. Pengaruh itu bukan hanya dalam bentuk terjemahan, bukan hanya dalam bentuk adaptasi, melainkan juga dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang utuh dalam konteks bahasa Indonesia. Ungkapan-ungkapan yang utuh itu terpakai bukan hanya dalam ragam teknis karena belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, melainkan juga dalam ragam nonstandar. Kata Inggris yang menarik perhatian kita ialah kata *you*. Walaupun dalam bahasa Inggris kata ini dipakai untuk segala ragam ternyata bila dipakai dalam konteks bahasa Indonesia hanya boleh dipakai dalam ragam nonstandar saja. Ini berlainan dengan kata Belanda *U* yang bila dipakai dalam konteks Indonesia tetap harus dalam ragam resmi. Dalam ragam nonstandar kita dapat pula kata-kata Inggris yang tidak pernah dipakai di Inggris, Amerika, Australia, atau di mana pun, selain di Indonesia, yakni kata-kata *cross boy*, *cross girl*, *cross mama*, *cross papa* seperti halnya kita harus mempergunakan bentuk-bentuk *ad hoc* (Latin), *force majeure* (Prancis), *weltanschauung* (Jerman). Karena belum ada padanannya dalam bahasa kita; demikian pula terjadinya bentuk-bentuk nonstandar itu karena perbendaharaan bahasa kita memiliki konsep-konsep yang diperlukan. Terpaksa kita akui dalam hal ini bahwa bahasa Indonesia memang tidak sepintar orang Indonesia !

VI

Dari uraian yang serba tidak sistematis itu beberapa hal ingin kami tekankan pada akhir pembicaraan ini. Perbendaharaan kata bahasa Indonesia bukan hanya berupa kumpulan kata yang lepas-lepas, melainkan terjadi dari beberapa subsistem yang mengikat perangkat-perangkat kata tertentu. Perkembangan kosa kata selama beberapa puluh tahun ini menyokong kenyataan itu.

Supaya wawasan linguistik tentang kenyataan itu dapat lebih berguna bagi pembinaan bahasa, perlu diadakan penelitian yang mendalam dalam bidang leksikologi mengenai pelbagai aspek kosa kata bahasa Indonesia.

Untuk masa-masa yang akan datang proses penciptaan kata masih akan berlangsung terus. Dalam hubungan ini perlu dibina sikap bahasa yang selaras dengan aspirasi untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional sebagai konsekuensi langsung kesediaan kita untuk menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan lima puluh tahun yang lalu.

PENELITIAN BAHASA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

S. Effendi

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Pendahuluan

Kegiatan penelitian bahasa mengalami kesepian pada tahun-tahun awal kemerdekaan hingga tahun enam puluhan. Pada tahun tujuh puluhan mulailah terlihat kegiatan-kegiatan penelitian bahasa yang dilaksanakan terutama oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Jakarta dan di daerah. Jumlah dan penyebaran kegiatan penelitian ini bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1974 mulailah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melakukan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan bahasa. Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga-tenaga dari perguruan tinggi di Jakarta dan di daerah dalam bentuk kerja sama dan tenaga-tenaga dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sendiri.

Kertas kerja ini tidak bermaksud menelaah kegiatan penelitian bahasa dan sastra di Indonesia secara tuntas dan mendalam. Sesuai dengan kemampuan yang ada dan informasi yang tersedia di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kertas kerja ini hanya akan berusaha menjawab seperangkat pertanyaan berikut.

1. Bagaimanakah kebijaksanaan penelitian bahasa dan dalam hubungan dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua?

2. Bagaimanakah jumlah dan mutu hasil penelitian bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang telah dicapai berdasarkan kebijaksanaan tersebut?
3. Bagaimanakah relevansi hasil penelitian bahasa itu dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa?
4. Langkah-langkah apakah yang perlu dikembangkan dalam usaha meningkatkan mutu hasil penelitian bahasa serta pemanfaatannya bagi usaha pembinaan dan pengembangan bahasa ?

Dengan seperangkat pertanyaan ini, diharapkan akan diperoleh jawaban yang tidak terlalu menyimpang dari harapan Panitia Kongres Bahasa Indonesia III ini.

Kebijaksanaan Penelitian Bahasa

Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974/75–1978/79) telah digariskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan ini, bahasa dan sastra merupakan salah satu segi kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa tercapai, yakni lebih berkembangnya kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di kalangan masyarakat luas sebagai sarana komunikasi nasional antarmanusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan akhir ini, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan dan kesastraan antara lain kegiatan (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, penyusunan berbagai kamus baku bahasa Indonesia dan bahasa daerah, penyusunan berbagai kamus istilah, dan penyusunan buku-buku pedoman ejaan, tata bahasa, dan pembentukan istilah, (2) penyuluhan bahasa Indonesia melalui berbagai media massa, (3) penerjemahan karya kesusastraan daerah yang utama, kesusastraan dunia, dan karya kebahasaan yang penting ke dalam bahasa Indonesia, (4) pengembangan informasi kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian, inventarisasi, perekaman, pendokumentasian, dan pembinaan jaringan informasi, dan (5) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara mengarang, pemberian bea siswa, dan hadiah penghargaan. Di sini terlihat bahwa penelitian bahasa berperan sebagai kegiatan penunjang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra.

Sebagai salah satu tindak lanjut kebijaksanaan tersebut, dibentuklah

oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah – Jakarta (Proyek Penelitian Pusat) pada tahun 1974 dan pada tahun-tahun berikutnya (pada tahun 1978/1979 pelaksanaan proyek menginjak tahun kelima) dengan tugas melakukan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam berbagai aspeknya, termasuk peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Proyek ini dikelola dan dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan memanfaatkan tenaga-tenaga dari perguruan tinggi di Jakarta dan di daerah dalam bentuk kerja sama serta tenaga-tenaga dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sendiri. Kemudian, mulai tahun 1976 proyek ini dipecah menjadi 10 proyek yang berlokasi di 8 provinsi dan di 2 daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh dengan pengelola Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Sumatra Barat dengan pengelola IKIP Padang, Sumatra Selatan dengan pengelola Universitas Sriwijaya Palembang, Kalimantan Selatan dengan pengelola Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Sulawesi Selatan dengan pengelola IKIP Manado, Bali dengan pengelola Universitas Udayana Denpasar, Jawa Barat dengan pengelola IKIP Bandung, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengelola Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan pengelola IKIP Malang. Program kegiatan kesepuluh proyek daerah ini merupakan bagian dari program kegiatan Proyek Penelitian Pusat di Jakarta yang disusun berdasarkan Rencana Induk Penelitian Bahasa dan Sastra, bagian Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pelaksanaan program proyek-proyek daerah dilakukan terutama oleh tenaga-tenaga perguruan tinggi di daerah bersangkutan berdasarkan penelitian yang harus dilaksanakan tiap tahun meningkat: dari 36 sampai 100 lebih.¹

Dari uraian di atas terlihat bahwa Proyek Penelitian Pusat dan kesepuluh proyek daerah bukanlah merupakan proyek-proyek perguruan tinggi atau dengan unit utama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melainkan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdapat juga proyek penelitian yang bertalian dengan masalah kebahasaan dan kesastraan, namun dengan tugas yang tentunya sejalan dengan tujuan direktorat tersebut dan dengan tujuan lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Hasil Penelitian Bahasa

Setelah empat tahun berjalan, Proyek Penelitian Pusat menghasilkan lebih dari 200 jenis naskah laporan penelitian tentang bahasa dan sastra termasuk lebih dari 25 jenis naskah kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan setelah dua tahun bekerja, kesepuluh proyek penelitian daerah menghasilkan 90 jenis naskah laporan penelitian tentang berbagai aspek bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Dari jumlah naskah ini, kurang lebih 50% merupakan naskah laporan penelitian mengenai bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Garis besar gambaran isi laporan penelitian mengenai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, baik sebagai hasil Proyek Penelitian Pusat maupun proyek-proyek daerah, sebagai berikut.

Pertama, masalah yang diteliti mencakup empat jalur masalah, yakni (1) struktur bahasa, (2) pengajaran bahasa, (3) hubungan bahasa dengan masyarakat, dan (4) perkembangan bahasa. Jalur 1 meneliti masalah-masalah seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana bahasa Indonesia dan bahasa daerah (lebih dari 40 bahasa daerah). Jalur 2 meneliti masalah-masalah seperti kemampuan berbahasa Indonesia dan kemampuan berbahasa daerah tertentu para pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah, kosa kata bahasa Indonesia dalam berbagai buku pelajaran dan karangan para pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah, pemakaian bahasa Indonesia dalam berbagai buku pelajaran sekolah dasar dan sekolah menengah, pemakaian bahasa Indonesia sebagai pengantar di beberapa sekolah dasar di Jawa dan di luar Jawa, tes prestasi belajar bahasa Indonesia yang disusun oleh pemerintah maupun swasta dan pernah digunakan di sekolah dasar dan sekolah menengah, dan pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah di beberapa daerah. Jalur 3 meneliti masalah-masalah seperti kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan beberapa bahasa daerah, ragam bahasa dalam beberapa situasi dan konteks pemakaian termasuk tingkat-tingkat bahasa, sikap penutur terhadap bahasanya, jumlah penutur beberapa bahasa daerah, dan wilayah pemakaian bahasa daerah. Jalur 4 meneliti masalah-masalah seperti perubahan dan pertumbuhan struktur dan kosa kata bahasa Indonesia, perkembangan telah bahasa, dan perkembangan kebijaksanaan bahasa dalam kurun waktu tertentu.

Kedua, informasi kebahasaan yang disajikan dalam laporan penelitian tersebut lebih merupakan gambaran garis besar tentang keempat jalur masalah seperti dikemukakan di atas alih-alih merupakan gambaran yang lengkap,

mendalam, dan tuntas. Di samping kenyataan ini, berdasarkan catatan-catatan penelitian dari beberapa ahli, sebagian besar kurang lebih 75% gambaran garis besar informasi kebahasaan yang disajikan memperlihatkan keterbatasan wawasan tentang kebahasaan yang disajikan memperlihatkan keterbatasan wawasan tentang penelitian bahasa dan kemampuan kerja lapangan dari para peneliti. Besar persentase keterbatasan ini menurun tiap tahun.

Ketiga, informasi kebahasaan yang disajikan memberikan petunjuk bahwa sasaran penelitian bahasa yang dilakukan adalah (a) terkumpulnya data dan informasi tentang keempat jalur masalah yang lebih lengkap, lebih sah, dan lebih terorganisasi untuk pengembangan informasi kebahasaan dan (b) tersusunnya seperangkat rekomendasi tentang peningkatan mutu pengajaran, tentang pemakaian bahasa baku, dan tentang perencanaan pembinaan dan pengembangan bahasa.

Naskah laporan penelitian bahasa dalam jumlah dan mutu seperti dikemukakan di atas adalah hasil penelitian yang dapat dilihat dan dibaca oleh siapa pun yang berminat. Di samping hasil penelitian berwujud naskah ini, ada beberapa hasil yang sukar diukur, hasil yang menyangkut wawasan, kemampuan, dan sikap para peneliti. Dari informasi yang disampaikan oleh sepuluh pemimpin proyek daerah kepada Pusat Bahasa dan dari pengamatan langsung ke daerah Aceh, Medan, Padang, Banjarmasin, Ujungpandang, Manado, Gorontalo, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Jember, Denpasar, dan Singaraja diperoleh petunjuk bahwa kegairahan meneliti di daerah-daerah, terutama di lingkungan perguruan tinggi, meningkat. Meningkatnya kegairahan ini tampaknya antara lain didorong oleh keinginan untuk menambah pengalaman, meningkatkan kemampuan meneliti dan wawasan tentang penelitian. Dari pengamatan terhadap rancangan-rancangan (desain) penelitian yang disusun pada tahun pertama dan pada tahun-tahun berikutnya, dari pengamatan terhadap tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh para peneliti dalam sanggar kerja (loka karya) penilaian dan penyusunan instrumen pengumpulan data, dan dari pengamatan terhadap naskah laporan penelitian hasil tahun pertama dan hasil tahun-tahun berikutnya, diperoleh petunjuk bahwa wawasan tentang penelitian bahasa dan kemampuan meneliti para peneliti juga meningkat.

Relevansi Penelitian Bahasa

Bagaimanakah relevansi hasil penelitian seperti dikemukakan di atas

dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa? Jawabnya tergantung pada tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa yang hendak dicapai. Apabila tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa terutama membakukan bahasa sehingga kedudukan dan fungsi bahasa itu menjadi lebih mantap, maka penelitian terhadap masalah-masalah bahasa yang relevan dengan pembakuan diutamakan. Apabila tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa bukan semata-mata membakukan bahasa, melainkan juga meningkatkan kemampuan berbahasa yang dimiliki masyarakat dan sikap masyarakat terhadap bahasanya, maka penelitian terhadap masalah-masalah yang relevan dengan usaha peningkatan itu pun perlu dilakukan.

Berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua dan dalam Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa akan dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa adalah membakukan bahasa Indonesia sehingga kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia menjadi lebih mantap, baik sebagai bahasa nasional, bahasa negara maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa seni budaya, dan bahasa pembangunan. Pembakuan bahasa dapat ditujukan terhadap suatu ragam bahasa (misalnya untuk mengangkatnya sebagai ragam resmi) atau terhadap aspek-aspek suatu ragam bahasa seperti ejaan, tata bahasa, kosa kata, peristilahan (lihat Jernudd dan Das Gupta, 1971:200 – 204). Pembakuan adalah suatu proses yang menyangkut pemilihan kaidah, pemerincian dan pemekaran fungsi, kodifikasi bentuk, dan penerimaan oleh masyarakat bahasa berdasarkan kriteria tertentu seperti efisiensi, kecermatan, dan keberterimaan (lihat Haugen, 1972 : 172–178).

Kedua, tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa adalah juga meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang dimiliki masyarakat dan sikap masyarakat terhadap bahasa Indonesia sehingga mutu pemakaian bahasa Indonesia lebih baik. Peningkatan kemampuan berbahasa dapat ditujukan kepada berbagai golongan dan lingkungan masyarakat seperti murid, guru, para pejabat, cendekiawan, dan masyarakat umum. Peningkatan kemampuan bahasa juga merupakan suatu proses yang menyangkut antara lain pengajaran bahasa dan penyuluhan bahasa.

Ketiga, tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa adalah juga memelihara dan mengembangkan bahan atau informasi kebahasaan sehingga bahan atau informasi itu menjadi lebih lengkap, lebih bermutu, lebih terpeliki-

hara, dan lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam usaha pembakuan dan peningkatan kemampuan serta sikap bahasa. Pemeliharaan dan pengembangan bahan atau informasi kebahasaan juga merupakan suatu proses yang antara lain menyangkut penginventarisasian, pendokumentasian, penyusunan, penerjemahan, dan penjarangan informasi kebahasaan.

Keempat, tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa adalah juga membakukan bahasa-bahasa daerah yang dipelihara baik-baik oleh masyarakat yang bersangkutan, meningkatkan kemampuan dan sikap bahasa masyarakat daerah tersebut, dan memelihara serta mengembangkan bahan atau informasi kebahasaan bahasa-bahasa daerah.

Apabila seperangkat tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa tersebut dijadikan ukuran untuk menentukan relevansi penelitian bahasa yang telah dilakukan selama empat tahun itu, maka relevansi itu dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, informasi tentang masalah-masalah struktur, pengajaran bahasa, hubungan bahasa dengan masyarakat, dan perkembangan bahasa sebagai hasil penelitian cenderung mempunyai hubungan langsung dengan tujuan pemeliharaan dan pengembangan informasi kebahasaan.

Kedua, sebagai akibat logis dari kenyataan pertama, informasi tentang masalah-masalah kebahasaan itu masih memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk kepentingan pembakuan bahasa peningkatan kemampuan berbahasa dan sikap bahasa, dan penyebaran informasi kebahasaan di kalangan masyarakat.

Gambaran relevansi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya manfaat hasil penelitian bahasa yang telah dilakukan dalam batas-batas tertentu untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kelemahan utama adalah sangat terbatasnya penelitian bahasa yang secara langsung bermanfaat bagi pembakuan bahasa apabila pembakuan bahasa dianggap sebagai tujuan utama pembinaan dan pengembangan bahasa.

Langkah-langkah Mendatang

Berdasarkan telaah kebijaksanaan penelitian bahasa, jumlah serta mutu hasil penelitian bahasa dan ragam serta cakupan masalah penelitian, dan relevansi hasil penelitian bahasa dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa sebagaimana telah dikemukakan, beberapa langkah berikut

dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan dan dilaksanakan.

Pertama, peningkatan penelitian bahasa baik yang bersifat terapan maupun bersifat murni. Penelitian yang langsung bertujuan memecahkan masalah-masalah praktis misalnya untuk keperluan pembakuan bahasa dan peningkatan mutu pemakaian bahasa perlu ditingkatkan. Penelitian yang bertujuan mengembangkan ilmu bahasa Indonesia seyogianya tidak diabaikan.

Kedua, peningkatan mutu tenaga peneliti bahasa. Kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan universitas hendaknya lebih membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan wawasan tentang seluk-beluk penelitian, kemampuan meneliti, dan sikap positif terhadap dunia penelitian alih-alih mengekang mereka atau membuat para lulusan sebagai sarjana-sarjana "mesin". Penataran penelitian bahasa perlu dikembangkan terus sekali pun kegiatan ini bersifat darurat.

Ketiga, peningkatan pemanfaatan hasil penelitian bahasa. Semua naskah hasil penelitian bahasa hendaknya segera diolah hingga siap untuk diterbitkan dan disebarluaskan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian yang memerlukan, guru bahasa, dan peminat bahasa pada umumnya.

Keempat, peningkatan sistem informasi kebahasaan. Lembaga yang memiliki informasi kebahasaan yang lengkap dan dapat dipercaya, dan sanggup melayani kebutuhan peminat bahasa perlu segera diwujudkan dan dikembangkan. Dalam hubungan ini, lembaga-lembaga yang ada seperti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan lembaga-lembaga yang berkepentingan dengan masalah kebahasaan seyogianya dimanfaatkan dalam usaha meningkatkan sistem informasi tersebut.

Kelima, peningkatan pengelolaan penelitian bahasa. Pemrioritasan masalah-masalah kebahasaan yang akan diteliti hendaknya sejalan dengan pemrioritasan sasaran-sasaran pembinaan dan pengembangan bahasa. Perencanaan penelitian bahasa, pemanfaatan dan penggairahan tenaga-tenaga pelaksana penelitian, koordinasi penelitian hendaknya selalu mempertimbangkan hambatan-hambatan yang ada misalnya sosial budaya, ekonomis, politis, teknis, administratif—dan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama ini. Evaluasi hasil penelitian perlu ditingkatkan sehingga lebih mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan bagi peningkatan mutu para peneliti itu sendiri.

Catatan :

1. Dari catatan-catatan yang ada, proyek-proyek penelitian bahasa ini telah melibatkan lebih dari 800 tenaga sarjana bahasa dan nonbahasa dalam berbagai kualifikasi: dari profesor, doktor sampai sarjana muda; hampir mendekati 1.000 orang pelaksana apabila diperhitungkan para mahasiswa tingkat terakhir yang diikutsertakan membantu pengumpulan data.

DAFTAR BACAAN

- Effendi, S. 1976. "Masalah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia." Kertas kerja untuk Sanggar Kerja Politik Bahasa Nasional di Jakarta, 23 – 27 Maret 1976.
- Halim, Amran (Ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hugen, Einar. 1972. "Linguistics and Language Planning." dalam Anwar S. Dil (Ed.), *The Ecology of Language*. Essays by Einar Haugen. Stanford, California: Stanford University Press.
- Jernudd, Bjorn H. dan Jyotirindra Das Gupta. 1971. "Towards a Theory of Language Planning." dalam Joan Rubin dan Bjorn H. Jernudd (Ed.), *Can Language Be Planned ?* Honolulu : The University Press of Hawaii.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1976. "Hasil Perumusan Sanggar Kerja Politik Bahasa Nasional. Jakarta.
- Rubin, Joan dan Bjorn H. Jernudd (Ed.). 1971. *Can Language Be Planned ?* Honolulu: The University Press of Hawaii.

Lampiran

POKOK-POKOK PENELITIAN BAHASA

Struktur Bahasa

1. Struktur Bahasa Lamaholot Ilemandiri
2. Struktur Bahasa Batak Mandailing
3. Struktur Bahasa Batak Toba
4. Struktur Bahasa Batak Pakpak/Dairi dan Struktur Bahasa Batak Simalungun
5. Dialek Deli Medan
6. Dialek Riau
7. Struktur Bahasa Sasak
8. Struktur Bahasa Bali I
9. Struktur Bahasa Bali (Morfologi)
10. Struktur Bahasa Bajau
11. Struktur Bahasa Bolaang Mongondow
12. Struktur Bahasa Bugis
13. Struktur Bahasa Bakumpai
14. Struktur Bahasa Blide Dialek Lembak
15. Struktur Bahasa Bali II
16. Struktur Bahasa Bukit
17. Struktur Bahasa Basemah
18. Struktur Bahasa Banjar Hulu
19. Struktur Bahasa Gayo
20. Struktur Bahasa Gorontalo
21. Struktur Bahasa Jawa
22. Struktur Bahasa Jawa Bagian Barat
23. Struktur Bahasa Jawa (Dialek) di Jawa Timur

24. Struktur Bahasa Jawa (Dialek) di Pesisir Utara Jawa Tengah
25. Struktur Bahasa Kayu Agung
26. Struktur Bahasa Komerling
27. Struktur Bahasa Makassar
28. Struktur Bahasa Madura
29. Struktur Bahasa Mandar
30. Struktur Bahasa Masenrempulu
31. Struktur Bahasa Melayu Makassar
32. Struktur Bahasa Mentawai
33. Struktur Bahasa Melayu Manado
34. Struktur Bahasa Melayu Palembang
35. Struktur Bahasa Minangkabau (fonologi)
36. Struktur Bahasa Minangkabau (sintaksis) I
37. Struktur Bahasa Minangkabau (sintaksis) II
38. Struktur Bahasa Minangkabau (morfologi)
39. Struktur Bahasa Minahasa
40. Struktur Bahasa Muna
41. Struktur Bahasa Nias
42. Struktur Bahasa Pesisir Timur Kalimantan Selatan
43. Struktur Bahasa Semendo
44. Struktur Bahasa Sangir
45. Struktur Bahasa Sunda
46. Struktur Bahasa Sunda Dialek Banten
47. Struktur Bahasa Sunda Pesisir Utara Jawa Barat
48. Struktur Bahasa Sunda Dialek Priangan
49. Struktur Bahasa Serawai
50. Struktur Bahasa Toraja
51. Struktur Bahasa Totemboan
52. Struktur Bahasa Talaud
53. Struktur Bahasa Mualang
54. Struktur Bahasa Indonesia Baku
55. Kalimat, Klausa, dan Frase Sebuah Taksonomi Sintaksis Bahasa Indonesia.
56. Loka Bahasa Dialek Geografi Bahasa Sunda
57. Morfologi Bahasa Indonesia
58. Morfologi Bahasa Indonesia Lisan
59. Morfologi dan Sintaksis Bahasa Sunda
60. Sintaksis Bahasa Bali

18. Kemampuan Berbahasa Jawa (Mendengarkan dan Berbicara) Murid Kelas VI SD di Jawa Tengah
19. Kemampuan Berbahasa Bali (Mendengarkan dan Berbicara) Murid Kelas VI SD di Bali
20. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD yang Berbahasa Ibu Bahasa Aceh
21. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Siswa Kelas III SPG di Jawa Barat
22. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Menulis) Siswa Kelas III SPG di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
23. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Siswa Kelas III SPG Negeri dan Swasta DKI Jakarta
24. Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di SD Bali
25. Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di SD Sulawesi Selatan
26. Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di SD Jawa Barat
27. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di SD Jawa Timur dan Madura
28. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di SD Jawa Tengah (Surakarta)
29. Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia di SD Sulawesi Utara
30. Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia di SD Kalimantan Selatan
31. Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia di SD Sumatra Selatan
32. Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia di SD Sumatra Barat
33. Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia di SD Yogyakarta
34. Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia dan Daerah di Jawa Timur dan Madura
35. Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia di SD Jawa Barat
36. Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah di SD Sulawesi Selatan
37. Pemakaian Bahasa Pengantar di Sekolah Dasar
38. Pemakaian Kosakata Bahasa Indonesia Murid Kelas III SD Sumatra Barat
39. Pemakaian Kosakata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI SD di Jawa Barat
40. Kosakata Bahasa Indonesia dalam Buku Pelajaran Kelas III SD

61. Sintaksis Bahasa Jawa
62. Wacana Berita dalam Surat Kabar Harian Bahasa Indonesia

Pengajaran Bahasa

1. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid SD Jawa Tengah
2. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD di Minahasa
3. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD Sumatra Barat
4. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD DKI Jaya
5. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD di Jawa Barat
6. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD di Bali
7. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid SMP Negeri Kelas III di Jawa Barat
8. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas III SPG Sumatra Barat
9. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD yang Berbahasa Bugis
10. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Siswa SD yang Berbahasa Madura
11. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas III SMP DKI Jakarta
12. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Siswa Kelas III SMP Jawa Timur
13. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengarkan dan Berbicara) Murid Kelas VI SD di Jawa Tengah
14. Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengarkan dan Berbicara) Murid Kelas VI SD di Jawa Barat
15. Kemampuan Berbahasa Sunda (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD di Jawa Barat
16. Kemampuan Berbahasa Bali (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD di Bali
17. Kemampuan Berbahasa Madura (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI SD Jawa Timur/Madura

41. Kosakata Bahasa Indonesia dalam Buku Pelajaran Kelas VI SD
42. Kosakata Bahasa Indonesia Murid Kelas III SD di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
43. Pemakaian Kosakata Murid Kelas VI SD yang Berbahasa Ibu Bahasa Bugis
44. Kosakata Bahasa Indonesia dalam Buku Pelajaran SMP Kelas III
45. Kosakata Bahasa Indonesia Murid Kelas I di Sumatra Barat
46. Kosakata Bahasa Indonesia Murid Kelas I SD di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
47. Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI SD di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
48. Tes Prestasi Belajar Bahasa Indonesia SMA Jawa Barat
49. Tes Prestasi Belajar Bahasa Indonesia SD DKI Jakarta
50. Tes Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMP di Jawa Timur
51. Pola Kalimat Bahasa Indonesia Siswa SD di Jawa Barat
52. Uji Kemampuan Berbahasa Lisan SPG Kelas III di Jawa Barat
53. Struktur Kalimat dan Ejaan dalam Buku Pelajaran Kelas VI SD

Sosiolinguistik

1. Bahasa Bugis di Sulawesi Selatan: Beberapa Aspek Sosiolinguistik
2. Bahasa Makasar: Suatu Tinjauan dari Segi Sosiolinguistik
3. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Jawa Barat
4. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Jawa Timur
5. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Masyarakat di Sulawesi Selatan
6. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Aceh
7. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Madura di Madura
8. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Minangkabau di Sumatra Barat
9. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Aceh di Aceh
10. Latar Belakang Sosial Budaya Bahasa Bali
11. Undak-usuk Bahasa Jawa
12. Undak-usuk Bahasa Madura
13. Undak-usuk Bahasa Sunda
14. Interferensi Gramatikal Bahasa Makassar Murid dalam Pemakaian Bahasa Indonesia
15. Kedwibahasaan di Pesisir Selatan Aceh (Blangpide ke Tenggara)

16. Interferensi Gramatikal Bahasa Makassar dalam Pemakaian Bahasa Indonesia Murid SD
17. Interferensi Gramatikal Bahasa Jawa dalam Pemakaian Bahasa Indonesia Murid SD
18. Fungsi dan Pemakaian Bahasa Indonesia dan Dialek Jakarta di SMA Jakarta

MASALAH AKRONIM DAN SINGKATAN DALAM PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA

Nugroho Notokusanto

Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

Tujuan Pembahasan

Kiranya tujuan Panitia memasukkan masalah ini sebagai salah satu di antara topik pembahasan di dalam Kongres Bahasa III adalah untuk menyampaikan saran-saran kepada masyarakat, mengenai penggunaan akronim dan singkatan yang layak. Bahwa pembahasannya diserahkan kepada seseorang yang bertugas di dalam lingkungan ABRI, barangkali bertolak dari anggapan bahwa kalangan itulah yang paling banyak memakai akronim dan singkatan. Dengan demikian, diharapkan bahwa masalahnya akan disoroti secara tajam, baik oleh pemrasaran maupun oleh peserta lainnya.

Penggunaan akronim dan singkatan di dalam bahasa Indonesia bukan lagi merupakan sesuatu yang asing, setidaknya setelah terbitnya *Kamus Singkatan dan Akronim yang Dipergunakan di Indonesia* pada tahun 1970 oleh A. Morzer Bruyns. Selain oleh para awam, juga oleh para sarjana linguistik persoalan itu sudah pernah dibahas secara sistematis. Dengan demikian, di dalam kertas kerja ini tidak lagi diperlukan uraian pengantar yang bersifat deskriptif.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24 Agustus 1975, No. 0196/U/1975, Lampiran II yang berjudul "Pedoman Umum Pembentukan Istilah", istilah singkatan adalah istilah yang dibentuk dengan menanggalkan satu bagiannya atau lebih seperti (kereta api) *ekspres*, (surat kabar) *harian*, (surat) *kawat*, *lab* (oratorium). Singkatan-jenis lain menurut dokumen itu adalah lambang huruf, yakni bentuk yang tulisannya disingkatkan, tetapi lafalnya dijabarkan dari bentuk lengkapnya, misalnya:

cm *sentimeter*

cos *kosinus*

l *liter*

sin *sinus*

Ada juga lambang singkatan yang dilisankan menurut ejaannya, huruf demi huruf, misalnya :

KVA atau *kva* *kilovolt-ampere*

TL *tube luminescent* (Prancis)

dk *daya kuda*

Ca *kalsium*

Akronim didefinisikan sebagai berikut. "Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata dan yang ditulis serta dilafalkan sebagai kata yang wajar, misalnya :

UNO

UNESCO

ABRI

ALRI

Akronim yang berupa gabungan huruf dan suku kata ditulis dengan huruf biasa (kecil) seluruhnya, kalau bukan nama diri, kecuali jika penciptanya memberikan ketentuan yang lain. Yang jadi nama diri dimulai dengan huruf kapital, misalnya :

radar

rapin

tilang

tapol

Depkes

Hankam

Akabri

Seorang pengarang, berdasarkan Mozer Bruyns, membagi-bagi singkatan dan akronim dalam jenis-jenis berikut.

1. Singkatan (*abbreviation*)
2. Akronim, yang dibagi lagi atas tiga subjenis, yakni :
 - a. penyingkatan (*shortening*), misalnya :
bhw (bahwa)
pak, dik, bu, dan juga No (Sutrisno), *Ti* (Siti), *Leh* (Saleh), dan *Min* (Gimin);
 - b. inisialisme (*Forms composed of initials*), misalnya : *FDR* (Front Demokrasi Rakyat), *LRKN* (Lembaga Research Kebudayaan Nasional), dan lain sebagainya;
 - c. kata-huruf (*letter-word*).

Jenis ini merupakan kata baru yang terbentuk dengan menggabungkan beberapa huruf dari suatu rangkaian kata. Misalnya, *Lipi*, *Pertamina*, *Nasakom*, *Mahmilub*, dan sebagainya (de Vries, 1970).

Dengan bantuan karya-karya tertentu di atas, usaha menyusun pola penggunaan akronim serta singkatan dalam bahasa Indonesia secara empiris tidaklah terlalu sulit. Menurut penglihatan saya, penggunaan akronim dan singkatan polanya sebagai berikut.

A. Akronim

1. Nama organisasi (dalam arti yang seluas-luasnya, misalnya :
 - a. nama departemen :

<i>Depdagri</i>	<i>Deplu</i>	<i>Dephankam</i>
<i>Depkeh</i>	<i>Deppen</i>	<i>Depku</i>
<i>Depdag</i>	<i>Deptan</i>	<i>Deperhub</i>
<i>Depkes</i>	<i>Depag</i>	<i>Depsos</i>
<i>Depnakertrans</i>		

Ada dua departemen yang tidak pasti bagi saya bagaimana menyingkat namanya, yakni Departemen Perindustrian dan Departemen Pertambangan, sedangkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri tidak memakai akronim, melainkan singkatan "P dan K". (Mengapa tidak memakai akronim Depdikbud yang rasanya lebih dinamis daripada P dan K ?

b. nama lembaga negara lainnya, misalnya :

<i>Setneg</i>	<i>Setkab</i>	<i>Setmil</i>
<i>Setdalopbang</i>	<i>Itjenbang</i>	<i>Bepeka</i>
<i>LAN</i>	<i>Bulog</i>	<i>Bakin</i>
<i>Batan</i>	<i>Bakosurtanal</i>	<i>Wanhankamnas</i>

Ada pula yang memakai singkatan, yang akan disebutkan di bawah. Dan ada pula yang tidak pernah disingkat, seperti : Rumah Tangga Kepresidenan (padahal cukup panjang), Mahkamah Agung Kejaksaan Agung (Kiranya akronim "Kejagung" lebih bersifat kelakar?), Lembaga Sendi Negara (aneh, sesungguhnya lembaga ini yang pantasnya meng-sandi-kan namanya!), Arsip Nasional.

c. nama perguruan tinggi :

<i>Unika</i>	<i>Unpad (Unpaj ?)</i>	<i>Unpar</i>
<i>Undip</i>	<i>Unair</i>	<i>Unand</i>
<i>Unsri</i>	<i>Unlam</i>	<i>Unsrat</i>
<i>Unpatti</i>	<i>Uncen</i>	<i>IKIP</i>
<i>USU</i>	<i>UISU</i>	<i>UKI</i>
<i>Unsoed</i>	<i>Unibraw</i>	<i>dan sebagainya.</i>

2. Nama jabatan

misalnya :

Menko (Polkam, Ekuin, Kesra)

(dan semua menteri) *Menneg*

Kakanwil *Sekjen*

Irjen *Wagub*

Purek *Pudek (Akad, Minlu dan Mahalum)*

AS *Karo*

Kasubdit *Kabag*

Mensesneg

Menmud

Dirjen

Kopertis

Kadit

Kaur

3. Nama diri

misalnya :

HAMKA

SUSKA

ZAKSE

4. Nama geografis

Asteng

Astim

Timteng

Afsel

Korut

Korsel

Jerbar

Jertim

Sumut

Sumbar

Sumbagsel

Jabar

Jateng

Jatim

(DKI) Jaya

Nusteng

Timtim

Kalbar

Kaltim

Kalsel

Kalteng

Sulut

Sulteng

Sulsel

Sultara

Irja

dan ada akronim yang mungkin dimulai sebagai main-main, tetapi lambat laun menjadi sungguh-sungguh seperti Otista (Oto Iskandardinata), Benhil (Bendungan Hilir), Cipijay (Cipinang Jaya), dan Rama Muda (Rawamangun Muka Dalam).

5. Nama pengertian abstrak

misalnya :

<i>Orba-Orla</i>	<i>Golkar</i>	<i>Rekornas</i>
<i>Gestapu</i>	<i>Gerpol</i>	<i>Repelita</i>
<i>Pungli</i>	<i>Hapsak (Pancasila)</i>	<i>Supersemar</i>

diartikan hari *penerangan* nasional.

6. Nama suatu perkumpulan perusahaan atau gedung, misalnya :

<i>Pramuka</i>	<i>Granadha</i>	<i>Persija</i>
<i>Persebaya</i>	<i>Persepura</i>	<i>Persib</i>
<i>Elnusa</i>	<i>Kabelindo</i>	<i>Intrana</i>
<i>Indec</i>	<i>Api</i>	<i>Masfurin</i>
<i>Persakon</i>	<i>Galsia</i>	<i>Nusvey</i>
<i>Perwari</i>	<i>Kowani</i>	<i>Persahi</i>
<i>Isei</i>	<i>Imada</i>	<i>Mapancas</i>

7. Pangkat Militer, misalnya :

<i>Letjen</i>	<i>Mayjen</i>	<i>Brigjen</i>
<i>Letkol</i>	<i>Peltu</i>	<i>Serma</i>

8. Singkatan

1. Nama Organisasi :

a. nama departemen

(Departemen) PU

(Departemen) P dan K

b. Nama lembaga negara lainnya

<i>MPR</i>	<i>DPR</i>	<i>DPA</i>
<i>BAKN</i>	<i>BKKBN</i>	<i>BPS</i>
<i>BKPM</i>	<i>BI</i>	<i>ITS</i>

2. (Bagian daripada) nama diri :

<i>Harsja W. Bachtiar</i>	<i>Boen S. Oemarjati</i>
<i>S.K. Trimurti</i>	<i>J.S. Badudu</i>
<i>Harjono MT</i>	<i>Solichin GP</i>

3. Nama geografis :

<i>AS</i>	<i>US</i>	<i>KL</i>	<i>NTB, NTT</i>
<i>RDV</i>	<i>RRC</i>	<i>PNG</i>	<i>DIY</i>

4. Gelar akademis

<i>DR</i>	<i>dr</i>	<i>IR</i>	<i>MR</i>
<i>MA</i>	<i>MSc</i>	<i>SH</i>	<i>SS</i>

5. Gelar bangsawan dan elite birokrasi

<i>GPH</i>	<i>BRM</i>	<i>KRT</i>	<i>BRA</i>
<i>PAA</i>	<i>RAA</i>	<i>RM</i>	<i>RP</i>
<i>ST</i>	<i>DT</i>	<i>T</i>	<i>TGK</i>

6. Pangkat militer

<i>Jen.</i>	<i>Laks.</i>	<i>Mars.</i>	<i>Kol.</i>	
<i>May.</i>	<i>Kpt.</i>	<i>Let.</i>	<i>Sers.</i>	<i>Kop.</i>

Untung Ruginya Memakai Akronim dan Singkatan

Dengan bahan-bahan empiris itu dapatlah kita meningkat kepada persoalan normatif, yakni apa untung-ruginya memakai akronim dan singkatan, terutama dengan melihat manfaatnya dari sudut penghematan dan ketelitian. Kesan yang dapat kita peroleh dari bahan-bahan di atas adalah bahwa penggunaan akronim dan singkatan memang ada fungsinya, baik di dalam bahasa lisan maupun di dalam bahasa tulisan. Kiranya jelas bahwa dalam bahasa lisan, akronim dan singkatan dapat menghemat waktu, sedangkan di dalam bahasa tulisan dapat menghemat tempat.

Contoh yang gampang saja akan saya ambilkan dari edaran Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia III sendiri. Pada kepala surat panitia dapat kita baca :

Sekretariat Panitia

d.a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan seterusnya.

Alangkan praktisnya singkatan *d.a.* itu daripada kata lengkapnya *dengan alamat*. Lagi pula singkatan itu tidak hanya dipakai dalam tulisan saja, melainkan juga diucapkan. Anggota panitia yang menghubungi saya pada waktu menjelaskan alamat Panitia, juga mengucapkan *d.a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Ia tidak mengatakan "*dengan alamat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Dan mengapa tidak ? Saya mengerti apa yang dimaksudkannya dengan *d.a.* itu. Menurut pengamatan dan pengalaman saya, khalayak ramai juga mempergunakan singkatan *d.a.* itu, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa jika kita mengakui bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi antarmanusia, maka selama fungsi itu dapat terlaksana, maka penggunaan akronim dan singkatan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagaimana dengan akronim dan singkatan yang dipakai oleh ABRI, yang rupa-rupanya beberapa kali dipermasalahakan oleh masyarakat? Jawaban atas pertanyaan itu harus dimulai dengan menyebutkan suatu sifat daripada bahasa. Bahasa dapat kita anggap sebagai gejala sosial. Bahasa hanya ada karena manusia yang harus bergaul. Jadi, merupakan suatu fakta sosial dan dengan demikian merupakan ungkapan daripada komuniti atau masyarakat.

Berdasarkan struktur sosiologis. Salah satu pembagian bahasa dilakukan atas dasar lapisan sosial (*stand*), *profesi*, agama, partai politik, sport, hobby, dan sebagainya (Lecoutere dan Grootaers, 19486 : 203-204). Setiap lingkungan profesi itu diperinci oleh perilaku, adat istiadat, dan kadang-kadang juga pakaian yang khas; juga mempunyai terminologi dan arti kata yang khas. Hal itu pasti berlaku pula untuk ABRI.

Di kalangan masing-masing lingkungan, terminologi, serta juga akronim dan singkatan tentunya dimengerti oleh para anggotanya. Demikianlah terminologi, akronim, dan singkatan ABRI dikenal dimengerti oleh anggota-anggota ABRI sesuai dengan tingkatannya. Bahwa pihak luar ABRI seringkali tidak mengerti artinya adalah wajar. Oleh karena itu, terminologi serta akronim

dan singkatan ABRI jika dipakai untuk komunikasi ke luar lingkungan ABRI, misalnya melalui media massa, harus diberi penjelasan atau kepanjangannya. Kecuali, tentu saja, akronim atau singkatan yang sudah dikenal oleh masyarakat seperti Menhankam/Pangab, Pangkopkamtib, dan Laksusda. Kiranya akan pedantik untuk menuliskan secara lengkap Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Pelaksana Khusus Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah.

Kalau kita memusatkan diri sejenak kepada akronim dan singkatan yang dipakai dalam lingkungan ABRI, dapat kita mengkonstatasi bahwa akronim dan singkatan itu memenuhi suatu kebutuhan. Prinsip penghematan kiranya dipenuhi, baik penghematan waktu di dalam bahasa lisan maupun penghematan tempat dalam bahasa tulisan. Contoh di atas kiranya sudah dapat memberikan kepada kita suatu bayangan bahwa akronim dan singkatan itu memenuhi suatu kebutuhan nyata dan tidak merupakan produk daripada sikap mengada-ada.

Sebuah *caption* selebar 1 kolom dalam surat kabar Angkatan Bersenjata, 25 Oktober 1978, halaman VI, kolom 2 berbunyi "Para petugas Satgas Operasi Tatib Lantas Kodya Bandung yang terdiri dari Polri Komtabes 86, Pemda Kodya Bandung, Pomgar, DLLJR, Organda, Hansip dan Banpol, sedang melakukan razia di jalan-jalan Kota Bandung (Kiri), sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan, sebahagian dari 454 buah kendaraan motor yang ditahan di Komtabes '86, Bandung. (Foto: Pendak VIII/LLB Jabar/R)."

Seperti dapat kita lihat *caption* itu banyak memakai akronim dan singkatan, yang kiranya tidak semuanya diketahui artinya oleh khalayak. Namun, penggunaan akronim dan singkatan itu bagi surat kabar yang jumlah ruangnya sangat terbatas merupakan penghematan yang berarti. Coba *caption* yang sama kita tuliskan kembali dengan memanjangkan semua akronim dan singkatan: "Para petugas Satuan-tugas Operasi Tata tertib Lalu Lintas Kotamadya Bandung yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia Komandan Kota Besar 86, Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, Polisi Militer Garnisun, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Organisasi Angkutan Daerah, Pertahanan Sipil dan Pembantu Polisi, sedang melakukan razia di jalan-jalan Kota Bandung (kiri), sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan, sebahagian dari 454 buah kendaraan motor yang ditahan di Komando Kota Besar 86, Bandung. (Foto: Penerangan Daerah Kepolisian VIII/Langlang Buana Barat/R)."
Beda panjangnya adalah 3½ baris, sedangkan tidak semua akronim dan singkatan berasal dari ABRI.

Panitia menanyakan di bidang kehidupan mana saja akronim dan singkatan banyak dipakai? Saya tidak dapat menyimpulkan. Dari 11.562 akronim dan singkatan dalam *Kamus Singkatan dan Akronim yang Dipergunakan di Indonesia* yang berasal dari ABRI ada 2029 buah. Jadi, kira-kira 20%. Lingkungan kedokteran mungkin juga banyak memakai akronim dan singkatan. Demikian pula dunia perhubungan. Hal itu mungkin terungkap dalam sidang-sidang Kongres Bahasa ini.

Apakah di luar bahasa Indonesia akronim dan singkatan juga cukup banyak dipakai? Tampaknya begitu. Tanpa melakukan penelitian secara sistematis, saya tuliskan saja di sini apa yang muncul dalam ingatan saya : nama-nama organisasi, seperti *WHO, UNICEF, FAO, ECOSOC, ILO, UNDP*; dari Perang Kemerdekaan kita masih diingat *UNCI, NEFIS, SEAC, AFNEI, AMACAB, NICA, RAPWI*; dari Zaman Hindia Belanda masih kita ingat *STOVIA, NIAS, MULO, (M)OSVIA, AMS, KNIL, NIPO, KNILM, NIROM, ANETA*, dari zaman Jepang kita ingat nama Indonesia *PETA, MIAI, MASJOEMI, POETERA*; kini kita kenal merk mobil yang merupakan singkatan nama pabriknya, yakni *FIAT* dan *DAF*; dari teknologi modern kita mendapat *radar, aircon, heli, tele*, dari proses dekolonisasi Timor Timur kita mengenai *APODETI* dan *FRETILIN*, kita juga kenal *ASEAN, Caltec, Stanvac, Qantas*, kita belum lupa *kominform* dan *Kominform*, dan kiranya masih banyak lagi.

Dari semuanya itu dapat kita simpulkan bahwa penggunaan akronim dan singkatan itu normal dan wajar, baik di Indonesia maupun di negeri-negeri lain. Penggunaannya pasti berarti penghematan, baik dilihat dari segi waktu (dalam bahasa lisan) maupun dilihat dari segi tempat (dalam bahasa tulisan). Yang perlu dijaga supaya akronim dan singkatan yang berasal dari lingkungan khusus (misalnya, lingkungan profesi tertentu) diberi penjelasan pada waktu dipakai keluar lingkungannya sendiri, terutama melalui media massa. Selama hal itu kita ingat, persoalan akronim dan singkatan bukan merupakan masalah. Malahan dapat memainkan peranan positif di dalam perkembangan bahasa Indonesia.

BAHASA INDONESIA BERBICARA
DAFTAR PUSTAKA

Vries, J.W. de. 1970. "Indonesia Abbreviation and Acronyms, *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*.

Decouters, C.P.E. & L. Grootaers. 1948⁶. *Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlands*. Leuven, Groningen, Batavia.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA PENALARAN

R. Slamet Iman Santoso

Pengantar

Jika bahasa Indonesia secara sungguh-sungguh dijadikan sarana penalaran, sebenarnya bahasa Indonesia merupakan jalan utama dan jalan satu-satunya untuk pengembangan manusia Indonesia dengan kepribadian Indonesia dan melalui kepribadian Indonesia membangun masyarakat bangsa Indonesia pula. Dalam hubungan ini, akan dibahas empat aspek bahasa (Indonesia) sebagai sarana penalaran, yaitu :

- (a) bahasa sebagai dasar pengembangan kepribadian manusia,
- (b) bahasa sebagai dasar pengembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan,
- (c) bahasa sebagai dasar kesatuan nasional, dan
- (d) bahasa sebagai dasar ketahanan negara (masalah multilingualisme).

A. *Bahasa sebagai Dasar Pengembangan Kepribadian Manusia*

Kehidupan dalam masyarakat manusia disusun oleh manusia yang menyusun masyarakat itu dan manusia itu dapat menentukan semua peraturan dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahasa merupakan jalan utama untuk pengembangan semua dasar kepribadian manusia. Melalui kepribadian manusia ini, masyarakat akan dibentuk sesuai dengan kepribadian manusianya. Perkembangan manusia didasari perkembangan perasaan (*emotional development*), perkembangan pemikiran, perkembangan perbuatan, dan perkembangan tingkah laku. Antara keempat jenis perkembangan itu ada hubungan timbal-balik, yang dalam penjelmaan terakhirnya merupakan suatu kesatuan mutlak yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yaitu kepribadian manusia.

Sekalipun demikian, jelas pula bahwa perasaan dan pemikiran menentukan perbuatan dan tingkah laku. Perbuatan dan tingkah laku disubordinasikan pada perasaan dan pemikiran.

Bahasa mempunyai hubungan timbal-balik dengan perasaan dan pemikiran. Proses timbal-balik inilah yang perlu dipergunakan untuk pengembangan perasaan, pemikiran, perbuatan, dan tingkah laku demi mengembangkan kepribadian. Pengembangan dasar kepribadian manusia melalui bahasa meliputi semua segi psikologis kepribadian, yaitu sebagai berikut.

1. Pengembangan sifat-sifat kepribadian dalam lapangan pemikiran yang identik dengan konsep-konsep, pengembangan kreativitas, pengembangan rasa, pengembangan moral dan etika, pengembangan estetika, pengembangan pergaulan sosial, dan seterusnya. Tanpa bahasa, semua pengembangan sifat itu tidaklah mungkin. Pemikiran pada khususnya adalah identik dengan bahasa, dan sebaliknya.
2. Pengembangan semua sifat psikologis dan segi pemikiran itu di atas, kemudian menguasai semua perbuatan, tingkah laku, dan tindakan-tindakan dalam kehidupan masyarakat seluruhnya.

Pengembangan kepribadian sebagaimana tertera dalam ayat (1) dan (2) di atas hanya dapat tercapai jika usaha pengembangan berlandaskan kepada ketelitian, ketekunan, kejujuran, dan disiplin mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan universitas. Setelah sistem pendidikan formal, tugas pengembangan dalam masyarakat beralih pada semua alat komunikasi sebagai media massa, seperti radio, televisi, surat kabar, dan percetakan-percetakan. Jika ketelitian, ketekunan, kejujuran, dan disiplin berkurang dalam pengembangan bahasa, kecerobohan ini akan mewujudkan sebagai degenerasi kepribadian dan disusul dengan disorganisasi kehidupan masyarakat.

Pengembangan bahasa yang diteliti, tekun, jujur, dan bersiplin menunjukkan beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut.

- a. Kebaikan menulis, membaca, dan berbicara, Menulis jelas dan berbicara baik merupakan langkah pertama dalam lapangan komunikasi sosial dan pergaulan.
- b. Ketelitian dalam ejaan, tata bahasa, komposisi ditujukan ke arah penggunaan bahasa secara singkat, jelas, dan tepat.

Membuat ringkasan yang tepat berarti melatih membedakan mana yang pokok dan mana yang tidak pokok.

- c. Pemakaian bahasa yang sopan dan santun.
- d. Keidentikan bahasa dan pemikiran secara timbal-balik diciptakan: bahasa kabur pemikiran kabur; bahasa jelas pemikiran jelas.

Tingkatan-tingkatan itu harus dibina mulai sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah lanjutan, dan terus sampai ke tingkat universitas. Rangkaian pembinaan yang panjang ini perlu jika kita memang secara sungguh-sungguh hendak membangun bahasa dan kepribadian manusia, dan tidak hanya oleh karena terkejut, atau ikut-ikutan, atau sioganistis saja.

Dalam kenyataannya selagi melaksanakan pembinaan bertahap dalam rangkaian yang panjang itu timbul soal baru dalam tiap tahapan baru, yang juga membutuhkan bahasa baru. Misalnya, karangan pada tingkat sekolah, dasar sangat berbeda dengan karangan ilmiah pada tingkat universitas. Selain itu, memang pada beberapa universitas di luar negeri bahasa masih merupakan mata pelajaran yang pemakaiannya diarahkan untuk menulis karangan ilmiah.

Rangkaian menulis-membaca mulai sekolah dasar sampai dengan tingkatan universitas dan penulisan kreatif atas sastra dapat diringkaskan sebagai berikut.

1. Huruf dan angka harus ditulis dengan baik dan teratur karena (a) penulisan baik merupakan langkah pertama dalam rangka "estetika" atau "keindahan". Sifat ceroboh dan kotor merendahkan martabat manusia; (b) tulisan yang baik mempermudah pembacaan oleh si penulis sendiri. Di samping itu, 'orang lain dengan mudah pula dapat membaca.' Dengan demikian, dalam rangka ini anak dididik untuk ingin bahwa di dunia ini ada orang lain juga, yang harus kita perlakukan dengan sopan santun; anak dididik bersikap 'mempermudah jalan untuk orang lain.' Dengan kata lain, "menulis dengan baik tidaklah hanya untuk menulis saja, melainkan merupakan latihan seketika, meletakkan dasar-dasar kesopanan dalam komunikasi dengan orang lain, dan merupakan langkah pertama dalam proses sosialisasi yang berlangsung secara teratur."
2. Huruf; melalui sistematik ejaan, putusan suku kata, disusun menjadi kata-kata; angka-angka disusun dengan rapi menjadi bilangan-bilangan yang siap untuk ditambahkurangkan, dikalikan, atau dibagi.

Di samping mendasari estetika, sopan santun, dan sosialisasi, kerapian menghindarkan kesalahan merupakan langkah pengaturan diri (*self discipline*) dan penguasaan diri (*self control*). Kata-kata dan bilangan diucap-

kan dengan jelas satu demi satu. Ucapan harus jelas supaya orang lain mudah mengerti. Hal ini merupakan langkah kedua dalam proses sosialisasi yang sopan dan santun. Sebaliknya, ucapan yang sembarangan merupakan sumber pertama perusakan sopan santun, di samping menimbulkan kesalahan-kesalahan.

3. Melalui tata bahasa, dengan bantuan tanda baca dan tanda tulis, kata-kata menjadi kalimat yang singkat, jelas, dan tepat. Bilangan disusun teratur sesuai dengan tujuan perhitungan. Kalimat-kalimat dibacakan dengan irama yang sesuai dengan tanda baca dan tanda tulis; pengucapan jelas, kata demi kata. Hal ini perlu karena :
 - a. kalimat yang singkat, jelas, dan tepat merupakan perwujudan penyusunan pemikiran yang teratur, tepat, dan jelas pula. Dengan kata lain, latihan, menyusun kalimat demikian merupakan latihan ke arah pemikiran yang sistematis (*clear and accurate thinking*);
 - b. menguasai tata bahasa berarti secara implisit melatih pemikiran analitis-sintetis, yaitu bagian dari logika. Betapa pentingnya penguasaan tata bahasa dapat digambarkan dari mitologi India. Menurut sejarah dan cerita, Panini adalah ahli pertama dalam tata bahasa. Oleh karena tata bahasa dikuasainya, ia selalu menang dalam diskusi bahkan para dewa dikalahkannya.

Pengaturan pemikiran dan perasaan merupakan langkah pertama dalam pengaturan perbuatan dan tingkah laku. Persesuaian antara bahasa dan pemikiran di satu pihak, dan perbuatan serta tingkah laku di lain pihak merupakan indikator kepribadian seseorang; jika antara bahasa dan tindakan ada hubungan yang konsisten, maka orang itu jujur; jika bahasa dan tindakan sopan, maka orang itu sopan pula. Dengan kata lain, "bahasa merupakan alat untuk menilai integritas kepribadian." Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan bahasa merupakan jalan utama untuk menyusun estetika, sopan santun, ketelitian, tata tertib, analisis, sintesis, pemikiran yang jelas serta sistematis, dan kejujuran; kesemuanya itu merupakan bagian dari integritas kepribadian. Tanpa pendidikan bahasa, integritas kepribadian tidak dapat tersusun, dan kata *kepribadian* merupakan hanya suatu perkataan yang hampa.

Jelas pula dari uraian di atas bahwa pendidikan bahasa merupakan usaha yang sangat fundamental. Dari rangkaian tahapan di atas semua menjadi jelas bahwa pengembangan bahasa dan pengembangan kepribadian merupakan kesatuan manunggal dilihat dari sudut bahasa berarti mengembangkan bahasa

sendiri; dilihat dari hasilnya ia mengembangkan kepribadian manusia si pemakai bahasa itu.

Pendidikan bahasa dalam masing-masing tahap pembinaan itu merupakan tugas dalam persekolahan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan universitas. Hanya saja pada tingkatan universitas soal bahasa dalam tingkat ilmu pengetahuan perlu mendapat perhatian khusus, yaitu bentuk yang dapat disebut dengan beberapa istilah, di antaranya *descriptive language, propositional and categorical language*. Ciri khas bahasa demikian adalah bahwa apa yang dinyatakan dalam bahasa dapat diuji benar-tidaknya dalam konteks ilmu pengetahuan yang dicakupnya.

B. Bahasa sebagai Dasar Pengembangan Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan

Di samping soal umum seperti ditulis dalam bagian A di atas, dalam rangka pengetahuan (*knowledge*) dan ilmu pengetahuan (*science*) ada soal yang perlu diperhatikan secara khusus jika pengembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat yang sebenarnya. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan mempunyai ciri khas dapat dibuktikan benar atau salah, disamping harus jelas dan tepat. Jadi, kalimat dan bahasa harus sedemikian rupa sehingga atas dasar bahasa itu dapat diusahakan pengujian untuk menetapkan salah satu benarnya persoalan. Untuk membuka kemungkinan pengujian benar atau salah, bahasa harus memenuhi beberapa sifat sebagai berikut.

1. Bahasa bersifat kategorial, yaitu menyatakan persoalan secara eksplisit dan hanya mempunyai satu tafsiran. Jika ada beberapa kemungkinan, pun kemungkinan itu harus dinyatakan secara eksplisit.
2. Antara semua bagian perlu jelas dan hubungan yang logis atau masuk akal. Soal terakhir ini merupakan soal komposisi. Bahasa demikian disebut dengan beberapa nama, di antaranya *descriptive language, propositional language*. Bentuk ekstrim dalam rangka bahasa ini adalah kalimat yang bersifat *categorical-propositional*; dan bentuk inilah yang menjadi bahan untuk ilmu logika pada khususnya.
3. Bagian khusus bahasa untuk pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah menganalisis perkataan dan konsep-sensep teknis sedemikian rupa sehingga artinya pasti agar konsekuensi dan pelaksanaan jelas dan tidak kacau. Hal ini terutama sekali penting dalam lapangan perundang-undang-

an. Banyak sekali kekacauan terjadi jika konsep-konsep dianggap sudah dimengerti atas dasar pengertian sehari-harinya. Menganalisis konsep-konsep ini merupakan bagian dari kegiatan *semantical analysis*, yang sebenarnya sudah dimulai oleh Socrates pada zaman Yunani kuno.

C. Bahasa sebagai Dasar Kesatuan Nasional

Sekalipun sudah terkenal bahwa bangsa Indonesia terdiri dari puluhan suku bangsa, tetapi berkat kurnia Tuhan kita mempunyai satu bahasa nasional tanpa pertikaian apa pun. Pada suatu konferensi internasional saya dapat berkata : *"We have one national language that has been accepted by every ethnological group without any pressure. Every ethnological group voluntarily sacrificed part of their language identity to contribute towards the development of the Indonesian national language. Even the largest group, the Javanese, did so without any resistance."*

Langkah pertama mempersatukan bangsa melalui bahasa Indonesia telah terlaksana. Menjadi tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk meneruskan perkembangan bahasa lebih luas dan mendalam supaya benar semua lapisan dapat mempergunakan bahasa nasional ini.

Sayang sekali kita menghadapi Pemerintah yang kurang menyadari kurnia Tuhan tadi, yang telah memberikan kepada bangsa Indonesia suatu bahasa sebagai alat komunikasi dan dasar kesatuan. Sekalipun Pemerintah membiayai pengembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi secara konsekuen dan kontradiksional Pemerintah sendiri pulalah-melalui Departemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat -- berusaha melumpuhkan alat komunikasi itu. Dan usaha yang sangat kontroversial ini ditiru oleh media massa. Sikap demikian memang dapat dimengerti sebab generasi sekarang tidak pernah mengalami perjuangan menegakkan bahasa Indonesia seperti halnya kita dari angkatan sebelum 1942.

Generasi sekarang "menemukan" bahasa Indonesia sehingga mereka tidak dapat merasakan kurnia Tuhan sedalam angkatan 1900-1942. Oleh karena itu, secara resmi diusahakan pengebirian bahasa Indonesia dengan menyusun singkatan-singkatan--untuk menyebutkan satu contoh saja--sehingga setelah beberapa lama orang tidak lagi mengetahui asli dan asalnya singkatan itu. Dengan demikian, secara resmi pula dicapai usaha mereduksi daya alat komunikasi dan membodohkan bangsa.

Jika singkatan hanya dipakai dalam rangka kedinasan, memang soal itu selayaknya. Akan tetapi, kalau singkatan masuk ke dalam bahasa sehari-hari, pidato-pidato resmi, pengumuman resmi, dan kemudian dalam media massa, maka peristiwa demikian merusak perkembangan bahasa Indonesia. Lambat-laun aslinya dan asal mulanya tidak akan diketahui lagi.

Apakah dengan mempergunakan singkatan dalam pengumuman resmi dan pidato-pidato pejabat tinggi bukan justru merendahkan wibawa Pemerintah sendiri? Misalnya, *Rantap*, *Inpres*, dan *Permen*, yang aslinya adalah *Rancangan Ketetapan*, *Instruksi Presiden*, *Peraturan Menteri*; tidaklah itu justru mengebiri wibawa lembaga atau orang yang diwakilinya atau, bahkan yang menetapkan peraturannya? Apakah salah kalau dalam pidato-pidato, pengumuman, dan seterusnya dipakai bahasa yang selengkapnya? Apakah kurang berwibawa, kurang resmi, kalau aslinya yang diucapkan? Ataukah perlu bahasa Indonesia dikebiri dahulu supaya dapat dimengerti ?

D. Bahasa sebagai Dasar Ketahanan Negara (Masalah Multilingualisme)

Negara dan bangsa Indonesia letaknya dari zaman purba hingga sekarang di jalan raya semua bangsa dan selalu merupakan daerah perebutan pengaruh. Apalagi pada zaman sekarang ini, dunia dikuasai oleh perusahaan multinasional dan *superpowers*. Luas daerah kita adalah seluas Eropa dan terdiri dari kira-kira empat belas ribu kepulauan. Oleh karena itu, sukar sekali dapat dijaga keamanannya, dan dapat dimasuki orang asing dengan mudah sekali tanpa dapat kita ketahui. Dengan masuknya orang asing, mereka membawa pula kebudayaan mereka sehingga terjadi pertukaran unsur-unsur adat kebiasaan. Dalam rangka pertukaran kebudayaan ini, bahasa mempunyai fungsi sentral yang terpenting. Demikian pula dalam perdagangan, organisasi sosial, dan lain segi kebudayaan: bahasa mempunyai fungsi sentral untuk komunikasi, diskusi, dan sebagainya.

Kalau kita tidak menguasai bahasa mereka, kita tidak dapat mengetahui apa yang mereka simpan dalam pemikiran dan hati mereka. Oleh karena bangsa ini dapat masuk sampai pedalaman, pengaruh itu semua tidak dapat dilokalisasi di kota-kota saja. Dengan jelas bahwa bahasa asing bukan sekedar soal "akademis" yang hanya dipelihara pada tingkat universitas saja, melainkan soal yang penting dalam kehidupan masyarakat seluruhnya. Masalah ba-

hasa asing di Indonesia merupakan masalah "sosial" untuk melindungi seluruh rakyat kita misalnya, dalam perdagangan, jual beli. Misalnya, bila kita

dapat berbahasa Cina, dan kita belanja, kita dapat mengetahui harga sebenarnya dan selalu menjadi lebih murah. Demikian pula untuk mempelajari ilmu pengetahuan, jauh lebih bermanfaat kalau kita menguasai bahasa asing. Mengenai bahasa asing pun membuka cakrawala pengetahuan dengan luas sekali: kita dapat memaca sejarah bangsa lain, pengetahuan mana dapat kita pergunakan untuk menangkis prasangka mereka. Apalagi kalau mereka merencanakan subversi. Tanpa menguasai bahasa mereka, pembongkaran subversi tidak mungkin.

Sebenarnya bangsa Indonesia mampu menerima dan mempelajari bahasa asing. Hal ini jelas sebelum 1942. Sebelum masa itu, lulusan sekolah menengah pertama menguasai bahasa Belanda dan bahasa Inggris, di samping bahasa daerah dan bahasa Indonesia, yang pada tahun 1921 mulai diajarkan di sekolah menengah pertama. Lulusan sekolah menengah atas dan HBS menguasai bahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis. Jadi, soal kemampuan bukan soal lagi. Bilamana bahasa asing berdasarkan *political decision* diajarkan di Indonesia dan dimulai pada tingkat sekolah menengah pertama, pendidikannya dapat dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga bahasa Inggris menjadi wajib, ditambah dengan salah satu bahasa asing, dan demikian seterusnya sampai tingkat universitas. Bahasa yang saya anggap sangat mendesak untuk ditangani adalah bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, dan bahasa Rusia, bahasa lainnya kemudian menyusul.

Negara yang menyadari kepentingan bahasa asing dalam abad kedua puluh ini, oleh karena bahasa merupakan *the golden road* dalam mengajar ilmu pengetahuan, menanggulangi subversi, dan lain-lain proses sosial adalah negara Cina. Sekalipun bangsa ini umumnya sudah lebih dari empat ribu tahun sebagai bangsa dan sudah mempunyai kesadaran nasional yang membaja serta mengikuti aliran *marxisme*, tetapi mereka menyadari bahaya *chauvinisme* bahasa. Berdasarkan kesadaran ini, mereka telah mengambil keputusan mengajarkan bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Rusia mulai pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan lain-lain. Kita, di Indonesia, sekalipun sudah mempunyai kira-kira enam juta bangsa Cina dan keturunannya masih belum secara serius menganggap bahasa Cina sebagai masalah akademis, apalagi masalah sosial (*social problem*).

STRUKTUR BAHASA SEBAGAI CERMIN PANDANGAN HIDUP

E.K.M. Masinambow

LEKNAS-LIPI

Pengantar

Untuk keperluan pembuatan karangan ini Panitia Kongres Bahasa Indonesia III telah meminta kepada saya agar karangan itu dapat menjawab lima pertanyaan sebagai berikut : (1) Berapa jauh bahasa dan kebudayaan berpengaruh timbal-balik? Pengaruh manakah agaknya yang lebih kuat? (2) Apakah mutu pemakaian bahasa Indonesia dipengaruhi oleh mutu kehidupan orang Indonesia? (3) Dapatkah usaha pemodernan bahasa mempengaruhi corak berpikir anggota masyarakat? (4) Adakah pola semantik yang khas dalam bahasa Indonesia ? Dapatkah diberikan deskripsi, meskipun sementara sifatnya ? (5) Apakah pola berpikir itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak manusia Indonesia ?

Kelima pertanyaan ini mencakup daerah permasalahan yang luas sekali, tetapi dapat disederhanakan ke dalam pokok-pokok persoalan berikut.

Jikalau antara bahasa dan kebudayaan terdapat saling ketergantungan satu dengan yang lain, apakah ketergantungan itu lebih berat kepada bahasa atau lebih berat kepada kebudayaan? Dengan kata lain, apakah arah pengaruh lebih banyak berasal dari pihak kebudayaan atau lebih banyak berasal dari pihak bahasa? Apabila pokok persoalan tadi dapat diselesaikan, hal ini akan berlaku pula bagi bahasa Indonesia? Dengan demikian, persoalan pokok di atas hendak kami dekati dengan membagi pembahasan di bawah ini menurut tiga kelompok persoalan, yaitu (1) hubungan timbal-balik antara bahasa dan kebudayaan, (2) bahasa dan soal makna, dan (3) bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia.

Suatu pembahasan tentang persoalan-persoalan itu dengan sendirinya akan lebih banyak bersifat teoritis karena boleh dikatakan bahwa penelitian menurut kerangka persoalan itu belum banyak dilakukan di Indonesia, atau jikalau ada hanya dilakukan dari sudut pendekatan satu disiplin saja (umumnya ilmu linguistik), sedangkan kerangka persoalan itu memerlukan pendekatan antar disiplin.

Bahasa dan Kebudayaan

Dalam teori dan praktik ilmu linguistik, bahasa sebagai objek penelitian dianggap sebagai suatu sistem yang otonom, yang berdiri sendiri dengan ciri dan aturannya yang tersendiri. Perlakuan bahasa seperti ini menghasilkan suatu gambaran bahwa bahasa itu memang terwujud sebagai sesuatu dengan kehidupan sendiri yang tunduk kepada hukum-hukum sendiri. Gambaran ini diperkuat lebih lanjut oleh kenyataan bahwa bahasa dapat dikongretkan dalam bentuk tulisan di atas kertas sehingga berada di luar penuturnya atau di luar kerangka interaksi sosial. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari bahasa memperoleh kemungkinan untuk berkembang ke arah yang berlainan dengan ilmu-ilmu yang mempelajari segi-segi bukan bahasa. Namun, anggapan bahwa bahasa itu adalah suatu fenomena kebudayaan juga tidak pernah diingkari orang, tetapi dipertahankan sebagai suatu kebenaran.

Oleh karena antara bahasa dan kebudayaan pada satu pihak dianggap terdapat semacam oposisi dan pada pihak yang lain bahasa itu adalah suatu peristiwa kebudayaan pula, timbullah persoalan bagaimana sebenarnya harus digambarkan pertalian antara bahasa dan kebudayaan itu. Keragu-raguan akan bentuk dan sifat pertalian itu tercermin pada ungkapan-ungkapan dan masyarakat, "bahasa sebagai aspek kebudayaan", "bahasa dan aspek-aspek lain dari kebudayaan", "bahasa sebagai pendukung kebudayaan", atau sebaliknya, "kebudayaan sebagai pendukung bahasa", "bahasa sebagai cermin kebudayaan", dan lain-lain. Bagaimana persisnya jenis-jenis pertalian itu harus dipahami atau diartikan berbeda menurut disiplin yang bersangkutan. Jadi, dari sudut penglihatan ilmu linguistik pertalian itu lebih banyak mengenai komponen semantik, yaitu pola yang tampak pada makna kata-kata, hubungan antara kata dan benda dan kejadian yang seakan-akan berada di luar bahasa, sedangkan dari sudut penglihatan antropologi pertalian itu ditentukan atas dasar anggapan bahwa bahasa itu merupakan suatu pranata sebagaimana halnya sistem kekerabatan, misalnya, merupakan suatu pranata pula. Setelah kedudukan bahasa diberikan batasan sedemikian rupa, baik ilmu linguistik maupun antropologi lebih banyak menyibukkan diri dengan

persoalan-persoalan yang menurut anggapannya masing-masing merupakan tugas pokok utama, yaitu struktur intern bahasa dan struktur sosial budaya suatu komunitas.

Teori-teori yang telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya bentuk dan sifat pertalian antara bahasa dan kebudayaan itu dapatlah digolongkan menurut dua golongan berikut.

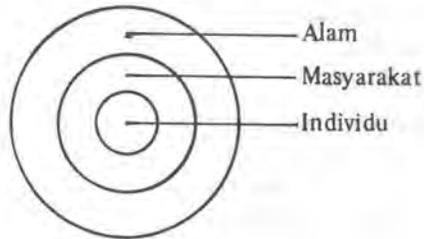
1. Teori yang berpangkal tolak pada bahasa :
 - a. pola struktural yang ditemukan dalam bahasa dianggap berlaku pula bagi aspek-aspek kebudayaan lainnya (Pike, 1960; Levi-Strauss, 1964) dan
 - b. bahasa dianggap sebagai penentu utama pertaliannya dengan kebudayaan (Hipotesis Sapir-Whorf).
2. Teori yang berpangkal tolak pada kebudayaan. Dalam hubungan ini, pertaliannya dilihat sebagai konfigurasi faktor-faktor sosial budaya yang memberikan corak terhadap kedudukan, peranan, dan penggunaan bahasa.

Jikalau kita hendak memperoleh pengertian tentang bahasa menurut kerangka kedua jenis teori tertera di atas, gambarnya ialah bahwa pada suatu pihak bahasa diartikan sebagai suatu sistem yang meletakkan hubungan tetap dengan hal-hal di luar bahasa: dengan alam pikiran dan alam perasaan manusia dan dengan benda, pertalian dan kejadian di luar diri manusia. Hubungan semacam ini digambarkan sebagai bersifat statis dan tetap. Pada pihak lain, bahasa itu diartikan sebagai suatu sistem yang melibatkan diri di dalam dinamika interaksi sosial. Pertalian yang tetap dengan hal-hal di luar bahasa dan keterlibatannya di dalam interaksi sosial adalah dua segi yang hendak kami bahas secara lebih terperinci di bawah ini. Untuk memperoleh gambaran yang seksama tentang kedudukan bahasa di dalam kebudayaan atau sebagai salah satu aspek kebudayaan, terlebih dahulu hendak kami uraikan apakah kebudayaan itu dan aspek-aspek apa saja yang diperlihatkan oleh kebudayaan.

Kebudayaan dan Komponen-komponennya

Di dalam bukunya Kroeber & Kluckhohn (1963) telah mengumpulkan 164 definisi tentang kebudayaan yang berbeda menurut cara merumuskan dan segi-segi yang ditekankan. Namun, yang jelas bersamaan ialah bahwa keseluruhan dari kebudayaan dapat dipecahkan ke dalam tiga komponen

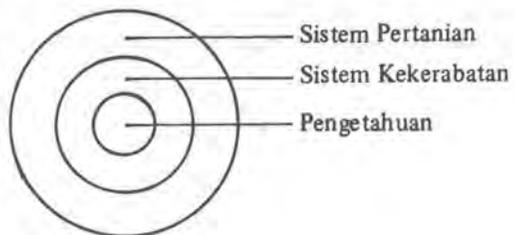
utama sesuai dengan hubungan timbal-baliknya dengan tiga "lingkungan pengalaman", yaitu (1) individu, (2) masyarakat, dan (3) alam; atau alam pemikiran dan perasaan hubungan antara manusia, dan hubungan manusia dengan dunia biofisika. Lingkungan pengalaman itu dapat digambarkan sebagai lingkungan yang dibatasi oleh tiga lingkaran konsentris (Gambar 1)



Gambar 1

Lingkungan Pengalaman

Oleh karena antara ketiga lingkungan pengalaman itu terdapat hubungan timbal-balik yang erat dengan kebudayaan, maka kebudayaan itu sendiri dapat digambarkan sebagai terdiri dari sejumlah lingkaran konsentris yang membatasi komponen-komponen kebudayaan yang berkaitan dengan lingkungan-lingkungan itu. Misalnya, dengan individu (Lingkaran dalam I) dapat dihubungkan "pengetahuan" sebagai salah satu aspek kebudayaan dengan masyarakat (Lingkaran II) dapat dihubungkan "sistem kekerabatan", dan dengan alam (Lingkaran luar III) dapat dihubungkan "sistem pertanian". (Lihat Gambar 2)



Gambar 2

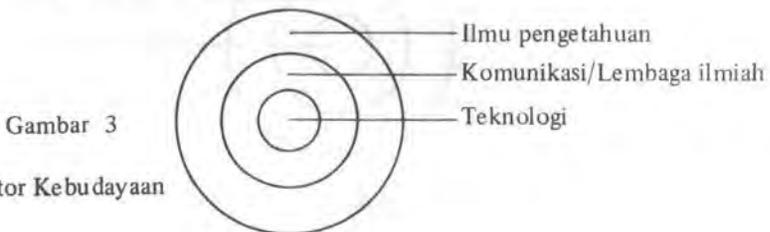
Kebudayaan

Suatu enumerasi yang lebih lengkap dari hal-hal yang termasuk dalam ketiga lingkaran itu adalah sebagai berikut.

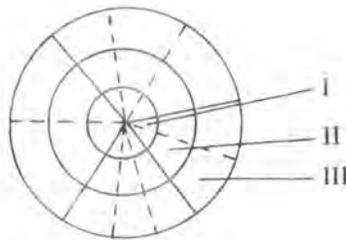
Kebudayaan

- I. Religi;
Filsafat;
Ilmu Pengetahuan;
Kesenian;
dan lain-lain.
- II. Organisasi sosial :
 - a. sistem kekerabatan;
 - b. organisasi keagamaan;
 - c. organisasi politik;
 - d. dan lain-lain;
 Kehidupan sosial;
Ekonomi;
dan lain-lain.
- III. Teknologi : artefak, perumahan, alat-alat;
Pertanian;
Perburuan;
Perikanan;
dan lain-lain.

Daftar di atas dapat diperinci lebih lanjut untuk masing-masing lingkungan pengalaman sesuai dengan adanya spesialisasi lebih lanjut. Tentu saja antara ketiga lingkungan pengalaman itu terdapat jalinan hubungan yang sangat erat, dalam arti bahwa perubahan di dalam salah satu lingkungan pengalaman berarti pula perubahan dalam kedua lingkungan pengalaman lainnya. Jalinan hubungan itu dapatlah digambarkan sebagai berikut.



Sektor yang dibatasi oleh kedua jari-jari ketiga lingkaran pada Gambar 3 menunjukkan jalinan hubungan suatu segi kebudayaan menurut ketiga lingkungan pengalaman. Misalnya, "ilmu pengetahuan" pada Lingkaran I mempunyai hubungan dengan "komuniti ilmuwan" atau "lembaga-lembaga ilmiah" pada Lingkaran II dan "Teknologi" pada Lingkaran III; "konsep tentang hubungan kekerabatan" pada Lingkaran I, terwujud sebagai "struktur kekerabatan" atau "cara berkelakuan dalam pergaulan antarkerabat" pada Lingkaran II, dan sebagai "benda-benda yang berfungsi sebagai lambang hubungan kekerabatan seperti: rumah adat, mas kawin, dan tolem". Dengan demikian, ketiga lingkaran itu dapat dibagi menurut sejumlah sektor sesuai dengan jumlah aspek kebudayaan yang ada. Lebih jauh suatu kebudayaan berkembang, lebih banyak pula jumlah sektor yang harus dibedakan dalam ketiga lingkaran itu (Gambar 4). Di dalam masyarakat industrial yang maju dengan sendirinya sektor teknologi pada Lingkaran III memperlihatkan diferensiasi yang besar, yang tercermin pula pada komponen kemasyarakatan pada Lingkaran VI dan pada ilmu pengetahuan pada Lingkaran I.



Gambar 4
Diferensiasi dalam Kebudayaan

Untuk keperluan pembahasan, ketiga lingkaran konsentris sebagai suatu model kebudayaan akan dipakai menjelaskan hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Oleh karena bahasa erat berhubungan dengan proses pemikiran dan perasaan, tetapi berfungsi pula sebagai wahan komunikasi antaramanusia, maka kami tambah satu lingkaran lagi di antara I dan II (Gambar 5).



Gambar 5

Kedudukan Bahasa dalam Kebudayaan

Bahasa sebagai Komponen Kebudayaan

Posisi bahasa sebagai Lingkaran A di antara Lingkaran I dan II menggambarkan keterlibatannya di dalam proses-proses kognitif dan emosional, baik yang terjadi dalam diri manusia maupun di dalam interaksi antara manusia dan alam.

Jikalau kita meninjau hubungan timbal-balik antara bahasa dan ketiga komponen kebudayaan, maka hubungan itu dapatlah diungkapkan menurut dua arah pengaruh, yaitu yang berasal dari komponen subjektif (Lingkaran pusat : I), dan yang berasal dari komponen material (Lingkaran luar : III). Apabila arah pengaruh semata-mata berasal dari lingkaran pusat, secara teoritis hal ini berarti bahwa bahasa secara murni dibentuk oleh proses pemikiran dan perasaan, sedangkan apabila arah pengaruh berasal semata-mata dari lingkaran luar, maka bahasa secara murni terbentuk sebagai akibat interaksi manusia dengan alam, dan antara manusia dengan manusia.

Meskipun kita ketahui bahwa pengalaman manusia dengan kenyataan empiris segera terjadi pada saat kelahirannya, tetapi tidaklah teramati bahwa bahasa berkembang sebagai akibat pengalaman itu. Kenyataan yang memang dapat diamati ialah bahwa bahasa berkembang dalam diri individu sebagai akibat pengalamannya dengan suatu bahasa yang sudah ada sebelum ia dilahirkan. Melalui bahasa yang sudah tersedia manusia selama masa pertumbuh-

annya diajar untuk mengadakan perbedaan dan pertalian, baik pada lingkungan alamnya maupun pada lingkungan sosialnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa sedikit-sedikitnya dalam masa pertumbuhan manusia kearah kedewasaan arah pengaruh terhadap alam pikiran dan perasaan berasal dari bahasa dengan akibat bahwa persepsi manusia terhadap dunia luar terbentuk oleh pengaruh itu. Namun, apabila manusia mencapai kedewasaan ia juga mampu berpikir dan bertindak secara kreatif, yang berarti bahwa ia mampu mengadakan perubahan pada bahasanya atau pada lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Hal ini juga berarti bahwa perubahan pada lingkungan alamnya dan pada lingkungan sosialnya yang terjadi di luar campur tangannya dapatlah ditampung olehnya melalui penyesuaian pada kebudayaan materialnya atau teknologi, pada struktur sosialnya, pada bahasanya, dan pada cara berpikirnya.

Kalau kita tinjau kini bahasa menurut suatu sektor dari kebudayaan katakanlah saja "ilmu pengetahuan dan teknologi" (Gambar 6), maka hubungan bahasa dengan ketiga komponen kebudayaan lainnya tergambar sebagai berikut.



Bahasa ilmiah terbentuk untuk menampung konsepsi dan cara berpikir yang khas bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa ilmiah itu khusus digunakan dalam masyarakat ilmuwan. Sebagai warisan generasi sebelumnya, maka teori, praktik, dan metodologi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang terungkap dalam bahasa ilmiah mempengaruhi proses pemikiran manusia.

Sebaliknya, *lavensi*, *inovasi*, *gagasan-gagasan baru* dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai pengaruh langsung pada bahasa ilmiah. Bagi sektor kebudayaan lainnya hubungan yang serupa berlaku pula. Namun, jikalau suatu sektor kebudayaan bersifat tradisional dan konservatif seperti umpamanya religi, maka bahasa yang bersangkutan di mana terungkap konsepsi dan upacara dari religi itu hanya berpengaruh pada alam pikiran dalam arti historisnya, yaitu sebagai warisan turun-temurun orang harus menyesuaikan pada hal-hal yang diturunkan itu. Perubahan, baik konsepsi, ritual maupun pada benda-benda sakral tidaklah dimungkinkan sehingga tercermin pula pada bahasa yang tetap mempertahankan sifat dan bentuknya dari satu generasi ke generasi yang lain; sebaliknya, terhadap bahasa sedikit kemungkinan untuk mengadakan perubahan yang dapat menimbulkan pola pemikiran yang lain, pelaksanaan ritual yang berbeda atau penggunaan benda-benda berbeda sebagai lambang sakral. Dengan soal pewarisan ini kita tiba pada soal perbedaan antara modern dan tradisional dan hubungannya dengan masalah pemodernan bahasa.

Bahasa Modern dan Pemodernan Bahasa

Istilah "modern" biasanya dipertentangkan dengan istilah "tradisional". Bagi banyak orang istilah pertama diasosiasikan dengan "maju", sedangkan istilah kedua dengan "terbelakang". Dalam hal ini yang diambil sebagai model adalah "masyarakat industrial" yang dipertentangkan dengan "masyarakat nonindustrial" atau "masyarakat ilmiah", dan "masyarakat pra-ilmiah". Jelaslah bahwa ciri-ciri yang membedakan kedua jenis masyarakat adalah kemajuan yang luar biasa di dalam mengendalikan alam dan berbarengan dengan itu adanya kemajuan yang luar biasa pula pada ilmu pengetahuan. Kemajuan yang luar biasa itu juga tercermin di dalam masyarakat di mana berkembang organisasi-organisasi yang kompleks dengan tujuan menampung kebutuhan dan tuntutan yang baru sebagai akibat kemajuan-kemajuan itu tadi. Sementara itu, berkembang pula suatu orientasi mental atau suatu corak bersifat yang cocok dengan kemajuan-kemajuan itu dan dengan kebutuhan dan tuntutan yang baru itu. Lalu orientasi mental itu sendiri berpengaruh pula pada cara orang bertindak di dalam masyarakat. (Untuk pembahasan yang terperinci tentang perbedaan antara cara bersifat "modern" dengan "tradisional" (Lihat Horton & Finnegan, 1973). Dengan demikian, suatu "bahasa modern" berarti bahwa bahasa itu sanggup menampung kemajuan-kemajuan beserta kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang timbul karenanya. Sebaliknya, suatu bahasa yang "tidak modern" tidak atau belum sanggup

mengadakan penampungan itu. Marilah kita tinjau bagaimana mekanisme penampungan itu.

Sebagai akibat kemajuan dalam sektor teknologi dan ilmu pengetahuan dua komponen kebudayaan dalam sektor itu mengalami perluasan melalui spesialisasi peralatan di dalam berbagai bidang kegiatan seperti pertanian, eksplotasi sumber-sumber alam, sarana perhubungan, dan pengolahan makanan; dan melalui pengembangan teori serta penemuan-penemuan baru. Perluasan ini terjadi pula melalui spesialisasi di dalam peran dan hubungan peran, di dalam jenis pekerjaan dan tugas, dan di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk bahasa keperluan itu berarti adanya benda-benda, alat-alat, perbedaan-perbedaan, kegiatan-kegiatan, dan hubungan-hubungan yang tidak lagi terungkap oleh unsur-unsur bahasa. Cara-cara yang ditempuh untuk mengisi kekosongan itu ialah : (1) menggunakan unsur-unsur yang sudah di dalam bahasa, misalnya, redefinisi makna : *kala* "waktu" menjadi "bentuk gramatikal yang menyatakan waktu"; penggunaan unsur-unsur gramatikal: *bangun* "bangkit", "pembangunan" untuk *development*; "salah urus" untuk *mismanagement*, (2) Adopsi dan adaptasi bentuk-bentuk asing, misalnya, *atom*, *reduksi*, *universitas*, *sistem*, di bahasa-bahasa Barat, yang menjadi sumber istilah baru untuk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahasa Latin dan Yunani.

Jelaslah bahwa dalam hal ini pengaruh terhadap bahasa berasal dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, segera sesudah konsep dan makna baru itu diterima di dalam bahasa, maka cara berpikir kita mengalami perubahan oleh karena harus memperhitungkan konsep dan makna baru itu sebagaimana kini telah terungkap di dalam bahasa. Misalnya, observasi bahwa di langit malam *tampak bulan dan bintang-bintang* demi keseksamaan harus diubah menjadi *tampak bulan, bintang-bintang, dan planet-planet*. Dengan demikian, pemodernan bahasa tidak lain daripada penyesuaian bahasa terhadap perubahan-perubahan lingkungan kehidupan kita sebagai akibat perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mutu Kehidupan dan Mutu Pemakaian Bahasa

Kita semua mengetahui bahwa perbaikan mutu kehidupan sedikit banyak disebabkan oleh kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbaikan kesehatan jasmani dan kesehatan lingkungan terjadi oleh kemajuan dalam ilmu kedokteran; penyediaan bahan makanan yang cukup dan bergizi disebabkan oleh kemajuan dalam ilmu pertanian serta teknologi ma-

kanan. Perbaikan jasa-jasa dan peralatan, semuanya ini banyak bergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu prasyarat penting agar semuanya itu dapat tercapai ialah adanya orientasi yang sesuai di dalam pandangan hidup masyarakat sehingga tindakan dan usaha ke arah perbaikan mutu kehidupan itu akan terwujud oleh karena selaras dengan pandangan hidup itu. Adalah sangat sukar menentukan, seandainya tercapai suatu tingkat mutu kehidupan tertentu, bahwa keadaan itu mempengaruhi pula mutu penggunaan bahasa. Fungsi bahasa di dalam masyarakat adalah komunikasi antarmanusia. Melalui bahasa para anggota masyarakat mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jikalau yang dimaksudkan dengan mutu pemakaian bahasa efektivitas dalam komunikasi, dalam penyampaian pesan untuk menggerakkan orang mengambil tindakan tertentu, maka jelaslah bahwa mutu kehidupan yang baik hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang baik sebagai akibat efektivitas pemakaian bahasa sebagai alat komunikasi. Sebaliknya, jikalau yang dimaksudkan dengan mutu pemakaian bahasa, kemampuannya untuk mengungkapkan semua aspek kebudayaan tanpa kecuali, maka bahasa dalam hal ini merupakan pencerminan dari kebudayaan itu sebagai hasil proses penyesuaian yang sempurna. Dalam arti ini sajalah dapat dikatakan bahwa pemakaian bahasa dipengaruhi oleh mutu kehidupan, terserah apa mutu kehidupan itu rendah atau tinggi, tradisional atau modern.

Makna dan Struktur Bahasa

Efektivitas komunikatif bahasa sebagian besar ditentukan oleh pola semantik bahasa, yaitu makna referensial dan makna gramatikal. Makna referensial meletakkan hubungan antara kata atau bentuk bahasa dengan dunia di luar bahasa (kognitif, sosial, atau fisik). Jadi, *sedih* berhubungan dengan suatu jenis emosi, *sadar* berhubungan dengan suatu keadaan mental, *ibu* berhubungan dengan suatu hubungan kekerabatan, *sendok* berhubungan dengan sejenis alat, dan *pohon* berhubungan dengan suatu benda dalam alam. Awalan *di-* dalam *dipukul*, *maka*, *tetapi*, dan lain-lain mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal mempertalikan bentuk-bentuk di dalam kalimat sehingga membentuk makna yang terpadu. Misalnya, awalan *di-* 'pasif' menyatakan pertalian yang berbeda dengan yang dinyatakan oleh awalan *me-* 'aktif': *Orang itu menembak* berbeda dengan *Orang itu ditembak*. Makna referensial mempertalikan bahasa dengan kenyataan biofisika serta psikologis dan menggolongkan kenyataan itu menurut orientasi kebudayaan; makna referensial juga menggolongkan isi dari ketiga komponen kebudayaan itu sendiri. Misal-

nya, dalam realitas biofisika, bahasa Indonesia menggolongkan buah dari tanaman *Oryza sativa* ke dalam *padi*, *beras*, dan *nasi*; dalam realitas psikologis kita ketahui adanya perasaan *sedih*, *gembira*, *marah*, dan lain-lain; isi kebudayaan terungkap antara lain melalui kata-kata : *pondok*, *gedung*, *bajak*, *pacul*; *ipar*, *ibu*, *ayah*, *paman*, *salah*, *benar*; *abstraksi*, dan *kongkret*. Dengan demikian, makna gramatikal berfungsi di dalam struktur bahasa, sedangkan makna referensial menghubungkan struktur intern bahasa dengan hal-hal di luar bahasa (bandingkan Hockett 1963:137-139). Hal ini berarti bahwa antara dua bahasa yang berbeda struktur internnya, akan terdapat pula perbedaan dalam pola makna gramatikalnya. Dalam hal perbedaan pola makna referensial antara dua bahasa, hal ini erat berhubungan dengan adanya perbedaan kebudayaan apabila makna referensial itu menyangkut isi kebudayaan; dan dengan orientasi kebudayaan, apabila makna referensial itu menyangkut realitas biofisik dan psikologis. Misalnya, kata *pendopo* sebagai 'ruangan menerima tamu' tidaklah sama maknanya dengan *lobby* atau *antechamber* yang juga berfungsi sebagai ruangan menerima tamu karena merupakan produk kebudayaan material yang berbeda. Kata *mamak* dalam bahasa Minangkabau mempunyai makna berbeda dengan kata *uncle* dalam bahasa Inggris karena masing-masing mengacu pada jaringan hubungan kekerabatan yang berbeda. Antara *sakit hati* dalam bahasa Indonesia dan *hartzeer* 'hati perih' ('sakit hati') dalam bahasa Belanda terdapat perbedaan makna karena yang pertama bersumber pada anggapan bahwa locus perasaan itu berada dalam 'hati', sedangkan yang kedua berada dalam 'jantung'. Bahwa kini kedua ungkapan itu memiliki makna yang sama ialah karena pengetahuan kita tentang apa yang dirasakan manusia tidak lagi menempatkan perasaan 'sakit hati' di dalam 'hati' maupun di dalam 'jantung' melainkan menghubungkannya dengan suatu keadaan kejiwaan manusia yang disebut 'emosi' yang locus jasmaniahnya masih sukar ditentukan. Oleh karena itu, jikalau kita berbicara tentang suatu pola semantik yang khas bagi bahasa Indonesia, kedua jenis makna, yakni makna gramatikal dan makna referensial haruslah dipisahkan secara jelas. Lagi pula kekhasan pola itu baru tampak jika diadakan perbandingan dengan bahasa yang berbeda. Apa saja yang terlibat di dalam perbandingan itu hendak kami uraikan di bawah ini melalui contoh dua bahasa struktur yang sangat berbeda, yaitu bahasa suku bangsa Tobelo di Halmahera Utara dengan bahasa Melayu Halmahera, suatu bahasa percakapan yang berfungsi sebagai *lingua franca* di Maluku Utara. Kita bertitik tolak pada dua kalimat sebagai berikut.

- (a) *w-a-fikiri o-ngotiri genanga i-pake o-hininga* 'dia-dia (benda) pikir -- (bentuk penentu) -- perahu itu dia (benda) -- pakai (bentuk penentu) hati'
- (b) ... *dia cuma fikir-fikir itu praw*
dia fikir itu praw yang pake fikiran

Terjemahan dalam bahasa Indonesia menghasilkan kalimat :

- (c) *ia berpikir perahu itu memiliki nyawa.*

Menurut makna gramatikal kalimat bahasa Indonesia mengingkari unsur-unsur dalam kalimat bahasa Tobelo sebagai berikut.

1. Penanda bahwa *perahu itu* adalah objek *berpikir*.
2. Bentuk yang berfungsi sebagai kata sandang untuk *perahu* dan untuk *nyawa*.
3. Penanda bahwa *perahu itu* adalah subjek dari *memiliki*

Meskipun ketiga unsur ITU tidak digunakan dalam kalimat bahasa Indonesia, kalimat itu rupanya mampu menyampaikan isi yang sama.

Menurut makna referensial, yang berbeda adalah :

1. pikiran tidak dipunyai tetapi digunakan.
2. adanya *hati* dalam perahu bukan *nyawa*.

Selesai pengertian *memakai hati* dan buka *memiliki hati* sukarlah dipahami dengan data yang ada. Untuk bahasa Indonesia penggunaan pengertian *pemilikan* dan bukan *pemakaian* erat berhubungan dengan ungkapan *bernyawa* yang sesuai dengan aturan gramatikal bahasa itu. Lagi pula terdapat kesejajaran dengan ungkapan bahasa Inggris *to possess a soul*.

Jikalau antara kata *hati* dan *nyawa* terdapat perbedaan makna, maka hal itu terletak dalam perbedaan pandangan tentang apa yang menjadi sumber kehidupan sehingga ungkapan *mempunyai nyawa* dapat diganti dengan kata *hidup*. Namun, kalau kita membandingkan terjemahan dalam kalimat (b) yang dilakukan oleh penutur kalimat (a) itu sendiri maka untuk *hati* digunakan *pikiran*. Hal itu berarti bahwa bentuk *hati* tidak lagi mengacu kepada bagian badan, tetapi kepada suatu proses kognitif sehingga terjemahan dapat diubah menjadi dapat berpikir. Walaupun demikian, oleh karena dalam bahasa Indonesia itu sendiri masih digunakan ungkapan-ungkapan seperti *dalam hati kecil*, *sakit hati*, *makan hati*, *hati-hati*, *murah hati*, *dari hati ke*

hati, sehati, perhatian atau semua hatinya yang semua mengacu kepada berbagai jenis keadaan dan proses kognitif dan emosional, maka besarlah kemungkinan bahwa terjemahan yang tepat adalah *memakai hati* atau *memunyai hati*, tetapi oleh karena bahasa itu dilepaskan dari ikatannya dengan kebudayaan etnis dan dipengaruhi oleh kebudayaan lain ungkapan-ungkapan itu tidak lagi dianggapnya sesuai. Seandainya argumentasi ini benar, maka suatu penelitian yang mendalam tidak akan menemukan suatu pola semantik yang khas untuk bahasa Indonesia, kecuali mungkin yang mengenai pola makna referensial. Suatu faktor pengaruh yang kuat dalam hal ini adalah kenyataan bahwa bahasa Indonesia untuk generasi masa kini haruslah hidup berdampingan sebagai bahasa kedua atau ketiga dengan bahasa etnis pada satu pihak dan dengan bahasa Barat (bahasa Inggris dan bahasa Belanda) pada lain pihak; baik yang pertama maupun yang kedua erat etnis terikat dengan kebudayaannya masing-masing. Untuk bahasa etnis ikatannya yang terkuat adalah dengan komponen I yang mencakupi orientasi kognitif dan emosional yang terkait dengan sistem nilai dan dengan komponen II yang mencakupi struktur sosial. Untuk bahasa Barat ikatannya yang terkuat adalah dengan komponen I dan komponen III yang terutama mencakupi sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal-hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikut.

Bahasa Indonesia dan Masyarakat Indonesia

Beberapa Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas dapatlah diambil sejumlah kesimpulan yang hendak kami rumuskan dalam keseluruhannya yakni sebagai berikut ini. Untuk memahami bagaimana bahasa dan kebudayaan berkaitan antara satu dengan yang lain perlulah dibedakan tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- (a) Bahwa kaitan itu harus dilihat menurut pembagian kebudayaan ke dalam tiga komponen: (1) komponen yang mencakupi ekspresi kebudayaan yang bersumber pada orientasi mental manusia; (2) komponen yang menghasilkan ekspresi kebudayaan sebagai hasil hubungan antarmanusia; dan (3) komponen yang menghasilkan ekspresi kebudayaan sebagai hasil interaksi antara manusia dan alam (teknologi dan kebudayaan material).
- (b) Kebudayaan adalah suatu produk historis yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- (c) Perbedaan kegiatan di dalam masing-masing komponen membaginya

ke dalam sektor-sektor yang berbeda. Misalnya, perbedaan antara sektor pertanian dan sektor perikanan. Tiap-tiap sektor kegiatan dalam satu komponen terjalin secara erat dengan sektor dalam komponen lain yang mencakupi kegiatan yang mempunyai hubungan dengan kegiatan yang dicakupi oleh sektor tersebut pertama.

Oleh karena bahasa memperlihatkan segi mental atau kognitif pada satu pihak dan segi kemasyarakatan pada pihak yang lain, maka ia menengahi komponen mental dan komponen kemasyarakatan sebagai komponen keempat dari kebudayaan.

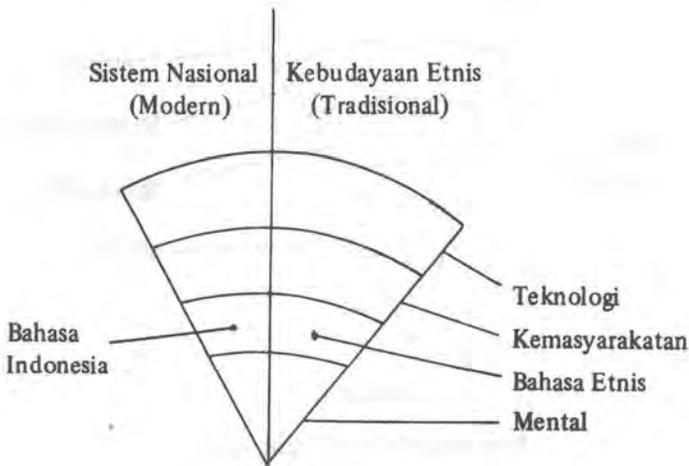
Jikalau kita berbicara tentang hubungan pengaruh antara bahasa dan ketiga komponen lainnya, pengaruh itu bersifat timbal-balik. Dalam hubungannya dengan komponen mental, bahasa berpengaruh terhadap komponen itu dalam arti bahwa ia menyalurkan pemikiran kita menurut corak tertentu. Pengaruh sebaliknya terjadi jika terjadi penciptaan atau adopsi pemikiran atau orientasi mental yang baru. Akan tetapi, dalam hubungan dengan komponen kemasyarakatan, bahasa memperlihatkan pertalian yang konstan, kecuali jika terjadi perubahan sosial yang cepat dalam hal mana jelas berarti suatu reorientasi mental yang memerlukan pengungkapan baru dalam bahasa, menjadi suatu pengaruh terhadap bahasa pula. Oleh karena perubahan sosial dialami secara langsung, hubungan pengaruh itu tidak langsung terkena pada bahasa, tetapi mengikuti jalan lewat komponen mental.

Hal yang sama berlaku pula bagi hubungan antara bahasa dan komponen teknologi. Penemuan dari suatu proses atau peralatan teknis yang baru berpengaruh terhadap bahasa, tidak sebaliknya. Adanya proses atau peralatan baru itu dipersepsikan secara langsung oleh pancaindra dan memerlukan ungkapan baru dalam bahasa. Namun, jikalau kita meninjau hubungan pengaruh itu dari sudut historis, artinya penurunan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka pengaruh bahasa di mana sudah terungkap hal-hal dalam komponen teknologi dan komponen kemasyarakatan berarah ke komponen mental. Dengan demikian, soal pertalian antara bahasa dengan ketiga komponen kebudayaan lainnya disederhanakan menjadi pertalian antara bahasa dan komponen mental saja sehingga kalau kita berbicara tentang hubungan timbal balik antara bahasa dan kebudayaan. Hal ini pada hakikatnya berarti hubungan dengan alam pikiran manusia.

Masyarakat Penutur Indonesia

Kita mengetahui semua bahwa di Indonesia terdapat aneka ragam suku bangsa dan oleh karenanya aneka ragam masyarakat penutur. Komposisi masyarakat penutur itu mengikuti suatu pola, yang pada satu pihak terdapat interaksi sosial menurut lingkungan kebudayaan etnis dengan penggunaan bahasa etnis dan interaksi sosial menurut lingkungan "sistem nasional" dengan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Lingkungan sistem nasional lebih banyak bersifat "modern".

Adanya pola itu berarti bahwa warga masyarakat penutur Indonesia haruslah menguasai lebih dari satu bahasa agar dapat bergaul dalam kedua lingkungan itu. Pola ini terlukis dalam gambar di bawah ini.

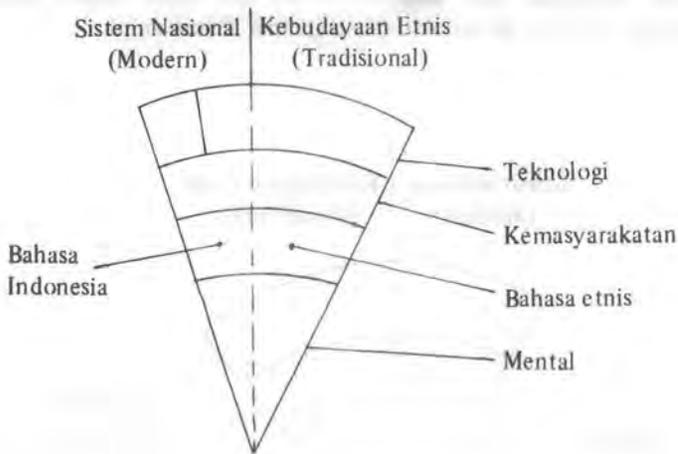


Gambar 7

Sistem Nasional dan Kebudayaan Etnis

Gambar di atas melukiskan suatu keadaan yang ideal karena menunjukkan bahwa Indonesia semata-mata digunakan dalam lingkungan sistem nasional, dan bahasa etnis dalam lingkungan etnis. Dalam kenyataan perpisahan itu tidak tajam sehingga dalam masing-masing lingkungan itu terjadi penggunaan

bahasa dari lingkungan yang lain, terjadi percampuran penggunaan bahasa. Percampuran penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa etnis merupakan gejala bahwa komponen-komponen kebudayaan etnis berfungsi di dalam komponen-komponen sejenis dari sistem nasional. Dengan kata lain, bahasa Indonesia, yang dimaksudkan sebagai ekspresi suatu orientasi mental, hubungan kemasyarakatan, dan hasil-hasil nasional yang sesuai atau kongruen dengan suatu "sistem nasional", masih harus berfungsi untuk mengekspresikan ketiga hal tertera di atas terkait dalam kebudayaan etnis. Keadaan itu terlukis dalam gambar berikut ini.

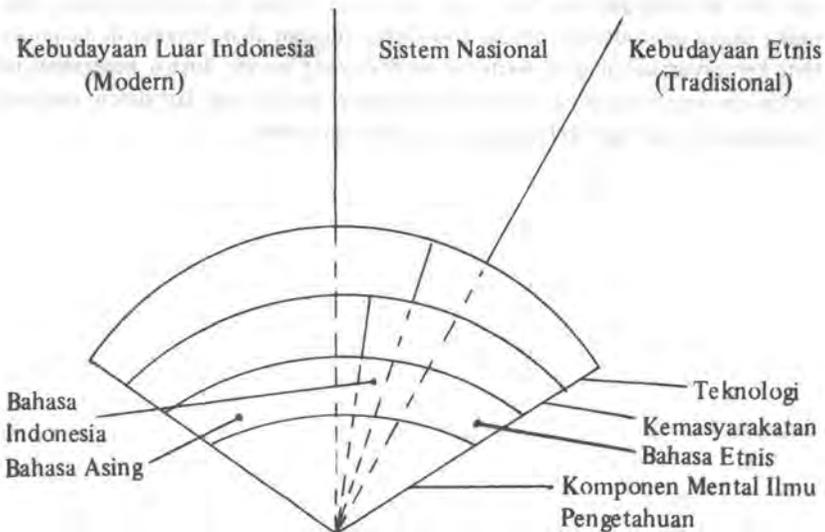


Gambar 8

Kedudukan Kebudayaan Etnis

Dalam uraian terdahulu telah disinggung bahwa proses modernisasi di Indonesia dalam kenyataan berarti mengembangkan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kemajuan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi di dalam kebudayaan-kebudayaan di luar Indonesia (terutama kebudayaan Barat), maka pemasukan teknologi modern ke dalam Indonesia berarti mengisi komponen serupa dalam sistem nasional Indonesia dengan akibat bahwa komponen teknologi dalam kebudayaan etnis atau teknologi tradisional terdesak atau sedikit-dikitnya mengalami perubahan. Mengingat

bahwa komponen teknologi terjalin erat dengan ketiga komponen mental, modernisasi teknologi berpengaruh pula pada corak hubungan sosial, orientasi mental, dan bahasa di Indonesia. Akan tetapi, pengaruh itu pada tahap pertama bukan lagi berasal dari dalam, melainkan dari suatu sistem kemasyarakatan, suatu orientasi mental, dan suatu bahasa yang telah melahirkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Lihat gambar di bawah ini).



Gambar 9

Modernisasi di Indonesia

Untuk bahasa Indonesia kesemuanya itu berarti bahwa di samping fungsinya sebagaimana terlukis di atas, ia harus berfungsi pula untuk mengekspresikan akibat dari proses pemodernan itu; artinya memodernkan dirinya. Oleh karena proses ini masih berlangsung, untuk segolongan masyarakat penutur di Indonesia agar menampung perubahan-perubahan sebagai akibat proses itu, apa yang tidak dapat dipenuhi oleh alat-alat ekspresif dalam bahasa Indonesia diisi melalui penggunaan bahasa asing; sebagaimana juga halnya dengan bahasa etnis yang penggunaannya menandai adanya kekosongan untuk mengekspresi suatu segi kebudayaan etnis.

Oleh karena pemodernan bahasa Indonesia (baik dengan cara adopsi unsur-unsur bahasa asing maupun dengan komponen-komponen sistem nasional yang isinya memperlihatkan pola sebagaimana terlukis dalam gambar di atas, unsur-unsur dari pemodernan bahasa Indonesia selalu akan dipikirkan sebagai terkait dengan komponen-komponen kebudayaan luar Indonesia ataupun dengan komponen-komponen kebudayaan etnis.

Selama komponen-komponen yang serupa di dalam sistem nasional belum menghasilkan suatu sintesis atau perpaduan antara unsur-unsur yang berasal dari kebudayaan luar Indonesia dan yang berasal dari kebudayaan etnis, maka usaha pemodernan bahasa Indonesia tidaklah akan berakar di dalam sistem kemasyarakatan dan orientasi mental yang serasi. Justru keserasian ini menjamin kecukupannya untuk mengekspresi semua segi dari sistem nasional itu sebagai lingkungan kehidupan yang khas Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardner, E. 1971. *Social Anthropology and Language*. London.
- Carrol, J.B. 1956. *Language, Thought, and Reality, Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. New York.
- Hockett, C.F. 1963. *A Course in Modern Linguistics*. New York.
- Hoijer, H. Editor. 1954. *Language in Culture*. Chicago.
- Horton R. & R. Finnegan Editor. 1973. *Modes of Thought. Essays on Thinking in Western and Non-Western Societies*. London.
- Hymes, D.H. Editor. 1964. *Language in Culture and Society*. New York.
- Kroeber, A.L. & C. Kluckhohn. 1963. *Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions*. New York.
- Levi-Strausse, C. 1964. "Structural Analysis in Linguistics and Anthropology". Dalam Hymes Editor.
- Pike, K.L. 1960. *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior*. Glendale, California.

MENUJU BAHASA HUKUM DAN BAHASA ADMINISTRASI YANG LEBIH MUDAH DIPAHAMI

Mahadi

Universitas Sumatra Utara

Bahasa Hukum

Seminar Hukum Nasional III yang diselenggarakan dalam tahun 1974 di Surabaya telah menuturkan bahwa hukum merupakan satu sarana penting bagi pembangunan sebagai :

- a. penjamin kepastian dalam proses pembangunan;
- b. penjamin ketertiban dalam proses pembangunan, dan
- c. alat untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Apabila diketahui bahwa hukum Indonesia dirumuskan dengan mempergunakan bahasa Indonesia dan bahwa keadaan dan pemakaian bahasa Indonesia dibidang hukum belum menunjukkan suatu kemantapan (Kepala BPHN : 1974), maka dapat diduga bahwa hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik seperti diutarakan di atas. Oleh sebab itu, menjadi tugas para sarjana hukumlah, dengan bekerja sama sekurang-kurangnya dengan para ahli bahasa, memperbaiki keadaan dan pemakaian bahasa Indonesia di bidang hukum.

Apakah yang Dimaksud dengan Bahasa Hukum ?

Kami dapat memahami ucapan Prof. Ter Haar dalam tahun 1939 bahwa di Indonesia belum ada *juristenstand*. Oleh sebab itu, belum ada bahasa hukum Indonesia (Ter Haar : 231) karena pada masa itu:

- a. pendidikan hukum, yang dilakukan dalam bahasa Belanda, baru ada di Jakarta saja;

- b. buku-buku hukum adalah karya sarjana Belanda dalam bahasa Belanda;
- c. perundang-undangan sentral dan lokal dirumuskan dalam bahasa Belanda;
- d. bahasa resmi di pengadilan adalah bahasa Belanda; dan
- e. jumlah sarjana hukum Indonesia dapat dihitung dengan jari.

Sekarang keadaan telah berubah. Apa yang dahulu dituangkan dalam bahasa Belanda sekarang sudah dilakukan dalam bahasa Indonesia. Hal ini berarti "bahwa bahasa Indonesia sudah harus mampu menjadi sarana komunikasi, sarana ekspresi pikiran atau perasaan, dan lain-lain lagi dalam bidang-bidang yang menjadi wawasan hukum, sekurang-kurangnya mempunyai potensi, tata-cara, dan keluwesan (*flexibility*) mengembangkan diri ataupun dikembangkan" (Mahadi : 184).

Bahasa Indonesia jenis inilah yang kami namakan bahasa hukum, yaitu :

Bahasa hukum adalah bagian pada bahasa Indonesia; bahasa hukum seharusnya mengikuti kaidah-kaidah yang telah dan yang akan ditetapkan untuk bahasa Indonesia; kemungkinan tentu tidak tertutup bagi bahasa hukum untuk memperlihatkan sedikit kebebasan di sana-sini yang justru menunjukkan sifat khususnya.

Sifat-sifat khusus demikian itu terdapat juga pada bahasa khusus lainnya. Lihat saja bahasa pers (diambil dari zaman perjuangan) : "Teriak rakyat di Jakarta, Soekarno—Hatta; *yes; van Mook; no*"

Seorang pujangga dapat berkata :

Letih badan menangi sukma, . . .
 Lemah lunglai sendi anggota,
 Haus lapar, tidak tertahan,
 Rasakan hilang nyawa di badan

Penyair itu hendak menyatakan Saya haus dan lapar (1954:22)

Di bidang hukum :

1. ada perbedaan antara :
 - a. bebas dari tuduhan, dan
 - b. lepas dari segala tuntutan hukum;
2. amar putusan, artinya perintah yang tercantum dalam keputusan pengadilan;
3. kata *relevant* sering sekali dipakai. (Jurisprudensi Indonesia : III, IV).

Siapa pemakai bahasa hukum? Sudah pasti bukan hanya sarjana hukum. Sarjana hukum pun tidak setiap menit mempergunakan bahasa hukum. Jadi, kriteria apakah harus dipakai bahasa hukum atau tidak, bukan harus dicari pada pemakai bahasa, melainkan—demikian pendapat kami—harus dicari pada masalahnya dan pada bidangnya. Lebih jauh dapat diterangkan bahwa tidak semua anggota MPR, DPR (pusat dan daerah), staf MPR/DPR, presiden, para menteri beserta staf, para hakim dan staf, para staf kantor-kantor administrasi (Balai Harta Peninggalan, Kantor Pendaftaran Tanah, dan lain-lain), staf notaris, staf pengacara, dan lain-lain adalah sarjana hukum, tetapi pada waktu-waktu tertentu harus mempergunakan bahasa hukum karena butir pembicaraan terletak dalam wawasan dan dalam bidang hukum.

Bahasa Administrasi

Dalam kertas kerja ini kami membatasi diri pada bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam surat-menyurat yang digunakan oleh :

- (1) instansi resmi kepada pihak swasta;
- (2) pihak swasta kepada instansi resmi;
- (3) antarinstansi resmi; dan
- (4) antarinstansi swasta.

Sabaruddin Ahmad (1977 : 13 dan berikutnya) mengutip kalimat yang berbunyi sebagai berikut.

1. "*Menghunjuk* surat saudara tertanggal *bersama ini* kami kabarkan, *yang mana* permintaan saudara belum dapat kami perkenankan".
2. Dengan ini Panitia Peringatan Raden Ajeng Kartini *mengundang kehadiran* Bapak dalam rangka memperingati Hari Kartini.

Saudara Sabaruddin Ahmad dalam kertas stensilan tertera di atas telah menderetkan sejumlah contoh-contoh kalimat yang bahasa Indonesianya tidak tersusun dengan tepat untuk mengungkapkan maksud penulis surat agar dapat menarik minat orang yang membacanya. Kesalahan-kesalahan dan kejanggalan lain mendapat tempat juga dalam stensilan itu.

Dari sudut mana pun kita meninjau hukum, entah :

- 1) sebagai jaminan kepastian dan penjamin ketertiban dalam proses pembangunan,
- 2) sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan (*Seminar Hukum Nasional* 1974),

- 3) sebagai alat untuk merumuskan hubungan-hubungan di antara para warga masyarakat¹⁾,
- 4) untuk menjinakkan kekuatan-kekuatan yang beroperasi di dalam masyarakat,
- 5) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa, maupun
- 6) untuk menentukan kembali hubungan-hubungan manakala kondisi kehidupan berubah,

hukum senantiasa mengandung aturan-aturan, konsepsi-konsepsi, ukuran yang telah ditetapkan oleh penguasa pembuat hukum untuk (a) disampaikan kepada masyarakat, (b) dipahami dan disadari maksudnya, dan (c) dipatuhi. Dengan demikian, ada tiga tahap yang dijalani hukum setelah ia ditetapkan supaya dapat bekerja dengan efisien dan menghasilkan buah yang efektif, yaitu : (1) disampaikan, (2) dipahami, dan (3) dipatuhi.

Bahasa Hukum Harus Dipahami oleh Masyarakat

Saudara Moeliono²⁾ menyebut sebagai satu contoh yang tidak dipahami masyarakat sebagai berikut.

KUH Pidana, Pasal 282

Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirimkan terus di dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan, atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan yang diketahui isinya, atau gambar, atau barang yang dikenalnya melanggar kesulitan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

Oleh karena kalimat itu terlalu panjang, dengan sendirinya ia tak dapat lekas dipahami oleh masyarakat. Saudara Moeliono menyarankan supaya pasal KUH Pidana itu dibunyikan sebagai berikut.

Barang siapa yang menyiarkan tulisan, gambar atau barang, yang isinya diketahui atau dikenalnya melanggar kesusilaan; barang siapa mempertunjukkannya atau menempelkannya untuk umum; barangsiapa membuatnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan pengirimannya di dalam negeri, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau menyimpannya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan untuk umum; barangsiapa secara terang-terangan, atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan bahwa orang dapat memperolehnya, maka ia dihukum (dipidana) dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan,

atau dengan denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

"Supaya dapat dipahami serta karena bahasa hukum adalah bahagian pada bahasa Indonesia, maka haruslah bahasa hukum memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia"

Ejaan Bahasa yang disempurnakan sudah mengatur bagaimana kata-kata asing berikut ini harus dituliskan: (*Pembinaan Bahasa Hukum*, 1977/8:240)

executif, taxi, extra, latex, exceptie, excess, eksklusif, dan sebagainya.

Hendaknya janganlah lagi terbaca kalimat sebagai berikut.

"... oleh Bupati telah mengeluarkan pengumuman tentang..."

(*Harian Mimbar Umum*, 1978).

Tentu ada kejanggalan dalam kalimat "*Untuk menimbang sudah sampiai di mana perjuangan pemuda, baiklah diingat dan melihat kembali jasa-jasa para perintis kemerdekaan.*" (*Harian Analisa*, 9-8-1978: 7 kolom 9). Ada kalimat, yang mempunyai kata kerja, tapi tidak memuat pokok kalimat: Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Perkawinan 1974 berbunyi :

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ahli bahasa dapat menentukan, apakah di sini harus ditulis *pejabat* atau *pejabat*.

Kata yang dipakai, yaitu *memberi kewajiban* menurut hemat saya sama sekali tidak serasi dengan bahasa Indonesia yang baik.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan 1974 bertutur sebagai berikut.

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. dan sebagainya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat *memberi kewajiban* tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. dan sebagainya.

Apakah *memberi kewajiban* tidak seharusnya *menunaikan kewajiban* ?

Contoh terakhir :

Di dalam ilmu jiwa mengemukakan tentang perkembangan anak-anak sejak lahir menuju dewasa dan sebagainya. (*Harian Pelita*, hal. V, kolom 3).

Penggunaan Bahasa Hukum Hendaknya Tetap, Terang, dan Monosemantik

Untuk pengertian "*verlijden*" (bahasa Belanda), yang acap kali dipergunakan oleh para notaris, dipakai bermacam-macam istilah, seperti :

- a. dibuat dan diselesaikan surat akta ini, ditulis, dan ditanda tangani di . . .
- b. dibuat dan dilangsungkan
- c. dibikin sebagai minuta dan diresmikan
- d. dibikin dan disyahkan
(Siregar)

Untuk "*natuurlijke verbinten*" dijumpai

- a. perikatan bebas
- b. perikatan alam
- c. perjanjian alam
- d. perikatan tanpa tuntutan
- e. perjanjian tanpa hak tuntutan
- f. perjanjian budi
- g. perikatan yang sudah jamak
- h. perikatan demi kemanusiaan
(Mohd. Syah)

Pengadilan Negeri Jakarta No. 504/1969 menjatuhkan *putusan*, sedangkan Mahkamah Agung memakai kata *keputusan* (*Yurisprudensi Indonesia*, 1973: 10, 20). Setelah membatalkan keputusan hakim bawahan, Pengadilan Tinggi Surabaya berkata :

Dan dengan memberi perasilan sendiri (No. 210/1969, *yurisprudensi* 1973: 22), sedangkan Mahkamah Agung lain sedikit, yaitu "Dan dengan mengadili sendiri". (*Yurisprudensi*, 1973: 24).

Empat buah kata asing dituliskan sebagai berikut.

- a. Dalam konpensi.
- b. Dalam rekompensi.

(Pengadilan Tinggi Surabaya No. 210/1969, *Yurisprudensi* 1973: 22)

- c. *Conventie* (Pengadilan Tinggi Medan, No. 203/1972).
- d. *Exeptie* (Pengadilan Negeri Medan, No. 661/1971).

Untuk pengertian *appel* ada beberapa istilah :

- a. tingkat banding (Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971, *Yurisprudensi* 1973: 60);
- b. tingkat bandingan (Pengadilan Tinggi Surabaya No. 210/1969, *Yurisprudensi* 1973: 22).

Undang-undang yang sama mempergunakan dua kata yang berbeda untuk satu pengertian :

- a) putusan pengadilan (Pasal 18 *Undang-Undang Perkawinan 1974*).
- b) keputusan pengadilan (*Undang-Undang Perkawinan 1974*, pasal-pasal 28, 38, 54).

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 1974 memakai kata *akta kelahiran*, sedangkan Undang-Undang Perkawinan 1974 sebagai peraturan induk mempergunakan istilah *akte kelahiran*.

Undang-Undang Perkawinan 1974 dalam Pasal 60 Ayat 3 memakai istilah yang, menurut hemat saya, tidak jelas, yaitu "Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak berbicara." Penjelasan menyatakan, ayat ini telah cukup jelas. Apakah maksudnya tanpa sidang? Di tempat kami ayat ini, menurut keterangan yang kami peroleh, belum pernah dipakai. Tentang pengertian *ahli waris* kami mencatat hal-hal yang pernah terjadi sebagai berikut.

Mahkamah Agung (Mahadi: 220 dan sebagainya) pernah membuat pertimbangan: . . . *isteri dapat dipandang sebagai ahli waris dari almarhum suaminya, juga dimana janda itu tidak mendapat bagian tertentu dari harta warisan, melainkan hanya sekedar cukup untuk melanjutkan hidupnya.*

Pengadilan Tinggi Medan :

Janda bukan ahli waris, tetapi ia mempunyai hak nikmat, i.e. hak menempati rumah sengketa selama hidupnya, kecuali ia kawin lagi.

Mahkamah Agung :

Janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang-barang asal dari suaminya, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal, sebagian harus tetap ditangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas.

Ahli waris menurut Islam mendapat bahagian yang penuh menjadi haknya, boleh diperjualbelikannya, dan sebagainya. Juga pengertian *harta pusaka* dapat menimbulkan keragu-raguan.

Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 91/1956, Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1964 No. 201/1958 dan 31 Januari 1968 No. 136 K/Sip. 1967 (Mahadi : 223).

Harta pusaka harus dibedakan dari harta peninggalan.

Harta pusaka ialah harta asal yang dibawa, misalnya pada waktu perkawinan.

Harta peninggalan ialah harta yang diperoleh selama perkawinan dari usaha sendiri atau usaha bersama.

Hukum yang Berasal dari Zaman Hindia Belanda

Berdasarkan Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, masih banyak peraturan-peraturan hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda mempunyai daya laku di zaman Indonesia merdeka. Manakala di zaman Hindia Belanda orang-orang dari golongan tertentu saja yang dapat berbahasa Belanda, dapat dipahami bahwa barisan itu menunjukkan sifat menipis sesudah tahun 1945. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan yang berasal dari zaman Hindia Belanda itu tidak dapat dibaca/dipahami oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia. Sudah sejak zaman Hindia Belanda kita menjumpai terjemahan peraturan-peraturan tertentu yang dihidangkan oleh Balai Pustaka. Sesudah tahun 1945 ada usaha penerjemahan yang dilakukan oleh orang-orang pribadi. Pada umumnya, usaha penerjemahan baru dapat diharapkan memberi hasil yang baik apabila dipenuhi syarat-syarat:

- 1) penerjemah menguasai bahasa yang diterjemahkan dengan baik;
- 2) penerjemah menguasai bahasa Indonesia dengan baik;
- 3) penerjemah menguasai ilmu yang bersangkutan dengan usaha penerjemah itu; dan
- 4) penerjemah tidak selamanya berusaha menyajikan terjemahan yang patih (*=letterlijk*), melainkan, demi kepentingan kejelasan terjemahan, mencari jalan lain, mencari jalan, misalnya, memendek-mendekkan kalimat, menyesuaikan terjemahan kepada alam pikiran Indonesia, dan lain-lain.

Kami pikir, tidak mudah bagi seorang penerjemah memenuhi keempat syarat di atas, terutama syarat menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Secara jujur kami mengakui bahwa bahasa Indonesia kami dalam kertas kerja ini pun pasti menunjukkan banyak kekurangan. Menurut penglihatan kami, kebanyakan penerjemah, pasti termasuk kami tidak pula menyesuaikan diri pada syarat Sub 4^o. Salah satu contoh telah diturunkan di atas ini dalam Bab II, yaitu KUH Pidana Pasal 282. Contoh lain ialah Pasal 163 Ayat I KUH Pidana juga, yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut.

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang isinya berjanji akan memberi keterangan, kesempatan atau ikhtiar untuk melakukan sesuatu tindak pidana dengan maksud supaya janji itu diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukum penjara dan sebagainya.

Contoh yang lain lagi adalah terjemahan Pasal 3 *Stadsvormingsordonnantie* (S 1948 No. 168), yang diselenggarakan oleh Direktorat Tatakota dan Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Terjemahan itu berbunyi sebagai berikut.

Ayat 1 : Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan peraturan pemerintah, Dewan menentukan dengan keputusan suatu rencana kota, dimana untuk seluruh daerahnya secara garis besar dijelaskan tentang keadaan pembentukan kota yang ada, rencana-rencana khusus yang telah ditetapkan, peruntukan tanah yang telah direncanakan lebih lanjut dengan membedakan lima lingkungan utama peruntukan beserta diferensiasi-diferensiasinya dengan jalan lingkungan-lingkungan peruntukan, semuanya dalam garis besar, akan tetapi sedemikian rupa sehingga unsur-unsur yang terpenting untuk pembentukan kota yang selanjutnya beserta perbaikan bagian-bagian kota yang ada, demikian juga kota yang telah direncanakan, nampak ada hubungannya satu sama lain.

Secara terus terang kami ingin mengakui bahwa pernyataan di atas baru dapat kami anggap memahaminya setelah membacanya dua tiga kali dengan teliti bahasa Belandanya. Kami percaya bahwa bagi seorang sarjana hukum pun tidak mudah memahami isi Pasal 3 dalam bahasa Indonesianya karena kalimatnya panjang dan diterjemahkan serta disusun dengan cara yang kurang jelas. Menurut hemat kami, sebaiknya terjemahannya dipecah menjadi kalimat-kalimat pendek dan disusun secara sederhana. Misalnya, terjemahan itu dapat berbunyi sebagai berikut.

Dengan memperhatikan syarat-syarat di dalam Peraturan Pemerintah, Dewan menetapkan suatu rencana kota dengan satu keputusan;

di dalam rencana itu ditentukan :

1^o keadaan pembentukan kota secara garis besar

2^o dan sebagainya.

Di dalam menentukan itu Dewan harus membedakan lima lingkungan utama peruntukan tanah beserta diferensiasi-diferensiasinya dengan jalan membuat lingkungan-lingkungan peruntukan. Semua pekerjaan ini dibuat secara garis besar, akan tetapi harus sedemikian rupa sehingga . . . dan sebagainya.

Sementara itu, ada terjemahan yang sudah begitu jelasnya sehingga rasanya tidak dapat disederhanakan lagi.

Contohnya ialah Pasal 2 KUH Pidana, yang berkata :

Aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku atas setiap orang yang di Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana.

Hukum Buatan Kita Sendiri

Ditinjau dari segi panjang pendeknya, berbelit-belit, atau sederhananya suatu kalimat aturan hukum, kami melihat pada kecenderungan yang menyempai seperti hukum pada zaman Hindia Belanda. Dahulu kita berjumpa dengan kalimat-kalimat yang panjang, misalnya, Pasal 131 Ayat 2 I.S., yang terdiri dari tidak kurang dari 120 kata, tetapi, sebaliknya, ada juga pasal yang hanya memuat 15 kata (Pasal 2 KUH Pidana). Dalam Pasal 26 Ayat 2 UUPA terdapat 80 kata, tetapi ada pula aturan yang memuat hanya 10 kata (Pasal 22 Ayat 1 UUPA).

Oleh karena hukum dibuat untuk masyarakat, maka sebaliknya kalimat-kalimatnya, meskipun panjang, hendaknya jelas dan mudah dipahami. Usaha supaya semua aturan-aturan perundang-undangan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, menurut hemat kami, sulit dilaksanakan karena pasti ada istilah, ungkapan, dan lain-lain dalam hukum yang perlu penjelasan dari ahlinya.

Kami menghadirkan satu contoh, yaitu Pasal 5 UUPA :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Kami pikir kalimat di atas dapat lebih jelas kalau dibuat misalnya sebagai berikut.

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang hukum adat itu tidak bertentangan dengan :

- a. kepentingan nasional, yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
- b. kepentingan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
- c. sosialisme Indonesia; dan
- d. peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini.

Berlakunya hukum adat itu juga dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Meskipun kalimatnya sudah disusun lebih jelas, tetapi masih ada hal-hal yang perlu penjelasan dan tafsiran tidak saja bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi sarjana hukum, seperti (a) hukum adat, (b) bumi, (c) air, dan lain-lain. Tegasnya, meskipun dapat diusahakan supaya aturan-aturan hukum dirumuskan sedemikian rupa sehingga mungkin lebih jelas bagi masyarakat daripada sekarang, tetapi hukum senantiasa mengandung istilah atau kalimat, yang hanya dapat dipahami oleh sarjana hukum. Begitu pula, adalah lazim, apabila dua orang sarjana hukum masih juga berselisih pendapat tentang makna atau hakikat suatu aturan, yang pada pandangan pertama bagi orang awam telah jelas.

Kesulitan Pemahaman Teks Hukum dan Gaya Bahasa Administrasi

Kesulitan pemahaman teks hukum dan gaya bahasa administrasi antara lain disebabkan oleh tata kalimatnya yang mirip dengan tata kalimat bahasa Belanda atau bahasa Inggris sebagai hasil terjemahan? Demikian ubunyi pertanyaan yang diajukan oleh Panitia kepada kami.

Hukum yang Berasal dari Zaman Hindia Belanda

Kesulitan yang tampak antara lain sebagai berikut.

1. Bahasa Belanda disusun oleh orang Belanda, Dengan sendirinya jalan pikiran, tata bahasa, azas-azas hukum, dan falsafah hidup Belanda terjalin ke dalam teks hukum.
2. Tidak semua orang, yang pandai berbahasa Belanda, dapat memahami teks hukum.
3. Kalau pun ada orang yang pandai berbahasa Belanda dan dapat membaca teks hukum, belum tentu ia dapat dikatakan menguasai hukum sebab teks hukum tidak tegak sendiri, tetapi erat hubungannya dengan :
 - (a) sejarah pembentukan hukum (*rechts historie*), dan
 - (b) sejarah pembuatan hukum (maksud Pemerintah, perdebatan di DPR, dapat dinamakan *wets – historie*);
4. Jurisprudensi; serta
5. Doktrina.

Terjemahan-terjemahan yang ada banyak memperlihatkan sifat harafiah. Namanya pun sudah terjemahan. Jadi, sulit mengharapkan sesuatu yang bukan terjemahan. Dalam hal-hal tertentu (lihat contoh-contoh di atas) adalah lebih baik untuk menyederhanakan kalimat-kalimat yang panjang tambahan pula memuat anak-anak kalimat. Selanjutnya, istilah-istilah Indonesia, yang dipakai dalam terjemahan-terjemahan itu, belum bersifat konsisten. Menurut pikiran kami, tak usahlah kita menghiraukan hal-hal itu; biarkan saja terjemahan yang ada itu sebagaimana adanya. Menghiraukan hal-hal itu pasti akan meminta waktu, pikiran, dan energi yang banyak. Lebih berfaedah rasanya mengarahkan perhatian kita ke masa depan.

Hukum Buatan Indonesia Sendiri Sesudah Tahun 1945

Soal bahasa sudah banyak dapat diatasi. Kesulitan-kesulitan tentu tetap ada, antara lain :

1. tidak semua orang yang pandai berbahasa Indonesia dan dapat memahami teks hukum;
2. kesulitan tertera di atas dalam sub 3 berlaku juga mutatis mutandis;
3. istilah-istilah yang dipakai belum bersifat konsisten.

Pada umumnya, sepanjang sesuai dengan bahasa Indonesia yang kami kuasai — hal ini belum tentu merupakan jaminan—bahasa Indonesia dalam hukum sudah lumayan. Akan tetapi, kami yakin bahwa masih ada yang perlu dimantapkan dari segi ejaan, pemakaian kata yang tetap untuk pengertian yang sama, tata bahasa, dan lain-lain. Semenara itu, apa pun usaha kita untuk menyempurnakan bahasa hukum menurut pendapat kami tidak akan mencapai tujuan supaya hukum dapat dipahami oleh lapisan terbesar masyarakat karena :

- (a) suatu teks hukum merupakan bagian yang tak bisa dipisah-pisahkan dengan teks lain dalam undang-undang yang sama dan
- (b) suatu undang-undang tertentu selalu termasuk dalam satu kerangka bersama-sama dengan undang-undang yang lain.

Kesimpulan dan Saran

1. Pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hukum masih perlu disempurnakan.
2. Adalah berfaedah kalau mahasiswa Fakultas Hukum di tingkat IV atau V diwajibkan mengikuti dan menempuh ujian bahasa Indonesia untuk men-

dapatkan kemahiran dan keterampilan dalam pemakaian bahasa Indonesia lisan dan tulisan.

3. Tanpa mengganggu benar pada kelancaran pembuatan undang-undang, dipandang sangat berguna apabila pembuat undang-undang mengadakan konsultasi dengan ahli bahasa sebelum sesuatu rancangan dibawakan ke DPR (pusat atau daerah).

Catatan

1. Sub 3 s.d. sub 6 dari E. Adamson Hoebel yang kami kutip dari karangan Sdr. Sutjipto Rahardjo, S.H., dalam *Majalah Hukum* No. 5. Tahun 1977. hal. 51.
2. Disebut dalam "Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia" Proyek BPHN 1977/8. hal. 100.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Takdir, 1954. *Puisi Baru*. Dikumpulkan oleh S. Takdir Alisjahbana. Jakarta : N.V. Pustaka Rakyat.
- Harian Analisa*. 1978. Medan: tanggal 9-8.
- Harian Mimbar Umum*. 1978. Medan : tanggal 30-8.
- Harian Pelita*. Jakarta : 7 September.
- Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. (BPHN). 1974 Kata Sambutan Dalam Pembukaan Simposium Bahasa dan Hukum. Medan 25 November.
- Kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya*, 1974.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Mahadi, 1977/8. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. Medan: Proyek BPHN. Proyek ini dikerjakan berdua oleh dr. Sabaruddin Ahmad dan Prof. Mahadi.
- Mahkamah Agung. 1976 *Yurisprudensi Indonesia*. Jakarta.
- Majalah Hukum dan Masyarakat*, 1962.
- Mohd. Syah, Prof. 1974. Kertas Kerja dalam Simposium Bahasa dan Hukum Parapat.
- Sabaruddin, Ahmad. *Pedoman Surat-Menyurat Resmi*, 1977. Medan, stensilan.
- Sutjipto Rahardjo, S.H. 1977. "Suatu Sketsa tentang Permasalahan Hukum dan Perubahan Sosial". Hukum No. 5 tahun keempat.
- Siregar. Notaris. Kertas Kerja dalam Simposium Bahasa dan Hukum. 1974. Parapat.
- Ter Haar. 1939. *Beginzellen en Stelsel*. Batavia: J.B. Wolters.
- Undang-Undang Perkawinan 1974*.
- Undang-Undang Pokok Agraria*, 1960.
- Yurisprudensi Indonesia*. 1973. Mahkamah Agung.

GAYA BAHASA KEILMUAN

H. Johannes

Universitas Gadjah Mada

Wujud dan Fungsi Bahasa

Bahasa ialah *anggu* (*set*) ungkapan (*expressions*) atau lambang (*symbols*) yang digunakan manusia atau makhluk lain untuk menyatakan sesuatu. Menyatakan sesuatu oleh suatu makhluk kepada makhluk yang lain atau kepada Penciptanya dinamakan komunikasi.

Suatu ungkapan atau lambang adalah berupa tanda (*sign*), baik tanda berupa benda atau cahaya yang dapat dilihat, bunyi yang dapat didengar, bau yang dapat dicium, elusan yang dapat dirasa maupun pangan yang dapat dikecap. Setiap tanda yang mempunyai arti tertentu adalah lambang. Tanda yang tidak mempunyai arti tertentu bukanlah lambang. Arti suatu tanda bergantung pada cara, bidang, dan suasana (*context*) penggunaannya. Tanda itu sendiri ada kalanya dinamakan lambang walaupun sebenarnya tanda hanya merupakan sarana atau wahana lambang. (Johannes, 1977:1).

Manusia sangat intensif menggunakan lambang-lambang bunyi dan lambang-lambang gambar untuk menyatakan sesuatu kepada sesamanya, yaitu mengadakan komunikasi dengannya. *Anggu* lambang-lambang bunyi itu dinamakan bahasa lisan; *anggu* lambang-lambang gambar (*graphic symbols*), termasuk lambang huruf dan tanda baca yang dinamakan bahasa tulis, digunakan dalam karangan, termasuk karangan ilmiah. Dalam karangan ilmiah manusia menggunakan bahasa tulis untuk melukiskan (*describe*) gagasan-gagasan, paham, dan hasil penelitian ilmiahnya kepada sidang pembaca. Yang termasuk ke dalam karangan ilmiah adalah makalah (*paper*) untuk majalah ilmiah atau seminar, tesis, disertasi, monograf, buku pelajaran universitas, buku pegangan (*handbook*), dan lain-lain.

Gaya Bahasa Keilmuan

Penulis ingin *mentakrifkan* (*define*) gaya bahasa (*literary style*) sebagai berikut. Gaya bahasa tulis ialah keseluruhan hasil pemilihan kata serta cara menyusun kata-kata itu dalam kalimat, kalimat dalam paragraf, dan paragraf dalam karangan. Gaya bahasa lisan ialah keseluruhan hasil pemilihan kata, cara menyusun kata-kata itu dalam kalimat-kalimat, serta cara mengucapkannya dengan lagu (*intonation*), irama (*rhythm*), jeda (*pause*), tekanan suara, perubahan air muka, dan gerak anggota badan.

Bahasa karangan ilmiah selain harus memenuhi kaidah-kaidah umum bahasa Indonesia harus juga memenuhi syarat-syarat khusus sehingga mempunyai ciri-ciri tertentu, di antaranya :

1. nada tulisan ilmiah bersifat formal dan objektif;
2. lazim dipakai titik pandang *nara* (*person*) ketiga serta ragam (*voice*) pasif;
3. titik pandang *nahu* (*grammatical point of view*) harus taat asas (*consistent*), baik mengenai ragam (*voice*) dan modus maupun mengenai *nara* (*person*) dan kata gantinya (*pronoun*);
4. tulisan ilmiah berbeda dari susastra (*belles lettres*) dalam hal digunakannya istilah-istilah khusus yang *ditakrifkan* khusus sehingga kata yang sama dalam bahasa ilmiah dan dalam bahasa umum dapat berbeda artinya;
5. tingkat bahasa yang dipakai dalam karangan ilmiah ialah tingkat bahasa resmi, bukan tingkat bahasa harian (*colloquial*);
6. dari keempat bentuk prosa yang dapat digunakan dalam sebuah karangan, yaitu pemaparan (*exposition*), perbincangan (*argumentation*), per lukisan (*description*), dan penceritaan (*narration*), bentuk pemaparanlah yang terutama dipakai dalam karangan ilmiah dengan ketiga bentuk lainnya sebagai pelengkap (Sklore, 1964: 128);
7. komunikasi gagasan atau paham dalam tulisan ilmiah harus secara lengkap, jelas, ringkas, meyakinkan, dan tepat;
8. dalam tulisan ilmiah dihindari bahasa usang, kolot, dan basi;
9. dalam karangan ilmiah dihindari ungkapan-ungkapan ekstrem, berlebihan, dan haru (*emotional*);
10. dalam karangan ilmiah dihindari kata-kata yang mubazir (*redundant*);

11. bahasa keilmuan tentang dan *gahari (moderate)*;
12. bahasa keilmuan lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan;
13. kalimat dan paragraf dalam karangan ilmiah panjangnya sedang.
14. pemakaian majas (*figures of speech*) terbatas;
15. karangan ilmiah lazim menggunakan gambar, diagram, daftar, peta, dan analisis ilmu pasti;
16. *mekanika gaya (mechanics of style)* mengenai tanda-tanda baca, lambang-lambang ilmiah, singkatan-singkatan, rujukan (*reference*), jenis huruf (besar, kecil, tegak, miring, tebal, atau tipis) sangat utama dalam karangan ilmiah.

Penalaran Mantiki

Suatu karangan dinamakan ilmiah kalau mengandung hasil penyelidikan ilmiah, baik yang baru saja dilakukan maupun yang telah berabad-abad yang lampu dilaksanakan. Penyelidikan ilmiah dilaksanakan dengan penalaran *mantiki* dan dengan metode ilmiah. Penalaran *mantiki* diperlukan pula dalam penyusunan karangan ilmiah yang baik. Nalar (*reason*) ialah akal sehat. Penalaran (*reasoning*) ialah penggunaan akal sehat. *Mantik (logic)* ialah ilmu penarikan kesimpulan-kesimpulan dari pelbagai keadaan dengan akal sehat. Penalaran *mantiki (logical reasoning)* ialah penarikan kesimpulan berdasarkan jalan pikiran yang sehat.

Penalaran *mantiki* penting dalam membuat karangan ilmiah karena kerangka (*outline*) karangan harus *mantiki*, penyusunan kalimat (*sentence*) dan paragraf (*aline*) harus *mantiki*, pilihan kata harus *mantiki*. Dalam metode ilmiah dipakai penalaran induksi (imbasan) dan penalaran deduksi (jabaran). Pada proses induksi, dari data-data yang telah dikumpulkan diadakan suatu "perampatan" (*generalization*), yaitu dirumuskan suatu dalil (*proposition*) umum. Pada proses deduksi, dari perampatan atau dalil umum diuji data-data teramati. Induksi dan deduksi saling mengisi. Deduksi hanya mungkin sesudah induksi dan induksi hanya berguna bila diikuti oleh induksi.

Kalimat dan Paragraf

Kalimat pernah *ditakrifkan (defined)* sebagai berikut.

1. Kalimat ialah satuan bentuk bahasa terkecil yang mengucapkan suatu pi-

kiran yang lengkap (Alisyahbana, 1977:57).

2. Kalimat ialah kesatuan bentuk ketatabahasa yang menyampaikan pikiran perasaan dan hasrat (Poerwadarminta, 1967:23).
3. Kalimat ialah ucapan bahasa yang mempunyai arti penuh dan batas keseluruhannya ditentukan oleh turunan suara (Fokker, 1972:9).
4. Kalimat ialah suatu bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa ujaran itu sudah lengkap (Keraf, 1978:156).
5. Rentetan atau rangkaian kata atau kelompok kata yang tidak mempunyai hubungan dengan lain kata atau kelompok kata yang berada di luarnya, dan memiliki kesatuan bunyi yang berdaulat adalah kalimat (Wojowasito, 1976:13).

Takrif pertama dan kedua berlaku, baik untuk bahasa lisan maupun untuk bahasa tulis. Takrif ketiga, keempat, dan kelima berlaku untuk bahasa lisan.

Kalimat tutur dapat lebih mudah dipahami daripada kalimat tulis karena pembicara dapat menggunakan lagu (*intonation*) tekanan suara, perubahan air muka, dan gerak anggota badan dalam mengucapkan kalimat itu. Pada kalimat tulis hanya dapat ditunjukkan tempat-tempat jeda dengan tanda koma dan titik koma. Penekanan (*emphasis*) makna hanya dapat dilakukan dengan penempatan kata-kata yang bersangkutan di bagian awal kalimat atau dengan pengulangan kata-kata itu.

Kalimat pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu pokok kalimat atau subjek dan sebutan kalimat atau predikat yang dapat ditambahi pelengkap atau objek. Kalimat tunggal hanya mempunyai satu pokok dan sebutan, kalimat susun atau kalimat majemuk mempunyai lebih dari satu pokok dan sebutan. Dalam kalimat susun setara tergabung beberapa kalimat tunggal yang menjadi anak kalimat (*clause*). Dalam kalimat susun rapatan, pokok atau sebutan yang sama dari beberapa anak kalimat hanya disebut sekali. Kalimat dapat berjenis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat modus, dan kalimat seru.

Keraf (1977:35) mengemukakan bahwa di dalam menyusun kalimat yang baik dan efektif perlu diperhatikan :

1. adanya kesehatan pikiran (*unity*), yaitu bahwa dalam kalimat hanya terdapat satu ide pokok;

2. adanya kesatuan susunan (*coherence*), yaitu adanya hubungan yang jelas antara unsur-unsur yang membentuk kalimat;
3. adanya penekanan (*emphasis*) terhadap inti ide dalam kalimat, dengan menyebutkan ulang, dengan pertentangan, atau dengan beberapa partikel seperti *-lah*, *-pun*, *-lah*;
4. adanya variasi dalam pilihan kata dan struktur kalimat; dan
5. adanya takrif (*definition*) dari istilah-istilah yang dipakai.

Beberapa kalimat yang digabung menjadi kesatuan yang membentangkan suatu pokok pikiran dinamakan paragraf. Tiap paragraf hanya boleh mengandung satu tema. Pembagian karangan dalam paragraf-paragraf memudahkan pembaca memahami karangan itu dengan berturut-turut memahami tema-tema paragraf. Paragraf yang baik dan efektif harus pula memenuhi syarat kesatuan pikiran dan kesatuan susunan. Selain itu, pokok pikiran paragraf harus dikembangkan secara baik dalam paragraf.

Syarat-syarat umum pembentukan kalimat dan paragraf itu berlaku juga bagi penulisan karangan ilmiah. Di samping itu, kalimat bahasa keilmuan perlu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. bahasanya adalah bahasa resmi bukan bahasa pergaulan;
2. sifatnya formal dan objektif;
3. nadanya tidak emosional;
4. keindahan bahasanya perlu juga diperhatikan;
5. kemubaziran (*redundancy*) dihindari; dan
6. isinya lengkap, bayan (*clear*), ringkas, meyakinkan, dan tepat.

Kata

Swift mentakrifkan tulisan yang baik sebagai seni menempatkan "kata-kata yang wajar di tempat-tempat yang wajar". Takrif ini, walaupun terlalu sederhana, menunjukkan betapa pentingnya kata, arti kata, dan kosa kata. Arti kata harus cukup mantap. Kata dan istilah baru perlu ditegaskan artinya dengan takrif (*definition*). Kosa kata suatu bahasa harus cukup kaya untuk memudahkan pemilihan kata yang tepat.

Yang dimaksudkan dengan kata dalam bahasa Indonesia ialah kata dasar, kata ulang, dan kata majemuk. Kata ialah unit terkecil bahasa. Winfrey (1962:147) mengumpamakan kata bagi pikiran dengan atom dan materi. Kata adalah kombinasi huruf-huruf abjad dan dipakai untuk mengungkapkan

ananta (tak berhingga) banyak citra (*image*), pengalaman, gagasan, teori, patokan duga (*hypothesis*), asas, fakta, dan hukum. Serupa dengan itu, atom adalah kombinasi zarah-zarah elementer. Atom-atom itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dan gabungannya memberikan senyawa yang tak tepermanai banyaknya itu.

Mengikuti penggolongan kata menurut Aristoteles, juga kata-kata dalam bahasa Indonesia, serupa kata-kata dalam bahasa Inggris, sering dibagi dalam sepuluh jenis, yaitu : kata benda (*noun*), kata kerja (*verb*), kata sifat (*adjective*), kata keterangan (*adverb*), kata ganti (*pronoun*), kata bilangan (*numeral*), kata sambung (*conjunction*), kata depan (*preposition*), kata sandang (*article*), dan kata seru (*interjection*).

Kata-kata bahasa Indonesia dapat diperkaya dengan menciptakan istilah-istilah baru. Istilah-istilah itu pada umumnya berupa kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kata keterangan dapat disusun kata sifat dengan diawali kata *dengan*, *secara*, dan lain-lain. Istilah-istilah baru yang dibentuk dari kata-kata bahasa Indonesia yang tidak lazim lagi tidak menambah jumlah kata, tetapi menambah jumlah istilah dan arti kata. Kosa kata bukan saja menyangkut jumlah kata, tetapi juga menyangkut jumlah arti kata. Ciptaan kata-kata baru Indonesia tidak banyak (Poerwadarminta, 1967:19), tetapi tempaan dan bentukan baru cukup banyak. Dalam karangan umum kelaziman kata lebih diutamakan daripada keterangan dan kesaksamaannya. Akan tetapi, dalam karangan ilmiah, berlaku sebaliknya; dan bila perlu demi ketepatan, dibentuk kata istilah yang baru sama sekali.

Seperti dalam karangan umum, juga dalam karangan ilmiah pengarang perlu mencapai kata-kata yang terbaik untuk menyampaikan gagasan dan pikirannya kepada pembaca. Terbaiknya sesuatu kata berhubungan dengan tepat arti dan tempatnya dalam kalimat, sedap bunyinya, baik nilai rasanya, dan juga sesuai dengan suasananya (*context*).

Keringkasan Kata

Bahasa keilmuan harus singkat dan jelas. Oleh karena itu, kata-katanya harus singkat dan jelas pula.

Kata ulang dapat diringkas dengan *dwipurwa*. Analog dengan *jamu-jamu* → *jejamu*; *gala-gala* → *gegala*; *paru-paru* → *peparu*; *pura-pura* → *pepura*; *langit-langit* → *lelangit*; *laki-laki* → *lelaki*; *runtuh-runtuhan* → *reruntuhan*; *sawi-sawi* → *sesawi*; *tamu-tamu* → *tetamu*; *wangi-wangian* → *wewangian*. Oleh karena itu, dapat disingkat

pula :

<i>rata-rata</i>	<i>rerata</i>
<i>jala-jala</i>	<i>jejala</i>

Sesudah enam tahun pengalaman dengan Ejaan yang Disempurnakan, beberapa ketentuan kiranya perlu ditinjau kembali, di antaranya ialah sebagai berikut.

Penulisan kata ulang dan kata jamak dengan angka dua yang menjadi ciri khas bahasa Indonesia hendaknya diperbolehkan lagi sehingga dapat ditulis: *kupu2, rumah2, tanam2an, se-kali2, sekali2, ke-perempuan2an, ketaksempurnaan2, kata majemuk2*. Penulisan ringkasan ini menghemat tenaga, biaya, dan kertas, sedangkan keistimewaannya dapat dihargai.

Untuk kejelasan tulisan ilmiah, sebaiknya setiap satuan pengertian dilambangkan dengan satu kata, misalnya, *counter* 'alat cacah'; *vacuum* 'ruang hampa'; *hospital* 'rumah sakit'. Dalam hal ini pembentukan jamaknya pun tidak perlu timbul keraguan, misalnya, antara bentuk *alat-alat cacah* dan *alat cacah-alat cacah* karena jelas harus *alatcacah2*.

Keringkasan kata dapat diperoleh pada pembauran (*blending*) dua kata menjadi satu kata atau istilah. Contoh dalam bahasa Inggris adalah: *smoke + fog* → *smog*; *breakfas + lunch* → *brunch*; *transmitter + receiver* → *transceiver*, sedangkan contoh dalam bahasa Indonesia adalah: *mata hari* → *mentari*; *tengah hari* → *tengari*; *bagai itu* → *begitu*; *bagai ini* → *begini*; *sejak dari* → *sedari*; *semangkin sakin*; *sedia kala* → *sedekala*; *parama icvara* → *permaisuri*; *asal bunyi* → *asbun*. Sekias itu, pada pembentukan istilah fisika telah diterangkan pembauran sebagai berikut :

<i>solid</i>	'zat padat	<i>zadat</i>
<i>liquid</i>	'zat cair'	<i>zair</i>
<i>fluid</i>	'zat alir'	<i>zalir</i>
<i>smog</i>	'asap + kabur'	<i>asbut</i>
<i>fume</i>	'asap racun'	<i>ascun</i>
<i>transceiver</i>	'pemancar + penerima'	<i>pemcerima</i>

Keringkasan kata terdapat juga pada akronim dan singkatan-singkatan (*abbreviation*). Akronim adalah singkatan yang terbentuk dari satu atau lebih

huruf dari kata-kata utama suatu nama istilah majemuk dan menjadi suatu kata yang wajar, misalnya : *Sekjen* → *Sekretaris Jenderal*, *radar* → *radio detecting and ranging*; *laser* → *light amplification by stimulated emission of radiation*.

Pada singkatan perlu diperimbangkan usul Prof. Eisenring dalam *Sinar Harapan*¹ tanggal 18 Juli 1978 agar ditinjau kembali ketentuan mengenai penempatan titik pada singkatan dalam Ejaan yang Disempurnakan. Usulnya ialah agar titik tidak perlu dibubuhi pada akhir singkatan bila huruf akhir singkatan sama dengan huruf akhir kata yang disingkat. Dalam hal ini bentuk-bentuk seperti :

<i>Sdr.</i>	singkatan dari	<i>Saudara</i>
<i>Prof.</i>	singkatan dari	<i>Profesor</i>
<i>Ny.</i>	singkatan dari	<i>Nyonya</i>
<i>dst.</i>	singkatan dari	<i>dan seterusnya</i>
<i>dg.</i>	singkatan dari	<i>dengan</i>

Bp. singkatan dari *Bapak*, yang ditulis dengan titik, selanjutnya tidak perlu dibubuhi tanda titik. Misalnya :

<i>sdg</i>	singkatan dari	<i>sedang</i>
<i>sdn</i>	singkatan dari	<i>sama dengan</i>
<i>tgl</i>	singkatan dari	<i>tanggal</i>
<i>ttgl</i>	singkatan dari	<i>tertanggal</i>
<i>yg</i>	singkatan dari	<i>yang</i>
<i>Tn</i>	singkatan dari	<i>tuan</i>
<i>Dr</i>	singkatan dari	<i>dokter</i>
<i>dr</i>	singkatan dari	<i>dokter</i>
<i>Ir</i>	singkatan dari	<i>insinyur</i>

Pada pembentukan istilah hendaknya dipilih bentuk ringkas kata dan bukan panjangnya serta dipilih kata dasar dan bukan kata turunan atau kata majemuk.

Hendaknya dipilih istilah-istilah sebagai berikut.

<i>set</i>	→	<i>anggu</i>	bukan <i>peranggu</i>
------------	---	--------------	-----------------------

<i>foil</i>	→	<i>kerjang</i>	bukan <i>kerajang</i>
<i>spark</i>	→	<i>latu</i>	bukan <i>lелatu</i>
<i>circuit</i>	→	<i>untai</i>	bukan <i>rangkaian</i>
<i>curve</i>	→	<i>liku</i>	bukan <i>garis lengkung</i>

Faedah penggunaan kata dasar untuk istilah ialah bahwa dari kata dasar itu masih dapat diturunkan kata turunan untuk menerjemahkan kata turunan asing.

Contoh :

<i>circuitry</i>	→	<i>untaian</i>
<i>curvature</i>	→	<i>kelikuan</i>

Pilihan Kata

Seorang penulis adalah seorang pemilih dan pengatur kata dalam kalimat dengan maksud agar dalam benak (*mind*) pembaca kalimatnya itu akan dapat timbul pikiran (*thoughts*) dan citraan (*imageries*) yang sama seperti yang ada dalam benaknya sendiri. Memilih dan menata kata secara tepat bukan suatu pekerjaan yang mudah karena sebuah kata selain mempunyai arti tersurat (*explicit*) mempunyai juga arti tersirat (*implicit*). Arti tersuratnya pun dapat banyak dan tidak semua arti itu tercantum dalam kamus, baik kamus umum maupun kamus khusus. Lagi pula arti sebuah kata dapat berubah dengan tempatnya dalam kalimat. Pascal mengatakan: "Kata diatur lain mempunyai arti lain, dan arti diatur lain memberi kesan lain.

Arti tersurat suatu kata merujuk (*refer*) pada *rinujuknya* (*referent*) yang dapat *maujud* (*concrete*) ataupun *mujarad* atau *niskala* (*abstract*). Arti tersirat suatu kata ialah arti tambahan (*connotation*) yang terdapat dalam benak pembaca, dan berbeda dari arti tersuratnya.

Seorang penulis akan lebih mudah memilih kata-kata yang serasi bila ia menguasai kosa kata (*vocabulary*) yang cukup besar yang dapat ia usahakan kalau kosa kata bahasa Indonesia cukup besar pula. Bahasa Indonesia bagi komunikasi ilmiah akan lebih bila kosa katanya diperkaya dengan kata-kata dan istilah-istilah baru. Istilah-istilah baru ini harus dipilih secara rasional dalam rangka ketepatan, keseragaman, kesedapan bunyi, konotasi, dan keringkas. Bahasa keilmuan terutama mengkomunikasikan pikiran dan bukan

perasaan sehingga perlu dibatasi pemakaian kata-kata yang ada arti konotatifnya. Istilah-istilah asing yang tidak berkonotasi diterjemahkan ke dalam istilah Indonesia yang tidak berkonotasi, dan istilah asing yang berkonotasi diterjemahkan ke dalam istilah Indonesia yang berkonotasi pula.

Contoh :

<i>random</i>	→	<i>rambang</i>
<i>erratic</i>	→	<i>acak</i>

Pilihan istilah dapat lebih rasional dengan menyusun dahulu *anggu* (*set*) istilah bersistem yang dapat dibuat berupa *anggu* kata turunan (*peradicum*), *anggu* kata kawan (*synonims*), *anggu* kata sebidang, dan *anggu* kata seimbuan. Contoh kata turunan dengan kata dasar *continue* diberikan di bawah. Demikian juga halnya dengan *anggu* kata dengan beberapa imbuan "baru".

Pilihan kata dalam kalimat (*diction*) dilakukan sesuai dengan bahasa baku. *Kata-kata untuk pelembutan* (*euphemism*) dan *majas* (*figures of speech*) tidak banyak diperlukan dalam bahasa keilmuan, tetapi ada juga, misalnya : *awan elektron*, *lubang positif*, *waktu terbang*. Majas seperti *pepindan* (*metaphor*), dan *tamsil* (*simile*) bekerja dengan kias (*analogue*), yaitu membandingkan sesuatu yang kurang terkenal dengan yang lebih terkenal.

Anggu Kata Turunan Continue

Arti *continues* dan *continuity* dalam matematika berbeda jauh dari arti sinambung dan berlanjut, kesinambungan dan keberlanjutan karena ditafsirkan bahwa sebuah fungsi $f(x)$ disebut *continuous* di titik $x = a$ bila terpenuhi ketiga-tiga syarat :

1. $f(x)$ mempunyai nilai tertentu $f(a)$ di $x = a$
2. limit $f(x)$ bila x mendekati a ada = L .
3. limit L itu sama dengan $f(a)$.

Berhubungan dengan itu, *continous* tidak diterjemahkan dengan sinambung atau berlanjut tetapi dengan *malar* dan *continuity* dengan *kemalaran*. Dalam bahasa keilmuan diusulkan *anggu* istilah bersistem (paradigma) yang menyangkut kata *continue* sebagai berikut.

<i>continual</i>	→	<i>sinambung</i>
<i>continually</i>	→	<i>secara sinambung</i>
<i>continuance</i>	→	<i>kesinambungan</i>
<i>continuant</i>	→	<i>bunyilanjut (dalam linguistika)</i>
<i>continue</i>	→	<i>melanjutkan</i>
<i>continuation</i>	→	<i>kelanjutan</i>
<i>continuative</i>	→	<i>berlanjut</i>
<i>constinuatively</i>	→	<i>secara berlanjut</i>
<i>continuativity</i>	→	<i>keberlanjutan</i>
<i>continuator</i>	→	<i>pelanjut</i>
<i>continue</i>	→	<i>memalarkan</i>
<i>continued</i>	→	<i>termalar</i>
<i>continuing</i>	→	<i>bermalar</i>
<i>continuable</i>	→	<i>termalarkan</i>
<i>continuability</i>	→	<i>ketermalaran</i>
<i>continuer</i>	→	<i>pemalar</i>
<i>continuity</i>	→	<i>kemalaran</i>
<i>continuous</i>	→	<i>malar</i>
<i>continuosly</i>	→	<i>secara malar</i>
<i>continuousness</i>	→	<i>kebermalaran</i>
<i>continuum</i>	→	<i>keserbamalaran</i>

Imbuan "Baru"

Dalam pembentukan istilah baru, beberapa imbuan lama Indonesia dapat dimanfaatkan sambil penerapannya diseragamkan. Awalan *awa-* dipakai untuk menerjemahkan awalan Inggris *de-*, dan *dis-*, yang berarti *menghilangkan*.

Contoh :

deodor → *awabau*

<i>dehydrate</i>	————→	<i>awaair</i>
<i>dehumidity</i>	————→	<i>awalengas</i>
<i>desinfect</i>	————→	<i>awahama</i>
<i>devoice</i>	————→	<i>awasuara</i>
<i>decontaminate</i>	————→	<i>awacemar</i>

Awalan *nir-* dipakai untuk menerjemahkan awalan Inggris *a-*, *an-*, *in-*, *non-*, dan akhiran Inggris *-less*, atau bentuk lain yang berarti *tanpa*, ataupun *tak ber-*.

Contoh :

<i>amorphous</i>	————→	<i>nirbangun</i>
<i>apathy</i>	————→	<i>nirasa</i>
<i>anonymous</i>	————→	<i>nirnama</i> (N.N.)
<i>anhydrous</i>	————→	<i>nirair</i>
<i>inanimate</i>	————→	<i>nirnyawa</i>
<i>nondegree</i>	————→	<i>nirgelar</i>
<i>nonsense</i>	————→	<i>nirarti</i>
<i>voiceless</i>	————→	<i>nirsuara</i>
<i>dissipationless</i>	————→	<i>nirlesap</i>
<i>intransitive</i>	————→	<i>nirsambut</i>

Awalan *tuna-* dipakai dalam arti *kurang* pada pembentukan beberapa istilah.

Contoh :

<i>deaf</i>	————→	<i>tunarungu</i>
<i>amoral</i>	————→	<i>tunasusila</i>
<i>roofless</i>	————→	<i>tunawisma</i>

Awalan *tan-* dipakai untuk menerjemahkan awalan Inggris *an-*, *in-* atau *non-*, yang berarti "bukan".

Contoh :

<i>nonmental</i>	→	<i>tanlogan</i>
<i>nonspeech sound</i>	→	<i>bunyi tanbahasa</i>
<i>nonsyllabic</i>	→	<i>tansuku</i>
<i>nonvocoid</i>	→	<i>tanvokoid</i>
<i>anorganic</i>	→	<i>tanorganik</i>
<i>inorganic</i>	→	<i>tanorganik</i>

Awalan *bak-* dipakai untuk diterjemahkan akhiran Inggris *-like, -ous, dan -ine*, yang berarti sebagai.

Contoh :

<i>space-like</i>	→	<i>bakruang</i>
<i>electron-like</i>	→	<i>bakelektron</i>
<i>vitreous</i>	→	<i>bakkaca</i>
<i>gelatineous</i>	→	<i>bakagar</i>
<i>adamantine</i>	→	<i>bak intan</i>

Awalan *tak-* dipakai untuk menerjemahkan awalan Inggris *a-, ab-, il-, im-, ir-, un-, non-, de-, dan dis-*, yang berarti tidak.

Contoh :

<i>asocial</i>	→	<i>taksosial</i>
<i>abnormal</i>	→	<i>takbiasa</i>
<i>impure</i>	→	<i>taksuci</i>
<i>insufficient</i>	→	<i>takcukup</i>
<i>irregular</i>	→	<i>takteratur</i>
<i>unable</i>	→	<i>taksanggup</i>
<i>non essential</i>	→	<i>takpenting</i>
<i>deest</i>	→	<i>takada</i> (dalam filologi)
<i>discontent</i>	→	<i>takpuas</i>

Awalan *nara-* dipakai untuk menerjemahkan istilah Inggris *person*.

Contoh :

<i>convicted person</i>	→	<i>narapidana</i>
<i>resource person</i>	→	<i>narasumber</i>

Sisipan *-in-* dipakai untuk menerjemahkan akhiran Inggris *-end*, *-and*, dan *-ent*, yang berarti *yang di-* . . . *-kan*, dan dalam menerjemahkan istilah yang mengandung arti seperti itu.

Contoh :

<i>addend</i>	→	<i>tinambah</i>
<i>subtrahend</i>	→	<i>kinurang</i>
<i>minuend</i>	→	<i>sinusut</i>
<i>dividend</i>	→	<i>binangi</i>
<i>son in law</i>	→	<i>minantu</i>
<i>integrand</i>	→	<i>rinangkun</i>
<i>operand</i>	→	<i>kinandar</i>
<i>referent</i>	→	<i>rinujuk, inacu</i>

Dalam hal kata dasar mulai dengan vokal seperti pada *acu*, sisipan *-n-* menjadi awalan. Dalam $5 + 3 = 8$, maka 3 = tinambah. Dalam $5 - 3 = 2$, *-in-* maka 3 adalah *kinurang* dan 5 adalah *sinusut*. Dalam $6 : 2$, maka 6 adalah *binagi*. Dalam $S y dx$ maka y adalah *rinangkun*. Dalam Vr maka r adalah *kinandar*. Kata-kata dengan awalan *awa-* adalah kata kerja, yang dengan awalan *nir-*, *tuna-*, *tan-*, *bak-*, dan *tak-* adalah kata sifat dan yang dengan awalan *nara-*, dan sisipan *-in-* adalah kata benda.

Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam bahasa Inggris sering dipakai beberapa awalan dan akhiran untuk pengertian yang sama, suatu hal yang tidak memudahkan bahasa itu. Berhubung dewasa ini terdapat kesempatan untuk membina tata istilah Indonesia secara rasional, dengan kaidah-kaidah penyeragaman, bahasa Indonesia dapat dijadikan lebih mudah.

Kesimpulan

Gaya bahasa keilmuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu agar mampu mengkomunikasikan pikiran, gagasan, dan paham secara lengkap, *bayan (clear)*, ringkas, dan tepat, Bahasa Indonesia perlu terus dibina untuk memenuhi syarat-syarat bahasa keilmuan. Diperlukan penyeragaman, peng-

anekaan, dan pementapan istilah dan arti kata. Dengan pengabdian dan ketekunan dari semua pihak, pekerjaan ini tidak perlu terlalu sukar.

Catatan

1. Prof. Dikwan Eisenring dalam karangannya di harian ini berjudul : Beberapa pertanyaan tentang E.Y.D., mengusulkan agar :
 - a. Huruf x dalam kata pungutan tetap x.
 - b. Akhiran *-age* dalam kata pungutan diganti *aze*
 - c. Dipakai angka dua (2) untuk jamak.
 - d. Dimanfaatkan apostrof untuk membedakan antara,
 - Rektor' baru dilantik tgl 15 Mei.
 - Rektor baru' dilantik tgl 15 Mei,

2. Perlu dibedakan :

<i>voiceless</i>	– nirsuara
<i>devoice</i>	– awasuara
<i>unvoiced</i>	– taksuara = tak disuarakan

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Takdir. 1977. *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia*. Jilid I. Jakarta : Penerbit Dian Rakyat.
- Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1977. *Kamus Istilah Filologi*. Yogyakarta: (belum diterbitkan).
- Fokker, A.A. 1972. *Sintaksis Indonesia*. Djakarta: Pradnja Paramita.
- Jacobs, Suzanne A, and Roderick A. Jacobs, 1973. *The College Writer's Handbook*. New York: John Wiley & Sons
- Jawatankuasa Istilah Linguistik, 1972. *Istilah Linguistik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1967. *ABC Karang Mengarang*. Yogya: U.P. Indonesia.
- Keraf, Gorys. 1978. *Tatabahasa Indonesia*. Ende: Nusa Indah.
- Keraf, Gorys. 1977. *Komposisi*. Ende. Nusa Indah, pp. 35–40.
- Kakonis, Tom E. dan Evans, David Allens. 1971. *From Language to Idea*. Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- McCrimmon, James M., 1967 *Writing with a Purpose. From Source to Statement*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Winfrey, Robley. 1962. *Technical and Business Report Preparation*. The Iowa State University Press, p. 147.
- Sklare, Arnold B. 1964. *Creative Report Writing*. New York: McGraw Hill.
- Turabian, Kate L., *A Manual for Writers*. The University of Chicago Press.

PENERJEMAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Maurits Simatupang

Universitas Indonesia

Pendahuluan

Keadaan Penerjemahan pada Umumnya di Indonesia

Jauh sebelum Perang Dunia II, bahkan sebelum Perang Dunia I, penerjemahan sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia, terutama di bidang agama 1 dan sastra 2. Keperluan penerjemahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada waktu itu tidak begitu diperlukan karena pada umumnya orang-orang Indonesia yang berpendidikan dapat memperoleh atau menambah ilmunya melalui bahasa Belanda, yang merupakan bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Sejak masuknya Jepang ke Indonesia sampai saat ini, boleh dikatakan bahwa memperoleh dan menambah ilmu sebagian besar dilakukan dengan perantaraan bahasa Indonesia, dan celakanya, buku atau karya ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia jumlahnya sangat sedikit. Sejak saat itu sebenarnya, penerjemahan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah diperlukan. Walaupun demikian, usaha penerjemahan di bidang ini baru mendapat perhatian dari Pemerintah dalam Pelita I. Di pihak lain, usaha pihak swasta di bidang penerjemahan pada umumnya terlihat meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada umumnya mereka menerjemahkan cerita-cerita rekaan dan buku yang diperkirakan akan laris di pasaran. Ada pula yang memberanikan diri menerjemahkan buku-buku ilmiah populer bagi remaja. Mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dan ketinggalannya kita dalam kedua bidang ini serta terbatasnya kemampuan kita untuk menulis karya asli

dalam kedua bidang ini, usaha penerjemahan sebenarnya semakin diperlukan. Bahwa demikian halnya kiranya dapat diperiksa dengan kenyataan yang terdapat diperguruan tinggi misalnya, yaitu :

1. sebagian besar informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi ditulis dalam bahasa asing dan sangat sedikit yang ditulis dalam bahasa Indonesia;
2. sebagian besar konsumen ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat atau sulit memperolehnya dari sumber aslinya karena mereka tidak menguasai secara baik bahasa sumbernya.

Walaupun kebutuhan di bidang penerjemahan ini sangat dirasakan, usaha yang dilakukan untuk mencukupinya belum banyak membawa hasil karena kemampuan kita pun di bidang penerjemahan masih terbatas. Hal ini dapat dilihat antara lain dari jumlah maupun bidang yang diterjemahkan. Selanjutnya, keterbatasan kita di bidang terjemahan ini bersumber pada sedikitnya penerjemahan yang kita miliki, apalagi kalau jumlah yang ada itu harus diperinci menurut spesialisasi yang terdapat dalam dunia penerjemahan dewasa ini.

Tampaknya dalam pengadaan prasyarat-prasyarat untuk penerjemahan kita pun sangat ketinggalan. Sekolah untuk mendidik penerjemah, misalnya, baru ada satu di seluruh Indonesia, yaitu yang diasuh oleh Universitas Nasional, Jakarta. Di beberapa fakultas sastra memang diajarkan teori dan latihan menerjemahkan ala kadarnya yang biasanya diberikan oleh pengajar yang tidak mempunyai pendidikan khusus untuk itu. Dapat dibayangkan kalau hasil pendidikan yang serba tanggung demikian tidak menghasilkan penerjemah yang terampil. Akademi-akademi bahasa asing pun mencantumkan mata pelajaran terjemahan dalam kurikulumnya. Setahu saya, mata pelajaran terjemahan di akademi-akademi ini pun diberikan oleh pengajar yang tidak mempunyai pendidikan khusus untuk itu.

Penerjemahan di luar bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tampak berkembang beberapa tahun terakhir ini, misalnya, penerjemahan kontrak jual-beli, akte notaris, undang-undang dan peraturan-peraturan Pemerintah yang bertalian dengan dunia bisnis. Penerjemahan demikian biasanya dilakukan oleh penerjemah yang disumpah (HPI. 1978:357).

Dalam hubungan dengan organisasi profesi penerjemah, kita dapat mencatat adanya Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) yang berpusat di Jakarta, Persatuan Penerjemah Indonesia (HPI) yang berpusat di Jakarta, Persatuan

Penterjemah Indonesia Surabaya dan Badan Kontak Penterjemah Disumpah. Selain itu, ada pula kelompok-kelompok penerjemah yang khusus menangani buku-buku dan naskah-naskah ilmiah untuk beberapa penerbit (HPI, 1978: 357).

Penulisan Karya Asli, Penerjemahan atau Penyaduran

Kita mengetahui bahwa pengadaan buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan. Ada tiga kemungkinan untuk mengatasinya, yaitu :

1. penulisan karya asli, baik yang berupa buku pelajaran maupun yang berupa buku bacaan;
2. penerjemahan; dan
3. penyaduran.

Selanjutnya, perlu diteliti kemungkinan mana dari ketiga kemungkinan itu yang paling mudah dilaksanakan mengingat situasi Indonesia dewasa ini.

Penulisan Karya Asli

Penulisan karya asli yang dimaksud di sini ialah penulisan karya ilmiah dan buku pelajaran untuk perguruan tinggi.

Untuk menangani penulisan karya asli ini sebenarnya ada tenaga di kalangan perguruan tinggi. Dan mengingat latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar mereka, secara teoritis, penulisan karya asli ini dapat dikerjakan. Walaupun demikian, tampaknya mereka tidak dapat berbuat banyak karena adanya hambatan-hambatan yang sifatnya sama sekali tidak ilmiah. Bahwa kelompok ini mempunyai potensi untuk menulis karya asli, secara tidak langsung dapat dalam majalah dan surat kabar dewasa ini. Ditinjau dari jumlah, cakupan, dan mutu tulisan-tulisan itu dapat dikatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini potensi untuk menulis itu semakin berkembang. Adanya usaha penulisan diktat dapat juga dipakai sebagai ukuran adanya potensi dan minat menulis. Jika potensi dan minat yang ada ini ditambah dengan pendidikan atau latihan menulis buku dapat diharapkan bahwa dalam 10 tahun mendatang potensi yang ada itu akan berkembang menjadi kemampuan.

Seperti telah dikemukakan di atas, faktor-faktor penghambat dalam penulisan karya asli bukanlah faktor-faktor penghambat yang sifatnya ilmiah. Banyak dari tenaga yang sebenarnya dapat dihadapkan menulis karya asli menghabiskan tenaga dan waktunya di bidang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang langsung dapat dinikmatinya. Telah menjadi rahasia umum bahwa penghasilan dosen tidak akan memungkinkannya untuk memperdalam ilmunya dan mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika ia memilih pekerjaan yang tidak begitu banyak memeras pikiran dan tenaganya tetapi yang langsung memberikan imbalan. Selain itu, walaupun ia berhasil menulis naskah, belum tentu ada penerbit yang mau mengambil resiko untuk menerbitkannya, apalagi jika naskahnya berupa naskah buku pelajaran di bidang ilmu yang peminatnya sedikit. Untunglah Pemerintah menyadari adanya hambatan-hambatan ini. Dosen yang dianggap cukup ahli di dalam bidangnya ditawarkan dana untuk penulisan karya asli. Dari 61 judul yang direncanakan selesai dalam PELITA I, ternyata 31 judul yang selesai, dan 13 di antaranya telah diterbitkan. Ini berarti bahwa dalam PELITA I hanya 5 atau 6 naskah yang dapat dihasilkan dalam setahun. Untuk PELITA II datanya adalah sebagai berikut.

Tahun	Target	Selesai	Terbit
1976/1977	23 judul	1 judul	1 judul
1977/1978	6 judul	—	—

Sebenarnya dana yang tersedia untuk tahun 1976/1977 belum terpakai seluruhnya; begitu pula dana untuk tahun 1977/1978.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah judul yang dapat diselesaikan masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah judul yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tidaklah realistis kalau kita hanya mengandalkan penulisan karya asli dalam usaha pengadaan buku, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk sekedar memberikan gambaran umum mengenai kemampuan Indonesia dalam penulisan buku baru, baiklah kutipan berikut (*Kompas*, 14 September 1978) kita perhatikan :

Tahun	1975	: 2187 judul
	1976	: 2052 judul
	1977	: 1764 judul

Dalam tabel di atas tidak terlihat perincian tentang jenis buku yang diterbitkan. Angka-angka itu menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh ketinggalan, misalnya, dari Amerika Serikat yang menghasilkan rata-rata 200.000 judul per tahun.

Seandainya kita memaksakan untuk menghasilkan 100 judul karya asli yang tebalnya rata-rata 250 halaman dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masing-masing judul rata-rata 1 tahun dan penulisannya kita serahkan kepada para pengajar perguruan tinggi, kita dapat membayangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin ditimbulkannya. Untuk tugas itu tentunya keseratus pengajar yang bersangkutan harus dibebaskan dari tugasnya sehari-hari selama satu tahun, atau paling sedikit tugasnya diringankan. Mengingat langkanya tenaga pengajar yang benar-benar kompeten di bidangnya, usaha demikian barangkali lebih merugikan daripada menguntungkan.

Di beberapa perguruan tinggi ada maksud menerbitkan skripsi dan tesis doktor yang dianggap cukup bermutu. Khusus mengenai tesis doktor, banyak atau malah sebagian besar daripadanya ditulis dalam bahasa asing (sebagian besar doktor-doktor Indonesia adalah lulusan luar negeri) sehingga walaupun tesis-tesis itu akan diterbitkan, tesis-tesis itu perlu diterjemahkan lebih dulu, kalau memang yang menjadi sasarannya adalah mahasiswa Indonesia. Lagi pula, skripsi atau tesis doktor biasanya merupakan hasil penelitian yang mendalam mengenai topik yang terbatas sehingga untuk usaha pengadaan buku pelajaran penerbitan skripsi dan tesis ini, secara langsung, tidak begitu bermanfaat karena justru buku-buku tekslah yang sangat diperlukan sekarang ini.

Penerjemahan Karya Ilmiah

Setelah melihat kesulitan-kesulitan yang terdapat dan mungkin dihadapi dalam penulisan karya asli dalam bahasa Indonesia, kita tentunya terhadap kelangkaan buku yang terdapat dewasa ini dapat diatasi dengan usaha penerjemahan. Pertama-tama, kita akan melihat apa saja yang telah dilakukan dalam bidang ini. Sejalan dengan usaha penulisan karya asli, usaha penerjemahan karya ilmiah pun dicoba digiatkan di kalangan perguruan tinggi. Konsorsia memilih judul buku yang akan diterjemahkan dan hasil penerjemahannya ditawarkan kepada dosen-dosen yang dianggap ahli dalam bidang yang bersangkutan. Kenyataan menunjukkan bahwa usaha di bidang ini pun tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Keadaan sampai saat ini adalah sebagai berikut.⁴

	Target	Selesai	Terbit
1. PELITA I	54 judul	24 judul	9 judul
2. PELITA II			
1976/1977	15 judul	4 judul	—
1977/1978	16 judul	—	—

Kesulitan yang dihadapi saya kira tidak jauh berbeda dari kesulitan yang dihadapi dalam penulisan karya asli. Imbalan langsung yang diperoleh penerjemah tidak begitu menarik jika dibandingkan dengan imbalan langsung yang dapat diperoleh dari pekerjaan lain yang tidak memerlukan pikiran, tenaga, dan waktu yang banyak.

Jika dibandingkan dengan penulisan karya asli, penerjemahan sebenarnya tidak begitu sulit. Hal ini dapat dimaklumi karena penerjemah tidak perlu lagi mengumpulkan, mengolah, dan menyusun materi tulisan seperti halnya dalam penulisan karya asli. Jadi, faktor-faktor yang dihadapi antara lain adalah : imbalan, waktu, kemahiran dalam bahasa sumber, penguasaan materi yang akan diterjemahkan, dan kemampuan menerjemahkan biasanya diserahkan kepada orang yang dianggap ahli dalam bidang yang akan diterjemahkan, faktor yang mungkin menjadi penghambat dapat diperkecil menjadi: imbalan, waktu, dan kemampuan menerjemahkan. Jika faktor imbalan teratasi, faktor waktu pun kiranya dapat diatasi sehingga hambatan yang masih ada hanyalah kemampuan menerjemahkan. Penguasaan bahasa sumber tidak menjadi penghalang karena biasanya seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu itu tidak mengalami kesulitan dalam memahami teks asli yang akan diterjemhkannya.

Kemahiran menerjemahkan dapat ditingkatkan dengan memberikan dasar-dasar teori terjemahan kepada calon penerjemah. Untuk ini, tidak banyak waktu yang diperlukan. Tiga bulan barangkali sudah cukup.

Hal lain yang kiranya perlu diperhatikan dalam usaha penerjemahan karya ilmiah ialah bahwa tulisan mengenai bidang ini biasanya lebih cepat *kedaluwarsa* daripada tulisan mengenai sastra atau kebudayaan misalnya. Oleh karena itu, faktor kecepatan menerjemahkan perlu diperhatikan. Penerjemahan hendaknya harus sudah siap setahun setelah teks aslinya diterbitkan.

Penyaduran Karya Ilmiah

Kemungkinan ketiga yang akan kita bicarakan sehubungan dengan pengadaan buku ini ialah usaha penyaduran. Menyadur, seperti kita ketahui, relatif lebih mudah daripada menerjemahkan dan jauh lebih mudah daripada menulis karya asli. Bagi seorang penyadur telah tersedia bahan yang sudah jadi, baik ditinjau dari segi isi maupun susunan dan penyajiannya. Yang perlu diperhatikannya ialah menentukan dengan tepat bagian-bagian yang penting dari isi buku yang hendak disadurnya tanpa merusak susunan dan kebulatan karya asli. Ada dua cara yang dapat ditempuhnya dalam menyadur:

- 1) menerjemahkan (dalam arti sesungguhnya) bagian-bagian penting dari buku asli tanpa mengubah susunan karya aslinya, dan
- 2) memindahkan isi bagian-bagian yang telah dipilihnya ke dalam bahasa sasaran tanpa harus mempertahankan bentuk aslinya.

Menyadur seperti diterangkan di atas lebih dekat pada pekerjaan membuat ringkasan dalam bahasa sasaran dan ditinjau dari corak pekerjaan yang diperlukan dalam menyadur barangkali dapat dikatakan bahwa dari ketiga kemungkinan yang dapat ditempuh dalam pengadaan buku dalam bahasa Indonesia usaha penyaduran inilah yang lebih mudah dilakukan.

Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Berbahasa Inggris

Usaha penulisan karya asli dalam bahasa Indonesia dan juga usaha penerjemahan dan penyaduran erat hubungannya dengan taraf kemampuan mahasiswa berbahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita meninjau kemampuan berbahasa Inggris di kalangan mahasiswa Indonesia.

Kemampuan berbahasa Inggris, baik aktif maupun pasif, mahasiswa Indonesia pada umumnya rendah. Persoalan ini sebenarnya sudah harus diselesaikan di sekolah menengah. Walaupun demikian, di perguruan tinggi diusahakan juga peningkatan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa melalui mata pelajaran bahasa Inggris yang diwajibkan untuk cabang-cabang ilmu tertentu. Mata pelajaran bahasa Inggris ini diberikan pada tahun pertama dan ada kalanya sampai tahun kedua atau ketiga. Tujuan utamanya ialah agar mahasiswa pada tingkat lanjut studinya dapat membaca buku-buku yang bertalian dengan bidang studinya dalam bahasa Inggris tidak juga memuaskan. Banyak faktor yang kita duga menjadi penyebabnya dan cukuplah kalau kita menyebut beberapa di antaranya.

Mengingat banyaknya sekolah menengah dan langkanya guru bahasa Inggris yang cukup bermutu, tidaklah mengejutkan kalau kemampuan berbahasa Inggris lulusan sekolah menengah rendah dan usaha untuk mengatasi persoalan bahasa Inggris ini di sekolah menengah merupakan tugas yang berat dan sangat mahal. Sebenarnya problem ini tidak dapat dipisahkan dari problem umum yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita dewasa ini. Besar kemungkinan bahwa persoalan bahasa Inggris ini erat hubungannya dengan tidak berfungsinya secara baik sistem seleksi yang digunakan sekarang ini. Kita masih dapat mengingat, misalnya, bahwa pada zaman sebelum Perang Dunia II seleksi sangat ketat dilakukan sejak sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Seleksi tidak hanya didasarkan pada kemampuan anak didik, tetapi juga pada faktor-faktor lain, misalnya, latar belakang ekonomi dan sosialnya. Tidaklah mengherankan kalau pada waktu itu sedikit sekali orang Indonesia yang sampai ke perguruan tinggi dan sebelum mereka sampai ke sana mereka harus melalui beberapa tahap dan jenis seleksi. Sudah jelas bahwa orang-orang demikian tentunya mempunyai kemungkinan yang besar untuk menyelesaikan studinya. Mereka tergolong apa yang disebut *the cream of the cream Indonesia*.

Khusus mengenai faktor yang erat hubungan dengan belajar bahasa hal berikut dapat dikemukakan, Dalam belajar bahasa asing tampaknya apa yang disebut "bakat bahasa" (*language aptitude*) memegang peranan penting juga. Berhasil atau tidaknya seseorang belajar bahasa asing atau cepat-lambatnya ia dapat menguasai bahasa yang dipelajarinya bergantung pada "bakat bahasa" itu (Carroll, 1971; Simatupang, 1974). Berdasarkan hasil *language aptitude test* dapat diramalkan apakah seseorang akan berhasil dalam pelajaran bahasa atau tidak, atau setidaknya-tidaknya, dapat diramalkan kecepatan belajarnya. Untuk menghemat tenaga dan biaya barangkali ada baiknya kalau kita memakai *language aptitude test* dalam pengajaran bahasa asing. Berdasarkan hasil tes demikian dapat diketahui apakah seseorang mempunyai "bakat" untuk belajar bahasa asing atau tidak dan, bila perlu, pengajaran bahasa asing hanya diberikan kepada orang-orang yang "berbakat".

Apakah Ada Korelasi antara "Kemerosotan Mutu Ilmiah" dan Sedikitnya Bahan Bacaan yang Dapat Dipahami oleh Mahasiswa

Orang menduga adanya "kemerosotan mutu ilmiah" di perguruan tinggi Indonesia dewasa ini dan "kemerosotan" ini dihubungkan dengan sedikitnya bahan bacaan yang dapat dipahami oleh mahasiswa karena sebagian

besar bahan pustaka ditulis dalam bahasa Inggris. Dugaan ini didasari oleh setidaknya-tidaknya dua asumsi, yaitu 1) mahasiswa tidak memahami isi bacaan yang ditulis dalam bahasa Inggris, dan 2) hal ini merupakan akibat dari penguasaan bahasa Inggris mahasiswa yang tidak memadai. Selanjutnya, dugaan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk hipotesis berikut. Ada korelasi antara mutu ilmiah dan taraf penguasaan bahasa Inggris mahasiswa.

Untuk menentukan benar tidaknya dugaan di atas, pertama-tama kita akan membedakan dua hal, yaitu kemampuan membaca *an sich* (biasanya dalam bahasa ibu) dan kemampuan membaca dalam bahasa asing (Inggris).

Setahu saya, penelitian mengenai kemampuan membaca *an sich* belum banyak dilakukan di Indonesia. Namun, orang sering mengeluh bahwa kemampuan membaca lulusan sekolah menengah, bahkan mahasiswa, tidak memadai. Beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebabnya ialah : 1) cara mengajarkan membaca yang tidak tepat, 2) penyediaan bahan bacaan yang tidak memadai, baik dalam jumlah maupun mutu, dan 3) tidak adanya minat dan kebiasaan membaca.

Sekarang kita akan melihat hubungan kemampuan membaca dalam bahasa ibu dan kemampuan membaca dalam bahasa asing. Beberapa penelitian yang dilakukan belakangan ini (Thammongkol, 1976) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kemampuan membaca yang terbentuk melalui bahasa ibu (pertama) dan kemampuan membaca dalam bahasa asing. Dengan kata lain, kemahiran membaca dalam bahasa ibu dapat dialihkan menjadi kemahiran membaca dalam bahasa asing (yang dikuasainya, tentunya). Jika pendapat ini memang benar, ketidakmampuan mahasiswa membaca dalam bahasa Inggris, misalnya, mungkin juga disebabkan oleh ketidakmampuan membacanya dalam bahasa ibu atau bahasa pertamanya.

Untuk sekedar memberikan pengertian tentang kemampuan membaca, berikut ini terdapat beberapa tujuan membaca seperti dikemukakan oleh Deboer dan Dallman (dikutip dalam Sadtono, 1976:63-64):

1. menemukan pokok pikiran yang terdapat dalam tulisan;
2. membedakan keterangan tambahan yang perlu dan tidak begitu perlu tentang pokok pikiran;
3. menjawab pertanyaan tentang isi tulisan,
4. membuat generalisasi,

5. mengikuti petunjuk;
6. membuat penilaian secara kritis;
7. membaca grafik, tabel, dan peta;
8. menemukan arti frase;
9. menemukan arti kalimat,
10. menemukan arti alinea; dan
11. mengerti tulisan secara keseluruhan. (Terjemahan penulis).

Membaca, seperti terlihat juga dari beberapa tujuan yang dikemukakan di atas, merupakan proses yang kompleks yang melibatkan keberapa kemampuan yang saling berhubungan secara sekaligus (Slobin, 1971; Mackey, 1976) dan sebagian daripadanya merupakan kemampuan yang tergolong bidang kognitif yang sifatnya dapat dibedakan dari sifat kemampuan berbahasa. Jadi, jika seseorang mampu berbahasa, tidaklah secara otomatis dia mampu membaca, yaitu memahami isi bacaan dengan baik.

Khusus mengenai membaca dalam bahasa asing, Chastain (1976:309) berkata bahwa membaca berarti dapat memproses isi bacaan dalam bahasa asing yang bersangkutan tanpa harus menerjemahkannya ke dalam bahasa ibu.

Sekarang kita akan mencoba melihat apakah ada korelasi antara mutu ilmiah di kalangan mahasiswa dan taraf penguasaan bahasa Inggris mereka. Penelitian mengenai hal ini belum pernah saya temukan dalam kepustakaan Indonesia. Oleh karena itu, pembicaraan saya mengenai hal ini akan saya dasarkan pada hasil penelitian mengenai hal yang kira-kira serupa yang pernah dilakukan di tempat lain. Pertama-tama, kita akan menyinggung sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan "mutu ilmiah". Mutu ilmiah, saya kira, sukar diukur. Oleh karena itu, saya akan memberanikan diri mendekatinya dengan cara yang sederhana. Barangkali mutu ilmiah dapat dilihat dari jumlah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan kemampuannya menggunakan pengetahuan itu untuk menyelesaikan suatu persoalan yang baru dengan menggunakan penalaran. Jadi, kalau kita hendak mengukur mutu ilmiah setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pengetahuan (*knowledge*) akan sesuatu, aplikasinya, dan alat untuk mengaplikasikannya, yaitu penalaran. Sekarang kita dapat bertanya hubungan apa yang terdapat di antara ketiga unsur itu. Antara lain, kita melihat adanya hubung-

an urutan di antaranya. Bahwa pengetahuan harus ada lebih dulu sudah jelas, setidaknya ditinjau dari segi pengajaran. Dapat pula dilihat bahwa unsur yang disebut pertama inilah yang lebih mudah dipelajari (diperoleh). Selanjutnya, kita akan mencoba memeriksa yang manakah dari ketiga unsur itu yang paling erat hubungannya dengan kemampuan berbahasa. Dalam pengajaran zaman modern ini memperoleh pengetahuan lebih banyak dilakukan melalui bahan bacaan. Jadi, kemampuan membaca merupakan prasyarat yang penting untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa jika kemampuan membaca terbatas, maka jumlah pengetahuan yang akan diperoleh pun terbatas.

Setelah kita melihat adanya hubungan sebab akibat antara kemampuan membaca dan jumlah pengetahuan yang mungkin diperoleh yang merupakan salah satu unsur yang dapat dipakai untuk mengukur mutu ilmiah, maka kita akan melihat hubungan antara taraf kemampuan mahasiswa Indonesia membaca dalam bahasa Inggris dengan "kemerosotan mutu ilmiah" yang diduga ada dikalangan perguruan tinggi di Indonesia.

Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa Indonesia memahami isi bacaan yang ditulis dalam bahasa Inggris sangat rendah sehingga buku-buku yang ditulis dalam bahasa itu jarang sekali digunakan (Sadtono, 1976:61).

Dalam tulisannya, Adkins (1969:197) melaporkan bahwa murid-murid sekolah menengah yang bukan penutur asli bahasa Inggris (penutur asli bahasa Spanyol) ketinggalan dalam bidang akademis dari murid-murid penutur asli bahasa Inggris dari tingkat yang sama. Kemampuan membaca mereka ketinggalan dua atau tiga tahun daripada kemampuan membaca yang seharusnya mereka miliki. Selanjutnya, dia menduga bahwa ketinggalan itu mempunyai korelasi langsung dengan ketidakmampuan atau taraf kemampuan mereka berbahasa Inggris (mengerti bahasa Inggris).

Thammongkol (1976), dalam penelitiannya berdasarkan satu tes melihat bahwa kemampuan membaca dalam bahasa Inggris mahasiswa Thai sangat rendah, dan berdasarkan tes yang lain, melihat bahwa kemampuan berbahasa Inggris mereka juga sangat rendah.

Macnamara (1970:114) melihat bahwa perbedaan penguasaan bahasa menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan untuk memecahkan persoalan (*problem solving*): *when the contrast in grasp of two languages is*

sufficiently marked, the effect on certain types of problem solving and on certain aspects of reading can be demonstrated.

Eskey (1970:316), dalam jawabannya atas pertanyaan mengapa banyak mahasiswa asing yang belajar di Amerika Serikat tidak memahami bahan bacaan taraf universitas, antara lain melihat bahwa mereka tidak menguasai *the structure of unsimplified written English*. Memang struktur bahasa Inggris umum berbeda dari struktur bahasa ilmiahnya, yang sekarang ini sering disebut *English for Science and Technology* (EST) dan *English for Special Specific Purposes* (ESP) yang bagi penutur asli biasa pun sering menimbulkan kesulitan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan di atas, kita berkata paling sedikit ada dua faktor yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan membaca mahasiswa Indonesia dalam bahasa Inggris, yaitu kemampuan membaca *an sich* (yang terbentuk dalam bahasa ibunya) dan kemahiran berbahasa Inggris. Tanpa penelitian khusus sangatlah sulit bagi saya dadapat melihat secara jelas hubungan antara kedua variabel itu dan juga untuk menentukan variabel mana yang merupakan penyebab utama dari ketidakmampuan mahasiswa Indonesia untuk memahami isi bacaan dalam bahasa Inggris. Namun, saya cenderung berkata bahwa faktor penguasaan bahasalah yang menjadi penyebab utamanya. Pengamatan sepintas lalu juga menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia yang mempunyai kemampuan atau potensi akademis yang cukup tinggi tetapi tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik, pada umumnya prestasi akademisnya lebih rendah daripada prestasi akademis dari mahasiswa dengan kemampuan atau potensi yang sama tetapi menguasai bahasa Inggris lebih baik. Hal yang serupa terlihat juga di kalangan para pengajar perguruan tinggi. Tidak jarang bahwa pengajar yang sebenarnya mempunyai potensi akademis yang cukup tinggi sulit berkembang karena tidak mampu berbahasa asing (terutama bahasa-bahasa Barat modern dan Jepang).

Kembali pada pertanyaan apakah ada korelasi antara penguasaan bahasa Inggris dan mutu ilmiah, saya menduga bahwa korelasi demikian ada. Secara logis adalah sulit membayangkan bahwa seseorang dapat menambah ilmu, bahkan memperoleh ilmu tanpa membaca buku-buku atau karya-karya ilmiah. Dalam mempersoalkan "kerosotan mutu ilmiah" yang disebut-sebut itu hendaknya "mutu ilmiah" para pengajar pun jangan dilupakan karena dari pengajar yang bobot ilmiahnya diragukan tidaklah dapat diharapkan pengalihan (transfer) ilmu yang berbobot.

Di luar masalah yang menyangkut bahasa seperti dibicarakan di atas, kiranya faktor-faktor lain pun perlu ditinjau untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari sebab-sebab "kemerostan mutu ilmiah" yang diperkirakan terdapat di perguruan tinggi Indonesia. Ada pula dugaan bahwa sistem pendidikan pada umumnya turut mengambil bagian di dalamnya. Orang berkata bahwa kesulitan yang dihadapi di perguruan tinggi itu adalah "kiriman" dari sekolah menengah. Tampaknya "kemerostan mutu lulusan sekolah menengah" ini terjadi juga di tempat-tempat lain di dunia ini. Para pengajar perguruan tinggi di Amerika Serikat, misalnya, juga mengeluh karena lulusan sekolah menengah mereka pun taraf kemampuan membacanya di bawah taraf yang diperlukan untuk belajar di perguruan tinggi (van Roekel, 1961:140). Keluhan tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca, tetapi juga mengenai bidang-bidang lain seperti terlihat pada kutipan berikut.

One of the reasons why . . . (the Committee) had found the task of making a physics course for the last year of high school such an onerous task was the the student came into the class totally unprepared for physics, and without mathematics, the chemistry, and the general familiarity in science that by right he sould have accumulated during his earlier years in high school; during his years in junior high school; during his years in junior high school; during his years in elementary school.

. . . The problems of higher education will not be solved until we can send into the colleges young men and women who are prepared to move forward at a pace and level reasonable to demand of the. (Orlans, 1967:825)

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pencarian Penerjemah dan Penerjemahan

Untuk membicarakan masalah ini, pertama-tama kita akan meninjau latar belakang para penerjemah yang ada di Indonesia dewasa ini. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pendidikan khusus, baik di bidang penerjemahan maupun bahasa. Kemahiran menerjemahkan di peroleh dari pengalaman saja. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau ada di antara mereka membuat kesalahan yang cukup menyolok. Kesalahan yang terdapat pada umumnya dapat dibagi dua, yaitu kesalahan karena teori terjemahan tidak dikuasai dengan baik karena bahasa sumber tidak begitu dikuasai. Untuk bidang-bidang tertentu, hasil terjemahan mereka cukup baik.

Dunia penerjemahan telah mengenal apa yang disebut super spesialisasi. Di Inggris, misalnya, ada orang yang hanya mahir menerjemahkan teks mengenai serat sintesis dan itu pun dia hanya sanggup mengadakan terjemahan yang baik dari bahasa asing tertentu ke dalam bahasa Inggris (Finlay, 1974: 8). Jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah berkembang boleh dikatakan bahwa Indonesia masih jauh ketinggalan dalam pengkhususan ini, bahkan dalam penerjemahan pada umumnya. Untuk mencari penerjemah di bidang kehutanan, misalnya, akan sulit. Penerjemah yang dimaksud di sini tentunya orang yang benar-benar mahir soal-soal terjemahan dan kehutanan sekaligus.

Melihat kebutuhan akan terjemahan dewasa ini dapat dikatakan bahwa jumlah penerjemah yang sangat sedikit. Menurut keterangan Sdr. Hazil Tanzil, Sekretaris Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), HPI hanya beranggotakan lebih kurang 100 orang dan sebagian besar dari mereka mengkhususkan diri di bidang sastra dan kebudayaan. Ada pula yang disebut penerjemah yang disumpah (+ 40 orang, 24 diantaranya terdapat di Jakarta) yang bidang keahliannya menerjemahkan akte, kontrak, dan sebagainya. Mereka sering juga mengerjakan terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, umumnya bahasa Inggris. Sebenarnya dari seorang penerjemah tidak dituntut kemahiran menerjemahkan dari bahasa ibunya ke bahasa asing. Namun, seorang penerjemah dapat juga berbuat demikian asal saja dia benar-benar dwibasawan dan dwibudayawan (*bilingual* dan *bicultural*). Dalam kenyataan penerjemah demikian jarang sekali ditemukan. Melihat hasil terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing yang dikerjakan oleh para penerjemah yang disumpah dapat dikatakan bahwa penguasaan bahasa asing penerjemah kita itu masih perlu ditingkatkan.

Khusus di bidang penerjemah ilmiah, Indonesia juga masih jauh ketinggalan. Para penerjemah yang jumlahnya sangat sedikit itu pada umumnya terdiri dari pada pengajar dan lulusan perguruan tinggi dan kemampuan kelompok ini untuk menghasilkan terjemahan sangat terbatas (halm. 6). Pada umumnya mereka mengerjakan terjemahan sebagai pekerjaan sampingan. Penerjemah profesional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi belum ada dan profesi di bidang ini tampaknya sulit berkembang dalam situasi Indonesia dewasa ini. Mengapa demikian halnya; terlalu banyak sebab untuk disebut satu per satu di sini.

Syarat-syarat yang harus Dipenuhi untuk Mencapai Terjemahan yang Baik

Beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang penerjemah untuk menghasilkan terjemahan yang baik adalah sebagai berikut :

- a) penguasaan bahasa sasaran dengan baik,
- b) penguasaan bahasa sumber dengan baik,
- c) penguasaan materi teks yang akan diterjemahkan, dan
- d) pengetahuan teori terjemahan dengan baik.

Untuk bidang-bidang tertentu, misalnya, sastra dan kebudayaan, penerjemah memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai latar belakang kebudayaan dan sosial bangsa yang menghasilkan karya yang akan diterjemahkan.

Pengetahuan Bahasa Sasaran dengan Baik

Ada orang berpendapat bahwa seorang penerjemah harus seorang "seniman" dalam bahasa sasaran. (Yang dimaksud dengan bahasa sasaran di sini ialah bahasa ibu atau pertama penerjemah). Sebagai seseorang "seniman" dalam bahasa ibunya, penerjemahan harus benar-benar menguasai bahasa ibunya. Penguasaan bahasa ibu yang diperolehnya tanpa harus menggunakan banyak tenaga (*effortless*) dan yang berlangsung sepanjang hayatnya perlu ditambah dengan pengetahuan teoritis mengenai bahasa itu. Untuk itu, penerjemah setidaknya-tidaknya perlu belajar linguistik dan sosiolinguistik dan selanjutnya pengetahuannya di bidang ini akan membantunya dalam mempelajari teori terjemahan. Selain itu, retorika pun perlu diketahuinya.

Dalam mengerjakan terjemahan, penerjemah harus selalu memperhatikan calon pembacanya. Ada kalanya seorang penerjemah yang sangat mahir dalam materi teks yang akan diterjemahkannya lupa bahwa dia menerjemahkan untuk orang lain yang mungkin terdiri dari orang-orang yang mulai belajar di bidang yang bersangkutan. Bagi penerjemah demikian gaya bahasa yang dipakai untuk menerjemahkan tidak menjadi persoalan karena dia menguasai materinya, tetapi bagi orang lain belum tentu demikian halnya. Menulis untuk diri sendiri berbeda dari menulis untuk orang lain.

Hal-hal lain yang kiranya perlu diperhatikan dalam menerjemahkan ialah bahwa informasi yang terdapat dalam teks asli harus sama dengan ka-

dar informasi yang terdapat dalam terjemahan (Grimes, 1968:164–165). Pesan atau isi yang terdapat dalam bahasa sumber harus diwujudkan kembali dengan cara yang paling wajar menurut aturan-aturan bahasa sasaran sehingga terjemahan tidak akan terasa sebagai terjemahan (Nida, 1969).

Penguasaan Bahasa Sumber

Taraf penguasaan bahasa sumber yang diperlukan oleh penerjemah bergantung kepada bidang terjemahan yang dikerjakannya. Untuk bidang sastra, misalnya, yaitu bidang yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dan rohaniah dari pemakai bahasa yang bersangkutan diperlukan taraf penguasaan bahasa sumber yang lebih mendalam. Bagi seseorang yang bukan penutur asli yang hidup di luar masyarakat pemakai bahasa yang bersangkutan sangat sulit mencapai taraf penguasaan bahasa demikian. Itulah sebabnya, pendidikan untuk penerjemah mengharuskan calon penerjemah berada dalam masyarakat pemakai bahasa yang sedang dipelajarinya selama dua atau tiga tahun. Penguasaan bahasa untuk "berintegrasi" (*integrative purpose*) perlu dimilikinya. Bahasa yang dimaksud di sini bukan lagi sebagai satu sistem unsur dan struktur, tetapi sebagai aspek atau bagian dari kebudayaan.

Untuk penerjemahan ilmiah, penerjemah perlu menguasai bahasa sebagai "alat untuk memperoleh informasi" yang berbeda dari bahasa untuk berintegrasi". (Jenis bahasa Inggris yang diajarkan di sekolah di Indonesia termasuk jenis ini.) Belakangan ini, bahasa serupa ini terkenal dengan nama "bahasa untuk ilmu pengetahuan dan teknologi" dan "bahasa untuk tujuan-tujuan tertentu". (Dalam bahasa Inggris disebut *English for Science and Technology* (EST) dan *English for Special/Specific Purposes* (ESP). Tanpa memberikan ciri-ciri khas jenis-jenis bahasa ini, cukuplah kalau kita akhiri bagian ini dengan catatan bahwa dengan bekal "*common core English*" saja penerjemah akan mengalami kesulitan dalam menerjemahkan karya ilmiah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Penguasaan Materi Teks yang akan Diterjemahkan

Tanpa keterangan lebih lanjut, kita dapat menerima bahwa penerjemah harus menguasai dengan sebaik-baiknya bidang teks yang akan diterjemahkannya. Selain itu, dia perlu juga mengetahui bidang-bidang lain yang erat hubungannya dengan bidang teks. Walaupun dia ahli dalam bidang yang bersangkutan, dalam mengerjakan terjemahan kadang-kadang dia perlu juga berkonsultasi dengan orang lain yang ahli dalam bidang yang sama. Namun, di

masyarakat kita dewasa ini, syarat ini tampaknya tidak begitu diperhatikan demi uang tentunya – sehingga terjemahan yang dihasilkan sering tidak memuaskan.

Pengetahuan Teori Terjemahan

Ada orang yang berpendapat bahwa kalau seseorang telah menguasai materi teks dan bahasa sumbernya, maka dia dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa ibunya. Ada pula yang berpendapat bahwa menerjemahkan merupakan keterampilan (*skill*) yang dapat diperoleh melalui latihan dan pengalaman (*trial-and-error*) tanpa harus belajar teorinya. Biasanya sesuatu yang diperoleh melalui proses *trial-and-error* dapat disusun teorinya dan selanjutnya teori ini dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan.

Teori terjemahan yang dikembangkan akhir-akhir ini adalah sari pengalaman penerjemahan ke dalam beribu bahasa yang tergolong dalam bermacam-macam bahasa yang mencerminkan bermacam-macam cara manusia meninjau alam sekitarnya dan bermacam-macam pandangan hidup yang meliputi hampir semua bangsa di dunia.

Dalam teori ini dirumuskan hakikat menerjemahkan dan masalah-masalah yang mungkin ditemui dalam menerjemahkan serta cara-cara untuk menanganinya. Teori ini juga menggunakan hasil-hasil penelitian mutakhir dalam ilmu bahasa. Dengan bekal teori terjemahan yang demikian penerjemah diharapkan akan lebih terampil dalam melakukan pekerjaannya. Jelas pula bahwa teori demikian diperlukan karena sebagian besar penerjemah kita, baik yang profesional maupun yang amatir, adalah lulusan "sekolah pengalaman".

Syarat-syarat Lain yang Diperlukan dalam Penerjemahan

Syarat-syarat yang diperlukan dalam penerjemahan antara lain ialah :

1. kamus dwibahasa (bilingual) yang baik ;
2. kamus istilah yang baik untuk berbagai bidang; dan
3. kamus ekabahasa (monolingual) yang baik untuk bahasa sumber dan bahasa sasaran (Indonesia).

Yang dimaksud dengan kamus istilah yang baik di sini antara lain ialah kamus yang memuat istilah dalam konteks seperti yang mungkin dijumpai oleh penerjemah dalam teks (Finlay, 1974:138–139).

Melihat keadaan perkamusan di Indonesia sekarang ini, penerjemah sering harus menciptakan istilah-istilah baru dan hal ini mungkin juga merupakan penghambat dalam usaha penerjemahan.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai berikut.

Pengadaan buku/karya ilmiah dalam bahasa Indonesia hendaknya dilakukan melalui tiga macam kegiatan secara serentak, yaitu penulisan karya asli, penerjemahan, dan saduran.

Prioritas hendaknya diberikan pada usaha penerjemahan dengan jalan menentukan "target". Penerjemahan ditawarkan kepada para ahli pada bidang-bidang yang bersangkutan dan untuk itu kepada penerjemah diberikan imbalan yang cukup besar sehingga dia dapat memberikan perhatian dan waktu yang lebih banyak. Selain itu, penerjemah perlu dibebaskan dari sebagian tugas rutinnnya (khusus bagi pegawai negeri) dan sebelum dia mulai menerjemahkan ada baiknya jika kepadanya diberikan teori terjemahan.

Untuk penulisan karya asli tidak perlu ditentukan "target". Cukuplah kalau disusun daftar bidang-bidang yang perlu digerap dan penulisannya ditawarkan kepada orang-orang yang dianggap ahli. Penulis hendaknya dibebaskan dari tugas rutinnnya (*sabbatical leave*). Sehubungan dengan penulisan karya asli ini perlu diadakan latihan penulisan buku (*textbook writing*).

Saduran dapat dipisahkan kalau izin untuk itu dapat diperoleh dari penulis/Penerbit.

Sudah waktunya Pemerintah membuka sekolah penerjemah. Untuk itu dapat dipakai hasil kerja Panitia Pendirian Sekolah Penerjemah dan Jurusan Bahasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No. 1.3.004—Kep. 74.

Catatan

1. Kitab Injil, misalnya, diterjemahkan ke dalam bahasa daerah: ke dalam bahasa Melayu pada abad ke-18; ke dalam bahasa Batak Toba pada penghujung abad ke-19.
2. Sebelum Perang Dunia II Balai Pustaka telah mulai menerbitkan terjemahan, terutama cerita rekaan.

- 3. Keterangan ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4. Keterangan ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkins, Patricia G. 1969. "Deficiency in Comprehension in Non-Native Speakers". *TESOL Quarterly*. Vol. 3. No. 3.
- Catford, J.C. 1975. *A Linguistics Theory of Translation*. London : Oxford University Press.
- Carroll, John B. 1971. "Predicting Difference in English Language Learning". Dalam Roy, Cherrier. (Editor) *Report of the RELC Fifth Regional Seminar. Bangkok, 25-30 May, 1970*. Singapore: RELC.
- Chastain, Kenneth. 1976. *Developing Second-Language Skills*. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.
- Eskey, David. 1970. "A New Technique for the Teaching of Reading to Advanced Students". *TESOL Quarterly*, Vol. 4, No. 4.
- Kanda Thammongkol. 1976. "The English Reading Ability of Thai Undergraduate Students". Dalam Edwards M., Anthony dan Jack Richards. Editor. *Reading: Insights and Approaches*. Singapore: RELC.
- Kasuya, Toshiki. 1978. "Persoalan Mengenai Penerjemahan Karya Sastra Jepang". *Berita H.P.I.* No. 12-13.
- Lehman, Winfred P. 1979. "Machine Translation". Archibald A Hill (Editor). *Linguistics*. Voice of America Forum Lectures.
- Mackey, Ronald dan Mountford, Alan. 1976. "Reading for Information". Dalam Edward M. Anthony dan Jack Richards. Editor. *Reading: Insights and Approaches*. Singapore: RELC.

- Macnamara, John. 1970. "Comparative Studies of Reading and Problem Solving in Two Languages". *TESOL Quarterly*. Vol. 4. No. 2.
- Nida, Eugene A. 1964. *Toward a Science of Translating*. Leiden: E.J. Brill.
- Nida, Eugene A. dan Taber, Charles. 1969. *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: E.J. Brill.
- Orlans, Harold. 1967. "Educational and Scientific Institutions". *DAEDALUS: Journal of the American Academy of Arts and Sciences*. Richmond, Virginia" The American Academy of Arts and Sciences.
- Richards, Jack. Editor. 1976. *Teaching English for Science and Technology*. Singapore: RELC.
- Sadtono, E. 1976. "The Cloze Technique as an Instrument to Test Reading Ability". Dalam Edward M. Anthony dan Jack Richards. Editor. *Reading: Insights and Approaches*. Singapore: RELC.
- Simatupang, Maurits. 1975. "A Language Aptitude Test for Indonesia". *Research Proposals for Studies in Language Learning*. Singapore: RELC. Occasional Papers. No. 2.
- Slobin, Dan I. 1971. *Psycholinguistics*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.
- Van Roekel, Byron H. 1961. "Meeting Demands of College Curriculum: Reading in THought and Action". Dalam J, Allen Figurel. Editor. *Changing Concepts of Reading Instruction*. New York: Scholastic Magazines.
- Wonderly, William L. 1068. "Crib, Translation and Dynamic Equivalence". *The Bible Translator*. Vol. 19 No. 1.
- Berita H.P.I.* 1978. No. 12 - 13
- Kompas*. 14 September 1978.

PEMBAKUAN DAN PENYEBARAN TATA ISTILAH DAN TATA NAMA

Tjiptasurasa

A. Aminuddin

Universitas Hasanuddin

Pendahuluan

Kemajuan hidup dewasa ini ditandai oleh besarnya pengaruh ilmu dan teknologi. Kemajuan itu antara lain didukung oleh kerja sama dan komunikasi antara para ahli dan sarjana di berbagai bidang profesi karena pengembangan suatu cabang ilmu akan menarik atau mendorong dan sekaligus menunjang pembangunan cabang ilmu lain utamanya yang berhubungan.

Agar komunikasi itu berjalan lancar dan efektif, diperlukan pengembangan ragam bahasa dan kosa kata keilmuan dan teknis yang tradisinya di Indonesia belum berakar secara luas. Para ilmuwan masih cenderung menggunakan gaya bahasa dan istilah asing dengan alasan untuk mendapatkan kesatuan makna. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan kemampuan dan pendalaman di suatu bidang ilmu atau teknologi, yang umumnya bersumber dari tempat dan atau pustaka asing, kurang diimbangi dengan hasrat untuk mengkomunikasikannya apalagi dengan bahasa Indonesia. Akibatnya adalah bahwa istilah-istilah yang berasal dari kosa kata Indonesia sendiri sering dirasakan lebih asing daripada istilah asing dan tentu akan menimbulkan pula kekabaran dan ketidakamaan makna.

Untuk menjamin kelangsungan pengembangan ilmu dan teknologi, pembakuan, dan penyebaran tata nama dan tata istilah dalam berbagai jenis bidang profesi merupakan kebutuhan pokok yang mendesak. Pembakuan dan penyebaran ini akan mempermudah komunikasi ilmiah, baik pada taraf nasional maupun internasional serta mengurangi kekacauan, kemaknagandaan, dan kesalahpahaman.

Tata Istilah dan Tata Nama

Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Seperangkat peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkannya disebut tata istilah.

Nama ialah kata atau gabungan kata yang dibentuk atau diciptakan secara persepakatan untuk menyatakan suatu benda, zat atau individu, serta untuk membedakan satu dengan lainnya. Dalam beberapa bidang ilmu karena banyaknya benda, zat atau individu, serta adanya pertalian satu dengan lainnya dibuatlah seperangkat kaidah penamaan, yang bersama dengan kumpulan nama yang dihasilkannya disebut tata nama.

Dalam banyak hal kerap kali sulit untuk membedakan nama dengan istilah karena di dalam nama sering terkandung pula makna konsep, keadaan, atau sifat yang khas, misalnya, akuntan, alkohol, atau usus dua belas jari. Apalagi sekarang ini untuk kepentingan komunikasi, para cendekiawan dengan beberapa konvensi telah menetapkan dan membakukan tata nama. Hanya dalam hal-hal tertentu seperti untuk spesifikasi tanda dagang dan nama daerah tumbuhan, hewan serta pelikan dan untuk keperluan sehari-hari masih perlu menggunakan nama-nama di luar tata nama.

Pembakuan Tata Istilah

Agar pertukaran informasi lebih efisien dan memperoleh hasil yang baik, maka istilah umum, yakni istilah yang menjadi unsur bahasa umum atau istilah khusus yang pemakaiannya dan atau maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu harus mempunyai makna yang sama bagi semua orang yang menggunakannya.

Sudah waktunya sekarang semua orang perlu mempelajari, menyimak, dan mengembangkan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* sebagai salah satu do-

kumen kosa kata umum bahasa Indonesia. Di samping itu, untuk mencapai kesepakatan umum tentang arti istilah khusus perlu pula disusun dan dibakukan tata istilahnya dengan berpadu pada *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* dan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tanpa mengurangi kemungkinan perbaikan bagian-bagian tertentu, kedua pedoman ini sebenarnya telah cukup sebagai petunjuk. Kesepakatan umum ini akan menjamin penggunaannya secara taat azas dan akan menghasilkan menjamin penggunaannya secara taat azas dan akan menghasilkan keseragaman suatu kosa kata khusus yang memuat konsep, istilah, dan definisinya yang baku.

Dalam rangka pembakuan tata istilah khusus ini, setiap istilah perlu dipertimbangkan dari beberapa segi sebagai berikut.

1. Teknik kebahasaan sesuai dengan yang terpapar dalam kedua *Pedoman Umum* tertera di atas.
2. Teknik kejuruan agar tepat dengan konsep yang harus diungkapkannya dan mudah diterima dalam bidang yang bersangkutan. Untuk ini apabila diperlukan dapat disusun pedoman khusus yang istimewa berlaku bagi setiap cabang ilmu dan sebaiknya dijabarkan dari *Pedoman Umum*.
3. Sosiolinguistik untuk memelihara keserasiannya dengan istilah umum dan untuk kepentingan penyebaran. Harus dihindarkan kesan bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang musykil dan serba asing.

Selain itu, kita berhadapan dengan kenyataan bahwa betapa pun besarnya semangat kenasionalan kita, kita harus mengakui bahwa perkembangan ilmu dan teknologi masih bersumber dari negara asing dan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa antarbangsa yang resmi dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kita harus terbuka menerima kenyataan ini dengan penyerapan istilah asing yang telah disesuaikan ejaan dan lafalnya. Dengan demikian, generasi muda kita dapat kita bantu sekurang-kurangnya dengan jalan mengurangi jarak antara teks aslinya dalam bahasa Inggris dengan teks yang telah diindonesiakan. Selanjutnya, untuk menata himpunan istilah yang telah berhasil dibakukan dalam suatu klasifikasi yang sistematis perlu segera ditetapkan taksonomi ilmu pengetahuan yang berlaku umum. Dengan makin majunya kerja sama antarbidang profesi, penataan ini diperlukan pula untuk mencegah terjadinya tumpang tindih istilah dengan bermacam ragam makna.

Dalam pembakuan dan penataan istilah memang ideal apabila Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat mempertemukan para bahasawan dan ilmuwan dalam setiap sanggar kerja. Akan tetapi, hal ini akan sulit dilaksanakan mengingat waktu, kesempatan, dan biayanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini diusulkan kepada Pusat Bahasa untuk membentuk suatu Komisi Istilah yang anggota-anggotanya mewakili kelompok pakar bahasa dan ilmu. Komisi ini berfungsi sebagai sumber informasi dalam setiap rapat kerja pengembangan bahasa dan istilah yang dilaksanakan secara bergilir bagi kelompok-kelompok bidang ilmu dan untuk menjaga kestabilan istilah-istilah yang telah berhasil dibakukan.

Pembakuan Tata Nama

Sudah menjadi naluri manusia untuk memberi nama kepada segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk kepentingan komunikasi dan keperluan sehari-hari sesuai dengan bahasa dan selernya. Dengan sendirinya nama-nama tadi akan beraneka ragam bergantung kepada kelompok dan daerahnya. Dalam satu negara saja, apalagi yang keadaan geografinya seperti Indonesia, pasti tidak ada keseragaman yang dapat mengakibatkan salah pengertian. Oleh karena itu, perlu disusun pemberian dan pemakaian nama yang dapat dianut di seluruh dunia.

Ditetapkanlah sistem-sistem tata nama internasional seperti Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan hasil Kongres-kongres Botani Internasional, Sistem Tata Nama IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*) untuk senyawa-senyawa kimia, dan *International Nonproprietary Name* untuk obat-obatan.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana pengindonesiaan nama-nama internasional yang umumnya menggunakan bahasa Latin dan Yunani itu. Sesuai dengan jiwa kode tata nama dan pembentukan istilah, dalam pembakuan penamaan ini dipakai nama dan pembentukan istilah, dalam pembakuan penamaan ini dipakai asas permufakatan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku umum pada masing-masing bidang ilmu serta berpegangan pula pada pedoman penyerapan ejaan dan lafal atau terjemahan sesuai dengan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Untuk ini, sebagai contoh bidang kimia telah mulai merintis tata nama sejak Konferensi Kimia dan Mikrobiologi di Klaten pada September 1946, dan disiplin biologi mulai dengan nama tingkat-tingkat takson sejak tahun 50-an. Dengan demikian, kita hanya mengenal dua sistem pena-

maan, yakni tata nama resmi yang berlaku dan berpatokan pada tata nama internasional dan tata nama Indonesia yang merupakan hasil penyerapan tata nama internasional. Nama-nama lain yang tidak bersistem, seperti nama lazim dan nama *trivial* perlu diselangkan.

Penyebaran Tata Istilah dan Tata Nama

Sebenarnya pembakuan dan penyebaran istilah merupakan dua kegiatan yang bertautan satu sama lain karena dari hasil penyebaran dapat diperoleh sarana balik untuk kepentingan pembakuan.

Tanggung jawab pengembangan bahasa Indonesia sebenarnya terletak di pundak segenap bangsa, terutama yang hadir pada Kongres ini sebagai peminat-peminat bahasa sesuai dengan jiwa Sumpah Pemuda yang kita ikrarkan lima puluh tahun yang lalu. Tentu saja kadar tanggung jawab itu dapat berbeda-beda.

Pejabat teras negara seyogyanya dapat menjadi peminat, penutur, dan atau penulis yang baik sebab pidatonya, tutur katanya, dan tulisannya mempunyai efek sangat besar dan jangkauan penyebaran yang sangat luas.

Di dalam pembangunan segenap disiplin ilmu dan teknologi perlu dibudayakan penulisan dan atau penterjemahan buku karena bahasa tulisan dapat menembus dimensi waktu dan potensi penyebarannya jauh lebih kuat daripada penyampaian lisan. Selanjutnya, penghayatan para pejabat terhadap kosa kata Indonesia juga perlu ditingkatkan, paling sedikit dimulai dengan penguasaan *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Yang terakhir dan terpenting adalah jalinan kompak antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan semua aparat komunikasi massa—dengan sarana televisi, radio, dan media massa lainnya—karena bagaimanapun juga kita semua mengetahui benar bahwa jaringan hubungan ini merupakan wahana pemasaran bahasa yang sangat ampuh dan sebagai penutup marilah kita berbahasa Indonesia yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1977. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta.
- , 1977. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta.
- , 1976. *Hasil Rapat Kerja VIII PPBI*. Jakarta.
- Mien Rivai, 1976. *Kode Internasional Tatanama Tumbuh-tumbuhan*. Fotokopi.

BILANGAN DAN NAMANYA DALAM BAHASA INDONESIA

Andi Hakim Nasution

Institut Pertanian Bogor

Judul tulisan ini mengaitkan matematika dengan bahasa. Hal ini mungkin dianggap aneh oleh sementara orang, tetapi sebenarnya matematika itu suatu jenis bahasa juga, yang diperlukan sebagai alat bertukar pikiran.

Pada mulanya manusia primitif tinggal di dalam gua-gua. Kehidupannya boleh dikatakan tidak ubahnya dengan binatang. Satu saja kelebihannya, yaitu kemampuannya memelihara dan menyalakan api. Kehidupannya bergantung pada usaha pengumpulan hasil alam dan berburu. Tidak banyak benda dengan kijang yang merumput dan harimau yang memangsa kijang (Struik, 1965). Kemudian mereka bermasyarakat dan timbullah keperluan akan berkomunikasi. Mulailah bahasa lisan berkembang. Untuk setiap sesuatu diciptakan suatu ungkapan yang melambangkannya. Lama kelamaan daya cipta mereka meningkat. Mereka mulai dapat menggambar, seperti dapat diamati di Prancis dan Spanyol. Gambar-gambar binatang perburuan di dalam gua itu diperkirakan telah berumur 15 ribu tahun. Inilah kemampuan manusia membuat lambang suatu benda atau makhluk hidup dalam bentuk gambar. Timbullah kemampuan membuat abstraksi suatu benda.

Setelah masa mengumpulkan hasil alam dan berburu berkembanglah masyarakat yang melakukan usaha produksi bahan makanan. Timbullah pertanian dan peternakan. Pada masa itu hal itu dapat dianggap sebagai suatu teknologi baru yang menimbulkan revolusi dalam kehidupan manusia. Lain halnya dengan pendapat sementara orang sekarang bahwa usaha itu hanya

suatu pekerjaan rutin. Dari hubungan manusia dengan alam yang pasif timbullah hubungan aktif manusia yang ingin mengendalikan alam.

Teknologi baru yang bernama pertanian dan peternakan itu menimbulkan pengertian mengenai ruang dan bilangan. Pengertian mengenai ruang timbul karena manusia harus mengelola sebidang tanah untuk bertani atau menggembala. Timbullah geometri. Pengertian mengenai bilangan timbul karena manusia perlu tahu berapa banyak ternak yang dimilikinya.

Pengertian Bilangan

Apa yang dimaksud dengan bilangan (*number*) ialah suatu pengertian yang sangat abstrak. Bilangan ialah suatu ungkapan mengenai banyaknya sesuatu. Pada mulanya ungkapan ini lebih bersifat kualitatif. Sesuatu itu ada sebanyak satu atau lebih dari satu dan disebut "banyak". Berapa "banyak" itu tidak dibedakan lagi karena pada taraf itu memang manusia belum dapat membedakannya. Oleh karena itu, dalam tata bahasa ada bentuk *mufrad* dan *jamak*. Kemudian orang mulai mempertelakan "banyak" menjadi "dua" atau "lebih dari dua", "lebih dari dua" inilah kemudian disebut "banyak". Oleh karena itu, timbul pula dalam tata bahasa pembedaan bentuk jamak menjadi bentuk jamak untuk dua orang dan bentuk jamak untuk tiga orang atau lebih.

Lama kelamaan "banyak" yang lebih dari dua itu dipertelakan lebih lanjut. Kemudian timbullah pengertian "satu", "dua", "tiga", "empat", dan selanjutnya sebagai "banyaknya sekumpulan benda-benda atau makhluk". Pengertian bilangan dalam bentuk seperti ini menjadi lebih bersifat kuantitatif.

Pada berbagai peradaban pengertian bilangan ini mendapatkan nama-nama yang berlainan bergantung pada lambang yang diciptakan untuk mewakili bilangan itu ketika mengadakan komunikasi.

Lambang Bilangan

Banyaknya sesuatu itu dapat dikomunikasikan antara sesama manusia dalam bentuk lambang. Dalam bentuk lambang, bentuknya yang tertua yang diketahui sampai saat ini mungkin sekali ialah lukisan-lukisan gua di Spanyol dan Prancis. Lambang banyaknya sesuatu itu berupa gambar apa yang dimaksudkan dengan sesuatu itu. Gambar itu adalah abstraksi sesuatu tadi dan mewakili tadi dalam setiap perhitungan.

Kalau seorang pemburu ingin mencatat, untuk pengetahuan anak cucunya bahwa pada suatu saat tertentu ia berhasil menombak kijang tujuh ekor, di dinding gua itu dilukisnyalah gambar kijang tujuh ekor. Kebiasaan seperti ini masih diikuti orang sampai sekarang walaupun gambar yang dilukis bukan lagi kijang melainkan pesawat terbang dan tempat melukis bukan lagi dinding gua, tetapi dinding luar kokpit pesawat terbang pemburu.

Berbagai sistem penulisan lambang bilangan berkembang sepanjang pasang surutnya berbagai peradaban. Perbaikan cara penulisan lambang bilangan berupa penyederhanaan gambar sesuatu itu menjadi keratan-keratan pada tongkat, buhul-buhul pada tali, pahatan-pahatan berbentuk paku pada bata tanah liat, sampai kepada coretan-coretan berbentuk tulisan. Suatu gambaran mengenai berbagai sistem penulisan lambang bilangan itu ditampilkan pada Gambar 1.

Adapun yang bertahan hingga sekarang ialah sistem penulisan lambang bilangan orang India yang dikembangkan oleh orang Arab. Dua sumbu-angan terbesar kebudayaan India Kuno terhadap matematika ialah penciptaan pengertian bilangan non dan penciptaan sepuluh lambang bilangan dasar yang dinamakan angka (*numeral*). Angka-angka yang melambangkan bilangan nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan sembilan berturut-turut ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dengan menggunakan prinsip "nilai tempat" bilangan-bilangan selanjutnya seperti sepuluh, sebelas, sembilan belas, dua puluh tiga, seribu empat ratus tiga dan sepuluh ribu dua ratus empat puluh tiga tetap dapat dilambangkan dengan menggunakan kombinasi kesepuluh angka tadi. Untuk jelasnya hal itu dapat dipelajari dari gagasan berikut ini.

- 10 *sepuluh*
- 11 *sebelas*
- 19 *sembilan belas*
- 23 *dua puluh tiga*
- 1403 *seribu empat ratus tiga*
- 10243 *sepuluh ribu dua ratus empat puluh tiga*

Sistem penulisan seperti ini disebut "sistem desimal".

Perbedaan Makna Bilangan dan Angka

Ketika saya mempelajari bahasa Indonesia, sewaktu duduk di bangku kelas IV SD, saya diajari bahwa yang dimaksud dengan angka ialah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan sembilan. Sepuluh, sebelas, dan selanjutnya disebut bilangan. Cara mendefinisikan angka dan bilangan seperti ini sudah jelas tidak membedakan antara bilangan dan lambangnya.

Kesalahan pendefinisian ini mendapatkan imbalan di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Poerwadarminta edisi tahun 1976. Menurut kamus ini angka ialah tanda (tulisan) sebagai pengganti bilangan. Misalnya, disebut bahwa angka Arab ialah 1, 2, 3, dan sebagainya. Batasan angka itu benar, tetapi yang dipakai sebagai misal itu kurang lengkap dan sekaligus terlalu lengkap. Angka 0 harus dimasukkan ke dalamnya, sedangkan dan sebagainya harus berhenti pada angka 9. Akan tetapi, selanjutnya juga didefinisikan bahwa angka-angka (bentuk jamak angka) ialah bilangan. Pengertian ini mirip dengan apa yang saya terima sebagai murid SD dahulu. Ini berarti bahwa *Kamus Umum* yang kita anggap sebagai karya baku tempat merujuk masalah-masalah mengenai bahasa Indonesia mengandung suatu ketidaktepatan dipandang dari segi penggunaan bahasa Indonesia di dalam matematika karena tidak dapat membedakan antara pengertian *number* dan *numeral*.

Jenis Bilangan

Jenis bilangan yang mula-mula dikenal orang ialah bilangan yang dipakai "membilang". Itulah sebabnya bilangan disebut *number* dalam bahasa Inggris. Kata ini berasal dari kata Latin *numerus* dan erat hubungannya dengan kata kerja *to numerate* yang artinya membilang satu demi satu. Itu pula sebabnya, dalam bahasa Indonesia *number* disebut *bilangan*. Dalam arti yang sempit ini yang sah untuk diartikan sebagai bilangan hanyalah nol, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Itulah bilangan-bilangan yang timbul sebagai hasil usaha membilang.

Lama kelamaan timbul pula keperluan akan jenis bilangan lain, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan pecahan, bilangan rasional, bilangan takrasional, bilangan nyata, bilangan khayal, serta bilangan kompleks. Bilangan yang biasanya kita pakai membilang itu dengan demikian harus mendapatkan nama yang khusus. Dalam bahasa Inggris bilangan itu dinamakan *counting number* walaupun sebenarnya *to count* hanyalah suatu sinonim *to numerate*. Dalam

bahasa Indonesia timbul kesulitan sinonim bagi membilang dan agak janggal mengucapkan *bilangang bilang* kalau yang kita maksudkan ialah *counting number*. Oleh karena itu, diambillah sinonimnya dari bahasa Jawa yang juga telah lazim dipakai dalam kegiatan pengumpulan statistik. Jadilah *bilangang cacah* sebagai padanan *counting number*. Saudara-saudara kita di Malaysia tidak mengalami kesulitan karena *number* mereka serap ke dalam bahasa Malaysia menjadi *nombor*. Oleh karena itu, tidak terlalu janggal ditelinga kalau mereka menggunakan *nombo bilang* sebagai istilah padanan *bilangang cacah* di Indonesia.

Mengenai jenis bilangan ini kita juga harus mengadakan perbaikan pen-
definisian di dalam *Kamus Umum*. Batasan bilangan bulat di dalam kamus itu ialah "bilangang yang bukan pecahan". Kalaulah demikian halnya, maka V_2 yang bukan pecahan tetapi termasuk bilangan takrasional, harus dianggap sebagai suatu bilangan bulat. Dari segi matematika hal ini sama sekali tidak benar.

Suatu ringkasan mengenai berbagai jenis bilangan yang ada sekarang ini dapat dilihat pada daftar berikut.

Jenis Bilangan	Beberapa Contoh						
Bilangan asli	1	2	3	4	5	6	...
Bilangan cacah	0	1	2	3	4	5	6 ...
Bilangan bulat	...	-2	-1	0	+1	+2	...
Bilangan rasional	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{11}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{5}{5}$		
	-0.625	+0.12	+0.36	-0.285714			
Bilangan nyata	$-\sqrt{1}$	$-\pi$	e	$\sqrt{1}$	+	11	
	-2.64575 ...			-3.14159 ...			
	+2.71828 ...			+3.31647 ...			

Bilangan khayal	$\sqrt{-1}$	$\sqrt{-4}$	$\sqrt{-11}$
Bilangan kompleks	$3 + 2\sqrt{-1}$	$\sqrt{5}$	$\sqrt{-7}$

Tampaklah bahwa suatu bilangan asli juga bilangan cacah. Suatu bilangan cacah juga bilangan bulat. Suatu bilangan bulat juga bilangan rasional, sedangkan suatu bilangan rasional juga termasuk bilangan nyata. Bilangan nyata yang tidak termasuk ke dalam kumpulan bilangan rasional, seperti misalnya π , e , dan $\sqrt{13}$ disebut bilangan irasional atau tak rasional. Bilangan khayal dan bilangan nyata keduanya tercakup dalam kumpulan bilangan kompleks.

Nama Bilangan Cacah

Erat hubungannya dengan lambang suatu bilangan ialah masalah menamakan bilangan itu. Sewaktu masyarakat masih bersifat sederhana, orang hanya dapat membilang sampai dengan dua. Kalau kemudian diadakan perkembangan konsep bilangan, selanjutnya, kata *satu* dan *dua* tetap digunakan sebagai kata dasar primitif.

Oleh karena itu, yang kita namakan "tiga", "empat", "lima", "enam", dan seterusnya pada ketika ini dahulu disebut "dua-satu", "dua-dua", "dua-dua-satu", dan seterusnya. Hingga kini cara menamakan bilangan seperti itu masih dapat ditemukan, misalnya, pada suku Sungai Murray di Australia. Bilangan-bilangan satu, dua, tiga, dan empat mereka namakan masing-masing *enea*, *petsyeval*, *petsyeval-enea*, dan *petsyeval-petsyeval*. Suku Kamilaria lebih tinggi taraf pemikiran matematikanya karena mempunyai tiga macam nama dasar bilangan, yaitu *mal* untuk 'satu', *bulan* untuk 'dua', dan *guliba* untuk 'tiga'. Dengan bermodalkan kata-kata ini, empat, lima, dan enam mereka namakan masing-masing *bulan-bulan*, *bulan-guliba*, dan *guliba-guliba* (Connant, 1896).

Dalam bahasa Indonesia kita memiliki sepuluh nama dasar bilangan, yaitu: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Atas dasar "prinsip aditif" yang digunakan oleh Suku Sungai Murray, seharusnya sebelas dinamakan "sepuluh-satu" atau "sembilan-dua" atau "delapan-tiga" atau "tujuh-empat" atau "enam-lima". Bilangan dua puluh satu akan mempunyai lebih banyak lagi pilihan nama, yaitu "sepuluh-sepuluh-satu", "sepuluh-sembilan-dua", dan seterusnya.

Dalam kenyataannya, nama bilangan dalam bahasa Indonesia setelah sepuluh ialah: sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dan seterusnya. Tampaklah bahwa untuk bilangan-bilangan di antara sepuluh dan dua puluh, nama-namanya menggunakan kata *belas* yang asal katanya ialah *dasa* dan berarti "sepuluh". Jadi, misalnya, *tiga belas* artinya tiga dan sepuluh atau sepuluh dan tiga. Di sini digunakan prinsip aditif seperti halnya orang Mesir Kuno juga menyusun lambang-lambang bagi bilangan-bilangannya (Rensikoff dan Wells, Jr, 1973). Akan tetapi, pada *dua puluh satu* kita telah menggunakan prinsip aditif bersamaan dengan prinsip multiplikatif. Kalau kita bertaat asas menggunakan prinsip aditif, maka dua puluh satu seharusnya dinamakan sepuluh-sepuluh-satu yang memerlukan napas yang lebih panjang untuk mengucapkannya. Di Indonesia bagian timur dan pada beberapa suku bangsa di bagian barat Indonesia, bilangan-bilangan antara *sepuluh* dan *dua puluh* dinamakan masing-masing sepuluh satu, sepuluh dua, sepuluh tiga, sepuluh empat, sepuluh lima, sepuluh enam, sepuluh tujuh, sepuluh delapan, dan sepuluh sembilan. Cara penamaan ini sepintas lalu kelihatannya hanya menggunakan prinsip aditif karena sepuluh satu itu sama dengan sepuluh dan satu. Akan tetapi, kita juga dapat menafsirkan sepuluh sebagai "satu puluh". Ini artinya bukan sebelas tetapi satu kali sepuluh sehingga telah menggunakan prinsip multiplikatif, seperti juga dua puluh artinya sama dengan dua kali sepuluh.

Pada tempat ini saya ingin memohonkan pertimbangan para peserta kongres ini untuk lebih mengutamakan pemakaian nama bilangan seperti yang lazim digunakan di Indonesia Timur untuk pengajaran matematika di tiga kelas yang pertama sekolah dasar. Kalau kita menggunakan pola penamaan ini, penamaan bilangan dalam bahasa Indonesia akan menjadi yang paling tepat untuk pengajaran matematika jika dibandingkan dengan bahasa modern negara-negara yang sudah berkembang, seperti bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman.

Ketepatan pola penamaan itu berkaitan dengan sistem penulisan lambang bilangan secara desimal. Mari kita perhatikan cara penulisan lambang bilangan dan penamaan bilangan *tiga belas* (atau sepuluh tiga) serta *dua puluh tiga* dalam bahasa Indonesia (I), Inggris (E), dan Belanda (B) :

$$13 = 1 \times 10 + 3$$

(satu puluh dan tiga)

Nama bilangan : tiga belas (I)

sepuluh tiga (I Bagian timur)

thirteen (E)

dertien (B)

$$23 = 2 \times 10 + 3$$

(dua puluh dan tiga)

Nama bilangan : dua puluh tiga (I)

twenty three (E)

drieëntwintig (B)

Ternyata bahwa untuk bilangan-bilangan antara sepuluh dan dua puluh penamaannya dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda tidak sejalan dengan sistem penulisan lambang bilangan secara desimal. Akibat ketidakserasian ini dapat dilihat apabila kita mencoba mengajari seorang anak membilang melampaui sembilan belas. Setelah menyebut "sembilan belas" ia akan menyebut "sepuluh belas". Tidak demikian halnya kalau untuk bilangan antara sepuluh dan dua puluh kita mengajari seorang anak menamakan bilangan sesuai dengan cara penulisannya menurut sistem desimal, yaitu "sepuluh dua", dan seterusnya menurut sistem desimal, yaitu "sepuluh dua", dan seterusnya sampai "sepuluh sembilan". Setelah anak itu paham membilang, barulah kepadanya dapat diajarkan sinonim nama-nama itu.

Cara Penamaan Bilangan yang benar

Bilangan yang besar menyatakan sesuatu yang sangat banyak. Apa yang sangat banyak itu bergantung pada taraf kemajuan peradaban. Pada zaman Mesir Kuno satu juta sudah dianggap batas ketakhinggaan karena lambang bilangan sejuta ialah gambar orang yang terkejut ini dianggap sebagai Dewa Ketakhinggaan atau Ketumpahruahan. Pada masa kanak-kanak saya, di kelas satu SD saya belajar membilang dan berhitung sampai dua puluh. Di kelas dua batas bilangan terbesar ialah seratus. Ketika itu dengan satu sen kita sudah dapat membeli penganan yang lezat menurut selera seorang anak. Sekarang seorang anak sekolah dasar sudah terbiasa mendengar nama bilangan-bilangan yang lebih besar. Oleh karena itu, batas terbesar bilangan yang dibahas di dalam kelas-kelas pertama SD pun ditingkatkan. Salah satu keuntungan timbul-

nya inflasi di seluruh dunia ialah bahwa anak-anak kita lebih cepat mengenal bilangan-bilangan yang besar.

Sejalan dengan itu sistem komunikasi kita pun bertambah baik. Kalau dahulu jarang orang ke luar dari desanya, maka sekarang ini sebuah mobil taksi yang kerjanya hanya pulang pergi dari Bandung ke Jakarta dan menempuh jarak seratus ribu kilometer dalam satu caturwulan. Belum lagi kalau kita pikirkan berapa jarak yang telah ditempuh oleh seorang antariksawan sewaktu mengadakan perjalanan ke bulan.

Sistem penulisan lambang bilangan secara diseimal memudahkan kita menuliskan lambang bilangan yang berapa pun besarnya melalui penggunaan "catatan ilmiah". Karena $100 = 10 \times 10 = 10^2$, maka dengan menggunakan catatan ilmiah seratus disebut *sepuluh eksponen dua*. pada umumnya catatan ilmiah berbentuk 10^n dan eksponen n menunjukkan ada berapa 0 terdapat di belakang angka 1. Jadi, misalnya, sepuluh juta dapat dicatat sebagai 10^7 dan dibaca "sepuluh eksponen tujuh".

Di samping nama yang berkaitan dengan catatan ilmiah, bilangan-bilangan besar pun mempunyai nama tersendiri dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Indonesia nama-nama bilangan sampai satu juta berasal kebanyakan dari India. Sepuluh ribu dinamakan *laksa* dan seratus ribu atau sepuluh laksa dinamakan *keti*. Dengan demikian sejuta sama dengan sepuluh keti.

Untuk bilangan yang sama atau lebih besar dari sejuta terdapat dua sistem penamaan. Satu sistem berlaku di Inggris dan Jerman, sedangkan yang lain berlaku di Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Prancis (Gellert *et al.*, 1975; Guralnik, 1976). Untuk jelasnya, berikut ini diterakan nama-nama bilangan yang penting di samping catatan ilmiahnya.

Catatan Ilmiah	Sistem Penamaan Inggris dan Jerman	Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Prancis
10^6	<i>million</i>	<i>million</i>
10^9	<i>milliard</i>	<i>billion</i>
10^{12}	<i>billion</i>	<i>trillion</i>

10^{15}	<i>billiard</i>	<i>quadrillion</i>
10^{18}	<i>trillion</i>	<i>quintillion</i>
10^{21}	<i>trilliard</i>	<i>sextrillion</i>
10^{24}	<i>quadrillion</i>	<i>septillion</i>
10^{27}	<i>quadrilliard</i>	<i>actillion</i>
10^{30}	<i>quintillion</i>	

Yang menjadi masalah bagi kita sekarang ialah sistem penamaan mana yang akan kita ikuti untuk penamaan bilangan besar dalam bahasa Indonesia. Menurut sistem penamaan Inggris dan Jerman ada dua macam nama bilangan besa, yaitu yang berakhiran *-lion* dan yang berakhiran *-liard* walaupun nama-nama seperti *billiard*, *trilliard* tidak pernah dipakai lagi. Di dalam sistem penamaan yang diikuti di Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Prancis bentuk nama-namanya lebih sederhana dan mudah diingat. Setiap ada tambahan tiga angka nol setelah 10^0 nama bilangan berubah menjadi *billion*, *trillion*, *quadrillion*, dan seterusnya. Ditambah dengan kenyataan bahwa sistem itu diikuti oleh tiga negara besar (dan mungkin pula oleh "satelit-satelit"nya), saya cenderung menggunakan sistem penamaan yang kedua, yaitu sistem Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Prancis. Kerugiannya tentu juga ada karena saudara-saudara kita di seberang Selat Malaka menggunakan sistem penamaan yang digunakan di Inggris. Mengingat hal ini ada baiknya bahwa di samping menggunakan nama-nama bilangan itu kita juga mencantumkan apa maknanya dalam bentuk catatan ilmiahnya.

Penulisan Nama Bilangan

Cara penulisan nama bilangan nol sampai sebelas tidak menjadi masalah. Akan tetapi, bagaimanakah kita harus menuliskan nama bilangan-bilangan lainnya? Apabila kita dapat bersepakat menggunakan nama bilangan yang sekaligus menggunakan prinsip aditif dan multiplikatif, saya ingin menyarankan suatu kaidah penulisan ke hadapan khalayak yang terhormat ini. Kaidah itu ialah sebagai berikut.

- Apabila dua nama bilangan dasar ditulis berdampingan dan fungsinya aditif, maka kedua nama itu ditulis terpisah.

b. Kalau fungsinya multiplikatif, kedua nama itu ditulis serangkai.

Bilangan yang lambangnya, misalnya, ialah 1978 kita tulis namanya sebagai berikut: *seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan*. Bilangan yang lebih besar lagi seperti 21741945 kita eja namanya sebagai *duapuluhsatujuta tujuh ratus empatpuluhsaturibu sembilan ratus empat puluh lima*. Kalau perlu, perangkai-an nama dapat dilakukan dengan menggunakan tanda hubung: *duapuluhsatujuta tujuh ratus empatpuluhsatu-ribu sembilan ratus empat puluh lima*.

Kesimpulan

Kalau tiba waktunya merevisi *Kamus Umum Bahasa Indonesia* agar memenuhi tuntutan zaman, perevisian harus dilakukan oleh sebuah dewan yang selain beranggotakan ahli-ahli bahasa dan leksikon, juga mencakup pakar-pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan bukan kebahasaan.

Agar bahasa Indonesia mempunyai sistem penamaan bilangan yang lebih mudah dicerna oleh anak-anak, penamaan bilangan antara sepuluh dan dua puluh yang digunakan di Indonesia bagian timur harus digalakkan ke seluruh Indonesia.

Sistem penamaan bilangan besar yang dipakai di Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Prancis sebaiknya diutamakan untuk diikuti di Indonesia.

Pengejaan nama bilangan sebaiknya dilakukan dengan mengingat fungsi aditif dan multiplikatif angka-angka yang terdapat di dalam tubuh lambang bilangan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Conant, L. 1896. *The Number Concept*. Dalam : Struik.
- Gellert, W., H. Kustner, M. Hellwich, and H. Kastner. Editor. 1975. *Mathematics at a Glance*. VEB Bibl. Inst. Leipzig.
- Guralnik, D.B. Editor. 1976. *Webster's New World Dictionary*. Modern Desk Edition. Collins and World.
- Horiba, Y. 1975. *Mathematics*. The Children's Treasury of Knowledge. Time-Life Books.
- Poerwadarminta, W.J. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Resnikoff, H.L. and R.O. Wells Jr. 1973. *Mathematics in Civilization*. Holt, Rinehart, and Winston.
- Solomon, C. 1971. *Mathematics*. Grosset and Dunlap.
- Struik, D.J. 1965. *Geschiedenis van de Wiskunde*. Spectrum.

Gambar 1 SISTEM LAMBANG BILANGAN

INDIA-ARAB MESIR BABILONIA YUNANI ROMA MAYA CINA JEPANG (KUNO)

1	I	𐎠	α	I	•	~	一
2	II	𐎡	β	II	••	≈	二
3	III	𐎢	γ	III	•••	≡	三
4	IIII	𐎣	δ	IV	••••	四	四
5	𐎥	𐎤	ε	V	—	五	五
6	𐎦	𐎥	ς	VI	—•	六	六
7	𐎧	𐎦	ζ	VII	—••	七	七
8	𐎨	𐎧	η	VIII	—•••	八	八
9	𐎩	𐎨	θ	IX	—••••	九	九
10	𐎪	𐎩	ι	X	—•••••	十	十
50	𐎫	𐎪	υ	L	—••••••	五十	五十
100	𐎬	𐎫	ρ	C	—•••••••	一百	一百

BAHASA INDONESIA DALAM PENULISAN LAPORAN

Hans E. Kawulanan

Pendahuluan

Kata *laporan* adalah kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kata itu, dalam kehidupan sehari-hari, sudah sering kita dengar atau malahan sering digunakan. Kata yang berasal dari bahasa asing itu — dari bahasa Belanda *rapport* — sudah terbenam begitu jauh dalam bahasa Indonesia sehingga banyak orang yang sudah tidak menyadari bahwa kata itu sebenarnya bukan kata asli bahasa Indonesia.

Arti kata laporan itu juga sudah kita semua pahami. Kita semua mengetahui bahwa berita-berita yang dimuat dalam surat-surat kabar adalah laporan tentang berbagai kejadian yang dialami atau diketahui oleh para wartawan. Karya ilmiah yang ditulis oleh para siswa, mahasiswa, sarjana, dan ahli dalam berbagai bidang ilmu, bagi kita, adalah juga laporan intern, laporan ilmiah. Semua karyawan, pegawai, petugas, pejabat, dan pemimpin yang bekerja di semua bentuk organisasi — pemerintahan dan swasta — setiap hari terlibat dalam pembuatan dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan yang juga kita sebut laporan-laporan. Surat yang dibuat oleh seseorang yang berisi pengaduan yang disampaikan kepada yang berwajib juga kita sebut laporan.

Lebih jauh dari itu, kita semua setiap hari, selalu terlihat dalam kegiatan lapor-melapor itu. Kita membuat laporan untuk disampaikan kepada orang lain atau kita menerima laporan dari orang lain. Setiap kita melapor kepada istri kita bahwa kita akan berangkat ke kantor — tidak ada orang yang meninggalkan rumahnya, ataupun gedung milik orang lain, tanpa pamit—. Kalau kita tiba di rumah pada siang atau sore hari, istri kita melaporkan makanan apa yang telah ia siapkan untuk disantap oleh keluarga hari itu.

Laporan memang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kualitas laporan merupakan faktor yang ikut menentukan keberhasilan semua kegiatan manusia yang hidup bermasyarakat. Laporan yang tepat dan jelas tentang hal yang mengambil keputusan yang terbaik atau menentukan langkah yang paling tepat yang harus ditempuh. Laporan yang tidak jelas atau tidak tepat—apalagi yang keliru—tentu saja akan membuka kemungkinan bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, merugikan, atau yang salah sama sekali.

Kalau laporan itu memegang peranan yang begitu penting dan kita juga sudah mengetahui apa arti kata laporan itu. Apa yang masih harus kita persoalkan? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah singkat sekali: 'masih banyak'. Dan tulisan ini akan membuka tabir masalah-masalah yang sedang kita hadapi dan harus kita atasi apabila bahasa Indonesia yang diikrarkan lima puluh tahun yang lalu itu, yang diperingati oleh Kongres Bahasa Indonesia III ini, ingin kita dudukkan pada tempatnya sebagai mahligai kebanggaan bangsa dan rakyat Indonesia.

Pertanyaan di atas mungkin akan mengungkit pertanyaan selanjutnya: Apa hubungan bahasa Indonesia dengan lapor-melapor itu? Jawaban-jawaban untuk ini juga akan kita temukan dalam uraian-uraian selanjutnya.

Bagian kedua akan mengupas arti dan makna laporan itu secara lebih luas dan lebih mendalam. Dalam pengupasan itu akan juga disinggung peranan penulisan laporan dalam pengefisienan dan pengefektivan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang kita semua hadapi itu.

Posisi kita di Indonesia dewasa ini dalam hal penulisan laporan akan digambarkan dalam kegiatan ketiga. Penggambaran posisi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan masalah yang harus kita atasi apabila peran penulisan laporan itu ingin kita tingkatkan demi kemajuan bangsa dan negara kita ini.

Bagian selanjutnya, atau bagian keempat, adalah bagian yang menjadi landasan utama dalam penyajian ini karena hal-hal yang dikemukakan dalam bagian ini merupakan pokok masalah yang menurut hemat kami sangat penting bukan hanya untuk disadari dan dihayati, melainkan juga untuk dicari-cari pemecahannya dalam Kongres Bahasa Indonesia ini.

Patokan-patokan umum bagi penulisan laporan yang baik dapat diikuti dalam uraian bagian kelima. Patokan-patokan ini belum begitu dikenal

oleh penulis-penulis laporan di Indonesia karena memang penulisan laporan belum banyak dibahas di negara kita ini. Hampir semua yang dikemukakan dalam bagian ini merupakan saduran dari buku-buku referensi asing.

Bagian berikutnya, bagian keenam, membahas sumber yang menurut hemat kami menjadi penyebab kelemahan orang Indonesia, yang bukan hanya dalam masalah penulisan laporan melainkan juga dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai wahana komunikasi suatu wahana yang menuntut adanya efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Bagian terakhir adalah bagian yang memuat rangkuman keseluruhan penyajian ini dan juga sarana-sarana tindak yang kami harapkan dapat berperan sebagai penggelindingan pertama suatu bola salju yang akan disempurnakan dan dipercepat oleh Kongres ini.

Arti dan Hakikat Laporan Tertulis

Dalam tulisan ini kata *laporan* itu digunakan dalam arti yang luas. Arti sempit kata *laporan* itu adalah 'pemberian informasi pejabat yang berkedudukan lebih rendah kepada atasannya'. Pengertian yang bersifat umum adalah bahwa laporan merupakan suatu wahana penyampaian berita, informasi, pengetahuan, atau gagasan dari seseorang kepada satu atau sekelompok orang lain. Dan laporan tertulis adalah wahana seperti dikemukakan di atas, tetapi dalam bentuk tertulis. De Boer (19613) dan kawan-kawannya mendefinisikan laporan tertulis itu sebagai suatu karya tulis yang memuat isi yang rasional. Mereka selanjutnya menjelaskan bahwa laporan tertulis itu dibuat oleh penulis untuk menyampaikan fakta-fakta, gagasan-gagasan, pendapat-pendapat, atau perasaan-perasaan kepada pembaca, dan bahwa penyampaian itu harus dilakukan dengan cara yang soobjektif mungkin.

Suatu laporan baru akan terjadi apabila telah ada beberapa unsur berikut ini: pelapor, informasi, tujuan, dan pembaca. Tanpa pelapor, tidak akan ada orang yang akan membuat laporan; tanpa informasi yang perlu dilaporkan, tidak akan ada laporan; tanpa tujuan, suatu laporan akan menjadi suatu tulisan yang tidak mempunyai ujung pangkal; dan tanpa pembaca atau orang yang dituju, laporan itu akan menjadi kertas pembungkus kacang. Unsur-unsur ini, seperti yang akan dibahas selanjutnya, merupakan titik tolak yang menentukan berbagai prinsip dan pendekatan dalam penyampaian laporan dan ketentuan-ketentuan itu menjadi lebih berat lagi dalam pembuatan laporan tertulis.

Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaporan adalah suatu bentuk komunikasi. Kita mengetahui bahwa teknologi komunikasi itu sudah mencapai dan sedang bergerak ke arah tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Banyak wahana komunikasi yang beberapa tahun yang lalu tidak pernah kita bayangkan, tetapi kini telah kita gunakan setiap hari. Kenyataan ini, oleh sebagian orang, digunakan sebagai pertanda bahwa lapor-melapor itu sedang menjurus kepada penggunaan cara-cara mutakhir dan bahwa laporan secara tertulis itu lambat laun akan tidak kita gunakan lagi. Kesimpulan demikian itu tidak tepat dan banyak sekali bukti yang tersedia yang justru menunjukkan gejala yang sebaliknya. Shurter (19719), umpamanya, dengan tegas membantah kesimpulan itu dan ia malahan mengatakan bahwa di hari-hari yang akan datang masalah tulis-menulis itu akan memainkan peranan yang lebih besar lagi.

De Boer dan kawan-kawannya mengemukakan delapan hal yang memperkuat peranan laporan tertulis jika dibandingkan dengan laporan lisan atau bentuk lain. Pertama, dengan adanya laporan tertulis, informasi atau gagasan yang terkandung di dalam laporan menjadi tidak bergantung pada nasib dari orang yang membuat laporan itu – penulis mungkin sudah tiada tetapi laporan itu dapat didapatkan kembali, masih ada dalam *file*. Kedua, jika dibandingkan dengan laporan lisan laporan tertulis mengandung sedikit sekali kemungkinan menimbulkan salah faham. Ketiga, dengan bantuan teknologi reproduksi, suatu laporan dapat diperbanyak sehingga dapat disebarakan kepada sidang pembaca yang tidak terbatas. Keempat, laporan tertulis memiliki daya bukti yang lebih kuat daripada laporan lisan. Kelima, angka-angka, tabel-tabel, grafik-grafik, dan skema-skema hanya dapat dilaporkan secara tertulis. Keenam, masalah yang sangat rumit hanya dapat dilaporkan secara jelas dan sistematis dalam laporan tertulis. Ketujuh, laporan tertulis dapat disimpan sehingga mempunyai sifat permanen, dan terakhir, laporan tertulis dapat diteliti perlahan-lahan, dengan saksama, dan secara berulang-ulang. (Lihat de Boer : 13 – 14).

Menning dan Wilkinson (1972:488) melihat laporan tertulis itu dari sudut lain, yaitu dari fungsi berikut. Pertama, laporan tertulis dapat mengatasi problem jarak antara penulis dan penerima laporan. Kedua, laporan tertulis juga dapat mengatasi problem perbedaan waktu. Ketiga, laporan tertulis memegang peranan yang ikut menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, laporan tertulis merupakan wadah untuk menyimpan informasi. Kelima, laporan tertulis merupakan

wahana yang sangat banyak digunakan untuk menilai kemampuan dan keterampilan orang yang membuat laporan itu.

Fungsi yang keenam yang dikemukakan oleh Menning dan Wilkinson di atas itu belum banyak kita manfaatkan di Indonesia. Fungsi ini sebenarnya merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh penulis laporan itu. Melalui laporan itu dapat diketahui apakah gagasan yang dimiliki oleh penulis itu baik atau tidak. Cara penulis menguraikan gagasannya juga merupakan faktor yang penting untuk mengetahui kemampuan dan keterampilannya. Banyak orang yang sanggup menulisi ratusan helai kertas dalam waktu sehari, tetapi apabila diteliti, tulisan itu ternyata merupakan kumpulan yang tidak teratur dari kepingan-kepingan informasi yang tidak berkaitan.

Pengembangan kemampuan orang Indonesia dalam membuat laporan tertulis pernah menjadi suram, yaitu ketika beberapa waktu yang lalu Pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melontarkan gagasan untuk menghilangkan kewajiban para calon sarjana di Indonesia dalam penulisan tesis. Untunglah bahwa berita ini tidak berlangsung lama dan kini gagasan itu telah mulai dilupakan—harap saja gagasan ini tidak akan timbul lagi. Penulisan tesis merupakan suatu cara yang paling efektif untuk menilai kemampuan seorang sarjana. Sampai sekarang masih banyak sekali sarjana kita yang diakui mempunyai pengetahuan, tetapi pengetahuan mereka tidak pernah diketahui oleh umum karena tidak pernah menuliskan karya-karya mereka itu untuk disebarakan kepada khalayak ramai. Banyak yang pandai berbicara—karena bahasa lisan memang mudah digunakan—tetapi dengan demikian pengetahuan para sarjana kita itu lalu hanya dikenal dalam lingkungan yang sangat terbatas. Pada umumnya dalam lingkungan mereka sendiri.

Kabar baik tentang penulisan laporan pernah tersiar, yaitu pada waktu dikemukakan gagasan agar setiap calon pejabat penting akan diwajibkan membuat suatu tulisan tentang gagasan yang akan ia laksanakan apabila ia diangkat menduduki jabatan yang bersangkutan. Hal ini baik sekali karena dengan demikian apa yang akan ia laksanakan itu telah dapat ia dirumuskan. Beberapa harapan kita, tentunya, yaitu bahwa tulisan itu ia buat sendiri, gagasan yang dipilih itu adalah yang terbaik, dan setelah diangkat ia akan betul-betul melaksanakan apa yang telah ia tulis itu. Dengan adanya gagasan itu, apalagi gagasan itu diterapkan secara konsekuen, penulisan laporan yang baik akan menjadi keahlian dan keterampilan yang betul-betul ingin dipelajari dan dikuasai orang.

Barnett (1974:21) menggolongkan penulisan laporan ke dalam apa yang ia sebut *informative writing* yang terutama bertujuan untuk memindahkan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis kepada pembaca atau kepada orang yang menerima laporan itu. Ia juga mengemukakan bahwa kemajuan-kemajuan umat manusia telah dan sedang berlangsung berkat adanya gagasan-gagasan orang yang diteruskan dan disebarluaskan secara luas. Proses penyebaran itu—melalui laporan-laporan tertulis yang bersifat informatif—dapat terlaksana dengan sempurna, dapat meneruskan gagasan yang asli itu dengan baik kepada para pembaca, tetapi juga dapat menimbulkan distorsi-distorsi terhadap gagasan yang asli sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang sama sekali lain dari gagasan semula.

Ketidakmampuan orang menulis laporan, dengan demikian, merupakan hal yang menghambat proses kemajuan dalam suatu masyarakat. Pemikiran-pemikiran yang baik akan tetap terbenam dan tidak akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penulisan Laporan di Indonesia

Gambaran umum tentang penulisan laporan di Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan suram sekali. Tidakkah terlalu keliru apabila kita mengatakan bahwa setiap hari ada ribuan, mungkin jutaan, orang di Indonesia—terutama yang bekerja di kantor-kantor—yang terlibat dalam pembuatan atau pembacaan laporan tertulis. Dari sekian banyak laporan tertulis itu hanya sedikit sekali laporan yang dapat mengenai sasaran secara efisien dan efektif. Mungkin lebih buruk dari itu, tidak sedikit jumlah laporan yang justru menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

Kelemahan penulis laporan di Indonesia dapat dilihat dari banyak segi. Dari laporan-laporan yang dapat kita temui sehari-hari dapat diketahui bahwa penulis laporan itu tidak mengetahui kegunaan suatu laporan. Banyak laporan yang ditulis bukan untuk memberikan informasi, tetapi lebih banyak dimaksudkan untuk memperlihatkan kepandaian atau kehebatan penulis.

Dari berbagai laporan yang setiap hari kita hadapi itu dapat juga diketahui bahwa laporan itu telah ditulis tanpa mengindahkan persyaratan-persyaratan penulisan laporan yang baik. Banyak laporan yang tidak disusun berdasarkan suatu kerangka tulisan (*outline*) yang logis dan terpadu. Pendahuluan, pengidentifikasi, pembahasan, dan perangkuman tulisan sering tidak mencerminkan judul-judul yang bersangkutan.

Teknik penulisan, terutama yang menyangkut komposisi, penyusunan paragraf, dan pembuatan kalimat tampak sekali belum dikuasai oleh hampir semua penulis laporan di Indonesia. Ini lebih diperkuat lagi oleh tidak adanya kerangka tulisan yang telah disebut di atas itu.

Yang paling banyak kita temukan adalah kelemahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Pemakaian kata-kata yang tidak pada tempatnya atau berlebihan penyusunan kata-kata dalam kalimat yang sangat tidak beraturan, dan penggunaan tanda-tanda baca yang tidak karuan dapat kita temukan dalam hampir semua laporan tertulis yang beredar di tengah-tengah kita setiap hari.

Banyak sekali laporan yang ditulis tanpa arah yang jelas sehingga pembaca terpaksa mencari-cari sendiri apa inti permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam laporan itu. Laporan yang demikian itu pada umumnya menjengkelkan pembaca yang biasanya tidak bersedia meneruskan pembacaan laporan itu.

Yang sering juga kita temukan adalah laporan-laporan yang tidak mengindahkan pembaca sama sekali. Terlalu banyak laporan yang dibuat oleh penulis bukan untuk dibaca oleh penerima laporan itu, tetapi untuk dibaca oleh penulis sendiri. Gaya bahasa, cara-cara mengemukakan pemikiran, dan kata-kata yang digunakan dalam tulisan-tulisan itu sering tidak memperhitungkan selera dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca. Penulis-penulis laporan itu acapkali menganggap bahwa penerima laporan itu sama pandai--atau sama bodoh--dengan dirinya.

Tidak ada orang yang dapat membantah bahwa menulis laporan adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Untuk memulai suatu tulisan saja sudah sulit, apalagi untuk menyelesaikan suatu laporan tertulis yang baik. Banyak orang yang mengetahui berbagai hal yang mereka ingin sekali laporkan atau sampaikan kepada orang lain, tetapi laporan yang bersangkutan tidak kunjung tiba. Alasan yang biasa dikemukakan dalam masalah ini adalah 'tidak ada waktu'. Mereka lupa bahwa laporan hanya dapat keluar setelah ada usaha yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit (Lihat de Boer:15).

Beberapa Sifat Kelemahan Penggunaan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sempurna. Pernyataan ini telah sering kami kemukakan dan tidak sedikit pula orang yang tidak menyetujui. Kesempurnaan bahasa Indonesia itu terletak pada kemampuan bahasa Indo-

nesia mengungkapkan dengan jelas dan tepat apa saja yang ingin dikemukakan oleh siapa saja, termasuk menerjemahkan apa saja yang dinyatakan dalam bahasa asing apa pun yang digunakan di dunia ini. Yang tidak mampu dalam hal ini bukanlah bahasa Indonesia melainkan orang-orang Indonesia yang menggunakan bahasa itu.

Beberapa waktu yang lalu kami mengemukakan beberapa pendapat yang tampaknya telah mengegerkan masyarakat kita. Pertama, kami mengatakan bahwa sembilan puluh sembilan persen orang Indonesia tidak dapat menyusun kalimat bahasa Indonesia yang logis. Kedua, kami mengatakan bahwa hampir semua sarjana di Indonesia tidak dapat dengan mudah merumuskan secara tertulis semua pendapat dan pengetahuan yang ia miliki. Dan terakhir, kami mengatakan bahwa para sarjana bahasa Indonesia juga masih membuat banyak kesalahan dalam menggunakan kata-kata, menyusun kalimat, paragraf, komposisi, dan dalam menggunakan tanda-tanda baca.

Kalimat-kalimat yang kacau, tidak sempurna, dan membingungkan tidak hanya dibuat oleh orang-orang yang tidak hanya dibuat oleh orang-orang yang tidak tergolong dalam ahli-ahli bahasa Indonesia, tetapi juga oleh sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh dalam bahasa Indonesia sendiri. Seperti yang akan dibahas kemudian, buku-buku pelajaran bahasa Indonesia untuk sekolah dasar dan lanjutan merupakan sumber-sumber yang sangat kaya akan kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia.

Sekarang mari kita lihat beberapa contoh. Kita mulai dengan bahasa koran yang oleh seorang tokoh bahasa kita dikatakan telah sempurna itu. Beberapa waktu lalu sebuah berita koran memuat kalimat seperti berikut.

Berbicara mengenai penusakambangan residivis Anton Sudjarwo mengatakan semakin maju.

Bagi yang tidak mengenal siapa Anton Sudjarwo itu, pada kesan pertama, apabila ia membaca agak cepat, maka Anton Sudjarwo itu adalah residivis. Berikut, yang tidak jelas dari kalimat itu adalah penggunaan ungkapan *semakin maju*. Mungkin yang dimaksud penulis berita itu sebenarnya adalah kalimat:

Anton Sudjarwo menjelaskan bahwa penusakambangan para residivis itu sudah mulai berjalan dengan lancar.

Bahasa seorang sarjana psikologi Indonesia adalah lain lagi. Berikut ini adalah kalimat pertama dari suatu tulisan ilmiah sarjana yang bersangkutan.

Setiap permasalahan terlepas dari besar ataupun kecil berat ataupun ringan maka faktor manusia senantiasa memiliki prosentase didalamnya.

Kalimat pertama itu saja sudah tidak menimbulkan selera untuk dibaca apalagi keseluruhan tulisan yang bersangkutan. Akan tetapi sekarang, bagaimana dengan buku-buku pelajaran bahasa Indonesia yang mendidik dan mengajar kita berbahasa Indonesia itu? Di bawah ini adalah kalimat yang dapat kita temukan dalam buku pelajaran SMP kelas I :

Kantor pos akan senang sekali kalau semua surat perangkonyanya terletak di sudut itu. (P & K, 1973:85)

Dalam kalimat ini, *kantor pos* diperlakukan sebagai orang yang mempunyai rasa senang dan ungkapan *di sudut itu* adalah ungkapan yang tidak jelas. Yang dimaksud oleh kalimat itu memang kita semua ketahui, tetapi cara mengemukakan seperti itu, dilihat dari segi penggunaan bahasa yang baik, adalah tidak efektif alias dapat lebih baik. Akan lebih baik kalau kalimat itu ditulis seperti berikut.

Para petugas kantor pos akan senang sekali kalau semua surat mempunyai peranko di sudut kanan atas.

Bagaimana dengan bahasa sarjana bahasa Indonesia kita? Di bawah ini adalah sebuah kalimat seorang sarjana bahasa Indonesia.

Ambillah seorang anak didik yang akan memasuki kelas dan akan memperoleh pelajaran bahasa Indonesia adalah seorang manusia yang hidup, yang memiliki perilaku, kemampuan belajar, lingkungan keluarga dan masyarakat tersendiri, berbeda dengan yang dimiliki anak didik yang lain dan amat sukar dipahami.

Dua kata terakhir dalam kalimat itu memang tepat juga untuk kalimat itu sukar dipahami. Kalimat yang begitu panjang itu terasa begitu berat dan sulit dirumuskan oleh penulis. Kesulitan itu akan hilang apabila penulis memisahkan beberapa kalimat yang ia tumpuk ke dalam satu kalimat seperti itu.

Untuk lebih mempertajam masalah penggunaan bahasa ini, marilah kita ambil contoh dari sebuah buku dari segala buku bahasa Indonesia, yaitu buku *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Semua edisi sebelum tahun 1976 dapat kita katakan menjadi tanggung jawab almarhum Poerwadarminta, tetapi edisi ter-

akhir, terbitan tahun 1976, yang telah diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah edisi yang telah mempunyai landasan yang lebih luas dan lebih kuat, yaitu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam kamus itu masih tercantum definisi kata *sistem* yang dikatakan seperti berikut :

sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.

Memang, sepiantas lalu, kita dapat mengatakan bahwa maksud ungkapan itu dapat kita mengerti. Namun, ada tiga hal yang dapat kita pertanyakan sehubungan dengan kalimat itu. Pertama, apakah penggunaan bentuk *sekelompok bagian-bagian* itu tidak keliru? Tidakkah seharusnya digunakan sekelompok bagian "tanpa menjamakkan" kata *bagian* itu? Kita juga tidak mengatakan *sekelompok orang-orang*, tetapi *sekelompok orang*. Kedua, dalam pengertian sistem, sesuai dengan definisi dalam bahasa-bahasa asing, bukan 'bekerja bersama-sama', melainkan 'bekerja sama'. Orang dapat saja sama-sama bekerja, tetapi belum tentu mereka bekerja sama, dan terakhir, apakah betul kalau kita mengatakan "untuk melakukan sesuatu maksud"? Dapatkah suatu maksud itu dilakukan? Sesuatu *maksud* tidak dapat dilakukan; yang lebih tepat adalah *dicapai*. Dengan berdasarkan pembahasan ini adalah lebih baik apabila definisi kata *sistem* itu dinyatakan seperti berikut :

sekelompok bagian (alat, dan sebagainya) yang bekerja sama untuk mencapai suatu maksud.

Contoh-contoh di atas itu kami kemukakan dengan maksud memperhatikan bahwa kita yang menggunakan bahasa Indonesia itulah yang harus meningkatkan penguasaan dan kemampuan kita berbahasa dan bukan bahasa Indonesia yang memiliki kelemahan-kelemahan. Kami mengakui bahwa bahasa Indonesia, sama seperti semua bahasa di dunia ini, akan mengalami perubahan-perubahan dengan berjalannya waktu. Dalam banyak hal, perubahan-perubahan ini akan lebih memantapkan bahasa kita itu. Akan tetapi, yang menjadi masalah kita sekarang ini, juga di masa-masa yang akan datang, adalah mengajarkan bahasa Indonesia itu kepada setiap warga negara sedemikian rupa sehingga bahasa itu tidak menjadi penghambat, tetapi menjadi alat yang ampuh yang harus dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Beberapa Patokan dalam Penulisan Laporan yang Baik

Kemampuan menulis laporan yang baik bukanlah merupakan suatu kemampuan yang diwarisi seseorang sejak ia lahir. Kemampuan seperti itu me-

upakan suatu keterampilan yang harus dikuasai melalui pelajaran-pelajaran dan latihan-latihan yang dilakukan secara tekun dan serius. Menning dan Walkinson (1972:7) mengatakan bahwa fakta satu-satunya yang dapat kita temui dalam hal penulisan laporan itu adalah bahwa mereka yang tidak pernah mempelajari bagaimana menulis laporan itu akan menghasilkan laporan-laporan yang jelek.

Untuk dapat menulis laporan yang baik, orang perlu mempunyai pengetahuan yang cukup luas. Di samping pengetahuan tentang bahan yang harus ia tuliskan itu, seorang penulis yang baik juga harus memiliki pengetahuan dasar tentang psikologi. Ia juga harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang teknik dan prosedur yang mutakhir dalam penulisan laporan. Dan yang terpenting-ini yang menjadi fokus dalam Kongres ini-adalah bahwa penulis itu harus sepenuhnya menguasai semua segi penggunaan bahasa, yang dalam hal ini bahasa Indonesia.

Laporan tentang suatu hal yang ditulis oleh orang yang tidak menguasai materi yang dibahas akan dapat dilihat dengan jelas. Ketidakpastian dan alasan-alasan yang dicari-cari untuk memperkuat suatu gagasan akan jelas kelihatan dari cara penulis menyusun dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam laporan itu.

Pengetahuan dasar yang perlu diketahui oleh penulis laporan itu terutama tertumpu pada pentingnya penulis senantiasa memperhitungkan dan memperhatikan pembaca yang dituju oleh laporan itu. Penulis yang mengetahui tugasnya dengan baik, demikian pula sasaran yang ingin ia capai, adalah penulis yang pada tahap pertama berusaha mengidentifikasi siapa pembaca-atau pembaca-pembaca yang dituju oleh tulisannya itu (Lihat de Boer:14). Ia harus mengetahui sejauh mungkin apa selera penerima laporan itu dan menggunakan pengetahuannya itu untuk menentukan pendekatan yang terbaik yang harus ia tempuh agar tulisannya itu dapat dengan tepat mengenai sasaran pembaca. Penulis juga harus senantiasa memperhitungkan bidang dan tingkat pengetahuan pembacanya agar kata-kata dan terminologi yang ia gunakan itu dapat ditangkap dan dimengerti dengan baik oleh penerima laporan. Tanpa mengenal pembacanya, tulisan yang dibuat tidak akan mengenai sasaran dan segala daya serta upaya yang dilakukan untuk membuat laporan itu menjadi sia-sia.

Prosedur penulisan laporan yang baik sudah dikenal dan dapat ditemukan dalam berbagai buku referensi tentang penulisan laporan yang ditulis dalam

buku-buku asing. Shurter (1971:239-419) mengemukakan suatu prosedur yang sederhana yang meliputi tahap-tahap: (1) perencanaan laporan yang akan ditulis, (2) penelitian, pengumpulan data yang diperlukan, dan perumusan kerangka pemikiran yang akan dituangkan ke dalam tulisan, (3) pengorganisasian bahan-bahan yang akan diolah menjadi tulisan, dan (4) penulisan laporan itu sendiri. Barnett (1974:100-105) dalam prosedur penulisan ini menambahkan *outlining* yang ikut menentukan keberhasilan penulisan suatu laporan. (Lihat juga lesikon, 1972:327-328); 552 dan Himstreet dan Wayne Murbi Baty, 1973:323-350).

Yang penting diperhatikan dalam teknik penulisan laporan ada dua kelompok. Pertama, kelompok yang menjurus pada format suatu laporan tertulis yang bentuk sampul dan halaman judul laporan, penjelasan penugasan penulisan laporan, surat penyerahan laporan, prakata, kata pengantar, tabel isi dan gambar atau grafik, sinopsis, isi laporan yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, saran-saran, rangkuman, dan lampiran yang terdiri dari bibliografi, apendiks, dan indeks (Leksikon: 1972:342-351). Kelompok kedua adalah teknik pencatatan sumber-sumber yang digunakan atau *footnoting*, atau penggunaan tiga titik untuk penghilangan keseluruhan atau sebagian kalimat.

Dari segi penggunaan bahasa yang terpenting adalah bahasa yang digunakan itu harus dapat merumuskan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca itu secara ringkas, padat, terpadu, dan sejauh mungkin tidak terbuka bagi berbagai kemungkinan interpretasi atau penafsiran. Bahasa seperti itu menuntut perbendaharaan kata seluas mungkin, penguasaan tata bahasa yang mendalam, kemampuan menggunakan kata-kata yang tepat dan yang sesederhana mungkin (bukan kata-kata yang muluk-muluk), ketepatan penggunaan semua tanda baca, perumusan kalimat-kalimat yang logis, tidak terlalu panjang, perangkaian kalimat-kalimat dengan kata-kata perangkai yang tepat sehingga antara kalimat yang satu dan kalimat berikutnya terdapat kesinambungan yang enak dibaca, penyusunan paragraf-paragraf yang mantap, dan penguraian dalam suatu komposisi yang harmonis dan terarah. Di samping itu, bahasa laporan juga menuntut adanya ketepatan bahasa yang digunakan.

Beberapa Sumber Masalah

Kelemahan kita di Indonesia dalam hal penulisan laporan sudah dikemukakan di atas secara panjang lebar. Beberapa patokan tentang penulisan

laporan yang baik juga telah diuraikan meskipun dalam tulisan ini belum dicakup semua aspek dan segi penulisan laporan itu secara menyeluruh. Dengan bekal kedua hal ini, marilah kita selusuri kembali proses pemupukan kemampuan penulisan laporan itu untuk mengidentifikasi problema yang perlu dipecahkan dan sekaligus mencari jawaban dan alternatif pemecahan yang terbaik dalam meningkatkan keterampilan tulis-menulis di Indonesia.

Inti tulis-menulis tidak lain daripada penguasaan dan penggunaan bahasa. Tulisan adalah semacam wahana perekam hasil pikiran orang yang dinyatakan dengan huruf-huruf di atas kertas. Huruf-huruf itu, selanjutnya melambangkan kata-kata, kalimat-kalimat, dan paragraf-paragraf yang mencerminkan bahasa sebagai media perumusan buah pikiran orang. Dengan gambaran itu, tidaklah sulit bagi kita menyimpulkan bahwa kemampuan membuat tulisan adalah suatu kemampuan yang sangat bergantung kepada kemampuan orang dalam penguasaan dan penggunaan bahasa--dalam hal ini bahasa Indonesia--.

Kita juga dapat mengatakan bahwa kelemahan kita di Indonesia dalam hal penulisan laporan terutama terletak pada ketidakmampuan kita menyatakan apa yang kita pikirkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang tidaklah mungkin dapat diketahui oleh orang lain apabila pikiran itu tidak ke luar dari orang itu dalam bentuk lisan atau tertulis. Ada orang-orang luar biasa yang dapat membaca isi hati orang lain, tetapi kemampuan seperti itu bukanlah hal yang dipermasalahan dalam tulisan ini. Yang kita bicarakan adalah masalah penyampaian informasi, pengetahuan, dan gagasan kepada orang lain sehingga apa yang ingin disampaikan itu dapat diterima dengan jelas, tepat, dan efektif.

Kini kita tibalah pada masalah kaitan yang terdapat antara penggunaan bahasa dan proses berpikir. De Boer dan kawan-kawannya (1966:50) mengatakan bahwa menulis adalah memindahkan gagasan-gagasan dan perasaan-perasaan kedalam kata-kata, dan selanjutnya mencatat semua itu di atas kertas. Mereka menambahkan bahwa kata-kata dan pengertian-pengertian--atau bahasa dan pemikiran--merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan; Tanpa bahasa, manusia tidak dapat berpikir sama sekali. Mereka juga menyimpulkan bahwa 'merumuskan kedalam kata-kata' adalah tidak lain daripada perwujudan proses berpikir yang dilakukan oleh manusia itu.

Dari pandangan inilah-bahwa bahasa dan berpikir itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan-harus kita lihat masalah penulisan laporan itu dan kita secara langsung dapat mengarahkan analisis kita pada sumbernya, yaitu pada pengajaran bahasa Indonesia, di semua tingkat pendidikan. Seperti yang telah dikemukakan di atas, yang kita persoalkan bukanlah bahasa, melainkan pengajaran di sekolah-sekolah kita yang selama ini menghasilkan orang-orang yang tidak menguasai dan tidak mempunyai kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik itu.

Saya tidak akan menguraikan panjang lebar kelemahan-kelemahan pengajaran bahasa Indonesia itu di sekolah-sekolah, terutama sekali di sekolah-sekolah dasar. Tanpa harus menjadi ahli atau sarjana dalam bahasa Indonesia, seorang awam yang mempunyai minat dalam bahasa akan menggeleng-gelengkan kepalanya apabila ia meneliti dengan seksama semua kalimat dan penggunaan kata-kata yang terdapat dalam buku-buku pelajaran bahasa untuk murid-murid kelas satu. Mungkin terlalu keras apabila dikatakan bahwa buku-buku pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah itu bukan hanya mengajarkan penggunaan bahasa yang keliru, tetapi jauh lagi, buku-buku pelajaran itu secara sistematis merusak kesadaran anak kita dalam berbahasa.

Penelitian ini dapat kita lanjutkan pada buku-buku pelajaran lain, termasuk buku-buku pelajaran berhitung dan matematika. Pada kesempatan lain kita dapat melihat contoh-contoh betapa tidak logisnya kalimat-kalimat yang menerangkan soal-soal berhitung dan matematika yang *nota bene* dimaksudkan untuk mengajar anak didik kita itu menguasai logika.

Kesimpulan dan Saran

Kami harus mengakui bahwa penguraian masalah tentang penulisan laporan ini belum mencakup keseluruhan permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan yang baik. Tulisan ini memang tidak dimaksudkan untuk menjadi buku pegangan bagi pengetahuan tentang penulisan laporan itu. Tujuan tulisan ini, di samping mengemukakan arti dan hakikat laporan tertulis, terutama adalah melemparkan masalah penulisan laporan yang bersumber pada penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia itu dalam Kongres ini dengan harapan agar seluruh bangsa kita dapat melihat masalah yang kita hadapi itu secara lebih jelas dan lebih serius sehingga kita semua bersedia berkorban untuk mengusahakan perbaikan-perbaikan yang kita semua anggap perlu.

Untuk menanggulangi problema-problema penulisan laporan dan pengajaran bahasa Indonesia yang telah kami kemukakan di atas kami sarankan agar Kongres Bahasa Indonesia III ini membicarakan dan mengumpulkan semua alternatif yang kiranya dapat disumbangkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk dilaksanakan di hari-hari yang akan datang. Kami sendiri menyarankan agar Kongres ini membahas dan mengusulkan kepada Pemerintah program-program berikut ini.

1. Program pembakuan bahasa Indonesia :
dengan tujuan secepat mungkin membakukan semua segi bahasa Indonesia;
2. Program penataran semua guru/pengajar bahasa Indonesia :
dengan tujuan mengintroduksi bahasa Indonesia yang baku itu kepada semua guru dan pengajar bahasa Indonesia;
3. Program penulisan kembali semua buku pelajaran (segi bahasa) :
dengan tujuan dalam jangka waktu 2 tahun semua buku pelajaran telah tertulis dalam bahasa Indonesia yang baku dan bersih dari semua kesalahan dan kekeliruan; dan
4. Program penyusunan kurikulum pelajaran penulisan laporan :
dengan tujuan dalam tahun 1980 secara serentak dimulai pelajaran-pelajaran penulisan laporan dan pembuatan tulisan-tulisan yang efektif, termasuk *speed reading*.

DAFTAR PUSTAKA

- De Boer. *et al.* 1966. *Schriftelijk Rapporteren*. Utrecht Aula Boeken.
- Shurter, Robert L. 1971. *Written Communication McGraw-Hill Book Company in Business*. Editor, New York:
- Menning, J.H. dan Wilkinson. C.W. 1972. *Communicating Through Letters and Reports*. Edisi V. Homewood, Illinois Richard D. Irwin, Inc.
- Barnett, Marva T. 1974. *Elements of Technical Writing*. Albany, New York: Delmar Publishers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Bahasa Indonesia*. I. 1973. Jakarta: Yayasan Purna Usaha Tama.
- Lesikon, Raymond V. 1972. *Business Communication, Theory and Application*, Revised Edition Homewood. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Himstreet, William C. and Baty, Wayne Murlin. 1973. *Business Communication Principles and Methods*. Edisi IV. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc.

KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA III

Kongres Bahasa Indonesia III, yang berlangsung dari Sabtu tanggal 28 Oktober 1978 sampai dengan hari Jumat tanggal 3 November 1978 di Hotel Indonesia Sheraton, Jakarta, dengan memperhatikan pidato peresmian pembukaan Kongres Bahasa Indonesia III oleh Presiden Republik Indonesia, Suharto, pada tanggal 28 Oktober 1978 dan pidato pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Joesoef, pada tanggal 30 Oktober 1978, serta setelah mendengarkan kertas-kertas kerja yang disajikan dan dibahas secara mendalam, baik dalam sidang-sidang lengkap maupun di dalam sidang-sidang kelompok, mengambil keputusan berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan :

1. kebijaksanaan kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional;
2. bidang pendidikan;
3. bidang komunikasi;
4. bidang kesenian;
5. bidang linguistik;
6. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut.

I. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Kebijakan Kebudayaan, Keagamaan, Sosial, Politik, dan Ketahanan Nasional

a. Kesimpulan Umum

Bahasa adalah unsur yang berpadu dengan unsur-unsur lain di dalam jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama bahasa merupakan sarana pengungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan nilai-nilai kehidupan kemasayarakatan. Oleh karena itu, kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebahasaan harus merupakan bagian yang integral dari kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebudayaan.

Perkembangan kebudayaan Indonesia ke arah peradaban modern sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya perkembangan cara berpikir yang ditandai oleh kecermatan, ketepatan, dan kesanggupan menyatakan isi pikiran secara eksplisit. Ciri-ciri cara berpikir dan mengungkapkan isi pikiran ini harus dipenuhi oleh bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan sebagai sarana berpikir ilmiah dalam hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi masyarakat Indonesia. Selain itu, mutu dan kemampuan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi keagamaan perlu pula ditingkatkan. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia memiliki kesanggupan menyatakan dengan tegas, jelas, dan eksplisit konsep-konsep yang rumit dan abstrak serta hubungan antara konsep-konsep itu satu sama lain. Untuk mencapai tujuan ini harus dijaga agar senantiasa terdapat keseimbangan antara kesanggupan bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah dan identitasnya sebagai bahasa nasional Indonesia.

Identitas kebangsaan Indonesia dimanifestasikan bukan saja oleh bahasa Indonesia, melainkan juga oleh bahasa-bahasa daerah. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus diimbangi dengan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sesuai dengan penjelasan Bab XV Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam hubungan ini diperlukan adanya keseimbangan antara sikap bahasa yang positif, baik terhadap bahasa Indonesia maupun terhadap bahasa daerah dan perilaku berbahasa, dan antara sikap bahasa perseorangan dan sikap bahasa bangsa yang dinyatakan di dalam kebijaksanaan bahasa nasional.

Sejarah kebangsaan Indonesia memperlihatkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia memiliki hubungan isi-mengisi dengan perkembangan kehidupan pedesaan—, serta kehidupan politik di Indonesia. Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik telah mewarnai perkembangan bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sarana komunikasi antardaerah, antarsuku, dan antarbudaya telah memungkinkan terjadinya perkembangan kehidupan kebudayaan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik seperti yang kita miliki hingga saat ini. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia yang semula merupakan sarana pembebasan dari kekangan stratifikasi sosial, dewasa ini menunjukkan kecenderungan ke arah pembedaan kedudukan sosial dalam masyarakat. Kecenderungan ini perlu diatasi demi keutuhan identitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang demokratis.

Di dalam hubungan dengan peningkatan isi dan makna kemerdekaan Indonesia bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan peningkatan kewibawaan serta identitas bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat antarbangsa, terutama dalam lingkungan Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bahasa Indonesia merupakan sarana yang diandalkan untuk meningkatkan ketahanan nasional, yang itu kondisi dinamik yang ditandai oleh adanya keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Hanya dengan wibawa yang besar dan identitas yang tegas dan nyata, bangsa Indonesia dapat memainkan peranan yang berpengaruh di dalam pergaulan masyarakat dunia.

Bahasa Indonesia dapat dikembangkan dan diperkaya dengan unsur-unsur bahasa daerah dan, apabila perlu, dengan unsur-unsur bahasa asing. Unsur-unsur serapan itu haruslah terbatas pada unsur-unsur yang sangat diperlukan dan yang padanya yang tepat tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Oleh karena kebijaksanaan bahasa nasional merupakan bagian integral kebijaksanaan kebudayaan nasional, dan disusun dalam konteks kebijaksanaan kebudayaan nasional itu, maka perlu segera diadakan Kong-

res Kebudayaan Nasional dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh nasional yang berpengalaman dalam bidang kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.

- (2) Pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional memerlukan partisipasi segenap lapisan masyarakat. Dalam hubungan ini perlu dibentuk Dewan Nasional Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berfungsi mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa dan yang berpengalaman dalam bidang kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan.
- (3) Sikap bahasa yang positif, perilaku berbahasa, dan kebiasaan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar perlu ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mencapai tujuan ini perlu dikembangkan lingkungan kebahasaan yang positif pula. Dalam hubungan ini, iklan serta papan nama toko, perusahaan, dan lain-lain yang tertulis dalam bahasa asing perlu diindonesiakan.
- (4) Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan cara berpikir ilmiah, buku-buku dan bahan kepustakaan ilmiah lain yang tertulis dalam bahasa asing perlu disebarluaskan dengan jalan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini perlu segera dibentuk Badan Penerjemahan Nasional dengan wewenang, dana, dan tenaga profesional yang cukup.
- (5) Keseimbangan antara sikap bahasa yang positif dan perilaku berbahasa dapat dicapai dengan menjadikan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian dalam sektor pemerintah, baik dalam lingkungan sipil maupun dalam lingkungan militer serta dalam sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan sarana perundang-undangan untuk mengatur penggunaan kemahiran bahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian.

II. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Pendidikan

a. Kesimpulan Umum

Perkembangan bahasa Indonesia seperti yang kita miliki dewasa ini telah dimungkinkan oleh usaha para pendidik. Sebaliknya, perkembangan pendidikan kebangsaan kita telah dimungkinkan berkat adanya bahasa Indonesia.

Bidang pendidikan merupakan wadah dan lingkungan formal yang harus menerima anak didik dari semua suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, dan sesuai pula dengan pokok-pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional adalah (1) sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, dan (2) sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang sekolah.

Bahasa daerah masih dapat dipakai untuk membantu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas satu sampai dengan kelas tiga sekolah dasar di daerah-daerah yang masih memerlukannya. Di samping itu, bahasa daerah dapat pula diajarkan sebagai mata pelajaran.

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah untuk sarana komunikasi antarbangsa dan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari buku-buku berbahasa asing.

Sehubungan dengan pemakaian tiga kelompok bahasa yang dikemukakan di atas, hal yang tidak menggembirakan ialah kenyataan bahwa pada sebagian anggota masyarakat terjadi percampuradukan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dan bahasa asing mungkin dapat diatasi dengan pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar oleh semua guru.

Perolehan bahasa daerah sebagai bahasa ibu yang berjalan secara alami-hal jalin-berjalin dengan perkembangan persepsi, daya abstraksi, perasaan, dan pengetahuan seorang anak. Oleh karena itu, proses belajar-mengajar bahasa Indonesia dengan pendekatan makro yang mencakup pembinaan melalui semua mata pelajaran dan lingkungan sosial yang lebih luas akan lebih menguntungkan.

Masukan (*input*) instrumental pendidikan bahasa mencakup kurikulum, guru, dan sarana pendidikan. Kurikulum pendidikan bahasa Indonesia pada semua jejang sekolah harus berkesinambungan. Guru yang memegang peranan kunci dalam proses mengajar tidak selalu menggembirakan kualifikasi dan jumlahnya. Demikian pula halnya dengan sarana pendidikan seperti buku-buku pelajaran dan buku bacaan.

Khusus mengenai buku-buku terdapat beberapa masalah. Pertama, jumlah dan jenis buku yang diperlukan oleh guru dan murid belum memadai.

Kedua, perpustakaan sekolah yang bertanggung jawab untuk pembinaan buku-buku dan media bacaan lainnya belum berkembang sebagaimana mestinya; petugas perpustakaan sangat kurang. Ketiga, buku-buku pelajaran masih banyak yang belum memenuhi syarat, baik dari segi ejaan dan tanda baca maupun dari segi bahasa dan isinya.

Minat baca di kalangan murid pada umumnya cukup memadai, kecuali minat baca untuk buku ilmu pengetahuan. Dukungan yang diperlukan untuk pengembangan minat baca ternyata masih kurang dalam pengajaran bahasa Indonesia.

Pelajaran sastra belum merupakan mata pelajaran yang mandiri. Sastra diajarkan sebagai sambilan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tenaga pengajar dan buku yang diperlukan masih kurang.

Keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan ternyata belum memenuhi syarat minimum bagi penggunaan bahasa Indonesia, baik untuk kepentingan pendidikan tinggi maupun untuk kepentingan komunikasi umum di dalam masyarakat. Keadaan ini perlu segera diatasi.

Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan masyarakat umum, termasuk para pejabat, di luar lembaga pendidikan formal perlu ditingkatkan.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Untuk meningkatkan mutu keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan tamatan sekolah dasar dan sekolah lanjutan mutu pelajaran harus segera diperbaiki dengan jalan menyediakan bahan pengajaran yang bermutu, mengembangkan metode dan sarana pengajaran yang lebih baik, dan meningkatkan mutu pendidikan guru sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan lanjutan. Selain itu, guru-guru terutama guru-guru bahasa Indonesia harus segera diberi penataran dalam keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, penggunaan metode dan sarana pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan pengembangan inovasi pendidikan kebahasaan.

- (2) Kebiasaan dan keterampilan menulis, termasuk menulis laporan ilmiah, harus dikembangkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Sejalan dengan itu, perlu pula dikembangkan keterampilan membaca cepat.
- (3) Perlu segera diadakan penelitian mengenai masalah-masalah kongkret tentang keserasian kurikulum bahasa Indonesia disemua jenis dan jenjang sekolah dan kemampuan sarana penunjang seperti buku-buku murid, penuntun guru, perpustakaan, dan alat peraga.
- (4) Peranan perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan dan buku-buku dilengkapi. Guru perlu ditatar untuk menjadi guru pustakawan.
- (5) Buku-buku pelajaran perlu diteliti dan dievaluasi ketepatan isinya dan keserasian bahasanya. Harga buku perlu diturunkan agar dapat terjangkau oleh daya beli orang tua murid.
- (6) Keragaman buku pelajaran untuk murid-murid yang berbeda latar belakang bahasa ibunya atau tingkat kemampuan bahasa Indonesianya perlu dikembangkan.
- (7) Untuk mempercepat proses evaluasi buku, maka wewenang pelaksanaannya perlu diserahkan kepada tim daerah. Tim ini dapat dibentuk pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keanggotaan tim harus mewakili ahli bahasa, ahli pendidikan, dan ahli bidang studi yang bersangkutan.
- (8) Untuk menghilangkan keraguan di lapangan, perlu dikeluarkan petunjuk yang jelas tentang masalah bahasa pengantar di sekolah, termasuk kedudukan bahasa daerah sebagai pembantu bahasa pengantar di kelas-kelas awal sekolah dasar.
- (9) Dalam rangka peningkatan pengajaran sastra, perlu disusun kurikulum yang serasi.
- (10) Dalam rangka penerapan pendekatan makro, perlu disusun pedoman untuk kepala sekolah dan para guru. Tugas guru yang mengajarkan bidang studi nonbahasa adalah mengembangkan kemampuan murid dalam memahami uraian lisan dan bahan bacaan dalam bidang studi masing-masing dengan tepat. Juga diperlukan latihan melakukan sintesis, analisis, dan evaluasi konsep-konsep dalam bidang studi dengan bahasa yang tepat.

- (11) Perlu ada kebijaksanaan yang menyeluruh tentang pembinaan guru bahasa Indonesia. Untuk mendapatkan guru yang baik, perlu dipikirkan masalah mutu calon guru di SPG dan IKIP, masalah pengangkatan dan pembinaan karier melalui penataran, dan pendidikan lanjutan.
- (12) Sehubungan dengan pendidikan luar sekolah, perlu ditingkatkan pembekalan buta huruf Latin dan buta bahasa Indonesia.
- (13) Dalam rangka pembinaan bahasa daerah, perlu diberikan tempat dan waktu yang wajar padanya dalam kurikulum sekolah.
- (14) Mutu pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris perlu segera ditingkatkan dengan tujuan memungkinkan penggunaannya sebagai sarana penggalian kekayaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta sarana komunikasi antarbangsa.

III. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kaitannya dengan Bidang Komunikasi

a. Kesimpulan Umum

Media massa merupakan salah satu sarana yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa karena media massa memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat. Dalam hubungan itu media massa telah memberikan sumbangan yang berharga dalam pertumbuhan bahasa Indonesia. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pemakaian bahasa Indonesia melalui media massa, baik secara tertulis maupun lisan. Misalnya, ada kata yang cenderung kehilangan maknanya yang sesungguhnya dalam ragam lisan belum ada lafal baku. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih dipakai bahasa daerah atau bahasa asing.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Untuk mencegah erosi bahasa perlu diadakan penelitian mendalam tentang sebab-sebabnya.
- (2) Kerja sama antara wartawan dan ahli bahasa dalam penumbuhan bahasa Indonesia perlu digalakkan.

- (3) Perlu diadakan penataran bahasa Indonesia untuk wartawan surat kabar, televisi, dan radio, baik pemerintah maupun swasta.
- (4) Pejabat negara, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam segala jenjang hendaknya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang lebih cermat, baik dalam komunikasi resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- (5) Perlu dipikirkan kemungkinan penempatan ahli-ahli bahasa di kantor-kantor Pemerintah dan swasta untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan masing-masing.
- (6) Sebaiknya, surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia menyediakan "Pojok Bahasa" yang memuat petunjuk praktis penggunaan bahasa Indonesia.
- (7) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bersama dengan Dewan Pers dan lembaga lain hendaknya segera menyusun pedoman lafal baku bahasa Indonesia yang didasarkan atas penelitian antara lain untuk penyiar televisi dan radio.
- (8) Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pers. televisi, serta radio dapat melakukan kerja sama yang lebih efektif dalam usaha keefisienan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan baku.

IV. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bidang Kesenian

a. Kesimpulan Umum

Bahasa Indonesia yang dipergunakan di dalam banyak karya sastra, cerita anak-anak, lagu, teater, dan film menunjukkan adanya banyak ketimpangan. Dalam hal sastra dan buku anak-anak, hal itu disebabkan oleh penggunaan bahasa yang kurang sempurna dari kebanyakan pengarang kita, di samping masih tidak pastinya peranan redaktur dalam penerbitan.

Dalam hal penerbitan cerita anak-anak, pengarang perlu memberi keleluasan kepada penerbit usia dan lingkungan anak-anak. Bacaan anak-anak memegang peranan penting dalam usaha peningkatan imajinasi dan kecerdasan anak; dengan demikian, kecermatan pemakaian bahasa merupakan faktor yang sangat penting. Dalam syair lagu ketimpangan itu antara lain di-

akibatkan oleh tidak adanya patokan yang pasti tentang aksen bahasa Indonesia sehingga para komponis tidak mempunyai pegangan untuk menyesuaikan dengan melodi.

Pemakaian bahasa Indonesia dalam film belum dilakukan sebaik-baiknya sebab film lebih banyak merupakan barang dagangan pemburu keuntungan bagi pengusaha; penulis skenario yang dipilihnya kebanyakan tidak menguasai teknik penulisan yang baik.

Bahasa Indonesia semakin banyak juga dipergunakan untuk menerjemahkan karya sastra tradisional dan teater tradisional. Usaha untuk menyebarkan jangkauan teater tradisional, yaitu dengan cara mengindonesiakan cakupannya kadang-kadang justru menurunkan mutu teater yang bersangkutan karena terjadinya ketidakseimbangan dalam struktur teater itu sendiri. Oleh karena itu, pengindonesiaan teater tradisional harus dilakukan secara teliti dengan melibatkan lembaga kebahasaan, lembaga pendidikan dan pengembangan kesenian, dan seniman.

b. *Tindak Lanjut*

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Mengefektifkan pengajaran sastra di sekolah-sekolah.
- (2) Menyediakan perpustakaan yang lengkap dan memadai.
- (3) Menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah.
- (4) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya asli berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Merangsang penelitian dan pendalaman karya-karya sastra daerah yang bersangkutan.
- (6) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia atau daerah.
- (7) Menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya sastra Indonesia dan daerah ke dalam bahasa-bahasa asing.
- (8) Menyusun suatu kebijaksanaan perbukuan secara nasional sehingga setiap warga negara dapat memperoleh kesempatan membaca buku dengan mudah dan murah.

- (9) Menggiatkan dan merangsang kreativitas para sastrawan kita dengan menyediakan sarana untuk itu, misalnya, berupa majalah sastra dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah.
- (10) Mengadakan kegiatan pertemuan antara sastrawan, ahli sastra, dan calon penggemar sastra (dalam rangka memasyarakatkan apresiasi sastra).
- (11) Mewajibkan para penerbit memiliki editor.
- (12) Mengadakan penataran untuk tenaga editor.
- (13) Menggunakan tenaga editor yang diakui oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- (14) Melakukan perekaman teater tradisional untuk kemudian diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (15) Mengadakan penelitian mengenai penggunaan syair untuk lagu-lagu Indonesia, yang hasilnya dapat digunakan sebagai pengarah penciptaan lagu.
- (16) Melakukan penelitian kembali terhadap kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang sudah ada, dan apabila ada kaidah yang sudah tidak sesuai lagi, maka kaidah itu sebaiknya diperbaiki.
- (17) Memberi rangsangan kepada pengarang-pengarang yang menyumbangkan tulisan-tulisan berharga kepada media massa.
- (18) Meningkatkan kecermatan pemakaian bahasa dalam bacaan anak-anak, termasuk penyesuaian dengan usia anak-anak.
- (19) Menumbuhkan kerja sama antara penerbit bacaan anak-anak dengan lembaga-lembaga pendidikan dan psikologi yang ada.
- (20) Perpustakaan sekolah hendaknya benar-benar terbuka bagi anak didik.

V. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kaitannya dengan Bidang Linguistik

a. Kesimpulan Umum

Bahasa Indonesia yang dipakai oleh semua lapisan masyarakat menunjukkan perkembangan berbagai ragam bahasa yang kaidah-kaidahnya lebih rumit daripada yang disangka orang. Kaidah bahasa yang tercantum dalam buku tata bahasa dan yang diajarkan di sekolah, tidak sepenuhnya lagi mencerminkan

kan kenyataan orang berbahasa dewasa ini. Ketidakserasian antara kaidah dan pemakaian bahasa yang beragama ragam itu kadang-kadang melahirkan keangsanian orang dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar.

Usaha agar Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan diterapkan secara sadar dan mantap oleh berbagai golongan dan lingkungan masyarakat dalam ragam bahasa tulisan belum berhasil seperti yang diharapkan.

Pengembangan kosa kata Indonesia yang tidak dilandasi oleh wawasan bahasa yang baik kadang-kadang menjurus ke pertumbuhan yang kurang teratus.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu diambil dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Penguasaan kaidah ejaan resmi dan lafal yang baku perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat luas, termasuk instansi Pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, dan sarana komunikasi massa.
- (2) Tata bahasa yang menggambarkan norma-norma bahasa adab dengan cara yang memadai perlu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pengembangan bahasa Indonesia. Tata bahasa deskriptif itu kemudian dijabarkan untuk pelbagai tujuan pedagogis atau tujuan praktis.
- (3) Kamus baku bahasa Indonesia perlu segera diterbitkan dan disebarluaskan. Untuk tujuan itu penelitian di bidang leksikologi perlu dilaksanakan dan para ahli berbagai bidang ilmu pengetahuan diikutsertakan.
- (4) Kerja sama penelitian antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan lembaga pendidikan tinggi perlu ditingkatkan.
- (5) Akronim yang dipakai di luar lingkungan khusus hendaknya disertai bentuk lengkapnya jika mungkin terjadi gangguan komunikasi.
- (6) Pembakuan dan modernisasi segala segi bahasa Indonesia perlu digalakkan dengan tujuan peningkatan penggunaan bahasa Indonesia baku di dalam segala kegiatan pemakaiannya.
- (7) Perlu diadakan penelitian mengenai berbagai segi bahasa Indonesia, seperti penggunaan kata ganti dan sapaan dalam hubungan dengan demokratisasi masyarakat.

- (8) Perlu diatur transliterasi tulisan Arab untuk kepentingan keagamaan, ilmiah, dan umum.

VI. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kaitannya dengan Bidang Ilmu dan Teknologi

a. Kesimpulan Umum

Oleh karena antara bahasa dan alam pemikiran manusia terdapat jalinan yang erat, maka keberhasilan dari pemoderanan itu sangat bergantung kepada corak alam pemikiran manusia Indonesia yang merupakan hasil sintesis antara nilai-nilai yang berakar pada kebudayaan etnis yang tradisional dan nilai-nilai kebudayaan yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Proses sintesis itu dipikirkan sebagai suatu proses yang mempertinggi potensi kreatif yang dapat menjelaskan suatu kebudayaan yang khas Indonesia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern merupakan faktor penting dalam modernisasi, serta pengenalan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dimasyarakatkan secara luas. Masyarakatan ini hanya dapat diselenggarakan secara efektif dan efisiensi apabila bahasa berfungsi sebagai penyebaran konsep-konsep ilmu pengetahuan dan teknologi itu.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemakaian bahasa keilmuan di Indonesia adalah ketidakseragaman istilah dan penamaan dalam satu bidang disiplin pun. Di dalam masing-masing disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat kecenderungan untuk membuat istilah-istilah dan tata nama yang berbeda-beda. Di samping ini, perlu pula diperhitungkan adanya sistem tata nama internasional. Jadi, banyak istilah yang mudah dibuat di dalam suatu kalangan tidak diketahui oleh kalangan itu.

Pengadaan buku pelajaran ilmiah dalam bentuk karya asli perlu digalakkan. Potensi ke arah ini sudah kelihatan mulai berkembang. Faktor-faktor penghambat tampaknya terletak antara lain di luar bidang ilmiah, misalnya.

- a. kreativitas di bidang lain adalah lebih produktif secara material; dan
- b. uluran tangan dari pihak Pemerintah hingga saat ini belum mencapai hasil yang diinginkan.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ilmu seperti ilmu hukum banyak yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena bahasa keilmuan itu harus bermakna tunggal, pemakaian bahasa Indonesia harus diperbaiki dan dibakukan.

Penggunaan akronim hendaklah terbatas pada lingkungan kedinasan yang bersangkutan saja. Penggunaan akronim di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, misalnya, di dalam media massa hendaklah dihindari. Apabila akronim digunakan di luar lingkungan kedinasan yang bersangkutan, akronim itu hendaklah dilengkapi dengan bentuk penuhnya.

Dasar dan penamaan bilangan di dalam bahasa Indonesia perlu ditinjau kembali.

Untuk kepentingan pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam bidang peristilahan, bahasa asing yang diutamakan sebagai bahasa sumber adalah bahasa Inggris.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan kesimpulan umum di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Usaha pemodernan bahasa Indonesia hendaknya memperhatikan tercapainya keselarasan dengan :
 - a. nilai-nilai yang telah memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern;
 - b. nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan etnis.
- (2) Pemerintah dan masyarakat ilmuwan perlu berusaha untuk segera menyeragamkan peristilahan, baik dalam satu disiplin maupun antardisiplin yang berdekatan dan agar istilah-istilah internasional digunakan di samping istilah-istilah bahasa Indonesia.
- (3) Dalam semua jenjang pendidikan, khususnya sejak sekolah lanjutan, perlu diusahakan keseimbangan antara pendidikan bahasa, matematika, dan logika supaya pemikiran bangsa Indonesia dapat mengimbangi kemajuan zaman.
- (4) Supaya Pemerintah menumbuhkan satu badan khusus yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penerjemah.
- (5) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya mendukung usaha swasta di bidang penerjemahan yang telah nyata-nyata menunjukkan kemampuan.

- (6) Untuk penulisan karya asli dan saudara tidak perlu ditentukan "target". Cukuplah kalau disusun daftar bidang-bidang yang perlu digarap dan penulisannya ditawarkan kepada orang-orang yang dianggap ahli. Penulis hendaknya dibebaskan dari tugas rutinnnya (*sabbatical leave*). Sehubungan dengan penulisan karya asli ini, perlu diadakan latihan penulisan buku (*textbook writing*).
- (7) Pengadaan pedoman khusus untuk pembentukan istilah-istilah dan tata nama dalam masing-masing bidang ilmu. Hendaknya pedoman khusus ini dijabarkan dari pedoman umum pembentukan istilah yang telah disepakati.
- (8) Desimal hendaklah dinyatakan dengan titik (.) bukan koma (,) sehingga 0,9 menjadi 0.9.
- (9) Sebagai pengejawantahan Kongres Bahasa Indonesia III agar pada awal Pelita III digalakkan penerjemahan besar-besaran.
- (10) Agar dibentuk badan pertimbangan yang anggotanya terdiri dari para ahli pelbagai bidang ilmu yang bekerja dalam 2 tahap, yaitu :
 - (a) memilih dan menyebarluaskan istilah dan
 - (b) menampung pendapat (tanggapan) masyarakat serta menetapkan istilah yang akan dipakai.
- (11) Peranan bilangan besar Amerika – yang sama dengan penamaan bilangan besar dalam bahasa Prancis dan Rusia – hendaklah dijadikan dasar penamaan bilangan dalam bahasa Indonesia (contoh: miliun, biliun, triliun, dan seterusnya).
- (12) Bahasa Indonesia dianjurkan menggunakan sistem penamaan bilangan antara sepuluh dan dua puluh yang digunakan di Indonesia bagian timur, yang lebih mudah diterima oleh anak-anak, di samping menggunakan sistem yang berlaku sekarang.
- (13) Pengejaan nama bilangan hendaknya dilakukan dengan mengingat fungsi aditif dan multiplikatif angka-angka yang terdapat dalam tubuh lambang bilangan itu. Yang bersifat aditif ditulis terpisah, sedangkan yang bersifat multiplikatif dirangkaikan (Contoh: 23 = duapuluh tiga)

**PIDATO MENTERI MUDA URUSAN PEMUDA SELAKU KETUA
UMUM PANITIA NASIONAL
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-50
PADA UPACARA PENUTUPAN KONGRES
BAHASA INDONESIA III
DI JAKARTA PADA TANGGAL 3 NOVEMBER 1978**

Para peserta Kongres yang saya hormati,

Saya merasa sangat berbahagia berada di tengah-tengah Saudara-saudara hari ini. Saya telah mengikuti perjalanan Kongres ini dengan penuh perhatian sejak dari awal hingga saat ini, bahkan sejak persiapan penyelenggaraan Kongres ini dimulai. Saya merasa berbahagia melihat kenyataan bahwa Kongres yang penting ini telah berlangsung bukan saja dengan lancar melainkan juga dengan semangat membangun yang hangat.

Tema dan tujuan Kongres ini telah mengumandangkan ke segenap lapisan masyarakat kita di seluruh Indonesia bahwa masalah kebahasaan adalah salah satu masalah nasional kita yang harus kita hadapi bersama dengan penuh kesungguhan dan ketekunan. Keharusan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masalah kebahasaan yang kita hadapi itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam jaringan masalah kebudayaan dan kehidupan kita sebagai bangsa

Di dalam usaha kita meningkatkan mutu kehidupan kita dan membawa kebudayaan kita ke arah peradaban modern, salah satu sarana yang ampuh adalah bahasa. Bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara kita, harus mampu berfungsi sebagai sarana yang sesuai dengan tuntutan komunikasi modern, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, serta teknologi modern demi peningkatan mutu kehidupan bangsa kita. Selain itu, bahasa Indonesia harus juga mampu berfungsi sebagai sarana

yang memungkinkan kita mempertahankan identitas kita sebagai bangsa dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena perkembangan lalu-lintas pergaulan, komunikasi, dan teknologi dunia sekarang tidak memungkinkan kita hidup terpisah dari bangsa-bangsa lain itu. Dengan kata lain, lingkungan hidup kita sebagai satu kesatuan yang bulat dengan tata kehidupan dan identitasnya sendiri serta lingkungan hidup kita di tengah-tengah per-caturan dunia dewasa ini menuntut adanya sarana yang dapat diandalkan, dan sarana itu adalah bahasa nasional kita.

Pentingnya peranan yang dimainkan oleh bahasa nasional kita di dalam hubungan dengan kehidupan kita sebagai bangsa mau tidak mau harus diimbangi dengan peranan yang sangat menentukan pula yang harus dimainkan oleh bahasa daerah kita yang berjumlah ratusan itu. Bahasa daerah, baik sebagai unsur dan pendukung kebudayaan daerah kita yang beraneka ragam itu maupun sebagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya bahasa nasional kita, merupakan kekayaan budaya kita. Adanya bahasa-bahasa daerah kita dan kebudayaan daerah yang didukungnya merupakan ciri khas yang mewarnai kehidupan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, bahasa-bahasa daerah kita harus tetap kita bina dan kita kembangkan sesuai dengan penjelasan Bab XV Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara kita.

Para peserta Kongres yang saya hormati,

Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda kita pada tanggal 28 Oktober 1928, 50 tahun yang lalu, mempunyai makna yang dalam dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kedalaman maknanya itu ternyata dari sendi-sendi yang diletakkannya di dalam kehidupan kita sebagai bangsa, yaitu bahwa kita merupakan satu bangsa yang hidup dalam satu tanah air dan menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda tahun 1928 itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu karena filsafat yang dikandungnya telah mewarnai dan memberi corak kepada kehidupan kita hingga saat ini dan akan tetap menjadi sendi kehidupan kita selanjutnya, pada masa yang akan datang, tahun demi tahun, dasawarsa demi dasawarsa, generasi demi generasi.

Kongres Bahasa Indonesia III ini dan kegiatan-kegiatan lain yang kita laksanakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-50* menjadi saksi pernyataan dan pengalaman kita mengenai pentingnya dan dalam-

*Telah dinyatakan secara resmi oleh Bapak Presiden bahwa Hari Sumpah Pemuda sekaligus merupakan Hari Pemuda Indonesia

nya makna Sumpah Pemuda itu. Kongres ini adalah peristiwa nasional. Banyaknya peserta yang datang dari seluruh pelosok tanah air dan mewakili berbagai lapisan masyarakat serta beraneka bidang profesi memperlihatkan kebulatan tekad kita di dalam pembinaan dan pengembangan bahasa nasional kita sesuai dengan tema dan tujuan Kongres Bahasa Indonesia III ini. Partisipasi Saudara-saudara di dalam peristiwa nasional yang penting ini bukan saja dihargai oleh masyarakat kita sekarang melainkan akan dikenang juga oleh generasi-generasi yang akan datang.

Para peserta Kongres yang terhormat,

Saudara-saudara telah berhasil mengambil keputusan-keputusan penting dalam hubungan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia serta pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Keputusan-keputusan penting ini menghendaki adanya tindak lanjut serta strategi pelaksanaan yang cermat, teliti, dan terarah. Oleh karena Kongres ini adalah peristiwa nasional, keputusan-keputusan penting yang telah diambil itu adalah keputusan-keputusan nasional pula. Ini berarti bahwa tindak lanjut dan pelaksanaannya menghendaki adanya kerja sama nasional dan partisipasi segenap lapisan masyarakat kita.

Di antara keputusan yang telah diambil di dalam Kongres ini ada keputusan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dengan dukungan kita semua, baik sebagai manusia perseorangan maupun sebagai tokoh masyarakat dan manusia profesi. Ada pula keputusan yang pelaksanaannya menghendaki usaha kita sebagai warga masyarakat dalam lingkungan yang lebih terbatas seperti lingkungan keluarga atau lingkungan profesi kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Saudara-saudara menerima keputusan-keputusan penting Kongres Bahasa Indonesia III ini bukan sebagai titik akhir melainkan sebagai titik kelanjutan usaha kita memantapkan fungsi dan kedudukan bahasa nasional kita sebagai sarana pemersatu, sarana komunikasi, sarana pengembangan kebudayaan, dan sarana pembangunan bangsa kita. Marilah kita laksanakan keputusan-keputusan ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa kita sekarang dan demi generasi muda yang akan meneruskan perjuangan kita.

Mudah-mudahan berkat kesungguhan kita di dalam melaksanakan keputusan-keputusan ini kita dapat membina sikap bahasa yang lebih positif pada generasi muda kita sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia benar-benar

dapat dipergunakan dengan cermat, tepat, dan santun sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Mahakuasa memberkahi usaha kita di dalam pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang telah dihasilkan oleh Kongres Bahasa Indonesia III ini.

Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangan pemikiran yang telah Saudara berikan selama Kongres ini berlangsung.

Dengan ini Kongres Bahasa Indonesia III saya nyatakan ditutup dengan resmi.

Menteri Muda Urusan Pemuda,

ttd.

dr. Abdul Gafur

SUSUNAN KEPANTIAAN KONGRES BAHASA INDONESIA III

Penanggung Jawab Umum

**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Dr. Daoed Joesoef**

Panitia Pengarah

- Ketua** : Ida Bagus Mantra
Direktur Jenderal Kebudayaan
- Wakil Ketua** : Amran Halim
Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Anggota** :
1. S. Takdir Alisjahbana
Akademi Jakarta
 2. H. Rosihan Anwar
Persatuan wartawan Indonesia
 3. Harsya W. Bachtiar
Fakultas Sastra Universitas Indonesia
 4. W.P. Napitupulu
Direktur Jenderal Pendidikan Luar
Sekolah dan Olah Raga
 5. Noegroho Notosoento
Kepala Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia
 6. A.M.W. Pranarka
Pusat Pengkajian Strategi Internasional
(CSIS)

7. Slamet Iman Santoso
Purnakaryawan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan
8. Amir Sirait
Komite Nasional Pemuda Indonesia
9. Soedjatmoko
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Ki Soeratman
Majelis Luhur Taman Siswa
11. Sumadi
Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film
12. Basyuni Suriamiharja
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia
13. Astrid S. Susanto
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia

Panitia Penyelenggara

Ketua : Amran Halim
Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Sekretaris : Maman Sumantri
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Seksi-seksi :

1. Seksi Persidangan dan Akomodasi
 - a. Djajanto Supraba
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - b. Dendy Sugono
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - c. Siti Sabarti Achadiah
Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
2. Seksi Kertas Kerja
 - a. S. Effendi
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

- b. Harimurti Kridalaksana
Fakultas Sastra Universitas Indonesia
 - c. Anton M. Moeliono
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - d. Hans Lapaliwa
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - f. Yayah B. Lumintintang
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - g. A. Murad
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
3. Seksi Dokumentasi
- a. Kuntamadi
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - b. Hartini Supadi
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - c. Farid Hadi
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - d. Basyaruddin
Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
4. Seksi Hubungan Masyarakat dan Resepsi
- a. A. Latief
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - b. Sri Sukesi Adiwimarta
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - c. M. Zaid
Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
 - d. Sunarjati Djajanegara
Fakultas Sastra Universitas Indonesia
5. Seksi Angkutan
- a. Hasjmi Dini
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - b. Samino
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

6. Seksi Perlengkapan
 - a. Dewan MS
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - b. E. Asmad
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - c. Rukijo
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 7. Seksi Keamanan
 - a. Julius Habib
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - b. Adi Sunaryo
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 8. Seksi Konsumsi
 - a. Sri Timur Suratman
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - b. Ny. S. Wahjudin
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 9. Seksi Pameran
 - a. Ipon Sukarsih Purawidjaja
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - b. Gina Ginanta
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - c. Atang Amsyahdi
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Sekretariat Panitia Penyelenggara
- a. Maman Sumantri
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - b. Atidjah Hamid
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - c. Hariyanti Eka Yuliwati
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 - d. Jusnan Junus
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

- e. **Katijem**
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- f. **Kasmini**
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- g. **Nasim**
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- h. **Sumiyati**
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

**DAFTAR PESERTA
KONGRES BAHASA INDONESIA III**

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Prof. Dr. A. Amiruddin	Rektor Universitas Hasanuddin Jalan Mesjid Raya 55 Ujungpandang	
2.	Abu Thalib Effendi	Kepala SMA Ksatria Jalan Percetakan Negara Rawasari Jakarta Timur	
3.	Ajip Rosidi	Direktur Pustaka Jaya Jalan Kramat II/31 A Jakarta	
4.	Letjen. H. Alamsyah Ratuprawiranegara	Menteri Agama Republik Indonesia Jln. Moh. Husni Thamrin No. 6 Jakarta	
5.	A. Latief, M.A.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Diponegoro 82 Jakarta Pusat	
6.	Prof. Dr. Amran Halim	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan dipenogoro 82 Jakarta Pusat	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
7.	Prof. Dr. Andi Hakim Nasution	d.a. Institut Pertanian Bogor Jalan Otto Iskandardinata - Bogor	
8.	Drs. Anton M. Moeliono. M.A.	Jalan Kartanegara 51 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	
9.	Drs. Anwas Iskandar	Direktur Pendidikan Masyarakat Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat	
10.	A.M.W. Pranarka, S.H.	Pusat Pengkajian Strategi Internasional (CSIS) Jalan Tanah Abang III/27 Jakarta	
11.	Drs. H. Asrul Sani	Jalan Menteng Atas Selatan II No. 1 Jakarta	
12.	Dr. Astrid S. Susanto	Kepala Biro Penerangan Kebudayaan Ilmu Pengetahuan BAPPENAS Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta	
13.	Dra. Astuti Hendrato	Jalan Pakuwono VI/12a Kebayoran Baru Jakarta Selatan	
14.	Drs. Benny H. Hoed	Jalan Daksinapati Timur 8 Kompleks Universitas Indonesia Rawamangun - Jakarta.	
15.	Dr. Boen S. Oemarjati	Jalan Cimandiri 26 Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
16.	Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H.	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jalan R.S. Fatmawati Jakarta Selatan.	
17.	Dr. Daulat P. Tampubolon	FKSS IKIP Medan Jalan Merbau 38 A Medan	
18.	Djoko Kentjono, M.A	Perumahan Dosen Universitas Indonesia 41 Ciputat Jakarta Selatan.	
19.	Letkol Hans Kawulanan	Staf Ahli Menteri Departemen Perhubungan Jalan Merdeka Selatan No. 8 - Gedung Utama Jakarta.	
20.	Drs. Harimurti Kridaklaksana	Perumahan Dosen Universitas Indonesia Ciputat Jakarta Selatan	
21.	Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar	Jalan Daksinapati Raya No. 1 Rawamangun - Jakarta.	
22.	Prof. Dr. Haryati Soebadio	Fakultas Sastra Universitas Indonesia Rawamangun Jakarta.	
23.	Drs. I. Gusti Ngurah Bagus	Kepala Balai Penelitian Bahasa	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
24.	Prof. Dr. Jakob Isman	Jalan Kolonel Ngurah Rai No. 54 Singaraja FKSS IKIP Padang Jalan Air Tawar Padang.	
25.	Drs. Jazir Burhan	d.a. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis Jalan Hanglekir II/16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.	
26.	Prof. Dr. Ir. H. Johannes	Sekip L-4 Yogyakarta	
27.	Dr. J.S. Badudu	Jalan Bukit Dago Selatan No. 27 Bandung	
28.	Prof. Mahadi, S.H.	Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara - Medan.	
29.	Dr. Masinambow	Asisten Direktur Bidang Pengembangan Leknas LIPI Jalan Gondangdia Lama No. 39 Jakarta Pusat.	
30.	Drs. Maurits Simatupang M.A.	Jalan Daksipati Utara No. 16 Kompleks Universitas Indonesia - Jakarta.	
31.	Dr. M. Mattulada	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Jalan Mesjid Raya No. 55 Ujungpandang	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
32.	Mochtar Lubis	Jalan Bonang No. 36 Jakarta	
33.	Dr. Mohammad Hatta	Jalan Diponegoro 57 Jakarta	
34.	Drs. M. Saleh Saad	Jalan Setiabudi Timur 30 Jakarta Selatan	
35.	Dr. Noegroho Notosoesanto, Brigjen.	Direktur Pusat Sejarah ABRI Jalan Gatot Subroto Jakarta	
36.	Oejeng Soewargana	Direktur Penerbit NV Ganaco Jalan Gereja No. 3 Bandung	
37.	Pranadjaja	Jalan Darmawangsa IIB/- No. 4-, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.	
38.	H. Rosihan Anwar	Jalan Surabaya No. 13 Jakarta Pusat	
39.	Drs. Sapardi Djoko Damono	Fakultas Sastra Universitas Indonesia Rawamangun Jakarta	
40.	Satyagraha Hoerip	d.a. Harian Sinar Harapan Jalan Pintu Besar Selatan No. 80 (atas) Jakarta Kota	
41.	Letjen Sayidiman	Gubernur LEMHANNAS Jalan Kebon Sirih 34 Jakarta Pusat	
42.	Drs. S. Effendi	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
		Jalan Diponegoro 82 Jakarta Pusat	
43.	Dra. S.K. Trimurti	Jalan Kramat Lontar H 7 Jakarta Pusat	
44.	Prof. Dr. Slamet Iman Santoso	Jalan Cimandiri 36 Jakarta	
45.	Dr. Soedjatmoko	Penasehat Ahli Sosial Budaya BAPPENAS Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat	
46.	Dr. Soepomo Poedjo Soedarmo	Dekan FKSS IKIP Sanata Dharma Karangmalang Yogyakarta	
47.	Prof. Sutan Takdir Alisyahbana	Jalan Dr. Sahardjo 290 Jakarta	
48.	Toeti Adhitama, M.A.	Cempaka Putih Tengah 27 D No. 42 Taman Solo Jakarta Pusat	
49.	Dr. Umar Kayam	Bulaksumur B 12 Yogyakarta	
50.	Dr. Yus Rusyana	Dekan FKSS IKIP Bandung Jalan Setiabudi Km. 8 Bandung	
51.	Drs. Abdul Djebar Hapip	Fakultas Keguruan Universitas Lambung Mangkurat Jalan Veteran No. 268 Banjarmasin	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
52.	Abdul Gani Jamaluddin, B.A.	Jati Pulo Rt. 005/05 No. 18 Kelurahan Kota Bambu, Jakarta Pusat	
53.	Abdul Gawi	Jalan Percetakan Negara V/31, Jakarta Pusat.	
54.	Agung Artini	Jalan Kompleks Kehakiman No. 10 Jakarta	
55.	Drs. Abdulhayi	Kampus FKSS IKIP Karangmalang Yogyakarta	
56.	Drs. Abdul Madjid Afandi	Jalan Daksinapati Timur II 18 Kompleks IKIP/UI/ P dan K Rawamangun Jakarta	
57.	Drs. Abdul Rachman HA	Sumber Sari VII B/11 Malang	
58.	Drs. Abu Bakar Sulaiman	Kompleks Universitas Riau Pekanbaru	
59.	A. Chalik, B.A.	Jalan Sultan Hasanudin No. 1,- Kendari	
60.	Achmad Djoenaedi	Salemba Raya No. 15 Jakarta	
61.	Drs. Achmad HP	IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta	
62.	Drs. Achmad Latuconsina	Dinas Museum dan Seja- rah : Museum Sumpah Pe- muda Jalan Kramat Raya No. 106 Jakarta.	
63.	Ny. Achmad Noerdin, S.H.	Jalan Tebet Barat Raya No. 16 Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
64.	Drs. Achmad Nuryani	HPBI Cabang Jakarta d.a. SMA Negeri XXIV F Jalan Jenderal Sudirman Jakarta	
65.	Adjat Sakri	Penerbit ITB Jalan Taman Sari 64 Bandung	
66.	A. Gani Jamal	SMPP XXXV Jalan Bakti IV Jakarta Barat	
67.	Dr. A. Hamid Hasan Lubis	Jalan Merbau 38 A Medan	
68.	Drs. Ahmad Samin Siregar	Fakultas Sastra USU Jalan Universitas No. 19 Medan	
69.	Ainin Niswati	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
70.	A. Kasim Achmad	Jalan Haji Agus Salim 60 Jakarta	
71.	Drs. Alex Asenold Koroh	Kompleks Unlam Jalan Krisnan Sucipto, S.H. 1/7 Banjarmasin	
72.	Ali Audah	Jalan Cikini Raya 73 Jakarta Pusat	
73.	Ali Moechtar Hoeta Soehoet	Jalan Gondangdia Lama 14 Jakarta Pusat	
74.	Aly H. Kasim, B.A.	Kamp. Pondol SK 10/20 Jalan Samratulangi III Manado	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
75.	Drs. A. Marzuki	Kompleks P dan K No. E 15 , Bandung	
76.	Drs. Ambo Gani	Jalan Inbo Nurdin No.9 Ujungpandang	
77.	Ananda B. Kusuma	Jalan Tendean 25 Jakarta	
78.	Drs. Anggur P. Tambunan	Jalan Cangkir/Gg Dooroha 35 , Medan	
79.	Drs. A.P. Tambunan	Jalan Merbau 38A Medan	
80.	Arfissalam, B.A.	Pancoran Rt. 008/03/22 Mampang Prapatan Jakarta Selatan	
81.	Ariany Isnarmurty	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
82.	Drs. A. Sardju Siswomartono	Sambeng Gg V/14 Sala	
83.	A.S. Broto	Jalan Sawo 4 Cipete, Jakarta	
84.	Drs. Asdi S. Dipodjojo	Perumahan Dosen IKIP Karangmalang Yogyakarta	
85.	Asih Heriana	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
86.	Asri Warnam	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
87.	Drs. Aubrey B.G. Rattu	Dosen FKSS IKIP Manado	
88.	A. Zaini Jambek, B.Sc.	Jalan Taman Cipinang No. 37 Jakarta	
89.	Dr. Barbara Sietz	Jalan Matraman Raya 23 Jakarta	
90.	Basyral Hamidy Harahap, B.A.	Rajungan I/10 Rawamangun IV Jakarta	
91.	Benny Lumowah	Jalan H. Agus Salim 60 Jakarta	
92.	Drs. Bistok A. Siahaan	Kompleks Slipi Blok I/62 Jalan Anggrek Garuda IV Jakarta	
93.	Drs. Bistok Sirait, M.Sc.	Jalan Merbau 38A Medan	
94.	Drs. B. Karno Ekowardono	FKSS IKIP Jalan Kelud Utara 2 Kampus IKIP Semarang	
95.	Drs. Brahim	Kompleks PSPN Blok V/ 637 Keping Duri Tomang Barat, Jakarta.	
96.	Drs. Buchari Mudahar	Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kompleks Perguruan Tinggi Air Tawar, Padang	
97.	Drs. Burhan Yunus	Jalan Patimura Gg. SD 19 No. 6 Pakanbaru	

Nomor Urut.	Nama	Alamat	Keterangan
98.	Drs. Bursodin	Pusdiklat PU Departemen Patimura 20 Jakarta	
99.	Catharina Sumantri	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
100.	Chaidir	Jalan Matraman I/12 Jakarta Timur	
101.	Christine	SMA Negeri VI Jalan Mahakam I/1 Blok C Kebayoran Baru Jakarta	
102.	C. Rombe	SMA St. Ursula II Jalan H. Agus Salim 75 Jakarta Pusat	
103.	Cut Riowati	Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 102 Jakarta	
104.	Drs. Daan Tulalessy	Guru SMA Negeri XIX Jalan Perniagaan No. 31 Jakarta Kota	
105.	Drs. Dalami Kari	Jalan Amal Hamzah 4 Pakanbaru	
106.	Drs. Daliman Edi Subroto	Fakultas Keguruan Universitas Negeri Sebe- las Maret Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No. 120 Surakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
107.	Dr. Daniel Bar Benyamin	Jalan Lembang 43 A Jakarta	
108.	Darlis Zakaria, B.A.	Kompleks Dep. P. dan K Cirendeu (Lebak Bulus) Jakarta	
109.	Drs. Darmansyah, M.A	Jalan Batu Tiban 42 Banjarmasin	
110.	Dr. Ir. Darmawan Harsokoesoemo	Departemen Mesin ITB Jalan Ganesa 10 Bandung	
111.	Dewaki Kramadibrata	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun Jakarta	
112.	Dien Kosini	SMA Negeri XXI Jalan Kel. Kayu Putih Kampung Ambon Jakarta Timur	
113.	Ny. Dini Coffin	d.a. Ibu Soedjahri Jalan Lembang No. 21 Jakarta	
114.	Direktur UNESCO	Jalan Thamrin 14 Tingkat II Jakarta	
115.	Djadja Djajadisastra	Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta	
116.	Drs. Djantera Kawi	Fakultas Keguruan Universitas Lambung Mangkurat Jalan Veteran No. 268 Banjarmasin	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
117.	D. P. Hutauruk	Jalan Sutan Syahrir 4 Jakarta Pusat	
118.	Drs. Durdje Durasid	Fakultas Keguruan Universitas Lambung Mangkurat Jalan Veteran No. 268 Banjarmasin	
119.	Edwin Satmoko Tanoyo	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
120.	Eka Budianta	Jalan Anggrek No. 16 Tanjung Priok Jakarta	
121.	Endang Sri Rahayu	Jalan Prambanan No.4 Jakarta Pusat	
122.	Epe Syafei Adisastra, B.A.	Jalan Pendawa No. 47 Bandung	
123.	E. Sumantri, B.A.	SMA Negeri XXVII Fifi'al Jalan Balaraja Tangerang Jakarta	
124.	E. Totot Suprajarto	SMA Kanisius Jalan Menteng Raya 64 Jakarta	
125.	Farid Sjamlan, B.A.	Guru SMP Muhammadiyah Jalan RH Amin Jakfar Pamekasan, Madura	
126.	Ny. Fauziah L. Gani	Jalan Manggis II/64 Jakarta	
127.	F.E. Runturambi	Jalan Antara 57 Jakarta Pusat	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
128.	Drs. Fudiat Suryadikara	Jalan Cendrawasih No. 20 Banjarmasin	
129.	Gan Kok Liang	Jalan Purwosari 29 Semarang	
130.	Drs. Gatot Susila Sumowijoyo	Jalan Taman Dewi Sartika 9 Surabaya	
131.	Ghozali H. Mustafa	HPBI Cabang Jakarta d.a. SMA Negeri XXIV F. Jalan Jenderal Sudirman Jakarta.	
132.	Ny. Groethy Mokoagouw. W.	SMP Negeri Tandengan Kecamatan Bris Sulawesi Utara	
133.	Hadisutjipto	SMA Negeri XVI Jalan Palmerah Utara II Jakarta	
134.	Drs. Gunawan	SPG Negeri IKIP Yogya- karta Jalan P. Senopati 40 Yogyakarta	
135.	Haji Soeman Hasibuan	Jalan Rambutan No. 6 Pakanbaru	
136.	Drs. Halipami Rasyad	FKSS IKIP Air Tawar Padang	
137.	Drs. Hari Mulyono	Jalan Kelud Utara 2 Kampus IKIP Semarang	
138.	Harjanto	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
		Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
139.	Hendri Chairudin Bangun	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
140.	Herawati, B.A.	Gondolayu Lor J 6/130 Yogyakarta	
141.	Ny. Herman	SMA Negeri XI Bulungan Kebayoran Baru Jakarta	
142.	Heru Roekijo	Jalan Lautze No. 3 Jakarta	
143.	Hilmi Yusuf, B.A.	Wirogunan Mg. II/66 Yogyakarta	
144.	H. Karkono Kamajaya Pk.	Pemimpin Umum PT Usa- ha Penerbitan U.P. Indo- nesia Jalan A. Yani 18 Yogyakarta	
145.	H.M.A. Yasin	SMA Negeri XXVI Jalan Tebet Barat Dalam VI, Jakarta	
146.	H. M. Nansi Mirhanuddin	Fakultas Keguruan Universitas Lambung Mangkurat Jalan Veteran No. 268 Banjarmasin	
147.	H.M.S. Tambunan	HPBI Cabang Jakarta d.a. SMA Negeri XXIV F Jalan Jenderal Sudirman Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
148.	H. Siahaan	Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Jalan Patimura 20 Jakarta	
149.	Dra. H. Suhartini Hartono	Jalan Hidup Baru 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	
150.	Drs. Idrus	HPBI Cabang Jakarta d.a. SMA Negeri XXIV F. Jalan Jenderal Sudirman Jakarta	
151.	Drs. Idrus	d.a. RRI Jalan Merdeka Barat Jakarta	
152.	Ig. Loy. Soewarian, B.A.	Jalan Suryodiningratan 13 Yogyakarta	
153.	Drs. I Gusti Ngurah Bagus	Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar	
154.	Iin Sudarmi	SMA Negeri VI Jalan Mahakam I/1 Blok C Kebayoran Baru Jakarta Selatan	
155.	Ika Kuntari	Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
156.	Ny. Ilya Rusli	SMA Negeri XVI Jalan Palmerah Utara II Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
157.	Imam Sukarsa	Sumur Batu Rt. 0012/012 Harapan Mulya Jakarta Pusat	
158.	Drs. Imam Waluyo	Setiabudi Office Building Blok II/C No. 3-4 Jalan H. Rangkayo Rasuna Said Kuningan, Jakarta	
159.	Imam Sukarsono Haryosuparto, S.H.	Kompleks Perumahan Departemen Hankam No. 57 Jalan Jenderal Panjait- an Cipinang Cempedak Jatinegara, Jakarta	
160.	Ny. Isti Kuntamadi	SMA Santa Ursula I Jalan Pos 2 Jakarta	
161.	Drs. Jaap Erkelens	Jalan Lembang 67 Jakarta Pusat	
162.	Drs. Jamil Bahar	FKSS IKIP Kompleks Perguruan Ting- gi Air Tawar Padang	
163.	Drs. Joannes F. Pattiasina, M.Sc.	d.a. Balai Penelitian Bahasa Kompleks Benteng Ujungpandang	
164.	Johan Peterus Pakasi	Guru SMP Negeri II Tondano Sulawesi Utara	
165.	Dra. Joharmi Haryono	FKSS IKIP Ketitang Wonocolo Surabaya	
166.	John. A. Rais	Jalan Matraman Raya 25, Jakarta Timur	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
167.	Johny Sarongsong	SMP Negeri Rembokon Minahasa Sulawesi Utara	
168.	Ny. J. Punuh Maramis	SMP Negeri II Manado	
169.	Ny J. Tidajoh Dotulong	SMP Negeri I Tondano	
170.	Dra. Juliana As.	Universitas Sebelas Maret Jalan Urip Sumohardjo 122 Surakarta	
171.	Drs. Juwarlan Purwodijoyo	SPG Negeri Jalan Dr. Setia Budi 163A Tegal	
172.	Drs. Kailani Hasan	Jalan Ronggowarsito Kompleks Universitas Riau, Pekanbaru	
173.	Karyana Sindunegara	Fakultas Sastra Budaya Universitas Diponegoro Jalan Hayam Wuruk No. 2 Semarang	
174.	Ir. Kasikun Martodarsono	Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta	
175.	Kiki Zakia K.M.	Jalan dr. Nurdin Raya 6 Jakarta	
176.	Ir. Koesmitro	Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Bagian Terintal	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
		Direktorat Jenderal A 10 d.a. Departemen Pekerjaan Umum Jalan Patimura 20 Jakarta	
177.	Drs. Kresnayana Yahya	Jalan Kacapiring No. 27 Surabaya	
178.	K. Sukarnaprawira	Penerbit Ganaco NV Jalan Gereja 3 Bandung	
179.	La. Rusdiana	SMP Negeri II Cikampek	
180.	Leo A. Apitulay	Dosen FKSS IKIP Manado	
181.	Drs. Livain Lubis	Jalan Tenteram No. 23 Bandung	
182.	Ny. L. J. Sumarouw Posumah	SMP Negeri I Tondao Sulawesi Utara	
183.	Drs. L. Kasim Manday	Kamp. Pondal SK 10/20 Jalan Samratulangi III Manado	
184.	Drs. L. Mardiwarsito	Jalan Cisadane 41 Jakarta	
185.	Lucy Montolalu	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
186.	Drs. Lukman Abdulgani	SPG Muhammadiyah I Jalan K. A. Dahlan 20 Jakarta Timur	
187.	Drs. M.A. Gani, M.A.	Jalan Danau Gelinggang CI/6, Pejompongan Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
188.	Dra. Maidar Arsjad	Kompleks Guru Klender Kampung Kapitan RT 7/- 001, Jalan X2 No. 15A Klender, Jakarta	
189.	Dr. Mangasa Silitonga	FKSS IKIP Jalan Merbau No. 38A Medan	
190.	Dra. Margaretta Jamilah	Jalan Serang 18 Jakarta	
191.	Maria Indra Rukmi	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
192.	Maria Ulfah Soebadio, S.H.	Jalan Guntur 49 Jakarta Selatan	
193.	Drs. Markas Hambuwali	Kompleks Jakarta Lloyd Flat B No. 2 Jalan Hadiah Jelambar Grogol Jakarta	
194.	Markus Hambuwali	SMA Bunda Hati Kudus Jalan Rahayu Jelambar Grogol Jakarta Barat	
195.	Drs. Marsono	Fakultas Sastra dan Buda- ya Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta	
196.	Marthias	Kepala Bidang Kegiatan Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Propinsi Jambi Jambi	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
197.	Drs. Martinus Salea	Fakultas Sastra UNSRAT Kampus Kleak Manado	
198.	Dr. Maruli Butar-Butar	Jalan Dr. Sofyan 14 Kampus USU Medan	
199.	Drs. Marwoto Manoesoepadmo	Jalan Letjen. Haryono 93 Madiun	
200.	Drs. M. Asfandi	Fakultas Keguruan Universitas Lampung Mangkurat Jalan Veteran No. 268 Banjarmasin	
201.	Drs. Mas Hariyadi	Perumahan Dosen No. 28 Kampus IKIP Ketitang Surabaya	
202.	Drs. H. M. Bermawi,	d.a. Sekolah Tinggi Kedokteran "YARSI" Cempaka Putih Jalan Jenderal Suprpto Jakarta	
203.	Drs. Mbiyo Saleh	Jalan Daksinapati No. 5 Kompleks IKIP/UI Rawamangun, Jakarta	
204.	M. H. Kadis, B.A.	Kepu Timur Kemayoran Gang Mantri II/138 Jakarta	
205.	M. Hutauruk	Jalan Sutan Syahrir 4 Jakarta Pusat	
206.	Ny. Misbach	SMA Negeri XXIII Jalan Tomang Komando Jakarta Barat	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
207.	M. Purbo Hadiwidjaja	Jalan Kidang Pananjung 5 Bandung	
208.	Mochtar Effendi A.R.	SMA XXVI Jalan Cipete Jakarta	
209.	Drs. Mohammad Syakir	Jalan Nagan Lor 64 Yogyakarta	
210.	Moh. Hatta Somi	Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kanwil. Departemen P dan K Propinsi Sumatra Selatan Jalan Kapten A. Rivai Palembang	
211.	Dra. M. Salea Warouw	Dosen Fakultas Sastra Universitas Samratulangi Manado	
212.	Drs. M. Toyib Usman	Kebon Kacang I/121 Tanah Abang Jakarta Pusat	
213.	Mohammad Amien Said, B.A.	Jalan Sedap Malam No. 1 Palu	
214.	Drs. Muhammad Anwar Yahya	Dosen FKSS IKIP Manado	
215.	Muh. Said Mangati	SMA Negeri XVIII Jalan Jembatan Batu 74 Jakarta	
216.	Drs. Mukti U.S.	Rt. 007 Rw. 05 No. 27 Kel. Kampung Rawa Sela- tan Cempaka Putih Jakarta Pusat	
217.	Multamia Retno Mayekti Tawangsih	Jalan Galuh I/15 Kebayoran Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
218.	Drs. Munadi Patmadiwiria	Gang Pemuda Asli II/7 Rawamangun, Jakarta	
219.	Dra. Murtiasih	Jalan Saventar No. 9 Surabaya	
220.	Drs. M. Yusuf Rawakil	FKSS IKIP Jalan Merbau No. 39A Medan	
221.	Drs. Nanang Sunardi	Jalan Wijaya Kesuma II Gang 10 No. 16, Klender, Jakarta	
222.	Drs. Nazir Achmad	HPBI Cabang Jakarta d.a. SMA Negeri XXIV F. Jalan Jenderal Sudirman Jakarta	
223.	Dra. Noerlena Basier	Jalan Bumi Putra IV No. 37 Jakarta	
224.	Drs. Noer Toegiman	Jalan Cik Ditiro 29A Yogyakarta	
225.	Dra. Noerzisri A. Nazar	Jalan Raden Patah 41 G Bandung	
226.	Drs. Novel Ali	Jalan Imam Bardjo Semarang	
227.	Nuraini	SMP Negeri XXI Jalan Bandengan Utara 80 Jakarta	
228.	Nurana	Rawasari Timur, RT 001/- 02 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
229.	Drs. Nurdin Amir	HPBI Cabang Jakarta d.a. SMA Negeri XXIV F. Jalan Jenderal Sudirman Jakarta	
230.	Nurul Supardan	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
231.	Obing	SMPP Negeri I Jalan Cempaka Putih Tengah 18 Jakarta Pusat	
232.	Oding Syafrudin	SMA Negeri XXIII Jalan Cengkong Jakarta	
233.	Drs. Osra Mustawadi Akbar	Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh	
234.	Drs. Pariata Westra, S.H.	Sekip Blok T No. 1 Yogyakarta	
235.	Drs. paul Permadi P.	Kavling Polri Blok D X/1084 RT. 008 RW. 013 Jelambar, Jakarta	
236.	Dra. Peraturen Sukapiring	Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara Jalan Universitas No. 19 Medan	
237.	Posuaniar Hamid	SMA Negeri IX Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta	
238.	Prapti Wahyuni	SMPA Negeri II Manado	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
239.	Pratiwi	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
240.	Dr. Priguna Sidharta	Jalan Prapanca Raya No. 27 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	
241.	P. Suparman Natawijaya	SMA Negeri XXII Jalan Kramat Asem Utun Kayu Jakarta Timur	
242.	Pudentia Parenti	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Inonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia Rawamangun, Jakarta	
243.	Pudji Astuti	Jalan Melur No. 11 Tebet Barat Jakarta Selatan	
244.	Drs. Puger	Kanwil Departemen P dan K Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta	
245.	Putu Nirwani	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia Rawamangun, Jakarta	
246.	Drs. Rachmat Haman	IKIP Rawamangun Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
247.	Drs. Raden Muhamad Arif	Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Palembang	
248.	Rahayu Sudiarti	Percetakan Negara No. D723A Jakarta Pusat	
249.	Ny. Ir. Rahayu Yusuf	Fakultas Pertanian UNPAD Jalan Bukit Dago Utara Bandung	
250.	Ras Siregar	Jalan Gondangdia Lama No. 14 Jakarta Pusat	
231.	Rasyid Sartuni	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia Rawamangun, Jakarta	
252.	R. Bambang Tribowo	Jalan Rawamangun Muka PJKA A/4 Jakarta Timur	
253.	Rektor Universitas Khairun	Jalan Hasanesa Ternate	
254.	Drs. Ridwan Manaf	Jalan Mustika IV/39 Jakarta	
255.	Rita Sri Hastuti	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia Rawamangun, Jakarta	
256.	R. Koesto	Jalan Iskandarsyah Raya Flat Deplu apt 413	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
	Wongsodidjojo	Kebayoran Baru Jakarta Selatan	
257.	R. Kotjo Sungkono	Jalan Tendean No. 25 Jakarta	
258.	Dra. Rosmid Rosa	Jalan Daksinapati Timur I/10 Kompleks UI Rawamangun, Jakarta	
259.	Drs. r. Suhardi	Wirobrajan Ng 7/116B Yogyakarta	
260.	Rusni Zulharman S.	SMA Negeri VII Jalan Merdeka Timur 4 Jakarta	
261.	Drs. Rustam Amir Effendi, M.A.	Fakulas Sastra Universitas Sumatra Utara Jalan universitas No. 19 Medan	
262.	R.W. Handoyopranoto	Pers. Penerbit Sadu Budi Jalan Purwopuran No. 43 Surakarta	
263.	Sabaruddin Ahmad	d.a. Gedung Sumpah Pemuda Jalan Kramat Raya No. 106, Jakarta	
264.	Drs. Sabaruddin Ahmad	Jalan Rahmatsah 107 Medan	
265.	Dra. Saidat Dahlan	Jalan Teratai No. 13 VII-3 Sj Pekanbaru	
266.	Dra. Sakura Ridwan	Jalan Pondok Bambu Kavling, Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
267.	Saleh Iskandar Poeradisastra	Jalan Gotong Royong Kebayoran Baru Blok A Jakarta Selatan	
268.	Dr. Sam Udin	d.a. Ir. A. Pamoentjak Jalan Cimandiri 11 Jakarta	
269.	Santoso	SMA Negeri VI Jalan Mahakam I/1 Blok C Kebayoran Baru Jakarta Selatan	
270.	Ir. Sarbini	Kep. Subbidang Perencana- naan Direktorat Sungai Departemen Pekerjaan Umum Jalan Patimura 20 Jakarta	
271.	Drs. Sardanto Cokrowinoto	Jalan Imam Barjo Semarang	
272.	Dra. Sartini	Universitas Sebelas Maret Jalan Urip Sumohardjo 122 Surakarta	
273.	Drs. Sarwandi	FKSS IKIP Karangmalang Yogyakarta	
274.	Svitri E.	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia Rawamangun, Jakarta	
275.	Sempu Siswokusumo	HPBI Cabang Jakarta d.a. SMA Negeri XXIV F Jalan Jenderal Sudirman Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
276.	Ny. S. Hadisutjipto	SMA Negeri IX Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta	
277.	Sigit Dwiyanto, B.A.	Jalan Sindunegaran 12 Yogyakarta	
278.	Drs. Siswo Sugiarto	Fakultas Keguruan Universitas Cendrawasih Jayapura	
279.	Prof. Dra. Siti Baroroh Baried	Jalan Parangtritis 46A Yogyakarta	
280.	Dra. Siti Chamamah Soeratno	Kadipaten Kp. I/293B Yogyakarta	
281.	Dra. Siti Sundari Maharto Tjitrosubono	Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada Bulaksumur Yogyakarta	
282.	Prof. Dr. Slamet Muljana	Jalan Ketang-ketang No. 7 Rawamangun Jakarta Timur	
283.	Slamet Riyadi Ali	Asrama Mahasiswa UI Daksinapati Rawamangun, Jakarta	
284.	Slamet Sukirmanto	Jalan Tanah Abang III/25A Jakarta	
285.	Dra. Ny. S. Marat	Jalan Setiabudi 61 Bandung	
286.	S. Nursinah	SMA Negeri I Jalan Budi Utomo No. 7 Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
287.	Drs. Soedaman Hadisoetjipto	Rektor Universitas Jenderal Sudirman Kampus UNSUD Kotak Pos 15 Grendeng, Purwokerto	
288.	Ir. Soefaat	Jalan Penjernihan II/7 Pejompongan Jakarta	
289.	Soepangat Bagio	SMA Negeri XI Bulungan Kebayoran Baru Jakarta	
290.	Drs. Soerono Martorahardjo	FKSS IKIP Jalan Ketitang Surabaya	
291.	Drs. Soeyadi	Jalan Hijau Daun IV/21 Cawang Kapling Jakarta	
292.	Dra. Sofia Manan	Departemen SAS IKIP Rawamangun Jakarta	
293.	Soimun	Jalan Haji Agus Salim No. 60 Jakarta	
294.	Sri Redjeki	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia Rawamangun, Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
295.	Sri Utami, B.A.	SMA XXIV Filial Jalan Jenderal Sudirman Jakarta	
296.	Dra. Subantari R.	Jalan Sawahkurung 30 Bandung	
297.	Drs. Sudaryanto	Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada Bulaksumur Yogyakarta	
298.	Drs. Sudjarwo	Jalan Imam Bardjo Semarang	
299.	Suhardiyana, B.A.	SMA Ricci Jalan Kemenag III/47 Jakarta Barat	
300.	Sulaeman Tjakrawiguna, S.H.	Pengurus Besar PGRI Jalan Tanah Abang III/24 Jakarta	
301.	Dr. Ny. Sulistyia	Bagian Farmakologi FKUI Salemba 6 Jakarta	
302.	Dra. Sumarti	Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin	
303.	Sunarjo Sukartaatmadja, B.A.	SMA Negeri XV Jalan Lak. Martadinata Jakarta Utara	
304.	Drs. Sunarko	Jalan Kayu Jati VI 119 Rawamangun Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
305.	Dra. Sunarti Mawahib	Jalan Kelud Utara III Semarang	
306.	Drs. Supiyadi	Jalan Setiabudi Tengah 16 Jakarta Selatan	
307.	Ir. Suprpto Soetosuwarno	Jalan Veteran No. 20 Semarang	
308.	Suroto, B.A.	Palmerah Utara I Slipi Jakarta Barat	
309.	Suryati Suwarso	d.a Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
310.	Drs. Sutoko	Fakultas Sastra Universitas Riau No. 6 Pekanbaru	
312.	Drs. Suwarlan	Kepala SPG Negeri Jambi	
313.	Drs. Suwito	Perumahan Rakyat Jajar No. 20 Surakarta	
314.	Suyati Soewarso	Kramat Jaya Barat Real Estate Blok 2/25 Jakarta	
315.	Prof. Drs. S. Wojowasito	Jalan Serang I Malang	
316.	Drs. Syahdan Manurung	Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara Jalan Universitas No. 19 Medan	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
317	Drs. Syahrial Sar Ibrahim	Fakultas Keguruan Universitas Lambung Mangkurat Jalan Veteran No. 268 Banjarmasin	
318.	Syarwani AR	Jalan N No. 161 RT 10/RW 08 Kayuputih Jakarta	
319.	Drs. Tamin Chairan	Jalan Kande No. 27 Ujungpandang	
320.	Dr. T.A. Ridwan	Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara Jalan Universitas No. 19 Medan	
321.	Tasrin Ismail	Fakultas Sastra USU Jalan Universitas No. 19 Medan	
322.	Tasrir Ismail	d.a. Gedung Sumpah Pemuda Jalan Kramat Raya No. 106 Jakarta	
323.	Teuku Alibasjah Talsya	Jalan Teuku Nya Arif Banda Aceh	
324.	Dra. Tj. Rahmah M.A.	Jalan Danau Geliling C I/6 Pejompongan Jakarta	
325.	Tonny Suryo Sat		
325.	Tonny Suryo Santoso	Kramat Lontar No. 60 Jakarta	
326.	Ny. Tutinar Zahri, B.A.	SMA Negeri I Jalan Budi Utomo 7 Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
327.	Drs. Ukun Suryaman	Kompleks UNPAD Sekoloa 3 B Bandung	
328.	Valentina Sumiati	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun Jakarta	
329.	Ny. Wahyunarah H.A.	SMA Negeri III Jalan Setiabudi II Jakarta	
330.	Wahyu Wibowo	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun Jakarta	
331.	Warda	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun Jakarta	
332.	Drs. Warsowiwoho, B.M.E		
333.	Drs. W.D.F. Rindorindo	Pengurus Besar PGRI Jln. Tanah Abang III/24 Jakarta	
334.	Drs. Widjono HS	Sekolah Laboratorium Kepentidikan PPSP IKIP Jakarta Rawamangun Jakarta	
335.	Widya Kirana, B.A.	Jalan Cik Ditiro 31 A Yogyakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
336.	Wijati Widjiasutji	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun Jakarta	
337.	Wisaksono Noeradi	Kebon Sirih 52 Jakarta Pusat	
338.	Dr. Wita Pribadi	Jalan Rajawali Selatan XI/4 Jakarta	
339.	Drs. W.J. Rumambi	Sekretaris Umum Lembaga Alkitab Indonesia Jalan Salemba Raya No. 12 Jakarta	
340.	Yeany Carolina	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun, Jakarta	
341.	Ny. Drg. Yetty Rizali Noor	Jalan Anyar No. 2 Jakarta	
342.	Yoesmanadi	Jalan Proklamasi 40 Pav. Jakarta Pusat	
343.	Drs. Yos Daniel Parera	Departemen Bahasa dan Seni IKIP Jakarta Rawamangun, Jakarta	
344.	Yosefina Mantik	d.a. Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI Rawamangun Jakarta	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
345.	Yulia Esti Katrini, B.A.	Ledok Balapan Gk. III/130 Yogyakarta	
346.	Dra. Yuniar Z.A.	Perum PT Jrep Blok E / 19 Kompleks Billy dan Moon Pondok Kelapa Jakarta	
347.	Dra. Yusmaniar Sofyan Adly	Jalan Merbau No. 38 A Medan	
348.	Drs. Zainal Abidin	Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara Jalan Universitas No. 19 Medan	
349.	Drs. Zainal Abidin Gani	Jalan Jaksa Abung R. Suprpto Palembang	
350.	Drs. Zaniar Rahman	Jalan Mokusuli 10 Kompleks Trikora Halim Perdana Kusuma Jakarta	
351.	Zainuddin A. Wahab	SMA Bhineka Tunggal Ika Jalan K.H.M. Mansyur No. 222A Jakarta	
352.	Zainuddin Ilyas	HPBI Cabang Jakarta d.a. SMA Negeri XXIV F Jalan Jenderal Sudirman Jakarta	
353.	Drs. Zainuddin Taha	Jalan Pancasila 4 B Ujungpandang	
354.	Ny. Zubaidah Labai	Titiwungan Jaya V Menado Sulawesi Utara	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
355.	Drs. Zubairsyah	Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara Jalan Universitas No. 19 Medan	
356.	Drs. Abdullah Payapo	Jalan Wonokitri III/4-c Surabaya	Surabaya Post
357.	Drs. Buntaran Sanusi	Jalan Pulo Gadung No. 15 Jakarta	Pos Sore
358.	E. Sudardja P	Kramat Sentiong Gg III i/100 S Jakarta Pusat	Idayu
359.	F.E. Runturambi	Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Jalan Antara No. 57 Jakarta Pusat	Antara
360.	Goenawan Mohammad	Kompleks PWI Cipinang Muara J-137 Jakarta	
361.	Kadjat Hartojo	Wakil Pemimpin Redaksi Suara Karya Jalan Bangka II/2 Gedung AKA Lantai 3 Jakarta	Suara Karya
362.	M. Said Budairy	Jalan Asemka 29 - 30 Jakarta Kota	Pelita
363.	Soebagijo I.N.	Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Jalan Antara No. 57 Jakarta Pusat	Antara

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
364.	Soegijanto	Jalan Dr. Muwardi V Gang I/17 Grogol Jakarta Pusat	Berita Yudha
365.	St. Sularto	Palmerah Selatan 26 Jakarta Barat	Kompas
366.	Subagyo Pr.	Jalan Petak Asem I/40 Jakarta	Sinar Harapan
367.	Sunardi D.M.	Jalan Siliwangi Raya Jakarta Pusat	PWI Pusat
368.	Suparto H.S.	Jalan Cilacap 6 A Jakarta Pusat	Berita Buana
369.	Willy Nursivin	d.a. W. Sarwono Jalan Raya Pasar Minggu Kilometer 18,2 Jakarta Selatan	Merdeka
370.	Yahya Sumarno, B.Sc.	Jalan Jatinegara Barat III No. 6 Jakarta	Kantor Berita Nasional Indonesia
371.	Yusuf Abdullah Puar	Jalan Ciniro III/20 Blok Q Kebayoran Baru Jakarta	
372.	Drs. Idrus	TVRI Jalan Merdeka Barat Jakarta	TVRI
373.	Zainoor Sulaiman	Jalan Moh. Jamin 27 Jakarta	Kantor Berita Nasional Malaysia

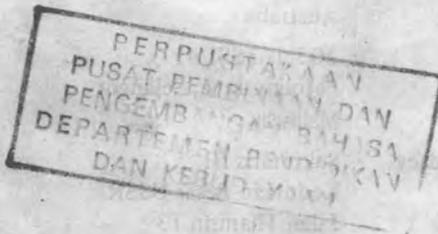
Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
374.	Moh. Irsyad Sudiro	Jalan Kramat Raya 96 Jakarta Pusat	Angkatan Bersenjata
275.	Abdul Samad bin Ahmad	Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia	
376.	Ajid bin Che Kob, M.A.	Jabatan Persuratan Melayu Universitas Kebangsaan Malaysia Bengi, Selangor Malaysia	
377.	Prof. Dr. Alton Lewis Becker	Departemen of Linguistics University of Michigan 1091 Frieze BLDG ANN ARBOR Michigan USA	
378.	Firdaus bin Haji Abdullah	Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia	
379.	Hamdan Hassan	Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur 22 - 11 Malaysia	
380.	Prof. Dr. Hans Kahler	Hartung str 5, II 2000 Hamburg 13 West-Germany	
381.	Hassan bin Muhd Ali	Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
382.	Drs. Huub Gaymans	UNICEF Programme officer education Jalan Thamrin No. 14 Jakarta	
383.	Prof. Ismail Hussien	Ketua Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia	
384.	Drs. Khalid bin Muhamad Hussain	Dewan Bahasa dan Pustaka Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia	
385.	Dr. Liaw Yock Fang	Nanyang University Jurug Load Singapore 22 Republic of Singapore	
386.	Prof. Madya Lutfi Abas	Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur 22 - 11 Malaysia	
387.	Drs. Muhammad Slamet	Parkville, 3052 Victoria Australia	
388.	Muhammad Yusuf Harun	Ketua Lembaga Bahasa Melayu Peti Surat 98 Malaka Malaysia	
389.	Dr. Nik Sapiah A. Karim	Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur 22 - 11 Malaysia	

Nomor Urut	Nama	Alamat	Keterangan
390.	Dr. Rahmah Bujang	Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur 22 - 11 Malaysia	
391.	Dr. Rainer Carle	Hohen Esch 1 2000 Hamburg 50 West-Germany	
392.	Saleh bin Kasnim	Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia Peti Surat 803 Kuala Lumpur Malaysia	
393.	Suratman Markasan, B.A.	67 Toh Tuok Road Singapura 21	
394.	Yan Pieter Sarumpaet, M.A.	Departement of Indonesia & Malayan Studies University of Melbourne Parkville Victoria, 3052 Australia	
395.	Umar Yunus	20 Jalan SSI/41 Petoling Jaya, Selangor Malaysia	
396.	Dr. Victor A. Pogadaev	Sekretaris III Kedutaan Besar USSR Jalan Thamrin 13 Jakarta	
397.	Dr. W.A.L. Stokhof	Jalan Tambak 18 Jakarta	

RALAT

Halaman	Tertulis	Perbaiki
152	baris ke-10 dari atas	masyarakat itu
197	baris ke-12 dari atas	bahwa sejak Q
262	baris ke-9 dari bawah	Satjadibrata
263	baris ke-14 dari atas	bahawa
	baris ke-10 dari atas	Indonesia
283	baris ke-3 dari bawah	mendatangi
282	baris ke-8 dari bawah	watergate
	baris ke-6 dari bawah	truse
	baris ke-2 dari bawah	our
295	baris ke-17 dari atas	ji-
298	baris ke-9 dari atas	nomerisialisasi
	baris ke-10 dari atas	Kta
309	baris ke 22 dari atas	kongret
	baris ke-22 dari atas	demokrasi
	baris ke-23 dari atas	kongret
	baris ke-27 dari atas	atif
316	baris ke-14 dari bawah	dataran
326	baris ke-2 dari atas	pelayanan



URUTAN

